



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2020**



PEMERINTAH SULAWESI SELATAN





GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 31);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya di sebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang mejadi kewenangan Daerah.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur.



BAB II  
ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2020 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2020, untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pembangunan Nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
- (2) RKPD Tahun 2020 dijadikan sebagai :
  - a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dalam mendukung capaian target dan sasaran Pembangunan Daerah; dan
  - c. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

BAB III  
SISTEMATIKA, PRORITAS DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2020, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) RKPD Tahun 2020 terdiri atas :
  - a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
  - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
  - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
  - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA;
  - f. BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;

h. BAB VIII PENUTUP.

- (3) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (5) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Bab III Lampiran Peraturan Gubernur ini tidak memproyeksikan alokasi Transfer Alokasi Dana Khusus sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran antara RKPD dengan APBD Tahun 2020, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- (6) Rencana Kerja dan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan pagu anggaran setiap program dan kegiatan yang sifatnya indikatif terdapat pada Bab VI Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV

#### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

##### Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan RKPD Tahun 2020 sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### BAB V

#### EVALUASI KINERJA

##### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perangkat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan dimaksud.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 24 Juni 2019

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

Ttd

**Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 24 Juni 2019  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN,

Ttd

**Dr. ABDUL HAYAT, M.Si.**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 25

## Daftar Isi

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3.	Hubungan Antar Dokumen	I-2
1.4.	Maksud dan Tujuan	I-3
1.5.	Sistematika Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan	I-4
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN</b>	<b>II-1</b>
2.1	<b>Gambaran Umum Wilayah</b>	<b>II-1</b>
2.1.1	<b>Aspek Geografi dan Demografi</b>	<b>II-1</b>
2.1.1.1	Aspek Geografi	II-1
2.1.1.1.1	Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.2	Letak dan Kondisi Geografi	II-3
2.1.2.2.1	Kondisi Topografi	II-3
2.1.2.2.2	Kondisi Geologi	II-4
2.1.2.2.3	Kondisi Hidrologi	II-5
2.1.2.2.4	Kondisi Klimatologi	II-6
2.1.2.2.5	Kondisi Penggunaan Lahan	II-6
2.1.1.3	Wilayah Rawan Bencana	II-7
2.1.1.4	Potensi Pengembangan Wilayah	II-10
2.1.1.4.1	Rencana Struktur Ruang	II-12
2.1.1.4.2	Kawasan Strategis Provinsi	II-14
2.1.1.4.3	Kawasan Andalan Provinsi	II-16
2.1.1.4.4	Kawasan Kelautan dan Perikanan	II-17
2.1.1.4.5	Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan	II-18
2.1.1.4.6	Kawasan Peruntukan Pariwisata	II-19
2.1.1.4.7	Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Migas	II-20
2.1.1.4.8	Kawasan Peruntukan Industri	II-21
2.1.1.4.9	Kawasan Peruntukan Perdagangan	II-21
2.1.1.4.10	Potensi Energy Baru Terbaharukan (EBT)	II-21
2.1.1.5	Aspek Demografi	II-22
2.1.1.5.1	Jumlah dan Struktur Umur Penduduk	II-23
2.1.1.6	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-27
2.1.2	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>II-31</b>
2.1.2.1	Fokus Kesejahteraan Pemerataan Ekonomi	II-31
2.1.2.1.1	Pertumbuhan PDRB	II-31
2.1.2.1.2	Laju Inflasi	II-34
2.1.2.1.3	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	II-34
2.1.2.1.4	PDRB Perkapita	II-35
2.1.2.1.5	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	II-36
2.1.2.1.6	Indeks Gini	II-37
2.1.2.1.7	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	II-37
2.1.2.1.8	Indeks Ketimpangan Williamsom	II-38
2.1.2.1.9	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	II-38
2.1.2.1.10	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	II-41
2.1.2.1.11	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	II-41
2.1.2.1.12	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	II-41
2.1.2.1.13	Kontribusi Sektor Pertanian (Tabama/Tanaman Bahan Makanan) Terhadap PDRB	II-42
2.1.2.1.14	PDRB Pertanian	II-42



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

2.1.2.1.15	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB .....	II-43
2.1.2.1.16	PDRB Perkebunan.....	II-43
2.1.2.1.17	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB .....	II-43
2.1.2.1.18	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB .....	II-43
2.1.2.1.19	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB .....	II-43
2.1.2.1.20	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB .....	II-45
2.1.2.1.21	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB .....	II-45
2.1.2.1.22	Pertumbuhan PDRB Industri.....	II-46
2.1.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-47
2.1.2.2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	II-47
2.1.2.2.2	Angka Melek Huruf (AMH).....	II-50
2.1.2.2.3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah .....	II-51
2.1.2.2.4	Angka Harapan Lama Sekolah .....	II-52
2.1.2.2.5	Angka Usia Harapan Hidup.....	II-53
2.1.2.2.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .....	II-55
2.1.2.2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-55
2.1.2.2.8	Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja.....	II-57
2.1.2.2.9	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja .....	II-57
2.1.2.2.10	Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja.....	II-58
2.1.2.3	Fokus Seni, Budaya dan Olahraga .....	II-58
<b>2.1.3</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum .....</b>	<b>II-63</b>
2.1.3.1	Fokus Layanan Urusan Wajib .....	II-63
2.1.3.1.1	Bidang Urusan Pendidikan.....	II-63
2.1.3.1.2	Bidang Urusan Kesehatan.....	II-70
2.1.3.1.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II-95
2.1.3.1.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-111
2.1.3.1.5	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-113
2.1.3.1.6	Bidang Urusan Sosial.....	II-114
2.1.3.2	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar .....	II-118
2.1.3.2.1	Bidang Urusan Tenaga Kerja.....	II-118
2.1.3.2.2	Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi.....	II-124
2.1.3.2.3	Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-126
2.1.3.2.4	Bidang Urusan Penanaman Modal .....	II-127
2.1.3.2.5	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	II-128
2.1.3.2.6	Bidang Urusan Statistik.....	II-131
2.1.3.2.7	Bidang Urusan Persandian .....	II-132
2.1.3.2.8	Bidang Urusan Kebudayaan.....	II-132
2.1.3.2.9	Bidang Urusan Perpustakaan .....	II-134
2.1.3.2.10	Bidang Urusan Kearsipan .....	II-136
2.1.3.2.11	Bidang Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-136
2.1.3.2.12	Bidang Urusan Pangan .....	II-143
2.1.3.2.13	Bidang Urusan Pertanahan .....	II-146
2.1.3.2.14	Bidang Urusan Lingkungan Hidup.....	II-146
2.1.3.2.15	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil....	II-153
2.1.3.2.16	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-155
2.1.3.2.17	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-157

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

2.1.3.2.18. Perhubungan.....	II-164
2.1.3.3 Fokus Layanan Pilihan .....	II-172
2.1.3.3.1 Bidang Urusan Pariwisata .....	II-172
2.1.3.3.2 Bidang Urusan Pertanian .....	II-176
2.1.3.3.3 Bidang Urusan Kehutanan .....	II-183
2.1.3.3.4 Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral....	II-186
2.1.3.3.5 Bidang Urusan Perdagangan .....	II-190
2.1.3.3.6 Bidang Urusan Perindustrian.....	II-191
2.1.3.3.7 Bidang Urusan Transmigrasi.....	II-192
2.1.3.3.8 Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan.....	II-192
2.1.3.4 Fokus Penunjang Urusan .....	II-199
2.1.3.4.1 Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan .....	II-199
2.1.3.4.2 Bidang Urusan Keuangan .....	II-200
2.1.3.4.3 Bidang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan.....	II-202
2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan.....	II-205
2.1.3.4.5 Pengawasan.....	II-206
2.1.3.4.6 Sekertariat Dewan.....	II-208
<b>2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....</b>	<b>II-209</b>
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi.....	II-209
2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ..	II-209
2.1.4.1.2 Pengeluaran Perkapita/Tahun .....	II-209
2.1.4.1.3 Nilai Tukar Petani.....	II-210
2.1.4.1.4 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita .....	II-210
2.1.4.1.5 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa .....	II-211
2.1.4.1.6 Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB .....	II-211
<b>2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....</b>	<b>II-213</b>
<b>2.1.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB/SDGs.....</b>	<b>II-216</b>
<b>2.2 Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....</b>	<b>II-231</b>
2.2.1. Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu.....	II-231
2.2.2. Review Capaian Kinerja RPJMD.....	II-251
2.2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan .....	II-337
<b>2.3 Permasalahan Pembangunan .....</b>	<b>II-345</b>
2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan Sasaran pembangunan daerah.....	II-345
2.3.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	II-351
2.3.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....	II-351
2.3.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	II-356
2.3.2.3. Urusan Pilihan .....	II-361
2.3.2.4. Fungsi Penunjang Urusan.....	II-364
<b>BAB III RENCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Makro .....	III-1
3.1.1.1 Pertumbuhan dan Komposisi Ekonomi.....	III-1
3.1.1.2 Inflasi.....	III-2
3.1.1.3 Ketenagakerjaan .....	III-3
3.1.1.4 Kemiskinan.....	III-3
3.1.2 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah.....	III-4
3.1.2.1 Prospek Perekonomian Daerah.....	III-4
3.1.2.2 Tantangan Perekonomian Daerah.....	III-5
3.1.3 Investasi Daerah .....	III-6

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

3.1.4	Sasaran dan Arah Kebijakan Perkonomian Daerah .....	III-9
3.1.4.1	Sasaran Ekonomi Makro .....	III-9
3.1.4.2	Arah Kebijakan Perekonomian .....	III-9
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-10
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Eksternifikasi PAD .....	III-10
3.2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-13
3.2.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-13
<b>BAB IV</b>	<b>PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020</b>	<b>IV-1</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-2
4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2020 .....	IV-5
4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020 .....	IV-5
4.2.2	Dukungan Prioritas Pembangunan Nasional .....	IV-8
4.2.3	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020 .....	IV-31
4.3	Prioritas Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	IV-5
4.3.1	Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan baru dan Pengembangan Destinasi Wisata .....	IV-41
4.3.2	Peningkatan Ketahanan Pangan, Sumberdaya Air dan Pelestarian Lingkungan Hidup .....	IV-42
4.3.3	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan, Reformasi Birokrasi dan Inovasi .....	IV-43
4.4	Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.....	IV-67
4.5	Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (SDGs) .....	IV-67
4.6	Inovasi Daerah.....	IV-80
4.7	Pembangunan Inklusif di Sulawesi Selatan .....	IV-83
4.7.1	Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan	IV-84
4.7.2	Ketimpangan Distribusi Pendapatan.....	IV-84
4.7.3	Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja .....	IV-86
4.7.4	Menuju Pertumbuhan yang Inklusif (RPJMD 2018-2023)....	IV-86
4.7.5	Pembangunan Renda Karbon.....	IV-88
4.7.6	Profil Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan .....	IV-88
4.7.7	Kebijakan Tahun Pembangunan Rendah Karbon 2020.....	IV-90
<b>BAB V</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA</b> .....	<b>V-1</b>
5.1	Kondisi Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan .....	V-2
5.2	Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan .....	V-7
5.3	Sasaran Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.....	V-9
<b>BAB VI</b>	<b>PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020</b> .....	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020</b>	<b>VII-1</b>
7.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah .....	VII-1
7.1.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	VII-1
7.1.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	VII-2
7.2	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	VII-43
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>VIII-1</b>

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 25 TAHUN 2019

TANGGAL : 24 JUNI 2019

TENTANG : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 25  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Perencanaan Kerja Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan Pembangunan Daerah merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah yang dilakukan melalui empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi hingga nasional.

Penyusunan dokumen rancangan awal RKPD 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 16 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 merupakan tahun ke II (kedua) dari pelaksanaan periodisasi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Dokumen Rancangan awal RKPD merupakan penjabaran tahunan RPJMD, Rancangan awal RKPD merupakan dasar untuk penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah.



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan.

Dasar hukum yang digunakan untuk penyusunan RKPD, baik yang berskala Nasional maupun lokal antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

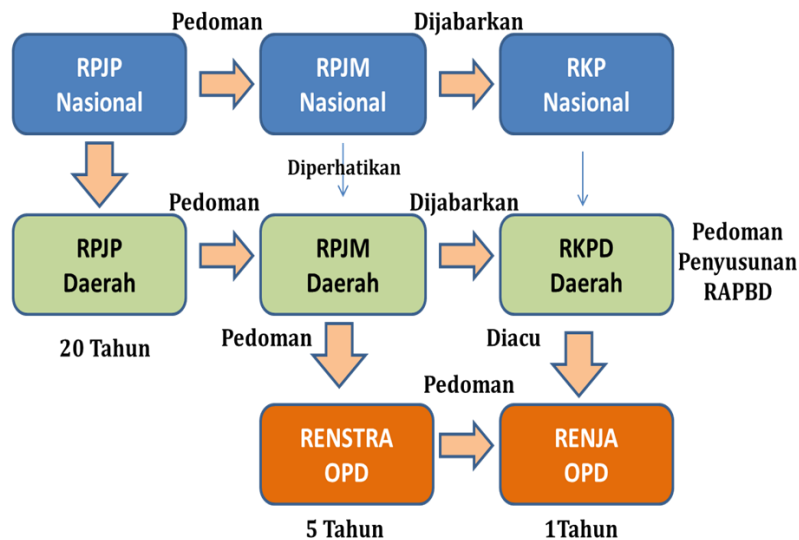
## 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Disamping itu RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman kepada sasaran pokok RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2020, dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029. Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Perangkat Daerah (PD).

Adapun dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat (gambar 1.1) Alur Proses Penyusunan RKPD dan Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020. Sebagaimana berikut dibawah ini:

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Antar Dokumen RKPDP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020**



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

### 1.3.1. RKP DAN RKPD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020.

Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2020 dan program strategis dan kegiatan serta tujuan dan sasaran pembangunan, selain itu juga menyangkut penyelarasan, sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Adapun agenda Prioritas Nasional adalah 1). Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, 2). Konektivitas dan Pemertaan, 3). Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja, 4). Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup, dan 5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

### 1.3.2. RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023 DAN RKPD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020.

Penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, berpedoman pada RPJMD provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran untuk periode II (kedua). Dalam Penyusunan Dokumen RKPD memuat penyelarasan dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat Daerah dan program lintas perangkat Daerah.

### 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan rencana pembangunan sebagai acuan/pedoman penganggaran tahunan daerah.

Secara lebih sistematis tujuan dari penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta APBD Tahun Anggaran 2020;
- 3) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan
- 4) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;

- 5) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas; serta
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, disusun dengan sistematika berdasarkan kaidah peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018 sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Tahun 2013-2018.
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

#### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- 3.3. Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

#### **BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020
- 4.3. Inovasi Daerah

#### **BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

- 5.1. Perkembangan Indikator Kinerja Penyelenggaraan
- 5.2. Proyeksi Indikator Kinerja Penyelenggaraan

#### **BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN OPD**

#### **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- 7.1 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Utama Menjelaskan Indikator
- 7.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci

#### **BAB VIII : PENUTUP**

- 8.1 Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Tahun 2020.

## BAB II

# GAMBARAN UMUM

## PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2.1. **Gambaran Umum**
- 2.1.1. **Aspek Geografi dan Demografi**
- 2.1.1.1. **Aspek Geografi**
- 2.1.1.1.1. **Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Batas wilayah administrasi adalah batas wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola pemerintah daerah didalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, desentralisasi, desentralisasi dan tugas pembantuan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 25, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan dengan wilayah dan batas-batasnya yang ditetapkan dengan UU 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara yang mengatur tentang kedaulatan, kewilayahan, dan wewenang pemerintah daerah. Menurut UUD 1945 amendemen kedua, pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat 1, dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut menyatakan bahwa provinsi merupakan tingkat pertama dari pembagian wilayah di Indonesia.

Provinsi Sulawesi selatan yang terletak di bagian selatan semenanjung pulau Sulawesi, merupakan salah satu wilayah yang mempunyai lokasi strategis ditengah-tengah kepulauan Indonesia dan sekaligus menjadi jembatan penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia, sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mempunyai luas wilayah sekitar 46.083,94 km persegi dan secara administratif terbagi 21 wilayah kabupaten, dan tiga wilayah kota. Terdiri dari 306 kecamatan dan 3.030 wilayah administrasi setingkat desa dan kelurahan yang terdiri dari 2.240 desa, dan 783 kelurahan.

dengan batas wilayah:

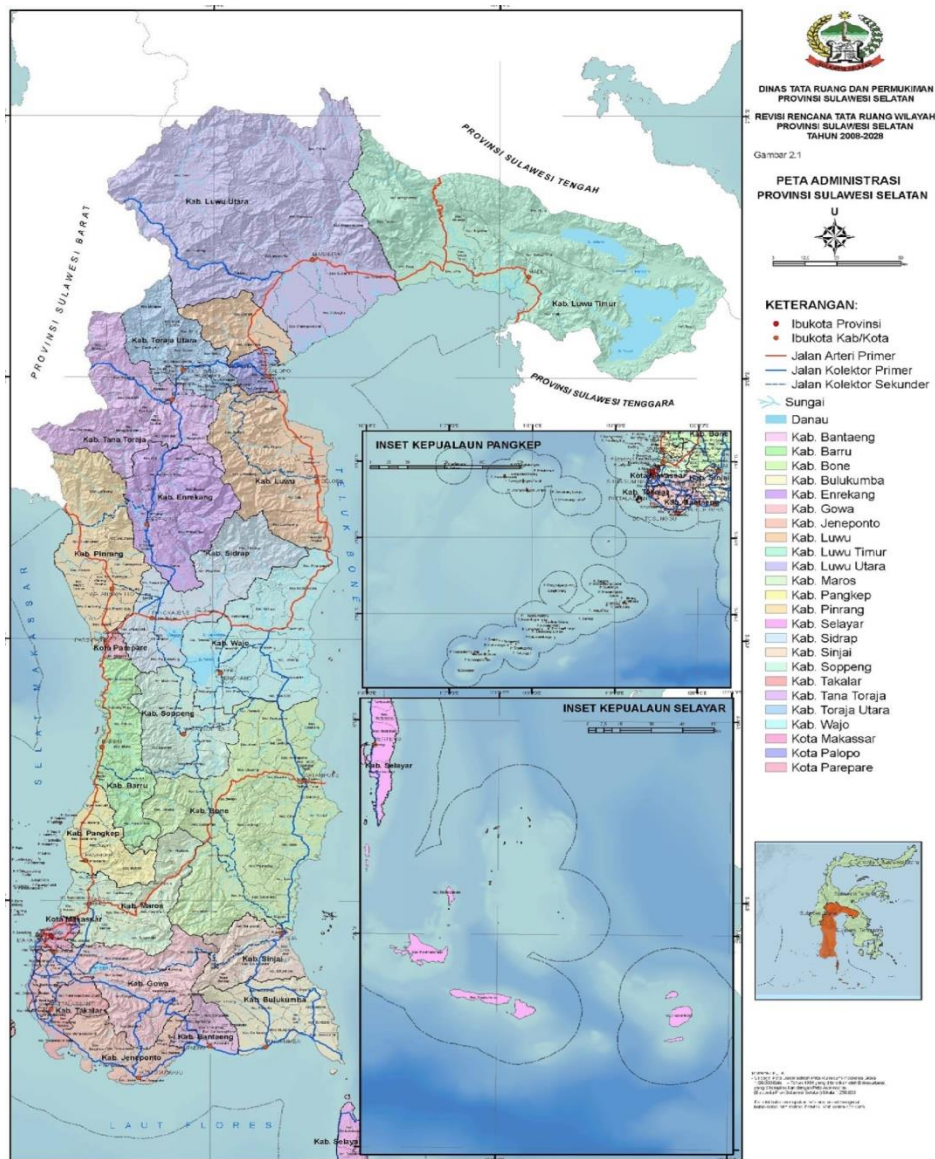
- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar dan Pulau Kalimantan

Posisi geografis tersebut secara tidak langsung mengantarkan Sulawesi Selatan sebagai wilayah perdagangan dan jasa yang secara posisi memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, karena Selat Makassar merupakan salah satu jalur pelayaran internasional, dan berfungsi sebagai titik simpul transportasi laut dan udara yang menghubungkan Asia Timur dan Benua Australia.

Posisi strategis geografis Sulawesi Selatan ini sebagai hub distribusi barang dan jasa dari dan ke timur-barat Indonesia menjadi salah satu nilai lebih yang harus mampu dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Poros maritim Indonesia seyogyanya itu bertumpu di Makassar, apalagi infrastruktur kemaritiman dengan hadirnya *New Port of Makassar* dan kebijakan *direct call* seharusnya mejadi modal dasar untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai *center point of Indonesia*.



Gambar II.1  
Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten dengan luasan wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luasan 7.502,28 Km persegi yang terdiri dari 12 kecamatan yang meliputi 173 desa/kelurahan, kemudian kabupaten Luwu Timur dengan luasan 6.944,88 km persegi memiliki 11 kecamatan dan 128 desa/kelurahan dan kabupaten Bone dengan luasan 4.559 km persegi yang terdiri dari 27 kecamatan dan 327 desa/kelurahan, sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kota Parepare dengan luas wilayah 99,33 km persegi yang terdiri dari 4 kecamatan dan 143 kelurahan.

Tabel II.1  
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

Kode	Kabupaten/Kota	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kecamatan	Banyaknya Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Selayar	1.357,03	11	88	135.809
2	Bulukumba	1.284,63	10	136	432.141
3	Bantaeng	395,83	8	67	196.358
4	Jeneponto	706,52	11	113	409.693
5	Takalar	566,61	9	100	286.390
6	Gowa	1.883,32	18	167	752.896
7	Sinjai	798,96	9	80	255.853
8	Maros	1.619,12	14	103	397.937

Kode	Kabupaten/Kota	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kecamatan	Banyaknya Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
9	Pangkep	1.132,08	13	103	361.636
10	Barru	1.174,71	7	55	173.683
11	Bone	4.559,00	27	372	866.245
12	Soppeng	1.557,00	8	70	249.768
13	Wajo	2.504,06	14	190	460.719
14	Sidenreng Rappang	1.883,23	11	106	310.493
15	Pinrang	1.961,67	12	108	411.837
16	Enrekang	1.784,93	12	129	239.707
17	Luwu	3.343,97	22	227	375.535
18	Tana Toraja	1.990,22	19	159	283.214
19	Luwu Utara	7.502,58	15	173	364.828
20	Luwu Timur	6.944,88	11	127	294.383
21	Toraja Utara	1.215,55	21	151	239.558
22	Makassar	199,26	15	153	1.663.479
23	Pare Pare	99,33	4	22	177.651
24	Palopo	252,99	9	48	182.690
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>46.717,48</b>	<b>307</b>	<b>3.047</b>	<b>9.522.503</b>

Sumber : Permendagri 137 Tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan dan hasil Pemekaran Luwu Utara pada tahun 2018 dari 12 Kecamatan menjadi 15

#### 2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografi

Provinsi Sulawesi selatan yang terletak dibagian selatan semenanjung pulau Sulawesi, merupakan salah satu lokasi wilayah yang strategis ditengah-tengah kepulauan Indonesia dan sekaligus menjadi jembatan penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia, sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) Secara Geografis Provinsi Sulawesi Selatan terletak di antara 0 12'- 8 lintang selatan dan 116'48 - 122' 36' Bujur Timur,

Dari sisi fisik, Sulawesi Selatan memiliki kondisi dan potensi yang sangat beragam. Berdasarkan topografi, wilayah Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran rendah yang meliputi hampir semua kabupaten/kota hingga dataran tinggi. Dataran tinggi di Sulawesi Selatan terbentuk melalui keberadaan sejumlah gunung. Pada perbatasan kabupaten Gowa, Bantaeng, Sinjai dan Bulukumba membentang gunung Lompobattang dengan ketinggian 2.871 meter, juga terdapat gunung Bawakaraeng dengan ketinggian 2.830 meter di perbatasan Kabupaten Gowa dan Sinjai. Di wilayah Luwu terdapat gunung Bukit Rantai Kombala dengan ketinggian 3.103 meter gunung Kambuno (2.900 meter) dan gunung Balease (3.016 meter). Pada wilayah perbatasan Kabupaten Luwu dan Enrekang terdapat gunung Rante Mario dengan ketinggian 3.470 meter dan gunung Latimojong dengan ketinggian 3.305 meter. Sulawesi Selatan juga ditandai oleh keberadaan bukit Karst di sebagian wilayah Kabupaten Pangkep dan Maros.

##### 2.1.1.2.1. Kondisi Topografi

Provinsi Sulawesi selatan yang terletak dibagian selatan semenanjung pulau Sulawesi, merupakan salah satu lokasi wilayah yang strategis ditengah-tengah kepulauan Indonesia dan sekaligus menjadi jembatan penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia, sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) Secara Geografis Provinsi Sulawesi Selatan terletak di antara 0 12'- 8 lintang selatan dan 116'48 - 122' 36' Bujur Timur,

Dari sisi fisik, Sulawesi Selatan memiliki kondisi dan potensi yang sangat beragam. Berdasarkan topografi, wilayah Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran rendah yang meliputi hampir semua kabupaten/kota hingga dataran tinggi. Dataran tinggi di Sulawesi Selatan terbentuk melalui keberadaan sejumlah gunung. Pada perbatasan

kabupaten Gowa, Bantaeng, Sinjai dan Bulukumba membentang gunung Lompobattang dengan ketinggian 2.871 meter, juga terdapat gunung Bawakaraeng dengan ketinggian 2.830 meter di perbatasan Kabupaten Gowa dan Sinjai. Di wilayah Luwu terdapat gunung Bukit Rantai Kombala dengan ketinggian 3.103 meter gunung Kambuno (2.900 meter) dan gunung Balease (3.016 meter). Pada wilayah perbatasan Kabupaten Luwu dan Enrekang terdapat gunung Rante Mario dengan ketinggian 3.470 meter dan gunung Latimojong dengan ketinggian 3.305 meter. Sulawesi Selatan juga ditandai oleh keberadaan bukit Karst di sebagian wilayah Kabupaten Pangkep dan Maros.

#### **2.1.1.2.2. Kondisi Geologi**

Berdasarkan struktur litotektonik, Sulawesi Selatan merupakan bagian dari Mandala barat yang memanjang dari lengan utara sampai dengan lengan selatan pulau Sulawesi. Secara umum, busur ini tersusun oleh batuan plutonik-vulkanik berumur Paleogen-Kuarter dengan batuan sedimen berusia mesozoikum-tercier dan batuan malihan. Kondisi geologi Sulawesi Selatan bagian timur dan bagian barat pada dasarnya berbeda, di mana kedua daerah ini dipisahkan oleh sesar Walanae.

Struktur geologi batuan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik geologi yang dicirikan oleh adanya berbagai jenis satuan batuan yang bervariasi yang membentuk formasi batuan. Formasi batuan di Sulawesi Selatan meliputi Formasi Latimojong, yang batuan penyusunnya terdiri dari batupasir kuarsa malihan, batulanau malihan, kuarsit, filit, dan setempat batulempung gampingan. Formasi ini diperkirakan berumur Kapur dan diendapkan di lingkungan laut dalam. Formasi Mallawa tersusun oleh batu pasir arkosik, batu lanau, batulempung, napal, dan konglomerat yang diinterkalasi oleh layer-layer atau lensa-lensa batubara dan batugamping. Formasi ini terdapat di bagian barat Sulawesi Selatan, yang melapis-bawahinya secara tak selaras Formasi Balangbaru dan setempat Formasi Langi.

Formasi Mallawa dan Tonasa tersebar luas di bagian barat Sulawesi Selatan. Formasi Salo Kaluppang hadir di bagian timur Sulawesi Selatan, yang terdiri atas batugamping, serpih, dan batulempung yang interbedded dengan konglomerat vulkanik, breksi, tufa, lava, batugamping, dan napal. Formasi ini seumur dengan Formasi Mallawa dan bagian bawah Formasi Tonasa. Formasi Kalamiseng tersingkap di bagian timur Depresi Walanae, terdiri atas breksi vulkanik dan lava dalam bentuk lava bantal dan lava masif, yang berinterbedded dengan tufa, batupasir, dan napal.

Formasi Walanae tersusun dari perselingan batupasir, konglomerat, tufa dengan sisipan batulanau, batulempung, batugamping, napal dan lignit, batupasir berbutir sedang sampai kasar, umumnya gampingan dan agak kompak, berkomposisi sebagian andesit dan sebagian lainnya banyak mengandung kuarsa. Batubara pada formasi Walanae yang pernah diteliti antara lain pada Kabupaten Sinjai, pada daerah Panaikang dan Bulupodo. Ketebalan batubara formasi Walanae pada daerah Panaikang bervariasi dengan rata-rata 2 meter. Kondisi fisik berlapis-lapis, berselang-seling dengan lempung. Sedangkan pada daerah Bulupodo batubaranya memiliki warna abu-abu hingga hitam, dan masih menampilkan tekstur asalnya yaitu kayu. Batubara ini merupakan sisipan pada batupasir yang berselingan dengan batulempung hingga lanau. Formasi Walanae secara lokal tidak selaras dengan formasi Tacipi, batu gamping (Limestone) di ujung selatan daerah Sulawesi Selatan dan yang berada di Pulau Selayar yang disebut selayar limestone, merupakan bagian formasi Walanae.

Formasi Bone yang berumur Miosen Awal, berada di daerah Sengkang terdiri atas wackestone bioklastik dan packstone foraminifera planktonik berbutir halus yang berinterbedded dengan mudstone kalkareus. Formasi Mandala Barat Bagian Barat, berada di wilayah Kabupaten Enrekang terdiri dari 8 satuan, yaitu: Satuan batupasir malih (Kapur Akhir), Satuan batuan serpih (Eosen-Oligosen Awal), Satuan batugamping (Eosen), Satuan



batupasir gampingan (Oligosen-Miosen Tengah), Satuan batugamping berlapis (Oligosen-Miosen Tengah), Satuan klastika gunung api (Miosen Akhir), Satuan batu gamping terumbu (Pliosen Awal), Satuan konglomerat (Pliosen).

Formasi batuan di Sulawesi Selatan menandakan potensi sumber daya mineral yang dimiliki sebagai modal penggerak pembangunan Sulawesi Selatan. Potensi keragaman geologi tersebut didukung oleh kondisi klimatologis Sulawesi Selatan yang unik. Periode musim hujan dan musim kering di wilayah pantai Barat (sepanjang pesisir Selat Makassar) berbeda dengan periode musim hujan dan musim kering di wilayah pantai Timur (pesisir kawasan Teluk Bone). Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut Oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu Tipe iklim A termasuk kategori iklim sangat basah dimana curah hujan rata-rata 3500-4000 mm/Tahun.

Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini adalah Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. Tipe Iklim B, iklim basah dimana curah hujan rata-rata 3000-3500 mm/tahun. Wilayah tipe terbagi 2 tipe yaitu (B1) meliputi kab. Tana Toraja, Luwu utara, Luwu timur. Tipe B2 meliputi Gowa, Bulukumba dan Bantaeng, tipe C termasuk iklim agak basah dimana curah hujan rata-rata 2500-3000 mm/tahun. Tipe iklim C terbagi 3 yaitu iklim tipe C1 meliputi kabupaten Wajo, Luwu dan Tana Toraja. Iklim C2 meliputi Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkep, Enrekang, Maros dan Jeneponto. Sedangkan tipe iklim C3 terdiri dari Makassar, Bulukumba Jeneponto, Pangkep, Barru, Maros, Sinjai, Gowa, Enrekang, Tana Toraja, Parepare, dan Selayar.

Wilayah daratan Sulawesi Selatan dikelilingi oleh laut, di sebelah Selatan terdapat laut Flores, di sebelah Barat terdapat selat Makassar dan Laut Jawa serta di sebelah Timur terdapat teluk Bone, dengan pulau-pulau tersebar pada perairan tersebut. Gambaran geografis ini menunjukkan besarnya keragaman aktivitas sosial-ekonomi yang berpeluang berkembang di Sulawesi Selatan. Gunung dan Daerah Aliran Sungai potensial menyimpan keragaman flora dan fauna pada area hutan yang terbentuk dan menjadi penyangga kawasan secara keseluruhan, serta potensial pula untuk budidaya tanaman perkebunan utamanya komoditas kakao dan kopi dan budidaya tanaman hortikultura.

Pada dataran rendah, potensi ekologis perkembangan pertanian padi sawah tidak bisa lagi disangkal, yang menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia, yang berjalan seiring dengan perkembangan produktifitas komoditas perikanan. Selain potensi ekologis, baik potensi pertanian maupun perikanan, tersimpan pula potensi sosial-ekonomi untuk mendorong transformasi pertanian dan perikanan melalui peningkatan aktivitas sosial ekonomi pedesaan yang menjadi kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu hilirisasi pengelolaan komoditas Sulawesi Selatan yang berbasis sumber daya alam.

#### **2.1.1.2.3. Kondisi Hidrologi**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, menetapkan wilayah sungai di Sulawesi Selatan terdiri dari Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang meliputi Wilayah Sungai (WS) Palu-Lariang yang melintasi Sulawesi Tengah-Sulawesi Barat-Sulawesi Selatan, WS Kalukku-Karama yang melintasi Sulawesi Barat-Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah, WS Pompengan-Larona yang melintasi Sulawesi Tenggara-Sulawesi Selatan, WS Saddang yang melintasi Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat, dan WS Towari-Lasusua yang melintasi Sulawesi Tenggara-Sulawesi Selatan. Peraturan menteri tersebut juga menetapkan wilayah sungai strategis nasional di Sulawesi Selatan yaitu WS. Walanae-Cenranae dan WS Jeneberang.



Tabel II.2  
Wilayah Sungai di Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Wilayah Sungai	Jumlah DAS	Kabupaten/Kota	Kewenangan
<b>Lintas Provinsi</b>				
1.	Palu-Lariang		Luwu Utara	Pusat
2.	Kalukku-Karama		Luwu Utara	Pusat
3.	Pompengan-Larona	27	Luwu Utara, Luwu, Luwu Timur, Palopo	Pusat
4.	Towari-Lasusua		Luwu Timur	Pusat
5.	Saddang	24	Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Pinrang, Parepare, Barru, Pangkajene Kepulauan, Maros	Pusat
<b>Strategis Nasional</b>				
1.	Walanae-Cenranae	20	Tana Toraja, Luwu, Enrekang, Pinrang, Sidenreng Rappang, Wajo, Soppeng, Bone, Maros	Pusat
2.	Jeneberang	58	Bone, Maros, Sinjai, Gowa, Makassar, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Kepulauan Selayar	Pusat

#### 2.1.1.2.4. Kondisi Klimatologi

Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan pengamatan digital Stasiun Klimatologi (Maros, Hasanuddin dan Maritim Paotere) selama tahun 2010 rata-rata suhu udara 27,4 C di Kota Makassar dan sekitarnya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara maksimum di stasiun klimatologi Hasanuddin 32,1 C dan suhu minimum 24,0 C. Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu Tipe iklim A termasuk kategori iklim sangat basah dimana curah hujan rata-rata 3500-4000 mm/Tahun.

Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini adalah Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. Tipe Iklim B, iklim basah dimana curah hujan rata-rata 3000-3500 mm/tahun. Wilayah tipe terbagi 2 tipe yaitu (B1) meliputi kab. Tana toraja, Luwu utara, Luwu timur. Tipe B2 meliputi Gowa, Bulukumba dan Bantaeng, tipe C termasuk iklim agak basah dimana curah hujan rata-rata 2500-3000 mm/tahun. Tipe iklim C terbagi 3 yaitu iklim tipe C1 meliputi kabupaten Wajo, Luwu dan Tana toraja. Iklim C2 meliputi Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkep, Enrekang, Maros dan Jeneponto. Sedangkan tipe iklim C3 terdiri dari Makassar, Bulukumba, Jeneponto, Pangkep, Barru, Maros, Sinjai, Gowa, Enrekang, Tana Toraja, Parepare, Selayar.

#### 2.1.1.2.5. Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan merujuk pada pola ruang wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan peruntukan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup di Sulawesi Selatan yang meliputi kawasan hutan lindung di 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota dengan luasan 1.189.207 Hektar dan kawasan rawan bencana berupa kawasan rawan gempa bumi di kabupaten Bone, Pinrang, Tana Toraja, Luwu, Luwu Utara, dan Enrekang, kawasan rawan banjir di kabupaten Jeneponto, Maros, Pangkajene Kepulauan, Bantaeng, Bulukumba,

Sinjai, Bone, Pinrang Luwu, dan Luwu Timur, kawasan rawan gerakan tanah di kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, dan Luwu Timur, dan kawasan rawan bencana tsunami di kabupaten Pinrang, Bulukumba, Kepulauan Selayar dan Kota Makassar.

Sedangkan Kawasan Budidaya yang merupakan kawasan yang ditetapkan untuk dibudidayakan yang bersifat strategis dan berdampak luas bagi upaya pencapaian pembangunan Sulawesi Selatan yang meliputi kawasan hutan produksi seluas 639.824 Hektar di 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota, kawasan pertanian seluas 317.224 Hektar di 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota, potensi kawasan perikanan berupa kawasan lahan budidaya laut seluas 600.500 Hektar di Kabupaten Bantaeng, Sinjai, Jeneponto, Bulukumba, Takalar, Luwu Timur, Luwu Utara, Bone, Pinrang, Wajo, Pangkajene Kepulauan, Barru, dan Kota Palopo. Kawasan pertambangan berdasarkan RTRWP Sulawesi Selatan ditetapkan di 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota dengan potensi sumber daya mineral berupa mineral logam, mineral non logam, batuan, serta minyak dan gas bumi.

Kawasan peruntukan industry meliputi kawasan industry skala besar ditetapkan di kota Makassar dan kota Parepare, serta kabupaten Luwu Timur, Pangkajene Kepulauan, Maros dan Gowa dan kawasan aglomerasi industry skala kecil dan menengah ditetapkan di Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Luwu, Enrekang, Sidenreng Rappang, Pinrang, Barru, Bone, Bulukumba, Bantaeng dan Jeneponto. Kawasan pariwisata yang ditetapkan dalam RTRWP Sulawesi Selatan meliputi kawasan wisata alam pada Taman Wisata Alam di Kabupaten Wajo, Sidenreng Rappang, Enrekang, Maros, Tana Toraja, Sinjai, Maros, Takalar, Gowa, serta Kota Palopo dan Makassar, kawasan wisata budaya di Kabupaten Bulukumba, Gowa, dan Makassar, dan kawasan wisata sejarah di Kabupaten Gowa, Bone, Sinjai, dan Kota Makassar dan Palopo. Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman perkotaan yang ditetapkan pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan kawasan permukiman perdesaan.

#### **2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana**

Bencana yang berpotensi melanda wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah banjir, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami. Banjir yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan disebabkan karena terjadinya proses degradasi kawasan lindung yang sebagian besar berupa hutan lindung baik di hulu maupun di hilir daerah sungai yang sering dijumpai pada kawasan perdesaan dan juga disebabkan oleh sistem drainase yang tidak berfungsi dengan optimal serta tersumbatnya sungai dan saluran air oleh sampah yang biasanya terjadi di kawasan perkotaan. Berdasarkan data tahun 2012, luas wilayah genangan di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 5.154 Km<sup>2</sup> atau sekitar 20% dari luas kawasan budidaya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang pada umumnya merupakan kawasan sentra produksi pertanian. Kawasan rawan bencana banjir di Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan di wilayah Kabupaten Jeneponto, Maros, Pangkajene Kepulauan, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Pinrang, Luwu, dan Luwu Timur.

Berdasarkan proses terbentuknya Pulau Sulawesi, maka terdapat garis sesar gempa memanjang dari perairan kanan dan kiri Pulau Selayar menuju ke utara melewati Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap, bercabang di Kabupaten Enrekang yang merupakan kawasan pengaruh kegempaan. Garis sesar gempa ini menunjukkan daerah rawan gempa di daerah yang dilewatinya yang berpusat di Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara. Selain daripada itu garis sesar di sebelah barat Kabupaten Pinrang dan di sebelah selatan Selat Makassar menyebabkan daerah pantai di kabupaten Pinrang, kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar serta Kota Makassar rawan terhadap bencana Tsunami.

Berdasarkan peta gerakan tanah Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh zona kerentanan gerakan tanah rendah dan menengah. Hal ini

mengindikasikan bahwa bencana gerakan tanah di Provinsi Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia khususnya pada pemanfaatan ruang di wilayah DAS dan pegunungan yang rentan akan bencana longsor. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan wilayah yang rawan bencana gerakan tanah adalah Kabupaten Takalar, Gowa, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, dan Luwu Timur.

**Tabel II.3**  
**Jenis dan Jumlah kejadian Bencana di Provinsi**  
**Sulawesi Selatan Tahun 2018**

No.	Bencana	Jumlah Kejadian	Korban (Jiwa)		Rumah (Unit)		Kerusakan Fasilitas Umum (Unit)
			Luka-Luka	Terdampak dan Mengungsi	Rusak	Terendam	
1.	Putting Beliung	110	16	211	1.018	0	7
2.	Banjir	39	3	52.458	607	22.955	201
3.	Tanah Longsor	27	6	0	48	0	1
4.	Gelombang pasang	5	0	0	8	0	0
5.	Kekeringan	3	0	0	8	0	0
6.	Gempa Bumi	2	0	0	8	0	4
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	1	0	0	8	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>187</b>	<b>25</b>	<b>52.669</b>	<b>1.782</b>	<b>22.955</b>	<b>208</b>

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah kejadian bencana sebanyak 230 kejadian, jenis kejadian wilayah Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh pada tingkat bencana banjir dan kebakaran Permukiman. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya kesadaran masyarakat Sulawesi Selatan itu perlu melakukan kegiatan manusia khususnya pada pemanfaatan ruang di wilayah.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi pascabencana dilakukan untuk memacu kembali perkembangan kegiatan perekonomian, social, dan budaya suatu wilayah yang terdampak bencana.

Penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana disyaratkan untuk mengacu pada Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan jalur evakuasi bencana pada struktur ruang wilayah dan kawasan rawan bencana pada pola ruang wilayah. Berdasarkan arahan peruntukan kawasan permukiman pada RTRWK, maka lokasi potensi relokasi pasca bencana pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

**Tabel II.4**  
**Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Kabupaten/Kota	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
1	Kota Makassar	Banjir	Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Ujung Pandang, Biringkanaya, dan Wajo
		Angin Puting Beliung	
		Kebakaran	
2	Kota Pare-pare	Banjir	Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Ujung Lare, Kelurahan
		Longsor	

No.	Kabupaten/Kota	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
		Kebakaran	Lakessi, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Watang Soreang, Kelurahan Ujung Bulu, Kelurahan Tiro Sompe, Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Cappa Galung, dan Kelurahan Ujung Sabbang
3	Kota Palopo	Banjir	Kelurahan Maroangin, Kec. Telluwanua; Kel. Rampoang, Kec. Bara; Kel. Songka, Kec. Wara Selatan
		Tanah longsor	
		Gelombang pasang	
		Abrasi	
		kebakaran	
4	Barru	Tanah longsor	Kelurahan Lalolang, Sepe'E, Lompo Riaja, Desa Batupute, dan Desa Nepo
		Banjir	
		Gelombang pasang	
5	Soppeng	Banjir	Desa Watu dan Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo; Desa Baringeng dan Desa Tetewatu di Kecamatan Lilirilau; Desa Panincong di Kecamatan Marioriawa;
		Tanah longsor	
6	Wajo	Banjir	Kelurahan Maroangin, Kec. Pammana, Kelurahan Solo Kec. Bola, Kel. Jalang dan Salo Bulu Kec. Sajoanging, dan Kel. Peneki dan Kel. Botto, Kec. Takkalalla
		Tanah longsor	
7	Sidrap	Banjir	Desa Kulo, Kec. Kulo; Kaw. Baranti Kec. Baranti; Kaw. Bilokka, Kec. Panca Lautang
		Angin Puting Beliung	
		Tanah Longsor	
8	Enrekang	Banjir	Desa Kalosi, Pana di Kec. Alla; Desa Baba di Kec. Cendana; Desa Kaluppang di Kec. Maiwa; Desa Kotu, Rurah, Cendana, Sossok, Singki di Kec. Anggeraja
		Tanah Longsor	
		Patahan	
9	Pinrang	Banjir	Kawasan Waetuo, Kec. Lanrisang
		Tanah Longsor	
		Gelombang pasang	
10	Toraja Utara	Tanah Longsor	Kawasan Rantebua Sanggalangi, Kec. Rantebua
		Banjir	
11	Tana Toraja	Tanah Longsor	Kec. Makale Utara; Kec. Malimbong Belepe; Kec. Mappak; Kec. Mengkendek; Kec. Rano; Kec. Rantetayo
		Banjir	
		Gempa Bumi	
12	Luwu	Banjir	Kaw. Lindajang, Bone Lemo, Rante Balla, Beuma, Ilanbatu dan Bosso
		Tanah Longsor	
13	Luwu Utara	Banjir	Desa Kapidi di Kecamatan Mappedeceng; Desa Pao di Kecamatan Malangke Barat; Desa Baebunta di Kecamatan Baebunta;
		Tanah Longsor	
		Gelombang pasang	
14	Luwu Timur	Banjir	Burai, Wonorejo, Kertoraharjo, Wasuponda, Solo, Kalaena dan Wawondula
		Tanah Longsor	
		Gempa Bumi	
15	Gowa	Banjir	Kaw. Ballabatua, Kec. Bajeng Barat; Kaw. Pencong, Kec. Biring Bulu; Kaw. Ulugalung, Kec. Tompobulu; Kaw. Buki-Buki Kec. Tombolo Pao
		Tanah Longsor	
		Gerakan Tanah	
16	Takalar	Banjir	Kec. Polombangkeng Utara; Kec. Polombangkeng Selatan; Kec. Mappakasunggu; Kec. Galesong Selatan, Kec. Mangarabombang
		Tanah Longsor	
		Gelombang Pasang	
17	Bantaeng	Banjir	Kaw. Bonto Maccini, Kec. Sinoa; Kaw. Bonto Marannu, Kec. Ulu Ere; Kaw. Gantarang Keke, Kec. Gantarang Keke; Kaw. Ulugalung, Kec. Eremerasa
		Tanah Longsor	
		Gelombang Pasang	
18	Bulukumba	Banjir	Kawasan Tanah Beru, Kec. Bontobahari; Kawasan Palampang, Kec. Rilau Ale
		Tanah Longsor	
		Tsunami	
		Abrasi	

No.	Kabupaten/Kota	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
		Gerakan Tanah	
19	Sinjai	Tanah Longsor	Kaw. Manipi, Kec. Sinjai Barat; Kaw. Bulupoddo, Kec. Bulupoddo; Kaw. Bikeru, Kec. Sinjai Selatan
		Banjir	
		Gerakan Tanah	
20	Bone	Banjir	Kaw. Taccipi, Kec. Ulaweng; Kaw. Lalebbata, Kec. Lamuru; Kaw. Pompanua, Kec. Ajangale; Kaw. Bojo, Kec. Kajuara; Kaw. Appala, Kec. Barebbo; Kaw. Bengo, Kec. Bengo; Kaw. Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge
		Gempa	
		Tanah Longsor	
		Angin Puting Beliung	
21	Maros	Banjir	Kaw. Ladange; Kaw. Padaelo; Kaw. Samaenre; Kaw. Barugae; dan Kaw. Batu Putih, Kec. Mallawa
		Tsunami	
		Tanah Longsor	
22	Pangkep	Banjir	Kaw. Balang Lompo, Mattiro Sompe, Mattiro Bone, Kec. Liukang Tupabbiring, Kaw. Biraeng, Bontokio, Kalabbirang, Kec. Minasa Te'ne
		Tanah Longsor	
		Tsunami	
		Abrasi	
23	Jeneponto	Banjir	Kaw. Rumbia, Kec. Rumbia; Kaw. Paitana, Kec. Turatea; Kaw. Bontotangnga, Kec. Tamalatea; Kaw. Bontoramba, Kec. Bontoramba
		Tanah Longsor	
		Gelombang Pasang	
		Abrasi Pantai	
		Gerakan Tanah	
24	Selayar	Gempa Bumi	Kaw. Matalalang, Kec. Bontoharu; Kaw. Polebungin, Kec. Bontomanai; Kaw. Buki, Kec. Buki
		Gelombang Pasang	

Sumber : Hasil Analisis RTRWK, Tahun 2018

#### 2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu.

PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Sulawesi Selatan. Rencana struktur ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Sulawesi Selatan mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasional.



Tabel II.5  
Sistem Perkotaan Nasional dan Provinsi di Sulawesi Selatan

No	Kabupaten / Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
1	Kepulauan Selayar			Kawasan Benteng dan Kawasan Pamatata
2	Bulukumba		Bulukumba (Agroindustri, Peratnian, Pariwisata, Perikanan)	
3	Bantaeng			Kawasan Perkotaan Bantaeng
4	Jeneponto		Jeneponto (Agroindustri, Perikanan, Pertanian, Pariwisata)	
5	Takalar	Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa)		
6	Gowa	Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa)		
7	Sinjai			Kawasan Sinjai
8	Maros	Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa)		
9	Pangkep		Pangkejene (Agroindustri, Perikanan, Pariwisata)	
10	Barru		Barru (Agroindustri, perikanan, pertanian, perkebunan)	Kawasan EMAS
11	Bone		Watampone (Agroindustri, Perikanan, Pertanian)	
12	Soppeng			Kawasan Watansoppeng
13	Wajo			Kawasan Sengkang
14	Sidrap			Kawasan Pangkajene
15	Pinrang			Kawasan Pinrang
16	Enrekang			Kawasan Enrekang
17	Luwu			Kawasan Belopa
18	Tana Toraja			Kawasan Makale
19	Luwu Utara			Kawasan Masamba
20	Luwu Timur			KTM Mahalona Kawasan Malili

No	Kabupaten / Kota	Sistem Perkotaan Nasional		Sistem Perkotaan Provinsi
		Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
21	Toraja Utara			Kawasan Rantetpao
22	Makassar	Kawasan Perkotaan Mamminasata (Perdagangan dan Jasa)		
23	Pare Pare		Parepare (Agroindustri, Perikanan)	
24	Palopo		Palopo (Agroindustri, Perkebunan, Pertanian)	

Sumber : RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan

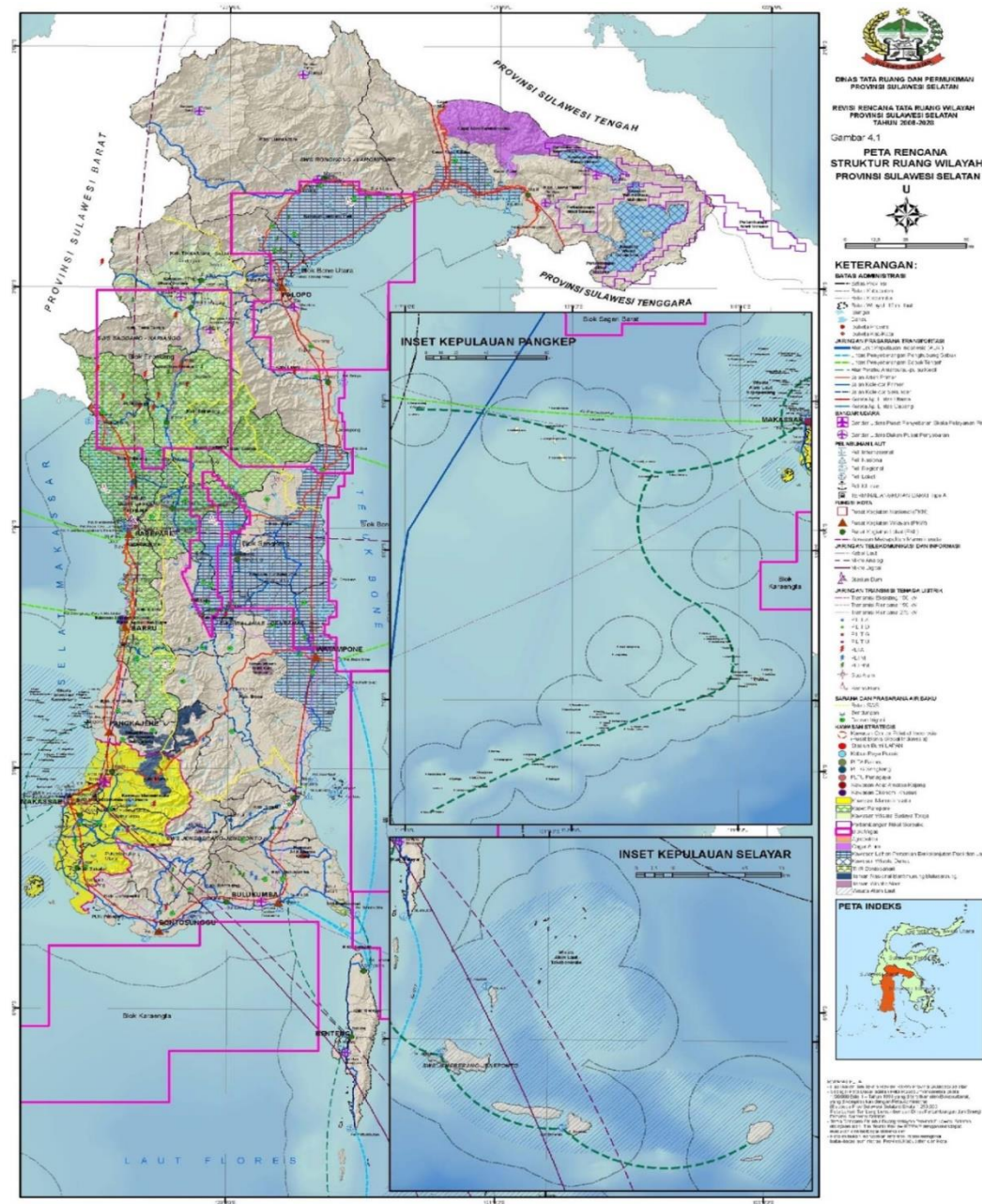
Sistem perkotaan nasional di Sulawesi Selatan meliputi: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi seluruh wilayah Kota Makassar, dan Kabupaten Takalar serta sebagian wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan nasional dan pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia. Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru dan Parepare, yang berfungsi mendukung peran Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan mengemban fungsi sebagai pusat jasa pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, simpul transportasi serta pusat pelayanan publik berskala provinsi. Sedangkan sistem perkotaan provinsi sebagaimana arahan RTRWP selain mengalokasikan sistem perkotaan nasional sebagaimana arahan RTRWN juga mengalokasikan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan meliputi Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kabupaten di Bantaeng, Enrekang, Masamba, Belopa, Malili, Pinrang, Pangkajene, Benteng, Sinjai, Watansoppeng, Makale, Rantepao dan Sengkang, kawasan perkotaan KTM Mahalona di kabupaten Luwu Timur, kawasan perkotaan EMAS di kabupaten Barru sebagai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dan kawasan perkotaan Pamatata di kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kawasan pusat distribusi bahan kebutuhan pokok kawasan timur Indonesia.

#### 2.1.1.4.1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah pusat, kegiatan lokal maupun sub pusat kegiatan lokal, serta kawasan perkotaan berupa kota, ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan kawasan pusat pertumbuhan industri dan perdagangan yang padat dengan kegiatan perkotaan dan fasilitas permukiman.



Gambar II.2  
Peta Struktur Ruang Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Prov. Sulsel

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kawasan Metropolitan Mamminasata yang terdiri dari Kota Makassar, Kabupaten Maros, Sungguminasa, dan Kabupaten Takalar. Pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata diarahkan sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama Kawasan Timur Indonesia, serta sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi di Sulawesi Selatan. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan di Kota Palopo, Watampone, Parepare, Barru, Pangkajene, Jeneponto, dan Bulukumba. PKW merupakan kawasan perkotaan berfungsi sebagai simpul kegiatan perdagangan dan jasa skala regional yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional, sebagai pusat kegiatan industri serta berfungsi sebagai simpul transportasi skala Provinsi di Sulawesi Selatan (Gambar II.2).

Selain PKN dan PKW pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan juga ditetapkan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan peran sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala kabupaten/kota dan sebagai simpul transportasi skala kabupaten/kota. Kawasan perkotaan di Sulawesi Selatan yang ditetapkan sebagai PKL adalah Kawasan Perkotaan Malili, Kawasan Perkotaan Masamba, Kawasan Perkotaan Rantepao, Kawasan Perkotaan Makale, Kawasan Perkotaan Enrekang, Kawasan Perkotaan Pangkajene, Kawasan Perkotaan Sengkang, Kawasan Perkotaan Soppeng, Kawasan Perkotaan Sinjai, Kawasan Perkotaan Bantaeng, Kawasan

Perkotaan Watansawitto, Kawasan Perkotaan Belopa, serta Kawasan Perkotaan Benteng, dan Kawasan Perkotaan Pamatata.

#### 2.1.1.4.2. Kawasan Strategis Provinsi

Selain Pusat Kegiatan Lokal, RTRWP Sulawesi Selatan juga menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Sulawesi Selatan terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (Gambar II.3).

Penetapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Sulawesi Selatan adalah:

- a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi:
  1. Kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung di masing-masing Kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur, Pangkep, Maros, Gowa dan Takalar;
  2. Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak di masing-masing Kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kepulauan Selayar;
  3. Kawasan pengembangan budidaya rumput laut meliputi wilayah perairan pantai dan atau tambak di masing-masing Kabupaten: Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Palopo, Luwu utara, dan Luwu Timur;
  4. Kawasan pengembangan budidaya udang meliputi tambak di Kabupaten: Pinrang, Barru, Pangkep, Bone, Bulukumba, Takalar dan Wajo;
  5. Kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar;
  6. Kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata Center Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) di Mamminasata;
  7. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Emas di Kabupaten Barru;
  8. Kawasan Industri (KI) skala besar meliputi: kawasan-kawasan industri di wilayah Metropolitan Mamminasata yang terdiri atas KI Makassar (Kota Makassar), KI Maros (Kabupaten Maros), KI Gowa (Kabupaten Gowa), KI Takalar (Kabupaten Takalar), selain dari pada itu diarahkan pengembangan KI Parepare (Kota Parepare), pabrik pengolahan nikel Sorowako (Kabupaten Luwu Timur), pabrik semen Tonasa (Kabupaten Pangkep), pabrik semen Bosowa (Kabupaten Maros).
- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Sosial dan Budaya yang ditetapkan untuk mewujudkan pengembangan kawasan dengan fungsi pelestarian komunitas adat yang memiliki keunikan local yaitu kawasan permukiman adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba.
- c. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi yang ditetapkan untuk mewujudkan pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis yang meliputi:
  1. Kawasan pemanfaatan sumber daya minyak dan gas yang ditetapkan di Blok Bone Utara (Kabupaten Luwu dan Kota Palopo), Blok Enrekang (Kabupaten Tana Toraja, Enrekang dan Pinrang), Blok Sengkang (Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng dan Bone), Blok Bone di Teluk Bone, dan Blok Sigeri di Selat Makassar, Blok Kambuno di wilayah perairan Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba, Blok Selayar di wilayah perairan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar, Blok Karaengta di wilayah perairan Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kepulauan Selayar;

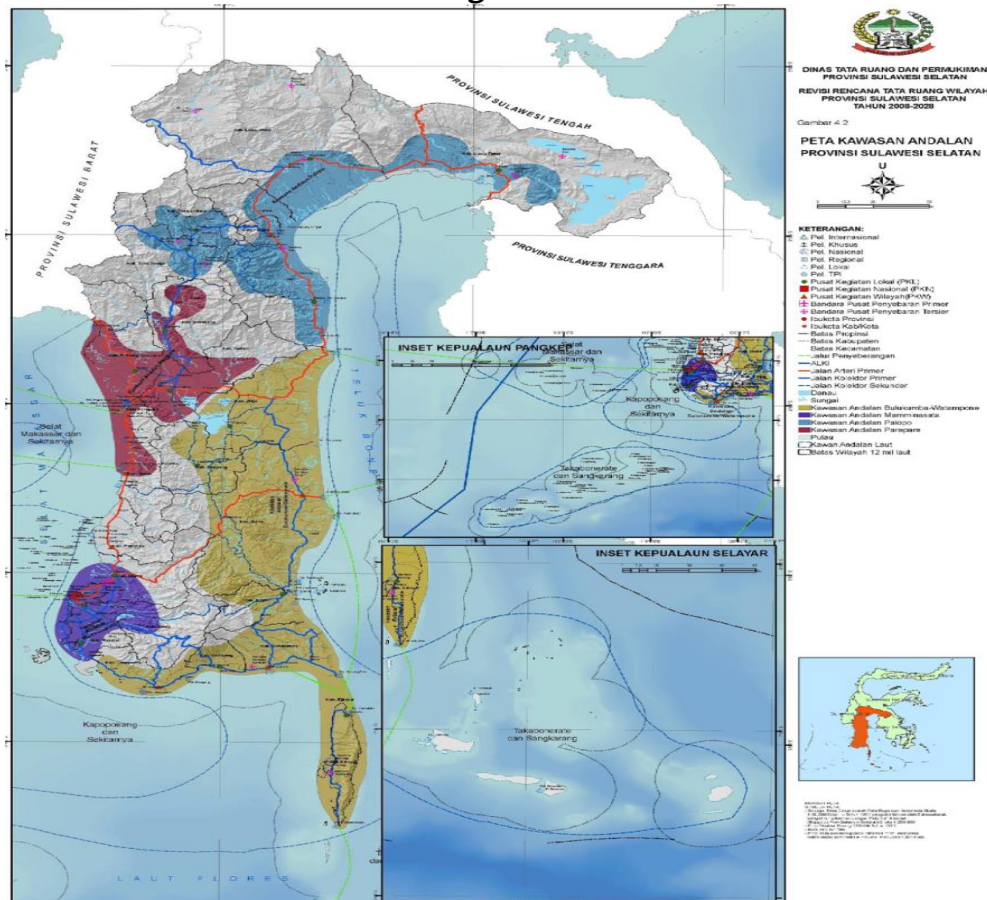
2. Kawasan pembangkit listrik yang ditetapkan di PLTG Sengkang (Kabupaten Wajo), PLTU Punagaya (Kabupaten Jeneponto), dan PLTU Bakaru (Kabupaten Pinrang).
- d. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yang ditetapkan untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan yang difokuskan pada pelestarian dan konservasi sumber daya alam keanekaragaman hayati yang meliputi Kawasan wisata bahari Mamminasata dan sekitarnya; kawasan taman nasional laut Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar), kawasan danau Tempe di kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo, dan kawasan bendungan yang terdiri dari kawasan Bendungan Batubassi, Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe (Kabupaten Luwu Timur), kawasan Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa), kawasan Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo), dan kawasan Bendungan Sanrego (Kabupaten Bone).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menetapkan Kawasan Andalan yang merupakan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya yang terdiri atas kawasan andalan laut dan kawasan andalan darat di Sulawesi Selatan. Adapun kawasan andalan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

- a. Kawasan Mamminasata dan sekitarnya (Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Pangkep) dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, perikanan, dan agroindustri;
- b. Kawasan Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan.
- c. Kawasan Bulukumba-Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan.
- d. Kawasan Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, perikanan, agroindustri dan pertanian.
- e. Kawasan Andalan laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata.
- f. Kawasan Andalan laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan pertambangan.
- g. Kawasan Andalan laut Singkarang-Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata.
- h. Kawasan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.



Gambar II.3  
Peta Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Selatan



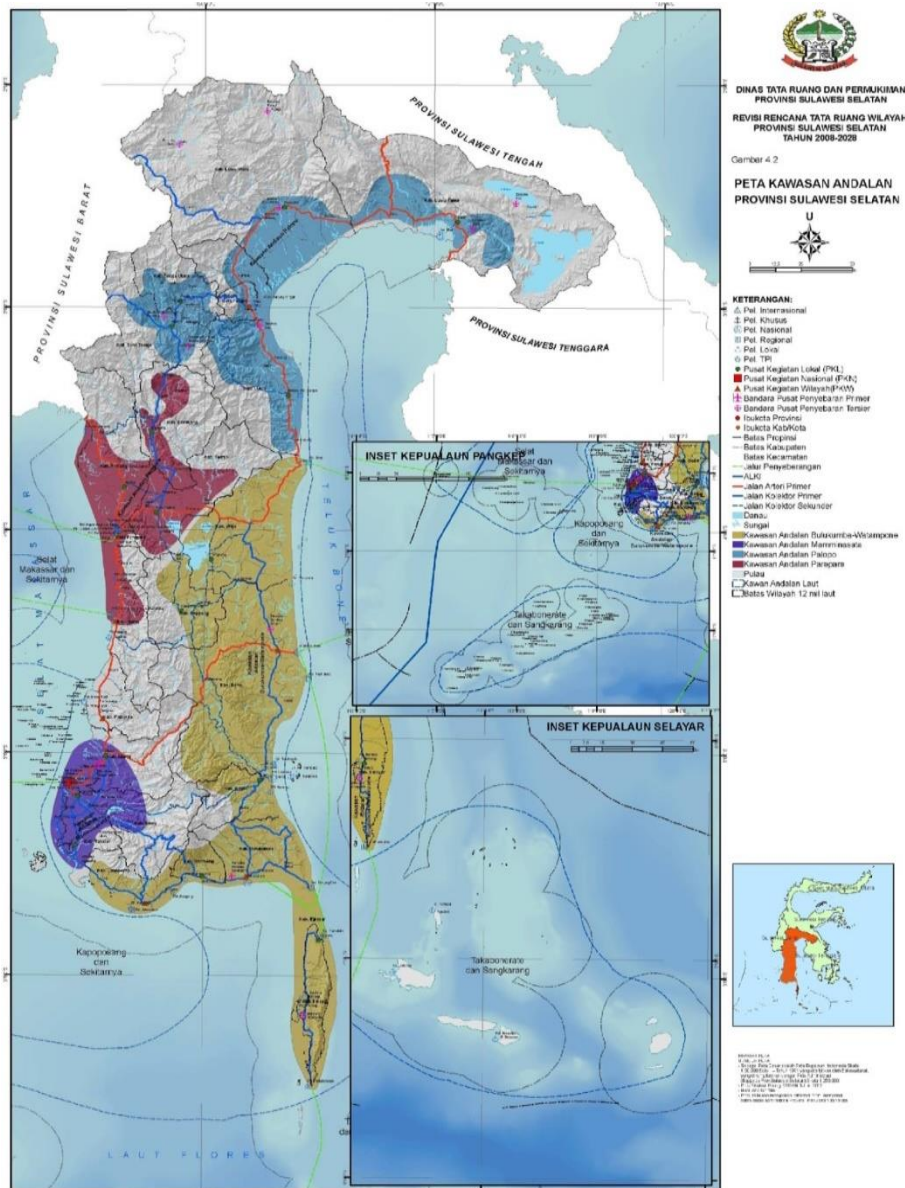
Sumber : Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Prov. Sulsel

#### 2.1.1.4.3. Kawasan Andalan Provinsi

Pengembangan kawasan di Sulawesi Selatan (Gambar II.4), selain didasarkan pada RTRWP juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menetapkan keberadaan Kawasan Andalan Laut dan Kawasan Andalan Darat di Sulawesi Selatan. Kawasan Andalan merupakan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah disekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah. Adapun kawasan andalan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

- a. Kawasan Mamminasata dan sekitarnya (Makassar, Maros, Gowa, Takalar, Pangkep) dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, perikanan, dan agroindustri;
- b. Kawasan Palopo dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan.
- c. Kawasan Bulukumba-Watampone dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan.
- d. Kawasan Parepare dan sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, perikanan, agroindustri dan pertanian.
- e. Kawasan Andalan laut Kapoposang dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata.
- f. Kawasan Andalan laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan pertambangan.
- g. Kawasan Andalan laut Singkarang-Takabonerate dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata.
- h. Kawasan laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

Gambar II.4  
Peta Kawasan Andalan Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Prov. Sulsel

#### 2.1.1.4.4. Kawasan Kelautan dan Perikanan

Sumberdaya kelautan yang dimiliki begitu besar dan beragam namun perlu komitmen bersama untuk mengelola dan mengolahnya secara profesional. Wujud dari komitmen itu adalah harus membangun dan memiliki industri kelautan (maritim) yang kuat, sinergis (terpadu), optimal dan berkelanjutan beserta kebijakan dan sasaran yang tepat dan benar. Termasuk dengan membangun dan mendidik SDM kelautan (kemaritiman) yang mumpuni. Pembangunan kelautan (maritim) untuk wilayah Indonesia Timur khususnya Sulawesi Selatan perlu mendapat perhatian karena memiliki potensi sumberdaya alam, pariwisata, pelabuhan dan transportasi laut dan hasil laut yang cukup memadai. Sehingga untuk mengoptimalkannya perlu pendayagunaan sumberdaya kelautan yang terdiri dari : 1) Pengembangan transportasi laut, 2) Pengembangan perikanan, 3) Pengembangan pariwisata bahari, 4) Pertambangan, 5) Industri maritim, 6) Bangunan kelautan, dan 7) Jasa kelautan.

Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan potensi maritim maka keberhasilannya ditandai oleh adanya kondisi ruang hidup yang memungkinkan masyarakat untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam suasana kehidupan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Kondisi ruang hidup tersebut ditandai oleh: (1) adanya infrastruktur dan akses wilayah yang lancar; (2) kondisi ekonomi, sosial dan budaya, politik dan keamanan yang baik; dan (3) kontribusi sumberdaya alam dalam pembangunan yang optimal.

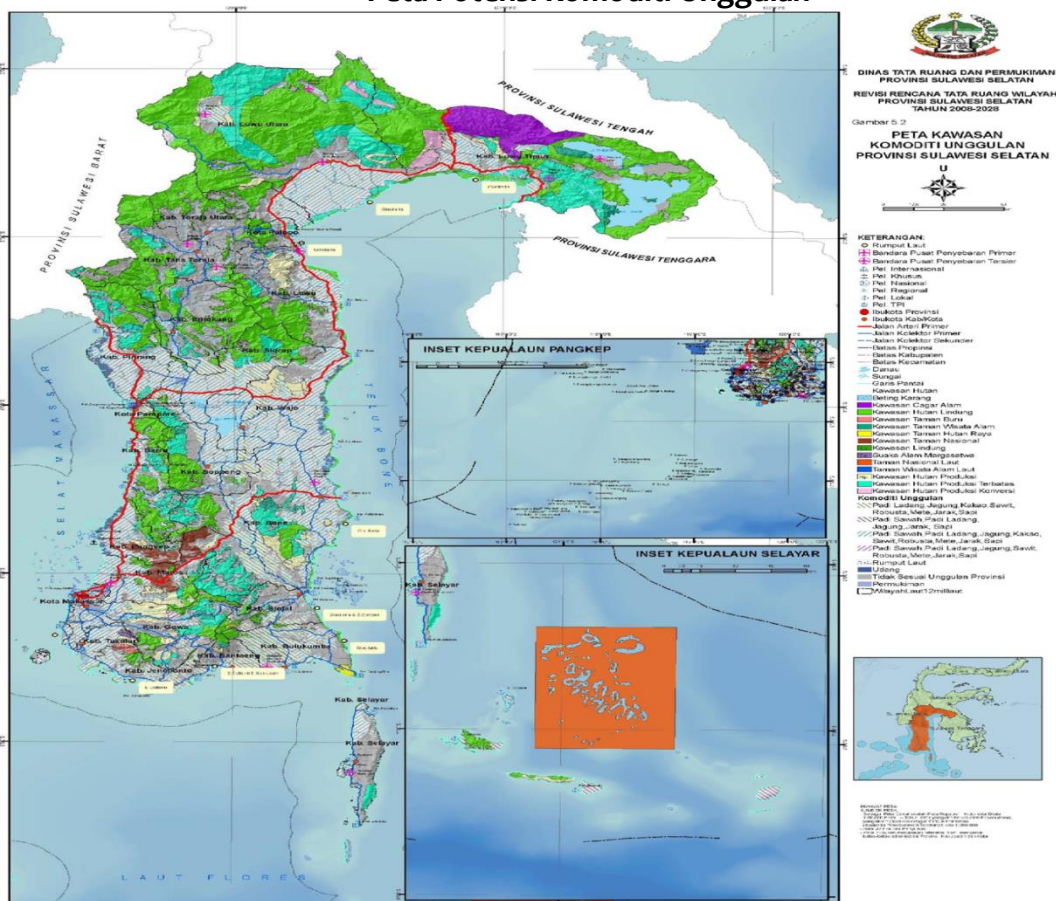


Pengelolaan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana diatur dalam Perda RTRWP Sulawesi Selatan diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pengembangan kawasan budidaya perikanan diprioritaskan pada pengembangan komoditas unggulan udang, yang ditetapkan pada: Kabupaten Barru dengan luasan 2.860,74 ha, Kabupaten Pangkep dengan luasan 8.307,12 ha, Kabupaten Bone dengan luasan 8.401,13 ha, Kabupaten Wajo dengan luasan 9.100,43 ha, dan Kabupaten Pinrang dengan luasan 13.559,01 hektar. Pengawasan atas eksploitasi potensi kemaritiman harus dilakukan secara ketat demi menjamin kelestariannya dan daya produksi kelautan.

**2.1.1.4.5. Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan**

Pengelolaan kawasan peruntukan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan hewan besar, dengan komoditas unggulan berupa komoditas pertanian tanaman pangan dan perikanan. Pengelolaan kawasan pertanian tanaman pangan ditetapkan di seluruh Kabupaten/Kota yaitu; Kabupaten Bantaeng dengan luasan 16.044,24 ha, Kabupaten Barru dengan luasan 18.195,73 ha, Kabupaten Bone dengan luasan 203.883,63 ha, Kabupaten Bulukumba dengan luasan 69.772,85 ha, Kabupaten Enrekang dengan luasan 16.525,21 ha, Kabupaten Gowa dengan luasan 41.249,14 ha, Kabupaten Jeneponto dengan luasan 39.238,05 ha, Kabupaten Luwu dengan luasan 66.279,81 ha, Kabupaten Luwu Timur dengan luasan 55.563,72 ha, Kabupaten Luwu Utara dengan luasan 124.095,96 ha, Kota Makassar dengan luasan 5.465,20 ha, Kabupaten Maros dengan luasan 48.593,69 ha, Kota Palopo dengan luasan 6.032,93 ha, Kabupaten Pangkep dengan luasan 30.352,96 ha, Kota Parepare dengan luasan 4.268,30 ha, Kabupaten Pinrang dengan luasan 76.445,75 ha, Kabupaten Selayar dengan luasan 34.311,28 ha, Kabupaten Sidrap dengan luasan 91.266,84 ha, Kabupaten Sinjai dengan luasan 14.407,44 ha, Kabupaten Soppeng dengan luasan 50.520,92 ha, Kabupaten Takalar dengan luasan 39.663,68 ha, Kabupaten Tana Toraja dengan luasan 3.421,02 ha, Kabupaten Toraja Utara dengan luasan 1.857,66 ha, dan Kabupaten Wajo dengan luasan 183.907,44 ha.

**Gambar II.5**  
**Peta Potensi Komoditi Unggulan**



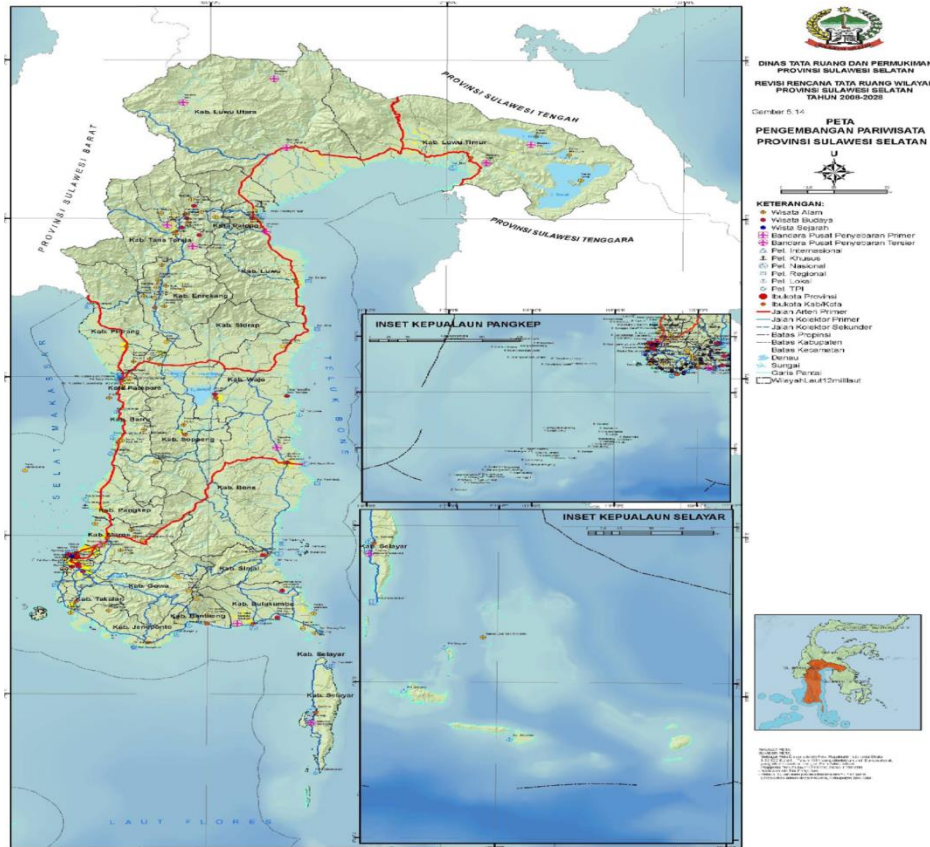
Sumber : Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Prov. Sulsel



#### 2.1.1.4.6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Sulawesi Selatan diarahkan pada perannya sebagai tujuan wisata maupun keberadaannya sebagai objek wisata. Sebaran kawasan peruntukan wisata dapat dilihat pada Gambar II.6.

**Gambar II.6**  
**Peta Kawasan Pariwisata**



Sumber : Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Prov. Sulsel

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Sulawesi Selatan dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kawasan Wisata Alam yang meliputi: Taman Wisata Alam (TWA) Danau Matano – Mahalona dan TWA Danau Towuti di Kabupaten Luwu Timur, TWA Malino di Kabupaten Gowa, TWA Cani Sirenreng di Kabupaten Bone, TWA Lejja di Kabupaten Soppeng, TWA Laut Kepulauan Kapoposang di Kabupaten Pangkep, TWA Danau Tempe -Sidenreng di Kabupaten Wajo dan Sidrap, TWA Laut Kepulauan Spermode di Kawasan Mamminasata, TWA Kebun Raya Enrekang, TWA Kebun Raya Pucak di Kabupaten Maros, TWA Sungai Saddang di Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang, Taman Hutan Raya Abdul Latief di Kabupaten Sinjai, Taman Hutan Raya Nanggala di Kota Palopo, Taman Nasional Laut Takabonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar, Taman Nasional Bantimurung – Bulusarang (Rammang-rammang) di Kabupaten Maros dan Pangkep, Taman Buru Ko'mara di Kabupaten Takalar dan Taman Buru Bangkala di Kabupaten Jeneponto; Goa mampu di Bone, Wisata Alam Bantaeng, Goa Purbakala Passea dan Passohara di Bulukumba,
- b. Kawasan Wisata Budaya yang meliputi: Taman Wisata Budaya (TWB) perdesaan tradisional di Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja, TWB Permukiman Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Taman Miniatur Sulawesi Selatan di Situs Pusat Kerajaan Gowa Benteng Sombaopu di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa; kawasan Wisata pelabuhan perahu tradisional Paotere di Kota Makassar, kawasan Pusat industri perahu tradisional Pinisi di Kabupaten Bulukumba, Kawasan Fort Rotterdam di Kota Makassar, Kawasan Situs Benteng Tallo dan Makam Raja-raja Tallo di Kota Makassar, kawasan Makam Raja-raja Gowa di Kota Makassar, kawasan Makam Syech Yusuf di Kota Makassar, kawasan Masjid Tua Katangka di Kabupaten Gowa, kawasan Museum Saoraja Lapawawoi Karaeng Sigeri di Kabupaten Bone, kawasan Masjid Jami Tua Palopo di Kota

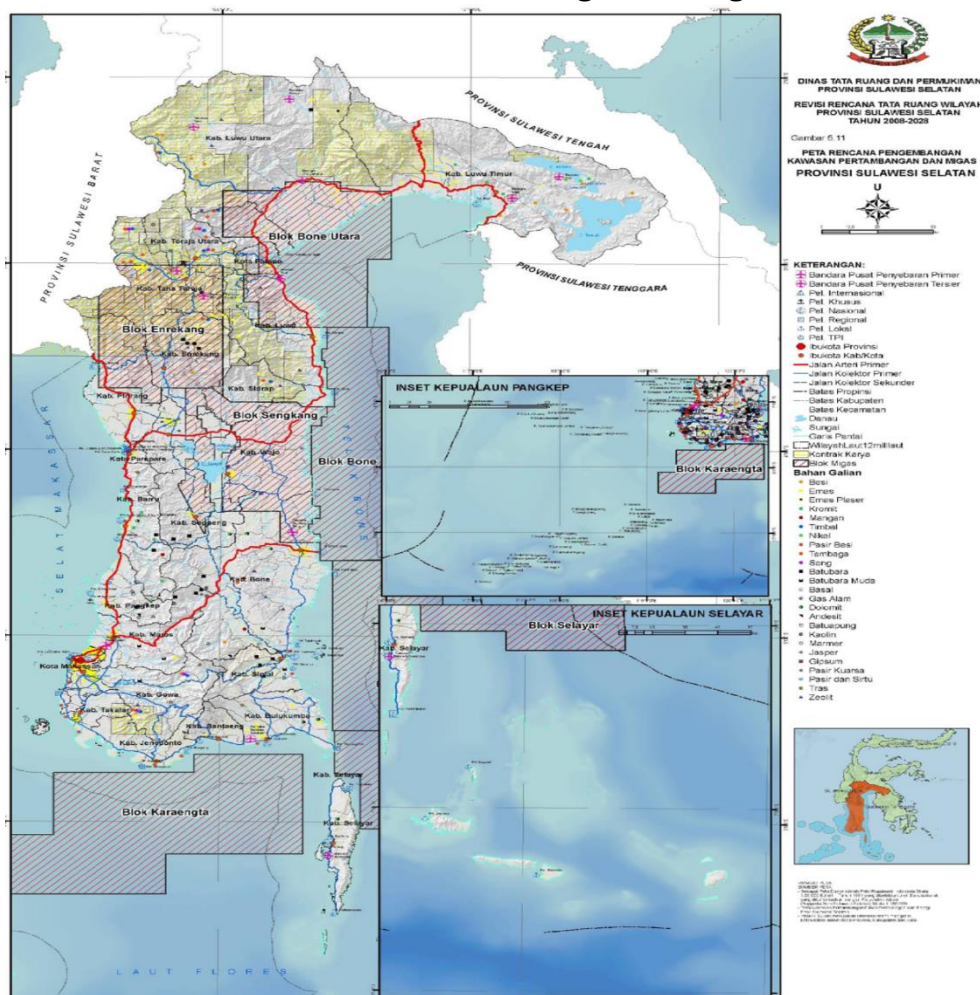
- Palopo, dan kawasan Taman prasejarah Batu Pakek Gong dan Karampuang di Kabupaten Sinjai, Kawasan Wisata Adat Rongkong di Luwu Utara.
- c. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 telah menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2015-2025 guna meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata dan mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Melalui peraturan ini ditetapkan Destinasi Pariwisata Nasional Makassar-Takaboneratoe dan sekitarnya yang meliputi Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Makassar Kota dan sekitarnya, KPPN Maros Karst dan sekitarnya, KPPN Bukukumba dan sekitarnya, KPPN Sinjai dan sekitarnya, KPPN Selayar dan sekitarnya dan KPPN Takabonerate dan sekitarnya dan Destinasi Pariwisata Nasional Toraja-Lorelindu dan sekitarnya yang meliputi KPPN Sengkang dan sekitarnya, KPPN Toraja dan sekitarnya, dan KPPN Palopo dan sekitarnya.

#### 2.1.1.4.7. Kawasan Peruntukan Pertambangan Dan Migas

Pengelolaan kawasan pertambangan berupa kawasan potensial pengembangan minyak dan gas bumi ditetapkan pada 8 blok wilayah pertambangan minyak dan gas bumi (Gambar II.6) yaitu:

- Blok Segeri di Selat Makassar;
- Blok Bone di Teluk Bone;
- Blok Enrekang di Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, dan Pinrang;
- Blok Bone Utara di Kabupaten Luwu dan Kota Palopo;
- Blok Sengkang di Kabupaten Wajo, Sidenreng Rappang, Soppeng, dan Bone;
- Blok Kambuno di perairan laut Kabupaten Bone, Sinjai dan Bulukumba;
- Blok Karaengta di perairan laut Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, dan Kepulauan Selayar;
- Blok Selayar di perairan laut Kabupaten Bulukumba dan Kepulauan Selayar.

**Gambar II.7**  
**Peta Kawasan Pertambangan dan Migas**



Sumber : Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Prov. Sulsel



#### 2.1.1.4.8. Kawasan Peruntukan Industri

Pengelolaan kawasan peruntukan industri di Sulawesi Selatan dikategorikan dalam kawasan industri skala besar dan kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah. Pengelolaan kawasan peruntukan industri di Sulawesi Selatan ditetapkan di:

- Kawasan industri skala besar diarahkan pada Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa;
- Kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah diarahkan pada: Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Jeneponto.

#### 2.1.1.4.9. Kawasan Peruntukan Perdagangan

Pengelolaan kawasan peruntukan perdagangan di Sulawesi Selatan dikategorikan dalam kawasan perdagangan skala besar dan kawasan perdagangan skala menengah. Pengelolaan kawasan peruntukan perdagangan di Sulawesi Selatan ditetapkan di:

- Kawasan perdagangan skala besar diarahkan pada PKN Mamminasata, dan Kawasan Perkotaan di PKW yaitu Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Bulukumba;
- Kawasan perdagangan skala menengah diarahkan pada Kawasan Strategis Provinsi yaitu KEK Barru, dan Kawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia di Kawasan Pelabuhan Pamatata.

#### 2.1.1.4.10. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)

Saat ini, sistem kelistrikan Sulawesi Selatan memiliki kapasitas daya mampu 1.230 MW dengan beban puncak 1.002 MW. Dengan kata lain, besaran cadangan daya mencapai 228 MW atau rasio reserve margin 18,5%. Pada Tahun 2018, kapasitas daya mampu Sulawesi Selatan diprediksi mencapai 1.973 MW dengan beban puncak sebesar 1.475 MW, sehingga daya cadangan Sulawesi Selatan diprediksi mencapai 33% atau melampaui ambang batas ideal. Bahkan pada 2020, cadangan daya listrik di Sulsel diprediksi bisa berada pada level 55% atau ekuivalen 1.176 MW dengan asumsi daya mampu sebesar 3.291 MW, sedangkan beban puncak 2.115 MW.

Ketersediaan listrik serta penambahan pembangkit yang relatif agresif tersebut menjadi sebuah sinyal dorongan akselerasi perekonomian daerah. Ketersediaan pasokan listrik dengan cadangan daya yang terus membesar tersebut bahkan bisa menjadi momentum bagi Sulsel untuk bertransformasi menjadi lumbung energi dan melengkapi predikat daerah yang sebelumnya sebagai salah satu lumbung pangan di Tanah Air. Namun ketersediaan serta penambahan pembangkitan memerlukan dukungan peningkatan kapasitas transmisi dan konsistensi pelayanan serta pemerataan distribusi listrik guna mendukung kebijakan pengembangan industri

**Gambar II.8**  
**Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)**



Sumber : Kementerian ESDM, Olah Data : Michael Agustinus

**Gambar II.9**  
**Pengerjaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)**



Sumber : Jendela Nasional.com

Pemenuhan kebutuhan energi yang berasal dari energi fosil yang keberadaannya akan semakin berkurang akan berdampak terhadap perubahan iklim. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah melalui kebijakan energi nasional yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 menyatakan bahwa energi yang berkelanjutan adalah modal pembangunan melalui pengembangan energi baru terbarukan sebagai focus utama mencapai kedaulatan energi. Salah satu program pemerintah terkait pemanfaatan energi baru terbarukan yang menjadi focus pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah pemanfaatan energi terbarukan dari hidro dan bayu. Pemerintah melalui RUPTL Tahun 2017-2016 menyatakan bahwa potensi tenaga air yang dapat dikembangkan menjadi PLTA di Sulawesi Selatan sebesar 1.836 MW dan yang dapat dikembangkan menjadi PLTM sebesar 160 MW yang antara lain meliputi Sinjai dengan potensi 50 kW, Bakarlu dengan kapasitas 126 MW, dan Bili-Bili dengan potensi 20 MW.

Selain potensi energi air, Sulawesi Selatan juga berlimpah akan ketersediaan energi bayu (angin). Saat ini di Sulawesi Selatan sedang dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang merupakan investasi asing bekerjasama dengan perusahaan Indonesia di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kapasitas 75 MW dan di Kabupaten Jeneponto dengan kapasitas 60 MW. Berdasarkan hasil pemetaan potensi pengembangan energi bayu melalui PLTB, maka di Sulawesi Selatan masih dapat dikembangkan beberapa wilayah untuk pengembangan PLTB yang meliputi antara lain Kabupaten Takalar dengan kapasitas 20 MW, Bantaeng dengan kapasitas 84 MW, Takalar II dengan kapasitas II dengan kapasitas 60 MW, Sidrap II dengan kapasitas 45 MW dan Selayar dengan kapasitas 5 MW.

#### **2.1.1.5. Aspek Demografi**

Perkembangan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan, dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun selama dua tahun terakhir sebesar 0,99. Jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada Tahun 2015 berjumlah sebanyak 8.520.304 jiwa yang meningkat menjadi sebanyak 8.690.294 jiwa pada Tahun 2017, dan diproyeksikan pada Tahun 2018 akan bertambah menjadi sebanyak 8.776.888 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota yang terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan adalah kota Palopo dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,34 persen, sedangkan laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota yang terkecil adalah kabupaten Soppeng dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,08 persen.

**Tabel II.6**  
**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut**  
**Kabupaten Kota**

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Penduduk (Ribuan)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018*	
1	Selayar	130,199	130,605	133,003	134,426	1.07
2	Bulukumba	410,485	410,485	415,713	418,332	0.63
3	Bantaeng	183,386	184,517	185,581	186,694	0.60
4	Jeneponto	355,599	357,807	359,787	361,910	0.59
5	Takalar	286,906	289,978	292,983	296,059	1.05
6	Gowa	722,702	735,493	748,200	761,294	1.75
7	Sinjai	238,099	239,689	241,208	242,776	0.65
8	Maros	339,300	342,890	346,383	349,985	1.04
9	Pangkep	323,597	326,700	329,791	332,924	0.95
10	Barru	171,217	171,906	172,767	173,544	0.45
11	Bone	742,912	746,973	751,026	755,082	0.54
12	Soppeng	226,116	226,305	26,466	226,647	0.08
13	Wajo	393,218	394,495	395,583	396,770	0.30
14	Sidrap	289,787	292,985	296,125	299,353	1.09
15	Pinrang	366,789	369,595	372,230	374,985	0.74
16	Enrekang	199,998	201,614	203,320	205,008	0.83
17	Luwu	350,218	353,277	356,305	359,405	0.87
18	Tana Toraja	228,984	230,195	231,519	232,792	0.55
19	Luwu Utara	302,687	305,372	308,001	310,681	0.87
20	Luwu Timur	275,595	281,822	287,874	294,207	2.20
21	Toraja Utara	225,516	226,959	228,414	229,876	0.64
22	Makassar	1,449,401	1,469,601	1,489,011	1,509,262	1.36
23	Pare Pare	138,699	140,423	142,097	143,831	1.22
24	Palopo	168,894	172,916	176,907	181,047	2.34
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>8,520,304</b>	<b>8,606,375</b>	<b>8,690,294</b>	<b>8,776,888</b>	<b>0.99</b>

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

#### 2.1.1.5.1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk mencapai 9,48 juta jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,72% per tahun. Pada tahun 2014 tingkat kepadatan penduduk Sulawesi Selatan adalah 202,46 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara pada tahun 2017 kepadatan penduduk Sulawesi Selatan menunjukkan nilai 202,93 jiwa/km<sup>2</sup>. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Kegunaan data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat disebabkan angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian. Sedangkan struktur penduduk di wilayah Sulawesi Selatan mengalami perubahan dari waktu ke waktu dikarenakan proses demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.

**Tabel II.7**  
**Indikator Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2014-2017**

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	9.458.378	9.473.684	9.521.658	9.522.503
2	Pertumbuhan Penduduk	%	0.0046727418	0.0016182478	0.0050445000	-0.0043252970
3	Kepadatan Penduduk	Orang/ Km <sup>2</sup>	202,46	202,78	203,81	202,93
4	Sex Ratio	%	99,24	99,02	99,53	99,28
5	Jumlah Rumah Tangga	Ruta	1.938.938	1.956.593	1.976.250	1.995.421
6	Rata-rata ART	Orang/ Ruta	4.35	4.35	4.35	4.36

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2018

Berdasarkan rasio jenis kelamin, pada beberapa kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, yaitu pada kelompok umur 0-4 tahun dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,2, kemudian kelompok umur 10-14 tahun dengan rasio jenis kelamin sebesar 105,70, kelompok umur 15-19 tahun dengan rasio jenis kelamin sebesar 105,58, dan kelompok umur 20-24 tahun dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,91. Namun pada kelompok umur 65 tahun ke atas, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 73,01.

**Tabel II.8**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
1	0 - 4	428,080	411,549	839,629	104.02
2	5 - 9	423,906	439,983	863,889	96.35
3	10 - 14	412,857	390,597	803,454	105.70
4	15 - 19	417,116	395,087	812,203	105.58
5	20 - 24	388,924	381,620	770,544	101.91
6	25 - 29	338,487	350,192	688,679	96.66
7	30 - 34	305,155	327,294	632,449	93.24
8	35 - 39	293,576	316,563	610,139	92.74
9	40 - 44	285,122	304,397	589,519	93.67
10	45 - 49	259,883	283,744	543,627	91.59
11	50 - 54	213,475	238,848	452,323	89.38
12	55 - 59	168,015	194,895	362,910	86.21
13	60 - 64	129,128	148,651	277,779	86.87
14	65+	223,551	306,192	529,744	73.01
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>4,287,263</b>	<b>4,489,625</b>	<b>8,776,888</b>	<b>95.49</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2018

Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2030 Indonesia akan menghadapi fenomena bonus demografi. Fenomena bonus demografi terjadi akibat perubahan struktur umur penduduk, yaitu proporsi penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun).



Perubahan struktur penduduk menurut umur tersebut mempengaruhi besarnya angka rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan memerlukan pengelolaan yang baik, agar dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka akan semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2017-2018**

No	Kabupaten /Kota	2017			2018		
		Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1	Selayar	63,968	69,035	92.66	64,652	69,410	93.15
2	Bulukumba	96,426	219,287	89.57	197,663	220,165	89.78
3	Bantaeng	89,494	96,087	93.14	90,031	97,797	92.06
4	Jeneponto	173,771	186,016	93.42	174,796	183,795	95.10
5	Takalar	140,870	152,113	92.61	142,349	154,359	92.22
6	Gowa	368,234	379,966	96.91	374,678	383,873	97.60
7	Sinjai	116,766	124,442	93.83	117,525	126,166	93.15
8	Maros	169,433	176,950	95.75	171,195	179,661	95.29
9	Pangkep	159,611	170,180	93.79	161,127	172,685	93.31
10	Barru	83,082	89,685	92.64	83,456	91,437	91.27
11	Bone	358,889	392,137	91.52	360,827	395,061	91.33
12	Soppeng	106,591	119,875	88.92	106,676	120,838	88.28
13	Wajo	189,379	206,204	91.84	189,947	207,717	91.45
14	Sidrap	145,003	151,122	95.95	146,584	153,648	95.40
15	Pinrang	180,586	191,644	94.23	181,922	193,936	93.81
16	Enrekang	102,117	101,203	100.90	102,965	102,903	100.06
17	Luwu	174,829	181,476	96.34	176,350	182,908	96.41
18	Tana Toraja	117,030	114,489	102.22	117,674	115,157	102.19
19	Luwu Utara	154,594	153,407	100.77	155,939	154,578	100.88
20	Luwu Timur	147,984	139,890	105.79	151,240	143,756	105.21
21	Toraja Utara	114,509	113,905	100.53	115,242	114,490	100.66
22	Makassar	737,146	751,865	98.04	747,171	761,155	98.16
23	Pare Pare	69,822	72,275	96.61	70,674	73,065	96.73
24	Palopo	85,967	90,940	94.53	86,579	91,065	95.07
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>4,246,101</b>	<b>4,444,193</b>	<b>95.54</b>	<b>4,287,263</b>	<b>4,489,625</b>	<b>95.49</b>

Berdasarkan rasio jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan di Sulawesi Selatan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki dengan persentase penduduk perempuan sebesar 51,15 persen dan persentase penduduk laki-laki sebesar 48,15 persen. Namun terdapat beberapa kabupaten yang jumlah

penduduk laki-lakinya lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan yaitu kabupaten Luwu Timur dengan rasio jenis kelamin sebesar 105,21, kabupaten Tana Toraja dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,19, kabupaten Luwu Utara dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,88, kabupaten Toraja Utara dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,66, dan kabupaten Enrekang dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,06.

**Tabel II.9**  
**Rasio Ketergantungan Tahun 2018**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Rasio Ketergantungan	Proporsi Penduduk Usia Produktif
		Laki-Laki	Perempuan		
1	0 - 14	851.986	851.532	52,90	65,4
2	15 - 64	2.798.881	2.941.291		
3	65+	223.551	306,192		

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019

Angka rasio ketergantungan Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan rasio ketergantungan dari 52,10 pada tahun 2017 menjadi sebesar 52,90 pada tahun 2018. Angka rasio ketergantungan Sulawesi Selatan tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 53 orang penduduk usia tidak produktif.

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa beban tanggungan penduduk usia produktif laki-laki lebih tinggi yaitu sebesar 52,64 dibandingkan dengan penduduk usia produktif perempuan yang sebesar 53,18. Angka rasio ketergantungan juga menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan telah mengalami bonus demografi yang ditunjukkan dengan proporsi penduduk usia produktif sebesar 65,4 yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif.

**Tabel II.10**  
**Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1	Kepulauan Selayar	134.426	991
2	Bulukumba	418.332	3.256
3	Bantaeng	186.694	4.717
4	Jeneponto	361.910	5.122
5	Takalar	296.059	5.225
6	Gowa	761.294	4.042
7	Sinjai	242.776	3.039
8	Maros	349.985	2.162
9	Pangkajene Kepulauan	332.924	2.941
10	Barru	173.544	1.477
11	Bone	755.082	1.656
12	Soppeng	226.647	1.456
13	Wajo	396.770	1.585
14	Sidenreng Rappang	299.353	1.590

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
15	Pinrang	374.985	1.912
16	Enrekang	205.008	1.149
17	Luwu	359.405	1.075
18	Tana Toraja	232.792	1.170
19	Luwu Utara	310.681	414
20	Luwu Timur	294.207	424
21	Toraja Utara	229.876	1.891
22	Makassar	1.509.262	75.743
23	Parepare	143.831	14.480
24	Palopo	181.047	7.156
<b>SULAWESI SELATAN</b>		<b>9.552.503</b>	

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017

#### 2.1.1.6. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air. Informasi status daya dukung lingkungan dapat menjadi informasi dasar dalam mengkaji perencanaan suatu wilayah agar tidak berdampak lingkungan. Hasil kajian terhadap status daya dukung lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Selatan untuk pangan dan air bersih menggunakan pendekatan sistem grid. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa untuk status penyediaan bahan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan masih cukup bagus dimana 99,4% wilayahnya belum melampaui ambang batas. Sedangkan untuk status penyediaan air bersih 100% wilayahnya belum terlampaui. Akan tetapi nilai tersebut sangat perlu diperhatikan mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang, sehingga kedepannya jika tanpa pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup maka ketersediaan yang ada saat ini akan semakin defisit.

Analisis status daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan teknik pengolahan data spasial, sehingga untuk membandingkan data ketersediaan dan kebutuhan dilakukan dengan mengumpulkan data potensi baik pangan dan air serta kebutuhan pangan dan air berbasis spasial. Adapun standar yang digunakan untuk menghitung kebutuhan pangan masyarakat adalah standar angka kecukupan energi(AKE)yaitu m<sup>3</sup>/tahun/kapita. Adapun hasil perhitungan kebutuhan pangan dan air di Sulawesi Selatan disajikan pada Tabel II.7 berikut.

**Tabel II.11**  
**Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan dan Air**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Kabupaten/ Kota	Daya Dukung Air		Daya Dukung Pangan	
		Ketersediaan Air (m <sup>3</sup> )	Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> )	Ketersediaan Pangan (kkal)	Kebutuhan Pangan (kkal)
1	Bantaeng	13.207.132.029,30	334.276.617,14	381.231.535.589,20	123.154.741.250,00
2	Barru	30.555.654.693,98	545.607.631,74	632.417.004.096,43	185.959.853.250,00
3	Bone	86.853.621.918,66	3.532.169.849,69	3.606.385.505.072,13	1.000.032.037.000,00
4	Bulukumba	35.577.450.403,97	1.102.441.867,51	965.145.139.948,67	345.695.715.750,00
5	Enrekang	28.042.648.239,89	660.428.672,64	871.516.999.291,37	316.700.772.750,00
6	Gowa	51.416.156.653,79	1.208.815.020,19	1.323.334.268.129,08	439.120.988.000,00
7	Jeneponto	32.615.406.153,58	798.752.266,08	925.869.108.918,79	261.674.102.750,00
8	Pare-Pare	2.275.751.598,53	48.446.958,74	52.928.199.277,17	21.196.882.250,00

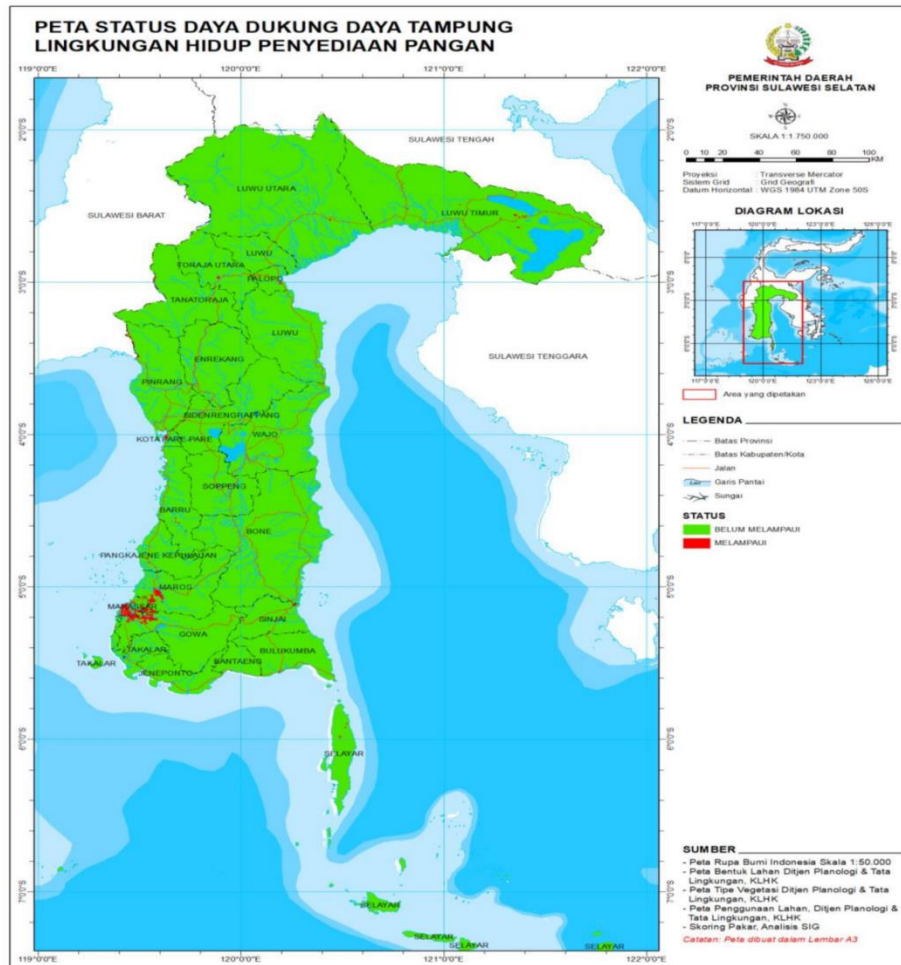
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

No	Kabupaten/ Kota	Daya Dukung Air		Daya Dukung Pangan	
		Ketersediaan Air (m <sup>3</sup> )	Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> )	Ketersediaan Pangan (kkal)	Kebutuhan Pangan (kkal)
9	Luwu	31.283.925.765,53	1.218.157.190,96	1.868.257.117.924,51	409.262.820.000,00
10	Luwu Timur	116.297.005.372,44	979.291.990,33	3.680.421.183.912,68	300.910.818.000,00
11	Luwu Utara	100.524.004.886,09	1.448.698.478,77	3.674.996.781.617,69	313.732.848.250,00
12	Makassar	5.102.519.376,17	83.589.912,53	102.340.577.049,49	70.804.068.750,00
13	Maros	27.288.025.525,12	828.980.209,64	807.467.046.487,89	281.485.901.250,00
14	Palopo	3.614.529.014,26	121.702.499,64	173.799.582.855,48	42.190.514.250,00
15	Pangkajene Kepulauan	19.609.838.624,31	548.156.258,38	478.054.522.400,42	171.412.942.500,00
16	Pinrang	64.175.477.823,26	1.544.949.046,65	1.705.801.653.957,59	435.785.800.500,00
17	Kepulauan Selayar	31.302.709.923,63	191.798.110,70	493.321.663.914,85	87.648.727.500,00
18	Sidenreng Rappang	24.054.015.484,03	1.496.493.874,26	1.485.400.950.831,03	405.181.335.250,00
19	Sinjai	22.598.794.834,56	683.842.119,05	593.801.262.153,45	256.939.706.000,00
20	Soppeng	11.682.994.864,81	811.765.910,18	1.022.938.778.905,09	315.472.639.000,00
21	Takalar	19.876.784.917,12	692.269.506,59	530.214.766.865,93	179.929.834.250,00
22	Tana Toraja	45.575.264.603,58	553.347.018,36	844.661.408.211,19	250.717.423.250,00
23	Toraja Utara	23.039.425.764,89	571.527.801,69	625.333.077.553,24	224.307.446.750,00
24	Wajo	29.326.878.846,27	2.798.876.683,13	2.905.045.328.720,86	683.382.273.000,00
<b>SULAWESI SELATAN</b>		<b>855.896.017.317,75</b>	<b>22.804.385.494,59</b>	<b>29.750.683.463.684,20</b>	<b>7.122.700.191.500,00</b>

Sumber : Laporan KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

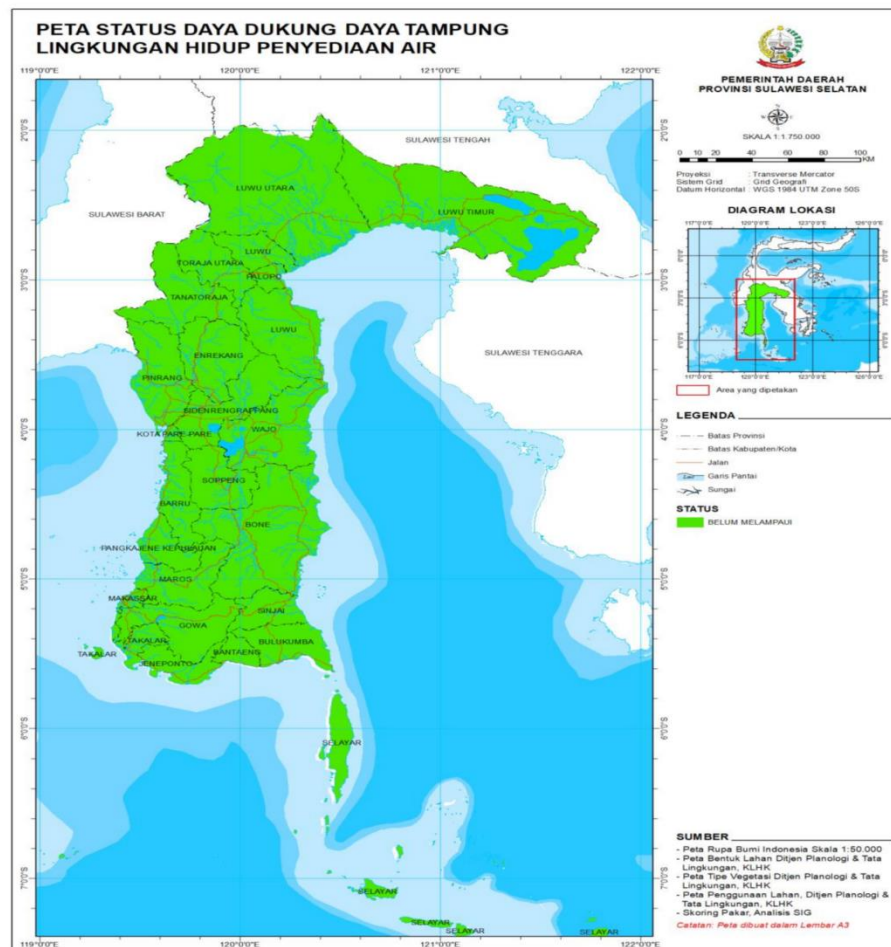
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk sektor pangan dan air hampir pada setiap kabupaten belum terlampaui. Analisis terkait perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pada setiap kabupaten sangat diperlukan untuk mengukur berapa ambang batas penyediaan, mengingat pertumbuhan penduduk semakin meningkat sehingga akan meningkatkan kebutuhan, yang mana yang akan datang dapat menyebabkan terlampauinya daya dukung wilayah. Wilayah-wilayah yang diperkirakan akan melampaui ambang batasnya dapat menjadi zona yang terbatas terhadap program-program perencanaan pembangunan wilayah dikarenakan dua komponen analisis yang digunakan yakni pangan dan air merupakan komponen penentu bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Akan tetapi banyak teknik yang dapat dilakukan ketika terjadi kekurangan ketersediaan di suatu wilayah yakni dapat dilakukan dengan mendatangkan sumbernya dari luar wilayah atau dari wilayah-wilayah yang masih surplus ketersediaannya. Pada Gambar II.10 menunjukkan Peta Status Penyediaan Bahan Pangan di Sulawesi Selatan dan Gambar II.11 menunjukkan Status Penyediaan Air Bersih di Sulawesi Selatan.

Gambar II.10  
Peta Status Penyediaan Bahan Pangan Sulawesi Selatan



Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Gambar II.11  
Peta Status Penyediaan Air Bersih di Sulawesi Selatan



Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018



Berdasarkan informasi dari Gambar II.10 dan II.11 diatas diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa wilayah yang telah melampaui ambang batas yakni antara kemampuan alam menyediakan pelayanan dalam hal penyediaan bahan pangan terhadap kebutuhan yang digambarkan dari besarnya konsumsi pangan yang dibutuhkan masyarakat diwilayah tersebut. Adapun rincian luasan status daya dukung wilayah penyediaan bahan pangan dan penyediaan air disajikan pada Tabel II.8 berikut:

**Tabel II.8**  
**Status Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Bahan Pangan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Kabupaten / Kota	Status Daya Dukung Pangan			
		Wilayah yang Masih Mendukung		Wilayah yang Tidak Masih Mendukung	
		Ha	(%)	Ha	(%)
1	Bantaeng	39.780,51	0,9	149,64	
2	Barru	120.229,51	2,6	426,40	0,00
3	Bone	459.634,90	10,1		0,01
4	Bulukumba	116.518,73	2,6	217,96	0,00
5	Enrekang	185.119,33	4,1		0,00
6	Gowa	175.985,12	3,9	5.573,47	0,12
7	Jeneponto	81.899,50	1,8		0,00
8	Pare-Pare	9.464,33	0,2	440,31	0,01
9	Luwu	305.116,37	6,7		0,00
10	Luwu Timur	679.403,59	14,9	1.506,46	0,03
11	Luwu Utara	739.711,51	16,3	482,57	0,01
12	Makassar	10.419,31	0,2	6.921,62	0,15
13	Maros	139.021,75	3,1	6.053,87	0,13
14	Palopo	24.627,21	0,5	341,71	0,01
15	Pangkajene Kepulauan	82.258,37	1,8	258,39	0,01
16	Pinrang	187.623,96	4,1	1.095,86	0,02
17	Kepulauan Selayar	116.549,16	2,6	420,45	0,01
18	Sidenreng Rappang	176.789,66	3,9		0,00
19	Sinjai	87.928,12	1,9	257,48	0,01
20	Soppeng	137.592,54	3,0	85,05	0,00
21	Takalar	56.199,80	1,2	187,76	0,00
22	Tana Toraja	204.009,53	4,5	742,31	0,02
23	Toraja Utara	121.298,11	2,7	429,69	0,01
24	Wajo	263.831,72	5,8	171,07	0,00
<b>SULAWESI SELATAN</b>		<b>4.521.012,67</b>	<b>99,4</b>	<b>25.762,03</b>	<b>0,57</b>

Sumber : Laporan KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

**Tabel II.9**  
**Status Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Kabupaten / Kota	Status Daya Dukung Air Wilayah yang Masih Mendukung	
		Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Bantaeng	39.930,15	0,88
2	Barru	120.655,90	2,65
3	Bone	459.634,90	10,11
4	Bulukumba	116.736,69	2,57
5	Enrekang	185.119,33	4,07
6	Gowa	181.558,59	3,99
7	Jeneponto	81.899,50	1,80

No.	Kabupaten / Kota	Status Daya Dukung Air Wilayah yang Masih Mendukung	
		Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
8	Pare-Pare	9.904,64	0,22
9	Luwu	305.116,37	6,71
10	Luwu Timur	680.910,05	14,98
11	Luwu Utara	740.194,08	16,28
12	Makassar	17.340,93	0,38
13	Maros	145.075,63	3,19
14	Palopo	24.968,91	0,55
15	Pangkajene Kepulauan	82.516,76	1,81
16	Pinrang	188.719,81	4,15
17	Kepulauan Selayar	116.969,61	2,57
18	Sidenreng Rappang	176.789,66	3,89
19	Sinjai	88.185,60	1,94
20	Soppeng	137.677,60	3,03
21	Takalar	56.387,55	1,24
22	Tana Toraja	204.751,83	4,50
23	Toraja Utara	121.727,80	2,68
24	Wajo	264.002,79	5,81
<b>SULAWESI SELATAN</b>		<b>4.546.774,70</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Laporan KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan ini mampu mendukung kebutuhan pangan dan air diwilayahnya, bahkan untuk saat ini dapat mengeksplor kelebihan potensi pangan dan air ke wilayah disekitarnya.

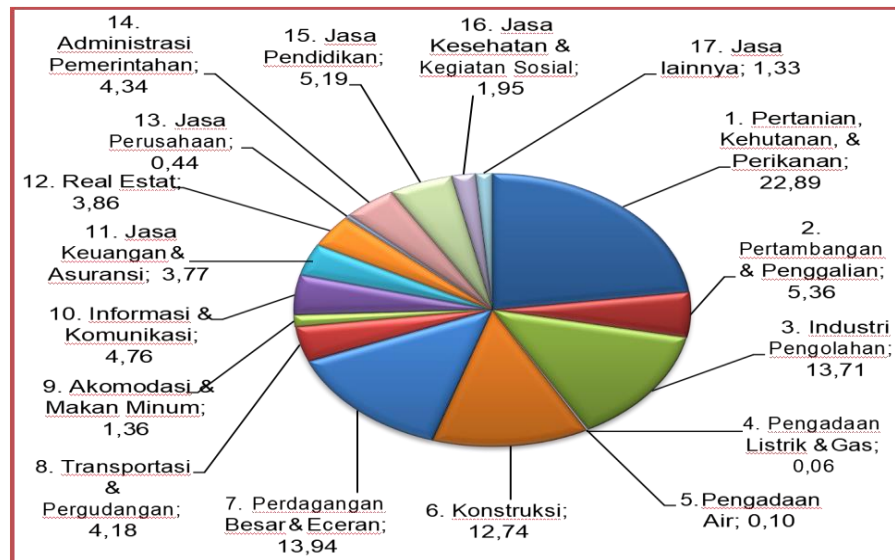
### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

##### 2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2017 tumbuh 7,23%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,66%, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,74% serta Informasi dan Komunikasi sebesar 10,52%. Struktur perekonomian Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha tahun 2017 masih didominasi oleh empat lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,89%); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,94%); Industri Pengolahan (13,71%) serta Konstruksi (12,74%). Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan IV tahun 2017 mengalami kontraksi 4,19% bila dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini didorong oleh intensitas hujan yang cukup tinggi pada tahun 2017 menyebabkan beberapa komoditi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan seperti padi palawija mengalami gagal panen. Kontraksi ekonomi terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh minus 22,64%. Selain Pertanian, lapangan usaha yang juga mengalami kontraksi antara lain Pertambangan dan Penggalan (-2,86%), Pengadaan Air (-1,13%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-2,42%) serta Transportasi dan Pergudangan (-1,20%).

**Grafik II.1**  
**Struktur Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2017

**Tabel II.10**  
**Pertumbuhan PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Pertumbuhan PDRB</b>						
Sulawesi Selatan	%	7,54	7,19	7,42	7,23	7,07
Nasional	%	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Trend pertumbuhan ekonomi tersebut, sejalan dengan perkembangan secara nasional. Pola perkembangan ekonomi nasional juga menunjukkan besaran peningkatan yang menurun antara Tahun 2014-2018 sebesar 0,39%. Sebagaimana yang terlihat pada Tahun 2016, baik provinsi dan nasional mengalami perlambatan, dan memasuki Tahun 2017, provinsi dan nasional mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan kondisi nasional pada umumnya, laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selalu berada diatas rata-rata nasional.

**Tabel II.11**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2017**

No	Kabupaten / Kota	Laju Pertumbuhan PDRB				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bantaeng	9,00	8,33	6,64	7,39	7,32
2	Barru	7,87	7,35	6,32	6,01	6,48
3	Bone	6,30	9,53	8,30	9,01	8,43
4	Bulukumba	7,77	8,54	5,62	6,79	6,92
5	Enrekang	5,84	5,99	6,91	7,64	6,89
6	Gowa	9,42	7,17	6,79	7,61	7,23
7	Jeneponto	6,64	7,93	6,54	8,37	8,26
8	Pare-Pare	7,95	6,33	6,30	6,87	6,99
9	Luwu	7,74	8,81	7,26	7,88	6,79
10	Luwu Timur	6,30	8,10	6,42	1,58	3,07
11	Luwu Utara	7,39	8,82	6,67	7,49	7,60
12	Makassar	8,55	7,39	7,55	8,03	8,23
13	Maros	6,28	4,73	8,44	9,50	6,81
14	Palopo	8,02	7,05	6,47	6,95	7,19
15	Pangkajene Kepulauan	9,33	10,41	7,63	8,31	6,60

No	Kabupaten / Kota	Laju Pertumbuhan PDRB				
		2013	2014	2015	2016	2017
16	Pinrang	7,27	8,11	8,24	7,44	7,86
17	Kepulauan Selayar	8,18	9,01	8,83	7,35	7,61
18	Sidenreng Rappang	6,93	7,87	8,03	8,81	7,11
19	Sinjai	7,79	6,98	7,55	7,09	7,23
20	Soppeng	7,23	6,89	5,11	8,14	8,34
21	Takalar	8,80	9,76	8,42	9,61	7,39
22	Tana Toraja	7,19	6,80	6,85	7,32	7,50
23	Toraja Utara	9,74	7,64	7,76	8,04	8,22
24	Wajo	6,92	9,67	7,06	4,98	5,22
<b>SULAWESI SELATAN</b>		<b>7,62</b>	<b>7,54</b>	<b>7,19</b>	<b>7,42</b>	<b>7,23</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Memperhatikan lebih jauh pada struktur perekonomian Sulsel, berdasarkan Lapangan Usaha, diketahui bahwa sektor primer, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kontributor yang paling besar, pada Tahun 2017 nilai PDRB-ADHK sektor ini sebesar Rp 61,47 trilyun dari total PDRB Sulsel, Sektor kedua adalah Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ini sebesar Rp. 42,48 Trilyun. Sektor ketiga adalah Industri Pengolahan dengan nilai PDRB pada Tahun 2017 sebesar Rp. 40,41 trilyun. Sektor keempat adalah Konstruksi, dengan kontribusi sebesar Rp. 34,76 Trilyun terhadap total PDRB. (Tabel II.10).

**Tabel II.12**  
**Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

LAPANGAN USAHA	NILAI PDRB-ADHK (Trilyun Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	51,08	53,96	58,44	61,47	64,87
Pertambangan dan Galian	14,71	15,87	15,96	16,72	16,78
Industri Pengolahan	33,28	35,51	38,45	40,41	40,79
Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,21	0,26	0,27	0,29
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,30	0,30	0,32	0,34	0,37
Konstruksi	27,67	29,97	31,99	34,76	37,87
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,64	34,92	38,36	42,48	47,13
Transportasi dan Pergudangan	8,60	9,19	9,86	10,68	11,78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,18	3,37	3,66	4,08	4,61
Informasi dan Komunikasi	14,56	15,71	16,99	18,78	21,03
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,07	8,66	9,84	10,28	10,75
Real Estate	8,56	9,20	9,78	10,22	10,70
Jasa Perusahaan	1,00	1,06	1,14	1,24	1,36
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	10,56	11,38	11,22	11,93	13,11
Jasa Pendidikan	12,47	13,38	14,30	15,69	17,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,43	4,85	5,25	5,72	6,21
Jasa Lainnya	2,94	3,21	3,25	3,86	4,37
<b>Total PDRB</b>	<b>234,27</b>	<b>250,73</b>	<b>269,07</b>	<b>288,91</b>	<b>309,24</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Dari segi pertumbuhan ekonomi, untuk Tahun 2014-2018 persentase pertumbuhan untuk tahun 2013 sebesar 7,62% namun pada tahun 2017 kondisi pertumbuhan ekonomi sulawesi selatan mengalami penurunan hingga 7,23%. Hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami kontraksi sebesar 22,64%. Walaupun angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan menurun tetapi

angka tersebut masih diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,10%. Dari segi distribusi lapangan usaha terhadap PDRB yang terbesar adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,89%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,94% dan kemudian industri pengolahan sebesar 13,71%. Selama kurun waktu 2014-2018, gambaran tentang perekonomian Sulawesi Selatan berdasarkan PDRB ADHK seluruh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen pengeluaran terbesar yaitu 53,65%.

#### 2.1.2.1.2. Laju Inflasi

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur stabilitas perekonomian suatu wilayah adalah inflasi. Perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Inflasi tertinggi yang terjadi di Sulawesi Selatan dalam periode 5 tahun (2014-2018) terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,61 persen. Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan masyarakat khususnya tahun 2014 akibat kenaikan harga BBM bersubsidi yang berdampak pada kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok khususnya kelompok bahan makanan serta transportasi dan komunikasi. Laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 adalah sebesar 3,50 persen lebih tinggi dibandingkan secara nasional 3,13 persen.

**Tabel II.13**  
**Perkembangan Laju Inflasi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Laju Inflasi</b>						
Sulawesi Selatan	%	8,61	4,48	2,94	4,44	3,50
Nasional	%	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

#### 2.1.2.1.3. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Produksi jagung tahun 2013 sebesar 1,25 juta ton dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebesar 2,34 juta ton pipilan kering atau meningkat 13,38% dari tahun sebelumnya. Peningkatan produksi jagung tahun 2017 dipengaruhi oleh meningkatnya luas panen sebesar 12,33% dan meningkatnya produktifitas sebesar 0,93%. Meningkatnya luas panen dan produktifitas pada tahun 2017 ditunjang dengan iklim yang cukup baik dan banyaknya alokasi bantuan benih jagung yang disalurkan pada petani pada sejumlah 227.586 Ha. Persentase kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 kontribusi sektor pertanian (palawija) sebesar 6,01% terhadap PDRB dengan rata-rata kontribusi 4,54% sepanjang tahun 2013-2017.

**Tabel II.14**  
**Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	%	3,30	3,94	4,07	5,42	6,01

Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)



**2.1.2.1.4. PDRB Perkapita**

PDRB Perkapita adalah total PDRB dibagi dengan total penduduk pertengahan tahun pada suatu daerah pada tahun yang sama. Untuk meningkatkan pendapatan perkapita, maka laju perekonomian haruslah meningkat sebaliknya laju pertumbuhan penduduk harus dapat dikendalikan. PDRB perkapita atau pendapatan perkapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu daerah dari tahun ke tahun. Namun penggunaan indikator PDRB Perkapita tentu tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar penilaian tingkat kesejahteraan penduduk atau meningkatnya pendapatan masyarakat, namun secara luas untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi nyata perkapita penduduk.

Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah mengindikasikan majunya suatu wilayah dari segi ekonomi. Indikasi pendapatan perkapita harus disandingkan dengan angka inflasi, gini ratio dan beberapa indikasi kesenjangan pendapatan maupun pengeluaran termasuk perkembangan harga-harga berbagai jenis barang kebutuhan pokok. Pembangunan bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja, tetapi peningkatan tersebut harus berkesinambungan serta merata dirasakan pada setiap lapisan masyarakat. Jumlah penduduk Sulawesi Selatan meningkat rata-rata pada kisaran 1,08 persen setiap tahunnya. Sementara itu pertumbuhan PDRB perkapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 6 hingga 7 persen. Dengan demikian pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan selalu diikuti dengan peningkatan kualitas perekonomian, meskipun peningkatan ekonomi tersebut belum dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat.

**Tabel II.15**  
**Perkembangan PDRB Perkapita (ADHB)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>PDRB Perkapita (ADHB)</b>						
Sulawesi Selatan	Juta Rp	35,34	39,94	44,11	48,21	52,85
Nasional	Juta Rp	41,90	45,10	48,00	51,90	56,0

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sulawesi Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Tabel 2.13 menunjukkan angka PDBR Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2018 dimana PDRB Perkapita tahun 2013 yaitu 31,01 Juta, dan pada tahun 2014 sebesar 35,34 Juta hingga pada tahun 2017 terus mengalami tren peningkatan yang mencapai 48,21 Juta. Pada triwulan 1 tahun 2018 Provinsi Sulawesi Selatan mampu menciptakan nilai tambah sebagai PDRB sebesar 108,65 triliun rupiah, tumbuh sebesar 7,41% pada periode yang sama tahun sebelumnya dan nilai PDRB Perkapita tertinggi ke-3 secara nasional. Sekitar 51% atau setengah dari perekonomian Sulawesi Selatan masih didominasi sektor Pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Kontribusi terbesar pertanian adalah tanaman pangan dan perikanan untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,89%. Sektor industri pengolahan dikontribusi oleh industri makanan dan minuman serta industri barang galian bukan logam sebesar 13,71%. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 13,94%.

**Tabel II.16**  
**Perkembangan PDRB Perkapita (ADHB) Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017**

No	Kabupaten / Kota	Pertumbuhan PDRB Perkapita (Juta Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bantaeng	24,03	27,14	31,86	35,60	39,67
2	Barru	22,64	26,03	28,86	31,76	34,55
3	Bone	22,79	26,90	31,35	35,21	39,15
4	Bulukumba	17,75	20,53	23,10	26,18	29,28
5	Enrekang	20,97	23,69	26,20	29,27	31,53
6	Gowa	15,39	16,97	19,02	21,10	23,08
7	Jeneponto	15,00	17,42	19,68	22,00	24,02
8	Pare-Pare	29,14	32,39	36,49	39,47	43,00
9	Luwu	22,34	25,98	29,58	33,57	36,60
10	Luwu Timur	63,35	70,62	69,72	67,67	70,34
11	Luwu Utara	21,31	25,30	28,73	32,06	35,06
12	Makassar	62,75	70,24	78,93	87,39	96,12
13	Maros	36,06	40,11	45,93	52,11	56,15
14	Palopo	26,00	28,79	31,68	34,15	37,02
15	Pangkajene Kepulauan	43,38	49,86	56,94	62,94	67,64
16	Pinrang	27,38	31,22	35,83	39,87	44,08
17	Kepulauan Selayar	22,64	27,14	31,86	35,60	39,67
18	Sidenreng Rappang	24,48	28,07	32,12	36,76	40,37
19	Sinjai	23,84	27,41	31,57	34,65	38,10
20	Soppeng	23,95	27,34	30,26	34,99	39,50
21	Takalar	17,83	20,72	23,78	26,74	29,27
22	Tana Toraja	16,28	18,78	21,43	23,80	26,27
23	Toraja Utara	19,02	22,46	26,10	30,02	34,09
24	Wajo	29,77	34,83	38,44	41,93	45,24
<b>SULAWESI SELATAN</b>		<b>31,03</b>	<b>35,34</b>	<b>39,94</b>	<b>44,11</b>	<b>48,21</b>

#### 2.1.2.1.5. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Sebagai daerah yang mengandalkan pada hasil-hasil pertanian, maka sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan. Kondisi pertanian di Sulawesi Selatan masih membutuhkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat khususnya pelaku tani. Selain potensi yang besar dalam nilai produksi, sektor pertanian juga merupakan sektor yang paling besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Sulawesi Selatan. Sub sektor tanaman pangan khususnya komoditi padi dan jagung berkontribusi besar terhadap sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Namun pada tahun 2017 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan dengan nilai kontribusi 22,89%. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Sulawesi Selatan diarahkan dengan melakukan pengembangan kawasan budidaya unggulan yang memiliki nilai strategis pada sentra-sentra produksi komoditas pertanian unggulan. Pengembangan komoditas pertanian dengan pengembangan kawasan potensial pertanian tanaman pangan komoditas padi dan jagung diarahkan pada beberapa daerah seperti Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto dan Luwu.

**Tabel II.17**  
**Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	22,97	23,14	23,27	22,89	22,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

#### 2.1.2.1.6. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai koefisien gini mendekati nol, sedangkan makin tidak merata distribusi pendapatan, maka nilai koefisien gini mendekati satu. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Gini Ratio pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,429 yang masih berada diatas rata-rata nasional yaitu 0,391. Pada rentan tahun 2014 hingga 2016 nilai Indeks Gini Sulawesi Selatan menunjukkan penurunan yang berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan semakin kecil.

Pada Maret 2018 indeks gini mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan nilai 0,397 masih diatas indeks gini nasional sebesar 0,389. Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Peningkatan pendapatan perkapita atau PDRB perkapita dari beberapa sektor antara lain: Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta sektor Industri Pengolahan menjadi faktor penurunan Indeks Gini dimana distribusi pendapatan yang semakin meningkat akan memperkecil ketimpangan.

**Tabel II.18**  
**Indeks Gini**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017**

Indikator	Indeks Gini				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan	0,432	0,448	0,404	0,400	0,429
Nasional	0,406	0,414	0,402	0,394	0,391

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

#### 2.1.2.1.7. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Kebijakan pemerintah dibidang pangan untuk komoditas padi mengakibatkan pola pangan pokok masyarakat yang dahulu beragam (beras, jagung, sagu, pisang) sesuai dengan potensi budaya lokal, kini mengalami perubahan yang cenderung kearah pola pokok tunggal yaitu beras. Jenis, jumlah dan kualitas produk pangan lokal sangat bergantung pada kondisi spesifik pada suatu wilayah. Kondisi tersebut bukan hanya pada kesesuaian lahan, sifat tanah, iklim dan budidaya akan tetapi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pada wilayah tersebut juga mempengaruhi jumlah produksi. Produktivitas padi atau lahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2014 hingga tahun 2015 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016. Pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai produktivitas sebesar 50,93% dan kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 50,13% dengan rata-rata produktivitas 51,27% selama 5 tahun.

**Tabel II.19**  
**Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	%	52,18	52,41	50,72	50,93	50,13

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

#### 2.1.2.1.8. Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks Ketimpangan Williamson merupakan ukuran ketimpangan pendapatan untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antar wilayah/daerah berdasarkan nilai PDRB Perkapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk pada setiap wilayah/daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pendapatan daerah yang selanjutnya akan berdampak pada proses pembangunan dan menyangkut kesejahteraan dari masyarakat. Akan tetapi, proses pembangunan tidak selalu berjalan sesuai rencana, terdapat beberapa daerah yang mengalami pembangunan secara cepat sementara daerah yang lainnya mempunyai laju pembangunan yang lambat. Sulawesi Selatan sebagai Provinsi yang meliputi 24 kabupaten/kota mempunyai keberagaman karakteristik, mulai dari wilayah, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana social-ekonomi maupun kebijakan pemerintah daerah. Adanya keberagaman tersebut menyebabkan terjadinya disparitas pertumbuhan ekonomi maupun PDRB perkapita antar wilayah. Indeks Ketimpangan Williamson berdasarkan data pada tabel 2.14 berikut menunjukkan nilai ketimpangan yang berflutuasi sejak tahun 2013-2017, hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah/daerah mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibanding wilayah/daerah lain meskipun pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahun. Indeks Ketimpangan Williamson pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016 dengan nilai indeks 0,610.

**Tabel II.20**  
**Indeks Ketimpangan Williamson**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Ketimpangan Williamson	0,648	0,630	0,616	0,603	0,610

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

#### 2.1.2.1.9. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bahan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan diatas garis kemiskinan. Jadi, penduduk dikatakan miskin jika pengeluaran perkapita perbulannya dibawah garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dalam pembangunan. Tingkat kemiskinan di Sulawesi selatan sekalipun relatif menurun, tetapi persentasenya masih cenderung tinggi. Persoalan kemiskinan penduduk berdampak pada keterbelakangan akses penduduk terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan sanitasi lingkungan perumahan yang diakibatkan rendahnya daya beli masyarakat karena rendahnya tingkat pendapatan.



**Tabel II.21**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Wilayah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan	Ribu Jiwa	154,40	157,18	150,60	166,50	168,70
Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan	Ribu Jiwa	651,95	707,34	646,21	659,47	610,94
Jumlah Penduduk Miskin Kota + Desa	Ribu Jiwa	806,35	864,51	796,81	825,97	779,64
Persentase Penduduk Miskin Perkotaan	%	4,93	4,93	4,47	4,76	4,48
Persentase Penduduk Miskin Pedesaan	%	12,25	13,22	12,30	12,65	12,15
Persentase Penduduk Miskin Kota + Desa	%	9,54	10,12	9,24	9,48	8,87

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Jumlah penduduk miskin di Sulsel terus mengalami fluktuasi. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 864,51 ribu jiwa (10,12 persen). Jumlah penduduk miskin di Sulsel tahun 2014-2018 didominasi oleh penduduk pedesaan. Berdasarkan data statistik (Maret 2018) jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 779,64 ribu jiwa (8,87 persen) dibawah rata-rata nasional yaitu 9,82 persen.

Merujuk pada Hasil Pemutakhiran Sebaran Data Terpadu Tahun 2015, keterbelakangan akses masyarakat miskin, khususnya pada rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah terhadap pemenuhan rumah yang layak huni berdasarkan komponen yang tidak layak tergambar pada jumlah RTLH di Sulawesi Selatan sebanyak 217.755 Keluarga (KK).

**Tabel II.22**  
**Persebaran Kepemilikan Rumah di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2015**

No	Kabupaten/Kota	Status Kepemilikan Rumah				RTLH
		Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Lainnya	
1	KEP. SELAYAR	12.727	27	704	117	4.278
2	BULUKUMBA	32.479	134	2674	246	11.645
3	BANTAENG	15.439	76	1118	205	3.308
4	JENEPONTO	45.818	105	5288	398	11.012
5	TAKALAR	32.096	126	1824	92	4.445
6	GOWA	64.876	660	4136	355	9.335
7	SINJAI	19.884	55	785	147	4.548
8	MAROS	28.313	183	1823	169	38.115
9	PANGKEP	28.438	181	3142	325	3.963
10	BARRU	15.003	85	1225	212	9.300
11	BONE	74.720	517	4333	585	9.404
12	SOPPENG	19.881	160	1497	114	21.654
13	WAJO	26.716	141	2809	218	5.961
14	SIDRAP	18.359	190	2712	169	11.066
15	PINRANG	20.460	182	2275	90	8.324
16	ENREKANG	17.454	56	2107	202	823
17	LUWU	30.067	136	3090	404	12.926
18	TANA TORAJA	20.581	111	3009	556	18.136
19	LUWU UTARA	28.674	143	3028	118	4.004
20	LUWU TIMUR	16.825	125	1414	149	11.126
21	TORAJA UTARA	15.904	156	3039	4566	3.672

No	Kabupaten/Kota	Status Kepemilikan Rumah				RTLH
		Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Lainnya	
22	MAKASSAR	27.527	10410	11577	1000	5.237
23	PARE-PARE	4.710	779	1537	109	1.461
24	PALOPO	5.430	714	1057	74	4.012
JUMLAH		622.381	15.452	66.203	10.620	217.755

Sumber : Hasil Pemutakhiran Sebaran Data Terpadu, Tahun 2015.

**Tabel II.23**  
**Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan</b>						
Perkotaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	246.416	274.140	286.669	303.834	327.725
Perdesaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	219.109	254.524	267.428	287.788	306.250
<b>Garis Kemiskinan Nasional</b>						
Perkotaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	326.853	356.378	372.114	400.995	425.770
Perdesaan	Rupiah/ Kapita/Bulan	296.681	333.034	350.420	370.910	392.154
<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>						
Sulawesi Selatan	Ribu Jiwa	806,35	864,51	796,81	825,97	779.64
Nasional	Ribu Jiwa	27.727,78	28.513,57	27.764,32	26.582,99	25.670.000
<b>Persentase Penduduk Miskin</b>						
Sulawesi Selatan	%	9,54	10,12	9,24	9,48	8.87
Nasional	%	10,96	11,13	10,70	10,12	9.66

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Penurunan angka kemiskinan menjadi target utama pemerintah melalui beberapa program penanggulangan kemiskinan. Sehingga diharapkan dengan memfokuskan program terkait penanggulangan kemiskinan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan semakin meningkat.

**Tabel II.24**  
**Penduduk Diatas Garis Kemiskinan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan</b>						
Sulawesi Selatan	%	90,46	89,88	90,76	90,52	91.13
Nasional	%	89,04	88,87	89,30	89,88	90.34

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Peningkatan persentase penduduk diatas garis kemiskinan di Sulawesi Selatan yaitu 90,76% (2016) menjadi 90,52% (2017) mengindikasikan bahwa jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan mengalami penurunan. Pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan jumlah 792,63 ribu jiwa dari total jumlah penduduk miskin nasional sebesar 25.949,80 ribu jiwa. Peranan komoditi makanan yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan makanan

dan non makanan diantaranya adalah bandeng, telur ayam ras, mie instan, daging sapi dan rokok filter.

#### 2.1.2.1.10. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Pada awal pelaksanaan RPJMD tahun 2013, persentase PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 52,59%. Hal ini menunjukkan PAD masih lebih dominan kontribusinya dibandingkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2014, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah meningkat menjadi 55,04%. Peningkatan ini disebabkan pertumbuhan positif semua sector penerimaan PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2015, persentase PAD terhadap total pendapatan sedikit mengalami penurunan menjadi 53,57% disebabkan kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah yang tidak seagresif tahun 2014. Pada tahun 2016 Dana BOS mulai disalurkan melalui APBD Pemerintah Provinsi sebagai penerimaan DAK Non Fisik. Sebagai efek kebijakan ini, Dana Transfer meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya sehingga persentase Dana Transfer terhadap total Pendapatan Daerah naik signifikan walaupun realisasi PAD juga bertumbuh positif. Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 dikarenakan dampak penyerahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah atas kepada Pemerintah Provinsi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Gaji guru SMA/SMK dialokasikan pada DAU Pemerintah Provinsi mulai tahun anggaran 2017 yang mengakibatkan persentase Dana Transfer terhadap total Pendapatan Daerah kembali naik sehingga persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah hanya sebesar 40,62.

**Tabel II.25**  
**Persentase PAD Terhadap Pendapatan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase PAD Terhadap Pendapatan	52,59	55,04	53,57	48,16	40,62

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.2.1.11. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2013 hingga 2017 telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.

**Tabel II.26**  
**Opini BPK**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.2.1.12. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Perekonomian Sulawesi Selatan masih ditopang oleh sektor pertanian, dengan kontribusi sekitar 22,89% dari seluruh sektor pada di tahun 2017. Data keadaan angkatan kerja di Sulawesi Selatan menunjukkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian cukup mendominasi sekitar 38.67% dari seluruh sektor ekonomi. Tidak salah dikatakan

bahwa pertanian masih menjadi tumpuan ekonomi mayoritas penduduk Sulawesi Selatan. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku mencapai 95,90 triliun rupiah atau sebesar 22,89%. Sub kategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 63,34%. Sub kategori tersebut juga masih dirinci lagi dan tanaman pangan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah sub kategori usaha tersebut yaitu sebesar 51,89 persen.

**Tabel II.27**  
**Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	22,97	23,14	23,27	22,89	22,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

#### 2.1.2.1.13. Kontribusi Sektor Pertanian (Tabama/Tanaman Bahan Makanan) Terhadap PDRB

Tanaman bahan makanan sebagai sumber bahan makanan memiliki peranan yang sangat penting. Kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 7,57%. Pada tahun 2018 kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai kontribusi 7,11%. Beberapa faktor seperti curah hujan atau cuaca ekstrim menyebabkan produksi tanaman bahan makanan mengalami penurunan atau peningkatan dari tahun ke tahun. Curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan produksi cabai sebagai tanaman utama dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan mengalami penurunan. Meskipun di Sulawesi Selatan banyak sawah tadah hujan namun tetap dapat mempengaruhi penurunan kualitas produksi padi dan jagung. Curah hujan yang tinggi pada tahun 2018 menyebabkan penurunan jumlah produksi beberapa tanaman pangan di Sulawesi Selatan sehingga kontribusi sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB pada tahun 2018 mengalami penurunan.

**Tabel II.28**  
**Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Bahan Makanan) terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi Sektor Pertanian (Tabama / Tanaman Bahan Makanan) terhadap PDRB	%	7,79	7,65	7,81	7,52	7,11

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

#### 2.1.2.1.14. PDRB Pertanian

Sektor pertanian selain berperan penting dalam penyediaan kebutuhan pangan masyarakat, menyerap tenaga kerja di perdesaan, juga berperan dalam pengendalian Inflasi serta pembentukan PDRB. Percepatan pembangunan sektor pertanian akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sulawesi Selatan memiliki beberapa kabupaten yang pendapatan asli daerah terbesarnya adalah bersumber dari pertanian. Peningkatan PDRB Pertanian selain meningkatkan ketahanan pangan juga memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan pendapatan perkapita. Berdasarkan data BPS, PDRB Pertanian mengalami pertumbuhan selama 5 tahun sebesar 104,01 Trilyun Rupiah pada tahun 2018.



**Tabel II.29**  
**PDRB Pertanian**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
PDRB Pertanian	Trilyun Rp	68,47	78,78	88,33	95,50	104,01

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

**2.1.2.1.15. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB**

Perkebunan sebagai salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian di Sulawesi Selatan telah menempatkan beberapa komoditas unggulan perkebunan (tanaman keras) yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian seperti Kakao, Kopi, Jambu Mete, Tebu, Cengkeh, Kelapa Sawit, Lada, Pala dan Tembakau. Untuk mencapai target produksi pemerintah bersama stakeholder terkait melakukan upaya pemeliharaan tanah dan merehabilitasi lahan yang rusak. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB mengalami fluktuasi dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 4,16% dari total PDRB.

**Tabel II.30**  
**Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	%	4,56	4,55	4,45	4,26	4,16

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

**2.1.2.1.16. PDRB Perkebunan**

Secara nasional sub sektor perkebunan memberikan kontribusi peningkatan devisa Negara dan PDRB terbesar diluar minyak dan gas bumi serta penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Sehubungan dengan strategi dan kebijakan pembangunan perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, maka sasaran pembangunan perkebunan adalah memulihkan produksi dan kualitas kakao. Dari 9 komoditas unggulan perkebunan, kakao merupakan komoditi dengan nilai ekspor tertinggi dari total nilai ekspor. Upaya yang telah dilakukan dalam menunjang peningkatan produksi kakao tersebut antara lain : kebun contoh (demplot) metode pengendalian penyakit VSD kakao pada kabupaten/kota wilayah pengembangan kakao. Pencapaian pertumbuhan PDRB sektor perkebunan pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan yang signifikan dengan nilai pertumbuhan 19,86 Trilyun Rupiah.

**Tabel II.31**  
**PDRB Perkebunan**  
**PDRB Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
PDRB Perkebunan	Trilyun Rp	13,60	15,49	16,91	17,84	19,86

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

**2.1.2.1.17. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB**

Peranan sektor kehutanan dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sangat penting dalam kaitannya terhadap pertumbuhan PDRB. Kontribusi sektor kehutanan antara lain didukung oleh peningkatan jumlah produksi pangan dalam hutan sebesar 16,90 ton, jumlah produksi hasil hutan bukan kayu sebesar 7,450 ton, serta jumlah produksi hasil hutan kayu olahan sebesar 379,023 m3. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 adalah 0,07%. Kontribusi sub kategori kehutanan dan penebangan kayu sebesar 272,68 milyar rupiah.

**Tabel II.32**  
**Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	%	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

#### 2.1.2.1.18. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Perkembangan pembangunan pertambangan di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari jumlah investasi sektor pertambangan dimana jumlah izin usaha pertambangan mengalami peningkatan. Namun dengan berlakunya kebijakan pemerintah terhadap peningkatan nilai tambah (PNT) yang memaksa perusahaan-perusahaan tambang untuk meningkatkan kadar pada batasan tertentu sebelum diizinkan untuk dijual ke luar negeri. Kebijakan pemerintah inilah yang menyebabkan menurunnya nilai ekspor komoditas logam sehingga berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada sektor pertambangan. Kategori Pertambangan dan Penggalian dirinci menjadi 4 sub kategori, antara lain: sub kategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi, subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit, sub lapangan usaha Pertambangan Biji Logam, dan subkategori Pertambangandan Penggalian lainnya. Di Sulawesi Selatan terdapat tiga subkategori, hanya sub kategori Pertambangan Batu Bara dan Lignit yang tidak ada. Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan relatif rendah selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu hanya berkisar 5 hingga 7 persen. Pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 17,88 milyar rupiah atau 6,91% dan meningkat menjadi 22,48 milyar rupiah atau 5,39% pada tahun 2017. Salah satu sumber produksi pertambangan terbesar di Sulawesi Selatan adalah pertambangan Biji Nikel yang terletak di Soroako Kabupaten Luwu Timur.

**Tabel II.33**  
**Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	6,91	7,11	6,32	5,59	5,39

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

#### 2.1.2.1.19. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 318,059 ton pada tahun 2017 merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Produksi udang adalah salah satu unggulan Provinsi Sulawesi Selatan, utamanya udang windu, vannamei, udang putih dan lainnya. Pada tahun 2017, nilai ekspor udang segar berkontribusi 17,71% terhadap total sektor pertanian/perikanan namun mengalami penurunan yang disebabkan kurangnya raw material dan faktor harga yang tidak stabil. Pada tahun 2017 produksi udang mencapai 43,03 ribu ton atau naik 3,2% dari tahun 2016 sebesar 41,64 ton. Selain udang, rumput laut yang dikembangkan di Sulawesi Selatan oleh pembudidaya. Komoditas rumput laut ini dibudidayakan di laut dan tambak. Produksi rumput laut tahun 2013 sebesar 2.422 ribu ton dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 3.375 ribu ton atau sebesar 39,35%. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 hingga 2018 mengalami peningkatan yang

signifikan. Nilai kontribusi sektor kelautan dan perikanan mencapai 8,40% pada tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,12% selama 5 tahun.

**Tabel II.34**  
**Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	7,67	8,10	8,14	8,33	8,40

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

#### 2.1.2.1.20. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Perdagangan sangatlah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah ini terlihat dari Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dikontribusi oleh perdagangan besar dan eceran mencapai 13,02% dari total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,12%. Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 11,57% terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2018, kontribusi kategori ini mencapai 47,132,15 milyar rupiah atau sekitar 13,02%. Dari nilai tersebut, sekitar 14,37% merupakan sumbangan dari sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor sedangkan 8,13% merupakan sumbangan dari sub kategori perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya. Pelemahan kondisi tersebut di picu oleh kinerja exportasi Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih rendah di bandingkan dengan aktivitas importasi, jika dilihat secara keseluruhan penurunan bukan hanya dipengaruhi oleh kategori perdagangan mobil dan sepeda motor dan reparasi tetapi pada sejumlah komoditas utama, e-commerce menjadi salah satu pendorong mengingat Makassar merupakan salah satu kota dengan konsumen e-commerce terbanyak.

**Tabel II.35**  
**Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	12,62	12,86	13,39	13,94	13,02

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

#### 2.1.2.1.21. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sulawesi Selatan memiliki peranan penting dan strategis dalam perekonomian karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, untuk mendukung perekonomian Sulawesi Selatan terus mendorong investasi dan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru.

Dalam mewujudkan sektor Industri target utama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan memprioritaskan enam sektor industri unggulan diantaranya pengolahan kopi, kakao (coklat), kain sutera, markisa dan pengolahan hutan. Alasan pengembangan sektor industri pengolahan karena mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi dan sekaligus membuka lapangan kerja yang luas, bukan berarti yang lain tidak mendapat perhatian karena bisa saja ada industri lain menjadi unggulan di sebuah kabupaten.

Potensi industri di Sulawesi Selatan sangat besar dengan bahan baku yang tersedia memberi harapan produk ekspor Sulawesi Selatan selama ini masih berbentuk bahan mentah dapat diolah terlebih dahulu sebelum di ekspor, sehingga menciptakan nilai tambah

yang tinggi bagi perekonomian, untuk mencapai tujuan tentu diharapkan dukungan dan sinergitas dari semua pihak baik pemerintah, pengusaha, perbankan dan lainnya. Namun demikian perkembangan industrialisasi pengolahan di Sulawesi Selatan cenderung melamban. Industri manufaktur di Sulawesi Selatan tumbuh hanya 5,06% tahun 2018. Kontribusi industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pun menurun dari 13,71% pada tahun 2017 menjadi 13,61% pada tahun 2018. Untuk mendorong industrialisasi di Sulawesi Selatan pemerintah membangun beberapa kawasan industri di Kabupaten Takalar untuk pengelolaan logam dan kilang minyak yang sudah disiapkan lahan 750 hektar yang rencananya akan digunakan tahap awal, kawasan industri Bantaeng yang fokus pada industri smelter ferronikel berupa stainless steel. Meskipun nilai kontribusi mengalami fluktuasi mulai tahun 2014 hingga 2018 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,80%, namun kontribusi sektor industri menempati urutan kedua terbesar berdasarkan lapangan usaha.

**Tabel II.36**  
**Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	13,98	13,88	13,97	13,71	13,61

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

#### 2.1.2.1.22. Pertumbuhan PDRB Industri

Terjadinya perubahan perekonomian sebagai akibat besarnya pengaruh external juga di tingkat regional secara nyata telah terlihat pada pertumbuhan dicerminkan dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang ditandai oleh suatu transformasi mengandung perubahan yang mendasar pada struktur ekonomi terlihat untuk Industri pengolahan, penyumbang terbesar di tahun 2018 adalah Industri Makanan dan Minuman dan Industri Barang Galian Bukan Logam, dengan kontribusi masing-masing kategori sebesar 54,32% dan 45,68%. Pertumbuhan PDRB Industri pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai kontribusi 5,03%. Industri Pengolahan berkembang dari 57,45 triliun rupiah menjadi 59,45 triliun rupiah. Namun pertumbuhannya berfluktuasi sepanjang tahun 2014-2018. Pada tahun 2018, hanya lima lapangan usaha yang tumbuh lebih dari 5 persen, yaitu Industri Makanan dan Minuman (9,36%), Industri Pengolahan Tembakau (21,15%), Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (7,66%), Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan (5,72%), dan Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan (9,07%). Selain Industri Pengolahan, produksi industri manufaktur besar dan sedang di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang berada di atas angka pertumbuhan nasional. Jenis industri manufaktur yang mengalami kenaikan produksi tertinggi, yaitu industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya yang naik sebesar 6,05%, serta industri barang galian bukan logam yang naik 5,23%.



**Tabel II.37**  
**Pertumbuhan PDRB Industri**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Pertumbuhan PDRB Industri	%	9,00	6,77	8,23	5,03	6,71

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

## 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

### 2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan salah satu faktor penting dalam ukuran keberhasilan suatu wilayah. Ukuran keberhasilan pembangunan manusia ini tertuang dalam indikator yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan cenderung mengalami kemajuan dimana pada tahun 2013 IPM Sulawesi Selatan sebesar 67,92 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2017 menjadi 70,34 lebih rendah daripada IPM Nasional sebesar 70,81. Selama periode tahun 2013 hingga tahun 2017 angka IPM Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 1,85 point dimana IPM Sulawesi Selatan dari posisi 14 secara nasional pada tahun 2017. Tren komponen IPM Sulawesi Selatan meliputi: 1) Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir pada tahun 2017 tumbuh 0,03% dengan capaian 69,84%; 2) Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2017 tumbuh 0,91% dengan capaian 13,28%; 3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2017 tumbuh 2,58% dengan capaian 7,95%; 4) Pengeluaran Per Kapita/tahun pada tahun 2017 tumbuh sebesar 2,02% dengan capaian 10.489 Ribu Rupiah.

**Tabel II.38**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017**

Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Sulawesi Selatan	67,92	68,49	69,15	69,76	70,34
Nasional	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Berdasarkan jenis kelamin, dari tahun 2013 sampai dengan 2017, IPM perempuan ternyata masih jauh dari laki-laki. Bahkan pada tahun 2016 dan 2017, tidak mengalami perubahan dengan perbedaan 5,31.

**Tabel II.39**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Menurut Jenis Kelamin**  
**Tahun 2013-2017**

Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Provinsi Sulawesi Selatan	71.84	66.34	72.59	67.22	72.98	67.81	73.61	68.30	74.21	68.90
Nasional	72.69	65.56	73.36	66.27	73.58	66.98	74.26	67.44	74.85	68.08

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Pertumbuhan IPM kabupaten/kota tertinggi di Sulawesi Selatan tahun 2016-2017 adalah kabupaten Jeneponto (1,39%), kabupaten Soppeng (1,09%), dan Bantaeng (1,02%). Sedangkan pertumbuhan IPM kabupaten/kota terendah di Sulawesi Selatan tahun 2016-

2017 adalah kabupaten Luwu (0,45%), kota Palopo (0,34%), dan kota Pare-Pare (0,26%). Tahun 2017 IPM Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 0,83% dibanding pertumbuhan nasional sebesar 0,90%. Angka IPM tahun 2017 menurut kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan memperlihatkan adanya variasi yang relatif besar yaitu dari 81,13 (Makassar), 76,71 (Palopo) dan 76,68 (Pare-pare), Penyebab terjadinya variasi angka tersebut disebabkan sebahagian oleh kondisi sosial, ekonomi, kultural serta geografis yang berpengaruh pada bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan/daya beli dari masing-masing daerah.

**Tabel II.40**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kepulauan Selayar	63,16	63,66	64,32	64,95	65,39
2	Bulukumba	64,27	65,24	65,58	66,46	67,08
3	Bantaeng	64,88	65,77	66,20	66,59	67,27
4	Jeneponto	60,55	61,45	61,61	61,81	62,67
5	Takalar	62,58	63,53	64,07	64,96	65,48
6	Gowa	65,45	66,12	66,87	67,70	68,33
7	Sinjai	63,47	63,83	64,48	65,36	65,80
8	Bone	66,06	66,65	67,13	67,76	68,42
9	Maros	65,24	66,16	66,65	66,86	67,25
10	Pangkajene Kepulauan	67,02	67,94	68,64	69,07	69,56
11	Barru	61,40	62,09	63,11	63,86	64,16
12	Soppeng	64,43	64,74	65,33	65,95	66,67
13	Wajo	65,79	66,49	66,90	67,52	68,16
14	Sidrap	67,15	68,14	69,00	69,39	69,84
15	Pinrang	68,14	68,92	69,24	69,42	69,90
16	Enrekang	68,39	69,37	70,03	70,79	71,44
17	Luwu	66,39	67,34	68,11	68,71	69,02
18	Tana Toraja	64,55	65,08	65,75	66,25	66,82
19	Luwu Utara	66,40	66,90	67,44	67,81	68,35
20	Luwu Timur	69,53	69,75	70,43	70,95	71,46
21	Toraja Utara	65,65	66,15	66,76	67,49	67,90
22	Makassar	79,35	79,94	80,53	80,53	81,13
23	Pare-Pare	75,66	76,31	76,48	76,48	76,68
24	Palopo	75,65	76,27	76,45	76,45	76,71
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>67,92</b>	<b>68,49</b>	<b>69,15</b>	<b>69,76</b>	<b>70,34</b>

Sumber :Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Berdasarkan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, ketimpangan IPM antara laki-laki dan perempuan, tertinggi di Kabupaten Toraja Utara dengan ketimpangan mencapai 10,10. Menyusul Kabupaten Takalar dengan ketimpangan 9,28, Toraja 9,23, Gowa 8,97 dan Maros 8,12. Sedangkan yang terendah yaitu Kabupaten Sinjai dengan ketimpangan 1,33, Enrekang 1,35, Soppeng 1,75, Kota Palopo 1,90 dan Kota Parepare 1,98.

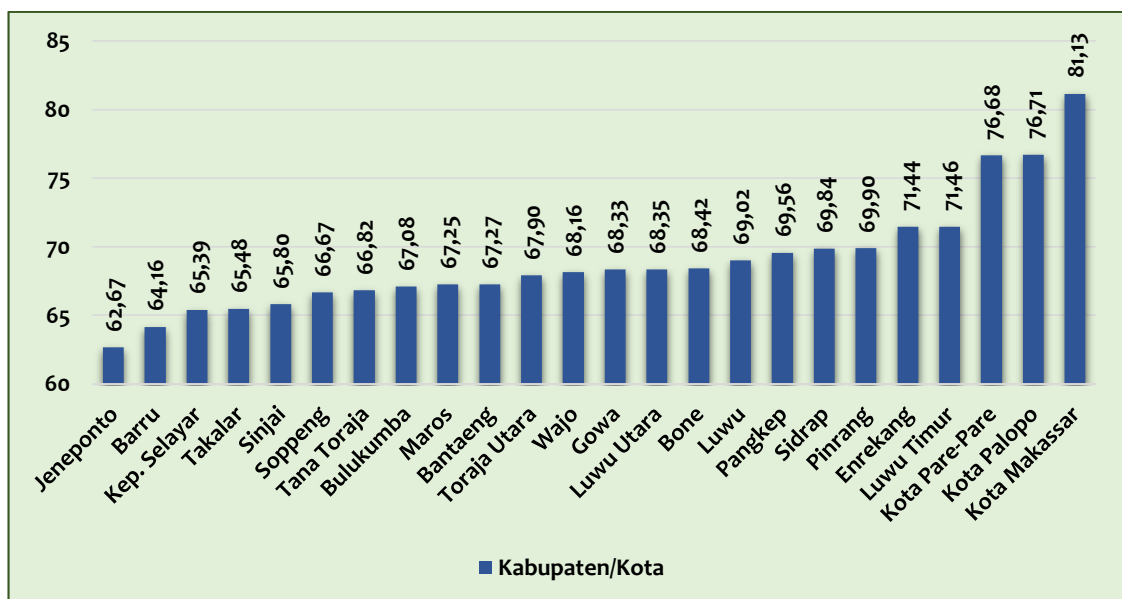
**Tabel II.41**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota dan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017**

Provinsi/Kab/Kota	IPM	
	L	P
Kepulauan Selayar	70.66	64.28
Bulukumba	69.41	67.02
Bantaeng	68.44	65.21
Jeneponto	67.47	61.36
Takalar	70.09	60.81

Provinsi/Kab/Kota	IPM	
	L	P
Gowa	72.84	63.87
Sinjai	66.93	65.60
Maros	73.21	65.09
Pangkajene dan Kepulauan	72.16	64.41
Barru	72.34	69.09
Bone	67.85	62.86
Soppeng	68.12	66.37
Wajo	72.89	65.53
Sidenreng Rappang	73.71	67.97
Pinrang	72.22	68.93
Enrekang	71.99	70.64
Luwu	72.32	66.91
Tana Toraja	72.01	62.78
Luwu Utara	71.99	63.98
Luwu Timur	76.03	68.04
Toraja Utara	72.30	62.20
Kota Makasar	83.28	78.87
Kota Parepare	78.19	76.21
Kota Palopo	78.17	76.27

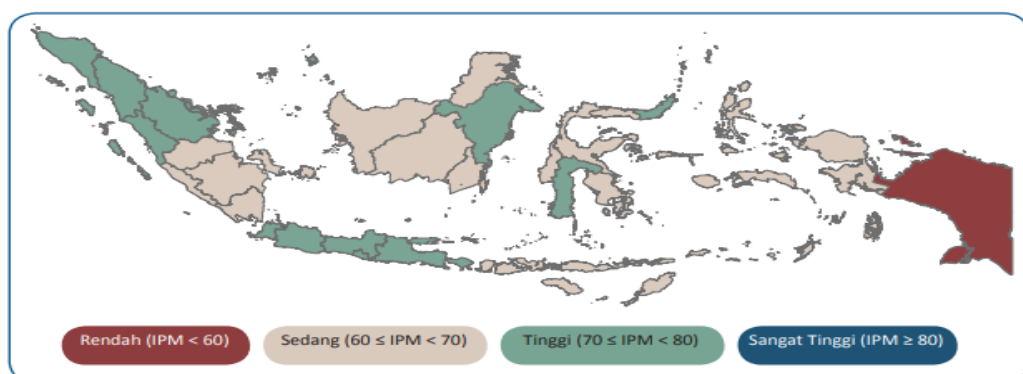
Sumber :Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

**Grafik II.2**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018 (Data Diolah)

**Gambar II.12**  
**Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional**



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

### 2.1.2.2.2. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Angka melek huruf Sulawesi Selatan pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai 90,44% atau sejumlah 9,56% penduduk Sulawesi Selatan yang buta huruf.

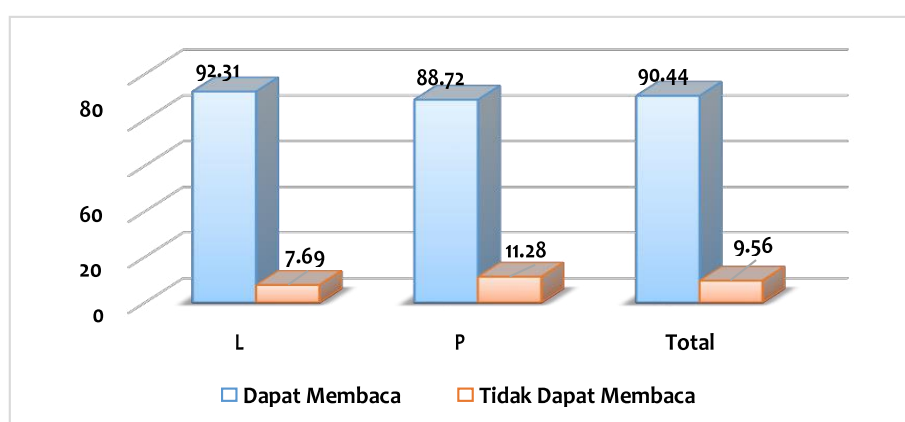
**Tabel II.42**  
**Angka Melek Huruf (AMH)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Melek Huruf	%	89,69	92,81	91,29	91,52	90,44

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki 15 tahun keatas yang melek huruf di Sulsel tahun 2017, lebih besar dibanding perempuan. Persentase laki-laki dapat membaca sebesar 92,31% sementara perempuan 88,72%. Dengan kata lain, kedepan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kewajiban untuk menuntaskan buta aksara pada penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 9,56 persen. Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk, antara lain melalui program kejar paket A, paket B, dan program keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin, termasuk juga mampu berbahasa Indonesia. Harapannya, mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan melalui media cetak dan elektronik.

**Grafik II.3**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas**  
**Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

**Tabel II.43**  
**Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017**

Kelompok Umur	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan					
Umur 15+	9,84	8,74	8,71	8,48	8,35
Umur 15-44	3,20	2,58	2,22	2,07	2,03



Kelompok Umur	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Umur 45+	23,55	21,44	21,34	20,81	20,28
Nasional					
Umur 15+	6,08	4,88	4,78	4,62	4,50
Umur 15-44	1,61	1,24	1,10	1,00	0,94
Umur 45+	15,15	12,25	11,89	11,47	11,08

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

### 2.1.2.2.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

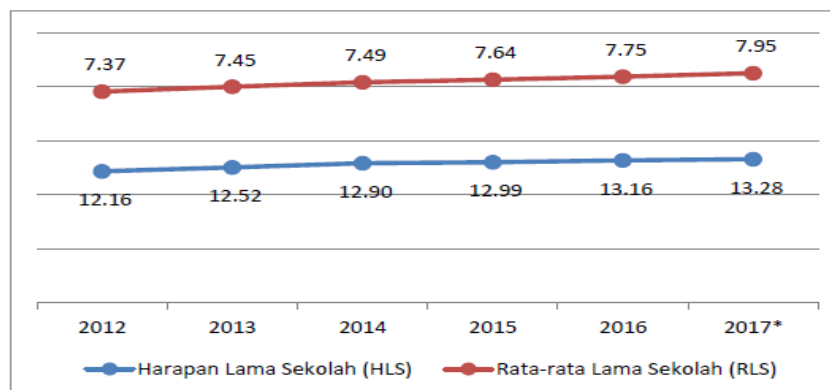
Perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan memperlihatkan hasil yang cukup membaik. Seiring dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun. Indikator angka rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Walaupun masih belum tinggi, namun sepanjang periode tahun 2013-2017 rata-rata lama sekolah di Sulawesi selatan terus mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata lama sekolah 7,65 tahun.

**Tabel II.44**  
**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan	Tahun	7,45	7,49	7,64	7,75	7,95
Nasional	Tahun	7,61	7,73	7,84	7,95	8,10

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

**Grafik II.4**  
**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018 (Data Diolah)

Adapun berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2017, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) laki-laki memang masih lebih lama dibandingkan perempuan, dimana laki-laki sudah menikmati pendidikan hingga kelas 3 SMP sedangkan perempuan kelas 2 SMP.

Dari 24 kabupaten/kota, Kota Makassar, Palopo dan Parepare menduduki peringkat tertinggi yang rata-rata lama sekolahnya lebih lama dibandingkan kabupaten/kota lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan yang terendah untuk laki-laki yaitu Jeneponto, Bone dan Takalar, dan untuk perempuan yaitu Jeneponto, Bantaeng dan Wajo.

**Tabel II.45**  
**Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota dan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin**  
**Tahun 2017**

Provinsi/Kab/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah	
	L	P
<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>8.31</b>	<b>7.63</b>
Kepulauan Selayar	7.66	6.97
Bulukumba	7.47	7.09
Bantaeng	7.15	6.32
Jeneponto	6.37	5.98
Takalar	7.03	6.55
Gowa	7.95	7.55
Sinjai	7.57	7.03
Maros	7.84	7.16
Pangkajene dan Kepulauan	8.02	6.91
Barru	8.06	7.67
Bone	6.94	6.67
Soppeng	7.57	7.30
Wajo	7.12	6.38
Sidenreng Rappang	7.78	7.34
Pinrang	8.04	7.18
Enrekang	8.75	8.03
Luwu	7.96	7.69
Tana Toraja	8.49	7.77
Luwu Utara	7.67	7.07
Luwu Timur	8.56	7.94
Toraja Utara	8.37	7.50
Kota Makasar	11.36	10.83
Kota Parepare	10.31	9.90
Kota Palopo	10.54	10.30

Sumber :Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

#### 2.1.2.2.4. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Tujuan mengukur indikator angka HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem Pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya Pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Grafik menunjukkan bahwa angka HLS mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai 13,28.

**Tabel II.46**  
**Angka Harapan Lama Sekolah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Angka Harapan Lama Sekolah				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan	Tahun	12,52	12,90	12,99	13,16	13,28
Nasional	Tahun	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Jika dikaitkan antara RLS dan HLS, masyarakat Sulawesi Selatan masih memiliki harapan untuk bisa mengenyam pendidikan hingga sekitar 13 tahun atau hingga bangku kuliah setaraf diploma.

Berdasarkan jenis kelamin, hampir semua kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, perempuan memiliki Angka Harapan Lama sekolah yang lebih lama dibandingkan laki-laki,

kecuali di Kabupaten Jeneponto dan Luwu Utara, dimana laki-laki memiliki Harapan Lama Sekolah yang lebih lama dibandingkan perempuan.

**Tabel II.47**  
**Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota dan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017**

Provinsi/Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah	
	L	P
SULAWESI SELATAN	12.99	13.59
Kepulauan Selayar	12.38	13.21
Bulukumba	12.35	13.09
Bantaeng	11.77	12.34
Jeneponto	12.00	11.92
Takalar	12.21	12.50
Gowa	12.83	13.46
Sinjai	12.84	13.55
Maros	12.97	13.11
Pangkajene dan Kepulauan	12.37	12.45
Barru	13.46	13.79
Bone	12.40	12.88
Soppeng	12.31	12.83
Wajo	12.83	13.60
Sidenreng Rappang	12.49	13.25
Pinrang	12.31	13.97
Enrekang	13.40	14.14
Luwu	12.81	13.67
Tana Toraja	13.22	13.72
Luwu Utara	12.51	12.23
Luwu Timur	12.73	13.18
Toraja Utara	12.92	13.64
Kota Makassar	14.99	15.77
Kota Parepare	14.07	14.63
Kota Palopo	14.08	15.75

Sumber :Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

#### 2.1.2.2.5. Angka Usia Harapan Hidup

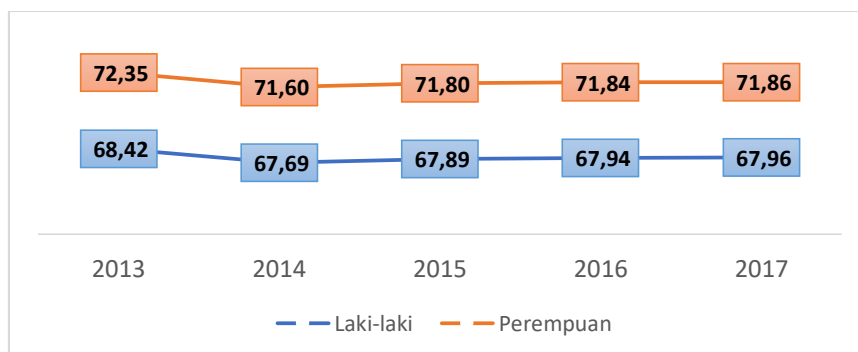
Ukuran statistik yang umum digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat adalah angka usia harapan hidup. Angka usia harapan hidup merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan. Tolak ukur keberhasilan dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. UHH merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang terus meningkat. Selama periode 2013 hingga 2017, secara rata-rata, UHH tumbuh 0,17 persen pertahun. Pada tingkat kabupaten/kota, UHH Toraja Utara (72,94 tahun) merupakan usia tertinggi dibanding 24 kabupaten/kota lainnya. Dengan membaiknya kondisi kesehatan daerah, yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2013 angka usia harapan hidup masyarakat di Sulawesi Selatan sebesar 69,50 tahun meningkat menjadi 69,84 tahun pada tahun 2017. Peningkatan angka harapan hidup rata-rata sebesar 0,085 per tahun menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun seorang bayi yang dilahirkan dapat hidup lebih lama dibanding tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel II.48**  
**Angka Usia Harapan Hidup**  
**Provinsi Sulaatan dan Nasional Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Angka Usia Harapan Hidup				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan	Tahun	69,50	69,60	69,80	69,82	69,84
Nasional	Tahun	70,40	70,59	70,78	70,90	71,06

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 201

**Grafik II.5**  
**Angka Usia Harapan Hidup**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Menurut jenis Kelamin, Tahun 2013-2017**



Sumber :Badan Pusat Statistik, Tahun 2018.

Berdasarkan jenis kelamin, meskipun cenderung mengalami penurunan, namun Angka Usia Harapan Hidup perempuan di Sulawesi Selatan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini terjadi dari tahun 2013 sampai 2017. Pada tahun 2017, perempuan memiliki Angka Usia Harapan Hidup sampai 71,86 tahun sedangkan laki-laki hanya 67,96 tahun.

Sedangkan berdasarkan kabupaten/kota, Angka Usia Harapan Hidup yang tertinggi baik perempuan maupun laki-laki yaitu Kabupaten Toraja Utara 74,79 tahun untuk perempuan dan 70,98 tahun untuk laki-laki. Terendah yaitu Kabupaten Jeneponto 67,52 tahun untuk perempuan dan 63,66 tahun untuk laki-laki.

**Tabel II.49**  
**Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota dan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin 2017**

Provinsi/Kab/Kota	Usia Harapan Hidup	
	Laki-laki	Perempuan
SULAWESI SELATAN	67.96	71.86
Kepulauan Selayar	65.78	69.74
Bulukumba	64.94	68.86
Bantaeng	67.94	71.81
Jeneponto	63.66	67.52
Takalar	64.37	68.27
Gowa	67.92	71.86
Sinjai	64.60	68.50
Maros	66.71	70.52
Pangkajene dan Kepulauan	63.87	67.74
Barru	66.26	70.22
Bone	64.22	68.11
Soppeng	66.68	70.64
Wajo	64.52	68.42
Sidenreng Rappang	66.78	70.74
Pinrang	66.64	70.60
Enrekang	68.36	72.29



Provinsi/Kab/Kota	Usia Harapan Hidup	
	Laki-laki	Perempuan
Luwu	67.57	71.52
Tana Toraja	70.59	74.42
Luwu Utara	65.58	69.53
Luwu Timur	67.76	71.70
Toraja Utara	70.98	74.79
Kota Makasar	69.51	73.39
Kota Parepare	68.67	72.60
Kota Palopo	68.28	72.21

Sumber :Badan Pusat Statistik, Tahun 2018.

#### 2.1.2.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam usia kerja tahun 2017 sebanyak 6.251.377 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang tergolong angkatan kerja mencapai 3.812.358 orang dengan komposisi 3.599.663 adalah penduduk yang bekerja dan 213.695 orang penduduk yang menganggur. Dibandingkan Agustus 2016, jumlah angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 4,50 persen atau terjadi penurunan angkatan kerja sebanyak 68.645 orang angkatan kerja. Demikian juga dengan jumlah orang yang bekerja terjadi penurunan sebesar 5,33 persen atau terjadi penurunan jumlah orang yang bekerja sebanyak 96.049 orang. Sebaliknya jumlah orang yang menganggur meningkat 12,21 persen atau terjadi penambahan pengangguran sebanyak 27.404 orang penganggur. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada Agustus 2017 sebesar 60,98 persen. Sejalan dengan menurunnya jumlah angkatan kerja, TPAK tahun 2017 1,94 poin lebih rendah dibandingkan Agustus 2016. Hal ini menunjukkan indikasi adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.

**Tabel II.50**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angkatan Kerja	Orang	3.558.183	3.715.801	3.706.128	3.881.003	3.812.358
Bekerja	Orang	3.376.549	3.527.036	3.485.492	3.694.712	3.598.663
Pengangguran	Orang	181.634	188.765	220.636	186.291	213.695
Bukan Angkatan Kerja	Orang	2.340.470	2.273.948	2.375.747	2.349.137	2.439.019
Penduduk Usia Kerja	Orang	5.898.653	5.989.749	6.081.875	6.124.063	6.251.377
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	60,49	62,00	60,94	62,92	60,98

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

#### 2.1.2.2.7. Pengangguran Terbuka

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dibanding angkatan kerja merupakan salah satu acuan bagi pemerintah untuk memperkirakan pembukaan lapangan kerja baru. Besarnya angka pengangguran terbuka memiliki implikasi social yang luas, karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Tingkat pengangguran

terbuka pada tahun 2017 sebesar 5,61% dengan total jumlah pengangguran sebanyak 224.885 jiwa. Pada Februari 2018 tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan mengalami penurunan yaitu 5,39% masih diatas rata-rata nasional sebesar 5,13%.

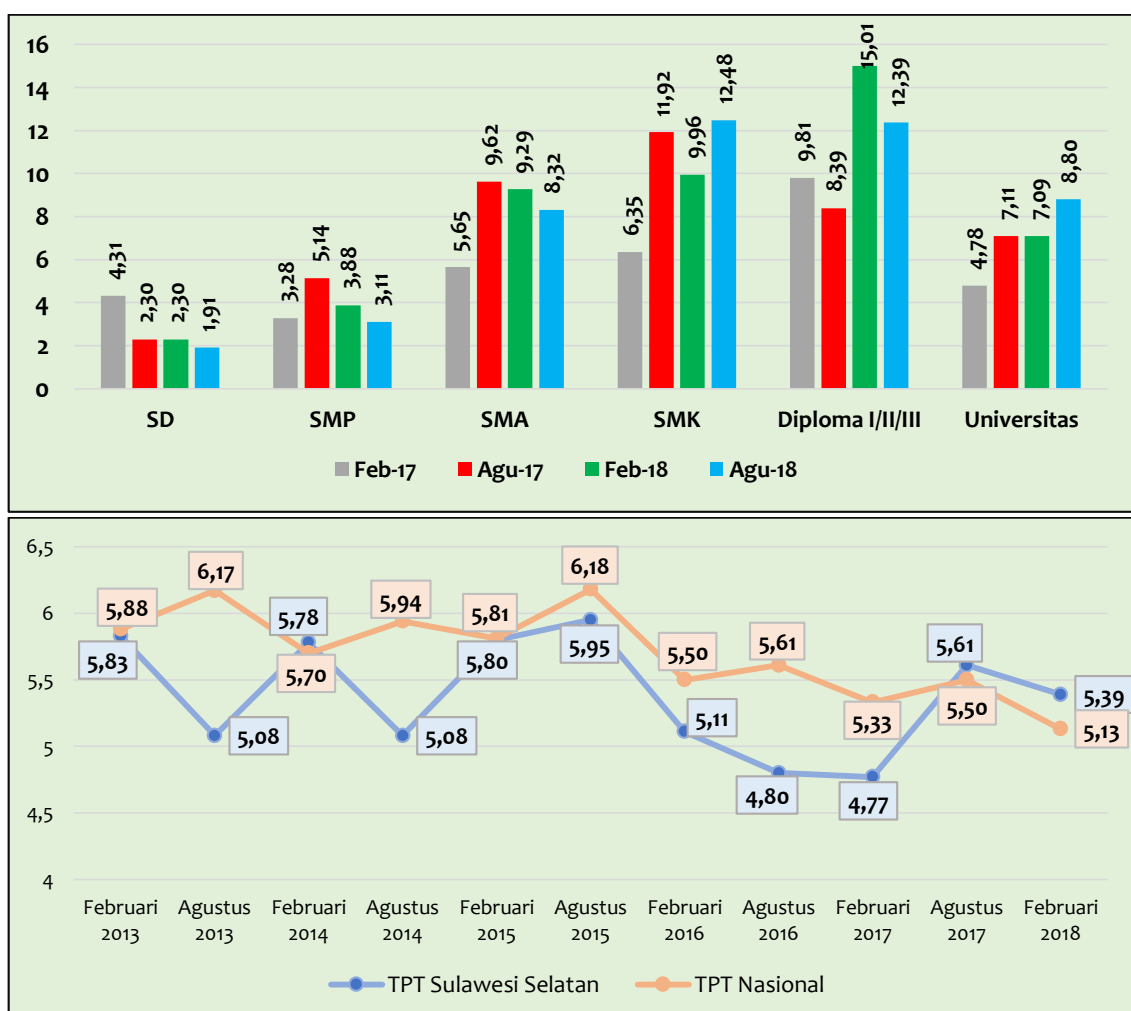
Peningkatan tingkat pengangguran terbuka dibanding tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru sehingga tenaga kerja yang ada belum terserap secara optimal. Tingkat pengangguran terbuka juga disebabkan karena semakin bertambahnya jumlah lulusan angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pada Agustus 2017, TPT Sulawesi Selatan sebesar 5,61%, mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2016 yang besarnya 4,80%. TPT perempuan sebesar 4,98 persen, jauh lebih rendah dibandingkan TPT laki-laki yang besarnya 6,66 persen. Dibandingkan Agustus 2016, TPT laki-laki dan TPT perempuan keduanya juga mengalami kenaikan.

**Tabel II.51**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tingkat Pengangguran Terbuka				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan	%	5,10	5,08	5,95	4,80	5,61
Nasional	%	6,17	5,94	6,18	5,61	5,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

**Grafik II.6**  
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018 (Data Diolah)

Dilihat dari tingkat pendidikan pada tahun 2017, TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan yang lain yaitu sebesar 11,92%. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 9,62%. Dengan kata lain terdapat penawaran tenaga kerja yang lebih terutama pada jenjang pendidikan SMK dan SMA. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, sehingga terlihat TPT SD ke bawah paling kecil dibandingkan jenjang lainnya yaitu sebesar 2,30%. Selanjutnya berdasarkan jenis kelamin, TPT perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki, baik pada tahun 2016 maupun 2017. Dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, TPT perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu pada SD dan Diploma.

#### 2.1.2.2.8. Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja

Selama periode tahun 2013-2017 penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan didominasi oleh sektor pertanian walaupun seiring dengan waktu menunjukkan pola cenderung menurun. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam usia kerja tahun 2017 sebanyak 6.251.377 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang tergolong angkatan kerja mencapai 3.812.358 orang dengan komposisi 3.598.663 adalah penduduk yang bekerja dan 213.695 orang penduduk yang menganggur. Persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja pada tahun 2017 sebesar 94,39%. Jumlah penduduk yang bekerja menurut sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2017, penduduk Sulawesi Selatan paling banyak bekerja pada sektor pertanian yaitu sebanyak 1.391.639 orang (38,67%), disusul oleh sektor perdagangan sebanyak 766.755 orang (21,31%), dan sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 652.899 orang (18,14%).

**Tabel II.52**  
**Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	%	94,90	94,92	94,05	95,20	94,39

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

#### 2.1.2.2.9. Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang digunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja mengalami peningkatan menjadi 10,09%.

**Tabel II.53**  
**Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sulawesi Selatan	%	9,60	0,35	8,46	1,34	10,09
Nasional	%	5,39	3,31	4,62	1,83	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

**2.1.2.2.10. Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja**

Dari seluruh penduduk bekerja pada Agustus 2017, status pekerjaan yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan (34,12%), diikuti oleh berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (21,43%), dan pekerja keluarga (19,80%). Dalam setahun terakhir (Agustus 2016 hingga Agustus 2017), persentase penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/ pegawai meningkat dari 31,82% pada Agustus 2016 menjadi 34,12% pada Agustus 2017. Peningkatan juga terjadi pada pekerja keluarga dari 18,67% menjadi 19,80%. Sebaliknya penduduk yang berusaha sendiri maupun berusaha dibantu pekerja tidak dibayar mengalami penurunan dalam setahun terakhir. Secara sederhana kegiatan formal dan informal diidentifikasi melalui status pekerjaan. Komponen pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas pada sektor pertanian, pekerja bebas pada sektor non pertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Sisanya merupakan pekerja formal. Persentase tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total penduduk yang bekerja pada tahun 2017 sebesar 37,26% mengalami peningkatan dari tahun 2016.

**Tabel II.54**  
**Persentase Tenaga Kerja dan Pekerja Bebas Keluarga**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja	%	34,72	35,44	36,86	35,65	37,26

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

**2.1.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga**

**2.1.2.3.1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif**

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepedanilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jumlah organisasi pemuda dari tahun 2013 berjumlah 651 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan jumlah organisasi 655. Persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2013 mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 kemudian persentasenya menurun pada tahun 2017 yaitu nilai 8,31%.

**Tabel II.55**  
**Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Organisasi Pemuda Aktif	Organisasi	59	59	59	59	59
Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	Organisasi	651	651	831	695	710
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	9,06	9,06	7,10	8,49	8,31

Sumber : sipd.kemendagri.go.id



Persentase pemuda yang aktif dalam lima tahun terakhir dalam keadaan tetap sehingga pembinaan difokuskan pada 59 organisasi pemuda yang aktif. Hal ini sesuai dengan persyaratan organisasi pemuda yang terdaftar di KNPI. Jumlah organisasi pemuda di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi. Jumlah organisasi pemuda meningkat sejak tahun 2013 hingga 2017. Namun persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan karena kelembagaan yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga kabupaten/kota belum terbentuk di Sulawesi Selatan.

#### 2.1.2.3.2. Persentase Wirausaha Muda

Pada tahun 2017 persentase wirausaha muda mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh karena dinamika perekonomian global nasional.

**Tabel II.56**  
**Persentase Wirausaha Muda**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Wirausaha Muda	Orang	200	220	260	200	110
Jumlah Seluruh Wirausaha	Orang	1010	1010	1010	1010	1010
Persentase Wirausaha Muda	%	19,80	21,78	25,74	19,80	10,89

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.2.3.3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Penambahan jumlah cabang olahraga yang menjadi binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 sebanyak satu cabang olahraga. Jumlah keseluruhan cabang olahraga yang terdaftar di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2013 hingga 2017 sebanyak 50 cabang olahraga.

**Tabel II.57**  
**Cakupan Pembinaan Olahraga**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina	Cabor	15	16	16	16	16
Jumlah Seluruh Cabang Olahraga yang Ada/Terdaftar	Cabor	50	50	50	50	50
Cakupan Pembinaan Olahraga	%	30	32	32	32	32

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.2.3.4. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat dari tahun 2013 hingga 2015 mengalami peningkatan, sedangkan dari tahun 2015 hingga 2017 jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat mengalami penurunan sebanyak 90 orang. Kecenderungan penurunan jumlah pelatih bersertifikat kemungkinan dipengaruhi oleh persyaratan lisensi sertifikasi yang tidak dapat dipenuhi. Jumlah seluruh pelatih di Sulawesi Selatan mengalami stagnasi dengan jumlah 907 pelatih sejak lima tahun.

**Tabel II.58**  
**Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pelatih Bersertifikat	Orang	160	200	205	175	110
Jumlah Seluruh Pelatih	Orang	907	907	907	907	907
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	17,64	22,05	22,60	19,29	12,13

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.2.3.5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Jumlah atlet binaan dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan sejumlah 90 atlet. Sedangkan jumlah seluruh atlet pelajar di Sulawesi Selatan dari tahun 2013 hingga 2017 tidak mengalami peningkatan jumlah.

**Tabel II.59**  
**Cakupan Pembinaan Atlet Muda**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Atlet Pelajar yang Dibina	Atlet	110	110	115	115	200
Jumlah Seluruh Atlet Pelajar	Atlet	2652	2652	2652	2652	2652
Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	4,15	4,15	4,34	4,34	4,34

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.2.3.6. Jumlah Atlet Berprestasi

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh sebab itu olahraga seharusnya dilakukan oleh manusia, dan pemerintah harus berperan untuk menjadikan olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Setiap orang yang berolahraga tidak mempunyai tujuan yang sama, ada yang hanya untuk mencari kebugaran dan bagi seorang atlet tujuan utama berolahraga ialah ingin mendapatkan prestasi yang tinggi, sering disebut dengan prestasi olahraga. Berprestasi dikancah Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui peningkatan pembinaan pelatih, pencarian bibit-bibit muda yang potensial, dan pembangunan sarana prasarana. Dalam hal peningkatan kualitas dan prestasi keolahragaan juga telah diraih berbagai prestasi yaitu :

- a. Prestasi Olahraga Atlet Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Sekolah Keberbakatan Olahraga antara lain :
  1. Atlet PPLP meraih 4 medali emas, 3 medali perak dan 24 medali perunggu pada event Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Semarang Jawa Tengah.
  2. Atlet PPLP meraih 13 medali emas, 3 medali perak dan 11 medali perunggu pada Kejuaraan Nasional Antar PPLP.
- b. Prestasi Olahraga Atlet Pusat Pembinaan Atlet Prestasi Daerah antara lain :
  1. Atlet PPAPD meraih 5 medali emas, 2 medali perak pada Pekan Olahraga Antar Mahasiswa di Makassar.
  2. Atlet PPAPD meraih 2 medali emas, 1 medali perak pada Kejuaraan Nasional Jawa Timur open.
  3. Atlet PPAPD meraih 1 medali perak pada event Bosowa Maraton.
  4. Atlet PPAPD meraih 1 medali emas pada Kejuaraan Indonesia Timur.

5. Atlet PPAPD Cabang Olahraga Kempo meraih 1 medali emas, 1 medali perunggu pada event Kejurnas Piala Walikota Tangerang.
  6. Atlet PPAPD Cabang Olahraga Karate meraih 1 medali perunggu pada event Piala Panglima.
  7. Atlet PPAPD meraih 1 medali emas, 1 medali perunggu pada kejuaraan Gojukai se Selselbar dan Tenggara.
  8. Atlet PPAPD meraih 1 medali emas, pada Kejuaraan Silat Antar Periai Putih di Jakarta.
- c. Prestasi A Tradisional/Kemasyarakatan Atlet yang membutuhkan khusus Sulawesi Selatan pada Pekan Paralimpik Pelajar Nasional menempati urutan ke 12 dengan perolehan medali : 6 medali emas, 5 medali perak dan 4 medali perunggu.
- Jumlah atlet berprestasi tahun 2013 mengalami peningkatan hingga tahun 2017 dengan jumlah 81 atlet pada tahun 2017.

**Tabel II.60**  
**Jumlah Atlet Berprestasi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Atlet	50	39	46	76	81

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.2.3.7. Jumlah Prestasi Olahraga

Pencapaian prestasi cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga berfluktuasi dari tahun 2013 hingga 2017. Peningkatan kualitas pelatih dan kuantitas latihan bagi para atlet dibutuhkan untuk meningkatkan pencapaian target prestasi olahraga kedepan. Diharapkan agar pemerintah mendorong terbentuknya organisasi kepemudaan dan olahraga secara keseluruhan di kabupaten/kota serta menginisiasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk membuat inovasi Sistem Informasi Kepemudaan dan Olahraga (SIPOR).

**Tabel II.61**  
**Jumlah Prestasi Olahraga**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	Medali	17	18	17	14	16

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Analisis data capaian jumlah prestasi olahraga pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Prestasi cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi-Selatan mengalami fluktuasi. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi terbanyak pada tahun 2014 dan dua tahun berikutnya mengalami tren yang menurun. Namun demikian, pada akhir tahun 2017, jumlahnya kembali meningkat akan tetapi belum melebihi prestasi di tahun 2014.

Capaian prestasi sebagaimana yang telah di uraikan pada beberapa tabel di atas adalah hasil dari pembinaan atlet pelajar melalui program Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Program Pusat Pembinaan Atlet Prestasi Daerah (PPAPD). Jumlah Cabor yang dibina dari tahun 2013 – 2017 adalah 16 Cabor dan jumlah seluruh cabor yang ada / terdaftar dikomite olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Provinsi Sulawesi Selatan Sebanyak 50 cabor.

**2.1.2.3.8. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas Wilayah 46.717 Km2, terdiri dari 21 kabupaten dan 3 Kota, dengan jumlah penduduk sesuai data BPS tahun 2018 kurang lebih 8,7 Juta Jiwa, dalam kehidupan bermasyarakat, penduduk ini melakoni kehidupannya diwarnai/ dipengaruhi oleh 3 Etnis yaitu: Etnis Makassar, Bugis dan Toraja, masing-masing Etnis ini memiliki Kesenia Daerah yang berbeda-beda walaupun dalam pergaulannya sangat kental dan harmonis. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertugas membina, melestarikan dan mengembangkan Kesenian Daerah sebagai warisan Budaya, tugas tersebut pada tahun Anggaran 2013 – 2017, telah dilakukan terhadap Seniman melalui Kelompok/Sanggar Seni berupa; memberikan bantuan kepala Kelompok/Sanggar Seni dari Kab/Kota yang bersyarat, dan juga memberikan kesempatan sekaligus memfasilitasi para Pelaku Seni/Sanggar Seni yang berprestasi untuk menampilkan Karya Seninya pada Event-Event Daerah maupun pada Event Nasional.

Daya tarik kesenian daerah Sulawesi Selatan tidak kalah bersaing dengan kesenian daerah provinsi lain, bahkan pada berbagai Event tingkat Nasional Tim Seni Budaya Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan apresiasi ditingkat pusat, termasuk Festival Tari Nusantara di Jakarta tahun 2014 Tim Tari Provinsi Sulawesi Selatan meraih Prestasi sebagai “Penata Rias dan Busana Terbaik” dan pada Event Festival Nasional Teater Anak-Anak 2015 meraih prestasi sebagai “Sutra Dara Terbaik”. Seiring dengan perkembangan zaman, dimana para generasi muda sudah sangat mudah mengakses segala jenis kesenian modern melalui berbagai macam media yang dapat merusak mental generasi muda, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah tetap menghidupkan, membina, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai seni budaya sebagai alat perekat diantara etnis dan menjadi aset daerah.

**Tabel II.62**  
**Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	16	16	15	19	22

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**2.1.2.3.9. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**

Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang dipelihara/dilestarikan dalam daerah mengalami penurunan dari angka tertinggi pada Tahun 2014 sebesar 5 buah, pada Tahun 2015 sebesar 3 Buah dan Tahun 2016 turun menjadi 1 Buah, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 3 Buah dan kembali turun pada tahun 2018 sebesar 2 buah. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Cagar Budaya (Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya) kurang lebih 700 buah, tersebar di 24 Kabupaten/Kota. Data tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Cagar Budaya yang cukup banyak sehingga perlu dikelola dan dilestarikan dengan baik. Upaya pengelolaan dan pelestariannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Cagar Budaya baik berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya maupun Kawasan Cagar Budaya memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan Sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dalam rangka pelestarian dan pengelolaannya diperlukan adanya upaya perlindungan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya.



**Tabel II.63**  
**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Buah	5	3	1	3	2

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**2.1.2.3.10. Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi**

Karya budaya Sulawesi Selatan yang dimasukkan sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 terdapat di 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi selatan, yang jumlahnya saat ini baru dapat dicatat oleh seksi Sejarah dan Nilai Tradisional Bidang Sejarah dan Cagar Budaya sebanyak 670 Karya Budaya. Sejak Tahun 2013 hingga 2018 dari jumlah tersebut hanya 44 yang dianggap lengkap datanya dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai warisan Budaya Tak benda (WBTB) Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari 44 WBTB Indonesia asal Sulawesi Selatan itu ada 2 yang telah mendapatkan pengakuan Dunia sebagai warisan Dunia oleh UNESCO.

**Tabel II.64**  
**Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	4	3	3	6	6

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

**2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib**

**2.1.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan**

**2.1.3.1.1.1. Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah membandingkan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK untuk SMA/SMK Sederajat secara nasional telah memenuhi standar ideal berdasarkan Indikator Pemerataan dan Perluasan Pendidikan yang pencapaiannya di atas 100 % termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Pencapaian APK SMA/SMK Sederajat juga telah mencapai target nasional “tuntas paripurna” sejak tahun 2013, mencapai target Millenium Development Goals (MDG's) dan target UNESCO dalam Education For All (EFA), yang memastikan pada tahun 2017, semua anak laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar.

**Tabel II.65**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2018**

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Sulawesi Selatan</b>						
SMA/SMK/MA/Paket C	%	78,46	81,28	81,37	81,39	81,47
<b>Nasional</b>						
SMA/SMK/MA/Paket C	%	74,26	78,02	80,89	82,84	88,55

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

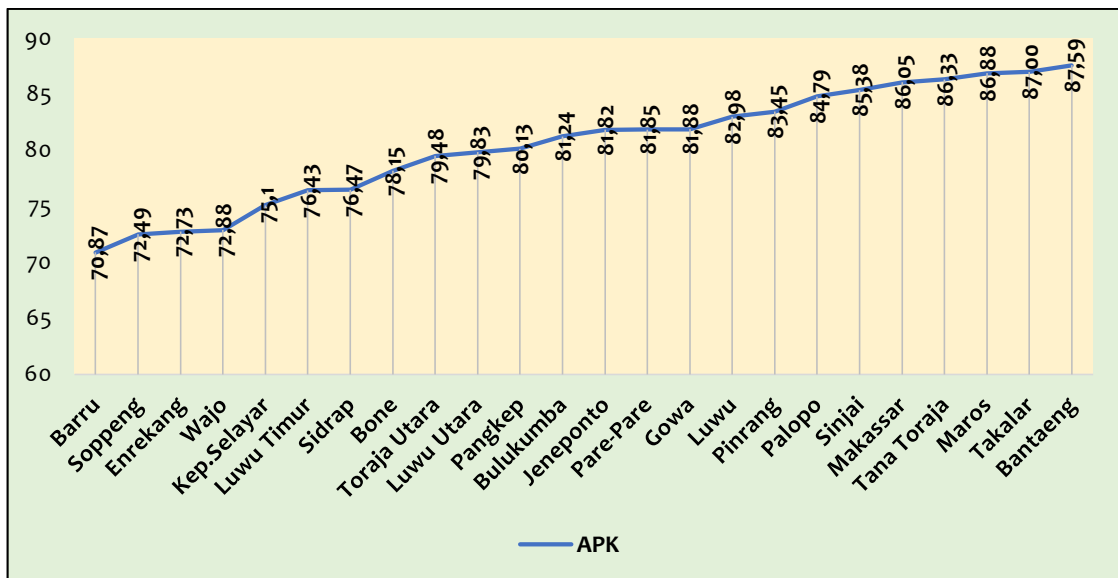
APK SMA/SMK/MA/Paket C seperti pada tabel diatas menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dari tahun 2014 APM SMA/SMK/MA/Paket C mencapai 78,46 mengalami kenaikan 3.01% pada tahun 2018 yang mencapai 81,47. Dibandingkan dengan capaian nasional APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2018 Sulawesi Selatan berada dibawah APK Nasional dengan nilai APK 88,55%. Keberhasilan capaian ini karena didukung adanya pertambahan dan perbaikan daya tampung baik melalui pembiayaan APBD maupun APBN (dekonsentrasi) serta dukungan koordinasi dengan stakeholder pendidikan (Kemdikbud, Disdik Kab/Kota dan Satuan Pendidikan).

**Tabel II.66**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2017**

No	Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		2016	2017
1	Kepulauan Selayar	85,19	75,10
2	Bulukumba	79,05	81,24
3	Bantaeng	70,83	87,59
4	Jeneponto	68,82	81,82
5	Takalar	99,77	87,00
6	Gowa	78,70	81,88
7	Sinjai	75,03	85,38
8	Bone	63,76	78,15
9	Maros	76,58	86,88
10	Pangkajene Kepulauan	92,51	80,13
11	Barru	71,82	70,87
12	Soppeng	88,04	72,49
13	Wajo	60,40	72,88
14	Sidenreng Rappang	80,45	76,47
15	Pinrang	84,41	83,45
16	Enrekang	92,33	72,73
17	Luwu	86,64	82,98
18	Tana Toraja	83,90	86,33
19	Luwu Utara	81,61	79,83
20	Luwu Timur	77,24	76,43
21	Toraja Utara	83,61	79,48
22	Makassar	94,98	86,05
23	Pare-Pare	80,56	81,85
24	Palopo	91,28	84,79
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>81,37</b>	<b>81,39</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

**Grafik II.7**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017**



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018 (Data Diolah)

#### 2.1.3.1.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APM SMA/MA Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari 54,26 persen pada tahun 2018 mencapai 70,89 persen angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan APM SMA/MA tingkat Nasional yang hanya 67,14 pada tahun 2018.

**Tabel II.67**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) MA/SMK/MA/Paket C**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2018**

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Partisipasi Murni (APM)				
		2014	2015	2016	2017	2018
Sulawesi Selatan						
SMA/SMK/MA/Paket C	%	61,48	70,12	70,46	70,54	70,89
Nasional						
SMA/SMK/MA/Paket C	%	59,35	59,71	59,95	60,37	67,14

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Peningkatan ketercapaian APM setiap tahunnya ditingkat provinsi ini, didukung dengan adanya kedisiplinan masyarakat yang patuh dan taat menyekolahkan anaknya sesuai dengan usia sekolah terutama pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Faktor lain adalah adanya sosialisasi di Kabupaten/Kota dan pada satuan Pendidikan yang memberikan pencerahan kepada masyarakat/lembaga tentang pentingnya pendidikan dan adanya program perluasan akses pendidikan yang bermutu dan terjangkau.

#### 2.1.3.1.1.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Pada tahun 2014 jumlah murid sekolah usia 16-19 tahun sebesar 305.841 dan meningkat pada tahun 2016 yakni 317.020 dan terus mengalami peningkatan menjadi 425.338 pada tahun 2018. sebanyak 351.422. APS SMA/SMK mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 sebesar 62,25% dan pada tahun 2018 mencapai 81.75%. Capaian APS dari 2014 hingga 2018 trendnya mengalami kenaikan setiap tahunnya rata – rata 4.07% dan atau mengalami kenaikan 16.45% dari tahun 2014 ke tahun 2018. Keberhasilan ini ditunjukkan adanya pertumbuhan / keberadaan sekolah khususnya tingkat SM sederajat di daerah yang padat penduduknya, yang terluar dan yang terpencil.

**Tabel II.68**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Murid Usia 16-19 Tahun	Orang	305.841	304.841	317.020	351.422	425.338
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	62,25	71,64	71,70	71,80	81.75

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.1.4. Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK (APtS)

Angka Putus Sekolah (APtS) dimaknai sebagai proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (SM sederajat = 16-18 tahun). Diinterpretasikan bahwa semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Pada tahun 2015 capaian angka putus sekolah = 1,10 mengalami penurunan 1,18 pada tahun 2014 dan turun 1,10 pada tahun 2015. Angka ini menunjukkan adanya kondisi pemerataan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang semakin baik. Keberhasilan ini didukung adanya pendanaan dana BOS nasional yang setiap tahunnya meningkat dan adanya sebagian daerah (Kab/Kota) menyediakan BOSDA. demikian pada tahun 2017 APTS ini kembali menurun menjadi 1,18 dan pada tahun 2018 turun menjadi 1,00.

**Tabel II.69**  
**Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Putus Sekolah (APS)				
		2014	2015	2016	2017	2018
SMA/SMK/MA	%	1,18	1,10	1,19	1,18	1,00

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.1.5. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Pelaksanaan evaluasi yang diselenggarakan setiap tahun pelajaran merupakan implementasi dari fungsi manajemen. Bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas yang indikator outputnya adalah Angka Kelulusan (AL). Oleh karena itu angka kelulusan ini menggambarkan capaian atas keberhasilan satuan pendidikan menamatkan sejumlah peserta didik atas ketuntasan criteria dan standar nilai yang ditetapkan. Kondisi angka kelulusan tahun 2014 sampai ke tahun 2018, menunjukkan peningkatan dengan capaian 0,52% , namun pada tahun 2017 turun menjadi 99,95% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 dengan capaian 99,98%.

Setiap tahunnya khususnya untuk Ujian Nasional struktur soal yang sering berubah pada tingkat kesukaran/pemahaman. Soal ujian kadang strukturnya lebih banyak pada dimensi pemahaman dan seperti pada soal di tahun 2018 strukturnya lebih banyak ke analisa sehingga kurang kesiapan siswa menghadapi/menelaah soal. Angka kelulusan merupakan persentase kelulusan dalam ujian nasional atau telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat. Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Indonesia mencapai pendidikan menengah.

**Tabel II.70**  
**Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Kelulusan (AL)				
		2014	2015	2016	2017	2018
SMA/SMK/MA	%	99,73	96,65	100	99,95	99,98

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.1.6. Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Berdasarkan data menunjukkan angka melanjutkan dari angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mengalami peningkatan sebesar 98.15 persen pada tahun 2018 dari 94.65 persen pada tahun 2017. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA/MA/SMK.

**Tabel II.71**  
**Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Jenjang Pendidikan	Satuan	Angka Melanjutkan (AM)				
		2014	2015	2016	2017	2018
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	87,43	87,46	94,13	94,65	98,15

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.1.7. Rasio Guru/Murid per Kelas Pendidikan Menengah

Perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah sekolah yang bersangkutan menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Sebaliknya nilai rasio yang rendah menunjukkan adanya penguasaan kelas yang lebih sehingga mutu pengajaran cenderung membaik. Rasio guru terhadap murid untuk jenjang/tingkat Sekolah menengah (SM) sederajat cenderung rasio menurun dari tahun ke tahun menunjukkan adanya mutu pengajaran yang baik. Capaian menunjukkan satuan pendidikan pada jenjang SM sederajat telah menjalankan program manajemen berbasis sekolah (school based management) dengan memperhatikan ketentuan Standar Proses (PBM) dan Standar Pengelolaan (Sekolah) yang termaktub dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Rasio murid dan guru bervariasi pada setiap jenjang, paling tinggi pada jenjang SMA yaitu 1:12. Semakin tinggi nilai rasio, semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru. Rendahnya rasio murid dan guru dapat terjadi karena membludaknya perekrutan guru di Sulsel. Pemerintah perlu memperketat kualifikasi calon guru agar kebutuhan guru tidak hanya terpenuhi secara kuantitas. Rasio guru terhadap murid di Sulawesi Selatan pada tahun 2016 mengalami perbaikan, bahkan rasio ini terlihat lebih baik



dari angka ideal. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah dimana pada tahun 2013 rasio guru terhadap murid pada tingkat SMA/MA 1:30 sementara pada tahun 2017 sebesar 1:12. Rasio guru murid pada kedua jenjang tersebut rata-rata masih dibawah 30, yang berarti bahwa proses belajar mengajar masih berlangsung secara optimal.

**Tabel II.72**  
**Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	1:30	1:28	1:13	1:12	1:12

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**2.1.3.1.1.8. Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah (SM) Sederajat**

Ratio Guru/Murid perkelas rata-rata diartikan sebagai perbandingan dari jumlah guru pada satuan pendidikan (SM sederajat) per kelas dengan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan (SM sederajat). Hal ini digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan kelas pada suatu sekolah atau daerah tertentu dengan interpretasi bahwa semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan kelas makin tinggi tetapi penguasaan kelas oleh guru semakin tidak efektif. Rasio Guru/Murid perkelas rata-rata dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami penurunan akan tetapi menunjukkan pengelolaan kelas yang semakin efektif. Dengan angka capaian yang menunjukkan pada satuan pendidikan (SM sederajat) mengatur jumlah kelompok belajar sesuai ketentuan Standar Sarana Prasarana Pendidikan sehingga penguasaan materi bagi siswa memperlihatkan kompetensinya dan bagi guru dapat memperlihatkan penguasaan bahan ajar/materi.

**Tabel II.73**  
**Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah (SM) Sederajat	1:30	1:28	1:13	1:12	1:12

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**2.1.3.1.1.9. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)**

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan program keaksaraan fungsional yang membimbing masyarakat untuk berkemampuan menguasai keterampilan membaca dan menulis. Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan trend yang signifikan, dimana setiap tahunnya ada peningkatan atau rata setiap tahun mengalami peningkatan 1,54%, atau dari tahun 2013 mengalami kenaikan 6,78 % ke tahun 2017. Kenaikan ini disebabkan adanya kebulatan tekad di masing-masing daerah menjadikan program strategis dalam meningkatkan Indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu bantuan pendanaan melalui dekonsentrasi memberikan alokasi dana yang signifikan untuk layanan bagi warga masyarakat yang tidak melek huruf setiap tahunnya.

**Tabel II.74**  
**Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	88,50	90,00	91,78	93,01	94,06

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**2.1.3.1.1.10. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

Guru memegang peranan strategis terutama dalam membentuk karakter bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Oleh karena itu Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dengan peningkatan persentase guru yang berkesempatan memperoleh kualifikasi S1/D-IV disebabkan peran dan koordinasi dari pusat ke provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan perhatian dan layanan dengan memberi kesempatan/izin untuk melanjutkan pendidikan sebagai tuntutan dari Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan tuntutan Undang-Undang Guru dan Dosen. Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2013-2017, pada tahun 2013 jumlah guru yang memenuhi sebanyak 72,57% kemudian naik pada dari tahun ke tahun hingga tahun 2017 sejumlah 91,80%.

**Tabel II.75**  
**Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	72,57	73,90	79,59	98,99	91,80

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Dari 24 kabupaten/kota persentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV yang terendah pada tahun 2016 adalah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah 98,17% dan yang terbanyak adalah Kota Makassar dengan jumlah 99,44%. Sedangkan pada tahun 2017 persentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV yang terendah adalah Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah 88,39% seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel II.76**  
**Kualifikasi Guru S1/D-IV Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

No	Kabupaten/Kota	Angka Melanjutkan (AM)	
		2016	2017
1	Kepulauan Selayar	98,17	89,49
2	Bulukumba	98,74	91,58
3	Bantaeng	98,46	95,22
4	Jeneponto	98,65	94,79
5	Takalar	98,57	92,31
6	Gowa	98,66	92,93
7	Sinjai	98,57	92,60
8	Bone	98,78	90,23
9	Maros	98,66	91,01
10	Pangkajene Kepulauan	98,48	89,13
11	Barru	98,45	93,79
12	Soppeng	99,07	94,27
13	Wajo	98,50	92,62
14	Sidenreng Rappang	98,38	92,08
15	Pinrang	98,92	92,85
16	Enrekang	98,74	96,09
17	Luwu	98,58	89,95
18	Tana Toraja	98,49	88,39

No	Kabupaten/Kota	Angka Melanjutkan (AM)	
		2016	2017
19	Luwu Utara	98,82	93,20
20	Luwu Timur	98,64	91,54
21	Toraja Utara	98,81	91,59
22	Makassar	99,44	91,17
23	Pare-Pare	98,87	91,11
24	Palopo	99,07	92,01
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>98,99</b>	<b>91,80</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

### 2.1.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

#### 2.1.3.1.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas). Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

**Tabel II.77**  
**Angka Kematian Bayi (AKB)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Kasus	1.113	1.167	1.183	1.059	1037

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Perkembangan angka kematian bayi selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2013 angkanya mencapai 1.041 jiwa, selanjutnya naik pada tahun 2014 menjadi 1.113 jiwa, dan tahun 2015 angka kematian bayi kembali naik yakni 1.167 jiwa hingga tahun 2016. Pada tahun 2017 angka kematian bayi turun menjadi 1.059 jiwa dan menurun pada tahun 2018 menjadi 1037 jiwa, penurunan angka kematian bayi ini terjadi setelah mengalami kenaikan selama 3 tahun berturut-turut. Terjadinya penurunan AKB merupakan dampak positif dari naiknya angka persalinan dengan bantuan tenaga medis dan meningkatnya proporsi tingkat pendidikan perempuan secara umum, khususnya para ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam usaha meminimalkan AKB diperlukan penanganan yang intensif baik dari faktor eksternal maupun internal, antara lain melalui keberadaan penolong persalinan yang mumpuni dan kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan serta peningkatan perawatan bayi seperti pemberian asupan makanan yang cukup serta pemberian ASI dan imunisasi.

#### 2.1.3.1.2.2. Angka Kematian Balita

Kasus kematian Balita dari tahun 2013 sampai 2017, cenderung meningkat namun terjadi penurunan pada akhir tahun 2017. Kematian balita pada umumnya disebabkan oleh Diare dan Pemonia, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan

pertolongan pada anak sakit. Disamping itu hal ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor resiko serta tata laksana dalam penanganan balita sakit yang belum kuat.

**Tabel II.78**  
**Angka Kematian Balita**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Jiwa	1.157	1.201	1.265	1.303	1.151

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.3. Angka Kematian Neonatal

Tahun 2013 hingga tahun 2017 cakupan kematian Neonatus masih fluktuatif, hal ini disebabkan diantaranya adalah kualitas kesehatan ibu hamil yang masih rendah, kompetensi petugas dalam penatalaksanaan bayi baru lahir masih kurang, dukungan sarana prasarana yang kurang memadai serta deteksi faktor resiko yang belum akurat. Kematian neonatal dari tahun 2013 hingga 2017 rata-rata disebabkan oleh BBLR dan Asfiksa, hal ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi BBLR dan kemampuan petugas dalam penanganan awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, sementara kualitas kesehatan ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya.

**Tabel II.79**  
**Angka Kematian Neonatal**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Kasus	813	762	936	887	818

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam yaitu Meningkatkan Kesehatan Ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi  $\frac{3}{4}$  resiko jumlah kematian ibu. Oleh karena itu, Indonesia harus berhasil menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

Grafik 2.22 menunjukkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dimana banyaknya kasus kematian Ibu nampak mengalami penurunan selama 4 tahun mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 156 kasus, turun pada tahun 2017 menjadi 115 kasus. Peningkatan kembali terjadi ketika 139 kasus pada tahun 2018.

Jika melihat data tersebut dari tahun 2013 hingga 2016 terjadi peningkatan kasus hal ini disebabkan:

1. Belum maksimalnya deteksi dini resiko tinggi bagi bumil, bulin dan nifas;
2. Belum semua tenaga kesehatan penolong persalinan memiliki skill penanganan kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal;

3. Puskesmas PONED belum berfungsi secara optimal baik ketersediaan alat maupun tenaga terlatih yang sudah tidak lengkap lagi, yang terdiri dari Dokter, Bidan, Perawat karena adanya tenaga yang melanjutkan Pendidikan ataupun mutase tenaga.
4. Belum semua RS di kabupaten/kota memiliki Bank Darah;
5. Sistem rujukan belum seluruhnya berjalan optimal;
6. Masih ada persalinan bukan di fasilitas kesehatan (Faskes);
7. Faktor 3 terlambat (terlambat mengenali tanda bahaya, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat dalam penanganan kegawatdaruratan.
8. Terdapat beberapa Kabupaten yang belum melaksanakan ANC terstandar dikarenakan fasilitas yang belum memadai terkait pemeriksaan laboratorium khusus;
9. Belum semua tenaga kesehatan menerapkan ANC sesuai standar dan terpadu (10T).
10. Masih kurangnya koordinasi antar penolong persalinan sehingga data kesehatan ibu hilang atau tidak lengkap.

Pada tahun 2018 jumlah kematian ibu menurun menjadi 139 kasus dari 115 kasus kematian pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena penyediaan alat pada puskesmas PONED/puskesmas perawatan belum cukup memadai, tersedianya Bank Darah RS hamper di 24 kabupaten/kota, dan system rujukan sudah mulai berjalan tapi belum optimal.

**Tabel II.80**  
**Angka Kematian Ibu (AKI)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Kasus	138	149	156	115	139

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.5. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Keberadaan posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Tahun 2013-2017 mewujudkan jumlah posyandu dan jumlah balita di Provinsi Sulawesi Selatan relative meningkat .

Pada tahun 2013, jumlah posyandu sebanyak 9.414 unit, meningkat menjadi 9.754 unit pada tahun 2017. Sedangkan jumlah balita pada tahun 2013 sebanyak 656.298 jiwa, meningkat pada tahun 2017 sebanyak 863.350 jiwa. Rasio Posyandu persatuan Balita pada tahun 2013 adalah 14.34 dan menjadi 11.30 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah posyandu sebanyak 10,936 unit dan jumlah balita sebesar 848,203 jiwa dengan rasio sebesar 12,8 persen

**Tabel II.81**  
**Rasio Posyandu Per Satuan Balita**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Posyandu	Unit	9.657	9.592	9.710	9.754	10,936
Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Per 1000 balita	11,74	12,70	12,23	11,30	12,8

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.6. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 75 Tahun 2014 tentang persyaratan Puskesmas pada Pasal 9, dijelaskan bahwa pada setiap kecamatan minimal harus memiliki satu puskesmas, dan dalam kondisi tertentu pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas yang dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas. Sementara berdasarkan PMK Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik pada pasal 5 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di



wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan. Sehingga dalam hal ini tidak ada penetapan rasio jumlah penduduk per puskesmas, mengingat kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah berbeda-beda termasuk luas wilayah pada kabupaten/kota tersebut serta mempertimbangkan ketersediaan SDM kesehatan sesuai kompetensi pada PMK Nomor 75 Tahun 2014.

**Tabel II.82**  
**Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Puskesmas	Unit	440	446	448	448	451
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	23,17	22,64	21,28	22,63	20,37

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.7. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan yaitu rumah sakit. Pada tahun 2014, jumlah rumah sakit sebanyak 91 unit dan pada tahun 2018 jumlah rumah sakit bertambah menjadi sebanyak 104 unit. Sedangkan rasio rumah sakit persatuan penduduk selama lima tahun terakhir (2014-2018) mengalami fluktuasi yang rendah. Pertumbuhan rumah sakit di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 hingga 2018 berkembang mengikuti trend pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan rumah sakit di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 hingga 2018 berkembang mengikuti trend pertumbuhan penduduk. Rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk sebesar 1,10 pada tahun 2018 memperlihatkan besarnya beban rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bila dilihat menurut kabupaten/kota, beberapa rumah sakit Daerah bahkan memiliki beban lebih besar. Hal ini menyebabkan rendahnya mutu pelayanan serta sulitnya masyarakat mengakses pelayanan rumah sakit yang cepat.

Sejak berlakunya JKN pada tahun 2014, kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan rumah sakit semakin meningkat. Trend kebutuhan pelayanan tersebut menyebabkan beberapa pihak swasta mendirikan rumah sakit untuk menangkap peluang tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2017 trend pertumbuhan rumah sakit relatif meningkat karena fenomena JKN tersebut, khususnya di daerah perkotaan seperti Kota Makassar. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesungguhnya lebih banyak berpengaruh oleh waktu tempuh dibandingkan karena jarak tempuh, menyebabkan beberapa daerah yang secara geografis memiliki wilayah yang luas dan kepadatan penduduk yang rendah menyulitkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, maka ratio rumah sakit terhadap jumlah penduduk harus ditingkatkan. Hal ini akan berpengaruh terhadap mutu pelayanan dan akses penduduk terhadap pelayanan rujukan.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah harus melakukan kajian dalam menyediakan layanan kesehatan rujukan untuk meningkatkan akses masyarakat. Meskipun pertumbuhan rumah sakit mulai terasa sejak 2014, tetapi angka tersebut didominasi oleh rumah sakit swasta. Padahal sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan akses tersebut.

**Tabel II.83**  
**Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (Pusat/Vertikal)	Unit	2	2	2	2	2

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru Dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah	Unit	6	6	5	6	6
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/ Polri	Unit	7	7	7	7	7
Jumlah Rumah Sakit Pemprov, Pemkab dan Pemkot	Unit	32	32	34	32	35
Jumlah Rumah Sakit Swasta	Unit	44	46	45	51	57
Jumlah Seluruh Rumah Sakit	Unit	91	93	93	98	104
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	1,08	1,09	1,08	1,03	1,10

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Sulitnya akses masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit sejak berlakunya era JKN, akses masyarakat terhadap pelayanan masyarakat semakin meningkat. Namun hal ini tidak diimbangi dengan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada. Secara geografis, beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan memiliki kepadatan penduduk yang rendah karena wilayahnya luas dengan jumlah penduduk sedikit sehingga jumlah sarana pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan sarana pelayanan kesehatan yang berdasarkan rasio jumlah penduduk hanya melihat dari jarak tempuh tanpa mempertimbangkan waktu tempuh menjadi penyebab sulitnya masyarakat mengakses sarana pelayanan kesehatan. Perlunya ditingkatkan mutu pelayanan rumah sakit pemerintah. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan rujukan seharusnya diimbangi dengan kualitas pelayanan, khususnya RS Pemerintah. R

#### 2.1.3.1.2.8. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada tahun 2014 jumlah dokter 1.456 orang dengan rasio 17,27 persen dan pada tahun 2018 jumlah dokter meningkat menjadi 1.537 orang dokter dengan rasio 16,14 persen . Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah dokter dari tahun 2014-2018 belum sebanding dengan pertambahan penduduk.

**Tabel II.84**  
**Rasio Dokter Per Satuan Penduduk**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Dokter Umum	Jiwa	1.456	1.413	1.356	1.341	1537
Jumlah Penduduk	Jiwa	8.432,163	8.520,345	8.606,375	9.522.503	9.426.885
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	17,27	16,58	15,76	14,08	<b>16.14</b>

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.9. Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk

Pemenuhan Rasio tenaga kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat, ini karena adanya upaya yang dilakukan untuk pemenuhan tenaga kesehatan oleh pemerintah pusat dan daerah. Upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini dianggap belum mencukupi dan belum sesuai kebutuhan di unit pelayanan kesehatan termasuk di Puskesmas dan Rumah Sakit. Khususnya untuk pemenuhan tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan, ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang jumlahnya masih sangat kurang seperti tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi), serta tenaga untuk upaya promotive dan preventif (tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga farmasi, dan tenaga ahli teknologi laboratorium medis).

Pendistribusian tenaga kesehatan tidak merata utamanya didaerah terpencil, perbatasan dan kepulauan dan rawan bencana serta daerah bermasalah kesehatan lainnya. Ini disebabkan karena daerah tersebut masih kurang diminati oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang telah ditempatkan di daerah tersebut selalu berusaha untuk pindah ke daerah perkotaan dengan berbagai macam alasan yang mereka ajukan. Selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan dengan melakukan penugasan khusus namun beberapa daerah tetap kosong peminat untuk bertugas didaerah tersebut. Jumlah tenaga medis di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2014-2018 mengalami peningkatan yaitu dari 3.111 orang pada tahun 2014 menjadi 4.028 orang pada tahun 2018. peningkatan jumlah tenaga medis tersebut mengakibatkan rasio tenaga medis persatuan penduduk juga mengalami peningkatan 25.14 pada tahun 2014 menjadi 42.72 per 100.000 penduduk pada tahun 2018.

**Tabel II.85**  
**Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Tenaga Medis	Jiwa	3.111	4.089	3.581	3.590	4,028
Jumlah Penduduk	Jiwa	8.432,163	8.520,345	8.606,375	9.522.503	9.426.885
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	36,89	47,99	41,61	<b>37,70</b>	<b>42,72</b>

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Distribusi tenaga kesehatan belum merata di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) Kabupaten/Kota. Re-distribusi tenaga kesehatan belum dapat diatur oleh stakeholder terkait di Kab/Kota (dinkes Kab/Kota, BKD Kabupaten/Kota). Pengangkatan tenaga kesehatan tidak sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah.

#### **2.1.3.1.2.10. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani**

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2013 sebesar 64,99% masih ada sekitar 35,01% yang tidak ditangani, tahun 2014 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 71,65% masih ada sekitar 28,35% yang tidak ditangani, tahun 2015 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 79,21% masih ada sekitar 20,79% yang tidak ditangani, tahun 2016 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 76,48% masih ada sekitar 23,52% yang tidak ditangani dan pada tahun 2017 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 81,84% masih ada sekitar 18,16% yang tidak ditangani. Jika melihat data tersebut penanganan komplikasi kebidanan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan hal ini disebabkan tenaga kesehatan telah melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K) yang merupakan suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan di Desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil termasuk perencanaan penggunaan KB Pasca Persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan Bayi Baru Lahir. Beberapa permasalahan yang dihadapi :

1. Keterlambatan dalam pengambilan keputusan (belum optimalnya pemahaman tentang 3 Terlambat);
2. Skrining deteksi resiko tinggi bagi ibu hamil belum maksimal;
3. Pelaksanaan ANC sesuai standar (10 T), berkualitas dan terpadu belum terlaksana secara maksimal.

Data rekapitulasi Kabupaten/Kota cakupan ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani secara defenitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan berkompeten

pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan tahun 2013 hingga tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi. Tahun 2013, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 64,99%, meningkat menjadi 71,65% di tahun 2014 dan 79,21% pada tahun 2015. Namun pada akhir tahun 2016 menurun menjadi 76,48%. Sampai dengan tahun 2017 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 79,95%. Hal ini menunjukkan masih perlunya ditingkatkan upaya yang mendukung peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu yang sesuai standar di Sulawesi Selatan khususnya dalam penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan sesuai kompetensinya. Terlambat dalam pengambilan keputusan, Skrining Deteksi Resiko Tinggi bagi ibu hamil belum maksimal serta Pelaksanaan ANC sesuai standar (10 T), berkualitas dan terpadu belum terlaksana secara maksimal menjadi permasalahan dalam pelayanan komplikasi dalam persalinan.

**Tabel II.86**  
**Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	64,99	71,65	79,21	76,48	81,84

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.11. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2013 sebesar 92,74% berarti ada sekitar 7,26% yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan. Tahun 2014 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 92,79% dan yang ditolong oleh non kesehatan sekitar 7,21%. Tahun 2015 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 94,02% dan masih ada yang ditolong bukan oleh tenaga kesehatan sekitar 5,98%. Tahun 2016 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 92,90% dan masih ada yang ditolong bukan oleh tenaga kesehatan sekitar 7,1% dan tahun 2017 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 94,05% dan masih ada yang ditolong bukan oleh tenaga kesehatan sekitar 5,95%. Jika melihat cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami peningkatan namun capaian pada tahun 2016 menurun hal ini disebabkan karena adanya ibu hamil yang melahirkan bukan di fasilitas kesehatan dan pertolongan bukan oleh tenaga kesehatan. Hal tersebut dipengaruhi diantaranya jarak dengan fasilitas kesehatan, alat transportasi, letak demografi daerah dan pengetahuan mencari penolong persalinan yang aman dan pengetahuan tersebut mempengaruhi keputusan dalam meminta bantuan penolong persalinan.

Pada tahun 2017 capaian persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat menjadi 94,05%, hal ini disebabkan Kabupaten/Kota telah melaksanakan permenkes 97 tahun 2014 tentang pelayanan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, menyelenggarakan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual yang terdapat pada bagian ketiga pasal 14 ayat 1 yaitu persalinan harus dilakukan di fasilitas kesehatan, namun secara umum penyebab masih adanya persalinan yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah :

1. Masih adanya persalinan yang dilakukan dirumah karena kondisi wilayah yang terpencil dan jauh dari fasilitas kesehatan serta adanya pengaruh budaya (kepercayaan) yang dianut oleh masyarakat.
2. Masih terdapat tenaga penolong persalinan yang belum melaksanakan asuhan persalinan sesuai standar.

Selain kesehatan ibu hamil, proses persalinan yang tepat turut berperan dalam melahirkan generasi yang sehat. Persentase perempuan pernah kawin yang melahirkan anak lahir hidup dengan ditolong oleh tenaga kesehatan telah mencapai 95,31% pada tahun



2017. Beberapa kabupaten/kota bahkan telah 100 persen menggunakan tenaga kesehatan. Cakupan kunjungan ibu bersalin yang memperoleh pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2013-2017 di Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II.87**  
**Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	92,74	92,79	94,02	92,90	94,05

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Masih adanya persalinan yang dilakukan di rumah dikarenakan kondisi wilayah yang terpencil dan jauh dari fasilitas kesehatan serta adanya pengaruh budaya (kepercayaan) yang dianut oleh masyarakat. Masih terdapat tenaga penolong persalinan yang belum melaksanakan asuhan persalinan sesuai standar.

#### 2.1.3.1.2.12. Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Cakupan UCI di Provinsi Sulawesi Selatan selama empat tahun berturut-turut (tahun 2013-2018) menunjukkan peningkatan, pada tahun 2013 sebesar 87,1% meningkat menjadi 90,5% di tahun 2013, ditahun 2014 kembali meningkat menjadi 94,98% dan mencapai 95,28% pada tahun 2015. Namun data Sampai dengan bulan Desember tahun 2018 menunjukkan Cakupan UCI di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yaitu sebesar 95,27%, tercatat dari 3.027 Desa/Kelurahan di Provinsi Sulawesi Selatan jumlah Desa/Kelurahan yang sudah mencapai UCI sebanyak 2.884 Desa/Kelurahan. Hal ini disebabkan beberapa hal di antara lain :

1. Terdapat wilayah yang sulit dijangkau dan keterbatasan alat transportasi terutama di daerah pulau dan adanya mutase petugas di Puskesmas dan Kabupaten;
2. Perbedaan data sasaran pusdatin yang jauh selisih dengan data riil Kabupaten/Kota.;
3. Adanya kelompok-kelompok penolakan terhadap imunisasi;
4. Usaha (berita) anti vaksin semakin gencar.

Cakupan UCI di Provinsi Sulawesi Selatan selama empat tahun berturut turut (tahun 2013-2017) menunjukkan peningkatan, pada tahun 2013 sebesar 87,1% meningkat menjadi 90,5% di tahun 2013, ditahun 2014 kembali meningkat menjadi 94,98% dan mencapai 95,28% pada tahun 2015. Namun data Sampai dengan bulan Desember tahun 2017 menunjukkan Cakupan UCI di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yaitu sebesar 96,45%, tercatat dari 3.027 Desa/Kelurahan di Provinsi Sulawesi Selatan jumlah Desa/Kelurahan yang sudah mencapai UCI sebanyak 2.884 Desa/Kelurahan.

**Tabel II.88**  
**Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Desa/Kelurahan UCI	Desa/ Kel	2.873	2.884	2.855	2.933	2884
Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan	Desa/ Kel	3.025	3.027	3.029	3.041	3.027
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	94,98	95,28	94,26	96,45	95,27

Sumber : sipd.kemendagri.go.id



### 2.1.3.1.2.13. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, tahun 2018, proporsi status gizi buruk nasional sejumlah 3,9% dan status gizi kurus mencapai 6,7% dan sangat kurus mencapai 3,5%. Jumlah balita gizi buruk yang terbanyak di Sulawesi Selatan adalah di Kabupaten Wajo sejumlah 19 kasus, Kabupaten Bone sejumlah 14 kasus dan Kota Makassar sejumlah 11 kasus. Cakupan balita gizi buruk di provinsi Sulawesi Selatan yang mendapat perawatan sudah mencapai angka 100 persen sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1. Pelatihan penatalaksanaan kasus gizi buruk dengan output terbentuknya Tim Tata Laksana Gizi Buruk Terlatih di tingkat Puskesmas maupun RS;
2. Peningkatan deteksi dini kasus-kasus gizi buruk di Posyandu;
3. Pemberian Makanan Tambahan pada balita kurus dan bumil KEK selama 90 hari makan;
4. Melaksanakan konseling menyusul dan konseling gizi di Puskesmas.

Adapun kendala yang ditemukan adalah:

1. Program Penanggulangan Kasus Gizi Buruk masih sektoral (kesehatan) padahal permasalahannya multifactor bukan hanya dari aspek kesehatan/Gizi tetapi juga dari aspek Kemiskinan, Lingkungan, Air Bersih (Intervensi Sensitif dan Spesifik);
2. Tim Tata Laksana Kasus Gizi Buruk yang sudah dilatih di Tingkat Provinsi banyak yang sudah berpindah tugas (mobilitas tinggi) sehingga upaya penanganan kasus gizi buruk menjadi tidak optimal;
3. Banyak orang tua penderita gizi buruk menolak saat anaknya dirujuk untuk intervensi penatalaksanaan kasus gizi buruk melalui rawat inap.

Program Penanggulangan Kasus Gizi Buruk masih sektoral (kesehatan) padahal permasalahannya multifaktor bukan hanya dari aspek kesehatan/Gizi tapi juga dari aspek Kemiskinan, Lingkungan, Air bersih dll (Intervensi Sensitif dan Spesifik). Tim Tata Laksana Kasus Gizi Buruk yang sudah dilatih di Tingkat Provinsi banyak yang sudah berpindah tugas (mobilitas tinggi) sehingga upaya penanganan kasus gizi buruk menjadi tidak optimal. Banyak Orang Tua Penderita Gizi Buruk menolak saat anaknya dirujuk untuk intervensi Penatalaksanaan Kasus Gizi Buruk melalui rawat inap.

**Tabel II.89**  
**Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Balita	229	184	156	138	369
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Balita	229	184	156	138	369
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	<b>100</b>

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 2.1.3.1.2.14. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Hal ini antara lain didukung oleh upaya-upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Provinsi kepada 24 Kabupaten/Kota. Diharapkan capaian kinerja ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang mengingat pemberian kekebalan anak terhadap penyakit campak ini merupakan investasi masa depan. Pelaksanaan imunisasi campak pada kelompok sasaran di Provinsi Sulawesi Selatan, masih menemukan beberapa kendala antara lain:

1. Adanya kelompok-kelompok penolakan terhadap imunisasi;
2. Usaha (berita) anti vaksin semakin gencar.

Salah satu hal penting dalam menjaga kesehatan bayi adalah imunisasi, persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap di Sulsel tahun 2017 sebesar 102%. Persentase tertinggi adalah Kota Pare-Pare sebesar 120%, sementara Kepulauan Selayar hanya 90%.

**Tabel II.90**  
**Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	99,6	99,4	98,4	101	102

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.15. Non Polio AFP Rate

Pelacakan kasus lumpuh layu di kabupaten/kota sangat ditentukan oleh SDM yang ada. Kasus lumpuh layu didapatkan dari rumah sakit dan masyarakat. Permasalahan dalam penemuan kasus lumpuh layu adalah:

1. Tenaga klinis tidak pernah dilatih tentang surveilans lumpuh layu/AFP;
2. Keterbatasan anggaran;
3. Pemeriksaan specimen tinja kasus AFP masih dikirim ke BBLK Surabaya sebagai laboratorium rujukan nasional;
4. Penemuan kasus AFP di rumah sakit sangat rendah karena dokter spesialis belum tersosialisasi program surveilans AFP.

Tenaga klinisi tidak pernah dilatih tentang surveilans Lumpuh Layu/AFP. Pemeriksaan spesimen tinja kasus AFP masih dikirim ke BBLK Surabaya sebagai laboratorium rujukan nasional. Penemuan kasus AFP di rumah sakit sangat rendah karena dokter spesialis belum tersosialisasi program surveilans AFP.

**Tabel II.91**  
**Non Polio AFP Rate**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	1,92	2,08	1,60	1,60	1,96

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.16. Cakupan Balita Pneumonia

Cakupan balita pneumonia yang ditangani tahun 2013 sebanyak 1,89%, tahun 2014 sejumlah 10,04%. Capaian yang sangat rendah disebabkan karena petugas ISPA di tingkat Puskesmas belum mendapatkan pelatihan tentang pelaksanaan kegiatan program ISPA dan tatalaksana Pnemonia/ISPA. Capaian di tahun 2015 sebanyak 10,01%, tahun 2016 sebanyak 18,24%, dan tahun 2017 sebanyak 19,04% dimana target 2015-2017 yaitu 9,7% dimana petugas kabupaten/kota dan puskesmas sudah mendapatkan sosialisasi tatalaksana ISPA sesuai standar sehingga cakupan yang diperoleh diatas target provinsi, artinya capaian 2015-2017 sudah melebihi target provinsi yaitu 9,7%. Tingginya tingkat mutasi di daerah yang berimbas pada pengelola program baik di Kabupaten/Kota maupun di tingkat Puskesmas sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan program di daerah. Dukungan Sumberdaya (SDM, bahan KIE serta sarana dan prasarana) yang tersedia masih terbatas, masih lemahnya koordinasi antar Program, Dokter, Pengelola Program dan Petugas MTBS serta program lain.

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Petugas ISPA di tingkat Puskesmas belum mendapatkan pelatihan tentang pelaksanaan kegiatan program ISPA dan tatalaksana Pnemonia/ISPA;

2. Tingginya tingkat mutase di daerah yang berimbas pada pengelola program baik di kabupaten/kota maupun di tingkat Puskesmas sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan program di daerah;
3. Dukungan Sumber Daya (SDM, Bahan KIE serta sarana dan prasarana) yang tersedia masih terbatas, masih lemahnya koordinasi antar Program, Dokter, Pengelola Program dan Petugas MTBS serta program lain.

**Tabel II.92**  
**Cakupan Balita Pneumonia**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	1,89	10,04	10,01	18,24	19,04

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.17. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah perkiraan penderita baru TBC TBA (+) di Sulawesi Selatan pada tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan dan penurunan jumlah penderita TBC BTA yang ditemukan dan diobati. Pada tahun 2013 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 50,80% dan meningkat pada tahun 2014 52,70%, kemudian menurun hingga tahun 2016 43,90%. Tetapi pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan mencapai 46,00%. Tentunya perlunya kesadaran masyarakat untuk saling menjaga kondisi lingkungan sekitarnya serta belum adanya kewajiban pelaporan dari RS dan layanan kesehatan swasta dalam penemuan dan tatalaksana TB (*mandatory notification*). Dalam upaya penemuan dan penanganan pasien TBC dibutuhkan strategi yang tepat yaitu strategi DOTS. Pengobatan TBC yang diberikan di fasilitas kesehatan DOTS dilakukan secara gratis oleh pemerintah dengan pendampingan yang dilakukan oleh PMO selama 6 bulan masa pengobatan hingga tuntas. Beberapa permasalahan yang dihadapi selama ini adalah:

1. Data penemuan dan pengobatan pada RS dan fasilitas kesehatan swasta masih ada yang belum masuk dalam system pelaporan program TBC;
2. Beberapa fasilitas kesehatan swasta tidak memberikan penanganan yang tepat sesuai standar ISTC.

**Tabel II.93**  
**Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun	Jiwa	8.929	8.859	8.191	7.139	7.890
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	Jml	12.208	16.949	17.518	17.518	26.919
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	50,80	52,7	48,3	43,9	46

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.18. Tingkat Prevalensi Tuberkolosis

Target program penanggulangan TBC secara nasional telah ditetapkan eliminasi TBC akan dicapai pada tahun 2030. Dalam roadmap eliminasi TBC menunjukkan sampai tahun 2020 diharapkan adanya upaya akselerasi untuk meningkatkan penemuan kasus TBC. Angka penemuan kasus berdasarkan data yang telah didapatkan menunjukkan peningkatan setiap

tahunnya dari tahun 2013-2015. Hal ini menggambarkan jumlah kasus yang telah didapatkan di pelayanan kesehatan dan dilaporkan di program terus meningkat. Beberapa hal yang menjadi permasalahan pada tahun 2016 tidak meningkat adalah :

1. Belum adanya kewajiban pelaporan dari Rumah Sakit dan layanan kesehatan swasta dalam penemuan dan tatalaksana TB (*mandatory notification*);
2. Sebagian besar Kab/Kota belum mengembangkan jejaring eksternal dalam program TBC;
3. Jejaring internal rumah sakit yang masih lemah, sehingga beberapa kasus TBC yang ditemukan di beberapa poli rumah sakit tidak tercatat dan dilaporkan dengan baik di unit DOTS rumah sakit;
4. Beberapa fasilitas kesehatan swasta belum menjalankan program TBC dengan strategi DOTS.

**Tabel II.94**  
**Tingkat Prevalensi Tuberkulosis**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	Per 100.000 penduduk	146	152	156	156	197

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.19. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis

Laporan kematian yang masuk tidak semua penyebab utamanya adalah Tuberkulosis. Data tahun 2017 akan bisa dievaluasi 1 tahun setelah pengobatan (kohor pengobatan). Angka kematian pada penderita TBC pada tahun 2013-2016 relatif sama, namun pada tahun 2017 turun menjadi 3 per 100.000 penduduk. Beberapa hal yang menjadi penyebab kematian penderita TBC masih tinggi antara tahun 2013-2016:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini bila telah ditemukan gejala awal TBC.
2. Keterlambatan dalam mengakses fasilitas kesehatan karena stigma yang masih ada di masyarakat.
3. Pengobatan yang tidak tuntas sehingga kematian semakin tinggi.

**Tabel II.95**  
**Tingkat Kematian karena Tuberkulosis**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kematian karena Tuberkulosis	Jiwa	3.847	4.351	3.962	4.278	3.732
Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	Per 100.000 penduduk	5	6	6	6	3

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.20. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Belum adanya kewajiban pelaporan dari RS dan layanan kesehatan swasta dalam penemuan dan tatalaksana TB (*mandatory notification*). Dalam proporsi jumlah kasus TBC menggambarkan banyaknya kasus TBC yang terjangkau oleh program. Berdasarkan proporsi penemuan kasus TBC yang didapatkan, belum mencapai target yang diharapkan yaitu >70%. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 belum menunjukkan peningkatan. Beberapa hal yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Beberapa adanya kewajiban pelaporan dari RS dan Fasilitas kesehatan swasta lainnya dalam penemuan kasus TBC (*mandatory notification*);

2. Upaya penemuan kasus TBC masih lebih bersifat pasif karena petugas TBC masih lebih cenderung untuk menunggu pasien yang datang ke fasilitas kesehatan;
3. Keterlibatan kader kesehatan untuk program TBC belum optimal;
4. Jejaring internal dan eksternal antara fasilitas kesehatan belum berjalan dengan baik;
5. Upaya skrining terduga TBC belum dilaksanakan pada kelompok-kelompok populasi daerah kumuh dan miskin, lapas dan lain-lain;
6. Komitmen pemerintah daerah yang masih rendah.

**Tabel II.96**  
**Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam Program DOTS	%	50,80	52,70	48,30	43,90	46,00

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**2.1.3.1.2.21. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS**

Success Rate (SR) tahun 2016-2017 belum mencapai target karena:

- a. Beberapa kasus pindah yang tidak melaporkan data kesembuhan;
- b. Turn over SDM TB yang tinggi yang mengakibatkan pasien tidak terlayani dengan baik (*Lost to Follow Up*).

Target kesembuhan antara 2013-2015 telah mencapai sesuai indikator nasional yaitu 85%. Tahun 2016 sesuai kebijakan NTP (*National Tuberculosis Program*) target yang harus dicapai sebesar 90%. Berdasarkan laporan data kesembuhan antara 2016-2017 menunjukkan hasil yang belum mencapai target. Beberapa hal yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Turn Over SDM TBC yang tinggi sehingga mengakibatkan pasien terlayani dengan baik
2. Beberapa kasus pindah ke daerah lain dengan tidak memberikan laporan hasil pengobatan yang dijalani
3. Beberapa kasus melaporkan *lost to follow up* dengan beberapa penyebab yaitu efek samping obat, kejenuhan karena pengobatan yang sangat lama, ekonomi, kurangnya dukungan keluarga.

**Tabel II.97**  
**Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	%	86	86	86	87	89

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**2.1.3.1.2.22. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD**

Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2013 yaitu 4.834 kasus, yang ditangani sesuai SOP berjumlah 4.834 kasus. Pada tahun 2017 jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani mengalami penurunan dari tahun 2016 dengan jumlah temuan 7.587 kasus. Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan dan yang ditangani sesuai SOP pada tahun 2017 sebanyak 1.755 kasus. Diantara 24 kabupaten/kota jumlah kasus DBD yang tertinggi pada Kabupaten Maros dengan jumlah temuan 253 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mencapai 100, resiko penularan di masyarakat seperti angka bebas jentik 100%. Kekurangan logistik untuk penemuan kasus dan penanggulangan kasus serta perlunya sosialisasi tatalaksana kasus DBD untuk Dokter dan Petugas di Puskesmas. Persentase cakupan penemuan dan



penanganan penderita penyakit DBD di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mencapai 100%, karena jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah seluruhnya dapat ditangani sesuai standar/SOP. Hal ini dapat tercapai karena penanganan penderita DBD dapat langsung dilakukan oleh rumah sakit dan puskesmas yang ada di masing-masing Kab/Kota.

Kesadaran dari masyarakat untuk segera membawa penderita sedini mungkin ke rumah sakit atau puskesmas sangat berperan dalam penanganan berdasarkan standar/SOP yang ada.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah masih terdapat perbedaan standar/SOP yang dipedomani oleh dokter dan petugas kesehatan pada masing-masing rumah sakit dan puskesmas di Kab/Kota. Hal ini terlihat dari terjadinya kenaikan drastis terhadap jumlah penderita di tahun 2016 yang mencapai hingga 190% dari jumlah penderita di tahun 2015. Kondisi ini terjadi karena penetapan kriteria penderita DBD yang digunakan hanya berdasarkan pada keadaan demam/suhu badan  $39^{\circ}\text{C}$ , serta adanya bintik-bintik merah pada tubuh penderita (*petechiae*). Sedangkan berdasarkan WHO, standar yang digunakan adalah melalui pemeriksaan Darah Rutin seperti Hb, Trombosit, Haematokrit, Ns-1, IgG/IgM, dan deteksi adanya kebocoran plasma pada penderita.

Sebagai solusi Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel senantiasa mendorong penyamanan standar yang digunakan oleh petugas kesehatan, diantaranya dengan melakukan kegiatan sosialisasi Tata Laksana Kasus bagi Dokter dan pengelola Program DBD yang ada di puskesmas masing-masing Kab/Kota. Selain itu untuk menurunkan jumlah penderita maka dilakukan gerakan pencegahan berupa Gerakan 1 (satu) rumah 1 (satu) Jumantik (G1R1J) dengan menggandeng masing-masing Pemerintah Kab/Kota yang juga untuk terus meningkatkan capaian diatas, maka masih dihadapi diantaranya :

1. Kekurangan logistik untuk penemuan kasus dan penanggulangan kasus
2. Pelaksanaan sosialisasi tatalaksana kasus DBD belum menyentuh seluruh Dokter dan Petugas di Puskesmas/RSUD di masing-masing Kab/Kota
3. Gerakan 1 (satu) rumah 1 (satu) jumantik (G1R1J) belum dilaksanakan oleh seluruh Kab/Kota.

**Tabel II.98**  
**Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun	Jiwa	4.834	3.386	4.037	7.587	1,755
Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wikayah dalam kurun waktu yang sama	Jiwa	4.834	3.386	4.037	7.587	1,755
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.23. Penderita Diare yang Ditangani

Menurunnya jumlah kasus yang dilaporkan dari tahun 2013-2017 setiap tahun belum mencerminkan bahwa jumlah kasus diare sudah berkurang di masyarakat. Hal ini terlihat dari target cakupan penemuan dan pelayanan penderita diare sampai akhir tahun 2017 belum mencapai target 100%. Beberapa hal yang menjadi kendala sehingga target cakupan penemuan dan pelayanan belum tercapai di antaranya adalah petugas diare di puskesmas dan kabupaten belum secara rutin dan tepat waktu mengirimkan laporannya, Kasus-kasus diare yang tangani di rumah sakit belum semua dilaporkan, masih kurangnya kegiatan sosialisasi di masyarakat tentang pentingnya penanganan kasus diare di pelayanan kesehatan khususnya kepala balita, sehingga banyak orang tua yang menangani sendiri

kasus diare di rumah tangga dengan cara yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan tatalaksana diare pada belita. Beberapa masalah dalam penanganan penderita diare diantaranya:

1. Masih banyak laporan yang tidak masuk dari puskesmas
2. Kurangnya motivasi kerja pengelola puskesmas untuk mengirimkan laporan tepat waktu
3. Laporan yang dikirim masih banyak yang kurang tepat (tidak sesuai)
4. Seringnya terjadi mutasi pegawai dalam lingkup puskesmas, sehingga mempengaruhi kinerja pengelola yang sudah terlatih.

**Tabel II.99**  
**Penderita Diare yang Ditangani**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penderita Diare yang Ditangani	Orang	243.669	240.381	238.085	192.681	169.972

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.24. Angka Kejadian Malaria

Penurunan Angka Kejadian Malaria sesuai dengan Target Nasional Yaitu < 1 Per 1000 Penduduk pada Tahun 2013 sampai dengan 2017, penurunan angka ini di sebabkan karena penemuan kasus malaria Secara dini atau early diagnosis dan prompt treatment sehingga memutuskan mata rantai penularan malaria setempat. Penurunan Angka Kejadian Malaria diperoleh dengan berbagai upaya yang telah dilakukan baik oleh Provinsi maupun Kab/Kota, diantaranya adalah peningkatan Kapasitas SDM, Mass Bolod Survey (MBS), Penyemprotan Rumah, Distribusi Kelambu, Surveilans Migrasi, Sosialisasi Sistem Surveilans Malaria kepada LS/LP, pengamatan daerah reseptif dan pemberdayaan masyarakat. Walaupun angka kesakitan malaria sudah tercapai terget nasional, tetapi masih banyak kendala yang di hadapi di lapangan terutama dalam kualitas SDM, *logistic (Laboratorium Supply)* penatalaksanaan, dan kasus import yang datang dari daerah – daerah endemis yang harus ditemukan secara dini. Beberapa permasalahan dalam penanganan kejadian malaria diantaranya:

1. Masih perlu pelatihan bagi tenaga mikroskopis Puskesmas;
2. Logistik penemuan penderita (*Rapid Test Diagnostik/RDT*) bagi puskesmas yang tidak memiliki tenaga mikroskopis masih kurang;
3. Mikroskop yang layak pakai pemeriksaan sediaan darah masih kurang;
4. Jejaring tatalaksana untuk klinik Swasta, Dojter Swasta belum berjalan dengan baik;
5. Sistem surveilans migrasi masih belum maksimal.

**Tabel II.100**  
**Angka Kejadian Malaria**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	0,22	0,14	0,12	0,13	0,15

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.25. Penderita Malaria yang Diobati dengan ACT

Upaya penanggulangan penyakit malaria di Indonesia seak tahun 2007 dapat dipantau dengan menggunakan indikator *Annual Parasit Incidence (API)*. Setiap kasus malaria harus dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sediaan darah dan semua kasus positif harus diobati dengan pengobatan dengan kombinasi berbasis artemisinin atau ACT (*Artemisinin based Combination Therapies*). Cakupan kasus yang dinyatakan positif dan mendapatkan pengobatan, diukur melalui indikator persentase penderita malaria yang diobati.

**Tabel II.101**  
**Penderita Malaria yang Diobati dengan ACT**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Positif Malaria	Kasus	1.772	1.126	953	1.073	1.237
Pengobatan ACT	Penderita	1.626	1.058	864	1.032	1.156
Persentase Penderita Malaria yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat (ACT)	%	91,76	93,96	90,66	96,18	93,45

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**Tabel II.102**  
**Penderita Malaria yang Diobati dengan ACT Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Kabupaten/ Kota	Tahun									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Positif	ACT	Positif	ACT	Positif	ACT	Positif	ACT	Positif	ACT
Kep. Selayar	59	59	27	27	53	50	23	23	30	27
Bulukumba	51	51	23	23	20	20	22	22	38	38
Bantaeng	9	9	5	2	15	14	15	15	33	33
Jeneponto	67	67	37	37	35	35	36	36	53	52
Takalar	43	43	16	15	12	12	19	17	20	20
Gowa	31	27	27	26	15	15	13	13	10	8
Sinjai	36	36	21	20	38	38	33	33	33	31
Bone	48	39	35	34	36	33	36	33	61	61
Maros	57	48	53	51	38	38	70	63	132	117
Pangkajene Kepulauan	145	142	91	87	82	73	53	53	67	65
Barru	30	29	17	16	24	24	19	19	17	17
Soppeng	29	29	21	21	23	22	12	12	10	10
Wajo	51	46	29	27	16	13	10	10	38	37
Sidenreng Rappang	11	11	15	14	16	16	14	14	9	9
Pinrang	84	81	68	68	92	92	80	80	72	71
Enrekang	121	98	86	72	62	52	98	92	58	58
Luwu	72	71	58	57	36	35	34	34	32	31
Tana Toraja	108	94	33	33	28	25	25	19	51	51
Luwu Utara	99	93	55	53	18	17	34	34	24	24
Luwu Timur	98	96	41	41	27	22	18	18	25	25
Toraja Utara	208	168	175	175	84	82	137	137	145	145
Makassar	196	189	98	92	83	78	196	191	188	168
Pare-Pare	34	29	14	13	14	14	9	7	20	9
Palopo	85	71	81	54	86	44	67	57	71	49
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>1.772</b>	<b>1.626</b>	<b>1.126</b>	<b>1.058</b>	<b>953</b>	<b>864</b>	<b>1.073</b>	<b>1.032</b>	<b>1.237</b>	<b>1.156</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

#### 2.1.3.1.2.26. Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi

Masih rendah penemuan kasus di Kabupaten/Kota karena belum semua Kabupaten/Kota melakukan Testing HIV. Prevalensi HIV-AIDS sejak tahun 2013-2017 sudah sesuai target program sebesar  $< 0,5$ , namun capaian ini masih rendah disebabkan oleh tidak semua Kabupaten/Kota melakukan kegiatan Sero Survey untuk penemuan kasus. Kondisi yang ada :

1. Angka prevalensi diperoleh dari kegiatan survey setiap tahun;

2. Tahun 2013, dilakukan Survey Terpadu Biologis & Perilaku (STPB) sehingga nilai prevalensi di peroleh;
3. Tahun 2014 – 2017 dikukan kegiatan Sero Survey Sentibel di 2 Kabupaten;
4. Rendahnya Prevalensi HIV karena tidak semua Kabupaten/Kota melakukan Kegiatan Sero Survey untuk penemuan kasus.

**Tabel II.103**  
**Prevalensi HIV/AIDS**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi	%	0,3	0,025	0,056	0,28	0,33

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**2.1.3.1.2.27. Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir**

Belum ada Juknis Khusus Survey penggunaan Kondom di tingkat Provinsi, tetapi dilakukan oleh Subdit AIDS & PMS Kemkes bersama dengan Survey Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP). Diperlukan survey, karena keterbatasan dana, survey tidak dilakukan setiap tahun. Kondisi terkait capaian indikator kinerja:

1. Tahun 2013, Indikator Survey Penggunaan Kondom diperoleh dari kegiatan Survey Terpadu Biologis dan Perilaku (STPB) yang dilakukan oleh Subdit AIDS & PMS Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Tahun 2015, data diperoleh dari kegiatan Survey Cepat Perilaku (SCP) yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) bersama dengan komisi penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP);
3. Karena Keterbatasan dana, survey tidak dilakukann setiap tahun.

**Tabel II.104**  
**Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir	%	Perempuan : 35 Laki-Laki : 14	0	Perempuan : 69,6% Laki-Laki : 56,6%	0	0

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**2.1.3.1.2.28. Proporsi Jumlah Penduduk Memiliki Pengetahuan Komprehensif**

Kurangnya sosialisasi HIV AIDS di sekolah dan belum semua kabupaten/kota memiliki pendanaan APBD untuk program HIV-AIDS, Survey masih bergantung pada APBD Provinsi. Diperlukan survey, karena keterbatasan dana, survey tidak dilakukan setiap tahun. Kondisi terkait capaian indikator kinerja :

1. Indikator diperoleh dari Survey yang dilakukan pada anak usia 15 – 24 tahun;
2. Tahun 2013 survey dilakukan hanya Kota Makassar, sehingga hasil survey rendah;
3. Pengembangan survey dilakukan tahun 2014 sebanyak 14 Kab/Kota, Tahun 2015 yang dilakukan sebanyak 21 Kab/Kota, dan Tahun 2016 Sebanyak 24 Kab/Kota, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan pendanaan APBD Provinsi dan GF-AIDS (Global Fund);
4. Masih kurangnya sosialisasi HIV AIDS di sekolah;
5. Nelum semua Kab/Kota memiliku pendanaan APBD untuk melakukan survey pengetahuan komprehensif, survey masih bergantung pada APBD Provinsi.

**Tabel II.105**  
**Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif	%	11,40	65,30	73,4	83,40	n.a

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**2.1.3.1.2.29. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin**

Sama halnya dengan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, capaian kinerja untuk tahun 2017 juga mencapai angka 100%. Pelayanan rujukan ini, antara lain meliputi Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum, Rehabilitasi medis, Penunjang diagnostic seperti pemeriksaan laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik, Tindakan medis kecil dan sedang, Operasi sedang dan besar, Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan, Pelayanan KB seperti pelayanan pasca persalinan/ keguguran, Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit. Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit, pelayanan darah dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) pada ruang perawatan kelas III. Diterapkannya sistem rujukan online oleh BPJS yang memetakan wilayah rujukan untuk Pasien, hal ini menimbulkan adanya batasan masyarakat untuk memilih Rumah Sakit karena sudah ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Ketersediaan Rumah Sakit Tipe C di Makassar sangat kurang sehingga merugikan pasien yang diterapkan sistem rujukan berjenjang, akhirnya pasien dirujuk ke Rumah Sakit Khusus dengan fasilitas yang tidak memadai.

Pencapaian sasaran cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin yang telah memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, dari jumlah penduduk miskin adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2013 sebanyak 2.944.929 jiwa, jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan rujukan ke Rumah Sakit Sebanyak 164.968 Kasus;
2. Tahun 2014 sebanyak 2.944.929 jiwa, jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan rujukan ke Rumah Sakit Sebanyak 164.620 Kasus;
3. Tahun 2014 sebanyak 2.987.280 jiwa, jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan rujukan ke Rumah Sakit Sebanyak 137.136 Kasus;
4. Tahun 2016 sebanyak 2.987.280 jiwa, jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan rujukan ke Rumah Sakit Sebanyak 202.811 Kasus;
5. Tahun 2017 sebanyak 4.634.971 jiwa, jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan rujukan ke Rumah Sakit Sebanyak 458.673 Kasus.

Pada Tahun 2014 dengan adanya regulasi tentang program Jaminan Kesehatan Nasional yang mengharuskan Program Kesehatan Gratis integrasi dan tuntas pada tahun 2016, maka pemerintah Sulawesi Selatan melakukan pemetaan masyarakat yang tergolong miskin sesuai dengan PP. No. 101 Tahun 2013 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Kab/Kota jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu di Sulawesi Selatan pada Tahun 2016 sebanyak 1.735.222 jiwa yang di biayai oleh Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, sedangkan Peserta PBI Pusat yang dibiayai dengan dan APBN sebanyak 2.944.929 jiwa sehingga jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan secara keseluruhan yang mendapat jaminan kesehatan sebanyak 4.680.151 jiwa.

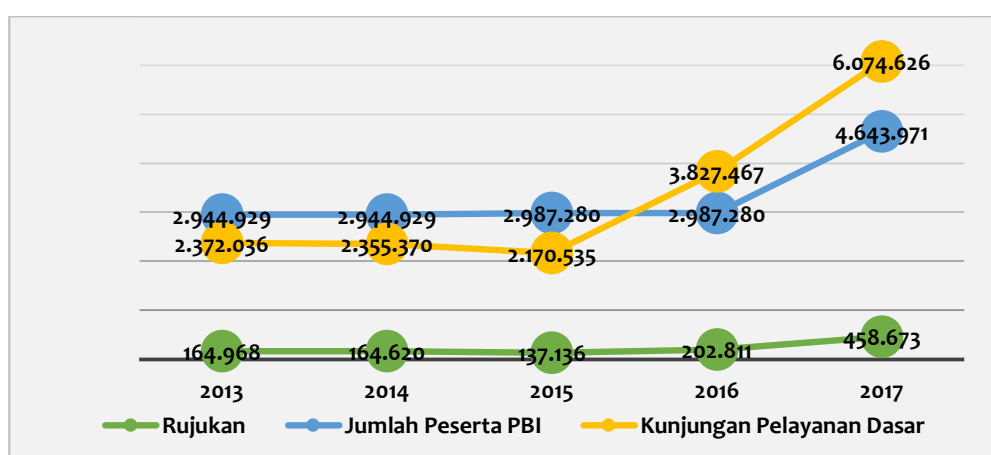


Tabel II.106  
Kunjungan Pelayanan Kesehatan  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta PBI	Kunjungan Pelayanan Dasar	Rujukan
1	Kepulauan Selayar	93.237	149.629	3.123
2	Bulukumba	224.539	238.697	12.667
3	Bantaeng	78.326	37.957	1.486
4	Jeneponto	269.419	219.964	14.343
5	Takalar	181.197	149.933	4.861
6	Gowa	226.020	446.727	5.487
7	Sinjai	128.578	81.235	5.536
8	Bone	563.479	476.140	32.497
9	Maros	209.653	198.144	33.147
10	Pangkajene Kepulauan	232.047	207.683	26.407
11	Barru	119.636	89.961	8.402
12	Soppeng	140.601	261.910	28.736
13	Wajo	166.467	214.338	11.464
14	Sidenreng Rappang	130.957	167.296	24.484
15	Pinrang	168.115	233.173	16.051
16	Enrekang	115.474	117.510	8.201
17	Luwu	242.705	122.911	5.878
18	Tana Toraja	172.217	110.265	13.436
19	Luwu Utara	174.079	233.463	7.535
20	Luwu Timur	152.427	264.550	21.670
21	Toraja Utara	154.749	146.166	7.981
22	Makassar	490.393	1.616.827	152.653
23	Pare-Pare	102.323	192.342	1.526
24	Palopo	107.315	97.805	11.102
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>4.634.971</b>	<b>6.074.626</b>	<b>458.673</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Grafik II.8  
Kunjungan dan Rujukan Penerima Bantuan Iuran (PBI)  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018 (Data Diolah)

Peserta yang mengakses pelayanan kesehatan pada tahun 2013 – 2017 yang mendapatkan rujukan di FKTRL sebanyak 1.128.208 orang yang didukung dengan adanya regulasi Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 tentang system rujukan berjenjang, dan adanya peningkatan Sumber Daya Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan, dimana tergambar semakin menurunnya keluhan dan masalah rujukan masyarakat miskin untuk mengakses pelayanan di Rumah Sakit.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Adanya kebijakan yang mengatur Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Khususnya Integrasi Jamkesda ke JKN/KIS, Yaitu :
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara pemberian Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Rangka Penyelenggaraan jaminan Sosial
  - b. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Optmalisasi Pelaksanaan Program JKN.
2. Komitmen bersama Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan Menyiapkan dan sharing untuk pembiayaan Pelaksanaan Program Integrasi Jamkesda ke JKN yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 15 tentang Sistem Regionalisasi dan Rujukan Berjenjang.
3. Dukungan anggaran dari pemerintah Pusat berupa alokasi Pembiayaan untuk peserta PBI dan Operasional pengelolaan Program JKN.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini, antara lain:

1. Sarana dan Prasarana yang belum memadai sehingga terjadi proses antrian bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan rawat inap di Rumah Sakit;
2. Penerapan Sistem rujukan belum berjalan optimal dimana beberapa kasus yang seharusnya dapat ditangani pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang Non Spesialistik, namun tetap dirujuk ke Rumah Sakit.

Namun pada bulan September 2018 BPJS Kesehatan menerbitkan Sistem Rujukan berjejang berbasis kompetensi dan terintegrasi dengan sistem informasi (rujukan online), sehingga menimbulkan kendala pada pelayanan sistem rujukan bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu untuk mendapatkann pelayanan rujukan sebgaimana penjelasan berikut :

1. Diterapkannya system rujukan online Oleh BPJS yang memetakan wilayah rujukan untuk pasien, hal ini menimbulkan adanya Batasan masyarakat untuk memilih Rumah Sakit Karena sudah di tentukan oleh BPJS Kesehatan;
2. Ketersedian RS Tipe C di Makassar sangat kurang sehingga merugikan pasien yang diterapkan system rujukan berjenjeng, akhirnya pasien dirujuk ke RS Khusus dengan fasilitas yang Tidak Memadai.

**Tabel II.107**  
**Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.30. Cakupan Kunjungan Bayi

Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard pada tahun 2013-2017 di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada tahun 2013 jumlah kunjungan sebanyak 90,98% dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 98,54%. Keterlibatan Lintas Sektor dalam pelayanan Posyandu belum maksimal. Kegiatan di Posyandu perlu inovasi/kreatifitas; Pembinaan belum optimal dalam rangka revitalisasi Posyandu. Berdasarkan data capaian dari tahun 2013 sampai 2017, cakupan kunjungan bayi mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini di karenakan pelayanan kesehatan dasarpada anak bayi salah satunya adalah pemberi Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), hal Ini yang menarik ibu atau keluarga untuk datang berkunjung ke Posyandu sehingga anak bayi mendapatkan pelayanan berkualitas dan terstandar sampai usia satu tahun. Oleh karena itu, perlu dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam oenigkatan kualitas pelayanan kesehatan pada anaka bayi khususnya

peran kader dan PKK dalam Pelayanan kesehatan anak bayi saat permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Keterlibatan lintas sektor dalam pelayanan Posyandu belum maksimal;
2. Kegiatan di Posyandu perlu inovasi/kreatifitas;
3. Pembinaan belum optimal dalam rangka revitalisasi Posyandu.

**Tabel II.108**  
**Cakupan Kunjungan Bayi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Kunjungan Bayi	%	90,98	95,23	98,11	98,08	98,54

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.31. Cakupan Puskesmas

Puskesmas merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Distribusi tenaga kesehatan (jumlah dan jenis tenaga) tidak merata di seluruh Puskesmas, banyak terpusat di kawasan perkotaan. Tingginya mutasi petugas yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi Puskesmas serta penempatan Pejabat/Petugas di Puskesmas tidak sesuai dengan kompetensi kesehatan menurut Permenkes 75 Tahun 2014. Permasalahan terkait capaian indikator kinerja :

1. Kewenangan Kab/Kota;
2. Distribusi tenaga kesehatan (jumlah dan jenis tenaga) tridak merata di seluruh Puskesmas, banyak terpusat di Kawasan perkotaan;
3. Tingginya mutase petugas yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi Puskesmas;
4. Penempatan penjabat/Petugas di Puskesmas tidak sesuai dengan kompetensi menurut Permenkes 75 Tahun 2014

**Tabel II.109**  
**Cakupan Puskesmas**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Puskesmas	Unit	440	446	448	448	451
Cakupan Puskesmas	%	144	146	146	146	147

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.32. Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Cakupan puskesmas pembantu terhadap jumlah seluruh desa di Sulawesi Selatan masih rendah, hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan dasar di wilayah perdesaan masih memerlukan perhatian dari pemerintah khususnya bagi daerah terisolir. Pada tahun 2017 cakupan puskesmas pembantu sebesar 56,56%.

**Tabel II.110**  
**Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)	%	56,22	54,78	54,82	54,06	56,56

sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.33. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan. Adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sampai persalinannya. Cakupan

Kunjungan ibu hamil K4 tahun 2013 sebesar 91,64% berarti ada sekitar 8,36% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4. Tahun 2014 cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 91,22% ada sekitar 8,78% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4, Tahun 2015 cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 91,72 %, ada sekitar 8,228% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4, tahun 2016 cakupan kuncungan ibu hamil sebesar 89,75%, ada sekitar 10,25% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamilK4.

Pada tahun 2017 cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 91,13%, ada sekitar 8,87 yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4. Berdasarkan data tersebut cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) masih berfungsi dari tahun ke tahun dan masih ada disparitas/kesenjangan antar Kab/Kota yang variasinya cukup besar, ditemukan juga ibu hamil yang tidak menerima pelayanan dimana seharusnya diberikan saat kontak dengan tenaga kesehatan (missed opportunity). Selain faktor tersebut adanya pernikahan dini menyebabkan ibu hamil malu kontak dengan petugas kesehatan dan pada akhirnya terlambat memperoleh pelayanan antenatal lengkap sesuai standar yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil, kondisi geografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya yang mempunyai kompetensi sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu : 1 kali pada trimester ke -1 (0-12 Minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (.12-24 Minggu), dan 2 kali pada trimester ke-3 (> 24 minggu sampai dengan kelahirannya). Jika ibu hamil tidak memperoleh pelayanan seperti tersebut diatas pada masa kehamilan, maka tidak dapat dilaporkan sebagai cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4). Kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan, penyakit dan gangguan kehamilan.

Secara umum penyebab masih adanya ibu hamil yang tidak memperoleh pelayanan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) adalah :

1. Belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan
2. Adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sasmpai persalinannya.

**Tabel II.111**  
**Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	91,64	91,22	91,72	89,25	91,13

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.34. Cakupan Pelayanan Nifas

Masih ada ibu bersalin tidak melahirkan di fasilitas kesehatan serta ibu bersalin berpindah tempat setelah bersalin sehingga tidak dapat dipantau. Cakupan pelayanan nifas tahun 2013 sebesar 85,54% masih ada sekitar 14,46% yang tidak mendapatkan pelayanan nifas; tahun 2014 cakupan pelayanan nifas sebesar 89,49, masih ada sekitar 10,51% yang tidak mendapatkan pelayanan nifas; tahun 2015 cakupan pelayanan nifas sebesar 91,72%, masih ada sekitar 8,28% yang tidak mendapatkan pelayanan nifas; tahun 2016 cakupan pelayanan nifas sebesar 91,32%, masih ada sekitar 8,68% yang tidak mendapatkan pelayanan nifas dan tahun 2017 cakupan pelayanan nifas sebesar 91,48, masih ad sekitar 8,52 yang tidak mendapatkan pelayanan nifas.

Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan cakupan pelayanan nifas dari tahun 2013 sampai dengan 2017 oleh tenaga kesehatan walaupun masih ada ibu nifas yang belum memperoleh pelayanan nifas, hal ini disebabkan masih adanya persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan sehingga ibu nifas tidak terpantau oleh nakes dan tidak memperoleh pelayanan nifas yang seharusnya. Secara umum penyebab yang mempengaruhi cakupan kunjungan nifas yaitu:

1. Masih ada ibu bersalin tidak melahirkan di fasilitas kesehatan;
2. Ibu bersalin berpindah tempat setelah bersalin sehingga tidak dapat dipantau.

**Tabel II.112**  
**Cakupan Pelayanan Nifas**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pelayanan Nifas	%	85,54	89,49	91,72	91,32	91,48

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**2.1.3.1.2.35. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani**

Kompetensi Nakes dalam menangani bayi baru lahir masih rendah, deteksi faktor resiko komplikasi pada ibu hamil masih rendah serta kualitas Kesehatan Ibu hamil masih rendah merupakan permasalahan dalam penanganan neonates dalam komplikasi. Berdasarkan data capaian pelayanan neonates dengan komplikasi yang ditangani dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami fluktuasi disebabkan oleh salah satunya faktor medik secara langsung yaitu keberadaan tenaga kesehatan yang kompeten serta menyangkut sarana dan prasarana dalam menangani bayi baru lahir bermasalah yang belum adekuat. Masalah kesehatan bayi baru lahir tidak terlepas dari kualitas kesehatan ibu pada sebelum dan saat hamil. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. kompetensi nakes dalam menangani bayi baru lahir masih rendah
2. deteksi faktor resiko komplikasi pada ibu hamil masih rendah
3. kualitas kesehatan ibu hamil masih rendah.

**Tabel II.113**  
**Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani	%	53,80	56,44	88,74	60,66	60,28

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**2.1.3.1.2.36. Cakupan Pelayanan Anak Balita**

Berdasarkan data capaian pelayanan anak balita dari tahun 2013 sampai 2017 peningkatannya tidak signifikan, hal ini disebabkan salah satunya karena kegiatan posyandu yang monoton sehingga mengurangi minat ibu untuk datang membawa balitanya berkunjung ke posyandu. Demikian pula keterlibatan lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan pelayanan di posyandu yang masih kurang maksimal. Kompetensi Nakes dalam memberikan pelayanan kesehatan anak balita belum adekuat. Pemberdayaan masyarakat dalam memantau tumbuh kembang anak balita masih kurang.

**Tabel II.114**  
**Cakupan Pelayanan Anak Balita**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	58,62	65,17	76,51	69,09	71,74

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**2.1.3.1.2.37. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin**

Pemberian makanan pendamping ASI pada tahun 2013-2015 tidak terlaksana, karena pada saat itu tidak ada dropping MP-ASI dari kementerian Kesehatan RI. Selanjutnya pada tahun 2016 dan 2017, cakupan MP-ASI telah mencapai target, hal ini didukung oleh upaya



pendistribusian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang bersumber dari pusat maupun daerah kepada semua balita kurus secara cepat, tepat dan akurat.

Namun demikian, masih ditemukannya permasalahan diantaranya :

1. Makanan pendamping ASI yang didistribusikan pada masyarakat miskin seringkali dikonsumsi bukan hanya oleh Balita Kurus tapi juga oleh anggota keluarga lainnya;
2. Banyak balita kurus yang memperoleh bantuan MP-ASI enggan mengkonsumsi sesuai aturan yang ditetapkan sehingga perubahan status gizi yang diharapkan tidak optimal.

Makanan Pendamping ASI yang didistribusikan pada masyarakat miskin seringkali dikonsumsi bukan hanya oleh Balita Kurus tapi juga oleh anggota keluarga lainnya. Banyak Balita kurus yang memperoleh Bantuan MP-ASI enggan mengkonsumsi sesuai aturan yang ditetapkan sehingga perubahan status gizi yang diharapkan tidak optimal.

**Tabel II.115**  
**Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	0	0	0	100	100

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.38. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pemerintah Pusat melalui program jaminan kesehatan masyarakat miskin yang merupakan peralihan program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui program kesehatan gratis yang keduanya sekarang telah berintegrasi menjadi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berupaya untuk menghadapi permasalahan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Pencapaian sasaran cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin yang telah memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2013 sebanyak 2.944.929 jiwa, jumlah yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama sebanyak 2.355.370 kasus
2. Tahun 2014 sebanyak 2.944.929 jiwa, jumlah yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama sebanyak 2.355.370 kasus
3. Tahun 2015 sebanyak 2.987.280 jiwa, jumlah yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama sebanyak 2.170.535 kasus
4. Tahun 2016 sebanyak 2.987.280 jiwa, jumlah yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama sebanyak 3.827.467 kasus
5. Tahun 2017 sebanyak 4.634.971 jiwa, jumlah yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama sebanyak 6.074.626 kasus

Pada tahun 2014 dengan adanya regulasi tentang program Jaminan Kesehatan Nasional yang mengharuskan program kesehatan gratis integrasi dan tuntas pada tahun 2016, maka Pemerintah Sulawesi Selatan melakukan pemetaan masyarakat yang tergolong miskin sesuai dengan PP.No. 101 tahun 2013 tentang penerima bantuan iuran (PBI), dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu di Sulawesi Selatan pada tahun 2016 sebanyak 1.735.222 jiwa yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan peserta PBI Pusat yang dibiayai dengan dan APBN sebanyak 2.944.929 jiwa sehingga jumlah penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan sebanyak 4.680.151 jiwa mendapatkan layanan yang ada di Sulawesi Selatan. Peserta yang mengakses pelayanan kesehatan pada tahun 2013-2017 sebanyak 16.800.034 kasus yang mendapatkan pelayanan dasar di FKTP.

a. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Adanya kebijakan yang mengatur sistem jaminan Kesehatan Daerah Khususnya integrasi Jamkesda ke JKN/KIS, yaitu :

- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Sanksi Administrasi kepada pemberi kerja dan setiap orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, yang tidak memiliki jaminan kesehatan nasional.
  - Peraturan Presiden Ri Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.
  - Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan atas perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang kerja sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis.
2. Komitmen bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyiapkan dana sharing untuk pembiayaan pelaksanaan program integrasi Jamkesda ke JKN yang tertuang dalam peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan peraturan atas perda Nomor 2 tahun 2009 tentang kerja sama penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis.
  3. Dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat berupa alokasi Pembiayaan untuk peserta PBI Jamkesmas dan operasional pengelolaan Program JKN.
- b. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini, antara lain :
1. Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan terutama tenaga medis (dokter) yang belum terdistribusi dengan baik terutama di daerah terpencil.
  2. Kerjasama lintas sektor khususnya Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan belum optimal terkait validasi data kepesertaan baik penetapan kuota, dan persyaratan yang harus dipenuhi utamanya identitas dan NIK peserta. Selain itu pengusulan kuota peserta kesehatan gratis integrasi ke JKN dari Kabupaten/Kota ke BPJS belum tepat sasaran.
- c. Walaupun capaian program 100%, namun :
1. Tenaga medis untuk beberapa FKTP (Puskesmas) masih kurang/tidak sebanding dengan rasio jumlah peserta yang ada wilayah FKTP, sehingga ada pasien yang dipindahkan ke FKTP lain meskipun jaraknya jauh.
  2. Kebiasaan masyarakat selalu mau di rujuk ke Rumah Sakit.
- Walaupun capaian program 100% namun tenaga medis untuk beberapa FKTP (Puskesmas) masih kurang/tidak sebanding dengan jumlah pasien di FKTP, sehingga ada pasien yang dipindahkan ke FKTP lain meskipun jaraknya jauh. Kebiasaan masyarakat selalu mau dirujuk ke Rumah Sakit.

**Tabel II.116**  
**Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.39. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, tahun 2018, proporsi balita gizi kurang di Indonesia mencapai 13,8%. Proporsi status gizi pendek pada balita mengalami peningkatan dari tahun 2013 mencapai 19,3% dan sangat pendek mengalami penurunan dari tahun 2013 mencapai 11,5%. Sedangkan proporsi status gizi pendek pada balita mencapai 17,1% dan sangat pendek mencapai 12,8%. Prevalensi balita gizi kurang di Sulawesi Selatan masih berada diatas rata-rata nasional yaitu 17,59%. Capaian status Gizi Kurang pada Balita dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi disebabkan oleh multifactor diantaranya adalah asupan gizi yang tidak adekuat, tingginya kasus-kasus

penyakit infeksi dan hygiene Sanitasi yang tidak optimal. Secara spesifik penyebab balita gizi kurang sebagai berikut :

1. Asupan Gizi yang tidak adekuat disebabkan oleh pemberian Asi Eksklusif yang tidak optimal dan makanan pendamping ASI yang tidak memenuhi syarat asupan gizi;
2. Deteksi Dini Status Gizi Kurang dan Gizi Buruk tidak berjalan disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak membawa anaknya ke posyandu sehingga pemantauan pertumbuhan anak tidak optimal;
3. Banyak balita yang terpapar penyakit infeksi dibawa ke fasilitas kesehatan saat kondisi anak sudah berat sehingga berpengaruh terhadap asupan gizi;
4. Rendahnya pengetahuan ibu tentang higyene dan sanitasi terutama dalam penyiapan makanan anak sehingga banyak menyebabkan kasus infeksi dan berdampak pada asupan balita;
5. Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor belum optimal dan terintegrasi.

**Tabel II.117**  
**Prevalensi Balita Gizi kurang**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	19,0	20,5	17,1	20,2	17,59

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.2.40. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Dukungan dan keterlibatan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan penjaringan kesehatan siswa SD yang masih kurang sehingga mempengaruhi capaian. Demikian pula dengan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah anak yang akan dijaring.

**Tabel II.118**  
**Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	58,89	60,46	82,58	65,76	83,19

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

##### 2.1.3.1.3.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Pembangunan jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, memperlihatkan adanya peningkatan kinerja penyelenggaraan jalan, karena walaupun terjadi penambahan panjang jalan provinsi dari 1.500,15 Km menjadi 2.000,36 Km namun terjadi peningkatan persentase jalan provinsi dalam kondisi baik. Kondisi jalan dalam kondisi baik menunjukkan adanya peningkatan panjang ruas jalan, walaupun proporsinya menunjukkan adanya kecenderungan penurunan. Hal ini terlihat pada proporsi panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 42,22% menurun menjadi 37,07% pada tahun 2017.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik saat ini meningkat dari 37,07% pada tahun 2017 menjadi 38,34% pada tahun 2018 dari keseluruhan jalan provinsi sepanjang 2.009,35 Km. Namun peningkatan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, belum didukung oleh peningkatan kinerja penanganan jalan dalam kondisi rusak berat yang ditunjukkan dengan meningkatnya panjang jalan dalam kondisi rusak berat selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 yang hanya sepanjang 55,61 Km, bertambah menjadi sepanjang 383,75 Km pada tahun 2016, dan bertambah menjadi sepanjang 417,89 Km pada tahun 2017 dan kemudian bertambah lagi menjadi sepanjang 554,99 Km pada akhir tahun 2018 .

Belum optimalnya kinerja penanganan jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan, antara lain dipicu oleh rendahnya kondisi permukaan jalan dan lokasi jalan di beberapa kabupaten yang merupakan wilayah terisolir sehingga membutuhkan upaya penanganan yang lebih besar untuk mencapai tingkat kemandapan jalan. Beberapa ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak berat dan kondisi rusak ringan yang sangat membutuhkan penanganan antara lain berada di kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo, Barru, Soppeng, Gowa, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara serta di Kota Makassar.

**Tabel II.119**  
**Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Panjang Jalan Kondisi Baik	Km	469,13	483,21	633,36	556,05	770,48
Panjang Jalan Keseluruhan	Km	1.147,51	1.147,51	1.500,15	1.500,15	2.009,36
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	40,88	42,11	42,22	37,07	38,34

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

#### 2.1.3.1.3.2. Proporsi Panjang Jaringan Jalan

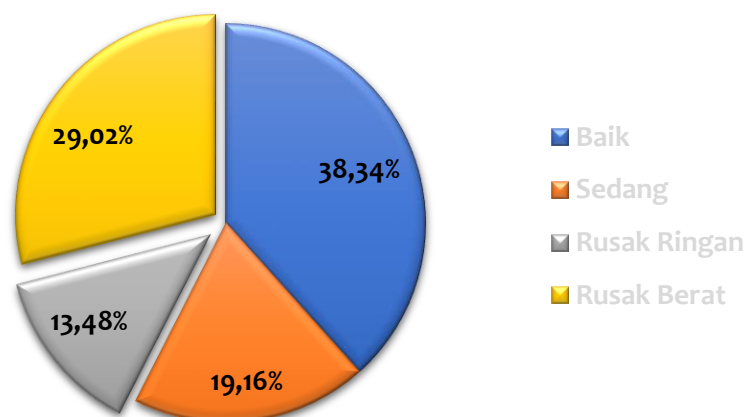
Kinerja penyelenggaraan jalan berdasarkan proporsi panjang jalan, belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini tergambar dari menurunnya proporsi panjang jalan dalam kondisi sedang dari 26,51% pada tahun 2017 menurun menjadi 20,59% pada akhir tahun 2018. Selain itu juga, panjang jalan dalam kondisi rusak ringan bertambah dari 128,59 Km pada tahun 2017 bertambah menjadi 270,14 Km pada akhir tahun 2017 yang menyebabkan meningkatnya proporsi jalan provinsi dalam kondisi rusak ringan dari 8,57% pada tahun 2017 menjangkit menjadi 13,44% pada tahun 2018. Demikian juga halnya dengan proporsi jalan dalam kondisi rusak berat, yang walaupun secara proporsi menunjukkan adanya penurunan besaran proporsi jalan dalam kondisi rusak berat, namun dari panjang jalan menunjukkan adanya penambahan panjang jalan dalam kondisi rusak berat dari sepanjang 417,86 Km pada tahun 2017 bertambah menjadi sepanjang 554,99 Km pada tahun 2018.

**Proporsi Panjang Jaringan Jalan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Uraian	Satuan	Tahun									
		2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Kondisi Baik	Km	469,13	40,88	483,21	42,11	633,36	42,22	556,05	37,07	770,48	38,34
Kondisi Sedang	Km	510,51	44,49	519,92	45,31	294,70	19,64	397,62	26,51	413,75	20,59
Kondisi Rusak Ringan	Km	85,81	7,48	88,77	7,74	188,34	12,55	128,59	8,57	270,14	13,44
Kondisi Rusak Berat	Km	82,06	7,15	55,61	4,85	383,75	25,58	417,89	27,86	554,99	27,62
Panjang Jalan Keseluruhan	Km	1.147,51	100	1.147,51	100	1.500,15	100	1.500,15	100	2.009,36	100

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

**Grafik II.9**  
**Kondisi Jaringan Jalan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018**



Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Tahun 2018 (Data Diolah)

### 2.1.3.1.3.3. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan. Dengan kata lain bahwa dalam 1 (satu) Km jalan di wilayah tersebut dibanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Memperhatikan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2014 hingga 2018, dapat digambarkan bahwa jumlah masyarakat Sulawesi Selatan yang terlayani oleh jaringan jalan belum menunjukkan adanya peningkatan.

Panjang jalan di Sulawesi Selatan yang terdiri dari jalan kewenangan nasional, jalan kewenangan provinsi dan jalan kewenangan kabupaten/kota menunjukkan adanya penambahan panjang jalan, antara lain pada jalan kewenangan nasional yang bertambah pada tahun 2015 menjadi sepanjang 1.745,92 Km dan pada jalan provinsi yang bertambah pada tahun 2016 menjadi sepanjang 1.500,15 Km dan kemudian bertambah lagi menjadi sepanjang 2.009,36 Km pada tahun 2018 sehingga panjang jalan keseluruhan di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 29.134,86 Km. Akan tetapi penambahan panjang jalan tersebut belum dapat mengimbangi penambahan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan, ditunjukkan oleh angka rasio panjang jalan provinsi yang hampir dinamis yang hanya berkisar pada angka 0,00332. Nilai rasio panjang jalan menginformasikan tingkat pelayanan jalan terhadap masyarakat di Sulawesi Selatan, angka rasio panjang jalan menunjukkan bahwa pada tahun 2018 setiap 1 Km jalan di Sulawesi Selatan melayani 332 orang penduduk Sulawesi Selatan.

**Tabel II.120**  
**Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Panjang Jalan Nasional	Km	1.722,86	1.745,92	1.745,92	1.745,92	1.745,92
Panjang Jalan Provinsi	Km	1.147,51	1.147,51	1.500,15	1.500,15	2.009,36
Panjang Jalan Kab/Kota	Km	25.379,58	25.379,58	25.379,58	25.379,58	25.379,58
Total Panjang Jalan	Km	28.249,95	28.273,01	28.625,65	28.625,65	29.134,86
Jumlah Penduduk	Jiwa	8.509.021	8.520.304	8.606.375	8.690.294	8.776.888
Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk	Km/ Jiwa	0,00332	0,00332	0,00333	0,00329	0,00332

Sumber: sipd.kemendagri.go.id



### 3.1.1.1.1. Persentase Jalan Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air

Jalan provinsi di Sulawesi Selatan yang dilengkapi dengan trotoar dan drainase pada tahun 2018 sepanjang 1.547,21 Km atau sebesar 77% dari keseluruhan panjang jalan provinsi. Jalan provinsi yang memiliki drainase/saluran pembuangan air Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 hingga tahun 2018 pada dasarnya terus bertambah setiap tahunnya sebagai upaya untuk menjaga lapisan perkerasan jalan dari pengaruh air, khususnya air hujan yang dapat mengurangi kualitas permukaan jalan. Namun persentase jalan provinsi yang memiliki trotoar dan drainase, belum memperlihatkan peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan antara lain sempitnya lahan terbuka di sisi kiri dan kanan jalan karena telah dipadati dengan bangunan. Untuk itu guna menjaga agar air hujan tidak mempengaruhi kualitas perkerasan pada permukaan jalan, diperlukan perencanaan dan upaya untuk melengkapi jalan provinsi dengan drainase/saluran pembuangan.

**Tabel II.121**  
**Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 M)	Km	958,17	963,91	1.125,04	1.155,12	1.547,21
Panjang jalan provinsi	Km	1.147,51	1.147,51	1.500,15	1.500,15	2.009,36
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)	%	83,50	84,00	75,00	77,00	77,00

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.1.2. Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Pemanfaatan sempadan jalan oleh pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar di Sulawesi Selatan sepanjang 202,14 Km atau sebesar 10,11% pada tahun 2018. Bertambahnya panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar, utamanya disebabkan adanya peralihan kewenangan jalan dari jalan kabupaten/kota menjadi jalan provinsi. Hal ini terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2018 dimana pada saat tersebut, beberapa ruas jalan kewenangan kabupaten/kota yang beralih menjadi jalan kewenangan provinsi telah digunakan oleh pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar.

Pada tahun 2015 terdapat jalan kewenangan kabupaten/kota sepanjang 45,53 Km yang telah digunakan oleh pedagang kaki lima atau bangunan liar beralih menjadi jalan kewenangan provinsi, dan kemudian pada tahun 2018 terdapat jalan kabupaten/kota sepanjang 54,38 Km yang telah digunakan oleh pedagang kaki lima atau bangunan liar beralih menjadi jalan kewenangan provinsi. Pada dasarnya pemerintah provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan upaya pengendalian pemanfaatan sempadan jalan oleh pedagang kaki lima atau bangunan liar yang ditunjukkan dengan penurunan jumlah panjang jalan yang dipakai oleh pedagang kaki lima atau bangunan liar, namun upaya tersebut membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam konsistensi penegakan aturan sempadan jalan sebagaimana amanat Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005.

**Tabel II.122**  
**Sempadan Jalan Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Panjang jalan yang sempadannya dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Km	110,96	107,29	152,72	147,76	202,14
Panjang jalan provinsi	Km	1.147,51	1.147,51	1.500,15	1.500,15	2.009,36
Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar	%	9,67	9,35	10,18	9,85	10,11

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.1.3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Angka rumah tinggal bersanitasi diperoleh dari persentase akses penduduk terhadap jamban, dimana pada terdapat peningkatan sebesar 5,82% dalam 5 tahun terakhir. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sudah mencapai 84,41%. Salah satu faktor yang mempengaruhi antara lain karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pembangunan septic tank yang sesuai dengan kriteria teknis.

**Tabel II.123**  
**Rumah Tinggal Bersanitasi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi	1.579.900	1.617.112	1.651.626	1.767.440	1.713.087
Jumlah Rumah Tangga	1.948.608	1.957.528	1.990.008	2.009.996	2.029.478
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	81,08	82,61	83,00	83,41	84,41

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2018

**Tabel II.124**  
**Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017**

No	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi				
		Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk Bersanitasi	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi	Persentase (%)
1	Kep. Selayar	133.003	33.168	113.312	28.257	85,20
2	Bulukumba	415.713	102.392	359.053	88.437	86,37
3	Bantaeng	185.581	45.044	178.721	43.379	96,30
4	Jeneponto	359.787	85.056	266.637	63.035	74,11
5	Takalar	292.983	70.769	262.544	63.416	89,61
6	Gowa	748.200	173.596	594.383	137.908	79,44
7	Sinjai	241.208	52.666	235.763	51.477	97,74
8	Bone	751.026	171.859	534.482	122.307	71,17
9	Maros	346.383	76.974	222.911	49.536	64,35
10	Pangkajene Kepulauan	329.791	77.781	245.636	57.933	74,48
11	Barro	172.767	41.832	161.591	39.126	93,53

No	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi				
		Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk Bersanitasi	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi	Persentase (%)
12	Soppeng	226.466	58.217	188.585	48.479	83,27
13	Wajo	395.583	96.484	371.418	90.590	93,89
14	Sidenreng Rappang	296.125	71.184	248.257	59.677	83,84
15	Pinrang	372.230	87.378	365.892	85.890	98,30
16	Enrekang	203.320	45.283	168.858	37.608	83,05
17	Luwu	356.305	77.122	252.150	54.578	70,77
18	Tana Toraja	231.519	55.788	182.753	44.037	78,94
19	Luwu Utara	308.001	72.642	241.121	56.868	78,29
20	Luwu Timur	287.874	68.869	244.534	58.501	84,94
21	Toraja Utara	228.414	50.091	184.995	40.569	80,99
22	Makassar	1.489.011	345.478	1.450.643	336.576	97,42
23	Pare-Pare	142.097	32.004	101.074	22.764	71,13
24	Palopo	176.907	37.801	150.409	32.139	85,02
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>8.690.294</b>	<b>2.029.478</b>	<b>7.325.722</b>	<b>1.713.087</b>	<b>84,41</b>

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2018

#### 3.1.1.1.4. Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Pemanfaatan sempadan sungai di Sulawesi Selatan oleh bangunan liar menunjukkan trend peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 sebesar 22% yang meningkat menjadi 35% pada Tahun 2017. Peningkatan tersebut disebabkan karena masih kurangnya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai dan kurangnya upaya pemerintah daerah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sempadan sungai melalui penerbitan regulasi pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai.

**Tabel II.125**  
**Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	27	25	30	32	35

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.1.5. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik cukup tinggi di tahun 2013 namun mengalami penurunan di tahun 2014 karena besarnya tingkat kerusakan di jaringan irigasi dan kembali mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan besarnya anggaran untuk perbaikan jaringan irigasi dan puncaknya di tahun 2017 mengalami peningkatan cukup tinggi. Di Sulawesi selatan ada lahan sawah yang dilakukan irigasi dan ada juga yang tidak. Jumlah lahan yang irigasi lebih banyak dibandingkan non irigasi, daerah irigasi sebesar 391.147 sedangkan non irigasi sebesar 262.799. Kabupaten yang paling banyak melakukan irigasi adalah pinrang, yaitu sebanyak 47.139, sedangkan daerah yang tidak melakukan irigasi paling banyak adalah wajo, dengan jumlah 70.219. Jumlah kebun keseluruhan yang dimiliki Sulawesi selatan sebanyak 481.405, jumlah lading yang dimiliki sebanyak 117.588 dan lahan yang tidak diusahakan atau kosong sebanyak 101.911.

**Tabel II.126**  
**Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	10,95	8,81	9,61	16,67	32,55

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan mulai tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 persentase irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 32,55% dibanding tahun 2016 sebesar 16,67%.

#### 3.1.1.1.6. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi diperoleh dari Panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budidaya pertanian yang cenderung konsisten tiap tahunnya karena tidak ada tambahan Panjang saluran irigasi ataupun luas lahan budidaya pertanian kecuali ditahun 2015 dan tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan karena adanya penambahan luas lahan budidaya pertanian.

**Tabel II.127**  
**Rasio Jaringan Irigasi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Jaringan Irigasi	M/H	8,83	8,83	9,03	9,18	9,18

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

**Tabel II.128**  
**Total Daerah Irigasi (DI) Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi (DI)	Luas Daerah Irigasi (Ha)
1	Kepulauan Selayar	50	3.778
2	Bulukumba	154	20.777
3	Bantaeng	100	16.990
4	Jeneponto	113	22.779
5	Takalar	11	2.852
6	Gowa	216	27.806
7	Sinjai	161	12.027
8	Bone	224	34.379
9	Maros	74	9.094
10	Pangkajene Kepulauan	118	13.392
11	Barru	103	9.792
12	Soppeng	121	9.666
13	Wajo	126	17.504
14	Sidenreng Rappang	94	11.299
15	Pinrang	87	8.294
16	Enrekang	237	8.846
17	Luwu	69	8.904
18	Tana Toraja	184	14.238
19	Luwu Utara	61	9.221
20	Luwu Timur	33	6.788
21	Toraja Utara	162	10.129
22	Makassar	-	-
23	Pare-Pare	5	164
24	Palopo	6	800
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>2.509</b>	<b>279.509</b>

Sumber : Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Tahun 2018

**3.1.1.1.7. Persentase Penduduk Berakses Air Minum**

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan penggunaan air semakin tinggi. Kebutuhan terhadap kuantitas juga kualitas air pun turut meningkat. Pada tahun 2017 persentase penduduk berakses air minum di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sejumlah 87,38%.

**Tabel II.129**  
**Persentase Penduduk Berakses Air Minum**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk berakses air minum	Jiwa	7.316.093	7.316.093	7.443.530	7.517.263	7.593.263
Jumlah Penduduk	Unit	8.342.049	8.380.765	8.520.304	8.606.375	8.690.294
Persentase Penduduk Berakses air minum	%	87,70	87,30	87,36	87,35	87,38

Sumber:sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.1.8. Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum**

Penyediaan air bersih di Indonesia dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3), kebijakan tersebut dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan. Persentase rumah tangga yang berakses air minum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capaian 87,45% dari total 2.029.478 rumah tangga.

**Tabel II.130**  
**Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum	Jiwa	1.673.318	1.710.365	1.740.268	1.757.030	1.774.720
Jumlah Rumah Tangga	Unit	1.948.608	1.957.528	1.990.008	2.009.996	2.029.478
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	%	85,87	87,37	87,45	87,41	87,45

Sumber:sipd.kemendagri.go.id

Jumlah desa/kelurahan yang belum berakses air minum yang terbanyak adalah kabupaten Jeneponto sejumlah 103 desa/kelurahan. Persentase rumah tangga di Sulawesi Selatan yang berakses air bersih perpipaan sejumlah 74,77%.

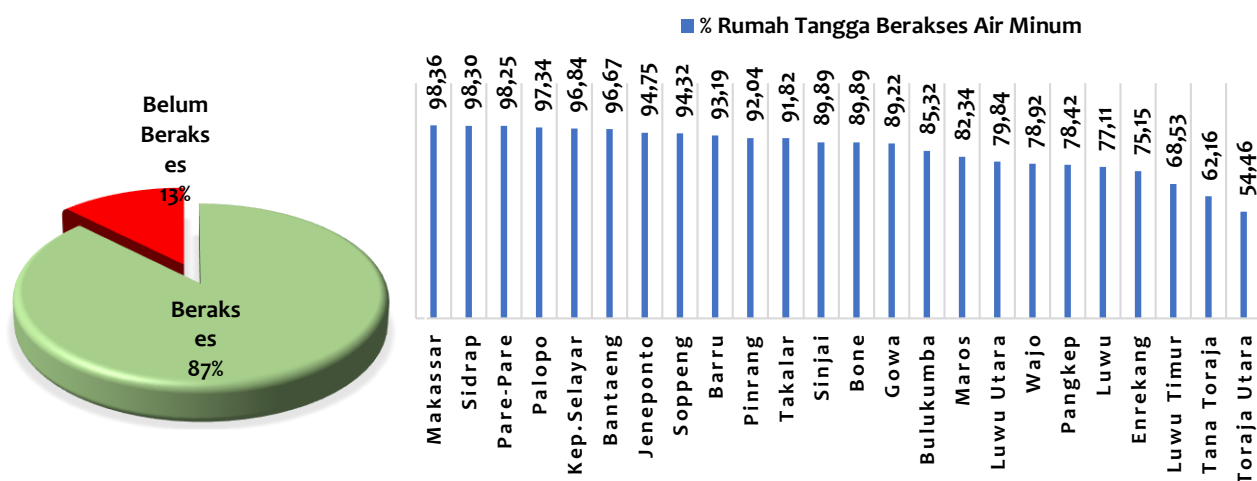


Tabel II.131  
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum  
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017  
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Berakses Air Minum (%)	Rumah Tangga Berakses Perpipaan (%)	Cakupan Layanan Air Minum (%)	Jumlah Desa/Kelurahan Belum Berakses Air Minum
1	Kepulauan Selayar	96,84	94,80	73,71	23
2	Bulukumba	85,32	78,43	78,43	34
3	Bantaeng	96,67	90,62	41,23	10
4	Jeneponto	94,75	84,25	66,00	103
5	Takalar	91,82	74,31	81,62	18
6	Gowa	89,22	58,35	52,54	45
7	Sinjai	82,09	73,46	22,66	12
8	Bone	89,89	64,92	64,92	15
9	Maros	82,34	74,80	74,80	17
10	Pangkajene Kepulauan	78,42	65,53	65,53	14
11	Barru	93,19	84,95	66,00	n.a
12	Soppeng	94,32	77,40	77,30	47
13	Wajo	78,92	89,04	88,62	22
14	Sidenreng Rappang	98,30	76,41	85,36	79
15	Pinrang	92,04	59,27	81,00	21
16	Enrekang	75,15	76,21	76,21	58
17	Luwu	77,11	90,10	82,00	91
18	Tana Toraja	62,16	70,34	49,53	18
19	Luwu Utara	79,84	83,25	82,99	35
20	Luwu Timur	68,53	66,89	40,00	38
21	Toraja Utara	54,46	81,14	28,00	38
22	Makassar	98,36	73,98	70,08	46
23	Pare-Pare	98,25	81,98	81,85	0
24	Palopo	97,34	94,36	87,71	6
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>87,45</b>	<b>74,77</b>	<b>67,42</b>	<b>780</b>

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2018

Grafik II.10  
Akses Air Minum  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017



Sumber :Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018  
(Data Diolah)

**3.1.1.1.9. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Perkotaan Dan Perdesaan**

Air minum layak adalah air minum yang memenuhi 4 kriteria diantaranya; kualitas air sesuai dengan standar air minum, kuantitas yang mengacu pada standar penyediaan yaitu 60 liter/hari/orang, Kontinuitas atau tersedia secara terus menerus, serta Keterjangkauan yaitu akses dan harga terjangkau. Penyediaan air minum layak menunjukkan peningkatan sebesar  $\pm 2\%$  /tahun. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan mencapai 83,34%. Namun pencapaian akses ini masih bertumpu pada masyarakat perkotaan yang terlayani oleh PDAM. Sedangkan pemenuhan akses air minum layak di perdesaan masih belum optimal, dikarenakan sumber air dan pengaliran yang digunakan masyarakat khususnya di area terpencil dan pulau-pulau masih belum layak, belum terjangkau serta belum menggunakan jaringan perpipaan. Selain itu, pengelolaan sumber air baku belum maksimal untuk menjamin penyediaan dan penyaluran air baku sesuai standar kebutuhan.

**Tabel II.132**  
**Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	66,95	68,89	72,07	73,40	83,34

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.1.10. Proporsi Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan**

Target *universal access* pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata kepada air minum aman dan terjangkau bagi semua. Proporsi penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahun dengan capaian pada tahun 2017 sejumlah 74,76%. Mayoritas sumber air minum masyarakat secara nasional diperoleh dari air dalam kemasan, sumur terlindung, dan air tanah dengan memakai pompa.

**Tabel II.133**  
**Proporsi Penduduk Akses Berkelanjutan**  
**Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017**

Uraian	Satuan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	Jiwa	5.182.407	5.669.766	6.194.207	6.497.004
Jumlah Penduduk Seluruhnya	Jiwa	8.432.163	8.520.304	8.606.342	8.690.294
Proporsi Penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan		61,46	66,54	71,97	74,76

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2018

**3.1.1.1.11. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan**

Peningkatan akses kepada layanan air minum merupakan target nasional melalui Perwujudan 100% layanan air minum, dengan 85% populasi terlayani akses kepada air sejalan dengan prinsip 4K dan 15% lainnya akan terlayani sesuai dengan layanan kebutuhan dasar pada tahun 2019. Berdasarkan data Susenas oleh BPS mencatat adanya peningkatan rumah

tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Indonesia sejumlah 72,04%. Sedangkan di Sulawesi Selatan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan mencapai 87,45%.

**Tabel II.134**  
**Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak**  
**Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Akses Air Bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih	Persentase (%)
1	Kep.Selayar	113.003	33.168	128.805	32.121	96,84
2	Bulukumba	415.713	102.392	354.693	86.363	85,32
3	Bantaeng	185.581	45.004	179.402	43.544	96,67
4	Jeneponto	359.787	85.056	340.905	80.592	94,75
5	Takalar	292.983	70.769	269.005	64.977	91,82
6	Gowa	748.200	173.596	667.557	154.886	89,22
7	Sinjai	241.208	52.666	198.011	43.234	82,09
8	Maros	346.383	76.974	285.195	63.377	82,34
9	Pangkep	329.791	77.781	258.612	60.993	78,42
10	Barru	172.767	41.832	161.004	38.984	93,19
11	Bone	751.026	171.859	675.099	154.485	89,89
12	Soppeng	226.466	58.217	213.604	54.911	94,32
13	Wajo	395.583	96.484	312.198	76.146	78,92
14	Sidrap	296.125	71.184	291.104	69.977	98,30
15	Pinrang	372.230	87.378	342.607	80.424	92,04
16	Enrekang	203.320	45.283	152.793	34.030	75,15
17	Luwu	356.305	77.122	274.753	59.470	77,11
18	Tana Toraja	231.519	55.788	143.906	34.676	62,16
19	Luwu Utara	308.001	72642	245.899	57.995	79,84
20	Luwu Timur	287.874	68.869	197.294	47.200	68,53
21	Toraja Utara	228.414	50.091	124.397	27.280	54,46
22	Makassar	1.489.011	345.478	1.464.608	339.816	98,36
23	Parepare	142.097	32.004	139.606	31.443	98,25
24	Palopo	176.907	37.801	172.206	36.796	97,34
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>8.690.294</b>	<b>2.029.478</b>	<b>7.593.263</b>	<b>1.774.720</b>	<b>87,45</b>

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2018

### 3.1.1.1.12. Persentase Luas Areal Kawasan Kumuh

Penanganan kawasan permukiman kumuh sesungguhnya perlu dilakukan tidak saja di kawasan-kawasan permukiman kumuh yang menjadi bagian kota metropolitan dan atau kota besar, tetapi juga perlu dilakukan di kawasan-kawasan permukiman kumuh yang ada di kota sedang dan kecil. Persentase luas areal Kawasan kumuh di Sulawesi Selatan mencapai 0,067% mengalami penurunan dari tahun 2013. Dalam upaya mencapai target nasional 0% kawasan kumuh pada tahun 2019 pemerintah kabupaten/kota melalui program penanganan kawasan kumuh harus terus berupaya mengurangi luas areal kawasan kumuh.

**Tabel II.135**  
**Persentase Luas Areal Kawasan Kumuh**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Luas Kawasan Kumuh	Ha	2.615,48	2.592,84	2.552,51	2.517,86	1.729,35
Luas Wilayah Perkotaan	Ha	2.582.120	2.582.120	2.582.120	2.582.120	2.582.120
Persentase Luas Areal Kawasan Kumuh	%	0,101	0,100	0,099	0,098	0,067

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.1.13. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan**

Akses sanitasi layak merupakan indikator kepemilikan jamban beserta septic tank yang layak. Salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah keterpenuhan akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan yang saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan sudah mencapai 84,41%. Beberapa hal yang mempengaruhi keterpenuhan 100% akses terhadap layanan tersebut antara lain adalah penggunaan septic tank oleh masyarakat yang belum layak serta pelayanan dan pengelolaan di IPLT yang belum baik. Hal ini dikarenakan sistem pengelolaan air limbah domestik di kab/kota sebagian masih menggunakan on-site system (setempat) dimana limbah buangan langsung dialirkan ke septic tank, ataupun langsung ke sungai, danau, atau ke saluran irigasi tanpa pengelolaan terlebih dahulu sehingga berpotensi mencemari air tanah, sungai dan danau.

**Tabel II.136**  
**Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	%	81,08	82,74	82,94	83,40	84,41

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

Pencapaian 100% layanan sanitasi (air limbah domestik, sampah, drainase lingkungan), yaitu 85% masyarakat akan terlayani sesuai standar layanan, dan 15% masyarakat akan terlayani sesuai kebutuhan dasar merupakan target nasional yang menjadi acuan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam pembangunan sanitasi layak berkelanjutan. Mencapai akses kepada sanitasi dan kebersihan yang layak dan merata bagi semua serta mengakhiri BAB sembarangan melalui program ODF (*open defecation free*)/bebas BABs. Berikut kondisi sanitasi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan:

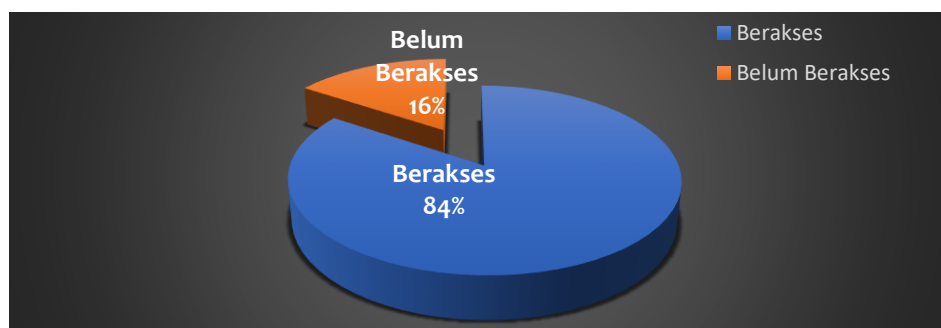
**Tabel II.137**  
**Kondisi Sanitasi dan Akses Layanan Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Kabupaten/ Kota	BAB Sembarangan (%)	Akses Jamban (%)	Septic Tank Layak (%)	Ketersediaan Truk Tinja (%)	Kondisi IPLT
1	Kepulauan Selayar	21,76	78,24	56,64	21,60	Belum Tersedia
2	Bulukumba	7,51	92,49	83,71	83,71	Rusak
3	Bantaeng	8,66	91,34	87,87	87,87	Tidak Berfungsi
4	Jeneponto	15,59	84,41	71,18	71,18	Belum Tersedia
5	Takalar	7,71	92,29	40,74	40,74	Tidak Berfungsi
6	Gowa	5,67	94,33	81,94	81,94	Belum Tersedia
7	Sinjai	10,63	89,37	70,13	70,13	Berfungsi
8	Bone	7,67	92,33	16,02	76,31	Rusak
9	Maros	16,75	83,25	7,72	75,53	Tidak Berfungsi
10	Pangkajene Kepulauan	20,17	79,83	10,19	69,64	Belum Tersedia
11	Barru	6,80	93,20	23,11	76,31	Berfungsi
12	Soppeng	3,35	96,55	60,03	36,52	Belum Tersedia
13	Wajo	1,74	98,26	6,32	91,94	Tidak Berfungsi

No	Kabupaten/ Kota	BAB Sembarangan (%)	Akses Jamban (%)	Septic Tank Layak (%)	Ketersediaan Truk Tinja (%)	Kondisi IPLT
14	Sidenreng Rappang	3,02	96,98	9,68	87,30	Tidak Berfungsi
15	Pinrang	3,32	96,68	41,60	55,08	Berfungsi
16	Enrekang	8,96	91,04	1,47	89,57	Belum Tersedia
17	Luwu	16,97	83,03	22,45	60,58	Belum Tersedia
18	Tana Toraja	3,95	96,05	33,84	62,21	Berfungsi
19	Luwu Utara	11,21	88,79	10,36	78,43	Belum Tersedia
20	Luwu Timur	9,89	90,11	33,16	56,95	Belum Tersedia
21	Toraja Utara	2,99	97,01	65,86	31,15	Belum Tersedia
22	Makassar	2,78	97,22	63,87	33,35	Berfungsi
23	Pare-Pare	0	100	12,82	87,18	Berfungsi
24	Palopo	7,81	92,12	0,01	92,18	Berfungsi
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>7,66</b>	<b>92,34</b>	<b>27,94</b>	<b>64,40</b>	

Sumber : Data Olahan AMPL, STBM, dan Dokumen SSK, Tahun 2018

**Grafik II.11**  
**Rumah Tangga Berakses Sanitasi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017**



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018 (Data Diolah)

#### 3.1.1.1.14. Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani

Besarnya timbunan sampah yang belum tertangani, menyebabkan berbagai fenomena permasalahan baik langsung maupun tidak langsung bagi penduduk perkotaan. Selain menimbulkan pencemaran dan sumber berbagai penyakit menular, juga pudarnya nilai-nilai keindahan kota karena maraknya tumpukan-tumpukan sampah. Penanganan sampah di Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 sebesar 75,41% yang mengindikasikan bahwa upaya penanganan sampah belum dilakukan secara optimal. Beberapa faktor penghambat upaya penanganan sampah antara lain adalah masih terbatasnya TPA dengan sistem yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perUUan yaitu sistem sanitary landfill. TPA dengan sistem *sanitary landfill* baru diterapkan di Kabupaten Bulukumba dan Barru.

**Tabel II.138**  
**Sampah Perkotaan yang Tertangani**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	%	n.a	66,61	71,67	74,5	75,41

Sumber: sipd.kemendagri.go.id



**3.1.1.1.15. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk**

Rasio tempat ibadah dibandingkan dengan jumlah penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan rasio 2,09 unit/jiwa.

**Tabel II.139**  
**Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah tempat ibadah	Unit	17.304	16.941	17.785	17.003	18.129
Jumlah penduduk	Jiwa	8.342.049	8.380.765	8.520.304	8.606.375	8.690.294
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Unit/ Jiwa	2,07	2,02	2,09	1,98	2,09

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**Tabel II.140**  
**Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

No	Kabupaten/Kota	Rasio Tempat Ibadah		
		Jumlah Penduduk	Jumlah Tempat Ibadah	Rasio
1	Kepulauan Selayar	133.003	382	2,87
2	Bulukumba	415.713	1.097	2,64
3	Bantaeng	185.581	500	2,69
4	Jeneponto	359.787	857	2,38
5	Takalar	292.983	521	1,78
6	Gowa	748.200	1.441	1,93
7	Sinjai	241.208	774	3,21
8	Bone	751.026	1.496	1,99
9	Maros	346.383	726	2,10
10	Pangkajene Kepulauan	329.791	533	1,62
11	Barru	172.767	315	1,82
12	Soppeng	226.466	478	2,11
13	Wajo	395.583	668	1,69
14	Sidenreng Rappang	296.125	495	1,67
15	Pinrang	372.230	527	1,42
16	Enrekang	203.320	783	3,85
17	Luwu	356.305	1.028	2,89
18	Tana Toraja	231.519	1.017	4,39
19	Luwu Utara	308.001	1.108	3,60
20	Luwu Timur	287.874	674	2,34
21	Toraja Utara	228.414	883	3,87
22	Makassar	1.489.011	1.337	0,90
23	Pare-Pare	142.097	189	1,33
24	Palopo	176.907	300	1,70
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>8.690.294</b>	<b>18.129</b>	<b>2,09</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

**3.1.1.1.16. Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah**

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R ini bertujuan untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya, mengurangi pencemaran lingkungan, memberikan manfaat kepada masyarakat, serta dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah. Konsep 3R ini sebenarnya sangat sederhana dan mudah dilaksanakan, tetapi sulit implementasinya. Karena keberhasilan konsep 3R ini sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dengan mengubah perilakunya yang pada umumnya dipengaruhi oleh karakter sosial budaya dan karakter sosial ekonomi yang mewarnai kehidupan

masyarakat. Penerapan konsep 3R dalam mengelola sampah secara swakelola oleh masyarakat bukanlah hal baru dalam pengelolaan sampah. Namun pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R harus diawali dengan mengubah perilaku “membuang” sampah menjadi perilaku “mengelola” sampah. Pada tahun 2017 dari total 79.297 ton sampah yang mengalami daur ulang di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk ke TPA sejumlah 8,52% atau 6.753 ton.

**Tabel II.141**  
**Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	Ton	1.095	1.460	4.015	5.840	6.753
Total volume sampah	Ton	76.138	76.943	77.748	78.533	79.297
Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	1,44	1,90	5,16	7,44	8,52

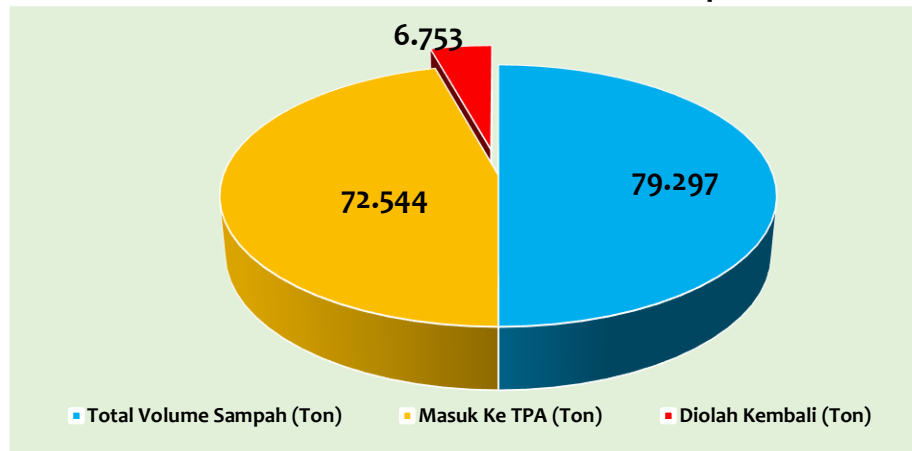
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2018

**Tabel II.142**  
**Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

No	Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pengurangan Sampah		
		Total Volume Sampah (Ton)	Volume Sampah di Perkotaan Yang Mengalami Guna Ulang, Daur ulang, Pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah Sebelum Masuk TPA (M <sup>3</sup> /Thn)	Persentase (%)
1	Kepulauan Selayar	1.214	0	0,00
2	Bulukumba	3.973	182,5	4,81
3	Bantaeng	1.693	365	21,56
4	Jeneponto	3.283	182,5	5,56
5	Takalar	2.673	365	13,66
6	Gowa	6.826	0	0,00
7	Sinjai	2.201	182,5	8,29
8	Bone	6.853	365	5,33
9	Maros	3.161	365	11,55
10	Pangkajene Kepulauan	1.009	365	12,13
11	Barru	1.576	365	23,16
12	Soppeng	2.067	0	0,00
13	Wajo	3.610	182,5	5,06
14	Sidenreng Rappang	2.702	547,5	20,26
15	Pinrang	3.397	1.277,5	37,61
16	Enrekang	1.855	182,5	9,84
17	Luwu	3.251	182,5	5,61
18	Tana Toraja	2.113	0	0,00
19	Luwu Utara	2.811	0	0,00
20	Luwu Timur	2.627	0	0,00
21	Toraja Utara	2.084	0	0,00
22	Makassar	11.587	1.095	8,06
23	Pare-Pare	1.297	182,5	14,07
24	Palopo	1.614	365	22,62
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>79.297</b>	<b>6.753</b>	<b>8,52</b>

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2018

**Grafik II.12**  
**Penanganan Sampah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017**



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tahun 2018 (Data Diolah)

**3.1.1.1.17. Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan Perkotaan**

Berdasarkan data tersebut menandakan bahwa ruang untuk RTH di Kawasan Perkotaan di Sulawesi Selatan belum memenuhi standar minimal yang di persyaratkan.

**Tabel II.143**  
**Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	%	20	23	24	25	25

Sumber:sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.1.18. Rasio ber-IMB per satuan Bangunan**

Berdasarkan data tersebut menandakan bahwa izin mendirikan bangunan sudah mengikuti rencana tata ruang, namun belum maksimal karena hampir setiap perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan belum mempunyai Perda RDTR Perkotaan.

**Tabel II.144**  
**Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	%	25	29	35	38	48

Sumber:sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.1.19. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan**

Untuk tahun 2013-2015 sumber data didapatkan dari citra Landsat, sementara untuk tahun 2016-2017 sumber didapatkan dari Data Spot. Sumber data berbeda mengakibatkan perbedaan data.

**Tabel II.145**  
**Rasio Luas Kawasan Tertutup Pohon**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pohon Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan	%	25	29	35	38	48

Sumber:sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.1.20. Ketaatan terhadap RTRW

Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Pemerintah Kabupaten/Kota telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Akan tetapi pemanfaatan RTRW sebagai acuan pelaksanaan pembangunan belum optimal dilakukan, karena belum terintegrasinya program prioritas RTRW dalam dokumen perencanaan daerah baik dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) maupun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

**Tabel II.146**  
**Ketaatan terhadap RTRW**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ketaatan Terhadap RTRW	%	60	65	65	70	70

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.1.2. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

#### 3.1.1.1.2.1. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni dibandingkan jumlah penduduk, sehingga jumlah rumah layak huni adalah ±1.839,211 rumah di tahun 2017.

**Tabel II.147**  
**Rasio Rumah Layak Huni**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Rumah Layak Huni		0,190	0,191	0,192	0,193	0,194

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.1.2.2. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Pendataan kawasan kumuh dilakukan melalui pendataan berdasarkan indikator kumuh yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah, hingga saat ini masih terdapat kawasan kumuh sebesar 2.242,43 Ha.

**Tabel II.148**  
**Lingkungan Permukiman Kumuh**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0,101	0,100	0,099	0,098	0,048

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.1.2.3. Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani

Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, luas kawasan kumuh yang tertangani tahun 2013-2017 adalah sekitar 951,49 Ha atau sekitar 35,49% dari total luas permukiman kumuh di Provinsi Sulawesi Selatan. Tingkat persentase tertinggi dalam menangani kawasan kumuh adalah Kabupaten Sinjai sebesar 84,93%, sedangkan yang terendah adalah kabupaten Jeneponto hanya sebesar 3,42%.

**Tabel II.149**  
**Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Luas Permukiman Kumuh Tertangani	Ha		88	208,33	374,33	951,49
Luas Permukiman Kumuh	Ha	2.680,84	2.680,84	2.680,84	2.680,84	2.680,84
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani	%		3,28	7,77	13,96	35,49

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

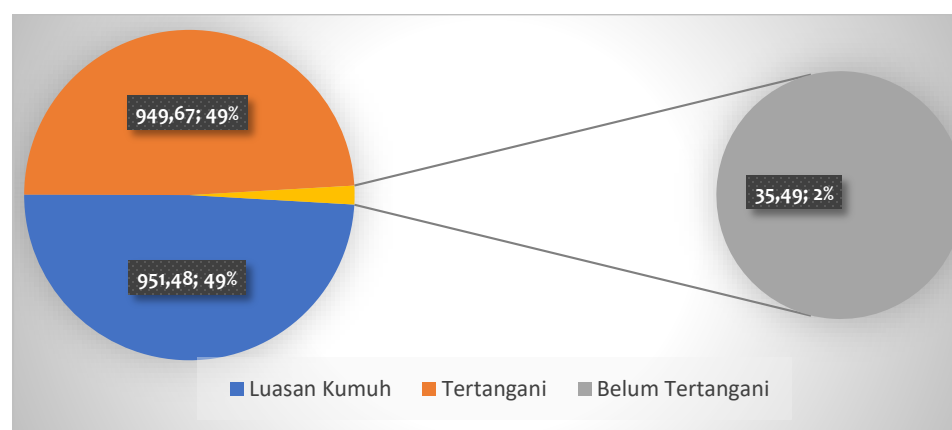
**Tabel II.150**  
**Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

No	Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani			
		Luas Kawasan Kumuh Berdasarkan SK Kepala Daerah (Ha)	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani (Ha)	Persentase Pengurangan (%)	Luas Kawasan Kumuh Saat ini (Ha)
1	Kepulauan Selayar	24,27	14,93	61,52	9,34
2	Bulukumba	56,00	39,65	70,80	16,35
3	Bantaeng	39,36	19,71	50,08	19,65
4	Jeneponto	365,92	12,50	3,42	353,42
5	Takalar	29,05	8,40	28,92	20,65
6	Gowa	231,03	118,61	51,34	112,42
7	Sinjai	67,09	56,98	84,93	10,11
8	Bone	260,46	14,26	5,47	246,2
9	Maros	5,74	1,84	32,06	3,90
10	Pangkajene Kepulauan	37,39	3,20	8,56	36,19
11	Barru	31,04	4,50	14,50	26,54
12	Soppeng	4,69	2,30	49,04	2,19
13	Wajo	40,62	28,38	69,87	12,24
14	Sidenreng Rappang	22,40	5,77	25,76	16,63
15	Pinrang	20,64	17,43	84,45	3,23
16	Enrekang	38,47	5,60	14,56	32,87
17	Luwu	202,60	24,18	11,93	178,42
18	Tana Toraja	14,25	4,50	31,58	9,75
19	Luwu Utara	42,30	12,40	29,31	29,9
20	Luwu Timur	19,78	6,70	33,87	13,08
21	Toraja Utara	24,39	11,61	47,60	12,78
22	Makassar	740,02	317,44	42,90	422,58
23	Pare-Pare	274,00	163,35	59,62	110,65
24	Palopo	89,33	57,25	64,09	32,08
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>951,48</b>	<b>949,67</b>	<b>35,42</b>	<b>35,49</b>

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018



**Grafik II.13**  
**Luas Kawasan Kumuh (Ha)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017**



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tahun 2018 (Data Diolah)

### 3.1.1.1.3. Bidang Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

#### 3.1.1.1.3.1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas Perlindungan masyarakat adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Tabel dibawah memperlihatkan bahwa cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) masih berada pada angka 32% di tahun 2013 namun terus meningkat hingga mencapai angka 34,54% di tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.1 berikut.

**Tabel II.156**  
**Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0	32,29	32,84	34,04	34,54

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.1.3.2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan satu kesatuan frase yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan. Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat atau kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban yang dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah.

Tabel dibawah menunjukkan bahwa hingga tahun 2017, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 90% di tahun 2014 menjadi 93% ditahun 2017.

**Tabel II.157**  
**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	0	90	91	92	93

Sumber: sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.3.3. Persentase Penegakan PERDA

Tingkat persentase Penegakan PERDA di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami Peningkatan. Dari tabel dibawah menunjukkan tingkat persentasi penegakan PERDA di tahun 2014 hanya sekitar 10% dan mengalami peningkatan menjadi 75% di Tahun 2017.

**Tabel II.158**  
**Persentase Penegakan PERDA**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penegakan PERDA	%	0	10	35	55	75

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.1.4. Bidang Urusan Sosial

#### 3.1.1.1.4.1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pada tahun 2014 jumlah total Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 321.765 jiwa dan yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 77.376 jiwa. jumlah yang menerima bantuan sosial ini masih dirasa cukup sedikit karena jika dilihat dari nilainya hanya 24.04% dari total keseluruhan jumlah PMKS. Adapun permasalahan yang sering di hadapi di lapangan yaitu masih kurangnya petugas dalam melakukan pendataan dimana petugas tersebut harus melakukan verifikasi dan validasi data 2 kali dalam 1 tahun di setiap kab/kota.

Pada tahun 2015 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) naik mejadi 376.071 jiwa, dari jumlah PMKS tersebut yang menerima bantuan sosial sebanyak 101.154 jiwa atau 26,90%, jika dilihat dari jumlah penerima bantuan ada sedikit kenaikan dari penerima bantuan tahun 2015. Adapun permasalahan yang di hadapi yaitu masih banyak masyarakat yang belum terdata dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Peran petugas pendata dalam hal ini adalah Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) masih kurang maksimal sehingga masih adanya masyarakat yang belum terdata dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tahun 2016 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebanyak 456.381 jiwa dan yang mendapatkan batuan sosial sebanyak 187.972 jiwa atau 41.18%. Tahun 2017 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebanyak 584.240 jiwa dan yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 185.514 jiwa atau 31.75%. Sampai dengan tahun 2018 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosia (PMKS) sebanyak 503.848 jiwa dengan jumlah yang menerima bantuan sosial sebanyak 355.136 jiwa atau 70.48%.

**Tabel II.159**  
**Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan	Jiwa	77.376	101.154	187.972	185.514	355,136
Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Jiwa	321.765	376.071	456.381	584.240	148,711
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	24,04	26,90	41,18	31,75	70,48

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.1.4.2. Persentase PMKS yang Tertangani

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani adalah jumlah PMKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan dan sandang pangan sampai dengan bantuan sosial berbentuk usaha ekonomi produktif dan bantuan kelompok usaha bersama. Pada tahun 2013 jumlah PMKS sebanyak 320.720 jiwa dan yang tertangani sebanyak 117,385 jiwa atau 36,60%. Tahun 2014 jumlah PMKS sebanyak 321.765 jiwa dan yang tertangani sebanyak 112.163 jiwa atau 34,85%. Tahun 2015 jumlah PMKS sebanyak 376.071 jiwa dan yang PMKS tetangani sebanyak 104.542 atau 27,80%. Tahun 2016 jumlah PMKS sebanyak 456.361 jiwa dan PMKS yang tertangani sebanyak 216.431 atau 47,42%. tahun 2017 jumlah PMKS sebanyak 584.240 jiwa dan PMKS yang tertangani sebanyak 204.428 jiwa atau 35%. Adapun kendala yang di hadapi pada pencapaian target indikator ini adalah masih kurangnya pengalokasian anggaran untuk penanganan Penyandang permasalahan kesejahteraan sosial di sulawesi selatan dan juga tingginya jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

**Tabel II.160**  
**Persentase PMKS yang Tertangani**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PMKS yang Tertangani	Jiwa	117.385	112.163	104.542	216.431	204.428
Jumlah PMKS	Jiwa	320.720	321.765	376.071	456.381	584.240
Persentase PMKS yang Tertangani	%	36,60	34,85	27,8	47,42	35,00

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.1.4.3. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Panti sosial dengan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan mejadi salah satu standar pelayan minumum pada setiap panti yang ada, dalam pelayanan panti sangat penting keberadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan karena akan menunjang pelayanan yang dilakukan dalam penanganan klien atau santunan pada dalam panti. Itulah mengapa setiap panti harus memiliki standar pelayanan sarana prasarana pelayanan kesehatan. Dari capaian taget indikator pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mencakup 100% dikarenakan seluruh panti yang ada harus memiliki paling minumum sarana dan parsaran pelayana kesehatan. Kedala yang sering dihadapi yaitu, masih kurangnya jumlah peralatan dalam hal ini fasilitas pelayanan kesehatan masih perlu adanya penambahan unit alat kesehatan dan rehabilitasi tempat pelayanan kesehatan.

**Tabel II.161**  
**Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	%	100	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.1.4.4. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)

Pada tahun 2013 wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial yang berjumlah sebanyak 242 dan yang memiliki sarana dan prasarana sebanyak 172 atau 68,25 %. pada tahun wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial yang berjumlah sebanyak 283 dan yang memiliki sarana dan prasarana sebanyak 182 atau 63,60 %. Pada tahun 2015 wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial yang berjumlah sebanyak 361 dan yang memiliki sarana dan prasarana sebanyak 200 atau 55,40%. pada tahun 2016 wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial yang berjumlah sebanyak 383 dan yang memiliki sarana dan prasarana sebanyak 250 atau 65,27%. Pada tahun 2017 wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial yang berjumlah sebanyak 773 dan yang memiliki sarana dan prasarana sebanyak 350 atau 45,27%. Adapun kendala yang dihadapi terkait pencapaian indikator penyediaan sarana dan prasarana adalah masih kurangnya pengalokasian bantuan dari pemerintah setempat dalam hal ini kab/kota untuk melengkapi dan memperhitungkan kenaikan WKBSM pada setiap tahunnya.

**Tabel II.162**  
**Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	WKBSM	172	180	200	250	350
Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	WKBSM	252	283	361	383	773
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	68,25	63,60	55,40	65,27	45,27

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.1.4.5. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Pencapaian target indikator korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat dalam hal ini bantuan logistik mulai pada tahun 2013 korban bencana sebanyak 49.044 jiwa dan yang menerima bantuan sosial sebanyak 31.152 jiwa atau 63,52%. Tahun 2014 korban bencana sebanyak 37,202 jiwa dan yang menerima bantuan sosial sebanyak 25.205 jiwa atau 67,75%. Tahun 2015 korban bencana sebanyak 45.442 jiwa dan yang menerima bantuan sosial sebanyak 31.908 jiwa atau 70,25%. Tahun 2016 korban

bencana sebanyak 42.611 jiwa dan yang menerima bantuan sosial sebanyak 31.998 jiwa atau 75,09%. Tahun 2017 korban bencana sebanyak 37.645 jiwa dan yang menerima bantuan sosial sebanyak 30.925 jiwa atau 82,15%. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang diberikan kepada korban bencana yaitu medan yang di lalui cukup berat dikarenakan lokasi bencana yang cukup jauh dan juga jalan yang kecil dimana sulit akses kendaraan roda 4 untuk mengantarkan bantuan tersebut harus menggunakan kendaraan besar seperti truk dan kendaraan sejenisnya. Dan apabila yang terjadi bencana sosial atau konflik sosial pendistribusian bantuan harus di perlambat karena harus menunggu keadaan tenang.

**Tabel II.163**  
**Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	Jiwa	31.152	25.205	31.908	31.998	30.925
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	Jiwa	49.004	37.202	45.422	45.611	37.645
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	63,52	67,75	70,25	75,09	82,15

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### **3.1.1.4.6. Persentase Korban Bencana Dievakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Cepat**

Pencapaian target indikator korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat. Pada Tahun 2013 jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 9.808 jiwa dan jumlah korban yang evakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap sebanyak 6.080 jiwa atau 61,90%. Pada Tahun 2014 jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 7.440 jiwa dan jumlah korban yang evakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap sebanyak 5.084 atau 68,33%.

Pada Tahun 2015 jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 9.084 jiwa dan jumlah korban yang evakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap sebanyak 8.622 jiwa atau 75,09%. Pada Tahun 2016 jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 8522 jiwa dan jumlah korban yang evakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap sebanyak 6.832 jiwa atau 80,16%. Pada Tahun 2017 jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 9.808 jiwa dan jumlah korban yang evakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap sebanyak 7.529 atau 82,32%. Adapun yang menjadi kendala pada saat pelaksanaan evakuasi korban bencana yaitu masih kurangnya petugas atau relawan dalam tanggap darurat, oleh karena itu walaupun sarana prasarana tanggap darurat lengkap tetapi tidak didukung oleh petugas dan relawan yang memadai akan menjadi penghambat dalam mengevakuasi korban bencana.



**Tabel II.164**  
**Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah korban bencana dalam satu tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	6.080	5.084	8.622	6.832	6.198
Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	9.808	7.440	9.084	8.522	7.529
Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	61,90	68,33	75,09	80,16	82,32

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.4.7. Persentase Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial

Pencapaian target indikator jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun di Sulawesi Selatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memiliki nilai yang tetap yaitu 1.135 jiwa. Sedangkan untuk indikator jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sekitar 15.272 jiwa dan tahun 2017 sekitar 17.668 jiwa. Berdasarkan data tersebut, diperoleh informasi bahwa persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mengalami penurunan, dari 7,43% di tahun 2013 menjadi 6,42% di tahun 2017.

**Tabel II.165**  
**Persentase Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun	Jiwa	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun	Jiwa	15.272	15.310	17.668	18.124	17.668
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	7,43	7,41	6,42	6,26	6,42

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

##### 3.1.1.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

##### 3.1.1.2.1.1. Angka Sengketa Pengusaha- Pekerja Pertahun

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi jumlah Perusahaan. Angka sengketa Pengusaha-Pekerja pertahunnya kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2013 sebesar 1,26% dengan jumlah perusahaan sebesar 12.201 perusahaan, pada tahun 2014 meningkat sebesar 0,9% menjadi sebesar 2,16% menurun lagi pada tahun 2015 sebesar 0,27%, namun

pada tahun 2016 meningkat lagi sebesar 0,07%, dan pada tahun 2017 meningkat lagi sebesar 0,27% dengan jumlah perusahaan sebesar 12.487 perusahaan. Ada beberapa hal yang menyebabkan sengketa pengusaha dan pekerja meningkat antara lain adalah meningkatnya wawasan pekerja dan buruh dan era transparansi sementara sebagian perusahaan masih belum melaksanakan secara maksimal aturan yang berlaku, disamping itu kendala SDM yang kita miliki dalam mengawasi dan melakukan pembinaan masih kurang baik kualitas maupun kuantitasnya ini dibuktikan dengan data pengawas maupun mediator kurang lebih 50 sd 60 orang yang mau melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap 12.487 perusahaan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut untuk Internal Dinas adalah berupaya untuk menambah jumlah mediator dan pengawas setiap tahunnya dan tenaga teknis diupayakan untuk ditingkatkan pengetahuannya melalui bimbingan teknis dan ketrampilan. Sementara untuk eksternal pengusaha dan pekerja secara terus menerus dilakukan pembinaan baik pelatihan maupun bimbingan teknis agar pengusaha maupun pekerja memahami posisi dan kewajiban masing-masing sehingga pada gilirannya keduanya bisa saling memahami dan bersinergi dalam membangun kebersamaan dalam mengurus perusahaan yang pada akhirnya bisa mengurangi bahkan mempersempit ruang perselisihan. Perlu upaya pemerintah untuk dapat memfasilitasi sengketa antara pemilik perusahaan dan karyawan.

**Tabel II.166**  
**Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja	Kasus	155	267	235	244	279
Jumlah Perusahaan	Perusahaan	12.201	12.366	12.487	12.487	12.487
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	1,26	2,16	1,89	1,96	2,23

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.1.2. Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sesuai table diatas menggambarkan nilai fluktuatif, tahun 2013 kasus yang terselesaikan sebesar 90,96 %, kemudian tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 76,40 % dan tahun 2015 meningkat kembali sebesar 87,66 %, dan tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dapat mencapai peningkatan sampai sebesar 100 %. Hal ini disebabkan banyak faktor antara lain pihak-pihak memang mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan, pihak yang mewakili dalam melakukan perundingan mediasi sangat mempengaruhi pula tingkat keberhasilan penyelesaian, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terutama tentang penyelesaian secara Perjanjian Bersama, faktor budaya dan social ekonomi perusahaan.

**Tabel II.167**  
**Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	90,96	76,40	87,66	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.1.3. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 sebesar 78,58%, mengalami penurunan sebesar 34% pada tahun 2014 menjadi 44,99%, dan pada tahun 2015 meningkat lagi sebesar 17% menjadi 61,67%, namun pada tahun 2016 turun lagi sekitar 16 persen menjadi 45,59 persen dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 5,61% menjadi 51,20%. Fluktuasi terhadap besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data dari kabupaten/kota yang diolah secara online, dimana ada beberapa kabupaten yang sama sekali tidak mengirim data karena penghentian anggaran operasional dari kementerian ketenagakerjaan. Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk dapat mengalokasikan anggaran dari kementerian pada beberapa kabupaten kota yang tidak mendapat anggaran, dan juga memaksimalkan fungsi dari fungsional pengantar kerja.

**Tabel II.168**  
**Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	%	78,58	44,99	61,67	45,59	51,20

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.1.4. Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan perlindungan merupakan perbandingan antara jumlah perusahaan yang menerapkan K3 terhadap jumlah perusahaan. Keselamatan dan perlindungan K3 dari tahun 2013-2017 rata rata mencapai realisasi sebesar 100%. Dapat diartikan bahwa hampir semua perusahaan di Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan pemeriksaan sudah menerapkan SMK3. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja (SMK3) dari tahun ketahun tingkat kepatuhan terhadap norma K3 mengalami kemajuan yang menggembirakan. Dalam Pasal 5 ayat (2) PP tersebut, bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya wajib menerapkan SMK3. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 4.573 Perusahaan yang telah menerapkan SMK3 dari jumlah perusahaan Wajib Laport Ketenagakerjaan sejumlah 12.487 Perusahaan.

Kendala yang dihadapi adalah masih terbatasnya jumlah kualitas SDM maupun kuantitas Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan yang ada Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah kurang lebih 55 orang. cPersentase jumlah perusahaan yang menerapkan keselamatan danckesehatan kerja selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran sejumlah perusahaan telah menerapkan keselamatan dan kesejahatan kerja bagi para pekerjanya.

**Tabel II.169**  
**Keselamatan dan Perlindungan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Keselamatan dan Perlindungan	%	100	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.1.5. Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah**

Bahwa perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terlihat dengan ditetapkannya Upah Minimum setiap tahunnya, dimana kemampuan membayar perusahaan tidak semua sama tergantung banya faktor sehingga timbul perselisihan antara pekerja dan pengusaha, namun terhadap hal ini telah diberikan jalan oleh Peraturan perundang-undangan untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

**Tabel II.170**  
**Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.1.6. Besaran Penguji Peralatan di Perusahaan**

Besaran pengujian peralatan di Perusahaan kurun waktu 2013 – 2017 berfluktuatif, dimana pada tahun 2013 sebesar 4,97%, pada tahun 2014 turun sebesar 0,62% menjadi 4,35%, dan pada tahun 2015 mengalami stagnan dan pada tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan masing-masing menjadi 4,50% dan 5,00%. Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan jumlah besaran pengujian peralatan di perusahaan sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 624 perusahaan dari total jumlah perusahaan wajib lapor ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 adalah sebanyak 12.487 perusahaan.

Peningkatan besaran pengujian peralatan di perusahaan perlu terus ditingkatkan agar dapat meminimalkan kecelakaan kerja. Setiap peralatan kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya kecelakaan kerja atau dibutuhkan sertifikasi untuk memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja dalam setiap operasinya. Di Indonesia setiap peralatan kerja harus disertifikasi sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Sebagaimana yang telah diketahui dan dijalankan sampai saat ini, sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan lokasi dimana peralatan kerja tersebut akan dioperasikan. Seperti di pabrik-pabrik produksi dan perkebunan untuk sertifikasinya dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Namun didalam melaksanakan pemeriksaan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih memiliki kendala dari segi kuantitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki fungsi untuk melakukan pemeriksaan masih sangat terbatas hanya berjumlah kurang lebih 60 orang, disamping itu kualitas SDM nya juga masih sangat terbatas terutama terkait tenaga ahli.

**Tabel II.171**  
**Besaran Penguji Peralatan di Perusahaan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	4,97	4,35	4,35	4,50	5,00

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.1.7. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2013 hanya berkisar 52,38%, pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 47,62% menjadi 100%, dan pada tahun 2015 dan 2016 menjadi 100%, namun pada tahun 2017 menurun sebanyak 20% dibandingkan pada tahun 2016. Pelatihan berbasis

kompetensi sangat dibutuhkan dalam kaitan meningkatkan skill tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja.

**Tabel II.172**  
**Besaran Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	52,38	100	100	100	80

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.1.8. Besaran Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan**

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2013 hanya berkisar 67,95%, pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 22,05% menjadi 100%, dan pada tahun 2015 dan 2016 menjadi 100%, namun pada tahun 2017 menurun sebanyak 23,33% menjadi 66,67% dibandingkan pada tahun 2016. Pelatihan berbasis kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, meningkatkan produktivitas UKM. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan pelatihan kewirausahaan yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel II.173**  
**Besaran Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	67,95	100	100	100	66,67

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.1.9. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek**

Persentase Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta jamsostek berfluktuatif. Dimana pada tahun 2013 sebesar 79,05% kemudian pada tahun 2014 dan tahun 2015 turun menjadi masing-masing sebesar 74,52 pada tahun 2015 dan 71,22 persen. Dan pada tahun 2016 naik sekitar 0,59% menjadi 71,81%, Namun pada tahun 2017 turun lagi menjadi 0,73% menjadi 71,08%. Ada banyak factor yang mempengaruhi turunnya kepesertaan jamsostek salah satunya adalah sebagian perusahaan masih bersifat sentralistik artinya pekerjanya di Makassar tapi terdaftar BPJS ketenagakerjaannya di Jakarta dan tidak melaporkan di Makassar. Kemudian ada peserta yang keluar masuk BPJS ketenagakerjaan terutama pekerja kontrak atau pekerja di sektor konstruksi.

**Tabel II.174**  
**Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun					Rata-Rata
		2013	2014	2015	2016	2017	
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	79,05	74,52	71,22	71,81	71,08	73,54

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.1.10. Besaran Pemeriksaan Perusahaan**

Besaran pemeriksaan di Perusahaan kurun waktu 2013 – 2017 berfluktuatif, dimana pada tahun 2013 sebesar 8,71%, pada tahun 2014 turun sebesar 2,84% menjadi 5,87%, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 19,36% menjadi sebesar



25,23% dan pada tahun 2016 meningkat lagi sebesar 3,60% menjadi sebesar 28,83%. Namun pada tahun 2017 turun sebesar 3,35%. Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan jumlah besaran pemeriksaan di perusahaan sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 3.182 perusahaan dari total jumlah perusahaan wajib lapor ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 adalah sebanyak 12.487 perusahaan. Memperhatikan perkembangan jumlah perusahaan yang melapor sejak pelaksanaan system pemerintahan otonomi daerah, dimana pertumbuhannya hamper tidak bergerak. Demikian pula pertumbuhan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan ada juga tidak mengalami kenaikan, bahkan cenderung berkurang karena usia pension.

**Tabel II.175**  
**Besaran Pemeriksaan Perusahaan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	8,71	5,87	25,23	28,83	25,48

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.1.11. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK ) merupakan prosentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja. Pada tahun 2013 sampai 2017 secara umum cenderung berfluktuatif. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2013 sebesar 60,32% mengalami kenaikan sebesar 1,72% pada tahun 2014 menjadi sebesar 62,04%, pada tahun 2015 turun sebesar 1,10 point dibanding TPAK pada tahun 2014 menjadi 60,94%, dan TPAK tahun 2016 kembali terkoreksi sebesar 1,98% dibanding TPAK pada tahun 2015 menjadi 62,92%, Tahun 2017 turun sebesar 1,94 point dibanding TPAK pada tahun 2016 menjadi 60,98%. Meningkatkan atau menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk Usia Kerja, Semakin tinggi Angkatan Kerja yang tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, maka TPAK akan semakin tinggi, namun jika terjadi hal yang sebaliknya maka TPAK akan menurun.

Dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, diharapkan jumlah lapangan kerja juga tersedia agar tidak terjadi peningkatan pengangguran, namun dari data BPS tergambar bahwa Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi berpendidikan SD berkisar 40% hingga 45%, disusul pendidikan SMP 14% hingga 16%, SMTA/Kejuruan berkisar 23% hingga 26%, kemudian perguruan tinggi 11% hingga 15%, dan pendidikan Diploma 2% hingga 4%. Untuk mengurangi jumlah pengangguran dinas tenaga kerja dan transmigrasi telah melakukan berbagai upaya baik melalui pelatihan bagi calon pencari kerja (putus sekolah, perempuan, petugas lansia), pelatihan kewirausahaan, pelatihan peningkatan produktivitas, pemberdayaan kelompok usaha mandiri dan wirausaha produktif maupun penyebar luasan kesempatan kerja melalui job fair.

**Tabel II.176**  
**Angka Partisipasi Angkatan Kerja**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun					Rata-Rata
		2013	2014	2015	2016	2017	
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	60,32	62,04	60,94	62,92	60,98	61,44

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.1.12. Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk usia 15 Tahun ke atas**

Rasio Kesempatan Kerja adalah merupakan prosentase Penduduk Yang Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja. Pada tahun 2013 hingga 2017 persentase penduduk yang bekerja terhadap total jumlah penduduk usia kerja cenderung mengalami fluktuasi. Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun keatas mengalami fluktuatif, pada tahun 2013 realisasi rasio kesempatan kerja sebesar 57,24%, pada tahun 2014 meningkat sebesar 1,64% menjadi 58,88%, dan mengalami penurunan sebesar 1,57 persen menjadi 57,31 persen pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 1,59% menjadi 59,90% namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,61%. Penurunan persentase rasio kesempatan kerja sebagai akibat menurunnya jumlah penduduk yang bekerja di beberapa sektor yaitu :

- a. Sektor Pertanian, data BPS pada tahun 2016 penduduk yang bekerja sebesar 39,73% menurun pada tahun 2017 sebesar 76.350 orang menjadi 38,67%, hal ini disebabkan :
  1. Berkurangnya lahan pertanian, karena adanya alih fungsi lahan pertanian kelahan permukiman;
  2. Adanya teknologi mekanisasi pertanian dimana alih peran dari tenaga manusia beralih kepenggunaan mesin-mesin pertanian yang lebih efisien dan efektif dalam pengolahan lahan;
  3. Pengaruh iklim.
- b. Sektor Konstruksi, data BPS pada tahun 2016 penduduk yang bekerja sebesar 7,11% menurun pada tahun 2017 sebesar 29.989 orang menjadi 6,47%.
- c. Sektor Industri, data BPS pada tahun 2016 penduduk yang bekerja sebesar 7,65% menurun pada tahun 2017 sebesar 19.818 orang menjadi 7,31%, hal ini disebabkan :
  1. Penggunaan mesin-mesin yang dioperasikan secara digital dengan teknologi modern yang bersumber dari penanaman modal asing dengan menggunakan TKA sehingga dapat mengurangi tenaga kerja lokal dengan dalih proses alih pengetahuan kepada tenaga kerla lokal.
  2. Sektor Pertambangan dan Penggalian, data BPS pada tahun 2016 penduduk yang bekerja sebesar 1,09% menurun pada tahun 2017 sebesar 11.532 orang menjadi 0,80%, hal ini disebabkan beberapa usaha pertambangan tidak beroperasi sebagai akibat dari kebijakan yang memberatkan pengusaha tambang.

**Tabel II.177**  
**Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk usia 15 Tahun ke atas**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun					Rata-Rata
		2013	2014	2015	2016	2017	
Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk usia 15 Tahun ke atas	%	57,24	58,88	57,31	59,90	54,01	57,47

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.2. Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi**

**3.1.1.2.2.1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan**

Kelompok Informasi Masyarakat merupakan komunitas masyarakat/mitra strategis Pemerintah Daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jumlah KIM tersebut meningkat 8,32% dalam 5 tahun.

**Tabel II.178**  
**Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	5,00	10,16	6,16	19,89	13,62

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.2.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi di Sulawesi Selatan telah menjangkau 90% wilayah provinsi pada tahun 2016.

**Tabel II.179**  
**Cakupan Layanan Telekomunikasi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	n.a	n.a	n.a	90	n.a

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.2.3. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Pada tahun 2013, 47,12% atau sebesar ±4.4 juta masyarakat telah memiliki HP/telepon, kemudian meningkat 11,41% di tahun 2016 atau sebesar 5.573.026 orang.

**Tabel II.180**  
**Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	%	47,12	49,75	56,21	58,53	n.a

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.2.4. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Peningkatan penggunaan internet meningkat cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir, dari ±2 juta penduduk di tahun 2013 menjadi 3.985.591 orang di tahun 2017.

**Tabel II.181**  
**Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	21,99	26,57	37,72	39,21	42,04

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.2.5. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Kepemilikan komputer pribadi meningkat sebesar 8,83% dalam 5 tahun terakhir, dari ±1,6 juta orang di tahun 2013 menjadi 2.549.299 orang di tahun 2017.

**Tabel II.182**  
**Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	%	18,06	25,20	20,58	21,73	26,89

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

3.1.1.2.3. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

3.1.1.2.3.1. Presentase Koperasi Aktif

Tahun 2013 jumlah koperasi sebanyak 8.230 unit yang aktif sebanyak 5.624 unit atau 68,33% disebabkan karena beberapa kabupaten/kota tidak memiliki Lembaga yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM. Pada tahun 2014 jumlah koperasi aktif sejumlah 5.331 unit atau 62,24 dari total 8.565 unit koperasi. Pola pembinaan yang dilakukan beberapa kabupaten/kota dinilai kurang terarah dimana masih banyak kabupaten/kota yang lembaganya terkait urusan koperasi masih bergabung dengan OPD lain, sehingga kualitas kelembagaan masih kurang. Pada tahun 2015 jumlah koperasi aktif sebanyak 5.427 unit atau berkisar 62,48%, dimana terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan sudah adanya kejelasan terkait pola pembinaan serta aktifnya peran penyuluh koperasi di lapangan. Pada tahun 2016 jumlah koperasi aktif sejumlah 5.185 unit atau 58,64% dari total 8.841 unit jumlah koperasi. Penurunan ini terjadi disebabkan karena adanya peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia tentang pembubaran Koperasi bagi yang sudah tidak aktif dan tidak ingin dibina. Tahun 2017 jumlah koperasi meningkat menjadi 8.845 unit koperasi dengan jumlah koperasi aktif 5.226 unit atau 59,08%. Terkait bertambahnya jumlah koperasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah koperasi aktif, maka pihak Kementerian sangat selektif dalam memberikan perizinan serta telah kita usulkan beberapa koperasi tidak aktif untuk dibubarkan.

**Tabel II.183**  
**Presentase Koperasi Aktif**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Koperasi Aktif	%	68,33	62,24	62,48	58,64	59,08

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

**Tabel II.184**  
**Pengembangan Koperasi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

No	Kabupaten/ Kota/Status	Jumlah Koperasi (Unit)									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif
1	Kepulauan Selayar	132	52	138	48	141	47	143	49	147	44
2	Bulukumba	186	117	224	78	222	80	222	80	229	79
3	Bantaeng	133	79	139	78	123	96	126	95	131	94
4	Jeneponto	47	180	137	90	121	110	121	111	154	90
5	Takalar	270	68	272	69	234	116	243	113	249	109
6	Gowa	364	149	414	122	424	117	453	117	455	115
7	Sinjai	97	29	106	26	110	25	115	25	114	26
8	Bone	759	175	185	753	183	754	184	754	184	754
9	Maros	185	126	204	125	229	118	236	117	237	116
10	Pangkajene Kepulauan	240	69	246	70	253	69	262	67	264	66
11	Barru	87	22	93	22	96	22	97	22	97	22
12	Soppeng	190	7	191	7	192	7	181	22	182	21
13	Wajo	223	190	256	186	270	182	281	181	282	160
14	Sidenreng Rappang	161	193	176	182	178	182	178	182	184	182
15	Pinrang	204	109	228	109	249	97	259	96	270	96
16	Enrekang	84	98	65	89	83	101	85	104	88	117
17	Luwu	203	213	206	213	206	216	187	237	187	237
18	Tana Toraja	99	44	102	43	100	62	118	45	116	42
19	Luwu Utara	152	85	174	76	149	84	173	85	154	105
20	Luwu Timur	179	76	190	71	185	77	159	113	144	92
21	Toraja Utara	62	38	60	42	53	63	70	60	70	60
22	Makassar	1.134	223	1.134	366	1.163	364	808	720	808	720

No	Kabupaten/ Kota/Status	Jumlah Koperasi (Unit)									
		2013		2014		2015		2016		2017	
23	Pare-Pare	103	101	127	80	111	96	123	92	123	92
24	Palopo	191	76	193	82	192	90	204	82	200	86
25	Provinsi	113	72	113	72	134	68	131	72	138	72
26	Sekunder	26	15	26	15	26	15	26	15	19	22
<b>Jumlah</b>		<b>5.624</b>	<b>2.606</b>	<b>8.230</b>	<b>68</b>	<b>5.427</b>	<b>3.258</b>	<b>5.185</b>	<b>3.656</b>	<b>5.225</b>	<b>3.619</b>

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

### 3.1.1.2.3.2. Presentase Usaha Mikro dan Kecil

Beberapa permasalahan terkait pengembangan usaha mikro dan kecil diantaranya adalah:

1. Para pengelola belum professional dan akuntabel dalam pengelolaan;
2. Para pengelola belum mampu untuk berinovasi dalam pengembangan produk;
3. Kemampuan dalam mengakss teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran masih sangat rendah;
4. Masih banyak pengelola yang berorientasi dan bergantung pada bantuan pemerintah;
5. Fungsi kelembagaan dan infrastruktur UMKM belum optimal terutama pembiayaan dan pemasaran.

**Tabel II.185**  
**Presentase Usaha Mikro dan Kecil**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	71,45	90,35	91,64	92,48	94,29

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.4. Bidang Urusan Penanaman Modal

#### 3.1.1.2.4.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor berskala nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dengan jumlah proyek mencapai 911. Peningkatan investor tersebut tidak terlepas dari dukungan beberapa kebijakan pemerintah daerah yang memberi berbagai kemudahan kepada investor, peningkatan iklim yang lebih kondusif, system perizinan yang lebih baik dan adanya jaminan kepastian hukum dari pemerintah dalam berinvestasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel II.186**  
**Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	183	505	281	689	911

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.4.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 hingga 2017 cenderung meningkat diakibatkan karena kondisi ekonomi regional yang stabil.

**Tabel II.187**  
**Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Triliun Rupiah	5,32	7,90	12,10	8,30	11,48

Sumber :sipd.kemendagri.go.id



### 3.1.1.2.4.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja pada perusahaan berskala nasional di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 mencapai angka 301 orang/proyek, diakibatkan karena pada adanya proyek yang berskala nasional yang merealisasikan proyeknya pada sektor jasa lainnya (industri semen) yang menyerap tenaga kerja cukup tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun berikutnya angka rasio daya serap tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan menurun karena perusahaan-perusahaan sebagian besar menggunakan mesin-mesin yang berteknologi sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja.

**Tabel II.188**  
**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/ Proyek	301	91	55	29	11

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.4.4. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Terjadinya fluktuasi nilai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi Sulawesi Selatan diakibatkan karena peningkatan iklim investasi yang lebih kondusif dan adanya jaminan kepastian hukum dari pemerintah dalam berinvestasi di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga turut mendorong peningkatan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

**Tabel II.189**  
**Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	-60	437	86	64	-41

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.5. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

#### 3.1.1.2.5.1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepedanilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jumlah organisasi pemuda dari tahun 2013 berjumlah 651 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan jumlah organisasi 655. Persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2013 mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 kemudian persentasenya menurun pada tahun 2017 yaitu nilai 8,31%.

**Tabel II.190**  
**Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	9,06	9,06	7,10	8,49	8,31

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

Persentase pemuda yang aktif dalam lima tahun terakhir dalam keadaan tetap sehingga pembinaan difokuskan pada 59 organisasi pemuda yang aktif. Hal ini sesuai dengan persyaratan organisasi pemuda yang terdaftar di KNPI. Jumlah organisasi pemuda di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi. Jumlah organisasi pemuda meningkat sejak tahun 2013 hingga 2017. Namun persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan karena kelembagaan yang menangani urusan kepemudaan dan olahraga kabupaten/kota belum terbentuk di Sulawesi Selatan.

#### 3.1.1.2.5.2. Persentase Wira Usaha Muda

Pada tahun 2017 persentase wirausaha muda mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh karena dinamika perekonomian global nasional.

**Tabel II.191**  
**Persentase Wira Usaha Muda**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Wirausaha Muda	%	19,80	21,78	25,74	19,80	10,89

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.5.3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Penambahan jumlah cabang olahraga yang menjadi binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 sebanyak satu cabang olahraga. Jumlah keseluruhan cabang olahraga yang terdaftar di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2013 hingga 2017 sebanyak 50 cabang olahraga.

**Tabel II.192**  
**Cakupan Pembinaan Olahraga**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pembinaan Olahraga	%	40	40	42	42	40

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.5.4. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat dari tahun 2013 hingga 2015 mengalami peningkatan, sedangkan dari tahun 2015 hingga 2017 jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat mengalami penurunan sebanyak 90 orang. Kecenderungan penurunan jumlah pelatih bersertifikat kemungkinan dipengaruhi oleh persyaratan lisensi sertifikasi yang tidak dapat dipenuhi. Jumlah seluruh pelatih di Sulawesi Selatan mengalami stagnasi dengan jumlah 907 pelatih sejak lima tahun.

**Tabel II.193**  
**Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	17,64	22,05	22,60	19,29	12,13

Sumber :sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.5.5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Jumlah atlet binaan dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan sejumlah 90 atlet. Sedangkan jumlah seluruh atlet pelajar di Sulawesi Selatan dari tahun 2013 hingga 2017 tidak mengalami peningkatan jumlah.

**Tabel II.194**  
**Cakupan Pembinaan Atlet Muda**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	4,15	4,15	4,34	4,34	4,34

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.5.6. Jumlah Atlet Berprestasi

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh sebab itu olahraga seharusnya dilakukan oleh umat manusia, dan pemerintah harus berperan untuk menjadikan olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Setiap orang yang berolahraga tidak mempunyai tujuan yang sama, ada yang hanya untuk mencari kebugaran dan bagi seorang atlet tujuan utama berolahraga ialah ingin mendapatkan prestasi yang tinggi, sering disebut dengan prestasi olahraga. Berprestasi dikalahkan Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui peningkatan pembinaan pelatih, pencarian bibit-bibit muda yang potensial, dan pembangunan sarana prasarana. Dalam hal peningkatan kualitas dan prestasi keolahragaan juga telah diraih berbagai prestasi yaitu :

- a. Prestasi Olahraga Atlet Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Sekolah Keberbakatan Olahraga antara lain :
  1. Atlet PPLP meraih 4 medali emas, 3 medali perak dan 24 medali perunggu pada event Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Semarang Jawa Tengah.
  2. Atlet PPLP meraih 13 medali emas, 3 medali perak dan 11 medali perunggu pada Kejuaraan Nasional Antar PPLP.
- b. Prestasi Olahraga Atlet Pusat Pembinaan Atlet Prestasi Daerah antara lain :
  1. Atlet PPAPD meraih 5 medali emas, 2 medali perak pada Pekan Olahraga Antar Mahasiswa di Makassar.
  2. Atlet PPAPD meraih 2 medali emas, 1 medali perak pada Kejuaraan Nasional Jawa Timur open.
  3. Atlet PPAPD meraih 1 medali perak pada event Bosowa Maraton.
  4. Atlet PPAPD meraih 1 medali emas pada Kejuaraan Indonesia Timur.
  5. Atlet PPAPD Cabang Olahraga Kempo meraih 1 medali emas, 1 medali perunggu pada event Kejurnas Piala Walikota Tangerang.
  6. Atlet PPAPD Cabang Olahraga Karate meraih 1 medali perunggu pada event Piala Panglima.
  7. Atlet PPAPD meraih 1 medali emas, 1 medali perunggu pada kejuaraan Gojukai se Selselbar dan Tenggara.
  8. Atlet PPAPD meraih 1 medali emas, pada Kejuaraan Silat Antar Perai Putih di Jakarta.
- c. Prestasi A Tradisional/Kemasyarakatan Atlet yang membutuhkan khusus Sulawesi Selatan pada Pekan Paralimpik Pelajar Nasional menempati urutan ke 12 dengan perolehan medali : 6 medali emas, 5 medali perak dan 4 medali perunggu.

Jumlah atlet berprestasi tahun 2013 mengalami peningkatan hingga tahun 2017 dengan jumlah 81 atlet pada tahun 2017.

**Tabel II.195**  
**Jumlah Atlet Berprestasi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	50	39	46	76	81

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.5.7. Jumlah Prestasi Olahraga

Pencapaian prestasi cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga berfluktuasi dari tahun 2013 hingga 2017. Peningkatan kualitas pelatih dan kuantitas latihan bagi para atlet dibutuhkan untuk meningkatkan pencapaian target prestasi olahraga kedepan. Diharapkan agar pemerintah mendorong terbentuknya organisasi kepemudaan dan olahraga secara keseluruhan di kabupaten/kota serta menginisiasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk membuat inovasi Sistem Informasi Kepemudaan dan Olahrag (SIPOR).

**Tabel II.196**  
**Jumlah Prestasi Olahraga**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Prestasi Olahraga	Medali	17	18	17	14	16

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.6. Bidang Urusan Statistik

##### 3.1.1.2.6.1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegritas

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyediakan sistem data statistik setiap tahun.

**Tabel II.197**  
**Data dan Statistik yang Terintegritas**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Jumlah	Ada (24)	Ada (24)	Ada (24)	Ada (24)	Ada (24)

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

##### 3.1.1.2.6.2. Buku “Kabupaten Dalam Angka”

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyusun buku Kabupaten Dalam Angka setiap tahun.

**Tabel II.198**  
**Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Jumlah	Ada (24)	Ada (24)	Ada (24)	Ada (24)	Ada (24)

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.6.3. Buku (PDRB)

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyusun buku PDRB setiap tahun.

**Tabel II.199**  
**Ketersediaan Buku PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Buku "PDRB"	Jumlah	Ada (48)	Ada (48)	Ada (48)	Ada (48)	Ada (48)

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.7. Bidang Urusan Persandian

#### 3.1.1.2.7.1. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Persentase keterhubungan antar Perangkat Daerah dalam jaring komunikasi sandi telah menjangkau seluruh perangkat daerah.

**Tabel II.200**  
**Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	0	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.8. Bidang Urusan Kebudayaan

#### 3.1.1.2.8.1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Pariwisata merupakan sektor penting dan potensi dalam memajukan dan memperkenalkan daerah di kanca nasional dan internasional, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas Wilayah 46.717 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 21 kabupaten dan 3 Kota, dengan jumlah penduduk sesuai data BPS tahun 2018 kurang lebih 8,7 Juta Jiwa, dalam kehidupan bermasyarakat, penduduk ini melakoni kehidupannya diwarnai/ dipengaruhi oleh 3 Etnis yaitu: Etnis Makassar, Bugis dan Toraja, masing-masing Etnis ini memiliki Kesenian Daerah serta potensi wisata yang berbeda-beda walaupun dalam pergaulannya sangat kental dan harmonis. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertugas membina, melestarikan dan mengembangkan Kesenian Daerah sebagai warisan Budaya, tugas tersebut pada tahun Anggaran 2014 – 2018, telah dilakukan pembinaan terhadap Seniman melalui Kelompok/Sanggar Seni berupa; memberikan bantuan kepala Kelompok/Sanggar Seni dari Kab/Kota yang bersyarat, dan juga memberikan kesempatan sekaligus memfasilitasi para Pelaku Seni/Sanggar Seni yang berprestasi untuk menampilkan Karya Seninya pada Event-Event Daerah maupun pada Event Nasional.

Kerjasama sinergis antara Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata di daerah, agar dapat terwujud manajemen kepariwisataan yang baik pada seluruh bidang pendukung, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap daya tarik wisatawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah, pendapatan masyarakat, dan berkontribusi pula terhadap peningkatan devisa negara. Peran dan kontribusi sektor swasta harus terus didorong dan difasilitasi dalam pengembangan pariwisata, karena selama ini hampir sebagian besar obyek pariwisata dikelola oleh Pemerintah Daerah. Di suatu provinsi misalnya, lebih dari 90% obyek pariwisata dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini akan



mengakibatkan tingginya tingkat ketergantungan manajemen obyek wisata terhadap alokasi dana APBD.

Daya tarik kesenian daerah Sulawesi Selatan tidak kalah bersaing dengan kesenian daerah provinsi lain, bahkan pada berbagai Event tingkat Nasional Tim Seni Budaya Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan apresiasi ditingkat pusat, termasuk Festival Tari Nusantara di Jakarta tahun 2014 Tim Tari Provinsi Sulawesi Selatan meraih Prestasi sebagai “Penata Rias dan Busana Terbaik” dan pada Event Festival Nasional Teater Anak-Anak 2015 meraih prestasi sebagai “Sutra Dara Terbaik”. Seiring dengan perkembangan zaman, dimana para generasi muda sudah sangat mudah mengakses segala jenis kesenian modern melalui berbagai macam media yang dapat merusak mental generasi muda, maka salahsatu upaya yang dapat dilakukan adalah tetap menghidupkan, membina, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai seni budaya sebagai alat perekat diantara etnis dan menjadi aset daerah.

**Tabel II.201**  
**Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	16	15	19	22	9

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.8.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang dipelihara/dilestarikan dalam daerah mengalami penurunan dari angka tertinggi pada Tahun 2014 sebesar 5 buah, pada Tahun 2015 sebesar 3 Buah dan Tahun 2016 turun menjadi 1 Buah, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 3 Buah, dan tahun 2018 turun kembali menjadi 2 buah. Cagar Budaya yang tersebar di Sulawesi Selatan memiliki daya tarik tersendiri termasuk Kekayaan jejak masa silam yang masih bertahan hingga saat ini menjadi sajian data yang menarik untuk didalami lebih jauh. Alhasil, tak sekadar peneliti pribumi, peneliti dari luar negeri pun tak sungkan menelusuri berbagai objek yang mereka teliti. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Cagar Budaya (Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya) kurang lebih 700 buah, tersebar di 24 Kabupaten/Kota. Data tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Cagar Budaya yang cukup banyak sehingga perlu dikelola dan dilestarikan dengan baik. Upaya pengelolaan dan pelestariannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Cagar Budaya baik berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya maupun Kawasan Cagar Budaya memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan Sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dalam rangka pelestarian dan pengelolaannya diperlukan adanya upaya perlindungan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya.

**Tabel II.202**  
**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Di lestarikan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Buah	5	3	1	3	2

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.8.3. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Revitalisasi dan Inventarisasi karya budaya adalah kegiatan yang memungkinkan budaya lokal itu mampu menjawab tantangan jaman, tantangan hidup hari ini dengan menjadikan gantang penakarnya memanusiawikan manusia, kehidupan dan masyarakat. Langkah ini merupakan tindak lanjut yang menyusul langkah pelestarian alias pendataan (pendaftaran) dan pengenalan hasil budaya angkatan-angkatan terdahulu guna melawan lupa dan memulihkan ingatan kolektif suatu komunitas masyarakat. Karya budaya Sulawesi Selatan yang dimasukkan sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 terdapat di 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi selatan, yang jumlahnya saat ini baru dapat dicatat oleh seksi Sejarah dan Nilai Tradisional Bidang Sejarah dan Cagar Budaya sebanyak 670 Karya Budaya. Sejak Tahun 2014 hingga 2018 dari jumlah tersebut hanya 44 yang dianggap lengkap datanya dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai warisan Budaya Tak benda (WBTB) Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari 44 WBTB Indonesia asal Sulawesi Selatan itu ada 2 yang telah mendapatkan pengakuan Dunia sebagai warisan Dunia oleh UNESCO.

**Tabel II.203**  
**Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Buah	3	3	6	6	21

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.9. Bidang Urusan Perpustakaan

#### 3.1.1.2.9.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga 2017. Data pada tabel dibawah menunjukkan jumlah pengunjung selama kurun waktu 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan sekitar 55%. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca masyarakat semakin meningkat.

**Tabel II.204**  
**Pengunjung Perpustakaan Per tahun**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	342,152	438,686	440,579	513,408	621,306

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.9.2. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Jumlah koleksi buku pada tahun 2013 sebanyak 240.006 eksamplar dan tahun 2017 jumlah koleksi buku berjumlah 380.579 eksamplar, mengalami peningkatan sekitar 60,1%.

**Tabel II.205**  
**Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Eksamplar	240,006	342,502	350,802	360,902	380,579

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.9.3. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk**

Rasio jumlah perpustakaan mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Dimana rasio perpustakaan per satuan penduduk mengalami peningkatan, dimana tahun 2013 hanya sekitar 2.079 unit menjadi sebesar 3.009 unit.

**Tabel II.206**  
**Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Unit	2.079	2.671	2.783	2.896	3.009

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.9.4. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/ Tahun**

Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan per tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Dimana pada tahun 2013 jumlah pengunjung hanya sekitar 96.534 orang, sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sekitar 107.898 orang.

**Tabel II.207**  
**Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/ Tahun**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan / Tahun	Orang	96.534	1.893	72.829	107.898	107.898

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.9.5. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan**

Jumlah koleksi buku perpustakaan juga mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 jumlah judul buku hanya sekitar 225.000 sedangkan pada tahun 2017 judul buku koleksi perpustakaan sudah berjumlah 571.002.

**Tabel II.208**  
**Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	225,000	250,000	280,570	300,575	571,002

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.9.6. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilaian yang Memiliki Sertifikat**

Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perpustakaan tentunya harus ditunjang oleh jumlah tenaga pustakawan dan tenaga teknis yang bertugas di perpustakaan. Tabel dibawah menunjukkan bahwa jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat mengalami peningkatan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan.

**Tabel II.209**  
**Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilaian yang Memiliki Sertifikat**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	Orang	1.200	1.500	1.800	2.300	2.900

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.10. Bidang Urusan Kearsipan

#### 3.1.1.2.10.1. Presentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pada Organisasi Perangkat daerah (OPD), sistem pengelolaan arsip merupakan hal yang sangat penting dalam pertanggungjawaban tentang perencanaan, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan arsip merupakan langkah awal dalam membangun sistem informasi. Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan menjadi 62 OPD/Unit kerja dan Desa/Kelurahan di tahun 2017.

**Tabel II.210**  
**Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	OPD/Unit Kerja & Desa Kelurahan	47	50	54	58	62

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.10.2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Dalam mengelola arsip secara baku membutuhkan tenaga sumberdaya manusia yang memadai. Organisasi Perangkat daerah (OPD) /Unit kerja terus berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola kearsipan. Berdasarkan tabel dibawah, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah orang yang ditingkatkan kualitasnya dalam pengelolaan kearsipan setiap tahunnya.

**Tabel II.211**  
**Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	2.727	3.010	3.250	3.620	3.700

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### 3.1.1.2.11.1. Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Sejarah menunjukkan bahwa perempuan Indonesia mampu menjadi pemimpin dan pengambil keputusan yang penting, dan bahkan Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan. Hal ini memberikan gambaran bahwa ruang untuk menjadi pemimpin terbuka bagi seorang perempuan, dan perempuan harus memanfaatkan kesempatan tersebut. Meskipun demikian, data secara umum menunjukkan bahwa persentase perempuan di posisi pengambilan keputusan di lembaga eksekutif masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, baik eksekutif dan yudikatif di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan telah mengalami peningkatan dari tahun 2013 (45,26%) hingga tahun 2017 (49,66%) meskipun belum optimal dan dibawah 50%, hal ini disebabkan karena para pemimpin lembaga pemerintah sebagian sudah memahami pentingnya peran perempuan di lembaga pemerintah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

**Tabel II.212**  
**Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	45,26	47,95	48,41	48,91	49,66

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.11.2. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa parpol harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam politik terutama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan sebuah akses positif bagi seluruh perempuan untuk terlibat dalam dunia politik dan legislatif. Terlihat dengan adanya peningkatan jumlah perempuan terpilih menjadi wakil rakyat pada periode pemilihan 2009-2014. Hal ini juga menunjukkan indikasi meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki dalam berpolitik sehingga peran perempuan dalam dunia politik perlu untuk mendapat dukungan oleh semua pihak.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, persentase keterwakilan perempuan di parlemen dalam 3 (tiga) periode Pemilu, yaitu periode 2004-2009, periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 mengalami peningkatan, namun belum dapat mencapai kuota 30%, artinya pencapaian perempuan dalam bidang politik masih tertinggal dibandingkan laki-laki.

Terbitnya *grand design* peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 10 tahun 2014, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Perempuan berhasil meningkatkan motivasi perempuan untuk masuk dan berkiprah di partai politik dan mendaftarkan diri sebagai calon legislatif.

**Tabel II.213**  
**Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD	%	17	19	19	21	21

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.11.3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Kaum perempuan tidak hanya memilih profesi yang duduk di lembaga pemerintah tapi sebagian juga memilih bekerja di lembaga swasta, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga swasta dari tahun 2013 yaitu 64 % meningkat menjadi 71% pada tahun 2017, hal ini disebabkan karena akses yang dibuka untuk perempuan bekerja seperti di perusahaan atau pabrik sudah terbuka untuk perempuan, meskipun posisi perempuan di perusahaan atau pabrik kebanyakan bukan menempati posisi strategis atau posisi pengambil keputusan melainkan sebagai karyawan seperti sekretaris dan administrasi atau buruh pada pabrik.

**Tabel II.214**  
**Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	64	65	67	69	71

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.11.4. Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Anak merupakan penentu kualitas sumberdaya manusia dan akan menjadi pilar utama pembangunan, oleh karena itu seluruh populasi anak perlu ditingkatkan kualitasnya, mendapatkan perlindungan sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. Provinsi Sulawesi Selatan cukup banyak memiliki tenaga kerja dibawah umur, terutama yang bekerja di usaha-usaha informal, asisten rumah tangga, hotel tempat karaoke, pedagang asongan (untuk di wilayah perkotaan), pemulung dst. Kondisi tempat kerja tersebut sangat rentan dengan tindakan kekerasan, pelecehan seksual, seks bebas dan narkoba.



Dari jumlah tenaga informal dan formal, pekerja anak mengalami peningkatan yg cukup signifikan dari tahun-tahun dan pada tahun 2017 mencapai kurang lebih 0,042 persen atau jika dirata-ratakan meningkat 0,011 persen pertahun, inipun berdasarkan data dari 12 kabupaten/kota (Makassar, Gowa, Maros, Bone, Barru, Palopo, Luwu Utara, Sidrap, Sinjai, Pare-Pare, Bantaeng dan Kota Pare-Pare) yang memberikan laporan. Fenomena meningkatnya pekerja usia anak merupakan permasalahan klasik yaitu masalah ketidakberdayaan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak dalam keluarga. karena alasan ekonomi dan minimnya pendidikan orang tua membuat banyak anak yang putus sekolah dan bahkan tidak bersekolah dan kemudian anak ikut membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**Tabel II.215**  
**Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	0,02	0,02	0,15	0,18	0,40

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.11.5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Sulawesi Selatan pada kurun waktu dua tahun terakhir mengalami penurunan. Kecenderungan. Melalui data Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, dapat dikatakan bahwa hanya 43,76 persen saja dari penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang siap dalam dunia kerja pada tahun 2017. Saat ini, perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) Sulawesi Selatan lebih banyak berkegiatan mengurus rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa kerja di Sulawesi Selatan masih banyak dikuasai oleh penduduk laki-laki.

Perempuan tidak bekerja dapat disebabkan faktor sosial dan budaya, seperti mengurus rumah tangga, sulit masuk ke sektor formal, diskriminasi pekerjaan bagi perempuan, dan budaya yang tumbuh di masyarakat tentang peran dan kedudukan perempuan. Faktor-faktor yang menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan antara lain: marginalisasi dalam pekerjaan, kedudukan perempuan yang subordinat dalam sosial budaya, stereotip terhadap perempuan, dan tingkat pendidikan perempuan yang rendah (Khotimah, 2009).

**Tabel II.216**  
**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	48,18	45,33	44,31	47,47	43,76

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.11.6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Berdasarkan data yang tercantum, bahwa cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu tahun 2013-2017 realisasi 100%, dimana semua kasus yang dilaporkan melalui unit layanan terpadu mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih baik ditingkat kabupaten maupun kota, hal ini merujuk pada amanah SPM bahwa setiap orang yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun korban perdagangan orang, termasuk laki-laki, berhak mendapatkan pelayanan berdasarkan kasus korban.

**Tabel II.217**  
**Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

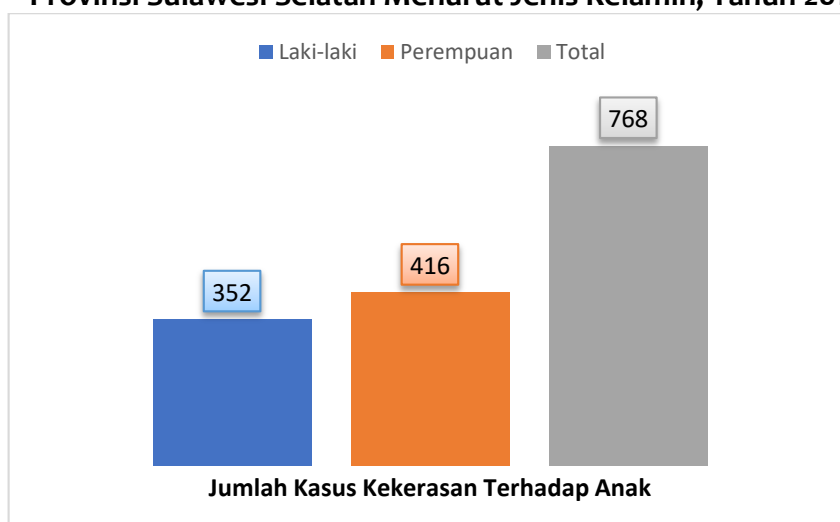
Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Pada tahun 2017, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan sebanyak 1537 kasus. Dari jumlah ini 769 kasus (50%) adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan 768 kasus (50%) adalah kasus kekerasan terhadap anak. 27 kasus diantaranya adalah perempuan difabel.

Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, tertinggi terjadi di Kota Makassar dengan jumlah 424 kasus. Demikian juga kasus kekerasan terhadap anak, tertinggi juga terdapat di Kota Makassar dengan jumlah 245 kasus, menyusul Kabupaten Bulukumba dengan jumlah 77 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, 54% korbannya anak perempuan dan 46% anak laki-laki.

**Grafik II.14**  
**Jumlah Kasus Terhadap Anak Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017**



Sumber : DP3A Provinsi Sulawesi Selatan

#### 3.1.1.2.11.7. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Berdasarkan tabel diatas bahwa cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit realisasi 100% tahun 2013-2017, dimana semua kasus korban kekerasan akan mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan baik di tingkat Puskesmas maupun Rumah Sakit. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pasien/klien di fasilitasi kesehatan akan terlayani 100% berdasarkan tingkat keterpaparannya/diagnosa hasil pemeriksaan, terkecuali pada kasus kasus tertentu pasien/klien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi atau pelayanan khusus.

**Tabel II.218**  
**Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A Dan PPT/PKT Di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.11.8. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu**

Rehab sosial bertujuan melakukan pendampingan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan klien yang mengalami disfungsi sosial/traumatik sehingga klien/korban dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (seperti semula). Pada dasarnya seluruh korban yang sudah tercatat, lembaga/petugas akan melakukan identifikasi korban dalam rangka menindak lanjuti kasus klien. Berdasarkan tabel diatas bahwa cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu sejak tahun 2013-2017 rata-rata korban yang mendapatkan rehabsos sebanyak 45 persen , sebab tidak semua korban menginginkan untuk Rehab Sosial. Diharapkan semua kasus yang dilaporkan melalui unit layanan terpadu akan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih.

**Tabel II.219**  
**Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di dalam Unit Pelayanan Terpadu.	%	43	43	46	44	49

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.11.9. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Sulsel sejak tahun 2013 sd 2017 mencapai 100%. seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik kasus ringan dan berat oleh Penyidik seluruhnya terproses dan dikawal oleh pendamping dari P2TP2A Maupun Unit PPA Polda/Polres/Poltabes ketingkat pengadilan, demikian pula tingkat kejaksaan tetap terproses dengan baik hingga putusan.

**Tabel II.220**  
**Cakupan Penegakan Hukum Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	100	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.11.10. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum**

Berdasarkan tabel, bahwa cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum kurun waktu lima tahun (2013-2017) data berfluktuasi. Korban/Klien yang melaporkan diri di tempat pengaduan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak maupun di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak tetap diberikan layanan hukum, namun pada kondisi tertentu beberapa klien (pelapor) mencabut laporan dan ditempuh dengan jalan damai.

**Tabel II.221**  
**Cakupan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	55	55	58	57	54

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.11.11. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan**

Layanan reintegrasi sosial, merupakan upaya untuk menyatukan kembali korban /klien kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan. Pelayanan lembaga P2TP2A dalam reintegrasi terhadap korban /klien adalah melakukan layanan terapi oleh konselor selama dalam penanganan, sebagai wujud perlindungan kepada klien disiapkan rumah aman kemudian diberikan pelatihan keterampilan termasuk pemenuhan spiritual klien . Reintegrasi akan dilakukan jika kondisi klien sudah siap untuk pulang dan keluarga mau menerima korban.

Persentase klien/korban yang dipulangkan ke keluarga yang ditangani oleh Layanan P2TP2A Provinsi Sulsel sampai tahun 2017 sebanyak 29 persen, dan jika dirata-ratakan klien yang di reintegrasi sebanyak 27 persen termasuk klien yang dipulangkan diluar provinsi sulsel yakni Maluku, Kendari dan Kalimantan.

**Tabel II.222**  
**Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Korban Kekerasan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	28	26	27	26	29

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.11.12. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Indikator APM merupakan indikator yang lebih baik dibanding dengan indikator APK, sebab APK biasanya digunakan ketika APM-nya masih jauh dari 100 persen. Di Provinsi Sulawesi Selatan, Rasio APM perempuan/laki-laki di SD mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun (2013-2017). Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan di SD bagi anak perempuan sudah mampu menyamai anak laki-laki.

**Tabel II.223**  
**Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD	%	99,93	100,11	101,55	100,75	100,1

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.11.13. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP**

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan anak perempuan sudah mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan di SMP meskipun pada tahun 2016 mengalami sedikit penurunan namun APM nya masih diatas 100%.

**Tabel II.224**  
**Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP	%	104,01	105,04	106,59	105,33	104,1

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.11.14. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA**

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perempuan sudah mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh kesempatan belajar di bangku SMA, rasionya meningkat secara signifikan pada tahun 2015 sebesar 101,86 menjadi 110,6.

**Tabel II.225**  
**Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA	%	100,03	102,02	102,95	101,86	110,6

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.11.15. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi**

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat perguruan tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa perempuan sudah diberikan peluang untuk memperoleh pendidikan di perguruan tinggi sama seperti laki-laki. Hal ini berarti jenjang pendidikan perempuan yang ditempuh semakin meningkat disebabkan kesadaran bahwa perempuan harus meningkatkan kualitas ilmu dan pendidikan sama seperti laki-laki.

**Tabel II.226**  
**Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi	%	108,05	110,02	110,02	0	103,1

Sumber : sipd.kemendagri.go.id



**3.1.1.2.11.16. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun**

Dalam kurun waktu 5 tahun (2013-2017) di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa tidak ada lagi perempuan yang buta huruf pada kelompok usia 15-24 tahun. Hal ini ditunjukkan dengan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki sudah mencapai nilai 100. Kesadaran kaum perempuan untuk bisa baca tulis semakin meningkat, hal ini berkorelasi dengan rasio APM perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan SMP hingga perguruan tinggi juga sudah mencapai nilai 100.

**Tabel II.227**  
**Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	%	100,57	100,49	100,15	100,28	100,4

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.12. Bidang Urusan Pangan**

**3.1.1.2.12.1. Ketersediaan Pangan Utama (Beras)**

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) selama 5 tahun (2014 hingga 2018) ketersediaan beras per kapita per tahun sudah melebihi dari kebutuhan konsumsi langsung berdasarkan angka SUSENAS tahun 2015 yaitu 105,2 kg/kapita/tahun, tahun 2016 sebesar 18,9 kg/kapita/tahun. Sehingga berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama (beras) rata-rata 3,6 kali lipat dari kebutuhan konsumsi beras.

**Tabel II.228**  
**Ketersediaan Pangan Utama (Beras)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	361,9	352	373,6	384	388,24

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tahun 2018

**3.1.1.2.12.2. Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)**

Hasil Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) pada tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan ketersediaan jagung per kapita per tahun telah melebihi kebutuhan konsumsi langsung berdasarkan angka SUSENAS tahun 2015 yaitu 2,3 kg/kapita/tahun dan tahun 2016 sejumlah 2,8 kg/kapita/tahun.

**Tabel II.229**  
**Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	%	15,17	24,33	34,02	38,89	44,33

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

**3.1.1.2.12.3. Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai)**

Hasil Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) pada tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan ketersediaan jagung per kapita per tahun telah melebihi kebutuhan konsumsi langsung berdasarkan angka SUSENAS tahun 2015 yaitu 4,0 kg/kapita/tahun dan tahun 2016 sejumlah 3,9 kg/kapita/tahun.

**Tabel II.230**  
**Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai)	%	6,06	23,56	23,71	20,88	22,55

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### 3.1.1.2.12.4. Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita

Jika mengacu pada rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) tahun 2012 adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat ketersediaan yaitu Energi = 2.400 kkal/kapita/hari dan Protein 63 gram/kapita/hari sehingga dapat dikatakan bahwa kecukupan rata-rata gizi setiap hari semua penduduk Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal sudah melebihi dari standar yang ditetapkan.

**Tabel II.231**  
**Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ketersediaan Energi	kkal/ kapita/ hari	6.557	5.544	5.862	5.769	5.827
Ketersediaan Protein	gram/ kapita/ tahun	168,76	154,52	168,34	164,38	166,02

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### 3.1.1.2.12.5. Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pada tahun 2014 hasil pengambilan sampel pangan sayur dan buah dengan total sampel adalah 59 sampel, sejumlah 46 sampel atau 77,96% dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Sisanya sejumlah 13 sampel atau 22,04% tidak aman dikonsumsi. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah sampel yang aman untuk dikonsumsi. Kategori sampel yang tidak aman terdapat pada pengujian residu pestisida dan pengujian formalin pada buah.

Pada tahun 2015 berdasarkan hasil pengambilan sampel pangan sayur dan buah dengan jumlah sampel 66 sampel yang dikategorikan aman sebanyak 51 atau 77,27% sampel. Sedangkan 15 sampel dinyatakan tidak aman atau 22,73% dari total jumlah sampel. Sampel yang tidak aman ini dari kategori buah dengan uji formalin, sedangkan sayur dengan pengujian residu pestisida dan logam berat dinyatakan semuanya aman. Pada tahun 2016 berdasarkan hasil pengambilan sampel pangan sayur dan buah dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 101 sampel dan dinyatakan aman sejumlah 86 sampel atau 85,13%. Sedangkan 15 sampel dinyatakan tidak aman atau 14,85%. Sampel sayur yang tidak aman terdapat pada pengujian residu pestisida sedangkan sampel buah terdapat pada pengujian formalin. Terjadi peningkatan yang signifikan tingkat keamanan pangan dari tahun 2015 sejumlah 7,86%. Pada tahun 2017 berdasarkan hasil pengujian laboratorium untuk pengambilan sampel sayur dengan jumlah sampel 23 sampel dinyatakan bahwa semua sampel yang diuji dengan parameter residu pestisida, logam berat dan mikroba aman untuk dikonsumsi dalam arti 100% sampel sayur aman.

**Tabel II.232**  
**Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	77,93	77,27	85,13	100	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) mulai dari Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan 3 pilar ketahanan pangan yaitu pilar ketersediaan pangan, pilar akses pangan dan pilar pemanfaatan pangan.

Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2018 yang diolah dan dianalisis ulang oleh TIM FSVA (Food Security and Vulnerability) atau Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, maka terdapat kecamatan yang terindikasi Sangat Rentan (nilai range sama dengan di atas dari 70 % rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 % terhadap total pengeluaran) terhadap kerawanan pangan sebanyak 8 kecamatan pada 4 kabupaten. Kecamatan yang terindikasi Rentan (nilai range 70 % sama dengan 60 %) terhadap kerawanan pangan sebanyak 8 kecamatan pada 11 kabupaten/kota. Kecamatan yang terindikasi Agak Rentan (nilai range 50 % sampai sama dengan di bawah 60 %) terhadap kerawanan pangan sebanyak 17 kecamatan pada 8 kabupaten/kota. Kecamatan yang terindikasi Agak Tahan (nilai range 40 % sampai sama dengan di bawah 50 %) terhadap kerawanan pangan sebanyak 19 kecamatan pada 11 kabupaten/kota. Kecamatan yang terindikasi Tahan (nilai range 30 % sampai sama dengan di bawah 40 %) terhadap kerawanan pangan sebanyak 34 kecamatan pada 17 kabupaten/kota. Kecamatan yang terindikasi Sangat Tahan (nilai range di bawah 30 %) terhadap kerawanan pangan sebanyak 221 kecamatan pada 24 kabupaten/kota.

**Tabel II.233**  
**Sebaran Kerawanan Pangan dan Gizi Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan/ Lembang	Jumlah Desa			
				Sangat Rentan	Rentan	Agak Rentan	Tahan Pangan
1	Kepulauan Selayar	11	0	0	0	0	0
2	Bulukumba	10	2	1	0	1	2
3	Bantaeng	8	2	0	1	0	2
4	Jeneponto	11	0	0	0	0	0
5	Takalar	9	0	0	0	1	0
6	Gowa	18	3	0	7	1	2
7	Sinjai	9	0	0	1	0	0
8	Bone	27	0	1	0	2	4
9	Maros	14	0	0	0	0	1
10	Pangkajene Kepulauan	13	0	1	0	0	1
11	Barru	7	0	0	0	0	0
12	Soppeng	8	0	0	0	0	1
13	Wajo	14	0	0	0	0	1
14	Sidenreng Rappang	11	0	0	1	2	2
15	Pinrang	12	0	0	1	0	0
16	Enrekang	12	1	0	0	1	2
17	Luwu	22	0	2	4	2	5
18	Tana Toraja	19	0	0	0	3	2
19	Luwu Utara	12	0	0	0	0	2
20	Luwu Timur	11	0	1	1	1	1
21	Toraja Utara	21	0	1	0	2	3
22	Makassar	15	0	0	0	0	0
23	Pare-Pare	4	0	0	0	0	1
24	Palopo	9	0	1	1	3	2
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>306</b>	<b>3.030</b>	<b>79</b>	<b>168</b>	<b>516</b>	<b>2.267</b>

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tahun 2018

**3.1.1.2.13. Pertanahan**

**3.1.1.2.14. Bidang Urusan Lingkungan Hidup**

**3.1.1.2.14.1. Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi**

Dokumen RPPLH memuat tentang latarbelakang, kondisi wilayah dan lingkungan hidup, permasalahan dan isi pokok lingkungan hidup, serta arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi selatan untuk 30 tahun mendatang. Pada tahun 2017 DPLH Prov. Sulsel telah menyusun dokumen RPPLH Sulawesi Selatan untuk 2017-2047, sehingga target IKD tersedianya dokumen RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan telah tercapai pada tahun 2017. Skenario RPPLH prov. Sulsel adalah sebagai berikut:

- Periode I (tahun 2017 - 2026)
- Periode II (tahun 2027 - 2036)
- Periode III (tahun 2037 - 2047)

**Tabel II.234**  
**Tersedianya Dokumen RPPLH Provinsi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.14.2. Tersusunnya RPPLH Provinsi**

Dengan adanya dokumen RPPLH maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan penyusunan peraturan daerah tentang RPPLH. Tahun 2019 direncanakan untuk menyusun naskah akademik Ranperda RPPLH, di tahun 2020 direncanakan penyelesaian penyusunan RPPLH prov. Sulsel menjadi Peraturan Daerah.

**Tabel II.235**  
**Tersusunnya RPPLH Provinsi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Tersusunnya RPPLH Provinsi	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.14.3. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Provinsi**

Dokumen RPPLH diselesaikan pembuatannya pada bulan desember 2017, sehingga dokumen ini baru dapat dimanfaatkan dan diintegrasikan dalam rencana pembangunan menengah daerah (RPJMD) prov. Sulsel. Dokumen RPPLH digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan KLHS RPJMD pada tahun 2018. Sehingga RPPLH telah terintegrasi dalam rencana pembangunan Provinsi.

**Tabel II.236**  
**Integrasi RPPLH Dalam Rencana Pembangunan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Provinsi	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.14.4. Tersedianya dokumen KLHS Provinsi**

Pada tahun 2017, prov. Sulsel telah menyusun dokumen KLHS untuk dua KRP (Kebijakan, Rencana, Program) yaitu KLHS RZWP3K dan KLHS RTR Pusat Bisnis Terpadu. Untuk tahun 2018 telah menyusun dokumen KLHS yang dibuat adalah KLHS RPJMD. Untuk tahun 2019, direncanakan akan dibuat KLHS revisi RTRW provinsi. KLHS RZWP3K, KLHS RTR Pusat Bisnis Terpadu, dan KLHS revisi RTRW provinsi pelaksanaannya melekat pada

anggaran dinas penanggungjawab KRP masing-masing. Namun, DPLH menjadi tim pokja dalam penyusunan KLHS tersebut. Untuk pelaksanaan tahun selanjutnya, mengikuti perencanaan dari instansi terkait yang akan melaksanakan kegiatan wajib KLHS.

**Tabel II.237**  
**Ketersediaan Dokumen KLHS**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Tersedianya Dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.14.5. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi

Penyelenggaraan KLHS sejak berlakunya PP 46 tahun 2016 diwajibkan untuk setiap KRP baik tingkat provinsi maupun kab/kota, sehingga di tiap tahunnya selalu terdapat KLHS yang diselenggarakan oleh kab/kota/provinsi.

**Tabel II.238**  
**Penyelenggaraan KLHS**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.14.6. Peningkatan Indeks Kualitas Air

Penentuan nilai IKA (Indeks Kualitas Air) Sulawesi Selatan didasarkan pada hasil pemantauan kualitas air pada 27 sungai lintas kabupaten se-Sulawesi Selatan. Hasil pengukuran kualitas air untuk setiap sungai dilakukan pada lokasi hulu, tengah dan hilir. Kecenderungan penurunan kualitas air di beberapa daerah di Sulawesi Selatan telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya parameter e-Coli, BOD dan COD yang semakin meningkat. Selain itu meningkatnya jumlah limbah domestik yang masuk kedalam badan sungai, hal ini meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Peningkatan limbah domestik akan meningkatkan pencemaran air yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan konsentrasi parameter BOD dan COD di badan air sungai. Secara umum, nilai IKA di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2013 – 2017 apabila dilihat kecenderungan linear-nya maka nilai IKU cenderung menurun dengan laju penurunan 0,57 per tahun. Akan tetapi, pada tahun 2015 dan 2016 terjadi peningkatan yang cukup besar dari 56,29 menjadi 72,43 dan 75,44 atau terjadi penurunan nilai indeks sebesar 19,15 poin. Sementara pada tahun 2017 IKA Sulawesi Selatan kembali menurun menjadi 54,29. Hal ini karena adanya perubahan lokasi pemantauan, dimana kualitas air yang dipantau pada tahun 2017 tidak lebih baik dibandingkan tahun 2016. Nilai IKU Sulawesi Selatan ini berada dibawah IKU nasional yaitu 60,38. Nilai IKU ini secara umum dalam kategori kurang baik. Pada tahun 2018 kualitas air meningkat diperlihatkan dengan capaian IKA naik dari tahun 2017 menjadi 56 di tahun 2018.

**Tabel II.239**  
**Indeks Kualitas Air**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Peningkatan Indeks Kualitas Air		56,29	56,29	75,44	54,29	56

Sumber : sipd.kemendagri.go.id



#### 3.1.1.2.14.7. Peningkatan Indeks Kualitas Udara

Penentuan nilai IKU (Indeks Kualitas Udara) Sulawesi Selatan didasarkan pada hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode passive sampler yang dilakukan di 24 kabupaten se-Sulawesi Selatan. Hasil pengukuran kualitas udara untuk setiap kabupaten dilakukan pada lokasi roadside, terminal dan pemukiman. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa daerah di Sulawesi Selatan telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O<sub>3</sub>) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan konsentrasi parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> di udara ambien.

Secara umum, nilai IKU di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2013 – 2017 apabila dilihat kecenderungan linear-nya maka nilai IKU cenderung meningkat dengan laju peningkatan 0,136 per tahun. Akan tetapi, pada tahun 2015 terjadi penurunan yang cukup besar dari 90,43 menjadi 76,80 atau terjadi penurunan nilai indeks sebesar 13,63 poin. Namun pada tahun 2016 dan 2017 IKU Sulawesi Selatan kembali meningkat menjadi 85,80 dan 88,66. Nilai IKU Sulawesi Selatan ini berada diatas IKU nasional yaitu 81,61. Nilai IKU ini secara umum masih dalam kategori baik dilihat dari parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>. Tahun 2018 terjadi peningkatan indeks kualitas udara diperlihatkan dari naiknya angka indeks kualitas udara 0,01 menjadi 88,67.

**Tabel II.240**  
**Indeks Kualitas Udara**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Peningkatan Indeks Kualitas Udara	90,43	76,80	85,80	88,66	88,67

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.14.8. Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penjumlahan nilai dari lima indeks yaitu Indeks Tutupan Hutan (ITH), Indeks Performance Hutan (IPH), Indeks Kondisi Tutupan Tanah (IKT), Indeks Konservasi Badan Air (IKBA), dan Indeks Kondisi Habitat (IKH). Data IKTL Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan adanya kecenderungan penurunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan indeks tutupan lahan antara lain kegiatan pembukaan lahan, penebangan liar, penggunaan Kawasan hutan untuk sektor diluar kehutanan, dan pemukiman. Adanya kecenderungan penurunan IKTL menunjukkan korelasi dengan tutupan lahan berhutan di tingkat tapak yang dimungkinkan dikarenakan terjadi penurunan kelas hutan menjadi non hutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hutan seharusnya berfungsi sebagai penjaga tata air, penyedia udara bersih, penyerap polutan, serta penyedia jasa ekosistem lainnya. Perubahan fungsi hutan akan mengganggu kualitas dan kuantitas air, kesuburan tanah, kualitas udara, dan ekosistem hutan secara keseluruhan yang pada akhirnya akan mengganggu keberlangsungan berbagai sektor seperti pertanian dan perkebunan. Kawasan hutan yang tidak berhutan dan secara alamiah harusnya berupa hutan mengindikasikan hutan belum terkelola dengan baik. Indeks tutupan lahan tahun 2018 berbeda dengan indeks tutupan lahan di tahun 2017 disebabkan karena terdapat perbedaan metode penghitungan. Dengan demikian perbedaan angka ini tidak dapat dilihat sebagai kenaikan indeks dan angka indeks 2017 tidak bisa dibandingkan dengan angka indeks tahun 2018.

**Tabel II.241**  
**Indeks Tutupan Lahan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Peningkatan Indeks Tutupan Lahan	50,10	50,85	55,43	54,81	75

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.14.9. Laporan Inventarisasi GRK

Dasar pelaksanaan adalah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 dimana Pasal 9 Gubernur bertugas menyelenggarakan Inventarisasi GRK di tingkat Provinsi. Pasal 12 ayat 2 “Gubernur melaporkan hasil kegiatan inventarisasi GRK dari kabupaten dan atau kota Menteri satu kali dalam setahun. Dalam pelaksanaan dari tahun 2014 – tahun 2018 kegiatan inventarisasi dilakukan setiap tahun untuk 3 sektor antara lain sektor limbah, sektor Afolu (pertanian, perkebunan, kehutanan) dan sektor energi . Sedangkan untuk sektor industri belum dilakukan.

**Tabel II.242**  
**Ketersediaan Inventarisasi GRK**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Laporan Inventarisasi GRK	Laporan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.14.10. Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi

Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2013. Jenis kegiatan yang dilakukan pada saat itu adalah kegiatan Program Kampung Iklim, Inventarisasi GRK dan lain-lain. Target yang akan dicapai pada saat itu adalah jumlah lokasi yang dibina. Sedangkan laporan yang dimaksud adalah laporan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2016 bahwa terdapat target penurunan emisi GRK sekitar 29 % kegiatan sendiri dan 41 % dengan bantuan pihak luar pada tahun 2029. Provinsi Sulawesi Selatan melalui Pergub No. 59 Tahun 2012 RAD Penurunan Emisi GRK memiliki target 22,25 % dan telah dilakukan kaji ulang pada tahun 2018. Hasil evaluasi kegiatan 2012-2017 menunjukkan bahwa target yang ditetapkan tidak dapat dicapai yang disebabkan karena kegiatan dalam RAD dikerjakan oleh instansi teknis seperti dinas kehutanan, dinas pertanian, dinas peternakan, dinas tarkim, dinas ESDM dan pemerintah kabupaten/kota serta terdapat beberapa kegiatan inti dalam RAD yang tidak dilaksanakan antara lain Rehabilitasi Hutan lewat *air seeding*, operasional kereta api dan MRT. Pelibatan OPD teknis dan Kabupaten/Kota diperlukan dalam menginventarisasi aksi mitigasi yang ada di masing-masing sektor dan melakukan analisis berapa penurunan emisi dari kegiatan tersebut dan dijabarkan dalam sebuah laporan tiap tahun.

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah:

1. Instansi terkait belum bisa melakukan identifikasi jenis kegiatan yang masuk dalam kegiatan mitigasi dan adaptasi;
2. RAD Penurunan Emisi GRK belum diintegrasikan kedalam renstra instansi terkait:

**Tabel II.243**  
**Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Laporan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.14.11. Jumlah Limbah B3 yang Dikelola

Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan (Pasal 1 angka 11 PP Nomor 101 tahun 2014). Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3 maka dilaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap perusahaan atau pelaku usaha/kegiatan. Hasil pemantauan dan pembinaan terhadap perusahaan dan atau kegiatan pengelolaan limbah B3 tahun 2015 diperoleh data limbah B3 sejumlah 611.898 Ton, Tahun 2016 sejumlah 677.869 Ton dan Tahun 2017 sejumlah 667.900 Ton, dari perusahaan di sektor rumah sakit, pertambangan, energi dan migas, sektor manufaktur, sektor agroindustri serta sektor prasarana dan jasa. Data menggambarkan bahwa pengelolaan limbah B3, terlihat bahwa berbagai sektor di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan Limbah B3 yang dikelola terutama sektor pertambangan, energi menghasilkan limbah B3 dengan jumlah dan persentase yang dominan.

**Tabel II.244**  
**Jumlah Limbah B3 yang Dikelola**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Ton	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	611.898	677.869	667.900

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.14.12. Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH

Jumlah izin Lingkungan yang diawasi selama tahun 2013 sebanyak 6 izin lingkungan dari 46 izin/perusahaan, selanjutnya tahun 2014 sebanyak 15 izin dari 47 izin, tahun 2015 sebanyak 25 izin dari 89 izin, tahun 2016 sebanyak 35 izin dari 110 izin dan tahun 2017 sebanyak 45 izin dari 131 izin. Pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah, BAPEDALDA) belum mempunyai PPLH, Tahun 2014-2017 jumlah sebanyak 5 Orang, serta tidak tersedianya sarana dan Prasarana Pengawasan yaitu kendaraan operasional dan alat Pelindung diri (APD) untuk pengawas tahun 2013 hingga 2017. Untuk tahun 2018 terjadi peningkatan pembinaan dan pengawasan hampir 2 kali lipat dari 34,35% menjadi 66%.

**Tabel II.245**  
**Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin	%	8,69	43,37	20,19	23,37	66

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.14.13. Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat, dan pada masa sekarang ini pembangunan sedang gencarnya, terbukanya akses globalisasi, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan, perubahan iklim, penambahan penduduk, pembuangan limbah B3, dan lain sebagainya menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Pembangunan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum diimbangi dengan upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan oleh para pelaku usaha. Aturan perundangan yang berlaku, Izin Lingkungan yang dikeluarkannya sering diabaikan (tidak ditaati) dan tidak dipedomani dalam melaksanakan dan mengelola usaha dan/atau kegiatan yang akhirnya menimbulkan permasalahan lingkungan. Untuk itu, dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang melakukan usaha dan / atau masyarakat pada umumnya mempunyai kewajiban dan menjadi upaya sistematis dan terpadu yang dapat dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan berkontribusi nyata dari setiap persoalan lingkungan yang ditemukan, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tersebut akan menjadi sentral dalam menjamin keberlangsungan lingkungan hidup yang lebih maksimal.

Berdasarkan persoalan diatas maka dari tahun ketahun pengaduan dibidang lingkungan hidup atas terus bertambah demi mendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang lebih maksimal.

**Tabel II.246**  
**Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Lokasi Usaha Dan Dampak Lintas Kabupaten/Kota yang Ditangani	Pengaduan	5	7	8	9	10

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.14.14. Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Provinsi

Tersedianya data dan informasi Pengelolaan sampah di Sulawesi Selatan melalui Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan (SILHD SULSEL) meliputi data dan informasi:

1. Data umum Kab/Kota;
2. Data Timbulan sampah Kab/Kota;
3. Data komposisi sampah Kab/Kota;
4. Timbulan sampah harian;
5. Timbulan sampah terolah;
6. Volume sampah terangkut per hari;
7. Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah.

**Tabel II.247**  
**Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Provinsi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.14.15. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani pada Kondisi Khusus di Provinsi/Kabupaten/Kota**

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada pasal 27 “dalam hal terdapat kondisi khusus, Pemerintah provinsi dapat melakukan pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah” dalam penjelasan PP 81 Tahun 2012 dijelaskan bahwa kondisi khusus dalam ketentuan ini misalnya terjadi bencana alam, bencana non alam, dan terjadi perselisihan pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2018 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah terjadi kondisi khusus sehingga Provinsi Sulawesi Selatan tidak melakukan pengangkutan, pengelolaan maupun proses akhir sampah.

**Tabel II.248**  
**Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Pada Kondisi Khusus di Provinsi Kabupaten/Kota	%	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Penanganan sampah yang terangkut ke TPA Sanitary *Landfill/Control landfill* dan yang terkelola melalui rumah kompos adalah sebagai berikut:

**Tabel II.249**  
**Persentase Penanganan Sampah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Tahun	Timbulan Sampah	Tertangani		Persentase Penanganan Sampah
		Diangkut ke TPA	Kompos	
2013	1668,40	277,79	14,68	17,53
2014	1686,44	280,79	14,84	17,53
2015	1704,06	283,73	15,00	17,53
2016	1721,28	286,59	15,15	17,53
2017	1738,06	289,39	15,29	17,53

Sumber : Dinas Pengelolaan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Berdasarkan dari data di atas dapat disimpulkan bahwa persentase sampah yang tertangani dalam kondisi khusus masih kurang yaitu 17,53% untuk upaya peningkatan persentase sampah tertangani menggunakan Model TPA *Sanitary Landfill* dan *Control Landfill* untuk Kab/Kota khususnya yang berada di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa yang persentase timbulan sampahnya cukup besar.



### 3.1.1.2.15. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### 3.1.1.2.15.1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Penduduk yang ber-KTP elektronik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan inovasi yang dilakukan oleh dinas Dukcapil Kabupaten/Kota serta tersedianya sarana dan prasarana perekaman dan penerbitan KTP-el yang memadai. Namun belum tuntas secara keseluruhan diakibatkan oleh kondisi yang dialami diantaranya:

- Pernahnya terjadi kekosongan blanko KTP-el;
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-el;
- Masih adanya data ganda/anomali pada Database kependudukan;
- Keterbatasan peralatan dan anggaran di Kabupaten/Kota.

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk mengalami peningkatan dimana tahun 2016 sejumlah 0,79 menjadi 0,82 pada tahun 2017.

**Tabel II.250**  
**Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	0	0	0	0,79	0,82

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.15.2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Terjadi peningkatan karena semakin banyaknya inovasi pelayanan yang dilakukan kab/kota untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bayi seperti melalui PKS dengan stakeholder terkait seperti Rumah Sakit ataupun Puskesmas, selain itu semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran.

**Tabel II.251**  
**Rasio Bayi Berakte Kelahiran**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0	0	0	0,81	0,86

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.15.3. Kepemilikan Akte Kelahiran

Terjadi peningkatan karena semakin banyaknya inovasi pelayanan yang dilakukan kab/kota untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bayi seperti melalui PKS dengan stakeholder terkait seperti Rumah Sakit ataupun Puskesmas. Selain itu, upaya untuk meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran ataupun mengkonversi akte kelahiran manual ke akte kelahiran yang sudah terintegrasi ke SIAK senantiasa dilakukan. Kebijakan pemerintah melalui pemberlakuan SPTJM untuk kondisi tertentu juga turut mendorong penerbitan akte kelahiran anak.

**Tabel II.252**  
**Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran	0	0	0	0	0,11

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.15.4. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Masih Rendahnya cakupan kepemilikan akte nikah disebabkan oleh data yang dijadikan acuan adalah data SIAK sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan banyak akte nikah yang sudah

diterbitkan jauh sebelumnya namun belum dikonversi ke dalam SIAK. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat, faktor budaya serta kondisi sosial ekonomi masyarakat juga menjadi penyebab masih banyaknya pasangan menikah yang belum memiliki akte pernikahan/buku nikah.

**Tabel II.253**  
**Rasio Pasangan Berakte Nikah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Pasangan Berakte Nikah	0	0	0	0,09	0,11

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.15.5. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

UU 23/2006 sebagaimana telah diubah dengan UU 24/2013 serta turunannya telah mengamankan penyediaan database kependudukan skala provinsi yang disajikan setiap semester. Di tingkat internal, aparatur pengelola adminduk telah menyediakan database kependudukan skala provinsi yang disajikan setiap semester.

**Tabel II.254**  
**Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	0	0	0	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.15.6. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

UU 23/2006 sebagaimana telah diubah dengan UU 24/2013 serta turunannya telah mengamankan penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

**Tabel II.255**  
**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Belum	Belum	Belum	Sudah	Sudah

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.15.7. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Penduduk yang ber-KTP elektronik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan inovasi dan stelsel aktif yang dilakukan oleh dinas Dukcapil Kab/Kota serta tersedianya sarana dan prasarana perekaman dan penerbitan KTP-el yang memadai. Namun belum tuntas secara keseluruhan diakibatkan oleh kondisi yang dialami :

- Pernahnya terjadi kekosongan blanko KTP-el;
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-el;
- Masih adanya data ganda/anomali pada Database kependudukan;
- Keterbatasan peralatan dan anggaran di Kab/Kota.

**Tabel II.256**  
**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		0	0	0	77,36	79,92

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.15.8. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Terjadi peningkatan karena semakin banyaknya inovasi pelayanan yang dilakukan kab/kota untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bayi seperti melalui PKS dengan stakeholder terkait seperti Rumah Sakit ataupun Puskesmas. Selain itu, upaya untuk meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran ataupun mengkonversi akte kelahiran manual ke akte kelahiran yang sudah terintegrasi ke SIAK senantiasa dilakukan. Kebijakan pemerintah melalui pemberlakuan SPTJM untuk kondisi tertentu juga turut mendorong penerbitan akte kelahiran anak.

**Tabel II.257**  
**Penerbitan Akta Kelahiran**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran		0	0	0	80,90	85,03

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.16. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

#### 3.1.1.2.16.1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Dari total 2.555 desa sejumlah 820 desa yang teridentifikasi kondisi sarana dan prasarana perkantorannya dan sejumlah 1.436 desa belum teridentifikasi. Sejumlah 710 desa sarana dan prasarana perkantoran dengan kondisi baik dan sejumlah 110 desa kondisi sarana dan prasarannya rusak.

**Tabel II.258**  
**Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	-	-	-	-	31,47

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

#### 3.1.1.2.16.2. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan LPM juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM. Peningkatan kelompok binaan LPM terjadi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yaitu 51.650 total kelompok binaan LPM dengan jumlah LPM sebanyak 3.037 pada tahun 2015, sejumlah 56.431 kelompok binaan dengan jumlah LPM 3.037 pada tahun 2016, 60.866 kelompok binaan dengan jumlah LPM 3.038. Peningkatan rata-rata jumlah kelompok binaan LPM ini didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan, akan tetapi melihat perkembangan yang ada pada tahun 2018 kelompok binaan LPM tidak bertahan lama oleh karena masih kurangnya pembinaan kepada anggota LPM serta pergantian kepemimpinan LPM.

**Tabel II.259**  
**Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah LPM	Lembaga	3.024	3.038	3.037	3.037	3.038
Jumlah Kelompok Binaan LPM	Klp	3.024	3.038	51.650	56.431	60.866
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	1	1	17	19	20

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

#### 3.1.1.2.16.3. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilyahan atau kegiatan. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Berdasarkan data sampai pada tahun 2017, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sebesar 39 kelompok binaan dari 3.632 jumlah PKK, sehingga peran masyarakat dalam pemberdayaan yang menunjang pembangunan masih relatif besar serta dukungan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi melalui pembinaan. Dibanding pada tahun 2015 yang kelompok binaan PKK hanya berkisar rata-rata 19 kelompok binaan hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat dalam ikut andil dalam pembangunan menurun serta banyaknya kader yang tidak aktif dibanding tahun sebelumnya.

**Tabel II.260**  
**Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PKK	Klp	11.361	11.787	7.531	3.328	3.632
Jumlah Kelompok Binaan	Klp	335.792	294.096	146.835	123.487	142.517
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Klp	30	25	19	37	39

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

#### 3.1.1.2.16.4. Persentase LPM Berprestasi

Pada tahun 2013 sampai tahun 2015 indikator persentase LPM berprestasi sangat rendah dikarenakan tolak ukur untuk menentukan indikator LPM berprestasi menyebabkan banyak LPM masuk dalam golongan tidak berprestasi sehingga sampai tahun 2015 hanya 1,22% LPM berprestasi dari total 3.037 LPM. Selain itu capaian yang rendah disebabkan oleh pembinaan masih kurang terhadap tugas dan fungsi LPM didalam masyarakat. Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 persentase LPM berprestasi meningkat disebabkan oleh peran aktif pemerintah daerah provinsi beserta kabupaten/kota dalam mendukung keterlibatan LPM dalam proses pembangunan yang sampai pada tahun 2017 mencapai 24,33% LPM berprestasi dari total 3.038 jumlah LPM.

**Tabel II.261**  
**Persentase LPM Berprestasi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah LPM	Lembaga	3.024	3.038	3.037	3.037	3.038
Jumlah LPM Berprestasi	Lembaga	29	30	37	736	739
Persentase LPM Berprestasi	%	0,98	0,99	1,22	24,24	24,33

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

#### 3.1.1.2.16.5. Persentase PKK Aktif

Jumlah PKK dihitung dari jumlah tim penggerak PKK dalam lingkup wilayah pemerintah daerah. Tim Penggerak PKK beranggotakan warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan partai politik, Lembaga atau instansi, berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengendali gerakan PKK. Berdasarkan data persentase PKK aktif mengalami peningkatan pada tahun 2017 mencapai 97,71%. Proses pembinaan yang terkendala dengan luasnya ruang lingkup pembinaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hingga tahun 2017 tercatat sejumlah 2.255 desa termasuk desa di wilayah kepulauan yang memiliki Tim Penggerak PKK dengan persentase aktif 97,71% dari 3.632 jumlah PKK.

**Tabel II.262**  
**Persentase PKK Aktif**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PKK	Klp	11.361	11.787	7.531	3.328	3.632
Jumlah PKK Aktif	Klp	11.074	11.315	7.536	3.251	3.549
Persentase PKK aktif	%	97,47	96,00	97,68	97,69	97,71

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

#### 3.1.1.2.16.6. Jumlah Posyandu Aktif

Jumlah pos yandu aktif dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan dengan capaian pada tahun 2018 sejumlah 99,89% posyandu aktif. Keaktifan posyandu didukung oleh program/kegiatan melalui pembinaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi posyandu. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pembinaan posyandu adalah beberapa desa yang berada di wilayah kepulauan yang jauh.

**Tabel II.263**  
**Jumlah Posyandu Aktif**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Posyandu Aktif	Unit	9.126	9.589	9.725	10.936	10.976
Persentase Posyandu Aktif	%	97,00	99,28	99,49	99,53	99,89

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

#### 3.1.1.2.17. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

##### 3.1.1.2.17.1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Angka ini masih tergolong tinggi diatas target nasional. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015, namun pada tahun berikutnya angkanya kembali naik. Penyebabnya adalah naiknya angka kelahiran, angka kemiskinan yang masih tinggi yang berakibat pada kurangnya pendidikan, serta pengaruh meningkatnya arus imigrasi ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun berkenan.



**Tabel II.264**  
**Laju pertumbuhan penduduk (LPP)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,01	1,57	1,16	1,39	1,36

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.17.2. Total Fertility Rate (TFR)**

Tingginya angka TFR ini yaitu angka rata-rata per wanita disebabkan oleh masih tingginya angka unmet need (kejadian kebutuhan KB yang tidak terpenuhi), dan masih relatif tingginya angka putus pemakaian kontrasepsi. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah pada program KB semakin menurun sejak era reformasi birokrasi, namun 3 tahun terakhir angka TFR menunjukkan penurunan meski masih diatas target nasional 2,1.

**Tabel II.265**  
**Total Fertility Rate (TFR)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Total Fertility Rate (TFR)	%	2,56	2,56	2,28	2,35	2,40

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.17.3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB**

Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 Kampung KB Belum dicanangkan. Tahun 2016 Kampung KB di canangkan oleh Presiden RI, berdasarkan surat edaran Mendagri No: 440/70/SJ, tanggal 11 Januari 2016. Tanggal 27 Oktober 2017, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan: 2548/X/2017 tentang pembentukan kelompok kerja Advokasi Akselerasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) provinsi Sulawesi Selatan, dan surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan No : 472/7329/DISDUKCAPIL DALDUK KB, tanggal 6 Nopember 2017, perihal dukungan lintas program/sektoral pada kampung KB di Sulsel.

Tahun 2016 telah dicanangkan sebanyak 24 Kampung KB disetiap Kab/Kota provinsi Sulsel. Tahun 2017 telah dibentuk sebanyak 305 disetiap kecamatan se Sulsel. OPD Provinsi yang berperan aktif di Kampung KB adalah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB, BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumah Sakit Fatimah, Rumah Sakit Pertiwi, Rumah Sakit Labuang Baji, Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD Prov Sulsel. Jumlah OPD Provinsi Sulawesi Selatan : 49 OPD, sehingga OPD yang berperan aktif 24.5%.

**Tabel II.266**  
**Peran Aktif Perangkat Daerah Melalui Kampung KB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	0	0	0	0	11,29

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.17.4. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Jumlah rata-rata anak yang lahir dalam satu keluarga mengalami penurunan dan secara bertahap diharapkan akan mencapai target nasional pada tahun 2019 yaitu 2,3. Penyebabnya adalah tingkat usia pernikahan pada perempuan dan laki-laki yang masih rendah. Diupayakan untuk mendorong laki-laki dan perempuan bisa terus meningkatkan tingkat usia pernikahan guna mencegah pernikahan anak. Saat ini perempuan berusia 15 hingga 19 tahun masih memilih usia 20 tahun sebagai usia terendah untuk menikah. Sementara itu, untuk laki-laki, sebanyak sebagian besar memilih usia 20 tahun sebagai usia terendah untuk menikah. Kami mendorong agar usia nikah terendah bisa naik ke usia 21 tahun dan usia tertinggi yang dipilih 25 tahun. Upaya itu dilakukan dengan terus mengintervensi remaja melalui pusat informasi dan konseling (PIK) remaja serta sosialisasi program Genre.

**Tabel II.267**  
**Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	Anak/ Keluarga	0	0	0	2,58	2,4

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.17.5. Ratio Akseptor KB

Rata – rata jumlah akseptor KB 67,11 %. Artinya terdapat 67,11 akseptor KB aktif dari pasangan usia subur (PUS). Melakukan Advokasi KIE bagi pasangan usia subur.

**Tabel II.268**  
**Ratio Akseptor KB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ratio Akseptor KB	%	0	67,85	66,87	67,42	66,30

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.17.6. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Upaya pemerintah yang lain dalam meningkatkan kesehatan adalah dengan menggalakkan program KB (Keluarga Berencana). KB diharapkan dapat mengatur jarak kelahiran sehingga mengurangi angka kematian ibu, menjamin tumbuh kembang bayi dan mencegah bayi kekurangan gizi. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 66,30%.

**Tabel II.269**  
**Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	63,05	67,85	66,87	67,42	66,30

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.17.7. Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Cakupan PUS Unmet Need untuk 5 thn terakhir, rata-rata 14,35 % artinya dari total PUS, masih ada 14,35 % yang belum tersentuh pelayanan KB bagi petugas KB, sehingga memungkinkan untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan penduduk di Sulawesi Selatan. Untuk mengurangi angka Unmet need ini, maka salah satu yang harus

diperhatikan adalah perluasan jangkauan petugas KB untuk melayani akseptor KB, khususnya PUS yang berada di daerah terluar, terpencil dan terbelakang, dengan cara membangun infrastruktur pelayanan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang aksesibel terhadap kebutuhan. Perlu pelayanan mobile bagi wilayah yang sulit dijangkau oleh petugas KB. Menggalang mitra strategis dengan stakeholder dalam penggerakan program. Mengembangkan sistem rujukan alkon (alat kontrasepsi) yang berkelanjutan.

**Tabel II.270**  
**Cakupan PUS Unmet Need**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	14,68	13,85	15,13	13,98	14,14

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.17.8. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk 5 tahun terakhir, rata-rata 19,70 %. Angka ini menunjukkan masih terdapat 80,30 % peserta KB aktif yang ber KB dengan metode yang masih memungkinkan Drop Out (DO), atau berhenti ber KB, atau terdapat 19,70% peserta KB yang aktif ber KB untuk jangka panjang yang sangat kecil untuk Drop Out. Untuk meningkatkan MKJP, maka hal yang harus dilakukan adalah perluasan jangkauan petugas KB untuk melayani akseptor KB, dengan cara membangun infrastruktur pelayanan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang aksesibel terhadap kebutuhan. Menyusun rencana aksi daerah percepatan target MKJP yang melibatkan semua sector terkait. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelayanan MKJP serta kebijakan teknis bagi petugas untuk peningkatan kemampuan komunikasi dan teknis.

**Tabel II.271**  
**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (Mkjp)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	17,57	18,39	19,40	21,1	22,05

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.2.17.9. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi untuk 4 tahun terakhir, rata rata 9.56 %. Angka ini menunjukkan masih terdapat 90.44 % peserta KB yang masih memungkinkan untuk tidak lanjut memakai kontrasepsi. Untuk meningkatkan keberlangsungan pemakaian Kontrasepsi, maka hal yang perlu disarankan adalah dorongan pemakaian MKJP. Pendampingan PUS yang berKB yang mengalami komplikasi dan efek samping, sehingga tetap konsisten menggunakan alat kontrasepsi. Memperbanyak calon fasilitator KB, yang dapat memberikan Advokasi dan KIE kepada akseptor KB untuk tetap menggunakan alat kontrasepsi. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelayanan MKJP serta kebijakan teknis bagi petugas untuk peningkatan kemampuan komunikasi dan teknis.

**Tabel II.272**  
**Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	0	10,32	8,16	8,76	10,99

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.17.10. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB**

Dari 5 tahun presentase BKB Ber-KB mengalami penurunan setiap tahun 1-2% (2013-2017). Karena pada tahun tahun tersebut isu KB mengalami Stagnan, nanti pada tahun 2016 kembali dicanangkan Program Nasional Kampung KB.

**Tabel II.273**  
**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	63	63	61	61	60

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.17.11. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB**

Rata-rata Presentase Cakupan BKR Ber-KB selama 5 tahun sebanyak 53,2%. Setiap tahunnya angka cakupan mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2013 cakupan mengalami angka yang paling besar yaitu sebanyak 57%.

**Tabel II.274**  
**Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	57	54	50	53	52

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.17.12. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB**

Dalam 3 tahun terakhir dalam (2015-2017) Cakupan BKL yang Ber-KB mengalami peningkatan yang relative kecil yaitu sebanya 1,4%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh aktifnya Posyandu melakukan pelayanan pada lansia melalui program revitalisasi Posyandu.

**Tabel II.275**  
**Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	44	42	39	43	44

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.17.13. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan**

Data distribusi PPKS di setiap kecamatan pada table di atas memperlihatkan anomali khususnya dalam tahun 2014 dimana angka 10, PPKS sangat kecil dibandingkan pada 4 tahun sebelum dan sesudahnya. Kemungkinan tahun 2014 jumlah PPKS yang tidak aktif sangat besar disebabkan oleh aspek pemodal dan pemasaran.

**Tabel II.276**  
**Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	57	10	55	54	55

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.17.14. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri**

Upaya meningkatkan peserta KB juga dilakukan melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang merupakan wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar anggotanya adalah peserta KB dari keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera yang aktif berusaha secara kelompok. Dengan peningkatan pendapatan masyarakat, diharapkan keikutseretaan dan kesinambungan ber-KB dapat ditingkatkan. Berdasarkan tabel dibawah persentase cakupan pasangan usia subur (PUS) peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan dari 5% ditahun 2013 menjadi 15% di tahun 2017.

**Tabel II.277**  
**Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang Ber-KB Mandiri**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	%	5	13	13	15	15

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.17.15. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan**

Pada tahun 2017 terdapat sejumlah 3030 Desa/Kelurahan di Sulawesi Selatan dengan jumlah PPKBD sebanyak 3038 orang petugas. Sehingga Ratio petugas per desa atau kelurahan adalah 100.26 % pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa rata rata terdapat 1 orang PPKBD/desa atau kelurahan.

**Tabel II.278**  
**Rasio PPKBD per Desa/Kelurahan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	0	0	0	0	100,26

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.17.16. Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan**

Persentase Faskes dan Jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan mencapai 65,71 %, artinya masih terdapat Faskes dan jejaringnya yang belum bekerjasama dengan BPJS dan belum memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan. Persyaratan kerjasama dengan BPJS yang belum terpenuhi oleh Faskes, sementara hampir semua Faskes menginginkan kerjasama dengan BPJS karena akan menambah item pelayanan Faskes yang berdampak pada pendapatan Faskes tersebut.

**Tabel II.279**  
**Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai dengan Standarisasi Pelayanan	%	0	0	0	0	65,71

Sumber : sipd.kemendagri.go.id



**3.1.1.2.17.17. Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)**

Dari 1000 orang remaja terdapat 36 kasus IMS dalam 5 tahun. Hal ini disebabkan karena praktek seksual luar nikah cenderung terjadi mengingat semakin terbuka dan vulgarnya informasi yang di terima oleh remaja.

**Tabel II.280**  
**Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0	0	0,12	0,04	0,02

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.17.18. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga**

Tahun 2017 semua POKTAN melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga. Akan tetapi pada tahun 2013 hingga 2016 tidak tersedia data yang akurat untuk menjelaskan cakupan pembinaan 8 fungsi keluarga oleh POKTAN.

**Tabel II.281**  
**Cakupan Kelompok Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	0	0	0	0	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.17.19. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak**

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam memberi pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral, menanamkan fungsi keluarga dan pembentukan kepribadian yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hak-hak anak yaitu Asah, Asih, dan Asuh. Berdasarkan data dibawah, persentase cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak di Sulawesi Selatan pada tahun 2017 adalah sekitar 71%.

**Tabel II.282**  
**Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	0	0	0	0	71

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.17.20. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita**

Rata – rata usia kawin pertama wanita pada tahun 2015 adalah 20,8 tahun. Perlunya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan bagi wanita. Data terakhir adalah pada tahun 2015, karena pendataan dilakukan sekali dalam 5 tahun, sehingga pendataan selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2020 (berdasarkan Survey Demografi Kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2015).

**Tabel II.283**  
**Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	Tahun	0	0	20,8	0	0

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.17.21. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes**

Pembiayaan untuk urusan pengendalian penduduk khusus oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan KB masih baru dan urusan ini hanya dilaksanakan oleh lembaga setingkat bidang (Eselon III).

**Tabel II.284**  
**Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0	0	0	0	0,03

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.2.18. Perhubungan**

**3.1.1.2.18.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum**

Berikut adalah data jumlah arus penumpang angkutan umum di Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan kecenderungan meningkat pada tiap tahunnya sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel II.285**  
**Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jiwa	9.378.146	11.639.705	11.833.341	12.683.600	13.322.856

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Tabel di atas menggambarkan bahwa telah terjadi kenaikan jumlah pengguna angkutan umum dari tahun 2013 hingga tahun 2017 sebesar 42,06 % atau 3.944.710 penumpang. Jika dihitung pertahunnya persentase kenaikan dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 24 %, tahun 2014 – 2015 sebesar 1,67 %, tahun 2015-2016 sebesar 7,18 % dan tahun 2016-2017 sebesar 5 %. Rata-rata pertumbuhan arus penumpang adalah 9,46 % atau 986.177 penumpang dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada periode tahun 2013-2014 serta terendah pada tahun 2014-2015. Tren peningkatan ini dapat diartikan bahwa masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadikan angkutan umum sebagai salah satu pilihan utama alat transportasi dalam bepergian ke suatu daerah. Adapun dengan fluktuasi kenaikan penumpang dapat disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi masyarakat serta meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi. Pengembangan transportasi umum masih berbasis di perkotaan sehingga terjadi ketimpangan pelayanan transportasi antar wilayah. Peningkatan jumlah penumpang merupakan arus urbanisasi dari desa ke perkotaan sebanyak 800.000 orang per tahunnya.

**Tabel II.286**  
**Jumlah Arus Penumpang, AKAP dan AKDP**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018**

Indikator	Satuan	Terminal Regional Daya	Terminal Tamalate	Jumlah
Jumlah AKAP	Unit	21.734	--	21.734
Jumlah AKDP	Unit	78.478	28.960	107.438
Jumlah Penumpang	Jiwa	949.983	303.951	1.253.934

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

### 3.1.1.2.18.2. Rasio Ijin Trayek

Angkutan umum merupakan salah satu fasilitas layanan yang menjadi indikator yang penting dalam dalam urusan perhubungan. Dalam hal ini, angkutan umum baik angkutan orang maupun barang perlu dilegalisasi dalam bentuk pemberian ijin trayek. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Perhubungan telah mengeluarkan ijin trayek yang dibandingkan dengan jumlah penduduk sebagaimana tertera pada tabel berikut:

**Tabel II.287**  
**Rasio Ijin Trayek**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio ijin trayek	0,45	0,38	1,99	0,26	0,20

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Berdasarkan tabel di atas, rasio ijin trayek secara umum mengalami penurunan dari 0,45 di tahun 2013 menjadi 0,20 di tahun 2017 atau sekitar 0,25 secara total walaupun telah terjadi kenaikan secara signifikan pada tahun 2015 sebanyak 1,99. Jika melihat kecenderungan kenaikan penumpang yang naik, penurunan ini dapat disebabkan oleh maraknya angkutan umum yang berplat hitam serta berbasis aplikasi yang tidak melakukan legalisasi terhadap status kendaraannya.

### 3.1.1.2.18.3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Selain legalisasi angkutan umum, penyediaan sarana dan prasarana perhubungan juga merupakan salah satu tugas penting pemerintah provinsi. Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kenaraan penumpang. Terminal Regional Daya sebagai salah satu terminal penumpang tipe A di Kota Makassar memiliki fungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan/atau angkutan lintas batas negara, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan. Belum terintegrasinya transportasi antar moda dan belum optimalnya pelayanan pelabuhan laut/udara/terminal serta terjadinya berbagai perubahan kebijakan pemerintah pusat mengenai kewenangan pengelolaan pelabuhan laut/bandara/terminal. Kecenderungan peningkatan jumlah pelabuhan laut, udara dan terminal bis ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

**Tabel II.288**  
**Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Jenis Prasarana Transportasi	Satuan	Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pelabuhan Udara	Unit	11	11	11	11	11
Pelabuhan Laut	Unit	62	62	62	82	82
Terminal Tipe B	Unit	16	16	16	16	16
<b>Jumlah</b>	<b>Unit</b>	<b>90</b>	<b>98</b>	<b>134</b>	<b>237</b>	<b>281</b>

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Perubahan angka yang menunjukkan tren positif ini merupakan dampak dari terjadinya kenaikan jumlah penumpang dan semakin membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. Direncanakan akan dibangun terminal multi moda untuk menghubungkan semua moda transportasi. Terminal multi moda untuk menghubungkan semua moda transportasi. Terminal multi moda yang akan dibangun adalah terminal multi moda bagian utara di Bandara Hasanuddin dan terminal multi moda bagian selatan di Pelabuhan Boddia Takalar.

**Tabel II.289**  
**Hierarki Pelabuhan Laut, Sungai Menurut Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Hirarki Pelabuhan	Kewenangan
1	Bantaeng	Bantaeng / Bonthain	Pengumpan Regional	Provinsi
2	Barru	Garongkong	Pengumpul	Pusat
3	Barru	Awerange	Pengumpan Regional	Provinsi
4	Bone	Bajoe	Pengumpul	Pusat
5	Bone	Pattirobajo	Pengumpan Regional	Provinsi
6	Bulukumba	Bulukumba / Lappe'e	Pengumpul	Pusat
7	Bulukumba	Maccini Baji	Pengumpan Regional	Provinsi
8	Jeneponto	Jeneponto /Bunging	Pengumpan Regional	Provinsi
9	Luwu	Belopa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
10	Luwu Timur	Malili	Pengumpan Regional	Provinsi
11	Luwu Timur	Lampia	Pengumpul	Pusat
12	Luwu Utara	Munte	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
13	Makassar	Makassar	Utama	Pusat
14	Palopo	Palopo / Tg. Ringgit	Pengumpul	Pusat
15	Pangkajene Kepulauan	Biringkasi	Pengumpan Regional	Provinsi
16	Pangkajene Kepulauan	P. Kalukalukuang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
17	Pangkajene Kepulauan	P. Sabutung	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
18	Pangkajene Kepulauan	P. Sailus	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
19	Pangkajene Kepulauan	P. Sapuka	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
20	Pare-Pare	Pare - Pare	Pengumpul	Pusat
21	Pinrang	Marabombang	Pengumpan Lokal	PR
22	Kepulauan Selayar	Jampea	Pengumpan Regional	Provinsi
23	Kepulauan Selayar	Selayar/Benteng/Rauf Rahman	Pengumpul	Pusat
24	Kepulauan Selayar	Galesong/Takalar	Pengumpan Regional	Provinsi
25	Kepulauan Selayar	P. Bonerate	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
26	Kepulauan Selayar	Kalaotoa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
27	Kepulauan Selayar	Kayuadi	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
28	Kepulauan Selayar	P. Jinato	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
29	Kepulauan Selayar	Ujung Jampea	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
30	Kepulauan Selayar	Pamatata	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
31	Sinjai	Sinjai / Larea-rea	Pengumpul	Pusat
32	Wajo	Siwa / Bangsalae	Pengumpan Regional	Provinsi
33	Barru	Lamuru Kung	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
34	Barru	Pancana / Pute Angin	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
35	Bone	Waetuo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
36	Bone	Cenrana	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
37	Bone	Lapangko / Salameko	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
38	Bone	Barebbo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
39	Bone	Uloe	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
40	Bone	Tuju-Tuju	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
41	Bulukumba	Butung / Kasuso	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
42	Bulukumba	Bira / Tanah Beru	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
43	Bulukumba	Kajang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
44	Jeneponto	Tarawang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
45	Luwu	Bawa Salo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

No	Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Hirarki Pelabuhan	Kewenangan
46	Luwu	Bona Pute	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
47	Luwu	Larompong	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
48	Luwu Timur	Wotu	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
49	Luwu Utara	Labuange	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
50	Luwu Utara	Cappasalo/Malangke	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
51	Makassar	Kayu Bangkoa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
52	Makassar	Pulau Barrang Caddi	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
53	Makassar	Pulau Barrang Lompo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
54	Makassar	Pulau Bonetambung	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
55	Makassar	Pulau Kodingareng	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
56	Makassar	Pulau Lae-Lae	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
57	Makassar	Pulau Langkai	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
58	Makassar	Pulau Samalona	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
59	Pangkajene Kepulauan	P. Badi	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
60	Pangkajene Kepulauan	P. Balang Lompo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
61	Pangkajene Kepulauan	P. Balo-Baloang Lompo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
62	Pangkajene Kepulauan	P. Dewakang Lompo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
63	Pangkajene Kepulauan	P. Doang-Doangan Lompo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
64	Pangkajene Kepulauan	P. Gondong Bali	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
65	Pangkajene Kepulauan	P. Kapoposang Bali	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
66	Pangkajene Kepulauan	P. Karangrang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
67	Pangkajene Kepulauan	P. Kulambing	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
68	Pangkajene Kepulauan	P. Langkoitang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
69	Pangkajene Kepulauan	P. Matalaang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
70	Pangkajene Kepulauan	P. Pammantauang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
71	Pangkajene Kepulauan	P. Salemo	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
72	Pangkajene Kepulauan	P. Karumpa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
73	Pangkajene Kepulauan	Kalatoa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
74	Pinrang	Langga	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
75	Pinrang	Ujung Lero	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
76	Selayar	Appatana	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
77	Selayar	Bangkala	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
78	Selayar	P. Batang Mata	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
79	Selayar	P. Bembe / Tanamlala	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
80	Selayar	P. Biropa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
81	Selayar	P. Bona Lohe	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
82	Selayar	P. Kalao	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
83	Selayar	P. Komba- Komba	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
84	Selayar	P. Lambego	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
85	Selayar	P. Padang	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
86	Selayar	P. Samatellu	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
87	Selayar	P. Tarupa	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
88	Selayar	P. Tambolongan	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
89	Selayar	P. Madu	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
90	Selayar	P. Rajuni	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
91	Selayar	Pasitallu	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
92	Sinjai	Cappa Ujung Sinjai	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
93	Sinjai	P. Burung Lohe	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
94	Sinjai	Patubukan	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
95	Sinjai	P. Kambuno	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
96	Takalar	P. Tanakeke / Satanga	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
97	Takalar	Salomakko	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
98	Wajo	Doping	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
99	Wajo	Jalang/Cendrane	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota
100	Wajo	Danggae	Pengumpan Lokal	Kabupaten/Kota



No	Kabupaten/Kota	Pelabuhan	Hirarki Pelabuhan	Kewenangan
<b>Daftar Dermaga Sungai dan Danau</b>				
101	Dermaga Danau Soroako	Operasi	Pengumpan	Kabupaten/Kota
102	Dermaga Danau Nuha	Operasi	Pengumpan	Kabupaten/Kota
103	Dermaga Penyeberangan Beau Tokalimbo di Danau Towuti	Konstruksi	Pengumpan	Kabupaten/Kota
104	Dermaga Danau Towuti	Rencana	Pengumpan	Kabupaten/Kota
105	Dermaga Danau Matano	Operasi	Pengumpan	Kabupaten/Kota
106	Dermaga Danau Mahalona	Rencana	Pengumpan	Kabupaten/Kota
107	Dermaga Sungai Sadang	Operasi	Pengumpan	Kabupaten/Kota
108	Dermaga Danau Sidenreng	Rencana	Pengumpan	Kabupaten/Kota
109	Dermaga Danau Tempe	Rencana	Pengumpan	Kabupaten/Kota

Sumber : Keputusan Menhub Nomor 432 TAHUN 2017 dan Keputusan Menhub Nomor 432 TAHUN 2017

**Tabel II.290**  
**Jumlah Halte**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Koridor/Tahun	Satuan	Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
2	Unit	1	-	6	-	12	19
3	Unit	-	8	13	12	15	48
4	Unit	-	-	17	2	10	29
5	Unit	-	-	-	13	1	14
7	Unit	-	-	-	38	2	40
8	Unit	-	-	-	-	2	2
PLUS	Unit	-	-	-	-	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>Unit</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>65</b>	<b>44</b>	<b>154</b>

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.18.4. Persentase Layanan Angkutan Darat

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Angkutan Antar Kota Antar (AKAP), dimana Kota Makassar merupakan tempat asal dan tujuan maupun hanya sebagai lintasan dari kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan sebaliknya;
2. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang menghubungkan kabupaten/kota yang terdapat didalam Provinsi Sulawesi selatan;
3. Angkutan Lokal yang ada berupa Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan;

Saat ini jumlah kendaraan di Sulawesi Selatan tercatat telah mencapai angka 2,2 juta unit, namun hal ini tidak beriringan dengan pengembangan jalan. Pertumbuhan jumlah kendaraan di Sulawesi Selatan antara 8-10% per tahun. Kota Makassar dan Kabupaten Gowa tercatat memiliki jumlah kendaraan beredar terbesar;

Selain itu, jumlah angkot di Makassar sebanyak 4.013 unit. BRT 30 unit melayani 4 rute diantaranya: Sentral-Sungguminasa, Panampu-Sungguminasa, Makassar-Parepare dan jalur khusus Bandara Sultan Hasanuddin-Lapangan Karebosi. Taksi sejumlah 2.500 unit dari 11 perusahaan taksi yaitu Taksi Bosowa, Taksi Lima Muda, Taksi Gowata, Taksi Metro Makassar, Taksi Putra, Taksi Puskud, Taksi Gowa Mas, Taksi Mitra, Taksi Airport, Taksi Koperasi TNI (Kopsidara), Taksi Bintang.

Data berikutnya menggambarkan kapasitas pelayanan dari salah satu jenis angkutan umum yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan.

**Tabel II.291**  
**Persentase Layanan Angkutan Darat**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase layanan angkutan darat	%	80	87	90	94	97

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Tabel di atas menginformasikan bahwa telah terjadi kenaikan persentase layanan angkutan darat sejak tahun 2013 yang hanya 80 % menjadi 97 % di tahun 2017 atau peningkatan sebesar 17%. Kenaikan tertinggi terjadi selama periode 2013-2014 sebesar 7% dan terendah pada tahun 2014-2015 dan 2016-2017 sekitar 3%. Informasi ini menyiratkan bahwa layanan angkutan darat semakin baik walaupun belum 100 % sebagaimana ditargetkan.

### 3.1.1.2.18.5. Pemasangan Rambu-Rambu

Peningkatan jumlah panjang jalan seiring dengan meningkatnya fasilitas keselamatan jalan sehingga dapat memperkecil jumlah kecelakaan hingga tahun 2017 telah terpasang 9 jenis fasilitas keselamatan jalan sebanyak 135.665 atau 30% dari Panjang jalan Sulawesi Selatan. Rambu merupakan fasilitas perlengkapan jalan untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Fasilitas ini memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan. Di Sulawesi Selatan, berdasarkan data pemasangan rambu-rambu, terjadi penurunan jumlah pemasangan di Tahun 2017. Salah satu penyebabnya karena jumlah pemasangan rambu telah tercover di tahun sebelumnya. Berikut data Pemasangan Rambu-Rambu di Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017 :

**Tabel II.292**  
**Pemasangan Rambu-Rambu**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Jenis Rambu	Satuan	Pemasangan Rambu-Rambu				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rambu Lalu Lintas	Unit	560	4.484	45	1.440	1.909
Warning Light	Unit	-	-	-	10	-
Guardrail	Unit	-	200	200	2.720	-
Marka Jalan	Unit	13.160	13.500	13.250	166.122	128.551
Cermin Tikungan	Unit	-	-	-	-	-
Deliniator	Unit	-	-	-	3.250	5.205
Paku Marka	Unit	-	-	-	2.170	-
Traffic Light	Unit	-	-	-	-	-
RPPJ	Unit	-	-	-	68	-
APILL	Unit	-	-	2	-	-
Jumlah	Unit	13.720	18.184	13.497	175.780	135.665

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

### 3.1.1.2.18.6. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar arus perekonomian daerah. Usaha pembangunan yang meningkat menuntut adanya akses untuk menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang. Panjang jalan Provinsi Sulawesi Selatan 1.500,15 Km. Jumlah kendaraan bermotor mencapai 2,2 juta unit pada tahun 2017 namun tidak sebanding dengan penambahan jumlah Panjang jaringan jalan. Pertumbuhan jumlah kendaraan di Sulawesi Selatan antara 8-10% per tahun. Kota

Makassar dan Kabupaten Gowa tercatat memiliki jumlah kendaraan beredar terbesar. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Jenis kendaraan yang diperhitungkan terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor, sedangkan panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah.

Data rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan di bawah menunjukkan bahwa di Tahun 2017, secara umum, 1 km jalan melayani 108 unit kendaraan bermotor. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya khususnya dari tahun 2013 yaitu 33 unit/1 km panjang jalan atau 44 %. Hal ini dapat diartikan bahwa kuantitas kendaraan semakin meningkat yang berimplikasi pada peningkatan kapasitas layanan angkutan dan di sisi lain juga berefek apa adanya semakin tingginya kepadatan jalan yang berpotensi pada kemacetan. Berikut data rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan :

**Tabel II.293**  
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	75	88	95	102	108

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.2.18.7. Jumlah Orang/ Barang Terangkut Angkutan Umum

Keberadaan sarana dan prasarana transportasi laut merupakan salah satu yang paling penting bagi pengembangan wilayah Republik Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan. Pengembangan prasarana transportasi laut khususnya pelabuhan di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu hal yang penting bagi pergerakan penumpang dan barang untuk menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) salah satunya memprogramkan pengembangan infrastruktur pelabuhan.

Pemerintah Provinsi meminta PT. Pelabuhan Indonesia IV untuk merealisasikan pengembangan Pelabuhan Makassar tahun 2013. Hal ini disebabkan arus bongkar muat barang yang sudah melebihi kapasitas membutuhkan perluasan dermaga, serta penambahan ruang dan fasilitas terminal peti kemas Pelabuhan Makassar semakin mendesak. PT. Pelindo IV menginvestasikan dana sebesar 150 Milyar rupiah untuk perluasan Dermaga Hatta seluas 150 meter persegi dari luas dermaga saat ini 850 m2. Dengan perluasan dermaga kapasitas muat pelabuhan peti kemas diharapkan bertambah dan waktu tunggu kapal yang akan sandar di pelabuhan juga dapat dikurangi. Sulawesi Selatan memiliki cukup banyak pelabuhan potensial untuk mendukung program MP3EI. Sebagai contoh, Pelabuhan Makassar dapat fokus pada aktivitas bongkar muat peti kemas. Pelabuhan Garongkong fokus pada bongkar muat barang, dan Pelabuhan Boddia dapat fokus sebagai pelabuhan penumpang. Di Kabupaten Barru selain pelabuhan penyeberangan Garongkong juga ada Pelabuhan serbaguna/curah di Kawasan Garongkong yang proses pembuatannya terpadu dengan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pelabuhan Awerange dengan Panjang dermaga 70 meter lebar 8 meter. Panjang pelataran 40 meter lebar 4 meter. Pelabuhan berstatus pelabuhan rakyat.

Pelabuhan laut Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan hirarkinya terdiri dari pelabuhan internasional, pelabuhan nasional dan pelabuhan regional. Pelabuhan Makassar merupakan satu-satunya pelabuhan internasional yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Karena fungsinya sebagai pelabuhan internasional, pelabuhan tersebut memiliki

volume bongkar muat barang dan naik penumpang yang paling tinggi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Berikut ini kinerja Pelabuhan Makassar:

**Tabel II.294**  
**Kinerja Pelayanan Kapal**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Arus Kunjungan Kapal	Call	4.767	4.912	4.315	5.625	6.188
Arus Peti Kemas	Ton	3.782.717	5.915.854	6.905.622	7.127.755	7.908.590

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Pelabuhan yang selama ini diusahakan di Sulawesi Selatan adalah: Pelabuhan Makassar di Kota Makassar, Pelabuhan Palopo di Kota Palopo, Pelabuhan Siwa di Kabupaten Wajo, Pelabuhan Galesong di Kabupaten Takalar, Pelabuhan Pattiro Bajo di Kabupaten Bone, Pelabuhan Bantaeng di Kabupaten Bantaeng, Pelabuhan Jeneponto di Kabupaten Jeneponto, Pelabuhan Parepare di Kota Pare-Pare, Pelabuhan Awerangnge di Kabupaten Barru, Pelabuhan Sinjai di Kabupaten Sinjai, Pelabuhan Bulukumba di Kabupaten Bulukumba, Pelabuhan Tujutuju di Kabupaten Bone, Pelabuhan Jampea di Kabupaten Kepulauan Selayar, Pelabuhan Biringkassi di Kabupaten Pangkep, Pelabuhan Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Transportasi udara didalam wilayah Sulawesi Selatan masih dalam taraf awal pengembangan seperti di Bandara Pongtiku di Kabupaten Tator, Bandara Arupala di Kabupaten Selayar secara umum dapat melayani kebutuhan lalu lintas udara antara Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan bagian utara dan ke Pulau Selayar. Sejak beberapa tahun sebelumnya, bandara ini telah memberikan kontribusi pengembangan sektor transportasi. Untuk Kabupaten Tana Toraja kendala yang dihadapi adalah selain stabilitas jumlah penumpang juga faktor sarana dan prasarana yang belum secara optimal memenuhi standar bagi penerbangan pesawat udara. Di Soroako terdapat bandara yang dioperasikan oleh PT.INCO yang sangat strategis karena menghubungkan Makassar dengan wilayah Luwu yang relatif jauh jika menggunakan transportasi darat.

Pengembangan wilayah di kawasan itu cukup terdorong oleh keberadaan bandara tersebut. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin merupakan bandara yang secara fisik telah masuk kedalam internasional hubs dimana memiliki dua pilihan run way yang lebih Panjang sesuai persyaratan serta terminal penumpang dan pesawat yang menampung lebih dari 12 pesawat udara. Menghadapi kondisi perkembangan dunia penerbangan, bandara Sultan Hasanuddin akan terus berbenah diri khususnya dari aspek manajemen pengelolaan penerbangan bertaraf internasional. Kondisi fisik telah mampu melayani jumlah penumpang domestik dan mancanegara yang terus meningkat termasuk kelengkapan sarana dan jasa angkutan barang. Kapasitas normal Bandara Sultan Hasanuddin hanya mampu menampung 7 juta penumpang. Tetapi saat ini penumpang yang dilayani hingga akhir tahun ini sudah 8 juta orang dan dikhawatirkan membengkak hingga sekitar 13 juta penumpang pada tahun 2017.

Bandara harus diperluas sebagai langkah optimalisasi untuk menghadapi *over capacity*. Pertumbuhan arus penumpang yang signifikan kedepannya diproyeksikan mampu memberikan kontribusi besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Makassar dan Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Bandara perintisan yang beroperasi di Sulawesi Selatan adalah: Bandara Pongtiku di Tana Toraja, Bandara Andi Jemma di Masamba, Bandara Seko di Masamba, Bandara Rampi di Masamba, Bandara Bua di Luwu, Bandara Aeropala di Selayar, Bandara Bone di Bone, Bandara Khusus PT.Inco di Soroako. Data jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan yang signifikan, dari tahun 2013 hingga 2017 sebesar 1.467.937 atau 13%. Namun angka ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pola pergerakan penduduk yang tidak merata

sepanjang waktu, misalnya ada saat-saat dimana permintaan cukup tinggi (biasanya menjelang hari raya) dan ada saat dimana permintaan menurun. Membaiknya sarana dan prasarana transportasi juga secara tidak langsung mempengaruhi angka ini. Di bawah ini, tabel Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum :

**Tabel II.295**  
**Jumlah Orang/Barang Terangkut Angkutan Umum**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Jenis Transportasi	Jumlah Orang/ Barang Terangkut Angkutan Umum				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bus	119.365	120.110	121.080	121.425	121.785
Kereta Api	-	-	-	-	-
Kapal Laut	1.460.543	1.822.717	1.644.073	1.642.444	1.823.531
Pesawat Udara	9.654.384	8.828.586	9,302.437	10.756.915	12.294.226
Jumlah	11.234.292	10.771.413	11.067.590	12.520.784	14.239.542

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Peningkatan jumlah penumpang pesawat terbang melalui Bandara Sultan Hasanuddin sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 berdasarkan data mengalami peningkatan sebesar 7,83% dengan jumlah penumpang pada tahun 2017 sebesar 12.294.226 jiwa. Lalu lintas penumpang diperkirakan mencapai 21 juta penumpang pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 4,7%. Pergerakan pesawat juga mengalami peningkatan dengan jumlah 113.911 unit pada tahun 2017 yang melalui Bandara Sultan Hasanuddin. Diperkirakan pergerakan pesawat mencapai 174.000 pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 3,8%.

**Tabel II.296**  
**Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara /terminal per tahun	12.357.723	11.848.554	12.174.349	12.684.570	13.972.454

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.3. Fokus Layanan Pilihan

#### 3.1.1.3.1. Bidang Urusan Pariwisata

##### 3.1.1.3.1.1. Kunjungan Wisata (Wisatawan Nusantara)

Kenaikannya signifikan kunjungan wisatawan nusantara terjadi sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2016 dimana jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Sulawesi Selatan mencapai 8.426.528 orang. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan nusantara mengalami penurunan dengan jumlah pengunjung 8.367.748 orang. Dan kembali terjadi kenaikan kunjungan wisatawan menjadi 8.393.024 orang di tahun 2018. Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan tersebut tidak lepas dari peran pemerintah dan pihak terkait untuk terus mempromosikan destinasi baru di Wilayah Sulawesi Selatan. Peningkatan jumlah kunjungan yang cukup signifikan ini merupakan salah satu indikator keefektifan branding baru pariwisata Sulsel yakni *Explore South Sulawesi*, sehingga pencapaian jumlah kunjungan wisatawan mendongkrak peningkatan perekonomian. Secara umum rata-rata pertumbuhan pergerakan wisatawan nusantara di Sulawesi Selatan sebesar 11,96%. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015, yaitu pertumbuhan sebesar 20,41% dari tahun lalu atau dengan nilai absolut sebanyak 1.208.298. Dengan pertumbuhan rata-rata capaian sebesar 11,96%, realisasi pergerakan wisatawan nusantara ke Sulawesi Selatan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Pada Tabel berikut ditampilkan target dan capaian pergerakan wisatawan nusantara.



**Tabel II.297**  
**Kunjungan Wisatawan Nusantara**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	Kunjungan	5.920.528	7.128.826	8.426.528	8.367.748	8.393.024

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Realisasi jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini tentunya tidak lepas dari peran dari pemerintah untuk terus mengembangkan potensi destinasi wisata yang ada di wilayahnya yang bertujuan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung atau berlibur di Sulawesi Selatan.

**Tabel II.298**  
**Perkembangan Kunjungan dan Pengeluaran Wisatawan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Target Kunjungan	Kunjungan	5.250.000	5.500.000	5.750.000	6.000.000	6.250.000
Realisasi Kunjungan	Kunjungan	5.920.528	7.128.826	8.426.528	8.367.748	8.393.024
Rata-Rata Pengeluaran/Hari	Rupiah	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Belanja/Tahun	Trilyun Rupiah	20,72	26,73	31,60	31,38	31,47

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.3.1.2. Kunjungan Wisata (Wisatawan Mancanegara)

Pencapaian peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara periode tahun 2014-2018 mengalami peningkatan setiap tahun. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2017 mencapai 255.747 orang. Pencapaian tersebut sejalan dengan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018, yang didukung oleh sinergitas antar stakeholder pariwisata seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Kota asosiasi pariwisata yakni, PHRI, ASITA, HPI, BPPD, akademisi serta dukungan media yang memajukan sektor pariwisata Sulsel.

**Tabel II.299**  
**Kunjungan Wisatawan Mancanegara**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	Kunjungan	151.763	191.773	236.491	255.747	263.293

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Secara umum rata-rata pertumbuhan pergerakan wisatawan nusantara di Sulawesi Selatan sebesar 25,02%. Realisasi pergerakan wisatawan nusantara ke Sulawesi Selatan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Pada Tabel berikut ditampilkan target dan capaian wisatawan mancanegara.

**Tabel II.300**  
**Target dan Capaian Kunjungan Wisatawan Mancanegara**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Target	Kunjungan	115.000	125.000	175.000	200.000	200.000
Capaian	Kunjungan	151.763	191.773	236.491	255.747	263.293

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Ada fakta yang perlu dicermati secara saksama dari tampilan kedua tabel tersebut yaitu rata-rata capaian pertumbuhan selama lima tahun terakhir sebesar 25,02% dan tiap tahun melampaui target, namun kecenderungan pertumbuhan wisatawan mancanegara mengalami penurunan. Pertumbuhan wisatawan mancanegara pada tahun 2014 sebesar 42%, kemudian tahun 2015 turun sebesar 26% selanjutnya pada tahun 2016 hanya sebesar 22%, terakhir pada tahun 2017 turun menjadi 9%. Kecenderungan pertumbuhan yang terus menurun harus menjadi bahan evaluasi tidak hanya seluruh destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan berupa aksesibilitas, amenities dan atraksi tetapi juga menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selama lima tahun ke depan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 sebagai acuan target indikator kinerja daerah. Perkembangan kunjungan wisman dalam kurun waktu lima tahun terakhir sangat fluktuatif terhadap faktor-faktor di luar kendali yang menjadi fenomena trend kunjungan wisatawan, seperti: persepsi keamanan warga negara asing-wisatawan asing (*tourist*) terhadap kondisi keamanan nasional, gangguan atau stabilitas pada beberapa daerah tujuan wisata (DTW), seperti Bali yang sampai saat ini masih merupakan “trendsetter” atau barometer besaran (naik-turunnya) kunjungan wisata di Indonesia telah memberikan warna signifikan terhadap turunnya minat kunjungan wisatawan ke Indonesia, juga termasuk ke Sulawesi Selatan. Pada Tabel di bawah ini ditampilkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan pintu masuk baik yang di bandara Sultan Hasanuddin maupun di pelabuhan Soekarno-Hatta.

**Tabel II.301**  
**Kunjungan Wisatawan Mancanegara**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018 Berdasar Pintu Masuk**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Wisatawan Mancanegara	Kunjungan	15.713	13.713	17.705	18.335	14.115

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Berdasarkan capaian kunjungan wisatawan mancanegara tertera pada Tabel di atas menunjukkan grafik “kurva U”, artinya kecenderungan menurun walauun pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan rebound. Selisih nilai absolut pada tahun 2013 terhadap tahun 2017 sebesar 605. Pada tahun 2013 situasi politik dan keamanan di daerah Sulawesi Selatan cenderung stabil dan efek promosi yang dilakukan pada program Visit South Sulawesi mulai mendapat respon positif dari pasar terutama market tourist internasional hal ini di buktikan dengan lonjakan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2013 sebesar 39,39% atau 106,584 orang wisatawan asing telah berkunjung ke berbagai Destinasi Pariwisata di Sulawesi Selatan. Hal ini juga membuktikan bahwa upaya keras yang di lakukan para stakeholder pariwisata di daerah ini dalam mengembangkan inovasi dan diversifikasi produk-produk wisata terutama pembenahan terhadap fasilitas dan rekayasa beberapa obyek dan atraksi wisata baru mampu menarik minat wisatawan asing untuk kembali berkunjung ke destinasi unggulan seperti Makassar, Toraja, Toraja Utara dan Maros. Selain itu kemudahan aksesibilitas berupa perbaikan jalur utara transportasi darat Provinsi Sulawesi Selatan memberikan imbas terhadap kenyamanan dan jarak tempuh ke destinasi- destinasi pariwisata yang menjadi primadona bagi wisatawan mancanegara di sepanjang jalur tersebut. Sehingga jumlah peningkatan kunjungan wisatawan asing yang terjadi cukup signifikan disbanding periode tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014 promosi brandig Visit South Sulawesi mulai mendapat respon positif dari pasar terutama market tourist internasional. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2014 sebesar 42,39% atau 151,763 orang wisatawan asing telah berkunjung ke berbagai Destinasi Pariwisata di Sulawesi Selatan. Hal ini juga merupakan implikasi dari mulai diperkenalkannya beberapa alternatif destinasi

wisata baru yang ditunjang dengan penguatan event-event lokal yang secara berkala di selenggarakan di destinasi wisata daerah. Komponen atraksi wisata yang menjadi bagian dari penyelenggaraan event wisata merupakan daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke destinasi wisata di Sulawesi Selatan. Hal ini pula sejalan dengan preferensi wisatawan mancanegara cenderung memilih destinasi karena paket wisata yang ditawarkan memiliki komponen atraksi dan event wisata daerah. Sejak launching Visit South Sulawesi pada tahun 2010, maka tahun 2015 merupakan masa akhir dari program tersebut. Pada tahun ini pula program dan event pendukung turut diluncurkan guna mendukung masa final Visit South Sulawesi. Hal tersebut ternyata mampu membawa tambahan arus kunjungan wisatawan manca negara yang meningkat hingga 26,36%. dengan penyelenggaraan event Festival Full Moon di kawasan Karst Maros-Pangkep yang merupakan contoh Best Practice Diversifikasi produk yang menjadi terobosan pemerintah dalam upaya menggaet lebih banyak wisatawan internasional. Selain itu, interkoneksi antar destinasi dan event pariwisata sudah menjadi perhatian dari pemerintah kabupaten/kota sehingga kenyamanan dalam melakukan perjalanan dan kepastian event turut memberikan kesan positif bagi pencitraan destinasi pariwisata Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2016, setelah berhasil dengan branding pariwisata Visit South Sulawesi pada tahun 2010 lalu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan meluncurkan branding pariwisata Sulsel yang baru yaitu, Explore South Sulawesi. Launching Explore South Sulawesi di tahun 2016 merupakan branding pariwisata yang baru. Explore South Sulawesi dimaksudkan agar wisatawan yang datang ke Sulsel dapat melakukan eksplorasi atau menjelajahi seluruh destinasi wisata di Sulsel. Dengan hadirnya branding baru tersebut yang didukung oleh fasilitas pendukung seperti tersedianya pusat informasi pariwisata di bandara telah memberi dampak yang lebih baik untuk peningkatan pariwisata. Selain itu, diluncurkannya media promosi dalam bentuk aplikasi android dan IOS serta website baru merupakan strategi baru yang diupayakan mampu meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara di Sulawesi Selatan hingga 22,16% atau 234,249 wisatawan mancanegara pada tahun 2016.

Secara keseluruhan bila kita mengamati analisa diatas, maka terlihat peningkatan jumlah kunjungan dari tahun ke tahun walau secara bersamaan pula terjadi fluaktuasi prosentase jumlah wisatawan dari tahun ke tahun yang di pengaruhi oleh variabel sebagai berikut:

1. Kondisi kemanan baik dari faktor *force majuer* (bencana alam) dan social human eror (kecelakan, teroris, kerusakan).
2. Kegiatan promosi dan penetrasi pasar potensial serta perluasan pangsa pasar baru
3. Adanya kompetisi antar destinasi yang memiliki keunggulan komperatif yang sama
4. Peningkatan fasilitas dan destinasi baru di Sulawesi Selatan.

Terbukanya lagi aksesibilitas penerbangan Internasional ke destinasi Sulawesi Selatan (Singapura dan Malaysia).

#### 3.1.1.3.1.3. Lama Kunjungan Wisata

Pada tahun 2018 ditargetkan kunjungan wisatawan sebanyak 6.000.000 orang, namun jumlah kunjungan pada tahun tersebut mencapai 8.367.748 orang dengan rata-rata lama tinggal 5 hari, besaran pengeluaran perharinya sebesar Rp 750.000 dan besaran belanja pertahunnya sebesar 31.38 trilyun rupiah.

**Tabel II.302**  
**Lama Kunjungan Wisata**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Lama kunjungan Wisata	Hari	5	5	5	5	5

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Secara umum lama tinggal wisatawan pada suatu destinasi wisata dipengaruhi oleh ketersediaan informasi yang cukup tentang suatu destinasi wisata bagi wisatawan sehingga memutuskan untuk melakukan eksplorasi lebih mendalam destinasi tersebut. Khusus untuk Sulawesi Selatan, ikon pariwisata budaya telah mulai menggeliat berkat dukungan stake holder pariwisata dan perhatian serius pemerintah baik pusat dan daerah untuk kembali menghidupkan atraksi-atraksi wisata potensial di destinasi Toraja. Dukungan event pariwisata internasional seperti Toraja International Festival yang menghadirkan para pekerja seni dari berbagai negara yang berkolaborasi menggelar pertunjukan seni etnografi, telah menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan mancanegara untuk berkunjung kembali ke Toraja. Sinkronisasi promosi dan event pariwisata telah mampu meningkatkan minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Sulawesi Selatan. Pemanfaatan promosi In *Flight Magazine*, yang mengiklankan semua event pariwisata daerah di Sulawesi Selatan turut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Destinasi baru yang diendorse oleh komunitas seperti komunitas fotografi dan provider telekomunikasi di dunia maya turut berperan membuka pangsa pasar baru bagi para traveler independen dari luar negeri, pergeseran paradigma berwisata dengan pola konvensional yang memanfaatkan moda pergerakan transportasi berubah menjadi pemanfaatan gadget dan aplikasi serta internet dalam menentukan minat traveling wisatawan mancanegara. Selain itu terbukanya akses pasar baru sebagai akibat kebijakan bebas visa juga memberikan akses positif terhadap pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

#### 3.1.1.3.1.4. PAD Sektor Pariwisata

Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata dari tahun 2013 hingga 2018 mengalami capaian yang berfluktuasi. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Promosi destinasi wisata dan pengembangan pariwisata di Sulawesi Selatan harus lebih optimal dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah khususnya sektor pariwisata.

**Tabel II.303**  
**PAD Sektor Pariwisata**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	311.513.000	491.991.725	383.640.000	451.750.000	375.900.000

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.3.2. Bidang Urusan Pertanian

##### 3.1.1.3.2.1. Subsektor Pertanian Tanaman Pangan

Sub sektor tanaman pangan khususnya komoditi padi dan jagung berkontribusi besar terhadap sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Namun pada tahun 2017 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan dengan nilai kontribusi 22,89%. Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 mengarahkan sector utama pendukung pembangunan wilayah Sulawesi 2020-2024, salah satunya adalah pertanian, kehutanan dan perikanan dengan mengarahkan pembangunan Sulawesi Selatan sebagai pusat lumbung pangan nasional. Strategi pembangunan nasional tersebut sejalan dengan kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Sulawesi Selatan yang diarahkan dengan melakukan pengembangan kawasan budidaya unggulan yang memiliki nilai strategis pada sentra-sentra produksi komoditas pertanian unggulan dengan melakukan pengendalian terhadap lahan pangan di Sulawesi Selatan melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTRWP Sulawesi Selatan.



**Tabel II.304**  
**Perkembangan Lahan Pertanian Pangan di Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2015-2018**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	Perkembangan Rata-Rata Tahunan	
	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(%/Tahun)
Bantaeng	7,829	7,829	7,829	1,507	0.0	0.0
Barru	14,475	14,694	14,557	22,232	41.0	0.3
Bone	100,631	112,331	112,081	10,339	5,725.0	5.1
Bulukumba	22,797	22,901	22,958	27,709	80.5	0.4
Enrekang	10,861	10,573	11,164	18,424	151.5	1.3
Gowa	33,806	33,929	34,093	37,272	143.5	0.4
Jeneponto	16,834	17,303	17,666	16,082	416.0	2.4
Kepulauan Selayar	3,572	3,825	3,825	25,978	126.5	3.3
Kota Makassar	2,549	2,609	2,609	16,770	30.0	1.1
Kota Palopo	2,353	2,671	2,667	15,939	157.0	5.9
Kota Pare Pare	819	817	703	115,248	-58.0	-8.2
Luwu	37,037	38,158	32,623	27,211	-2,207.0	-7.0
Luwu Timur	22,900	24,662	24,626	98,897	863.0	3.5
Luwu Utara	24,916	25,314	25,387	46,970	235.5	0.9
Maros	25,927	26,022	25,852	46,141	-37.5	-0.1
Pangkajene Kepulauan	16,732	16,732	16,732	9,562	0.0	0.0
Pinrang	53,584	54,615	55,111	29,577	763.5	1.4
Sidenreng Rappang	48,309	47,783	48,218	14,043	-45.5	-0.1
Sinjai	15,852	15,899	16,067	21,671	107.5	0.7
Soppeng	27,413	28,631	28,940	17,931	763.5	2.7
Takalar	16,779	16,619	16,876	16,423	48.5	0.3
Tana Toraja	10,761	10,761	10,761	2,174	0.0	0.0
Toraja Utara	15,318	15,277	15,199	937	-59.5	-0.4
Wajo	96,177	99,237	100,068	1,837	1,945.5	2.0
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>628,231</b>	<b>649,192</b>	<b>646,612</b>	<b>641,457</b>	<b>9,190.5</b>	<b>1.4</b>

Lahan Sawah Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang di publikasikan oleh ATR-BPN seluas 641.457 ha, mengalami penurunan sebesar 12.489 ha dimana tahun 2017 luas sawah sebesar 653.946 ha. Luas lahan sawah Tahun 2015 sd 2017 dikeluarkan oleh BPS, sedangkan lahan sawah tahun 2018 dikeluarkan oleh ATR-BPN. Perbedaan ini dimungkinkan karena data yang dikeluarkan BPS berdasarkan laporan dari petugas lapangan (mantri tani) dan tidak tersedianya data perubahan (konversi) lahan ke non pertanian sehingga BPS tidak dapat melakukan updating, sedangkan data yang dikeluarkan oleh ATR-BPN berdasarkan pengukuran melalui citra satelit meskipun masih mengalami kontroversi karena diduga belum dilakukan ground check (pengecekan dengan GPS).

### 3.1.1.3.2.2. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Perekonomian Sulawesi Selatan masih ditopang oleh sektor pertanian, dengan kontribusi sekitar 22,89% dari seluruh sektor pada di tahun 2017. Data keadaan angkatan kerja di Sulawesi Selatan menunjukkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian cukup mendominasi sekitar 38.67% dari seluruh sektor ekonomi. Tidak salah dikatakan bahwa pertanian masih menjadi tumpuan ekonomi mayoritas penduduk Sulawesi Selatan. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku mencapai 95,90 triliun rupiah atau sebesar 22,89%. Subkategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 63,34%. Subkategori tersebut juga masih dirinci lagi dan Tanaman pangan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah sub kategori usaha tersebut yaitu sebesar 51,89 persen.



**Tabel II.305**  
**Kontribusi Subsektor Pertanian Terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	%	22,97	23,14	23,27	22,89	22,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

**3.1.1.3.2.3. Kontribusi Subsektor Pertanian Tanaman Pangan (Palawija) terhadap PDRB**

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menyumbang peningkatan pertumbuhan PDRB di Sulawesi Selatan. Palawija merupakan salah satu kunci dalam menggalakkan diversifikasi pangan di Indonesia demi mempertahankan ketahanan pangan. Lahan tidur yang tidak tergarap, misalnya lahan kehutanan bisa ditanam palawija karena penanaman palawija tidak membutuhkan banyak air. Produktivitas pertanian (palawija) seperti jagung dan umbi-umbian yang meningkat menjadi faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian (palawija).

**Tabel II.306**  
**Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	3,30	3,94	4,07	5,42	6,01

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.3.2.4. Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB**

Kondisi geobiofisik wilayah Sulawesi selatan sesuai untuk pengembanagn tanaman pangan, hal ini yang menjadikan provinsi ini memiliki ketahanan dan ketersediaan pangan yang baik sepanjang tahun. Berdasarkan data BPS pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 sebesar 7,23% tidak terlepas dari embangunan yang difokuskan pada sektor pertanian, khususnya sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB sulawesi Selatan turun pada tahun 2018 sekitar 7,11% yang semulanya pada tahun 2017 sebesar 7,52 %.

**Tabel II.307**  
**Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB	%	7,79	7,65	7,81	7,52	7,11

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.3.2.5. Kontribusi Sektor Pertanian (Hortikultura) Terhadap PDRB**

Pengembangan sektor pertanian Sub sektor hortikultura juga menjadi fokus dan akan terus dikembangkan di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data pada tabel dibawah menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian (hortikultura) terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 adalah sebesar 1,23%.

**Tabel II.308**  
**Kontribusi Sektor Pertanian (Hortikultura) Terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor pertanian (hortikultura) terhadap PDRB	%	1,35	1,33	1,31	1,30	1,23

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.3.2.6. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Sebanyak 73 persen dari total rumah tangga pertanian di Sulawesi Selatan mengusahakan tanaman pangan. Dominasi subsektor ini mencapai nilai tambah sebesar 95,59 triliun rupiah, dengan pertumbuhan 5,34 persen pada tahun 2017. Komoditas utamanya adalah padi, jagung dan ubi kayu. Sulawesi Selatan menyandang predikat sebagai lumbung pangan nasional di Indonesia Timur. Daerah penyokongnya adalah Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar dan Maros. Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar pada tahun 2018 sebesar 50.13% mengalami penurunan dibanding tahun 2017.

**Tabel II.309**  
**Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	52,18	52,41	50,72	50,93	50.13

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.3.2.7. Subsektor Peternakan

##### 3.1.1.3.2.7.1. Kontribusi Subsektor Peternakan terhadap PDRB

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana jika dibandingkan dengan kontribusi sub sektor lain terhadap PDRB lebih kecil karena jumlah pelaku usaha peternakan yang jumlahnya kecil dibandingkan jumlah pelaku usaha tani. Dalam rangka meningkatkan jumlah produksi peternakan, maka dilakukan upaya peningkatan kelahiran ternak, peningkatan pemotongan dan pengeluaran ternak hidup baik sebagai bibit maupun sebagai ternak potong serta upaya peningkatan populasi ternak.

**Tabel II.310**  
**Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	%	1,13	1,11	1,08	1,11	1,09

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2018

##### 3.1.1.3.2.7.2. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Ternak Terhadap PDRB

Sumbangan sub sektor peternakan terhadap PDRB Sulsel yang bersumber dari kelompok ternak non komersial pada tahun 2017 sebesar 32% antara lain pada ternak besar untuk jenis sapi perah, kerbau dan kuda, sedangkan untuk kelompok ternak keil antara lain kambing dan babi, untuk ternak unggas yakni ayam buras dan itik. Sektor peternakan Sulawesi Selatan didominasi oleh sapi potong sebesar 43,70% dari seluruh ternak besar. Kabupaten Bone merupakan produsen terbesar untuk ternak sapi potong, dengan distribusi sebesar 29,59% dari keseluruhan sapi potong di Sulawesi Selatan pada tahun 2017. Sebagian peternak umumnya adalah peternakan rakyat. Sementara pada usaha peternakan

komersial antara lain ayam ras petelur dan ayam buras pedaging (broiler) umumnya tidak tergabung dalam kelompok tani ataupun koperasi tetapi berada dibawah korporasi.

**Tabel II.311**  
**Kontribusi Produksi Kelompok Petani Ternak Terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Produksi Kelompok Petani Ternak terhadap PDRB	%	31	30	33	34	32

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2018

### 3.1.1.3.2.7.3. Produktivitas Hasil Peternakan

Produktivitas ternak dapat diukur dengan kelahiran, pemotongan (produksi daging) dan pengeluaran (ekspor) untuk ternak potong, produksi susu untuk ternak perah dan produksi telur untuk unggas. Produksi daging berasal dari pemotongan ternak sapi, kerbau, ternak kecil an unggas. Sedangkan produksi telur dari ternak ayam petelur dan itik, serta produksi susu dari sapi perah. Selama 5 tahun terakhir terjadi pertumbuhan produksi daging, susu dan telur diatas 10%. Pembinaan yang konsisten dalam 5 tahun kedepan diharapkan dapat mempertahankan pertumbuhan produksi yang besar.

**Tabel II.312**  
**Produktivitas Hasil Peternakan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Jenis	Satuan	Produktivitas Hasil Peternakan					(%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
Daging	Kg	80.969.670	113.377.425	121.141.815	119.811.816	125.673.776	9,3
Telur	Kg	99.969.069	121.236.098	133.600.123	143.847.788	140.439.879	8,5
Susu	Kg	2.566.800	2.635.600	2.727.000	2.752.200	3.052.800	3,9

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tahun 2018

Pembangunan peternakan Provinsi Sulawesi Selatan mampu memberi peningkatan produktivitas ternak dalam 5 tahun terakhir, antara lain 9,3% daging, 8,5% telur dan 3,9 produksi susu. Peningkatan produksi daging didukung oleh pemetongan ternak sapi, kerbau dan dan unggas (ayam pedaging, ayam buras dan ayam petelur serta itik). Jumlah pemotongan ternak sapi tahun 2017 terbanyak adalah kota Makassar dengan jumlah 29.757 (RPH) dan 2.976 (DRPH) sedangkan untuk pemotongan kerbau terbanyak berada pada Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah 10.095 (RPH) dan 1.010 (DRPH), dan jumlah pemotongan kuda terbanyak di kabupaten Jeneponto dengan dan 4.534 (DRPH). Kasus penyakit hewan terbanyak adalah rabies, terutama di daerah Kabupaten Toraja Utara. Populasi ternak sapi potong terbanyak di Sulawesi Selatan adalah kabupaten Bone dengan jumlah 419.819 ekor. Sedangkan untuk sapi perah paling banyak di Kabupaten Enrekang dengan jumlah 1.530 ekor. Populasi kerbau di Sulawesi Selatan paling banyak di Tana Toraja dan jumlah domba terbanyak di Kabupaten Jeneponto. Ada 8 jenis unggas yang ada Sulawesi selatan dengan jumlah ayam pedaging yang paling banyak yaitu 51.115.768 ekor.

Pada tahun mendatang produksi daging, susu dan telur diperkirakan tumbuh sebesar 5% pertahun. Kelebihan produksi akan dijual keluar daerah sebagai daging ataupun ternak hidup sebagai bibit dan ternak sapi potong. Kelebihan produksi tersebut akan memberikan kontribusi pada peningkatan sumbangan PDRB. Berdasarkan hasil analisis perkembangan PDRB, diketahui bahwa pertumbuhan PDRB ADHK dari tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan nilai 3-7,8% atau rata-rata 5% per tahun. Pembinaan kelompok peternak berupa bantuan bibit, pakan, tanaman pakan ataupun bantuan lainnya sehingga produksi kelompok ternak meningkat. Pengawasan pembinaan keamanan pangan asal hewan dilakukan melalui pemeriksaan sampel pangan asal hewan yang beredar. Nilai tukar petani peternakan selama 5 tahun (2013-2017) mengalami peningkatan dari 97,36% pada

tahun 2013 menjadi 108,46% pada tahun 2017. Kondisi pada triwulan 2 tahun 2018 sudah mencapai 110,40% sehingga kesejahteraan peternak meningkat.

**Tabel II.313**  
**Populasi Sapi Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak (Ekor)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kepulauan Selayar	15.358	15.995	16.756	18.070	18.894
2	Bulukumba	62.203	65.451	68.345	70.662	73.177
3	Bantaeng	23.967	24.891	26.046	27.789	28.824
4	Jeneponto	25.490	27.817	29.925	30.955	32.246
5	Takalar	38.131	38.410	36.374	36.025	32.336
6	Gowa	102.399	104.257	111.399	107.573	109.605
7	Sinjai	84.572	92.537	97.805	101.860	105.806
8	Bone	307.437	325.425	362.821	395.310	419.819
9	Maros	69.945	72.869	76.381	80.540	83.902
10	Pangkajene Kepulauan	42.474	45.981	49.585	53.377	53.816
11	Barru	62.040	65.645	68.805	70.850	71.857
12	Soppeng	30.250	36.310	41.327	46.441	49.120
13	Wajo	76.943	89.858	100.913	111.968	116.518
14	Sidenreng Rappang	45.425	49.960	54.950	60.433	64.604
15	Pinrang	23.331	24.072	24.937	25.821	26.628
16	Enrekang	46.333	47.433	47.552	48.912	50.175
17	Luwu	18.755	18.133	17.886	18.870	18.065
18	Tana Toraja	6.611	6.659	6.714	6.961	7.006
19	Luwu Utara	23.131	24.852	26.456	27.963	29.361
20	Luwu Timur	14.145	13.740	14.010	15.021	15.546
21	Toraja Utara	278	352	450	422	493
22	Makassar	3.259	3.219	3.334	3.409	3.483
23	Pare-Pare	4.312	4.713	5.090	5.538	5.814
24	Palopo	2.943	3.022	3.096	3.415	3.619
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>1.129.732</b>	<b>1.201.601</b>	<b>1.290.957</b>	<b>1.368.194</b>	<b>1.420.714</b>

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

### 3.1.1.3.2.8. Subsektor Perkebunan

#### 3.1.1.3.2.8.1. Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB mengalami percepatan pada tahun 2014, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi PDRB atas harga yang berlaku mencapai 4,56 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4,28 persen. Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 4,45 persen dan 4,26.

**Tabel II.314**  
**Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	%	4,28	4,56	4,55	4,45	4,26

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.3.2.8.2. Kontribusi Produksi Kelompok Tani Perkebunan terhadap PDRB

Berdasarkan hasil analisis terlihat kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB mengalami peningkatan pada tahun 2016. Kenaikan ini bersumber dari dari jumlah produksi yang dihasilkan oleh kelompok tani perkebunan rakyat yang dibagi dengan jumlah produksi perkebunan rakyat ditambah dengan PBS dan PBN. Tahun 2017 mengalami penurunan yang disebabkan jumlah produksi yang menurun untuk beberapa komoditi unggulan.

**Tabel II.315**  
**Kontribusi Produksi Kelompok Tani Perkebunan terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Produksi Kelompok Tani Perkebunan terhadap PDRB	%	89,78	90,48	90,18	90,90	87,71

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.3.2.8.3. Produktivitas Hasil Perkebunan

Analisis data menunjukkan produktivitas hasil perkebunan selama 5 tahun terakhir (2013-2017) menunjukkan kenaikan di tahun 2015 dan 2016. Hal ini dipicu adanya kenaikan jumlah produksi pada beberapa komoditi perkebunan seperti : kopi, kakao, cengkeh, lada, tembakau, aren, dll. Terhadap adanya penurunan produktivitas yang terjadi pada tahun 2017, dapat dijelaskan bahwa penurunannya akibat jumlah produksi yang berkurang yang disebabkan adanya alih fungsi lahan dan komoditi.

**Tabel II.316**  
**Produktivitas Hasil Perkebunan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktivitas Hasil Perkebunan	%	57,80	57,78	60,80	66,32	63,70

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**Tabel II.317**  
**Produksi Kakao Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Kakao (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kepulauan Selayar	153	151	158	165	159
2	Bulukumba	5.188	4.882	4.985	5.802	4.596
3	Bantaeng	2.790	2.848	2.849	3.047	3.088
4	Jeneponto	10	11	50	34	33
5	Takalar	24	26	26	26	10
6	Gowa	2.100	2.138	1.342	1.458	1.350
7	Sinjai	1.647	1.605	1.646	2.495	3.023
8	Bone	15.980	16.412	17.474	18.079	12.234
9	Maros	671	715	351	586	586
10	Pangkajene Kepulauan	49	50	51	55	58
11	Barru	801	494	485	751	263
12	Soppeng	12.360	11.577	12.345	12.361	9.807
13	Wajo	10.040	11.170	11.290	11.180	10.904
14	Sidenreng Rappang	7.262	7.277	7.133	7.527	7.607
15	Pinrang	14.109	12.018	10.935	12.281	11.067
16	Enrekang	7.017	7.034	7.019	5.000	3.289
17	Luwu	27.941	27.159	27.000	28.989	24.262
18	Tana Toraja	1.184	1.295	1.364	1.392	966
19	Luwu Utara	21.201	21.236	22.296	27.391	26.275
20	Luwu Timur	14.180	11.896	11.908	12.250	12.862
21	Toraja Utara	1.435	1.434	812	812	822
22	Makassar	-	-	-	-	-
23	Pare-Pare	-	-	-	-	-
24	Palopo	2.814	1.809	1.554	1.240	828
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>148.956</b>	<b>143.237</b>	<b>143.073</b>	<b>152.921</b>	<b>134.089</b>

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018



### 3.1.1.3.3. Bidang Urusan Kehutanan

#### 3.1.1.3.3.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Dari tabel diatas rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2013 mencapai 21,98% pada tahun 2017 mencapai 48,48% atau penurunan lahan kritis dari tahun 2013 sampai 2017 sebesar 14,65%. Rata-rata penurunan lahan kritis per tahun mencapai 3,88%. Kondisi lahan kritis mencapai 525.885,28 Ha dan pada tahun 2017 mencapai 448.856,47 Ha. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan dari tahun 2013 hingga 2017 mencapai 101.984,39 Ha dengan rata-rata rehabilitasi hutan dan lahan pertahun mencapai 25,496 Ha, dimana tahun 2014 dilakukan penanaman seluas 30,912 Ha. Tahun 2015 seluas 31.917,41 Ha, tahun 2016 27.069 Ha, tahun 2017 seluas 12.085,98 Ha. Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan melalui keterlibatan multipihak mulai dari kementerian LHK, Provinsi, Kabupaten, BUMN/BUMS, dan mitra kehutanan. Bentuk keterlibatannya berupa penanaman pada hutan dan lahan kritis serta fasilitasi bibit tanaman hutan ke masyarakat.

Namun pada tahun 2017 fasilitasi bibit ini mengalami penurunan disebabkan karena adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah daerah kabupaten, serta adanya penghematan anggaran pada beberapa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang bersumber dari dana APBDN sehingga berdampak pada pengurangan jumlah bibit tanaman hutan. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis menjadi kegiatan rutin yang dilakukan Dinas Kehutanan sejak terbentuk, karena merupakan indikator utama dari Dinas Kehutanan. Sejak tahun 2013 proporsi rehabilitasi hutan dan lahan kritis semakin meningkat mulai dari 21,98% di tahun 2013 dan mencapai 48,48% di tahun 2017. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dilakukan bukan hanya menggunakan APBD tapi banyak pula mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan pihak swasta. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kawasan hutan menjadi faktor yang memberikan dampak positif terhadap capaian indeks rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

**Tabel II.318**  
**Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	Ha	115.628,91	146.540,91	178.458,32	205.527,32	217.613,30
Luas Total Hutan dan Lahan Kritis	Ha	525.885,28	502.537,45	478.430,23	457.985,01	448.856,47
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	21,98	29,16	37,30	44,87	48,48

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Kondisi kerusakan hutan dan lahan di Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 mengalami peningkatan kualitas melalui penanganan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, yakni dari luas total hutan dan lahan kritis sebanyak 525.885,28 Ha tahun 2013 menjadi 448.856,47 Ha tahun 2017. Penanganan kerusakan hutan dan lahan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Sulawesi Selatan dilakukan secara bersinergi antara Pemerintah, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor SK. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang penetapan lahan kritis nasional, luas lahan kritis di provinsi Sulawesi Selatan dengan kategori sangat kritis seluas 293.952 Ha dan lahan kritis dengan kategori kritis seluas 155.568 Ha.

### 3.1.1.3.3.2. Kerusakan Kawasan Hutan

Dari tabel dibawah, kerusakan Kawasan hutan pada tahun 2013 mencapai 0,01467% dan pada tahun 2017 mencapai 0,0092% atau rata-rata penurunan per tahun sebesar 38,12% kejadian kebakaran hutan pada tahun 2013 mencapai 399,76 Ha, tahun 2014 371 Ha, tahun 2015 seluas 327,85 ha, tahun 2016 seluas 49 ha, pada tahun 2017 seluas 25,18 ha. Kerusakan Kawasan hutan masih menjadi tantangan dalam pengelolaan hutan. Kerusakan Kawasan hutan diantaranya kejadian kebakaran hutan dan perambahan hutan. Kebakaran hutan masih terjadi di setiap tahun. Penyebabnya oleh faktor manusia untuk membuka lahan dengan cara membakar. Sedangkan perambahan hutan dengan cara menebang dan mengambil pohon. Kejadian kebakaran hutan tertinggi pada tahun 2013 hingga 2015, dimana tahun 2013-2015 merupakan tahun dengan cuaca paling panas, temperature yang cukup tinggi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang tinggi. Namun upaya pengendalian kebakaran hutan terus dilakukan diantaranya pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api), pemadaman api pada lokasi kebakaran hutan, koordinasi dengan manggala agni (brigade kebakaran hutan UPT.KLHK).

Kerusakan kawasan hutan dihitung dengan menggunakan indikator degradasi hutan akibat kebakaran hutan. Sejak tahun 2013 kerusakan kawasan hutan berada pada kisaran dibawah 1%. Hal ini menunjukkan kinerja perlindungan hutan yang baik. Namun demikian kerusakan hutan masih terjadi setiap tahun disebabkan oleh musim kemarau yang mengakibatkan hutan menjadi rentan terhadap kebakaran. Perilaku masyarakat dalam membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar lahan atau membuang puntung rokok pada saat memasuki hutan kerap memicu kejadian kebaran hutan. Namun demikian kejadian kebakaran hutan masih dapat diantisipasi dan dimitigasi dengan koordinasi antara pihak Dinas Kehutanan dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam serta bantuan masyarakat setempat.

**Tabel II.319**  
**Kerusakan Kawasan Hutan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	399,76	371,00	327,85	49,00	25,18
Luas Kawasan Hutan	Ha	2.725.796	2.725.796	2.725.796	2.725.796	2.725.796
Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,01467	0,01361	0,01203	0,00180	0,0092

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

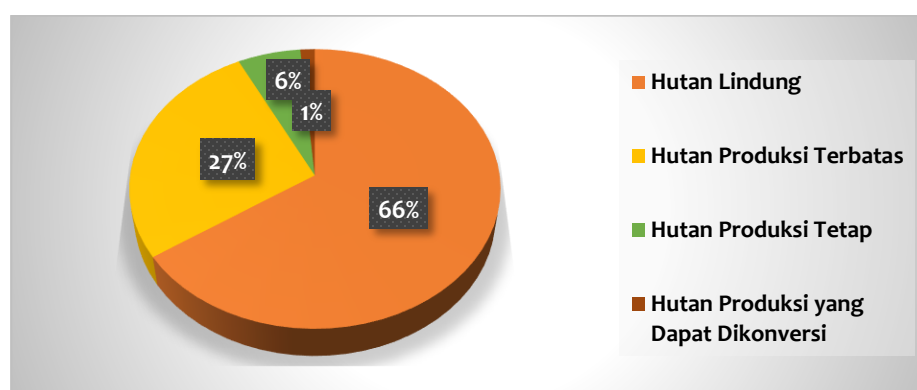
Luas kerusakan kawasan hutan selama kurun waktu 2013-2017 cenderung mengalami penurunan, yakni dari 399,76 ha atau sebesar 0,01467% tahun 2013 menurun menjadi 25,18 Ha atau sebesar 0,0092% pada tahun 2017. Penurunan luas kerusakan kawasan hutan di Sulawesi Selatan merupakan upaya yang saling bersinergi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta pelibatan masyarakat mengingat hutan merupakan salah satu sumber daya pembangunan Sulawesi Selatan.

### 3.1.1.3.3.3. Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan

Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 rasio luas Kawasan lindungan terhadap total luas Kawasan hutan sebesar 76,45%. Rasio ini merupakan luas Kawasan hutan lindung dan Kawasan pelestarian alam (hutan suaka alam, cagar alam) seluas 2.083.950 Ha. Kawasan hutan ini merupakan Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Luasan tersebut berdasarkan pada keputusan Menteri Kehutanan Nomo 434/Kemenhut-II/2009. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan dihitung dengan membagi luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan. Kawasan hutan di Sulawesi Selatan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 434/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan

Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 2.145.031 ha (daratan) dan 580.765 ha (perairan) dengan luas total 2.725.796 ha atau 59,56 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seluas 4.576.453 ha. Kawasan hutan tersebut terdiri dari hutan lindung seluas 1.232.683 ha, hutan produksi terbatas seluas 494.846 ha, hutan produksi seluas 124.024 ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 22.976 ha, hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam seluas 851.267 ha. Karena luas kawasan hutan dan luas kawasan lindung ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehutanan, maka rasio luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan adalah tetap selama keputusan penetapan kawasan hutan tidak berubah. Namun demikian pada kenyataannya terdapat banyak lokasi kawasan yang masih mendapat klaim kepemilikan oleh masyarakat sehingga terjadi konflik kepemilikan kawasan hutan.

**Grafik II.15**  
**Luas Areal Kawasan Hutan Sesuai Peruntukan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**



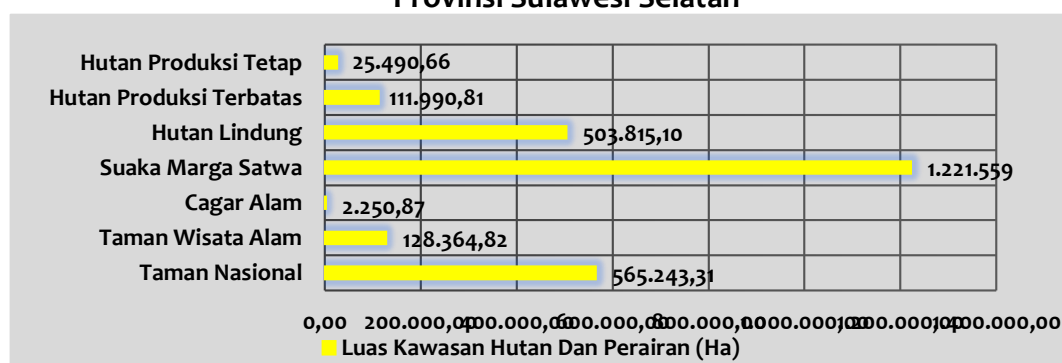
Sumber : Dinas Kehutanan, Tahun 2018 (Data Diolah)

**Tabel II.320**  
**Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Total Luas Kawasan Hutan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Luas Kawasan Lindung	Ha	2.083.950	2.083.950	2.083.950	2.083.950	2.083.950
Total Luas Kawasan Lindung	Ha	2.725.796	2.725.796	2.725.796	2.725.796	2.725.796
Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	%	76,45	76,45	76,45	76,45	76,45

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**Grafik II.16**  
**Luas Kawasan Hutan dan Perairan (Ha)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**



#### **3.1.1.3.3.4. Perhutanan Sosial**

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan salah satu konsep pengentasan kemiskinan melalui sektor kehutanan yang diharapkan dapat mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Realisasi capaian Program perhutanan sosial di Sulawesi Selatan sampai dengan Agustus 2018 seluas 49.148,78 Ha atau baru sekitar 16,62% dari luas indikatif perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan yaitu 285.870 Ha. Dengan capaian tersebut, diharapkan program perhutanan sosial di Sulawesi Selatan dapat lebih ditingkatkan karena berdasarkan data tenurial Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, jumlah penduduk yang bermukim dalam kawasan hutan mencapai 62.716 KK dengan indikatif luasan garapan mencapai 155.023,44 Ha. Data ini mengindikasikan bahwa tingkat interaksi masyarakat terhadap hutan cukup tinggi sehingga program perhutanan sosial diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.o/1/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Peta Indikatif Dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) revisi III, target program perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 403.162 Ha.

#### **3.1.1.3.4. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

##### **3.1.1.3.4.1. Rasio Desa Berlistrik**

Capaian rata-rata Rasio Desa Berlistrik yang diukur dari tahun 2013-2017 sebesar 73,92 %. Capaian Rasio Desa berlistrik di tahun 2013 sebesar 87,02 % didasarkan pada jumlah Desa pada tahun tersebut sebesar 2.751 Desa dan yang sudah berlistrik sebanyak 2.394 Desa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk peningkatan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2013 adalah Pembangunan PLTMH 2 Unit di Kec. Buntu pepesan Roroan Bara-Bara, Kab. Toraja Utara sebesar 50 Kw dan Desa Buntu Sarek, Kec. Lattimojong, Kab.Luwu sebesar 100 Kw. Selain pembangunan PLTMH juga dilakukan pembangunan PLTS Tersebar di Kab Pinrang Sebanyak 50 Unit dan di Kabupaten Bone sebanyak 200 Unit. Untuk Tahun 2014, rasio desa berlistrik meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 89,22 % dengan jumlah desa yang sudah teraliri listrik sebesar 2.697 dari 3.023 desa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk peningkatan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2014 adalah pembangunan PLTS Tersebar di Kab. Bone sebanyak 50 Unit dan Kabupaten Sinjai 10 Unit. Untuk Tahun 2015, rasio desa berlistrik meningkat sebesar 90,20 % dengan jumlah desa yang teraliri listrik sebesar 2.727 desa dari 3.023 desa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk peningkatan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2015 adalah Pembangunan PLTMH di Desa Leppangeng, Kec. Pituriase, Kab.Sidrap 1 Unit dan PLTS Tersebar di Kab. Luwu Timur 88 Unit dan Kab. Pangkep 32 Unit.

Pada Tahun 2016, rasio desa berlistrik meningkat sebesar 91,65% dengan jumlah desa yang teraliri listrik sebanyak 2.777 Desa dari 3.030 Jumlah desa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk peningkatan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2016 adalah Pembangunan PLTMH di Desa Ulsalu, Kec.Latimojong, Kab.Luwu 1 Unit kapasitas 30 Kw, di Desa Lembang, Kec. Suppirang, Kab. Pinrang 1 Unit kapasitas 70 Kw, di Desa Taloto, Kec. Seko Kab Luwu Utara 1 Unit kapasitas 40 Kw. Untuk pembangunan PLTS Tersebar dilakukan di Kab. Pinrang sebanyak 52 Unit dan di Kab. Bone sebanyak 100 Unit. Pembangunan PLTS Terpusat juga dilaksanakan di Pulau Balang Caddi, Kel. Mattiro Bintang, Kec. Liukang Tupabbiring, Kab. Pangkep dan di Pulau Manara Indah, Desa Mana Indah, Kec. Bontomatene, Kab. Selayar. Untuk Tahun 2017, rasio desa berlistrik meningkat sebesar 92,52% dengan jumlah desa yang teraliri listrik sebanyak 2.804 Desa dari 3.030 Jumlah desa.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk peningkatan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2017 adalah Pembangunan PLTMH 10 Unit yang dilaksanakan di (1) Desa Sali-Sali, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, (2) Desa Kanna Kec.



Bessesangtempe, Kab. Luwu , (3) Desa Suppirang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang (4) Desa Mesakda, Kec. Lembang, Kab. Pinrang (5) Desa Balepe, Kec. Malimbong Balepe, Kab. Tana Toraja (6) Desa Makkodo, Kec. Simbuang, Kab. Tana Toraja, (7) Desa Ilanbatu Uru Kec. Walenreng Barat, Kab. Luwu (8) Desa Kaladi Darussalam, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu (9) Desa Kanandede Kec. Rangong, Kab. Luwu Utara (10) Desa Beroppa, Kec. Seko, Kab. Luwu Utara. Pembangunan PLTS Terpusat juga dilaksanakan di (1) Pulau Sabangko, Kec. Liukang Tupabbiring Kab. Pangkep, (2) Pulau Pasi Kec. Bontoharu ab. Kep Selayar, (3) Pulau Kanalo II Desa Persatuan, Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian rasio desa berlistrik adalah sebagai berikut :

1. Capaian tiap tahun 4-10 Desa;
2. Kapasitas Pembangkit yang dipengaruhi oleh potensi local;
3. Sebaran potensi tenaga air tidak sama disemua daerah yang belum berlistrik.

**Tabel II.321**  
**Rasio Desa Berlistrik**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Desa Berlistrik	%	87,02	89,22	90,20	91,65	92,52

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.3.4.2. Jumlah Bio Energi yang Terbangun

Jumlah Bio Gas yang terbangun dalam kurun waktu 2013-2017 sebanyak 1.249 yang dilaksanakan di beberapa lokasi/daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan Bio Gas Skala Rumah Tangga yang dibangun pada tahun 2013 sebanyak 8 Unit yang dilaksanakan di Kab. Maros dengan jumlah pembangunan bio gas sebanyak 3 Unit, di Kab. Gowa sebanyak 2 Unit, dan di Kab. Sidrap sebanyak 3 Unit. Pada Tahun 2014 jumlah pembangunan Bio Gas meningkat sebanyak 200 Unit yang dilaksanakan di Kab. Pangkep sebanyak 33 Unit, Kab. Sinjai 34 Unit, Kab. Maros 33 Unit, Kab. Bulukumba 33 Unit, Kab. Wajo 34 unit, Kab. Sidrap 33 Unit. Pada Tahun 2015 jumlah pembangunan bio gas meningkat menjadi 342 Unit yang dilaksanakan di Luwu Utara sebanyak 30 Unit, Kab. Soppeng sebanyak 30 Unit, Kab. Sinjai sebanyak 30 Unit, Kab. Maros sebanyak 30 Unit, Kab. Takalr sebanyak 30 Unit, Kab. Luwu Timur sebanya 30 Unit, Kota Parepare sebanyak 30 Unit, Kota Palopo sebanyak 30 Unit, Kab. Kep. Selayar sebanyak 30 Unit.

Tahun 2016 jumlah pembangunan Bio Gas meningkat menjadi 404 Unit yang di laksanakan di Toraja Utara 13 Unit, Kab. Pinrang 28 Unit, Kab. Pangkep 28 Unit, Kab. Luwu Utara 28 Unit, Kab. Enrekang, 13 Unit, Kab. Soppeng 28 Unit, Kab. Sinjai 28 Unit, Kab. Maros 28 Unit, Kab. Bulukumba 28 Unit, Kab. Barru 28 Unit, Kab. Bantaeng 28 Unit, Kab. Bone 10 Unit, Kab. Wajo 28 Unit, Kab. Luwu Timur 28 Unit, Kab. Tana Toraja 14 Unit, Kab. Jeneponto 14 Unit, Kota Parepare 17 Unit, Kab. Gowa 15 Unit. Untuk tahun 2017 terjadi penurunan pembangunan Bio Gas dari tahun 2016 dengan jumlah bio gas yang dibangun sebanyak 367 Unit. Pembangunan pada tahun 2017 dilaksanakan di Kab. Pinrang 170 Unit, Kab. Luwu Utara 18 Unit, Kab. Sinjai 130 Unit, Kab. Maros 20 Unit, Kab. Bulukumba 19 Unit, Kab. Bone 10 Unit, Kab. Wajo 10 Unit, Kab. Jeneponto 10 Unit.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bio energi adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya permohonan bio gas yang belum dapat diakomodir;
2. Proses hibah bio gas yang rumit dan panjang (Permendagri 32 Tahun 2011) kapasitas digester yang relatif masih kecil.



**Tabel II.322**  
**Jumlah Rasio Energi Terbangun**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Bio Energi yang Terbangun	Unit	8	200	342	404	367

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.3.4.3. Cadangan Sumberdaya

Cadangan sumberdaya yang diukur dalam kurun waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2013-2017 adalah 1.931.426.384 Ton dan luas wilayah pemataan 47.457 Ha. Hasil penyelidikan dan Eksplorasi bahan galian pada tahun 2013 dilakukan di 5 Kabupaten, antara lain : 1) Kabupaten Jeneponto dengan jenis komoditi Logam Emas, Luas Daerah Penyelidikan 745 Ha dan Kadar Au : 2,85 ppm; Cu : 93,24 ppm. 2) Kabupaten Pinrang dengan jenis komoditi Non Logam Pasir Silika, Luas Daerah Potensi 660 Ha dengan kadar SiO<sub>2</sub> : 94 % didapatkan cadangan sumber daya terunjuk sebanyak 16.000.000 Ton. 3) Kabupaten Bone dengan jenis komoditas Batubara, Luas Daerah Penyelidikan 216 Ha dengan nilai Kalor : 3975 - 5.042 kal/gr didapatkan cadangan sumber daya tereka 2.800.000 Ton. 4) Kabupaten Bone dengan jenis Komoditas Batuan Marmer/Metagamping, Luas Daerah Potensi 7.890 Ha dengan Kualitas Kuat Tekan : 240 - 700 kg/cm<sup>2</sup> didapatkan cadangan sumber daya terunjuk sebanyak 220.920.000 Ha. 5) Kabupaten Jeneponto dengan jenis komoditi Non Logam Feldspar, Luas Daerah 3.992 Ha dengan kualitas SiO<sub>2</sub> = 63,75 %, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 15,97 % didapatkan cadangan sumber daya tereka 297.500.000 Ton.

Hasil penyelidikan dan Eksplorasi bahan galian pada tahun 2014 dilakukan di 4 Kabupaten antara lain : 1) Kabupaten Pinrang dengan jenis komoditi Logam Galena (Timah Hitam) Luas Daerah Penyelidikan 67 Ha didapatkan cadangan sumber daya Hipotetik sebanyak 337.680.000 Ton. 2) Kabupaten Barru dengan jenis komoditi Non Logam Leusit, Luas Daerah 100 Ha dengan kadar CaO > 50 % didapatkan cadangan sumber daya terukur 1.150.000 Ton. 3) Kabupaten Luwu dengan jenis komoditi Logam Biji Besi dan Emas didapatkan kualitas Kadar Fe Total : 38,9 %; Kadar Au : 1,50 ppm. 4) Kabupaten Enrekang dengan jenis komoditi Logam Base Metal (Cu,Pb,Zn), Kualitas Pb : 243 ppm; Cu : 74 ppm; Zn 125,79 ppm

Hasil Penyelidikan dan Eksplorasi bahan galian pada tahun 2015 dilakukan di : 1) Gowa dan Jeneponto dengan jenis Logam Base Metal (Cu,Pb,Zn), luas daerah penyelidikan 3.117 Ha didapatkan kualitas Cu 318 ppm, Pb 84 , Zn 118,2, Au 0,4. 2) Kabupaten Barru dan Pangkep dengan jenis komoditi Logam Kromit, Luas daerah penyelidikan 900 Ha dengan kadar Cr : 3 - 42,3 % didapatkan cadangan sumber daya terukur 21.602.650 Ton. 3) Kabupaten Pinrang dengan jenis komoditas batuan Marmer/Metagamping, luas daerah penyelidikan 99 Ha dengan kualitas kuat tekan kuat tekan 143,2 kg/cm<sup>2</sup> didapatkan cadangan terunjuk 14.850.000 Ton. 4) Kabupaten Pinrang dengan jenis komoditas Batuan Batu Gamping, Luas daerah penyelidikan 456 Ha dengan kualitas kuat tekan 104,3 kg/cm<sup>2</sup> didapatkan cadangan sumber daya terunjuk 22. 835.000 Ton. 5) Kabupaten Gowa dengan jenis komoditas Batuan Mineral Lempung, luas daerah penyelidikan 10.000 Ha didapatkan kualitas SiO<sub>2</sub> = 78,3 %, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 8,8 % dan cadangan sumber daya terunjuk 300.000.000 Ton. 6) Kabupaten Gowa dengan jenis komoditas Batuan Bentonit , Luas wilayah penyelidikan 1.100 Ha dengan kualitas SiO<sub>2</sub> : 78 % Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 4,25% didapatkan jumlah cadangan terunjuk 26.812.500 Ton.

Hasil Penyelidikan dan Eksplorasi bahan galian pada tahun 2016 dilakukan di : 1) Kabupaten Soppeng dengan komoditas batuan leusit, luas daerah penyelidikan 62 Ha didapatkan kualitas K<sub>2</sub>O : 3,71-4,68% dan jumlah cadangan sumber daya tereka 5.617.996 Ton. 2) Kabupaten Sinjai dengan komoditas Logam Pb, Cu, Zn, luas daerah penyelidikan 132

Ha dengan kualitas Pb : 92,Cu:38,7,Zn: 28,9 ppm. 3) Kabupaten Pinrang dengan komoditas tambang Batuan Mika, Luas daerah penyelidikan 851 Ha dengan kualitas Mika 35% dlm trakit, jumlah cadangan sumber daya terukur 567 Ton. 4) Kabupaten Sinjai dengan komoditas batuan leusit, luas wilayah pemetaan 419 Ha dengan kualitas K<sub>2</sub>O: 1,68-2,46%, jumlah cadangan tereka sebanyak 72.909.871 Ton. 5) Kabupaten Bulukumba dengan komoditas tambang Batuan Tras, luas daerah pemetaan 780 Ha dengan kualitas SiO<sub>2</sub> : 91,9-92,17%, jumlah cadangan sumber daya yang hipotetik 7.800 Ton. 6) Kabupaten Bone dengan komoditas batuan Batu Gamping, luas wilayah pemetaan 7.000 Ha dengan kualitas CaO : 48,3-51,8%, jumlah cadangan sumber daya hipotetik 233.240.000 Ton.

Pada tahun 2017, Survey tinjau batu gamping dolomitan dilakukan di Kecamatan Ulaweng dan Kecamatan Tellu Siattinge seluas 6.500 hektar dan dihasilkan sumberdaya hipotetik sebesar 406.250.000 ton. Adapun kegiatan eksplorasi dilakukan di Desa Lanca dan Desa Lappae, Kecamatan Tellu Siattinge dan dihasilkan sumberdaya terkira sebesar 10.360.557 ton terdiri dari 4.726.273 ton pada Blok Lanca dan 5.634.284 ton pada Blok Lappae. 3) Pemetaan dan Penyelidikan Zona Konservasi Air Tanah. 4) Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Air Tanah di Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kota Parepare, dan Kota Makassar. 5) Dokumentary dan Informasi Geologi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pengambilan contoh batuan pada formasi batuan yang menyusun di Kabupaten Gowa dan Takalar. 6) Pembinaan Pengelolaan Air Tanah yang dilaksanakan di Kabupaten Sinjai, Luwu Timur, Makassar, dan Parepare lebih difokuskan kepada pemakai air tanah atau pengguna air tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha atau kegiatan komersil.

**Tabel II.323**  
**Cadangan Sumberdaya**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cadangan Sumber Daya	Ton	537,220,000	338,830.000	386,100,150	311,776,234	357,500,000
Luas Wilayah Pemetaan	Ha	13,503	2,538	15,672	9,244	6,500

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.3.4.4. Jumlah Pembangunan Sumur Bor

Pembangun sumur bor merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sebagai upaya pemanfaatan air tanah. Pembangunan sumur bor diharapkan menjadi sarana bagi penyediaan air bersih bagi masyarakat khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau air bersih.

**Tabel II.324**  
**Jumlah Pembangunan Sumur Bor**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pembangunan Sumur Bor	Unit	19	13	7	13	16

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2018

#### 3.1.1.3.4.5. Jumlah Produksi Mineral dan Batubara

Wilayah Sulawesi Selatan memiliki potensi tambang yang cukup besar, salah satu hasil tambang di Sulawesi Selatan adalah nikel. Berdasarkan data pada tabel dibawah menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2013-2017 produksi tambang yang terbesar berasal dari jenis non logam dan terkecil dari jenis batubara. Peningkatan produksi tambang jenis non logam mengalami peningkatan yang signifikan dari 6.945.692 ton di tahun 2013 menjadi 16.894.928 ton tahun 2017.

**Tabel II.325**  
**Jumlah Produksi Mineral dan Batubara**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Jenis	Satuan	Jumlah Produksi Mineral dan Batubara				
		2013	2014	2015	2016	2017
Logam	Ton	93.088	68.906	87.901	77.581	79.837
Non Logam	Ton	6.945.692	6,338.038	10.245.160	11.082.066	16.894.928
Batuan	M <sup>3</sup>	17.855.266	6.962.019	7.347.647	1.212.249	8.481.874
Batubara	Ton	22.452	1.748	12.472	10.226	10.070

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2018

### 3.1.1.3.5. Bidang Urusan Perdagangan

#### 3.1.1.3.5.1. Ekspor Bersih Perdagangan

Dari data Ekspor Bersih Perdagangan pada tahun 2013 sampai dengan 2017 diatas, dapat terlihat bahwa Nilai Ekspor Bersih Perdagangan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Untuk Tahun 2014 hingga Tahun 2017 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Surplus) Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan yang sangat cukup drastis bila dibandingkan di Tahun 2016. Fluktuasi ini disebabkan karena telah terjadinya perekonomian yang buruk sehingga mengalami inflasi dan banyaknya jumlah uang beredar sehingga menyebabkan harga di pasaran meningkat dan pemerintah lebih memilih impor, selain itu produk tambang (Nikel) yang selama ini berkontribusi besar terhadap Nilai Ekspor mengalami penurunan harga yang berdampak pada menurunnya Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Surplus). Tahun 2017 Produk yang diimpor didominasi oleh produk Bahan Bakar Mineral sebesar 228,71 Juta US\$ atau 21,92 %, Gandum- Ganduman sebesar 144,24 Juta US\$ atau 13,8 %, Mesin-Mesin/Pesawat Mekanik sebesar 132,43 Juta US\$ atau 12,69 % dan Mesin/Peralatan Listrik sebesar 130,02 Juta US\$ atau 11,45%.

Impor pada tahun 2017 ini lebih besar dibandingkan tahun 2016, hal ini karena akan banyak realisasi dari kesepakatan investasi kurun 2016-2017 seperti pembangunan pabrik (mesin, bahan baku, bahan penolong dan lain-lain) yang masih berjalan hingga tahun depan. Implementasi dari investasi tersebut akan membuat tekanan yang cukup tinggi terhadap impor sehingga mau tidak mau harus dilakukan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus bersiap akan hal tersebut karena ini masih menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya. Dengan masuknya banyak investor ini akan membuat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan semakin kuat. Sehingga nanti pada tahun 2018, yang sekarang investasi, membangun pabrik dan lain-lain, akan mulai produksi dan sebagian ada yang melakukan ekspor. Kita bisa bayangkan, dengan pemulihan ekonomi, maka pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan akan sangat mungkin jauh lebih besar dari sekarang.

**Tabel II.326**  
**Ekspor Bersih Perdagangan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ekspor Bersih Perdagangan	Juta US\$	811.243.792	415.988.894	310.889.806	57.950.717	169.800.426

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.3.5.2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/usaha Informal

Sektor informal sering dipandang sebagai sektor transisi bagi tenaga kerja dari sektor pertanian di desa ke sektor industri di kota. Fenomena munculnya sektor informal hanyalah bersifat temporer. Akibat keterampilan yang terbatas, para pencari kerja dari desa, pada awal kepindahannya untuk sementara berusaha dan bekerja di sektor informal. Setelah mapan dan berpengalaman mereka akan mengalihkan usahanya ke sektor formal. Di sinilah terjadi proses formalisasi sektor informal, dimana terjadi peralihan status usaha yang tadi

nya informal menjadi formal, dan berpindahnya pekerja yang tadinya bekerja di sektor informal ke sektor formal. Namun pada kenyataannya seringkali proses ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Yang terjadi adalah “Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan” usaha di sektor informal khususnya industri kecil dan industri rumah tangga semakin menjamur. Demikian juga dengan jumlah pekerjanya.

Tenaga kerja dari desa sebagian besar bukan diserap oleh sektor industri (yang formal) tetapi oleh sektor jasa (terutama yang informal). Hal tersebut menandakan bahwa usaha yang tadinya berstatus informal tidak berubah menjadi formal. Demikian juga pekerja yang berada di sektor informal tetap berada di sektor tersebut. Dengan kata lain, sektor informal bukan menjadi sektor transisi, tetapi justru menjadi sektor yang dituju oleh pencari kerja dari sektor tradisional (pertanian). Selain itu juga menjadi sektor yang dituju oleh pencari kerja pertama yang tidak tertampung di sektor formal maupun pekerja sektor formal yang tidak memperoleh penghasilan yang cukup, sehingga secara sambilan ataupun serius merangkap berusaha dan bekerja di sektor informal. Sehingga dari data diatas terlihat labil dari tahun ke tahun. Untuk itu, kedepannya Dinas Perdagangan berusaha agar para pelaku usaha lebih intens dalam memahami data dan informasi tentang karakteristik sektor informal, seperti historis usaha mereka, motivasi Memasuki sektor ini, dari mana mereka berasal, latar belakang pendidikan dan pengalaman, dan lain sebagainya.

**Tabel II.327**  
**Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0,93	0,92	0,94	0,74	0.83

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.3.6. Bidang Urusan Perindustrian

#### 3.1.1.3.6.1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Belum adanya data spesifik yang menghitung jumlah cakupan kelompok pengrajin. Sedangkan data di dalam tabel didapatkan berdasarkan hasil perhitungan jumlah industri kerajinan yang bersumber dari data industri. Masih kurangnya pelatihan peningkatan kualitas di bidang industri kerajinan.

**Tabel II.328**  
**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	881	978	1.065	1.121	1.134

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**Tabel II.329**  
**Pertumbuhan Industri Pengolahan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Persentase pertumbuhan industri pengolahan	%	13,66	13,69	13,92	14,51	15.02

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018



**Tabel II.330**  
**Pertumbuhan Industri Kecil, Menengah, Besar, dan UMKM**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Perkembangan Industri Pengolahan	%	13,66	13,69	13,92	14,51	15,02
Industri Besar	Unit	333	338	341	348	350
Industri Kecil	Unit	12.140	12.166	12.370	12.894	13.347
Industri Menengah	Unit	668	670	681	710	734
Usaha Kecil Menengah	Unit	37.888	37.967	38.917	40.561	41.932

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

**Tabel II.331**  
**Tenaga Kerja yang Terserap Sektor Industri**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Tenaga Kerja yang terserap Sektor Industri	210.447	210.909	215.726	24.815	256.872

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

### 3.1.1.3.7. Bidang Urusan Transmigrasi

#### 3.1.1.3.7.1. Persentase Transmigrasi Swakarsa

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase Pembinaan Transmigrasi pada tahun 2013 sebesar 90,77%, dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 2,93% menjad 93,70%, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4,98% menjadi 88,72%, pada tahun 2016 turun lagi sebesar 3,05% menjadi 75,67% dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,19% menjadi 75,86%. Fluktuasi terhadap persentase pembinaan transmigrasi adalah adanya beberapa KK transmigran yang ditempatkan meninggalkan lokasi karena ketidaksesuaian terhadap pola transmigrasi di lokasi yang bersangkutan, dimana pada proses seleksi calon transmigran didaerah asal tidak menyampaikan dan menggambarkan secara detail tentang lokasi transmigran yang akan ditempati sehingga pengiriman transmigran tidak sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan dilokasi.

**Tabel II.332**  
**Persentase Transmigrasi Swakarsa**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase transmigrasi swakarsa	%	90,77	93,70	88,72	75,67	75,86

Sumber : sipd.kemendagri.co.id

### 3.1.1.3.8. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

#### 3.1.1.3.8.1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan adalah perbandingan jumlah produksi ikan dengan target daerah. Sebagai daerah maritim, produksi perikanan Sulawesi Selatan dapat dikatakan cukup tinggi. Sulawesi Selatan merupakan produsen perikanan terbesar di Indonesia. Ada 15 kabupaten/Kota yang merupakan daerah produsen ikan di Sulawesi Selatan. Kabupaten Takalar menjadi penyumbang terbesar produksi ikan Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 33,41%. Produksi Perikanan Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 10,3%. Produksi Perikanan pada tahun 2013 hanya sebesar 2.884.006,7 ton meningkat sebesar 4.262.554,7 ton. Kenaikan produksi perikanan ini didukung dengan produksi perikanan budidaya yang juga mengalami kenaikan sebesar 10,9% dan perikanan tangkap sebesar 5,3%. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpu



pada potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal seperti Rumput Laut, Udang, Bandeng.

**Tabel II.333**  
**Produksi Perikanan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Produksi Ikan	Ton	3.377.689,6	3.786.837,2	3.941.648,8	4.262.553,5	3.895.086,6
Target Daerah	Ton	3.146.106,0	3.349.134,6	3.517.298,7	4.145.760,6	4.906.672,7
Produksi Perikanan	%	107,4	113,1	112,1	102,8	79,4

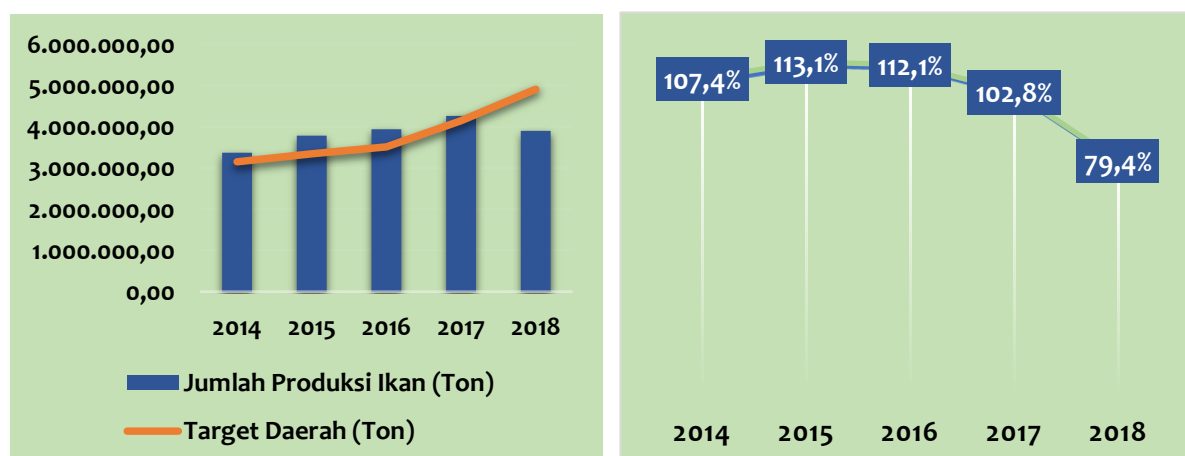
Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Produksi perikanan Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana produksi perikanan pada tahun 2014 sebesar 3.377.689,6 ton meningkat sebesar 3.786.847,2 ton pada tahun 2015, selanjutnya pada tahun 2016 meningkat menjadi 3.941.648,8 ton, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 4.262.553,5 ton, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3,895,086.6 ton atau turun 91,38 %. penurunan ini disebabkan daya dukung lahan yang mulai menurun serta pergeseran penggunaan lahan budidaya.

Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain mulai tahun 2014 - 2018 telah dilakukan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, bantuan bibit, akses permodalan dan perluasan jejaring serta kemitraan, diseminasi inovasi teknologi budidaya kepada pembudidaya sebagai upaya adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang tidak mendukung, meningkatkan pembinaan kepada petani untuk menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), serta melakukan penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

Dari grafik dibawah ini, perkembangan produksi perikanan dari tahun 2014 hingga 2017 mengalami trend positif dengan laju pertumbuhan produksi sebesar 4,87%, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun 2017 mencapai -8,62 %. penurunan ini disebabkan daya dukung lahan yang mulai menurun serta pergeseran penggunaan lahan budidaya.

**Grafik II.17**  
**Produksi Perikanan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018 (Data Diolah)

Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain mulai tahun 2014-2018 telah dilakukan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, bantuan bibit, akses permodalan dan perluasan jejaring serta kemitraan. Kenaikan produksi perikanan didukung pada nilai produksi, dimana kontribusi produksi dari sektor perikanan budidaya sebesar 10,8% dan perikanan tangkap sebesar 7,4%. Kenaikan nilai produksi

perikanan sangat dipengaruhi oleh nilai produksi rumput laut, dimana kontribusi produksi nilai rumput laut terhadap nilai produksi perikanan budidaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2013 kontribusinya sebesar 43,6%, tahun 2014 sebesar 44,3%, tahun 2015 sebesar 48,9%, tahun 2016 sebesar 42,7% dan tahun 2017 sebesar 46,7%. Pada tahun 2018 kabupaten penghasil rumput laut di Sulawesi Selatan antara lain Kabupaten Luwu sebesar 598.037 ton, Kabupaten Takalar sebesar 538.684 ton. Kabupaten Wajo sebesar 462.475 ton, dan kabupaten pangkep 314.201 ton.

**Tabel II.334**  
**Produksi Rumput Laut Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Rumput Laut (Ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kepulauan Selayar	7.656	285	170	334	366
2	Bulukumba	128.360	157.920	158.440	168.717	178.848
3	Bantaeng	86.478	85.349	82.628	83.455	84.077
4	Jeneponto	120.979	138.081	149.885	150.510	193.518
5	Takalar	733.972	846.395	923.832	996.550	538.684
6	Gowa	-	-	-	-	-
7	Sinjai	12.112	7.680	12.220	40.208	40.776
8	Bone	125.020	126.128	128.204	247.178	275.627
9	Maros	8	-	-	125	13.241
10	Pangkajene Kepulauan	148.652	179.603	202.552	280.976	314.201
11	Barru	798	788	892	936	959
12	Soppeng	-	-	-	-	-
13	Wajo	138.504	263.159	237.900	462.479	462.475
14	Sidenreng Rappang	-	-	-	-	-
15	Pinrang	3.582	6.754	9.027	11.056	15.449
16	Enrekang	-	-	-	-	-
17	Luwu	356.386	392.024	244.946	622.251	598.037
18	Tana Toraja	-	-	-	-	-
19	Luwu Utara	33.156	31.422	33.931	190.255	196.989
20	Luwu Timur	133.107	141.789	145.099	294.406	294.897
21	Toraja Utara	-	-	-	-	-
22	Makassar	-	-	-	-	-
23	Pare-Pare	-	28	-	-	-
24	Palopo	31.123	31.589	27.519	113.536	109.386
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>2.059.892</b>	<b>2.409.022</b>	<b>2.357.245</b>	<b>3.662.971</b>	<b>3.317.525</b>

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Sulawesi Selatan merupakan penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Selain rumput laut, Sulawesi Selatan juga dikenal sebagai penghasil udang terutama jenis udang Vannamei dan udang windu. Selama 5 tahun terakhir kenaikan produksi udang di Sulawesi Selatan sebesar 7,9 %. Pada tahun 2018 Kabupaten penghasil udang di Sulawesi Selatan antara lain kabupaten Pinrang sebesar 11.100,0 Ton, Kabupaten Bulukumba sebesar 5.302,7 ton, Kabupaten Bone sebesar 4.900,1 ton, Kabupaten Barru sebesar 4.188,4 ton, Kabupaten Luwu sebesar 3.882,3 ton, kabupaten Maros sebesar 3.484,1 ton, Kabupaten Pangkep sebesar 3.851,0 ton. Selain itu, Bandeng merupakan salah satu komoditi unggulan sector perikanan budidaya, dimana kenaikan rata-rata selama 5 tahun terakhir sebesar 9,6 %. Pada tahun 2018 Kabupaten penghasil Bandeng di Sulawesi Selatan antara lain kabupaten Bone sebesar 74.279,7 Ton, Kabupaten Wajo sebesar 22.050,0 ton, Kabupaten Pinrang sebesar 20.227,4 Ton, kabupaten Pangkep sebesar 14.230,0 ton, kabupaten Luwu Timur sebesar 10.563,0 Ton.

Komoditas tuna dan Cakalang adalah komoditas yang berbasis pada usaha penangkapan sehingga produksi komoditas ini sepenuhnya tergantung pada tingkat upaya (effort) yang dilakukan oleh nelayan dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penangkapan ikan. Melalui kebijakan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan serta peningkatan mutu hasil tangkapan, komoditas Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC), capaian produksi dapat dioptimalkan memberikan kontribusi nilai yang lebih baik dengan peningkatan jumlah produksi yang memiliki grade lebih tinggi pada pasar ekspor maupun lokal. Dari sisi produksi, capaian hasil komoditas Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC) telah terjadi kenaikan rata-rata selama 5 tahun sebesar 2,3 %.

**Tabel II.335**  
**Produksi Udang Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Udang (Ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kepulauan Selayar	1.673,1	261,3	189	74,4	75,3
2	Bulukumba	3.753,3	2.951,5	3.287,9	3.990,3	5.302,7
3	Bantaeng	32,6	32,5	38,3	34,9	39,9
4	Jeneponto	577,7	610,8	586,7	684,2	1.206,3
5	Takalar	5.113,8	4.538,7	4.805	4.516	1.908,4
6	Gowa	59,6	51,4	67,2	67,5	71,6
7	Sinjai	132,9	117,7	169,4	160,2	177,6
8	Bone	3.964,2	4.189,4	3.840,5	4.885,9	4.900,1
9	Maros	3.117,7	3.485,2	2.911,5	3.122,6	3.484,1
10	Pangkajene Kepulauan	2.046,3	2.546	2.850	3.463	3.851,0
11	Barru	3.851	3.209,4	3.430,8	3.810	4.188,4
12	Soppeng	-	-	-	-	-
13	Wajo	2.374,4	2.086,8	1.849,1	1.956,1	1.502,5
14	Sidenreng Rappang	-	-	-	-	-
15	Pinrang	8.175,5	7.479,5	7.467,2	9.935,7	11.100,0
16	Enrekang	-	-	-	-	-
17	Luwu	2.990,6	3.585,9	3.812,7	3.847,4	3.882,3
18	Tana Toraja	-	-	-	-	-
19	Luwu Utara	1.491,2	1.367,8	1.317,4	1.331,1	1.298,1
20	Luwu Timur	4.040,8	3.397,8	4.510,4	2.897	2.951,0
21	Toraja Utara	-	-	-	-	-
22	Makassar	191	248,1	302,9	300,3	331,1
23	Pare-Pare	113,8	16,9	10,2	15,7	13,1
24	Palopo	165,5	170	239,7	249,2	240,5
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>43.865</b>	<b>40.346,7</b>	<b>41.685,9</b>	<b>45.342</b>	<b>46.524,0</b>

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

### 3.1.1.3.8.2. Konsumsi Ikan

Persentase konsumsi ikan diperoleh dari jumlah konsumsi ikan dibanding target daerah. Persentase konsumsi ikan pada tahun 2014 mengalami peningkatan hingga tahun 2018. Hal ini dimungkinkan karena Sulawesi Selatan memiliki masyarakat yang mengkonsumsi ikan cukup tinggi dan memiliki budaya makan ikan yang tinggi serta pencapaian dari perikanan tangkap dan budidaya yang cukup mendukung. Selain faktor budaya, pencapaian konsumsi ikan ini tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan berupa keikutsertaan pada pameran produk perikanan, penyebarluasan informasi melalui promosi dan pameran, lomba masak serba ikan, dan pengembangan sarana dan prasarana hasil perikanan.

Dalam periode 2014-2018 telah terjadi peningkatan konsumsi ikan dengan capaian rata-rata 4,5% pertahun, dimana pada tahun 2014 sebesar 46,8 kg/kap, meningkat menjadi 49,7 kg/kap pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 52,5 kg/kap pada tahun 2016, selanjutnya pada tahun 2017 meningkat menjadi 55,2 kg/kap, dan di tahun 2018 peningkatan

mencapai 55,9 kg/kap. Sedangkan pencapaian konsumsi ikan nasional pada tahun 2018 telah mencapai 50,69 kg/kap (Data Susenas) dan KKP menargetkan pencapaian konsumsi ikan untuk tahun 2019 sebesar 54,49 kg/kap .

Hal ini menggambarkan bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia dan cukup baik yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya. Selain itu, peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Sulawesi Selatan tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan.

**Tabel II.336**  
**Konsumsi Ikan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Konsumsi Ikan	Kg	46,8	49,7	52,5	55,2	55,9
Target Daerah	Kg	44,7	45,2	45,6	46,6	46,5
Konsumsi Ikan	%	104,7	110,0	115,1	119,7	120,2

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.3.8.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan selama 5 tahun terakhir sekitar 469 kelompok dengan jenis bantuan sarana dan prasarana alat tangkap sesuai permohonan proposal yang diajukan oleh kelompok. Tahun 2014 hanya 59 kelompok yang mendapatkan bantuan sedangkan tahun yang paling banyak mendapatkan bantuan pemerintah daerah adalah tahun 2016 yaitu sebesar 193 kelompok. Kemudian di tahun 2018 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sebanyak 50 kelompok. Cakupan bina kelompok nelayan diarahkan untuk kontribusi terhadap ketahanan pangan.

**Tabel II.337**  
**Cakupan Bina Kelompok Nelayan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan Pemda Tahun n	Klp	59	89	193	78	50
Jumlah Kelompok Nelayan	Klp	168	295	333	358	308
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	35,12	30,17	57,96	21,79	16,23

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.3.8.4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap pemerintah provinsi telah memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok nelayan. Produksi kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dimana produksi kelompok nelayan pada tahun 2014 sebesar 101.109,43 ton, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar 89.073,67 ton, kemudian pada Tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar 172.376,69 ton, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 72.016,39 ton, dan pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi sebesar 173.412,00 ton. Produksi kontribusi hasil kelompok nelayan didapatkan berdasarkan data kelompok yang menerima bantuan pemerintah provinsi berdasarkan usulan yang diajukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah kab/kota dan pemangku kepentingan.

**Tabel II.338**  
**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	Ton	106.129,73	93.614	181.055,91	78.393,90	173.412,00
Jumlah Produksi Ikan di Daerah	Ton	302.191, 7	310.290,4	312.380,8	359.770,1	363.853,0
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	33,46	28,71	55,18	20,02	47,66

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.3.8.5. Proporsi Tangkapan Ikan

Dari tahun 2014 sampai dengan saat ini, proporsi tangkapan ikan di Sulawesi Selatan berada dalam batasan biologis yang aman. Dalam kerangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional, proporsi tangkapan ikan harus dipertahankan untuk berada dalam batasan biologis yang aman. Tahun 2014, proporsi tangkapan ikan sebesar 40,6% dan sampai tahun 2018 mencapai 48,92%. Walaupun proporsi tersebut mengalami kenaikan, namun masih dapat dikendalikan untuk tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC). Potensi lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) sumber daya perikanan tangkap tahun 2011 untuk nasional diperkirakan 6,4 juta ton per tahun dan untuk provinsi Sulawesi Selatan dengan potensi 929,7 ribu ton per tahun, sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (Total Allowable Catch/jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB) adalah 80 persen dari MSY atau sebesar 5,12 juta ton untuk nasional dan untuk provinsi sebesar 743.800 ton. Jumlah total hasil tangkapan ikan dari laut adalah penjumlahan dari produksi ikan dari seluruh kabupaten/kota. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari jumlah tangkapan lestari (maksimum sustainable yield – MSY). Data MSY ini diperoleh dari Komisi Nasional Pengkajian Ikan. Batasan biologis aman adalah proporsi tangkapan ikan < 100%. Manfaat Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan.

**Tabel II.339**  
**Proporsi Tangkapan Ikan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Tangkapan Ikan	Ton	302.191,7	310.290,4	312.380,8	359.770,1	363.853,0
80% dari Tangkapan Maksimum Lestari	Ton	743.776	743.77 6	743.776	743.776	743.776, 0
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	40,6	41,7	42,0	48,4	48,92

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.3.8.6. Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Territorial

Luas kawasan konservasi perairan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012 sebesar 762.055,12 Ha, dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan maka pada periode tahun 2013-2016 telah dikelola seluas 76.205,7 Ha pada tahun 2013, kemudian meningkat pada tahun 2014 telah dikelola sebesar 91.446,7 Ha, dengan melakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik termasuk penguatan fungsi



otoritas pengelolaan konservasi sumberdaya ikan maka pada tahun 2015 pengelolaan meningkat menjadi 92.557,1 Ha hingga pada tahun 2016 dengan adanya kewenangan pengelolaan yang diatur dalam UU 23/2014 sehingga pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 95.241 Ha, dan hingga tahun 2017 pengelolaan kawasan konservasi sebesar 95.752,1 Ha sehingga total pengelolaan luas kawasan konservasi dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 433.551,94 Ha atau mencapai 353,3 % dari target 122.728 Ha. Pencapaian luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan meningkat drastis hal ini sebagai respon akan pengalihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi dimana yang dulu masing-masing kabupaten/kota mengelola sendiri kawasan konservasi perairan daerah diwilayahnya masing-masing sekarang diserahkan ke Provinsi sebagaimana diatur pada UU 23 tahun 2014.

**Tabel II.340**  
**Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kawasan Lindung Perairan	Ha	91.446,8	92.557,1	95.241,0	95.752,1	433.551,94
Total Luas Perairan Tutorial	Km <sup>2</sup>	43.047.900	43.047.900	43.047.900	43.047.900	43.047.900,0
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		0,21	0,22	0,22	0,22	1,01

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.3.8.7. Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTN periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan periode tahun dasar dan sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan. Berdasarkan tabel dibawah nilai tukar nelayan pada tahun 2014 hingga tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan hanya di tahun 2016 yang mengalami penurunan, namun kembali meningkat pada tahun 2017 dan 2018. Peningkatan NTN disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang diterima nelayan lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan.

**Tabel II.341**  
**Nilai Tukar Nelayan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks yang Diterima Nelayan	117,40	107,80	156,70	186,80	140,8
Indeks yang Dibayar Nelayan	135,60	140,90	143,70	128,10	130,5
Nilai Tukar Nelayan	86,58	76,51	109,05	145,82	107,8

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan diidentifikasi dengan mengukur Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya (NTN). Nilai tukar digunakan untuk mempertimbangkan seluruh penerimaan (*revenue*) dan seluruh pengeluaran (*expenditure*) keluarga nelayan dan pembudidaya ikan. Selain itu, juga digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan

dan pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan telah memenuhi kebutuhan keluarganya. Selama periode 2013-2017 rata-rata pendapatan nelayan dan pembudidaya telah mengalami laju pertumbuhan untuk nelayan telah mencapai 22,8% pertahun sedangkan pembudidaya 13,3% pertahun. Berdasarkan hasil perhitungan BPS, NTN tahun 2014 telah dibagi menjadi dua yaitu Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya, hal ini disebabkan karena Tahun dasar perhitungan NTN telah mengalami perubahan dari tahun dasar 2007 menjadi tahun dasar 2012 sehingga Nilai Tukar NTN Tahun 2013 masih di gabung Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya dengan pencapaian Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya sebesar 111,45 dan Tahun 2014 Nilai Tukar Nelayan sebesar 106,40 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan sebesar 106,47. Kemudian pada tahun 2015 rata-rata Nilai Tukar Nelayan sebesar 107,1 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 102,1 pada tahun 2016 Nilai Tukar Nelayan telah mencapai 103,5 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 99,1, hingga tahun 2017 Nilai Tukar Nelayan telah mencapai 107,6 dan Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 97,9.

#### 3.1.1.4. Fokus Penunjang Urusan

##### 3.1.1.4.1. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

###### 3.1.1.4.1.1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan Perda

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.

**Tabel II.342**  
**Ketersediaan Dokumen RPJPD**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

###### 3.1.1.4.1.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

**Tabel II.343**  
**Ketersediaan Dokumen RPJMD**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun					Rata-Rata
		2013	2014	2015	2016	2017	
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

###### 3.1.1.4.1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada

Pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur setiap tahunnya. Namun dokumen perencanaan tahunan daerah masih perlu ditingkatkan kualitasnya dengan menaati jadwal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dan mengoptimalkan proses evaluasi perencanaan

pembangunan daerah, sehingga dokumen tersebut dapat menjadi acuan pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang berkualitas.

**Tabel II.344**  
**Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.4.1.4. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD

Program RKPD didasarkan pada program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan. Pada tahun 2017 Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD sebesar 92,80%. Sejumlah 472 Program yang ditetapkan pada dokumen RPJMD namun yang terakomodir pada RKPD sejumlah 438 Program.

**Tabel II.345**  
**Konsistensi Program RPJMD dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	92,80

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.4.2. Bidang Urusan Keuangan

##### 3.1.1.4.2.1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang Selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan - RI (BPK-RI). Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik tersebut saat ini telah menjadi sasaran kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dengan indikator Opini WTP oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk opini LKPD tahun anggaran 2017 dengan nilai WTP. Sebagai perbandingan dengan capaian Kinerja tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah meraih predikat opini WTP terhadap laporan keuangan daerah selama 7 tahun secara berturut turut. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dari seluruh manajemen organisasi perangkat daerah (OPD) untuk secara konsisten menjaga dan mentaati aspek – aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan. Selain itu, Keberhasilan tersebut menunjukkan tata kelola keuangan yang lebih baik, namun predikat tersebut harus tetap dipertahankan keberlanjutannya, olehnya itu Inspektorat Provinsi melaksanakan peran pengawasan secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penguatan kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Peningkatan Kualitas Pengawasan melalui Pembinaan, Pendampingan, Evaluasi dan monitoring, Konsultasi dan Reviu Laporan Keuangan.

**Tabel II.346**  
**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.4.2.2. Persentase SILPA

Pada perkembangannya SILPA APBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara persentase masih berfluktuatif dimana pada tahun 2013 mencapai 0,80% dan SILPA tertinggi tercatat 2,89% pada tahun 2015, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 1,78 %. Dari trend tersebut menunjukkan bahwa SILPA APBD Provinsi Sulawesi rata-rata masih dikategorikan sangat rendah yaitu 1,75%.

**Tabel II.347**  
**Persentase SILPA**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase SILPA	%	0,80	1,51	2,89	1,78	1,78

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.4.2.3. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Perkembangan persentase belanja pendidikan sudah memenuhi amanat undang undang yaitu sebesar 20 persen dari APBD, hal ini terlihat dari tahun 2013 yang mencapai 25,53% meningkat menjadi 42,48% pada tahun 2017.

**Tabel II.348**  
**Persentase Belanja Pendidikan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase belanja pendidikan (20%)	%	25,53	24,44	24,34	28,82	42,48

Sumber : sipd.kemendagri.go.i

#### 3.1.1.4.2.4. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase belanja kesehatan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 8,89% hingga tahun 2015 sebesar 13,42%. Kemudian mengalami penurunan menjadi 10,84% pada tahun 2017 dalam alokasi anggaran APBD Tahun 2017.

**Tabel II.349**  
**Persentase Belanja Kesehatan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase belanja kesehatan (10%)	%	8,89	12,57	13,42	11,59	10,84

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.4.2.5. Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Tidak Langsung

Proporsi belanja daerah sebagaimana di atas, merupakan indikasi bahwa belanja tidak langsung lebih dominan dibanding belanja langsung yang selama lima tahun terakhir yang cenderung berfluktuasi, mulai dari 62,02% pada tahun 2013, pada tahun 2014 menjadi 58,75%, pada tahun 2015 sebesar 60,54%, pada tahun 2016 menjadi 63,64%, dan pada tahun 2017 sebesar 65,64%.

**Tabel II.350**  
**Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Tidak Langsung**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Perbandingan Antara Belanja	%	Belanja langsung: 37,98	Belanja langsung: 41,25	Belanja langsung: 39,46	Belanja langsung: 36,36	Belanja langsung: 34,24

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Langsung dengan Tidak Langsung		Belanja Tidak Langsung: 62,02	Belanja Tidak Langsung: 58,75	Belanja Tidak Langsung: 60,54	Belanja Tidak Langsung: 63,64	Belanja Tidak Langsung: 65,64

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.4.2.6. Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa

Belanja bagi hasil Kabupaten/kota dan desa dalam lima tahun terakhir mengalami perubahan-perubahan dikarenakan adanya kebijakan pusat yang berubah-ubah terhadap Pemerintah Daerah (Provinsi). Dana bagi hasil pada tahun 2013 mengalami kenaikan hingga tahun 2016, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 16,86%.

**Tabel II.351**  
**Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	16,73	18,14	19,17	19,52	16,86

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.4.2.7. Penetapan APBD

Idealnya suatu penetapan APBD ditetapkan lebih awal sebelum tahun anggaran berakhir. Dalam penetapan APBD berdasarkan data antara tahun 2013 sampai dengan 2017 jadwal penetapannya yaitu di bulan Desember.

**Tabel II.352**  
**Penetapan APBD**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penetapan APBD	No Perda dan Tanggal	Perda No. 10 Tahun 2012, Tanggal 31 Desember 2012	Perda No. 11 Tahun 2014, Tanggal 31 Desember 2014	Perda No. 8 Tahun 2014, Tanggal 31 Desember 2014	Perda No. 13 Tahun 2015, Tanggal 31 Desember 2015	Perda No. 11 Tahun 2016, Tanggal 30 Desember 2016

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.4.3. Bidang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan

##### 3.1.1.4.3.1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan

**Tabel II.353**  
**Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam Belajar	15 JP/Ta hun	15 JP/Ta hun	15 JP/Ta hun	15 JP/Ta hun	15 JP/Ta hun

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

##### 3.1.1.4.3.2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase keikutsertaan ASN dalam Pendidikan dan pelatihan disebabkan karena ketersediaan biaya pada setiap tahun APBD masih sangat rendah dan sangat fluktuatif dari tahun ketahun, selain itu pelaksanaan Pergub 73 Tahun 2010 tentang pelaksanaan diklat satu pintu tidak dipatuhi oleh setiap OPD lingkup Pemerintah Provinsi sehingga data data ASN yang telah mengikuti diklat teknis yang dilaksanakan oleh OPD lingkup Pemerintah Provinsi tidak dapat diketahui oleh BPSDM.



**Tabel II.354**  
**Pendidikan Dan Pelatihan Formal ASN**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,7	0,8	4,3	0,1	0,1

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.4.3.3. Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural**

**Tabel II.355**  
**Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	4,4	3,9	37,64	3,3	2,9

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.4.3.4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah**

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah dalam hal ini instansi daerah yaitu perangkat daerah provinsi yang meliputi sekretariat dewan, sekretariat DPRD, dinas/badan daerah, dan Lembaga teknis daerah. JPT terdiri atas JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama, berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah meliputi :

- Kepeloporan dalam bidang; keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan manajemen;
- Pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

Pada tabel di atas terlihat tidak ada peningkatan jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Pemprov Sulsel periode tahun 2013 s/d 2016 yakni berjumlah 64 jabatan sebagaimana amanat PP nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang mengatur tentang pembentukan dan susunan serta tipologi perangkat daerah yang terdiri atas sekretariat daerah (12 biro dan 1 sekda), sekretariat DPRD, badan/dinas (45 SKPD), rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah (6 RS). Sedangkan pada tahun 2017 mengalami perubahan sesuai dengan amanat PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang mengakibatkan adanya perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya yang berjumlah 60 jabatan terdiri atas sekretariat daerah (9 biro dan 1 sekda), badan/dinas (44 OPD), RSUD dan RSKD (6 RS).

**Tabel II.356**  
**Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	64	64	64	64	60

Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

### 3.1.1.4.3.5. Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri atas :

1. Jabatan administrator; dimana pejabatnya bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, atau disebut juga pejabat eselon III;
2. Jabatan pengawas; dimana pejabatnya bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, atau disebut juga pejabat eselon IV;
3. Jabatan pelaksana; dimana pejabatnya bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pada tabel di atas tampak peningkatan terjadi sepanjang tahun 2013 s/d tahun 2017. Pada tahun 2013 s/d 2016 peningkatan jumlah jabatan terjadi di jabatan pelaksana, hal ini disebabkan penambahan jumlah pegawai (pelaksana) yang berasal dari penerimaan CPNS daerah dan usulan pindah masuk ke Pemprov Sulsel yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun (Batas Usia Pensiun / BUP). Sedangkan pada tahun 2017 peningkatan terlihat lebih signifikan sebagai implikasi diterapkannya UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu adanya pengalihan urusan dari kabupaten/kota ke provinsi yang kemudian menambah jumlah jabatan pengawas yang terdiri atas UPT dinas yang membidangi Pendidikan, Kehutanan, dan Ketenagakerjaan.

**Tabel II.357**  
**Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	7.473	7.581	7.793	7.587	8.877

Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

### 3.1.1.4.3.6. Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas :

1. Jabatan fungsional keahlian; ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama.
2. Jabatan fungsional keterampilan: penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

**Tabel II.358**  
**Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.170	2.389	2.424	2.400	17.485

Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berasal dari penerimaan CPNS daerah dan usulan pindah dari instansi luar untuk masuk ke Pemprov Sulsel yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang memasuki masa peniun setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 2017 terlihat peningkatan yang sangat signifikan sebagai implikasi dari diterapkannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yakni adanya pengalihan urusan dari kab/kota ke provinsi. Selanjutnya juga diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/SJ tanggal

16 Januari Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mencakup penyerahan urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kab/kota). Salah satu penyerahan tersebut adalah pengalihan PNS ke Kementerian dan Provinsi. Pengalihan PNS atau personil tersebut hanya bagi PNS atau jabatan fungsional yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dialihkan dari kab/kota ke provinsi. PNS tersebut diantaranya memiliki tugas sebagai Pengawas tenaga kerja, Guru SMA dan SMK, Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan. Berikut daftar pengalihan PNS ke Provinsi :

**Tabel II.359**  
**Pengalihan PNS**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Instansi Pusat	Urusan	Jabatan yang Dialihkan	Instansi	
			Asal	Tujuan
Kementerian Ketenagakerjaan	Bidang pengelola tenaga pengawas ketenagakerjaan	Pengawas Tenaga Kerja	Kab/kota	Provinsi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Pendidikan menengah	Guru SMA/SMK	Kab/kota	Provinsi
Kementerian Kehutanan	Bidang rehabilitasi, perlindungan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Penyuluh Kehutanan dan Polisi Kehutanan	Kab/kota	Provinsi
Kementerian Perhubungan	Bidang pengelolaan terminal penumpang tipe A dan B	Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Kab/kota	Provinsi
Kementerian Dalam Negeri	Urusan pemerintahan umum	Pelaksana Urusan Pemerintahan Umum	Kab/kota	Provinsi

Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

#### 3.1.1.4.4. Penelitian Dan Pengembangan

##### 3.1.1.4.4.1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

**Tabel II.360**  
**Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

##### 3.1.1.4.4.2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

**Tabel II.361**  
**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	50	53	56	24

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

3.1.1.4.4.3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi

Tabel II.362  
Penerapan Inovasi Daerah  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	34	22	29	20	49

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

3.1.1.4.4.4. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Tabel II.363  
Penerapan Kebijakan Inovasi Daerah  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	14	13	12	13	22

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

3.1.1.4.5. Pengawasan

3.1.1.4.5.1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Untuk tahun 2013 capaian kinerja cukup optimal mencapai 83,31% sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami penurunan dari 81,5% menjadi 67,91%. Penurunan capaian kinerja indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan disebabkan antara lain kurangnya respon dari organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan, adanya beberapa pejabat yang mutasi/pension/meninggal dan adanya rekanan yang terkait dengan temuan sulit ditelusuri lagi keberadaannya. Penurunan capaian pada tahun 2017 bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2016) dikarenakan pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2017 sebagian besar dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan (PKPT), sehingga sebagian besar rekomendasi hasil pemeriksaan belum ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Adanya perubahan nomenklatur OPD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengakibatkan adanya OPD mengalami perubahan nama dan terdapat kewenangan urusan pemerintahan yang berpisah terbagi pada 2 (dua) OPD dan tergabung dalam 1 (satu) OPD sehingga sulit untuk ditindaklanjuti kepada Kepala OPD sebelum berlakunya struktur baru sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 dimaksud. Dalam rangka mendukung capaian indikator ini telah dilakukan upaya monitoring/pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) ke OPD terkait dan melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan 2 (dua) kali setiap semester dalam 1 (satu) tahun dengan tujuan mengevaluasi progress tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan pada OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel II.364  
Persentase Tindak Lanjut Temuan  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	83,31	81,5	78,18	74,09	67,91

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.4.5.2. Persentase Pelanggaran Pegawai**

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah PNS yang direkomendasikan mendapatkan Sanksi Disiplin dibandingkan dengan total pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data tersebut bahwa capaian indikator pada tahun 2013 yaitu 0,11% dan mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu 0,07%. Pada tahun 2017 capaian indikator persentase pelanggaran pegawai mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu 0,08%. Hal ini disebabkan karena keseluruhan laporan yang dikategorikan sebagai perbuatan indisipliner yang diajukan oleh Kepala OPD masing-masing ASN yang tidak mentaati jam kerja sehingga mendapatkan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dampak dari sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran disiplin dapat meningkatkan kesadaran pegawai dalam mentaati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS. Pengaduan/laporan dan pemeriksaan khusus/tertentu yang dilaksanakan dan yang masuk tersebut terhadap pelanggaran disiplin pegawai lebih banyak bersifat pada ketaatan atas jam kerja.

**Tabel II.365**  
**Persentase pelanggaran pegawai**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0,11	0,07	0,10	0,19	0,08

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.1.4.5.3. Jumlah Temuan BPK**

Indikator Jumlah temuan BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Pada tahun 2013 sejumlah 54,74% jumlah hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti. Pada tahun 2017 capaian kinerja meningkat menjadi 64,11% yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 88%. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan BPK disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

1. Masih rendahnya respon dari obrik pemeriksaan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI;
2. Terdapat rekomendasi temuan BPK bukan ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetapi kepada Direksi Bank Sulselbar sehingga bukan kewenangan Pemerintah Provinsi untuk menindaklanjuti;
3. Rekomendasi BPK yang ditujukan kepada penyedia jasa dan pejabat teknis kegiatan sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga sulit menindaklanjuti temua;
4. Terkait dengan rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan serta anggota DPRD periode lama juga sudah berganti;
5. Untuk rekomendasi tentang persertifikatan asset tanah memang belum dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh tetapi dilakukan secara bertahap mengingat anggaran sertifikasi tanah dianggarkan secara bertahap tiap tahunnya;
6. Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI khususnya pada tahun 2017 yang baru mencapai 64,11% disebabkan adanya rekomendasi yang berhubungan dengan pengembalian uang ke kas daerah yang membutuhkan waktu yang agak lama dalam menindaklanjutinya dan beberapa temuan tersebut telah berproses pada Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) yang putusannya telah dibuatkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dengan jaminan dan penyelesaiannya dengan cara dicicil selama 2 (dua) tahun;
7. Adanya perubahan nomenklatur nama OPD yang menyulitkan untuk ditindaklanjuti karena rekomendasi temua masih ditujukan kepada Kepala OPD yang lama.



Meskipun demikian akan terus diupayakan agar tingkat penyelesaian tindak lanjut terus meningkat dengan melakukan berbagai upaya seperti monitoring ke OPD dan melaksanakan rapat-rapat pembahasan tindak lanjut BPK dengan OPD terkait. Sehingga pada tahun-tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dapat dimaksimalkan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

**Tabel II.366**  
**Jumlah Temuan BPK**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah temuan BPK	%	54,74	56,84	67,98	65,3	64,11

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.1.4.6. Sekretariat Dewan

#### 3.1.1.4.6.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

**Tabel II.367**  
**Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan DPRD Provinsi/Kab/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

#### 3.1.1.4.6.2. Tersusun dan Terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

**Tabel II.368**  
**Integrasi Program-Program Kerja DPRD pada RPJMD dan RKPD**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

3.1.1.4.6.3. **Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD**

**Tabel II.369**  
**Integrasi Program-Program pada Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

**3.1.2. Aspek Daya Saing Daerah**

**3.1.2.1. Fokus Kemampuan Ekonomi**

**3.1.2.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita**

Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat daritingkat pendapatannya. Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara umum dapat diartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga mempunyai pendapatan yang besar pula. Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran perkapita (harga konstan 2012) pada tahun 2017, pengeluaran perkapita masyarakat Sulawesi Selatan mencapai 25,94 juta rupiah per tahun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

**Tabel II.370**  
**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Juta Rp	17,58	19,65	21,78	23,75	25,94

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

**3.1.2.1.2. Pengeluaran Perkapita/Tahun**

Rata-rata pengeluaran perkapita/tahun yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/ pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahun mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk yang semakin meningkat dengan nilai pengeluaran pada tahun 2017 sebesar 10,489 juta rupiah.

**Tabel II.371**  
**Pengeluaran Perkapita/Tahun**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Perkapita / Tahun Sulawesi Selatan	Ribu Rupiah	9.632	9.723	9.992	10.281	10.489
Pengeluaran Perkapita / Tahun Nasional	Ribu Rupiah	9.858	9.903	10.150	10.420	10.664

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

### 3.1.2.1.3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

**Tabel II.372**  
**Nilai Tukar Petani (NTP)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Nilai Tukar Petani	Poin	105,39	104,72	104,73	101,71	103,1

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Selama tahun 2017, NTP relatif stabil walaupun terjadi penurunan tetapi relatif kecil yaitu sebesar 3,70%. Hal ini disebabkan indeks yang diterima petani (It) mengalami penurunan sedangkan dibandingkan dengan indeks yang dibayar petani (Ib) mengalami kenaikan. It mengalami penurunan sebesar 0,42%, sedangkan Ib terjadi kenaikan sebesar 3,41%. Penurunan NTP terutama disebabkan oleh turunnya NTP pada Subsektor Perkebunan Rakyat, Subsektor Hortikultura dan Subsektor Tanaman Pangan. Penurunan NTP tertinggi terjadi pada Subsektor Perkebunan Rakyat dengan penurunan sebesar 9,76%, kemudian diikuti oleh Subsektor Hortikultura dengan penurunan sebesar 4,27%. Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dialami oleh Subsektor Peternakan dan Subsektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Kenaikan NTP tertinggi dialami oleh subsektor perikanan dengan kenaikan sebesar 1,05%, kemudian diikuti oleh subsektor peternakan sebesar 0,14%.

**Tabel II.373**  
**Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Sub Sektor	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Tanaman Pangan	97,55	99,69	100,56	99,17	102,25
Hortikultura	109,24	110,69	115,00	107,76	106,14
Perkebunan Rakyat	113,44	105,95	102,39	93,64	95,64
Peternakan	106,39	107,86	108,46	109,73	110,88
Perikanan	106,44	104,24	100,98	105,13	105,01
Perikanan Tangkap	108,59	107,12	103,48	110,97	107,63
Perikanan Budidaya	105,00	102,92	99,13	100,83	103,08

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

### 3.1.2.1.4. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel untuk mengukur tingkat kesejahteraan (ekonomi) suatu penduduk, sedangkan pergeseran komposisi pengeluaran dapat mengindikasikan perubahan tingkat kesejahteraan suatu penduduk. Data konsumsi/pengeluaran dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu makanan dan bukan

makanan. kelompok bukan makanan hanya mencakup nilai pengeluaran barang yang dikonsumsi, kecuali beberapa jenis barang tertentu juga dikumpulkan kuantitasnya, seperti listrik, air, gas, dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. konsumsi bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/ pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Rata-rata pengeluaran per kapita selama sebulan untuk semua kabupaten/kota. Secara provinsi pengeluaran rata-rata per kapita penduduk sebesar Rp 927.908,-. Kabupaten/kota dengan rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi adalah Kota Makassar sebesar Rp 1.536.017,- sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Soppeng sebesar Rp 607.629,-. Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan.

**Tabel II.374**  
**Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita	%	9,81	11,06	12,28	13,17	14,35

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

### 3.1.2.1.5. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

**Tabel II.375**  
**Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	%	79,37	59,25	79,03	207,44	266,62

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

### 3.1.2.1.6. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Nilai ekspor Sulawesi Selatan pada tahun 2017 mencapai nilai US\$ 1.020,80 juta dengan berat bersih sebesar 1.266,30 ribu ton. Dari beberapa kelompok komoditas ekspor Sulawesi Selatan, kelompok komoditas nikel masih merupakan kelompok komoditas dengan nilai ekspor terbesar, yaitu sebesar US\$ 629,33 juta atau sekitar 61,65 persen dari total ekspor Sulawesi Selatan pada tahun 2016. Posisi kedua terbesar merupakan komoditas Biji Biji Berminyak dan Tanaman Obat dengan nilai ekspor sebesar US\$ 98,16 Juta (9,62%), dan kelompok komoditas Ikan, Udang dan Hewan Air Tidak Bertulang Belakang Lainnya menempati posisi ketiga dengan nilai ekspor sebesar US\$ 68,52 Juta. Selanjutnya kelompok komoditas ekspor dengan berat bersih terbesar adalah kelompok komoditas Garam, Belerang dan Kapur dengan total berat sebesar 292,25 ribu ton atau berkontribusi sebesar 26,87 persen. Sepanjang tahun 2017, rata rata harga Nikel sebesar US\$ 6,52 Juta per ribu ton, untuk kelompok komoditas Biji Biji Berminyak dan Tanaman Obat memiliki rata rata harga US\$ 0,96 juta per ribu dolar dan rata rata harga kelompok komoditas Ikan, Udang dan Hewan Air Tidak Bertulang Belakang Lainnya sebesar US\$ 6,04 juta per ribu ton.

**Tabel II.376**  
**Nilai dan Berat Ekspor Sulawesi Selatan**  
**Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2018**

Komoditas	Nilai (Juta US\$)	Persentase (%)	Berat (000,- Ton)	Persentase (%)
Nikel	776.90	65.96	93.87	4.93
Biji-bijian berminyak dan Tanaman Obat	115.11	6.35	106.75	3.21
Ikan, Udang dan Hewan Air Tidak Bertulang Belakang Lainnya	36.48	3.30	5.94	0.33
Kakao/Coklat	37.32	4.66	10.15	0.75
Garam, belerang dan kapur	55.03	5.73	1.599,07	82.53
Kayu dan barang dari kayu	28.04	4.66	23.85	2.20
Buah-buahan	10.89	1.98	1.92	0.15
Daging dan Ikan serta Hewan Air Lainnyayang diolah	36.48	3.30	5.94	0.33
Ampas/Sisa dari Industri Makanan	18.66	1.27	121.53	4.65
Lak, Getah dan Damar	31.26	3.14	6.88	0.31
<b>Total 10 komoditas utama</b>	<b>1127.49</b>	<b>97.03</b>	<b>2.037,85</b>	<b>99.06</b>
<b>Komoditas Lainnya</b>	<b>36.85</b>	<b>2.97</b>	<b>43.66</b>	<b>0.94</b>
<b>Total Ekspor</b>	<b>1164.35</b>	<b>100</b>	<b>2.081,51</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Komoditas impor Sulawesi Selatan pada bulan Desember 2017 dengan nilai terbesar adalah Bahan Bakar Mineral dengan nilai sebesar US\$ 32,13 juta atau 35,24% dari total impor Sulawesi Selatan, Gula dan Kembang Gula dengan nilai sebesar US\$ 18,74 juta atau 20,55% dari total impor Sulawesi Selatan; gandum-gandum dengan nilai sebesar US\$ 14,69 juta atau 16,11% dari total impor Sulawesi Selatan kemudian disusul oleh Mesin/peralatan Listrik dengan nilai sebesar US\$ 7,64 juta atau 8,38% dari total impor Sulawesi Selatan. Impor terbesar Sulawesi Selatan pada bulan Desember 2017 melalui Pelabuhan Makassar dengan nilai US\$ 58,71 juta (64,40%). Kemudian disusul pelabuhan Sukarno Hatta Makassar dengan nilai US\$ 20,35 juta atau 22,32% dari total nilai impor Sulawesi Selatan. Dibandingkan dengan bulan November 2017 impor Sulawesi Selatan melalui Pelabuhan Makassar mengalami peningkatan sebesar 166,87% dan impor yang melalui pelabuhan Sukarno Hatta Makassar naik sebesar 19,59%. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB merupakan perbandingan jumlah nilai ekspor dan impor barang dan jasa dengan PDB mengalami peningkatan dari tahun 2016 dengan nilai 33,08 pada tahun 2017.

**Tabel II.377**  
**Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018**

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	57,09	48,27	30,94	33,08	31,54

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018



3.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel II.378  
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Pendidikan</b>						
<b>Pendidikan Menengah</b>						
Persentase jumlah warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	47,92	61,48	70,12	70,46	70,54
<b>Pendidikan Khusus</b>						
Persentase jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	100%					
<b>Kesehatan</b>						
<b>Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi</b>						
Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	40%	50%	75%	80%	85%
<b>Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi</b>						
Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	96,85	100	100	100	100
<b>Pekerjaan Umum</b>						
<b>Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota</b>						
Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%					
<b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Kabupaten/ Kota</b>						
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%					
<b>Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat</b>						
Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang	60%	85,04%	85,37%	87,42%	61,86%	57,51%
Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi</b>						
Persentase tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat</b>						
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70%	51,18%	51,18%	51,18%	56,06%	57,22%
<b>Perumahan Rakyat</b>						
<b>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi</b>						
Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam	100%					
<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi</b>						
Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	100%					
<b>Rumah Layak Huni dan Terjangkau</b>						
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%					
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%					
<b>Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum</b>						
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%					
<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>						
<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi</b>						
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%					
<b>Sosial</b>						
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Pant</b>						
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam pant	100%	7,43%	7,41%	6,42%	6,26%	6,42%
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant</b>						
Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam pant	100%	11,70%	11,68%	9,15%	8,52%	8,91%
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pant</b>						

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	5,58%	5,56%	4,97%	4,97%	4,97%
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti</b>						
Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	0	2,02%	6,37%	0	8,13%
<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi</b>						
Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	61,90%	68,33%	75,09%	80,16%	82,32%
<b>Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Sosial</b>						
Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar	80%	36,60%	34,85%	27,80%	47,42%	35%
Persentase Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial	60%	100	100	100	100	100
<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial</b>						
Persentase Panti Sosial skala provinsi yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	100	100	100	100	100
Persentase Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti	60%	-	-	-	-	-
<b>Penanggulangan Korban Bencana</b>						
Persentase kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	80%	63,42	67,75	70,25	75,09	82,15
Persentase kabupaten/kota yang menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	80%	61,90	68,33	75,09	80,16	82,32
<b>Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial</b>						
Persentase	40%	Lanjut	Lanjut	Lanjut	Lanjut	Lanjut

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial		Usia : 5,58%	Usia : 5,56%	Usia : 4,97%	Usia : 4,97%	Usia : 4,97%
	40%	Disabilitas : 7,43%	Disabilitas : 7,41%	Disabilitas : 6,42%	Disabilitas : 6,26%	Disabilitas : 6,42%

Indikator Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian tidak pernah dibawah 50% pertahun dan cenderung konstan mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2015 karena tidak ada penambahan luas areal pertanian secara signifikan yang terairi, berbeda pada tahun 2016 ada penambahan Daerah Irigasi dan bertambah pula areal pertanian yang dapat diairi sesuai dengan ketersediaan air jaringan irigasi sampai tahun 2017 dan capaian tahun 2018 sebesar 58,38 terus mengalami peningkatan.

Indikator Persentase Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti bukan merupakan kewenangan provinsi karena pelayanan terkait luar panti sosial.

### 3.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat provinsi. Target-target SDGs di tingkat provinsi telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Jumlah tujuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan mencapai target nasional sejumlah 17 Tujuan

(Goals) sejumlah 75 indikator dari total keseluruhan indikator yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi sejumlah 235 indikator. Indikator TPB terbanyak yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional adalah capaian indikator pada pilar sosial sejumlah 42 indikator. Capaian target indikator 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) tahun 2014-2017 disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel II.379  
Capaian Target Indikator TPB/SDGs  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
<b>1</b>	<b>Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun</b>							
1.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	7%	9,91%	9,77%	9,32%	-	Dinas Sosial
1.2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	90%	75%	65%	67%	70%	75%	Dinas Kesehatan
1.3	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	17,12%	1173%	1135%	1135%	1173%	1173%	Dinas Sosial
1.4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	2,8 Juta Rumah Tangga	178.594 Rumah Tangga	74.178 Rumah Tangga	100.473 Rumah Tangga	100.473 Rumah Tangga	178.594 Rumah Tangga	Dinas Sosial
1.5	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	70%	81%	81,96%	86,81%	80,96%	91,11%	Dinas Kesehatan
1.6	Persentase anak umur 12-23 bulan	63%	63%	91,2%	85,9%	91,9%	102,9%	Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
	yang menerima imunisasi dasar lengkap							
1.7	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	65%	68%	71,86%	71,38%	72,39%	72,67%	Dinas Kesehatan
1.8	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	100%	100%	69,51%	72,97%	72,36%	84,20%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	91,63%	63,50%	61,48%	70,12%	70,46%	70,54%	Dinas Pendidikan
1.10	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	77,4%	77,4%	-	-	57,22%	66,09%	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.11	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	100%	95%	89,22%	90,20%	91,65%	92,52%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1.12	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	5.598 Jiwa	-	1.016 Jiwa	14.472 Jiwa	5.598 Jiwa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.13	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	39 Daerah	24 Kab/ Kota	24 Kab/ Kota	24 Kab/ Kota	24 Kab/ Kota	24 Kab/ Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
1.14	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Ada	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.15	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Meningkat	435	476	498	948	-	Dinas Sosial
<b>2</b>	<b>Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan</b>							
2.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	17%	22,1%	26,1%	20,05%	25,2%	23%	Dinas Kesehatan
2.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Menurun	48,9%	42,22%	40,33%	-	40%	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.3	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	8,5%	15,87%	13,84%	14,34%	-	16%	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Menurun	33,86%	35,9%	34%	36%	35%	Dinas Kesehatan
2.5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah	28%	33,87%	-	-	26,7%	21,8%	Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
	dua tahun/baduta							
2.6	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Menurun	7,25%	10,2%	10,9%	9,4%	8,7%	Dinas Kesehatan
2.7	Prevalensi anemia pada ibu hamil	28%	28,5%	-	-	15%	13,4%	Dinas Kesehatan
2.8	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	50%	44%	68%	72%	68%	73%	Dinas Kesehatan
2.9	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor PPH = 92,5; Tingkat Konsumsi Ikan = 54,5 kg/kapita/thn	57,67	55,79	55,37	65,55	60,75	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
<b>3</b>	<b>Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia</b>							
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	306	104	138	149	156	115	Dinas Kesehatan
3.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	95%	96%	92,79%	94,02%	92,90%	94,05%	Dinas Kesehatan
3.3	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas	85 %	81%	81,96%	86,81%	80,96%	91,11%	Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
	kesehatan							
3.4	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	1.151	1.201	1.265	1.303	1.151	Dinas Kesehatan
3.5	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	835	762	936	887	818	Dinas Kesehatan
3.6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	24	1037	1113	1167	1183	1059	Dinas Kesehatan
3.7	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	95%	85%	95,83%	100%	100%	95,83%	Dinas Kesehatan
3.8	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	<0,5%	<0,5%	0,025%	0,056%	0,28%	0,33%	Dinas Kesehatan
3.9	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	245	158	152	154	155	155	Dinas Kesehatan
3.10	Kejadian Malaria per 1000 orang	Menurun	<1	0,14	0,12	0,12	0,15	Dinas Kesehatan
3.11	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	300 Kab/Kota	5 Kab/Kota	0	0	14 Kab/Kota	4 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
3.12	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B		30%	4%	4%	17%	50%	Dinas Kesehatan
3.13	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Menurun	338.635	422.382	253.796	283.942	333.251	Dinas Kesehatan
3.14	Jumlah Provinsi/Kab/Kota dengan	34 Provinsi	14 Kab/Kota	11 Kab/Kota	9 Kab/Kota	12 Kab/Kota	11 Kab/Kota	Dinas Kesehatan



No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
	eliminasi Kusta							
3.15	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	35 Kab/Kota	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	2 Kab/Kota	-	-	Dinas Kesehatan
3.16	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	5,4%	6%	6,9%	7%	-	1,3%	Dinas Kesehatan
3.17	Prevalensi tekanan darah tinggi	24,3%	19,82%	20,64%	20,92%	20,08%	5,02%	Dinas Kesehatan
3.18	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	15,4%	13,60%	13,60%	4,01%	10,11%	3,17%	Dinas Kesehatan
3.19	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Menurun	3,7	0	0	0	0,1	Dinas Kesehatan
3.20	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	280 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
3.21	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	0,02%	1,95%	-	-	-	1,95%	Dinas Kesehatan
3.22	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	66%	1.495.547	-	-	-	1.387.345	Dinas Kesehatan
3.23	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua	65%	68%	71,86%	71,38%	72,39%	72,67%	Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
	cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin							
3.24	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	23,5%	11%	11,47%	11,67%	12,47%	14%	Dinas Kesehatan
3.25	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Meningkat	700 Jiwa	500 Jiwa	550 Jiwa	600 Jiwa	750 Jiwa	Dinas Kesehatan
3.26	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95%	75%	65%	67%	70%	75%	Dinas Kesehatan
3.27	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Meningkat	83%	73%	77%	83%	85%	Dinas Kesehatan
3.28	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Meningkat	357	222	280	299	299	Dinas Kesehatan
<b>4</b>	<b>Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua</b>							
4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat	91,63%	161%	103,84%	108,69%	109,92%	110,02%	Dinas Pendidikan
4.2	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	8,8 Tahun	8,11 Tahun	8 Tahun	8,26 Tahun	8,28 Tahun	8,31 Tahun	Dinas Pendidikan
4.3	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1)	Meningkat	79,9	79,18	82	82,83	82,93	Dinas Pendidikan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
	SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi							
4.4	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	96,1%	93,78%	90,04%	91,78%	93,01%	94,06%	Dinas Pendidikan
4.5	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Meningkat	93,78%	90%	91,78%	93,08%	94,06%	Dinas Pendidikan
<b>5</b>	<b>Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan</b>							
5.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	16 Kebijakan	10 Kebijakan	10 Kebijakan	10 Kebijakan	10 Kebijakan	10 Kebijakan	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5.2	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	70%	70%		50%	90%	94%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	91,63%	161%	103,84%	108,69%	109,92%	110,02%	Dinas Pendidikan
5.4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat	16,6%	60 orang	0 orang	50 orang	60 orang	60 orang	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
	pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah							
<b>6</b>	<b>Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan</b>							
6.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	100%	100%	69,51%	72,97%	72,36%	84,20%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.2	Kualitas Air Danau	Meningkat		20%	38,50%	40,25%	55,05%	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.3	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Meningkat		5%	7%	10%	12%	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.4	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi	5,5 Juta Ha (Skala Nasional)	6.000 Ha	30.912 Ha	31.917,41 Ha	27.069 Ha	11.461 Ha	Dinas Kehutanan
<b>7</b>	<b>Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua</b>							
7.1	Rasio elektrifikasi	96,6%	96,6%	85,18%	89,37%	94,53%	97,33%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>8</b>	<b>Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</b>							
8.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Meningkat	9,29%	7,54%	7,17%	7,41%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.2	PDB per kapita	50 Juta	48,21 Juta	32,12 Juta	35,11 Juta	38,02 Juta		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
8.3	Persentase tenaga kerja formal	51%	44,97%	36,45%	36,95%	35,11%	37,63%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.4	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Meningkat	39,42%	41,81%	41,73%	39,76%	38,67%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	25%	20%	18,7%	19,9%	20,3%	20%	Dinas Koperasi & UMK
8.6	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Menurun	4,56%	5,05%	5,83%	4,74%	5,61%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.7	Tingkat setengah pengangguran	Menurun		1.439.039	1.396.305	-	1.295.011	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.8	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Meningkat		-	24,10%	22,21%	21,83%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.9	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	8%	8%	1,38%	1,34%	1,32%		Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
8.10	Jumlah wisatawan mancanegara	20 Juta (skala nasional)	151.763 Wisman	151.763 Wisman	191.773 Wisman	236.491 Wisman	255.747 Wisman	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
8.11	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Meningkat	6.000.000	5.920.528	7.128.826	8.426.528	8.367.748	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
8.12	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap	Meningkat		-	10,36%	12,28%	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
	total pekerja							
8.13	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Meningkat	20%	18,7%	19,9%	20,3%	20%	Dinas Koperasi & UMKM
<b>9</b>	<b>Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi</b>							
9.1	Panjang jalur kereta api	3.258 Km	145 Km	-	-	16,1	16,1	Dinas Perhubungan
9.2	Jumlah dermaga penyeberangan	275 Unit	80 Unit	80 Unit	80 Unit	80 Unit	80 Unit	Dinas Perhubungan
9.3	Jumlah pelabuhan strategis	24 Pelabuhan (skala nasional)	19 Pelabuhan (skala nasional)	19 Pelabuhan	19 Pelabuhan	19 Pelabuhan	19 Pelabuhan	Dinas Perhubungan
9.4	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Meningkat	14,25%	13,98%	13,88%	13,92%	13,95%	Dinas Perindustrian
9.5	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	9,25%	13,98	13,88	13,92	13,95	Dinas Perindustrian
9.6	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Meningkat	287.269	202.003	230.459	296.882	262.936	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.7	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Meningkat	53.000	54.000	51.141	52.309	54.513	Dinas Perindustrian
9.8	Persentase Perubahan Emisi CO <sub>2</sub> /Emisi Gas Rumah Kaca	26%	22,5%	-	5,12	7,50	-	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
<b>10</b>	<b>Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara</b>							
10.1	Koefisien Gini	0,36	0,36	0,448	0,404	0,400	0,429	BPS
10.2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	7%	9,54	10,12	9,24	9,38	BPS
10.3	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Meningkat		8,9%	10,09%	11,17%	11,09%	BPS
10.4	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	14%	14%	15,31	15,18	15,49	15,4	BPS
<b>11</b>	<b>Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan</b>							
11.1	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	32%	22,8%	18%	19,6%	21,2%	22,8%	Dinas Perhubungan
11.2	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama	20 kota sedang (skala nasional)	7 kota sedang (skala nasional)	7 kota sedang	7 kota sedang	7 ota sedang	7 kota sedang	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
11.3	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	5 Metropolitan (skala nasional)	1 Metropolitan	1	1	1	1	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
11.4	Jumlah korban meninggal, hilang dan	Menurun	5.598 Orang	-	1.016 Orang	17.472 Orang	5.598	Badan Penanggulangan Bencana

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
	terkena dampak bencana per 100.000 orang						Orang	Daerah
11.5	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	30%	24%	24%	24%	24%	24%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.6	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Ada	75					
11.7	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	80%	80%	15,82%	16,21%	16,54%	17,53%	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
11.8	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Ada	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>12</b>	<b>Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan</b>							
12.1	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	150 Juta Ton (skala nasional)		528,88 Ton/ Periode	711,89 Ton/ Periode	677,87 Ton/ Periode	743,29 Ton/ Periode	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
12.2	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	20 Ton/Hari (skala nasional)	20 Ton/ Hari	14,84 Ton/ Hari	15 Ton/ Hari	15,15 Ton/ Hari	15,29 Ton/ Hari	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>13</b>	<b>Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya</b>							
13.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Ada	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
13.2	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	5.598 Orang	-	1.016 Orang	17.472 Orang	5.598 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.3	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Ada	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>14</b>	<b>Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan</b>							
14.1	Jumlah nelayan yang terlindungi	Meningkat	37.648 Nelayan	-	-	25.814 Nelayan	37.811 Nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>15</b>	<b>Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati</b>							
15.1	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Meningkat	55,65	59,56	59,56	59,56	59,56	Dinas Kehutanan
15.2	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Meningkat	22 KPH	-	-	9 KPH	16 KPH	Dinas Kehutanan
15.3	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Meningkat	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>16</b>	<b>Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan</b>							
16.1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Meningkat	Rp. 190.759.499. 612	Rp. 60.592.271. 668	Rp. 65.173.075.697	Rp. 35.83.608.00 0	Rp. 3.670.839.6 40,8	Badan Pengelola Keuangan Daerah
16.2	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	75%	-	CC	CC	B	B	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
	(SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)							
16.3	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	80%	100% (602 Paket/ Kegiatan)	-	100% (688)	100% (525)	100% (507)	Biro Pembangunan Setda
16.4	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Meningkat	60 Orang	-	50 Orang	60 Orang	60 Orang	Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
<b>17</b>	<b>Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan</b>							
17.1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Meningkat	Rp. 9.292.958.272,501	5.503.161.406.065,78	6.105.815.095.557,51	7.162.588.691.182,52	9.055.278.907.514,25	Badan Pendapatan Daerah
17.2	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49%	71%	44%	-	63%	-	Dinas Komunikasa, Informatika, Statistik, dan Persandian



No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Capaian TPB/SDGs				OPD Penanggung Jawab
				2014	2015	2016	2017	
		rumah tangga dan 6% populasi						
17.3	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Meningkat	99,16%	-	-	-	99,16%	BPS
17.4	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Meningkat	85,13%	-	-	-	85,13%	BPS
17.5	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	Meningkat	1	-	8	9	1	BPS
17.6	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada		-	-	-	2.985.233 Data	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17.7	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Meningkat	27.712 User	8.985 User	20.263 User	45.247 User	27.712 User	BPS
17.8	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	Meningkat	94,05%	-	-	-	94,05%	BPS

Sumber : BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018

## **2.4 Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

### **2.4.1 Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu**

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Setelah RKPD ditetapkan pada akhir Mei 2018, tanggal 15 Agustus 2018 dilakukan pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga RAPBD Tahun 2018 mengakomodir program dan kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang baru. Hal ini berdampak pada konsistensi program dan kegiatan antara RKPD dan APBD Tahun 2018 maupun realisasi pelaksanaannya.

Berikut ini digambarkan konsistensi serta capaian program dan kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

#### **1. Konsistensi Program dan Kegiatan**

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan APBD serta konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD.

Tabel II.380  
Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program			Program Yang Sama			Program Tidak Sama			Jumlah Kegiatan			
		RPJMD	RKPD	APBD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD	APBD	Sama	Tidak Sama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Dinas Pendidikan	16	16	16	16	16	16	-	-	-	190	116	104	98
2	Dinas Kesehatan	11	11	11	11	11	11	-	-	-	240	125	95	175
3	UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	6	6	6	6	6	6	-	-	-	23	20	20	3
4	UPT Pelatihan Kesehatan	8	8	8	8	8	8	-	-	-	62	46	42	24
5	UPT Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika	8	8	8	8	8	8	-	-	-	23	20	20	3
6	UPK Balai Pelayanan Kesehatan	7	7	7	7	7	7	-	-	-	24	20	20	4
7	UPT Transfusi Darah	5	5	5	5	5	5	-	-	-	21	20	20	1
8	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	8	8	4	8	4	4	-	4	4	41	13	12	30
9	Rumah Sakit Khusus Daerah	9	9	8	9	8	8	-	1	1	45	33	33	12
10	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	10	10	5	10	5	5	-	5	5	33	6	6	27
11	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	5	5	4	5	4	4	-	1	1	14	7	7	7
12	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	3	3	3	3	3	3	-	-	-	5	4	4	1

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program			Program Yang Sama			Program Tidak Sama			Jumlah Kegiatan			
		RPJMD	RKPD	APBD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD	APBD	Sama	Tidak Sama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
13	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	7	6	6	6	6	6	1	-	1	24	23	23	1
14	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang	10	10	10	10	10	10	-	-	-	67	55	55	12
15	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	4	4	4	4	4	4	-	-	-	68	65	65	3
16	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan	6	6	6	6	6	6	-	-	-	52	52	50	4
17	Satuan Polisi Pamong Praja	7	7	7	7	7	7	-	-	-	61	42	42	19
18	Dinas Sosial	10	10	10	10	10	10	-	-	-	75	69	57	30
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	8	8	8	8	8	-	-	-	125	87	85	42
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	9	9	9	9	9	-	-	-	54	54	54	-
21	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	14	14	13	14	13	13	-	1	1	108	77	76	33
22	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	7	7	7	7	7	7	-	-	-	43	36	36	7
23	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7	7	7	7	7	7	-	-	-	42	46	41	6
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	12	11	12	11	11	-	1	1	104	63	57	53
25	Dinas Perhubungan	6	6	5	6	5	5	-	1	1	63	56	51	17

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program			Program Yang Sama			Program Tidak Sama			Jumlah Kegiatan			
		RPJMD	RKPD	APBD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD	APBD	Sama	Tidak Sama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
26	Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian	6	6	6	6	6	6	-	-	-	67	42	35	39
27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7	7	7	7	7	7	-	-	-	136	60	54	88
28	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4	4	4	4	4	4	-	-	-	24	21	21	3
29	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8	8	8	8	8	8	-	-	-	74	71	70	5
30	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	12	12	11	12	11	11	-	1	1	168	71	62	115
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	8	8	8	8	8	-	-	-	124	74	74	50
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	8	8	8	8	8	8	-	-	-	254	226	222	36
33	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7	7	7	7	7	7	-	-	-	82	63	62	21
34	Dinas Perkebunan	5	5	5	5	5	5	-	-	-	129	92	60	101
35	Dinas Kehutanan	7	7	7	7	7	7	-	-	-	233	100	95	143
36	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6	6	6	6	6	6	-	-	-	49	49	49	-
37	Dinas Perdagangan	7	7	7	7	7	7	-	-	-	55	38	37	19
38	Dinas Perindustrian	7	7	7	7	7	7	-	-	-	41	36	35	7
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	7	7	7	7	7	-	-	-	92	86	84	10
40	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	5	5	5	5	5	-	-	-	43	38	38	5



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program			Program Yang Sama			Program Tidak Sama			Jumlah Kegiatan			
		RPJMD	RKPD	APBD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD	APBD	Sama	Tidak Sama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
41	Badan Pendapatan Daerah	5	5	5	5	5	5	-	-	-	113	111	110	4
42	Badan Kepegawaian Daerah	6	6	6	6	6	6	-	-	-	118	65	64	55
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	5	5	5	5	5	-	-	-	33	32	32	1
44	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	5	5	5	5	5	-	-	-	71	35	35	36
45	Sekretariat DPRD	8	8	8	8	8	8	-	-	-	81	75	75	6
46	Biro Hukum daq HAM	8	8	7	8	7	7	-	1	1	74	46	43	34
47	Biro Pemerintahan	11	11	9	11	9	9	-	2	2	41	18	18	23
48	Biro Humas dan Protokol	5	5	5	5	5	5	-	-	-	18	18	18	-
49	Biro Perekonomian	5	5	5	5	5	5	-	-	-	22	19	19	3
50	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	5	5	5	5	5	5	-	-	-	28	22	18	14
51	Biro Kesejahteraan	10	10	10	10	10	10	-	-	-	76	63	61	17
52	Biro Organisasi dan Tata Laksana	4	4	4	4	4	4	-	-	-	30	26	26	4
53	Biro Umum dan Perlengkapan	4	4	4	4	4	4	-	-	-	47	47	47	-
54	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	3	3	3	3	3	3	-	-	-	36	38	35	4
55	Inspektorat Daerah	9	9	9	9	9	9	-	-	-	59	55	55	4
56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	11	10	11	10	10	-	1	1	67	32	32	35

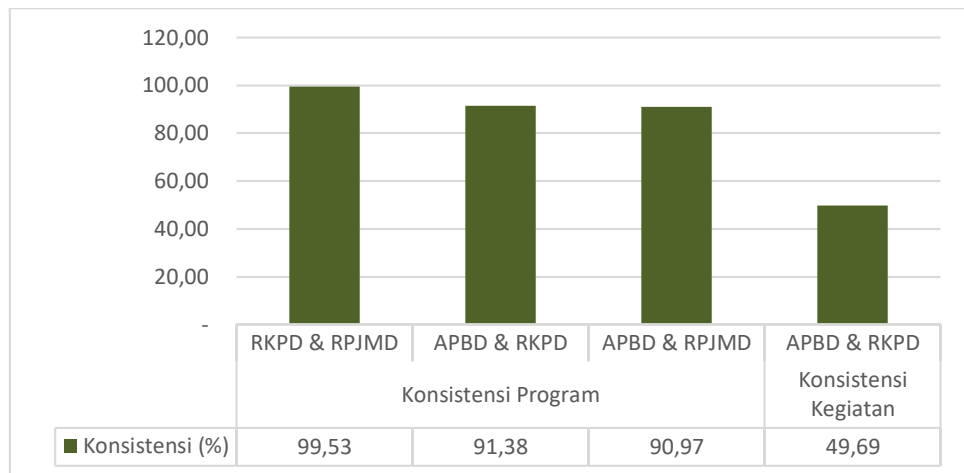
No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program			Program Yang Sama			Program Tidak Sama			Jumlah Kegiatan			
		RPJMD	RKPD	APBD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD	APBD	Sama	Tidak Sama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
57	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	7	7	7	7	7	-	-	-	71	57	55	18
58	Badan Penghubung Daerah	5	5	5	5	5	5	-	-	-	45	34	33	13
<b>J U M L A H</b>		<b>423</b>	<b>422</b>	<b>403</b>	<b>422</b>	<b>403</b>	<b>403</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>4.208</b>	<b>3.015</b>	<b>2.849</b>	<b>1.525</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat diberikan penjelasan terkait dengan kesesuaian program dan kegiatan RKPD dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
  - 1) Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah 423 program (jumlah pada kolom 3), sedangkan jumlah program dalam RKPD Tahun 2018 adalah 422 program (jumlah pada kolom 4). Dari 422 program dalam RKPD tersebut, seluruhnya merupakan program RPJMD (jumlah pada kolom 6).
  - 2) Terdapat 1 program (jumlah pada kolom 9) yang tidak sesuai antara RPJMD dan RKPD yaitu program RPJMD yang tidak dijabarkan ke dalam RKPD.
  - 3) Program yang tidak sesuai tersebut merupakan program RPJMD yang tidak dijabarkan dalam RKPD yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat. Program ini tidak dilaksanakan karena kegiatannya adalah penyusunan laporan evaluasi kinerja dan untuk memenuhi *output*-nya dapat dilakukan tanpa anggaran.
- b. Kesesuaian program RKPD dan APBD
  - 1) Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 422 program (jumlah pada kolom 4), sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 403 program (jumlah pada kolom 5). Dari sejumlah program dalam RKPD dan APBD tersebut, terdapat 403 program yang sesuai antara kedua dokumen (jumlah pada kolom 7).
  - 2) terdapat 10 program yang tidak sesuai antara kedua dokumen (jumlah pada kolom 10) yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD.
  - 3) Program yang tidak sesuai tersebut seluruhnya adalah program RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD.
- c. Kesesuaian program RPJMD dan APBD
  - 1) Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah 423 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 403 program.
  - 2) Terdapat 20 program yang tidak sesuai antara kedua dokumen (jumlah pada kolom 11).
  - 3) Seluruh program yang tidak sesuai antara kedua dokumen tersebut, merupakan program RPJMD yang tidak dianggarkan dalam APBD.
- d. Kesesuaian kegiatan RKPD dan APBD
  - 1) Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 4.208 (jumlah pada kolom 12) dan APBD adalah sejumlah 3.015 (jumlah pada kolom 13). Jumlah kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 2.849 (jumlah pada kolom 14), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 1.525 (jumlah pada kolom 15).
  - 2) Dari sejumlah 1.525 kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut, 1.359 kegiatan adalah kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD dan sisanya sejumlah 166 kegiatan adalah kegiatan yang ada dalam APBD yang tidak direncanakan dalam RKPD.
  - 3) Dari 58 perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 4 perangkat daerah yang sesuai kegiatannya antara RKPD dan APBD.
  - 4) Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 49,69%. Ketidaksesuaian kegiatan antara RKPD dan APBD tersebut disebabkan adanya kebijakan untuk melakukan rasionalisasi kegiatan-kegiatan rutin (yang merupakan tugas pokok tidak dianggarkan), adanya efisiensi dan perubahan kebijakan penganggaran sehubungan dengan pergantian kepala daerah.

Tingkat kesesuaian program dan kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

**Gambar 2.13**  
**Tingkat Kesesuaian Program dan Kegiatan**  
**RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018**



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa penjabaran RPJMD ke dalam RKPD sudah sangat tinggi dan mendekati sempurna. Namun demikian, dalam penganggarannya dilakukan efisiensi dengan tidak menganggarkan program dan kegiatan yang bersifat rutin, mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas serta dilakukannya simplikasi kegiatan, sehingga konsistensi program maupun kegiatan antara RKPD dan APBD lebih rendah.

## 2. Konsistensi Kerangka Pendanaan

Salah satu hal penting dalam muatan RPJMD dan RKPD adalah adanya kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dalam APBD. RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD.

APBD disusun berpedoman pada KUA-PPAS yang dirumuskan berdasarkan RKPD setelah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karena itu RPJMD sampai dengan APBD memiliki hubungan yang sangat terkait dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Penjabaran pendanaan belanja langsung dalam RPJMD ke dalam RKPD dan APBD selengkapnya pada setiap perangkat daerah adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel II.381**  
**Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018**

No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD		APBD		RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (4) - (3)	(7) = (5) - (4)	(8) = (5) - (3)
1	Dinas Pendidikan	758.299.761.205	711.859.218.522	93,88	684.762.854.522	90,30	(46.440.542.683)	(27.096.364.000)	(73.536.906.683)
2	Dinas Kesehatan	31.561.282.086	21.386.558.425	67,76	29.836.080.836	94,53	(10.174.723.661)	8.449.522.411	(1.725.201.250)
3	UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	18.605.997.500	15.903.288.218	85,47	13.539.790.173	72,77	(2.702.709.282)	(2.363.498.045)	(5.066.207.327)
4	UPT Pelatihan Kesehatan	14.067.949.188	13.704.341.677	97,42	10.693.122.663	76,01	(363.607.511)	(3.011.219.014)	(3.374.826.525)
5	UPT Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika	9.109.600.000	6.919.521.249	75,96	3.711.950.455	40,75	(2.190.078.751)	(3.207.570.794)	(5.397.649.545)
6	UPK Balai Pelayanan Kesehatan	10.038.028.000	9.332.422.541	92,97	3.793.815.541	37,79	(705.605.459)	(5.538.607.000)	(6.244.212.459)
7	UPT Transfusi Darah	19.204.031.000	18.171.405.300	94,62	19.090.757.352	99,41	(1.032.625.700)	919.352.052	(113.273.648)
8	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	103.851.742.289	103.851.742.289	100,00	132.238.231.006	127,33	-	28.386.488.717	28.386.488.717
9	Rumah Sakit Khusus Daerah	62.799.501.236	56.038.249.225	89,23	44.840.106.635	71,40	(6.761.252.011)	(11.198.142.590)	(17.959.394.601)
10	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	37.071.430.930	46.892.100.000	126,49	32.768.670.456	88,39	9.820.669.070	(14.123.429.544)	(4.302.760.474)
11	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	11.763.458.026	8.173.128.481	69,48	14.898.468.287	126,65	(3.590.329.545)	6.725.339.806	3.135.010.261



No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD		APBD		RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (4) - (3)	(7) = (5) - (4)	(8) = (5) - (3)
12	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	33.496.796.344	31.633.476.344	94,44	19.232.649.280	57,42	(1.863.320.000)	(12.400.827.064)	(14.264.147.064)
13	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	22.105.256.347	33.908.176.275	153,39	33.415.906.165	151,17	11.802.919.928	(492.270.110)	11.310.649.818
14	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	422.255.002.743	307.406.355.858	72,80	291.585.729.304	69,05	(114.848.646.885)	(15.820.626.554)	(130.669.273.439)
15	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	253.083.375.692	208.775.637.471	82,49	225.365.402.695	89,05	(44.307.738.221)	16.589.765.224	(27.717.972.997)
16	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan	76.334.442.706	54.841.914.806	71,84	46.748.300.515	61,24	(21.492.527.900)	(8.093.614.291)	(29.586.142.191)
17	Satuan Polisi Pamong Praja	10.950.148.672	14.244.293.922	130,08	10.149.630.000	92,69	3.294.145.250	(4.094.663.922)	(800.518.672)
18	Dinas Sosial	20.044.370.928	18.398.307.928	91,79	18.496.283.000	92,28	(1.646.063.000)	97.975.072	(1.548.087.928)
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.017.360.058	17.797.810.058	98,78	13.327.627.202	73,97	(219.550.000)	(4.470.182.856)	(4.689.732.856)
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.208.169.181	8.135.512.000	99,11	8.235.512.000	100,33	(72.657.181)	100.000.000	27.342.819
21	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	146.173.508.148	125.656.608.324	85,96	133.576.738.800	91,38	(20.516.899.824)	7.920.130.476	(12.596.769.348)

No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD		APBD		RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (4) - (3)	(7) = (5) - (4)	(8) = (5) - (3)
22	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	25.700.072.928	17.739.060.472	69,02	14.678.201.000	57,11	(7.961.012.456)	(3.060.859.472)	(11.021.871.928)
23	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	10.224.387.795	9.565.899.000	93,56	11.230.749.000	109,84	(658.488.795)	1.664.850.000	1.006.361.205
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28.415.251.250	27.304.868.750	96,09	24.224.498.601	85,25	(1.110.382.500)	(3.080.370.149)	(4.190.752.649)
25	Dinas Perhubungan	52.050.872.850	50.312.900.550	96,66	33.954.980.000	65,23	(1.737.972.300)	(16.357.920.550)	(18.095.892.850)
26	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	24.371.095.600	21.605.188.369	88,65	11.888.632.739	48,78	(2.765.907.231)	(9.716.555.630)	(12.482.462.861)
27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	80.427.113.494	79.858.981.994	99,29	29.979.930.000	37,28	(568.131.500)	(49.879.051.994)	(50.447.183.494)
28	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	19.950.366.500	14.764.516.149	74,01	4.215.000.000	21,13	(5.185.850.351)	(10.549.516.149)	(15.735.366.500)
29	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	199.831.451.524	81.167.551.000	40,62	101.869.269.817	50,98	(118.663.900.524)	20.701.718.817	(97.962.181.707)
30	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	41.791.687.500	39.415.497.500	94,31	21.414.090.000	51,24	(2.376.190.000)	(18.001.407.500)	(20.377.597.500)

No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD		APBD		RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (4) - (3)	(7) = (5) - (4)	(8) = (5) - (3)
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20.282.355.004	20.110.967.004	99,15	16.716.863.000	82,42	(171.388.000)	(3.394.104.004)	(3.565.492.004)
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	101.095.477.317	73.265.540.987	72,47	58.823.343.000	58,19	(27.829.936.330)	(14.442.197.987)	(42.272.134.317)
33	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	70.579.736.509	48.905.020.478	69,29	37.676.631.620	53,38	(21.674.716.031)	(11.228.388.858)	(32.903.104.889)
34	Dinas Perkebunan	41.891.675.024	40.466.434.024	96,60	35.217.002.727	84,07	(1.425.241.000)	(5.249.431.297)	(6.674.672.297)
35	Dinas Kehutanan	51.067.291.353	46.299.912.408	90,66	43.358.054.055	84,90	(4.767.378.945)	(2.941.858.353)	(7.709.237.298)
36	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	59.565.904.172	42.226.863.875	70,89	40.933.890.409	68,72	(17.339.040.297)	(1.292.973.466)	(18.632.013.763)
37	Dinas Perdagangan	13.511.154.869	11.575.971.300	85,68	13.429.100.000	99,39	(1.935.183.569)	1.853.128.700	(82.054.869)
38	Dinas Perindustrian	14.074.654.870	16.145.038.845	114,71	15.296.574.970	108,68	2.070.383.975	(848.463.875)	1.221.920.100
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	40.889.807.419	25.168.462.072	61,55	19.637.113.770	48,02	(15.721.345.347)	(5.531.348.302)	(21.252.693.649)
40	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	40.972.866.381	33.295.704.246	81,26	26.618.710.000	64,97	(7.677.162.135)	(6.676.994.246)	(14.354.156.381)
41	Badan Pendapatan Daerah	68.169.657.098	64.854.904.000	95,14	78.105.296.100	114,57	(3.314.753.098)	13.250.392.100	9.935.639.002
42	Badan Kepegawaian Daerah	17.791.460.158	15.324.445.279	86,13	12.723.426.146	71,51	(2.467.014.879)	(2.601.019.133)	(5.068.034.012)
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.751.488.100	15.079.001.288	102,22	13.651.488.100	92,54	327.513.188	(1.427.513.188)	(1.100.000.000)
44	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.260.252.500	11.260.252.500	100,00	8.846.820.440	78,57	-	(2.413.432.060)	(2.413.432.060)

No. Urut	Perangkat Daerah	Kerangka Pendanaan dan Anggaran OPD					Selisih Kerangka Pendanaan dan Anggaran		
		RPJMD	RKPD		APBD		RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RPJMD			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (4) - (3)	(7) = (5) - (4)	(8) = (5) - (3)
45	Sekretariat DPRD	180.587.269.192	180.587.269.192	100,00	190.617.336.192	105,55	-	10.030.067.000	10.030.067.000
46	Biro Hukum dan HAM	8.242.546.187	7.754.717.287	94,08	5.183.255.000	62,88	(487.828.900)	(2.571.462.287)	(3.059.291.187)
47	Biro Pemerintahan	8.367.543.969	6.346.962.547	75,85	2.815.628.000	33,65	(2.020.581.422)	(3.531.334.547)	(5.551.915.969)
48	Biro Humas dan Protokol	13.390.039.549	12.882.552.248	96,21	11.753.571.940	87,78	(507.487.301)	(1.128.980.309)	(1.636.467.610)
49	Biro Perekonomian	7.493.885.438	7.008.397.838	93,52	4.298.114.734	57,35	(485.487.600)	(2.710.283.104)	(3.195.770.704)
50	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	10.072.107.945	10.072.107.945	100,00	11.349.866.000	112,69	-	1.277.758.055	1.277.758.055
51	Biro Kesejahteraan	13.310.488.070	12.914.308.070	97,02	11.608.180.000	87,21	(396.180.000)	(1.306.128.070)	(1.702.308.070)
52	Biro Organisasi dan Tata Laksana	8.827.107.706	7.804.082.706	88,41	6.942.620.000	78,65	(1.023.025.000)	(861.462.706)	(1.884.487.706)
53	Biro Umum dan Perlengkapan	95.907.966.529	77.111.878.967	80,40	75.613.920.600	78,84	(18.796.087.562)	(1.497.958.367)	(20.294.045.929)
54	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	18.670.529.796	24.030.595.446	128,71	16.000.000.000	85,70	5.360.065.650	(8.030.595.446)	(2.670.529.796)
55	Inspektorat Daerah	20.383.648.713	16.343.676.203	80,18	13.630.000.000	66,87	(4.039.972.510)	(2.713.676.203)	(6.753.648.713)
56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.809.031.250	16.863.158.250	85,13	8.584.800.500	43,34	(2.945.873.000)	(8.278.357.750)	(11.224.230.750)
57	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.115.810.000	14.115.810.000	100,00	16.058.095.000	113,76	-	1.942.285.000	1.942.285.000
58	Badan Penghubung Daerah	22.254.223.784	21.499.814.761	96,61	15.746.885.280	70,76	(754.409.023)	(5.752.929.481)	(6.507.338.504)
	<b>J U M L A H</b>	<b>3.577.139.490.624</b>	<b>3.054.078.382.465</b>	<b>85,38</b>	<b>2.854.999.565.627</b>	<b>79,81</b>	<b>(523.061.108.160)</b>	<b>(199.078.816.838)</b>	<b>(722.139.924.998)</b>

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat gambaran pada tabel di atas antara lain adalah sebagai berikut:

- a. RKPD terhadap RPJMD
  - 1) Jumlah pagu indikatif RKPD lebih kecil dibanding kerangka pendanaan RPJMD (85,38%), dengan total selisih Rp523.061.108.160,- (lima ratus dua puluh tiga milyar enam puluh satu juta seratus delapan ribu seratus enam puluh rupiah).
  - 2) Sejumlah 5 perangkat daerah memiliki angka yang sama antara RKPD dan RPJMD, 6 perangkat daerah memperoleh pagu indikatif RKPD yang lebih besar dari kerangka pendanaan RPJMD, sedangkan sisanya yaitu 47 perangkat daerah memperoleh pagu indikatif RKPD yang lebih kecil dari kerangka pendanaan RPJMD.
- b. APBD terhadap RKPD
  - 1) Jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding pagu RKPD (93,48%), dengan total selisih Rp. 199.078.816.838,- (seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta tujuh delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - 2) Tidak terdapat perangkat daerah yang memiliki jumlah pagu indikatif dan anggaran yang sama antara RKPD dan APBD, sejumlah 15 perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD lebih besar dibanding pagu indikatif RKPD, dan sisanya sejumlah 43 perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD yang lebih kecil dibanding pagu indikatif RKPD.
- c. APBD terhadap RPJMD
  - 1) Jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding kerangka pendanaan RPJMD (76,81%), dengan total selisih 722.139.924.998,- (tujuh ratus dua puluh dua milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
  - 2) Tidak ada perangkat daerah yang memiliki pagu APBD yang sama dengan kerangka pendanaan RPJMD, sejumlah 9 perangkat daerah memiliki pagu APBD yang lebih besar dibanding RPJMD, sedangkan sisanya yaitu 49 perangkat daerah memperoleh pagu APBD yang lebih kecil dibanding RPJMD.

### 3. Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2018

Keberhasilan pelaksanaan RKPD dipengaruhi oleh konsistensinya dalam penganggaran. Semakin banyak kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD, maka semakin kecil pula tingkat capaian RKPD.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan menggunakan tabel sebagaimana terlampir, diperoleh capaian kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Dari total 4.208 kegiatan dalam RKPD, terdapat 1.359 kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBD.
- b. Jumlah indikator output dari seluruh kegiatan tersebut adalah sejumlah 4.392 indikator (satu kegiatan bisa lebih dari satu indikator).
- c. Output yang tidak ada realisasinya adalah sejumlah 1.422, output yang tidak mencapai target adalah sejumlah 181, output yang capaiannya 100% adalah sejumlah 2.690, dan output yang capaiannya melebihi target adalah sejumlah 99.
- d. Kegiatan yang tidak ada realisasinya disebabkan beberapa faktor, antara lain dana APBN yang didampingi dana APBD tidak terealisasi, tidak dilaksanakan karena permasalahan teknis pelelangan atau kewenangan yang berubah, kesulitan memperoleh data realisasi dari bidang yang melaksanakan kegiatan.
- e. Rata-rata capaian perangkat daerah adalah 76,52% untuk kinerja output dan 85,96% untuk anggaran, dengan predikat kinerja “tinggi”. Capaian kinerja sebagaimana dimaksud selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II.382  
Capaian Program dan Kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

No. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Keg	Non APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian < 100%	Capaian 100%	Capaian >100%	Kinerja Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)		(8)	
1	Dinas Pendidikan	190	86	193	87	11	92	3	68,28	70,73	S	S
2	Dinas Kesehatan	240	145	243	149	3	88	3	44,03	85,70	SR	T
3	UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	23	3	23	3	0	19	1	90,81	81,89	ST	T
4	UPT Pelatihan Kesehatan	62	20	62	23	2	36	1	75,67	98,97	T	ST
5	UPT Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika	23	3	23	4	5	14	0	53,68	46,10	R	SR
6	UPK Balai Pelayanan Kesehatan	24	4	24	4	0	19	1	85,12	53,41	T	R
7	UPT Transfusi Darah	21	1	21	1	0	20	0	97,14	130,87	ST	ST
8	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	41	29	41	29	0	12	0	24,22	112,27	SR	ST
9	Rumah Sakit Khusus Daerah	45	12	46	12	0	34	0	66,79	79,31	S	T
10	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	33	27	33	27	0	4	2	27,56	71,34	SR	S
11	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	14	7	15	8	1	5	1	56,15	87,53	R	T
12	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	5	1	7	1	1	5	0	79,63	68,87	T	S
13	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	24	1	24	1	0	23	0	97,22	91,54	ST	ST
14	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	67	12	73	12	0	60	1	91,15	111,26	ST	ST
15	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	68	3	98	4	6	84	4	98,71	93,30	ST	ST
16	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan	52	2	81	10	0	66	5	91,97	93,44	ST	ST
17	Satuan Polisi Pamong Praja	61	19	61	20	0	41	0	68,33	66,72	S	S
18	Dinas Sosial	75	18	75	18	0	57	0	70,81	81,39	S	T
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	125	40	125	40	1	84	0	70,11	71,09	S	S

No. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Keg	Non APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian < 100%	Capaian 100%	Capaian >100%	Kinerja Perangkat Daerah			
									K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)		(8)	
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	54	0	55	0	3	51	1	99,95	100,25	ST	ST
21	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	108	32	110	34	3	73	0	74,09	98,29	S	ST
22	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	43	7	43	7	7	22	7	98,90	78,22	ST	T
23	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	42	1	46	6	0	40	0	100,00	110,70	ST	ST
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	104	47	104	49	2	53	0	54,22	65,79	R	S
25	Dinas Perhubungan	63	12	63	12	3	48	0	80,23	79,77	T	T
26	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	67	32	67	32	0	35	0	61,99	60,06	R	R
27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	136	82	137	83	0	54	0	53,96	101,19	R	ST
28	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	24	3	25	3	1	21	0	98,73	47,33	ST	SR
29	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	74	4	83	6	1	76	0	99,00	126,21	ST	ST
30	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	168	106	170	111	3	50	6	43,63	95,86	SR	ST
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	124	50	124	50	0	73	1	77,75	99,74	T	ST
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	254	32	277	41	20	216	0	84,79	86,89	T	T
33	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	82	20	94	25	13	51	5	65,85	62,33	S	R
34	Dinas Perkebunan	129	69	129	69	6	51	3	72,07	203,99	S	ST
35	Dinas Kehutanan	233	138	234	140	38	38	18	41,96	44,51	SR	SR
36	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	49	0	49	0	5	43	1	97,19	113,61	ST	ST
37	Dinas Perdagangan	55	18	55	18	0	37	0	75,40	99,65	T	ST
38	Dinas Perindustrian	41	6	41	6	0	35	0	90,95	82,00	ST	T

No. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Keg	Non APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian < 100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K		Rp	
									K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)		(8)		
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	92	8	135	10	3	121	1	92,49	81,47	ST	T
40	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	43	5	43	5	11	19	8	90,30	75,53	ST	T
41	Badan Pendapatan Daerah	113	3	113	3	1	108	1	84,30	91,00	T	ST
42	Badan Kepegawaian Daerah	118	54	118	54	0	64	0	54,34	52,85	R	R
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33	1	33	2	0	31	0	93,81	94,38	ST	ST
44	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	71	36	70	35	0	32	3	69,48	183,38	S	ST
45	Sekretariat DPRD	81	6	82	8	2	72	0	87,12	133,39	T	ST
46	Biro Hukum dan HAM	74	31	74	29	3	32	10	84,41	71,39	T	S
47	Biro Pemerintahan	41	23	51	29	3	17	2	44,46	41,94	SR	SR
48	Biro Humas dan Protokol	18	0	18	0	1	17	0	99,24	97,77	ST	ST
49	Biro Perekonomian	22	3	22	3	0	19	0	83,18	55,88	T	R
50	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	28	10	28	10	0	18	0	61,29	54,96	R	R
51	Biro Kesejahteraan	76	15	76	16	11	44	5	87,93	80,34	T	T
52	Biro Organisasi dan Tata Laksana	30	4	30	4	0	26	0	95,83	84,09	ST	T
53	Biro Umum dan Perlengkapan	47	0	47	0	0	47	0	100,00	84,75	ST	T
54	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	36	1	37	2	0	35	0	98,04	53,09	ST	R
55	Inspektorat Daerah	59	4	59	4	1	53	1	96,23	52,54	ST	R
56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	67	35	66	34	9	19	4	42,75	41,87	SR	SR
57	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	71	16	71	16	0	55	0	75,25	158,05	T	ST
58	Badan Penghubung Daerah	45	12	45	13	1	31	0	69,81	44,99	S	SR
	<b>J U M L A H</b>	<b>4.208</b>	<b>1.359</b>	<b>4.392</b>	<b>1.422</b>	<b>181</b>	<b>2.690</b>	<b>99</b>	<b>76,52</b>	<b>85,96</b>	<b>T</b>	<b>T</b>

Program dalam RKPD pada dasarnya terdiri dari program rutin, program pembangunan daerah dan program strategis perangkat daerah. Program rutin adalah program yang ada disetiap perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah adalah program yang langsung berhubungan dengan pencapaian visi dan misi RPJMD. Sedangkan program strategis perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan, pelayanan maupun pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Capaian outcome program pembangunan daerah dan program strategis perangkat daerah dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.383**  
**Capaian Target Outcome Program Pembangunan Daerah dan Program Strategis Perangkat Daerah**

No. Urut	Perangkat Daerah	Capaian Outcome Program Prioritas Dibandingkan Dengan Target RKPD			
		Jumlah Indikator	Belum tercapai	sesuai	melampaui
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan	47	21	12	14
2	Dinas Kesehatan	70	31	14	25
3	UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	2	0	2	0
4	UPT Pelatihan Kesehatan	5	1	4	0
5	UPT Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika	6	6	0	0
6	UPK Balai Pelayanan Kesehatan	4	0	4	0
7	UPT Transfusi Darah	3	0	3	0
8	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	5	2	3	0
9	Rumah Sakit Khusus Daerah	6	4	2	0
10	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	4	3	1	0
11	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	4	2	2	0
12	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	5	5	0	0
13	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	4	1	3	0
14	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	12	0	11	1
15	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	2	0	2	0
16	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan	6	2	2	2
17	Satuan Polisi Pamong Praja	4	0	4	0
18	Dinas Sosial	7	1	6	0
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27	15	9	3
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	1	6	0
21	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	14	4	9	1
22	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	4	2	2	0

No. Urut	Perangkat Daerah	Capaian Outcome Program Prioritas Dibandingkan Dengan Target RKPD			
		Jumlah Indikator	Belum tercapai	sesuai	melampaui
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
23	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6	2	4	0
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15	7	8	0
25	Dinas Perhubungan	2	0	2	0
26	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	5	2	3	0
27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	5	2	1
28	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	0	0	1
29	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8	2	6	0
30	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	11	1	7	3
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	2	6	1
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	20	14	0	6
33	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	4	0	7
34	Dinas Perkebunan	45	32	0	13
35	Dinas Kehutanan	8	2	1	5
36	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9	4	0	5
37	Dinas Perdagangan	11	1	6	4
38	Dinas Perindustrian	11	5	5	1
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	0	5	0
40	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	0	4	0
41	Badan Pendapatan Daerah	2	0	2	0
42	Badan Kepegawaian Daerah	2	0	2	0
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	0	2	0
44	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	0	1	1
45	Sekretariat DPRD	5	0	5	0
46	Biro Hukum dan HAM	10	1	5	4
47	Biro Pemerintahan	7	2	5	0
48	Biro Humas dan Protokol	2	0	2	0
49	Biro Perekonomian	3	0	3	0
50	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	2	2	0	0
51	Biro Kesejahteraan	7	4	1	2
52	Biro Organisasi dan Tata Laksana	1	0	0	1
53	Biro Umum dan Perlengkapan	1	1	0	0
54	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	2	0	2	0
55	Inspektorat Daerah	6	2	4	0
56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	0	9	1
57	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	1	7	0
58	Badan Penghubung Daerah	2	0	2	0
<b>JUMLAH</b>		<b>511</b>	<b>197</b>	<b>212</b>	<b>102</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian program dengan penjelasan antara lain sebagai berikut:



- a. Terdapat 511 indikator kinerja outcome program pembangunan daerah dan program strategis perangkat daerah dalam RKPD Tahun 2018.
- b. Sejumlah 197 outcome belum mencapai target yang ditetapkan, 212 outcome mencapai target 100%, dan 102 outcome melampaui target yang ditetapkan.
- c. Hal penting lainnya yang menjadi catatan adalah indikator kinerja outcome yang masih banyak kurang terukur atau tidak menunjukkan kinerja, misalnya “jumlah”, “persentase”, “meningkatnya”, dan lain-lain.

Hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana digambarkan di atas merupakan gambaran kinerja perangkat daerah, mengingat pelaksanaan RKPD dalam operasionalnya dilakukan oleh perangkat daerah.

Terkait dengan realisasi program dan kegiatan RKPD berdasarkan tabel-tabel di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:
  - 1) Tidak dianggarkan dalam APBD.
  - 2) Tidak diperoleh data yang valid dan terverifikasi dari perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab program/kegiatan.
  - 3) Tidak dilaksanakan karena perubahan peraturan perundangan dan/ atau kewenangan yang mendasari pelaksanaan suatu kegiatan.
  - 4) Kegiatan yang bersumber dari APBN yang akan didampingi kegiatan RKPD tidak terealisasi.
  - 5) Permasalahan teknis seperti lelang yang terlambat, cuaca, dan lain-lain.
- b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:
  - 1) Dianggarkan dalam APBD.
  - 2) Pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
  - 3) Anggaran yang tersedia mencukupi untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana.
- c. Faktor-faktor penyebab realisasi melebihi target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:
  - 1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai APBN.
  - 2) Dukungan stakeholders terhadap pelaksanaan program/kegiatan.
  - 3) Penetapan target lebih rendah dari anggaran yang tersedia.
- d. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:
  - 1) Peningkatan pemahaman aparatur perangkat daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.
  - 2) Penyusunan dokumen rencana dan anggaran sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundangan.
  - 3) Pengelolaan data yang baik.

Adapun pencapaian indikator makro pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 yang ditetapkan dalam RKPD adalah sebagai berikut:

Tabel II.384

Capaian Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

No	Uraian	Target RKPD	Capaian	Interpretasi
1.	Pertumbuhan Ekonomi	7,30	7,07	Belum tercapai
2.	Inflasi	3,50	3,50	sesuai
3.	PDRB Perkapita	52,67	52,85	melampaui
4.	Tingkat Kemiskinan	9,13	8,87	melampaui
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,40	5,34	Belum tercapai
6.	Gini Ratio	0,400	0,388	melampaui
7.	IPM	70,90		

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat target-target pembangunan yang belum tercapai. Hal ini menjadi perhatian dalam proses pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan di masa-masa yang akan datang.

### 2.5.1 Review Capaian Kinerja RPJMD

Review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai. Review capaian kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.385  
Review Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
I.	Terpeliharanya situasi kondusif bagi kehidupan beragama	Jumlah konflik sosial terkait kehidupan beragama		0	5.351.623.500	0	4.994.366.307	100,00	sesuai	93,32	ST	
1	Program Peningkatan Fungsi Dan Peran Lembaga Keagamaan Dan Tokoh Agama	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang peningkatan fungsi dan peran lembaga keagamaan dan tokoh agama	Orang	550	979.942.500	550	987.650.067	100,00	ST	100,79	ST	Biro Kesejahteraan
2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang pengembangan wawasan kebangsaan bidang keagamaan	Orang	2.175	4.371.681.000	1.118	4.006.716.240	51,40	R	91,65	ST	Biro Kesejahteraan
II.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Persentase Pertumbuhan ekonomi	%	7,41	207.569.048.664	7,07	105.712.364.818	belum tercapai		50,93	R	
		PDRB Per Kapita	Juta Rp.	52,67		52,85		melampaui				
		Inflasi	%	5,0 - 3,0		3,50		sesuai				

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi			Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
		Pengangguran Terbuka	%	5,39								
		Gini Ratio	Angka	0,429		0,388		melampaui				
1	Program Peningkatan Produksi Dan Mutu Produk Hortikultura	Kedelai dan Palawija lainnya	%	15,90	12.090.353.000	15,90	11.525.207.439	100,00	ST	95,33	ST	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Hortikultura	%	109,28	17.932.882.000	106,46	7.934.159.038	97,42	ST	44,24	R	Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura
3	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Telur	Kg	161.927.765	19.372.677.751	154.483.883	12.631.808.300	95,40	ST	65,20	T	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Produksi Ternak Kecil	Ekor	2.770.441		2.425.690		87,56	ST			
		Produksi Daging	Kg	126.115.572		136.923.764		108,57	ST			
		Produksi Ternak Kuda	Ekor	235.511		239.798		101,82	ST			
		Produksi Ternak Sapi Perah	Ekor	1.574		2.029		128,91	ST			
		Produksi Ternak Kerbau	Ekor	195.615		238.048		121,69	ST			
		Produksi Sapi Potong	Ekor	2.171.247		2.474.095		113,95	ST			
		Produksi susu	Kg	2.833.072		3.115.800		109,98	ST			
		Produksi Ternak Unggas	Ekor	102.068.604		106.893.280		104,73	ST			
4		Nilai Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Triliun Rp.	16.650	29.312.434.024		16.110.547.895	-	SR	54,96	R	Dinas Perkebunan

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
	Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Produktifitas Komoditi Unggulan Perkebunan	Kg/Ha	1.055				-	SR			
		Volume Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Ton	56.187		33.842		60,23	S			
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah tenaga kerja Nelayan Perairan umum	Orang	1.228.648	20.153.550.945	1.004.221	18.578.596.075	81,73	ST	92,19	ST	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai produksi perikanan Tangkap	Juta Rp.	4.568.635		3.281.665		71,83	T			
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	104,09		107,66		103,43	ST			
		Jumlah produksi perikanan Tangkap	Ton	307.145		250.441		81,54	ST			
		Jumlah tenaga kerja Nelayan	Orang	119.074		155.458		130,56	ST			
6	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.599.528	21.005.059.000	2.523.722	12.517.812.128	54,87	R	59,59	S	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah tenaga pembudidaya	Orang	510.809		276.427		54,12	R			
		Nilai Produksi Perikanan Budidaya	Juta Rp.	13.245.584		6.586.331		49,72	R			



No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi			Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
		Nilai Tukar pembudidaya	%	108,50		303,78		279,98	ST			
7	Program Peningkatan Usaha Kehutanan	Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan (m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	282.366	2.063.950.000	460.642	497.310.000	163,14	ST	24,10	SR	Dinas Kehutanan
		Jumlah produksi pangan dalam hutan	Ton	25,00		90,49		361,96	ST			
		Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	2.947		12.623		428,33	ST			
8	Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Terlaksananya pelatihan SDM sumber daya lokal (Disperindus)	IKM	5	4.157.873.000	5	3.999.854.916	100,00	ST	96,20	ST	Dinas Perindustrian
		Meningkatnya Produksi dan Produktivitas industri lokal (Disperindus)	Industri	6		6		100,00	ST			
		Terlatihnya Peserta dalam pengembangan Produk sebanyak 2.250 IKM (Disperindus)	Orang	65		150		230,77	ST			
9		Jumlah Koperasi aktif	Unit	8.063	5.265.650.000	5.271	1.486.267.127	65,37	T	28,23	SR	

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Dan UMKM	jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah	Unit	158.718		153.956		97,00	ST			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah koperasi besar	Unit	30		28		93,33	ST			
10	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	Jumlah wirausaha baru	Orang	313.845	51.226.550.194	458.890	6.868.479.669	146,22	ST	13,41	SR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	250.000	8.107.070.000	250.000	3.580.455.851	100,00	ST	44,16	R	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	7.250.000		7.250.000		100,00	ST			
12	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	jumlah destinasi pariwisata menjadi destinasi unggulan	Destinasi	4	5.078.665.000	4	1.275.143.692	100,00	ST	25,11	SR	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
13	Program Pengendalian Lahan Pangan Berkelanjutan	Jumlah Regulasi lahan pangan berkelanjutan	Perda	1	500.000.000			-	SR	-	SR	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
14	Program Kelembagaan, Ketenagaan Dan	Jumlah kecamatan yang Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan	BP3K	115	4.440.002.500	117	3.398.144.128	101,74	ST	76,53	T	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	dan Kehutanan (BP3K) berbasis teknologi informasi, memiliki demplot terintegrasi pertanian, perikanan dan kehutanan										Pangan dan Hortikultura
15	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	105,00	6.862.331.250	105,00	5.308.578.560	100,00	ST	77,36	T	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Peningkatan konsumsi pangan yang sehat dan aman (skor Pola Pangan Harapan (PPH)	angka	87,70		87,70		100,00	ST			
		Jumlah kelompok yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi dan peningkatan pendapatan keluarga	Kelompok	80		80		100,00	ST			
III.	Terwujudnya kesejahteraan sosial	Angka kemiskinan	%	9,48	9.455.551.928	8,87	9.037.061.223	93,57	melampaui	95,57	ST	

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya	RTM	5.040	1.450.000.000	5.625	961.914.000	111,61	ST	66,34	T	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS	Jiwa	450	1.600.000.000	450	1.746.144.540	100,00	ST	109,13	ST	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	%	50					SR			
3	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS dalam dan Luar Panti	Jiwa	650	753.970.928	650	939.882.600	100,00	ST	124,66	ST	Dinas Sosial
4	Program Pembinaan Anak Terlantar	Cakupan anak terlantar yang diberikan pembinaan kearah kemandirian	Jiwa	510	3.151.581.000	510	3.020.143.551	100,00	ST	95,83	ST	Dinas Sosial
5	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Persentase Penyandang disabilitas dan trauma dalam pemulihan keberfungsian sosial	Jiwa	100	150.000.000	55	-	55,00	R	-	SR	Dinas Sosial

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)		(9)	
6	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase sarana sosial, panti asuhan, panti jompo yang melakukan pembinaan di dalam dan luar panti	Jiwa	255	2.350.000.000	255	2.368.976.532	100,00	ST	100,81	ST	Dinas Sosial
<b>IV.</b>	<b>Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Angka</b>	<b>63,72</b>	<b>27.250.283.972</b>		<b>13.932.292.973</b>	-		<b>51,13</b>	<b>R</b>	
1	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi SDA	lokasi	184	1.663.110.000	108	785.955.265	58,70	S	47,26	R	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah penurunan beban pencemaran	Ton	< 30,43	6.538.523.972		5.442.005.721			83,23	ST	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	Angka	3,37	1.827.000.000	3,17	1.031.730.051	94,07	ST	56,47	S	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
4	Program Peningkatan Fungsi Dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	430.885	5.500.600.000	217.358	3.058.202.136	50,44	R	55,60	S	Dinas Kehutanan
5		Luas kebakaran hutan yang dikendalikan	Ha	309,33	11.721.050.000	341,17	3.614.399.800	110,29	ST	30,84	SR	Dinas Kehutanan



No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
	Program Perlindungan Hutan Dan Konservasi Sumberdaya Alam	Jumlah ilegal logging yang tertangani	m3	86,04		20,51		23,84	SR			
V.	Meningkatnya kualitas manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,90	123.533.651.332	70,90	61.868.038.746	100,00	sesuai	50,08	R	
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,90				-				
		Angka Harapan Hidup	Tahun	70,27				-				
1	Program Intensifikasi Dan Perluasan Akses Pendidikan Keaksaraan Fungsional	Jumlah Melek Aksara Yang Menerima SUKMA	Orang	386.700	2.158.766.040	386.700	361.975.000	100,00	ST	16,77	SR	Dinas Pendidikan
		Angka Melek Huruf	%	95		95		99,59	ST			
		Rata Lama Sekolah	%	8		8		102,71	ST			
2	Program Peningkatan Pendidikan Non Formal Dan Informal	Taman bacaan masyarakat	Paket	55	889.296.000	55	456.612.000	100,00	ST	51,35	R	Dinas Pendidikan
3	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	700.000	6.170.369.623	342.999	4.152.934.901	49,00	R	67,30	T	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah pengelola perpustakaan yang telah mengikuti bimtek	Orang	3.500		2.474		70,69	T			

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
		Jumlah bahan pustaka yang terbaca	Exp	500.000		927.428		185,49	ST			
4	Program Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Putus Sekolah / Drop Out	% SMP Sederajat	0,70	38.647.060.000	0,90	36.665.945.000	128,57	ST	94,87	ST	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	% SMP Sederajat	95,00		94		98,51	ST			
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	% SMA Sederajat	64,25		82		127,24	ST			
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	% SD Sederajat	99,50		98		98,49	ST			
		Angka Partisipasi Murni (APM)	% SM Sederajat	64,25		71		110,33	ST			
		Angka Partisipasi Kasar (APK)	% SMP Sederajat	113,50		98		86,14	ST			
		Angka Partisipasi Kasar (APK)	% SMA Sederajat	99,50		81		81,88	ST			
		Angka Partisipasi Murni (APM)	% SMP Sederajat	78,00		80		102,81	ST			
		Angka Melanjutkan (AM)	% SD ke SMP	100,00		99		99,12	ST			
		Angka Putus Sekolah / Drop Out	% SMA Sederajat	1,00		1		100,00	ST			

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(9)	
5	Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	%	97	394.750.000	100	394.750.000	103,09	ST	100,00	ST	Dinas Pendidikan
6	Program Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik yang Berkualifikasi S1/D4	% SMP	77	26.787.086.154	97	1.025.290.000	126,57	ST	3,83	SR	Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidik yang Bersertifikat Pada	% SMA	80		54		67,20	T			
		Persentase Pendidik yang Berkualifikasi S1/D4	% SMA	80		99		124,23	ST			
		Persentase Pendidik yang Bersertifikat Pada	% SMK	84		42		50,79	R			
		Persentase Pendidik yang Bersertifikat Pada	% SMP	77		50		64,56	S			
		Pembinaan Guru Mengaji, Muballiq Khatib dan Alim Ulama	Orang	3.100		3.100		100,00	ST			
		Persentase Pendidik yang Bersertifikat Pada	% SD	45		44		97,44	ST			
7	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SMK Akreditasi B	50	17.736.323.060	35	6.125.193.793	69,72	T	34,53	SR	Dinas Pendidikan

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
		Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SMA Akreditasi B	50		31		61,44	S	
		Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SMP Akreditasi B	40		35		87,75	ST	
		Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SMA Akreditasi A	30		39		130,83	ST	
		Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SMP Akreditasi A	19		19		102,58	ST	
		Rasio Guru Persiswa	% SD							
		Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SMK Akreditasi A	34		17		50,59	R	
		Rasio siswa Perkelas	% SM	30,50		57,64		52,92	R	
		Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SD Akreditasi B	70		62		88,17	ST	
		Rasio siswa Perkelas	% SD							
		Rasio siswa Perkelas	% SMP	57,01		60		94,36	ST	

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi			Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
8	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Situs Cagar Budaya yang akan dilestarikan	situs	3	4.115.970.000	3	1.044.971.440	100,00	ST	25,39	SR	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
		Jumlah kawasan budaya yang dilestarikan	kawasan	n.a				n.a	ST			
9	Program Pengkajian, Pengembangan Dan Pelestarian Nilai Nilai Budaya	Jumlah kajian budaya lokal	kajian	2	676.150.000	2		100,00	ST	-	SR	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
		Jumlah pendokumentasian serta penyebarluasan naskah sejarah budaya lokal	Naskah									
10	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	22	7.089.924.000	22	1.047.575.700	100,00	ST	14,78	SR	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
		Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	sarpras	4		4		100,00	ST			
11	Pengembangan Budaya Maritim Brbasis Budaya Lokal Sulawesi Selatan	Cakupan pengkajian dan pengembangan komunitas spesifik	%	100	291.050.000	100	91.025.890	100,00	ST	31,28	SR	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata



No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
		maritim dan cakupan pengembangan museum budaya maritim										
12	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Presentase kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan	%	100	4.098.600.000	100	4.128.213.807	100,00	ST	100,72	ST	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase RS Prov/kab/Kota yang telah menjadi BLU	%	100	2.337.000.000	78	588.587.400	78,20	T	25,19	SR	Dinas Kesehatan
		Rasio Dokter Spesialis	per 100.000 Penduduk	13		16		123,08	ST			
		Rasio Dokter Umum		22		17		77,27	T			
		Rasio Perawat		100		136		136,00	ST			
		Rasio Bidan		58		59		101,72	ST			
		Rasio Ahli Gizi		18		13		72,22	T			
		Rasio Apoteker		9		11		122,22	ST			
		Rasio Ahli Sanitasi		17		9		52,94	R			
		Rasio Dokter Gigi		8		8		100,00	ST			
		Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat		25		18		72,00	T			
		Regulasi RS yang dihasilkan		Dokumen		1						

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
		RS Terakreditasi Internasional	RS	1		1		100,00	ST	
		RS Terakreditasi Nasional (Versi 2012)	RS	5		2		40,00	SR	
		PKM yang telah melaksanakan Akreditasi Pelayanan	PKM	10		190			ST	
		Persentase RS yang melakukan pelaporan SIRS on line	%	100		100		100,00	ST	
		Persentase RS yang melaksanakan SPGDT (sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	%	40		40		100,00	ST	
		Persentase RS Swasta yang telah mempunyai registrasi	%	100		100		100,00	ST	
		Persentase RS Swasta yang telah memiliki izin RS	%	90		100		111,11	ST	
		Persentase RS Swasta yang telah	%	100		89		89,36	ST	

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
		melaksanakan penetapan kelas										
		Persentase RS sebagai wahana internship	%	100		100		100,00	ST			
		Persentase RS Pusat rujukan sebagai RS kelas B	%	100		100		100,00	ST			
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan kab/kota	%	100		100		100,00	ST			
		Persentase RS Pemerintah yang telah mempunyai registrasi	%	100		96		95,74	ST			
		Persentase RS non pusat rujukan sebagai RS kelas C	%	100		92		92,30	ST			
		Persentase RS Pemerintah yang telah memiliki izin RS	%	100		100		100,00	ST			
14	Pengadaan Obat, Pengawasan Obat, Makanan	Persentase Ketersediaan Obat	%		2.224.687.800		735.883.392		SR	33,08	SR	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
	Dan Pengembangan Obat Asli Indonesia	Meningkatnya kualitas pelayanan kefarmasian pada sarana pelayanan obat tradisional	%	65		55		84,62	ST			
		Persentase Pengawasan Obat dan Makanan yang layak, bermutu dan aman dikonsumsi masyarakat	%	45		55		122,22	ST			
		Persentase Ketersediaan Obat Generik	%	80		85		106,25	ST			
		Persentase kualitas kefarmasian dalam pengembangan Obat Asli Indonesia	%	80		55		68,75	T			
15	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya cakupan Kepesertaan Kemitraan Asuransi Kesehatan Menuju Universal Coverage	%	80	1.384.280.000	87	540.860.900	108,89	ST	39,07	SR	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya cakupan Kepesertaan Jaminan	%	100		100		100,00	ST			

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	
		Kesehatan Daerah (Jamkesda) Menuju Universal Coverage									
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100		100	100,00	ST			
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100		100	100,00	ST			
16	Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan	Cakupan Akses Sanitasi Dasar	%	70	3.866.254.600	83	117,96	ST	64,42	S	Dinas Kesehatan
		Menurunkan Prevalensi Perokok Anak dan Remaja	%	6		3	50,18	R			
		Prevalensi Penduduk Usia > 15 Tahun dengan Tekanan Darah Tinggi	%	19		13	68,28	T			
		Cakupan Kualitas Air Minum Masyarakat	%	86		82	95,43	ST			
		Mempertahankan Prevalensi Obesitas	%	14		10	74,26	T			



No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
		Cakupan Desa/Kelurahan yang mencapai universal child Immunization (UCI)	%	95		94		99,22	ST			
17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Balita Dan Lansia	Kematian Bayi (Kasus)	Kasus	1.038	2.061.500.000	1.183	223.510.960	87,74	ST	10,84	SR	Dinas Kesehatan
		Persentase Kelompok Lansia Aktif	%	88		90		102,27	ST			
		Cakupan Peserta KB aktif	%	69		72		104,91	ST			
		Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (PN)	%	96		93		96,77	ST			
		Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	%	73		76		104,77	ST			
		Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	82		88		106,71	ST			
		Cakupan Pelayanan Nifas	%	90		91		101,47	ST			

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
		Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	70		76		109,26	ST			
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	93		89		95,97	ST			
		Cakupan Kunjungan Bayi	%	98		98		100,08	ST			
		Cakupan Kunjungan Balita	%	64		69		107,95	ST			
18	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan ASI Eksklusif	%	70	913.184.055	68	118.175.000	97,14	ST	12,94	SR	Dinas Kesehatan
		Cakupan Gizi Buruk yang memperoleh Perawatan	%	100		100		100,00	ST			
		Prevalensi Balita Stunting	%	33		36		92,94	ST			
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	18		20		86,63	ST			
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	4		5		80,00	T			
		Cakupan Penimbangan Balita (D/S)	%	84		81		96,43	ST			

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
		Cakupan Pendistribusian Vitamin A pada Balita	%	89		85		95,28	ST			
		Cakupan Ibu Hamil yang mengkonsumsi tablet Fe 90 Tablet	%	86		87		101,16	ST			
		Cakupan Kab/kota yang melaksanakan surveilansa Gizi	%	100		100		100,00	ST			
		Cakupan Konsumsi garam beryodium	%	87		89		102,53	ST			
19	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	% Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	862.000.000	97	847.911.000	97,11	ST	98,37	ST	Dinas Kesehatan
		% Cakupan PHBS Rumah Tangga	%	65		56		86,55	ST			
20	Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	Rasio akseptor KB Aktif (Jml akseptor KB Aktif/Jumlah pasangan usia subur)	%	30,35	829.400.000	30,35	827.843.323	100,00	ST	99,81	ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Prevalansi Peserta KB Aktif Keluarga Sejahtera	%	6,00		6		100,00	ST			

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)		(9)	
VI.	Meningkatnya dukungan infrastruktur daerah	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	%	74,26	556.398.998.310	73,61	465.948.505.185	99,12	belum tercapai	83,74	ST	
1	Program Penyelenggaraan Jalan	% Terhubungnya Pusat-Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi (Konektivitas) di wilayah Provinsi	%	100	186.949.697.076	100	177.236.441.008	100,00	ST	94,80	ST	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		% Tingkat Kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (Baik dan Sedang)	%	64,97		64,97		100,00	ST			
2	Pembangunan Transportasi Massal	% Pelayanan angkutan umum massal	%	35	7.500.000.000	39		111,43	ST	-	SR	Dinas Perhubungan
3	Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana Dan Pelayanan Transportasi Darat	% Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan	%	100	19.662.600.000	100	12.822.218.700	100,00	ST	65,21	T	Dinas Perhubungan
4	Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana Dan Pelayanan Transportasi Laut	% Pelayanan pelayaran	%	90	1.147.180.000	90	855.946.900	100,00	ST	74,61	T	Dinas Perhubungan
5	Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana Dan Pengawasan	Persentase layanan public berbasis elektronik	%		11.214.085.600		3.047.816.889			27,18	SR	Dinas Perhubungan

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi			Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
	Bidang Kominfo, Media Massa, Pos Dan Telekomunikasi	% Penyelenggaraan Komunikasi Publik	%	100		100		100,00	ST			
		Jumlah Pengamanan Penyelenggaraan Persandian pada OPD Prov.Sulsel	OPD	61		61		100,00	ST			
		% Pengelolaan Informasi Publik	%	100		100		100,00	ST			
6	Fasilitasi Dan Pembinaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	per satuan penduduk	0,195	4.373.571.642	0,195	3.695.673.779	100,00	ST	84,50	ST	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi bantuan peningkatan kualitas rumah	Unit									
		Persentase kawasan kumuh	%	0,095		0,095		100,00	ST			
7	Fasilitasi Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	83,00	41.881.859.265	84,20	31.946.047.378	101,45	ST	76,28	T	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
		Persentase Penanganan Sampah	%	83,00		83,80		100,96	ST			



No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi			Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
		Persentase rumah tangga berakses air minum	%	87,00		92,00		105,75	ST			
8	Program Pengembangan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Gedung	% Perwujudan Kawasan CPI	%	15,00	158.304.282.000	15	84.303.411.800	100,00	ST	53,25	R	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
		% Penataan bangunan dan lingkungan	%	100,00		100		100,00	ST			
		% Pembangunan wisma negara	%	22,00		25,87		117,59	ST			
9	Program Pengembangan Dan Pengelolaan, Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	% Cakupan layanan jaringan irigasi	%	80,00	54.043.611.640	80,00	39.971.374.437	100,00	ST	73,96	T	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
10	Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	% Ketersediaan air baku	%	100,00	25.686.628.087	100	80.110.457.882	100,00	ST	311,88	ST	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
11	Program Kedaulatan Energi	Ratio Desa Berlistrik		97,00	24.162.588.000	95,80	13.969.006.642	98,76	ST	57,81	S	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jumlah Bio Energi yang dibangun	Unit	776		257,00		33,12	SR			
12	Program Pemetaan Dan Penyelidikan Geologi, Sumberdaya Mineral,	Jumlah Pembangunan Sumur Bor	Unit	13	5.841.205.000	16	4.957.374.218	123,08	ST	84,87	ST	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Cadangan Sumberdaya	Kilo Ton	335.000		514.640		153,62	ST			

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
	Batubara, Dan Panas Bumi Serta Eksplorasi Dan Penyediaan Air Tanah	Luas Wilayah Pemetaan	Ha	3.500		4.558		130,23	ST			
13	Program Peningkatan Upaya Pengelolaan Dan Konservasi Pertambangan Dan Mineral	Jumlah Produksi Mineral dan Batubara	Ton Batubara	14.000	1.561.137.000	51.063	1.867.629.092	364,74	ST	119,63	ST	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jumlah Produksi Mineral dan Batubara	M3 Batuan	1.750.000		689.921		39,42	SR			
		Jumlah Produksi Mineral dan Batubara	Ton Non Logam	11.100.000		14.684.509		132,29	ST			
		Jumlah Produksi Mineral dan Batubara	Ton Logam	85.500		73.879		86,41	ST			
14	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau Kecil Serta Konservasi Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya diberdayakan	Pulau	12	7.967.785.000	3	5.425.082.360	25,00	SR	68,09	T	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi garam yang dihasilkan	Ton	177.887		73.789		41,48	R			
		Cakupan Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Ha	107.605		95.752		88,98	ST			

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)		(9)	
15	Program Pencegahan, Mitigasi Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria siaga bencana	Kab/Kota	15	1.220.527.500	15	1.357.477.100	100,00	ST	111,22	ST	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana	% terpenuhinya aspek standar minimal logistik dan peralatan penanggulangan bencana provinsi sulawesi selatan	%	100	3.418.020.000	100	1.021.254.500	100,00	ST	29,88	SR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	%Kabupaten/kota yang menyusun rencana aksi rehabilitasi	%	100	1.464.220.500	100	3.361.292.500	100,00	ST	229,56	ST	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>VII.</b>	<b>Meningkatnya daya saing investasi daerah</b>	<b>Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)</b>	<b>Triliun Rp.</b>	<b>10,00</b>	<b>20.830.778.967</b>	<b>11,55</b>	<b>7.721.072.741</b>	<b>115,50</b>	<b>melampaui</b>	<b>37,07</b>	<b>SR</b>	
1	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Jumlah Realisasi Investasi	Triliun Rp.	10,00	10.223.966.000	11,55	1.800.312.615	115,50	ST	17,61	SR	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Memperluas kesempatan kerja anggota kelompok melalui pembinaan	Kelompok	500	2.034.550.000	540	1.659.874.279	108,00	ST	81,58	ST	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
		kelompok usaha mandiri, kelompok wirausahaproduktif dan padat karya								
		Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Lokal Maupun Tenaga Kerja Luar Negeri	Orang	100.000		89.460		89,46	ST	
		Memperluas kesempatan kerja anggota kelompok melalui pembinaan kelompok usaha mandiri, kelompok wirausahaproduktif dan padat karya	Orang	100				-	SR	
		Memperluas kesempatan kerja anggota kelompok melalui pembinaan kelompok usaha	Kelompok	2				-	SR	

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi			Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
		mandiri, kelompok wirausahaproduktif dan padat karya										
3	Program Penelitian, Pengembangan Dan Pemanfaatan Sdm Dan Iptek Daerah	Jumlah Hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Hasil Litbang	8	5.265.000.000	8	2.820.926.795	100,00	ST	53,58	R	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Jumlah Inovasi daerah yang dihasilkan	Inovasi	2	2.042.517.967	3	1.088.657.236	150,00	ST	53,30	R	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	Program Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah	Jumlah MoU /PKS yang difasilitasi, jumlah kerjasama dipantau/di Monev pelaksanaannya dalam kerangka BKPRS serta kerjasama antar Daerah dan Pihak Ketiga	MoU/PKS	82	666.220.000		351.301.816	-	SR	52,73	R	Biro Pemerintahan
6	Program Pengembangan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah kerjasama luar negeri	MoU	4	372.825.000			-	SR	-	SR	Biro Pemerintahan



No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)			
7	Program Pengembangan Kerjasama Kawasan Andalan	Persentase Kerjasama pengembangan kawasan andalan	%	20	225.700.000			-	SR	-	SR	Biro Pemerintahan	
VIII.	Meningkatnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	71,28	10.079.741.687		5.689.060.581	-		56,44	S		
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	93,74				-					
1	Program Peningkatan Sistem Legislasi Daerah	Jumlah rancangan produk hukum/produk hukum (Perda,Pergub,Kepgub, dan PKS) yang dikaji dan finalisasi	Kepgub	1.358	2.375.000.000		532.253.534	241,83	ST	22,41	SR	Biro Hukum dan HAM	
		Jumlah rancangan produk hukum/produk hukum (Perda,Pergub,Kepgub, dan PKS) yang dikaji dan finalisasi	Perda	10				7	70,00				T
		Jumlah rancangan produk hukum/produk hukum	Pergub	50				151	302,00				ST

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
		(Perda, Pergub, Kepgub, dan PKS) yang dikaji dan finalisasi								
		Jumlah rancangan produk hukum/produk hukum (Perda, Pergub, Kepgub, dan PKS) yang dikaji dan finalisasi	MoU	15		42		280,00	ST	
2	Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase pembinaan PPNS daerah	%	100	1.438.668.287	100	837.365.358	100,00	ST	58,20
		Jumlah Perda Kab/Kota yang difasilitasi penggunaan dan pengawasan produk hukumnya	Perda	250		255		102,00	ST	
		Persentase jaringan dokumentasi hukum yang dapat menunjang informasi bagi masyarakat	%	100		100		100,00	ST	

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya nilai indeks demokrasi indonesia	Angka	68,00	2.166.500.000	69	76.500.000	100,78	ST	3,53	SR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Politik, Hukum, Ekonomi	%	65,00	918.882.500	65,00	1.111.605.200	100,00	ST	120,97	ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi	%	75,00		25,00		33,33	SR			
5	Program Perlindungan Perempuan	Persentase layanan rujukan lanjutan bagi korban kekerasan terhadap perempuan lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota	%	48,00	1.492.461.000	48,00	1.465.187.289	100,00	ST	98,17	ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Lembaga Layanan Pemerintah dan Non Pemerintah Lingkup Prov yang	%	40,00		35,00		87,50	ST			

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)		(9)	
		melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan										
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang mengintegrasikan Pemenuhan Hak Anak	%	55,00	1.218.667.500	55,00	1.214.426.800	100,00	ST	99,65	ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penanganan Perlindungan Khusus Anak	%	41,00	469.562.400	41,00	451.722.400	100,00	ST	96,20	ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IX.	Berkurangnya gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat	Angka Kriminalitas (jumlah kejahatan yang dilaporkan)	Kasus	19.422	5.693.692.250		922.479.000	-		16,20	SR	
1	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan keamanan, ketentraman dan	%	20	4.148.375.000	20	575.054.000	100,00	ST	13,86	SR	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
		ketertiban serta perlindungan masyarakat										
2	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Persentase Peningkatan kualitas pelayanan keamanan dan pemberdayaan potensi masyarakat untuk mewujudkan rasa aman masyarakat	%	20	535.317.250	20	347.425.000	100,00	ST	64,90	S	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan penguatan kebangsaan dan pilar NKRI melibatkan pramuka dan generasi muda, Ormas dan LSM yang terlaksana	Kegiatan	100	860.000.000			-	SR	-	SR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kelompok kerja yang membantu dalam memberi pemahaman	Kegiatan	1	150.000.000			-	SR	-	SR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)		(9)	
X.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah	Opini Laporan Keuangan		WTP	68.254.168.412	WTP	58.594.711.246	100,00	sesuai	85,85	ST	
1	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	% Pelaksanaan Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara Sesuai dengan standar yang telah ditentukan	%	100	5.839.865.525	100	5.339.423.899	100,00	ST	91,43	ST	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian minimal yang terpenuhi dengan akurat dan tepat waktu.	%	100		100		100,00	ST			
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan ASN yang mengikuti kediklatan lingkup Pemprov dan kab/kota	%	100	7.011.804.000	100	5.064.832.340	100,00	ST	72,23	T	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Tercapainya tingkat kompetensi peserta setelah mengikuti diklat	orang	3.405		355		10,43	SR			

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi			Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
		Persentase aparaturnya Sat.Pol.PP Prov. Sul Sel yang terlatih	%	62,00		30,00		48,39	R			
3	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase pembentukan DOB	%	20	273.062.800	20	28.395.400	100,00	ST	10,40	SR	Biro Pemerintahan
		Capaian skor Indeks Efektivitas Pemerintahan	%	80		80		100,00	ST			
4	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Daerah	Penegakan peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan	%	100	15.153.173.900	100	16.364.170.026	100,00	ST	107,99	ST	Badan Pendapatan Daerah
		Peningkatan PAD	Triliun	3,53		3,98		112,56	ST			
		Persentase capaian target pendapatan setiap tahun	%	100,00		100,00		100,00	ST			
		Persentase akurasi data objek dan subjek pajak	%	80,00		80,00		100,00	ST			
		Persentase Tertib administasi pengelolaan pendapatan daerah	%	90,00		90,00		100,00	ST			

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi			Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
		Persentase pemenuhan kebutuhan NSPM di bidang pendapatan	%	100,00		100,00		100,00	ST			
		Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat tentang pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya.	kegiatan / tahun	8		8		100,00	ST			
5	Program Peningkatan Aksesibilitas, Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Pajak Daerah	Tersedia dan efektifnya pelayanan Drive Thru, Gerai Samsat, Samsat Payment Point, Samsat Keliling, penerapan Standar ISO 9001:2000	%	90	1.070.146.000	90	663.159.503	100,00	ST	61,97	S	Badan Pendapatan Daerah
6	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan penerbitan SPD dan SP2D yang diberikan	%	100	15.766.263.310	100	11.717.247.068	100,00	ST	74,32	T	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Laporan pertanggungjawaban	%	100		100		100,00	ST			

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi			Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
		pelaksanaan APBD Prov. SulSel diserahkan tepat waktu										
		Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok dan Perubahan	%	100		100		100,00	ST			
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio ruang terbuka hijau	%	24	3.590.557.500	24	3.055.145.406	100,00	ST	85,09	ST	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Rasio ketaatan terhadap RT/RW	%	68		68		100,00	ST			
8	Program Koordinasi Pembangunan	Tingkat efektivitas kontribusi kabupaten/kota dalam mencapai target kinerja sasaran pembangunan nasional	%	80	4.506.826.700	80	3.059.304.500	100,00	ST	67,88	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Kesesuaian muatan antara dokument perencanaan	%	100		100		100,00	ST			
9	Program Pengembangan Data Dan Informasi	% Ketersediaan data dan informasi hasil perencanaan dan	%	100	2.710.951.177	100	1.487.139.043	100,00	ST	54,86	R	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi				Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		
		pelaksanaan pembangunan										
10	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDES yang difasilitasi	Bumdes	426	2.725.626.000	426	2.513.576.601	100,00	ST	92,22	ST	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	%Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif)	%	64,20	2.000.000.000	64,20	2.334.793.403	100,00	ST	116,74	ST	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Kelompok Binaan LPM	Kelompok	6		6		100,00	ST			
		Persentase LPM Berprestasi	%	14,50		14,50		100,00	ST			
12	Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan	PKK Aktif	%	98,02	2.205.891.500	97,72	1.155.804.277	99,69		52,40	R	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Posyandu Aktif	%	99,89		99,89		100,00	ST			
13	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa	Kegiatan	5	5.400.000.000	5	5.811.719.780	100,00	ST	107,62	ST	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah Aparat Desa Yang ditingkatkan Kapasitasnya	orang	5.821		4.342		74,59	T			



No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Capaian Kinerja (%) & Interpretasi			Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	
		Jumlah Desa Berstatus Swasembada	Desa	100		60		60,00	S		
<b>JUMLAH</b>					<b>1.034.417.539.023</b>		<b>734.419.952.820</b>	<b>95,27</b>	<b>ST</b>	<b>63,20</b>	<b>S</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bagaimana capaian kinerja RPJMD untuk pelaksanaan tahun 2018. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi antara lain adalah sebagai berikut: jawab

1. Realisasi kerangka pendanaan RPJMD adalah sebesar 63,20% dengan predikat “sedang”.
2. Terdapat capaian outcome maupun sasaran yang belum tersedia data capaiannya.
3. Terdapat program prioritas yang tidak dianggarkan dalam APBD.
4. Dari sejumlah 254 indikator program prioritas RPJMD untuk tahun 2018, terdapat 20 indikator atau 7,87% dengan predikat capaian kinerja “sangat rendah”, 14 indikator atau 5,51% dengan predikat “rendah”, 5 indikator atau 1,97% dengan predikat “sedang”, 15 indikator atau 5,91% dengan predikat “tinggi” dan sisanya sejumlah 200 indikator atau 78,74% dengan predikat “sangat tinggi”.
5. Dari sejumlah 96 program prioritas RPJMD untuk tahun 2018, terdapat 31 program atau 32,29% dengan predikat kinerja anggaran “sangat rendah”, 11 program atau 11,46% dengan predikat “rendah”, 8 program atau 8,33% dengan predikat “sedang”, 13 program atau 13,54% dengan predikat “tinggi” dan sisanya sejumlah 33 program atau 34,38% dengan predikat “sangat tinggi”.

Mengingat RKPD Tahun 2018 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018, berikut ini disajikan data pencapaian akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

Tabel II.386  
Capaian RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
I.	Terpeliharanya situasi kondusif bagi kehidupan beragama	Jumlah konflik sosial terkait kehidupan beragama	kasus	0	0	35.924,45	0	23.702,67	100,00	65,98	sesuai	S	
1	Program Peningkatan Fungsi Dan Peran Lembaga Keagamaan Dan Tokoh Agama	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang peningkatan fungsi dan peran lembaga keagamaan dan tokoh agama	Orang	200	3.410	11.884,78	2.648	5.050,40	77,65	42,49	belum tercapai	SR	Biro Kesejahteraan
2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bidang Keagamaan	Jumlah orang yang mendapatkan pemahaman tentang pengembangan wawasan kebangsaan bidang keagamaan	Orang	700	5.700	24.039,67	3.946	18.652,27	69,23	77,59	belum tercapai	T	

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
II.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Persentase Pertumbuhan ekonomi	%	7,62	7,80	1.053.812,31	7,07	857.707,56	90,64	81,39	belum tercapai	T	
		PDRB Per Kapita	Juta Rp.	31,01	55,00		52,85		96,09		belum tercapai		
		Inflasi	%	4,41	4,5 - 2,5		3,50		100,00		sesuai		
		Pengangguran Terbuka	%	5,10	4,80		5,34		111,25		melampaui		
		Gini Ratio	Angka	0,432	0,399		0,388		102,84		melampaui		
3	Program Peningkatan Produksi Dan Mutu Produk Hortikultura	Kedelai dan Palawija lainnya	%	14,77	15,90	127.281,81	15,90	111.992,37	100,00	87,99	sesuai	T	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Hortikultura	%		109,28	110.260,82	106,46	91.232,39	97,42	82,74	belum tercapai	T	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Telur	Kg	82.654.476	713.162.060	127.309,01	706.186.818	102.827,40	99,02	80,77	belum tercapai	T	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Produksi Ternak Kecil	Ekor	1.175.924	2.770.441		2.425.690		87,56		belum tercapai		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Produksi Daging	Kg	41.742.926	604.033.471		619.402.945		102,54		melampaui		
		Produksi Ternak Kuda	Ekor	156.545	235.511		239.798		101,82		melampaui		
		Produksi Ternak Sapi Perah	Ekor	1.426	1.574		2.029		128,91		melampaui		
		Produksi Ternak Kerbau	Ekor	100.831	195.615		238.048		121,69		melampaui		
		Produksi Sapi Potong	Ekor	1.128.306	2.171.247		2.474.095		113,95		melampaui		
		Produksi susu	Kg	2.897.820	13.739.815		14.023.800		102,07		melampaui		
		Produksi Ternak Unggas	Ekor	53.377.612	102.068.604		106.893.280		104,73		melampaui		
6	Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Nilai Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Triliun Rp.	7.473,52	16.650,00	161.443,26	12.416	144.173,78	74,57	89,30	belum tercapai	T	Dinas Perkebunan
		Produktifitas Komoditi Unggulan Perkebunan	Kg/Ha	1.038	1.055		1.191		112,89		melampaui		



No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Volume Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Ton	39.183,10	56.186,90		92.598		164,80		melampaui		
7	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah tenaga kerja Nelayan Perairan umum	Orang	13.906	1.228.648	63.562,92	1.004.221	62.479,82	81,73	98,30	belum tercapai	ST	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai produksi perikanan Tangkap	Juta Rp.	4.346.900	4.568.635		3.281.665		71,83		belum tercapai		
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%		104,09		107,66		103,43		melampaui		
		Jumlah produksi perikanan Tangkap	Ton	292.238	307.145		318.059		103,55		melampaui		
		Jumlah tenaga kerja Nelayan	Orang	112.255	119.074		155.458		130,56		melampaui		
8	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton		4.599.528	123.598,57	2.523.722	98.880,54	54,87	80,00	belum tercapai	T	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah tenaga pembudidaya	Orang		510.809		276.427		54,12		belum tercapai		
		Nilai Produksi Perikanan Budidaya	Juta Rp.		13.245.584		6.586.331		49,72		belum tercapai		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Nilai Tukar pembudidaya	%	107,70	108,50		103,78		95,65		belum tercapai		
9	Program Peningkatan Usaha Kehutanan	Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan (m3)	m3	175.327	282.366	16.914,30	460.642	13.789,13	163,14	81,52	melampaui	T	Dinas Kehutanan
		Jumlah produksi pangan dalam hutan	Ton		50		90		180,98		melampaui		
		Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	2.309	2.947		12.623		428,33		melampaui		
10	Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Terlaksananya pelatihan SDM sumber daya lokal (Disperindus)	IKM		20	35.339,76	19	19.001,65	95,00	53,77	belum tercapai	R	Dinas Perindustrian
		Meningkatnya Produksi dan Produktivitas industri lokal (Disperindus)	Industri		24		22		91,67		belum tercapai		
		Terlatihnya Peserta dalam pengembangan Produk sebanyak	Orang		285		305		107,02		melampaui		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		2.250 IKM (Disperindus)											
11	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Dan UMKM	Jumlah Koperasi aktif	Unit	5.554	8.063	20.554,54	5.271	13.621,52	65,37	66,27	belum tercapai	S	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah	Unit	113.370	158.718		153.956		97,00		belum tercapai		
		Jumlah koperasi besar	Unit	5	30		28		93,33		belum tercapai		
12	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	Jumlah wirausaha baru	Orang	12.045	313.845	155.484,27	458.890	79.022,29	146,22	50,82	melampaui	R	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	106.584	200.000	28.218,55	250.000	21.069,63	125,00	74,67	melampaui	S	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	5.385.809	8.000.000		7.250.000		90,63		belum tercapai		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
14	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	jumlah destinasi pariwisata menjadi destinasi unggulan	Destinasi	2	4	31.301,97	4	23.408,68	100,00	74,78	sesuai	S	
15	Program Pengendalian Lahan Pangan Berkelanjutan	Jumlah Regulasi lahan pangan berkelanjutan	Perda	0	1	950,00	0	396,29	-	41,71	belum tercapai	SR	
16	Program Kelembagaan, Ketenagaan Dan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kecamatan yang Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) berbasis teknologi informasi, memiliki demplot terintegrasi pertanian, perikanan dan kehutanan	BP3K	117	280	26.596,93	117	51.224,90	41,79	192,60	belum tercapai	ST	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
17	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%		105,00	24.995,60	105,00	24.587,15	100,00	98,37	sesuai	ST	
		Peningkatan konsumsi pangan yang sehat dan aman (skor Pola	angka	80,90	87,70		87,70		100,00		sesuai		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Pangan Harapan (PPH)											
		Jumlah kelompok yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi dan peningkatan pendapatan keluarga	Kelompok	80	80		80			100,00		sesuai	
III.	Terwujudnya kesejahteraan sosial	Angka kemiskinan	%	10,32	8,24	53.260,91	8,87	51.276,82	107,65	96,27	melampaui	ST	
18	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya	RTM	2.000	5.040	9.472,00	5.625	6.636,93	111,61	70,07	melampaui	S	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan	Jumlah PMKS yang diberikan kebutuhan dasar	Jiwa	2.446	6.751	8.231,00	6.650	8.116,54	98,50	98,61	belum tercapai	ST	Dinas Sosial

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
	Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	%	21,57	50,00		35,00		70,00		belum tercapai		
20	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS dalam dan Luar Panti	Jiwa	582	3.072	6.063,81	2.932	6.323,36	95,44	104,28	belum tercapai	ST	Dinas Sosial
21	Program Pembinaan Anak Terlantar	Cakupan anak terlantar yang diberikan pembinaan kearah kemandirian	Jiwa	459	2.607	17.275,27	2.512	17.486,47	96,36	101,22	belum tercapai	ST	Dinas Sosial
22	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Persentase Penyandang disabilitas dan trauma dalam pemulihan keberfungsian sosial	Jiwa	245	792	848,00	727	792,05	91,79	93,40	belum tercapai	ST	Dinas Sosial
23	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase sarana sosial, panti asuhan, panti jompo yang melakukan pembinaan	Jiwa	155	1.593	11.370,84	1.573	11.921,46	98,74	104,84	belum tercapai	ST	Dinas Sosial



No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		di dalam dan luar panti											
							0						
IV.	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63,58	63,72	126.665,58	73,83	94.221,14	115,87	74,39	melampaui	S	
24	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi SDA	lokasi	6	184	13.964,64	108	9.763,94	58,70	69,92	belum tercapai	S	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
25	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah penurunan beban pencemaran	Ton		< 30,43	34.512,17	24,34	25.503,09	100,00	73,90	sesuai	S	
26	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	Angka	2,78	3,37	8.824,83	3,17	4.678,95	94,07	53,02	belum tercapai	R	
27	Program Peningkatan Fungsi Dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	525.885,28	430.885,00	45.530,93	217.358,32	40.482,15	50,44	88,91	belum tercapai	T	Dinas Kehutanan
28		Luas kebakaran hutan yang dikendalikan	Ha	399,76	309,33	23.833,00	341,17	13.793,02	110,29	57,87	melampaui	R	Dinas Kehutanan

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
	Program Perlindungan Hutan Dan Konservasi Sumberdaya Alam	Jumlah ilegal logging yang tertangani	m3	111,19	86,04		20,51		23,84		belum tercapai		
V.	Meningkatnya kualitas manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	67,92	71,60	1.084.325,20	70,96	417.801,20	99,11	38,53	belum tercapai	SR	
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,45	7,90		8,03		101,65		melampaui		
		Angka Harapan Hidup	Tahun	69,50	70,27		69,98		99,59		belum tercapai		
29	Program Intensifikasi Dan Perluasan Akses Pendidikan Keaksaraan Fungsional	Jumlah Melek Aksara Yang Menerima SUKMA	Orang		386.700	21.596,33	386.700	15.166,64	100,00	70,23	sesuai	S	Dinas Pendidikan
		Angka Melek Huruf	%		95,00		94,61		99,59		belum tercapai		
		Rata Lama Sekolah	%		8,12		8,34		102,71		melampaui		
30	Program Peningkatan Pendidikan Non Formal Dan Informal	Taman bacaan masyarakat	Paket	310	120	11.432,30	91	6.059,55	75,83	53,00	belum tercapai	R	Dinas Pendidikan

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
31	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang		700.000	25.633,71	342.999	22.833,74	49,00	89,08	belum tercapai	T	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah pengelola perpustakaan yang telah mengikuti bimtek	Orang		3.500		2.474		70,69		belum tercapai		
		Jumlah bahan pustaka yang terbaca	Exp		500.000		927.428		185,49		melampaui		
32	Program Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Putus Sekolah / Drop Out	% SMP Sederajat		0,70	53.547,92	0,90	69.426,82	77,78	129,65	belum tercapai	ST	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	% SMP Sederajat		99,00		93,58		94,53		belum tercapai		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	% SMA Sederajat		64,25		81,75		127,24		melampaui		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	% SD Sederajat		99,50		98,00		98,49		belum tercapai		
		Angka Partisipasi Murni (APM)	% SM Sederajat		64,25		70,89		110,33		melampaui		
		Angka Partisipasi Kasar (APK)	% SMP Sederajat		113,50		97,77		86,14		belum tercapai		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Angka Partisipasi Kasar (APK)	% SMA Sederajat		99,50		81,47		81,88		belum tercapai		
		Angka Partisipasi Murni (APM)	% SMP Sederajat		78,00		80,19		102,81		melampaui		
		Angka Melanjutkan (AM)	% SD ke SMP		100,00		99,12		99,12		belum tercapai		
		Angka Putus Sekolah / Drop Out	% SMA Sederajat		1,00		1,00		100,00		sesuai		
33	Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	%		97,00	23.458,88	100,00	3.553,04	103,09	15,15	melampaui	SR	Dinas Pendidikan
34	Program Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik yang Berkualifikasi S1/D4	% SMP		77,00		97,46		126,57		melampaui	SR	Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidik yang Bersertifikat Pada	% SMA		80,00	125.894,39	53,76	47.200,42	67,20	37,49	belum tercapai		
		Persentase Pendidik yang Berkualifikasi S1/D4	% SMA		80,00		99,38		124,23		melampaui		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Persentase Pendidik yang Bersertifikat Pada	% SMK		83,50		42,41		50,79		belum tercapai		
		Persentase Pendidik yang Bersertifikat Pada	% SMP		77,00		49,71		64,56		belum tercapai		
		Pembinaan Guru Mengaji, Muballiq Khatib dan Alim Ulama	Orang		15.500		15.500		100,00		sesuai		
		Persentase Pendidik yang Bersertifikat Pada	% SD		45,00		43,85		97,44		belum tercapai		
35	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SMK Akreditasi B		50,00	63.786,29	34,86	25.264,62	69,72	39,61	belum tercapai	SR	Dinas Pendidikan
		Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SMA Akreditasi B		50,00		30,72		61,44		belum tercapai		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SMP Akreditasi B		40,00		35,10		87,75		belum tercapai		
		Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SMA Akreditasi A		30,00		39,25		130,83		melampaui		
		Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SMP Akreditasi A		19,00		19,49		102,58		melampaui		
		Rasio Guru Persiswa	% SD								n.a		
		Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SMK Akreditasi A		34,00		17,20		50,59		belum tercapai		
		Rasio siswa Perkelas	% SM		30,50		57,64		188,98		melampaui		
		Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SD Akreditasi B		70,00		61,72		88,17		belum tercapai		
		Rasio siswa Perkelas	% SD								n.a		



No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Rasio siswa Perkelas	% SMP		57,01		60,42		105,98		melampaui		
36	Program Pengembangan Fasilitas Pendidikan Tinggi	Angka melanjutkan (AM) tamatan SM ke Perguruan Tinggi	%	46,14	49,72	105.021,03	46,14	122.009,47	92,80	116,18	belum tercapai	ST	Dinas Pendidikan
		Gratis SPP Maba PTN/PTS Terakreditasi A, B dan C Selektif dan Proporsional	Orang	22.000	133.639		80.171		59,99		belum tercapai		
37	Program Pengembangan Pendidikan Vokasional	Jumlah Peserta Didik yang Menerima Pembiayaan Gratis Pendidikan Life Skill/ Kejuruan:	Paket			10.289,20		1.388,13		13,49	belum tercapai	SR	Dinas Pendidikan
		- Penerbangan		0	5		4		80,00		belum tercapai		
		- Perikanan		0	5		4		80,00		belum tercapai		
		- Perkebunan		0	5		4		80,00		belum tercapai		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		- Pertanian		0	5		4		80,00		belum tercapai		
		- Pramugari		0	5		4		80,00		belum tercapai		
		Jumlah SMK Dibina dan Dikembangkan Menjadi Sekolah Model	SMK		25		20		80,00		belum tercapai		
38	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Situs Cagar Budaya yang akan dilestarikan	situs	2	3	13.387,09	3	12.300,72	100,00	91,88	sesuai	ST	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
		Jumlah kawasan budaya yang dilestarikan	kawasan	5	33		5		15,15		belum tercapai		
39	Program Pengkajian, Pengembangan Dan Pelestarian Nilai Nilai Budaya	Jumlah kajian budaya lokal	kajian	11	24	1.783,30	7	1.660,48	29,17	93,11	belum tercapai	ST	
40	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan	kali		22	21.850,83	22	16.433,63	100,00	75,21	sesuai	T	

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		festival seni dan budaya											
		Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	sarpras		4		4		100,00		sesuai		
41	Pengembangan Budaya Maritim Brbasis Budaya Lokal Sulawesi Selatan	Cakupan pengkajian dan pengembangan komunitas spesifik maritim dan cakupan pengembangan museum budaya maritim	%		100,00	1.073,00	100,00	678,28	100,00	63,21	sesuai	R	
42	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Presentase kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan	%	97,26	100,00	21.811,59	100,00	20.133,46	100,00	92,31	sesuai	ST	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
43	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase RS Prov/kab/Kota yang telah menjadi BLU	%	100,00	100,00	534.480,68	78,20	7.601,86	78,20	1,42	belum tercapai	SR	Dinas Kesehatan
		Rasio Dokter Spesialis		5	13		16		123,08		melampaui		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Rasio Dokter Umum	per 100.000 Penduduk	15	22		17		77,27		belum tercapai		
		Rasio Perawat		92	100		136		136,00		melampaui		
		Rasio Bidan		51	58		59		101,72		melampaui		
		Rasio Ahli Gizi		11	18		13		72,22		belum tercapai		
		Rasio Apoteker		7	9		11		122,22		melampaui		
		Rasio Ahli Sanitasi		10	17		9		52,94		belum tercapai		
		Rasio Dokter Gigi		7	8		8		100,00		sesuai		
		Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat		20	25		18		72,00		belum tercapai		
		Regulasi RS yang dihasilkan	Dokumen	0	5	5	100,00	sesuai					
		RS Terakreditasi Internasional	RS	1	2	1	50,00	belum tercapai					

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		RS Terakreditasi Nasional (Versi 2012)	RS	1	22		181		822,73		melampaui		
		PKM yang telah melaksanakan Akreditasi Pelayanan	PKM	0	10		190		1.900,00		melampaui		
		Persentase RS yang melakukan pelaporan SIRS on line	%	48,28	100,00		100,00		100,00		sesuai		
		Persentase RS yang melaksanakan SPGDT (sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	%	11,49	40,00		40,00		100,00		sesuai		
		Persentase RS Swasta yang telah mempunyai registrasi	%	60,00	100,00		100,00		100,00		sesuai		
		Persentase RS Swasta yang telah memiliki izin RS	%	50,00	90,00		100,00		111,11		melampaui		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Persentase RS Swasta yang telah melaksanakan penetapan kelas	%	60,00	100,00		89,36		89,36		belum tercapai		
		Persentase RS sebagai wahana internship	%	16,00	100,00		100,00		100,00		sesuai		
		Persentase RS Pusat rujukan sebagai RS kelas B	%	80,00	100,00		100,00		100,00		sesuai		
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan kab/kota	%	100,00	100,00		100,00		100,00		sesuai		
		Persentase RS Pemerintah yang telah mempunyai registrasi	%	100,00	100,00		95,74		95,74		belum tercapai		
		Persentase RS non pusat rujukan sebagai RS kelas C	%	88,46	100,00		92,30		92,30		belum tercapai		



No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Persentase RS Pemerintah yang telah memiliki izin RS	%	60,00	100,00		100,00		100,00		sesuai		
44	Pengadaan Obat, Pengawasan Obat, Makanan Dan Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Ketersediaan Obat	%			8.960,83		7.336,57		81,87	belum tercapai	T	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan kefarmasian pada sarana pelayanan obat tradisional	%	30,00	65,00		55,00		84,62		belum tercapai		
		Persentase Pengawasan Obat dan Makanan yang layak, bermutu dan aman dikonsumsi masyarakat	%	35,00	45,00		55,00		122,22		melampaui		
		Persentase Ketersediaan Obat Generik	%		80,00		85,00		106,25		melampaui		
		Persentase kualitas kefarmasian dalam	%	40,00	80,00		55,00		68,75		belum tercapai		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		pengembangan Obat Asli Indonesia											
45	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya cakupan Kepesertaan Kemitraan Asuransi Kesehatan Menuju Universal Coverage	%	45,00	80,00	4.993,80	87,11	3.954,66	108,89	79,19	melampaui	T	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Menuju Universal Coverage	%	100,00	100,00		100,00		100,00		sesuai		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100,00	100,00		100,00		100,00		sesuai		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100,00	100,00		100,00		100,00		sesuai		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
46	Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan	Cakupan Akses Sanitasi Dasar	%	62,50	70,00	12.540,85	82,57	16.430,75	117,96	131,02	melampaui	ST	Dinas Kesehatan
		Menurunkan Prevalensi Perokok Anak dan Remaja	%	7,20	5,70		2,86		50,18		belum tercapai		
		Prevalensi Penduduk Usia > 15 Tahun dengan Tekanan Darah Tinggi	%	21,04	19,04		13,00		68,28		belum tercapai		
		Cakupan Kualitas Air Minum Masyarakat	%	69,35	86,00		82,07		95,43		belum tercapai		
		Mempertahankan Prevalensi Obesitas	%	13,60	13,60		10,10		74,26		belum tercapai		
		Cakupan Desa/Kelurahan yang mencapai universal child Immunization (UCI)	%	90,50	95,00		94,26		99,22		belum tercapai		
47		Kematian Bayi (Kasus)	Kasus	1.041	1.038	6.147,73	1.183	4.398,06	113,97	71,54	melampaui	S	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program					
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)					
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Balita Dan Lansia	Persentase Kelompok Lansia Aktif	%	85,00	88,00	90,00	90,00	102,27	102,27	102,27	102,27	melampaui							
	Cakupan Peserta KB aktif	%	64,75	69,00							72,39			104,91	104,91	104,91	104,91	melampaui
	Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (PN)	%	92,74	96,00							92,90			96,77	96,77	96,77	96,77	belum tercapai
	Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	%	64,99	73,00							76,48			104,77	104,77	104,77	104,77	melampaui
	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	77,95	82,00							87,50			106,71	106,71	106,71	106,71	melampaui
	Cakupan Pelayanan Nifas	%	85,54	90,00							91,32			101,47	101,47	101,47	101,47	melampaui
	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	53,80	70,00							76,48			109,26	109,26	109,26	109,26	melampaui
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	91,64	93,00							89,25			95,97	95,97	95,97	95,97	belum tercapai

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Cakupan Kunjungan Bayi	%	90,98	98,00		98,08		100,08		melampaui		
		Cakupan Kunjungan Balita	%	58,62	64,00		69,09		107,95		melampaui		
48	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan ASI Eksklusif	%	67,00	70,00	4.862,31	68,00	3.426,79	97,14	70,48	belum tercapai	S	Dinas Kesehatan
		Cakupan Gizi Buruk yang memperoleh Perawatan	%	100,00	100,00		100,00		sesuai				
		Prevalensi Balita Stunting	%	40,90	33,18		107,59		melampaui				
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	19,00	17,50		115,43		melampaui				
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	6,60	4,00		125,00		melampaui				
		Cakupan Penimbangan Balita (D/S)	%	80,00	84,00		96,43		belum tercapai				

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Cakupan Pendistribusian Vitamin A pada Balita	%	85,00	89,00		84,80		95,28		belum tercapai		
		Cakupan Ibu Hamil yang mengkonsumsi tablet Fe go Tablet	%	81,00	86,00		87,00		101,16		melampaui		
		Cakupan Kab/kota yang melaksanakan surveilansa Gizi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		sesuai		
		Cakupan Konsumsi garam beryodium	%	82,40	87,00		89,20		102,53		melampaui		
49	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	% Cakupan Desa Siaga Aktif	%	89,57	100,00	7.170,15	97,11	6.016,37	97,11	83,91	belum tercapai	T	Dinas Kesehatan
		% Cakupan PHBS Rumah Tangga	%	55,10	65,00		56,26		86,55		belum tercapai		
50	Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	Rasio akseptor KB Aktif (Jml akseptor KB Aktif/Jumlah pasangan usia subur)	%		30,35	4.603,00	30,35	4.527,14	100,00	98,35	sesuai	ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Prevalansi Peserta KB Aktif Keluarga Sejahtera	%		6,00		6,00		100,00		sesuai		Perlindungan Anak
VI.	Meningkatnya dukungan infrastruktur daerah	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	%	60,90	74,26	3.911.483,36	73,61	3.276.691,27	99,12	83,77	belum tercapai	T	
51	Program Penyelenggaraan Jalan	% Terhubungnya Pusat-Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi (Konektivitas) di wilayah Provinsi	%	100,00	100,00	2.161.679,46	100,00	1.826.545,91	100,00	84,50	sesuai	T	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		% Tingkat Kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (Baik dan Sedang)	%	85,04	64,97		64,97		100,00	sesuai			
52	Pembangunan Transportasi Massal	% Pelayanan angkutan umum massal	%	5,00	40,00	255.074,51	39,00	133.460,81	97,50	52,32	belum tercapai	R	Dinas Perhubungan

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
53	Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana Dan Pelayanan Transportasi Darat	% Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan	%	80,00	100,00	50.127,35	100,00	44.877,05	100,00	89,53	sesuai	T	Dinas Perhubungan
54	Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana Dan Pelayanan Transportasi Laut	% Pelayanan pelayaran	%	80,00	90,00	10.582,38	90,00	14.001,13	100,00	132,31	sesuai	ST	Dinas Perhubungan
55	Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana Dan Pengawasan Bidang Kominformasi, Media Massa, Pos Dan Telekomunikasi	Persentase layanan public berbasis elektronik	%	35,00	60,00	26.499,05	60,00	21.230,64	100,00	80,12	sesuai	T	Dinas Perhubungan
		% Penyelenggaraan Komunikasi Publik	%		100,00		100,00		100,00		sesuai		
		Jumlah Pengamanan Penyelenggaraan Persandian pada OPD Prov.Sulsel	OPD		61		61		100,00		sesuai		
		% Pengelolaan Informasi Publik	%		100		100		100,00		sesuai		
56	Fasilitas Dan Pembinaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	per satuan penduduk	23	0,195	128.406,67	0,195	122.713,76	100,00	95,57	sesuai	ST	Dinas Perumahan, Kawasan

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi bantuan peningkatan kualitas rumah	Unit	0	2.000		2.750		137,50		melampaui		Pemukiman, Dan Pertanahan
		Persentase kawasan kumuh	%	10,90	0,10		0,10		100,00		sesuai		
57	Fasilitasi Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	81,08	83,00	194.318,15	84,20	143.716,59	101,45	73,96	melampaui	S	
		Persentase Penanganan Sampah	%	81,23	83,00		83,80		100,96		melampaui		
		Persentase rumah tangga berakses air minum	%	85,87	87,00		92,00		105,75		melampaui		
58	Program Pengembangan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Gedung	% Perwujudan Kawasan CPI	%	30,00	15,00	296.429,77	15,00	173.478,91	100,00	58,52	sesuai	R	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
		% Penataan bangunan dan lingkungan	%	95,00	100,00		100,00		sesuai				
		% Pembangunan wisma negara	%	0,00	22,00		25,87		117,59		melampaui		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
59	Program Pengembangan Dan Pengelolaan, Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	% Cakupan layanan jaringan irigasi	%	60,00	80,00	508.202,14	80,00	477.970,59	100,00	94,05	sesuai	ST	
60	Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	% Ketersediaan air baku	%	50,00	100,00	59.163,30	100,00	111.259,69	100,00	188,06	sesuai	ST	
61	Program Kedaulatan Energi	Ratio Desa Berlistrik		87,02	97,00	104.817,51	95,80	95.175,51	98,76	90,80	belum tercapai	ST	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jumlah Bio Energi yang dibangun	Unit	7	1.987		1.578		79,42		belum tercapai		
62	Program Pemetaan Dan Penyelidikan Geologi, Sumberdaya Mineral, Batubara, Dan Panas Bumi Serta Eksplorasi Dan Penyediaan Air Tanah	Jumlah Pembangunan Sumur Bor	Unit	19	85	25.568,75	84	22.149,59	98,82	86,63	belum tercapai	T	
		Cadangan Sumberdaya	Kilo Ton	537.220	2.026.050		2.446.066		120,73		melampaui		
		Luas Wilayah Pemetaan	Ha	13.503	36.041		52.015		144,32		melampaui		
63	Program Peningkatan Upaya Pengelolaan Dan Konservasi Pertambangan Dan Mineral	Jumlah Produksi Mineral dan Batubara	Ton Batubara	22.452	83.592	9.713,40	108.031	10.290,78	129,24	105,94	melampaui	ST	
		Jumlah Produksi Mineral dan Batubara	M3 Batuan	17.855.266	37.875.495		42.548.976		112,34		melampaui		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Jumlah Produksi Mineral dan Batubara	Ton Non Logam	6.338.038	11.100.000		14.684.509		132,29		melampaui		
		Jumlah Produksi Mineral dan Batubara	Ton Logam	68.906	85.500		73.879		86,41		belum tercapai		
64	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau Kecil Serta Konservasi Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah pulau-pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya diberdayakan	Pulau	2	12	40.340,71	3	30.011,22	25,00	74,39	belum tercapai	S	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi garam yang dihasilkan	Ton	42.119	177.887		73.789		41,48		belum tercapai		
		Cakupan Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Ha	83.825	107.605		95.752		88,98		belum tercapai		
65	Program Pencegahan, Mitigasi Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria siaga bencana	Kab/Kota	0	24	5.436,78	15	4.965,73	62,50	91,34	belum tercapai	ST	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
66	Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana	% terpenuhinya aspek standar minimal logistik dan peralatan penanggulangan bencana provinsi sulawesi selatan	%	100,00	100,00	9.919,22	100,00	17.324,07	100,00	174,65	sesuai	ST	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
67	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	%Kabupaten/kota yang menyusun rencana aksi rehabilitasi	%	100,00	100,00	25.204,21	100,00	27.519,30	100,00	109,19	sesuai	ST	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
VII.	<b>Meningkatnya daya saing investasi daerah</b>	<b>Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)</b>	<b>Triliun Rp.</b>	<b>28,30</b>	<b>41,00</b>	<b>105.121,44</b>	<b>51,40</b>	<b>80.206,19</b>	<b>125,36</b>	<b>76,30</b>	melampaui	T	
68	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Jumlah Realisasi Investasi	Triliun Rp.	5,30	41,00	51.764,00	51,40	35.059,30	125,36	67,73	melampaui	S	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
69	Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Memperluas kesempatan kerja anggota kelompok	Kelompok	16	2.160	9.510,40	1.820	8.392,83	84,26	88,25	belum tercapai	T	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		melalui pembinaan kelompok usaha mandiri, kelompok wirausaha produktif dan padat karya											
		Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Lokal Maupun Tenaga Kerja Luar Negeri	Orang	53.904	500.000		541.332		108,27		melampaui		
		Memperluas kesempatan kerja anggota kelompok melalui pembinaan kelompok usaha mandiri, kelompok wirausaha produktif dan padat karya	Orang		500		480		96,00		belum tercapai		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Memperluas kesempatan kerja anggota kelompok melalui pembinaan kelompok usaha mandiri, kelompok wirausaha produktif dan padat karya	Kelompok	2	10		10		100,00		sesuai		
70	Program Penelitian, Pengembangan Dan Pemanfaatan Sdm Dan Iptek Daerah	Jumlah Hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Hasil Litbang	11	40	18.635,69	45	15.156,75	112,50	81,33	melampaui	T	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
71	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Jumlah Inovasi daerah yang dihasilkan	Inovasi	4	8	10.131,72	12	9.250,98	150,00	91,31	melampaui	ST	
72	Program Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah	Jumlah MoU /PKS yang difasilitasi, jumlah kerjasama dipantau/di Monev	MoU/PKS	71	146	7.758,41	82	5.582,93	56,16	71,96	belum tercapai	S	Biro Pemerintahan

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		pelaksanaannya dalam kerangka BKPRS serta kerjasama antar Daerah dan Pihak Ketiga											
73	Program Pengembangan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah kerjasama luar negeri	MoU	7	27	4.025,83	19	4.211,25	70,37	104,61	belum tercapai	ST	Biro Pemerintahan
74	Program Pengembangan Kerjasama Kawasan Andalan	Persentase Kerjasama pengembangan kawasan andalan	%	20,00	20,00	3.295,40	20,00	2.552,14	100,00	77,45	sesuai	T	Biro Pemerintahan
VIII	Meningkatnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Angka	64,42	71,28	41.563,11	72,48	32.539,60	101,68	78,29	melampaui	T	
		Indeks Pembangunan Gender (IDG)	Angka	92,34	93,74		92,96		99,17		belum tercapai		
75	Program Peningkatan Sistem Legislasi Daerah	Jumlah rancangan Kepgub yang dikaji dan finalisasi	Kepgub	2	7.216	8.639,95	11.407	6.532,50	158,08	75,61	melampaui	T	Biro Hukum dan HAM

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Jumlah rancangan Perda yang dikaji dan finalisasi	Perda	11	47		40		85,11		belum tercapai		
		Jumlah rancangan Pergub yang dikaji dan finalisasi	Pergub	69	250		491		196,40		melampaui		
		Jumlah rancangan PKS yang dikaji dan finalisasi	MoU	53	75		126		168,00		melampaui		
76	Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase pembinaan PPNS daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		sesuai		Biro Hukum dan HAM
		Jumlah Perda Kab/Kota yang difasilitasi penggunaan dan pengawasan produk hukumnya	Perda		1.190	6.259,55	2.355	5.488,98	197,90	87,69	melampaui	T	
		Persentase jaringan dokumentasi hukum	%	100,00	100,00		100,00		100,00		sesuai		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		yang dapat menunjang informasi bagi masyarakat											
77	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya nilai indeks demokrasi indonesia	Angka		68,00	19.931,08	68,53	13.007,57	100,78	65,26	melampaui	S	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
78	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Politik, Hukum, Ekonomi	%		65,00	1.626,45	65,00	1.984,05	100,00	121,99	sesuai	ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi	%	25,00	75,00		75,00		100,00		sesuai		
79	Program Perlindungan Perempuan	Persentase layanan rujukan lanjutan bagi korban kekerasan	%	100,00	48,00	2.520,98	48,00	2.572,51	100,00	102,04	sesuai	ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		terhadap perempuan lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota											Perlindungan Anak
		Persentase Lembaga Layanan Pemerintah dan Non Pemerintah Lingkup Prov yang melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	%	100,00	40,00		35,00		87,50		belum tercapai		
80	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang mengintegrasikan Pemenuhan Hak Anak	%	10,00	55,00	1.725,98	55,00	1.979,64	100,00	114,70	sesuai	ST	
81	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penanganan	%	20,00	41,00	859,14	41,00	974,35	100,00	113,41	sesuai	ST	



No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Perlindungan Khusus Anak											
IX.	Berkurangnya gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat	Angka Kriminalitas (jumlah kejahatan yang dilaporkan)	Kasus	19.042	19.422	18.658,19	16.494	16.198,52	117,75	86,82	melampaui	T	
82	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	%	80,00	100,00	12.574,37	100,00	12.263,24	100,00	97,53	sesuai	ST	Satuan Polisi Pamong Praja
83	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Persentase Peningkatan kualitas pelayanan keamanan dan pemberdayaan potensi masyarakat	%	20,00	100,00	2.974,47	100,00	2.123,89	100,00	71,40	sesuai	S	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		untuk mewujudkan rasa aman masyarakat											
84	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan penguatan kebangsaan dan pilar NKRI melibatkan pramuka dan generasi muda, Ormas dan LSM yang terlaksana	Kegiatan	2	20	2.627,80	16	1.477,46	80,00	56,22	belum tercapai	R	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
85	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kelompok kerja yang membantu dalam memberi pemahaman	Kegiatan	1	5	481,55	4	333,94	80,00	69,35	belum tercapai	S	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah	Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	306.068,64	WTP	309.823,49	100,00	101,23	sesuai	ST	
86	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	% Pelaksanaan Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara	%		100,00	27.936,60	100,00	26.468,14	100,00	94,74	sesuai	ST	Badan Kepegawaian Daerah

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Sesuai dengan standar yang telah ditentukan											
		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian minimal yang terpenuhi dengan akurat dan tepat waktu.	%	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	sesuai		
		Cakupan ASN yang mengikuti kediklatan lingkup pemprov dan kab/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	sesuai		
87	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tercapainya tingkat kompetensi peserta setelah mengikuti diklat	orang	355	3.405	36.732,71	355	32.389,09	10,43	88,18	belum tercapai	T	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase aparatur Sat.Pol.PP Prov. Sul Sel yang terlatih	%	30,00	62,00	30,00	30,00	48,39	48,39	48,39	belum tercapai		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
88	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase pembentukan DOB	%		20,00	2.877,08	20,00	1.849,99	100,00	64,30	sesuai	R	Biro Pemerintahan
		Capaian skor Indeks Efektivitas Pemerintahan	%	60,00	80,00		80,00		100,00		sesuai		
89	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Daerah	Penegakan peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan	%	100,00	100,00	31.091,65	100,00	65.247,23	100,00	209,85	sesuai	ST	Badan Pendapatan Daerah
		Peningkatan PAD	Triliun	2,50	3,53		3,98		112,56		melampaui		
		Persentase capaian target pendapatan setiap tahun	%	97,00	100,00		112,56		112,56		melampaui		
		Persentase akurasi data objek dan subjek pajak	%	60,00	80,00		80,00		100,00		sesuai		
		Persentase Tertib administasi pengelolaan pendapatan daerah	%	70,00	90,00		90,00		100,00		sesuai		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Persentase pemenuhan kebutuhan NSPM di bidang pendapatan	%	90,00	100,00		100,00		100,00		sesuai		
		Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat tentang pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya.	kegiatan / tahun	3	26		26		100,00		sesuai		
90	Program Peningkatan Aksesibilitas, Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Pajak Daerah	Tersedia dan efektifnya pelayanan Drive Thru, Gerai Samsat, Samsat Payment Point, Samsat Keliling, penerapan Standar ISO 9001:2000	%	2 Drive Thru, 2 Gerai Samsat, 2 Samsat Keliling, 17 Samsat berstandar ISO 9001:2000, Sistem	6 Drive Thru, 24 Gerai Samsat, 12 Samsat Keliling, 24 Samsat berstandar ISO 9001-	2.724,43	100	8.360,39	100,00	306,87	sesuai	ST	Badan Pendapatan Daerah

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
				pelayanan pajak berbasis web	2000,Sistem informasi dan pelayanan pajak berbasis Web								
91	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan penerbitan SPD dan SP2D yang diberikan	%		100,00	109.901,17	100,00	85.259,10	100,00	77,58	sesuai	T	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Prov. SulSel diserahkan tepat waktu	%		100,00		100,00		100,00		sesuai		



No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok dan Perubahan	%		100,00		100,00		100,00		sesuai		
92	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio ruang terbuka hijau	%	17,73	24,00	7.863,95	24,00	7.159,73	100,00	91,05	sesuai	ST	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Rasio ketaatan terhadap RT/RW	%	52,00	68,00		68,00		100,00		sesuai		
93	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Persentase kab/kota layak anak dan yang mengimplementasikan prasarat PUG	%		3,00	989,00	3,00	3.540,69	100,00	358,01	sesuai	ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase SKPD Prov dan kab/kota yang mengimplementasikan prasarat PUG	%	15,60	43,83		43,83		100,00		sesuai		
94	Program Koordinasi Pembangunan	Tingkat efektivitas kontribusi kabupaten/kota dalam mencapai target kinerja sasaran	%	40,00	80,00	16.013,13	80,00	12.645,68	100,00	78,97	sesuai	T	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran ( <i>Impact</i> ) dan Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		pembangunan nasional											
		% Kesesuaian muatan antara dokument perencanaan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		sesuai		
95	Program Pengembangan Data Dan Informasi	% Ketersediaan data dan informasi hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	%	100,00	100,00	16.063,89	100,00	13.159,40	100,00	81,92	sesuai	T	
96	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDES yang difasilitasi	Bumdes	176	426	13.531,00	426	12.049,09	100,00	89,05	sesuai	T	
97	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	% kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya:				10.943,04		10.180,60		93,03	belum tercapai	ST	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		LSM Aktif	%	52,00	64,20		64		100,00		sesuai		
		Kelompok Binaan LPM	Kelompok	1	6		6		100,00		sesuai		

No.	Sasaran dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Program (Outcome)	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Interpretasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program
					K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
		LPM Berprestasi	%	10,00	14,50		14,50		100,00		sesuai		
98	Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan	PKK Aktif	%	97,47	98,02	10.850,00	97,92	8.480,20	99,90	78,16	belum tercapai	T	
		Posyandu Aktif	%		99,89		99,89		100,00		sesuai		
99	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa	Kegiatan		21	18.551,00	21	23.034,15	100,00	124,17	sesuai	ST	
		Jumlah Aparat Desa Yang ditingkatkan Kapasitasnya	orang		5.281		4.342		82,22		belum tercapai		
		Jumlah Desa Berstatus Swasembada	Desa		500		320		64,00		belum tercapai		
<b>JUMLAH</b>						<b>6.736.883,18</b>		<b>5.160.168,46</b>	<b>95,27</b>	<b>76,60</b>	<b>ST</b>	<b>T</b>	



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bagaimana capaian kinerja RPJMD periode 2013-2018. Terkait dengan data tersebut, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari 17 indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, terdapat 6 indikator atau 35,29% yang targetnya “belum tercapai”, 3 indikator atau 17,65% yang capaiannya “sesuai” target, sedangkan yang capaiannya “melampaui” target adalah 8 indikator atau 47,06%.
2. Dari sejumlah 284 indikator *Outcome* yang ditetapkan dalam RPJMD, terdapat 113 indikator atau 39,79% yang targetnya “belum tercapai”, 87 indikator atau 30,63% yang “sesuai” target, sedangkan yang capaiannya “melampaui” target adalah 84 indikator atau 29,58%.
3. Realisasi kerangka pendanaan program prioritas RPJMD adalah sebesar 76,60% dengan predikat “tinggi”. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa terdapat sebesar 35,29% target sasaran dan 39,79% target *outcome* yang tidak mencapai target yang ditetapkan.

Hasil evaluasi RPJMD sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa konsistensi penjabaran RPJMD kedalam RKPD yang selanjutnya dianggarkan dalam APBD merupakan faktor penting yang mempengaruhi pencapaian target. Oleh karena itu, penyusunan dokumen perencanaan yang dibarengi dengan pengendalian dan evaluasi sangat penting untuk ditingkatkan kualitasnya didalam proses pembangunan daerah.

#### 2.4.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Oleh karena itu, belum terdapat hasil pelaksanaan RPJMD s/d tahun lalu yang akan dianalisis pencapaiannya.

Sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD, sebelum menyajikan capaian RKPD, perlu dikemukakan bagaimana komposisi program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD (yang disebut program prioritas) dan program perangkat daerah (yang disebut program strategis) serta program rutin yang menunjang pencapaian sasaran tersebut, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel II.387**  
**Komposisi Program dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD Tahun 2018			Jumlah Program RPJMD Tahun 2018-2023		
		Prioritas	Strategis -PD	Rutin	Prioritas	Strategis -PD	Rutin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dinas Pendidikan	6	2	4	6	3	4
2	Dinas Kesehatan	6	4	4	6	4	4
3	UPT Transfusi Darah	1	0	3	1	0	3
4	UPT Pelatihan Kesehatan	0	2	3	0	2	3
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	1	2	0	1	4	4
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	2	4	2	2	4	4
7	Rumah Sakit Khusus Daerah	0	3	1	0	3	1
8	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	0	2	0	2	3	3
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	0	2	0	2	3	3
10	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	1	2	0	1	2	0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD Tahun 2018			Jumlah Program RPJMD Tahun 2018-2023		
		Prioritas	Strategis -PD	Rutin	Prioritas	Strategis -PD	Rutin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	1	3	1	2	4	4
12	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	4	2	4	5	2	4
13	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	2	2	4	3	2	4
14	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	3	3	4	5	3	4
15	Satuan Polisi Pamong Praja	1	4	3	1	4	4
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	4	4	0	4	4
17	Dinas Sosial	3	3	4	3	3	4
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	4	4	1	4	4
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	5	4	1	5	4
20	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	10	4	1	10	4
21	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	4	4	1	4	4
22	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0	5	3	0	5	4
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	4	4	1	4	4
24	Dinas Perhubungan	2	2	4	2	2	4
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2	4	4	2	4	4
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	3	3	2	3	4
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0	4	4	0	4	4
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	5	4	1	5	4
29	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata	2	4	4	2	4	4
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	7	3	0	7	4
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	1	4	2	1	4
32	Dinas Perkebunan	1	2	4	1	2	4
33	Dinas Kehutanan	2	3	4	2	3	4
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3	3	4	3	3	4
35	Dinas Perdagangan	2	3	4	2	3	4
36	Dinas Perindustrian	1	3	4	1	3	4
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	3	4	1	3	4
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	4	4	2	4	4



No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD Tahun 2018			Jumlah Program RPJMD Tahun 2018-2023		
		Prioritas	Strategis -PD	Rutin	Prioritas	Strategis -PD	Rutin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
39	Badan Pendapatan Daerah	0	2	4	0	2	4
40	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	4	4	0	4	4
41	Badan Kepegawaian Daerah	1	5	4	1	5	4
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	2	4	1	2	4
43	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	1	4	1	1	4
44	Sekretariat DPRD	0	4	4	0	4	4
45	Biro Hukum dan HAM	0	4	2	0	4	4
46	Biro Pemerintahan	0	4	3	0	4	3
47	Biro Humas dan Protokol	0	3	3	0	3	3
48	Biro Perekonomian	0	1	3	0	1	4
49	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	0	3	3	0	3	3
50	Biro Kesejahteraan	1	2	3	1	2	4
51	Biro Organisasi dan Tata Laksana	1	2	4	1	2	4
52	Biro Umum dan Perlengkapan	0	5	2	0	5	3
53	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	0	1	4	0	1	4
54	Inspektorat Daerah	1	3	4	1	3	4
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	6	4	0	6	4
56	Badan Penghubung Daerah	0	2	3	0	2	4
<b>JUMLAH</b>		<b>65</b>	<b>181</b>	<b>184</b>	<b>74</b>	<b>187</b>	<b>209</b>
		<b>430</b>			<b>470</b>		

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara jumlah program dalam RKPD Tahun 2019 dengan jumlah program dalam RPJMD pada masing-masing kategori. Hal ini menunjukkan bahwa program yang terdapat dalam RPJMD belum seluruhnya dilaksanakan pada tahun 2018, yang berarti bahwa terdapat program RPJMD yang baru dilaksanakan mulai tahun kedua, ketiga, dan seterusnya.

Dalam daftar program prioritas, terdapat beberapa program yang baru ada dalam RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai penterjemahan dari janji politik kepala daerah, maupun dalam rangka pencapaian SDG'S dan SPM. Sedangkan untuk program perangkat daerah dan program rutin merupakan program yang sudah ada pada RPJMD periode sebelumnya.

Adapun hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2019 pada Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.388  
Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan  
Triwulan I Tahun 2019

No. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Kegiatan	Non APBD	Jumlah Indikator	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	K		Rp	
					0%	< 100%	100%	>100%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)		(8)	
1	Dinas Pendidikan	97	0	103	91	12	0	0	4,20	0,11	SR	SR
2	Dinas Kesehatan	165	0	173	136	30	7	0	7,94	2,85	SR	SR
3	UPT Transfusi Darah	16	0	20	6	14	0	0	11,21	3,82	SR	SR
4	UPT Pelatihan Kesehatan	15	0	18	12	5	0	1	6,63	2,53	SR	SR
5	UPT RSK Gigi dan Mulut	4	0	4	2	2	0	0	5,00	0,87	SR	SR
6	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	14	0	14	11	2	1	0	15,76	13,97	R	R
7	Rumah Sakit Khusus Daerah	5	0	7	6	1	0	0	6,25	3,70	SR	SR
8	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	3	0	5	5	0	0	0	-	-	SR	SR
9	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	5	0	7	7	0	0	0	-	-	SR	SR
10	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	5	0	7	3	4	0	0	8,74	7,04	SR	SR
11	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	6	0	8	3	5	0	0	13,16	8,29	R	SR
12	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	38	0	66	37	29	0	0	8,07	4,90	SR	SR
13	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	91	0	140	64	75	1	0	10,88	2,72	SR	SR
14	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	31	0	37	28	8	0	1	10,42	0,58	SR	SR
15	Satuan Polisi Pamong Praja	26	0	29	19	8	2	0	10,05	0,19	SR	SR
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32	0	33	24	9	0	0	4,56	2,40	SR	SR
17	Dinas Sosial	58	0	61	45	16	0	0	6,18	6,15	SR	SR
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	66	0	72	44	25	3	0	13,78	3,89	R	SR
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51	0	59	33	26	0	0	14,99	4,55	R	SR

No. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Kegiatan	Non APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian < 100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K		Rp	
									K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)		(8)	
20	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	65	0	76	51	25	0	0	7,77	3,10	SR	SR
21	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	36	0	38	26	12	0	0	7,76	1,52	SR	SR
22	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	29	0	37	24	13	0	0	6,27	3,45	SR	SR
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	55	0	60	46	14	0	0	6,01	3,04	SR	SR
24	Dinas Perhubungan	58	0	68	44	24	0	0	8,41	3,93	SR	SR
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	59	0	66	38	26	2	0	12,72	5,89	SR	SR
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	53	0	55	48	3	4	0	10,83	1,95	SR	SR
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	32	0	36	23	13	0	0	9,67	1,59	SR	SR
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	40	0	59	40	18	0	1	9,49	3,53	SR	SR
29	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata	69	0	76	55	18	3	0	12,76	1,51	R	SR
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58	0	63	49	14	0	0	5,81	5,11	SR	SR
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	68	0	87	67	19	1	0	6,32	1,78	SR	SR
32	Dinas Perkebunan	53	0	59	41	18	0	0	9,16	2,81	SR	SR
33	Dinas Kehutanan	97	0	136	122	14	0	0	5,46	1,38	SR	SR
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	64	0	75	52	23	0	0	6,83	1,95	SR	SR
35	Dinas Perdagangan	40	0	44	25	19	0	0	9,39	2,09	SR	SR
36	Dinas Perindustrian	55	0	59	31	27	1	0	12,99	4,36	R	SR
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	106	0	142	108	33	1	0	11,40	2,23	SR	SR
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	71	0	94	21	66	7	0	20,45	8,73	T	SR
39	Badan Pendapatan Daerah	143	0	158	89	69	0	0	11,63	3,35	SR	SR
40	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	48	0	67	33	33	1	0	13,72	6,91	R	SR

No. Urut	Perangkat Daerah	Keterangan Kinerja (K) Kegiatan							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Kegiatan	Non APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian < 100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)		(8)	
41	Badan Kepegawaian Daerah	53	0	61	33	28	0	0	9,82	5,28	SR	SR
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36	0	43	20	22	1	0	15,63	5,89	R	SR
43	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	46	0	65	39	25	1	0	15,11	4,06	R	SR
44	Sekretariat DPRD	41	0	48	18	29	1	0	18,77	5,91	S	SR
45	Biro Hukum dan HAM	36	0	37	19	17	0	1	13,15	2,24	R	SR
46	Biro Pemerintahan	20	0	27	8	16	2	1	26,34	2,01	ST	SR
47	Biro Humas dan Protokol	21	0	23	6	17	0	0	16,42	4,62	R	SR
48	Biro Perekonomian	19	0	19	6	13	0	0	11,31	4,10	SR	SR
49	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	30	0	35	13	22	0	0	17,39	5,77	S	SR
50	Biro Kesejahteraan	47	0	55	35	17	3	0	14,87	2,13	R	SR
51	Biro Organisasi dan Tata Laksana	26	0	57	36	19	2	0	20,07	4,08	T	SR
52	Biro Umum dan Perlengkapan	35	0	35	26	9	0	0	5,77	6,39	SR	SR
53	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	27	0	30	18	12	0	0	16,70	1,85	S	SR
54	Inspektorat Daerah	56	0	90	77	13	0	0	9,09	17,78	SR	S
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40	0	42	12	30	0	0	17,63	1,99	S	SR
56	Badan Penghubung Daerah	28	0	29	14	15	0	0	8,03	3,77	SR	SR
<b>JUMLAH</b>		<b>2.588</b>	<b>0</b>	<b>3.114</b>	<b>1.989</b>	<b>1.076</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>10,69</b>	<b>3,87</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>



Keterangan :

Predikat Kinerja yang digunakan berpedoman pada predikat kinerja yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Mengingat dalam RKPD belum ada target setiap triwulan, maka dilakukan penyesuaian interval nilai. Untuk Triwulan I, interval yang digunakan adalah 1/4 dari nilai skala capaian tahunan.

ST	= “Sangat Tinggi”, dengan interval nilai realisasi kinerja	:	$\geq 22,75$
T	= “Tinggi”, dengan interval nilai realisasi kinerja	:	$19,00 < 22,75$
S	= “Sedang”, dengan interval nilai realisasi kinerja	:	$16,50 < 19,00$
R	= “Rendah”, dengan interval nilai realisasi kinerja	:	$12,75 < 16,50$
SR	= “Sangat Rendah”, dengan interval nilai realisasi kinerja	:	$< 12,75$

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat sejumlah 2.558 kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah diligkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah indikator seluruhnya adalah 3.114. Jumlah indikator yang lebih besar dari jumlah kegiatan menunjukkan bahwa satu kegiatan bisa memiliki indikator lebih dari satu sesuai dengan output yang ingin diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Capaian kinerja RKPD Provinsi Sulawesi Selatan pada Triwulan I Tahun 2019 sesuai dengan tabel di atas dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Dari sejumlah 3.114 indikator kegiatan, terdapat 1.989 kegiatan yang belum dilaksanakan sehingga capaian kinerjanya masih 0%, sejumlah 1.076 indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target yang ditetapkan, sejumlah 44 indikator capaiannya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan 5 indikator capaiannya melebihi target yang ditetapkan.
2. Rata-rata capaian kinerja kegiatan secara keseluruhan adalah 10,69% dengan predikat kinerja “sangat rendah”, sedangkan rata-rata capaian anggaran adalah sebesar 3,87% dengan predikat kinerja “sangat rendah”.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I Tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat pada tabel yang menjadi lampiran RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 ini.



## 2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam mewujudkan Visi Sulawesi Selatan sebagai “Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan” serta dihubungkan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, terdapat berbagai permasalahan pembangunan yang perlu diselesaikan agar target pembangunan dapat dicapai.

### 2.5.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Oleh karena itu, beberapa permasalahan yang menjadi prioritas dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

#### 1. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan *core business* dalam mengimplementasikan pembangunan daerah mengingat aparatur pemerintah adalah subyek utama dalam pembangunan daerah. Pengelolaan pemerintahan yang baik menciptakan pelayanan publik yang cepat dan bersih sehingga tercipta kondisi yang kondusif antara pemerintah dan masyarakat. Sekurang-kurangnya terdapat empat elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus diperhatikan untuk mencapai *good governance*, yakni *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Empat hal tersebut akan menjadikan pelaksanaan pemerintahan menjadi efektif dan efisien.

Khusus di Sulawesi Selatan berbagai upaya terus dilakukan, seiring dengan semakin kuatnya penekanan terhadap upaya membentuk birokrasi yang ideal serta kondusif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun demikian, banyak permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah antar lain pertama masih rendahnya profesionalisme aparatur daerah yang menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum optimal, serta waktu yang ada tidak digunakan secara produktif. Hal ini di tandai dengan masih rendahnya indeks reformasi birokrasi, dimana pada tahun 2017 hanya mendapatkan nilai “CC”. Penilaian dilakukan dengan mengukur delapan area perubahan reformasi birokrasi, yakni mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap indeks reformasi birokrasi dan tanggapan masyarakat melalui penilaian lapangan.

Selain itu akuntabilitas, responsibilitas dan empati aparatur pemerintah terhadap kepentingan masyarakat masih rendah. Kondisi demikian yang mempengaruhi masih rendahnya kemampuan melaksanakan standar kinerja birokrasi seperti yang diharapkan. Hal lainnya adalah masih belum tumbuhnya kesadaran yang tinggi untuk melakukan evaluasi pembangunan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Cara-cara lama masih berlangsung hingga kini, sejak penentuan program/kegiatan, indikator, target, hingga penetapan kerangka pendanaan yang belum berorientasi pada hasil menyebabkan

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan masih belum optimal serta ketersediaan data yang belum dapat diandalkan.

Kedua, rendahnya kualitas pelayanan publik yang memperburuk citra birokrasi dan semakin kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Budaya birokrasi yang masih buruk serta birokrasi yang tambun berimplikasi pada kurang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga, pengaruh politik yang kuat terhadap birokrasi, juga menjadi penyumbang terhadap masih terhambatnya kinerja birokrasi sehingga lemah dalam merespon agenda dan tantangan dalam pembangunan daerah. Hal ini ditandai dengan Nilai saki pada tahun 2017 hanya bernilai B (62,04), yang diukur dari komponen: 1) Perencanaan kinerja dengan nilai 20,03; 2) Pengukuran kinerja dengan nilai 11,52; 3) pelaporan kinerja dengan nilai 10,80; 4) evaluasi internal dengan nilai 7,41; dan 5) capaian kinerja dengan nilai 12,28.

## **2. Belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar**

Salah satu infrastruktur dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan layak adalah masalah perumahan dan pemukiman. Rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan dimana kondisi rumah tinggal secara kasat mata akan memperlihatkan tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah rumah layak di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 adalah ±1.839,211 rumah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama, maka rasio rumah layak huni baru mencapai 0,194.

Salah satu prasyarat kondisi perumahan yang baik adalah apabila sanitasinya baik dan terstruktur. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 adalah 84,58%. Perhatian pemerintah harus diarahkan pada yang tidak menggunakan sanitasi yang layak karena sangat berpengaruh sekali dalam penurunan tingkat kesehatan di masyarakat.

Penanganan sampah di Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 sebesar 75,41% yang mengindikasikan bahwa upaya penanganan sampah belum dilakukan secara optimal. Beberapa faktor penghambat upaya penanganan sampah antara lain adalah masih terbatasnya TPA dengan sistem yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perUUan yaitu sistem *sanitary landfill*. TPA dengan sistem *sanitary landfill* baru diterapkan di Kabupaten Bulukumba dan Barru.

Jika dilihat dari jumlah pelanggannya, dapat terlihat belum sepenuhnya masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan mendapat akses distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan mencapai 83,34%. Namun pencapaian akses ini masih bertumpu pada masyarakat perkotaan yang terlayani oleh PDAM. Sedangkan pemenuhan akses air minum layak di perdesaan masih belum optimal, dikarenakan sumber air dan pengaliran yang digunakan masyarakat khususnya di area terpencil dan pulau-pulau.

Pada pengembangan fasilitas elektrifikasi dalam hal penggunaan sumber penerangan listrik, rata-rata Rasio Desa Berlistrik yang diukur dari tahun 2013-2017 sebesar 73,92%. Untuk mendukung ketersediaan listrik, dibangun Bio Gas dalam kurun waktu 2013-2017 sebanyak 1.249 yang dilaksanakan di beberapa lokasi/daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

## **3. Kualitas infrastruktur jalan dan perhubungan masih perlu ditingkatkan**

Salah satu permasalahan mendasar di Provinsi Sulawesi Selatan adalah aksesibilitas wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau secara mudah sehingga menyebabkan kesulitan baik distribusi barang maupun jasa. Peningkatan aksesibilitas akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar seperti pendidikan maupun kesehatan. Kualitas infrastruktur aksesibilitas wilayah yang belum memadai dan tidak merata ditandai dengan masih rendahnya jaringan jalan dalam kondisi baik yaitu 37,07% dari panjang jalan 2.009,35 Km. Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih

terdapat jalan provinsi dengan perkerasan berupa kerikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan perkerasan berupa tanah sepanjang 211,52 Km (10,53%). Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 adalah sebesar 0,000170. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat penggunaan jalan di wilayah Sulawesi Selatan masih membutuhkan peningkatan guna meningkatkan akses pelayanan masyarakat, khususnya pada wilayah dengan kondisi jalan yang rusak dan daerah yang masih terisolir.

Infrastruktur perhubungan juga belum memadai. Jumlah kendaraan bermotor mencapai 2,2 juta unit pada tahun 2017 tidak sebanding dengan penambahan jumlah Panjang jaringan jalan. Pertumbuhan jumlah kendaraan di Sulawesi Selatan antara 8-10% per tahun. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 adalah 108, artinya setiap 1 km jalan melayani 108 unit kendaraan bermotor. Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 11 pelabuhan udara, namun yang sudah baik baru 4 bandara. Transportasi udara di beberapa wilayah Sulawesi Selatan masih dalam taraf awal pengembangan. Kapasitas normal Bandara Sultan Hasanuddin hanya mampu menampung 7 juta penumpang. Tetapi pada tahun 2017 penumpang yang dilayani lebih dari 8 juta orang.

Keberadaan sarana dan prasarana transportasi laut merupakan salah satu yang paling penting bagi pengembangan wilayah Republik Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan. Pelabuhan laut di Sulawesi Selatan sejumlah 100, sebagian besar merupakan pelabuhan rakyat, dengan kondisi belum seluruhnya memenuhi standar. Terdapat 16 terminal, yang mengindikasikan belum seluruh kabupaten/kota yang berjumlah 24 memiliki terminal.

Hal lainnya adalah Sulawesi Selatan masih memiliki daerah yang terisolir, dalam artian belum dapat dijangkau dengan kendaraan roda 4 (empat), yaitu di Kabupaten Luwu Utara, Luwu, Malino, Bone, Wajo, Sinjai, Tana Toraja, Pinrang, Toraja Utara, Soppeng, Luwu Timur, Jeneponto dan Bulukumba. Total jarak tempuh seluruh jalan tersebut  $\pm$  160 km.

#### **4. Potensi pariwisata masih perlu dikelola dengan maksimal**

Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah pusat (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Sulawesi Selatan terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Dari berbagai pusat kegiatan tersebut, salah satu yang belum dikelola secara optimal adalah potensi pariwisata, padahal Sulawesi Selatan memiliki potensi yang sangat menjanjikan untuk dikelola dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah masih sangat rendah yaitu hanya 0,012% pada tahun 2017. Pada hal sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam luar biasa potensial, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa tempat eksotis yang menjanjikan untuk menjadi tujuan pariwisata dunia. Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai obyek wisata yang memiliki daya tarik tetapi masih belum dikelola secara optimal padahal memiliki prospek pasar skala nasional dan internasional. Perlu adanya terobosan-terobosan yang baru dan efektif terkait pemasaran, pengelolaan resort, hingga peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata.

Potensi wisata yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk secara alamiah dari kondisi geografis, sejarah dan budaya. Potensi wisata yang berasal dari kondisi geografis meliputi obyek laut/bahari, pengunungan dan agro. Potensi wisata yang berasal dari sejarah meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah. Potensi wisata yang berasal dari budaya meliputi keunikan masyarakat Sulawesi Selatan dengan segala kebudayaannya.

Pada tahun 2016, jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung di Sulawesi Selatan mencapai 8,43 juta orang, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 8,37 juta orang. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara terus tumbuh dan berkembang dari 106.584 orang pada tahun 2013 menjadi 255.747 orang pada tahun 2017.

Jika pariwisata dikelola secara optimal maka potensi wisatawan lokal maupun mancanegara bisa meningkat mencapai angka 100 persen sehingga secara langsung akan meningkatkan daya saing pariwisata hingga level internasional. Oleh karena itu, agar potensi pariwisata bisa meningkatkan perekonomian wilayah dan menjadi sumber pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan pengembangan pariwisata yang berkesinambungan dan terarah.

#### **5. Tingkat Pengangguran masih tinggi**

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 3.988.029 orang, naik 175.671 orang dibanding Agustus 2017. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2018, sebanyak 3.774.924 orang penduduk bekerja sedangkan sebanyak 213.105 orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 176.261 orang sedangkan pengangguran berkurang 590 orang. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. TPAK pada Agustus 2018 tercatat sebesar 63,02 persen, meningkat 2,03 poin dibanding setahun yang lalu.

Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2018, TPAK laki-laki sebesar 80,15 persen sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 47,19 persen. Dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, TPAK laki-laki dan perempuan masing-masing meningkat sebesar 0,49 poin dan 3,43 poin. Dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di perdesaan. Pada Agustus 2018, TPT di wilayah perkotaan sebesar 8,38 persen, sedangkan TPT di perdesaan hanya sebesar 3,16 persen. Dibandingkan setahun yang lalu, TPT di perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,72 poin. Sedangkan TPT perkotaan meningkat sebesar 0,27 poin.

Tingginya angka pengangguran menyebabkan rendahnya pendapatan per kapita di kabupaten/kota disebabkan oleh tidak terjadinya perubahan struktur ekonomi atau transformasi ekonomi. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB, bukan hanya sangat besar (di beberapa Kabupaten/Kota hampir mencapai 50%) tetapi juga menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Penyebab lainnya adalah kurang berkembangnya industri pengolahan, terutama industri berskala besar.

#### **6. Investasi dan penanaman modal belum optimal**

Berbagai potensi sumber daya yang merupakan keanekaragaman dan kekayaan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Namun dalam pengelolaannya, pemerintah daerah membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya sekaligus mempercepat laju roda perekonomian daerah.

Realisasi penanaman modal di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi dan cenderung stagnan pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2015, nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Sulawesi Selatan mencapai Rp12,10 triliun dengan jumlah investor 505 perusahaan, namun menurun menjadi Rp8,30 triliun rupiah dengan jumlah investor 281 perusahaan pada tahun berikutnya dan naik kembali menjadi Rp11,48 triliun dengan jumlah 689 perusahaan pada tahun 2017. Mengingat cukup banyaknya potensi sumber daya alam, seharusnya investasi yang direalisasikan untuk meningkatkan perekonomian dapat lebih dioptimalkan melalui berbagai kebijakan yang mendukung kemudahan penanaman modal.



## 7. Peningkatan kualitas pendidikan masih perlu dioptimalkan

Kualitas sumber daya manusia akan selalu dihubungkan dengan kualitas pendidikan di suatu wilayah. Begitu juga dengan Provinsi Sulawesi Selatan, belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan memiliki dampak yang tinggi terhadap rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan dalam bidang pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain menyangkut kualifikasi guru maupun tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan terutama di kawasan pedalaman/kepulauan, aksesibilitas pendidikan, kesadaran untuk melanjutkan sekolah karena kondisi social ekonomi misalnya pernikahan dini atau mencari kerja bagi anak usia sekolah, hingga sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 7,95 tahun pada tahun 2017, yang berarti penduduk Provinsi Sulawesi Selatan rata-rata mengenyam jenjang pendidikan sekolah selama 7,95 tahun atau kelas 2 SMP semester kedua, bagi laki-laki laki-laki sudah menikmati pendidikan hingga kelas 3 SMP sedangkan perempuan kelas 2 SMP. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan juga masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Nasional yang mencapai 8,10 tahun.

Dari segi harapan lama sekolah, angka harapan masyarakat usia masuk sekolah cukup tinggi pada lama jenjang pendidikan yang akan ditempuhnya. Angka harapan lama sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 13,28 tahun yang mengindikasikan bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 13-14 tahun. . Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki mencapai 12,99 dan perempuan 13,59. Angka Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Selatan pada dasarnya lebih tinggi dari angka di tingkat nasional.

## 8. Derajat kesehatan masyarakat masih perlu optimal

Peran kesehatan menjadi vital, mengingat setiap orang memerlukan kondisi tubuh “sehat” guna memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat dengan menyediakan rumah sakit rujukan di setiap regional, menyeimbangkan ketersediaan tenaga medis sampai ke wilayah pedalaman, meningkatkan kualifikasi tenaga medis, hingga mengefisiensikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Masalah di bidang pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan memang masih membutuhkan perhatian. Saat ini, Kota Makassar masih menjadi pusat rujukan dari sebagian besar kabupaten di Sulawesi Selatan akibat tidak tersedianya rumah sakit yang memberikan pelayanan rujukan di wilayahnya. Di samping itu, banyak penduduk yang bermukim pulau-pulau yang ada di Sulawesi Selatan belum terlayani fasilitas kesehatan maupun tenaga medis sebagaimana yang diharapkan.

Angka harapan hidup di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung naik perlahan, pada tahun 2013 sebesar 69,50 tahun, meningkat menjadi 69,84 tahun pada tahun 2017. Angka ini tergolong rendah dan selama lima tahun peningkatnya kurang dari 1 (satu) digit. Jika dibandingkan dengan angka harapan hidup Nasional yang mencapai 71,06 tahun, maka Provinsi Sulawesi Selatan masih cukup tertinggal. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, ternyata laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan.

## 9. Penanggulangan Kemiskinan

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pendapatan per kapita warga Sulawesi Selatan saat ini memang sudah meningkat mencapai 48,32 juta per tahunnya, tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasakan oleh semua warga Sulawesi Selatan. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2017 Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia (Gini Ratio).

Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1 dimana angka 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis sedangkan angka 1 menunjukkan hal yang sebaliknya. Ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan termasuk ketimpangan tinggi karena masih di atas angka 0,4. Indeks gini menurun dari angka 0,432 di tahun 2013 ke angka 0,429 pada tahun 2017 yang berarti terjadi penurunan ketimpangan pada pemerataan pendapatan masyarakat.

Meskipun mengalami penurunan gini ratio, akan tetapi jika dibandingkan dengan nasional (0,391), Sulawesi Selatan masih berada pada ketimpangan pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan harus merumuskan program pemerataan pendapatan masyarakat agar kesenjangan sosial menurun dan berusaha menstabilkan pemerataan pendapatan masyarakat dalam kualitas yang optimal.

Kesenjangan sosial dalam masyarakat sangat terlihat pada masyarakat yang berada pada kategori miskin maupun keluarga pra sejahtera. Hal tersebut terlihat pada tahun 2017 dimana tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan (9,48%). Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 10,32%, namun meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 9,24%. Angka ini juga lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 9,82%. Fenomena kenaikan angka kemiskinan ini harus selalu dipantau dan diminimalisir kembali guna menjalankan salah satu amanat pembangunan nasional untuk menyejahterakan kehidupan rakyat.

#### **10. Pertumbuhan perekonomian masih terpusat di perkotaan**

Pemerataan pembangunan daerah akan sulit diimplementasikan, mengingat pergerakan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan terpusat pada wilayah perkotaan. Distribusi penduduk yang tidak merata merupakan salah satu penyebab permasalahan tersebut timbul. Secara demografis, distribusi penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 terlihat sangat tinggi pada tiga wilayah, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa, dimana sekitar 34% penduduk mendiami wilayah tersebut.

Kegiatan perekonomian di daerah pedesaan belum mampu menggerakkan roda perekonomian secara masif pada masing-masing wilayah sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tidak terlalu signifikan. Pengembangan pariwisata yang diharapkan mampu mendorong perekonomian pedesaan, belum berkembang sebagaimana yang diharapkan.

#### **11. Produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam masih perlu dioptimalkan**

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari permasalahan perekonomian yang berujung pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula Provinsi Sulawesi Selatan, dalam perwujudan berbagai tujuan pembangunan memiliki kendala pembangunan yang multi dimensi seperti masih tingginya angka kemiskinan, angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan, hingga pemerataan pelaksanaan pembangunan.

Luasnya wilayahnya dan distribusi penduduk di berbagai wilayah menjadikannya salah satu keuntungan sekaligus kelemahan yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan wilayah yang luas dan memiliki potensi lebih banyak, Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki permasalahan yang lebih kompleks seperti minimnya aksesibilitas ke setiap wilayah (terutama wilayah terpencil) maupun variasi keanekaragaman potensi SDM.

Terlepas dari hal tersebut, perbedaan potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di setiap wilayah menyebabkan kesenjangan sosial di masyarakat semakin terlihat. Bahkan dalam satu wilayah yang samapun, kesenjangan masih kerap terjadi baik dalam kerangka kehidupan sosial maupun ekonominya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki “pekerjaan rumah” yang merupakan permasalahan utama dan periodik yakni menurunkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing



perekonomian melalui transformasi pengelolaan produk pertanian yang berfokus pada komoditi unggulan sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.

Ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2017 tumbuh 7,23%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,66%, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,74% serta Informasi dan Komunikasi sebesar 10,52%. Struktur perekonomian Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha tahun 2017 masih didominasi oleh empat lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,89%); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,94%); Industri Pengolahan (13,71%) serta Konstruksi (12,74%).

Memperhatikan lebih jauh pada struktur perekonomian Sulsel, berdasarkan Lapangan Usaha, diketahui bahwa sektor primer, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kontributor yang paling besar, pada Tahun 2017 nilai PDRB-ADHK sektor ini sebesar Rp 61,47 triliun dari total PDRB Sulsel, Sektor kedua adalah Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ini sebesar Rp. 42,48 Trilyun. Sektor ketiga adalah Industri Pengolahan dengan nilai PDRB pada Tahun 2017 sebesar Rp. 40,41 triliun. Sektor keempat adalah Konstruksi, dengan kontribusi sebesar Rp. 34,76 Trilyun terhadap total PDRB.

Pengembangan perekonomian lokal daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia merupakan salah satu cara yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun selama ini memiliki program-program yang memberdayakan masyarakat dalam perekonomian lokal tapi kurang maksimal implementasinya. Hal ini dikarenakan permasalahan pengembangan ekonomi lokal selalu terkait dengan permasalahan lain seperti aksesibilitas wilayah, sumber daya manusia, maupun koordinasi pemerintah daerah.

## **2.6.1 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi setiap Perangkat Daerah yaitu penjelasan tentang apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan ini konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

### **2.6.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar yang pemenuhannya ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

#### **1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting, hal ini disebabkan karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan suatu daerah. Manusia merupakan subyek dan obyek pembangunan. Pada prinsipnya pendidikan merupakan agenda yang sangat penting dalam pelaksanaan program kerja dalam pemerintahan. Masih banyak tantangan pendidikan yang dihadapi oleh Sulawesi Selatan dalam mempersiapkan kualitas SDM ke depan. Beberapa permasalahan di bidang pendidikan antara lain adalah:

- a. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 sebesar 7,95 tahun, lebih rendah dari target RPJMD sebesar 8,11 tahun 2017.
- b. Capaian nilai UN rata-rata untuk tingkat (SD-SM) untuk Tahun 2017 yaitu 5,79, adapun target rata-rata yang ditetapkan untuk (SD-SM) yaitu 7.73 atau hanya mencapai

74,90% dari target, dan mengalami penurunan dibanding tahun 2016 dengan rata-rata yang dicapai 6,30.

- c. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK baru mencapai 81,39% disebabkan kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk meneruskan ke jenjang pendidikan menengah dari SMP/MTs rendah, sehingga lulusannya lebih memilih untuk bekerja. Selain itu, ketersediaan sekolah jenjang pendidikan menengah juga belum tersebar merata, terutama untuk SMK.
- d. Masih adanya angka putus sekolah pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK.
- e. Persentase Angka Melanjutkan (AM) Tamatan SMA ke Perguruan Tinggi masih rendah disebabkan kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi, sehingga lulusannya lebih memilih untuk bekerja.

Kinerja di bidang pendidikan yang belum tercapai berdasarkan target RPJMD Tahun 2013-2018 atau RKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.389.**  
**Target Kinerja RPJMD/RKPD Bidang Pendidikan**  
**Yang Belum Tercapai Pada Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi RKPD	Capaian RKPD	Realisasi RPJMD	Capaian RPJMD
Angka Melanjutkan (AM)	% SD ke SMP	100,00	100,00	99,12	99,12	99,00	99,12
Angka Partisipasi Kasar (APK)	% SMA Sederajat	100,00	99,50	81,47	81,88	81,00	81,00
Angka Partisipasi Kasar (APK)	% SMP Sederajat	114,00	113,50	97,77	86,14	98,00	85,96
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	% SD Sederajat	100,00	99,50	98,00	98,49	98,00	98,00
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	% SMP Sederajat	99,00	99,00	93,58	94,53	94,00	94,95
Nilai Rata-rata Akhir Peserta Didik	% SMP	8,00	8,32	4,60	55,29	5,00	62,50
Nilai Rata-rata Akhir Peserta Didik	% SMK	8,00	8,10	4,05	50,00	4,00	50,00
Nilai Rata-rata Akhir Peserta Didik	% SMA	8,00	7,62	4,30	56,43	4,00	50,00
Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SD Akreditasi B	70,00	70,00	61,72	88,17	62,00	88,17
Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SMP Akreditasi A	19,00	19,00	19,49	102,58	19,00	102,58
Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SMA Akreditasi B	50,00	50,00	30,72	61,44	31,00	62,00

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target RPJMD</b>	<b>Target RKPD</b>	<b>Realisasi RKPD</b>	<b>Capaian RKPD</b>	<b>Realisasi RPJMD</b>	<b>Capaian RPJMD</b>
Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SMP Akreditasi B	40,00	40,00	35,10	87,75	35,00	87,50
Peserta Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SMK Akreditasi A	34,00	34,00	17,20	50,59	17,00	50,00
Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	% SMK Akreditasi B	50,00	50,00	34,86	69,72	35,00	70,00

## 2. Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk kewajiban dan urusan yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun demikian dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan bagi masyarakat belum dapat dikatakan berjalan dengan optimal dikarenakan berbagai kendala dan masalah yang masih ditemukan. Masalah tertinggi kesehatan di Sulawesi Selatan tertuju pada pelayanan yang tidak maksimal. Beberapa permasalahan di bidang pendidikan antara lain adalah:

- a. Dalam pelaksanaan integrasi program Kesehatan Gratis ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), permasalahan yang dihadapi antara lain:
  - Masih banyak penduduk miskin yang tidak tercover dalam kepesertaan Program JKN, selain itu sebagian besar tidak mempunyai NIK sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta JKN.
  - Terlambatnya turun regulasi pelaksanaan JKN dari Pusat, sehingga berpengaruh pada perencanaan dan penatalaksanaan pelayanan program JKN.
- b. Mobilitas tenaga kesehatan cukup tinggi sehingga menyebabkan jumlah tenaga kesehatan tidak merata secara proporsional.
- c. Masih kurangnya tenaga dokter spesialis pada beberapa rumah sakit daerah
- d. Belum optimalnya peran aktif lintas sektor dalam Pembangunan Kesehatan, Belum semua sektor menyadari pentingnya program/kegiatan yang dilaksanakan untuk tujuan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga beban tanggungjawab dirasa hanya pada SKPD teknis yang bersangkutan langsung.
- e. Perubahan gaya hidup masyarakat yang tidak sehat, yang menyebabkan beban ganda penyakit pada masyarakat, dimana meningkatnya angka kejadian penyakit menular dan infeksi juga disertai dengan meningkatnya angka kejadian penyakit tidak menular, akibat pola hidup masyarakat yang tidak sehat serta adanya gaya hidup kekinian khususnya pada kelompok remaja.
- f. Status Ekonomi masyarakat khususnya pada kelompok masyarakat miskin berdampak pada ketidakmampuan keluarga dalam penyediaan konsumsi yang layak, sehat dan bergizi.
- g. Masih adanya pengaruh budaya atau mitos pada masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil dan bayi sehingga berpengaruh pada asupan makanan, status gizi ibu hamil dan bayi.
- h. Kecenderungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan status dan perluasan sarana kesehatan tanpa mempertimbangkan faktor ketersediaan tenaga kesehatan.
- i. Masih rendahnya pengetahuan produsen Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) terhadap produk yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Beberapa indikator di bidang pendidikan yang belum mencapai target yang ditetapkan antara lain adalah sebagai berikut:

**Tabel II.390.**  
**Target Kinerja RPJMD/RKPD Bidang Kesehatan**  
**Yang Belum Tercapai Pada Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi RKPD	Capaian RKPD	Realisasi RPJMD	Capaian RPJMD
Meningkatnya kualitas pelayanan kefarmasian pada sarana pelayanan obat tradisional	%	65,00	65,00	55,00	84,62	55,00	84,62
Persentase kualitas kefarmasian dalam pengembangan Obat Asli Indonesia	%	80,00	80,00	55,00	68,75	55,00	68,75
Cakupan Kunjungan Puskesmas	%	47,73	47,73	39,59	82,95	40,00	83,80
Persentase Kabupaten/Kota memiliki minimal 2 Puskesmas yang mengembangkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer	%	66,00	66,00	42,00	63,64	42,00	63,64
Persentase Puskesmas yang melaksanakan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	%	44,55	44,55	30,00	67,34	30,00	67,34
% Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100,00	100,00	97,11	97,11	97,11	97,11
% Cakupan PHBS Rumah Tangga	%	65,00	65,00	56,26	86,55	56,26	86,55
Cakupan ASI Eksklusif	%	70,00	70,00	68,00	97,14	68,00	97,14
Cakupan Penimbangan Balita (D/S)	%	84,00	84,00	81,00	96,43	81,00	96,43
Cakupan Desa/Kelurahan yang mencapai universal child Immunization (UCI)	%	95,00	95,00	94,26	99,22	94,26	99,22
Mempertahankan Prevalensi Obesitas	%	13,60	13,60	10,10	74,26	10,10	74,26
Cakupan Kualitas Air Minum Masyarakat	%	86,00	86,00	82,07	95,43	82,07	95,43
Prevalensi Penduduk Usia > 15 Tahun dengan Tekanan Darah Tinggi	%	19,04	19,04	13,00	68,28	13,00	68,28
Menurunkan Prevalensi Perokok Anak dan Remaja	%	5,70	5,70	2,86	50,18	2,86	50,18
Persentase RS Pemerintah yang telah mempunyai registrasi	%	100,00	100,00	95,74	95,74	95,74	95,74

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi RKPD	Capaian RKPD	Realisasi RPJMD	Capaian RPJMD
Persentase RS non pusat rujukan sebagai RS kelas C	%	100,00	100,00	92,30	92,30	92,30	92,30
Persentase RS Prov/kab/Kota yang telah menjadi BLU	%	100,00	100,00	78,20	78,20	78,20	78,20
Persentase RS Swasta yang telah melaksanakan penetapan kelas	%	100,00	100,00	89,36	89,36	89,36	89,36
Rasio Ahli Gizi	/100.000 Penduduk	18,00	18,00	13,00	72,22	13,00	72,22
Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat		25,00	25,00	18,00	72,00	18,00	72,00
Rasio Ahli Sanitasi		17,00	17,00	9,00	52,94	9,00	52,94
Rasio Dokter Umum		22,00	22,00	17,00	77,27	17,00	77,27
Regulasi RS yang dihasilkan	Dokumen Regulasi	5	5			2	40,00
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	93,00	93,00	89,25	95,97	89,25	95,97
Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (PN)	%	96,00	96,00	92,90	96,77	92,90	96,77
Kematian Bayi (Kasus)	Kasus	1.038	1.038	1.183	87,74	2.498	41,55

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih adanya angkutan barang dengan muatan berlebih (*over Loading*) yang berpotensi mempercepat kerusakan jalan.
- Penegakan regulasi penataan ruang belum optimal.
- Sistem jaringan transportasi yang belum terpadu
- Belum optimalnya pengadaan lahan, baik untuk pelebaran jalan sub-standart maupun pembangunan jalan baru.

### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Pelayanan Infrastruktur pada kawasan permukiman dalam hal ini sistem pelayanan air bersih dan sanitasi terhadap masyarakat Sulawesi Selatan masih sering terkendala dengan sumber-sumber air baku dan kapasitas SPAM yang terbatas. Di lain pihak kita diperhadapkan pada persoalan keterbatasan anggaran dan regulasi terkait kewenangan dalam pengembangan sarana prasarana di kabupaten/kota
- Secara fungsional, sebagian besar kualitas perumahan dan permukiman masih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai sesuai skala kawasan yang ditetapkan. Secara fisik lingkungan, masih banyak ditemui kawasan perumahan dan permukiman yang telah melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan. Dimana masalah keterpaduannya dengan sistem prasarana dan sarana baik di perkotaan maupun di perdesaan tidak memenuhi syarat
- Tingginya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau masih belum dapat diimbangi karena terbatasnya kemampuan penyediaan baik oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Sementara ketidakmampuan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan permukiman yang responsive.



**5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

- a. Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesbangpol di bidang pemerintahan umum dalam rangka melakukan cegah dini, antisipaso dini dalam penanganan konflik belum ada regulasi yang mengatur partisipasi dana pihak ketiga.
- b. Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang masih bervariasi terutama di Daerah (belum sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja) menyebabkan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum belum terkoordinasi secara maksimal.
- c. Optimalisasi koordinasi dengan SKPD/Instansi, serta kabupaten/kota belum/tidak terinovasi dalam sebuah system jaringan koordinasi.
- d. Tidak ada garis komando/hirarki. Tak ada kewenangan Satpol PP Provinsi untuk memberikan instruksi ke Satpol PP kabupaten/kota
- e. Terjadinya konflik di masyarakat tidak lepas dari pendidikan bela Negara yang mereka pahami, untuk itu menjadi sebuah kelemahan dikarenakan kurangnya edukasi bela Negara yang dimiliki sebahagian masyarakat. Sehingga terkadang sebuah konflik memicu konflik berikutnya, konflik berjilid.
- f. Serta belum optimalnya peran serta masyarakat dan stakeholder (media, tokoh masyarakat, tokoh agama dan OPD terkait) dalam membangun sinergitas kebersamaan.

**6. Sosial**

- a. Masih lemahnya keterampilan berwirausaha bagi masyarakat miskin melalui bimbingan dan keterampilan
- b. Belum optimalnya akses dan pemanfaatan sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta rehabilitasi panti untuk menunjang pelayanan dan rehabilitasi Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- d. Meningkatnya beban pengeluaran masyarakat miskin, seiring dengan peningkatan kebutuhan dan harga barang kebutuhan pokok.
- e. Masih rendahnya SDM pendamping masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahterannya.
- f. Masih banyaknya sarana dan prasarana UPTD yang belum di rehabilitasi
- g. Masih Tingginya tingkat kemiskinan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan
- h. Belum adanya sinkronisasi dan integrasi antara berbagai program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
- i. Lemahnya koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan antar Perangkat Daerah dan stake holder yang lainnya.

**2.6.1.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang substansinya bukan merupakan Pelayanan Dasar yang pelaksanaannya mengikuti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.

**1. Tenaga Kerja**

- a. Masih tingginya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dimana faktanya adalah ditemukannya 244 kasus wilayah sulawesi selatan
- b. Terbatasnya tenaga fungsional mediator Kab/kota sehingga memerlukan tenaga Fungsional mediator Provinsi untuk penyelesaian kasus yang ada di kab/kota.
- c. Terbatasnya tenaga fungsional Pengawas sehingga memerlukan tenaga Fungsional Pengawas untuk penyelesaian kasus-kasus kecelakaan kerjayang ada di kab/kota.



- d. Belum optimalnya fungsi UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I, II, III dan IV yang dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kedudukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di kabupaten/kota di alihkan ke Provinsi
  - e. Masih rendahnya kemampuan dan Keterampilan pencari kerja sehingga tidak mampu bersaing di bursa lokal, nasional maupun internasional
  - f. Pertumbuhan angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan penambahan lapangan Kerja.
- 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- a. Minimnya pelayanan terpadu bagi anak pemulihan anak berhadapan hukum di LPKA/Lapas
  - b. Masih kurangnya layanan bagi anak berkebutuhan khusus
  - c. Tingginya pernikahan anak di Sulawesi Selatan
  - d. Minimnya lembaga penyedia perlindungan hak-hak perempuan
  - e. Minimnya layanan pengaduan dan layanan rujukan korban kekerasan terhadap perempuan
  - f. Belum optimalnya analisis Data Gender dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai instrumen pengawasan perencanaan penganggaran di daerah (meskipun aspek legalnya sudah tercantum dalam Permendagri, dan sudah ditindaklanjuti dengan Perda PUG, SE Gubernur).
  - g. Minimnya layanan Rehabilitasi bagi Anak, Korban NAPZA khususnya korban penyalahgunaan obat-obatan zat adiktif seperti, Lem
- 3. Pangan**
- a. Capaian Program Pangan Harapan (PPH) lebih rendah dari skor PPH nasional karena pola konsumsi beras masyarakat di Sulawesi Selatan masih tinggi, sementara konsumsi sayuran masih rendah. Untuk aspek keamanan pangan, penerbitan sertifikat prima produk Pangan Segar.
  - b. Pendapatan masyarakat masih rendah dibanding harga kebutuhan secara umum sehingga menurunnya daya beli masyarakat disebabkan kenaikan harga pangan dibanding ketersediaan pangan.
  - c. Kenaikan harga beras menguntungkan petani, tetapi disisi lain memberatkan konsumen. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan HPP sebesar 10 % pada tahun 2012 berdasarkan INPRES No. 3 Tahun 2012, maka turut meningkatkan harga beras di pasaran sebesar 2 % pada tahun 2013-2014 ini, dengan demikian kenaikan ini dapat menjaga usaha dan keuntungan petani.
  - d. Upaya pemerintah dalam penurunan konsumsi beras dengan meningkatkan konsumsi pangan sumber karbohidrat lain masih mengalami hambatan antara lain produksi umbi-umbian masih belum stabil, harga pangan sumber karbohidrat pangan lokal masih tinggi.
  - e. Masih banyaknya kasus keracunan yang melanda masyarakat terutama pada anak sekolah yang disebabkan oleh adanya residu pestisida pada berbagai jenis hasil pertanian dan perilaku produsen pangan segar masih menggunakan bahan pengawet, zat pewarna, zat pemanis buatan yang tidak sesuai ketentuan.
  - f. Kondisi umum daerah yang “Surplus Pangan” dan sulitnya memprediksi kejadian darurat pangan di setiap wilayah mengakibatkan kegiatan cadangan pangan belum menjadi prioritas utama pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota
- 4. Pertanian**
- a. Data dan informasi yang tersedia belum optimal, peta administrasi maupun digital sebagai media layanan data dan informasi belum tersedia.

- b. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada beberapa hal terkait Uraian tugas bidang pertanahan sesuai kewenangan provinsi belum jelas sehingga pada tataran pelaksanaan dan pengendalian dirasakan belum maksimal.
5. **Lingkungan Hidup**
- a. Masih rendahnya ketaatan pemrakarsa usaha terhadap dampak lingkungan hidup
  - b. Masih tingginya dampak lingkungan dari aktifitas sehari-hari berupa timbunan sampah masyarakat.
6. **Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**
- a. Data Base Kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan pemerintahan masih perlu ditingkatkan keakuratan dan validitasnya, masih berdasar perbedaan jumlah penduduk dari beberapa sumber resmi (Kemendagri, BPS, Kab/Kota)
  - b. Data dan informasi kependudukan tentang data kematian dan data pindah penduduk belum maksimal keakuratan dan updating.
  - c. Kesadaran masyarakat akan kepemilikan kelengkapan dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta Catatan Sipil) belum maksimal.
7. **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
- a. Penyebarluasan Teknologi Perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga kuantitas penggunaan teknologi tepat guna masih relatif sedikit dibanding jumlah sumber daya alam yang tersedia, demikian pula dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan selain daripada itu sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal begitu pula sarana perdesaan belum ditata secara baik sehingga masyarakat belum merasakan manfaat sumber daya alam dan sarana prasarana tersebut secara maksimal.
  - b. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Desa) masyarakat perlu pengelolaan yang lebih intensif sehingga pencapaian saat ini dapat lebih ditingkatkan serta pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih perlu ditingkatkan.
  - c. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun.
  - d. Belum optimalnya ketersediaan data Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa dan kelurahan. Ketersediaan data Profil Desa dan Kelurahan sangat membantu dalam menentukan rencana intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) selain daripada itu masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan yang terkait akibatnya Undang-Undang tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal.
  - e. Masih kurangnya partisipasi masyarakat terutama kaum perempuan dalam ikutserta membangun desa terutama dalam kelembagaan.
  - f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat belum optimal sesuai dengan ketentuan manual teknis pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan (Permendagri No.19 Tahun 2007) dan pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat belum optimal berdasarkan kompetensi, jenis dan variasi pelatihan terkait dengan ketersediaan modul pelatihan pemberdayaan yang sesuai dengan spirit zaman masih relatif sedikit/terbatas baik untuk kelembagaan masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

- g. Masih kurangnya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan SDM di pedesaan terkait inovasi Teknologi Tepat Guna
  - h. Masih rendahnya kapasitas SDM dari kader KPM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.
- 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
- Pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan provinsi masih dilaksanakan oleh 2 (dua) institusi yaitu Perwakilan BKKBN dan Disdukcapil Dalduk KB Prov SulSel, hal ini disebabkan keterlambatan penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urususan Pemerintahan Konkuren sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 9. Perhubungan**
- a. Pertambahan jumlah kendaraan lebih tinggi dari pada pertambahan kapasitas jalan raya.
  - b. Jumlah fasilitas keselamatan yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang ada
  - c. Pembebasan lahan kereta api Makassar – Pare-pare dan pembangunan sarana prasarannya dilakukan Satker Perkeretapihan Sulawesi Selatan Kementerian Perhubungan RI melalui dana APBN sehingga pemerintah Provinsi hanya bisa berkoordinasi tanpa terlibat langsung.
  - d. Masih kurangnya animo masyarakat untuk memanfaatkan BRT sehingga halte yang dibangun sampai dengan tahun 2016 sebanyak 110 buah belum dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kondisi halte yang rawan vandalisme / tindakan perusakan serta digunakan bukan untuk peruntukannya.
  - e. Trayek BRT, angkot (pete-pete) dan Pete-pete smart perlu disinkronkan.
  - f. Angkutan online menimbulkan masalah dalam pengoperasiannya.
  - g. Pengalihan jembatan timbang kepada Kementerian perhubungan menimbulkan masalah dalam pendataan aset dan kepegawaian.
  - h. Pengalihan pengelolaan terminal tipe B kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu dikoordinasikan lebih lanjut.
  - i. Masih terbatasnya pelayanan transportasi pada masyarakat yang ada pada daerah terpencil perbatasan dan kepulauan yang disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana transportasi di daerah tersebut.
- 10. Komunikasi dan Informatika**
- a. Nomenklatur Program Urusan Kominfo Statistik dan persandian pada RPJMD Prov.SulSel Tahun 2013-2018 dengan Rencana Strategik (RESNTRA) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian belum sesuai dengan Pembagian Kewenangan Urusan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika berdasar UU 23 Tahun 2014.
  - b. Masih terbatasnya SDM yang menguasai teknologi dan informasi
  - c. Sarana dan Prasaran Pendukung pelaksanaan tugas Komunikasi dan Informatika belum optimal.
- 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**
- a. Peran fasilitasi dan dukungan Akses Modal bagi pelaku Koperasi dan UMKM masih rendah
  - b. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah tiga pilar pelaku ekonomi yang ada di Indonesia namun penerapan sistim dan manajemen masih sangat rendah.
  - c. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah belum optimal memanfaatkan jaringan usaha dan kemitraan baik antara Koperasi dan UMKM maupun dengan pelaku ekonomi lainnya.
  - d. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan informasi serta perkembangan modal

- e. Belum optimalnya kualitas Sumber daya manusia dari para pengelola Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
12. **Penanaman Modal**
    - a. Belum meratanya sebaran investasi di Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa daerah mengalami ketimpangan dalam hal daya tarik investasi.
    - b. Belum optimalnya sistim jaringan informasi investasi kabupaten/ kota se Sulawesi Selatan
  13. **Kepemudaan dan Olah raga**
    - a. Masih banyaknya pengurus organisasi kepemudaan di Sulawesi Selatan yang melewati batas usia pemuda (16 s.d 30 tahun) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan (pasal 1 ayat 1). Hal ini disebabkan karena pemuda dan organisasi kepemudaan di Sulawesi Selatan belum memahami Undang Undang tersebut, akibatnya tidak optimalnya regenerasi kepengurusan organisasi juga upaya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda belum maksimal.
    - b. Belum adanya penjabaran/turunan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam bentuk Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
    - c. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kualitas dan prestasi atlet pada sentra pendidikan keolahragaan (PPLP/SKO, PPAPD dan Klub/Cabang Olahraga Unggulan Daerah)
    - d. Kurangnya event atau pertandingan olahraga antar pelajar yang diselenggarakan di Sulawesi Selatan yang mengakibatkan kurangnya pengalaman tanding atau “jam terbang” atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) sehingga berpengaruh pada proses pembentukan karakter dan “mental juara” dan prestasi atlet.
    - e. Komitmen penganggaran pembangunan Stadion Barombong yang sudah disepakati dengan Kemenpora RI berupa sharing budget antara APBD dengan APBN sesuai DED tahun 2013 mengalami ketidak konsistenan penganggaran APBN. Walaupun penganggaran APBD sudah tercapai dan terakumulasi sampai tahun 2018, namun belum sesuai yang diharapkan. Ketidak konsistenan penganggaran APBN disebabkan selain Indonesian teragenda sebagai tuan rumah Asean Games tahun 2018 juga belum keseluruhan lahan pembangunan Stadion Barombong memiliki alas hak/sertifikat. Akibatnya selama 3 tahun tidak teralokasi penganggaran APBN sesuai komitmen. Sehingga mempengaruhi optimalisasi pembangunan Stadion Barombong.
    - f. Belum sinkron dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang membidangi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
    - g. Belum adanya pola pembinaan dan pengembangan cabang olahraga yang menjadi unggulan di kabupaten/kota.
  14. **Statistik.**
    - a. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi pembangunan pada setiap OPD sesuai dengan tugas pokoknya
    - b. Belum optimalnya Sumber daya pengelola data statistik
  15. **Persandian**
    - a. Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan koordinasi persandian dengan jajaran persandian Se Sulawesi Selatan sesuai PERKA Lembaga Sandi Negara No.7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Penanganan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kab./Kota yang meliputi: tata kelola

persandian, operasional pengamanan persandian, pengelolaan sumberdaya persandian, pengamanan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

- b. Masih terbatasnya sarana prasarana dan SDM profesional dibidang persandian.
- c. Tidak ada kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran yang diarahkan untuk pengelolaan persandian.

**16. Kebudayaan**

- a. Belum optimalnya aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai acuan utama dari setiap lembaga kemasyarakatan dan setiap individu pada semua aspek kehidupan
- b. Belum optimalnya aktualisasi berbagai kekayaan budaya bagi perkembangan kunjungan wisata
- c. Belum maksimalnya koordinasi, integrasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan di kab./kota sebagai upaya peningkatan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya

**17. Perpustakaan**

- a. Masih kurangnya minat baca masyarakat.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat.
- c. Hasil seminar dan workshop yang berskala internasional belum bisa diaplikasikan pada penyelenggaraan perpustakaan.
- d. Anggapan penempatan pegawai diperpustakaan dipandang relatif rendah.
- e. Masih rendahnya kualitas layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.
- f. Koleksi bahan pustaka masih kurang.

**18. Kearsipan**

- a. Belum terlaksananya sistem kearsipan yang baku disetiap OPD.
- b. Rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya arsip.
- c. Belum terwujudnya Unit Kearsipan disetiap OPD, sesuai amanah UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- d. Belum optimalnya sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten di bidang kearsipan.
- e. Masih rendahnya kualitas layanan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Belum optimalnya pembinaan kearsipan di OPD karena kurangnya Tenaga Fungsional Kearsipan (Arsiparis).

**2.6.1.3 Urusan Pilihan**

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah

**1. Kelautan dan Perikanan**

- a. Faktor curah hujan yang tinggi (anomali cuaca lanina) sehingga mempengaruhi produksi garam rakyat, selain itu mayoritas pengelolaan tambak garam di Sulsel masih tradisional sehingga hasilnya tidak optimal.
- b. Kenaikan pendapatan pembudidaya tidak mampu mengompensasi laju inflasi kenaikan harga barang kebutuhan rumah tangga dan biaya operasional (kebutuhan usaha) yang meningkat akibat kontraksi ekonomi. Selain itu disebabkan Panjangnya rantai pemasaran sehingga nilai produksi/keuntungan yang didapatkan pembudidaya kecil.
- c. Adanya pengalihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi dimana yang dulu masing-masing kabupaten/kota mengelola sendiri kawasan konservasi perairan daerah diwilayahnya masing-masing sekarang diserahkan ke Provinsi sebagaimana diatur pada UU 23 tahun 2014.



- d. Pemahaman dan kesadaran hukum dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan masih kurang sehingga masih terjadi kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*).
  - e. SDM nelayan dan pembudidaya masih kurang terutama dalam hal penanganan kualitas hasil produksi perikanan yang berdampak pada mutu/kualitas produk perikanan yang belum memenuhi persyaratan ekspor.
  - f. Nilai tukar pembudidaya (NTPi) mengalami penurunan yaitu sebesar 97,9 atau mencapai 90,4 % dari target 108,3 dan turun 1,2 % dibandingkan tahun 2016
2. **Pariwisata**
- a. Belum optimalnya kesiapan daya tarik wisata pada setiap destinasi di Sulawesi Selatan, hal ini terkait dengan belum memadainya dukungan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.
  - b. Ada persaingan destinasi wisata melalui tumbuh pesatnya destinasi lain (dalam dan luar negeri).
  - c. Belum maksimalnya pelaksanaan promosi yang memanfaatkan media informasi, media cetak dan elektronik yang berbasis teknologi serta pemanfaatan event yang berskala besar, untuk menarik perhatian pangsa pasar potensial seperti Rusia China, dan Korea.
3. **Pertanian**
- Sektor Tanaman Pangan:
- a. Lahan yang layak untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura semakin terbatas, sedangkan target produksi dan produktivitas semakin meningkat setiap tahunnya untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan. Lahan yang tersedia untuk pertanian setiap tahun bertambah namun peningkatannya tidak signifikan, setiap tahun peningkatannya semakin menurun.
  - b. Kondisi iklim yang tidak menentu dapat mempengaruhi produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan
  - c. Belum optimalnya infrastruktur pertanian. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian belum mencukupi.
  - d. Masih terjadi kehilangan hasil pertanian pada saat panen.
  - e. Terbatasnya Petugas Lapangan Pertanian. Petugas Lapangan Pertanian dapat dirinci menjadi 3 kategori, yaitu Penyuluh Pertanian, Pengamat Hama Penyakit (P-OPT), dan Pengawas Benih.
  - f. Daya saing produk pertanian relatif masih rendah
  - g. Harga beberapa komoditas pertanian rendah, menyebabkan motivasi petani juga rendah.
  - h. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh karena pola konsumsi beras masyarakat Sulawesi Selatan masih tinggi, sementara konsumsi sayuran dan buah masih rendah.
  - i. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota belum optimal, misalnya Data usulan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat (Belanja Hibah/Bantuan Sosial) dari kabupaten/kota banyak yang terlambat masuk dan akan berdampak pada lambatnya penerbitan Surat Keputusan Gubernur.



*Sektor perkebunan:*

Pada proses pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dilapangan, terlihat masih terkendala pada proses pengadaan dan penyediaan pupuk dimana pupuk ini merupakan sarana yang menunjang keberhasilan penanaman komoditi unggulan.

*Sektor Peternakan:*

- a. Sistem pemeliharaan ternak sapi potong yang masih bersifat ekstensif dan semi intensif sehingga sulit untuk mengumpulkan ternak dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat dan sebagian besar peternak belum percaya teknologi Inseminasi Buatan yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan Inseminasi Buatan yang merupakan program prioritas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Masih tingginya pematangan sapi betina produktif/bunting sehingga berakibat pada melambatnya tingkat pertumbuhan populasi ternak sapi potong

**4. Kehutanan**

- a. Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi seluas 1.874.529 ha yang menjadi kewenangan daerah provinsi Sulawesi Selatan. Dengan luasan tersebut terdapat potensi pemanfaatan hutan yang besar untuk pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat, namun belum sepenuhnya masyarakat memanfaatkan kawasan hutan yang telah dicadangkan untuk pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat karena terkendala pada kurangnya minat masyarakat untuk mengelola hutan,
- b. Terdapat dengan juga terdapat tantangan dalam perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, dimana jumlah tenaga pengamanan hutan belum memadai dibanding luasan kawasan hutan yang ada, selain itu sarana prasarana pengamanan juga belum memadai, sehingga kasus ilegal logging dan penyerobotan kawasan belum dapat teratasi.
- c. Kebijakan pengelolaan hutan tingkat tapak oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan belum semua disusun dalam bentuk Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang sebagai landasan pengelolaan hutan
- d. Untuk sasaran rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan diperlukan keterlibatan masyarakat untuk membudidayakan tanaman kehutanan di lahan milik/kebun dalam bentuk hutan rakyat

**5. Energi dan Sumberdaya Mineral**

- a. Masih terdapat ketidaktaatan pengusaha tambang terhadap hak dan kewajiban yang berkaitan dengan produksi, konservasi, lingkungan hidup dan K3.
- b. Masih banyak desa yang belum menikmati energi listrik secara optimal.
- c. Aksesibilitas yang sulit, dimana kurang lebih 60% desa letaknya di daerah terpencil dan kepulauan sehingga sulit terjangkau listrik.
- d. Belum optimalnya peningkatan kualitas data Eksplorasi Energi dan Sumber Daya Mineral
- e. Akses untuk mengurus perizinan sangat jauh dari beberapa kabupaten

**6. Perdagangan**

- a. Belum optimalnya pengawasan perdagangan
- b. Fluktuasi harga komoditas bahan makanan pokok yang cenderung ekstrem pada hari besar keagamaan tertentu;
- c. Inefisiensi konektivitas perdagangan antar pulau dan asimetri informasi pada wilayah mitra dagang antar provinsi belum mampu maksimal diatasi.
- d. Pola rantai distribusi yang panjang yang mengakibatkan tingginya peningkatan harga dari tingkat petani hingga konsumen

- e. Harga lebih banyak ditentukan oleh pedagang dibandingkan petani sehingga keuntungan petani jauh lebih rendah dari pedagang meskipun harga di pasar distribusi
  - f. Belum adanya Lembaga Pangan resmi untuk mengatasi pasar yang belum efisien yang ditunjuk Pemerintah untuk mengakomodir perdagangan antar daerah. Belum optimalnya identifikasi komoditas produk/jasa unggulan bagi UMKM baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Sulsel
- 7. Perindustrian**
- a. Belum optimalnya industri di sektor komoditi unggulan karena belum dimanfaatkan secara optimal oleh investor.
  - b. Belum optimalnya upaya promosi potensi sumber daya alam.
  - c. Belum optimalnya pengembangan inovasi ekonomi kreatif yang berbasis sumber daya alam dan penguatan kompetensi sumber daya manusia.
- 8. Transmigrasi**
- a. Kurangnya bantuan pasca pelatihan setiap jenis kegiatan pelatihan yang dilaksanakan, sehingga para alumni tidak optimal mengembangkan ilmu yang diterima
  - b. Adanya kemungkinan penyerobotan lahan calon lokasi transmigrasi oleh oknum tertentu untuk memanfaatkan lokasi tersebut sebagai kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah setempat
  - c. Kurang optimalnya pengelolaan data dan informasi serta hasil penelitian dan pengembangan kawasan transmigrasi, pemenuhan standar/spesifikasi penyediaan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk kawasan transmigrasi serta kawasan perkotaan baru
  - d. Masih ditemukannya banyak lokasi tanah transmigrasi yang tidak jelas status lahannya dan masih banyak lokasi yang belum memiliki sertifikat

#### **2.6.1.4 Fungsi Penunjang Urusan**

Fungsi penunjang urusan pemerintahan merupakan fungsi yang melekat pada pemerintah daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.

##### **1. Perencanaan Pembangunan**

- a. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal.
- b. Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah belum optimal.
- c. Masih terbatasnya SDM perencana pada organisasi perangkat daerah.
- d.

##### **2. Keuangan**

- a. Penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan terkait penggunaan keuangan tidak tepat waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan,
- b. Pengetahuan para bendahara OPD terkait Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penatusahaan pengeluaran dan belanja daerah belum optimal.
- c. Terkait dengan kegiatan pengelolaan administrasi penggajian PNS, adalah masih adanya SKPD yang terlambat memasukkan SPM gaji, masih adanya kesalahan dalam pencantuman kode map Pajak di E-Simponi, untuk pembayaran IWP 10% dan Taperum, sehingga pembayaran gaji SKPD tersebut tidak bersamaan dengan SKPD lainnya.
- d. Masih banyak Lembaga/Ormas yang belum memahami aturan/prosedure pengalokasian hibah dan bansos terutama prosedur administrasi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan.

- e. Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan Dengan Pelaksanaan APBD Pada OPD Pemerintah Provinsi Sulsel terkhususnya Bapenda, Bappeda dan BPKD masih menggunakan aplikasi yang berbeda. Sehingga belum terintegrasinya data yang dihasilkan..
  - f. Masih seringnya terjadi perubahan struktur pengelola keuangan di kabupaten/kota, sehingga penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan terkadang tidak sinkron dan diperlukan waktu untuk melakukan penyesuaian.
3. **Kepegawaian**
- a. Belum optimalnya *up-date* data kepegawaian setiap saat karena belum terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dengan SKPD lingkup Pemprov.Sulsel dan Kabupaten/ Kota.
  - b. Kualitas SDM aparatur, pola rekrutmen, penilaian prestasi, pola pembinaan karir, mindset aparatur, kualitas pelayan publik belum optimal
4. **Pendidikan dan Pelatihan**
- a. Keterpaduan kebutuhan SDM OPD dengan jenis pelaksanaan diklat belum optimal.
  - b. Belum optimalnya koordinasi antar OPD Provinsi menyelenggarakan diklat/pelatihan dan workshop dengan Badan Diklat Provinsi Sul Sel;
5. **Penelitian dan pengembangan**
- a. Masih terbatas pejabat fungsional peneliti, pejabat fungsional rekayasa dan fungsional analisis kebijakan public yang akan mendukung pelaksanaan kelitbangan baik di Provinsi/Kab/Kota.
  - b. Belum optimalnya penguasaan metodologi dan analisis penelitian bagi Pejabat Fungsional Peneliti, Pejabat Fungsional Perekayasa dan staf Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada Permendagri RI Nomor 17 Tahun 2016.
  - c. Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi hasil-hasil penelitian dan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah Daerah.
  - d. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kelitbangan
6. **Pengawasan**
- a. Belum optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah berupa kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan berdasarkan temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun BPK-RI.
  - b. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Aparat eksternal oleh OPD masih menjadi fokus kinerja inspektorat, Oleh karena itu Inspektorat terus mendorong peningkatan tindak hasil melalui monitoring, membentuk tim klinik tindak lanjut.
  - c. Pelaksanaan Sistem akuntabilitas kinerja melalui evaluasi system akuntabilitas kinerja pada OPD masih terdapat beberapa kelemahan mendasar yang perlu perbaikan.

## BAB III

# RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

#### 3.1.1 KONDISI PEREKONOMIAN MAKRO

##### 3.3.1.1. Pertumbuhan dan Komposisi Ekonomi

Perekonomian Sulsel pada triwulan IV 2018 tumbuh mencapai 6,47% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, ekonomi Sulsel tetap tumbuh kuat dibandingkan nasional yang mencapai 5,18% (yoy). Pada triwulan IV 2018, perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi; Jasa Keuangan; dan Jasa Kesehatan. Sementara dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2018 terutama karena Konsumsi Pemerintah, dan Ekspor Luar Negeri.

Tabel III.2  
Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw I-2019 terhadap Triw IV-2018 (q-to-q)	Triw I-2019 terhadap Triw I-2018 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2019 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,90	2,71	0,57
B Pertambangan dan Penggalian	-8,81	-3,61	-0,20
C Industri Pengolahan	-0,02	8,26	1,13
D Pengadaan Listrik, Gas	-6,48	10,24	0,01
E Pengadaan Air	3,62	4,15	0,01
F Konstruksi	-6,55	6,88	0,83
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,96	9,87	1,45
H Transportasi dan Pergudangan	-3,07	3,86	0,15
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,45	6,29	0,09
J Informasi dan Komunikasi	0,82	13,13	0,89
K Jasa Keuangan	0,43	-1,30	-0,05
L Real Estate	-0,11	5,11	0,18
M,N Jasa Perusahaan	-2,49	6,80	0,03
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib	-4,23	11,64	0,48
P Jasa Pendidikan	-6,01	11,68	0,63
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,17	9,83	0,20
R,S,T,U Jasa Lainnya	-5,08	11,16	0,15
<b>PDRB</b>	<b>0,31</b>	<b>6,56</b>	<b>6,56</b>

Sumber : BRS-BPS Sulsel Triwulan I-2019

Kemudian secara keseluruhan tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 7,07% (yoy) lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, Sulawesi Selatan tetap berada pada peringkat 3 secara nasional setelah Maluku Utara (7,92%; yoy) dan Papua (7,33%; yoy). Lapangan usaha utama yang melambat yaitu lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Dari sisi pengeluaran, perlambatan terjadi pada Investasi (PMTB), namun terjadi peningkatan impor luar negeri untuk merespons konsumsi yang masih kuat.

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2019 dibanding triwulan I-2018 tumbuh sebesar 6,56 persen. Pertumbuhan didukung semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 13,13 persen, diikuti oleh Jasa Pendidikan sebesar 11,68 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,64; Jasa Lainnya sebesar 11,16 persen dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,24 persen. Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan I-2019 (yoy), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,45 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 1,13 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 0,89 persen serta Konstruksi sebesar 0,83 persen.

Selanjutnya terkait dengan Struktur ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2019 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; diikuti Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor dan Konstruksi dengan peran masing-masing sebesar 21,69 persen, 14,28 persen dan 13,78 persen. Selanjutnya Industri Pengolahan memiliki peran sebesar 13,52 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut mencapai 63,28 persen terhadap total PDRB Sulawesi Selatan.

**Tabel III.3**  
**Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen)**

Lapangan Usaha	2018	2018		Trw I-2019
		Trw I-2018	Trw IV-2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,50	23,23	18,99	21,69
B Pertambangan dan Penggalian	4,91	4,95	4,85	4,25
C Industri Pengolahan	12,86	13,42	13,58	13,52
D Pengadaan Listrik, Gas	0,06	0,06	0,07	0,06
E Pengadaan Air	0,10	0,11	0,10	0,10
F Konstruksi	13,54	12,87	14,82	13,78
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,37	13,85	14,50	14,28
H Transportasi dan Pergudangan	4,27	4,17	4,35	4,42
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,41	1,41	1,46	1,40
J Informasi dan Komunikasi	4,93	4,94	5,21	5,19
K Jasa Keuangan	3,74	3,93	3,69	3,66
L Real Estate	3,71	3,85	3,80	3,77
M,N Jasa Perusahaan	0,46	0,46	0,48	0,46
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib	4,47	4,27	4,79	4,54
P Jasa Pendidikan	5,28	5,09	5,74	5,35
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,99	2,01	2,05	2,08
R,S,T,U Jasa Lainnya	1,41	1,37	1,54	1,44
<b>PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BRS-BPS Sulsel Triwulan I-2019

### 3.3.1.2. Inflasi

Realisasi inflasi keseluruhan tahun 2018 tercatat 3,50% (yoy), berada dalam titik tengah sasaran inflasi 2018. Meningkatnya tekanan inflasi pada akhir 2018 dibandingkan triwulan III 2018, terutama didorong oleh kelompok pendidikan dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan, seiring kenaikan tarif angkutan pada saat masa libur anak sekolah. Inflasi yang terjadi di Sulawesi Selatan pada April 2019 ini disebabkan oleh naiknya harga pada enam kelompok pengeluaran yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga konsumen (IHK) pada kelompok bahan makanan (1,51%); kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (0,19%); kelompok sandang (0,18%); kelompok kesehatan (0,10%); kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga (0,05%); kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,02%); sementara kelompok perumahan,air, listrik, gas, dan bahan bakar deflasi (0,02%). Sedangkan laju inflasi tahun kalender (Januari-April 2019) Sulawesi Selatan sebesar 0,99 persen dan laju inflasi year on year (April 2019 terhadap April 2019) sebesar 3,33 persen. Oleh



karena itu, Bank Indonesia dan TPID akan terus memastikan upaya stabilitas harga untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### 3.3.1.3. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulsel mencapai 5,34% per Agustus 2018 lebih rendah dibandingkan Agustus tahun 2017 sebesar 5,61%. Secara nominal jumlah pengangguran terbuka Sulsel turun dari 213,69 ribu orang per Agustus 2017 menjadi 213,11 ribu orang per Agustus 2018 atau mengalami penurunan sebesar -0,27% (yoy). Penurunan pengangguran terjadi karena penyerapan di sektor sekunder dan tersier yang meningkat signifikan.

**Tabel III.3**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama**

KEGIATAN UTAMA	Februari 2017	Agustus 2017	Februari 2018	Agustus 2018
Angkatan Kerja	3.991.818	3.812.358	4.174.181	3.988.029
a. Bekerja	3.801.407	3.598.663	3.949.296	3.774.924
b. Menganggur	190.441	213.695	224.885	213.105
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>	<b>64,28 %</b>	<b>60,98 %</b>	<b>66,36%</b>	<b>63,02%</b>
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	<b>4,77 %</b>	<b>5,61 %</b>	<b>5,39%</b>	<b>5,34%</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Lapangan Usaha Pertanian, Perdagangan, Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Jasa Pendidikan masih menjadi Lapangan Usaha dengan jumlah penyerapan tenaga kerja terbesar pada periode Agustus 2018. Pangsa penyerapan tenaga kerja pada lima lapangan usaha tersebut masing-masing sebesar 37,79%, 19,08%, 9,05%, 6,75%, dan 5,51%.

**Tabel III.4**  
**Presentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama**

Lapangan Pekerjaan Utama	Februari 2017		Agustus 2017		Februari 2018		Agustus 2018		Growth (yoy)
	Jumlah	Pangsa	Jumlah	Pangsa	Jumlah	Pangsa	Jumlah	Pangsa	
A Pertanian	1,544,614	40.63%	1,391,639	38.67%	1,617,680	40.96%	1,426,501	37.79%	2.51%
B Pertambangan	41,840	1.10%	28,447	0.79%	41,647	1.05%	24,283	0.64%	-14.64%
C Industri Pengolahan	279,668	7.36%	279,246	7.76%	304,224	7.70%	341,716	9.05%	22.37%
D Pengadaan Listrik dan Gas	12,378	0.33%	11,292	0.31%	22,990	0.58%	9,217	0.24%	-18.38%
E Pengadaan Air	10,916	0.29%	7,136	0.20%	9,544	0.24%	9,586	0.25%	34.33%
F Konstruksi	245,679	6.46%	232,673	6.47%	236,673	5.99%	254,738	6.75%	9.48%
G Perdagangan Besar dan Eceran	666,962	17.55%	674,127	18.73%	652,232	16.52%	720,352	19.08%	6.86%
H Transportasi dan Pergudangan	150,205	3.95%	156,112	4.34%	136,237	3.45%	156,019	4.13%	-0.06%
I Penyediaan Akomodasi	137,489	3.62%	118,521	3.29%	154,251	3.91%	134,126	3.55%	13.17%
J Informasi dan Komunikasi	20,029	0.53%	21,546	0.60%	15,245	0.39%	20,069	0.53%	-6.86%
K Jasa Keuangan dan Asuransi	44,737	1.18%	35,924	1.00%	41,745	1.06%	47,853	1.27%	33.21%
L Real Estat	890	0.02%	5,079	0.14%	801	0.02%	8,594	0.23%	69.21%
M,N Jasa Perusahaan	19,482	0.51%	31,577	0.88%	28,630	0.72%	35,023	0.93%	10.91%
O Administrasi Pemerintahan	239,782	6.31%	206,819	5.75%	262,878	6.66%	207,003	5.48%	0.09%
P Jasa Pendidikan	246,833	6.49%	228,271	6.34%	253,103	6.41%	207,913	5.51%	-8.92%
Q Jasa Kesehatan	68,997	1.82%	74,101	2.06%	76,317	1.93%	68,630	1.82%	-7.38%
R,S,T,U Jasa Lainnya	70,906.00	1.87%	96,153	2.67%	95,099	2.41%	103,301	2.74%	7.43%
<b>Total</b>	<b>3,801,407</b>	<b>100%</b>	<b>3,598,663</b>	<b>100%</b>	<b>3,949,296</b>	<b>100%</b>	<b>3,774,924</b>	<b>100%</b>	<b>4.90%</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah BI

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sulsel tercatat meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. TPAK naik dari 60,98% pada Agustus 2017 menjadi 63,02% pada Agustus 2018. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 mencapai 3,99 juta orang, lebih tinggi dari periode Agustus 2017 sejumlah 3,81 juta orang. Secara sektoral, peningkatan TPAK diperkirakan terjadi karena penyerapan tenaga kerja di sektor sekunder dan tersier yang meningkat signifikan. Hal ini dikonfirmasi oleh hasil Survei Konsumen Bank Indonesia untuk ketersediaan lapangan kerja yang menunjukkan hasil serupa.

### 3.3.1.4. Kemiskinan

Berdasarkan data September 2018, jumlah penduduk miskin di Sulsel turun dibandingkan September 2017. Jumlah penduduk miskin pada September 2018 mencapai 779,6 ribu orang atau 8,87% dari total penduduk Sulsel, membaik dibandingkan kondisi September 2017 yang berjumlah 826 ribu orang (9,48%).



**Tabel III.5**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan**  
**Menurut Daerah, 2013-2018**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sept 2013	161,61	701,61	863,23	5,23	13,31	10,32
Mar 2014	162,49	701,81	864,30	5,22	13,25	10,28
Sept 2014	154,40	651,95	806,35	4,93	12,25	9,54
Mar 2015	146,42	651,30	797,72	4,61	12,23	9,39
Sept 2015	157,18	707,34	864,51	4,93	13,22	10,12
Mar 2016	149,13	657,90	807,03	4,51	12,46	9,40
Sept 2016	150,60	646,20	796,81	4,47	12,30	9,24
Mar 2017	153,56	659,51	813,07	4,48	12,59	9,38
Sept 2017	166,50	659,47	825,97	4,76	12,65	9,48
Mar 2018	167,93	624,70	792,63	4,61	12,24	9,06
Sept 2018	168,70	610,94	779,64	4,48	12,15	8,87

Sumber : Diolah dari Data Susenas September 2013 - September 2018

Komposisi penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan dari tahun ke tahun tidak ada perbedaan yang signifikan. Pada bulan September 2018 sebagian besar (78,36 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sementara pada bulan September 2017 persentasenya 79,84 persen. Secara spasial, persentase jumlah penduduk miskin di Sulsel pada September 2018 relatif cukup rendah dibandingkan provinsi lain di Sulawesi. Jumlah penduduk miskin Sulsel berada pada urutan kedua terendah (8,87%) setelah Sulawesi Utara (7,90%). Sedangkan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi untuk wilayah Sulawesi tercatat di Gorontalo sebesar 15,83%.

### 3.1.2 PROSPEK DAN TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

#### 3.1.2.1 Prospek Perekonomian Daerah

Memasuki 2019 dinamika global berubah secara cepat dengan eskalasi perang dagang dan kondisi persaingan geopolitik Amerika Serikat dan China yang meningkat tajam. Hal tersebut menimbulkan kenaikan resiko pada pertumbuhan ekonomi global dan perlemahan perdagangan internasional. Namun demikian, di tengah ketidakpastian tersebut, kinerja ekonomi Indonesia di awal 2019 dinilai masih positif. Hal ini ditandai dengan kondisi perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,07 persen yang ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang cukup sehat sejalan dengan terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah dan adanya arus modal yang mulai mengalir masuk kembali ke Indonesia, seiring dengan jeda kenaikan suku bunga di Amerika Serikat.

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui reformasi structural yang terus berlanjut serta penguatan permintaan domestic dengan investasi sebagai ujung tombak dan perbaikan kinerja perdagangan internasional melalui upaya diversifikasi ekspor. Berdasarkan rancangan RKP Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan mampu mencapai 5,35-5,5 persen pada tahun 2020 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI perkapita diharapkan meningkat menjadi USD4.360 – 4.410 per kapita pada tahun 2020. Selin menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro ekonomi tetap menjadi prioritas. Tingkat Inflasi ditargetkan sebesar 3,0+1 persen. Di tengah tekanan eksternal, pergerakan nilai tukar diupayakan tetap stabil mencapai rata-rata Rp15.000 per USD pada tahun 2020. Disisi lain tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 8,5 – 9,0 persen dan 4,7 – 5,1 persen dengan tingkat gini rasio menurun menjadi 0,375-0,380. Sementara itu, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,51 yang mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan kondisi perekonomian baik global maupun nasional, maka Prospek pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 akan berada pada kisaran 7,2 – 7,6% (yoy). Pertumbuhan tersebut didukung dengan tren kenaikan PDRB Sulsel pada semester I

2019. Pertumbuhan akan bersumber dari akselerasi konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh pada rentang 5,6 – 6,0% (yoy) dan disertai pula dengan akselerasi investasi. Pertumbuhan investasi diperkirakan berada pada rentang 8,0 – 8,4% (yoy). Tren deselerasi harga komoditas akan memberikan dampak pada perdagangan luar negeri Sulawesi Selatan sehingga pertumbuhan ekspor diperkirakan lebih moderat. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan akan ditopang oleh lapangan usaha utama Sulawesi Selatan, yaitu pertanian, industri, dan perdagangan. Inflasi pada tahun 2019 diperkirakan tetap berada pada rentang sasaran yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu 3,5±1% (yoy). Tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari bahan makanan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, produksi, dan faktor ketersediaan air sejalan dengan tertundanya operasional beberapa bendungan/waduk. Adapun pada kelompok harga yang diatur pemerintah pada tahun 2019 diperkirakan lebih terkendali sejalan dengan upaya pemerintah meredam kenaikan harga tiket angkutan udara. Optimisme keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi masih didukung oleh beberapa proyek infrastruktur yang telah selesai sehingga akan memberikan dampak pada tahun 2020. Beberapa proyek tersebut antara lain adalah bendungan Paselloreng dan bendungan Karalloe yang akan meningkatkan produktivitas pertanian. Selain faktor tersebut infrastruktur lainnya seperti perkeretaapian Makassar-Parepare dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sidrap dan Jeneponto yang juga telah selesai akan mendorong aksesibilitas dan kinerja lapangan usaha penyediaan listrik dan industri.

Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan kredit diperkirakan juga akan meningkat pada rentang 8-10% (yoy). Perkiraan pertumbuhan triwulan II 2019 diperkirakan berada pada rentang yang sama dengan pertumbuhan tahunan. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan diperkirakan berada pada rentang 7,2-7,6% (yoy) dengan faktor pendorong bersumber dari konsumsi rumah tangga merespon hari raya yang jatuh pada triwulan II. Kemudian dari sisi penawaran, pendorong utama berasal dari Lapangan Usaha Perdagangan dan Akomodasi Makan Minum, ditambah dengan Lapangan Usaha Pertanian yang juga meningkat dengan berlangsungnya masa panen.

### **3.1.2.2 Tantangan Perekonomian Daerah**

#### **3.1.2.2.1 Aspek Internal**

Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia masih diperhadapkan pada berbagai tantangan baik global, nasional dan domestik.

##### **1. Tantangan Perekonomian Global**

Beberapa tantangan global yang menjadi perhatian antara lain 1) pertumbuhan ekonomi dunia yang masih relatif rendah, sebesar 3,6 persen. Hal ini menyebabkan pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas internasional mengalami stagnasi, 2) Eskalasi perang dagang, terutama antara china dan Amerika Serikat, 3) Harga komoditas ekspor utama yang mengalami stagnasi. Harga kelapa sawit akan dipengaruhi pasokan yang masih berlebih di pasar dunia seiring dengan turunnya permintaan Uni Eropa yang mulai beralih ke minyak biji bunga matahari dan penerapan tarif terhadap minyak sawit oleh India. Selain itu, antusiasme negara-negara maju untuk menggunakan alternatif sumber energi yang lebih bersih, sehingga ekspor batu bara akan mengalami perlambatan.

##### **2. Tantangan Perekonomian Nasional**

Sedangkan tantangan nasional masih diperhadapkan pada : 1) Masih rendahnya produktifitas seiring dengan tidak berjalannya transformasi struktural seperti masih adanya tumpang tindih regulasi dan kompleksitas birokrasi, 2) Sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai, 3) Kualitas infrastruktur yang masih rendah dan tidak merata khususnya konektifitas dan energi, 4) Masih rendahnya kualitas SDM dan produktifitas tenaga kerja sehingga kurang bersaing di era MEA, 5) Intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal, 6) Sistem inovasi yang belum efektif, 7) Keterkaitan hulu hilir yang lemah

### 3. Tantangan Perekonomian Daerah

Secara umum tantangan perekonomian Daerah masih diperhadapkan pada permasalahan makro. Selanjutnya berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, tantangan perekonomian daerah antara lain : 1) Reformasi birokrasi yang belum maksimal di tataran pemerintahan. Hal ini mengakibatkan pada rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang bermuara pada masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, 2) Kualitas infrastruktur yang kurang memadai dan merata khususnya infrastruktur dasar pada kawasan terpencil sehingga konektivitas khususnya aksesibilitas arus barang dan jasa mengalami perlambatan, 3) Masih rendahnya kualitas SDM baik aparatur maupun tenaga kerja yang mengakibatkan masih rendahnya kualitas kinerja dan produktifitas kerja. Hal ini juga bermuara pada masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, 4) Produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang masih perlu dioptimalkan seperti pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Hal ini mengakibatkan masih redahnya nilai tambah dan kesejahteraan petani.

#### 3.1.3 INVESTASI DAERAH

Perbandingan nilai investasi tahun 2017 lalu dengan investasi yang masuk ke Sulsel pada tahun 2018 mengalami kenaikan 0,64 persen. Pada tahun 2017, realisasi investasi sebesar Rp11,47 Trilyun, maka di tahun 2018 naik menjadi Rp11,5 Trilyun (kurs Rp13.400)

**Tabel III.6**  
**Realisasi Investasi PMA dan PMDN Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2018**

NO	PERIODE	REALISASI INVESTASI							
		PMDN				PMA			
		PROYEK	TKI	TKA	Rp.	PROYEK	TKI	TKA	US \$
1	TRIWULAN	107	1,500	-	1,480,077,500,000	75	8,347	34	52,046,200
2	TRIWULAN II	204	2,087	2	791,276,700,000	110	787	62	182,592,600
3	TRIWULAN III	103	671	-	168,893,100,000	81	306	9	142,482,600
4	TRIWULAN IV	126	2,009	-	835,629,000,000	105	463	38	240,066,700
<b>JUMLAH</b>		<b>540</b>	<b>6,267</b>	<b>2</b>	<b>3,275,876,300,000</b>	<b>371</b>	<b>9,900</b>	<b>143</b>	<b>617,188,100</b>

Sumber : Renstra BPMD Provinsi Sulawesi Selatan, 2018-2023

Nilai investasi ini terbagi ke dalam PMDN, dimana realisasi investasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 66 persen dari 2017, dimana realisasi investasi tercatat Rp1,9 Trilyun maka di tahun 2018 sebesar Rp3,2 Trilyun. Sedangkan investasi yang bersumber dari PMA di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 12 persen dari Rp9,5 triliun menjadi Rp8,2 triliun. Adapun sektor-sektor yang memberi kontribusi atas peningkatan nilai investasi itu di antaranya sektor pertambangan, sektor kelistrikan, dan industri. Pada sektor pertambangan misalnya seperti potensi emas terbesar ada di kabupaten Luwu, potensi marmer terbesar di Maros dan Pangkajene, untuk pasir besi di Luwu dan Luwu Timur. Pada sektor kelistrikan yang sangat potensial juga dimiliki Sulawesi Selatan seperti panas bumi terdapat di Toraja, Luwu, Sidrap dan Sinjai. Tenaga air di Toraja, Pinrang dan Enrekang dengan potensi 1.400 megawatt. Tahun 2019 telah ada PLTB yang ada di Kabupaten Sidrap dengan kapasitas 75 Mega Watt, sementara berjalan di kabupaten Jeneponto dengan kapasitas 60 MW. Selain itu juga terdapat gas alam di Kabupaten Wajo. Sedangkan pada sektor industri telah disediakan lahan di beberapa daerah seperti Makassar, Maros, Gowa, Takalar dan Bantaeng. Berdasarkan data realisasi investasi untuk sektor/bidang usaha di tahun 2018 baik yang bersumber dari PMA maupun PMDN maka, listrik, gas dan air masih mendominasi dan kemudian dilanjutkan dengan pertambangan serta industry logam dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya. Selanjutnya berdasarkan negara asal, maka Singapura masih mendominasi nilai investasi yang ada di Sulawesi Selatan dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp.1,71 trilyun lebih dan diikuti Inggris dan Kanada.

Melihat kondisi lingkungan global khususnya dan trend nilai investasi untuk tiap tahunnya, maka Pemerintah Provinsi masih merasa optimistis bahwasanya nilai investasi yang ada di tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.13,897 trilyun dapat tercapai. Oleh karena itu, Pemerintah terus melakukan perbaikan baik dari sisi pelayanan khususnya regulasi maupun

penyediaan fasilitas yang dianggap memberikan kenyamanan dalam berinvestasi karena disisi lain ada beberapa daerah mengalami ketimpangan dalam hal daya tarik investasi dan Kota Makassar yang sekaligus menjadi ibukota provinsi masih menjadi magnet utama investasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya untuk Kabupaten/Kota agar terus meningkatkan promosi daerah dengan membuat inovasi-inovasi dalam menyebarkan potensi dan peluang investasi di daerahnya khususnya berkaitan dengan komoditas andalan seperti bidang usaha sektor perikanan, sektor tanaman pangan dan perkebunan, dan sektor peternakan yang menjadi andalan Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel III.7**  
**Realisasi Investasi PMA**  
**Berdasarkan Sektor/Bidang Usaha Tahun 2018**

No	Sektor Investasi	Jumlah Investasi (Dalam Rp. Juta)
1	Listrik, Gas dan Air	3,871,644
2	Pertambangan	1,429,804
3	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1,210,796
4	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1,043,554
5	Perdagangan dan Reparasi	267,501
6	Industri Makanan	195,937
7	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	85,417
8	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	79,301
9	Hotel dan Restoran	57,503
10	Jasa Lainnya	21,106
11	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik Presisi, Optik dan Jam	3,869
12	Kehutanan	1,828
13	Industri Kimia dan Farmasi	1,568
14	Konstruksi	423
15	Industri Kayu	67
16	Industri Mineral Non Logam	-
17	Industri Lainnya	-
18	Industri Tekstil	-
Total		8,270,319

Sumber : Renstra BPMD Provinsi Sulawesi Selatan, 2018-2023

**Tabel III.8**  
**Realisasi Investasi PMDN**  
**Berdasarkan Sektor/Bidang Usaha Tahun 2018**

No	Sektor Investasi	Jumlah Investasi (Dalam Rp. Juta)
1	Listrik, Gas dan Air	1,141,371
2	Industri Mineral Non Logam	1,056,242
3	Konstruksi	504,567
4	Industri Makanan	178,535
5	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	122,806
6	Perdagangan dan Reparasi	76,141
7	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	51,414
8	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	50,648
9	Hotel dan Restoran	39,927
10	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	20,108
11	Pertambangan	16,854
12	Jasa Lainnya	14,332
13	Industri Kertas dan Percetakan	2,918
14	Industri Kayu	13
15	Industri Karet dan Plastik	-



No	Sektor Investasi	Jumlah Investasi (Dalam Rp. Juta)
16	Industri Kimia Dan Farmasi	-
Total		3,275,876

Sumber : Renstra BPMD Provinsi Sulawesi Selatan, 2018-2023

**Tabel III.9**  
**Realisasi Investasi PMA**  
**Berdasarkan Negara Asal Tahun 2018**

No	Negara	Jumlah Investasi (Dalam Rp. Juta)
1	Singapura	1,716,833
2	British Virgin Islands	1,464,596
3	Kanada	1,361,345
4	Malaysia	1,172,545
5	R.R. Tiongkok	1,137,618
6	Hongkong	1,095,156
7	Jepang	72,097
8	Australia	63,576
9	Perancis	55,920
10	Cayman Islands	45,949
11	Inggris	24,694
12	Belgia	18,040
13	Korea Selatan	17,439
14	Luxembourg	10,666
15	Turki	7,858
16	Amerika Serikat	3,392
17	Bulgaria	1,773
18	Belanda	500
19	Spanyol	323
20	Kuwait	-
21	Jerman	-
<b>Total</b>		<b>8,270,319</b>

Sumber : Renstra BPMD Provinsi Sulawesi Selatan, 2018-2023

### 3.1.4 Sasaran dan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

#### 3.1.4.1 Sasaran Ekonomi Makro

Dengan memperhatikan *trend* perkembangan akhir kondisi ekonomi makro serta dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro Sulawesi Selatan pada tahun 2020 berdasarkan RPJMD 2018-2023 diprediksi sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

**Tabel III.10**  
**Sasaran Indikator Makro Ekonomi dan Sosial**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020**

No	Indikator	Tahun 2020
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)*	7,4 - 7,8
2	Tingkat Pengangguran (%)	4,97
3	Inflasi (%)	3,0 ± 1,0
4	PDRB Per Kapita (Rp. juta)	62,97
5	Tingkat Kemiskinan (%)	8,46
6	Indeks Pembangunan Manusia	72,18

Sumber : RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Berbagai kebijakan pemerintah diarahkan untuk memperbaiki prospek pembangunan ekonomi dan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini terlihat dari tinjauan terhadap perkembangan beberapa variabel ekonomi makro yang merupakan sasaran utama dari pembangunan ekonomi. Variabel tersebut berkenaan dengan aspek pendapatan dengan distribusinya, pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan yang berkeadilan, aspek ketenagakerjaan yang ditunjukkan dengan jumlah tingkat pengangguran penduduk, aspek

stabilitas harga ditunjukkan dengan fluktuasi dari tingkat harga umum yang mempengaruhi tingkat inflasi, aspek perdagangan terkait hubungan dengan negara lain yang ditunjukkan dengan kegiatan ekspor-impor. Ketiga hal tersebut dapat terealisasi jika didukung peran aktif dari seluruh lembaga ekonomi baik dari swasta, pemerintah maupun dari dunia perbankan serta lembaga ekonomi masyarakat di daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing secara efisien dan efektif didukung dengan Pemerintahan yang menerapkan prinsip *good governance*.

### 3.1.4.2 Arah Kebijakan Perekonomian

Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional merupakan bagian dari kerangka pikir arah kebijakan perekonomian dalam daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah, dan pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dilakukan secara efisien. Arah kebijakan ekonomi makro RKP 2020 diilustrasikan pada gambar berikut.



Sumber : Rancangan RKP Tahun 2020

Berdasarkan hasil analisis pada berbagai prospek dan tantangan ekonomi daerah, dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro RKP 2020, maka dirumuskan arah kebijakan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur
2. Peningkatan jangkauan, kualitas dan kemandirian jalan provinsi
3. Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana-prasarana, teknologi, dan micro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru
4. Penguatan pendidikan vocational dalam kerangka link and mach dengan dunia usaha dan industry
5. Peningkatan upaya eliminasi dan penghapusan segala bentuk kekerasan dan praktek-praktek yang membahayakan terhadap perempuan dan anak
6. Perbaikan pelayanan kesehatan sesuai SPM khususnya perbaikan pada 1.000 hari pertama kehidupan serta upaya preventif penanganan kesehatan
7. Akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan) secara ekologis
8. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim

## 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

### 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan Provinsi Sulsel hingga akhir tahun 2018 didominasi oleh pendapatan transfer khususnya dari Pemerintah pusat, terutama dalam bentuk DAK dan DAU. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp2,54 triliun disalurkan sebagian besar untuk bidang



pendidikan tingkat SMA, Dukungan Jaminan Kesehatan Nasional, Prioritas Daerah, serta kelautan dan perikanan. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp2,51 triliun atau sepenuhnya terealisasi baik di tahun 2018 maupun 2017. Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah merupakan komponen yang memiliki nilai dan persentase realisasi yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan retribusi mengalami penurunan khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan, dimana biaya yang dikeluarkan pemerintah jauh lebih tinggi dibandingkan retribusi yang masuk.

Sementara itu, persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga akhir tahun 2018 mencapai 99,31% dari pagu yang dianggarkan. Nilai dan persentase realisasi PAD lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2017. Peningkatan PAD tersebut dikarenakan terdapat beberapa strategi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mempermudah masyarakat membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor seperti Samsat Lorong, Samsat Mobile Banking, dan Samsat Sipakainge (layanan pemberian informasi pajak kendaraan kepada masyarakat).

Sedangkan persentase realisasi total belanja APBD Provinsi Sulsel pada tahun 2018 mencapai 96,4% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Realisasi belanja pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp9,32 triliun atau 96,4% dari anggaran Rp9,67 triliun, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp8,90 triliun atau 95,5% dari anggaran Rp9,32 triliun. Dengan persentase realisasi belanja yang lebih tinggi tersebut, maka APBD Provinsi Sulsel mengalami defisit Rp69,72 miliar atau lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2017 yang mencapai Rp5,16 miliar. Persentase realisasi belanja operasional lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya. Persentase realisasi belanja operasional pada tahun 2018 mencapai 95,4% (Rp6,85 triliun), dimana persentase nilai realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 96,2% (Rp6,31 triliun). Penurunan persentase realisasi belanja operasional tersebut terjadi pada hampir seluruh komponen kecuali komponen belanja bantuan keuangan. Penurunan belanja operasional tersebut disebabkan oleh pengurangan belanja hibah Pilkada yang tidak sepenuhnya dicairkan oleh KPU. Realisasi dan persentase belanja modal mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi belanja modal telah mencapai Rp1,08 triliun atau 95,5% dari anggaran sebesar Rp1,14 triliun, lebih tinggi dibandingkan pencapaian pada triwulan IV tahun 2017 sebesar Rp1,05 triliun (89,2%). Belanja modal yang terealisasi lebih tinggi antara lain belanja peralatan/mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan/irigasi/jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan aset lainnya masing-masing terealisasi sebesar Rp328,38 miliar (93,5%), Rp426,24 miliar (98,3%), Rp247,59 miliar (93,58%), Rp69,20 miliar (97,9%) dan Rp9,72 miliar (95,1%). Di sisi lain, belanja modal yang terealisasi lebih rendah antara lain belanja tanah dan belanja BLUD, dengan nilai realisasi masing-masing sebesar Rp399 juta (81,5%) dan Rp7,38 miliar (77,5%). Terus berlangsungnya pembangunan serta komitmen dari pemerintah daerah dalam mendorong infrastruktur terlihat pada realisasi belanja modal yang meningkat di Sulsel. Beberapa infrastruktur yang telah selesai dan masih akan berlanjut adalah perbaikan jalan, pembangunan kereta api trans Sulawesi tahap I (Makassar-Parepare), serta proyek dalam rangka mendorong pariwisata seperti Center Point of Indonesia (CPI).

Tabel III.11  
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2018

Uraian	Realisasi dan Target		Target APBD Pokok	Proyeksi
	2017	Target APBD-P 2018	2019	Tahun 2020
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>3.679.083.943.914</b>	<b>3,975,726,084,809.00</b>	<b>4.133.010.824.886</b>	<b>4.375.872.214.000</b>
- Pajak Daerah	3.241.746.521.190	3,462,102,500,000.00	3.680.655.797.020	3.843.460.587.000
- Retribusi Daerah	82.251.711.775	89,080,963,903.00	90.626.316.000	102.385.225.000
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	127.005.994.839	109,489,402,859.00	104.856.958.441	137.467.473.000
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	228.079.716.010	315,053,218,047.00	256.871.753.425	292.558.929.000
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>5.362.007.388.022</b>	<b>5,531,513,551,400.00</b>	<b>5.711.538.455.000</b>	<b>5.913.666.135.000</b>
- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	279.526.930.374	310,805,709,400.00	279.763.771.000	252.413.160.000
- Dana Alokasi Umum	2.509.480.255.000	2.509.480.255.000,00	2.586.312.342.000	2.686.143.998.000
- Dana Alokasi Khusus	2.565.500.202.648	2,695,227,587,000.00	2.816.520.494.000	2.954.041.272.000
- Dana Insentif Daerah	7.500.000.000	16,000,000,000.00	28.941.848.000	21.067.705.000
<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>14.187.575.578</b>	<b>32,610,352,120.00</b>	<b>54.050.790.000</b>	<b>24.585.667.000</b>
- Hibah	14.187.575.578	32,610,352,120.00	54.050.790.000	24.585.667.000
- Dana Penyesuaian	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>9.055.278.907.514</b>	<b>9,539,849,988,329.00</b>	<b>9.898.600.069.886</b>	<b>10.314.124.016.000</b>

Sumber : Bapenda dan RPJMD Prov. Sulsel 2018-2023

### 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah pada dasarnya tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang ditempuh sebagai berikut :

#### 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah tetap mengacu pada Kebijakan Umum Pendapatan daerah dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yaitu dengan upaya mengintensifkan pengelolaan pendapatan daerah pada yang sudah berjalan selama ini melalui kebijakan intensifikasi dan melakukan perluasan sumber-sumber pendapatan daerah baru melalui kebijakan ekstensifikasi, baik PAD maupun DBH pajak dan non pajak. Hal ini dijabarkan dalam Program Strategis Peningkatan Pendapatan Daerah Tahun 2020 sebagai berikut :

##### a. Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui :

1. Penyusunan petunjuk teknis peraturan daerah yang baru tentang retribusi daerah;
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama Lintas Pemerintah Daerah/Sektor/SKPD dalam rangka peningkatan PAD;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait dalam rangka peningkatan Dana Transfer;
4. Peningkatan Efektivitas Monitoring dan pengawasan Pengelolaan PAD;
5. Penegakan Sanksi;
6. Intensifikasi penagihan tunggakan pajak;
7. Pemutakhiran data base Objek dan Subjek Pajak;
8. Peningkatan Kualitas SDM pemungut PAD;
9. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah.

##### b. Peningkatan dan Pengembangan Akseibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui :

1. Pengembangan dan peningkatan efektivitas dan akseibilitas Kantor SAMSAT yang baru, Gerai Samsat, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Delivery order, Samsat Care, Kedai Samsat, dan SMS Jatuh Tempo pajak daerah;
2. Pengembangan sistem informasi pendapatan daerah;
3. Pengembangan E-Samsat melalui transaksi non tunai perbankan;
4. Peningkatan Standar Pelayanan Prima Perpajakan Daerah;
5. Peningkatan mutu jaringan dan content Website Badan Pendapatan Daerah

#### 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2020, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja tidak terduga. Sedangkan untuk Belanja Langsung diarahkan untuk setiap kegiatan dilakukan dengan analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output dan outcome yang dihasilkan. Dalam belanja kegiatan dilakukan pembagian yang proporsional antara belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut :

### 3.2.2.2.1 Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan Program dan kegiatan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

#### 1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

#### 2) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang sesuai Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### 3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus terlebih dahulu harus dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### 4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata cara penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### **5) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota**

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2020, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2019 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

#### **6) Belanja Bantuan Keuangan**

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2014.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Bantuan keuangan lainnya yaitu bantuan kepada partai politik yang dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

#### **7) Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga mengacu pada Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Dan Penanganan Gangguan Keamanan Serta Penghentian Konflik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau tanggap darurat bencana; bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya antara lain : Penanganan Gangguan Keamanan, Penghentian Konflik Sosial termasuk kegiatan untuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang yang meliputi : Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak.

#### 3.2.2.2.2 Belanja Langsung

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2020 difokuskan pada pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan ekonomi serta infrastruktur. Hal ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 yaitu **"Peningkatan Sumberdaya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas "**. Sejalan dengan tema nasional tersebut dan berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan serta memperhatikan 5 Program Nyata tersebut, maka prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penguatan infrastruktur wilayah
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
5. Pembangunan manusia
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
7. Pelestarian lingkungan hidup

Belanja daerah untuk Pembangunan Rumah Sakit Regional Provinsi Type Klas B yang berlokasi di Kantor Eks Bina Marga Kota Palopo dan Pembangunan Rumah Sakit Regional Type Klas C di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, diusulkan pelaksanaan pembangunannya secara Multi Years, dengan pertimbangan :

1. Rencana pembangunan Rumah Sakit yang dimaksud diatas termasuk bangunan kompleks sebagai mana diatur pada Peraturan Menteri PUPR sehingga diperlukan jasa konsultan Manajemen Konstruksi (MK).
2. Sesuai tugas dan fungsi dari jasa konsultan manajemen konstruksi melakukan kegiatan pengawasan sejak tahap perencanaan konstruksi sampai dengan pelaksanaan konstruksi sehingga pelaksanaan jasa perencanaan manajemen konstruksi tersebut melebihi 1 tahun anggaran.
3. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan fisik tidak memungkinkan sehingga rencana pelaksanaan pekerjaan fisik dialihkan ketahun 2020 s/d 2021 dengan kontrak tahun jamak (Multi Years).

Secara rinci realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun 2017-2020 dapat dilihat pada **tabel berikut ini** :



Tabel III.12  
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2017-2020

No	Uraian	Realisasi dan Target			Proyeksi 2020
		2017	Target APBD-P 2018	Target APBD Pokok 2019	
1.	<b>Belanja Tidak langsung</b>	<b>5.924.446.787.246</b>	<b>6,705,105,775,655.88</b>	<b>6.849.240.869.337,77</b>	<b>7.125.871.922.076,18</b>
1.1.	Belanja Pegawai	2.780.875.839.862	3,144,251,409,838.33	3.360.099.846.030,00	3.346.788.646.893,41
1.2.	Belanja Bunga	10.370.062.643	1,500,000,000.00	-	-
1.3.	Belanja Hibah	1.407.811.730.100	1,987,823,646,524.00	1.607.546.853.826,00	1.594.966.853.723,00
1.4.	Belanja Bantuan Sosial	597.750.000	600,000,000.00	1.100.000.000,00	1.150.000.000,00
1.5.	Belanja Bagi Hasil kepada Kab/Kota, Pemdes	1.536.772.252.432	1,346,921,669,014.55	1.387.644.828.681,77	1.716.117.080.659,77
1.6.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota dan Pemdes	187.987.387.209	220,209,050,279.00	477.849.340.800,00	446.849.340.800,00
1.7.	Belanja Tidak Terduga	31.765.000	3,800,000,000.00	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00
2.	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.976.633.603.610</b>	<b>2,961,430,278,547.13</b>	<b>3.049.359.200.548,23</b>	<b>3.288.252.093.924</b>
2.1.	Belanja Pegawai	201.237.823.908	13,899,406,380.00	15.926.175.569,00	16.722.484.347
2.2.	Belanja Barang Jasa	1.724.208.449.031	1,807,271,261,952.79	1.670.199.665.798,20	1.739.642.785.506
2.3.	Belanja Modal	1.051.187.330.671	1,140,259,610,214.34	1.363.233.359.181,03	1.531.886.824.070
	<b>Total Jumlah Belanja (1+2)</b>	<b>8.901.080.390.856</b>	<b>9,666,536,054,203.01</b>	<b>9.898.600.069.886,00</b>	<b>10.414.124.016.000,00</b>

Sumber RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, 2018-2023

### 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2014-2018 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang. Sesuai Pasal 22 dan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

#### **Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :**

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2020, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
2. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;

#### **Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :**

1. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada PT.Bank Sulselbar setiap tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
2. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Selengkapnya realisasi dan proyeksi pembiayaan tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.13  
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017– 2020

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	JUMLAH (Rp.)			
		Realisasi 2017	Target APBD-P 2018	Target APBD Pokok 2019	2020 (Proyeksi)
<b>1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>165.802.879.896,24</b>	<b>192,336,065,874.01</b>	<b>200.000.000.000,00</b>	<b>200.000.000.000,00</b>
1.1.	SiLPA	165.802.879.896,24	192,336,065,874.01	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
1.2.	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-
1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
1.7.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
1.8.	Penerimaan Pengembalian Investasi Perusda	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>136.000.000.000</b>	<b>65,650,000,000.00</b>	<b>200.000.000.000,00</b>	<b>100.000.000.000,00</b>
2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
2.2.	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	-	650,000,000.00	200.000.000.000,00	100.000.000.000,00
2.3.	Pembayaran Pokok Utang	136.000.000.000	65,000,000,000.00	-	-
2.4.	Pembayaran Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>29.802.879.896,24</b>	<b>126,686,065,874.01</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000.000,00</b>

Sumber : RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

## **BAB IV**

### **PRIORITAS DAN SASARAN**

### **PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020**

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2018, prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029, khususnya yang mengedepankan fokus pengembangan wilayah dan sektor unggulan di setiap kabupaten/kota. Rumusan tersebut merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Bab IV ini berisi prioritas dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Gubernur dan visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, capaian target pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

Substansi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2020 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan Rancangan RKP 2020.
2. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2020
3. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah dan Provinsi sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional maupun provinsi.
4. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2020. Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi

Organsasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 dan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RKP 2020.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah tersusun diterjemahkan dalam bentuk program unggulan dan prioritas daerah yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2020. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada dokumen ini merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang telah disusun. Selanjutnya tujuan merupakan suatu kondisi ideal yang ingin dicapai pada akhir periode dimana upaya pencapaiannya dilakukan dengan memenuhi sasaran yang telah ditentukan. Guna tercapainya sasaran pembangunan yang efektif dan efisien, harus didukung oleh strategi pembangunan yang ideal dan tepat sasaran. Ketiga hal tersebut nantinya akan menjadi acuan penyusunan program unggulan dan prioritas daerah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2020.

Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2018-2023. Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun ke-2 (dua) dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu tahapan “Akselerasi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia serta SDA yang berdaya saing bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan” dalam rangka mencapai visi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**“Sulawesi Selatan Yang  
Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”.**

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel IV.1  
Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023**

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, Dan Berkarakter	Inovatif	Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan men-ciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”
	Kompetitif	Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”
	Produktif	Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”.

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
	Inklusif	Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.
	Berkarakter	Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

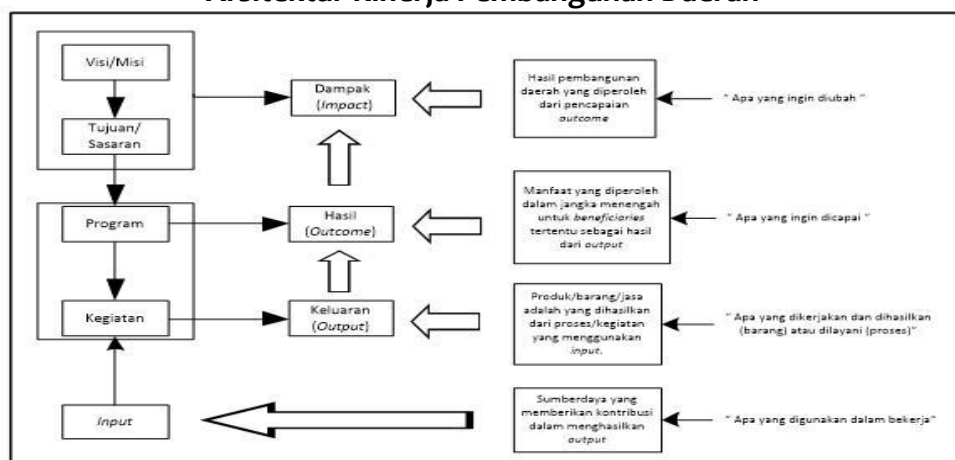
Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam yang Berkelanjutan

Berdasarkan Permendagri 86/2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 4.1.**  
**Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah**



Terkait RKPD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan



strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C.

**Tabel IV.2**  
**Tujuan, dan Sasaran RKPD Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2020
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	1 Indeks Reformasi Birokrasi	B
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	2 Nilai SAKIP	BB
	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	C
2	Meningkatkan infrastruktur wilayah	4 Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Pengadaan Air (%)	7.8
	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	5 Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	64
3	Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah	6 PDRB Perkapita (Juta Rp)	62,97
		7 Angka Kemiskinan (%)	8.46
	Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	8 PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan Bone) (Juta RP)	35,124,356.44
		9 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.97
	Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah	10 Indeks Gini	0.376
11 Indeks Williamson		0,570	
4	Meningkatkankualitas SDM secara inklusif	12 IPM	72,18
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	13 Indeks Pendidikan	66,10

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2020
7	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	14 IPG	93,40
		15 IDG	75,54
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	16 Indeks Kesehatan	77,17
5	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	17 Pertumbuhan PDRB (%)	7,4-7,8
	Meningkatnya produktifitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumber daya alam	18 Produktifitas Total Daerah (Rp/Angkatan Kerja)	81.942.489
	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	19 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,36
20 Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO <sub>2</sub> Eq)		1,4	

#### 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020

##### 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah.

Sesuai dengan arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 (Tahap IV) yaitu Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya **struktur perekonomian yang kokoh** berlandaskan **keunggulan kompetitif di berbagai wilayah** yang didukung oleh **SDM berkualitas** dan berdaya saing.

Adapun tema **Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020** yaitu: **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Dengan 5 (lima) prioritas nasional yaitu:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Dengan arah kebijakan makro pembangunan pemerintah tahun 2020, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia melalui arah kebijakan transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan dan penguatan permintaan domestik dan peningkatan kinerja perdagangan internasional.
2. Menjaga stabilitas makroekonomi, melalui arah kebijakan menjaga stabilitas harga, eksternal, dan stabilitas keuangan.

3. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan ekonomi, melalui arah kebijakan: mendorong pemertaan antar wilayah dan tingkat pendapatan, mendorong tingkat penurunan kemiskinan, memperluas akses dan kesempatan, mempertahankan keseimbangan lingkungan.

Prioritas pembangunan Nasional Tahun 2020 merupakan agenda pembangunan awal tahun RPJM periode 2020-2024. Berdasarkan kondisi umum dan amanat RPJP 2015-2025 maka prioritas pembangunan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.3**  
**Target Makro Pembangunan Nasional tahun 2020**

INDIKATOR		Tahun 2020
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,5
2.	Inflasi (%)	2,0 – 4,0
3.	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.000 – 14.400
4.	Indeks Pembangunan Manusia	72,5
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	4,8 – 5,1
6.	Tingkat Kemiskinan (persen)	8,5 – 9
7.	Gini Rasio (indeks)	0,375 – 0,380

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

**Prioritas Nasional 1:** Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
- c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
- d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
- e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- e. Pengentasan kemiskinan.
- f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

**Prioritas Nasional 2:** Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
- b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
- c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.

- d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
- f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
- b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
- c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
- e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

**Prioritas Nasional 3:** Nilai tambah sektor ril, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- b. Mempercepat transformasi struktural.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
- d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
- b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor ril.
- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
- d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

**Prioritas Nasional 4:** Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
- b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
- c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
- e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
- d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.

- e. Penguatan ketahanan bencana.

**Prioritas Nasional 5:** Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
- b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
- d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
- e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

#### 4.2.2 Dukungan Prioritas Pembangunan Nasional

Berikut ini dukungan prioritas daerah terhadap prioritas nasional:

Tabel IV.4  
Konsistensi Prioritas Nasional dan Daerah

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengentasan kemiskinan;	Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif				
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Indeks reformasi birokrasi	B		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai sakiP	A		
		Program pengembangan kompetensi sumber daya aparatur (prioritas)	Cakupan sdm aparatur yang lulus diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan diklat manajerial (prioritas) (%)	100	3,001,304,371	Badan pengembangan sumber daya manusia
		Program penilaian potensi dan kompetensi aparatur (prioritas)	Cakupan sdm yang ditempatkan sesuai kompetensinya (prioritas) (%)	75	2,655,000,000	Badan kepegawaian daerah



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program penataan dan penguatan kelembagaan (prioritas)	Cakupan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi dan kab/kota (prioritas) (%)	100	1,664,258,073	Biro organisasi dan tata laksana
		Program pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah (prioritas)	Opini lkpd dari bpk ri (prioritas) (% (opini wtp))	100	4,305,376,487	Inspektorat daerah
		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (prioritas)	%ketersediaan rpjpd, rpjmd, dan rkpdp yang ditetapkan (prioritas) (%)	100	12,098,959,455	Badan perencanaan pembangunan daerah
			% penjabaran konsistensi program rpjmd ke dalam rkpdp dan APBD (prioritas) (%)	100		
			% rata-rata capaian kinerja program rpjmd (prioritas) (%)	97.5		

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program pengembangan dan implementasi e-government (prioritas)	% penerapan e-government pada lingkup perangkat daerah (prioritas) (%)	70	9,623,858,368	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
		Program pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan (prioritas)	% perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah (prioritas) (%)	20	4,941,641,751	Badan penelitian dan pengembangan daerah
		<b>Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik</b>	<b>C</b>		
		Program pengembangan baruga layanan publik (prioritas)	% pemanfaatan baruga layanan masyarakat secara elektronik (prioritas) (%)	100	1,018,503,316	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program peningkatan partisipasi pendidikan menengah dan khusus (prioritas)	Angka partisipasi kasar (apk) (prioritas) ()	88.7	527,203,518,279	Dinas pendidikan
			Angka partisipasi murni (apm) (prioritas) ()	63.5		
			% jumlah warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (spm) (%)	75.25		
		Program pendidikan siswa kebutuhan khusus (prioritas)	% jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (spm) (%)	81	178,453,568	Dinas pendidikan
		Program pengembangan layanan kesehatan brigade siaga bencana (bsb) (prioritas)	% penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (spm) (%)	100	11,162,130,021	Dinas kesehatan

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			% penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (spm) (%)	100		
		Program pengembangan air minum curah lintas kabupaten/kota (prioritas)	% warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (spm) (%)	100	800,000,000	Dinas sumber daya air, cipta karya dan tata ruang
		Program penyediaan dan pengolahan air limbah domestik regional (prioritas)	% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (spm) (%)	100	800,000,000	Dinas sumber daya air, cipta karya dan tata ruang
		Program pengembangan dan pengelolaan irigasi dan jaringan pengairan lainnya (prioritas)	% tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (spm) (%)	71.46	265,608,022,473	Dinas sumber daya air, cipta karya dan tata ruang

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Jumlah tambahan luas lahan yang terlayani sistem pengairan irigasi (prioritas) (ha)	15014.3		
		Program bina konstruksi (prioritas)	% jasa konstruksi yang sesuai dengan standar (prioritas) (%)	85	4,014,588,000	Dinas bina marga dan bina konstruksi
		Program penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah daerah (prioritas)	% fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah (spm) (%)	100	1,100,000,000	Dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan
			% penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam (spm) (%)	100		
		Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (prioritas)	% korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	100	1,040,152,275	Dinas sosial

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			tanggap darurat bencana provinsi (prioritas) (%)			
			% penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (spm) (%)	100		
			% gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (prioritas) (%)	100		
		Program pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial anak (prioritas)	Cakupan anak dalam panti/lembaga kesejahteraan sosial yang dibina (jiwa)	425	4,534,655,049	Dinas sosial
			% anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (spm) (%)	100		



No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program pelayanan panti asuhan/panti jompo (prioritas)	% lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (spm) (%)	100	1,134,440,505	Dinas sosial
		Program layanan dan penegakan produk hukum daerah (prioritas)	% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara (spm) (%)	100	550,000,000	Satuan polisi pamong praja
		Program pembinaan mental dan spiritual (prioritas)	% penurunan penyalahgunaan narkoba (prioritas) (%)	1.55	1,000,078,478	Biro kesejahteraan
			% penurunan penduduk buta aksara alquran (prioritas) (%)	10		
			% penurunan kejahatan terhadap kesusilaan (prioritas) (%)	10		
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah;	Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel				

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Meningkatkan infrastruktur wilayah	Pertumbuhan pdrb sektor usaha transportasi dan pergudangan, konstruksi, pengadaan air (%)	65.37		
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	Indeks aksesibilitas infrastruktur	64		
		Program preservasi jalan (prioritas)	% tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang (mantap) (spm) (%)	62.61	283,652,045,943	Dinas bina marga dan bina konstruksi
		Program pengendalian jalan akses wilayah terisolir (prioritas)	Jumlah pembangunan akses wilayah terisolir yang dikendalikan (prioritas) (wilayah)	3	700,000,000	Dinas bina marga dan bina konstruksi
		Program penyelenggaraan kepelabuhanan dan angkutan pelayaran (prioritas)	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (prioritas) (orang)	1009	9,598,098,035	Dinas perhubungan
		Program penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan (prioritas)	Cakupan prasarana llaj dalam kondisi baik (prioritas) (%)	24	3,337,212,011	Dinas perhubungan

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program penanggulangan daerah-daerah potensi banjir (prioritas)	Jumlah daerah potensi banjir yang tertangani (prioritas) (kawasan)	8	350,000,000	Dinas sumber daya air, cipta karya dan tata ruang
		Program penyediaan listrik dan ketahanan energi (prioritas)	% desa berlistrik (prioritas) (%)	98.5	7,965,551,012	Dinas energi dan sumber daya mineral
3	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;	Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif				
		Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah	Pdrb perkapita (juta rp)	55-65		
			Angka kemiskinan (%)	8.46		
			Tingkat pengangguran terbuka (%)	4.97		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	Pdrb kawasan (luwu utara, selayar dan bone) (juta Rp)	25,124,356.44		
		Program pengembangan pusat pertumbuhan baru (prioritas)	Jumlah kawasan yang difasilitasi perencanaan dan pengembangannya (prioritas) (kawasan)	3	690,872,388	Badan perencanaan pembangunan daerah
		Prgram peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan internasional (prioritas)	Jumlah kerjasama antara pemerintah dan lembaga dunia usaha (prioritas) (mou)	2	2,608,637,889	Dinas perdagangan
		Program peningkatan dan pengembangan ekspor (prioritas)	Nilai ekspor bersih perdagangan (prioritas) (juta \$ us)	135809784	6,158,248,497	Dinas perdagangan
		Program pengembangan sentra-sentra industri (prioritas)	% peningkatan produksi industri potensial (prioritas) (%)	10	7,350,000,000	Dinas perindustrian
		Program perluasan dan pengembangan tenaga kerja (prioritas)	Rasio daya serap tenaga kerja (prioritas) (%)	58.47	1,720,500,000	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Menurunnya kesenjangan antar lapisan dan antar wilayah	Indeks williamson	0.570		
			Indeks gini	0.376		
		Program pengembangan dan pembinaan kelompok ukm bagi masyarakat miskin (prioritas)	% pertumbuhan ukm bagi masyarakat sangat miskin dan miskin (prioritas) (%)	20	9,917,900,000	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah
		Program pengembangan dan penataan fasilitas umum (prioritas)	Jumlah fasilitas rest area yang terbangun (prioritas) (lokasi)	2	66,076,249,998	Dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan
		Program pengembangan pemasaran pariwisata (prioritas)	Peningkatan jumlah produk usaha ekonomi kreatif (prioritas) (jenis)	2	4,368,526,750	Dinas kebudayaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Jumlah pengguna rest area sebagai spot wisata alternatif (prioritas) (orang)	1000		dan kepariwisataan
		Program penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin dan mbr (prioritas)	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (spm) (%)	1.75	3,100,000,000	Dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan
			Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (spm) (%)	5		
		Program pengembangan destinasi pariwisata halal (prioritas)	Jumlah kab/kota yang memiliki kawasan wisata halal (prioritas) (kab/kota)	2	260,916,000	Dinas kebudayaan dan kepariwisataan
		Program pengembangan usaha dan promosi produk umkm (prioritas)	Cakupan promosi produk umkm pada rest area (prioritas) (produk)	10	900,000,000	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah



No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program penataan permukiman (prioritas)	% kawasan kumuh yang tertata (prioritas) (%)	49	3,800,000,000	Dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan
		Program upaya kesehatan dan standarisasi pelayanan kesehatan (prioritas)	Jumlah klinik rest area yang berfungsi (prioritas) (klinik)	2	2,168,000,000	Dinas kesehatan
		Program bantuan pendidikan sma/smk/slb bagi siswa miskin (prioritas)	Cakupan siswa sma/smk/slb miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan (prioritas) (%)	54.93	110,000,000	Dinas pendidikan

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program penyediaan air bersih (prioritas)	Jumlah rt pesisir dan kepulauan yang berakses air bersih (prioritas) (rt)	1750	11,523,750,000	Dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan
4	<b>Pembangunan manusia</b>	<b>Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter</b>				
		<b>Meningkatkan kualitas sdm secara inklusif</b>	<b>lpm</b>	<b>72.19</b>		
		<b>Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat</b>	<b>Indeks pendidikan</b>	<b>66.10</b>		
		Program peningkatan kualitas pendidikan menengah (prioritas)	% tamatan sma/smk/slb yang lulus perguruan tinggi negeri yang bereputasi (prioritas) (%)	46.85	878,257,168	Dinas pendidikan
		Program peningkatan kualitas pendidikan vokasional (prioritas)	% tamatan smk yang bekerja 3 bulan setelah tamat (prioritas) (%)	45.6	522,581,804	Dinas pendidikan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program pendidikan karakter dan sekolah sehat (prioritas)	% sma/smk yang bebas narkoba (prioritas) (%)	91	3,115,016,030	Dinas pendidikan
		Program pengembangan dan kepeloporan pemuda (prioritas)	Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri dan berdaya saing (prioritas) (pemuda)	950	2,159,000,301	Dinas kepemudaan dan olahraga
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	lpg	93.40		
			ldg	75.54		
		Program perlindungan perempuan dan anak (prioritas)	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak (prioritas) (%)	31	928,360,000	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program peningkatan peran perempuan perdesaan (prioritas)	Jumlah kelompok binaan pkk (prioritas) (kelompok binaan pkk)	1	2,179,378,603	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
		<b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>	<b>Indeks kesehatan</b>	<b>77.17</b>		
		Program pembangunan rumah sakit regional (prioritas)	Jumlah rs regional yang terbangun dan ditingkatkan (prioritas) (unit)	4	123,778,800,05 4	Dinas kesehatan
		Program pengembangan spesialisasi dan kualitas layanan rumah sakit (prioritas)	Jumlah rs provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi. (prioritas) (unit)	6	631,138,208	Dinas kesehatan
		Program pelayanan 1000 hari pertama kehidupan (hpk) (prioritas)	% ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan (hpk) (prioritas) (%)	11.5	5,492,101,020	Dinas kesehatan

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			% anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan (hpk) (prioritas) (%)	6		
		Program promosi kesehatan, bina gizi dan kesehatan ibu dan anak (prioritas)	Prevalensi balita stunting (prioritas) (%)	31	2,560,616,000	Dinas kesehatan
5	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan				
		Pengelolaan sumber daya alam yang berdaya saing sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Pertumbuhan pdrb (%)	7.4 - 7.8		
		Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam	Produktivitas total daerah (rp / angkatan kerja)	81,942,489		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program hilirisasi pertanian (prioritas)	Nilai hilirisasi produksi pertanian (prioritas) (rp)	45423790969 3	92,950,000,000	Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura
		Program hilirisasi perkebunan (prioritas)	Nilai hilirisasi produksi perkebunan (prioritas) (rp)	5000000000	910,000,000	Dinas perkebunan
		Program hilirisasi peternakan (prioritas)	Nilai hilirisasi produksi peternakan (prioritas) (rp)	21964750000	35,405,887,584	Dinas peternakan dan kesehatan hewan
		Program hilirisasi perikanan (prioritas)	Nilai hilirisasi produksi perikanan (prioritas) (rp)	19793772994 810	43,608,000,000	Dinas kelautan dan perikanan
		Program hilirisasi pertambangan (prioritas)	Nilai hilirisasi produksi pertambangan (prioritas) (rp)	15203925000 000	1,227,776,582	Dinas energi dan sumber daya mineral



No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program eksplorasi sumber daya geologi, konservasi dan pemanfaatan air tanah (prioritas)	Luas wilayah pemetaan (prioritas) (ha)	8500	4,880,036,064	Dinas energi dan sumber daya mineral
			Jumlah cadangan sumber daya (prioritas) (ton)	4000000		
		Program peningkatan produksi dan produktivitas ternak (prioritas)	Jumlah populasi ternak sapi perah (prioritas) (ekor)	1416	19,478,200,000	Dinas peternakan dan kesehatan hewan
			Jumlah populasi ternak kuda (prioritas) (ekor)	185948		
			Jumlah populasi ternak kerbau (prioritas) (ekor)	115598		
			Jumlah produksi telur (prioritas) (kg)	170724195		
			Jumlah produksi daging (prioritas) (kg)	139478730		
			Jumlah produksi susu (prioritas) (kg)	3370049		

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Indeks kualitas lingkungan hidup (iklh)	73.36		
			Potensi penurunan emisi grk (juta ton co2eq)	1.4		
		Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (prioritas)	Indeks kualitas udara (prioritas) ()	88.71	913,628,104	Dinas pengelolaan lingkungan hidup
			Indeks kualitas air (prioritas) ()	77.67		
		Program rehabilitasi hutan dan lahan (prioritas)	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas) (ha)	1000	14,967,300,000	Dinas kehutanan
			Indeks kualitas tutupan lahan (prioritas) ()	58.62		
		Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai,	Panjang sungai/danau/waduk yang dipelihara (prioritas) (meter)	17500	21,211,246,095	Dinas sumber daya air, cipta

No.	Prioritas pembangunan nasional	Tujuan/ sasaran/ program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat daerah penanggung jawab
				Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		danau dan sumber daya air lainnya (prioritas)	Cakupan data potensi sumber daya air yang tersedia daya potensinya (prioritas) (%)	85		karya dan tata ruang
		Program penataan hutan dan pemanfaatan hutan (prioritas)	% luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya (prioritas) (%)	64.67	4,205,000,000	Dinas kehutanan

Tabel IV.5  
Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional RKP 2020	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Ket
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan	- Pembangunan SDM meliputi: sektor pendidikan, kesehatan, Kualitas ASN, - Penurunan Angka Kemiskinan
2	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah	Peningkatan kualitas infrastruktur Darat, laut, udara, dan pembukaan daerah terisolir,
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Akselerasi hilirisasi produk berbasis sumber daya alam, peningkatan Pusat Pertumbuhan baru, dan pengembangan destinasi pariwisata	- Hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumber daya alam - Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan baru - Pembukaan lapangan kerja baru - Pengembangan destinasi pariwisata
4	Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Peningkatan Ketahanan pangan, Sumber daya air, dan pelestarian Lingkungan Hidup	- Peningkatan Ketahanan pangan, - Sumber daya air, - Pelestarian Lingkungan Hidup - Pemenuhan universal acces (100-0-100)/airminum, Kawasan Kumuh, dan sanitasi. - Pemenuhan irigasi pertanian - Penyediaan listrik pada daerah perpendicil
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Peningkatan ketertiban dan keamanan, Reformasi birokrasi, dan Inovasi Pelayanan Publik	- Peningkatan ketertiban dan nyaman masyarakat - Reformasi birokrasi - Pemantapan pelayan satu pintu (mal pelayanan)

#### 4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu strategis yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJMD tahun berjalan, berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP), serta memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009- 2029.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu strategis yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJMD tahun berjalan, berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP), serta memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009- 2029.

Untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah, maka tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Memperhatikan arahan tersebut, maka tema pembangunan daerah tahun 2020 yaitu.

***“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Sulawesi Selatan Yang Inklusif”***

Pembangunan Daerah berkualitas dimaksudkan sebagai pembangunan daerah multidimensional yang memberikan hasil maksimal dan proporsional dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan kapasitas bagi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya di daerah serta menciptakan kesejahteraan dengan tidak menimbulkan bias bagi kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan daerah dimasa depan. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2020 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2020, meliputi:

1. Peningkatan kualitas SDM dan Penurunan angka kemiskinan
2. Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah
3. Akselerasi hilirisasi produk berbasis sumber daya alam, peningkatan Pusat Pertumbuhan baru dan Pengembangan destinasi wisata.
4. Peningkatan ketahanan pangan, sumber daya air, dan pelestarian lingkungan hidup.
5. Peningkatan ketertiban dan keamanan, Reformasi birokrasi dan Inovasi pelayanan publik.

Berdasarkan permasalahan pembangunan, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Keterangan
1	Peningkatan kualitas SDM dan Penurunan angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pembangunan SDM meliputi sektor : Pendidikan, Kesehatan, dan Kualitas ASN</li><li>▪ Penurunan angka kemiskinan</li></ul>
2	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah	Penguatan kualitas infrastruktur Darat, Laut, Udara dan Pembukaan daerah terisolir

No	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Keterangan
3	Akselerasi hilirisasi produk berbasis sumber daya alam, peningkatan Pusat Pertumbuhan baru dan Pengembangan destinasi wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumber daya alam</li> <li>• Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan baru</li> <li>• Pembukaan lapangan kerja baru</li> <li>• Pengembangan destinasi pariwisata</li> </ul>
4	Peningkatan ketahanan pangan, sumber daya air, dan pelestarian lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketahanan pangan</li> <li>• Sumber daya air</li> <li>• Pelestarian lingkungan hidup</li> <li>• Pemenuhan Universal Acces (100-0-100) / air minum, kawasan kumuh dan sanitasi.</li> <li>• Pemenuhan irigasi pertanian</li> <li>• Penyediaan listrik pada daerah terpencil</li> </ul>
5	Peningkatan ketertiban dan keamanan, Reformasi birokrasi dan Inovasi pelayanan public	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat</li> <li>• Reformasi birokrasi</li> <li>• Pemantapan pelayanan satu pintu ( Mall pelayanan )</li> </ul>

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2020 yang meliputi antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,40 – 7,80%;
2. Inflasi sebesar 4,5 – 2,5%;
3. PDRB/Kapita sebesar Rp. 62,97 juta;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,97 %;
5. Kemiskinan sebesar 8,46 %;
6. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,18 ; dan
7. Gini Rasio sebesar 0,376

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai berikut:

#### 4.2.3.1 Peningkatan kualitas SDM dan Penurunan angka kemiskinan

##### A. Peningkatan kualitas SDM

Sumber daya manusia merupakan inti dari pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subyek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu untuk meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan. Pada akhir tahun 2015, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai dilaksanakan sebagai bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dengan meningkatnya daya saing manusia antarnegara di dalam pelaksanaan MEA menyebabkan persaingan akan kualitas, dan kompetensi sangat di butuhkan bagi SDM Indonesia. Terkait dengan hal itu, daya saing sumber daya manusia memiliki



hubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan berperan di berbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Demikian juga dengan kondisi kemampuan pemuda dalam daya saing perekonomian, pada tahun 2017 persentase wirausaha muda mengalami penurunan menjadi 10,89% dari 21,78% pada tahun 2014.

**Tabel IV.6**  
**Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia**  
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, 2013-2017**

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sulawesi Selatan	67,92	68,49	69,15	69,76	70,34	70,90
Nasional	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

IPM Provinsi Sulawesi Selatan masih di bawah IPM nasional, dan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah agar merumuskan berbagai program prioritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kebijakan strategis yang mendukung tercapainya daya saing masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Menerjemahkan dari bahasan di atas, permasalahan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan bahwa sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan menyebabkan rendahnya daya saing sumber daya manusia tersebut.

Pembangunan SDM meliputi sector Pendidikan, Kesehatan, dan Kualitas ASN, melalui strategi berikut:

1. Mengefektifkan link and match antara proses pendidikan vokasional dengan perkembangan dunia usaha dan industri serta meningkatkan kualitas belajar-mengajar pada pendidikan menengah dalam meningkatkan kelulusan pada pendidikan tinggi bereputasi.

Perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui vokasi merupakan salah satu variable yang bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas manusia pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Sulawesi Selatan akan diarahkan pada kebutuhan dunia usaha, khususnya pada sector jasa dan industry yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan dapat menggerakkan PDRB Sulawesi Selatan melalui strategi antara lain:

- a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kewirausahaan berupa penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal untuk mengoptimalkan penyerapan lulusan SMK pada dunia usaha dan industry;
  - b) Perluasan dan peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas serta penguatan kompetensi keahlian di bidang aplikatif untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja;
  - c) Penyediaan pendidikan khusus melalui pengembangan model pembelajaran mandiri dengan system mobile schooling;
  - d) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional sekolah
  - e) Peningkatan akses pemerataan pendidikan
2. Meningkatkan keterpenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana parasarana olahraga serta peningkatan

- prestasi keolahragaan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta organisasi olah raga;
3. Peningkatan upaya promotif dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan.
  4. Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat, belum optimalnya pemenuhan tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan, khususnya pada RS di Kabupaten/Kota, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Memperhatikan gambaran tersebut, maka penanganan pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan akan dilakukan melalui strategi:
    - a) Penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional dan ambulance siaga;
    - b) Pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan, khususnya pada daerah terisolir dan pulau-pulau kecil;
    - c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada ibu, anak, remaja dan lansia;
    - d) Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani melalui pengembangan dan pembinaan olahraga.
  5. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang responsive. Salah satu program nyata adalah Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani. Program nyata tersebut menekankan bahwa aspek pelayanan menjadi hal utama dengan mengupayakan pencapaian nilai Indeks Reformasi yang saat ini bernilai CC menjadi A pada tahun 2023, dan mempertahankan opini laporan keuangan untuk tetap pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahun. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkan pencapaian nilai Indeks Reformasi dan mencapai opini WTP adalah:
    - a. Peningkatan kualitas aparatur
    - b. Penataan dan penguatan kelembagaan untuk memaksimalkan pencapaian visi dan misi pemerintah dan pemerintah daerah.
    - c. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan keuangan daerah.
    - d. Implementasi e-government
    - e. Pengembangan inovasi pemerintahan

#### **4.2.3.2 Penurunan Angka Kemiskinan**

##### **A. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional**

Dewasa ini, upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama, yaitu: (i) perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; (ii) peningkatan akses pelayanan dasar; (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (iv) pembangunan yang inklusif.

Mengacu kepada keempat prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi, yaitu: (i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (iii) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan (iv) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi tersebut dijalankan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia

usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menurut basis sasaran (penerima program) dan tujuannya, menjadi:

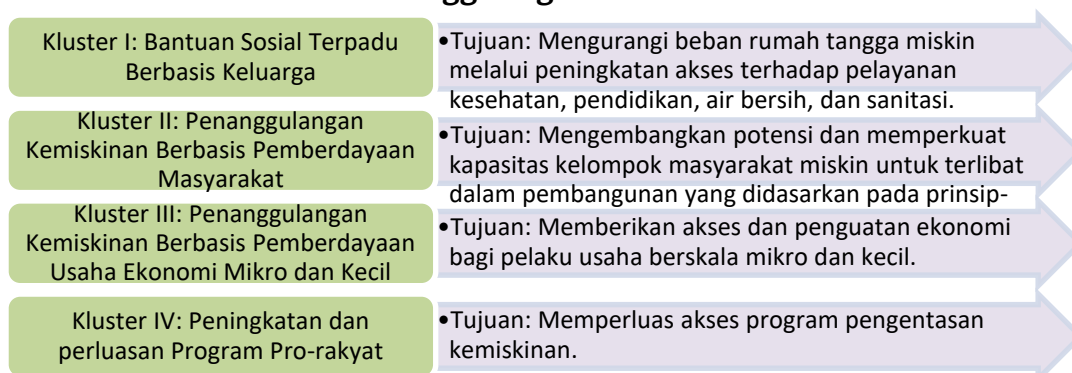
1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Tujuannya adalah memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Tujuannya adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
4. Program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Prinsip utama, strategi dan pengelompokan program penanggulangan kemiskinan di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan pada dasarnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan. Upaya ini tidak hanya melibatkan pihak pemerintah (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah), tetapi juga pihak non-pemerintah (organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan lembaga internasional). Oleh sebab itu, efektivitas penanggulangan kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan tersebut dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program di dalamnya.

Salah satu upaya serius pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia adalah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyusunan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, serta melakukan penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan. Salah satu output dari Peraturan Presiden ini adalah pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada level nasional dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pada tingkat daerah.

**Gambar 4.2**

**Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia**



Sumber: TNP2K

Adapun pemerintah Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten telah mengimplementasikan sejumlah program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Secara garis besar, program penanggulangan kemiskinan, diklasifikasi menjadi tiga kelompok program, yaitu: (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; (2) Program berbasis pemberdayaan masyarakat; dan (3) Program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan, pemerintah daerah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 yang merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

TKPK mempunyai dua tugas utama, yaitu: (1) melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan (2) mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi. Untuk melaksanakan tugas pertama, TKPK Provinsi menyelenggarakan fungsi, yaitu: (i) pengoordinasian penyusunan SPKD Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan; (ii) pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD; (iii) pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD; (iv) pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan (v) pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas kedua, TKPK Provinsi menyelenggarakan fungsi, yaitu: (i) pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; (ii) pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi; (iii) penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik; (iv) pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan; (v) pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan (vi) penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Untuk mempercepat penurunan kemiskinan maka beberapa hal yang dilakukan yaitu:

- a) Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal.
- b) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.
- c) Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain (i) beasiswa pendidikan bagi yang kurang mampu (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit.

- d) peningkatan pemberdayaan dan pemenuhan hak dasar orang miskin dan peningkatan kesempatan kerja, serta pemberdayaan ekonomi dan kredit usaha bagi PMKS

#### 4.2.3.3 Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah

Dampak positif dari pembangunan infrastruktur antara lain adalah akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendapatan daerah tersebut. Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk/masyarakat suatu kota atau wilayah, sehingga semakin bertambahnya penduduk pada kota/wilayah tersebut maka kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur juga akan meningkat. Infrastruktur merupakan pendukung utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Suatu infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.



Gambar 7. Hubungan antara Lingkungan, Infrastruktur, Ekonomi dan Sistem Sosial

Sumber: Grigg, 1998

Bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, selain mempunyai dampak positif, ternyata pembangunan infrastruktur juga mempunyai dampak negatif. Pembangunan infrastruktur juga berdampak negatif bagi kelestarian alam, diantaranya dengan berkurangnya sumberdaya alam akibat eksploitasi berlebihan, pencemaran udara akibat polusi industri dan pembangunan infrastruktur perekonomian yang identik dengan perusakan alam. Sehingga hal tersebut menimbulkan suatu pernyataan bahwa pembangunan infrastruktur selalu identik dengan perusakan alam.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan keberlangsungan alam dan lingkungan, akan membawa dampak negatif tidak hanya bagi alam tetapi juga bagi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah berkurangnya sumberdaya alam, pencemaran udara akibat polusi industri dan pembangunan infrastruktur yang identik dengan perusakan alam. Namun, hal tersebut dapat dicegah dengan menerapkan program pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan

Konsep Pembangunan Berkelanjutan muncul pada Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*UN Conference on the Human Environment*) pada tahun 1972 yang dikenal pula dengan nama The Stockholm Conference. Dan konsep ini selanjutnya didukung oleh Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*UN Conference on Environment and Development*) di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang menyatukan para kepala negara dan pejabat pemerintah dari seluruh dunia bersama dengan utusan badan-badan PBB, Organisasi Internasional dan utusan lainnya dari berbagai organisasi non pemerintah. Konferensi yang dihadiri oleh 179 negara tersebut secara jelas menyatakan bahwa pembangunan nasional suatu negara tidak lagi bisa memisahkan antara pengelolaan lingkungan dengan pembangunan sosial ekonomi



sebagai bidang-bidang yang terpisah. Pada tahun 1997 juga, Indonesia telah menyusun Agenda 21 – Indonesia yang merupakan strategi nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan dari Agenda 21- Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka integrasi pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan syarat yang harus dianut oleh semua sektor pembangunan terkait. Pelaksanaan pembangunan untuk menghindari terjadinya bencana yang terkait dengan perubahan iklim melalui program mitigasi dan adaptasi untuk masa depan Sulawesi selatan yang lebih sejahtera, aman, nyaman dan berkelanjutan.

#### 4.3. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Gambar 8. Hubungan Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah mencapai pembangunan berkelanjutan; Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjamin harmoni antara manusia dengan lingkungan hidup, termasuk makhluk hidup didalamnya. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan nomenklatur undang-undang tersebut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum.

Rumusan pembangunan ekonomi secara prinsip memuat 3 (tiga) jalur strategi, yakni : peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*pro growth*) dengan cara mengutamakan ekspor dan investasi; peningkatan penciptaan lapangan kerja (*pro job*) dengan menggerakkan sektor riil dan pengentasan kemiskinan (*pro poor*) melalui revitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi perdesaan.

Dengan demikian disusunlah arah kebijakan pembangunan infrastruktur sebagai berikut :

1. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur;
2. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera; pengembangan perdesaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan



- masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar maupun pembangunan sarana dan prasarana desa;
3. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi;
  4. Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan yang difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis;
  5. Arah kebijakan penanggulangan bencana yang akan dicapai melalui strategi : internalisasi pengurangan risiko bencana; penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  6. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional; dan
  7. Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah



Sasaran pembangunan Sulawesi Selatan menargetkan pertumbuhan PDRB khususnya pada beberapa sector utama dan peningkatan *indeks aksesibilitas infrastruktur*. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai melalui upaya:

1. Membangun konektivitas antara pusat-pusat kegiatan dan antara pusat kegiatan dengan kawasan perdesaan melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan;
2. Mengoptimalkan peningkatan kualitas jalan Provinsi secara terintegrasi melalui berbagai sumber pembiayaan dan mengembangkan inovasi penggunaan skema KPBU dan/atau pembiayaan swasta.
3. Membuka akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota dan mengembangkan konektivitas antara daerah tersebut dengan pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; dan
4. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis sebagai pedoman untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

5. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Pembangunan dan Pengembangan industri perkapalan.

#### **4.3.1 Akselerasi hilirisasi produk berbasis sumber daya alam, peningkatan Pusat Pertumbuhan baru dan Pengembangan destinasi wisata.**

Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam dengan dukungan sarana-prasarana pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pendapatan masyarakat;

Berdasarkan analisis pertumbuhan, terlihat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan lima tahun terakhir tidak cukup inklusif. Artinya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tidak cukup efektif mengurangi angka kemiskinan, menurungkan ketimpangan, dan menyediakan lapangan kerja baru bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Sulawesi Selatan, maka perlu untuk mendorong Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di atas pertumbuhan ekonomi. Dinamika sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tampaknya berasosiasi dengan dinamika kemiskinan di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk miskin di Sulawesi Selatan bermukim di wilayah perdesaan yang bercorak pertanian. Oleh karena itu dibutuhkan hilirisasi industri komoditas unggulan, terutama komoditas Rumput Laut, Kakao, dan Jagung. Hilirisasi ini diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) dan memperluas lapangan kerja baru sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, potensi pengembangan dan pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam di Kabupaten/Kota dengan sebaran sebagai berikut :

1. Kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung di masing-masing Kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang , Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur, Pangkep, Maros, Gowa dan Takalar;
2. Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak di masing-masing Kabupaten: Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kepulauan Selayar;
3. Kawasan pengembangan budidaya rumput laut meliputi wilayah perairan pantai dan atau tambak di masing-masing Kabupaten: Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Palopo, Luwu utara, dan Luwu Timur;
4. Kawasan pengembangan budidaya udang meliputi tambak di Kabupaten: Pinrang, Barru, Pangkep, Bone, dan Wajo;

Hilirisasi pegelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam merupakan penjabaran salah satu program nyata melalui penekanan pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja.

Pemerintah melalui kebijakan percepatan peningkatan populasi sapi yang diharapkan akan meningkatkan produksi daging local guna mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Asia pada Tahun 2045. Sebagai upaya mewujudkan Indonesia

yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan, maka Pemerintah menetapkan Sulawesi Selatan sebagai daerah sentra peternakan dengan system pemeliharaan semi intensif sekaligus sebagai Lumbung Ternak Nasional.

Peningkatan produksi perikanan sebagai sumber daya kelautan dan jasa maritim merupakan upaya yang dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah, khususnya Sulawesi Selatan. Salah satu komoditas perikanan yang volume ekspornya bertumbuh positif adalah ikan kerapu, namun memperhatikan rendahnya produksi kerapu di Sulawesi Selatan yang sangat dipengaruhi oleh skema produksi yang dilakukan nelayan maka sangat dibutuhkan upaya peningkatan manajemen budidaya dan penangkapan ikan kerapu dengan melakukan edukasi dan pelatihan terhadap kelompok nelayan guna meningkatkan jumlah produksi dan nilai kerapu tanpa merusak ekosistem kerapu di lautan.

Komoditas perkebunan yang paling dominan di wilayah Sulawesi adalah kakao. Sulawesi merupakan produsen terbesar di Indonesia dengan memasok sekitar 67% produksi kakao nasional. Sulawesi Selatan merupakan salah satu pusat pengembangan kakao unggul di Indonesia yang saat ini telah didukung oleh ketersediaan pusat penelitian dan pengembangan kakao yang akan berperan dalam meningkatkan produktivitas petani dengan melakukan pembinaan terhadap petani untuk memproduksi kakao berkualitas tinggi, sehingga Sulawesi Selatan dapat menjadi sentra benih kakao di Indonesia.

Selain kebijakan terkait komoditas perkebunan/pertanian, kebijakan lain adalah pengembangan destinasi wisata berkualitas yang didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata pada kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) maupun kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD), khususnya pada Kawasan Toraja yang memegang peran sebagai KSPN sekaligus serta pembangunan potensi wisata baru berbasis Rest Area yang berbasis pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat.;

#### **4.3.2 Peningkatan ketahanan pangan, sumber daya air, dan pelestarian lingkungan hidup.**

Pengembangan kawasan budidaya dengan mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Provinsi, sebagai daerah pendukung lahan pangan berkelanjutan, membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana alam untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana, menumbuh-kembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agroedukasi, agrowisata, melalui:

1. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas;
2. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas sumber daya air;
3. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta ,mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim;
4. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana

Mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan dalam menyelaraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon.

Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang

difokuskan pada pelaksanaan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan hukum dan tata kelola dan pilar pembangunan lingkungan secara terintegrasi.

Pilar pembangunan lingkungan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meliputi 6 (enam) tujuan pembangunan yaitu: Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua, Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan, Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Tujuan 13 Mengatasi Perubahan Iklim, Tujuan 14 Sumber Daya Maritim Berkelanjutan, dan Tujuan 15 Pengelolaan Ekosistem Terrestrial Berkelanjutan.

KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 menghasilkan skenario terkait integrasi pilar pembangunan lingkungan hidup dalam pembangunan Sulawesi Selatan yang merujuk pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan meliputi:

- a) Permukiman dengan akses layanan sanitasi yang kurang memadai akan berdampak pada kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat yang membutuhkan upaya tambahan guna mencapai sasaran pemenuhan pelayanan dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi layak;
- b) Mengembangkan kawasan perkotaan sebagai kawasan yang aman dan nyaman dihuni sesuai standar pelayanan perkotaan dengan meningkatkan pengelolaan sampah yang terpadu dan memperluas jangkauan transportasi umum serta mengoptimalkan kemampuan kawasan perkotaan untuk melakukan pencegahan, mitigasi dan penanggulangan bencana;
- c) Mengoptimalkan pengelolaan danau di Sulawesi Selatan, khususnya pada Danau Tempe dan Danau Matano yang ditetapkan menjadi danau prioritas Nasional sebagaimana yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan Pencanaan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan danau dengan melaksanakan penyelamatan danau dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu, mengintegrasikan penyelamatan danau prioritas ke dalam rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, melaksanakan kerja sama dengan para pihak untuk mewujudkan danau yang sehat dan lestari, serta mendukung penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan penyelamatan danau prioritas di Sulawesi Selatan;
- d) Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan melalui pembagian wilayah kelola Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merata yang belum didukung oleh hubungan koordinasi yang didukung oleh pembagian tugas yang jelas dan pendanaan yang cukup;
- e) Mengoptimalkan penurunan emisi gas rumah kaca melalui identifikasi sektor penyumbang emisi gas rumah kaca tinggi, dan membangun basis data terpadu sektor penyumbang emisi gas rumah kaca serta mengintegrasikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca kedalam rencana pembangunan kabupaten/kota dan rencana perangkat daerah;
- f) Mengoptimalkan peran dan fungsi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan guna menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan dan sumber daya hayati laut.



### 4.3.3 Peningkatan ketertiban dan keamanan, Reformasi birokrasi dan Inovasi pelayanan publik.

#### ***Peningkatan Ketertiban dan Kemanan***

Gangguan keamanan secara umum masih dalam tingkat terkendali, meskipun demikian terdapat perkembangan variasi kejahatan dan aktualisasi konflik horisontal serta peningkatan gangguan keamanan di dalam daerah yang meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Berbagai gangguan keamanan di wilayah Sulawesi Selatan tersebut yang belum dapat diimbangi dengan penuntasan penanganan oleh penegak hukum dapat melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan.

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa. Sebagian besar yaitu sekitar 90 persen dari 2 (dua) juta pecandu narkoba adalah generasi muda. Dampak dari masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba mencakup dimensi kesehatan baik jasmani dan mental, dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, dimensi sosial dengan meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban, serta dimensi kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma masyarakat secara keseluruhan.

Ketertiban dan kemanan dapat dicapai dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam rangka terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang akan ditempuh meliputi: 1. Intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan konvensional termasuk bentuk-bentuk baru kejahatan secara simultan dengan meningkatkan kapasitas institusi keamanan termasuk; 2. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan; 3. Melakukan upaya sinergis komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan narkoba; 4. Memberikan teladan praktek penegakan hukum non-diskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum dan membangun community policing; 5. Meningkatkan kinerja pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak hukum/ peraturan daerah.

#### ***Reformasi birokrasi dan Inovasi pelayanan public***

Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang responsive; Salah satu program nyata adalah Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani. Program nyata tersebut menekankan bahwa aspek pelayanan menjadi hal utama dengan mengupayakan pencapaian nilai Indeks Reformasi yang saat ini bernilai CC menjadi A pada tahun 2023, dan mempertahankan opini laporan keuangan untuk tetap pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahun.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkan pencapaian nilai Indeks Reformasi dan mencapai opini WTP adalah:

- a. Peningkatan kualitas aparatur
- b. Penataan dan penguatan kelembagaan untuk memaksimalkan pencapaian visi dan misi pemerintah dan pemerintah daerah.
- c. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan keuangan daerah.
- d. Implementasi e-government
- e. Pengembangan inovasi pemerintahan

Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar akan ditingkatkan dari nilai D menjadi A. Beberapa hal yang dibutuhkan guna meningkatkannya antara lain:

1. Pengembangan layanan berbasis elektronik
2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan
3. Pengembangan layanan kesehatan dan kesiagaan bencana
4. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar
5. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk urusan Wajib Pelayanan Dasar.

Adapun secara rinci program pembangunan prioritas tahun 2020 adalah sebagai mana tabel berikut:



Tabel IV.7  
Matriks Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020  
Tabel program prioritas tahun 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
1	Peningkatan kualitas sdm dan penurunan angka kemiskinan	Program peningkatan partisipasi pendidikan menengah dan khusus (prioritas)	Angka partisipasi kasar (apk) (prioritas)	88.7	527,203,518,279.0	Dinas pendidikan
			Angka partisipasi murni (apm) (prioritas)	63.5		
			% jumlah warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (spm)	75.25 %		
		Program peningkatan kualitas pendidikan vokasional (prioritas)	Jumlah peserta didik yang menerima pembiayaan gratis pendidikan life skill/kejuruan	150 orang	522,581,804.0	Dinas pendidikan
			% tamatan smk yang bekerja 3 bulan setelah tamat (prioritas)	45.6 %		
		Program pendidikan siswa kebutuhan khusus (prioritas)	% jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (spm)	81 %	178,453,568.0	Dinas pendidikan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
		Program pendidikan karakter dan sekolah sehat (prioritas)	% sekolah yang menerapkan budaya sehat dan faham radikalisme	51 %	3,115,016,030.0	Dinas pendidikan
			% sma/smk yang bebas narkoba (prioritas)	91 %		
			% sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	52.5 %		
		Program peningkatan kualitas pendidikan menengah (prioritas)	% tamatan sma/smk/slb yang lulus perguruan tinggi negeri yang bereputasi (prioritas)	46.85 %	878,257,168.0	Dinas pendidikan
		Program peningkatan dan pemerataan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	% guru sma yang memenuhi kualifikasi s1/d-iv	99.45 %	29,224,805,232.0	Dinas pendidikan
			% guru smk yang bersertifikat	42.75 %		
			% jumlah sekolah yang terpenuhi daftar kebutuhan guru per mata pelajaran dan standar tenaga kependidikan	1.14 %		
			% guru smk yang memenuhi kualifikasi s1/d-iv	98.18 %		
			% guru sma yang bersertifikat	53.85 %		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
		Program pengembangan layanan kesehatan brigade siaga bencana (bsb) (prioritas)	% penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (spm)	100 %	11,162,130,021.0	Dinas pendidikan
			% penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (spm)	100 %		
		Program pembangunan rumah sakit regional (prioritas)	Jumlah rs regional yang terbangun dan ditingkatkan (prioritas)	4 unit	123,778,800,054.0	Dinas kesehatan
		Program upaya kesehatan dan standarisasi pelayanan kesehatan (prioritas)	% puskesmas yang menyelenggarakan program kesehatan tradisional	35 %	2,168,000,000.0	Dinas kesehatan
			% rs yang terakreditasi nasional	75 %		
			% puskesmas terakreditasi	70 %		
			% puskesmas yang menyelenggarakan program pelayanan kesehatan penunjang	60 %		
			% rs kabupaten/kota yang telah menjadi blu	80 %		
			Jumlah klinik rest area yang berfungsi (prioritas)	2 klinik		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
		Program pelayanan 1000 hari pertama kehidupan (hpk) (prioritas)	% ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan (hpk) (prioritas)	11.5 %	5,492,101,020.0	Dinas kesehatan
			% anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan (hpk) (prioritas)	6 %		
		Program pengembangan spesialisasi dan kualitas layanan rumah sakit (prioritas)	Jumlah rs provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi. (prioritas)	6 unit	631,138,208.0	Dinas kesehatan
		Program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin	100 %	432,780,485.0	Dinas kesehatan
			Cakupan kepesertaan kemitraan asuransi kesehatan menuju universal coverage	100 %		
		Program pengembangan spesialisasi dan kualitas layanan rumah sakit (prioritas)	Jumlah rs provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi	1 rs	150,000,000.0	Rumah sakit umum daerah labuang baji
		Program penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin dan mbr (prioritas)	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (spm)	1.75 %	3,100,000,000.0	Dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan
			Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (spm)	5 %		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
		Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (prioritas)	% korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (prioritas)	100 %	1,040,152,275.0	Dinas sosial
			% penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (spm)	100 %		
			% gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (prioritas)	100 %		
		Program pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial anak (prioritas)	Cakupan anak dalam panti/lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	425 jiwa	4,534,655,049.0	Dinas sosial
			% anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (spm)	100 %		
		Program pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil (kat)	Jumlah fakir miskin dan komunitas adat terpencil (kat) yang mendapatkan pengembangan kemampuan dan potensi	800 jiwa	11,614,751,715.0	Dinas sosial

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
			% pmks yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (kub) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0.6 %		
			% pmks skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1 %		
		Program penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial	Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	246 lks	746,788,842.0	Dinas sosial
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Cakupan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mendapatkan pembinaan	100 jiwa	927,547,623.0	Dinas sosial
		Program pelayanan panti asuhan/panti jompo (prioritas)	Cakupan lansia yang memperoleh perawatan di panti jompo	75 jiwa	1,134,440,505.0	Dinas sosial
			% lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (spm)	100 %		



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
		Program perlindungan perempuan dan anak (prioritas)	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak (prioritas)	31 %	928,360,000.0	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga	% lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang terstandarisasi	25 %	652,684,000.0	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Program pengembangan dan pembinaan kelompok ukm bagi masyarakat miskin (prioritas)	% pertumbuhan ukm bagi masyarakat sangat miskin dan miskin (prioritas)	20 %	9,917,900,000.0	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah
2	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah	Program bina konstruksi (prioritas)	% jasa konstruksi yang sesuai dengan standar (prioritas)	85 %	4,014,588,000.0	Dinas bina marga dan bina konstruksi
		Program preservasi jalan (prioritas)	% tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang (mantap) (spm)	62.61 %	283,652,045,943.32	Dinas bina marga dan bina konstruksi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
		Program pengendalian jalan akses wilayah terisolir (prioritas)	Jumlah pembangunan akses wilayah terisolir yang dikendalikan (prioritas)	3 wilayah	700,000,000.0	Dinas bina marga dan bina konstruksi
		Program pembangunan jalan dan jembatan	% panjang ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dalam wilayah provinsi	93.28 %	233,062,686,432.68	Dinas bina marga dan bina konstruksi
		Program perencanaan teknik dan evaluasi	% kesesuaian perencanaan dengan penyelenggaraan jalan dan jembatan	100 %	42,375,273,602.0	Dinas bina marga dan bina konstruksi
		Program penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah daerah (prioritas)	% fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah (spm)	100 %	1,100,000,000.0	Dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan
			% penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam (spm)	100 %		
		Program penataan permukiman (prioritas)	% kawasan kumuh yang tertata (prioritas)	49 %	3,800,000,000.0	Dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan
			Cakupan pembinaan penanganan kawasan kumuh kabupaten/kota	24 kab/kota		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
			Luasan permukiman kumuh kewenangan provinsi	860 ha		
		Program penyediaan air bersih (prioritas)	Jumlah rt pesisir dan kepulauan yang berakses air bersih (prioritas)	1750 rt	11,523,750,000.0	Dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan
			Cakupan pembinaan penanganan air minum kab/kota	24 kab/kota		
		Program penyelenggaraan kepelabuhanan dan angkutan pelayaran (prioritas)	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (prioritas)	1009 orang	9,598,098,035.09	Dinas perhubungan
			Jumlah pelabuhan strategis provinsi	11 lokasi		
			Jumlah pelabuhan yang beroperasi	38 lokasi		
		Program penyelenggaraan angkutan jalan	% pengguna moda transportasi umum di perkotaan	40 %	3,648,250,415.0	Dinas perhubungan
			% layanan angkutan darat	52 %		
			Jumlah terminal bis terkelola	7 lokasi		
			Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	245000 orang		
		Program pemberdayaan pemuda dan pramuka	% organisasi pemuda yang aktif	9.81 %	1,090,002,301.59	Dinas kepemudaan dan olahraga
			Jumlah lembaga pramuka yang aktif	25 kwarda/kwarcab		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
		Program pengembangan air minum curah lintas kabupaten/kota (prioritas)	% warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (spm)	100 %	800,000,000.0	Dinas sumber daya air, cipta karya dan tata ruang
		Program penyediaan dan pengolahan air limbah domestik regional (prioritas)	% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (spm)	100 %	800,000,000.0	Dinas sumber daya air, cipta karya dan tata ruang
		Program pengembangan dan pengelolaan irigasi dan jaringan pengairan lainnya (prioritas)	% tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (spm)	71.46 %	265,608,022,473.0	Dinas sumber daya air, cipta karya dan tata ruang
			Jumlah tambahan luas lahan yang terlayani sistem pengairan irigasi (prioritas)	15014.3 ha		
		Program penanggulangan daerah-daerah potensi banjir (prioritas)	Jumlah daerah potensi banjir yang tertangani (prioritas)	8 kawasan	350,000,000.0	Dinas sumber daya air, cipta karya dan tata ruang
		Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya (prioritas)	Panjang sungai/danau/waduk yang dipelihara (prioritas)	17500 meter	21,211,246,095.0	Dinas sumber daya air, cipta karya dan tata ruang
			Cakupan data potensi sumber daya air yang tersedia daya potensinya (prioritas)	85 %		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
		Program penyelenggaraan penataan ruang	% ketaatan terhadap rtrw	70 %	1,660,060,834.50	Dinas sumber daya air, cipta karya dan tata ruang
		Program pengembangan dan penataan fasilitas umum (prioritas)	Jumlah fasilitas rest area yang terbangun (prioritas)	2 lokasi	66,076,249,998.19	Dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan
			Jumlah fasilitas pendukung kawasan pariwisata	0 lokasi		
3	Akselerasi hilirisasi produk berbasis sumber daya alam, peningkatan pusat pertumbuhan baru dan pengembangan destinasi wisata	Program hilirisasi pertanian (prioritas)	Nilai hilirisasi produksi pertanian (prioritas)	454237909693 rp	92,950,000,000.0	Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura
		Program pengembangan sentra-sentra industri (prioritas)	Jumlah sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukannya	2 sentra	7,350,000,000.0	Dinas perindustrian
			Jumlah kawasan pergudangan yang tertata	2 kawasan		
			% peningkatan produksi industri potensial (prioritas)	10 %		
Program penyehatan lingkungan permukiman	Cakupan pembinaan penanganan sanitasi kabupaten/kota	24 kab/kota	2,575,000,000.0	Dinas perumahan,		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
			% sekolah yang memiliki infrastruktur sanitasi layak	10 %		kawasan pemukiman, dan pertanahan
		Program perluasan dan pengembangan tenaga kerja (prioritas)	% pencari kerja yang ditempatkan	3.7 %	1,720,500,000.0	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
			Rasio daya serap tenaga kerja (prioritas)	58.47 %		
		Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	71.4 %	2,199,650,000.0	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75 %		
		Program pembinaan dan peningkatan pengawasan ketenagakerjaan	% keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	70.13 %	1,651,000,000.0	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
			Besaran pemeriksaan perusahaan	26.43 %		
			Besaran pengujian peralatan di perusahaan	9.6 %		



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (pmdn/pma)	13.87 triliun	762,429,656.0	Dinas penanaman modal dan ptsp
		Program pengembangan pemasaran pariwisata (prioritas)	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	300000 wna	4,368,526,750.0	Dinas kebudayaan dan kepariwisataan
			Jumlah kunjungan wisatawan lokal	7500000 wni		
			Peningkatan jumlah produk usaha ekonomi kreatif (prioritas)	2 jenis		
			Lama kunjungan wisata	5 hari		
			Jumlah pengguna rest area sebagai spot wisata alternatif (prioritas)	1000 orang		
		Program pengembangan destinasi pariwisata halal (prioritas)	Jumlah kab/kota yang memiliki kawasan wisata halal (prioritas)	2 kab/kota	260,916,000.0	Dinas kebudayaan dan kepariwisataan
		Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi yang didukung/difasilitasi menjadi destinasi wisata unggulan	2 destinasi wisata	4,357,556,446.0	Dinas kebudayaan dan kepariwisataan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
		Program pengembangan kemitraan dan sumber daya pariwisata	Cakupan penyelenggaraan event pariwisata bekerjasama dengan lembaga kemitraan	12 event	1,910,901,211.0	Dinas kebudayaan dan kepariwisataan
		Program hilirisasi pertanian (prioritas)	Nilai hilirisasi produksi pertanian (prioritas)	454237909693 rp	92,950,000,000.0	Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura
		Program hilirisasi peternakan (prioritas)	Nilai hilirisasi produksi peternakan (prioritas)	21964750000 rp	35,405,887,584.0	Dinas peternakan dan kesehatan hewan
		Program peningkatan produksi dan produktivitas ternak (prioritas)	Jumlah populasi ternak kecil	1740324 ekor	19,478,200,000.0	
	Jumlah populasi ternak sapi perah (prioritas)		1416 ekor			
	Jumlah populasi ternak unggas		129027702 ekor			
	Jumlah populasi ternak kuda (prioritas)		185948 ekor			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
			Jumlah populasi ternak kerbau (prioritas)	115598 ekor		
			Jumlah produksi telur (prioritas)	170724195 kg		
			Jumlah populasi sapi potong (prioritas)	1329788 ekor		
			Jumlah produksi daging (prioritas)	139478730 kg		
			Jumlah produksi susu (prioritas)	3370049 kg		
		Program hilirisasi perkebunan (prioritas)	Nilai hilirisasi produksi perkebunan (prioritas)	5000000000 rp	910,000,000.30	Dinas perkebunan
		Program hilirisasi pertambangan (prioritas)	Nilai hilirisasi produksi pertambangan (prioritas)	15203925000000 rp	1,227,776,582.0	Dinas energi dan sumber daya mineral
		Program peningkatan dan pengembangan ekspor (prioritas)	Nilai total ekspor	1358097840 rp (milyar)	6,158,248,497.0	Dinas perdagangan
			Nilai ekspor bersih perdagangan (prioritas)	135809784 juta \$ us		
		Program hilirisasi perikanan (prioritas)	Nilai hilirisasi produksi perikanan (prioritas)	19793772994810 rp	43,608,000,000.0	Dinas kelautan dan perikanan
		Program peningkatan produksi kelautan dan perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap	374981 ton	2,398,000,000.0	Dinas kelautan dan perikanan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
			Jumlah produksi perikanan budidaya	5088024 ton		
			Jumlah produksi garam rakyat	95735.52 ton		
		Program pengembangan pusat pertumbuhan baru (prioritas)	Jumlah kawasan yang difasilitasi perencanaan dan pengembangannya (prioritas)	3 kawasan	690,872,388.0	Badan perencanaan pembangunan daerah
4	Peningkatan ketahanan pangan, sumber daya air, dan pelestarian lingkungan hidup	Program peningkatan produksi tanaman pangan	Jumlah produksi kedelai dan palawija	16751 ton	7,275,000,000.0	Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura
			Jumlah produksi padi	6329309 ton		
			Produktivitas padi	51 kw/ha		
			Produktivitas jagung	57 kw/ha		
			Produktivitas kedelai dan palawija	13 kw/ha		
			Jumlah produksi jagung	2560267 ton		
		Program peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura	22806 ton	5,400,000,000.0	Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura
			Produktivitas tanaman hortikultura	57 kw/ha		
			Jumlah bibit hortikultura bersertifikat yang siap diperbanyak pada ikb	10000 pohon		
		Program pengolahan hasil, pasca panen, pengembangan agribisnis, dan penyebaran informasi	Tingkat kehilangan hasil panen	8 %	1,600,000,000.0	Dinas ketahanan pangan,
Jumlah kelompok tani yang menjalankan usaha agribisnis	25 poktan					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
						tanaman pangan dan hortikultura
		Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	Cakupan ketersediaa jaringan irigasi	20000 ha	46,987,000,000.0	Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura
			Cakupan ketersediaan alat dan mesin pertanian	400 unit		Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura
		Program penyediaan benih bermutu pengendalian opt dan statistik pertanian	% penurunan serangan opt	4.8 %	3,695,000,000.0	Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura
			% penggunaan benih padi bersertifikat	63 %		
			Cakupan ketersediaan data statistik pertanian	100 %		
		Program fasilitasi prasarana dan sarana berbantuan	Jumlah proyek bantuan wismp dan loan untuk sektor pertanian	2 proyek	6,946,538,000.0	Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura
		Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan keamanan pangan segar	Skor pola pangan harapan (pph)	93.05 %	3,395,000,000.0	Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura
			% pengawasan keamanan pangan	100 %		
			% ketersediaan pangan utama	100 %	1,783,244,800.0	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
		Program pengembangan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan	Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi setara beras (ton)	145 juta ton		Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura
		Program pengembangan distribusi dan harga pangan	Cakupan ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	100 %	875,000,000.0	Dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura
		Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (prioritas)	% penurunan jumlah beban pencemaran	41 %	913,628,103.79	Dinas pengelolaan lingkungan hidup
			Cakupan lokasi kerusakan sumber daya alam yang dipulihkan	20 %		
			Indeks kualitas udara (prioritas)	88.71		
			Indeks kualitas air (prioritas)	77.67		
		Program pengelolaan persampahan dan limbah b3	% penanganan sampah kabupaten/kota	48 %	5,173,010,617.0	Dinas pengelolaan lingkungan hidup
			Cakupan limbah b3 yang dikelola	80 %		



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
		Program peningkatan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup	Cakupan layanan pengujian laboratorium lingkungan hidup	100 %	459,454,944.0	Dinas pengelolaan lingkungan hidup
		Program penataan dan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	% jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	652,964,702.21	Dinas pengelolaan lingkungan hidup
			Jumlah kabupaten/kota dengan kelompok masyarakat atau lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan lingkungan hidup	24 kab/kota		
		Program penataan lingkungan	Cakupan penilaian dokumen lingkungan kabupaten/kota	100 %	765,471,091.0	Dinas pengelolaan lingkungan hidup
			Cakupan pemantauan emisi gas rumah kaca	10 kab/kota		
		Program rehabilitasi hutan dan lahan (prioritas)	Cakupan ketersediaan jumlah bibit tanaman hutan	1000000 bibit	14,967,300,000.0	Dinas kehutanan
			Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas)	1000 ha		
			Indeks kualitas tutupan lahan (prioritas)	58.62		
		Program perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem	% tindak pidana khusus kehutanan yang ditangani	100 %	4,065,000,000.0	Dinas kehutanan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
		Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Cakupan luas kebakaran hutan yang dikendalikan	100 %	3,220,000,000.0	Dinas kehutanan
5	Peningkatan ketertiban dan keamanan, reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan public	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran keamanan, ketertiban dan kenyamanan	100 %	610,000,000.0	Satuan polisi pamong praja
		Program pemberdayaan dan perlindungan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	100 %	538,000,000.0	Satuan polisi pamong praja
		Program pengelolaan dan pelayanan perizinan	Kenaikan/penurunan nilai realisasi pmdn	15 %	1,081,788,499.0	Dinas penanaman modal dan ptsp
		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (prioritas)	%ketersediaan rpjpd, rpjmd, dan rkpdp yang ditetapkan (prioritas)	100 %	12,098,959,455.0	Badan perencanaan pembangunan daerah
			% penjabaran konsistensi program rpjmd ke dalam rkpdp dan APBD (prioritas)	100 %		
% rata-rata capaian kinerja program rpjmd (prioritas)	97.5 %					

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

No.	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Program Pembangunan	Indikator kinerja program (Outcome)		Pagu indikatif	OPD Pelaksana
			Tolok ukur	Target		
		Program penilaian potensi dan kompetensi aparatur (prioritas)	Cakupan sdm yang ditempatkan sesuai kompetensinya (prioritas)	75 %	2,655,000,000.0	Badan kepegawaian daerah
		Program pendidikan kedinasan	% terisinya formasi	100 %	150,000,000.0	Badan kepegawaian daerah
		Program pembinaan dan pengendalian aparatur	% pegawai yang menerima sanksi disiplin	100 %	590,000,000.0	Badan kepegawaian daerah
		Program pengembangan karier aparatur	% kebutuhan sdm aparatur sipil negara sesuai standar yang telah ditentukan	100 %	1,025,000,000.0	Badan kepegawaian daerah
		Program pengembangan kompetensi sumber daya aparatur (prioritas)	Cakupan sdm aparatur yang lulus diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan diklat manajerial (prioritas)	100 %	3,001,304,370.99	Badan pengembangan sumber daya manusia
		Program pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan (prioritas)	% perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah (prioritas)	20 %	4,941,641,751.46	Badan penelitian dan pengembangan daerah

#### 4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Pokok - pokok pikiran DPRD untuk rencana pembangunan tahun 2020 sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD dan RPJMD, dan RKPD. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi:

1. Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan;
2. Peningkatan kualitas kesehatan penduduk
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Peningkatan sarana prasarana perhubungan
5. Peningkatan kualitas Perumahan dan permukiman
6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat muiskin dan yang berkebutuhan khusus
7. Peningkatan sarana prasarana pertanian

#### 4.5. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) dengan RKPD Tahun 2020

TPB/SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasal 1 Ayat 4 dimana Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah dengan mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan yakni Pencapaian Target, Kesesuaian, serta keselarasan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan RKPD. Target-target TPB/SDGs sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) )/Sustainable Development Goals (SDGs) dengan RKPD Tahun 2020 merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB menjadi salah satu acuan dalam pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 telah mengarusutamakan pencapaian TPB dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan dan indikator yang terukur. Integrasi TPB dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah
1	Tujuan 1  Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)</li> <li>2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Program Pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)</li> <li>4. Program Pengembangan Layanan Kesehatan Siaga Bencana</li> <li>5. Program Pembangunan Rumah Sakit Regional</li> <li>6. Program Bantuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Siswa Miskin (Priorotas)</li> <li>7. Program Perencanaan Perekonomian</li> <li>8. Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> <li>9. Program Penyediaan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin dan MBR</li> <li>10. Program Peningkatan Peran Perempuan Pedesaan</li> <li>11. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar</li> <li>12. Program Hilirisasi Pertanian</li> <li>13. Program Hilirisasi Perkebunan</li> <li>14. Program Keluarga Sejahtera</li> <li>15. Program Pengembangan Kemitraan dan Sumber Daya Pariwisata</li> <li>16. Program Pengembangan dan Pembinaan Kelompok UKM Bagi Masyarakat Miskin</li> </ol>



No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah
		17. Program Hilirisasi Peternakan 18. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak 19. Program Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan 20. Program Pengendalian Jalan Akses Wilayah Terisolir 21. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 22. Program Penyediaan Listrik dan Ketahanan Energi 23. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 24. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 25. Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial (Prioritas) 26. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 27. Program Peningkatan Keluarga Berencana 28. Program Penyediaan Air Bersih 29. Program Pengembangan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota 30. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional 31. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 32. Program Penataan Permukiman 33. Program Partisipasi Pendidikan Menengah dan Khusus (Prioritas)

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah
		34. Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Manusia dan Kebudayaan 35. Program Penataan Administrasi Kependudukan 36. Program Pencegahan dan mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 37. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 38. Program Pendidikan Siswa Kebutuhan Khusus 39. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 40. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
2	Tujuan 2  Tanpa Kelaparan : Mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;	1. Pembangunan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan 2. Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan 3. Pengembangan Distribusi Harga Pangan 4. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak (Prioritas) 5. Pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) 6. Promosi Kesehatan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak 7. Pengembangan Layanan Kesehatan Brigade Siaga Bencana (BSB) 8. Pembangunan Rumah Sakit Regional 9. Pendidikan Karakter Sekolah Sehat (Prioritas) 10. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>11. Hilirisasi Pertanian</li> <li>12. Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga</li> <li>13. Upaya Kesehatan dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan</li> </ul>
3	<p>Tujuan 3</p> <p>Kehidupan Sehat dan Sejahtera : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi Kesehatan, Bina Gizi, dan Kesehatan Ibu dan Anak</li> <li>2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</li> <li>3. Pengembangan Layanan Kesehatan Brigade Siaga Bencana (BSB)</li> <li>4. Pembangunan Rumah Sakit Regional</li> <li>5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ul>
4	<p>Tujuan 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Partisipasi Pendidikan Menengah dan Khusus (Prioritas)</li> <li>2. Program Pendidikan Karakter dan Sekolah Sehat</li> </ul>

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah
	Pendidikan Berkualitas : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;	3. Program Pendidikan Siswa Kebutuhan Khusus 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan 5. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 6. Peningkatan dan Pemerataan Mutu dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5	Tujuan 5 Kesetaraan Gender : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;	1. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga 2. Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan 3. Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 4. Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak 5. Perlindungan Perempuan dan Anak (Prioritas) 6. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Menengah dan Khusus

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah
		7. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga  8. Program Peningkatan Keluarga Berencana  9. Program Pengembangan Data dan informasi Statistik Sektoral
6	Tujuan 6  Air Bersih dan Sanitasi Layak : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	1. Program Pengembangan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Prioritas) 2. Program Penyediaan Air Bersih 3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya (Prioritas) 4. Program Penyediaan Air Bersih 5. Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga 6. Program Eksplorasi Sumberdaya Geologi, Konservasi, dan Pemanfaatan Air Tanah 7. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 8. Program Penegenalian dan Evaluasi Pemanfaatan Energi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah 9. Program Penanggulangan Daerah-Daerah Potensi Banjir (Prioritas) 10. Program Penegmbangan dan Pengelolaan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya 11. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah
7	<p>Tujuan 7</p> <p>Energi Bersih dan Terjangkau : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan Pengembangan instalasi Bio Energi</li> <li>2. Program Penyediaan Listrik dan Ketahanan Energi</li> </ol>
8	<p>Tujuan 8</p> <p>Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja</li> <li>2. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> </ol>
9	<p>Tujuan 9</p> <p>Industri, Inovasi dan Infrastruktur : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri kreatif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan transportasi massal.</li> <li>2. Pengembangan/Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi laut.</li> <li>3. Pengembangan/Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi udara.</li> <li>4. Pengembangan/Pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi darat.</li> <li>5. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.</li> <li>6. Pengembangan industry kecil dan menengah.</li> <li>7. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM.</li> </ol>



No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah
10	Tujuan 10 Berkurangnya kesenjangan : Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara;	1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi PedesaanKemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 2. Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan 3. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
11	Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh berkelanjutan	1. Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Penyelenggaraan Angkutan Jalan 3. Program Bina Konstruksi

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah
		4. Program Penyelenggaraan Tata Ruang 5. Program Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 6. Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana 7. Program kualitas dan akses informasi penanggulangan bencana 8. Program Penanggulangan Daerah-Daerah Potensi Banjir 9. Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana 10. Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 11. Program Pengembangan dan Penataan Fasilitas Umum
12	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;	1. Program Penelolaan Limbah B3 2. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
13	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	1. Program pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana 2. Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana 3. Penataan Lingkungan 4. Program Perencanaan Sumberdaya Alam
14	Tujuan 14	1. Program Hilirisasi Perikanan

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah
	Ekosistem Lautan : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Program Peningkatan Produksi kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Program Penerapan Mutu , Pengembangan Usaha dan Daya Saing</li> <li>4. Program Pengawasan, Konservasi, Penataan dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut</li> </ul>
15	<p>Tujuan 15</p> <p>Ekosistem Daratan : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggunaan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program penataan dan pemanfaatan hutan</li> <li>2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem</li> <li>4. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan</li> <li>5. Tata Lingkungan</li> <li>6. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ul>
16	<p>Tujuan 16</p> <p>Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingka</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Program Pengelolaan Informasi Publik</li> </ul>

No.	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah
17	Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengembangan dan Implementasi E-Government</li><li>2. Program Pengembangan Baruga Layanan Publik</li><li>3. Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektor</li><li>4. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li><li>5. Program Penataan Administrasi Kependudukan</li></ol>

#### 4.6. Inovasi Daerah

Secara umum berlakunya otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah kreatif mewujudkan visi dan misi kepala daerah (Hasil Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung). Adanya kewenangan dalam mengelola sendiri daerahnya, maka pemerintah daerah menganggap paling mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Kemampuan kepala daerah dalam memimpin daerahnya akan nampak pada pencapaian Visi dan Misi yang dibangun secara konsisten sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Salah satu factor penunjang pencapaian kinerja kepala daerah yaitu melalui inovasi daerah. Saat ini inovasi sudah menjadi kebutuhan pemerintah pusat dan daerah. Inovasi lahir dari kebiasaan atau budaya kerja pemerintah yang masih menggunakan cara lama sehingga perbaikan pelayanan publik masih jalan di tempat.

Sudah barang pasti jika budaya kerja pemerintah yang monoton dan tidak kreatif akan berimbas pada kualitas pelayanan publik yang lama, berbelit-belit dan transaksional. Masyarakat juga sudah ikut berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran mengenai pelayanan publik yang sebaiknya lebih efektif dan efisien.

Sampai tahun 2019 pemerintah Sulawesi Selatan telah menemukan beberapa inovasi baru dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel IV.8**  
**Data Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015**

NO.	UNIT KERJA	JUDUL INOVASI	KET.
1.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulsel	1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Sulsel 2. Pelayanan Perizinan Khusus Pemohon Disable 3. Digital Licensing Agreement by SIMAP	
1.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulsel	1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Sulsel 2. Pelayanan Perizinan Khusus Pemohon Disable Digital Licensing Agreement by SIMAP	
2.	RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel	Pemberdayaan “Patient expert” MDR dalam Pengelolaan Terpadu Pengendalian TB Resisten Obat pada RSUD Labuang Baji melalui wadah “KAREBA BAJI”	

<b>NO.</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>JUDUL INOVASI</b>	<b>KET.</b>
3.	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata Prov. Sulsel.	Explore South Sulawesi with Sulsel in my hand application.	
4.	Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel	Layanan SAMSAT Care	
1.	Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel	Layanan SAMSAT Care	
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	1. Pelayanan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Benteng Rotterdam. 2. Maccini Sombala of Indonesia (MOI) dan Taman Pakui Sayang	
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Sistem Informasi Badan Usaha Milik Desa (SiBUMDes)	
4.	Sekretariat DPRD	Pelayanan Penerimaan Aspirasi/Pengaduan Masyarakat.	
5.	Biro Hukum Dan HAM	1. Klarifikasi, Evaluasi/Asistensi Ranperda Kab/Kota melalui media elektronik (website) 2. Penyuluhan hukum tentang Bullying di Sekolah yang telah berlangsung sejak tahun 2015. 3. Penyuluhan hukum tentang Gerakan Anti Korupsi Masuk Sekolah yang telah berlangsung sejak tahun 2011.	
6.	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Prov. Sulsel.	1. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) 2. Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (SIPEKA)	
7.	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Sulsel	Pelayanan Laboratorium LH Berbasis Online.	LOLOS TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK



NO.	UNIT KERJA	JUDUL INOVASI	KET.
			NASIONAL.
8.	Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah.	1. Sinergi Aplikasi Viewer SIMDA – BMD dalam Percepatan pelaporan pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Pemprov. Sulsel. 2. Visualisasi Pengamanan Aset Pemprov.	
1.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	<b>Inovasi Sejuta Ikan</b> (Sertifikasi Pengujian Pengujian Mutu Hasil Perikanan Agar Produk Perikanan Sulsel Tetap Mendunia)	MASUK TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2018 NASIONAL
2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.	SIGA SULSEL, Jendela Informasi Gender Dan Anak.	
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan desa	Sistem Informasi Badan Usaha Milik Desa (SiBUMDes)	
4.	RSUD SAYANG RAKYAT	GO GRAB MAYANG ASA (Ayo! Gerakan Rehabilitasi Anti Bubuk Di Rumah Sayang Anak Bangsa.	
5.	RSUD HAJI Makassar	Gender Unir Rumah Sakit (GURS) Integrasi Pelayanan Terpadu Pengarusutamaan Gender Dalam Pelayanan Kesehatan Di RSUD Haji Makassar.	
6.	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Prov. Sulsel.	1. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) 2. Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (SIPEKA)	
7.	Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah.	1. Sinergi Aplikasi Viewer SIMDA – BMD dalam Percepatan pelaporan pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Pemprov. Sulsel. 2. Visualisasi Pengamanan Aset	

NO.	UNIT KERJA	JUDUL INOVASI	KET.
		Pemprov.	
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Prov. Sulsel.	TeSA 129 (Telepon Sahabat Anak) “Cegah dan Laporkan Kekerasan Anak melalui Layanan Gratis Hotline TESA 129”	
9.	Dinas Pendidikan Prov. Sulsel.	Sistem e-PANRITA	
10.	Badan Pendapatan Daerah	Kriing.... PKB Samsat Care.	

#### 4.7. Pembangunan Inklusif di Sulawesi Selatan

Perekonomian Sulawesi Selatan terus bertumbuh dalam lima tahun terakhir. Secara rata-rata, perekonomian Sulawesi Selatan bertumbuh dikisaran 7,40 persen per tahun. Pada tahun 2018, perekonomian Sulawesi Selatan mengalami sedikit pelemahan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen pada tahun 2018. Meskipun demikian pertumbuhan tersebut tidak signifikan memberikan penurunan terhadap pengurangan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan di Sulawesi selatan. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi yang akan datang diharapkan mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan untuk menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah. Untuk mengukur pembangunan ekonomi inklusif digunakan 3 (tiga) pilar yaitu:

1. Pilar pertumbuhan dan ekonomi tinggi
2. Pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan
3. Pilar perluasan akses dan kesempatan kerja.

Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi inklusif secara nasional berada pada indeks 5,75, sedangkan provinsi Sulawesi Selatan berada pada indeks 5,73, yang terdiri dari 3 pilar yaitu seperti pada tabel berikut:

Tabel IV.9

#### Pembangunan Ekonomi Inklusif Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.

No	Pilar	Indeks Pertumbuhan	
		Nasional	Sulawesi Selatan
1.	Pertumbuhan Ekonomi Tinggi	5,46	5,30
2.	Pemerataan Pendapatan Pengurangan Kemiskinan	6,30	5,72
3.	Pilar Perluasan Akses dan Kesempatan Kerja	5,83	6,71

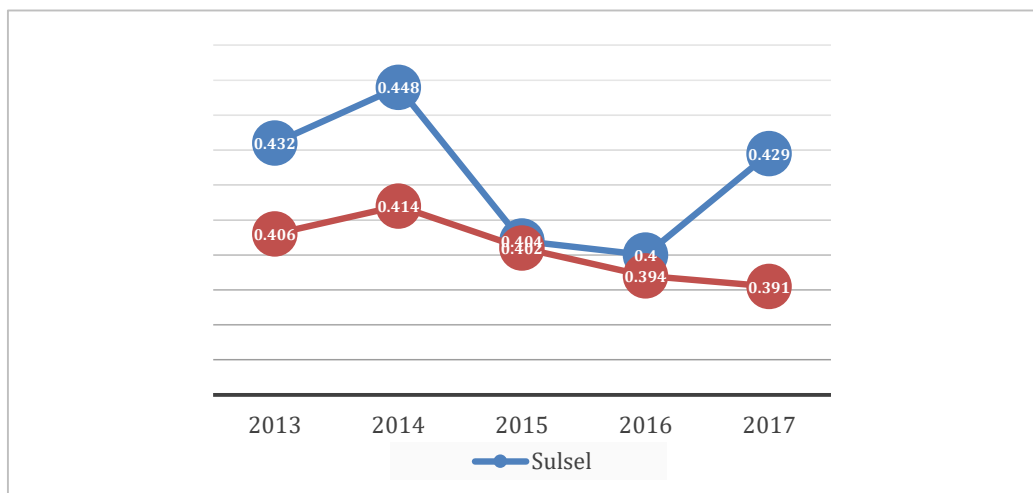
#### 4.7.1 Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Untuk mengetahui elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan digunakan pendekatan *Growth Elasticity of Poverty* (GEP). Pendekatan GEP dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen dengan penurunan angka kemiskinan sebagai variabel dependen. Dari hasil perhitungan diperoleh angka koefisien regresi sebesar -0,169 persen. Angka ini kurang dari 1 (satu) yang berarti inelastis. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak cukup sensitif terhadap penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi semacam ini dianggap tidak inklusif. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa setiap perekonomian bertumbuh satu persen, jumlah penduduk miskin berkurang 0,169 persen. Dengan demikian, jika rata-rata perekonomian bertumbuh sebesar 7,40 persen per tahun maka jumlah penduduk miskin berkurang rata-rata 1,25 persen per tahun.

#### 4.7.2 Ketimpangan distribusi pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan atau biasa disebut saja ketimpangan (*inequality*) adalah perbedaan atau disparitas pendapat antara kelompok penduduk suatu negara atau daerah/wilayah dalam satu pengukuran waktu tertentu. Pengukurannya diproksi dari pengeluaran konsumsi rumah tangga melalui perhitungan koefisien gini atau biasa disebut rasio/indeks gini. Selain itu, ketimpangan juga dapat dilihat antar wilayah yang diproksi dari ketimpangan pendapatan wilayah melalui metode perhitungan Indeks Williamson (IW). Pada analisis kondisi ketimpangan di Sulawesi Selatan, lebih ditonjolkan tingkat ketimpangan melalui perhitungan koefisien gini atau indeks gini, baik berdasarkan posisi relatif Sulawesi Selatan dengan provinsi lainnya maupun berdasarkan indeks gini kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Gambar 4..  
Perbandingan Perkembangan Indeks Gini  
Sulawesi Selatan dan Nasional, 2013-2017



Sumber: BPS Sulawesi Selatan

Perkembangan indeks gini di Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir, meskipun nampak menurun, tetapi tidak menunjukkan kinerja penurunan yang konsisten selama periode 2013-2017. Berfluktuasi pada kisaran indeks gini 0,400 hingga 0,448. Tingkat ketimpangan yang dicapai selama periode ini, bukan hanya tidak konsisten menunjukkan penurunan, tetapi juga masih tergolong tinggi. Secara absolut

menunjukkan dalam kategori ketimpangan moderat atau sedang, dan secara relatif menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi dibandingkan dengan tingkat ketimpangan nasional pada periode yang sama. Indeks gini di Sulawesi Selatan senantiasa mencatat angka indeks yang lebih besar daripada indeks gini nasional setiap tahunnya selama periode 2013-2017, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.

Secara fungsional, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan telah memberi dampak terhadap indeks gini selama periode lima tahun terakhir, 2013-2017. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap capaian indeks gini. Artinya, perubahan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada perubahan indeks gini.

Secara teoritis, perubahan antara keduanya diharapkan berkorelasi secara negatif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat. Meskipun hal sebaliknya juga dapat terjadi, penurunan pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan antara golongan masyarakat. Berdasarkan analisis regresi sederhana yang dilakukan pada kedua variabel ini selama periode 2013-2017, dihasilkan persamaan:

$$RG = 0,11 + 0,56PE \text{ dengan } R^2 = 0,258$$

Dimana, RG = Indeks Gini dan PE = Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi tingkat indeks gini. Bila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1 persen akan berdampak pada peningkatan indeks gini sebesar 0,56. Artinya, pertumbuhan ekonomi bersifat inelastic terhadap indeks gini. Selain itu, hanya 25,8 persen variabel indeks gini ditentukan oleh variabel-variabel dalam model ini, selebihnya 74,2 persen ditentukan variabel-variabel yang berada di luar model.

Mencermati hasil statistik ini, nampaknya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks gini di Sulawesi Selatan belum seperti yang diharapkan. Sangat diharapkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong penurunan angka indeks gini, yang berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong penurunan ketimpangan distribusi pendapatan atau peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat di Sulawesi Selatan. Fakta yang ditunjukkan pada persamaan ini justru sebaliknya, pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif terhadap indeks gini. Artinya, bila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan berdampak pada peningkatan indeks gini, yang berarti ketimpangan distribusi pendapatan justru akan semakin melebar dengan pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan makro ekonomi daerah.

Fakta ini mengindikasikan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi di Sulawesi Selatan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, bukan oleh kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Sehingga dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi justru tidak memberi dampak besar pada penurunan tingkat ketimpangan, malah sebaliknya bisa semakin menciptakan disparitas pendapatan masyarakat yang semakin melebar. Hal ini sejalan dengan hipotesis Kuztnes melalui kurve U terbaliknya, bahwa pada tahapan awal peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada peningkatan angka indeks gini yang berarti ketimpangan pendapatan justru akan melebar. Fakta ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan tidak bisa menghindari risiko tingkat ketimpangan pendapatan yang

cenderung tergolong tinggi sebagai dampak dari peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahapan awal.

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan diharapkan secara bertahap akan semakin memperbesar kelompok masyarakat yang menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada saatnya akan menciptakan disparitas ketimpangan pendapatan masyarakat yang semakin menyempit, sehingga dapat mewujudkan pemerataan pendapatan yang semakin tinggi.

#### **4.7.3 Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja**

Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh Sulawesi Selatan dalam kurung waktu lima tahun terakhir telah berkontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja. Hal ini menandakan bahwa terdapat hubungan linier antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja. Misalnya pada tahun 2016, perekonomian bertumbuh lebih cepat dari tahun sebelumnya dan pada saat itu, penduduk yang bekerja juga mengalami pertumbuhan positif. Kondisi ini juga terjadi pada tahun 2017, dimana pertumbuhan penduduk yang bekerja kembali melambat seiring dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi. Sebagai konsekwensi dari pelambatan pertumbuhan penduduk yang bekerja mengakibatkan peningkatan jumlah orang yang menganggur atau peningkatan tingkat pengangguran. Untuk mendorong lebih cepat jumlah angkatan kerja yang terserap ke dalam lapangan kerja, maka pertumbuhan ekonomi harus secara konsisten bertumbuh lebih cepat setiap tahunnya.

Dari hasil perhitungan diperoleh angka koefisien regresi sebesar 0,31 persen. Angka ini kurang dari 1 yang berarti inelastis. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi tidak peka terhadap penyerapan tenaga.

#### **4.7.4 Menuju Pertumbuhan yang Inklusif (RPJMD 2018-2023)**

Berdasarkan analisis pertumbuhan, terlihat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan lima tahun terakhir tidak cukup inklusif. Artinya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tidak cukup efektif mengurangi angka kemiskinan, menurungkan ketimpangan, dan menyediakan lapangan kerja baru bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Sulawesi Selatan, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mendorong Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di atas pertumbuhan ekonomi. Dinamika sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tampaknya berasosiasi dengan dinamika kemiskinan di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk miskin di Sulawesi Selatan bermukim di wilayah perdesaan yang bercorak pertanian. Hal ini dilakukan melalui strategi:
  - a. Melakukan hilirisasi industri komoditas unggulan, terutama komoditas Rumput Laut, Kakao, dan Jagung. Hilirisasi ini diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) dan memperluas lapangan kerja baru sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan
  - b. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka wilayah terisolir, memperkuat interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara berkelanjutan

- Meningkatkan produktivitas pekerja melalui peningkatan keterampilan, perbaikan akses terhadap sumberdaya, dan peningkatan infrastruktur ekonomi.
  - a. Mengefektifkan link and match antara proses pendidikan vokasional dengan perkembangan dunia usaha dan industri serta meningkatkan kualitas belajar-mengajar pada pendidikan menengah umum dalam meningkatkan kelulusan pada pendidikan tinggi bereputasi
  - b. Melakukan akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumber daya alam
- Mendorong sektor ekonomi yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mendorong dan memfasilitasi pengembangan industri pengolahan, melalui arah kebijakan:
  - a. Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana-prasa-rana, teknologi, dan micro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru
  - b. Hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan) secara ekologis.
  - c. Penguatan kerjasama antar daerah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
- Mendorong ekonomi kreatif dan ekonomi digital di wilayah perkotaan untuk mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja terdidik. Data menunjukkan bahwa para penganggur berdomisili di wilayah perkotaan, berada di usia produktif, dan relatif terdidik.
  - a. Mengarahkan Tenaga kerja untuk bekerja di bidang ekonomi kreatif dan ekonomi digital dapat menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran.
  - b. Mendorong usaha-usaha non-pertanian di wilayah perdesaan. Berbagai hasil studi terbaru menunjukkan bahwa jembatan emas untuk keluar dari kemiskinan bagi mereka yang memiliki mata pencaharian di sektor pertanian tampaknya harus berasal dari kombinasi sektor pertanian yang lebih produktif dan pembukaan kesempatan kerja non-pertanian di perdesaan.
- Mengendalikan inflasi, terutama harga kelompok bahan makanan. Kenaikan harga bahan makanan selalu berkorespondensi dengan tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk miskin akan bergerak naik ketika harga bahan makanan cenderung meningkat. Ini mudah difahami mengingat proporsi terbesar dari pengeluaran rumah tangga miskin dialokasikan untuk membeli bahan makanan.
- Menerapkan kebijakan penggajian dan pengupahan yang lebih adil, terutama memastikan para pekerja menerima upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Upaya semacam ini diharapkan dapat memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan taraf hidup para pekerja. Meningkatkan keselamatan kerja dan memperbaiki kualitas kesehatan para pekerja, juga perlu terus diupayakan untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja.
- Mengintensifkan kebijakan transfer, terutama yang diarahkan untuk perlindungan dan jaminan sosial. Ini penting untuk tetap mempertahankan kualitas hidup penduduk miskin, khususnya bagi mereka yang berada pada usia yang sudah tidak produktif, pengangguran, penyandang disabilitas, rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga, dsb



#### 4.7.5 Pembangunan Rendah Karbon

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap perubahan iklim dengan berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% (kemudian diperbaharui menjadi 29%) dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional dari kondisi tanpa adanya intervensi aksi mitigas (business as usual/ BAU). Komitmen tersebut telah dijabarkan melalui Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Sebagaimana dimandatkan dalam Perpres No 61/ 2011 bahwa aksi penurunan GRK tidak hanya dilakukan pada tingkat pusat saja, namun pemerintah provinsi juga dituntut berkontribusi dalam aksi penurunan GRK. Peran serta daerah dalam penurunan GRK tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Penurunan GRK (RAD-GRK) yang merujuk pada dokumen RAN-GRK. Tindak lanjut dari implementasi Perpres No. 61 Tahun 2011 adalah dilakukannya penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sulawesi Selatan dengan penetapan Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2012.

#### 4.7.6 Profil Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil kaji ulang terhadap Perubahan Gubernur No. 59 Tahun 2012, emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sulawesi Selatan disumbang oleh beberapa bidang/bidang antara lain pertanian, kehutanan, energi yang didalamnya termasuk sub bidang transportasi dan terakhir adalah bidang limbah. Dalam bidang energi terdapat pula sub bidang industri, namun dalam RAD-GRK ini sub bidang industri secara spesifik tidak dihitung namun komponen utamanya telah masuk dalam perhitungan penggunaan energi. Total dari emisi GRK Prov. Sulsel adalah 63.597.394 ton CO<sub>2</sub>eq pada tahun 2030. Emisi terbesar adalah pada bidang energi yang menyumbang 60% emisi gas rumah kaca diikuti dengan sektor kehutanan dengan emisi 26% dan bidang pertanian dengan emisi 11% dan terakhir adalah limbah dengan emisi 1,2% dari total emisi Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil perhitungan BaU baseline untuk masing-masing bidang, maka target penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sulawesi selatan adalah 5,6%. Bidang yang memiliki emisi terbesar adalah bidang Energi dengan terbesar adalah sumbangan emisi dari sub bidang transportasi. Kehutanan adalah sektor yang menyumbang penurunan emisi terbesar (4,39%). Berikut adalah tabel target penurunan emisi sementara yang dihitung per Januari 2019.

**Tabel IV.10**  
**Emisi GRK dan Mitigasi Provinsi Sulawesi Selatan**

BIDANG	BaU (ton CO <sub>2</sub> Eq)	% Emisi per Bidang	Mitigasi (Ton CO <sub>2</sub> eq)	% Penurunan Perbidang	% Penurunan Terhadap Total Mitigasi	% Penurunan Terhadap BaU
Kehutanan	16.887.156	26,6	2.792.501	16,54	78,49	4,39
Pertanian	7.486.438	11,8	90.348	1,21	2,54	0,14
Energi	38.430.000	60,4	473.237	1,23	13,30	0,74
Limbah	793.800	1,2	201.630	25,40	5,67	0,32

BIDANG	BaU (ton CO <sub>2</sub> Eq)	% Emisi per Bidang	Mitigasi (Ton CO <sub>2</sub> eq)	% Penurunan Perbidang	% Penurunan Terhadap Total Mitigasi	% Penurunan Terhadap BaU
Total	63.597.394		3.557.715		100,00	5,6

Sumber : Hasil Pengolahan, Desember 2018

Penurunan emisi ini dilaksanakan dengan Program/Kegiatan Mitigasi GRK 2018-2030 di masing-masing OPD dengan perincian sebagai berikut :

- Pertanian
  - Pengembangan desa organic
  - Sistem Pertanian Terintegrasi Jagung, Ternak dan Pengolahan Limbah
  - Sistem tumpang sari
  - Pengembangan Bio Gas
  - Penambahan Pakan Konsentrat (untuk mengurangi gas methane)
  - Pengembangan HMT (Hijauan Makanan Ternak)
- Kehutanan
  - Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  - Perhutanan Sosial
  - Rehabilitasi Mangrove
  - Perlindungan Hutan
  - Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan
- Energi
  - Pembangunan PLTMH Off Grid
  - Pembangunan Instalasi Bio Gas Rumah
  - Pembangunan PLTS Terpusat
  - Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya
  - Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)
  - Pembangunan PLTBm Off Grid
  - Pembangunan ITS/ATCS
  - Reformasi Sistem Transit (BRT/semi BRT) dan angkutan umum
  - Peremajaan angkutan umum
  - Car free Day
  - Pelatihan dan Sosialisasi Smart Driving
- Limbah
  - Kegiatan Pembangunan Fasilitas pengelolaan Sampah
  - Kegiatan Penangkapan Metan
  - Kegiatan Daur Ulang dan 3R
  - Kegiatan Pengurangan Open Burning
  - Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Air Limbah

#### 4.7.7 Kebijakan Tahun Pembangunan Rendah Karbon 2020

Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Misi 5 diarahkan untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. Tujuan misi ini adalah mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berdaya saing sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta sasaran yang ingin dicapai dalam misi ini adalah (1) Pembangunan rendah karbon direncanakan akan dilaksanakan setiap tahun hingga Tahun 2023 dan (2) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Strategi yang akan dilaksanakan adalah dengan mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan dalam menyelaraskan upaya-upaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasikan pembangunan rendah karbon.

Dalam tahun 2020 kebijakan yang Penerapan secara efektif RPPLH dan KLHS dalam mengadaptasi dan memitigasi dampak lingkungan dari perubahan yang berlangsung serta koordinasi antar sektor dalam implementasi pembangunan rendah karbon. Koordinasi antar sektor dilaksanakan dengan menginisiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai sektor sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan yang bersifat spasial secara partisipatif agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan sumberdaya dan masalah yang ada di masyarakat. Target penurunan emisi yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah penurunan emisi sebesar 300.000 ton CO<sub>2</sub> Equivalen yang diharapkan dapat dicapai dengan kegiatan-kegiatan prioritas antara lain rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan pertanian secara organik dengan tetap melaksanakan kegiatan penyediaan energi baru terbarukan. Rehabilitasi hutan dan lahan diarahkan pada Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang sebagai upaya tindakan rehabilitasi terhadap kerusakan hutan dan lahan pasca banjir dan longsor yang terjadi pada tahun 2018.

Pada penyediaan energi baru terbarukan prioritas pelaksanaan adalah pada daerah kepulauan serta daerah terpencil yang belum terjangkau listrik namun tetap memperhatikan sumberdaya lokal yang ada. Selain kegiatan-kegiatan prioritas, kegiatan lainnya pada sektor-sektor yang dapat mereduksi emisi gas rumah kaca antara lain pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dilaksanakan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dan antar sektor terkait.

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA**

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota pada dasarnya merupakan pedoman untuk mengarahkan pembangunan pada masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota Tahun 2020 akan menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan daerah sehingga tercipta sinergitas pembangunan antar tingkatan pemerintahan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional di Sulawesi Selatan.

Pembangunan wilayah Sulawesi Selatan dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan menetapkan pusat-pusat kegiatan yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industry dan jasa, secara berjenjang berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Penetapan pusat kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang diatur dalam RTRWN dan RTRWP Sulawesi Selatan terdiri dari: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Bulukumba, Kawasan Perkotaan Jeneponto, Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kawasan Perkotaan Barru, Kawasan Perkotaan Watampone di Kabupaten Bone, Kota Parepare dan Kota Palopo. Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan di kawasan perkotaan Bantaeng, kawasan perkotaan Enrekang, kawasan perkotaan Masamba, kawasan perkotaan Belopa, kawasan perkotaan Malili, kawasan perkotaan Pinrang (Watangsawitto), kawasan perkotaan Pangkajene, Kawasan Ekonomi Khusus EMAS di kabupaten Barru, kawasan perkotaan Benteng dan kawasan perkotaan Pamatata, kawasan perkotaan Sinjai, kawasan perkotaan Watansoppeng, kawasan perkotaan Makale, kawasan perkotaan Rantepao, dan kawasan perkotaan Sengkang.

Merujuk pada tujuan pembangunan wilayah Sulawesi Selatan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pengembangan wilayah Sulawesi Selatan dioptimalkan pada pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang khususnya pada kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional. Pengembangan wilayah berdasarkan pemanfaatan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional didasarkan pada penetapan 4 (empat) kawasan andalan darat yaitu Kawasan Mamminasata dan Sekitarnya, Kawasan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Bulukumba-Watampone dan Sekitarnya, dan Kawasan Parepare dan Sekitarnya.

Memperhatikan isu pembangunan kewilayahan, yang masih meghadapi isu kesenjangan wilayah dan dalam rangka pemerataan pembangunan antar wilayah, maka wilayah pengembangan di Provinsi Sulawesi Selatan dibagi dalam 5 (lima) wilayah pengembangan yang didasarkan pada arahan pemanfaatan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional yang meliputi: Kawasan Makassar dan Sekitarnya, Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya, Kawasan Watampone dan Sekitarnya, Kawasan Parepare dan Sekitarnya, dan Kawasan Palopo dan Sekitarnya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.

### 5.1. Kondisi Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2018 tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun 2017, yaitu sebesar 7,07%, namun tetap tumbuh kuat dibandingkan nasional dan berada pada peringkat tiga secara nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi 2018 melambat dibandingkan tahun 2017, namun kondisi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan cenderung membaik yang tercermin dari indikator pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dan indeks pembangunan manusia yang bergerak ke arah yang lebih baik. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Selatan per Agustus 2018 sebesar 5,34% yang lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 5,61%. Ketimpangan Sulawesi Selatan pada September 2018 membaik dengan gini ratio sebesar 0,388 dibandingkan tahun 2017 sebesar 0,429, sedangkan persentase penduduk miskin juga berkurang dari 9,38% pada tahun 2017 menjadi 9,06% pada tahun 2018.

**Tabel 5.1.**  
**Gambaran Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2016-2018**

Indikator	Satuan	Nasional Tahun 2018	Capaian		
			2016	2017	2018
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,17	7,42	7,23	7,07
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,34	5,11	5,61	5,34
IPM		70,81	69,76	70,34	70,90
Penduduk Miskin	%	9,82	9,40	9,38	9,06
Indeks Gini		0,389	0,400	0,429	0,388

Sumber: BPS, diolah Tahun 2019

Gambaran kondisi pembangunan wilayah Sulawesi Selatan menurut kabupaten/kota Tahun 2018, berdasarkan indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan indeks pembangunan manusia dapat dilihat, sebagaimana tabel berikut

**Tabel 5.2.**  
**Gambaran Kondisi Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018**

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN WILAYAH			
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	IPM	Pertumbuhan Ekonomi*
1	Bantaeng	9.23	3,69	67,76	7.32
2	Barru	9.04	5,38	70,05	6.48
3	Bone	10.55	2,88	65,04	8.43
4	Bulukumba	7,48	3,62	67,70	6.92
5	Enrekang	12,49	1,66	72,15	6.89
6	Gowa	7,83	4,80	68,87	7.32
7	Jeneponto	15,48	2,81	63,33	8.26
8	Pare-Pare	5.59	6,81	77,19	6.99
9	Luwu	13,36	3,89	69,60	6.79
10	Luwu Timur	7.23	2,18	72,16	3.07
11	Luwu Utara	13,69	3,87	68,79	7.60
12	Makassar	4,41	12,19	81,73	8.23
13	Maros	10,31	6,19	68,94	6.81
14	Palopo	7,94	11,60	77,30	7.19
15	Pangkajene Kepulauan	15,10	6,91	67,71	6.60

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN WILAYAH			
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	IPM	Pertumbuhan Ekonomi*
16	Pinrang	8,81	3,04	70,62	7.86
17	Kepulauan Selayar	13.13	1,88	66,04	7.61
18	Sidenreng Rappang	5,16	4,70	70,60	7.11
19	Sinjai	9.28	2,14	66,24	7.23
20	Soppeng	7,50	2,66	67,60	8.34
21	Takalar	9.00	3,88	66,07	7.39
22	Tana Toraja	12.75	3,07	67,66	7.50
23	Toraja Utara	13,37	2,88	68,49	8.22
24	Wajo	7.50	3,79	68,57	5.22
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>9,06</b>	<b>5,34</b>	<b>70,90</b>	<b>7,23</b>

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

\*) Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2018, tumbuh sebesar 7,07 persen yang lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 7,23 persen, perlambatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh beberapa lapangan usaha utama yang melambat yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industry pengolahan dan konstruksi.

Namun gambaran pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota tahun 2018 belum tersedia, sehingga gambaran perekonomian Sulawesi Selatan masih berdasarkan pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Sebaran pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017, menunjukkan bahwa:

1. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi sama maupun di atas provinsi sebanyak 13 kabupaten/kota, meliputi: Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng, Bone, Gowa, Jeneponto, Luwu Utara, Pinrang, Kepulauan Selayar, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, dan Toraja Utara;
2. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi di bawah provinsi sebanyak 11 kabupaten/kota, meliputi: Kota Parepare, Palopo, Kabupaten Barru, Bulukumba, Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Maros, Pangkep Kepulauan, Sidenreng Rappang, dan Wajo.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur tumbuh paling rendah di Sulawesi Selatan sebesar 3,07 persen, dan tertinggi adalah Kabupaten Bone dengan pertumbuhan sebesar 8,43 persen.

#### b. Kemiskinan

Berdasarkan hasil Susenas, Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan berjumlah 792,64 ribu jiwa atau 9,06 persen dari total penduduk di Sulawesi Selatan. Berdasarkan persentasenya, sebagian besar penduduk miskin di Sulawesi Selatan berada di daerah perdesaan dengan persentase sebesar 12,24 persen, sedangkan penduduk miskin di perkotaan sebesar 4,61 persen. Persebaran penduduk miskin di Sulawesi Selatan menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan Tahun 2018 menunjukkan bahwa:

1. Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi sebanyak 12 kabupaten/kota, meliputi: Kota Parepare, Makassar, Palopo, Kabupaten Gowa, Bulukumba, Luwu Timur, Sidenreng Rappang, Pinrang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Barru, dan Wajo;



2. Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi sebanyak 12 kabupaten, meliputi: Kabupaten Bantaeng, Bone, Enrekang, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pangkajene Kepulauan, Kepulauan Selayar, Sinjai, Tana Toraja dan Toraja Utara.

Penduduk miskin terbanyak terdapat di Kabupaten Jeneponto dengan persentase sebesar 15,48 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 55,95 ribu jiwa, sedangkan kabupaten/kota dengan penduduk miskin yang paling sedikit adalah Kota Makassar dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,41 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 66,22 ribu jiwa.

#### **c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 5,34 persen menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase TPT dari 5,61 persen pada tahun 2017, namun berdasarkan status pekerjaan utama masih didominasi oleh pekerja sector informal yaitu sebesar 63,01 persen yang didominasi oleh pekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai.

Gambaran kondisi pengangguran terbuka menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan Tahun 2018, menunjukkan bahwa:

1. Kabupaten/Kota dengan persentase pengangguran terbuka di bawah provinsi sebanyak 19 kabupaten/kota, meliputi: kota Parepare, kabupaten Bantaeng, Bone, Bulukumba, Enrekang, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Kepulauan Selayar, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Gowa dan Wajo;
2. Kabupaten/Kota dengan persentase pengangguran terbuka di atas provinsi sebanyak 5 kabupaten/kota, meliputi: kota Makassar, Palopo, Kabupaten Maros, Barru, dan Pangkajene Kepulauan.

Persentase pengangguran terbuka terbesar terdapat di Kota Makassar sebesar 12,19 persen dan persentase pengangguran terbuka terkecil terdapat di Kabupaten Enrekang dengan persentase sebesar 1,66 persen.

#### **d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Kualitas hidup manusia yang digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan yang ditandai dengan pencapaian IPM tahun 2018 sebesar 70,90 yang merupakan IPM level “tinggi” dengan pertumbuhan sebesar 0,80 persen dibandingkan tahun 2017. Peningkatan IPM Sulawesi Selatan dikontribusi oleh peningkatan komponennya yaitu umur harapan hidup saat lahir (UHH) yang meningkat menjadi 70,08 tahun, anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,34 tahun, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,02 tahun di tahun 2018, dan pengeluaran per kapita masyarakat Sulawesi Selatan telah mencapai 10,81 juta rupiah pada tahun 2018.

Gambaran IPM menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan Tahun 2018, menunjukkan bahwa:

1. Kabupaten/Kota dengan IPM di bawah provinsi sebanyak 19 kabupaten, meliputi: kabupaten Barru, Bantaeng, Bone, Bulukumba, Gowa, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Maros, Pangkajene Kepulauan, Pinrang, Kepulauan Selayar, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Wajo;
2. Kabupaten/Kota dengan IPM di atas provinsi sebanyak 5 kabupaten/kota, meliputi: kota Makassar, Parepare, Palopo, Kabupaten Enrekang, dan Luwu Timur.

Kabupaten/kota dengan angka IPM tertinggi di Sulawesi Selatan adalah kota Makassar dengan angka sebesar 81,73, sedangkan kabupaten/kota yang memiliki angka IPM terendah di Sulawesi Selatan adalah kabupaten Jeneponto sebesar 63,33.

Memperhatikan hasil pembangunan menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, yang digambarkan berdasarkan indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan,

pengangguran dan indeks pembangunan manusia maka dapat digambarkan kualitas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

Pertumbuhan ekonomi dapat digolongkan sebagai pertumbuhan yang berkualitas atau pertumbuhan inklusif apabila pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Memperhatikan gambaran pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan menurut kabupaten/kota dibandingkan dengan persentase penduduk kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

**a. Pertumbuhan ekonomi dengan persentase penduduk miskin**

Persandingan antara pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, memberikan gambaran sebagai berikut:

1. Kategori kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi dan persentase penduduk miskin di bawah angka rata-rata provinsi meliputi: kota Makassar, Parepare, kabupaten Gowa, Soppeng, Pinrang, dan Takalar. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong penurunan persentase penduduk miskin, sehingga diharapkan kabupaten/kota tersebut dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tetap meningkatkan upaya penurunan persentase penduduk miskin;
2. Kategori kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin di bawah rata-rata provinsi meliputi: kota Palopo dan kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba dan kota Palopo menunjukkan keberhasilan untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya, namun perlu untuk terus meningkatkan kinerja pembangunan dengan memacu pertumbuhan ekonomi berbasis pada sector dan komoditas unggulan daerah dengan tetap menjaga konsistensi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
3. Kategori kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi dan persentase penduduk miskin di atas rata-rata provinsi, meliputi: kabupaten Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Bone, Luwu Utara, Tana Toraja, dan Toraja Utara. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota tersebut yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ternyata belum memberikan dampak yang nyata terhadap penurunan persentase penduduk miskin. Kabupaten/kota dalam kategori ini diharapkan untuk memacu kinerja pembangunan yang dapat meningkatkan perekonomian wilayah, khususnya pada sector-sektor unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja antara lain pengembangan wirausaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang diiringi dengan optimalisasi pelaksanaan program pembangunan terkait penanggulangan kemiskinan;
4. Kategori kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi dan persentase penduduk miskin di atas rata-rata provinsi, meliputi: kabupaten Sinjai, Maros, Pangkajene Kepulauan, Barru, Wajo, Sidenreng Rappang, Enrekang, Luwu, dan Luwu Timur. Kabupaten/kota yang berada dalam kelompok kategori ini diharapkan untuk mengoptimalkan upaya peningkatan kinerja pembangunan yang dapat memacu perekonomian wilayah khususnya pada sector-sektor unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja antara lain pengembangan wirausaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang diiringi dengan optimalisasi pelaksanaan program pembangunan terkait penanggulangan kemiskinan.

**b. Pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka**

Persandingan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, memberikan gambaran sebagai berikut:

1. Kategori kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi dan tingkat pengangguran terbuka di bawah angka rata-rata provinsi meliputi: kabupaten

- Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Bone, Soppeng, Pinrang, Tana Toraja, Luwu Utara, dan Toraja Utara. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota tersebut dikontribusi oleh lapangan usaha pertanian sebagai kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kecuali di kabupaten Toraja Utara yang kontributor terbesar terhadap PDRB adalah lapangan usaha perdagangan yang merupakan salah satu lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Kabupaten/kota pada kategori ini diharapkan dapat mempertahankan kinerja pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh peningkatan akses ke pekerjaan berkualitas melalui peningkatan kapasitas SDM;
2. Kategori kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka di bawah rata-rata provinsi meliputi: kabupaten Bulukumba, Sinjai, Wajo, Sidenreng Rappang, Enrekang, Luwu, dan Luwu Timur. Kabupaten pada kategori ini berhasil mendorong penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian yang merupakan kontributor terbesar pada PDRB kabupaten pada kategori ini, kecuali kabupaten Luwu Timur yang PDRBnya dikontribusi oleh lapangan usaha pertambangan sebagai kontributor terbesar yang juga merupakan lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Kabupaten pada kategori ini diharapkan dapat mempertahankan kinerjanya dalam penyerapan tenaga kerja yang diiringi perbaikan kualitas SDM serta memacu pertumbuhan ekonomi berbasis sektor dan komoditas unggulan wilayah;
  3. Kategori kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi dan tingkat pengangguran terbuka di atas rata-rata provinsi, meliputi: kota Makassar dan Parepare. Pertumbuhan ekonomi pada kota Makassar dan Parepare yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi rata-rata provinsi ternyata belum dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka, sehingga diharapkan pemerintah kota Makassar dan Parepare dapat mengoptimalkan program pembangunan yang dapat meningkatkan akses terhadap pekerjaan berkualitas melalui peningkatan kualitas dan kapasitas SDM;
  4. Kategori kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi dan tingkat pengangguran terbuka di atas rata-rata provinsi, meliputi: kota Palopo, kabupaten Maros, Pangkajene Kepulauan, dan Barru. Kabupaten/kota yang berada dalam kelompok kategori ini diharapkan untuk mengoptimalkan upaya peningkatan kinerja pembangunan yang dapat memacu perekonomian wilayah khususnya pada lapangan usaha perdagangan, transportasi dan industri serta pertanian yang merupakan kontributor terbesar bagi PDRB kabupaten/kota melalui peningkatan kualitas dan kapasitas SDM yang diiringi dengan optimalisasi pelaksanaan program pembangunan terkait penanggulangan kemiskinan.

**c. Pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia**

Persandingan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, memberikan gambaran sebagai berikut:

1. Kategori kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di atas rata-rata provinsi meliputi: kota Makassar dan Parepare. Peningkatan kondisi perekonomian di kota Makassar dan Kota Parepare, memberikan peningkatan terhadap kualitas manusia di kota tersebut yang diindikasikan dengan peningkatan angka IPM di atas rata-rata provinsi Sulawesi Selatan yang ditandai dengan peningkatan di semua komponen pembentuk IPM dengan laju pertumbuhan IPM di kota Makassar sebesar 0,74 dan laju pertumbuhan IPM di kota Parepare sebesar 0,66. Memperhatikan peningkatan kinerja tersebut, maka kota Makassar dan kota Parepare diharapkan dapat mempertahankan kinerja tersebut dengan tetap mengoptimalkan kinerja pelayanan dasar;
2. Kategori kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi dan indeks pembangunan manusia di atas rata-rata provinsi meliputi: kota Palopo, kabupaten Enrekang, dan Luwu Timur. Pemerintah kabupaten/kota pada kategori ini telah berhasil

meningkatkan kinerja pelayanan dasar bagi masyarakatnya yang ditandai dengan laju peningkatan indeks pembangunan manusia di atas rata-rata provinsi, namun perlu untuk terus meningkatkan kinerja pembangunan dengan memacu pertumbuhan ekonomi berbasis pada sector dan komoditas unggulan daerah dengan tetap menjaga konsistensi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan terkait pelayanan dasar masyarakat;

3. Kategori kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi dan indeks pembangunan manusia di bawah rata-rata provinsi meliputi: kabupaten Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Bone, Soppeng, Pinrang, Tana Toraja, Luwu Utara, dan Toraja Utara. Kabupaten pada kategori ini pada dasarnya telah memperlihatkan adanya peningkatan kinerja pelayanan dasar yang ditandai dengan peningkatan komponen indeks pembangunan manusia, utamanya pada peningkatan pengeluaran perkapita seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi, namun belum optimal meningkatkan kinerja pelayanan dasar, khususnya pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Untuk itu diharapkan pemerintah kabupaten pada kategori ini dapat meningkatkan kinerja pelayanan dasar melalui optimalisasi program pembangunan pada pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan;
4. Kategori kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di bawah rata-rata provinsi meliputi: kabupaten Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajene Kepulauan, Barru, Wajo, Sidenreng Rappang dan Luwu. Kabupaten/kota yang berada dalam kelompok kategori ini diharapkan untuk mengoptimalkan upaya peningkatan kinerja pembangunan yang dapat memacu perekonomian wilayah khususnya pada lapangan usaha perdagangan, transportasi dan industri serta pertanian yang merupakan kontributor terbesar bagi PDRB kabupaten/kota melalui peningkatan kualitas dan kapasitas SDM yang diiringi dengan peningkatan kinerja pelayanan dasar, khususnya pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar.

## 5.2. Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mengamanatkan Sulawesi Selatan untuk menjadi simpul transportasi, industry, perdagangan melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustry berbasis komoditas unggulan wilayah sebagai penggerak ekonomi dengan mengedepankan keberlanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui arah kebijakan yang difokuskan pada peningkatan akses pelayanan perkotaan dan peningkatan interkoneksi antar pusat kegiatan, antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis potensi sumber daya alam sebagai penggerak utama pengembangan wilayah yang didukung oleh jaringan infrastruktur yang berkualitas dengan tetap mengutamakan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan guna mewujudkan pembangunan Sulawesi Selatan yang berkelanjutan.

Sebagai upaya mengoptimalkan pengembangan wilayah di Sulawesi Selatan, maka ditetapkan arah pengembangan wilayah tahun 2020 guna mencapai tujuan pembangunan Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan peningkatan interkoneksi antar pusat kegiatan, antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan melalui peningkatan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan meningkatkan konektivitas antara pusat kegiatan dengan kawasan perdesaan yang diprioritaskan pada daerah terisolir;
2. pengoptimalan peran dan fungsi pusat-pusat kegiatan guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui hilirisasi pengelolaan komoditas unggulan wilayah guna meningkatkan nilai tambah komoditas dan mampu menciptakan kesempatan kerja,



serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis potensi sumber daya alam sebagai penggerak utama pengembangan wilayah yang didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan dasar dan penguatan kewirausahaan;

3. pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan inklusif dengan meningkatkan kualitas pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan melalui integrasi pembangunan rendah karbon yang berupaya meningkatkan perekonomian wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya dan pembangunan berkeadilan.

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk mendorong pemerataan perkembangan wilayah dengan memperhatikan keterkaitan fungsional antar wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penataan ruang yang diamanatkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan dengan mengacu pada kebijakan penataan ruang nasional berdasarkan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Andalan pada Sistem Nasional dengan mempertimbangkan efektivitas pengelolaan pembangunan.

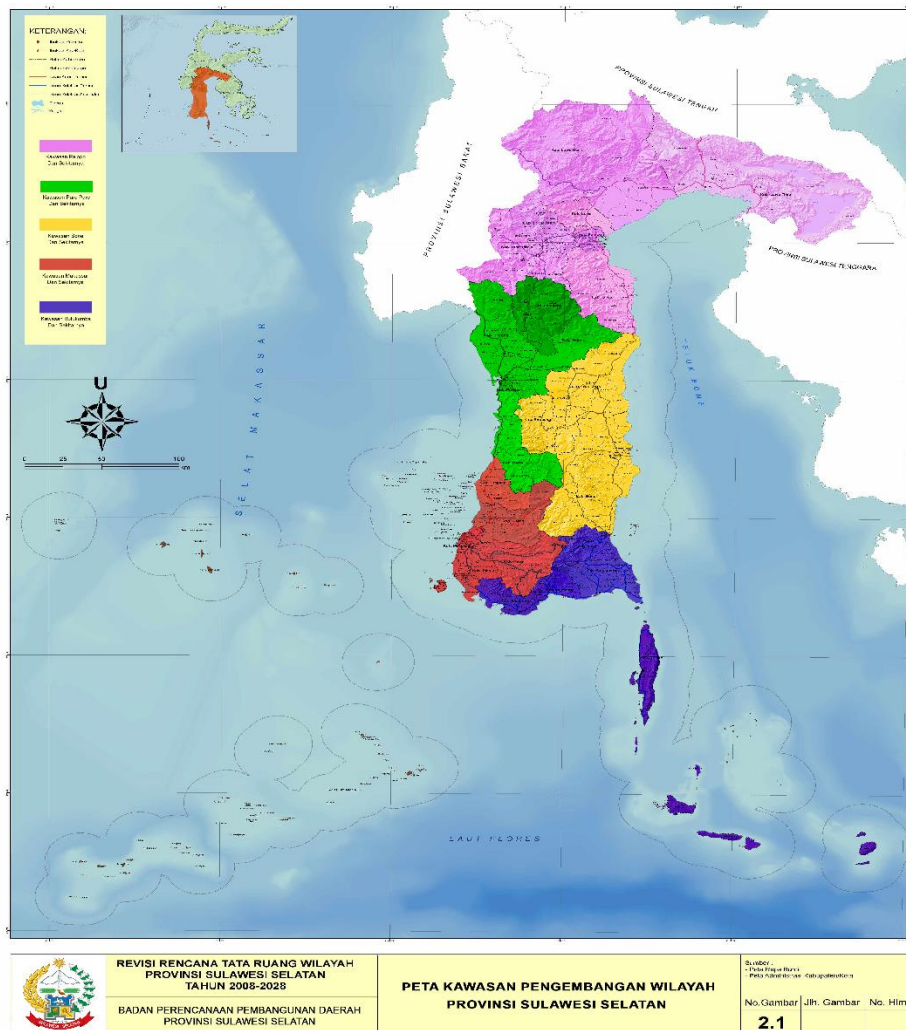
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan 5 (lima) Kawasan strategis Nasional, 4 (empat) Kawasan Andalan, dan 4 (empat) Kawasan Andalan Laut di Provinsi Sulawesi Selatan, maka untuk meningkatkan sinergitas dan integrasi pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan keterkaitan fungsional dan efektivitas pengelolaan pembangunan, maka pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibagi dalam 5 (lima) Wilayah Pengembangan dengan arah kebijakan pengembangannya, yaitu:

1. **Wilayah Pengembangan Makassar dan Sekitarnya**, sebagai pusat pengembangan sentra produksi dari sector unggulan pertanian, dan perikanan yang didukung oleh industry pengolahan berorientasi ekspor, pusat perdagangan dan jasa skala internasional serta pariwisata, khususnya wisata konvensi serta pengembangan industry komoditas pertambangan, serta mengintegrasikan pembangunan rendah karbon pada kawasan Mamminasata melalui pengurangan emisi dengan mengoptimalkan angkutan massal sebagai sarana transportasi perkotaan;
2. **Wilayah Pengembangan Bulukumba dan Sekitarnya**, sebagai pusat pengembangan industry berbasis maritime melalui pengembangan industry perikanan dan pariwisata bahari, dan kawasan industry prioritas nasional berbasis hilirisasi komoditas nikel, serta sebagai salah satu lumbung pangan Sulawesi Selatan yang didukung dengan industry berbasis komoditas pertanian, dan perkebunan, serta peningkatan kualitas pemanfaatan potensi sumber daya kelautan melalui konservasi sumberdaya pesisir dan kelautan;
3. **Wilayah Pengembangan Watampone dan Sekitarnya**, sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat penopang pangan nasional di Sulawesi Selatan yang didukung dengan industry berbasis komoditas pertanian, perkebunan dan pengembangan industry gas bumi. Sebagai upaya menjaga keberlanjutan fungsi kawasan Watampone sebagai penunjang pangan nasional, maka akan dilakukan upaya penyelamatan sumber daya air dan keanekaragaman hayati, khususnya pada danau Tempe yang merupakan danau prioritas nasional;
4. **Wilayah Pengembangan Palopo dan Sekitarnya**, sebagai pusat pengembangan komoditas pertambangan nikel, pengembangan pariwisata alam dan cagar budaya yang didukung oleh industry dan jasa wisata, dan pusat pangan nasional yang didukung dengan industry pengolahan berbasis komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan serta pengoptimalan peran kawasan Palopo sebagai paru-paru Sulawesi Selatan melalui optimalisasi pengelolaan kawasan hutan dan optimalisasi pengelolaan danau Matano sebagai danau prioritas nasional; dan

5. **Wilayah Pengembangan Parepare dan Sekitarnya**, sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat penopang pangan nasional yang didukung dengan pengembangan hilirisasi komoditas peternakan, khususnya sapi dan pengembangan industry berbasis komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan serta optimalisasi pengelolaan sumber daya air guna menjaga keberlanjutan pemenuhan kebutuhan air baku.

Gambar 6.1

Peta Kawasan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: Perda Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang RTRWP Sulsel

### 5.3. Sasaran Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Sesuai dengan tema RKPD Tahun 2020, yaitu "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Sulawesi Selatan yang Inklusif" maka pengembangan wilayah Sulawesi Selatan akan didorong melalui peningkatan produktivitas sector-sector unggulan daerah yang merupakan penopang utama perekonomian Sulawesi Selatan, yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan, industry pengolahan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, dan reparasi mobil dan sepeda motor. Peningkatan kontribusi sector-sector tersebut dilakukan seiring dengan pengembangan pusat kegiatan dan pusat-pusat pertumbuhan yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya hilirisasi pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan konektivitas serta peningkatan kualitas manusia melalui peningkatan pelayanan dasar dengan tetap mengutamakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Memperhatikan kebijakan penataan ruang yang diamanatkan Rencana Tata Ruang baik nasional maupun provinsi, maka kebijakan pengembangan wilayah didasarkan pada potensi dan keunggulan daerah masing-masing wilayah pengembangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.



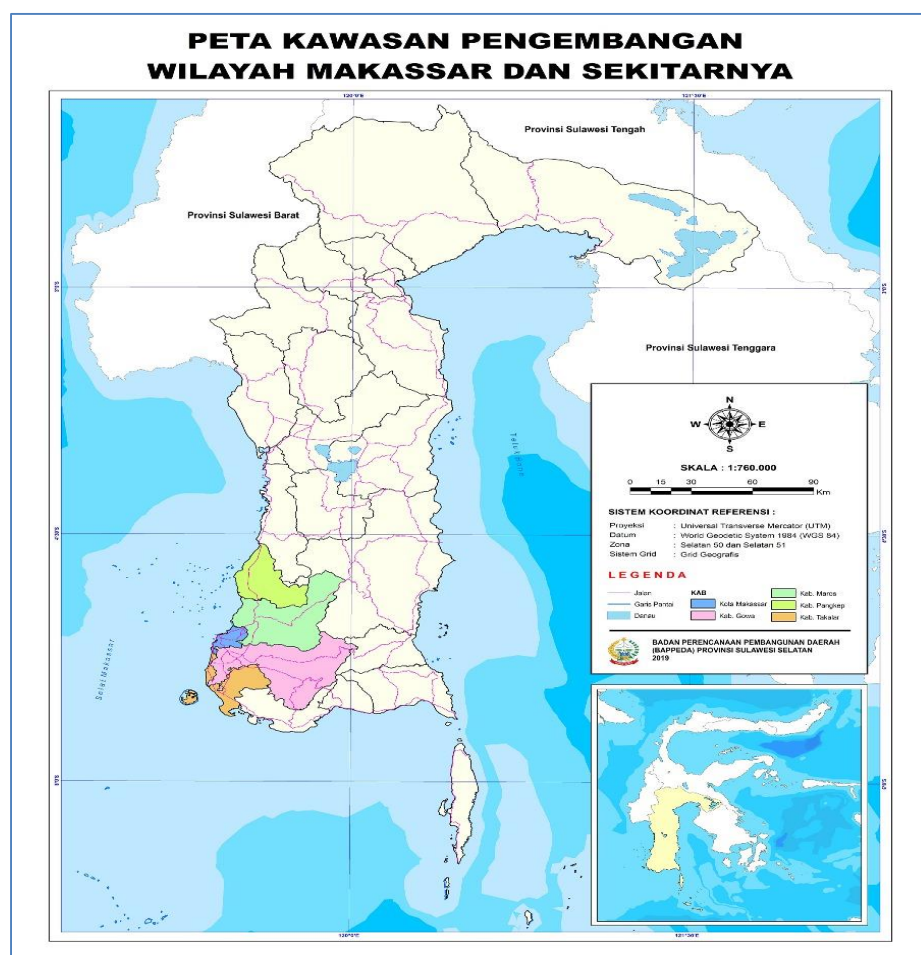
## 1. Kawasan Makassar dan Sekitarnya.

Kawasan Makassar dalam rencana tata ruang berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKN merupakan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Takalar, sebagian wilayah Kabupaten Gowa, dan sebagian wilayah Kabupaten Maros, sedangkan PKW meliputi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kawasan Makassar diarahkan sebagai pusat perdagangan internasional; pusat industri pengolahan komoditas sumber daya alam dan sebagai pusat pariwisata bahari serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE).

Sedangkan pengembangan kawasan Makassar yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah peningkatan pelayanan perkotaan dengan memperhatikan peran kawasan tersebut sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan MAMMINASATA yang berperan sebagai Kawasan Strategis Nasional melalui pengembangan kerjasama antar daerah yang disertai dengan upaya pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah (*ecoregion*) yang antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana, dan mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah sebagai upaya menintegrasikan pembangunan rendah karbon di Sulawesi Selatan, mengingat Kabupaten Maros, Gowa, dan Kabupaten Takalar merupakan wilayah dengan kelas multi resiko bencana tinggi.

Gambar 6.2

Peta Wlayah Pengembangan Kawasan Makassar



Sumber: RTRWP Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2019

**a. Gambaran Indikator Makro Kawasan Makassar dan Sekitarnya**

Kawasan Makassar merupakan penyumbang utama terhadap perekonomian Sulawesi Selatan dengan persentase sebesar 50 persen, yang merupakan terbesar selama 3 (tiga) tahun terakhir dan menunjukkan trend yang semakin meningkat dimana pada Tahun 2015 menyumbang sebesar 49,68 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 50,10 persen.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di kawasan Makassar adalah industry pengolahan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian serta transportasi dan pergudangan.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di kawasan Makassar pada umumnya lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang sebesar 7,23 persen kecuali pada dua kabupaten yang pertumbuhannya lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, yaitu kabupaten Maros yang pertumbuhannya sebesar 6,81 persen dan kabupaten Pangkajene Kepulauan yang pertumbuhannya sebesar 6,60 persen.

Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di kawasan Makassar, memperlihatkan bahwa kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan ternyata memiliki persentase pengangguran terbuka yang terbesar di Sulawesi Selatan sebesar 12,19 persen, demikian juga dengan kabupaten Maros dan kabupaten Pangkajene Kepulauan yang memiliki tingkat pengangguran terbuka lebih besar daripada tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Selatan.

Tingkat kemiskinan kabupaten Pangkajene Kepulauan sebesar 15,10 persen, menempatkan kabupaten Pangkajene Kepulauan sebagai kabupaten kedua setelah kabupaten Jeneponto yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi Selatan, sedangkan kota Makassar merupakan kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 5.3.**  
**Gambaran Indikator Makro Kawasan Makassar Tahun 2018**

No	Kabupaten/Kota	Gambaran Indikator Makro			
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	IPM	Pertumbuhan Ekonomi*
1	Gowa	7,83	4,80	68,87	7.32
2	Makassar	4,41	12,19	81,73	8.23
3	Maros	10,31	6,19	68,94	6.81
4	Pangkajene Kepulauan	15,10	6,91	67,71	6.60
5	Takalar	9.00	3,88	66,07	7.39
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>9,06</b>	<b>5,34</b>	<b>70,90</b>	<b>7,23</b>

Sumber: BPS, Tahun 2019

**b. Sasaran pembangunan kawasan Makassar tahun 2020**

Kawasan Makassar merupakan penggerak utama perekonomian Sulawesi Selatan yang ditandai dengan besarnya kontribusi PDRB provinsi Sulawesi Selatan. Sektor industry pengolahan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian serta transportasi dan pergudangan menjadi sector utama penggerak perekonomian di kawasan ini. Pengembangan di sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional utamanya padi di kabupaten Gowa yang didukung oleh investasi Pemerintah dengan membangun bendungan yaitu Bendungan Karalloe dan rencana pembangunan bendungan Jenelata. Peningkatan peran di sektor perdagangan didorong melalui upaya pengembangan kawasan Makassar sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh pariwisata serta pengembangan hilirisasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan melalui pengembangan industry yang ditunjang

oleh integrasi dengan infrastruktur transportasi untuk perdagangan ke luar Indonesia yaitu Bandar udara Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Makassar, sehingga kawasan Makassar dapat berperan sebagai pusat logistik Sulawesi Selatan.

Penanganan tingkat pengangguran terbuka di kawasan Makassar akan dilakukan melalui kebijakan penguatan pendidikan vokasional yang terintegrasi antara kebutuhan dunia usaha dan industry, sedangkan untuk peningkatan indeks pembangunan manusia dilakukan melalui kebijakan penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana prasarana, teknologi dan pendanaan mikro serta perbaikan kualitas pelayanan dasar khususnya pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.

Dalam rangka pengintegrasian pembangunan rendah karbon, maka di kawasan Makassar akan dilakukan melalui peningkatan penggunaan moda transportasi umum di perkotaan yang diharapkan dapat menyumbang penurunan emisi gas rumah kaca.

Sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2020, maka sasaran pembangunan yang diharapkan dapat dicapai oleh kabupaten/kota di kawasan Makassar adalah sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.4.**  
**Sasaran Pembangunan Kawasan Makassar dan Sekitarnya Tahun 2020**

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN			
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	IPM	Pertumbuhan Ekonomi
1	Gowa	7,7	4,89	70,19	7,3 – 7,7
2	Makassar	4,24	10,26	82,65	8,1 – 8,5
3	Maros	9,84	6,81	70,94	7,0 – 7,4
4	Takalar	8,30	5,28	67,81	7,2 – 7,6
5	Pangkajene Kepulauan	14,57	7,86	71,33	6,4 – 6,8
<b>SULAWESI SELATAN</b>		<b>8,46</b>	<b>5,99</b>	<b>72,18</b>	<b>7,4 – 7,8</b>

Sumber: BPS, diolah Tahun 2019

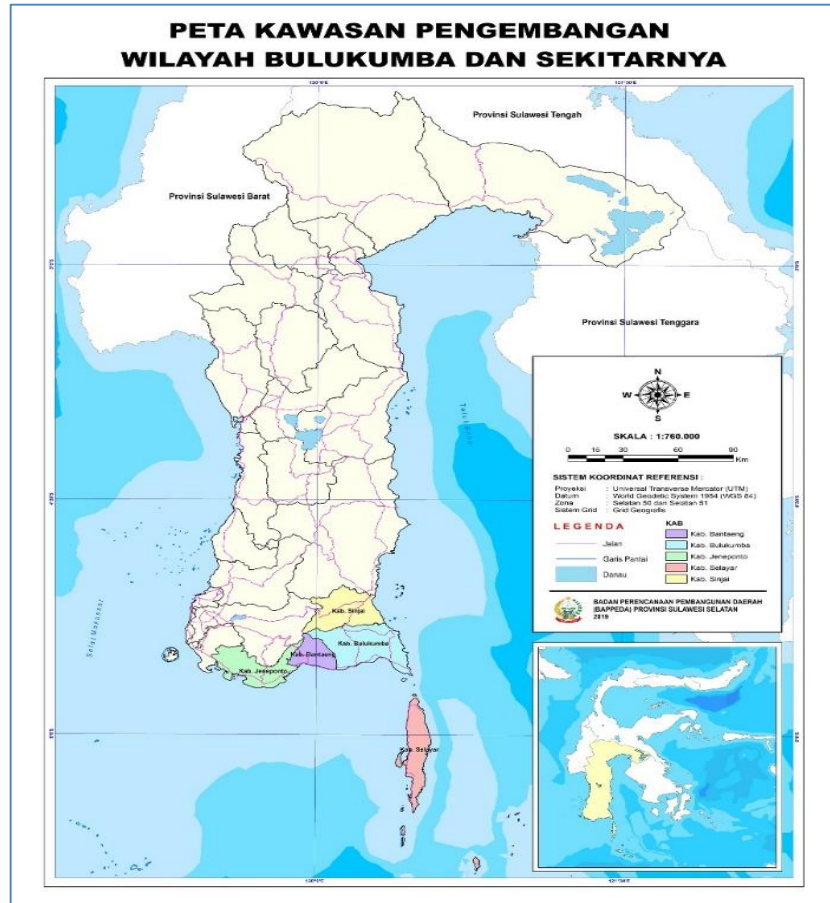
## 2. Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya.

Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya, meliputi Kabupaten Bulukumba, Jeneponto, Sinjai, Bantaeng dan Kepulauan Selayar dengan sector unggulan pertanian, perkebunan, agroindustry, industry, perikanan, dan pariwisata merupakan kawasan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKW meliputi Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bulukumba, sedangkan PKL meliputi Benteng dan Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bantaeng. Kawasan Bulukumba diarahkan sebagai pusat industri pengolahan hasil komoditas pertanian dan perikanan serta pusat industri pengolahan komoditas pertambangan. Kawasan Bulukumba memegang peranan penting sebagai kawasan industry dengan ditetapkannya Kawasan Industri Bantaeng sebagai kawasan industri prioritas nasional.

Sedangkan tujuan pengembangan kawasan Bulukumba yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai pusat pertumbuhan wilayah seiring dengan ditetapkannya Kabupaten Bantaeng sebagai Kawasan Industri Prioritas serta pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang didorong melalui kebijakan hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam khususnya komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan yang didukung kerjasama antar daerah melalui pengembangan pengembangan kawasan agropolitan yang memadukan agroindustry, agrobisnis, agroedukasi, dan agrowisata, peningkatan kompetensi keahlian SDM, peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar masyarakat, dan optimalisasi penurunan emisi gas rumah

kaca melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan khususnya kabupaten Bantaeng dan kabupaten Jeneponto yang merupakan wilayah dengan kelas multi risiko bencana tinggi.

**Gambar 6.3**  
**Peta Wilayah Pengembangan Kawasan Bulukumba**



Sumber: RTRWP Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2019

**a. Gambaran Indikator Makro Kawasan Bulukumba dan Sekitarnya**

Kawasan Bulukumba menyumbang 10,03 persen terhadap perekonomian Sulawesi Selatan, yang menunjukkan trend yang semakin meningkat dimana pada Tahun 2015 menyumbang sebesar 9,94 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 10,03 persen.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di kawasan Bulukumba adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota pada tahun 2017 di kawasan Bulukumba pada umumnya lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang sebesar 7,23 persen kecuali kabupaten Bulukumba yang pertumbuhannya lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 6,92 persen.

Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota tahun 2018 di kawasan Bulukumba, memperlihatkan kinerja yang lebih bagus daripada rata-rata provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,30 persen. Namun tingkat pengangguran kawasan Bulukumba yang lebih baik daripada rata-rata provinsi tidak berdampak positif terhadap persentase penduduk miskin di kawasan Bulukumba. Hal ini tergambar pada tingkat kemiskinan tahun 2018 di kawasan Bulukumba yang lebih tinggi daripada rata-rata tingkat kemiskinan provinsi Sulawesi Selatan, kecuali kabupaten Bulukumba yang persentase penduduk miskinnya sebesar 7,48 persen lebih rendah daripada persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan sebesar 9,06 persen.



Tabel 5.5.  
Gambaran Indikator Makro Kawasan Bulukumba Tahun 2018

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN WILAYAH			
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	IPM	Pertumbuhan Ekonomi*
1.	Bantaeng	9,23	3,69	67,76	7,32
2.	Bulukumba	7,48	3,62	67,70	6,92
3.	Jeneponto	15,48	2,81	63,33	8,26
4.	Kepulauan Selayar	13,13	1,88	66,04	7,61
5.	Sinjai	9,28	2,14	66,24	7,23
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>9,06</b>	<b>5,34</b>	<b>70,90</b>	<b>7,23</b>

Sumber: BPS, diolah Tahun 2019

**b. Sasaran pembangunan kawasan Bulukumba tahun 2020**

Kawasan Bulukumba diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian Sulawesi Selatan yang ditandai dengan semakin meningkatnya kontribusi PDRB kawasan Bulukumba terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industry pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi menjadi sector utama penggerak perekonomian di kawasan ini. Pengembangan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diarahkan untuk menjadi sumber penggerak utama perekonomian kawasan melalui akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam yang didukung oleh peningkatan konektivitas antar wilayah. Peningkatan peran di sektor perdagangan juga akan didorong melalui upaya pengembangan kawasan Bulukumba sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung oleh pariwisata alam dan cagar budaya dengan memanfaatkan peran kawasan pelabuhan Pamatata sebagai pusat distribusi kebutuhan di Kawasan Timur Indonesia dan pengembangan kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Pengembangan dan pementapan fungsi dan peran Kawasan Industri Bantaeng yang merupakan kawasan industry prioritas nasional dengan produk unggulan industry smelter diharapkan dapat lebih meningkatkan peran kawasan Bulukumba sebagai pusat pertumbuhan Sulawesi Selatan.

Sebagai upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia di kawasan Bulukumba, akan dilakukan melalui kebijakan penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana prasarana, teknologi dan pendanaan mikro serta perbaikan kualitas pelayanan dasar khususnya pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan, sedangkan pengurangan persentase penduduk miskin akan dilakukan melalui kebijakan penguatan sumberdaya manusia pelaku usaha dan dukungan sarana, prasarana, teknologi dan penguatan akses usaha mikro,kecil, dan menengah ke layanan keuangan.

Dalam rangka pengintegrasian pembangunan rendah karbon, maka di kawasan Bulukumba akan dilakukan melalui kebijakan peningkatan dan pemeliharaan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut melalui konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir dengan mengoptimalkan fungsi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai perangkat pengendalian pembangunan.

Sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2020, maka sasaran pembangunan yang diharapkan dapat dicapai oleh kabupaten/kota di kawasan Bulukumba adalah sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5.6.  
Sasaran Pembangunan Kawasan Bulukumba Tahun 2020

No	Kabupaten / Kota	SASARAN PEMBANGUNAN			
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	IPM	Pertumbuhan Ekonomi
1	Bantaeng	8,90	3,38	69,36	7,2 -7,6
2	Bulukumba	7,16	3,31	68,90	7,0 – 7,4
3	Jeneponto	14,15	3,97	64,59	7,8 – 8,2
4	Kepulauan Selayar	12,08	3,00	66,84	8,0 – 8,4
5	Sinjai	8,36	3,11	68,18	6,8 – 7,2
<b>SULAWESI SELATAN</b>		<b>8,46</b>	<b>5,99</b>	<b>72,18</b>	<b>7,4 – 7,8</b>

Sumber: BPS, diolah Tahun 2019

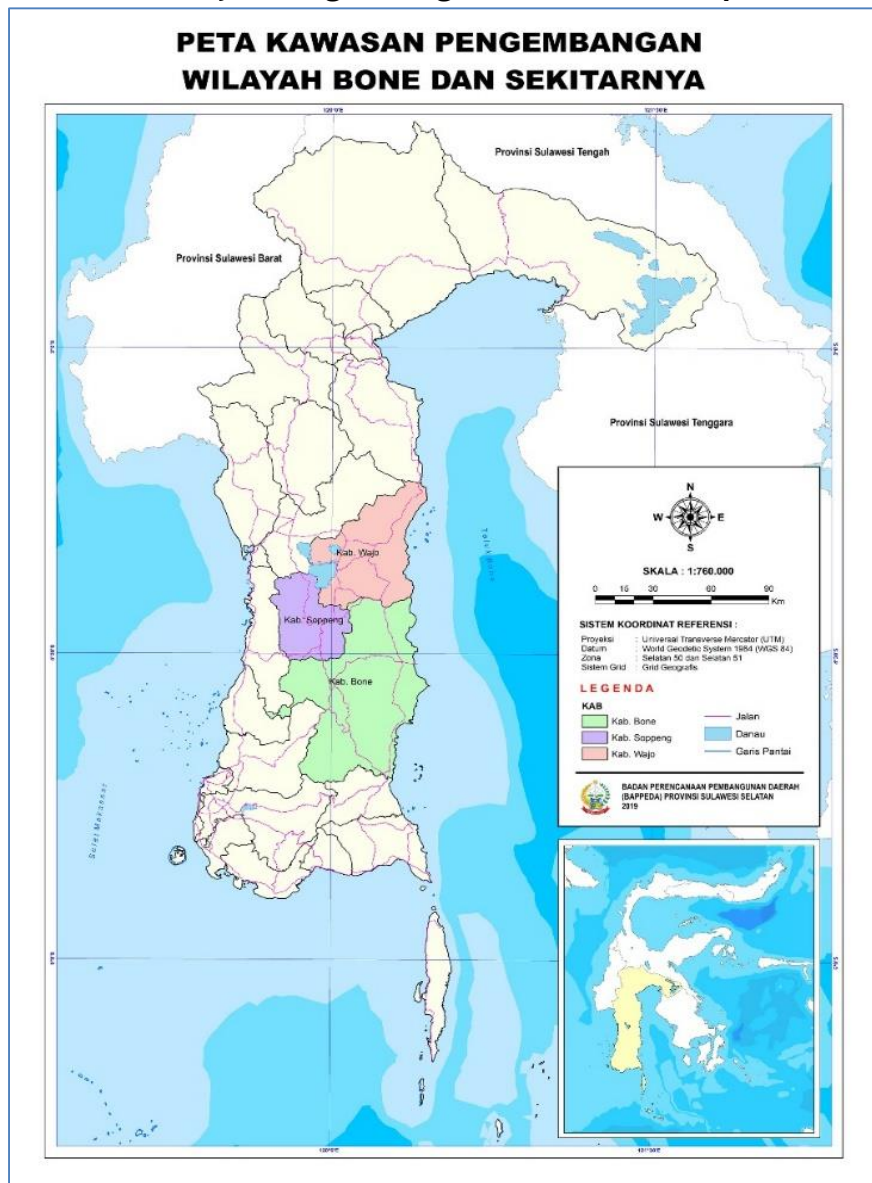
### 3. Kawasan Watampone dan Sekitarnya.

Kawasan Watampone dan Sekitarnya, meliputi Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo, dengan sector unggulan pertanian, perdagangan, dan perikanan merupakan kawasan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKW meliputi Watampone di Kabupaten Bone, sedangkan PKL meliputi Kawasan Perkotaan Watansoppeng di Kabupaten Soppeng dan Sengkang di Kabupaten Wajo. Kawasan Watampone diarahkan sebagai pusat perdagangan dan jasa regional serta pusat industri pengolahan hasil komoditas pertanian dan perikanan.

Sedangkan tujuan pengembangan kawasan Watampone yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai pusat pengembangan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung peran Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan penunjang pangan nasional didukung dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur sumber daya air dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung sumber daya air melalui upaya konservasi sumber air baku. Pembangunan di kawasan Watampone dan sekitarnya dilakukan dengan menerapkan prinsip kerjasama antar daerah guna mengefektifkan dan mengoptimalkan pembangunan antar wilayah, peningkatan kompetensi keahlian SDM, peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar masyarakat, dan optimalisasi penurunan emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memperhatikan kerentanan wilayah terhadap bencana, mengingat Kabupaten Bone, dan Wajo merupakan wilayah dengan kelas resiko multi bencana tinggi.



Gambar 6.4  
Peta Wilayah Pengembangan Kawasan Watampone



Sumber: RTRWP Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2019

**a. Gambaran Indikator Makro Kawasan Watampone dan Sekitarnya**

Kawasan Watampone menyumbang 13,38 persen terhadap perekonomian Sulawesi Selatan, yang menunjukkan trend yang semakin meningkat dimana pada Tahun 2015 menyumbang sebesar 13,30 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 13,38 persen.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di kawasan Watampone adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, dan pertambangan. Hal ini sesuai dengan peran kawasan Watampone sebagai kawasan utama penunjang pangan nasional di Sulawesi Selatan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten di kawasan Watampone tahun 2017 lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang sebesar 7,23 persen kecuali kabupaten Wajo yang pertumbuhannya lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 5,22 persen.

Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota tahun 2018 di kawasan Watampone, memperlihatkan kinerja yang lebih bagus daripada rata-rata provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,30 persen. Kinerja penanganan tingkat pengangguran terbuka kawasan Watampone yang secara rata-rata lebih baik daripada rata-rata provinsi Sulawesi Selatan memberikan dampak positif terhadap persentase penduduk miskin di kawasan Watampone, yang tergambar pada tingkat kemiskinan tahun 2018 di kawasan Watampone yang lebih rendah daripada rata-rata tingkat kemiskinan provinsi Sulawesi Selatan, kecuali kabupaten Bone yang persentase penduduk miskinnya sebesar 10,55

persen lebih tinggi daripada persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan sebesar 9,06 persen.

Tabel 5.7.

Gambaran Indikator Makro Kawasan Watampone Tahun 2018

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN WILAYAH			
		% Penduduk Miskin	Tingkat Penganggura n Terbuka	IPM	Pertumbuhan Ekonomi*
1	Bone	10.55	2,88	65,04	8.43
2	Soppeng	7,50	2,66	67,60	8.34
3	Wajo	7.50	3,79	68,57	5.22
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>9,06</b>	<b>5,34</b>	<b>70,90</b>	<b>7,23</b>

Sumber: BPS, diolah Tahun 2019

**b. Sasaran pembangunan kawasan Watampone tahun 2020**

Kawasan Watampone diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian Sulawesi Selatan yang ditandai dengan semakin meningkatnya kontribusi PDRB kawasan Watampone terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi menjadi sector utama penggerak perekonomian di kawasan ini. Pengembangan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diarahkan untuk menjadi sumber penggerak utama perekonomian kawasan melalui akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam yang didukung oleh peningkatan konektivitas antar wilayah.

Pengembangan di sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional utamanya padi di kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo yang didukung oleh investasi Pemerintah dengan membangun bendungan yaitu Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo dan pemberian hibah pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi melalui program IPDMIP untuk menjaga keberlanjutan system irigasi, mewujudkan ketahanan pangan dan mengurangi persentase penduduk miskin. Peningkatan peran di sektor perdagangan didorong melalui upaya pengembangan kawasan Watampone sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung oleh pengembangan hilirisasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan melalui pengembangan industry yang ditunjang oleh integrasi dengan infrastruktur transportasi untuk perdagangan ke luar wilayah yaitu bandar udara dan pelabuhan pengumpul guna mendukung peran kawasan Watampone sebagai pusat pertumbuhan Sulawesi Selatan.

Sebagai upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia di kawasan Watampone, akan dilakukan melalui kebijakan penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana prasarana, teknologi dan pendanaan mikro serta perbaikan kualitas pelayanan dasar khususnya pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan, sedangkan pengurangan persentase penduduk miskin, khususnya di kabupaten Bone akan dilakukan melalui kebijakan penguatan sumberdaya manusia pelaku usaha dan dukungan sarana, prasarana, teknologi dan penguatan akses usaha mikro, kecil, dan menengah ke layanan keuangan.

Dalam rangka pengintegrasian pembangunan rendah karbon, maka di kawasan Watampone akan dilakukan melalui kebijakan peningkatan dan pemeliharaan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut melalui konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir dengan mengoptimalkan fungsi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai perangkat pengendalian pembangunan serta memperhatikan kerentanan kawasan Watampone terhadap bencana, mengingat kabupaten Bone dan kabupaten Wajo merupakan wilayah dengan kelas risiko multi bencana tinggi.

Sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2020, maka sasaran pembangunan yang diharapkan dapat dicapai oleh kabupaten/kota di kawasan Watampone adalah sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.8.**  
**Sasaran Pembangunan Kawasan Watampone Tahun 2020**

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN			
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	IPM	Pertumbuhan Ekonomi
1	Bone	9,15	4,48	66,37	8,7 – 9,1
2	Soppeng	7,44	4,05	68,08	7,9 – 8,3
3	Wajo	6,73	4,66	70,25	5,0 – 5,4
<b>SULAWESI SELATAN</b>		<b>8,46</b>	<b>5,99</b>	<b>72,18</b>	<b>7,4 – 7,8</b>

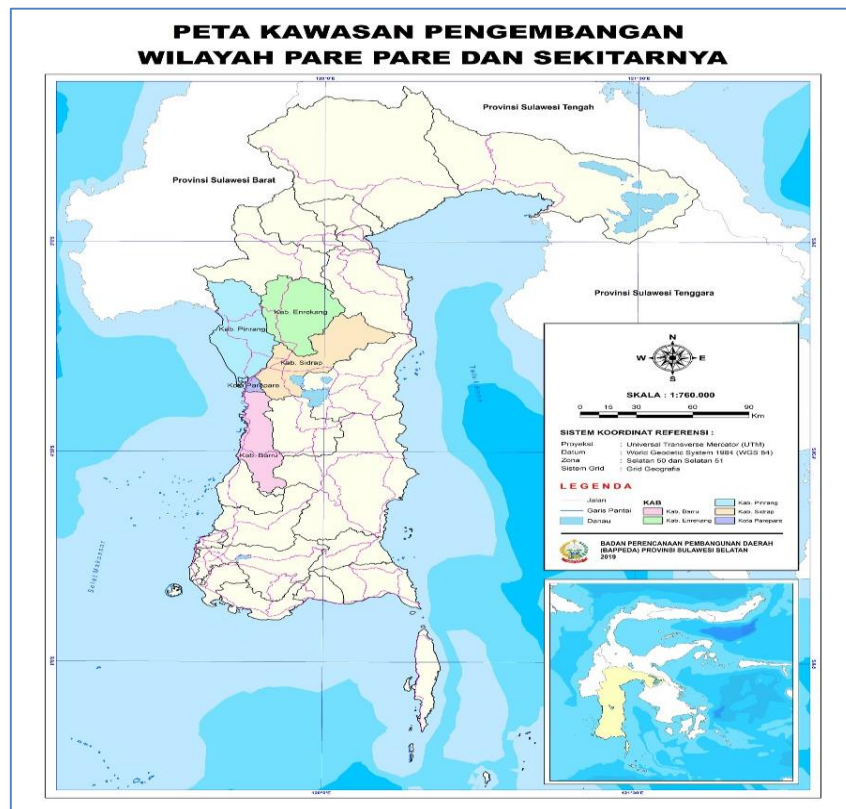
Sumber: BPS, diolah Tahun 2019

#### 4. Kawasan Parepare dan Sekitarnya.

Kawasan Parepare dan Sekitarnya, meliputi Kota Parepare, Kabupaten Barru, Pinrang, Enrekang, Sidenreng Rappang, dengan sector unggulan agroindustry, pertanian, perikanan dan perkebunan merupakan kawasan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKW meliputi Kawasan Perkotaan Barru dan Kota Parepare, sedangkan PKL meliputi Kawasan Perkotaan Enrekang, Kawasan Perkotaan Pinrang, dan Kawasan Perkotaan Pangkajene.

Sedangkan tujuan pengembangan kawasan Parepare yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai sebagai pusat pertumbuhan dengan memperhatikan peran Kawasan Parepare sebagai Kawasan Strategis Nasional yang didukung oleh pengembangan kawasan agropolitan yang memadukan agroindustry, agrobisnis, agroedukasi, dan agrowisata. Kawasan Parepare juga berperan sebagai pusat pengembangan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung peran Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan penunjang pangan nasional dan sebagai lumbung ternak nasional.

**Gambar 6.5**  
**Peta Wilayah Pengembangan Kawasan Parepare**



Sumber: RTRWP Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2019

**a. Gambaran Indikator Makro Kawasan Parepare dan Sekitarnya**

Kawasan Parepare menyumbang 11,13 persen terhadap perekonomian Sulawesi Selatan, yang menunjukkan trend yang semakin meningkat dimana pada Tahun 2015 menyumbang sebesar 11,08 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 11,13 persen.

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di kawasan Parepare adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi dan industry pengolahan. Hal ini sesuai dengan peran kawasan Parepare sebagai Kawasan Strategis Nasional dan kawasan utama penunjang pangan nasional di Sulawesi Selatan. Namun peran kawasan Parepare sebagai kawasan penunjang pangan nasional belum optimal, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di kawasan Parepare tahun 2017 lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang sebesar 7,23 persen kecuali kabupaten Pinrang dan kota Parepare yang pertumbuhannya lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 7,86 persen dan 8,26 persen.

Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota tahun 2018 di kawasan Parepare, memperlihatkan kinerja yang lebih bagus daripada rata-rata provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,30 persen, kecuali di kota Parepare yang tingkat pengangguran terbukanya lebih tinggi daripada tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Selatan yaitu sebesar 6,81 persen. Kinerja penanganan tingkat pengangguran terbuka kawasan Parepare yang secara rata-rata lebih baik daripada rata-rata provinsi Sulawesi Selatan memberikan dampak positif terhadap penurunan persentase penduduk miskin di kawasan Parepare, yang tergambar pada tingkat kemiskinan tahun 2018 di kawasan Parepare yang lebih rendah daripada rata-rata tingkat kemiskinan provinsi Sulawesi Selatan, kecuali kabupaten Enrekang yang persentase penduduk miskinnya sebesar 12,49 persen, lebih tinggi daripada persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan sebesar 9,06 persen.

Selain itu kinerja peningkatan kualitas manusia di kawasan Parepare belum optimal yang ditandai dengan indeks pembangunan manusia yang lebih rendah daripada indeks pembangunan manusia Sulawesi Selatan yaitu di kabupaten Sidenreng Rappang yang IPMnya sebesar 70,60, kabupaten Pinrang IPMnya sebesar 70,62, dan di kabupaten Barru yang angka IPMnya sebesar 70,05.

**Tabel 5.9.**  
**Gambaran Indikator Makro Kawasan Parepare Tahun 2018**

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN WILAYAH			
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	IPM	Pertumbuhan Ekonomi*
1	Barru	9.04	5,38	70,05	6.48
2	Enrekang	12,49	1,66	72,15	6.89
3	Pare-Pare	5.59	6,81	77,19	6.99
4	Pinrang	8,81	3,04	70,62	7.86
5	Sidenreng Rappang	5,16	4,70	70,60	7.11
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>9,06</b>	<b>5,34</b>	<b>70,90</b>	<b>7,23</b>

Sumber: BPS, diolah Tahun 2019

**b. Sasaran pembangunan kawasan Parepare tahun 2020**

Kawasan Parepare sebagai Kawasan Strategis Nasional diharapkan dapat mengoptimalkan perannya untuk menjadi sumber penggerak utama perekonomian Sulawesi Selatan. Namun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di kawasan



Parepare berfluktuasi namun kontribusinya tetap dalam kisaran 11,10 persen, terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, industry pengolahan, dan konstruksi menjadi sector utama penggerak perekonomian di kawasan ini. Pengembangan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diarahkan untuk menjadi sumber penggerak utama perekonomian kawasan melalui akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam yang didukung oleh peningkatan konektivitas antar wilayah karena dinamika sector pertanian, perikanan dan kehutanan berdampak positif terhadap penurunan persentase tingkat kemiskinan di kawasan Parepare.

Pengembangan di sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional utamanya padi di kabupaten Sidenreng Rappang, dan kabupaten Pinrang Wajo yang didukung oleh investasi Pemerintah melalui rencana pembangunan bendungan Boiya di Kabupaten Sidenreng Rappang dan pemberian hibah pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi melalui program IPDMIP untuk menjaga keberlanjutan system irigasi, mewujudkan ketahanan pangan dan mengurangi persentase penduduk miskin.

Peningkatan peran sektor perdagangan di kawasan Parepare didorong melalui upaya pengembangan kawasan Parepare sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung oleh pengembangan hilirisasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan melalui pengembangan industry pengelolaan komoditas pertanian dan peternakan yang ditunjang oleh integrasi dengan infrastruktur transportasi untuk perdagangan ke luar wilayah melalui pelabuhan pengumpul guna mendukung peran kawasan Parepare sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Sulawesi Selatan.

Sebagai upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia di kawasan Parepare, akan dilakukan melalui kebijakan penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana prasarana, teknologi dan pendanaan mikro serta perbaikan kualitas pelayanan dasar khususnya pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan, sedangkan pengurangan persentase penduduk miskin, khususnya di kabupaten Sidenreng Rappang, Pinrang, dan Barru akan dilakukan melalui kebijakan penguatan sumberdaya manusia pelaku usaha dan dukungan sarana, prasarana, teknologi dan penguatan akses usaha mikro, kecil, dan menengah ke layanan keuangan.

Dalam rangka pengintegrasian pembangunan rendah karbon, maka di kawasan Parepare akan dilakukan melalui kebijakan peningkatan dan pemeliharaan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengembangan kawasan Parepare sebagai kawasan perkotaan dengan memperluas jangkauan transportasi umum massal.

Sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2020, maka sasaran pembangunan yang diharapkan dapat dicapai oleh kabupaten/kota di kawasan Parepare adalah sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.10.**  
**Sasaran Pembangunan Kawasan Parepare Tahun 2020**

No	Kabupaten / Kota	SASARAN PEMBANGUNAN			
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	IPM	Pertumbuhan Ekonomi
1	Barru	9,02	5,28	71,63	5,9 – 6,3
2	Enrekang	11,70	3,01	73,69	6,6 – 7,0
3	Pare-Pare	5,15	4,48	78,22	7,0 – 7,4
4	Pinrang	7,86	4,77	71,66	7,4 – 7,8
5	Sidenreng Rappang	4,69	5,31	72,01	7,0 – 7,4
<b>SULAWESI SELATAN</b>		<b>8,46</b>	<b>5,99</b>	<b>72,18</b>	<b>7,4 – 7,8</b>

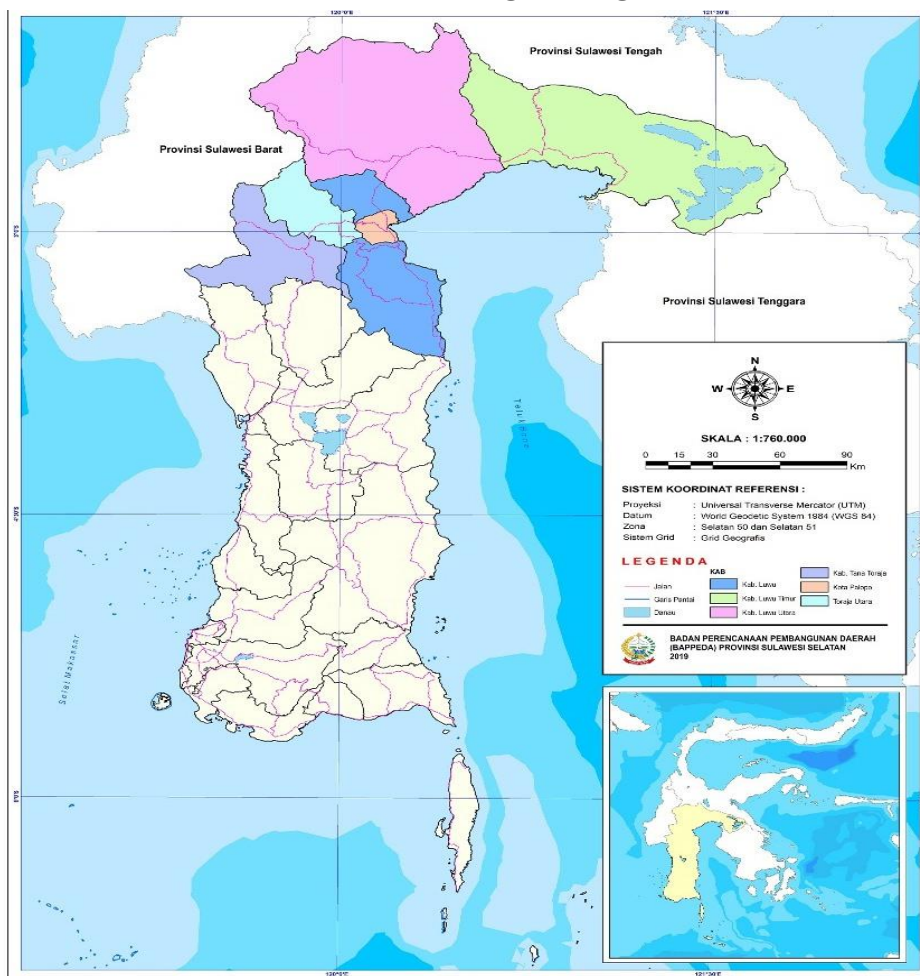
Sumber: BPS, diolah Tahun 2019

## 5. Kawasan Palopo dan Sekitarnya.

Kawasan Palopo dan Sekitarnya, meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan Toraja Utara dengan sector unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan merupakan kawasan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKW meliputi Kota Palopo, sedangkan PKL meliputi Kawasan Perkotaan Masamba di Kabupaten Luwu Utara, Kawasan Perkotaan Belopa di Kabupaten Luwu, Kawasan Perkotaan Malili di Kabupaten Luwu Timur, Kawasan Perkotaan Makale di Kabupaten Tana Toraja, dan Kawasan Perkotaan Rantepao di Kabupaten Toraja Utara.

Sedangkan tujuan pengembangan kawasan Palopo yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kepariwisataan, dengan memperhatikan peran Kabupaten Luwu Utara sebagai bagian dari Kawasan Sorowako yang merupakan Kawasan Strategis Nasional dan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara sebagai bagian dari Kawasan Toraja yang Kawasan Strategis Prioritas Nasional.

**Gambar 6.6**  
**Peta Wilayah Pengembangan Palopo**



### a. Gambaran Indikator Makro Kawasan Palopo dan Sekitarnya

Kawasan Palopo menyumbang 15,34 persen terhadap perekonomian Sulawesi Selatan, yang merupakan kawasan penyumbang terbesar kedua terhadap PDRB Sulawesi Selatan, namun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kontribusi yang semakin menurun dimana pada Tahun 2015 menyumbang sebesar 16,00 persen dan pada tahun 2017 menurun menjadi 15,34 persen. Penurunan kontribusi PDRB kawasan terhadap PDRB Sulawesi Selatan dipicu oleh menurunnya kontribusi PDRB di kabupaten Luwu Timur dan kota Palopo yang cenderung menurun dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir. Hal ini terlihat dari kontribusi PDRB kabupaten Luwu Timur yang pada tahun 2010 sebesar 6,89 persen menurun menjadi 4,81 persen pada tahun 2017 dan PDRB kota Palopo yang pada tahun 2010 berkontribusi sebesar 1,7 persen menurun menjadi 1,56 persen pada tahun 2017.



Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar di kawasan Palopo adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, dan pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Palopo sudah menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam mengembangkan perannya sebagai bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional yaitu Kawasan Toraja yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten Tana Toraja dan kabupaten Toraja Utara yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Demikian halnya dengan kabupaten Luwu Utara yang mengemban peran sebagai pusat kawasan sentra produksi pertanian dan perkebunan, khususnya komoditas kakao dan kopi. Telah menunjukkan peningkatan kinerja yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6 persen di tahun 2017 yang lebih besar daripada tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 7,23 persen.

Akan tetapi pertumbuhan ekonomi kabupaten di kawasan Palopo yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan belum berkontribusi positif terhadap penurunan persentase kemiskinan yang ditunjukkan dengan persentase penduduk miskin tahun 2018 di kabupaten Luwu sebesar 13,36%, di kabupaten Tana Toraja sebesar 12,75 persen, di kabupaten Luwu Utara sebesar 13,69 persen dan di kabupaten Toraja Utara sebesar 13,37 persen yang jauh di atas rata-rata persentase penduduk miskin provinsi Sulawesi Selatan sebesar 9,06 persen.

Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota tahun 2018 di kawasan Palopo, memperlihatkan kinerja yang lebih bagus daripada rata-rata provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,30 persen, kecuali di kota Palopo yang tingkat pengangguran terbukanya lebih tinggi daripada tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Selatan yaitu sebesar 11,60 persen. Namun kinerja penanganan tingkat pengangguran terbuka di kawasan Palopo juga belum berdampak positif terhadap penurunan persentase penduduk miskin.

Selain itu kinerja peningkatan kualitas manusia di kawasan Palopo juga belum optimal yang ditandai dengan indeks pembangunan manusia yang lebih rendah daripada indeks pembangunan manusia Sulawesi Selatan kecuali di kabupaten Luwu Timur yang IPMnya sebesar 72,16 dan kota Palopo yang angka IPMnya sebesar 77,30 yang lebih tinggi daripada angka IPM provinsi Sulawesi Selatan yang besarnya 70,90.

Tabel 5.11.

Gambaran Indikator Makro Kawasan Palopo Tahun 2018

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN WILAYAH			
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	IPM	Pertumbuhan Ekonomi*
1	Luwu	13,36	3,89	69,60	6.79
2	Luwu Timur	7.23	2,18	72,16	3.07
3	Luwu Utara	13,69	3,87	68,79	7.60
4	Palopo	7,94	11,60	77,30	7.19
5	Tana Toraja	12.75	3,07	67,66	7.50
6	Toraja Utara	13,37	2,88	68,49	8.22
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>9,06</b>	<b>5,34</b>	<b>70,90</b>	<b>7,23</b>

Sumber: BPS, diolah Tahun 2019

**b. Sasaran pembangunan kawasan Palopo tahun 2020**

Kawasan Palopo yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Sorowako dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja diharapkan dapat mengoptimalkan perannya untuk menjadi salah satu sumber penggerak utama perekonomian Sulawesi Selatan. Namun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir kontribusi kabupaten/kota di kawasan Palopo terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan terus menurun. Sektor

pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, dan pertambangan tetap menjadi menjadi sector utama penggerak perekonomian di kawasan ini.

Untuk itu, pengembangan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan akan dioptimalisasi untuk menjadi sumber penggerak utama perekonomian kawasan melalui akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam khususnya komoditas kakao dan kopi yang didukung oleh peningkatan konektivitas antar wilayah karena dinamika sector pertanian, perikanan dan kehutanan akan berdampak positif terhadap penurunan persentase tingkat kemiskinan di kawasan Palopo.

Pengembangan di sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan kawasan Palopo sebagai salah satu penyangga pangan Sulawesi Selatan yang berperan sebagai lumbung pangan nasional yang didukung oleh investasi Pemerintah melalui pembangunan bendungan dan peningkatan jaringan di Daerah Irigasi Baliase di kabupaten Luwu Utara.

Peningkatan peran sektor perdagangan di kawasan Palopo didorong melalui upaya optimalisasi peran kawasan Toraja sebagai kawasan strategis pariwisata nasional yang didukung oleh infrastruktur transportasi melalui Bandar udara di kabupaten Toraja Utara dan kabupaten Luwu serta pengembangan pelabuhan pengumpul.

Sebagai upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia di kawasan Palopo, akan dilakukan melalui kebijakan penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana prasarana, teknologi dan pendanaan mikro serta perbaikan kualitas pelayanan dasar khususnya pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan, sedangkan pengurangan persentase penduduk miskin, khususnya di kabupaten Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, dan Toraja Utara akan dilakukan melalui kebijakan penguatan sumberdaya manusia pelaku usaha dan dukungan sarana, prasarana, teknologi dan penguatan akses usaha mikro, kecil, dan menengah ke layanan keuangan.

Dalam rangka pengintegrasian pembangunan rendah karbon, maka di kawasan Palopo akan dilakukan melalui kebijakan peningkatan dan pemeliharaan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan yang persentase luasannya terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tetap memperhatikan resiko bencana, mengingat Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur, Luwu, dan Luwu Utara, merupakan kota/kabupaten dengan kelas multi resiko bencana tinggi.

Sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2020, maka sasaran pembangunan yang diharapkan dapat dicapai oleh kabupaten/kota di kawasan Palopo adalah sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5.12.

Sasaran Pembangunan Kawasan Palopo Tahun 2020

No	Kabupaten / Kota	GAMBARAN KONDISI PEMBANGUNAN WILAYAH			
		% Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka	IPM	Pertumbuhan Ekonomi
1	Luwu	12,64	7,12	72,08	6,6 – 7,0
2	Luwu Timur	6,89	1,27	72,76	3,9 – 4,3
3	Luwu Utara	12,79	2,16	69,79	7,6 – 8,0
4	Palopo	7,74	6,3	78,46	6,8 – 7,2
5	Tana Toraja	11,45	3,34	70,05	7,4 – 7,8
6	Toraja Utara	12,77	1,61	69,80	8,1 – 8,5
<b>SULAWESI SELATAN</b>		<b>8,46</b>	<b>5,99</b>	<b>72,18</b>	<b>7,4 – 7,8</b>

Sumber: BPS, diolah Tahun 2019

**BAB 6**  
**PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

**PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

Final RKP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
							Renja	Usulan Masyarakat yang diakomodir	Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan		Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1	2				3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1.01	0	Pendidikan																
1.01	0	01.00	Dinas Pendidikan										581,782,080,923.39	603,345,418,389.43				
1.01	0	01.00	0	0	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS (Prioritas)	Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Angka Partisipasi Kasar (APK) (Prioritas)	88.7					527,203,518,279.0	546,775,081,644.16	Dinas Pendidikan	
	1		1					Angka Partisipasi Murni (APM) (Prioritas)	63.5									
								% Jumlah warga negara usia 16 ã€“ 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	75.25 %									
1.01	0	01.00	0	0	Pelaksanaan Pelayanan Peserta Didik Berbasis Zonasi		Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Zona Pelayanan Peserta Didik	1 Zona Pelayanan	Terlaksananya Pelaksanaan Pelayanan Peserta Didik Berbasis Zonasi	1 Kegiatan	320,000,000.0	315,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0	01.00	0	0	Pelaksanaan Pelayanan Peserta Didik Home Schooling		Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Unit Pelayanan Home Schooling dan Mobile Schooling	2 Unit	Terselenggaranya Pelaksanaan Pelayanan Peserta Didik Home Schooling dan Mobile Schooling	2 Kegiatan	600,000,000.0	650,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0	01.00	0	0	Pelaksanaan Pengelolaan DAK Reguler SMA		Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Sarana/Prasarana yang Akan diadakan	150 Sekolah	Terselenggaranya Pelaksanaan Pengelolaan DAK Reguler SMA	150 Unit	46,618,518,279.0	56,010,081,644.16	Dinas Pendidikan	
1.01	0	01.00	0	0	Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK		Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Sarana/Prasarana yang Diadakan	112 Sekolah	Terselenggaranya Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK	112 Kegiatan	105,000,000,000.0	105,500,000,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	01	01.00	01	005	Pelaksanaan Pengelolaan DAK Reguler SLB			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sarana/Prasarana yang Diadakan	46 Sekolah	Terselenggaranya Pelaksanaan Pengelolaan DAK Reguler SLB	46 Kegiatan	3,500,000,000.0	4,000,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	01	006	Pembangunan Prasarana Pembelajaran SMA			Provinsi Sulawesi Selatan	#		Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan USB/RKB/LAB/Perpustakaan/Halaman/Pagar SMA	10 Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pembelajaran SMA	10 Unit	2,700,000,000.0	3,200,000,000.0	Dinas Pendidikan	
									# Ara Bonto Bahari Bulukumba Regency									
									# Jl. Bonto Biraeng Barombong Tamalate									
									# Sakkoli Sajoanging Wajo Regency									
									# SMAN 1 Bastem Desa Pantilang kec.Basse Sangtempe Utara Kab.Luwu Pantilang Basesangtempe Luwu Regency									
									#8 SMAN Kab Soppeng Soppeng Regency South Sulawesi ID									
									#Desa Padangbalua Kec.Seko kab.Luwu Utara Seko North Luwu Regency South Sulawesi									
									#Kec. Angkona Kab. Luwu Timur Angkona East Luwu Regency South Sulawesi									
									#Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur Kalaena East Luwu Regency South Sulawesi									
									#Kec. Malili Kab. Luwu Timur Malili East Luwu Regency South Sulawesi									







								#Lembang Leppan Kec.Malimbong Balepe Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan											
								#Lembang Randan Batu Kecamatan Makale Selatan Makale Sel. Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan											
								#SMA KRISTEN MIALLO Mappak Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan											
								#SMA Negeri 13 Luwu Timur Towuti East Luwu Regency South Sulawesi											
								#SMA Negeri 15 Luwu Utara Onondoa Rampi North Luwu Regency											
								#SMA Negeri 3 Bone Biru Tanete Riattang Bone Regency											
								#SMA Unggulan Kassiloe Kassi Loe Labakkang Pangkajene Dan Kepulauan Regency											
								#SMAN 1 BITTUANG Kec.Bittuang Bittuang Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan											
								#SMAN 1 Sinjai Kecamatan Sinjai Utara Kab. Sinjai											



									#SMAN 8 Dusun Kalimbu Kecamatan Sinjai Borong								
									#SMAN 8 Saluputti Saluputti Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan								
									#SMAN 9 Sinjai Dusun Bontoasa kecamatan tellulimpoe								
									#SMAN 9 Tana Toraja Kec.Gandangba tu Silanan Gandang Batu Silanan Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan								
									#Ujungbulu Bulukumba Regency South Sulawesi ID								
									#Ujungloe Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan ID								
1.01	0 1	01.00	0 1	0 0 7	Pembangunan Prasarana Pembelajaran SMK			Provinsi Sulawesi Selatan	# Eremerasa Bantaeng Regency South Sulawesi	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembanguna n USB/ RKB/ Lab/ Perpustakaan / Halaman/Pag ar SMK	10 Sekolah	Terlaksananya Pembanguna n Prasarana Pembelajaran SMK	10 Unit	3,200,000,000.0	3,700,000,000.0	Dinas Pendidikan	
									# Kindang Bulukumba Regency South Sulawesi								
									#4 SMKN Kab Soppeng Soppeng Regency South Sulawesi ID								
									#Desa Galung Kec. Barru Kab. Barru Sulawesi Selatan Galung Barru Sub- District Barru Regency								
									#Herlang Hero Lange-Lange Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan								







1.01	01	01.00	01	008	Pembangunan Prasarana Pembelajaran SLB			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Perpustakaan SLB	5 Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pembelajaran SLB	5 Unit	2,150,000,000.0	2,350,000,000.0	Dinas Pendidikan	
											Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan RKB SLB	5 Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pembelajaran SLB	5 Unit				
											Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan USB	5 Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pembelajaran SLB	5 Unit				
1.01	01	01.00	01	009	Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Pembelajaran SMA			Provinsi Sulawesi Selatan	# Baranti Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi		Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Ruang Kelas/LAB/Perpustakaan/Halaman SMA	10 Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Pembelajaran SMA	10 Unit	2,000,000,000.0	2,500,000,000.0	Dinas Pendidikan	
									# Batu Lappa Watang Pulu Sidenreng Rappang Regency									
									# Caile Ujung Bulu Bulukumba Regency									
									# Corawali Panca Lautang Sidenreng Rappang Regency									
									# Jl. Wolter Monginsidi Rijang Pitu Maritengngae									
									# No Jalan Pendidikan II 9 Batu									
									# Rappang Panca Rijang Sidenreng Rappang Regency									
									# Rijang Pitu Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang									
									# Tanru Tedong Duapitue Sidenreng Rappang Regency									
									# Teppo Tellulimpo E Sidenreng Rappang Regency									



								#SMAN 3 Wajo Mattiroappareng Tempe Wajo Regency									
								#SMAN 7 Wajo Jl. Cendana Lapongkoda Tempe									
								#ujungbulu Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan									
1.01	0 1	01.00	0 1	0 1 0	Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Pembelajaran SMK		Provinsi Sulawesi Selatan	# Bulu Cenrana Pitu Riawa Sidenreng Rappang Regency	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Ruang Kelas/Perpustakaan/Halaman SMK	10 Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Pembelajaran SMK	10 Unit	2,000,000,000.0	2,500,000,000.0	Dinas Pendidikan		
								# Ciro-Ciroe Watang Pulu Sidenreng Rappang Regency									
								# Maritengngae Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi									
								# Panca Lautang Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi									
								# Panca Rijang Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi									
								# Pangkajene Maritengngae Sidenreng Rappang Regency									
								# Rappang Panca Rijang Sidenreng Rappang Regency									
								#Kec. Burau Kab. Luwu Timur Burau East Luwu Regency South Sulawesi									
								#Kec. Malili Kab. Luwu Timur Malili East Luwu Regency South Sulawesi									

									#Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur East Tomoni East Luwu Regency South Sulawesi									
									#Kindang Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan									
									#SMK Mandala Bakti Palopo Wara Palopo City									
									#SMK Muhammadiyah Kota Pare- pare Pare-Pare City South Sulawesi ID									
									#SMKN 2 Wajo Pitumpunua Wajo Regency South Sulawesi									
									#SMKN 4 Wajo Sajoanging Wajo Regency South Sulawesi									
									#SMKN 6 Wajo Sompe Sabbang Paru Wajo Regency									
									#Ujungloe Salemba Ujung Loe Kabupaten Bulukumba									
1.01	0 1	01.00	0 1	0 1 1	Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Pembelajaran SLB			Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Ruang Kelas/Perpustakaan/Halaman SLB	5 Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Pembelajaran SLB	5 Unit	1,000,000,000.0	1,500,000,000.0	Dinas Pendidikan		
1.01	0 1	01.00	0 1	0 1 2	Pembangunan Prasarana Pendukung Lainnya Bagi SMA			Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah Ruang Pendukung Lainnya SMA yang Dibangun (Ruang Perkantoran, Tempat Ibadah, Jamban/Toilet, Kantin, UKS, Gudang, Bak Sampah	3 Ruang	Terselenggaranya Pembangunan Prasarana Pendukung Lainnya Bagi SMA	3 Unit	1,000,000,000.0	1,500,000,000.0	Dinas Pendidikan		

1.01	01	01.00	01	013	Pembangunan Prasarana Pendukung Lainnya Bagi SMK			Provinsi Sulawesi Selatan	#SMK 4 Pangkep Balocci Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi		Jumlah Ruang Pendukung Lainnya SMK yang Dibangun (Ruang Perkantoran, Tempat Ibadah, Jamban/Toilet, Kantin, UKS, Gudang, Bak Sampah)	4 Ruang	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pendukung Lainnya Bagi SMK	4 Unit	1,250,000,000.0	1,500,000,000.0	Dinas Pendidikan		
									#SMK Negeri 1 Makassar Makassar Makassar City South Sulawesi										
									#SMK Negeri 3 Makassar Makassar Makassar City South Sulawesi										
									#SMK Negeri 7 Makassar Makassar Makassar City South Sulawesi										
									#SMK Negeri 8 Makassar Makassar Makassar City South Sulawesi										
1.01	01	01.00	01	014	Pembangunan Prasarana Pendukung Lainnya Bagi SLB			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Kantor	1 Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pendukung Lainnya bagi SLB	1 Sekolah	750,000,000.0	1,000,000,000.0	Dinas Pendidikan		
											Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah	1 Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pendukung Lainnya bagi SLB	1 Sekolah					
											Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Asrama Siswa	2 Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pendukung Lainnya bagi SLB	2 Sekolah					
											Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Bantuan Pembangunan Pagor/Halaman	3 Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pendukung Lainnya bagi SLB	3 Sekolah					
1.01	01	01.00	01	015	Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan SMA			Provinsi Sulawesi Selatan	# Dannuang Ujung Loe Bulukumba Regency		Jumlah Sarana Pendidikan yang	10 Unit	Terlaksananya Pengadaan Sarana Pembelajaran	10 Kegiatan	1,400,000,000.0	1,500,000,000.0	Dinas Pendidikan		





								#Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur Mangkutana East Luwu Regency South Sulawesi												
								#Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur Tomoni East Luwu Regency South Sulawesi												
								#Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur East Tomoni East Luwu Regency South Sulawesi												
								#Kec. Towuti Kab. Luwu Timur Towuti East Luwu Regency South Sulawesi												
								#Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur Wasuponda East Luwu Regency South Sulawesi												
								#Kec. Wotu Kab. Luwu Timur Wotu East Luwu Regency South Sulawesi												
								#Kelurahan Rantepao, Keca matan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara North Toraja Regency South Sulawesi ID												
								#Kelurahan Rantepao, Keca matan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara Rantepao North Toraja Regency South Sulawesi												
								#Kelurahan Sanrobone Sanrobone Takalar Regency South Sulawesi												



									#SMAN 4 Pangkep Pangkajene Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi								
									#SMAN 4 TANA TORAJA Sanggalla Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan								
									#SMAN 8 TANA TORAJA Saluputti Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan								
									#SMAN 9 TANA TORAJA Gandang Batu Silanan Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan								
									#ujungbulu Bulukumba Regency South Sulawesi ID								
1.01	0 1	01.00	0 1	0 1 6	Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan SMK			Provinsi Sulawesi Selatan	# Binturu Larompong Luwu Regency # Padang Tuju Bupon Luwu Regency # Tamuku Bone- Bone North Luwu Regency # Tullak Tallu Sabbang North Luwu Regency #Kec. Lalabata, Kec. Citta, Kec. Donri-donri, Kec. Marioriwawo, Kec. Marioriawa, Kec. Ganra, Kec. Liliiraja, Kec. Liliirilau Soppeng Regency South Sulawesi ID #Kec. Malili Kab. Luwu Timur Malili East Luwu Regency South Sulawesi		Jumlah Sarana Pendidikan yang Diadakan (Mobiler,Kom puter,Alat Peraga,DII)	3 Unit	Terlaksananya Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan SMK	3 Kegiatan	350,000,000.0	375,000,000.0	Dinas Pendidikan



									#SMKN 9 JENEPONTO Tamalatea Jeneponto Regency South Sulawesi										
1.01	0 1	01.00	0 1	0 1 7	Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan SLB			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sarana Pendidikan yang Diadakan (Mobiler, Komputer, Alat Peraga, Dll)	3 Unit	Terlaksananya Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan SLB	3 Kegiatan	400,000,000.0	450,000,000.0	Dinas Pendidikan		
1.01	0 1	01.00	0 1	0 1 8	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa Se Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sekolah Negeri yang Mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah	519 Sekolah	Terlaksananya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa Se Sulawesi Selatan	100 %	347,750,000,000.0	352,750,000,000.0	Dinas Pendidikan		
1.01	0 1	01.00	0 1	0 1 9	Pembinaan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Terkait Pengelolaan Dana BOS	12 Bulan	Terlaksananya Pembinaan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1 Kegiatan	150,000,000.0	175,000,000.0	Dinas Pendidikan		
1.01	0 1	01.00	0 1	0 2 0	Peningkatan Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Menengah SMA, SMK, dan SLB Non PNS			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Penerima Insentif PTK SMA, SMK, dan SLB	50 Orang	Terlaksananya Peningkatan Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Menengah SMA, SMK, dan SLB Non PNS	1 Kegiatan	120,000,000.0	140,000,000.0	Dinas Pendidikan		
1.01	0 1	01.00	0 1	0 2 2	Penguatan Kelembagaan Pendidikan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Komite Sekolah, MGMP, MKKS, MKPS, dan Dewan Pendidikan	50 Orang	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pendidikan	1 Kegiatan	145,000,000.0	160,000,000.0	Dinas Pendidikan		
1.01	0 1	01.00	0 1	0 2 3	Iklan Layanan Masyarakat			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Iklan Layanan Masyarakat	5 Iklan	Terlaksananya Iklan Layanan Masyarakat	5 Kegiatan	95,000,000.0	115,000,000.0	Dinas Pendidikan		
1.01	0 1	01.00	0 1	0 2 4	Penanganan Pengaduan Pelayanan Pendidikan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan Pendidikan	30 Dokumen	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Pelayanan Pendidikan	30 Kegiatan	40,000,000.0	60,000,000.0	Dinas Pendidikan		

1.01	0 1	01.00	0 1	0 2 5	Izin Operasional Kelembagaan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kelembagaan SMA, SMK, SLB yang Mendapatkan Izin Operasional	10 Sekolah	Terlaksananya izin Operasional Kelembagaan	10 Kegiatan	55,000,000.0	60,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 1	0 2 6	Motivasi Warga Belajar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Keaksaraan Fungsional			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pelajar Pendidikan Keaksaraan Fungsional	30 Orang	Terlaksananya Motivasi Warga Belajar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Keaksaraan Fungsional	1 Kegiatan	115,000,000.0	125,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 1	0 2 7	Kampanye Peningkatan Partisipasi dalam Pendidikan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kegiatan Partisipasi Pendidikan yang diselenggarakan	1 Kegiatan	Telaksananya Kegiatan Kampanye Peningkatan Partisipasi	1 Kegiatan	110,000,000.0	120,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 1	0 2 8	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas I			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas	1 Kegiatan	Terlaksananya Operasional Manajemen Cabang Dinas	100 %	350,000,000.0	360,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 1	0 2 9	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan	1 Kali	225,000,000.0	240,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 1	0 3 0	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas II			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas	1 Kegiatan	Terlaksananya Operasional Manajemen Cabang Dinas	100 %	350,000,000.0	360,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 1	0 3 1	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas III			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas	1 Kegiatan	Terlaksananya Operasional Manajemen Cabang Dinas	100 %	350,000,000.0	360,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 1	0 3 2	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas IV			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas	1 Kegiatan	Terlaksananya Operasional Manajemen Cabang Dinas	100 %	350,000,000.0	360,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 1	0 3 3	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas V			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas	1 Kegiatan	Terlaksananya Operasional Manajemen Cabang Dinas	100 %	350,000,000.0	360,000,000.0	Dinas Pendidikan	



1.01	01	01.00	01	034	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas VI			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas	1 Kegiatan	Terlaksananya Operasional Manajemen Cabang Dinas	100 %	300,000,000.0	310,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	01	035	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas VII			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas	1 Kegiatan	Terlaksananya Operasional Manajemen Cabang Dinas	100 %	350,000,000.0	360,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	01	036	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas VIII			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas	1 Kegiatan	Terlaksananya Operasional Manajemen Cabang Dinas	100 %	350,000,000.0	360,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	01	037	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas IX			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas	1 Kegiatan	Terlaksananya Operasional Manajemen Cabang Dinas	100 %	360,000,000.0	370,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	01	038	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas X			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas	1 Kegiatan	Terlaksananya Operasional Manajemen Cabang Dinas	100 %	350,000,000.0	360,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	01	039	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas XI			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas	1 Kegiatan	Terlaksananya Operasional Manajemen Cabang Dinas	100 %	350,000,000.0	360,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	01	040	Pembinaan Manajemen Pelayanan Cabang Dinas XII			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kegiatan Pelayanan Cabang Dinas	1 Kegiatan	Terlaksananya Operasional Manajemen Cabang Dinas	100 %	350,000,000.0	360,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	02		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN VOKASIONAL (Prioritas)</b>	<b>Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru dan Pengembangan Destinasi Wisata</b>	<b>Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat</b>			<b>Jumlah peserta didik yang menerima pembiayaan gratis pendidikan life skill/kejuruan</b>	<b>150 Orang</b>				<b>522,581,804.0</b>	<b>541,950,925.46</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	
										<b>% Tamatan SMK yang bekerja 3 bulan setelah tamat (Prioritas)</b>	<b>45.6 %</b>							
1.01	01	01.00	02	001	Pengembangan Program Studi Keahlian (Kurikulum) Berbasis Keunggulan Lokal			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Program Studi/Kurikulum Keunggulan Lokal	1 Sekolah	Terlaksananya Pengembangan Program Studi Keahlian (Kurikulum) Berbasis Keunggulan Lokal	1 Kegiatan	5,000,000.0	5,500,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	0 1	01.00	0 2	0 0 2	Pengembangan Program Studi Keahlian (kurikulum) Berbasis Keunggulan Dunia Industri dan Dunia Usaha			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sekolah yang Menerapkan Pengembangan Program Studi Keahlian Berbasis Keunggulan Industri SMK	10 Sekolah	Terlaksananya Pengembangan Program Studi Keahlian (kurikulum) Berbasis Keunggulan Dunia Industri dan Dunia Usaha	1 Kegiatan	85,950,000.0	89,250,925.46	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 2	0 0 3	Pengembangan Program Kewirausahaan (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan)			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Program Pendidikan Kewirausahaan yang Dikembangkan	15 Sekolah	Terlaksananya Pengembangan Program Kewirausahaan (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan)	1 Kegiatan	68,400,000.0	70,400,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 2	0 0 4	Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	50 Orang	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	1 Kegiatan	130,800,000.0	135,800,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 2	0 0 5	Penguatan Unit Produksi Siswa berbasis Sekolah (Teaching Factory)			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa yang Terlibat Dalam Unit Produksi	75 Orang	Terselenggaranya Penguatan Unit Produksi Siswa berbasis Sekolah (Teaching Factory)	1 Kegiatan	104,431,804.0	106,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 2	0 0 6	Pengembangan Kemitraan Strategis antara Sekolah, DUDI, Lembaga Kursus dan Perguruan Tinggi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa dan Sekolah Yang Terlibat Kemitraan Strategis	40 Orang	Terlaksananya Pengembangan Kemitraan Strategis antara Sekolah, DUDI, Lembaga Kursus dan Perguruan Tinggi	1 Kegiatan	78,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 2	0 0 7	Pengembangan Kompetensi Keahlian Berbasis Produksi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Program Studi Keahlian Berbasis Produksi Yang Dikembangkan	1 Studi	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Keahlian Berbasis Produksi	1 Kegiatan	5,000,000.0	5,500,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	01	01.00	02	008	Pengembangan Kompetensi Keahlian Berbasis Keunggulan Lokal			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Program Studi Keahlian Produksi Berbasis Keunggulan Lokal Yang Dikembangkan	1 Studi	Terlaksananya a Pengembangan Kompetensi Keahlian Berbasis Keunggulan Lokal	1 Kegiatan	5,000,000.0	5,500,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	02	009	Bimtek Pengembangan Kewirausahaan SMK Bidang Keahlian, Kemaritiman dan Agrobisnis/Agroteknologi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru Yang Mengikuti Bimtek	2 Orang	Terlaksananya a Bimtek Pengembangan Kewirausahaan SMK Bidang Keahlian, Kemaritiman dan Agrobisnis/Agroteknologi	1 Kegiatan	5,000,000.0	5,500,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	02	010	Fasilitasi Pelaksanaan Academy of Community			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Academy Of Community Yang Terbentuk	1 Akademi	Terlaksananya a Fasilitasi Pelaksanaan Academy of Community	1 Kegiatan	5,000,000.0	5,500,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	02	011	Pelaksanaan Penilaian Peserta Didik SMK Berbasis IT			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SMK Yang Mengikuti Penilaian Berbasis Komputer	1 Orang	Terselenggaranya Pelaksanaan Penilaian Peserta Didik SMK Berbasis IT	1 Kegiatan	5,000,000.0	5,500,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	02	012	Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Industri SMK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru Yang Mengikuti Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Industri SMK	1 Orang	Terlaksananya a Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Industri SMK	1 Kegiatan	5,000,000.0	5,500,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	02	013	Pemetaan Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Lokasi Pemetaan Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)	1 Lokasi	Terlaksananya a Pemetaan Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)	1 Kegiatan	5,000,000.0	5,500,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	02	014	Workshop Manajemen Berbasis Sekolah SMK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kepala Sekolah Yang Telah Mengikuti Workshop Manajemen Berbasis Sekolah SMK	1 Orang	Terlaksananya a Workshop Manajemen Berbasis Sekolah SMK	1 Kegiatan	5,000,000.0	5,500,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	01	01.00	02	015	Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah SMK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Operator/Teknisi Sekolah Yang Telah Mengikuti Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah SMK	1 Orang	Terlaksananya Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah SMK	1 Kegiatan	5,000,000.0	5,500,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	02	016	Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum SMK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah sekolah yang melaksanakan kurikulum	10 Sekolah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum SMK	1 Kegiatan	5,000,000.0	5,500,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	03		<b>PROGRAM PENDIDIKAN SISWA KEBUTUHAN KHUSUS (Prioritas)</b>	<b>Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan</b>	<b>Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>			<b>% Jumlah warga negara usia 4 â€” 18 tahun yang termasuk dalam penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)</b>	<b>81 %</b>				<b>178,453,568.0</b>	<b>185,067,821.78</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	
1.01	01	01.00	03	001	Workshop Pengembangan Kurikulum PK-PLK 2013			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Workshop Pengembangan Kurikulum PK-PLK 2013	2 Orang	Terlaksananya Workshop Pengembangan Kurikulum PK-PLK 2013	1 Orang	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	03	002	Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi	3 Orang	Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	03	003	Pelatihan Keterampilan Siswa PK/PLK			Provinsi Sulawesi Selatan			Persiapan Jumlah Siswa PK-PLK yang Dilatih	2 Orang	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Siswa PK-PLK	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	03	004	Sosialisasi Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru PK-PLK yang Mengikuti Sosialisasi Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	2 Orang	Terlaksananya Sosialisasi Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	03	005	Sosialisasi Sekolah Inklusi dan Ramah Anak			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru yang Mengikuti Workshop Sekolah Inklusi dan Ramah Anak	4 Orang	Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Inklusi dan Ramah Anak	1 Kegiatan	14,200,000.0	14,300,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	01	01.00	03	006	Workshop Ketunaan Guru PK-PLK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Workshop Ketunaan Guru PK-PLK	1 Orang	Terlaksananya Workshop Ketunaan Guru PK-PLK	1 Orang	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	03	007	Pelayanan Assesment bagi ABK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa ABK yang Dinilai	20 Orang	Terlaksananya Pelayanan Assesment bagi ABK	1 Kegiatan	30,400,000.0	30,500,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	03	008	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Kepribadian dan Sosial Siswa			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Dalam Kepribadian dan Kompetensi	1 Orang	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kompetensi Kepribadian dan Sosial Siswa	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	03	009	Pelaksanaan Pendidikan layanan khusus berbasis komunitas dan tempat rehabilitasi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa Unit Pendidikan Layanan Khusus Pada Masyarakat dan atau Tempat Rehabilitasi	8 Orang	Terseleenggaranya Pelaksanaan Pendidikan layanan khusus berbasis komunitas dan tempat rehabilitasi	1 Kegiatan	16,500,000.0	16,600,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	03	010	Pelaksanaan Penilaian Portopolio Sekolah Inklusif			Provinsi Sulawesi Selatan			Persentase Jumlah Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Inklusif	1 Sekolah	Terseleenggaranya Pelaksanaan Penilaian Portopolio Sekolah Inklusif	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	03	011	Seleksi dan Pembinaan Pramuka Siswa PK-PLK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa yang Telah Dibina	2 Orang	Terlaksananya Seleksi dan Pembinaan Pramuka Siswa PK-PLK	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	03	012	Workshop Manajemen Berbasis Sekolah SLB			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kepala Sekolah yang Telah Mengikuti Workshop Manajemen Berbasis SLB	25 Orang	Terlaksananya Workshop Manajemen Berbasis Sekolah SLB	1 Kegiatan	67,353,568.0	63,667,821.78	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	03	013	Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah SLB			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Operator/Teknisi Sekolah yang Telah Mengikuti Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah SLB	2 Orang	Terlaksananya Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah SLB	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	03	014	Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum SLB			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum SLB	5 Sekolah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum SLB	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	01	01.00	04		PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER DAN SEKOLAH SEHAT (Prioritas)					% Sekolah yang menerapkan budaya sehat dan Faham Radikalisme	51 %					3,115,016,030.0	3,211,939,732.07	Dinas Pendidikan	
										% SMA/SMK yang bebas Narkoba (Prioritas)	91 %								
										% Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	52.5 %								
1.01	01	01.00	04	001	Pembinaan Program Sekolah Sehat			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Sekolah yang Menerapkan Sekolah Sehat	75 Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Program Sekolah Sehat	1 Kegiatan	239,000,000.0	240,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	04	002	Kampanye Sekolah Anti Pergaulan Bebas, Anti Faham Sesat dan Radikalisme			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Siswa/Sekolah yang Terlibat Dalam Kampanye Mengikuti Anti Paham Radikalisme	100 Sekolah	Terlaksananya Kampanye Sekolah Anti Pergaulan Bebas, Anti Faham Sesat dan Radikalisme	1 Kegiatan	150,000,000.0	152,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	04	003	Pelaksanaan Tes Urine			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Siswa yang Telah Mengikuti Tes Urine	1000 Orang	Terselenggaranya Pelaksanaan Tes Urine	1 Kegiatan	25,000,000.0	30,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	04	004	Kampanye Anti Rokok dan Narkoba			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Sekolah/Siswa yang Terlibat Dalam Kampanye Anti Rokok dan Narkoba	100 sekolah	Terlaksananya Kampanye Anti Rokok dan Narkoba	1 kegiatan	540,416,030.0	583,239,732.07	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	04	005	Pelaksanaan Sekolah Adiwiyata (Sekolah Berbasis Lingkungan)			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Sekolah yang Telah Melaksanakan Sekolah Adiwiyata	35 Sekolah	Terselenggaranya Pelaksanaan Sekolah Adiwiyata (Sekolah Berbasis Lingkungan)	1 Kegiatan	123,000,000.0	124,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	04	006	Pengelolaan Kantin Sehat			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Kantin Sekolah yang Sehat	40 Unit	Terlaksananya Pengelolaan Kantin Sehat	1 Kegiatan	197,600,000.0	197,700,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	04	007	Pengelolaan Bank Sampah Sekolah			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Bank Sampah Sekolah yang Terbentuk	45 Unit	Terlaksananya Pengelolaan Bank Sampah Sekolah	1 Kegiatan	165,000,000.0	170,000,000.0	Dinas Pendidikan	



1.01	01	01.00	04	008	Kepemimpinan Siswa Menyongsong Masa Depan Terpadu			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Siswa yang Telah Mengikuti Kepemimpinan Siswa Menyongsong Masa Depan Terpadu	100 Orang	Terlaksananya a Kepemimpinan Siswa Menyongsong Masa Depan Terpadu	1 Kegiatan	135,000,000.0	140,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	04	009	Gerakan 15 menit mengaji			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Sekolah yang Telah Melaksanakan Gerakan 15 Menit Mengaji Secara Baik	100 Sekolah	Terlaksananya a Gerakan 15 Menit Mengaji	1 Kegiatan	755,000,000.0	765,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	04	010	Pelaksanaan Lomba Portopolio Pendidikan karakter Tematik			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba Portopolio Pendidikan Karakter Tematik	100 orang	Terseleenggaranya Pelaksanaan Lomba Portopolio Pendidikan Karakter Tematik	2 kegiatan	115,000,000.0	125,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	04	011	Pembentukan dan Penguatan Kader Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga dan Masyarakat			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Orang Tua Siswa dan Tokoh Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Kader Pendidikan Karakter	1000 orang	Terlaksananya a Pembentukan dan Penguatan Kader Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga dan Masyarakat	1 kegiatan	620,000,000.0	630,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	04	012	Workshop Pembinaan Karakter Organisasi Kesiswaan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Siswa Anggota Organisasi Kesiswaan yang Mengikuti Pembinaan Karakter (OSIS, Pramuka, PMR, dan UKS)	75 orang	Terlaksananya a Workshop Pembinaan Karakter Organisasi Kesiswaan	1 Kegiatan	50,000,000.0	55,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	05		<b>PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN SMA/SMK/SLB BAGI SISWA MISKIN (Prioritas)</b>	<b>Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan</b>	<b>Menurunnya kesenjangan antar lapisan dan antar wilayah</b>				<b>Cakupan siswa SMA/SMK/SLB miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan (Prioritas)</b>	<b>54.93 %</b>				<b>110,000,000.0</b>	<b>120,000,000.0</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	
1.01	01	01.00	05	040	Pengelolaan Data Penerima Bantuan Pendidikan			Provinsi Sulawesi Selatan				Validitas Data Siswa Yang Mendapatkan Bantuan Pendidikan	1 Dokumen	Terlaksananya a Pengelolaan Data Penerima Bantuan Pendidikan	1 Kegiatan	100,000,000.0	105,000,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	0 1	01.00	0 5	0 4 1	Pengelolaan Pendistribusian Bantuan Pendidikan			Provinsi Sulawesi Selatan			Pendistribusi an siswa yang mendapatkan Bantuan Pendidikan	1 Dokumen	Terlaksananya a Pengelolaan Pendistribusi an Bantuan Pendidikan	1 Kegiatan	10,000,000.0	15,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH (Prioritas)</b>	<b>Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan</b>	<b>Meningkatny a derajat pendidikan masyarakat</b>			<b>% Tamatan SMA/SMK/SLB yang lulus Perguruan Tinggi Negeri yang bereputasi (Prioritas)</b>	<b>46.85 %</b>				<b>878,257,168.0</b>	<b>892,276,999.78</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 0 1	Peningkatan passing grade/tryout dalam menghadapi UMPTN			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa yang Telah Mengikuti Tryout	10000 Orang	Terlaksananya a Peningkatan Passing Grade/Tryout Dalam Menghadapi UMPTN	1 Kegiatan	269,257,168.0	261,276,999.78	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 0 2	Pemetaan Kopetensi Siswa dalam Memilih Program Studi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa yang Mengikuti Pemetaan Kompetensi	1 Orang	Terlaksananya a Pemetaan Kopetensi Siswa dalam Memilih Program Studi	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 0 3	Workshop Pengembangan Kurikulum SMA 2013			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Workshop Pengembangan Kurikulum SMA 2013	2 orang	Terlaksananya a Workshop Pengembangan Kurikulum SMA 2013	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 0 4	Bimtek Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Bimtek Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	2 Orang	Terlaksananya a Bimtek Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 0 5	Pelatihan Manajemen Bagi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala SLB			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB yang Dilatih	50 Orang	Terlaksananya a Pelatihan Manajemen Bagi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala SLB	1 Kegiatan	25,000,000.0	23,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 0 6	Pelatihan Manajemen Bagi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB yang Dilatih	1 Orang	Terlaksananya a Pelatihan Manajemen Bagi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	01	01.00	0607	00	Workshop Pendalaman Materi Program IPA, IPS dan Bahasa SMA yang di UN kan				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru Mata Pelajaran yang Mengikuti Workshop Pendalaman Materi Program IPA, IPS, dan Bahasa	10 Orang	Terlaksananya Workshop Pendalaman Materi Program IPA, IPS dan Bahasa SMA yang di UN kan	1 Kegiatan	20,000,000.0	19,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	0608	00	Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas Sekolah Menengah (SMA)				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah PTK yang Mengikuti Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas	1 Orang	Terlaksananya Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas Sekolah Menengah (SMA)	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	0609	00	Bimbingan Teknis Pembelajaran Berbasis Keunggulan Lokal SMA				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah PTK SMA yang Mengikuti Pelatihan Pembelajaran Berbasis Keunggulan Lokal	1 Orang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembelajaran Berbasis Keunggulan Lokal SMA	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	0610	00	Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen SMA				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru yang Mengikuti Workshop Pengembangan SIM SMA	1 orang	Terlaksananya Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen SMA	1 kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	0611	00	Pelaksanaan Penilaian Peserta Didik Berbasis Komputer SMA				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SMA yang Mengikuti Penilaian Berbasis Komputer	1 Orang	Terselenggaranya Pelaksanaan Penilaian Peserta Didik Berbasis Komputer SMA	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	0612	00	Pelaksanaan Penilaian Peserta Didik Berbasis Komputer SMK				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SMK yang Mengikuti Penilaian Berbasis Komputer	1 orang	Terselenggaranya Pelaksanaan Penilaian Peserta Didik Berbasis Komputer SMK	1 kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	0613	00	Pembinaan Siswa Kelas Khusus				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa Kelas Khusus yang Dibina	2 Orang	Terlaksananya Pembinaan Siswa Kelas Khusus	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan
1.01	01	01.00	0614	00	Pengembangan Program Studi Keahlian Berbasis Keunggulan Lokal SMK				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Program Studi Keahlian Berbasis Keunggulan Lokal SMK	2 studi	Terlaksananya Pengembangan Program Studi Keahlian Berbasis Keunggulan Lokal SMK	2 kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan

1.01	0 1	01.00	0 6	0 1 5	Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Industri SMK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru yang Mengikuti Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Industri SMK	1 Orang	Terlaksananya Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Industri SMK	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 1 6	Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal SMA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal SMA	10 Orang	Terlaksananya Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal SMA	1 Kegiatan	20,000,000.0	19,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 1 7	Pemetaan Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah Atas (SMA)			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Lokasi Pemetaan Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah (SMA)	1 Lokasi	Terlaksananya Pemetaan Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah Atas (SMA)	1 Kegiatan	175,000,000.0	176,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 1 8	Pemetaan Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Lokasi Pemetaan Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)	1 Lokasi	Terlaksananya Pemetaan Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)	1 Kegiatan	175,000,000.0	176,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 1 9	Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi siswa SMA/SMK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sekolah yang Mengikuti Tambahan Bahasa Asing	1 Sekolah	Terlaksananya Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi siswa SMA/SMK	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 2 0	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional Perbaikan (UNP) SMA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sekolah Penyelenggara UNP	1 Sekolah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional Perbaikan (UNP) SMA	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 2 1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	1 Sekolah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 2 2	Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum Muatan Lokal SMA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal SMA	1 Sekolah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum Muatan Lokal SMA	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	0 1	01.00	0 6	0 2 3	Bimbingan Teknis Penyusunan Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru yang Mengikuti Bimtek Penyusunan Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)	10 Orang	Terlaksananya a Bimbingan Teknis Penyusunan Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMA	1 Kegiatan	21,000,000.0	21,500,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 2 4	Bimbingan teknis hasil pemetaan mata pelajaran muatan lokal SMA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru yang Mengikuti Bimtek Hasil Pemetaan Mata Pelajaran Muatan Lokal	1 Orang	Terlaksananya a Bimbingan teknis hasil pemetaan mata pelajaran muatan lokal SMA	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 2 5	Penyusunan Bahan Ajar Mulok SMA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru yang Mengikuti Penyusunan Bahan Ajar Mulok SMA	1 Orang	Terlaksananya a Penyusunan Bahan Ajar Mulok SMA	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 2 6	Workshop Kelompok Peminatan Ilmu - ilmu Bahasa dan Budaya Kurikulum 2013 SMA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru yang Mengikuti Workshop Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya Kurikulum 2013 SMA	10 Orang	Terlaksananya a Workshop Kelompok Peminatan Ilmu - ilmu Bahasa dan Budaya Kurikulum 2013 SMA	1 Kegiatan	21,000,000.0	21,500,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 2 7	Workshop Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu - ilmu Alam Kurikulum 2013 SMA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru Yang Mengikuti Workshop Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam Kurikulum 2013 SMA	10 Orang	Terlaksananya a Workshop Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu - ilmu Alam Kurikulum 2013 SMA	1 Kegiatan	21,000,000.0	21,500,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 2 8	Workshop Kelompok Peminatan Ilmu - ilmu Sosial Kurikulum 2013 SMA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru Yang Mengikuti Workshop Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial Kurikulum 2013 SMA	10 Orang	Terlaksananya a Workshop Kelompok Peminatan Ilmu - ilmu Sosial Kurikulum 2013 SMA	1 Kegiatan	21,000,000.0	21,500,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 6	0 2 9	Pengembangan Kompetensi Keahlian Berbasis Keunggulan Lokal SMK			Provinsi Sulawesi Selatan			Terbentuknya Tim Pembina Keahlian Yang Berkompeten Yang Berbasis Keunggulan	1 Orang	Terlaksananya a Pengembangan Kompetensi Keahlian Berbasis Keunggulan Lokal SMK	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	01	01.00	06	030	Workshop Manajemen Berbasis Sekolah SMA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kepala Sekolah Yang Telah Mengikuti Workshop Manajemen Berbasis Sekolah	2 Orang	Terlaksananya Workshop Manajemen Berbasis Sekolah SMA	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	06	031	Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah SMA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Operator/Teknisi Sekolah Yang Telah Mengikuti Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah	1 Orang	Terlaksananya Workshop Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah SMA	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	06	032	Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum 2013 SMA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sekolah Yang Telah Menerapkan Secara Baik Kurikulum 2013	5 Sekolah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum 2013 SMA	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	07		PROGRAM PROMOSI MINAT KEILMUAN					Jumlah perolehan medali siswa pada lomba/kejuruan tingkat nasional/International	32 Medali				1,501,242,317.0	1,556,884,791.78	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	07	001	Bimbingan teknis pendampingan pelajar andalan SULSEL			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa yang Mendapat Pendampingan Pada Lomba Lomba Prestasi	1 Orang	Terlaksananya Bimbingan teknis pendampingan pelajar andalan SULSEL	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	07	002	Seleksi dan Pembinaan OSN SD tingkat provinsi ke tingkat Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa yang Mengikuti Seleksi OSN SD	60 Orang	Terlaksananya Seleksi dan Pembinaan OSN SD tingkat provinsi ke tingkat Nasional	1 Kegiatan	35,000,000.0	40,100,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	07	003	Penyelenggaraan Seleksi O2SN SD Tingkat Provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Seleksi O2SN SD	100 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Seleksi O2SN SD Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	35,000,000.0	40,100,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	07	004	Penyelenggaraan Seleksi O2SN SMP Tingkat Provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Seleksi O2SN Tingkat Provinsi	100 Orang	Terselenggaranya Penyelenggaraan Seleksi O2SN SMP Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	70,010,000.0	90,732,791.78	Dinas Pendidikan	



1.01	0 1	01.00	0 7	0 0 5	Pelaksanaan & Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa SMK Tk.Provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SMK yang Mengikuti Seleksi dan Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa SMK	150 Orang	Terselenggaranya Pelaksanaan & Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa SMK Tk.Provinsi	1 Kegiatan	88,010,000.0	90,200,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 0 6	Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SMK yang Mengikuti Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi	200 Orang	Terlaksananya Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	70,010,000.0	71,020,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 0 7	Pelaksanaan dan Pembinaan Olimpiade Sains (OSN) SMA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SMA yang Mengikuti Seleksi OSN Tingkat Provinsi	200 Orang	Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pembinaan Olimpiade Sains (OSN) SMA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	1 Kegiatan	90,000,000.0	91,010,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 0 8	Penyelenggaraan dan Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SMA yang Mengikuti Seleksi O2SN SMA	200 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional	1 Kegiatan	159,100,000.0	161,110,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 0 9	Pelaksanaan dan Pembinaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SMA yang Mengikuti Seleksi FL2SN	300 Orang	Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pembinaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA	1 Kegiatan	141,101,317.0	142,320,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 1 0	Penyelenggaraan dan Pembinaan Olimpiade SAINS SMP Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Pembinaan OSN SMP	2 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pembinaan Olimpiade SAINS SMP Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	0 1	01.00	0 7	0 1 1	Pembinaan Peserta Festival Lomba Seni dan OSN PK/PLK Tk. Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa PK-PLK yang Mengikuti Pembinaan FLS2N dan OSN	1 Orang	Terlaksananya a Pembinaan Peserta Festival Lomba Seni dan OSN PK/PLK Tk. Nasional	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 1 2	Seleksi O2SN Siswa PK/PLK tingkat provinsi ke tingkat Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa PK-PLK yang Mengikuti Seleksi O2SN	35 Orang	Terlaksananya a Seleksi O2SN Siswa PK/PLK tingkat provinsi ke tingkat Nasional	1 Kegiatan	64,500,000.0	64,510,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 1 3	Seleksi dan Pembinaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD Tingkat Provinsi ke tingkat Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Seleksi dan Pembinaan FLS2N	1 Orang	Terlaksananya a Seleksi dan Pembinaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 1 4	Penyelenggaraan Seleksi FLS2N SD Tingkat Provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Seleksi FLS2N	70 Orang	Terlaksananya a Penyelenggaraan Seleksi FLS2N SD Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	44,400,000.0	44,410,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 1 5	Pembinaan O2SN SD Tingkat Provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Pembinaan O2SN	60 Orang	Terlaksananya a Pembinaan O2SN SD Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	30,000,000.0	31,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 1 6	Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) SMP			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI)	50 Orang	Terlaksananya a Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) SMP	1 Kegiatan	30,000,000.0	31,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 1 7	Seleksi dan Pembinaan OSN SMP tingkat provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Seleksi OSN	60 Orang	Terlaksananya a Seleksi dan Pembinaan OSN SMP Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	30,000,000.0	31,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 1 8	Penyelenggaraan Seleksi FLS2N SMP Tingkat Provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Seleksi FLS2N	45 Orang	Terlaksananya a Penyelenggaraan Seleksi FLS2N SMP Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	38,960,000.0	38,970,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 1 9	Olimpiade Sains Guru (OSN) SD dan SMP ke Tingkat Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru SD dan SMP yang Megikuti Olimpiade Sains Guru	65 Orang	Terlaksananya a Olimpiade Sains Guru (OSN) SD dan SMP ke Tingkat Nasional	1 Kegiatan	17,320,000.0	17,330,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	0 1	01.00	0 7	0 2 0	Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas SMA Berprestasi dan Berdedikasi Tk. Provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas SMA Berprestasi dan Berdedikasi Tk. Provinsi	1 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas SMA Berprestasi dan Berdedikasi Tk. Provinsi	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 2 1	Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat TAP MPR-RI dan UUD 1945 (Provinsi & Nasional)			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Lomba Cerdas Cermat TAP MPR-RI dan UUD 1945	2 Orang	Terselenggaranya Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat TAP MPR-RI dan UUD 1945 (Provinsi & Nasional)	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 2 2	Pelaksanaan Lomba Debat Bahasa Inggris SMA			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Lomba Debat Bahasa Inggris	100 Orang	Terselenggaranya Pelaksanaan Lomba Debat Bahasa Inggris SMA	1 Kegiatan	53,400,000.0	53,500,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 2 3	Pelaksanaan Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Lomba Debat Bahasa Indonesia	100 Orang	Terselenggaranya Pelaksanaan Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA	1 Kegiatan	53,400,000.0	53,500,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 2 4	Pelaksanaan dan Pembinaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) Tingkat Provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Guru yang Mengikuti Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) Tingkat Provinsi	1 Orang	Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pembinaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 2 5	Pelaksanaan Seleksi dan Pembinaan Lomba Parade Cinta Tanah Air Tingkat Provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Siswa yang Mengikuti Seleksi dan Pembinaan Lomba Parade Cinta Tanah Air	100 Orang	Terselenggaranya Pelaksanaan Seleksi dan Pembinaan Lomba Parade Cinta Tanah Air Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	52,800,000.0	52,810,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 2 6	Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) SMA Tingkat Provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Guru Yang Mengikuti Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) SMA Tingkat Provinsi	1 Orang	Terselenggaranya Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) SMA Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	0 1	01.00	0 7	0 2 7	Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat dan Berprestasi SMAN/SMAS			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Lomba Sekolah Sehat Dan Berprestasi	3 Sekolah	Terselenggaranya Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat dan Berprestasi SMAN/SMAS	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 2 8	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Tingkat Provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SMK yang Mengikuti Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Tingkat Provinsi	2 Orang	Terlaksananya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 2 9	Olimpiade Sains Guru SMK Tingkat Provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru Yang Mengikuti Olimpiade Sains Guru Tingkat Provinsi	1 Orang	Terlaksananya Olimpiade Sains Guru SMK Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 3 0	Seleksi FLS2N Siswa PK/PLK tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional (FLS2N)			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa PK-PLK yang Mengikuti Seleksi FLS2N Tingkat Provinsi	60 Orang	Terlaksananya Seleksi FLS2N Siswa PK/PLK tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional (FLS2N)	1 Kegiatan	75,991,000.0	75,992,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 3 1	Festival Pelajar PK-PLK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SMP Yang Mengikuti Festival Pelajar Jenjang SMP	2 Orang	Terlaksananya Festival Pelajar PK-PLK	2 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 3 2	Festival Pelajar jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA)			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SMA Yang Mengikuti Festival Pelajar	100 Orang	Terlaksananya Festival Pelajar jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA)	1 Kegiatan	98,320,000.0	98,330,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 3 3	Festival Pelajar jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah SMK yang Mengikuti Festival Pelajar	100 Orang	Terlaksananya Festival Pelajar jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)	1 Kegiatan	79,220,000.0	79,230,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 3 4	Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang SMP tingkat provinsi ke tingkat Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa SMP Yang Mengikuti Gala Siswa Tingkat Provinsi Ke Tingkat Nasional	100 Orang	Terlaksananya Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang SMP tingkat provinsi ke tingkat Nasional	1 Kegiatan	74,700,000.0	74,710,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	0 1	01.00	0 7	0 3 5	Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SMP Berprestasi tingkat Provinsi ke tingkat Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru, Kepsek, Pengawas SMP Yang Mengikuti Seleksi Tingkat Nasional	1 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SMP Berprestasi tingkat Provinsi ke tingkat Nasional	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 7	0 3 6	Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SD Berprestasi tingkat Provinsi ke tingkat Nasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru, Kepsek, Pengawas SD Yang Mengikuti Seleksi Tingkat Nasional	1 Orang	Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SD Berprestasi tingkat Provinsi ke tingkat Nasional	1 Kegiatan	5,000,000.0	6,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 8		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN</b>					% Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TIK	70 %				1,358,923,166.0	1,409,290,683.33	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 8	0 0 1	Studi Wawasan Pengembangan dan Pendayagunaan Jaringan Pembelajaran			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah ASN yang Mengikuti Studi Wawasan Pengembangan dan Pendayagunaan Jaringan Pembelajaran	22 Orang	Terlaksananya Studi Wawasan Pengembangan dan Pendayagunaan Jaringan Pembelajaran	1 Kegiatan	45,460,000.0	55,470,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 8	0 0 2	Anugerah KiHajar Tingkat Provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Siswa yang Mengikuti Anugerah KiHajar Tingkat Provinsi	100 orang	Terlaksananya Anugerah KiHajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	83,510,000.0	91,030,683.33	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 8	0 0 3	Pengembangan dan Pemeliharaan Ruang Belajar Multimedia			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Ruang Belajar Multimedia yang Dipelihara	1 Ruang	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Ruang Belajar Multimedia	1 Unit	6,500,000.0	7,000,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	01	01.00	0804	Peningkatan Manajemen UPT Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Manajemen UPT Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Dikelolah	5 Ruang	Terlaksananya Peningkatan Manajemen UPT Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5 Unit	360,550,000.0	365,560,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	0805	TOT Pendayagunaan TIK dalam pembelajaran			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti TOT Pendayagunaan TIK Dalam Pembelajaran	4 Orang	Terlaksananya a TOT Pendayagunaan TIK dalam pembelajaran	1 Kegiatan	6,500,000.0	7,500,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	0806	Workshop Penyusunan Model Pembelajaran Berbasis TIK untuk Daerah Tertentu			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru yang Mengikuti Workshop Penyusunan Model Pembelajaran Berbasis TIK untuk Daerah Tertentu	4 Orang	Terseleenggaranya Workshop Penyusunan Model Pembelajaran Berbasis TIK untuk Daerah Tertentu	1 Kegiatan	6,500,000.0	7,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	0807	Produksi Program Pembelajaran Muatan Lokal Berbasis ICT			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Materi Pembelajaran Muatan Lokal Berbasis ICT	2 Materi	Terlaksananya a Produksi Program Pembelajaran Muatan Lokal Berbasis ICT	2 Kegiatan	6,500,000.0	7,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	0808	Workshop strategi Pengembangan Sumber Belajar Di Sekolah			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru yang Mengikuti Workshop Strategi Pengembangan Sumber Belajar	75 Orang	Terlaksananya a Workshop strategi Pengembangan Sumber Belajar Di Sekolah	1 Kegiatan	40,610,000.0	48,620,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	0809	Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK	75 Orang	Terlaksananya a Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK	1 Kegiatan	61,793,166.0	75,000,000.0	Dinas Pendidikan	



1.01	0 1	01.00	0 8	0 1 0	Kajian Pendayagunaan Sumber Belajar di Sekolah			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah PTK yang Mengikuti Kajian Pendayagunaan Sumber Belajar di Sekolah	30 Orang	Terlaksananya Kajian Pendayagunaan Sumber Belajar di Sekolah	1 Kegiatan	40,900,000.0	40,910,000.0	Dinas Pendidikan		
1.01	0 1	01.00	0 8	0 1 1	Pemanfaatan Pelayanan Pendidikan Berbasis TIK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Layanan Pendidikan Berbasis TIK	10 Unit	Terlaksananya Pemanfaatan Pelayanan Pendidikan Berbasis TIK	1 Kegiatan	680,100,000.0	682,200,000.0	Dinas Pendidikan		
1.01	0 1	01.00	0 8	0 1 2	Pengadaan Sumber Belajar/Informasi Virtual			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sumber Belajar/Informasi Virtual	1 Unit	Terlaksananya Pengadaan Sumber Belajar/Informasi Virtual	1 Kegiatan	6,500,000.0	7,000,000.0	Dinas Pendidikan		
1.01	0 1	01.00	0 8	0 1 3	Rakor TIK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Rakor TIK	150 Orang	Terlaksananya Rakor TIK	1 Kegiatan	6,500,000.0	7,000,000.0	Dinas Pendidikan		
1.01	0 1	01.00	0 8	0 1 4	Jambore TIK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Jambore TIK	100 Orang	Terlaksananya Jambore TIK	1 Kegiatan	7,000,000.0	8,000,000.0	Dinas Pendidikan		
1.01	0 1	01.00	0 9		PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN MUTU DAN DISTRIBUSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						% Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	99.45 %			29,224,805,232.0	30,308,001,772.74	Dinas Pendidikan		
											% Guru SMK yang bersertifikat	42.75 %							
											% Jumlah Sekolah yang terpenuhi daftar kebutuhan guru per mata pelajaran dan Standar Tenaga Kependidikan	1.14 %							
											% Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	98.18 %							
											% Guru SMA yang bersertifikat	53.85 %							

1.01	0 1	01.00	0 9 0 1	0 0 1	Pendampingan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas SMA Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah guru berprestasi dan berdedikasi	75 Orang	Terlaksananya Pendampingan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas SMA Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	750,000,000.0	760,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 9 0 2	0 0 2	Bimbingan Teknis Penilai/ Asesor Terhadap Penilaian Kinerja Guru			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah asesor yang telah mengikuti bimtek	72 Orang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penilai/ Asesor Terhadap Penilaian Kinerja Guru	1 Kegiatan	710,000,000.0	720,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 9 0 3	0 0 3	Bimbingan Teknis dan Lomba Pengelolaan Perpustakaan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah pengelola perpustakaan yang telah mengikuti bimbingan	75 Orang	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Lomba Pengelolaan Perpustakaan	1 Kegiatan	750,000,000.0	760,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 9 0 4	0 0 4	Pemetaan Analisis Pendidikan dan Tenaga Kependidikan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan	110 Orang	Terlaksananya Pemetaan Analisis Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	1 Kegiatan	750,000,000.0	760,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 9 0 5	0 0 5	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah dan Jenis kegiatan penegembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	110 orang	Terselenggaranya Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Kegiatan	900,000,000.0	910,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 9 0 6	0 0 6	Pelaksanaan Academy Of Innovative Education Leadership Bagi Kepala Sekolah			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Kepala sekolah yang mengikuti kegiatan	110 Orang	Terselenggaranya Pelaksanaan Academy Of Innovative Education Leadership Bagi Kepala Sekolah	1 Kegiatan	750,000,000.0	760,000,000.0	Dinas Pendidikan	
												Jumlah Inovasi yang dihasilkan	75 Orang	Terselenggaranya Pelaksanaan Academy Of Innovative Education Leadership Bagi Kepala Sekolah	1 Kegiatan				

1.01	01	01.00	09	007	Pengembangan Kompetensi Pengawas Sekolah			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pegawai sekolah yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	50 Orang	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pengawas Sekolah	1 Kegiatan	750,000,000.0	760,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	008	Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Khusus			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pegawai yang mengikuti jabatan fungsional	50 Orang	Terselenggaranya Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Khusus	1 Kegiatan	750,000,000.0	760,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	009	Pelaksanaan Pemetaan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah zonasi distribusi guru	7600 orang	Pelaksanaan Pemetaan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 kegiatan	750,000,000.0	760,000,000.0	Dinas Pendidikan	
											Jumlah sekolah yang memenuhi standar (rasio) tenaga kependidikan	103 sekolah	terselenggaranya Pelaksanaan Pemetaan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Kegiatan				
1.01	01	01.00	09	010	Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Provinsi Sulawesi Selatan			Persentase guru sma/smk/slb yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	50 Orang	Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Kegiatan	730,000,000.0	740,000,000.0	Dinas Pendidikan	
											Persentasase tenaga kependidikan sma/smk/slb yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	50 Orang	Terlaksananya Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Kegiatan				
1.01	01	01.00	09	011	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pedagogik			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah guru yang mengikuti pengembangan kompetensi pedagogik	110 Orang	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pedagogik	1 Kegiatan	710,000,000.0	720,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	012	Pengembangan Kompetensi Kepribadian dan Sosial			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru yang telah mengikuti pengembangan Kompetensi Kepribadian dan Sosial	110 Orang	Terlaksananya Kompetensi Kepribadian dan Sosial	1 Kegiatan	780,000,000.0	790,000,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	0 1	01.00	0 9	0 1 3	Workshop Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Mapel MIPA SMA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah guru yang telah mengikuti kompetensi Profesional Guru Mapel MIPA SMA	50 Orang	Terlaksananya Workshop Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Mapel MIPA SMA	1 Kegiatan	700,000,000.0	710,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 9	0 1 4	Workshop Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Mapel IPS SMA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah guru yang telah mengikuti Kompetensi Profesional Guru Mapel IPS SMA	50 Orang	Terlaksananya Workshop Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Mapel IPS SMA	1 Kegiatan	710,000,000.0	720,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 9	0 1 5	Workshop Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Mapel Bahasa dan Seni SMA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru yang telah mengikuti Kompetensi Profesional Guru Mapel Bahasa dan Seni SMA	50 Orang	Terlaksananya Workshop Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Mapel Bahasa dan Seni SMA	1 Kegiatan	750,000,000.0	760,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 9	0 1 6	Workshop Pengembangan Kompetensi Mapel Adaptif Bagi Guru SMK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru yang telah mengikuti Kompetensi Mapel Adaptif Bagi Guru SMK	50 Orang	Terlaksananya Workshop Pengembangan Kompetensi Mapel Adaptif Bagi Guru SMK	1 Kegiatan	700,000,000.0	710,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 9	0 1 7	Workshop Pengembangan Kompetensi Mapel Normatif Bagi Guru SMK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru yang telah mengikuti Kompetensi Mapel Normatif Bagi Guru SMK	50 Orang	Terlaksananya Workshop Pengembangan Kompetensi Mapel Normatif Bagi Guru SMK	1 Kegiatan	700,000,000.0	710,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 9	0 1 8	Workshop Pengembangan Kompetensi Mapel Produktif Bagi Guru SMK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru yang telah mengikuti Kompetensi Mapel Produktif Bagi Guru SMK	50 Orang	Terlaksananya Workshop Pengembangan Kompetensi Mapel Produktif Bagi Guru SMK	1 Kegiatan	700,000,000.0	710,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	0 9	0 1 9	Pendampingan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas PK-PLK Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah guru berprestasi dan berdedikasi	50 Orang	Terlaksananya Pendampingan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas PK-PLK Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	800,000,000.0	810,000,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	01	01.00	09	020	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Guru BK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah guru yang mengikuti workshop Pengembangan Kompetensi Guru BK	50 Orang	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kompetensi Guru BK	1 Kegiatan	800,000,000.0	810,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	021	Pengembangan Kompetensi Guru PK-PLK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah guru yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Guru PK-PLK	50 Orang	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Guru PK-PLK	1 Kegiatan	800,000,000.0	810,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	022	Workshop Guru Pembimbing Khusus (GPK)			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru yang mengikuti Workshop Guru Pembimbing Khusus (GPK)	50 Orang	Terlaksananya Workshop Guru Pembimbing Khusus (GPK)	1 Kegiatan	730,000,000.0	780,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	023	Pelatihan Guru Inklusi PK-PLK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah guru yang mengikuti Pelatihan Guru Inklusi PK-PLK	50 Orang	Terlaksananya Pelatihan Guru Inklusi PK-PLK	1 Kegiatan	734,805,232.0	780,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	024	Pelatihan Guru Produktif SMK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah guru SMK yang mengikuti Pelatihan Guru Produktif SMK	50 Orang	terlaksananya Pelatihan Guru Produktif SMK	1 Kegiatan	900,000,000.0	910,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	025	Workshop Guru Bidang Studi Normatif SMK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah guru yang mengikuti Workshop Guru Bidang Studi Normatif SMK	50 Orang	Terlaksananya Workshop Guru Bidang Studi Normatif SMK	1 Kegiatan	730,000,000.0	878,001,772.74	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	026	Workshop Guru Bidang Studi Adaptif SMK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah guru yang mengikuti Workshop Guru Bidang Studi Adaptif SMK	75 Orang	Terlaksananya Workshop Guru Bidang Studi Adaptif SMK	1 Kegiatan	730,000,000.0	880,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	027	Metode Pembelajaran Membaca Lontara			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru yang mengikuti kegiatan pembelajaran membaca lontara	50 Orang	Terlaksananya metode pembelajaran membaca lontara	1 kegiatan	730,000,000.0	760,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	028	Kurikulum Bahasa Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah guru yang mengikuti kegiatan pengembangan Kurikulum Bahasa Daerah	30 Orang	Terlaksananya Kurikulum Bahasa Daerah	1 kegiatan	700,000,000.0	710,000,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	01	01.00	09	029	Seminar Guru Bahasa Indonesia			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah guru bahasa indonesia yang mengikuti seminar	80 orang	Terselenggaranya seminar guru bahasa indonesia	1 kegiatan	730,000,000.0	760,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	030	Workshop Guru Bahasa Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru bahasa daerah yang mengikuti peningkatan kompetensi	72 Orang	Terlaksananya Workshop Guru Bahasa Daerah	1 Kegiatan	730,000,000.0	760,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	031	Workshop Guru Bahasa dan Sastra			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah guru bahasa dan sastra yang mengikuti peningkatan kompetensi	72 Orang	Terlaksananya Workshop Guru Bahasa dan Sastra	1 Kegiatan	750,000,000.0	760,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	032	Potensi dan Kompetensi Peminatan Jurusan/ Program Studi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah siswa yang terserap di Perguruan tinggi dan DUDI	100 Orang	Terlaksananya Potensi dan Kompetensi Peminatan Jurusan/ Program Studi	1 Kegiatan	700,000,000.0	710,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	033	Workshop Penyusunan Bahan Ajar Muatan Lokal			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah guru yang mengikuti Workshop Penyusunan Bahan Ajar Muatan Lokal	72 Orang	Terlaksananya Workshop Penyusunan Bahan Ajar Muatan Lokal	1 Kegiatan	730,000,000.0	760,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	034	Workshop Penyusunan Bahan Ajar Bahasa Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah guru yang mengikuti Workshop Penyusunan Bahan Ajar Bahasa Daerah	50 orang	Terlaksananya Workshop Penyusunan Bahan Ajar Bahasa Daerah	1 Kegiatan	730,000,000.0	800,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	035	Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah guru yang telah mengikuti Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	150 Orang	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Kegiatan	770,000,000.0	800,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	036	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS	50 Orang	Terlaksananya penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS	1 Kegiatan	780,000,000.0	830,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	037	Verifikasi dan Sertifikasi Pendidik			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah guru yang di sertifikasi	50 Orang	Terlaksananya Verifikasi dan Sertifikasi Pendidik	1 Kegiatan	760,000,000.0	870,000,000.0	Dinas Pendidikan	



1.01	01	01.00	09	038	Pengembangan Kompetensi TIK Bagi Pendidik			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah guru yang mengikuti Pengembangan Kompetensi TIK Bagi Pendidik	75 Orang	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi TIK Bagi Pendidik	1 Kegiatan	800,000,000.0	810,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	09	039	Pelaksanaan Seleksi dan Pembinaan dan GTK SMA Berprestasi Tingkat Provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Guru yang mengikuti Seleksi dan Pembinaan dan GTK SMA Berprestasi Tingkat Provinsi	192 Orang	Terlaksananya Seleksi dan Pembinaan dan GTK SMA Berprestasi Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	750,000,000.0	800,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	50		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>				<b>13,471,173,824.0</b>	<b>13,970,473,264.29</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	
1.01	01	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	3 Jenis	2,044,550,000.0	2,150,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	16 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	16 Unit	721,221,728.0	792,559,158.0	Dinas Pendidikan	
											Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	7 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	7 Unit				
1.01	01	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	52 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	2,741,543,456.0	2,789,164,106.29	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah ATK yang tersedia	50 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	2,470,771,728.0	2,513,750,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	50 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	770,771,728.0	808,750,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	2 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	2,220,771,728.0	2,303,750,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	2 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	930,771,728.0	1,018,750,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perjalanan dinas	60 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi	715 Orang	1,570,771,728.0	1,593,750,000.0	Dinas Pendidikan	

1.01	01	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %				3,422,287,806.39	3,549,132,461.48	Dinas Pendidikan		
1.01	01	01.00	5102		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	2 Unit	Ketersediaan rumah jabatan/ rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	300,000,000.39	327,052,461.48	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	5104		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	7 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	1,500,000,000.0	1,510,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	5106		Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	15 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	275,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	5107		Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	15 Unit	Ketersediaan Perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas sesuai kebutuhan	100 %	98,000,000.0	98,500,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	5108		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	25 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	210,000,000.0	220,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	5109		Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	50 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	628,570,000.0	628,580,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	5110		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	300,951,000.0	350,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	5112		Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	2 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	109,766,806.0	115,000,000.0	Dinas Pendidikan	
												Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	5 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	100 %				

1.01	0 1	01.00	5 2		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA				% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %				409,548,182.0	424,727,792.61	Dinas Pendidikan		
1.01	0 1	01.00	5 2	0 0 1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	32 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	25,000,000.0	26,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	5 2	0 0 2	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	2 Dokumen	Ketersediaan Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	2 Dokumen	70,510,000.0	70,520,000.0	Dinas Pendidikan	
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	1 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	1 Dokumen				
1.01	0 1	01.00	5 2	0 0 3	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi , tugas pembantuan dan DAK	7 Usulan Kegiatan	Ketersediaan Usulan Kegiatan dana dekonsentrasi , tugas pembantuan dan DAK	7 Laporan	24,100,000.0	24,200,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	0 1	01.00	5 2	0 0 4	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	5 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	100 %	30,000,000.0	31,000,000.0	Dinas Pendidikan	
											Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	5 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %				
1.01	0 1	01.00	5 2	0 0 5	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	10 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	184,938,182.0	192,007,792.61	Dinas Pendidikan	

1.01	01	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	25,000,000.0	30,000,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %	50,000,000.0	51,000,000.0	Dinas Pendidikan	
<b>1.01</b>	<b>01</b>	<b>01.00</b>	<b>53</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>	<b>100 %</b>			<b>386,273,547.0</b>	<b>400,590,499.95</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>		
1.01	01	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian nya	20 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	58,680,000.0	61,860,000.0	Dinas Pendidikan	
										Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	10 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %					
1.01	01	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	750 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	307,156,867.0	310,150,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	60 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	10,218,000.0	14,250,000.0	Dinas Pendidikan	
1.01	01	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	30 Orang	10,218,680.0	14,330,499.95	Dinas Pendidikan	
<b>1.01</b>	<b>01</b>				<b>Kesehatan</b>													
<b>1.01</b>	<b>01</b>	<b>01.00</b>			<b>Dinas Kesehatan</b>										<b>171,961,680,073.0</b>	<b>151,070,686,526.0</b>		

1.01	02	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN KESEHATAN BRIGADE SIAGA BENCANA (BSB) (Prioritas)	Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			% Penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 %					11,162,130,021.0	10,159,896,973.0	Dinas Kesehatan	
										% Penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	100 %								
1.01	02	01.00	01	001	Pengadaan Ambulans Laut dengan Fasilitas Kesehatan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Ambulans Laut yang diadakan	2 unit	Tersedianya layanan kesehatan Ambulans Laut cepat tanggap, layanan daerah terisolir serta layanan daerah kepulauan	100 %	4,000,000,000.0	2,000,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	01	002	Pemeliharaan Ambulans Laut			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Ambulans Laut yang dipelihara	3 unit	Tersedianya layanan Ambulans Laut yang memadai	100 %	30,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	01	003	Operasional dan Krew Kapal			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Ambulans Laut siap siaga	5 unit	Terlaksananya pelayanan kesehatan dan penelitian melalui Ambulans Laut	100 %	410,000,000.0	574,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	01	004	Pengadaan Ambulans Darat			Provinsi Sulawesi Selatan Kab/Kota Kab/Kota				Jumlah ambulans darat yang diadakan	3 unit	Tersedianya ambulans darat yang cepat tanggap	100 %	3,000,000,000.0	3,100,000,000.0	Dinas Kesehatan	

1.01	0 2	01.00	0 1	0 0 5	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat (R-4)			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kendaraan Operasional Roda Empat (R-4) yang diadakan	1 unit	Tersedianya Kendaraan Khusus Penanggulangan Krisis Kesehatan BSB (Brigade Siaga Bencana) dan PSC (Public Safety Centre)	100 %	600,000,000.0	450,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 1	0 0 6	Pengadaan Perahu Karet			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Perahu Karet yang diadakan	2 unit	Tersedianya Layanan Kesehatan mobile kejadian banjir dan atau di atas air	100 %	200,000,000.0	328,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 1	0 0 8	Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM)			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pemakaian bahan bakar untuk pemanasan dan operasional	2500 liter	Berjalannya Pemeliharaan dan Operasional Ambulans Laut	100 %	29,100,000.0	50,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 1	0 0 9	Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Krisis Kesehatan Brigade Siaga Bencana (BSB) dan Public Safety Centre			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah paket kegiatan persiapan dan tahap pelaksanaan	1 Paket	Terbentuknya lembaga Krisis Kesehatan BSB dan PSC	100 %	75,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 1	0 1 0	Operasional Satgas (Satuan Tugas)			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kegiatan pengendalian dan pemantauan kejadian krisis kesehatan yang dilaksanakan	365 hari	Terlaksananya Operasional Pengendalian dan Pemantauan kejadian Krisis Kesehatan BSB (Brigade Siaga Bencana) dan PSC (Public Safety Centre) di Provinsi Sulsel	100 %	292,000,000.0	292,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 1	0 1 1	Operasional Satlak (Satuan Pelaksana)			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah kejadian Krisis Kesehatan	30 kejadian	Penanganan cepat dan terpadu kejadian Krisis Kesehatan	100 %	416,250,000.0	555,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 1	0 1 2	Penguatan dan Fasilitas Public Safety Centre (PSC) Kabupaten/Kota			24 Kab/Kota 24 Kab/Kota			Jumlah Kabupaten/Kota yang diberi penguatan	24 Kab/Kota	Terbentuknya PSC (Public Safety Centre) masing-masing Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan	100 %	144,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kesehatan	



1.01	02	01.00	01	013	Pelatihan BTCLS (Basic Trauma and Cardiac Life Support)			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah angkatan dalam penyelenggaraan Pelatihan BTCLS (Basic Trauma and Cardiac Life Support)	3 angkatan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam penanganan krisis kesehatan	100 %	465,000,000.0	620,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	01	014	Peningkatan Kapasitas Petugas Medis dan Paramedis			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah angkatan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Medis dan Paramedis	3 angkatan	Meningkatnya kapasitas Petugas Medis dan Paramedis dalam kesiapsiagaan bencana	100 %	600,000,000.0	800,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	01	015	Sosialisasi Krisis Kesehatan			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Krisis Kesehatan	2 kali	Meningkatnya pengetahuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam penyelenggaraan kegiatan Krisis Kesehatan BSB (Brigade Siaga Bencana) dan PSC (Public Safety Centre)	100 %	210,780,021.0	230,189,600.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	01	016	Penguatan Manajemen Krisis Kesehatan			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah paket penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan Krisis Kesehatan	2 pt	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Penyelenggaraan Krisis Kesehatan BSB (Brigade Siaga Bencana) dan PSC (Public Safety Centre)	100 %	400,000,000.0	500,707,373.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	01	019	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	29 unit	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Krisis Kesehatan BSB (Brigade Siaga Bencana) dan PSC (Public Safety Centre)	100 %	290,000,000.0	360,000,000.0	Dinas Kesehatan	

1.01	02	01.00	02		PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REGIONAL (Prioritas)				Jumlah RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan (Prioritas)	4 Unit					123,778,800,054.0	105,471,937,258.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	02	001	Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Regional		Kabupaten Bantaeng				Jumlah Dokumen Feasibility Study, Master Plan, AMDAL, Detail	2 RS	Terpenuhinya standar kelayakan dalam rangka pembanguna	100 %	3,073,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	02	006	Pembangunan Rumah Sakit Regional		Kabupaten Wajo				Jumlah Rumah Sakit Regional yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	1 Unit	Berfungsinya Rumah Sakit Regional	100 %	120,705,800,054.0	105,471,937,258.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	03		PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)				% Puskesmas yang Menyelenggarakan Program Kesehatan Tradisional	35 %					2,168,000,000.0	1,448,000,000.0	Dinas Kesehatan	
									% RS yang Terakreditasi Nasional	75 %								
									% Puskesmas Terakreditasi	70 %								
									% Puskesmas yang menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Penunjang	60 %								
									% RS Kabupaten/Kota yang Telah Menjadi BLU	80 %								
									Jumlah klinik rest area yang berfungsi (Prioritas)	2 Klinik								
1.01	02	01.00	03	009	Pemilihan Puskesmas Berprestasi (Kinerja Terbaik)		Kabupaten Bantaeng				Jumlah Puskesmas Berprestasi (Kinerja Terbaik) Tingkat Provinsi Sulsel yang terpilih	12 Puskesmas Berprestasi	Meningkatnya Kinerja Puskesmas Terpilih Tingkat Provinsi Sulsel	100 %	300,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Kesehatan	
							Kabupaten Barru											
							Kabupaten Bone											
							Kabupaten Bulukumba											
							Kabupaten Enrekang											
							Kabupaten Gowa											
							Kabupaten Jeneponto											
							Kabupaten Luwu											
							Kabupaten Luwu Timur											
							Kabupaten Luwu Utara											
							Kabupaten Maros											











							Kabupaten Maros											
							Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan											
							Kabupaten Pinrang											
							Kabupaten Sidenreng Rappang											
							Kabupaten Sinjai											
							Kabupaten Soppeng											
							Kabupaten Takalar											
							Kabupaten Tana Toraja											
							Kabupaten Wajo											
							Kota Makassar											
							Kota Palopo											
							Kota Parepare											
1.01	0 2	01.00	0 3	0 3 7	Monev Pelaksanaan Quickwins Program Pelayanan Darah		Kabupaten Bantaeng			Jumlah pemantauan pelaksanaan Quickwins Program Pelayanan Darah	24 Kab/Kota	Pelaksanaan Program Quickwins Pelayanan Darah di Kab/Kota sesuai target yang ditetapkan	100 %	105,000,000.0		0.0	Dinas Kesehatan	
							Kabupaten Barru											
							Kabupaten Bone											
							Kabupaten Bulukumba											
							Kabupaten Enrekang											
							Kabupaten Gowa											
							Kabupaten Jeneponto											
							Kabupaten Kepulauan Selayar											
							Kabupaten Luwu											
							Kabupaten Luwu Timur											
							Kabupaten Luwu Utara											
							Kabupaten Maros											
							Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan											
							Kabupaten Pinrang											
							Kabupaten Sidenreng Rappang											
							Kabupaten Sinjai											
							Kabupaten Soppeng											
							Kabupaten Takalar											



1.01	0 2	01.00	0 3	0 4 3	Pertemuan Pelaporan SIRS Online bagi Petugas Rekam Medik RS			5 Desa PHBS Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Pelaporan SIRS Online bagi Petugas Rekam Medik RS	105 Orang	Rumah Sakit yang melaksanakan pelaporan secara online	100 %	117,000,000.0	117,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 3	0 4 7	Monev Peningkatan Klas di Rumah Sakit			RS Pratama Bungyi Kabupaten Pinrang			Jumlah pemantauan Klas Rumah Sakit di Kab/Kota	2 RS	Tercapainya peningkatan Klas Rumah Sakit sesuai standar	100 %	10,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 3	0 4 9	Monev Program Patient Safety di RS Pemerintah			Rumah Sakit Kabupaten Bantaeng			Jumlah pelaksanaan pemantauan Patient Safety di RS Pemerintah	49 RS	Rumah Sakit Pemerintah melaksanakan Patient Safety sesuai standar	100 %	120,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
								Rumah Sakit Kabupaten Barru										
								Rumah Sakit Kabupaten Bone										
								Rumah Sakit Kabupaten Bulukumba										
								Rumah Sakit Kabupaten Enrekang										
								Rumah Sakit Kabupaten Gowa										
								Rumah Sakit Kabupaten Jeneponto										
								Rumah Sakit Kabupaten Kepulauan Selayar										
								Rumah Sakit Kabupaten Luwu										
								Rumah Sakit Kabupaten Luwu Timur										
								Rumah Sakit Kabupaten Luwu Utara										
								Rumah Sakit Kabupaten Maros										
								Rumah Sakit Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
								Rumah Sakit Kabupaten Pinrang										
								Rumah Sakit Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Rumah Sakit Kabupaten Sinjai										



1.01	0 2	01.00	0 4	0 0 9	Pendampingan dalam Pemanfaatan Paket Intervensi Gizi pada Anak			Kabupaten Bone	#12 Kecamatan Enrekang Enrekang Regency South Sulawesi			Jumlah pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi Gizi pada Anak	2 Kab/Kota	Meningkatnya capaian Program Kesehatan Keluarga dan Gizi	100 %	250,000,000.0	350,000,000.0	Dinas Kesehatan	
								Kabupaten Enrekang	#14 Puskesmas Enrekang Enrekang Regency South Sulawesi										
1.01	0 2	01.00	0 4	0 1 0	Penyediaan Intervensi Gizi pada Ibu Hamil dalam rangka Penanggulangan Stunting			Kabupaten Bone	#panaikang Panakkukang Kota Makassar Sulawesi Selatan			Jumlah Intervensi Gizi pada Ibu Hamil	5642 Orang	Meningkatnya Status Gizi Ibu Hamil	100 %	4,289,669,020.0	4,289,669,020.0	Dinas Kesehatan	
								Kabupaten Enrekang	#Sudiang Raya Biring Kanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan										
									#tamalanrea indah Tamalanrea Kota Makassar Sulawesi Selatan										
									#tamangapa Manggala Kota Makassar Sulawesi Selatan										
									#Tana Toraja Tana Toraja Regency South Sulawesi ID										
1.01	0 2	01.00	0 4	0 1 1	Penyediaan Intervensi Micronutrient pada Anak Umur 6 - 24 Bulan dalam rangka Penanggulangan Stunting			Kabupaten Bone	#antang Manggala Kota Makassar Sulawesi Selatan			Jumlah Intervensi Micronutrient pada Anak Umur 6-24 Bulan	4878 Orang	Meningkatnya Status Gizi Anak Umur 6-24 Bulan	100 %	702,432,000.0	702,432,000.0	Dinas Kesehatan	
								Kabupaten Enrekang	#karampuang Panakkukang Kota Makassar Sulawesi Selatan										
									#Sudiang Raya Biring Kanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan										
									#tamalanrea indah Tamalanrea Kota Makassar Sulawesi Selatan										
									#Tana Toraja Tana Toraja Regency South Sulawesi ID										

1.01	02	01.00	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas)					Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi. (Prioritas)	6 Unit					631,138,208.0	653,669,842.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	05	003	Monitoring dan Evaluasi			Kota Makassar Kota Makassar				Jumlah layanan Unggulan/Spesialisasi pada RS Provinsi yang terpantau	6 Rumah Sakit	Meningkatnya kualitas pelayanan pada RS Provinsi	100 %	80,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	05	024	Pengembangan Infrastruktur Organisasi dan Manajemen RS			Kota Makassar Kota Makassar				Jumlah Dokumen Pendukung Pengembangan RS	2 Dokumen	Meningkatnya infrastruktur Organisasi dan Manajemen UPK4	100 %	551,138,208.0	653,669,842.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	07		PROGRAM KEFARMASIAN, ALAT KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					% Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar	75 %					8,130,779,117.0	8,254,753,442.0	Dinas Kesehatan	
										% Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pengamanan Pangan yang dibina	55 %								
										Pemenuhan Rasio Tenaga Kesehatan	80 %								
										% Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Cara Pembuatan yang baik	57 %								
										% Produk Alkes dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat	92 %								
1.01	02	01.00	07	001	Pengadaan Obat			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah item obat yang disiapkan sebagai Buffer Stock Provinsi	25 item obat	Tersedianya obat Buffer Stock di Provinsi	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Kesehatan	



1.01	0 2	01.00	0 7	0 0 2	Pembekalan Tenaga Kesehatan pada Penerapan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Masyarakat			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah tenaga kesehatan yang dibekali dalam penerapan POR (Penggunaan Obat Rasional)	200 Orang	Meningkatnya penggunaan obat yang rasional di masyarakat	100 %	150,000,000.0	120,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 7	0 0 3	Sosialisasi E-Monev RKO (Rencana Kebutuhan Obat) untuk RS Swasta Kab/Kota			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Sosialisasi e-Monev RKO	54 Orang	Tersosialisasinya e-Monev RKO di Rumah Sakit Swasta di Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000.0	70,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 7	0 0 4	Pemetaan Sarana Distribusi Obat BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dan Vaksin			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah sarana distribusi obat yang dipetakan	108 Sarana	Dimanfaatkannya pemetaan sarana distribusi obat BMHP dan Vaksin	100 %	150,000,000.0	175,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 7	0 0 5	Pembekalan Tenaga Kesehatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik di Kab/Kota			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah tenaga kesehatan yang dibekali untuk pembinaan	32 Tenaga Kesehatan	Tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten dalam pembinaan dan pengawasan sarana produksi kosmetik	100 %	100,000,000.0	125,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 7	0 0 6	Pembinaan dan Produksi Makanan Bagi Kader Kesehatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kader kesehatan yang dibina dalam produksi makanan	50 Orang	Tersedianya kader kesehatan yang terampil dalam produksi makanan	100 %	70,000,000.0	70,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 7	0 0 7	Pertemuan Pelaksanaan Permenkes 70 Tahun 2014 dalam Penerbitan Sertifikasi Produksi Perusahaan Rumah Tangga			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Permenkes 70 Tahun 2014	24 Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang melaksanakan permenkes 70 dengan sistem oss	50 %	120,000,000.0	120,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 7	0 0 8	Monev Ketersediaan Alat Kesehatan Kab/Kota berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014			Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto			Jumlah Kab/Kota yang telah memiliki data ketersediaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas	24 Kab/Kota	Terpenuhinya ketersediaan Alkes di RS dan Puskesmas	85 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kesehatan	



				2	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)			Kabupaten Maros				tentang data kondisi sarana produksi Alkes dan PKRT yang memenuhi penerapan persyaratan perizinan dan cara pembuatan yang baik	Sarana PAK/PKRT	yang melakukan distribusi sesuai persyaratan						
								Kabupaten Sidenreng Rappang												
								Kabupaten Soppeng												
								Kabupaten Takalar												
								Kabupaten Wajo												
								Kota Makassar												
								Kota Parepare												
1.01	0 2	01.00	0 7	0 1 3	Monev Pelaksanaan Program Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)			Kabupaten Bantaeng				Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan program Alat Kesehatan dan PKRT	24 Kab/Kota	Sinkronisasi program dan kegiatan Alat Kesehatan dan PKRT antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota	75 %	115,000,000.0	115,000,000.0	Dinas Kesehatan		
								Kabupaten Barru												
								Kabupaten Bone												
								Kabupaten Bulukumba												
								Kabupaten Gowa												
								Kabupaten Jeneponto												
								Kabupaten Maros												
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan												
								Kabupaten Sinjai												
								Kabupaten Soppeng												
								Kabupaten Takalar												
								Kabupaten Wajo												
								24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan												
1.01	0 2	01.00	0 7	0 1 4	Pendataan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota			Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota				Jumlah jenis profesi tenaga kesehatan di Kab/Kota	22 Jenis Profesi	Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang terdata	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kesehatan		
								Kabupaten Bantaeng												
								Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota												
								Kabupaten Barru												
								Dinkes, RSUD, Klinik, Optik, Apotik Kabupaten/Kota												
								Kabupaten Bone												









							Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Gowa													
							Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Jeneponto													
							Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Selayar													
							Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Luwu													
							Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Luwu Timur													
							Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Luwu Utara													
							Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Maros													
							Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan													
							Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Pinrang													
							Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Sidenreng Rappang													
							Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Sinjai													
							Dinkes dan RSUD Kab/Kota Kabupaten Soppeng													



1.01	0 2	01.00	0 7	0 2 8	Pertemuan Koordinasi Lintas sektor Pemenuhan NAKES di Provinsi			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah peserta Koordinasi Upaya Pemenuhan NAKES di Provinsi	30 Orang	Terpenuhinya Kebutuhan NAKES di Unit Puskesmas & Rumah Sakit sesuai kebutuhan	70 %	97,000,000.0	97,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 7	0 2 9	Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pemenuhan NAKES di Kab/Kota			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah peserta koordinasi dalam upaya pemenuhan NAKES di Kab/Kota	78 Orang	Terpenuhinya kebutuhan NAKES di Unit Puskesmas & Rumah Sakit sesuai kebutuhan	70 %	135,000,000.0	135,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 7	0 3 6	Sosialisasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah jenis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	6 Jenis Jafung	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi	80 %	140,000,000.0	140,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 7	0 3 7	Sosialisasi Pemberdayaan Tenaga Kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah Peserta Sosialisasi Pemberdayaan Tenaga Kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan	74 orang	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi tenaga kesehatan	70 %	140,000,000.0	140,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 7	0 3 8	Koordinasi Upaya Pemenuhan Tenaga Kesehatan pada 6 Rumah Sakit			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah peserta koordinasi pemenuhan tenaga kesehatan 6 RS Regional	50 RS	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit berdasarkan tipenya sesuai PERMENKES 56 Tahun 2014	70 %	120,000,000.0	120,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 7	0 3 9	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah peserta pertemuan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan	70 orang	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas oleh tenaga kesehatan yang bermutu sesuai kompetensi	70 %	140,000,000.0	140,000,000.0	Dinas Kesehatan	

1.01	02	01.00	07	040	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Kota Makassar Kota Makassar	# Maros Regency South Sulawesi ID			Jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan SDM	107 orang	Terlindungnya tenaga kesehatan dan masyarakat dari aspek hukum	100 %	135,000,000.0	135,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	07	041	Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan			Kota Makassar Kota Makassar				Jumlah jenis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	6 Jenis Jafung	Pelayanan kesehatan semakin berkualitas dengan meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan	80 %	135,000,000.0	135,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	07	042	Pemetaan Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Swasta/Klinik/TNI/POLRI			RS Swasta/Klinik /TNI/POLRI Kab/Kota Kabupaten Bantaeng				Jumlah pemetaan tenaga kesehatan pada RS Swasta/Klinik /TNI/POLRI	20 RS	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan	70 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kesehatan	
								RS Swasta/Klinik /TNI/POLRI Kab/Kota Kabupaten Barru											
								RS Swasta/Klinik /TNI/POLRI Kab/Kota Kabupaten Bone											
								RS Swasta/Klinik /TNI/POLRI Kab/Kota Kabupaten Bulukumba											
								RS Swasta/Klinik /TNI/POLRI Kab/Kota Kabupaten Enrekang											
								RS Swasta/Klinik /TNI/POLRI Kab/Kota Kabupaten Gowa											
								RS Swasta/Klinik /TNI/POLRI Kab/Kota Kabupaten Jeneponto											
								RS Swasta/Klinik /TNI/POLRI Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Selayar											



							RS Swasta/Klinik /TNI/POLRI Kab/Kota Kabupaten Tana Toraja										
							RS Swasta/Klinik /TNI/POLRI Kab/Kota Kabupaten Toraja Utara										
							RS Swasta/Klinik /TNI/POLRI Kab/Kota Kabupaten Wajo										
							RS Swasta/Klinik /TNI/POLRI Kab/Kota Kota Makassar										
							RS Swasta/Klinik /TNI/POLRI Kab/Kota Kota Palopo										
							RS Swasta/Klinik /TNI/POLRI Kab/Kota Kota Parepare										
1.01	0 2	01.00	0 7	0 4 3	Identifikasi dan pemetaan Produsen makanan Khusus yang beredar		Kabupaten Bantaeng			Jumlah produsen makanan khusus yang beredar dan telah diidentifikasi serta dipetakan	35 Produsen	Terjaminnya mutu makanan khusus yang beredar (Functional Food dan Fortified Food)	100 %	100,000,000.0	110,000,000.0	Dinas Kesehatan	
							Kabupaten Barru										
							Kabupaten Bone										
							Kabupaten Bulukumba										
							Kabupaten Enrekang										
							Kabupaten Gowa										
							Kabupaten Jeneponto										
							Kabupaten Kepulauan Selayar										
							Kabupaten Luwu										
							Kabupaten Luwu Timur										
							Kabupaten Luwu Utara										
							Kabupaten Maros										
							Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
							Kabupaten Pinrang										

















										% Lansia Usia â‰¥ 60 Tahun yang mendapat pelayanan Santun Lansia	60 %								
										% Posyandu Aktif	62 %								
1.01	0 2	01.00	0 8	0 0 1	Lomba Posyandu Terbaik Tingkat Provinsi				5 Posyandu Kab/Kota terpilih Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Posyandu terbaik tingkat Provinsi	5 Posyandu	Meningkatnya Kualitas Posyandu Aktif	100 %	150,608,000.0	148,142,250.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 8	0 0 7	Penyebaran Informasi Kesehatan Melalui Kampanye Kesehatan				Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	# Pacerakkang South Ponrang Luwu Regency		Jumlah penyebaran Informasi kesehatan melalui Kampanye Kesehatan	1 Kali	Meningkatkan pengetahuan akan Sadar Hidup Sehat pada Pengunjung Pameran Kesehatan	80 %	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 8	0 0 8	Penyebaran Informasi Kesehatan melalui Pameran Kesehatan				Jakarta Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Penyebaran Informasi Kesehatan melalui Pameran	2 Kali	Meningkatnya pengetahuan akan Sadar Hidup Sehat pada Pengunjung Pameran Kesehatan	65 %	140,000,000.0	140,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 8	0 1 1	Bimbingan Teknis dalam Upaya Penanggulangan Stunting dengan Pemanfaatan Kelas Ibu Hamil				Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Petugas Gizi yang dibina dalam upaya penanggulangan Stunting melalui Kelas Ibu Hamil	85 org	Terlaksananya upaya penanggulangan Stunting dengan baik dan benar melalui Kelas Ibu Hamil	100 %	110,000,000.0	120,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 8	0 3 6	Pertemuan Rutin Tim AMP Provinsi				Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Rutin Tim AMP Provinsi	35 Orang	Diketahuinya masalah penyebab tingginya Kasus Kematian Ibu dan Bayi	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 8	0 3 7	Pertemuan Pembahasan Draft Regulasi Penurunan AKI dan AKB				Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Pembahasan Draft Regulasi Penurunan AKI dan AKB	35 Orang	Terbitnya Regulasi Penurunan AKI dan AKB	100 %	159,400,000.0	159,400,000.0	Dinas Kesehatan	

1.01	0 2	01.00	0 8	0 3 8	Workshop LP/LS tentang Regulasi dalam rangka Penanggulangan Stunting			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Workshop LP/LS tentang Regulasi dalam rangka Penanggulangan Stunting	30 Orang	Meningkatnya pencapaian indikator kinerja bagi Lintas Sektor dan Lintas Program dalam penurunan masalah gizi bagi Balita dan Ibu Hamil KEK	100 %	270,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 8	0 3 9	Pengembangan Media dan Informasi Sadar Hidup Sehat			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	#Kota Makassar Makassar City South Sulawesi		Jumlah penyebarluasan informasi melalui radio, TV, media cetak, merchandise, kelompok potensial dan evaluasi media	5 Paket	Adanya perubahan dalam pengetahuan, sikap dan tindakan dalam peningkatan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat	65 %	150,000,000.0	190,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 8	0 4 0	Sosialisasi Perpres No. 42 Tahun 2013 terkait Peran LP/LS dalam Penyelamatan 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan)			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Perpres No. 42 Tahun 2013 terkait Peran LP/LS dalam Penyelamatan 1000 HPK	30 Orang	Meningkatnya peran Lintas Program dan Lintas Sektor dalam penurunan anak balita yang mengalami Wasting, Underweight dan Stunting	100 %	250,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 8	0 4 1	Pertemuan Tim terkait Penurunan Stunting			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Pertemuan Tim terkait Penurunan Stunting	30 Orang	Diketahuinya upaya-upaya dalam penurunan stunting	100 %	220,000,000.0	220,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 8	0 4 2	Lomba Desa PHBS Tingkat Provinsi			5 Desa terpilih Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah desa PHBS di Kabupaten/Kota yang terpilih	5 Desa	Meningkatnya kinerja desa PHBS di Kab/Kota	100 %	150,608,000.0	148,142,250.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 8	0 4 3	Lomba Lansia Sehat, Aktif dan Produktif			12 Kab/Kota terpilih Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pemenang Lomba Lansia Sehat, Aktif dan Produktif di Kab/Kota	12 Kab/Kota	Penduduk Lanjut Usia yang Sehat, Aktif dan Produktif	75 %	75,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 8	0 4 5	Pertemuan Pelaksanaan Pelayanan Santun Lansia di Tingkat Provinsi			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Pertemuan Pelaksanaan Pelayanan Santun Lansia di Tingkat Provinsi	40 Orang	Meningkatnya Pelayanan Santun Lansia di Kab/Kota	80 %	80,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	

1.01	0 2	01.00	0 8	0 5 2	Pertemuan Balita Terintegrasi			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Pertemuan Balita Terintegrasi	30 Orang	Meningkatny a pengetahuan dan kemampuan petugas kesehatan dalam Pelayanan Balita Terintegrasi	100 %	125,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 8	0 5 4	Workshope Pengembangan Model Intervensi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			Sumatera Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah workshop pengembang an model intervensi kemitraan dan pemberdayaa n masyarakat	1 Kali	Adanya inovasi dalam melakukan kemitraan dan pemberdayaa n masyarakat	85 %	140,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 8	0 5 6	Monitoring dan Evaluasi Audit Maternal dan Perinatal			Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo	Jumlah Audit Maternal dan Perinatal di Kab/Kota	24 Kab/Kota	Meningkatny a pelaksanaan AMP di Kab/Kota	100 %	125,000,000.0	125,000,000.0	Dinas Kesehatan			



										% Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu	50 %							
1.01	0 2	01.00	0 9	0 0 1	Pengembangan Provincial Epidemiologi Surveillance Team			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah peserta pengembangan PEST (Provincial Epidemiologi Surveillance Team)	70 Orang	Tersebarluasnya Informasi Epidemiologi Surveilans melalui Buletin	80 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kesehatan
1.01	0 2	01.00	0 9	0 0 2	Bimbingan Teknis Program Sistem Terpadu Penyakit			Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare			Jumlah Kab/Kota sasaran bimbingan teknis Program Sistem Terpadu Penyakit	24 Kab/Kota	Terbinanya Program Sistem Terpadu Penyakit (STP)	100 %	54,000,000.0	65,000,000.0	Dinas Kesehatan	

1.01	0 2	01.00	0 9 3	0 0 3	Penyelidikan/Penangulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular			24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah KLB penyakit menular yang tertangani	13 Kejadian	Diketahuinya faktor resiko penyebab KLB	80 %	250,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9 4	0 0 4	Pengembangan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok			Kabupaten Bantaeng			Jumlah kab/Kota yang mengembangkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	24 Kab/Kota	Terbinanya Kawasan Tanpa Rokok	70 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kesehatan	
								Kabupaten Barru										
								Kabupaten Bone										
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Enrekang										
								Kabupaten Gowa										
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Kepulauan Selayar										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Maros										
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Sinjai										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Takalar										
								Kabupaten Tana Toraja										
								Kabupaten Toraja Utara										
								Kabupaten Wajo										
								Kota Makassar										
								Kota Palopo										
								Kota Parepare										
1.01	0 2	01.00	0 9 5	0 0 5	Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara (Pengembangan Daerah Pilot Project)			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara (Pengembangan Daerah Pilot Project)	60 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Tenaga Kesehatan dalam deteksi dini	85 %	80,674,000.0	80,674,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0	01.00	0	0	Monitoring dan Evaluasi Program						Jumlah	24	Terbinanya	60 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas	

	2		9	0 7	Pengendalian Penyakit Tidak Menular						Kab/Kota sasaran monitoring dan evaluasi Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Kab/Kota	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular				Kesehatan	
											Kabupaten Bantaeng							
											Kabupaten Barru							
											Kabupaten Bone							
											Kabupaten Bulukumba							
											Kabupaten Enrekang							
											Kabupaten Gowa							
											Kabupaten Jeneponto							
											Kabupaten Kepulauan Selayar							
											Kabupaten Luwu							
											Kabupaten Luwu Timur							
											Kabupaten Luwu Utara							
											Kabupaten Maros							
											Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan							
											Kabupaten Pinrang							
											Kabupaten Sidenreng Rappang							
											Kabupaten Sinjai							
											Kabupaten Soppeng							
											Kabupaten Takalar							
											Kabupaten Tana Toraja							
											Kabupaten Toraja Utara							
											Kabupaten Wajo							
											Kota Makassar							
											Kota Palopo							
											Kota Parepare							
1.01	0 2	01.00	0 9	0 0 8	Pemeliharaan Cold Room dan Distribusi Vaksin/Logistik					Jumlah Cold Room yang dipelihara	1 Unit	Peningkatan Kualitas Vaksin	100 %	127,000,000.0	135,000,000.0	Dinas Kesehatan		
										Jumlah Kab/Kota dengan distribusi Vaksin yang berkualitas	10 Kab/Kota	Cakupan ketersediaan Vaksin di Kab/Kota	95 %					



1.01	0 2	01.00	0 9	0 0 9	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Kesehatan Jiwa Kab/kota			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pengelola Kesehatan Jiwa yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Kesehatan Jiwa di Kab/Kota	48 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Pengelola Program Kesehatan Jiwa	85 %	53,000,000.0	53,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 1 0	Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program Imunisasi			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program Imunisasi	40 Orang	Diketahuinya hasil kegiatan Penggunaan Vaksin Baru MR	95 %	39,429,263.0	0.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 1 1	Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program tentang Kesehatan Jiwa dan NAPZA			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program tentang Kesehatan Jiwa dan NAPZA	50 Orang	Terbinanya kerjasama Lintas Sektor dan Lintas Program tentang Kesehatan Jiwa dan NAPZA	85 %	30,543,000.0	30,543,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 1 2	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Jiwa Provinsi			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Jiwa Provinsi	40 Orang	Terbinanya Program Kesehatan Jiwa Provinsi	12.52 %	75,000,000.0	65,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 1 3	Bimbingan Teknis Kesehatan Indra			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Petugas/Pengelola Program Kesehatan Indra yang mendapat bimbingan teknis Program Kesehatan Indra	24 Orang	Terbinanya Program Kesehatan Indra	85 %	99,215,000.0	99,215,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 1 4	Pertemuan Program Kesehatan Indra Provinsi			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pertemuan program kesehatan Indra Provinsi	55 Orang	Tersosialisasinya Program Kesehatan Indra	81 %	100,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 1 5	Pertemuan/Review Petugas District Surveilans Officer			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Pertemuan/Review Petugas District Surveilans Officer	60 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Petugas District Surveilans Officer	85 %	53,100,000.0	53,100,000.0	Dinas Kesehatan	

1.01	0 2	01.00	0 9	0 1 9	Pertemuan Koordinasi Program HIV-AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Program HIV-AIDS dan IMS Kab/Kota	85 Orang	Peningkatan koordinasi Lintas Program	100 %	35,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 2 2	Penggandaan /Cetak Format Hepatitis			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Format Pencatatan Hepatitis yang tersedia	100 Exemplar	Menjamin kelancaran pencatatan dan Pelaporan	100 %	20,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 2 3	Pemantauan Evaluasi Program Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)			Kabupaten Bantaeng			Jumlah Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi Program Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	15 Kab/Kota	Peningkatan pengetahuan dan kinerja Petugas Kab/Kota	100 %	40,000,000.0	45,000,000.0	Dinas Kesehatan	
						Kabupaten Barru												
						Kabupaten Bone												
						Kabupaten Jeneponto												
						Kabupaten Luwu												
						Kabupaten Luwu Utara												
						Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan												
						Kabupaten Pinrang												
						Kabupaten Sidenreng Rappang												
						Kabupaten Sinjai												
						Kabupaten Soppeng												
						Kabupaten Tana Toraja												
						Kabupaten Toraja Utara												
						Kabupaten Wajo												
						Kota Parepare												
1.01	0 2	01.00	0 9	0 2 4	Bimbingan Teknis dan Supportif Program Pengendalian Penyakit Tuberculosis			Kabupaten Jeneponto			Jumlah petugas/pengelola program TB yang yang mendapat bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan program P2 TB	15 orang	Peningkatan pengetahuan dan kinerja Petugas Kab/Kota	100 %	20,000,000.0	25,000,000.0	Dinas Kesehatan	
						Kabupaten Luwu												
						Kabupaten Luwu Utara												
						Kabupaten Sidenreng Rappang												
						Kota Palopo												
						Kota Parepare												
1.01	0 2	01.00	0 9	0 2 5	Pengadaan/Cetak Format RR Tuberculosis			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Format Pencatatan Program TB , TB MDR, dan TB HIV yang tersedia	1 Paket	Menjamin kelancaran pencatatan dan pelaporan	100 %	20,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Kesehatan	

1.01	0 2	01.00	0 9	0 2 6	Pengadaan Format RR P2 Kusta			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Format Pencatatan dan Pelaporan program P2 Kusta yang tersedia	4 Paket Format	Meningkatny a pelayanan Penderita Kusta di Masyarakat	100 %	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 2 9	Pengadaan Logistik Arbovirosis			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Rapid Diagnostik TEST Demam Berdarah Dengue (DBD) yang tersedia	28 paket	Penemuan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)	100 %	30,000,000.0	60,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 3 0	Monitoring dan Evaluasi Program Malaria			Kabupaten Bantaeng			Jumlah Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi dalam rangka pelaksanaan program Malaria	8 Kab/Kota	Peningkatan Pengetahuan dan Kinerja Petugas Kab/Kota	100 %	30,000,000.0	40,000,000.0	Dinas Kesehatan	
				Kabupaten Barru														
				Kabupaten Enrekang														
				Kabupaten Jeneponto														
				Kabupaten Luwu														
				Kabupaten Luwu Timur														
				Kabupaten Luwu Utara														
				Kota Palopo														
1.01	0 2	01.00	0 9	0 3 1	Monitoring dan Evaluasi Program Zoonosis			Kabupaten Bone			Jumlah Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi dalam rangka pelaksanaan program Zoonosis	14 Kab/Kota	Meningkatny a Pengetahuan dan Kinerja petugas Kab/Kota	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kesehatan	
				Kabupaten Bulukumba														
				Kabupaten Luwu														
				Kabupaten Luwu Timur														
				Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan														
				Kabupaten Pinrang														
				Kabupaten Sidenreng Rappang														
				Kabupaten Sinjai														
				Kabupaten Soppeng														
				Kabupaten Tana Toraja														
				Kabupaten Toraja Utara														
				Kabupaten Wajo														
				Kota Makassar														
				Kota Parepare														
1.01	0 2	01.00	0 9	0 3 2	Supervisi Supportif Program P2 ISPA			Kabupaten Bone			Jumlah Kab/Kota sasaran pembinaan	12 Kab/Kota	Terlaksananya Program Tifoid sesuai tatalaksana	100 %	40,000,000.0	40,000,000.0	Dinas Kesehatan	
				Kabupaten Gowa														













1.01	0 2	01.00	0 9	0 6 8	Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan	30 Orang	Meningkatnya koordinasi lintas sektor dan lintas program	100 %	20,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 6 9	Pengadaan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan Haji			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pengadaan media KIE yang tersedia	1 Paket	Tersedianya media komunikasi informasi dan edukasi	100 %	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 7 0	Pemantauan Embarkasi Debarkasi			Asrama Haji Sudiang Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Jemaah Haji Provinsi Sulawesi Selatan	60 Orang	Meningkatnya kewaspadaan dini terhadap proses pemberangkatan dan pemulangan haji	100 %	30,000,000.0	30,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 7 2	Sosialisasi Haji Sehat Bagi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Sosialisasi Haji Sehat Bagi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah	30 Orang	Tersosialisasinya Manajemen Penyelenggaraan kesehatan haji terhadap pihak penyelenggara haji dan umrah	100 %	20,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 7 6	Penguatan Haji Sehat Kab/kota dan Integrasi Program Kesehatan Haji			Kabupaten Bantaeng			Kabupaten/Kota dengan tindak lanjut sosialisasi	24 Kab/Kota	Meningkatnya integrasi penyelenggaraan program kesehatan haji	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kesehatan	
							Kabupaten Barru											
							Kabupaten Bone											
							Kabupaten Bulukumba											
							Kabupaten Enrekang											
							Kabupaten Gowa											
							Kabupaten Jeneponto											
							Kabupaten Kepulauan Selayar											
							Kabupaten Luwu											
							Kabupaten Luwu Timur											
							Kabupaten Luwu Utara											
							Kabupaten Maros											
							Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan											
							Kabupaten Pinrang											



1.01	02	01.00	09	079	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Kesehatan Haji Kab/Kota			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Kesehatan Haji Kab/Kota	24 Kab/Kota	Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan dan Operasional Penyelenggaraan Haji	100 %	40,000,000.0	40,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	09	080	Pertemuan Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Kesehatan Haji			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Kesehatan Haji	24 Kab/Kota	Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Kesehatan Haji	100 %	190,000,000.0	190,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	09	081	Monitoring dan Evaluasi Program P2 Typoid			Kabupaten Bulukumba Kabupaten Gowa Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Takalar			Jumlah petugas/pengelola program tifoid kab/kota yang mendapat bimbingan teknis pelaksanaan program Tifoid	8 Kab/kota	Peningkatan pengetahuan dan Kinerja Petugas Kab/kota	100 %	45,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	09	082	Workshop Pelibatan organisasi Profesi dalam Program TB			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta workshop dalam rangka penyusunan rencana tindak lanjut masing masing peran organisasi profesi dalam penanggulangan TB	50 Orang	Meningkatnya pelayanan tatalaksana TB yang berkualitas baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta yang telah DOTS	100 %	30,000,000.0	30,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	09	083	Investigasi dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi			7 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kab/Kota yang dilakukan investigasi dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	7 Kab/Kota	Tertanganinya kasus KIPI di Kab/Kota	100 %	25,000,000.0	25,000,000.0	Dinas Kesehatan	

1.01	0 2	01.00	0 9	0 8 4	Workshop Jejaring Layanan Diabetes Militus (DM) dan Hipertensi kepada seluruh Pemangku Kepentingan Terkait			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Workshop Jejaring Layanan DM dan Hipertensi kepada Seluruh Pemangku Kepentingan Terkait	50 Orang	Prevalensi Penduduk Usia > 18 Tahun dengan Tekanan Darah Tinggi	18.08 %	70,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 8 7	Penyusunan PERDA TB			Luar Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Ranperda TB yang disusun	1 Paket	Tersedianya RANPERDA TB tingkat Provinsi	100 %	200,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 9 2	Pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (PTM)			Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Pelatihan Pelayanan Terpadu (PANDU) Penyakit Tidak Menular	48 Orang	% Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Terpadu (PANDU) Penyakit Tidak Menular (PTM)	60 Persen	115,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 9 3	Pertemuan Koordinasi Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL)			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL)	50 Orang	Jumlah Pelayanan Kesehatan sebagai IPWL yang menyelenggarakan Upaya Pencegahan dan Rehabilitasi Medis pada Penyalagunaan NAPZA	10 IPWL	70,000,000.0	70,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 9 4	Sosialisasi Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL) bagi Tenaga Kesehatan dan Guru			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Sosialisasi IPWL bagi Tenaga Kesehatan dan Guru	50 Orang	Jumlah Kab./Kota Yang Menyelenggarakan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA di 30% SMA yang sederajat	24 Kab./Kota	60,000,000.0	60,000,000.0	Dinas Kesehatan	

1.01	0 2	01.00	0 9	0 9 5	Pertemuan Koordinasi Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Tingkat Provinsi			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi dalam rangka Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Tingkat Provinsi	50 Orang	% Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa	12.52 Persen	70,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	0 9	0 9 6	Monitoring dan Evaluasi Impelementasi KTR di Sekolah			Kabupaten Barru			Jumlah Kab/Kota Mengimplem entasikan Kawasan Tanpa Rokok ( KTR ) di Sekolah	24 Kab./Kota	Persentase Kabupaten/K ota yang 50% Sekolahnya Mengimplem entasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	60 %	70,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
								Kabupaten Bone										
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Enrekang										
								Kabupaten Gowa										
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Kepulauan Selayar										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Maros										
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Sinjai										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Takalar										
								Kabupaten Tana Toraja										
								Kabupaten Toraja Utara										
								Kabupaten Wajo										
								Kota Makassar										
								Kota Palopo										
								Kota Parepare										
								Kabupaten Bantaeng										

1.01	02	01.00	09	097	Pelatihan Penyelenggaraan CERDIK bagi Petugas Pelaksana Posbindu PTM di Sekolah			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Pelatihan Penyelenggaraan CERDIK bagi Petugas Pelaksana Posbindu PTM di Sekolah	50 Orang	Persentase Skrining Penduduk Usia Produktif	5 %	100,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	09	098	Monev Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (PTM)			Kabupaten Bantaeng			Jumlah Kabupaten/Kota yang Mengembangkan Deteksi Dini Melalui Pelayanan Terpadu ( PANDU ) Penyakit Tidak Menular ( PTM )	24 Kab./Kota	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Terpadu (PANDU) Penyakit Tidak Menular ( PTM )	60 %	70,000,000.0	70,000,000.0	Dinas Kesehatan	
								Kabupaten Barru										
								Kabupaten Bone										
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Enrekang										
								Kabupaten Gowa										
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Kepulauan Selayar										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Maros										
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Sinjai										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Takalar										
								Kabupaten Tana Toraja										
								Kabupaten Toraja Utara										
								Kabupaten Wajo										
								Kota Makassar										
								Kota Palopo										
								Kota Parepare										
1.01	02	01.00	10		PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA					% Puskesmas yang mengembangkan Program Kesehatan Kerja					595,073,168.0	205,000,000.0	Dinas Kesehatan	





1.01	02	01.00	10	017	Pemantauan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas						Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas	48 FKTP	Terlaksananya Program Kesling di Puskesmas	100 %	70,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
						Kabupaten Bantaeng												
						Kabupaten Barru												
						Kabupaten Bone												
						Kabupaten Bulukumba												
						Kabupaten Enrekang												
						Kabupaten Gowa												
						Kabupaten Jeneponto												
						Kabupaten Kepulauan Selayar												
						Kabupaten Luwu												
						Kabupaten Luwu Timur												
						Kabupaten Luwu Utara												
						Kabupaten Maros												
						Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan												
						Kabupaten Pinrang												





1.01	0 2	01.00	1 0	0 2 6	Pengamatan Penyakit akibat Kerja di Daerah Migran			Kabupaten Bantaeng			Jumlah kab/kota yang dilakukan pengamatan penyakit	2 Kab/kota	Terpantaunya penyakit akibat kerja di daerah migran	100 %	15,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Kesehatan	
								Kabupaten Sinjai										
1.01	0 2	01.00	1 0	0 2 7	Pengukuran Kebugaran Jasmani bagi Karyawan Dinas Kesehatan Prov. Sulsel			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta yang diukur kebugarannya	50 Orang	Terpantaunya tingkat Kebugaran Karyawan Dinas Kesehatan Prov. Sulsel	100 %	25,000,000.0	25,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	1 0	0 2 8	Monitoring Capaian Peningkatan Sarana Kualitas Air Minum			Kabupaten Bantaeng			Jumlah Sarana Air Minum yang memenuhi syarat Kesehatan	24 Sarana	Meningkatnya jumlah sarana air minum yang dilakukan uji kualitas	100 %	85,000,000.0	0.0	Dinas Kesehatan	
								Kabupaten Barru										
								Kabupaten Bone										
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Enrekang										
								Kabupaten Gowa										
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Kepulauan Selayar										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Maros										
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Sinjai										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Takalar										
								Kabupaten Tana Toraja										
								Kabupaten Toraja Utara										
								Kabupaten Wajo										
								Kota Makassar										
								Kota Palopo										
								Kota Parepare										
1.01	0 2	01.00	1 0	0 3 0	Pelaksanaan Verifikasi Desa STBM			Kabupaten Takalar			Jumlah Desa STBM	10 Desa	Meningkatnya jumlah desa STBM yang	100 %	32,693,168.0	40,000,000.0	Dinas Kesehatan	



								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan											
								Kabupaten Pinrang											
								Kabupaten Sidenreng Rappang											
								Kabupaten Sinjai											
								Kabupaten Soppeng											
								Kabupaten Takalar											
								Kabupaten Tana Toraja											
								Kabupaten Toraja Utara											
								Kabupaten Wajo											
								Kota Makassar											
								Kota Palopo											
								Kota Parepare											
1.01	02	01.00	11	004	Pengadaan Panduan Praktis Program Kesehatan Gratis Integrasi ke Program JKN			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah buku panduan praktis bagi petugas kesehatan dalam rangka program kesehatan gratis integrasi ke JKN	1000 Buku	Meningkatnya pengetahuan petugas kesehatan tentang kesehatan gratis ke program JKN	100 %	50,000,000.0		0.0	Dinas Kesehatan	
1.01	02	01.00	11	005	Konsultasi & Bimtek Pemantapan Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke Program ke JKN			Kabupaten Bone			Jumlah Petugas/pengelola JKN Kab/Kota mendapat bimbingan teknis dan jumlah pengelola JKN Provinsi yang melakukan konsultasi ke Pusat	168 Orang	Diperolehnya masukan dan petunjuk dalam pelaksanaan program kesehatan gratis integrasi ke JKN	100 %	79,500,000.0		105,500,000.0	Dinas Kesehatan	
								Kabupaten Bulukumba											
								Kabupaten Enrekang											
								Kabupaten Gowa											
								Kabupaten Jeneponto											
								Kabupaten Luwu											
								Kabupaten Luwu Utara											
								Kabupaten Maros											
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan											
								Kabupaten Pinrang											
								Kabupaten Sidenreng Rappang											
								Kabupaten Sinjai											
								Kabupaten Soppeng											







1.01	0 2	01.00	5 0	0 0 5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kantor Dinkes Prov.Sulsel dan UPK Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah ATK yang tersedia	36 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	818,032,520.0	800,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	5 0	0 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor Dinkes Prov.Sulsel dan UPK Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	30 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	250,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	5 0	0 0 8	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kantor Dinkes Prov.Sulsel dan UPK Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	3 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	2,966,317,027.0	2,179,613,570.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	5 0	0 1 0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kabupaten Bantaeng			Jumlah perjalanan dinas	117 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	117 Orang	596,200,000.0	655,820,000.0	Dinas Kesehatan	
								Kabupaten Barru										
								Kabupaten Bone										
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Enrekang										
								Kabupaten Gowa										
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Kepulauan Selayar										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Maros										
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Sinjai										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Takalar										
								Kabupaten Tana Toraja										
								Kabupaten Toraja Utara										



1.01	0 2	01.00	5 1	0 1 2	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Kantor Dinkes Prov.Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	10 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	300,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Kesehatan	
											Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	200 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	100 %				
1.01	0 2	01.00	5 2		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %				360,650,405.0	373,525,624.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	5 2	0 0 1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	100 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	60,000,000.0	65,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	5 2	0 0 2	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kantor Dinkes Prov.Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	130,000,000.0	140,000,000.0	Dinas Kesehatan	
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	0 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	4 Dokumen				
1.01	0 2	01.00	5 2	0 0 4	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			Kantor Dinkes Prov.Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	84 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	100 %	129,600,000.0	124,600,000.0	Dinas Kesehatan	
											Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	20 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %				

1.01	0 2	01.00	5 2	0 0 5	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kantor Dinkes Prov.Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	17,000,000.0	17,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	5 2	0 0 6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Kantor Dinkes Prov.Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	10,400,000.0	10,400,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	5 2	0 0 7	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Kantor Dinkes Prov.Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %	13,650,405.0	16,525,624.0	Dinas Kesehatan	
<b>1.01</b>	<b>0 2</b>	<b>01.00</b>	<b>5 3</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>	<b>100 %</b>			<b>435,000,000.0</b>	<b>535,000,000.0</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>		
1.01	0 2	01.00	5 3	0 0 1	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Kantor Dinkes Prov.Sulsel dan UPK Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian nya	527 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	60,000,000.0	60,000,000.0	Dinas Kesehatan	
											Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	8 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %				
1.01	0 2	01.00	5 3	0 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kantor Dinkes Prov.Sulsel dan UPK Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	468 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	5 3	0 0 3	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kantor Dinkes Prov.Sulsel dan UPK Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	508 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	100,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Kesehatan	
1.01	0 2	01.00	5 3	0 0 8	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	40 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	40 Orang	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Kesehatan	
<b>1.01</b>	<b>0</b>	<b>01.01</b>			<b>UPT Transfusi Darah</b>										<b>13,619,933,411.09</b>	<b>14,087,682,232.96</b>		
<b>1.01</b>	<b>0 2</b>	<b>01.01</b>	<b>0 3</b>		<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN DAN KESEHATAN (Prioritas)</b>					<b>Cakupan pasien yang memperoleh transfusi darah</b>	<b>100 %</b>			<b>9,142,995,736.09</b>	<b>9,457,778,825.61</b>	<b>UPT Transfusi Darah</b>		

1.01	0 2	01.01	0 3	0 0 1	Peningkatan Pelayanan Penyediaan Darah			Kantor UPT Transfusi Darah Kota Makassar			Jumlah pengumpulan darah dalam dan luar gedung	34000 Pendonor	Tersedianya darah transfusi yang aman, berkualitas cepat dan tepat indikasi berdasarkan standar WHO atau Standar Operating Procedure untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan akibat perdarahan dan angka kematian lain yang	100 %	7,184,900,250.0	7,435,000,247.0	UPT Transfusi Darah
1.01	0 2	01.01	0 3	0 0 2	Uji saring dan Quality Control			Kantor UPT Transfusi Darah Kota Makassar			Jumlah jenis pemeriksaan pada proses laboratorium uji saring darah donor terhadap penyakit HIV, Syphilis, Hepatitis B, Hepatitis C, dan proses uji silang serasi antara darah donor dengan darah pasien di UTD Prov. Sulsel	4 jenis pemeriksaan	Tersedianya darah transfusi yang aman, berkualitas cepat dan tepat indikasi berdasarkan standar WHO, mencegah transmisi penyakit, HIV, sifilis, Hepatitis B, Hepatitis C melalui transfusi darah & mencegah terjadinya incompabilitas	100 %	1,704,983,970.0	1,749,983,973.0	UPT Transfusi Darah
1.01	0 2	01.01	0 3	0 0 3	Pemusnahan Limbah Medis			Kantor UPT Transfusi Darah Kota Makassar			Jumlah limbah medis dari hasil pengolahan darah transfusi yang dimusnahkan	5571 kg	Terhindarnya petugas dari resiko akibat pekerjaan & donor serta lingkungan	100 %	195,000,000.0	205,000,000.0	UPT Transfusi Darah
1.01	0 2	01.01	0 3	0 0 6	Pelestarian Donor Darah Sukarela			Kantor UPT Transfusi Darah Kota Makassar			Jumlah jenis penghargaan yang diterima	5 Jenis	Termotivasinya donor darah sukarela untuk mendonorkan darahnya secara rutin	100 %	58,111,516.09	67,794,605.61	UPT Transfusi Darah
1.01	0 2	01.01	5 0		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %				3,791,087,562.0	3,916,597,892.54	UPT Transfusi Darah



1.01	02	01.01	5001	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor UPT Transfusi Darah Kota Makassar				Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100 Jenis	200,000,000.0	200,000,000.0	UPT Transfusi Darah	
1.01	02	01.01	5002	0	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor UPT Transfusi Darah Kota Makassar				Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	10 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	100 Unit	425,000,000.0	470,000,000.0	UPT Transfusi Darah	
												Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	1 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	100 Unit				
												Jumlah kendaraan dinas yang berfungsi	10 unit	Ketersediaan bbm kendaraan dinas/operasional	100 Unit				
1.01	02	01.01	5003	0	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kantor UPT Transfusi Darah Kota Makassar				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	384 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	1,064,800,000.0	1,064,800,000.0	UPT Transfusi Darah	
1.01	02	01.01	5005	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kantor UPT Transfusi Darah Kota Makassar				Jumlah ATK yang tersedia	36 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	320,000,000.0	320,000,000.0	UPT Transfusi Darah	
												Jumlah jenis Cetakan yang tersedia	21 Jenis	Ketersediaan cetakan	100 %				
												Jumlah jenis fotocopy yang tersedia	4 Jenis	Ketersediaan fotocopy	100 %				
1.01	02	01.01	5006	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor UPT Transfusi Darah Kota Makassar				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	50,000,000.0	55,000,000.0	UPT Transfusi Darah	
1.01	02	01.01	5008	0	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kantor UPT Transfusi Darah Kota Makassar				Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	3 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	1,350,000,000.0	1,410,000,000.0	UPT Transfusi Darah	
1.01	02	01.01	5010	0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah perjalanan dinas	76 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi	100 Orang	381,287,562.0	396,797,892.54	UPT Transfusi Darah	
1.01	02	01.01	5011		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>											659,555,649.0	686,036,465.08	UPT Transfusi Darah	
1.01	02	01.01	5014	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kantor UPT Transfusi Darah Kota Makassar				Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	150,000,000.0	155,000,000.0	UPT Transfusi Darah	
1.01	02	01.01	5016	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kantor UPT Transfusi Darah Kota Makassar				Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	11 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	160,000,000.0	170,000,000.0	UPT Transfusi Darah	

1.01	02	01.01	5109	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor UPT Transfusi Darah Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	13 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	220,000,000.0	220,000,000.0	UPT Transfusi Darah	
1.01	02	01.01	5110	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor UPT Transfusi Darah Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	85,000,000.0	95,000,000.0	UPT Transfusi Darah	
1.01	02	01.01	5112	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Kantor UPT Transfusi Darah Kota Makassar			Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	1 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	44,555,649.0	46,036,465.08	UPT Transfusi Darah	
<b>1.01</b>	<b>02</b>	<b>01.01</b>	<b>53</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>	<b>100 %</b>				<b>26,294,464.0</b>	<b>27,269,049.73</b>	<b>UPT Transfusi Darah</b>	
1.01	02	01.01	5303	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	70 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	18,062,464.0	18,559,464.0	UPT Transfusi Darah	
1.01	02	01.01	5308	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Kantor UPT Transfusi Darah Kota Makassar			Jumlah peserta Sosialisasi tentang pelayanan darah	100 orang	Terlaksananya rekrutmen donor darah sukarela resiko rendah untuk ketersediaan stok darah yg aman & berkualitas	100 %	8,232,000.0	8,709,585.73	UPT Transfusi Darah	
<b>1.01</b>	<b>02</b>	<b>01.02</b>		<b>UPT Pelatihan Kesehatan</b>										<b>3,923,270,992.58</b>	<b>3,918,684,230.90</b>		
<b>1.01</b>	<b>02</b>	<b>01.02</b>	<b>17</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TENAGA KESEHATAN</b>					<b>Cakupan Tenaga Kesehatan yang telah bersertifikasi</b>	<b>100 %</b>				<b>1,160,000,000.0</b>	<b>1,375,000,000.0</b>	<b>UPT Pelatihan Kesehatan</b>	
1.01	02	01.02	1701	Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis Kesehatan			UPT Pelatihan Kesehatan Kota Makassar			Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat teknis kesehatan	100 Tenaga Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	100 %	150,000,000.0	300,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan	
1.01	02	01.02	1702	Pelaksanaan Pelatihan Tekhnis Keperawatan			UPT Pelatihan Kesehatan Kota Makassar			Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan Tekhnis Keperawatan	100 Perawat	Peningkatan Kapasitas Perawat Dalam Penanganan Pasien Sesuai Standar	100 %	150,000,000.0	300,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan	

1.01	02	01.02	17	003	Pelaksanaan Pelatihan Tekhnis Kebidanan							Jumlah bidan yang mengikuti pelatihan tekhnis kebidanan	60 Perawat	Peningkatan Skill bidan dalam Penatalaksanaan dan penanganan pasien	100 %	100,000,000.0	150,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan	
1.01	02	01.02	17	009	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kesehatan Olahraga							Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kesehatan olahraga	60 Orang	Meningkatnya Kemampuan Pengelola Kesehatan Olahraga	100 %	100,000,000.0	150,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan	
1.01	02	01.02	17	010	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kesehatan Kerja							Jumlah Peserta Pelatihan	60 Orang	Meningkatnya Pengetahuan Peserta Pelatihan Tekhnis Kesehatan Kerja	100 %	100,000,000.0	150,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan	
1.01	02	01.02	17	011	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kefarmasian							Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	30 Perawat	Meningkatkan Pengetahuan Peserta Diklat	100 %	50,000,000.0	100,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan	
1.01	02	01.02	17	021	Promosi dan Publikasi Kediklatan							Jenis Publikasi Kediklatan	3 Jenis	Terwujudnya Publikasi Kediklatan	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan	
1.01	02	01.02	17	024	Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Kimia Pakai Habis							Jumlah Obat-Obatan dan Bahan Kimia yg Tersedia	250 Jenis	Tersedianya Bahan Obat-Obatan dan Bahan Kimia Pakai Habis	100 %	75,000,000.0	75,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan	
1.01	02	01.02	17	025	Sosialisasi Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan							Jumlah Kabupaten Tempat Terselenggaranya Sosialisasi Pelatihan dan Sertifikasi	24 Kab/Kota	Cakupan Ketersediaan Biaya Sosialisasi Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan	100 %	285,000,000.0	0.0	UPT Pelatihan Kesehatan	
<b>1.01</b>	<b>02</b>	<b>01.02</b>	<b>18</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGKAJIAN MUTU PELATIHAN TEKNIS KESEHATAN</b>							<b>Cakupan Pelatihan yang terakreditasi</b>				<b>300,000,000.0</b>	<b>240,000,000.0</b>	<b>UPT Pelatihan Kesehatan</b>	
1.01	02	01.02	18	001	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Akademisi / Kesehatan							Jumlah Jasa Tenaga Ahli Akademisi / Kesehatan	6 Orang	Cakupan ketersediaan biaya jasa tenaga ahli	100 %	80,000,000.0	80,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan	
1.01	02	01.02	18	002	Akreditasi UPT Pelatihan Kesehatan							Jumlah dokumen mutu akreditasi yang tersedia	100 Dokumen	Terlaksananya Proses Akreditasi	100 %	70,000,000.0	0.0	UPT Pelatihan Kesehatan	

1.01	02	01.02	1803	0	Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur				UPT Pelatihan Kesehatan Kota Makassar			Jumlah Aparat yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	7 Orang	Cakupan Ketersediaan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan	
1.01	02	01.02	1806	0	Workshop peningkatan kapasitas kelembagaan, keorganisasian, ketatalaksanaan mutu pegawai dalam lingkup UPT Pelatihan Kesehatan				UPT Pelatihan Kesehatan Kota Makassar			Jumlah peserta workshop	50 Orang	Melaksanakan Workshop peningkatan kapasitas kelembagaan, keorganisasian, ketatalaksanaan mutu pegawai dalam lingkup UPT Pelatihan Kesehatan	100 %	50,000,000.0	60,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan	
<b>1.01</b>	<b>02</b>	<b>01.02</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>							<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>1,206,131,473.0</b>	<b>1,271,514,699.0</b>	<b>UPT Pelatihan Kesehatan</b>	
1.01	02	01.02	501	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Kantor UPT Pelatihan Kesehatan Kota Makassar			Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	4 Jenis	350,000,000.0	350,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan	
1.01	02	01.02	502	0	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				kantor UPT Pelatihan Kesehatan Kota Makassar			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	9 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	2 Unit	5,000,000.0	7,500,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan	
									Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	1 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	2 Unit							
1.01	02	01.02	503	0	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS				UPT Pelatihan Kesehatan Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	45 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	106,000,000.0	110,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan	
1.01	02	01.02	505	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan				Kantor UPT Pelatihan Kesehatan Kota Makassar			Jumlah ATK yang tersedia	100 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	226,349,699.0	241,349,699.0	UPT Pelatihan Kesehatan	
1.01	02	01.02	506	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				UPT Pelatihan Kesehatan Kota Makassar			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	30 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	25,980,000.0	32,475,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan	
1.01	02	01.02	508	0	Penyediaan Makanan dan Minuman				UPT Pelatihan Kesehatan Kota Makassar			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	30 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	160,190,000.0	180,190,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan	

1.01	0 2	01.02	5 0	0 1 0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perjalanan dinas	20 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	90 Orang	332,611,774.0	350,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan		
							Luar Provinsi Sulawesi Selatan Luar Provinsi Sulawesi Selatan												
1.01	0 2	01.02	5 1		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>						<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>1,116,639,519.58</b>	<b>880,669,531.90</b>	<b>UPT Pelatihan Kesehatan</b>		
1.01	0 2	01.02	5 1	0 0 3	Pembangunan Gedung Kantor / Asrama			UPT Pelatihan Kesehatan Kota Makassar			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dibangun	1 Unit	Ketersediaan gedung kantor/Asrama sesuai kebutuhan	100 %	400,000,000.0	118,366,059.90	UPT Pelatihan Kesehatan		
1.01	0 2	01.02	5 1	0 0 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			UPT Pelatihan Kesehatan Kota Makassar			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	6 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	306,639,519.58	337,303,472.0	UPT Pelatihan Kesehatan		
1.01	0 2	01.02	5 1	0 0 6	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			UPT Pelatihan Kesehatan Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	11 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	160,000,000.0	170,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan		
1.01	0 2	01.02	5 1	0 0 9	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			UPT Pelatihan Kesehatan Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	20 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan		
1.01	0 2	01.02	5 1	0 1 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			UPT Pelatihan Kesehatan Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	35 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	50,000,000.0	55,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan		
1.01	0 2	01.02	5 3		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>						<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>	<b>100 %</b>			<b>140,500,000.0</b>	<b>151,500,000.0</b>	<b>UPT Pelatihan Kesehatan</b>		
1.01	0 2	01.02	5 3	0 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			UPT Pelatihan Kesehatan Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	169 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	110,500,000.0	121,500,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan		
1.01	0 2	01.02	5 3	0 0 3	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			UPT Pelatihan Kesehatan Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	60 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	30,000,000.0	30,000,000.0	UPT Pelatihan Kesehatan		
1.01	0	01.03			<b>UPT RSK Gigi dan Mulut</b>										<b>12,114,872,487.52</b>	<b>12,563,901,586.87</b>			

1.01	02	01.03	03		PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)					Cakupan pasien yang mendapatkan perawatan sesuai standar pelayanan	100 %				1,064,872,487.52	600,000,000.0	UPT RSK Gigi dan Mulut		
1.01	02	01.03	03	001	Akreditasi rumah sakit			Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut Kota Makassar				Jumlah RS yang terakreditasi	1 RS	Persentase akreditasi rumah sakit	100 %	400,000,000.0	0.0	UPT RSK Gigi dan Mulut	
1.01	02	01.03	03	002	Peningkatan kesehatan masyarakat			Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut Kota Makassar				Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut	120000 Orang	Meningkatnya kesehatan gigi dan mulut masyarakat	100 %	664,872,487.52	600,000,000.0	UPT RSK Gigi dan Mulut	
1.01	02	01.03	12		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN					Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSKD Gigi dan Mulut	100 %				1,000,000,000.0	963,901,586.87	UPT RSK Gigi dan Mulut		
1.01	02	01.03	12	001	Rehabilitasi sedang/berat dan pengembangan bangunan rumah sakit			Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut Kota Makassar				Jumlah gedung yang direhabilitasi	1 Paket	Terlaksananya rehabilitasi, pembangunan pelayanan private care centre gigi dan mulut	100 %	500,000,000.0	463,901,586.87	UPT RSK Gigi dan Mulut	
1.01	02	01.03	12	002	Pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran rumah sakit			Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut Kota Makassar				Jumlah alat-alat kesehatan dan kedokteran yang diadakan	5 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kesehatan dan kedokteran RS	100 %	500,000,000.0	500,000,000.0	UPT RSK Gigi dan Mulut	
1.01	02	01.03	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD					% Peningkatan pendapatan RSKD Gigi dan Mulut	0 %				10,050,000,000.0	11,000,000,000.0	UPT RSK Gigi dan Mulut		
1.01	02	01.03	15	001	Peningkatan kinerja pelayanan RS BLUD			RS Khusus Daerah Gigi dan Mulut Kota Makassar				Jumlah layanan RS BLUD	14 Unit layanan	Terlaksananya pelayanan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan jasa	100 %	10,050,000,000.0	11,000,000,000.0	UPT RSK Gigi dan Mulut	
1.01	02	02.00			Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji										97,483,827,377.16	100,451,695,840.30			
1.01	02	02.00	03		PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)					Cakupan pasien yang mendapatkan perawatan sesuai standar pelayanan	85 %				480,000,000.0	380,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji		
1.01	02	02.00	03	001	Peningkatan SDM Tenaga Keperawatan			Kota Makassar				Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan	40 Orang	Meningkatnya SDM Tenaga Keperawatan	100 %	80,000,000.0	80,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	

1.01	0 2	02.00	0 3	0 0 2	Pembimbingan dan Survei Simulasi Akreditasi			Kota Makassar				Jumlah Dokumen Akreditasi Rumah Sakit	1 Dokumen	Terselenggaranya Standar Rumah Sakit Tipe B	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
1.01	0 2	02.00	0 3	0 0 3	Pelatihan Keperawatan Medical Bedah Perawatan Luka			Kota Makassar				Jumlah peserta pelatihan	30 Orang	Peningkatan SDM Tenaga Keperawatan	100 %	100,000,000.0	0.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
1.01	0 2	02.00	0 3	0 0 7	Peningkatan Kapasitas Tenaga Medik di setiap KSM			Kota Makassar				Jumlah peserta pelatihan dan sosialisasi	30 Orang	Peningkatan SDM Tenaga Medik	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
1.01	0 2	02.00	0 3	0 0 8	Pelatihan Excellence Service			Kota Makassar				Jumlah peserta pelatihan	30 Orang	Peningkatan Keterampilan Petugas RS	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
<b>1.01</b>	<b>0 2</b>	<b>02.00</b>	<b>0 5</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas)</b>					<b>Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi</b>	<b>1 RS</b>					<b>150,000,000.0</b>	<b>150,000,000.0</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji</b>	
1.01	0 2	02.00	0 5	0 0 2	Peningkatan Mutu Spesialisasi Rumah Sakit			Kota Makassar				Jumlah peserta pelatihan tenaga Rumah Sakit	30 Orang	Tercapainya RS Sesuai Standar Tipe B	60 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
<b>1.01</b>	<b>0 2</b>	<b>02.00</b>	<b>1 2</b>		<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN</b>					<b>Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Labuang Baji</b>	<b>85 %</b>					<b>37,387,527,378.16</b>	<b>39,583,795,840.30</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji</b>	
1.01	0 2	02.00	1 2	0 0 1	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan			Kota Makassar				Jumlah Kebutuhan Peralatan Medis RS yang tersedia	12 Bulan	Peralatan Medis Rumah Sakit Yang Sesuai Standar	100 %	16,427,376,801.0	20,625,584,480.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
1.01	0 2	02.00	1 2	0 0 2	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rutin			Kota Makassar				Jumlah Kebutuhan Rutin Peralatana Medis RS yang tersedia	12 Bulan	Peralatan Medis Rumah Sakit Yang Sesuai Standar	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
1.01	0 2	02.00	1 2	0 0 3	Peningkatan Sarana Lingkungan Rumah Sakit			Kota Makassar				Jumlah Sarana Lingkungan RS yang tersedia	1 Paket	Meningkatnya Sarana Lingkungan Yang Mendukung Kegiatan RS	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
1.01	0 2	02.00	1 2	0 0 4	Pembangunan Tahap III Gedung A & B dan Gedung Perawatan Anak Rumah Sakit			Kota Makassar				Jumlah Sarana Dan Prasarana RS yang terbangun	1 Paket	Ketersediaan Gedung Pelayanan Dan Penunjang RS Yang Modern	100 %	16,860,150,577.16	17,958,211,360.30	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
1.01	0 2	02.00	1 2	0 0 7	Pengadaan Linen Operasi			Kota Makassar				Alat Sterilisasi pada Ruang CCSD	1 Set	Tersedianya Perlengkapan Kerja di Ruang Operasi	100 %	200,000,000.0	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	



1.01	02	02.00	12	008	Pengadaan Instalasi Listrik Dan Air			Kota Makassar			Jumlah IPAL yang tersedia	1 Unit	Tersedianya Pengolahan Air Limbah (IPAL)	100 %	3,000,000,000.0	0.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
											Jumlah Genset yang tersedia	1 Unit	Tersedianya Genset Listrik di RS	100 %			
1.01	02	02.00	12	009	Pengadaan Alat Laundry Dan Kesehatan Lainnya			Kota Makassar			Jumlah peralatan Laundry	1 Paket	Peralatan Laundry Yang Sesuai Standar	100 %	500,000,000.0	500,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	12	010	Pengadaan Media Promosi Kesehatan RS / CHT			Kota Makassar			Jumlah Media Promosi Tentang Bahaya Rokok di RS yang tersedia	1 Paket	Terciptanya Kawasan/ Area Bebas Rokok	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	13		<b>PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN</b>					<b>Cakupan sarana dan prasarana RSUD Labuang Baji dalam kondisi baik</b>					<b>1,550,000,000.0</b>	<b>1,550,000,000.0</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji</b>
1.01	02	02.00	13	001	Kalibrasi Alat Kesehatan RS			Kota Makassar			Jumlah Jenis-Jenis Alat kesehatan yang terkalibrasi	1 Paket	Terlaksananya Standarisasi Pemakaian Alat Kesehatan	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	13	002	Pengadaan / Pemeliharaan Instalasi Sarana Dan Prasarana RS			Kota Makassar			Jumlah Instalasi Sarana Dan Prasarana RS yang dipelihara	1 Unit	Terpenuhinya Instalasi Sarana Dan Prasarana RS	100 %	500,000,000.0	500,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	13	003	Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman dan Sarana Parkir RS			Kota Makassar			Jumlah taman dan parkir RS yang terpelihara	2 Unit	Tersedianya Taman Dan Parkir RS	100 %	100,000,000.0	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	13	004	Pemeliharaan Rutin Kebersihan Rumah Sakit			Kota Makassar			Jumlah RS yang terpelihara kebersihannya	1 RS	Peningkatan kualitas pelayanan RS	100 %	650,000,000.0	700,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	13	006	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung RS			Kota Makassar			Jumlah Gedung RS yang dipelihara	1 Tahun	Peningkatan fungsi gedung RS	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	15		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD</b>					<b>% Peningkatan pendapatan RSUD Labuang Baji</b>					<b>47,000,000,000.0</b>	<b>48,000,000,000.0</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji</b>
1.01	02	02.00	15	001	Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan Masyarakat			Kota Makassar			Jumlah pengelola manajemen Keuangan, Tata Kelola dan Perencanaan BLUD	12 12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %	47,000,000,000.0	48,000,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

1.01	02	02.00	16		PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, MAKAN MINUM DAN LOGISTIK RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN					Cakupan ketersediaan Obat-obatan, Makan Minum dan Logistik RS/UPTD Kesehatan	85 %				3,200,000,000.0	3,200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
1.01	02	02.00	1601	0	Pengadaan Obat-Obatan			Kota Makassar				Jumlah pengadaan obat-obatan	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Obat-Obatan Pasien	100 %	2,000,000,000.0	2,000,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	1603	0	Pengadaan Bahan Habis Pakai			Kota Makassar				Jumlah pengadaan bahan habis pakai	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Habis Pakai Untuk RS	100 %	1,200,000,000.0	1,200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					% Pemenuhan administrasi perkantoran	95 %				7,056,000,000.0	7,106,400,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
1.01	02	02.00	5003	0	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			RSUD Labuang Baji Kota Makassar				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	190 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	6,552,000,000.0	6,552,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	5005	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggunaan			RSUD Labuang Baji Kota Makassar				Jumlah ATK yang tersedia	2 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	50,000,000.0	55,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	5006	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			RSUD Labuang Baji Kota Makassar				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	300,000,000.0	330,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	5010	0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			RSUD Labuang Baji Kota Makassar				Jumlah perjalanan dinas	25 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	100 Orang	154,000,000.0	169,400,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	70 %				265,000,000.0	281,500,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
1.01	02	02.00	5109	0	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			RSUD Labuang Baji Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	90 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	165,000,000.0	181,500,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
1.01	02	02.00	5112	0	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			RSUD Labuang Baji Kota Makassar				Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	1 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	60 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

1.01	0 2	02.00	5 2		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA				% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	90 %				200,000,000.0	200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji		
1.01	0 2	02.00	5 2	0 0 2	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			RSUD Labuang Baji Kota Makassar			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	100 Dokumen	50,000,000.0	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	100 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	100 Dokumen				
1.01	0 2	02.00	5 2	0 0 3	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK			RSUD Labuang Baji Kota Makassar			Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	1 Usulan Kegiatan	Ketersediaan Usulan Kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	100 Laporan	50,000,000.0	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
1.01	0 2	02.00	5 2	0 0 5	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			RSUD Labuang Baji Kota Makassar			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
1.01	0 2	02.00	5 2	0 0 6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			RSUD Labuang Baji Kota Makassar			Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
1.01	0 2	02.00	5 3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				% ASN berkinerja sangat baik	98 %				195,299,999.0	0.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji		
1.01	0 2	02.00	5 3	0 0 8	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			RSUD Labuang Baji Kota Makassar			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	557 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	100 Orang	195,299,999.0	0.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
1.01	0	03.00			Rumah Sakit Khusus Daerah									40,641,910,534.0	42,148,273,930.76			
1.01	0 2	03.00	1 2		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN				Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSKD	100 %				2,754,313,549.0	2,856,400,214.59	Rumah Sakit Khusus Daerah		

1.01	02	03.00	12	02	Rehab Sedang/Berat & Pengembangan bangunan RS/UPTD Kesehatan			RS. Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Diadakan/Dibangun/Rehab	17 Sarana	Tersedianya Sarana & Prasarana RS yang diadakan / dibangun	100 %	2,219,213,549.0	2,321,300,214.59	Rumah Sakit Khusus Daerah	
1.01	02	03.00	12	03	Pengadaan Perlengkapan RS/UPTD Kesehatan			RS. Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah Jenis Perlengkapan yang Diadakan	15 Jenis	Terpenuhinya Perlengkapan Pelayanan Penunjang RS	100 %	535,100,000.0	535,100,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah	
1.01	02	03.00	15		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD</b>					<b>% Peningkatan pendapatan Rumah Sakit Khusus Daerah</b>	<b>100 %</b>				<b>30,462,216,095.0</b>	<b>31,591,276,385.64</b>	<b>Rumah Sakit Khusus Daerah</b>	
1.01	02	03.00	15	01	Peningkatan Kinerja RS BLUD			RS. Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah Pendapatan	37327 Juta Rupiah	Terealisasinya Pendapatan	100 %	30,462,216,095.0	31,591,276,385.64	Rumah Sakit Khusus Daerah	
											Jumlah Pasien Rawat Inap	5332 Pasien	Terlayannya Pasien Rawat Inap	100 %				
											Jumlah Pasien Rawat Jalan	56004 Pasien	Terlayannya Pasien Rawat jalan	100 %				
1.01	02	03.00	16		<b>PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, MAKAN MINUM DAN LOGISTIK RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN</b>					<b>Cakupan ketersediaan obat-obatan, makan minum dan logistik RS/UPTD Kesehatan</b>	<b>100 %</b>				<b>1,269,871,788.0</b>	<b>1,316,938,678.77</b>	<b>Rumah Sakit Khusus Daerah</b>	
1.01	02	03.00	16	03	Pengadaan Bahan-bahan Logistik RS			RS. Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah Bahan-bahan Logistik yang Diadakan	50 Jenis	Terpenuhinya Kebutuhan Logistik RS	100 %	1,269,871,788.0	1,316,938,678.77	Rumah Sakit Khusus Daerah	
1.01	02	03.00	50		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>				<b>6,155,509,102.0</b>	<b>6,383,658,651.76</b>	<b>Rumah Sakit Khusus Daerah</b>	
1.01	02	03.00	50	03	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			RS. Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	255 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	6,155,509,102.0	6,383,658,651.76	Rumah Sakit Khusus Daerah	
1.01	02	04.00			Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar										<b>56,928,742,744.33</b>	<b>59,038,765,949.87</b>		
1.01	02	04.00	03		<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)</b>					<b>Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan</b>	<b>87.5 %</b>				<b>1,192,500,000.0</b>	<b>1,465,375,000.0</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar</b>	
1.01	02	04.00	03	01	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesehatan			Kota Makassar Luar Sulawesi Selatan			Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	40 Orang	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis bidang kesehatan di	100 %	225,000,000.0	250,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	

1.01	02	04.00	03	002	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan			RSUD Haji Kota Makassar				Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	Terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	200,000,000.0	250,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	03	003	Akreditasi Rumah Sakit/ UPTD Kesehatan			Luar Susel				Jumlah pelaksanaan survey penilaian	1 Kali	Terlaksananya pelayanan sesuai standar	100 %	282,500,000.0	295,375,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	03	005	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan			RSUD Haji Kota Makassar				Jumlah kegiatan promosi kesehatan yang dilaksanakan	12 Bulan	Meningkatnya kegiatan promosi kesehatan yang dilaksanakan rumah sakit	100 %	175,000,000.0	350,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	03	006	Survey Kepuasan Pasien/ Pelanggan			RSUD Haji Kota Makassar				Jumlah pelaksanaan survey kepuasan pasien/pelanggan	1 Kali	Tersedianya angka kepuasan pelanggan di rumah sakit haji makassar	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	03	007	Pengembangan Tipe Rumah Sakit			Kota Makassar				Jenis dan Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan	1 Kali	Meningkatnya kegiatan pengembangan rumah sakit	100 %	160,000,000.0	170,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	05		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas)</b>						<b>Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi</b>	<b>1 RS</b>				<b>1,150,000,000.0</b>	<b>825,000,000.0</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar</b>
1.01	02	04.00	05	001	Monitoring dan Evaluasi Spesialisasi Rumah Sakit			Kota Makassar				Jumlah laporan monitoring dan evaluasi spesialisasi rumah sakit	1 Dokumen	Terlaksananya kegiatan spesialisasi rumah sakit	100 %	250,000,000.0	125,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	05	002	Studi Kelayakan Spesialisasi Rumah Sakit			Kota Makassar				Jumlah kajian spesialisasi yang tersusun	1 Dokumen/ Kajian	Tersedianya data dan laporan kajian yang lengkap	100 %	500,000,000.0	350,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	05	003	Peningkatan Mutu dan Spesialisasi Rumah Sakit			Kota Makassar				Jumlah Aparatur kesehatan yang ditingkatkan	25 Orang	Meningkatnya kompetensi aparatur kesehatan sesuai	100 %	400,000,000.0	350,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	02	04.00	12		<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN</b>						<b>Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Haji Makassar</b>	<b>85.5 %</b>				<b>14,473,298,757.33</b>	<b>14,176,593,082.71</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar</b>
1.01	02	04.00	12	001	Rehabilitasi Sedang/Berat dan Pengembangan Bangunan Rumah Sakit/UPTD Kesehatan			RSUD Haji Kota Makassar				Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang direhabilitasi dan dikembangkan	3 Unit	Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan bangunan rumah sakit	100 %	2,000,000,000.0	2,750,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar

1.01	0 2	04.00	1 2	0 0 2	Pengadaan Alat alat kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit/ UPTD Kesehatan			RSUD Haji Kota Makassar			Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan	5 Jenis	Tersedianya alat-alat kesehatan sebagai sarana pelayanan kesehatan rumah sakit	100 %	8,250,000,000.0	8,000,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	0 2	04.00	1 2	0 0 3	Pengadaan Ambulance Rumah Sakit/UPTD Kesehatan			RSUD Haji Kota Makassar			Jumlah ambulance yang diadakan	1 Unit	Tersedianya Ambulance sebagai sarana layanan kesehatan RS	100 %	800,000,000.0	0.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	0 2	04.00	1 2	0 0 4	Pengadaan Mebeuler Rumah Sakit/UPTD Kesehatan			RSUD Haji Kota Makassar			Jumlah meubeler yang diadakan	20 Unit	Tersedianya mebeuler rumah sakit	100 Unit	423,298,757.33	120,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	0 2	04.00	1 2	0 0 6	Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ UPTD Kesehatan			RSUD Haji Kota Makassar			Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan dikembangkan	1 Unit	Tersedianya pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100 %	3,000,000,000.0	3,306,593,082.71	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
<b>1.01</b>	<b>0 2</b>	<b>04.00</b>	<b>1 3</b>		<b>PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN</b>					<b>Cakupan sarana dan prasarana RSUD Haji Makassar dalam kondisi baik</b>					<b>350,000,000.0</b>	<b>1,170,000,000.0</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar</b>
1.01	0 2	04.00	1 3	0 0 1	Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana rumah sakit			RSUD Haji Kota Makassar			Jumlah jenis sarana dan prasarana Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	2 Jenis	Terpeliharanya sarana dan prasarana Rumah Sakit	100 %	200,000,000.0	720,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	0 2	04.00	1 3	0 0 2	Pemeliharaan rutin/ berkala alat - alat kesehatan dan kedokteran rumah sakit/ UPTD Kesehatan			RSUD Haji Kota Makassar			Jumlah jenis/unit alkes dan alked yang dipelihara	10 Unit	Tersedianya alkes dan alked dengan kondisi yang baik	100 %	150,000,000.0	450,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
<b>1.01</b>	<b>0 2</b>	<b>04.00</b>	<b>1 5</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD</b>					<b>% Peningkatan pendapatan RSUD Haji Makassar</b>					<b>38,887,943,987.0</b>	<b>40,329,297,867.16</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar</b>
1.01	0 2	04.00	1 5	0 0 1	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja RS BLUD			RSUD Haji Kota Makassar			Jumlah pasien rawat jalan yang terlayani	28834 Pasien	Terlayannya pasien rawat jalan sesuai standar	87 %	38,887,943,987.0	40,329,297,867.16	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
									Jumlah pasien rawat inap yang terlayani	10826 Pasien	Terlayannya pasien rawat inap sesuai standar	87 %					
									Jumlah pendapatan rumah sakit	39382000 000 Rp	Meningkatnya pendapatan Rumah Sakit	1 %					
<b>1.01</b>	<b>0 2</b>	<b>04.00</b>	<b>5 0</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>					<b>125,000,000.0</b>	<b>150,000,000.0</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar</b>

1.01	0 2	04.00	5 0	0 1 0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Luar Provinsi Sulse				Jumlah perjalanan dinas	10 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi	10 Orang	125,000,000.0	150,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	0 2	04.00	5 1		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	85 %					650,000,000.0	802,500,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	0 2	04.00	5 1	0 0 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			RSUD Haji Kota Makassar				Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	275,000,000.0	300,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	0 2	04.00	5 1	0 0 9	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			RSUD Haji Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	20 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	275,000,000.0	302,500,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	0 2	04.00	5 1	0 1 2	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			RSUD Haji Kota Makassar				Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	10 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	100 %	100,000,000.0	200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	0 2	04.00	5 2		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	90 %					100,000,000.0	120,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
1.01	0 2	04.00	5 2	0 0 2	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			RSUD Haji Kota Makassar				Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	100,000,000.0	120,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
												Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	1 Dokumen			
												Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	1 Dokumen			
												Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	4 Dokumen			
1.01	0 2	05.00			Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah											22,550,998,446.26	23,386,835,103.39	
1.01	0 2	05.00	0 3		<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)</b>					Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan	100 %					100,000,000.0	100,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah



1.01	0 2	05.00	0 3	0 0 1	Akreditasi Rumah Sakit/UPTD Kesehatan			RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar			Jumlah Dokumen Akreditasi Rumah Sakit	1 Dokumen	Terwujudnya Rumah Sakit yang Terakreditasi Versi SNARS	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
<b>1.01</b>	<b>0 2</b>	<b>05.00</b>	<b>0 5</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas)</b>					<b>Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi</b>	<b>1 RS</b>				<b>350,000,000.0</b>	<b>360,000,000.0</b>	<b>Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah</b>
1.01	0 2	05.00	0 5	0 0 1	Studi Kelayakan Spesialisasi Rumah Sakit			RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar			Jumlah Dokumen Studi Kelayakan yang Tersedia	1 Dokumen	Terlaksananya a Studi Kelayakan Spesialisasi Rumah Sakit	100 %	50,000,000.0	60,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
1.01	0 2	05.00	0 5	0 0 2	Peningkatan Mutu dan Kualitas Spesialisasi Layanan Rumah Sakit			RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar			Jumlah Tenaga Spesialisasi Layanan yang Terlatih	20 Orang	Tersedianya Tenaga Spesialisasi Layanan yang Terlatih	100 %	250,000,000.0	250,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
1.01	0 2	05.00	0 5	0 0 3	Monitoring Dan Evaluasi Spesialisasi Layanan Rumah Sakit			RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi yang Tersusun	1 Dokumen	Terlaksananya a Monitoring dan Evaluasi	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
<b>1.01</b>	<b>0 2</b>	<b>05.00</b>	<b>1 2</b>		<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN</b>					<b>Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Ibu dan Anak Siti Fatimah</b>	<b>100 %</b>				<b>5,450,000,000.0</b>	<b>5,675,000,000.0</b>	<b>Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah</b>
1.01	0 2	05.00	1 2	0 0 2	Pengadaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / UPTD Kesehatan			RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar			Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Diadakan	1 Unit	Tersedianya Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100 Unit	450,000,000.0	400,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
1.01	0 2	05.00	1 2	0 0 3	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit / UPTD Kesehatan			RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar			Jumlah Alat-Alat Kesehatan dan Kedokteran yang Diadakan	10 Unit	Terpenuhinya Alat-Alat Kesehatan Kedokteran Dirumah Sakit	100 %	5,000,000,000.0	5,275,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
<b>1.01</b>	<b>0 2</b>	<b>05.00</b>	<b>1 3</b>		<b>PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN</b>					<b>Cakupan sarana dan prasarana RSUD Ibu dan Anak Siti Fatimah dalam kondisi baik</b>	<b>100 %</b>				<b>330,000,000.0</b>	<b>350,904,254.39</b>	<b>Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah</b>
1.01	0 2	05.00	1 3	0 0 1	Pemeliharaan Rutin Berkala / Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / UPTD Kesehatan			RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Dipelihara	7 Jenis	Berfungsinya Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Layanan Kesehatan	100 %	130,000,000.0	140,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah

1.01	0 2	05.00	1 3	0 0 2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Limbah Rumah Sakit / UPTD Kesehatan			RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar			Jumlah Ipal Rumah Sakit yang Direhabilitasi	1 Unit	Terhindarnya Pencemaran Akibat Limbah Rumah Sakit	100 %	130,000,000.0	140,904,254.39	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	
1.01	0 2	05.00	1 3	0 0 3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit / UPTD Kesehatan			RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar			Jumlah Alat-Alat Kesehatan yang Dipelihara	110 Jenis	Berfungsinya dan Termanfaatnya Alat-Alat Kesehatan yang Terkalibrasi dan Alat Laboratorium	100 %	70,000,000.0	70,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	
1.01	0 2	05.00	1 5		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD</b>					% Peningkatan pendapatan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah	7.5 %			15,535,132,263.26	16,110,930,849.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah		
1.01	0 2	05.00	1 5	0 0 1	Peningkatan Kinerja Pelayanan Rumah Sakit BLUD			RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar			Jumlah Pasien Rawat Inap	5200 Pasien	Terlayannya Pasien Rawat Inap	100 %	15,535,132,263.26	16,110,930,849.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	
									Jumlah Pasien Rawat Jalan	3300 Pasien	Terlayannya Pasien Rawat Jalan	100 %						
									Jumlah Pendapatan	15535132263 Rupiah	Terealisasinya Pendapatan	100 %						
1.01	0 2	05.00	5 0		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %			595,866,183.0	725,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah		
1.01	0 2	05.00	5 0	0 0 3	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	15 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	300,000,000.0	300,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	
1.01	0 2	05.00	5 0	0 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	25,000,000.0	25,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	
1.01	0 2	05.00	5 0	0 1 0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar			Jumlah perjalanan dinas	1 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	136 Orang	270,866,183.0	400,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	
1.01	0 2	05.00	5 1		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %			60,000,000.0	65,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah		
1.01	0 2	05.00	5 1	0 0 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	50,000,000.0	55,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah	

1.01	0 2	05.00	5 1	0 1 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	10,000,000.0	10,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
1.01	0 2	05.00	5 3		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					% ASN berkinerja sangat baik	100 %				130,000,000.0	0.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
1.01	0 2	05.00	5 3	0 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	140 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	130,000,000.0	0.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Siti Fatimah
1.01	0 2	06.00			Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi										21,405,948,949.15	22,199,345,164.17	
1.01	0 2	06.00	0 3		<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)</b>					Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan	100 %				400,679,979.0	411,824,468.05	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
1.01	0 2	06.00	0 3	0 0 1	Jasa Pembersihan Dan Pengendalian Hama (Pest Control)			RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Kota Makassar			Jumlah Kunjungan Pembersihan Hama	144 Kali	Terlaksananya Pembersihan Hama	100 %	104,400,000.0	104,400,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
1.01	0 2	06.00	0 3	0 0 2	Pengemangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan			RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Kota Makassar			Jumlah Media Promosi Yang Disediakan	2 Jenis	Termanfaatkannya Media Promosi	100 %	196,279,979.0	207,424,468.05	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
1.01	0 2	06.00	0 3	0 0 3	Pengukuran Kepuasan Pelanggan			RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Kota Makassar			Jumlah Pelanggan Yang Merasa Puas Terhadap Pelayanan RSKD Ibu dan Anak Pertiwi	13241 Orang	Jumlah Pelanggan Yang Merasa Puas Terhadap Pelayanan RSKD Ibu dan Anak Pertiwi	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
1.01	0 2	06.00	1 2		<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN</b>					Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSKD Ibu dan Anak Pertiwi	100 %				1,959,937,018.15	1,999,222,837.45	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
1.01	0 2	06.00	1 2	0 0 1	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RS			RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Kota Makassar			Jumlah Alat- Alat Kesehatan RS Yang Diadakan	30 Unit	Termanfaatkannya Alat- Alat Kesehatan RS	100 %	1,342,937,018.15	1,382,222,837.45	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
1.01	0 2	06.00	1 2	0 0 3	Pembangunan Gedung RS			RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Kota Makassar			Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	1 Unit	Termanfaatkannya Gedung Yang Direhab	100 %	617,000,000.0	617,000,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
1.01	0 2	06.00	1 5		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD</b>					% Peningkatan pendapatan RSKD Ibu dan Anak Pertiwi	5 %				19,045,331,952.0	19,788,297,858.67	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi

1.01	0 2	06.00	1 5	0 0 1	Peningkatan Kinerja Pelayanan Rumah Sakit BLUD			RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Kota Makassar				Jumlah Pasien Rawat Jalan	8837 Pasien	Terlayannya Pasien Rawat Jalan	100 %	19,045,331,952.0	19,788,297,858.67	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
												Jumlah Pasien Rawat Inap	4404 Pasien	Terlayannya Pasien Rawat Inap	100 %				
												Jumlah pendapatan	16489629 779 Rupiah	Terealisasinya pendapatan	100 %				
1.01	0 2	07.00			Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat											12,925,455,553.0	13,304,528,334.73		
1.01	0 2	07.00	0 3		PROGRAM UPAYA KESEHATAN DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (Prioritas)				Cakupan pasien yang tertangani sesuai standar pelayanan	100 %						100,000,000.0	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	0 3	0 0 2	Peningkatan Kualitas dokter dan paramedis			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar				Jumlah dokter dan paramedis yang mengikuti workshop dan bimtek baik laki-laki maupun perempuan	2 Orang	Meningkatnya keterampilan dokter dan paramedis baik laki-laki maupun perempuan	2 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	0 3	0 0 7	Jasa Pembersihan dan Pengendalian Hama (Pest Control)			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar				Jenis pembersihan dan pengendalian hama (pest control)	2 Jenis Tindakan	Terciptanya kebersihan dan pengendalian hama di rumah sakit	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	0 5		PROGRAM PENGEMBANGAN SPESIALISASI DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT (Prioritas)				Jumlah RS Provinsi yang tertata kelembagaannya berdasarkan spesialisasi	1 RS						200,453,320.0	207,882,978.70	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	0 5	0 0 2	Peningkatan mutu dan kualitas spesialisasi layanan RS			Sayang Rakyat Kota Makassar				Jumlah Tenaga Spesialisasi Layanan yang Terlatih	20 Orang	Tersedianya Tenaga Spesialisasi Layanan yang Terlatih	100 %	100,453,320.0	107,882,978.70	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	0 5	0 0 3	Monitoring dan evaluasi spesialisasi layanan RS			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar				Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi yang Tersusun	1 Dokumen	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	1 2		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN				Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat	100 %						949,048,688.0	845,343,786.22	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	1 2	0 0 2	Rehabilitasi Sedang/Berat dan Pengembangan Bangunan Rumah Sakit			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar				Jumlah Bangunan Rumah Sakit Yang di Rehabilitasi	1 Unit	Tersedianya Bangunan Rumah Sakit yang Telah Direhabilitasi	100 %	400,000,000.0	545,343,786.22	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	1 2	0 0 7	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah RS			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar				Jumlah Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah RS	1 Unit	Tersedianya pembangunan instalasi pengolahan limbah RS	100 %	100,000,000.0	0.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	

1.01	0 2	07.00	1 2	0 0 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Instalasi Pengolahan Limbah RS			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar			Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah RS yang direhabilitasi	1 Unit	Tersedianya instalasi pengolahan limbah RS yang direhabilitasi	100 %	100,000,000.0	0.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	1 2	0 0 9	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar			Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan	1 Unit	Tersedianya alat-alat kesehatan di RS	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	1 2	0 1 1	Pengadaan Mebeuler Rumah Sakit			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar			Jumlah mebeuler RS yang diadakan	5 Unit	Bertambahnya sarana dan prasarana RS	100 Tahun	100,000,000.0	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	1 2	0 1 2	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar			Jumlah perlengkapan rumah tangga RS yang diadakan	2 Unit	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	100 %	49,048,688.0	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	1 2	0 1 4	Pengembangan Tipe Rumah Sakit			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar			Jumlah tipe rumah sakit yang dikembangkan	1 Tipe	Peningkatan status rumah sakit dari Tipe C ke Tipe B	1 Tipe	100,000,000.0	0.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	1 3		<b>PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN</b>					<b>Cakupan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat dalam kondisi baik</b>					<b>200,000,000.0</b>	<b>250,000,000.0</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat</b>	
1.01	0 2	07.00	1 3	0 0 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar			Jumlah bangunan rumah sakit yang dipelihara	5 Unit	Terpeliharanya bangunan rumah sakit	100 %	50,000,000.0	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	1 3	0 0 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah RS			RSUD sayang Rakyat Kota Makassar			Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah RS yang dipelihara	1 Unit	Terpeliharanya instalasi pengolahan limbah RS	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	1 3	0 0 5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar			Jumlah alat-alat kesehatan RS yang dipelihara	5 Unit	Berfungsinya dan Termanfaatkannya Alat-Alat Kesehatan yang Terkalibrasi dan Alat Laboratorium	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	1 5		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD</b>					<b>% Peningkatan pendapatan RSUD Sayang Rakyat</b>					<b>9,772,099,327.0</b>	<b>10,134,295,211.47</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat</b>	
1.01	0 2	07.00	1 5	0 0 1	Peningkatan Kinerja Pelayanan RS BLUD			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar			Jumlah Pasien Rawat Jalan	0 Orang	Terlayannya pasien rawat Jalan	100 %	9,772,099,327.0	10,134,295,211.47	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
										Jumlah Pasien Rawat Inap	2777 Orang	Terlayannya pasien rawat inap	100 %					

											Jumlah pendapatan BLUD	97720993 27 Rp	Terealisasinya pendapatan rumah sakit	100 %					
1.01	0 2	07.00	1 6		<b>PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, MAKAN MINUM DAN LOGISTIK RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN</b>					<b>Cakupan ketersediaan Obat-obatan, Makan Minum dan Logistik RS/UPTD Kesehatan</b>	<b>100 %</b>				<b>902,039,938.0</b>	<b>935,473,404.14</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat</b>		
1.01	0 2	07.00	1 6	0 0 1	Pengadaan Obat-obatan RS			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar				Jumlah Obat-obatan RS yang diadakan	10 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan rumah sakit	100 Persen	850,000,000.0	900,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	1 6	0 0 3	Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar				Jumlah Jenis Logistik RS yang Diadakan	5 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan logistik rumah sakit	100 Persen	52,039,938.0	35,473,404.14	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	5 0		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>					<b>531,814,280.0</b>	<b>501,532,954.20</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat</b>	
1.01	0 2	07.00	5 0	0 0 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar				Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	2 Jenis	331,814,280.0	301,532,954.20	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	5 0	0 1 0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah perjalanan dinas	20 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi	20 Orang	200,000,000.0	200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	5 1		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>					<b>100,000,000.0</b>	<b>100,000,000.0</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat</b>	
1.01	0 2	07.00	5 1	0 0 9	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	5 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	5 1	0 1 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	0 2	07.00	5 2		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					<b>% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu</b>	<b>100 %</b>					<b>20,000,000.0</b>	<b>30,000,000.0</b>	<b>Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat</b>	

1.01	02	07.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar			Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	1 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	100 %	20,000,000.0	30,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
											Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	1 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %			
1.01	02	07.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					% ASN berkinerja sangat baik	100 %			150,000,000.0	200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat	
1.01	02	07.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			RSUD Sayang Rakyat Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	200 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	77 %	150,000,000.0	200,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
1.01	03				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1.01	03	01.00			Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang									322,366,455,441.78	328,731,780,888.44		
1.01	03	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA (Prioritas)	Penguatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	100 %			800,000,000.0	800,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	
1.01	03	01.00	01	003	Survey dan Investigasi Pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota			Kabupaten Gowa			Jumlah dokumen kelayakan study (FS) yang disusun	1 Dokumen	Ketersediaan dokumen hasil survey dan investigasi pengembangan SPAM lintas	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
								Kabupaten Maros									
								Kabupaten Takalar									
								Kota Makassar									
1.01	03	01.00	01	004	Desain Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota			Kabupaten Gowa			Jumlah dokumen detail desain (DED) yang disusun	1 Dokumen	Ketersediaan dokumen detail desain (DED)	100 %	400,000,000.0	400,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
								Kabupaten Maros									
								Kabupaten Takalar									
								Kota Makassar									
1.01	03	01.00	01	005	Sosialisasi Kebijakan dan Pengaturan SPAM Lintas Kabupaten/Kota			Kabupaten Gowa			Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang	Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
								Kabupaten Maros									
								Kabupaten Takalar									
								Kota Makassar									
1.01	03	01.00	01	006	Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota			Kabupaten Gowa			Jumlah dokumen RISPAM yang disusun	1 Dokumen	Ketersediaan dokumen RISPAM	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
								Kabupaten Maros									



								Kabupaten Takalar										Ruang	
								Kota Makassar											
1.01	03	01.00	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL (Prioritas)	Penguatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (SPM)	100 %			800,000,000.0	800,000,000.0		Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		
1.01	03	01.00	02	001	Survey dan Investigasi Pengembangan Pengolahan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota			Kabupaten Gowa				Jumlah dokumen kelayakan study (FS) pengembangan pengolahan Air Limbah Domestik lintas Kab/Kota	1 Dokumen	Cakupan ketersediaan dokumen kelayakan study (FS) pengembangan pengolahan Air Limbah Domestik lintas	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	
								Kabupaten Maros											
								Kabupaten Takalar											
								Kota Makassar											
1.01	03	01.00	02	003	Desain Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional			Kabupaten Gowa				Jumlah dokumen detail desain pengembangan pengolahan air limbah domestik	1 Dokumen	Ketersediaan dokumen detail desain (DED) pengembangan pengolahan air limbah	100 %	400,000,000.0	400,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	
								Kabupaten Maros											
								Kabupaten Takalar											
								Kota Makassar											
1.01	03	01.00	02	004	Sosialisasi Kebijakan dan Pengaturan Pengolahan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota			Kabupaten Gowa				Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang	Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	
								Kabupaten Maros											
								Kabupaten Takalar											
								Kota Makassar											
1.01	03	01.00	02	005	Penyusunan Rencana Pengelolaan Air Limbah			Kabupaten Gowa				Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan air limbah yang disusun	1 Dokumen	Cakupan ketersediaan rencana induk pengelolaan air limbah	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	
								Kabupaten Maros											
								Kabupaten Takalar											
								Kota Makassar											
1.01	03	01.00	03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA (Prioritas)	Peningkatan Ketahanan Pangan, Sumber Daya Air, dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			% Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (SPM)	71.46 %			265,608,022,473.0	255,556,510,793.0		Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		
										Jumlah tambahan luas lahan yang terlayani sistem pengairan irigasi (Prioritas)	15014.3 Ha								

1.01	0 3	01.00	0 3	0 0 1	Inventarisasi database kondisi jaringan irigasi, sarana prasarana irigasi dan air bersih			Kabupaten Barru			Jumlah dokumen database Jaringan Irigasi, sarana prasarana irigasi dan air bersih	1 Dok.	Cakupan ketersediaan dokumen database jaringan irigasi, sarana prasarana irigasi dan air bersih	1 Dok	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
								Kabupaten Bone									
								Kabupaten Bulukumba									
								Kabupaten Enrekang									
								Kabupaten Gowa									
								Kabupaten Luwu									
								Kabupaten Luwu Timur									
								Kabupaten Luwu Utara									
								Kabupaten Maros									
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan									
								Kabupaten Pinrang									
								Kabupaten Sidenreng Rappang									
								Kabupaten Sinjai									
								Kabupaten Soppeng									
								Kabupaten Toraja Utara									
								Kabupaten Wajo									
1.01	0 3	01.00	0 3	0 0 2	Perencanaan Teknis dan Study Pengembangan jaringan Irigasi & Air Bersih, Rawa Tambak & Air Baku			Kabupaten Barru			Jumlah dokumen perencanaan Teknis dan Study Pengembangan jaringan Irigasi, Rawa Tambak dan Air Baku	25 Dok.	Cakupan Dokumen perencanaan teknis dan Study Pengembangan jaringan Irigasi, Rawa Tambak dan Air Baku yang tersedia	25 Dok.	12,118,074,925.0	12,164,846,049.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
								Kabupaten Bone									
								Kabupaten Bulukumba									
								Kabupaten Enrekang									
								Kabupaten Gowa									
								Kabupaten Luwu									
								Kabupaten Luwu Timur									
								Kabupaten Luwu Utara									
								Kabupaten Maros									
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan									
								Kabupaten Pinrang									
								Kabupaten Sidenreng Rappang									
								Kabupaten Sinjai									
								Kabupaten Soppeng									



1.01	03	01.00	03	004	Perbaikan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)			D.I Bettu Kabupaten Bulukumba				Luas areal Daerah Irigasi yang ditingkatkan	0 Ha	Termanfaatnya Areal Daerah Irigasi yang ditingkatkan	0 Ha	7,968,281,860.0	8,087,806,087.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
								D.I Tubu Ampak Kabupaten Luwu				Luas areal Daerah Irigasi yang direhabilitasi	682 Ha	Termanfaatnya Areal Daerah Irigasi yang di rehabilitasi	682 Ha			
1.01	03	01.00	03	006	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Tambak, Rawa Sawah, Ladang Garam, Pantai dan Air Baku							Panjang saluran irigasi rawa tambak, pantai dan air baku yang ditingkatkan	10000 M	Termanfaatnya saluran irigasi rawa tambak, pantai dan air baku yang telah ditingkatkan	10000 M	3,500,000,000.0	3,552,500,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
								Kabupaten Bone				Panjang saluran irigasi rawa tambak, pantai dan air baku yang direhabilitasi	35000 M	Termanfaatnya saluran irigasi rawa tambak, pantai dan air baku yang direhabilitasi	35000 M			
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Maros										
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Takalar										
								Kabupaten Wajo										
1.01	03	01.00	03	007	Pengendalian, Operasi dan Pemeliharaan sarana Prasarana irigasi dan jaringan pengairan lainnya							Panjang sarana prasarana irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	10368 Meter	Berfungsinya sarana prasarana irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	10368 Meter	8,737,981,313.0	8,869,051,032.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
								Kabupaten Barru										
								Kabupaten Bone										
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Enrekang										
								Kabupaten Gowa										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Maros										



1.01	03	01.00	03	012	Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Pompengan Larona			Kabupaten Luwu			Wilayah cakupan Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air di Wilayah WS. Walanae	1 WS	Persentase Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air di Wilayah WS. Walanae	100 %	150,000,000.0	152,250,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	03	013	Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya Air Wil. S. Walanae Cenranae			Kabupaten Sidenreng Rappang			Wilayah cakupan pembinaan dan pelaksanaan Sumber Daya Air di Wilayah WS. Walanae	1 WS	Persentase pembinaan dan pelaksanaan Sumber Daya Air di Wilayah WS. Walanae	100 %	150,000,000.0	152,250,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	06		<b>PROGRAM PENANGGULANGAN DAERAH-DAERAH POTENSI BANJIR (Prioritas)</b>	<b>Penguatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah</b>	<b>Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur</b>			<b>Jumlah daerah potensi banjir yang tertangani (Prioritas)</b>	<b>8 Kawasan</b>				<b>350,000,000.0</b>	<b>450,000,000.0</b>	<b>Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang</b>
1.01	03	01.00	06	001	Inventarisasi potensi Daerah rawan banjir			Kabupaten Barru			Jumlah Daerah yang berpotensi banjir	2 Kab./Kota	Cakupan ketersediaan dokumen pemetaan Daerah yang berpotensi banjir	1 Dok.	40,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01	03	01.00	06	003	Pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana pengendali banjir			Kabupaten Barru			Jumlah bahan pengendalian banjir	8250 Lembar/Lap.	Tersedianya karung plastik	8250 Lembar/Lap.	180,000,000.0	230,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
								Kabupaten Bone			Jumlah bahan pengendalian banjir	440 Unit/Lap.	Tersedianya Kawat Bronjong	440 Unit/Lap.			
								Kabupaten Luwu									
								Kabupaten Luwu Timur									
								Kabupaten Luwu Utara									
								Kabupaten Pinrang									
								Kabupaten Sidenreng Rappang									
								Kabupaten Soppeng									
								Kabupaten Wajo									
								Kota Palopo									
1.01	03	01.00	06	000	Operasi dan pemeliharaan stasiun hidrologi, kualitas air, dan fasilitas			Kabupaten Bantaeng			Jumlah Stasiun	21 Kab./Kota;	Termanfaatnya data	83 Pos Curah Hujan/ Lap.	130,000,000.0	170,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air,

				4	penunjang lainnya			Kabupaten Barru			Hidrologi, kualitas air dan fasilitas penunjang lainnya	Lap.	dan terjaganya stasiun Hidrologi, kualitas air, dan fasilitas penunjang				Cipta Karya dan Tata Ruang
								Kabupaten Bone									
								Kabupaten Bulukumba									
								Kabupaten Enrekang									
								Kabupaten Gowa									
								Kabupaten Luwu									
								Kabupaten Luwu Timur									
								Kabupaten Luwu Utara									
								Kabupaten Maros									
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan									
								Kabupaten Pinrang									
								Kabupaten Sidenreng Rappang									
								Kabupaten Sinjai									
								Kabupaten Takalar									
								Kabupaten Tana Toraja									
								Kota Makassar									
1.01	03	01.00	07		PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA (Prioritas)					Panjang Sungai/Danau/Waduk yang dipelihara (Prioritas)	17500 Meter				21,211,246,095.0	21,311,448,550.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
										Cakupan Data Potensi Sumber Daya Air yang tersedia daya potensinya (Prioritas)	85 %						
1.01	03	01.00	07	02	Pengelolaan dan pengendalian konservasi dan pengembangan sungai, danau, dan waduk			# Desa Bolong, Bosso timur dan Limbong North Walenrang Luwu Regency South Sulawesi		Panjang perkuatan tebing sungai	7400 m	7400 m	7400 m	10,252,415,525.0	10,173,235,521.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	
							Kabupaten Bantaeng	# Kadong-Kadong West Bajo Luwu Regency		Jumlah Penahan Sedimen, Embung, dan Cekdam yang terbangun	4 Bangunan	4 Bh	4 Bh				
							Kabupaten Barru	#Desa Opo Kecamatan Ajangale Ajangale Bone Regency South Sulawesi									







1.01	03	01.00	07	008	Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan Teknis UPT Wil. S. Pompengan Larona			Kabupaten Luwu			Wilayah cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya	1 WS	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan Teknis Sumber Daya	100 %	150,000,000.0	152,250,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
								Kabupaten Luwu Timur									
								Kabupaten Luwu Utara									
								Kota Palopo									
1.01	03	01.00	10		<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG</b>										<b>1,660,060,834.50</b>	<b>1,865,000,000.0</b>	<b>Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang</b>
1.01	03	01.00	10	001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang			Kota Makassar			Jumlah Dokumen KLHS RTR Provinsi yang disusun	2 KLHS RTR KSP	Cakupan Dokumen dan Gambaran umum wilayah perencanaan	2 KLHS RTR KSP	1,000,000,000.0	1,015,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
								Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Perda RTR Provinsi yang ditetapkan	2 Perda RTRW	Perda RTR Provinsi	2 Perda RTRW			
											Jumlah Dokumen RTR Provinsi yang disusun	2 RTR KSP	Cakupan Data Dokumen KLHS RTR Provinsi	2 RTR KSP			
1.01	03	01.00	10	002	Fasilitasi dan Pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Kab/Kota						Jumlah cakupan fasilitasi dan pembinaan Kab/Kota dalam menyusun	7 RTRW Kab/RDTR /RTR KSK	Kab./Kota yang menyelesaikan penyusunan Rencana Tata Ruangnya	7 RTRW Kab/RDTR/RT R KSK	283,083,500.0	300,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
								Kota Makassar									
								Provinsi Sulawesi Selatan									
1.01	03	01.00	10	003	Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah						Jumlah Rekomendasi penyelenggaraan penataan ruang yang diberikan	10 Rekomendasi	Rekomendasi penyelenggaraan penataan ruang yang terbit	1 Laporan	105,864,500.0	150,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
								Kota Makassar									
								Provinsi Sulawesi Selatan									
1.01	03	01.00	10	004	Penyusunan dan Penetapan ketentuan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi			Kota Makassar			Jumlah Dokumen RTR Provinsi yang dilengkapi dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang	1 Naskah Teknis	Cakupan Dokumen data RTR Provinsi yang dilengkapi dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang	1 Dok.	146,414,562.0	150,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
								Provinsi Sulawesi Selatan			Arahan pengendalian pemanfaatan ruang	11 Papan Larangan	Arahan pengendalian pemanfaatan ruang	11 Papan Larangan			
1.01	03	01.00	10	005	Fasilitasi dan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kab / Kota			Kota Makassar			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan Pengendalian Pemanfaatan	2 Kab./Kota	Kab./Kota yang berhasil melakukan Pengendalian Pemanfaatan ruang	2 Laporan	71,711,272.50	150,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
								Provinsi Sulawesi Selatan									

1.01	03	01.00	1006	Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang			Kota Makassar				Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang	1 Laporan	Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang	1 Dok	52,987,000.0	100,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	
							Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah PPNS yang dibina	20 Org	Jumlah PPNS yang dibina (laki-laki dan Perempuan)	1 Laporan				
											Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang oleh PPNS penataan ruang yang tertangani	2 Kasus	Persentase penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang oleh PPNS penataan ruang	100 %				
1.01	03	01.00	13	PROGRAM PENGEMBANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN GEDUNG					% Bangunan /Gedung /Lingkungan Negara yang Terkelola	95 %					18,950,000,000.0	34,835,632,015.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	
1.01	03	01.00	1301	Pembangunan dan peningkatan bangunan dan lingkungan gedung							Jumlah pembangunan dan peningkatan bangunan Masjid di kawasan CPI	100 %	Persentase pembangunan dan peningkatan bangunan Masjid di kawasan CPI	100 %	18,950,000,000.0	34,835,632,015.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	
							Kabupaten Bantaeng				Jumlah pembangunan dan peningkatan bangunan Negara Asset Dinas	0 Bangunan	Jumlah bangunan Negara Asset Dinas dalam kondisi Baik	0 Bangunan				
							Kabupaten Barru				Jumlah Pembangunan Islamic Center Makassar	0 Bangunan	Jumlah bangunan Islamic Center Makassar yg terbangun	0 Bangunan				
							Kabupaten Bone				Jumlah Konstruksi Bangunan Negara dan Public Services yang terbangun	1 Bangunan	Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Bangunan Gedung Negara dan Public Service	1 Bangunan				
							Kabupaten Bulukumba											
							Kabupaten Enrekang											
							Kabupaten Gowa											



								Kabupaten Wajo				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	3 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS (Keamanan)	100 %					
								Kota Makassar				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	8 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS (Cleaning Services)	100 %					
								Kota Palopo				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	5 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %					
												Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	1 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Instruktur	100 %					
												Jumlah Jasa Tenaga PPA, POB dan PCH	318 Orang	Peningkatan Kesejahteraan PPA, POB dan PCH	100 %					
1.01	03	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kantor Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Makassar				Jumlah ATK yang tersedia	50 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	400,229,639.28	400,088,086.44	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		
												Jumlah Cetakan/Jilid yang tersedia	10 Jenis Cetakan	Ketersediaan Cetakan/Jilid	100 %					
												Jumlah Penggandaan yang tersedia	100000 Rangkap	Ketersediaan	100 %					
1.01	03	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kantor Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Makassar				Jumlah biaya jaman makan dan minum yang tersedia	2 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	395,109,050.0	401,035,685.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		
1.01	03	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kantor Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Makassar				Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	140,000,000.0	173,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		
1.01	03	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Ibukota Jakarta				Jumlah perjalanan dinas	50 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	15 Orang	527,800,000.0	535,717,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		
								Kabupaten Bantaeng												
								Kabupaten Barru												
								Kabupaten Bone												
								Kabupaten Bulukumba												
								Kabupaten Enrekang												
								Kabupaten Gowa												
								Kabupaten Jeneponto												
								Kabupaten Kepulauan Selayar												
								Kabupaten Luwu												
								Kabupaten Luwu Timur												
								Kabupaten Luwu Utara												





				9				Kabupaten Pinrang					dan peralatan gedung kantor yang tersedia		dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan				Cipta Karya dan Tata Ruang		
								Kabupaten Wajo													
								Kota Makassar													
								Kota Palopo													
1.01	03	01.00	52							% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %						865,180,000.0		876,657,700.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	
1.01	03	01.00	52	001				Kota Makassar					Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	150 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	150,000,000.0		152,250,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	
1.01	03	01.00	52	002				Kota Makassar					Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	5 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	70 Dokumen	215,180,000.0		218,407,700.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	
													Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen					
													Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	0 Dokumen					
													Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	1 Dokumen					
1.01	03	01.00	52	003				Ibukota Jakarta					Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi , tugas pembantuan dan DAK	50 Usulan Kegiatan	Ketersediaan Usulan Kegiatan dana dekonsentrasi , tugas pembantuan dan DAK	1 Laporan	75,000,000.0		75,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	
								Kota Makassar													
								Luar Provinsi Sulawesi Selatan													
1.01	03	01.00	52	005				Kabupaten Gowa					Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	325,000,000.0		331,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	
								Kabupaten Pinrang					Jumlah Laporan Administrasi Keuangan UPTD WS. Sadang	1 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan UPTD WS. Sadang	100 %					

							Kabupaten Wajo				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan UPTD WS. Walanae Cenranae	1 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan UPTD WS. Walanae Cenranae	100 %					
							Kota Makassar				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan UPTD WS. Jeneberang	1 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan UPTD WS. Jeneberang	100 %					
							Kota Palopo				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan UPTD WS. Pompengan Larona	1 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan UPTD WS. Pompengan Larona	100 %					
1.01	03	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun		Kota Makassar				Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		
1.01	03	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Makassar				Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		
1.01	03	01.00	53		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>										555,825,000.0	556,662,375.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		
1.01	03	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Kabupaten Gowa				Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian nya	330 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	55,825,000.0	56,662,375.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang		
							Kabupaten Pinrang				Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	330 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %					
							Kabupaten Wajo				Jumlah Tenaga Ahli Professional	5 Orang	Tersedianya Tenaga Ahli (Laki-Laki dan Perempuan) Professional di setiap Bidang	100 %					
							Kota Makassar												
							Kota Palopo												

1.01	03	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	410 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	500,000,000.0	500,000,000.0	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01	03	02.00			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi										585,229,125,184.0	612,068,849,889.20	
1.01	03	02.00	04		PROGRAM BINA KONSTRUKSI (Prioritas)					% Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar (Prioritas)	85 %				4,014,588,000.0	4,040,867,400.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.01	03	02.00	04	001	Pembinaan, Peningkatan Kompetensi Lembaga/ asosiasi Jasa Konstruksi tingkat Provinsi			Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah Dokumen Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi	3 Dokumen	Termanfaatkannya Dokumen Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi	100 %	857,000,000.0	857,000,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
											Jumlah Kab/Kota yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kompetensi jasa konstruksi	24 Kab/Kota	Meningkatnya kompetensi/kualitas jasa penyelenggara jalan baik laki-laki maupun perempuan	100 %			
											Jumlah Asosiasi/Badan Usaha/OPD yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kompetensi jasa konstruksi	40 Asosiasi	Meningkatnya kompetensi/kualitas jasa penyelenggara jalan baik laki-laki maupun perempuan	100 %			
1.01	03	02.00	04	003	Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Jasa Konstruksi			Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah laporan Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Jasa Konstruksi	3 Laporan	Tertibnya pelaksanaan jasa konstruksi	100 %	1,707,588,000.0	1,733,867,400.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.01	03	02.00	04	004	Identifikasi Pelaku Jasa Konstruksi di Provinsi Sulawesi Selatan			Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah pelaku jasa konstruksi di Sulawesi Selatan yang teridentifikasi	3 Dokumen	Persentase pelaku jasa konstruksi di Sulawesi yang teridentifikasi	100 %	450,000,000.0	450,000,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

1.01	03	02.00	04	005	Pembinaan, Peningkatan Mutu Pelaksanaan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi			Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan mutu pelaksanaan jasa konstruksi	6 Kegiatan	Persentase Meningkatnya pembinaan dan peningkatan mutu pelaksanaan jasa konstruksi	100 %	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
1.01	03	02.00	05		<b>PROGRAM PRESERVASI JALAN (Prioritas)</b>	<b>Penguatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah</b>	<b>Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur</b>			<b>% Tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang (mantap) (SPM)</b>	<b>62.61 %</b>				<b>283,652,045,943.32</b>	<b>316,319,776,635.40</b>	<b>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi</b>	
1.01	03	02.00	05	001	Pengaturan Teknis, Pemeliharaan berkala dan Penanganan Pasca Bencana			Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah Paket Pasca bencana alam yang ditangani	6 Paket	Tertanganinya Penanganan Ruas Jalan Pasca Bencana	100 %	7,291,978,570.50	9,126,577,499.04	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
											Jumlah paket Silpa yang terbayarkan	0 Paket	Terbayarnya Silpa 2017	0 %				
1.01	03	02.00	05	002	Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan			Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah Laporan Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan	12 Laporan	Termanfaatnya laporan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan	100 %	196,875,000.0	206,718,750.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
1.01	03	02.00	05	003	Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Rehabilitasi Jembatan			Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah Paket Jembatan yang direhabilitasi	9 Paket	Tertanganinya Paket-paket Jembatan	100 %	2,200,029,017.55	2,310,030,468.41	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
											Jumlah Paket Silpa 2017 yang terbayarkan	0 Paket	Terbayarnya Silpa 2017	0 %				
1.01	03	02.00	05	004	Identifikasi rawan bencana ruas jalan provinsi			Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah dokumen ruas - ruas provinsi rawan bencana	1 Dokumen	Termanfaatnya Dokumen	100 %	700,875,000.0	735,918,750.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
1.01	03	02.00	05	005	Pengadaan, Pemeliharaan, Pengendalian Penggunaan Peralatan Jalan dan Jembatan			UPT Perbengkelan dan Peralatan Kota Makassar			Jumlah alat berat / Peralatan yang diadakan, jumlah alat berat yang dipelihara	5 Unit Alat berat/Peralatan	Termanfaatnya peralatan dalam menunjang kegiatan pemeliharaan rutin oleh aparatur	100 %	8,743,600,000.0	11,293,780,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
											Jumlah Alat-alat Laboratorium Jalan dan Jembatan yang diadakan	0 Set Alat Laboratorium	Termanfaatnya alat-alat Laboratorium	0 %				

1.01	03	02.00	05	06	Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah I Luwu Utara			UPT Wilayah I Luwu Utara Kabupaten Luwu Utara			Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah I Luwu Utara	12 Laporan	Termanfaatnya Laporan Penanganan dan pengendalian Jalan dan Jembatan Lingkup UPT Wilayah I Luwu Utara	100 %	250,950,000.0	263,497,500.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
1.01	03	02.00	05	08	Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah II Tator			UPT Wilayah II Tator Kabupaten Tana Toraja			Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah II Tana Toraja	12 Laporan	Termanfaatnya laporan Penanganan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan Lingkup UPT Wilayah II Tana Toraja	100 %	250,950,000.0	263,497,500.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
1.01	03	02.00	05	00	Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah III Pare-Pare			UPT Wilayah III Pare-Pare Kota Parepare			Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah III Pare-Pare	12 Laporan	Termanfaatnya Laporan Penanganan dan pengendalian Jalan dan Jembatan Lingkup UPT Wilayah III Parepare	100 %	250,950,000.0	263,497,500.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
1.01	03	02.00	05	01	Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah IV Makassar			UPT Wilayah IV Makassar Kota Makassar			Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah IV Makassar	12 Laporan	Termanfaatnya Laporan Penanganan dan pengendalian Jalan dan Jembatan Lingkup UPT Wilayah IV Makassar	100 %	250,950,000.0	263,497,500.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
1.01	03	02.00	05	01	Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah V Bone			UPT Wilayah V Bone Kabupaten Bone			Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah V Bone	12 Laporan	Termanfaatnya Laporan Penanganan dan pengendalian Jalan dan Jembatan Lingkup UPT Wilayah V Bone	100 %	250,950,000.0	263,497,500.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	

1.01	03	02.00	05	016	Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah VI Bulukumba			UPT Wilayah VI Bulukumba Kabupaten Bulukumba			Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Wilayah VI Bulukumba	12 Laporan	Termanfaatnya Laporan Penanganan dan pengendalian Jalan dan Jembatan Lingkup UPT Wilayah VI Bulukumba	100 %	250,950,000.0	263,497,500.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
1.01	03	02.00	05	018	Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Tana Toraja, Toraja Utara, dan Enrekang			- Bts Sidrap - Salukarajae Kabupaten Enrekang #Kec. Tallunglipu, Kec. Tondon, Kec. Sesean dan Kec. Sadan North Toraja Regency South Sulawesi ID - Pasobbo - Matangli - Masubbu - Bts. Kab. Pinrang Kabupaten Tana Toraja #Ruas Batas sidrap - Salokarajae Enrekang Regency South Sulawesi ID - Rante Pao - Batusitanduk Kabupaten Toraja Utara #ruas Passobbo-Matangli-Masuppu - bts Pinrang Malimbong Balepe Tana Toraja Regency South Sulawesi #Ruas Tedong Bonga - Batas Kab. Luwu Rantepao North Toraja Regency South Sulawesi Bts. Kab. Luwu - Tedong Bonga			Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan kondisinya	4 Km	Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan Provinsi	100 %	30,400,000,000.0	30,800,000,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
1.01	03	02.00	05	019	Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pinrang, Sidrap, Barru, dan Kota Pare-Pare			- Paletteang - Malaga - Kabere Kabupaten Pinrang #Desa Malimpung Kab. Pinrang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan ID - Pekkae - Bts. Soppeng Kabupaten Barru #Kecamatan Cendana Enrekang Regency South Sulawesi ID			Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditingkatkan kondisinya	5 Km	Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan Provinsi	100 %	38,650,000,000.0	59,290,000,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	









1.01	0 3	02.00	0 5	0 2 9	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu dan Palopo									Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	33 Km	Mempertahankan kondisi Jalan Provinsi	100 %	1,313,400,000.0	2,270,400,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
														Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	50 M	Mempertahankan kondisi Jembatan Provinsi	100 %				
1.01	0 3	02.00	0 5	0 3 0	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Toraja Utara									Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	79 Km	Mempertahankan kondisi Jalan Provinsi	100 %	2,639,010,000.0	3,383,820,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
														Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	20 M	Mempertahankan kondisi Jembatan Provinsi	100 %				
1.01	0 3	02.00	0 5	0 3 1	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Tana Toraja									Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	37 Km	Mempertahankan kondisi Jalan Provinsi	100 %	1,244,100,000.0	1,772,100,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
														Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	50 M	Mempertahankan kondisi Jembatan Provinsi	100 %				
1.01	0 3	02.00	0 5	0 3 2	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Enrekang									Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	54 Km	Mempertahankan kondisi Jalan Provinsi	100 %	1,799,490,000.0	1,868,790,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
														Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	257 M	Mempertahankan kondisi Jembatan Provinsi	100 %				
1.01	0 3	02.00	0 5	0 3 3	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pinrang									Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	49 Km	Mempertahankan kondisi Jalan Provinsi	100 %	1,497,210,000.0	1,827,210,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
														Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	349 M	Mempertahankan kondisi Jembatan Provinsi	100 %				
1.01	0 3	02.00	0 5	0 3 4	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Sidrap									Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	78 Km	Mempertahankan kondisi Jalan Provinsi	100 %	2,413,620,000.0	2,413,620,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
														Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	257 M	Mempertahankan kondisi Jembatan Provinsi	100 %				

1.01	03	02.00	05	035	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Barru				Pekkae - Bts. Soppeng, Takkalasi - Bainange Batas Kab. Soppeng Kabupaten Barru				Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	40 Km	Mempertahankan kondisi Jalan Provinsi	100 %	1,339,140,000.0	1,603,140,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
													Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	357 M	Mempertahankan kondisi Jembatan Provinsi	100 %				
1.01	03	02.00	05	036	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kota Makassar dan Kab. Takalar				Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Dr. Ratulangi, Jl. Dr. Leimena, Jl. Antang Raya, Jl. Tamangapa Raya, Bts. Gowa - Bts. Takalar, Jl. Hertasning, Jl. Aroepala, Jl. Kumala, Jl. Daeng Ngeppe, Jl. Daeng Tata, Jl. Malengkeri, Tamalanrea - Pammanjengan Bts. Kab.				Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	87 Km	Mempertahankan kondisi Jalan Provinsi	100 %	2,775,765,481.14	2,775,765,481.14	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
									Bts. Kota Makassar - Bt. Ramba (Gowa), Bt. Nompo Selatan - Pattallassang, Palekko - Towata Kabupaten Takalar				Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	117 M	Mempertahankan kondisi Jembatan Provinsi	100 %				
1.01	03	02.00	05	037	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Gowa dan Maros				Batas Kab. Gowa - Carangki - Bantimurung, Batas Kota Makassar - Benteng Gajah, Batas Pangkep - Mallawa Kabupaten Maros				Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	79 Km	Mempertahankan kondisi Jalan Provinsi	100 %	2,726,555,518.86	2,726,555,518.86	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
													Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	117 M	Mempertahankan kondisi Jembatan Provinsi	100 %				

								Jl. Abdul Kadir Dg. Suro, Jl. Mustafa Dg. Bunga, Jl. Muttalib Dg. Narang, Jl. Kacong Dg. Lalang, Jl. Syech Yusuf, Jl. Tun Abdul Razak (Terusan Hertasning), Jl. H.M. Yasin Limpo (Samata - Burung Burung), Bili Bili - Burung Burung, Burung Burung											
1.01	03	02.00	05	038	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Pangkep			Pangkep - Tondongkura - Matojeng - Bts. Kab. Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan				Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	19 Km	Mempertahankan Kondisi Jalan Provinsi	100 %	652,410,000.0	652,410,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
												Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	50 M	Mempertahankan Kondisi Jembatan Provinsi	100 %				
1.01	03	02.00	05	039	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Ruas Gowa - Malino di Kab. Gowa			S. Minasa-Malino (KM.60), Malino (Km. 60) - Bts. Sinjai, Kabupaten Gowa				Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	110 Km	Mempertahankan Kondisi Jalan Provinsi	100 %	3,649,140,000.0	3,649,140,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
1.01	03	02.00	05	040	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Ruas Gowa - Sapaya di Kab. Gowa			Pallangga - Sapaya, Sapaya - Bts. Jeneponto, Sapaya - Malino Kabupaten Gowa				Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	89 Km	Mempertahankan Kondisi Jalan Provinsi	100 %	2,937,330,000.0	2,937,330,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
												Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	102 M	Mempertahankan Kondisi Jembatan Provinsi	100 %				
1.01	03	02.00	05	041	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Bone Barat Kab. Bone			Tanabatue-Sanrego-Palattae, Ujung Lamuru - Bts. Soppeng, Ujung Lamuru - Palattae, Palattae -				Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	113 Km	Mempertahankan kondisi Jalan Provinsi	100 %	3,739,230,000.0	3,739,230,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
												Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	300 M	Mempertahankan kondisi Jembatan Provinsi	100 %				
1.01	03	02.00	05	042	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Bone Timur Kab. Bone			Bts. Soppeng - Pompanua, Waempubbu - Pompanua, Batas Kab.				Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	37 Km	Mempertahankan kondisi Jembatan Provinsi	100 %	1,250,700,000.0	1,250,700,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	

								Soppeng - Tobenteng Kabupaten Bone					Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	107 M	Mempertahankan kondisi Jembatan Provinsi	100 %				
1.01	03	02.00	05	043	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Soppeng			Bts. Bone - Takkalalla, Takkalalla-Cabenge-Salaonro, Salaonro - Bts. Wajo, Salaonro - Bts. Bone, Soppeng - Bts. Sidrap, Bts. Barru - Takkalalla,					Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	135 Km	Mempertahankan kondisi Jalan Provinsi	100 %	4,323,000,000.0	4,587,000,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
												Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	960 M	Mempertahankan kondisi Jembatan Provinsi	100 %					
1.01	03	02.00	05	044	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Wajo			Impa-impa - Anabanua, Bts. Soppeng - Ulugalung, Solo - Peneki - Kulampu, Doping - Atapange,					Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	106 Km	Mempertahankan Kondisi Jalan Provinsi	100 %	3,563,670,000.0	3,563,670,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
												Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	450 M	Mempertahankan Kondisi Jembatan Provinsi	100 %					
1.01	03	02.00	05	045	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Jeneponto dan Bantaeng								Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	59 Km	Mempertahankan kondisi Jalan Provinsi	100 %	1,967,130,000.0	1,967,130,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
								Bts. Jeneponto - Bantaeng Kabupaten Bantaeng					Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	160 M	Mempertahankan kondisi Jembatan Provinsi	100 %				
								Bts. Gowa - Boro, Boro - Jeneponto, Boro - Bts. Bantaeng Kabupaten Jeneponto												
1.01	03	02.00	05	046	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Sinjai			Bts. Gowa - Tondong, Bts. Bulukumba - Sinjai, Bts. Bulukumba - Botolempangan Kabupaten Sinjai					Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	92 Km	Mempertahankan Kondisi Jembatan Provinsi	100 %	2,557,830,000.0	3,068,010,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
												Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	450 M	Mempertahankan Kondisi Jembatan Provinsi	100 %					
1.01	03	02.00	05	047	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Bulukumba			Tanete - Tanaberu, Kajang - Bts. Sinjai, Palampang - Munte Batas Kab. Sinjai Kabupaten Bulukumba					Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara rutin	245.3 M	Mempertahankan Kondisi Jalan Provinsi	100 %	2,472,690,000.0	2,622,510,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
												Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara secara rutin	83 Km	Mempertahankan Kondisi Jembatan Provinsi	100 %					

1.01	03	02.00	05	048	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Selayar			Tana Bau - Ngapaloka - Pattumbukan g Kabupaten Kepulauan Selayar				Panjang Jalan Provinsi yang ditingkatkan, serta dipelihara secara berkala	5 Km	Mempertahan kondisi Jalan Provinsi	100 %	854,700,000.0	854,700,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
												Panjang Jembatan Provinsi yang ditingkatkan, serta dipelihara secara berkala	50 m	Mempertahan kondisi Jembatan Provinsi	100 %			
1.01	03	02.00	05	051	Pengadaan Aspal untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin			Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar				Jumlah Aspal yang tersedia untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	588044 Kg	Termanfaatnnya aspal untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	100 %	8,794,787,355.27	9,234,526,723.04	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.01	03	02.00	06		<b>PROGRAM PENGENDALIAN JALAN AKSES WILAYAH TERISOLIR (Prioritas)</b>	<b>Penguatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah</b>	<b>Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur</b>			<b>Jumlah pembangunan akses wilayah terisolir yang dikendalikan (Prioritas)</b>	<b>3 Wilayah</b>					<b>700,000,000.0</b>	<b>700,000,000.0</b>	<b>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi</b>
1.01	03	02.00	06	001	Survey dan Investigasi Kelayakan Pembangunan Jalan Akses Wilayah Terisolir / Pusat pertumbuhan ekonomi baru			Ruas Sabang - Tallang, Tallang - Sae, Sae Bts. Sulbar Kabupaten Luwu Utara				Jumlah dokumen survey dan investigasi kelayakan pembangunan jalan akses wilayah terisolir / Pusat pertumbuhan ekonomi baru	3 Dokumen	Termanfaatnnya hasil survey dan investigasi kelayakan pembangunan jalan untuk penanganan wilayah terisolir / Pusat pertumbuhan ekonomi baru	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.01	03	02.00	06	003	Monitoring dan Evaluasi pembangunan jalan akses wilayah terisolir / Pusat pertumbuhan ekonomi baru			- Batas Kab. Tanatoraja (Madandan) - Alang Alang - Rantepao Kabupaten Toraja Utara - Botolempangan - Munte - Palampang Kabupaten Sinjai - Bua - Bts. Toraja Utara Kabupaten Luwu - Latuppa - Bongko - Salolimbong - Pantilang Kota Palopo				Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan jalan akses wilayah terisolir / pusat pertumbuhan ekonomi baru	3 dokumen	Terpantaunya pembangunan jalan dan jembatan di kab/kota untuk akses daerah terisolir / pusat pertumbuhan ekonomi baru	100 %	500,000,000.0	500,000,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi





							Jembatan Ruas Bua - Rantepao 2 Kabupaten Luwu	#ruas rantepao-Sadang-Batusitanduk Batu Sitanduk Walenrang Kabupaten Luwu										
							Jembatan S. Eke Kab. Luwu Utara Kabupaten Luwu Utara	#Ruas Sabbang - Tallangsae Bts. Sulawesi Barat Limbong North Luwu Regency South Sulawesi										
							Jembatan S. Pamungkaran Kabupaten Luwu											
							Latuppa - Bongko - Salulimbong - Pantilang Kab. Luwu											
							Sabbang - Tallang - Sae Kabupaten Luwu Utara											
							Sae - Bts. Sulbar Kabupaten Luwu Utara											
1.01	03	02.00	09	00	02	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Luwu Timur	Jembatan S. Lemolengko Kabupaten Luwu Timur	#Jalan Ruas Ussu - Nuha - Beteleme (batas Sulawesi Tengah) Ussu Malili East Luwu Regency		Panjang Jalan Provinsi yang dibangun	2.5 Km	Terhubungnya pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi	100 %	20,725,203,569.68	24,243,200,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi		
								#Pembangunan jembatan ruas ussu, nuha, beteleme (batas Sulawesi Tengah) Nuha East Luwu Regency South Sulawesi		Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun	12 M	Terhubungnya pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi	100 %					
											0		0					
1.01	03	02.00	09	00	03	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Tana Toraja, Toraja Utara, dan Enrekang	- Masuppu - Bts. Kab. Pinrang Kab. Tana Toraja	#Rantepao - Pangala - Baruppu - Batas Sulbar North Toraja Regency South Sulawesi ID		Panjang Jalan Provinsi yang dibangun	52.9 Km	Terhubungnya pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi	100 %	44,593,000,000.0	33,482,000,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi		
							- Rantepao - Bts. Sulbar Kabupaten Toraja Utara	#Ruas Rantepao-Saddan - bts kab. Luwu North Toraja Regency South Sulawesi ID		Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun	0 M	Terhubungnya pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi	0 %					



								- Takkalasi - Bainange - Lawo Kabupaten Soppeng										
1.01	0 3	02.00	0 9	0 0 7	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Bulukumba dan Sinjai			#Bontolempang an-Munte- Palampang Sinjai Regency South Sulawesi ID			Panjang Jalan Provinsi yang dibangun	5 Km	Terhubungny a pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi	100 %	8,928,000,000.0	2,032,800,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
							Jembatan ruas Bontolempang an - Munte 1	#Bontolempang an -Munte - Palampang (STA-000 s/d STA 015) Bulukumba Regency South Sulawesi ID			Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun	16 M	Terhubungny a pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi	100 %				
							Jembatan ruas Bontolempang an - Munte 2	#Ruas Bontolempanga n-Munte 1 Bulukumba Regency South Sulawesi ID										
							Jembatan ruas Bontolempang an - Munte 3											
							Jembatan ruas Bontolempang an - Munte 4											
							Jembatan ruas Bontolempang an - Munte 5											
							Jembatan ruas Bontolempang an - Munte 6											
							Jembatan ruas Bontolempang an - Munte 7											
							Palampang - Munte - Bontolempang an Kabupaten Bulukumba dan Kab. Sinjai											
1.01	0 3	02.00	0 9	0 0 9	Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan			Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembanguna n/Peningkata n Jalan	12 Laporan	Termanfaatka nnya Laporan sebagai bahan evaluasi Pelaksanaan Pembanguna n Jalan dan Jembatan	100 %	357,000,000.0	374,850,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	

1.01	03	02.00	09	010	Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan			Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengaturan Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan	12 Laporan	Termanfaatnya Laporan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan Provinsi	100 %	252,000,000.0	264,600,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
1.01	03	02.00	09	011	Pembinaan, Pengaturan Teknis, Pengendalian Lingkungan dan Pengaman Jalan			Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengaturan Teknis, Pengendalian Lingkungan dan Pengaman Jalan	2 Laporan	Termanfaatnya Laporan sebagai bahan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Provinsi	100 %	297,925,000.0	307,821,250.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
1.01	03	02.00	09	012	Pembinaan dan Evaluasi mutu Penyelenggaraan Jalan dan jembatan			Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi mutu penyelenggaraan jalan dan jembatan	1 Laporan	Termanfaatnya laporan pembinaan dan evaluasi mutu oleh Aparatur Penyelenggara Jalan dan Jembatan	100 %	750,000,000.0	750,000,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
1.01	03	02.00	09	016	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab. Selayar			Jembatan S. Poluaran Kabupaten Kepulauan Selayar			Panjang Jalan Jembatan Provinsi yang dibangun	0 Km	Terhubungnya pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi	0 %	4,200,000,000.0	11,520,000,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
										Panjang Jembatan Provinsi yang dibangun	15 M	Terhubungnya pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi	100 %					
1.01	03	02.00	12		<b>PROGRAM PERENCANAAN TEKNIK DAN EVALUASI</b>										<b>42,375,273,602.0</b>	<b>43,923,644,292.31</b>	<b>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi</b>	
1.01	03	02.00	12	02	Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Jalan			Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Jalan	4 Dokumen	Termanfaatnya laporan pengawasan dan penertiban jalan	100 %	669,800,000.0	683,081,746.23	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
										Jumlah Kajian naskah akademik Ranperda yang disusun	0 Naskah Akademik	Tersusunnya Naskah Akademik	0 %					

1.01	03	02.00	12	04	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan			Jembatan S. Lolisang Kabupaten Sinjai			Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	Termanfaatnya lahan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan	100 %	8,000,000,000.0	8,240,000,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.01	03	02.00	12	07	Inventarisasi Quarry dan Penyelidikan Struktur Lapisan Tanah			UPT Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi Kota Makassar			Jumlah dokumen penyelidikan struktur lapisan tanah dan inventarisasi quarry	1 Dokumen	Termanfaatnya dokumen penyelidikan struktur lapisan tanah dan laporan inventarisasi quarry	100 %	1,127,000,000.0	1,160,810,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.01	03	02.00	12	08	Pengembangan konsep pra-rencana, Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan			Kabupaten Bantaeng			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	18 Dokumen	Termanfaatnya hasil survey, jasa konsultasi, pengawasan dan pengawasan serta laporan kondisi jalan dan jembatan	100 %	31,250,473,602.0	32,476,492,546.08	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
								Kabupaten Barru			Jumlah dokumen pra-rencana	12 Dokumen	Termanfaatnya dokumen pra-rencana untuk penanganan jalan dan jembatan	100 %			
								Kabupaten Bone									
								Kabupaten Bulukumba									
								Kabupaten Enrekang									
								Kabupaten Gowa									
								Kabupaten Jeneponto									
								Kabupaten Kepulauan Selayar									
								Kabupaten Luwu									
								Kabupaten Luwu Timur									
								Kabupaten Luwu Utara									
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan									
								Kabupaten Pinrang									
								Kabupaten Sidenreng Rappang									
								Kabupaten Sinjai									







1.01	03	02.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	2 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	355,000,000.0	372,750,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.01	03	02.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah perjalanan dinas	238 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	440 Orang	1,258,762,500.0	1,321,700,625.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.01	03	02.00	51		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>						<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100 %</b>		<b>4,975,547,026.0</b>	<b>5,275,195,817.91</b>	<b>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi</b>	
1.01	03	02.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas			Rumah Dinas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	6 Unit	Ketersediaan rumah jabatan/ rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	150,000,000.0	154,500,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.01	03	02.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kantor UPT Wil. I, II, III, IV, V dan VI Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar, Parepare, Palopo, Luwu Utara, Tana Toraja, Enrekang, Parepare, Takalar, Bone, Sidrap, Wajo, Soppeng, Bulukumba dan Sinjai			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	26 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	477,000,000.0	496,080,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
1.01	03	02.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	48 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	2,663,590,226.0	2,902,590,984.17	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
											Jumlah kendaraan jabatan/dinas roda dua yang dipelihara	25 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %			
1.01	03	02.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	10 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	1,402,562,800.0	1,430,614,056.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



											Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	150 orang	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah	100 %					
											Jumlah Buku Data dan Informasi yang terpublikasi	100 Buku	Tersedianya Buku Data & Informasi	100 %					
											Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang disusun	3 Dokumen	Ketersediaan Laporan Evaluasi Kinerja PD	3 Dokumen					
1.01	03	02.00	52	03	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK				Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	2 Usulan Kegiatan	Ketersediaan Usulan Kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	2 Laporan	504,973,211.0	525,172,139.44	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
1.01	03	02.00	52	05	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan				Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	420,000,000.0	436,500,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
1.01	03	02.00	53		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>											<b>1,185,049,957.0</b>	<b>1,228,972,987.61</b>	<b>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi</b>	
1.01	03	02.00	53	01	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah Aparat OPD yang mengelola administrasi kepegawaian nya	400 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	157,679,957.0	162,410,355.71	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
												Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %				
1.01	03	02.00	53	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya				Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	400 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	779,970,000.0	809,266,631.90	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
												Jumlah Pakaian Dinas Non PNS	240 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Non PNS	100 %				
1.01	03	02.00	53	03	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu				Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	400 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	247,400,000.0	257,296,000.0	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	

											Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	40 Pasang seragam pameran	Ketersediaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %						
1.01	04					Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman														
1.01	04	01.00				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan									101,764,607,787.19		103,536,440,319.97			
1.01	04	01.00	01	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH (Prioritas)	Penguatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				% Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah (SPM)	100 %			1,100,000,000.0		1,120,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan		
											% Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam (SPM)	100 %								
1.01	04	01.00	01	001	Penyediaan Fasilitas Tanggap Darurat Kawasan Permukiman			Lokasi Tanggap Darurat Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Tenda Darurat Yang Tersedia	2 Unit	Terwujudnya fasilitas tanggap darurat pada kawasan permukiman	100 %	750,000,000.0		750,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan		
											Jumlah Toilet Mobile yang Tersedia	1 Unit	Terwujudnya fasilitas tanggap darurat pada kawasan permukiman	100 %						
											Jumlah Tangki Air Mobile Yang Tersedia	1 Unit	Terwujudnya fasilitas tanggap darurat pada kawasan permukiman	100 %						
											Jumlah Personil Siaga Bencana	10 Orang	Terwujudnya fasilitas tanggap darurat pada kawasan permukiman	100 %						
1.01	04	01.00	01	003	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah			Kabupaten Bantaeng			Jumlah KK yang Terfasilitasi relokasi pemerintah Provinsi	24 Kab/Kota	Terwujudnya KK yang terfasilitasi relokasi program pemerintah Provinsi	100 %	150,000,000.0		150,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan		
								Kabupaten Barru												
								Kabupaten Bone												
								Kabupaten Bulukumba												
								Kabupaten Enrekang												
								Kabupaten Gowa												
								Kabupaten Jeneponto												

								Kabupaten Kepulauan Selayar										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Maros										
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Sinjai										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Takalar										
								Kabupaten Tana Toraja										
								Kabupaten Toraja Utara										
								Kabupaten Wajo										
								Kota Makassar										
								Kota Palopo										
								Kota Parepare										
1.01	04	01.00	01	004	Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana			Lokasi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Rumah Instan Sederhana Sehat yang terbangun akibat bencana	4 Unit	Terwujudnya Fasilitas Terhadap Korban Bencana	100 %	200,000,000.0	220,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan	
1.01	04	01.00	02	001	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MBR (Prioritas)	Penguatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Menurunnya kesenjangan antar lapisan dan antar wilayah			Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (SPM)	1.75 %				3,100,000,000.0	3,000,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan	
										Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (SPM)	5 %							
1.01	04	01.00	02	001	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Miskin			Kabupaten Gowa	# North Belopa Luwu Regency South Sulawesi			Jumlah Keluarga Miskin dan MBR yang terfasilitasi dalam peningkatan kualitas perumahan	200 KK	Terwujudnya fasilitas peningkatan kualitas perumahan terhadap Rumah tangga Miskin dan MBR	100 %	3,000,000,000.0	3,000,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
								Kabupaten Luwu	#Desa Paccerakang Kec.Ponrang Selatan South Ponrang Luwu Regency South Sulawesi									

							Kabupaten Luwu Utara	#Desa Tanamakaleang Kec.seko Kab.Luwu Utara Seko North Luwu Regency South Sulawesi											
							Kabupaten Maros	#Kelurahan Bongki Bongki North Sinjai Sinjai Regency											
							Kabupaten Sinjai	#Lalong Walenrang Lalong Walenrang Luwu Regency											
							Kabupaten Takalar												
							Kota Makassar												
1.01	0 4	01.00	0 2	0 0 5	Pendataan dan Verifikasi Bidang Perumahan		Kota Makassar				Jumlah Dokumen Data Dan Verifikasi Rumah Negara	0 Dokumen	Review Dokumen Data Dan Verifikasi Bidang Perumahan	0 %	100,000,000.0	0.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan		
											Jumlah Dokumen Data Dan Verifikasi Rumah Negara	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Data Dan Verifikasi Bidang Perumahan	100 %					
1.01	0 4	01.00	0 3	0 0 1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENATAAN FASILITAS UMUM (Prioritas)</b>				Jumlah fasilitas rest area yang terbangun (Prioritas)	2 Lokasi					66,076,249,998.19	63,605,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan		
									Jumlah Fasilitas Pendukung Kawasan Pariwisata	0 lokasi									
1.01	0 4	01.00	0 3	0 0 1	Penataan Pedestrian Kawasan Benteng Sombaopu		Kawasan benteng sombaopu Kota Makassar				Jumlah kawasan Pedestrian kawasan benteng Somba Opu	1 kawasan	Tertatanya pedestrian benteng somba opu (kewenangan provinsi)	100 %	100,000,000.0	0.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan		
1.01	0 4	01.00	0 3	0 0 5	Pembangunan Jalan Lingkungan pada Kawasan Pucak		Kawasan Pucak Kabupaten Maros				Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak	1583 Meter	Terbangunnya Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak	100 %	1,400,000,000.0	1,500,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan		
									Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak	0 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak	0 %							
1.01	0 4	01.00	0 3	0 0 0	Pembangunan Rest Area Sulawesi Selatan		Kabupaten Luwu Utara				Jumlah Rest Area yang	2 Kawasan	Terwujudnya kawasan Rest	40 %	60,000,000,000.0	60,000,000,000.0	Dinas Perumahan,		





							SMK NEGERI 8 Kabupaten Kepulauan Selayar	#SMKN 8 Selayar Kabupaten Kepulauan Selayarr Selayar Islands Regency South Sulawesi ID											
								#SMU Negeri 2 Enrekang Enrekang Regency South Sulawesi ID											
1.01	04	01.00	04		PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN (Prioritas)	Penguatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Menurunnya kesenjangan antar lapisan dan antar wilayah		% Kawasan kumuh yang tertata (Prioritas)	49 %					3,800,000,000.0	3,900,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan		
									Cakupan Pembinaan Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota	24 Kab/Kota									
									Luasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	860 Ha									
1.01	04	01.00	04	002	Penataan Kawasan Kumuh			Kabupaten Bulukumba	#Desa Wewangriu Wewang Riu Malili East Luwu Regency		Jumlah Kawasan Kumuh yang tertata	6 Kawasan	Terwujudnya kawasan permukiman yang tertata	100 %	3,800,000,000.0	3,900,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan		
								Kabupaten Enrekang	#Kec. Ujungbulu		Jumlah Dokumen DED Penataan Kawasan Kumuh	5 Dokumen	Tersedianya Dokumen DED Revitalisasi (Penataan) Kawasan Kumuh	100 %					
								Kabupaten Kepulauan Selayar	#Kecamatan Anggeraja Enrekang Regency South Sulawesi ID										
								Kabupaten Luwu Timur	#Kecamatan Bontosikuyu Selayar Islands Regency South Sulawesi ID										
								Kabupaten Toraja Utara	#Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan ID										
									#Kel. Baula dan Kel. Toddang Pulu Kec. Tellu Limpoe Tellulimpo E Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi										

									#kelurahan tanakongkong Kec Ujung Bulu										
1.01	0 4	01.00	0 5		PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH (Prioritas)					Jumlah RT pesisir dan kepulauan yang berakses air bersih (Prioritas)	1750 RT					11,523,750,000.0	12,560,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan	
										Cakupan Pembinaan Penanganan Air Minum Kab/Kota	24 Kab/Kota								
1.01	0 4	01.00	0 5	0 0 4	Perencanaan pengembangan sistem jaringan air minum kawasan permukiman			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah dokumen DED pembangu n jaringan SPAM SMA/SMK se Sulsel	1 Dokumen	Tersedianya dokumen DED pembangu n jaringan SPAM SMA/SMK se Sulsel	100 Dokumen	250,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan	
1.01	0 4	01.00	0 5	0 0 5	Pembangunan dan Pengembangan sistem jaringan air minum kawasan permukiman			SMA NEGERI 1 Kabupaten Barru	# Jalanjang Gantarang Kabupaten Bulukumba			Jumlah sistem pengelolaan / jaringan SPAM kawasan SMA/SMK se Sulsel	7 kawasan	Terbangunnya a sistem pengelolaan / jaringan SPAM kawasan SMA/SMK se Sulsel	100 %	11,123,750,000.0	12,160,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan	
								SMA NEGERI 1 Kabupaten Pinrang	#Dusun Butung Desa Lasitae Tanete Rilau Barru Regency South Sulawesi			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada kawasan pesisir dan kepulauan yang terbangun	5 Kawasan	Terwujudnya SPAM pada kawasan pesisir dan kepulauan	100 %				
								SMA NEGERI 16 Kabupaten Bulukumba	#Dusun Pancana Desa Pancana Tanete Rilau Barru Regency South Sulawesi										
								SMA NEGERI 19 Kabupaten Bone	#Dusun Puteangng Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Tanete Rilau Barru Regency South Sulawesi										
								SMA NEGERI 2 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	#Kelurahan Takkalasi Balusu Barru Regency South Sulawesi										



								SMA NEGERI 3 LAROMPONG Kabupaten Luwu	#Kelurahan Larompong Kec. Larompong Kab, Luwu Larompong Larompong Luwu Regency									
								SMK NEGERI 4 Kabupaten Tana Toraja	#SMA 14 Sinjai Semataring Sinjai Tim. Kabupaten Sinjai									
									#SMA Negeri 3 Sombaopu Somba Opu Gowa Regency South Sulawesi									
									#SMAN 21 Bone / SMAN 1 Salomekko Pancaitana Salomekko Kabupaten Bone									
									#SMU 2 Enrekang Ledan Buntu Batu Enrekang Regency									
1.01	04	01.00	06	002	Perencanaan sarana dan prasarana drainase dan air limbah			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah dokumen perencanaan (DED) pembangunan drainase dan air limbah SMA/SMK sulawesi Selatan	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan (DED) pembangunan drainase dan air limbah SMA/SMK sulawesi Selatan	100 %	85,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
1.01	04	01.00	06	003	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan Se Sul - Sel			SMA NEGERI 2 Kabupaten Barru	# SMA Neg 3 Baebunta Kec. Baebunta Baebunta North Luwu Regency			Jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun pada kws. SMA / SMK se sulsel	5 kawasan	Tersedianya sarana dan Prasarana yang terbangun pada kws. SMA / SMK se sulsel	100 %	1,000,000,000.0	2,200,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
								SMA NEGERI 22 Kabupaten Bone	#SMA Negeri 1 Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan ID									
								SMA NEGERI 3 Baebunta Kabupaten Luwu Utara	#SMAN 3 Baebunta Luwu Utara Baebunta North Luwu Regency South Sulawesi									
								SMA NEGERI 6 Kabupaten Wajo	#SMAN 6 Wajo Bulete Pitumpanua Wajo Regency									



1.01	04	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Dinas Perumahan Kws Permukiman dan Pertanahan Kota Makassar			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	20 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	20 Unit	60,000,000.0	66,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
											Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	12 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	12 Unit			
1.01	04	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Dinas Perumahan Kws Permukiman dan Pertanahan Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	62 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	3,397,680,000.0	3,397,680,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
1.01	04	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Makassar			Jumlah ATK yang tersedia	99 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	345,000,000.0	414,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
1.01	04	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Dinas Perumahan Kws Permukiman dan Pertanahan Kota Makassar			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	25 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	50,000,000.0	55,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
1.01	04	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Dinas Perumahan Kws Permukiman dan Pertanahan Kota Makassar			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	20 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	140,900,000.0	185,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
1.01	04	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kota Makassar			Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	2 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	300,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
1.01	04	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Luar Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perjalanan dinas	130 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	135 Orang	3,500,000,000.0	4,200,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
1.01	04	01.00	51		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>1,042,200,000.0</b>	<b>1,360,223,086.0</b>	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan</b>	



1.01	0 4	01.00	5 1	0 0 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Makassar			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	250,000,000.0	400,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
1.01	0 4	01.00	5 1	0 0 6	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Dinas Perumahan Kws Permukiman dan Pertanahan Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	29 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	442,200,000.0	485,223,086.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
1.01	0 4	01.00	5 1	0 0 9	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Dinas Perumahan Kws Permukiman dan Pertanahan Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	35 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	250,000,000.0	325,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
1.01	0 4	01.00	5 1	0 1 2	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Dinas Perumahan Kws Permukiman dan Pertanahan Kota Makassar			Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	5 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	100,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
											Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	5 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	100 %			
1.01	0 4	01.00	5 2		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %			500,000,000.0	425,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan	
1.01	0 4	01.00	5 2	0 0 1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Dinas Perumahan Kws Permukiman dan Pertanahan Kota Makassar			Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	50 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	350,000,000.0	275,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
1.01	0 4	01.00	5 2	0 0 4	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			Dinas Perumahan Kws Permukiman dan Pertanahan Kota Makassar			Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	3 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
											Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	3 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %			

1.01	04	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					% ASN berkinerja sangat baik	100 %				748,161,295.0	840,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan		
1.01	04	01.00	5302	0	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Dinas Perumahan Kws Permukiman dan Pertanahan Kota Makassar				Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	160 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	323,161,295.0	320,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan	
1.01	04	01.00	5303	0	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Dinas Perumahan Kws Permukiman dan Pertanahan Kota Makassar				Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	160 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	125,000,000.0	220,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan	
1.01	04	01.00	5308	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Dinas Perumahan Kws Permukiman dan Pertanahan Kota Makassar				Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	200 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	100 Orang	300,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan	
1.01	05				Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan														
1.01	0	01.00			Satuan Polisi Pamong Praja											13,464,127,879.04	15,050,156,879.87		
1.01	05	01.00	01		PROGRAM LAYANAN DAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH (Prioritas)					% Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (SPM)	100 %				550,000,000.0	695,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja		
1.01	05	01.00	0101	0	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran Perda	15 Kasus	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan Pergub Sulawesi Selatan	100 %	115,000,000.0	115,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	0102	0	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Praktek Ilegal			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Operasi Penertiban terhadap Praktek-praktek kerja ilegal	20 Kali	Meningkatnya Penertiban terhadap Praktek-praktek kerja ilegal	100 %	30,000,000.0	100,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	

1.01	05	01.00	01	003	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta Bimtek Pemberkasan Hasil Penyelidikan	35 Orang	Meningkatkan pemahaman peserta Bimtek Pemberkasan Hasil Penyelidikan	100 %	25,000,000.0	25,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	01	004	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Tanpa Rokok			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Area Kawasan Tanpa Rokok	10 Kali	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya merokok pada area Kawasan Tanpa Rokok	100 %	25,000,000.0	30,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	01	005	Pemetaan Kasus Non Yustisi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah data dan Peta lokasi kasus pelanggaran Perda	6 Lokasi	Tersedianya data dan Peta lokasi pelanggaran Perda	100 %	90,000,000.0	90,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	01	006	Penerapan Kebijakan pada Pedoman Penyelidikan dan Penyidikan			Kota Makassar			Jumlah pelanggaran Perda dan Pergub Provinsi Sulawesi Selatan yang tertangani	7 Kasus	Terselesaikannya penanganan pelanggaran Perda dan Pergub Sulawesi Selatan	100 %	30,000,000.0	35,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	01	007	Penyelidikan dan Penyidikan kasus Pelanggaran Perda dan Perkada			Kota Makassar			Jumlah kasus pelanggaran Perda yang terselesaikan	3 Kasus	Terselesaikannya kasus pelanggaran Perda	100 %	25,000,000.0	35,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	01	008	Penyelenggaraan Kerjasama Bantuan Hukum			Kota Makassar			Jumlah peserta rapat hubungan kerjasama bantuan hukum dalam penegakan perda	110 orang	Terjalinya hubungan kerjasama bantuan hukum dalam penegakan perda	100 %	10,000,000.0	15,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	01	009	Satgas Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Aparat Satgas Penegakan Perda dan Pergub Sulawesi Selatan	100 Orang	Meningkatnya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Pergub Sulawesi Selatan	100 %	200,000,000.0	250,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02		<b>PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI POLISI PAMONG PRAJA</b>					<b>Cakupan petugas satpol yang terlatih</b>				<b>100 %</b>	<b>900,000,000.0</b>	<b>1,405,000,000.0</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>

1.01	05	01.00	02	001	Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sat.Pol.PP			Kota Makassar			Jumlah peserta Aparat Sat.Pol.PP dalam peningkatan kualitas SDM	100 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Aparat Sat.Pol.PP dalam menyusun rencana Operasi Non Yustisi	100 %	100,000,000.0	150,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	002	Pelatihan Dasar/ Kesamaptaaan Sat.Pol.PP			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pelatihan dasar/ kesamaptaaan personil Pol.PP	65 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan disiplin Aparat Sat.Pol.PP	100 %	300,000,000.0	470,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	003	Pembinaan Mental, Spritual dan Etika Pegawai Sat.Pol.PP			Kota Makassar			Jumlah peserta pembinaan Mental, Spritual dan Etika Pegawai Sat.Pol.PP	200 Orang	Meningkatnya kemampuan Mental dan Etika Aparat Sat.Pol.PP	100 %	65,000,000.0	150,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	004	Penguatan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja			Kota Makassar			Jumlah Rekrutmen Tenaga Teknis Operasional Sat.Pol.PP	100 Orang	Meningkatnya kinerja Sat.Pol.PP dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	100 %	50,000,000.0	100,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	005	Pembinaan Pelatihan Rescue Sat.Pol.PP			Kota Makassar			Jumlah anggota Sat.Pol.PP terlatih dalam penyelamatan	35 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Ketenteraman dan Ketertiban pada masyarakat	100 %	30,000,000.0	30,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	006	Bimbingan dan Penyuluhan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta masyarakat yang diberikan bimbingan dan penyuluhan	40 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Ketenteraman dan Ketertiban pada masyarakat	100 %	25,000,000.0	25,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja

1.01	05	01.00	02	007	Pembinaan, Penyuluhan dan Pemahaman tentang Perda, Pergub dan Hukum Daerah			Kota Makassar			Jumlah peserta Aparat Sat.Pol.PP yang mengikuti penyuluhan dan pemahaman Perda, Pergub dan Hukum Daerah	65 Orang	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan aparat dan masyarakat terhadap Perda, Pergub dan Hukum daerah	100 %	20,000,000.0	25,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	008	Pembinaan, Penyuluhan dan edukasi potensi masyarakat melalui deteksi dini Penanganan gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta Bimtek Aparat Sat.Pol.PP dalam penanganan deteksi dini	50 Orang	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan aparat Sat.Pol.PP dalam penanganan deteksi dini	100 %	50,000,000.0	55,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	009	Bimbingan Teknis Penanganan Gejolak Sosial			Kota Makassar			Jumlah peserta Bimtek Aparat Sat.Pol.PP penanganan secara dini gejala sosial	50 Orang	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan Aparat Sat.Pol.PP penanganan secara dini gejala sosial	100 %	20,000,000.0	30,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	010	Focus Group Discussion (FGD) Kewaspadaan Dini			Kota Makassar			Jumlah peserta FGD kewaspadaan dini	0 Orang	Terjalinya kerjasama antar berbagai Stakeholder instansi yang memiliki deteksi dini	0 %	20,000,000.0	30,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	011	Satgas Kewaspadaan Dini dan Peringatan			Kota Makassar			Jumlah Aparat Satgas Kewaspadaan dini dan peringatan dini dari Sat.Pol.PP	55 Orang	Meningkatnya Kewaspadaan dini Pencegahan dini dalam Trantibum dan Transmas dari aparat Sat.Pol.PP	100 %	30,000,000.0	150,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	02	012	Forum Kewaspadaan Dini			Kota Makassar			Jumlah peserta Forum kewaspadaan dini	45 Orang	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan akan koordinasi dan kerjasama pada peserta Forum kewaspadaan dini	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja

1.01	05	01.00	02	013	Pemetaan Wilayah Kewaspadaan Dini			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah lokasi yang telah dipetakan rawan gangguan Trantibum dan Tranmas	10 Lokasi	Tersedianya pemetaan wilayah yang jelas dalam melakukan deteksi secara dini terhadap rawan gangguan Trantibum dan Tranmas	100 %	40,000,000.0	40,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN					Tingkat penyelesaian pelanggaran Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	100 %				610,000,000.0	858,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03	001	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kota Makassar			Jumlah Koordinasi Aparat Sat.Pol.PP dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Kali	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	100 %	105,000,000.0	105,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03	002	Penanganan Gangguan Trantibum			Kota Makassar			jumlah Pengamanan Gangguan Trantibum	100 Kali	Terlaksananya Pengamanan Gangguan Trantibum	100 %	200,000,000.0	250,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03	003	Penyelenggaraan Patroli Wilayah			Kabupaten Gowa			Jumlah Patroli Wilayah yang dilaksanakan	80 Kali	Meningkatnya pencegahan dalam meminimalisir gangguan trantibum dan Tranmas	100 %	130,000,000.0	130,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
								Kabupaten Maros									
								Kota Makassar									
1.01	05	01.00	03	004	Penyelenggaraan Apel Besar Sat.Pol.PP			Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah penyelenggaraan Apel besar secara terpusat di sulse!	2 Kali	Meningkatnya kerjasama Sat.Pol.PP Kab/ Kota dalam penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum (HUT Sat.Pol.PP dan Apel Siaga Pemilihan Presiden RI., Pilcaleg, Pilkada Serentak)	100 %	45,000,000.0	200,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja

1.01	05	01.00	03	005	Pengamanan dan Pengawasan			Kota Makassar			Jumlah Pengamanan dan Pengawasan aparat Sat.Pol.PP yang dilaksanakan	120 Kali	Terlaksananya pengamanan dan pengawasan Lingkup Internal serta Eksternal dari aparat Sat.Pol.PP	100 %	25,000,000.0	35,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03	006	Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Lembaga/ Instansi Terkait			Kota Makassar			Jumlah Pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan Trantibum yang terlaksana	5 Kali	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara proporsional	100 %	10,000,000.0	18,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03	007	Operasi Penertiban gangguan ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	7 Kali	Tersedianya penyelenggaraan penertiban gangguan Ketenteraman umum dan Ketenteraman Masyarakat	100 %	30,000,000.0	40,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03	008	Penyusunan Juknis dan SOP Pengendalian Operasi Penyelenggaraan Trantibum			Kota Makassar			Jumlah Juknis dan SOP pengendalian Operasi penyelenggaraan Trantibum	4 Dokumen	Tersedianya Juknis dan SOP pengendalian Operasi penyelenggaraan Trantibum	100 %	20,000,000.0	30,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03	009	Satgas Pengendalian Operasi Penyelenggaraan Trantibum			Kota Makassar			Jumlah aparat satgas operasi pengendalian Trantibum	110 Orang	Terlaksananya Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban umum	100 %	25,000,000.0	30,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	03	010	Pemetaan Wilayah Operasi Penyelenggaraan Trantibum			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah data lokasi operasi yang telah dipetakan penertiban Gangguan Trantibum dan Tranmas	5 Dokumen	Tersedianya data lokasi operasi yang telah dipetakan penertiban gangguan Trantibum dan Tranmas	100 %	20,000,000.0	20,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	05		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>					<b>Cakupan petugas perlindungan masyarakat</b>	<b>100 %</b>			<b>538,000,000.0</b>	<b>685,000,000.0</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	



1.01	05	01.00	05	001	Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba				Provinsi Sulawesi Selatan				jumlahPencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba	60 Orang	Meningkatnya pemahaman peserta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba	100 %	35,000,000.0	40,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	05	002	Bimtek Bela Negara				Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah peserta Bimtek Bela Negara	55 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan peserta terhadap bela negara	100 %	40,000,000.0	40,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	05	003	Penyuluhan dan Sosialisasi Linmas				Kota Makassar				Jumlah peserta Sosialisasi Linmas	55 Orang	Meningkatnya pemahaman peserta terhadap tugas dan kewenangan Linmas dalam penyelenggaraan Trantibum dan Linmas	100 %	150,000,000.0	200,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	05	004	Analisis Data Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Analisis Data Gangguan Trantibum	3 Dokumen	Tersedianya data gangguan trantibum dan linmas pada Sat.Pol.PP Kabupaten/ Kota se Sulawesi Selatan	100 %	45,000,000.0	100,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	05	005	Pembinaan dan Pemberdayaan Sat.Linmas				Kota Makassar				Jumlah Peserta Pembinaan Sat.Linmas	60 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan peserta aparat Sat.Po.PP dan Sat.Linmas dalam mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat di Kabupaten/ Kota se Sulawesi Selatan	100 %	80,000,000.0	80,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	

1.01	05	01.00	05	006	Penguatan perlindungan masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Kota Makassar			Jumlah Pelaksanaan penguatan Linmas dalam penanganan penyandang PMKS	8 Kali	Terwujudnya pemahaman dan antisipatif dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	05	007	Pengembangan Potensi masyarakat dan penanganan bencana dan pengungsi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pelaksanaan pengembangan potensi masyarakat dalam menangani bencana dan pengungsi	15 Kali	Meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam menangani bencana dan pengungsi	100 %	40,000,000.0	50,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	05	008	Penyusunan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah audio/ visual Profil Dokumentasi kegiatan Sat.Pol.PP Provinsi Sulawesi Selatan	1 Buah/ Tahun	Tersedianya audio/ visual Profil Dokumentasi kegiatan Sat.Pol.PP Provinsi Sulawesi Selatan	100 %	35,000,000.0	40,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	05	009	Bimtek Sistem Informasi Manajemen/ Data dan Informasi Pelaporan Sat.Pol.PP			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Bimtek Sistem Informasi Manajemen/ Data dan Pelaporan Sat.Pol.PP yang Responsif Gender	65 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman manajemen/ data Pelaporan Trantibum dan Linmas Peserta Sat.Pol.PP se Sulawesi Selatan yang Responsif Gender	100 %	23,000,000.0	30,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	05	010	Pengembangan Potensi Masyarakat dalam mewujudkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kota Makassar			Jumlah pelaksanaan pembinaan pengembangan potensi masyarakat dalam mewujudkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 Kali	Meningkatnya kualitas pengembangan potensi masyarakat dalam mewujudkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	20,000,000.0	35,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja

1.01	05	01.00	05	011	Gladi Penanggulangan dan Penanganan Pasca Bencana			Kota Makassar			Jumlah peserta gladi penanggulangan dan penanganan Pasca Bencana	115 Orang	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan para peserta gladi penanggulangan dan penanganan Pasca Bencana	100 %	20,000,000.0	20,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA KEBAKARAN				Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100 %					310,000,000.0	515,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
									Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100 %								
1.01	05	01.00	06	001	Gladi Penanggulangan Kebakaran			Kota Makassar			Jumlah peserta gladi penanggulangan kebakaran	50 Orang	Meningkatnya pemahaman pada peserta gladi cara memadamkan kebakaran	100 %	30,000,000.0	35,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	06	002	Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Aset Daerah			Kota Makassar			Jumlah peserta rapat koordinasi penanggulangan kebakaran aset daerah	50 Orang	Meningkatnya pemahaman dan kerjasama peserta rapat koordinasi penanggulangan kebakaran aset daerah	100 %	35,000,000.0	40,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	06	003	Bimtek mentality dan kesamaptaan bagi anggota Pemadam Kebakaran			Kota Makassar			Jumlah peserta Bimtek mentality dan kesamaptaan bagi anggota Pemadam Kebakaran	60 Orang	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan peserta Bimtek mentality dan kesamaptaan bagi anggota Pemadam Kebakaran	100 %	100,000,000.0	150,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	

1.01	05	01.00	06	004	Pemetaan Wilayah Rawan Bencana Kebakaran			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah lokasi yang telah dipetakan Rawan Bencana Kebakaran se Sulawesi Selatan	15 Dokumen	Tersedianya data lokasi operasi yang telah dipetakan Rawan Bencana Kebakaran se Sulawesi Selatan	100 %	100,000,000.0	135,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	06	005	Gladi Lapang Penyelamatan Bencana Kebakaran			Kota Makassar			Jumlah peserta gladi penyelamatan bencana kebakaran	60 Orang	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan para peserta gladi penyelamatan bencana kebakaran	100 %	20,000,000.0	25,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	06	006	Satgas Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Aset Daerah			Kota Makassar			Jumlah aparat satgas penanggulangan dan penyelamatan kebakaran aset daerah	60 Orang	Terlaksananya Penanggulangan dan penyelamatan kebakaran aset daerah	100 %	25,000,000.0	130,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	50		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>				<b>9,180,000,000.0</b>	<b>9,465,000,000.0</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>
1.01	05	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Makassar			Jumlah biaya tagihan telepon, Internet, Dokumentasi /Publikasi, Koran/ Majalah, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi (Internet), Dokumentasi/ Publikasi, Koran/ Majalah, Sumber daya air dan listrik	10 Jenis	100,000,000.0	150,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Makassar			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	8 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	8 Unit	75,000,000.0	100,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja
									Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	30 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	30 Unit					
1.01	05	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kota Makassar			jumlah Jasa Tenaga Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Jasa Kebersihan Kantor serta Jasa Sopir yang terbayarkan	12 Bulan	Cakupan Ketersediaan jasa Tenaga Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Jasa Kebersihan Kantor serta Jasa Sopir	250 Orang	8,000,000,000.0	8,000,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja

1.01	05	01.00	50	004	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor			Kota Makassar				Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor	12 Bulan	Cakupan Ketersediaan jasa Tenaga Keamanan Kantor	30 Orang	200,000,000.0	200,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Makassar				Jumlah ATK yang tersedia	110 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	100,000,000.0	150,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Makassar				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	30 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	30,000,000.0	35,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Makassar				Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	55 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	300,000,000.0	400,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	2 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	75,000,000.0	30,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah perjalanan dinas	180 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi	180 kali	300,000,000.0	400,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	51		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>							<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>				<b>545,000,000.0</b>	<b>585,000,000.0</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	
1.01	05	01.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas			Kota Makassar				Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	100 Unit	Ketersediaan rumah jabatan/ rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	40,000,000.0	45,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kota Makassar				Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	15 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kota Makassar				Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	100 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	120,000,000.0	150,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	12 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	150 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	35,000,000.0	40,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	

1.01	05	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %				221,127,879.04	122,156,879.87	Satuan Polisi Pamong Praja		
1.01	05	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar				Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	2 Dokumen	60,000,000.0	40,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
												Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				
												Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	0 Dokumen				
												Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	24 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	24 Dokumen				
1.01	05	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	24 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	20 %	100,000,000.0	20,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kota Makassar				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	27 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	30,000,000.0	30,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Kota Makassar				Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	25,000,000.0	25,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Kota Makassar				Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	2 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %	6,127,879.04	7,156,879.87	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.01	05	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					% ASN berkinerja sangat baik	100 %				610,000,000.0	720,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja		
1.01	05	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Kota Makassar				Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	30 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %	55,000,000.0	60,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja	

1.01	05	01.00	53	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	130 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja		
1.01	05	01.00	53	03	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	250 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	300,000,000.0	400,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja		
1.01	05	01.00	53	08	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	100 Orang	55,000,000.0	60,000,000.0	Satuan Polisi Pamong Praja		
1.01	05	02.00			Badan Penanggulangan Bencana Daerah										7,543,291,472.68	7,661,325,657.95			
1.01	05	02.00	07		PROGRAM PENCEGAHAN, MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA					Jumlah aparat/personil siaga bencana	75 Orang				881,741,740.0	807,010,010.55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
										Jumlah kawasan evakuasi bencana	24 Lokasi								
1.01	05	02.00	07	07	Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan			SMA/SMK Kota Makassar			jumlah peserta peningkatan kapasitas aparat	250 orang	% peserta yang memiliki kompetensi dalam pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan	100 %	481,741,740.0	707,010,010.55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.01	05	02.00	07	08	Penyusunan Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah dokumen strategi pengurangan risiko bencana	13 Dokumen	Jumlah dokumen strategi pengurangan risiko bencana	13 Dokumen	200,000,000.0	100,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.01	05	02.00	07	09	Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana (Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana)				#Kabupaten Sidenreng Rappang		Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana/sekolah aman bencana yang terbentuk	5 Desa/kelurahan / sekolah	% Kab/kota yang memiliki desa/kelurahan tangguh bencana/sekolah aman bencana	100 %	200,000,000.0	0.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
								Kab. Pinrang Kabupaten Pinrang	#Kelurahan Loka, Kec. Ujungbulu Loka Ujung Bulu Bulukumba Regency										
								Kab. Sinjai Kabupaten Sinjai											
								Kota Parepare Kota Parepare											



1.01	05	02.00	08		PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA					Jumlah posko penanganan darurat bencana	24 Unit					2,386,148,502.0	2,482,002,249.66	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
										Cakupan ketersediaan bahan logistik pada Gudang stock	5 Jenis								
										% Jumlah korban bencana yang dievakuasi	100 %								
1.01	05	02.00	08	007	Penguatan dan Pengembangan Fungsi PUSDALOPS PB			Kota Makassar Kota Makassar	#Kabupaten Sidenreng Rappang #Kelurahan Loka, Kec. Ujungbulu Loka Ujung Bulu Bulukumba Regency #Rantepao Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan ID			jumlah SDM pengelola data kebencanaan	500 orang	% SDM yang memiliki kompetensi pengelolaan data kebencanaan	100 %	950,000,000.0	790,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.01	05	02.00	08	012	Penyebarluasan informasi Kebencanaan melalui Media Massa dan Media Sosial			Kota Makassar Kota Makassar				Jumlah peserta penyebaran informasi kebencanaan melalui media massa dan media sosial	350 orang	% informasi kebencanaan yang disebarluaskan	100 %	696,562,182.0	620,526,547.79	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.01	05	02.00	08	013	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Penanganan Darurat serta Pengelolaan Data dan Informasi			Kota Makassar Kota Makassar				jumlah peserta peningkatan kapasitas aparat	400 orang	% peserta yang memiliki kompetensi dalam penanganan darurat serta pengelolaan data dan informasi	100 %	739,586,320.0	1,071,475,701.87	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.01	05	02.00	09		PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA					Jumlah perbaikan sarana dan prasarana umum serta sosial ekonomi pasca bencana	10 Unit					799,407,837.68	829,037,319.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
										Jumlah SDM yang terlatih dalam penanganan bencana	75 Orang								

1.01	05	02.00	09	007	Verifikasi Faktual Proposal Pascabencana			#Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan ID			jumlah proposal yang diverifikasi	5 proposal	% kab/kota yang mengajukan proposal	100 %	299,407,837.68	429,037,319.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Kabupaten Bantaeng	#Kab. Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan ID									
							Kabupaten Luwu Timur										
1.01	05	02.00	09	010	Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi			Kota Makassar Kota Makassar			jumlah dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi	1 dokumen	% kab/kota yang memiliki dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	09	011	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi			Kota Makassar Kota Makassar			jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur dalam rehabilitasi dan rekonstruksi	350 orang	% aparatur yang memiliki kompetensi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi	100 %	400,000,000.0	300,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1.01</b>	<b>05</b>	<b>02.00</b>	<b>50</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>2,013,967,062.0</b>	<b>2,088,613,312.91</b>	<b>Badan Penanganan Bencana Daerah</b>	
1.01	05	02.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar			Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Jenis	300,000,000.0	350,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	4 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	4 Unit	50,000,000.0	50,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
										Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	10 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	10 Unit				
1.01	05	02.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	40 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	780,000,000.0	780,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01	05	02.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar			Jumlah ATK yang tersedia	10 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.01	05	02.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	7 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.01	05	02.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar				Jumlah biaya jaman makan dan minum yang tersedia	5 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.01	05	02.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar				Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	3 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	133,967,062.0	158,613,312.91	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.01	05	02.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar				Jumlah perjalanan dinas	200 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	250 Orang	400,000,000.0	400,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.01	05	02.00	51		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>							<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>				<b>100 %</b>	<b>199,170,418.0</b>	<b>145,000,000.0</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>
1.01	05	02.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar				Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	2 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	25,000,000.0	45,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.01	05	02.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar				Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	14 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	150,000,000.0	100,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.01	05	02.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	50 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	24,170,418.0	0.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.01	05	02.00	52		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>							<b>% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu</b>				<b>100 %</b>	<b>705,595,685.0</b>	<b>731,748,085.01</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>
1.01	05	02.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Kota Makassar Kota Makassar				Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	300 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	3 Laporan	200,000,000.0	200,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.01	05	02.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar				Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	2 Dokumen	Ketersediaan Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	2 Dokumen	235,595,685.0	261,748,085.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen					
											Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	1 Dokumen					
											Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	1 Dokumen					
1.01	05	02.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD					Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	5 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	100 %	120,000,000.0	120,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
											Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	5 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %					
1.01	05	02.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan					Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	24 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.01	05	02.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun					Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	3 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.01	05	02.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran					Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.01	05	02.00	53		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>						% ASN berkinerja sangat baik	100 %			557,260,228.0	577,914,680.78	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.01	05	02.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian					Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar	Jumlah Aparat OPD yang mengelola administrasi kepegawaian	40 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	105,600,000.0	116,160,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
											Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	8 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %					

1.01	05	02.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	80 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	31,680,000.0	34,848,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.01	05	02.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kantor BPBD Provinsi Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	80 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	31,680,000.0	34,848,000.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.01	05	02.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	300 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	300 Orang	388,300,228.0	392,058,680.78	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
<b>1.01</b>	<b>0</b>				<b>Sosial</b>													
<b>1.01</b>	<b>0</b>	<b>01.00</b>			<b>Dinas Sosial</b>										<b>25,822,855,997.0</b>	<b>26,172,318,857.88</b>		
1.01	06	01.00	01	001	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (Prioritas)	Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			% Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (Prioritas)	100 %				1,040,152,275.0	1,078,704,776.46	Dinas Sosial	
										% Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100 %							
										% Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (Prioritas)	100 %							
1.01	06	01.00	01	001	Bimbingan Sosial Bagi Tuna Sosial (Wanita Tuna Susila, BWBLP, Waria, ODHA dan Gepeng)			Kota Makassar			Jumlah tuna sosial yang mendapatkan bimbingan sosial	50 orang	peningkatan bimbingan sosial bagi tuna sosial (Wanita Tuna Susila, BWPLP, Waria, ODHA dan Gepeng)	100 %	47,500,000.0	47,500,000.0	Dinas Sosial	

1.01	06	01.00	01	003	Bimbingan Sosial Penanggulangan Pencegahan NAPZA			Kota Makassar			Jumlah masyarakat, pelajar yang mendapatkan bimbingan sosial penanggulangan pencegahan Napza	50 orang	peningkatan bimbingan sosial penanggulangan Napza	100 %	47,500,000.0	68,404,776.0	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	01	005	Pemulangan Warga Negara Migran, Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar dari Titik Debar Kasih ke Daerah Kab/Kota Provinsi Asal			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pekerja migran, korban tindak kekerasan dan orang terlantar yang dipulangkan kedaerah asal	300 orang	pemulangan pekerja migran, korban tindak kekerasan dan orang terlantar kedaerah asal	100 %	140,000,000.0	160,000,000.46	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	01	006	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kesiapsiagaan & Mitigasi Bencana Terhadap Petugas Provinsi, Kabupaten/Kota			Kota Makassar			Jumlah Petugas Provinsi dan Relawan yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana	50 orang	peningkatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kesiapsiagaan & Mitigasi Terhadap Petugas Provinsi Kabupaten dan Relawan, Penjajakan Daerah Rawan Bencana	100 %	47,500,000.0	47,500,000.0	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	01	007	Pelaksanaan Distribusi Logistik Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Alam Pada Kabupaten/Kota			Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah Logistik Tanggap darurat dan Pasca Bencana Kab/Kota	24 Kab/Kota	peningkatan Pendistribusi an Logistik Tanggap darurat dan Pasca bencana pada Kab/Kota	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	01	009	Bimbingan Teknis Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Sosial			Kota Makassar			Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bimbingan teknis dukungan psikososial	65 Orang	Peningkatan bimbingan teknis dukungan psikososial bagi korban bencana sosial	100 %	38,000,000.0	38,000,000.0	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	01	011	Pelaksanaan Distribusi Logistik Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sosial pada Kabupaten/Kota			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Logistik Tanggap darurat dan Pasca Bencana Kab/Kota yang terlaksana	24 Kab/Kota	cakupan Logistik Tanggap darurat dan Pasca Bencana Kab/Kota	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Sosial	

1.01	06	01.00	01	012	Koordinasi lintas sektor dalam penanganan gelandangan dan pengemis Kab/Kota			Kota Makassar			jumlah koordinasi lintas sektor penanganan gelandangan dan pengemis	50 Orang	terlaksananya koordinasi lintas sektor penanganan gelandangan dan pengemis	100 %	47,500,000.0	47,500,000.0	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	01	020	Bantuan Sosial Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas			Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah bantuan sosial alat bantu bagi penyandang disabilitas	20 orang	terlaksananya pemberian bantuan sosial alat bantu bagi penyandang disabilitas	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Sosial	
								# Bulukumba Regency South Sulawesi ID										
								# Pangkajene Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi										
								#21 Kecamatan North Toraja Regency South Sulawesi ID										
								#5 Kecamatan Sinjai Regency South Sulawesi ID										
								#Benteng, Bontoharu, Bontosikuyu, Bontomanai Selayar Islands Regency South Sulawesi ID										
								#Buntu Sarong, Kecamatan Masalle Enrekang Regency South Sulawesi ID										
								#Desa Belakunranga Parangloe Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan										
								#Desa Bissoloro Bungaya Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan										
								#Desa Bontobuddung Tompobulu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan										



								#Desa Bontolangkasa Utara Bontonompo Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan											
								#Desa Bontoloe Bontolempangan Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan											
								#Desa Bontoramba Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan											
								#Desa Buakkang Bungaya Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan											
								#Desa Buntu Kamiri Ponrang Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan											
								#Desa Cimpu Utara Suli Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan											
								#Desa Jonjo Parigi Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan											
								#Desa Kalaserena Bontonompo Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan											
								#Desa Kanjilo Barombong Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan											
								#Desa Kanre Apia Tombolo Pao Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan											



									#Desa Pattallikang Manuju Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan										
									#Desa Rannaloe Bungaya Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan										
									#Desa Romang Loe Bontomarannu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan										
									#Desa Sengka Bontonompo Sel. Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan										
									#Desa Tabah Walenrang Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan										
									#Desa Tabbaja Kamanre Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan										
									#Desa Tallang Bulawang Bajo Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan										
									#Desa Tanabangka Bajeng Bar. Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan										
									#Desa Tanarigella Bua Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan										
									#Desa Tanrara Bontonompo Sel. Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan										
									#Desa Taring Biringbulu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan										

								#Desa Taripa Kec.Angkona Kab.Luwu timur Angkona East Luwu Regency South Sulawesi											
								#Desa Tassese Manuju Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan											
								#Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng 1 Jl. A Mannappiang Lamalaka											
								#Kec. Lalabata Soppeng Regency South Sulawesi ID											
								#kec. marbo, kec. mapsu, kec.sanronone, kec. pattalassang, kec. Polsel, Kec. Polut, kec. galsel, Kec. Galesong, Kec. Galut											
								#Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan ID											
								#Kecamatan, Towuti, Wowandula,Nu ha, Maliii, Angkona,Wotu, Burau,Tomoni, Tomini Timur, Mangkutana, Kalena East Luwu Regency South Sulawesi ID											
								#Kel. Bontoramba Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan											
								#Kel. Bulutana Tinggimoncong Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan											

								#Kel. Gantarang Tinggimoncong Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan												
								#Kel. Pangkabinanga Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan												
								#Kel. Romang Lompoa Bontomarannu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan												
								#Kel. Tamarunang Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan												
								#Kel. Tetebatu Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan												
								#Kelurahan Batupasi North Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Binturu South Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Boting Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Dangerakko Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Jaya Telluwana Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Lagaligo Wara Palopo City South Sulawesi												

								#Kelurahan Lanna Parangloe Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan												
								#Kelurahan Larompong Larompong Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan												
								#Kelurahan Lebang West Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Luminda North Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Mata Allo Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan												
								#Kelurahan Pattene North Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan penggoli North Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Purangi Sendana Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Romang Polong Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan												
								#Kelurahan Sabbamparu North Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Samata Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan												

								#Kelurahan sampoddo South Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Senga Belopa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan											
								#Kelurahan Sumarambu Telluwanua Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Takkalala South Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Tanamanai Belopa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan											
								#Kelurahan Temmalebba Bara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Tompobalang Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan											
								#seluruh kecamatan dikab. sidrap Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan ID											
								#tersebar di 14 Kecamatan Wajo Regency South Sulawesi ID											
								#Tersebar di 15 Kecamatan di Luwu Utara North Luwu Regency South Sulawesi ID											



								#Ujung, Soreang, Bacukiki, Bacukiki Barat Parepare Pare- Pare City South Sulawesi										
1.01	0 6	01.00	0 1	0 2 2	Rekrutmen Tenaga Pelopor Perdamaian			Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah tenaga pelopor perdamaian	48 orang	terlaksananya perekrutan tenaga pelopor perdamaian kab/kota	100 %	47,300,000.0	47,300,000.0	Dinas Sosial	
1.01	0 6	01.00	0 1	0 2 4	Pengembangan Wirausaha bagi Penyandang Disabilitas Produktif			Provinsi Sulawesi Selatan	# Bulukumba Regency South Sulawesi ID # Jongaya Tamalate Makassar City # Pangkajene Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi #9 Kecamatan Sinjai Regency South Sulawesi ID #Barowa Bua Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan #Desa Barembeng Bontononpo Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan #Desa Bicoing Tonra Bone Regency South Sulawesi #Desa Bolang, Kecamatan Alla Enrekang Regency South Sulawesi ID #Desa BonEputE Tonra Bone Regency South Sulawesi #Desa Bulu Bulu Tonra Bone Regency South Sulawesi #Desa Gareccing Tonra Bone Regency South Sulawesi	jumlah penyandang disabilitas produktif yang mendapatkan pengembang an wirausaha	50 orang	terlaksananya pengembang an wirausaha bagi penyandang disabilitas produktif	100 %	174,852,275.0	172,500,000.0	Dinas Sosial		



									#Kelurahan Bontonompo Bontonompo Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan										
									#Kelurahan Dangerakko Wara Palopo City South Sulawesi										
									#Kelurahan Lindajang Suli Bar. Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan										
									#Kelurahan Pajalesang Wara Palopo City South Sulawesi										
									#Kelurahan Suli Suli Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan										
1.01	06	01.00	02		PROGRAM PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (Prioritas)	Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Cakupan anak dalam panti/lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	425 Jiwa					4,534,655,049.0	4,549,728,801.25	Dinas Sosial	
										% Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100 %								
1.01	06	01.00	02	001	pelayanan dan pembinaan sosial pada PPRSA inang matutu makassar			Kota Makassar	# Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan			Jumlah Anak Balita 0- 5 Tahun Yang Mendapatkan Pelayanan dan Reahbilitas di PPRSA Inang Matutu	65 Balita	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada PPRSA Inang Matutu	100 %	732,320,000.0	732,320,000.0	Dinas Sosial	
									#Sinjai Utara, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan Sinjai Regency South Sulawesi ID										
1.01	06	01.00	02	002	pelayanan dan pembinaan sosial pada anak terlantar pada PPSBK nirannuang bulukumba			Kabupaten Bulukumba	#Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumba Bulukumba Regency South Sulawesi ID			Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dan Pembinaan pada PPSBK Nirannuang Bulukumba	100 Anak	Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Sosial Anak Terlantar pada PPSBK Nirannuang Bulukumba	100 %	915,700,000.0	915,700,000.0	Dinas Sosial	

									#Sinjai Utara, Sinjai Selatan, Sinjai Tengah Sinjai Regency South Sulawesi ID									
1.01	0 6	01.00	0 2 3	0 0 3	pelayanan dan pembinaan sosial anak terlantar pada PPSBR makkareso maros			Kabupaten Maros	#21 Kecamatan North Toraja Regency South Sulawesi ID			Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dan Pembinaan Pada PPSBR Makkareso Maros	110 Anak	Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Sosial Anak Terlantar pada PPSBR Makkareso Maros	100 %	1,011,937,000.0	1,011,937,000.0	Dinas Sosial
									#kec. marbo, kec. mapsu, kec. sanronone, kec. pattalassang, kec. Polsel, Kec. Polut, kec. galsel, Kec. Galesong, Kec. Galut									
									#Kelurahan Ammassangan Wara Palopo City South Sulawesi									
									#Kelurahan Batupasi North Wara Palopo City South Sulawesi									
									#Kelurahan Dangerakko Wara Palopo City South Sulawesi									
									#Kelurahan Lagaligo Wara Palopo City South Sulawesi									
									#Kelurahan Luminda North Wara Palopo City South Sulawesi									
									#Kelurahan Pontap East Wara Palopo City South Sulawesi									
									#Kelurahan Sabbamparu North Wara Palopo City South Sulawesi									
									#Kelurahan Salobulo North Wara Palopo City South Sulawesi									

								#Semua Kecamatan diKab. Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan ID											
								#Sinjai Utara, Sinjai Selatan, Sinjai Tengah Sinjai Regency South Sulawesi ID											
1.01	06	01.00	02	004	pembinaan dan rehabilitasi sosial anak jalanan pada PPSBR makkareso maros			Kabupaten Maros	#Kelurahan Ammassangan Wara Palopo City South Sulawesi		Jumlah Anak Jalanan Yang Mendapatkan Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial pad PPSBR Maakkareso Maros	70 Anak	Peningkatan Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Pada PPSBR Makkareso Maros	100 %	519,000,000.0	519,000,000.0	Dinas Sosial		
								#Kelurahan Batupasi North Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Dangerakko Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Lagaligo Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Luminda North Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Pontap East Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Sabbamparu North Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Salobulo North Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Semua Kecamatan di Kab.Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan ID											

									#Sinjai Utara, Sinjai Selatan, Sinjai Tengah Sinjai Regency South Sulawesi ID										
1.01	0 6	01.00	0 2	0 1 0	pelayanan dan Pembinaan Sosial pada PPSRA Seroja Bone			Kabupaten Bone	# Bone Regency South Sulawesi ID #21 Kecamatan North Toraja Regency South Sulawesi ID			jumlah persentase pembinaan sosial anak di PPSRA Seroja Bone	80 Anak	Terlaksananya pembinaan sosial anak pada PPSRA Seroja Bone	100 %	1,061,543,055.0	1,061,871,801.25	Dinas Sosial	
1.01	0 6	01.00	0 2	0 2 0	Penguatan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kab/Kota			Kota Makassar				jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak yang mendapatkan penguatan kapasitas	50 orang	terlaksananya peningkatan kapasitas petugas lembaga kesejahteraan sosial anak	100 %	47,500,000.0	47,500,000.0	Dinas Sosial	
1.01	0 6	01.00	0 2	0 2 3	Pemberdayaan sosial gelandangan dan pengemis melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)			Provinsi Sulawesi Selatan	#Kel. Galonta, Kecamatan Enrekang Enrekang Regency South Sulawesi ID #semua Kecamatan dikab. Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan ID #Sinjai Utara, Sinjai Selatan, Sinjai Tengah Sinjai Regency South Sulawesi ID #Ujung, Soreang, Bacukiki, Bacukiki Barat Parepare Pare- Pare City South Sulawesi			jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan usaha ekonomi produktif	50 orang	terlaksananya pemberdayaa n gelandangan dan pengemis melalui usaha ekonomi produktif	100 %	125,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Sosial	
1.01	0 6	01.00	0 2	0 2 4	Home visit dan sidang tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA)			Provinsi Sulawesi Selatan				jumlah home visit dan sidang tim PIPA	30 orang	terlaksananya home visit dan sidang tim PIPA	100 %	45,900,000.0	45,900,000.0	Dinas Sosial	
1.01	0 6	01.00	0 2	0 2 6	Koordinasi lintas sektor penanganan kesejahteraan sosial anak			Kota Makassar				Jumlah koordinasi lintas sektor penanganan kesejahteraan sosial Anak	50 Orang	Terlaksananya a koordinasi lintas sektor penanganan kesejahteraan sosial anak	100 %	75,754,994.0	65,500,000.0	Dinas Sosial	

1.01	06	01.00	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)					Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat terpencil (KAT) yang mendapatkan pengembangan kemampuan dan potensi	800 Jiwa					11,614,751,715.0	11,674,601,334.89	Dinas Sosial	
										% PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0.6 %								
										% PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1 %								
1.01	06	01.00	03	09	Penjajagan lokasi dan penyiapan kondisi masyarakat daerah komunitas adat terpencil			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Penjajagan lokasi dan pemberdayaan KAT	2 Lokasi	Peningkatan penjajagan dan penyiapan kondisi masyarakat daerah Komunitas Adat Terpencil	100 %	200,000,000.0	210,000,000.0	Dinas Sosial		
1.01	06	01.00	03	010	Koordinasi teknis pendamping dan operator keluarga harapan			Kota Makassar			Jumlah pendamping operator keluarga harapan yang melakukan koordinasi	500 Orang	peningkatan koordinasi teknis pendamping dan operator keluarga harapan	100 %	226,500,000.0	236,500,000.0	Dinas Sosial		
1.01	06	01.00	03	02	Bantuan Sosial untuk Pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin			Kabupaten Bone	# Jl. Bukit Harapan Bukit Harapan Soreang			Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	4000 KK	Terlaksananya pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin	100 %	10,000,000,000.0	10,000,000,000.0	Dinas Sosial	
								Kabupaten Enrekang	# Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi ID										
									# Sinjai Regency South Sulawesi ID										
									#Desa Ajallase Kec. Cenrana Kab. Bone Cenrana Bone Regency South Sulawesi										



								#Desa Ajang Laleng Kec. Amali Kab. Bone Amali Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Ajang Pulu Kec. Sibulue Kab. Bone Sibulue Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Allamungeng Patue Kec. Ajangale Kab. Bone Ajangale Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Amali Riattang Kec. Amali Kab. Bone Amali Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Amessangeng Kec. Ajangale Kab. Bone Ajangale Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Angkue Kec. Kajuara Kab. Bone Kajuara Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Apala Kec. Barebbo Kab. Bone Barebbo Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Arallae Kec. Kahu Kab. Bone Kahu Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Awang Cenrana Kec. Cenrana Kab. Bone Cenrana Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Bacu Kec. Barebbo Kab. Bone Barebbo Bone Regency South Sulawesi											



								#Desa Bulu Tanah Kec. Kajuara Kab. Bone Kajuara Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone West Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Bulu Ulaweng Kec. Patimpeng Kab. Bone Patimpeng Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Bulusirua Kec. Bontocani Kab. Bone Bontocani Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Bune Kec. Libureng Kab. Bone Libureng Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Cakkela Kec. Kahu Kab. Bone Kahu Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Cakkeware Kec. Cenrana Kab. Bone Cenrana Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Cammilo Kec. Kahu Kab. Bone Kahu Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Cari Gading Kec. Awangpone Kab. Bone Awangpone Bone Regency South Sulawesi												

							#Desa Cege Kec. Mare Kab. Bone Mare Bone Regency South Sulawesi																
							#Desa Cempaniga Kec. Barebbo Kab. Bone Barebbo Bone Regency South Sulawesi																
							#Desa Cenrana Kec. Cenrana Kab. Bone Cenrana Bone Regency South Sulawesi																
							#Desa Ceppaga Kec. Libureng Kab. Bone Libureng Bone Regency South Sulawesi																
							#Desa Cingkang Kec. Barebbo Kab. Bone Barebbo Bone Regency South Sulawesi																
							#Desa Cinnong Kec. Barebbo Kab. Bone Barebbo Bone Regency South Sulawesi																
							#Desa Congko Kec. Barebbo Kab. Bone Barebbo Bone Regency South Sulawesi																
							#Desa Corawalie Kec. Barebbo Kab. Bone Barebbo Bone Regency South Sulawesi																
							#Desa Ere Cinnong Kec. Bontocani Kab. Bone Bontocani Bone Regency South Sulawesi																
							#Desa Hulo Kec. Kahu Kab. Bone Kahu Bone Regency South Sulawesi																

								#Desa Kading Kec. Barebbo Kab. Bone Barebbo Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Kajaolaliddong Kec. Barebbo Kab. Bone Barebbo Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone Awangpone Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Kalero Kec. Kajuara Kab. Bone Kajuara Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Kalibong Kec. Sibulue Kab. Bone Sibulue Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Kampuno Kec. Barebbo Kab. Bone Barebbo Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Labotto Kec. Cenrana Kab. Bone Cenrana Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Labuaja Kec. Kahu Kab. Bone Kahu Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Lalepo Kec. Kahu Kab. Bone Kahu Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Lampoko Kec. Barebbo Kab. Bone Barebbo Bone Regency South Sulawesi											

								#Desa Lamuru Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone Tellu Siattinge Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Laoni Kec. Cenrana Kab. Bone Cenrana Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Laponrong Kec. Amali Kab. Bone Amali Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Lappae Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone Tellu Siattinge Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Latellang Kec. Patimpeng Kab. Bone Patimpeng Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Latonro Kec. Cenrana Kab. Bone Cenrana Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Lattekko Kec. Awangpone Kab. Bone Awangpone Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Lebbae Kec. Ajangale Kab. Bone Ajangale Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Lebongnge Kec. Cenrana Kab. Bone Cenrana Bone Regency South Sulawesi												





								#Desa Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone Awangpone Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Mallinrung Kec. Libureng Kab. Bone Libureng Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone Sibulue Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Manciri Kec. Ajangale Kab. Bone Ajangale Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Mapotu Kec. Amali Kab. Bone Amali Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Mario Kec. Libureng Kab. Bone Libureng Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Maroanging Kec. Sibulue Kab. Bone Sibulue Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Masago Kec. Patimpeng Kab. Bone Patimpeng Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Massangkae Kec. Kajua Kab. Bone Kajua Bone Regency South Sulawesi											

								#Desa Massenrengpulu Kec. Sibulue Kab. Bone Sibulue Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Massila Kec. Patimpeng Kab. Bone Patimpeng Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Dua Boccoe Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Matajang Kec. Kahu Kab. Bone Kahu Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Mattampa Walie Kec. Mare Kab. Bone Mare Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Mattiro Deceng Kec. Libureng Kab. Bone Libureng Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Mattiro Walie Kec. Libureng Kab. Bone Libureng Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Mattiro Walie Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone West Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Mattoanging Kec. Kahu Kab. Bone Kahu Bone Regency South Sulawesi											

								#Desa Matuju Kec. Awangpone Kab. Bone Awangpone Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Melle Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Dua Boccoe Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Melle Kec. Palakka Kab. Bone Palakka Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Mico Kec. Palakka Kab. Bone Palakka Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Naga Ulung Kec. Cenrana Kab. Bone Cenrana Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Nusa Kec. Kahu Kab. Bone Kahu Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Pacubbe Kec. Cenrana Kab. Bone Cenrana Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Padaelo Kec. Kajuara Kab. Bone Kajuara Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Pakkasalo Kec. Sibulue Kab. Bone Sibulue Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Palakka Kec. Kahu Kab. Bone Kahu Bone Regency South Sulawesi												

																					#Desa Pallae Kec. Cenrana Kab. Bone Cenrana Bone Regency South Sulawesi
																					#Desa Pallattae Kec. Kahu Kab. Bone Kahu Bone Regency South Sulawesi
																					#Desa Pallime Kec. Cenrana Kab. Bone Cenrana Bone Regency South Sulawesi
																					#Desa Palongki Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone Tellu Siattinge Bone Regency South Sulawesi
																					#Desa Pammusureng Kec. Bontocani Kab. Bone Bontocani Bone Regency South Sulawesi
																					#Desa Panyiwi Kec. Cenrana Kab. Bone Cenrana Bone Regency South Sulawesi
																					#Desa Pappolo Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi
																					#Desa Parippung Kec. Barebbo Kab. Bone Barebbo Bone Regency South Sulawesi
																					#Desa Pasaka Kec. Kahu Kab. Bone Kahu Bone Regency South Sulawesi
																					#Desa Pasaka Kec. Sibulue Kab. Bone Sibulue Bone Regency South Sulawesi



								#Desa Poleonro Kec. Libureng Kab. Bone Libureng Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Polewali Kec. Kajuara Kab. Bone Kajuara Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Polewali Kec. Libureng Kab. Bone Libureng Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Polewali Kec. Sibulue Kab. Bone Sibulue Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Ponre- Ponre Kec. Libureng Kab. Bone Libureng Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Pusungnge Kec. Cenrana Kab. Bone Cenrana Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Raja Kec. Kajuara Kab. Bone Kajuara Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Sailong Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Dua Boccoe Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Saluinduk Kec.Bua Ponrang Kab.Luwu Saluinduk Bupon Luwu Regency											
								#Desa Samaelo Kec. Barebbo Kab. Bone Barebbo Bone Regency South Sulawesi											

								#Desa Sanrangeng Kec. Dua Bocoe Kab. Bone Dua Bocoe Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Siame Kec. Palakka Kab. Bone Palakka Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Sumaling Kec. Mare Kab. Bone Mare Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Sumpang Minangae Kec. Sibulue Kab. Bone Sibulue Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Suwa Kec. Libureng Kab. Bone Libureng Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Swadaya Kec. Libureng Kab. Bone Libureng Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Tadang Palie Kec. Sibulue Kab. Bone Sibulue Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Tanabatue Kec. Libureng Kab. Bone Libureng Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Tanete Kec. Cina Kab. Bone Cina Bone Regency South Sulawesi											



																		#Desa Tappale Kec. Libureng Kab. Bone Libureng Bone Regency South Sulawesi
																		#Desa Tarasu Kec. Kajua Kab. Bone Kajua Bone Regency South Sulawesi
																		#Desa Tawaroe Kec. Dua Bocoe Kab. Bone Dua Bocoe Bone Regency South Sulawesi
																		#Desa Timurung Kec. Ajangale Kab. Bone Ajangale Bone Regency South Sulawesi
																		#Desa Tompobulu Kec. Libureng Kab. Bone Libureng Bone Regency South Sulawesi
																		#Desa Tunreng Tellue Kec. Sibulue Kab. Bone Sibulue Bone Regency South Sulawesi
																		#Desa Ulo Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone Tellu Siattinge Bone Regency South Sulawesi
																		#Desa Unnyi Kec. Dua Bocoe Kab. Bone Dua Bocoe Bone Regency South Sulawesi
																		#Desa Unra Kec. Awangpone Kab. Bone Awangpone Bone Regency South Sulawesi

									#Desa Ureng Kec. Palakka Kab. Bone Palakka Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa Waemputtange Kec. Amali Kab. Bone Amali Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa Waetuwo Kec. Kajuara Kab. Bone Kajuara Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa Waji Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone Tellu Siattinge Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa Wanuwaru Kec. Libureng Kab. Bone Libureng Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone West Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa Watang ta Kec. Cenrana Kab. Bone Cenrana Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa Watangceni Kec. Bontocani Kab. Bone Bontocani Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa Watu Kec. Barebbo Kab. Bone Barebbo Bone Regency South Sulawesi											

								#Desa Watu Kec. Cenrana Kab. Bone Cenrana Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Wollangi Kec. Barebbo Kab. Bone Barebbo Bone Regency South Sulawesi											
								#Kec. Lalabata, Kec. Citta, Kec. Donri-donri, Kec. Marioriwawo, Kec. Marioriwawa, Kec. Ganra, Kec. Liliriaja, Kec. Lilirilau Soppeng Regency South Sulawesi ID											
								#Kecamatan Enrekang Enrekang Regency South Sulawesi ID											
								#Kecamatan Makale Makale Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan											
								#Kecamatan Sabbangparu Wajo Regency South Sulawesi ID											
								#Kecamatan Tempe Wajo Regency South Sulawesi ID											
								#Kecamatan Baraka Enrekang Regency South Sulawesi ID											
								#Kecamatan Bungin Enrekang Regency South Sulawesi ID											
								#Kelurahan Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone East Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi											

							#Kelurahan Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi													
							#Kelurahan Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi													
							#Kelurahan Lonrea Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone East Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi													
							#Kelurahan Majang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone West Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi													
							#Kelurahan Manurungge Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi													
							#Kelurahan Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi													
							#Kelurahan Ta Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi													
							#Kelurahan Toro Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone East Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi													

									#Kelurahan Walennaec. Tanete Riattang Kab. Bone Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi										
									#Kelurahan Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi										
									#Menyebar di 8 Kecamatan se Kabupaten Bantaeng Bantaeng Regency South Sulawesi ID										
1.01	06	01.00	03	00	Identifikasi dan seleksi calon pendamping dan penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin perkotaan			Kota Makassar				jumlah calon pendamping/ penerima bantuan yang diidentifikasi dan di seleksi	50 orang	terlaksananya identifikasi dan seleksi pendamping/ penerima bantuan	100 %	51,151,715.0	71,001,334.89	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	03	021	Bimbingan teknis pendamping dan penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin perkotaan			Kota Makassar				jumlah pendamping/ penerima manfaat yang me dapatkan bimbingan teknis pemberdayaan fakir miskin	50 orang	terlaksananya bimbingan teknis pendamping/ penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin perkotaan	100 %	47,100,000.0	47,100,000.0	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	03	002	Pemberdayaan fakir miskin perkotaan melalui bantuan kelompok usaha bersama (KUBE)			Provinsi Sulawesi Selatan	# barru Barru Regency South Sulawesi ID # Lemoe Bacukiki Kota Pare-Pare # Makassar Makassar City South Sulawesi # Sinjai Regency South Sulawesi ID #2 Kecamatan (Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Bissappu) Bantaeng Regency South Sulawesi ID #21 Kecamatan North Toraja Regency South Sulawesi ID			jumlah fakir miskin perkotaan yang menerima bantuan kelompok usaha bersama	150 KK	terlaksananya pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama	100 %	300,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Sosial	

								#6 kecamatan kec. mapsu, kec. Polsel, Kec. Polut, kec. galsel, Kec. Galesong, Kec. Galut												
								#Bontokio Minasatene Pangkajene Dan Kepulauan Regency Bontokio Minasatene Pangkajene Dan Kepulauan Regency												
								#DESA BANRIMANUR UNG West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#DESA BEROANGING West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#DESA BONTO NOMPO Kelara Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#DESA GARASSIKANG West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#DESA PAPALUANG West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#DESA PATTIRO West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#DESA TUJU West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi												

									#Kalabbarang Minasatene Pangkajene Dan Kepulauan Regency Kalabbarang Minasatene Pangkajene Dan Kepulauan Regency													
									#Kec. Lalabata, Kec. Citta, Kec. Donri-donri, Kec. Marioriwawo, Kec. Marioriwawa, Kec. Ganra, Kec. Liliraja, Kec. Lilirilau Soppeng Regency South Sulawesi ID													
									#Kecamatan Alla Enrekang Regency South Sulawesi ID													
									#Kecamatan Baroko Enrekang Regency South Sulawesi ID													
									#Kecamatan Benteng Selayar Islands Regency South Sulawesi ID													
									#Kecamatan Binamu Binamu Jeneponto Regency South Sulawesi													
									#kecamatan pulau sembilan Sembilan Island Sinjai Regency South Sulawesi													
									#Kecamatan Ujung Bulu, dan Kecamatan Ujung Loe Bulukumba Regency South Sulawesi ID													
									#Kelurahan Ammassangan Wara Palopo City South Sulawesi													



								#Kelurahan BajoE East Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi												
								#Kelurahan Balandai Bara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Battang Barat West Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Battang West Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Batu Walentrang Telluwana Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Batupasi North Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Benteng East Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Benteng Selatan South Benteng Benteng Selayar Regency												
								#Kelurahan Binturu South Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Biru Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi												
								#Kelurahan Bojo Baru Bojo Baru Mallusetasi Baru Regency												

								#Kelurahan Bosso Walenrang Utara Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan												
								#Kelurahan Boting Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Bukaka Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi												
								#Kelurahan Bulo Walenrang Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan												
								#Kelurahan Bulu TEmpe West Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi												
								#Kelurahan Buntu Datu Bara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Cellu East Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi												
								#Kelurahan Dangerakko Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan jaya Telluwana Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Kambo Mungkajang Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Lagaligo Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Lamasi Lamasi Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan												

								#Kelurahan Latuppa Mungkajang Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Lebang West Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan LonraE East Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi												
								#Kelurahan Luminda North Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Macanang West Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi												
								#Kelurahan Macege West Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi												
								#Kelurahan Majang West Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi												
								#Kelurahan Malatunrung East Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Mancani Telluwanua Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan ManurungE Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi												
								#Kelurahan Maroangin Telluwanua Palopo City South Sulawesi												

							#Kelurahan Masumpu Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi											
							#Kelurahan MattirowaliE West Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi											
							#Kelurahan Mawa Sendana Palopo City South Sulawesi											
							#Kelurahan Mungkajang Mungkajang Palopo City South Sulawesi											
							#Kelurahan Murante Mungkajang Palopo City South Sulawesi											
							#Kelurahan Noling Bupon Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan											
							#Kelurahan Padang Lambe West Wara Palopo City South Sulawesi											
							#Kelurahan Pajalesang Wara Palopo City South Sulawesi											
							#Kelurahan PallettE East Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi											
							#Kelurahan Panyula East Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi											
							#Kelurahan Pappolo Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi											

								#Kelurahan Penggoli North Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Pentojangan Telluwana Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Peta Sendana Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan PoEwali West Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi											
								#Kelurahan Ponjalae East Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Pontap East Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Purangi Sendana Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Rampoang Bara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Sabbamparu North Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Salekoe East Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Salobulo North Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Salubattang Telluwana Palopo City South Sulawesi											





									#Tamanrea Makassar Makassar City South Sulawesi										
1.01	0 6	01.00	0 3	0 2 4	Identifikasi dan seleksi calon pendamping dan penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin pedesaan			Kota Makassar				jumlah calon pendamping/ penerima bantuan yang di identifikasi dan di seleksi	50 Orang	terlaksananya identifikasi dan seleksi pendamping dan penerima bantuan KUBE	100 %	47,500,000.0	52,500,000.0	Dinas Sosial	
1.01	0 6	01.00	0 3	0 2 5	Bimbingan teknis pendamping dan penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin pedesaan			Kota Makassar				jumlah pendamping/ penerima manfaat yang me dapatkan bimbingan teknis pemberdayaa n fakir miskin	50 orang	terlaksananya a bimbingan teknis pendamping/ penerima bantuan pemberdayaa n fakir miskin pedesaan	100 %	47,500,000.0	47,500,000.0	Dinas Sosial	
1.01	0 6	01.00	0 3	0 2 6	Pemberdayaan fakir miskin pedesaan melalui bantuan kelompok usaha bersama (KUBE)			Provinsi Sulawesi Selatan	# Kalibamamase Walenrang Luwu Regency # Sinjai Regency South Sulawesi ID #12 Kecamatan Enrekang Regency South Sulawesi ID #2 Kecamatan (Kecamatan Pajukukang dan Kecamatan Sinoa) Bantaeng Regency South Sulawesi ID #21 Kecamatan North Toraja Regency South Sulawesi ID #8 kecamatan kec. marbo, kec. mapsu, kec. sanrobone, kec. Polsel, Kec. Polut, kec. galsel, Kec. Galesong, Kec. Galut #Ballewe Desa Binuang Kec, Barru Binuang Balusu Barru Regency			jumlah fakir miskin pedesaan yang menerima bantuan kelompok usaha bersama	150 KK	terlaksananya pemberdayaa n fakir miskin pedesaan melalui kelompok usaha bersama	100 %	300,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Sosial	



								#BARAKA. KEC BARAKA. KAB ENREKANG Baraka Baraka Enrekang Regency										
								#Barru Barru Regency South Sulawesi ID										
								#Cempae Desa libureng Libureng Tanete Riaja Barru Regency										
								#CURIO. KEC CURIO. KAB ENREKANG Curio Curio Enrekang Regency										
								#Desa Bacu Kecamatan Tonra Tonra Bone Regency South Sulawesi										
								#Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto Balang Baru Tarowang Jeneponto Regency										
								#DESA BANRIMANUR UNG West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi										
								#DESA BARANA West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi										
								#Desa Batu Putih Tellu Limpoe Bone Regency South Sulawesi										
								#Desa Biccoring Kecamatan Tonra Tonra Bone Regency South Sulawesi										
								#Desa Cinennung Palakka Bone Regency South Sulawesi										

								#DESA GARASSIKANG West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#Desa Jaling Kecamatan Awangpone Awangpone Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Kading Kecamatan Barebbo Barebbo Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Lakawali Pantai, Kecamat an Malili, Kabupate n Luwu Timur Lakawali Pantai Malili East Luwu Regency												
								#Desa Lampoko Kecamatan Barebbo Barebbo Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge Tellu Siattinge Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Limbong Walenrang Utara Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan												
								#Desa MattampawaliE Kecamatan Lappariaja Lappariaja Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone												

								#Desa Pallawa Tellu Limpoe Bone Regency South Sulawesi											
								#DESA PAPALUANG West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#DESA PATTIRO West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#Desa Pattukku LimpoE Lappariaja Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Sadar Tellu Limpoe Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Saragi Walenrang Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan											
								#Desa Siame Kecamatan Palakka Palakka Bone Regency South Sulawesi											
								#Desa Tombang Walenrang Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan											
								#Desa Tondong Tellu Limpoe Bone Regency South Sulawesi											
								#DESA TUJU West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#Desa Ulo Kecamatan Tellu SiattingE Tellu Siattinge Bone Regency South Sulawesi											

								#Desa Walenrang Walenrang Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan														
								#Jl. Bau Massepe No. 87, Kecamatan Bacukiki Barat Lumpue West Bacukiki Pare- Pare City														
								#Jl. M. Husain Zubair no.28 Lumpue West Bacukiki Pare- Pare City														
								#Kanaungan Gentung Labakkang Kanaoengan Gentung Labakkang														
								#Kec. Lalabata, Kec. Citta, Kec. Donri-donri, Kec. Marioriwawo, Kec. Marioriawa, Kec. Ganra, Kec. Liliraja, Kec. Lilirilau Soppeng Regency South Sulawesi ID														
								#Kecamatan Bungin, Kecamatan Masalle dan Kecamatan Buntu Batu Enrekang Regency South Sulawesi ID														
								#Kecamatan Mallusetasi Bojo Mallusetasi Barru Regency														
								#Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Herlang, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Kajang														
								#KELURAHAN BULUJAYA West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi														

								#pangkep Segeri Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi										
								#Patallassang Labakkang Pangkajene Dan Kepulauan Regency Patallassang Labakkang Pangkajene Dan Kepulauan Regency										
								#Taraweang Labakkang Pangkajene Dan Kepulauan Regency Taraweang Labakkang Pangkajene Dan Kepulauan Regency										
								#Toe Desa Siddo kec Soppeng Riaja Siddo Soppeng Riaja Barru Regency										
								#Towuti, Nuha, Wasuponda, Ma lili, Angkona, Bur au, Wotu , Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana, Ka laena East Luwu Regency South Sulawesi ID										
1.01	0 6	01.00	0 3	0 2 8	Identifikasi dan seleksi calon pendamping dan penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin pesisir, tertinggal dan pulau pulau kecil			Kota Makassar			Jumlah calon pendamping/ penerima bantuan pemberdayaa n fakir miskin pesisir yang identifikasi dan di seleksi	100 Orang	terlaksananya identifikasi da seleksi calon pendamping/ penerima bantuan pemberdayaa n fakir miskin pesisir	100 %	47,500,000.0	62,500,000.0	Dinas Sosial	

1.01	06	01.00	03	029	Bimbingan teknis pendamping dan penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin pesisir, tertinggal dan pulau pulau kecil			Kota Makassar			jumlah pendamping/penerima manfaat yang me dapatkan bimbingan teknis pemberdayaan fakir miskin	100 Orang	terlaksananya bimbingan teknis pendamping/penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin pesisir	100 %	47,500,000.0	47,500,000.0	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	03	030	Pemberdayaan fakir miskin pesisir, tertinggal dan pulau pulau kecil melalui bantuan kelompok usaha bersama (KUBE)			Provinsi Sulawesi Selatan	#3 Kecamatan (Kec. Bantaeng, Kec. Bissappu dan Kec. Pajukukang) Bantaeng Regency South Sulawesi ID		jumlah fakir miskin pesisir yang menerima bantuan kelompok usaha bersama	150 KK	terlaksananya pemberdayaan fakir miskin pesisir melalui kelompok usaha bersama	100 %	300,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Sosial	
									#6 kecamatan kec. marbo, kec. mapsu, kec. sanronone, kec. galsel, Kec. Galesong, Kec. Galut									
									#Desa Ancu Kajuara Bone Regency South Sulawesi									
									#Desa AngkuE Kajuara Bone Regency South Sulawesi									
									#Desa Bacu Kecamatan Tonra Tonra Bone Regency South Sulawesi									
									#Desa Bassiang Timur Ponrang Sel. Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan									
									#Desa BuliE Sibulue Bone Regency South Sulawesi									
									#Desa Cakkeware Cenrana Bone Regency South Sulawesi									
									#Desa Carigading Awangpone Bone Regency South Sulawesi									
									#Desa Cege Mare Bone Regency South Sulawesi									

									#Desa Data Mare Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa Kading Awangpone Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa Kajuara Awangpone Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa Labotto Cenrana Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa Lamuru Kecamatan Tellu SiattingE Tellu Siattinge Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa Lapasa Mare Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa Latonro Cenrana Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa Libureng Tonra Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa MallahaE Kajuara Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa Mallimongeng Salomekko Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa ManajEng Sibulue Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa Manera Salomekko Bone Regency South Sulawesi											
									#Desa Mappatoba Salomekko Bone Regency South Sulawesi											

								#Desa Mario Ponrang Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan												
								#Desa MassangkaE Kajuara Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Mattoanging Tellu Siattinge Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Padatuo Tonra Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Pasaka Sibulue Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Polewali Kajuara Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa PusungngE Cenrana Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa SamaEnrE Tonra Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Sumaling Mare Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Sumpang MinangaE Sibulue Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Tirowali Ponrang Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan												
								#Desa Ujung SalangkEto Mare Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa UjungE Tonra Bone Regency South Sulawesi												
								#Kabupaten Gowa Gowa Regency South Sulawesi ID												



								#Kabupaten Takalar Takalar Regency South Sulawesi ID										
								#Mattiro Bulu North Liukang Tupabbiring Pangkajene Dan Kepulauan Regency Mattiro Bulu North Liukang Tupabbiring Pangkajene Dan Kepulauan Regency										
								#Mattiro Kanja North Liukang Tupabbiring Pangkajene Dan Kepulauan Regency Mattiro Kanja North Liukang Tupabbiring Pangkajene Dan Kepulauan Regency										
								#Mattiro Walie North Liukang Tupabbiring Pangkajene Dan Kepulauan Regency Mattiro Walie North Liukang Tupabbiring Pangkajene Dan Kepulauan Regency										
								#Sinjai Timur West Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi										
								#Sinjai Utara, Sinjai Timur, Tellulimpoe, Pulau IX Sinjai Regency South Sulawesi ID										
								#tersebar di 23 kecamatan di luwu utara North Luwu Regency South Sulawesi ID										

1.01	06	01.00	04		PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL				Cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	246 LKS					746,788,842.0	774,468,037.13	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	04	005	Bimbingan sosial karang taruna		Kota Makassar	# Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan # Sinjai Regency South Sulawesi ID # Sulawesi Selatan ID #12 Kecamatan Enrekang Regency South Sulawesi ID #21 Kecamatan North Toraja Regency South Sulawesi ID #Desa Pattedong Ponrang Sel. Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan #Desa Rante Belu Larompong Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan #dusun pakengnge Batu Pitumpanua Wajo Regency #Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng 1 Jl. A Mannappiang Lamalaka #kec. marbo, kec. mapsu, kec. sanronone, kec. pattalassang, kec. Polsel, Kec. Polut, kec. galsel, Kec. Galesong, Kec. Galut	Jumlah karang taruna yang mendapatkan bimbingan sosial	50 orang	peningkatan bimbingan sosial pada karang taruna	100 %	47,500,000.0	47,500,000.0	Dinas Sosial			

								#Kecamatan Herlang, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Kindang Bulukumba Regency South Sulawesi ID										
								#Kecamatan Tempe Wajo Regency South Sulawesi ID										
								#Kelurahan Bajo Bajo Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan										
								#kelurahan bulete Pitumpanua Wajo Regency South Sulawesi										
								#Kelurahan Tamarundung West Wara Palopo City South Sulawesi										
1.01	06	01.00	04	006	Bimbingan teknis tenaga kesejahteraan sosial kecamatan		Kota Makassar	# Sinjai Regency South Sulawesi ID		Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang mendapatkan bimbingan teknis	50 orang	peningkatan bimbingan teknis tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	100 %	47,500,000.0	47,500,000.0	Dinas Sosial		
								#21 Kecamatan North Toraja Regency South Sulawesi ID										
								#Bonepute Larompong Sel. Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan										
								#Desa Bone Lemo Bajo Bar. Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan										
								#Desa Pelalalan Lamasi Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan										
								#Kab. Luwu Timur East Luwu Regency South Sulawesi ID										

								#Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng 1 Jl. A Mannappiang Lamalaka											
								#kec. marbo, kec. mapsu, kec. sanronone, kec. pattallassang, kec. Polsel, Kec. Polut, kec. galsel, Kec. Galesong, Kec. Galut											
								#Kecamatan Tempe Wajo Regency South Sulawesi ID											
								#Kelurahan Noling Bupon Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan											
								#Kelurahan Sabe Belopa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan											
								#Kelurahan Sabe Belopa Utara Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan											
								#Kelurahan tamarundung West Wara Palopo City South Sulawesi											
								#makassar, gowa dan Takalar Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan											
								#manggala Manggala Kota Makassar Sulawesi Selatan											
								#panaikang Panakkukang Kota Makassar Sulawesi Selatan											

								#Semua Kecamatan diKabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan ID												
								#Sudiang Raya Biring Kanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan												
								#tamalanrea indah Tamalanrea Kota Makassar Sulawesi Selatan												
1.01	06	01.00	04	008	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional			Kota Makassar			Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional yang Terpelihara	2 TMP/MPN	peningkatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional	100 %	152,188,842.0	179,868,037.13	Dinas Sosial			
1.01	06	01.00	04	009	Penanaman nilai kepahlawanan,keperintisan,kesetiakawanan dan restorasi sosial			Kota Makassar			jumlah penanaman dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	3 hari-hari besar	peningkatan penanaman dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	100 %	402,000,000.0	402,000,000.0	Dinas Sosial			
1.01	06	01.00	04	010	Pengusulan dan rekomendasi calon pahlawan nasional,perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan			Kota Makassar			Jumlah pengusulan dan rekomendasi yang mendapatkan persetujuan penganugerahan gelar pahlawan nasional sekaligus tanda kehormatan lainnya	50 Orang	tercapainya pengusulan dan rekomendasi calon pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan	100 %	19,600,000.0	19,600,000.0	Dinas Sosial			
1.01	06	01.00	04	011	Bimbingan dan penyuluhan sosial			Kota Makassar			jumlah penyuluh sosial yang mendapatkan bimbingan	150 orang	peningkatan bimbingan dan penyuluhan kesejahteraan sosial	100 %	78,000,000.0	78,000,000.0	Dinas Sosial			

1.01	06	01.00	05		PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)					Cakupan eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mendapatkan pembinaan	100 Jiwa				927,547,623.0	927,926,513.17	Dinas Sosial		
1.01	06	01.00	05	001	pelayanan dan rehabilitasi sosial pada PPSKW mattirodeceng makassar			Kota Makassar	#Semua Kecamatan di kab. Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan ID			Jumlah wanita tuna susila yang mendapatkan bimbingan dan pelayanan pada PPSKW Mattirodeceng Makassar	100 Orang	Peningkatan pelayanan sosial pada PPSKW Mattirodeceng Makassar	100 %	927,547,623.0	927,926,513.17	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	06		PROGRAM PELAYANAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO (Prioritas)	Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Cakupan lansia yang memperoleh perawatan di panti jompo	75 Jiwa					1,134,440,505.0	1,176,487,732.56	Dinas Sosial	
									% Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)	100 %									
1.01	06	01.00	06	001	pelayanan sosial pada PPSLU mappakasunggu pare-pare			Kota Parepare	# Sinjai Regency South Sulawesi ID #Kecamatan Herlang, Kajang, Bulukumpa, Rilau Ale, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bontotiro, Bonto Bahari, Gantarang, Kindang Bulukumba Regency South Sulawesi ID #Semua Kecamatan di Kab. Sidenreng Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan ID			Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pelayanan pada PPSLU Mappakasunggu Pare pare	75 orang	Peningkatan pelayanan sosial pada PPSLU Mappakasunggu Pare-pare	100 %	959,375,000.0	959,375,000.0	Dinas Sosial	

1.01	06	01.00	06	003	bimbingan dan pendamping lanjut usia potensial			Kota Makassar			Jumlah lanjut usia potensial yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan	50 Orang	Peningkatan bimbingan dan pendampingan lanjut usia potensial	100 %	50,065,505.0	92,112,732.56	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	06	004	pemberdayaan lanjut usia potensial melalui usaha ekonomi produktif			Kota Makassar	# Bumi Harapan Bacukiki Bar. Kota Pare-Pare # Sinjai Regency South Sulawesi ID #Desa Abbumpung Cina Bone Regency South Sulawesi #Desa Ajang Pulu Cina Bone Regency South Sulawesi #Desa ArasoE Cina Bone Regency South Sulawesi #Desa Bacu Kecamatan Tonra Tonra Bone Regency South Sulawesi #Desa Bicoing Kecamatan Tonra Tonra Bone Regency South Sulawesi #Desa Cinennung Palakka Bone Regency South Sulawesi #Desa Jaling Awangpone Bone Regency South Sulawesi #Desa Kading Kecamatan Barebbo Bone Regency South Sulawesi #Desa Kanco Cina Bone Regency South Sulawesi	jumlah lanjut usia potensial yang mendapatkan pemberdayaan	50 orang	terlaksananya pemberdayaan lanjut usia potensial melalui usaha ekonomi produktif	100 %	125,000,000.0	125,000,000.0	Dinas Sosial		

								#Desa Lampoko Kecamatan Barebbo Barebbo Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Lamuru Kecamatan Tellu SiattingE Tellu Siattinge Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Lompu Cina Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa MattampawaliE Kecamatan Lappariaja Lappariaja Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Awangpone Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Padang Loang Cina Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Pattukku LimpoE Lappariaja Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Siame Kecamatan Palakka Palakka Bone Regency South Sulawesi												
								#Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Desa Buntu Sarong, Masalle, Kec. Masalle Enrekang Regency South Sulawesi ID												



							#Desa Tanete Harapan Cina Bone Regency South Sulawesi													
							#Desa Ulo Kecamatan Tellu SiattingE Tellu Siattinge Bone Regency South Sulawesi													
							#Desa WalenrEng Cina Bone Regency South Sulawesi													
							#Kec. Lalabata, Kec. Citta, Kec. Donri-donri, Kec. Marioriwawo, Kec. Marioriawa, Kec. Ganra, Kec. Liliriaja, Kec. Lilirilau Soppeng Regency South Sulawesi ID													
							#kec. marbo, kec. mapsu, kec.sanronone, kec. pattalassang, kec. Polsel, Kec. Polut, kec. galsel, Kec. Galesong, Kec. Galut													
							#Kelurahan Ammassangan Wara Palopo City South Sulawesi													
							#Kelurahan Balandai Bara Palopo City South Sulawesi													
							#Kelurahan battang barang West Wara Palopo City South Sulawesi													
							#Kelurahan battang West Wara Palopo City South Sulawesi													
							#Kelurahan Batupasi North Wara Palopo City South Sulawesi													

								#Kelurahan batuwalenrang Telluwanua Palopo City South Sulawesi														
								#Kelurahan Benteng East Wara Palopo City South Sulawesi														
								#Kelurahan Binturu South Wara Palopo City South Sulawesi														
								#Kelurahan Boting Wara Palopo City South Sulawesi														
								#Kelurahan Buntu Datu Bara Palopo City South Sulawesi														
								#Kelurahan Dangerakko Wara Palopo City South Sulawesi														
								#Kelurahan jaya Telluwanua Palopo City South Sulawesi														
								#kelurahan kambo Mungkajang Palopo City South Sulawesi														
								#Kelurahan Lagaligo Wara Palopo City South Sulawesi														
								#kelurahan latuppa Mungkajang Palopo City South Sulawesi														
								#Kelurahan lebang West Wara Palopo City South Sulawesi														
								#kelurahan luminda North Wara Palopo City South Sulawesi														

								#Kelurahan luminda North Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan malatunrung East Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan mancani Telluwanua Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan maroangin Telluwanua Palopo City South Sulawesi												
								#kelurahan mungkajang Mungkajang Palopo City South Sulawesi												
								#kelurahan murante Mungkajang Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan padang lambe West Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Pajalesang Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan pattene North Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan Penggoli North Wara Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan pentojangan Telluwanua Palopo City South Sulawesi												
								#Kelurahan peta Sendana Palopo City South Sulawesi												

								#Kelurahan ponjalae East Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Pontap East Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan purangi Sendana Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Rampoang Bara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Sabbamparu North Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Salekoe East Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Salobulo North Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan salubattang Telluwana Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Salutellue East Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Sampoddo South Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan sendana Sendana Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Songka South Wara Palopo City South Sulawesi											

								#Kelurahan sumarambu Telluwanua Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Surutanga East Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Takkalala South Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan tamarunding West Wara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan TanEtE Cina Bone Regency South Sulawesi											
								#Kelurahan Temmalebba Bara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan To Bulung Bara Palopo City South Sulawesi											
								#Kelurahan Tompotikka Wara Palopo City South Sulawesi											
1.01	06	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %					4,547,734,573.0	4,666,293,108.44	Dinas Sosial		
1.01	06	01.00	50	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	3 Jenis	384,000,000.0	412,843,108.44	Dinas Sosial		
1.01	06	01.00	50	03	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS		kantor dinas sosial Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	71 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	2,336,400,000.0	2,336,400,000.0	Dinas Sosial		
1.01	06	01.00	50	05	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan		kantor dinas sosial Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah ATK yang tersedia	3 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	212,850,000.0	212,850,000.0	Dinas Sosial		

1.01	06	01.00	5006	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	25,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	5008	08	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah biaya jaman makan dan minum yang tersedia	4 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	1,140,800,000.0	1,165,800,000.0	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	5009	09	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	3 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	5010	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Luar Provinsi Sulawesi Selatan 24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perjalanan dinas	88 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	100 Orang	348,684,573.0	388,400,000.0	Dinas Sosial	
<b>1.01</b>	<b>06</b>	<b>01.00</b>	<b>51</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>					<b>936,818,589.0</b>	<b>971,541,100.94</b>	<b>Dinas Sosial</b>	
1.01	06	01.00	5104	04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kota Makassar			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	7 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	345,000,000.0	345,000,000.0	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	5106	06	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	10 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	230,818,589.0	228,700,000.0	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	5108	08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	20,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	5109	09	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	300 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	304,000,000.0	340,841,100.94	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	5110	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	37,000,000.0	37,000,000.0	Dinas Sosial	

1.01	06	01.00	52		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %					321,926,027.0	333,857,984.96	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Kota Makassar				Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	50 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	38,500,000.0	38,500,000.0	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kantor Dinas Sosial Kota Makassar				Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	87,728,027.0	99,659,984.96	Dinas Sosial	
									Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen							
									Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	1 Dokumen							
									Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	0 Dokumen							
1.01	06	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			Kantor Dinas Sosial Kota Makassar				Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	2 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %	88,000,000.0	88,000,000.0	Dinas Sosial	
1.01	06	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kantor dinas Sosial Kota Makassar				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	4 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	107,698,000.0	107,698,000.0	Dinas Sosial	
<b>1.01</b>	<b>06</b>	<b>01.00</b>	<b>53</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>	<b>100 %</b>					<b>18,040,799.0</b>	<b>18,709,468.08</b>	<b>Dinas Sosial</b>	
1.01	06	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kantor Dinas Sosial Kota Makassar				Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	20 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	15,000,000.0	15,000,000.0	Dinas Sosial	

1.01	06	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kantor Dinas Sosial Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	2 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	3,040,799.0	3,709,468.08	Dinas Sosial		
1.02					Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar														
1.02	0				Tenaga Kerja														
1.02	01	01.00			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi										16,632,013,024.26	16,876,080,996.28			
1.02	01	01.00	01		PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA (Prioritas)	Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan	Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan			% Pencari kerja yang	3.7 %				1,720,500,000.0	1,738,500,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
										Rasio daya serap tenaga kerja (Prioritas)	58.47 %								
1.02	01	01.00	01	001	Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri			Kabupaten Bantaeng	# Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan			Jumlah kelompok usaha mandiri yang mengikuti pembinaan	21 Kelompok	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok dalam mengembangkan usahanya	100 %	953,500,000.0	953,500,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
								Kabupaten Bone	#belopa dan walmas Belopa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan										
								Kabupaten Enrekang	#Kabupaten Bantaeng Bantaeng Sub-District Bantaeng Regency South Sulawesi										
								Kabupaten Gowa	#Kabupaten Gowa Gowa Regency South Sulawesi ID										
								Kabupaten Luwu	#Kec. Bacukiki Barat Kampung Baru West Bacukiki Pare-Pare City										
								Kabupaten Takalar	#Kec. Panakkukang, Manggala, Tamalanrea, Biringkanaya Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan										
								Kabupaten Toraja Utara	#Kec. Panakkukang, Manggala, Tamalanrea, Biringkanaya Makassar Makassar City South Sulawesi										



								Kota Parepare	#Kec. Parangloe, Tinggi Moncong Tompobulu Gowa Regency South Sulawesi									
								Provinsi Sulawesi Selatan	#Kecamatan Rantepao dan Kec. Kesu di Kabupaten Toraja Utara North Toraja Regency South Sulawesi ID									
									#Kel.Pattene Kec.Wara Timur Kota Palopo Pattene North Wara Palopo City									
1.02	01	01.00	01	02	Penyelenggaraan Padat Karya			Kabupaten Enrekang	# Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan		Jumlah penganggur yang mengikuti program padat karya	80 Orang	Penyerapan tenaga kerja sementara	100 %	193,900,000.0	193,900,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
								Kabupaten Luwu	# Larompong Sel. Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan									
								Kabupaten Sidenreng Rappang	#21 Kecamatan se Kabupaten Toraja Utara North Toraja Regency South Sulawesi ID									
								Kabupaten Tana Toraja	#Desa Cenrana Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan									
								Kabupaten Toraja Utara	#Kec. Bungayya/ Kec. Biringbulu Gowa Regency South Sulawesi ID									
									#Kec. Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan ID									
									#Kel.Tomarunding Kec.Wara Barat Kota Palopo Tomarunding West Wara Palopo City									

1.02	01	01.00	01	003	Pameran Bursa Kerja Daerah ( Job Fair )			Kota Makassar				Data dan informasi lowongan kerja di perusahaan	1000 Orang	Penyerapan tenaga kerja	100 %	78,500,000.0	78,500,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
1.02	01	01.00	01	004	Monitoring dan Pengendalian Tenaga Kerja Lokal dan Asing			Provinsi Sulawesi Selatan				Data dan informasi penempatan tenaga kerja lokal, tenaga kerja imigran dan tenaga kerja asing di kab/kota	24 Kab/Kota	Tersedianya data dan informasi penempatan tenaga kerja lokal, tenaga kerja imigran dan tenaga kerja asing di kab/kota	100 %	182,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
1.02	01	01.00	01	005	Penyediaan Informasi Pasar dan Bursa Kerja			Provinsi Sulawesi Selatan				Data dan informasi pasar dan bursa kerja di kab/kota	24 Kab/Kota	Tersedia data dan informasi pasar dan bursa kerja di 24 kab/kota	100 %	49,000,000.0	49,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
1.02	01	01.00	01	006	Pemerdayaan Tenaga Kerja AKL/AKAD			Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah tenaga kerja AKAD/AKL yang mengikuti	20 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
1.02	01	01.00	01	007	Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas			Kabupaten Sidenreng Rappang	#Kec. Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan ID			Jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas yang mendapatkan pemberdayaan/pembinaan	80 Orang	Penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di perusahaan	100 %	99,600,000.0	99,600,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
								Provinsi Sulawesi Selatan	#Kec.Tomoni Kab.Luwu Timur Tomoni East Luwu Regency South Sulawesi												
1.02	01	01.00	01	008	Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja			Kota Makassar				Jumlah angkatan kerja dan stake holder terkait yang mengikuti sosialisasi	50 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman angkatan kerja dan stake holder tentang lingkup bidang penempatan tenaga kerja	100 %	26,000,000.0	26,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
1.02	01	01.00	01	009	Pelayanan Sentra Penanganan TKI Terpadu			Kota Parepare				Pelayanan Penanganan TKI Terpadu	12 Bulan	Kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan penanganan penangan TKI terpadu	100 %	88,000,000.0	88,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
1.02	01	01.00	02		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>							Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan			71.4 %				2,199,650,000.0	2,299,650,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

										Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75 %								
1.02	01	01.00	02	001	Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja							Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan	340 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pencari kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja	100 %	927,600,000.0	977,600,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
								Kabupaten Bone	# 63 Jl. Keterampilan Cappa Galung										
								Kabupaten Bulukumba	# Bara-Baraya Kec. Makassar Kota Makassar										
								Kabupaten Enrekang	# Bara-Baraya Tim. Kec. Makassar Kota Makassar										
								Kabupaten Luwu Timur	# Barana Kec. Makassar Kota Makassar										
								Kabupaten Sidenreng Rappang	# Bontoa Minasatene Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan										
								Kabupaten Sinjai	# Kalibamamase Walenrang Luwu Regency										
								Kabupaten Soppeng	# Kamanre Luwu Regency South Sulawesi										
								Kabupaten Takalar	# Kassi-Kassi Rappocini Kota Makassar										
								Kabupaten Toraja Utara	# Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan										
								Kota Parepare	#Kab. Bone Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan										
									#Kec. Bacukiki Barat, Bacukiki, Soreang, Ujung Jl. Keterampilan Cappa Galung Bacukiki Bar.										
									#Kec. Biringkanaya, Kec. Tamalanrea, Kec. Manggala Biring Kanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan										

								#Kec. Gantarang, Ujungloeo, Bontotiro, Kindang Gantarang Bulukumba Regency South Sulawesi												
								#Kec. Lalabata Soppeng Regency South Sulawesi ID												
								#Kec. Malili Malili East Luwu Regency South Sulawesi												
								#Kec. Panakkukang, Manggala, Tamalanrea, Biringkanaya Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan												
								#Kec. Panakkukang, Manggala, Tamalanrea, Biringkanaya Makassar Makassar City South Sulawesi												
								#Kecamatan Panca Lautang, Watangsidenreng Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan												
								#Kel. Bontoduri Kec. Tamalate Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan												
								#Kel. Pajalesang Kec. Wara Kota Palopo Panjelesang Wara Palopo City												
								#loka bina karya (lbk) dinas sosial jl.ahmad yani no.7 ( peserta dari 9 kecamatan )												

									#Rantepao Toraja Utara Rantepao North Toraja Regency South Sulawesi									
									#Sempowai Kel.Dangerakko Dangerakko Wara Palopo City									
1.02	01	01.00	02	02	Pelatihan Berbasis Kompetensi			Kabupaten Luwu	#Kec. Bajo barat Belopa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	45 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi	100 %	258,000,000.0	258,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
								Kabupaten Luwu Timur	#Kec. Makale Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan ID									
								Kabupaten Tana Toraja	#Kec. Malili East Luwu Regency South Sulawesi									
1.02	01	01.00	02	03	Uji Kompetensi			Kabupaten Luwu		Jumlah tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi	20 Orang	Sertifikasi kompetensi tenaga kerja	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
								Provinsi Sulawesi Selatan										
1.02	01	01.00	02	05	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja			Kabupaten Luwu	#Kantor Disnaker Jalan Jend. Sudirman Tiro Sompe Bacukiki Bar.	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi	10 LPK	Sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan khususnya di bidang pelatihan dan kompetensi	100 %	41,000,000.0	41,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
								Kota Parepare	#Kec. Walenrang Timur Belopa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan									
								Provinsi Sulawesi Selatan										
1.02	01	01.00	02	06	Bimtek Pelatihan Berbasis Kompetensi			Kabupaten Tana Toraja	# Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan ID	Jumlah orang yang mengikuti bimtek pelatihan berbasis kompetensi	70 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pimpinan, insutruktur dan peserta bimtek	100 %	163,750,000.0	163,750,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
								Provinsi Sulawesi Selatan										
1.02	01	01.00	02	08	Sosialisasi Pembinaan Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja			Kota Makassar		Jumlah stakeholder pelatihan yang mengikuti sosialisasi	20 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman stakeholder pelatihan dalam mewujudkan lulusan pelatihan yang kompeten	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

1.02	01	01.00	02	009	Pemagangan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri					Jumlah pencari kerja yang mengikuti pemagangan	75 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pencari kerja dalam memenuhi kebutuhan	100 %	50,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Luar Provinsi Sulawesi Selatan											
						Provinsi Sulawesi Selatan											
1.02	01	01.00	02	010	Standarisasi Kompetensi Tenaga Kerja					Data dan informasi tenaga kerja yang memiliki standarisasi yang kompeten	1 Dokumen	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja yang memiliki standarisasi yang kompeten	100 %	41,000,000.0	41,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.02	01	01.00	02	011	Pelatihan Transmigrasi Lokal					Jumlah warga transmigrasi yang mengikuti pelatihan	50 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan warga transmigrasi dalam rangka peningkatan pendapatan	100 %	69,700,000.0	69,700,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Kabupaten Luwu Timur	#Desa Lagading, Kec. Pitu Riase, Kab Sidenreng Rappang Lagading Pitu Riase Sidenreng Rappang Regency										
						Kabupaten Luwu Utara	#Kec. Marioriwawo Soppeng Regency South Sulawesi ID										
						Kabupaten Sidenreng Rappang	#Kec. Towuti Towuti East Luwu Regency South Sulawesi										
						Kabupaten Soppeng	#Kecamatan Awan Rantekarua Rantepao North Toraja Regency South Sulawesi										
						Kabupaten Toraja Utara											
						Kabupaten Wajo											
1.02	01	01.00	02	012	Pelatihan Kewirausahaan					Jumlah calon tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	80 Orang	Meningkatnya jumlah calon wirausaha baru	100 %	329,500,000.0	329,500,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Kabupaten Bone	# Kamanre Luwu Regency South Sulawesi										
						Kabupaten Bulukumba	# Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan										



								#Kec. Somba Opu Sungguminasa Somba Opu Gowa Regency										
								#loka bina karya (lbk) dinas sosial jl.ahmad yani no.7 North Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi										
								#Rilau Ale, Bulukumpa, Ujung Loe, Ujung Bulu, Kindang, Gantarang, Herlang, Kajang, Bontotiro, Bontobahari Bulukumpa Regency South Sulawesi ID										
1.02	01	01.00	02	013	Pelatihan Peningkatan Produktivitas			Kabupaten Sinjai	# Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan			Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	40 Orang	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja sektor informal	100 %	96,000,000.0	96,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
								Provinsi Sulawesi Selatan	# Tamarunang Mariso Kota Makassar									
									#loka bina karya (lbk) dinas sosial jl.ahmad yani no.7 North Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi									
1.02	01	01.00	02	015	Pengukuran Produktivitas			Provinsi Sulawesi Selatan				Data dan informasi pengukuran produktivitas tenaga kerja	1 Dokumen	Tingkat Produktivitas Perusahaan	100 %	44,100,000.0	44,100,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	02	017	Pelayanan dan Pembinaan UPTD BPK			Kota Makassar				Pelayanan dan pembinaan pelatihan UPTD	12 Bulan	Kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan pelatihan UPTD	100 %	79,000,000.0	79,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					% Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	70.13 %				1,651,000,000.0	1,673,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
										Besaran pemeriksaan perusahaan	26.43 %							
										Besaran pengujian peralatan di perusahaan	9.6 %							



1.02	01	01.00	03	001	Penanganan Kasus Ketenagakerjaan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah kasus ketenagakerjaan yang ditangani di perusahaan	150 Kasus	Penyelesaian kasus ketenagakerjaan di perusahaan kab/kota	100	141,000,000.0	141,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	002	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah perusahaan yang diperiksa	300 Perusahaan	Penegakan norma ketenagakerjaan di perusahaan berjalan sesuai aturan	100 %	340,000,000.0	350,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	003	Pemeriksaan dan Pengujian Objek dan Peralatan K3			Provinsi Sulawesi Selatan				Data dan informasi objek dan peralatan K3 perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian	100 Perusahaan	Kelayakan pemakaian objek dan peralatan K3 di perusahaan	100 %	48,000,000.0	48,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	006	Pembinaan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan			Kota Makassar				Jumlah pengawas ketenagakerjaan yang mengikuti pembinaan	60 Orang	Persamaan persepsi aparatur pengawas ketenagakerjaan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan	100 %	20,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	007	Pelatihan Keselamatan dan Kecelakaan Kerja ( K3 )			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah tenaga kerja perusahaan yang mengikuti pelatihan keselamatan dan kecelakaan kerja ( K3 )	60 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja tentang keselamatan dan kecelakaan kerja ( K3 )	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	011	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Wilayah I			Kabupaten Enrekang				Jumlah perusahaan lingkup wilayah I yang diperiksa	150 Perusahaan	Penegakan norma ketenagakerjaan di perusahaan lingkup wilayah I berjalan sesuai aturan	100 %	127,000,000.0	130,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Kabupaten Pinrang													
					Kabupaten Sidenreng Rappang													
					Kota Parepare													
1.02	01	01.00	03	012	Pendataan Objek Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I			Kabupaten Enrekang				Data dan informasi objek pengawasan ketenagakerjaan Wilayah I	1 Dokumen	Sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan aparatur pengawas ketenagakerjaan	100 %	43,000,000.0	43,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Kabupaten Pinrang												
						Kabupaten Sidenreng Rappang												
						Kota Parepare												
1.02	01	01.00	03	013	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Wilayah II			Kabupaten Luwu				Jumlah perusahaan lingkup wilayah II	150 Perusahaan	Penegakan norma ketenagakerjaan di	100 %	127,000,000.0	130,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Kabupaten Luwu Timur												



1.02	01	01.00	03	020	Pelayanan Pemeriksaan Pengawasan UPTD Wilayah II			Kota Palopo			Kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan pemeriksanaan pengawasan UPTD Wilayah	12 Bulan	Meningkatnya layanan pemeriksaan pengawasan UPTD Wilayah	100 %	68,000,000.0	68,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	021	Pelayanan Pemeriksaan Pengawasan UPTD Wilayah III			Kabupaten Bone			Kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan pemeriksanaan pengawasan UPTD Wilayah	12 Bulan	Meningkatnya layanan pemeriksaan pengawasan UPTD Wilayah	100 %	68,000,000.0	68,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	03	022	Pelayanan Pemeriksaan Pengawasan UPTD Wilayah IV			Kabupaten Bulukumba			Kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan pemeriksanaan pengawasan UPTD Wilayah	12 Bulan	Meningkatnya layanan pemeriksaan pengawasan UPTD Wilayah	100 %	68,000,000.0	68,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	04		PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA					Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	96 %				1,192,850,000.0	1,268,850,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
										Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2.1 %						
										Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	45.24 %						
										Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100 %						
1.02	01	01.00	04	001	Koordinasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh			Kota Makassar			Jumlah anggota SP/SB yang mengikuti rapat koordinasi/workshop	45 Orang	Berkurangnya kasus perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, unjuk rasa di perusahaan	100 %	40,850,000.0	40,850,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	01.00	04	002	Pengupahan dan Jaminan Purna Kerja			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Fasilitasi Dewan Pengupahan dalam menetapkan	23 Orang	Penetapan Upah Minimum Provinsi dan	100 %	477,800,000.0	500,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.02	0 1	01.00	0 4	0 0 3	Pemberdayaan LKS Tripartit			Luar Provinsi Sulawesi Selatan		Fasilitasi Tim LKS Tripartit dalam mewujudkan hubungan industrial yang kondusif ( Pengusaha, Pekerja, Unsur Pemerintah )	27 Orang	Peningkatan peran LKS Tripartit secara maksimal dalam mewujudkan hubungan industrial	100 %	396,200,000.0	400,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
								Provinsi Sulawesi Selatan								
1.02	0 1	01.00	0 4	0 0 4	Sosialisasi Penyusunan dan Penetapan UMP			Kota Makassar		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi ( Unsur Pengusaha, Unsur Pekerja, Unsur Pemerintah )	50 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman stakeholder terkait dalam penyusunan maupun penetapan UMP	100 %	34,000,000.0	34,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	0 1	01.00	0 4	0 0 5	Monitoring Pelaksanaan Syarat-Syarat Kerja			Kabupaten Kepulauan Selayar	# Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan ID	Data dan informasi pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan kab/kota	1 Dokumen	Pelaksanaan syarat-syarat kerja berjalan sesuai aturan ketenagakerjaan	100 %	48,000,000.0	48,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
								Kabupaten Luwu	#Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja							
								Kabupaten Luwu Timur	#Kantor Disnaker Jalan Jend. Sudirman Tiro Sompe Bacukiki Bar.							
								Kabupaten Tana Toraja	#Kec Bua ,walenrang dan Belopa Belopa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan							
								Kota Parepare	#Kec. Malili Malili East Luwu Regency South Sulawesi							
								Provinsi Sulawesi Selatan								
1.02	0 1	01.00	0 4	0 0 6	Bimtek Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan			Kabupaten Kepulauan Selayar	# Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan ID	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti bimtek	40 Orang	Berkurangnya kasus perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, unjuk rasa di perusahaan	100 %	100,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
								Kabupaten Luwu	#Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja							
								Kabupaten Tana Toraja	#Makassar Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan							

								Kabupaten Toraja Utara	#Rantepao Toraja Utara Rantepao North Toraja Regency South Sulawesi														
								Kota Makassar															
1.02	0 1	01.00	0 4	0 0 7	Pembinaan Jaminan Sosial Kesejahteraan tenaga Kerja			Provinsi Sulawesi Selatan					Jumlah pekerja yang mengikuti program jamsostek	90000 Orang	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mengikuti program jamsostek	100 %	48,000,000.0	48,000,000.0					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	0 1	01.00	0 4	0 0 9	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			Kabupaten Luwu Timur	# Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan ID				Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial di perusahaan yang dapat diselesaikan	100 Kasus	Berkurangnya kasus perselisihan hubungan industrial di perusahaan kab/kota	100 %	48,000,000.0	48,000,000.0				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Kabupaten Tana Toraja	#Kec. Malili East Luwu Regency South Sulawesi																
						Provinsi Sulawesi Selatan																	
<b>1.02</b>	<b>0 1</b>	<b>01.00</b>	<b>5 0</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>								<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>3,813,713,024.26</b>	<b>3,888,430,996.28</b>				<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	
1.02	0 1	01.00	5 0	0 0 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Makassar					Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	4 Jenis	541,000,000.0	541,000,000.0					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	0 1	01.00	5 0	0 0 2	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Makassar					Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	7 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	7 Unit	50,000,000.0	50,000,000.0				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
												Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	10 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	10 Unit								
1.02	0 1	01.00	5 0	0 0 3	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kota Makassar					Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	20 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	720,000,000.0	720,000,000.0					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	0 1	01.00	5 0	0 0 5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Provinsi Sulawesi Selatan					Jumlah ATK yang tersedia	16 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	525,300,000.0	552,300,000.0					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	0 1	01.00	5 0	0 0 8	Penyediaan Makanan dan Minuman			Provinsi Sulawesi Selatan					Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	2 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	1,469,150,000.0	1,494,150,000.0					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	0 1	01.00	5 0	0 0 9	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kota Makassar					Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	0 1	01.00	5 0	0 0 1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Luar Provinsi Sulawesi					Jumlah perialasan	12 Kali	Peningkatan Jumlah	100 Orang	458,263,024.26	480,980,996.28					Dinas Tenaga Kerja dan



											Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	1 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	4 Dokumen				
1.02	01	01.00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi , tugas pembantuan	2 Usulan Kegiatan	Ketersediaan Usulan Kegiatan dana dekonsentrasi , tugas	2 Laporan	228,400,000.0	228,400,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.02	01	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	4 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	100 %	161,350,000.0	161,350,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
											Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	3 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %				
1.02	01	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kota Makassar			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.02	01	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Kota Makassar			Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	19 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	35,000,000.0	35,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
<b>1.02</b>	<b>01</b>	<b>01.00</b>	<b>53</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>				<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>	<b>100 %</b>					<b>250,000,000.0</b>	<b>100,000,000.0</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	
1.02	01	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Kota Makassar			Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian nya	241 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
											Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %				
1.02	01	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	240 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	150,000,000.0	0.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
<b>1.02</b>	<b>02</b>				<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>													

1.02	02	01.00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										9,341,601,819.99	9,450,777,335.96			
1.02	02	01.00	01		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (Prioritas)				Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Prioritas)	31 %					928,360,000.0	931,360,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.02	02	01.00	01	002	Pembentukan Model Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM)			Kabupaten Luwu	# Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan ID		Jumlah Kab/kota yang dibangun PATBM dan jumlah kab/kota yang dimonitoring dan dievaluasi	4 Kab/kota	Persentase PATBM yang terbentuk di kab/kota	17 %	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	# Luwu Regency South Sulawesi ID										
								Kabupaten Sinjai	# Palopo Wara Palopo City										
								Kota Palopo	# Pangkajene Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Sulawesi Selatan										
1.02	02	01.00	01	004	Pengasuhan Berbasis Hak Anak Dalam Keluarga dan Institusi			Kota Makassar			Jumlah kader organisasi/pemerintah dan non pemerintah yang difasilitasi	45 Orang	Jumlah kader organisasi/pemerintah dan non pemerintah yang memahami	45 Kader	82,360,000.0	85,360,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
								Provinsi Sulawesi Selatan											
1.02	02	01.00	01	005	Pengembangan Model Layanan Integratif Perlindungan Perempuan Termasuk TPPO			Kabupaten Bulukumba			Jumlah Kab/kota yang mengembangkan model layanan integratif perlindungan	2 Kab/kota	Jumlah model layanan integratif perlindungan perempuan termasuk TPPO yang tersedia	2 Piloting	110,000,000.0	110,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
								Kabupaten Gowa											
1.02	02	01.00	01	006	Pembentukan Model Pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak (SPA) bagi lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah			Kota Makassar	#Balai Ainun Jl. Andi Isa Parepare Parepare City South Sulawesi		Jumlah Kab/Kota yg terlatih penerapan model SPA berbasis PPRA	3 kab/kota	% Kab/Kota yg terlatih penerapan model SPA berbasis PPRA	12.5 Persen	110,000,000.0	110,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
								Provinsi Sulawesi Selatan	#Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toraja Utara North Toraja Regency South Sulawesi ID										



								#Jl Jend A Yani No 1 Kel Biringere Kantor Bupati Sinjai Lama North Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi										
								#Kab. Soppeng Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan ID										
								#Kabupaten Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi ID										
								#Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Jl. Chalik Sumpang Minangae Bacukiki Bar.										
								#Kantor DPPP Kab. Bulukumba Jl. Anggrek Caile Ujung Bulu										
								#Kecamatan Tompobulu Tompobulu Tompu Bulu Maros Regency										
1.02	02	01.00	01	07	Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan kampanye perkawinan anak	100 Orang	Prosentase Kab/Kota yang berkomitmen melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak	50 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.02	02	01.00	01	08	Pelayanan integratif dan rujukan Korban ktP/ktA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kasus perempuan dan anak korban ktP/ktA yang mendapatkan layanan pengaduan	60 kasus	% Kasus perempuan dan anak korban ktP/ktA yang mendapatkan layanan pengaduan	100 %	451,000,000.0	451,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.02	02	01.00	02		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA</b>						% Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga yang terstandarisasi	25 %			652,684,000.0	686,601,500.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

1.02	02	01.00	02	007	Workshop PPRG Bagi Calon Fasilitator			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah calon fasilitator yang mengikuti workshop PPRG	25 Orang	Persentase komitmen pelaksanaan PPRG melalui Fasilitator PPRG	100 %	72,000,000.0	72,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.02	02	01.00	02	010	Pendampingan/mentoring pelaksanaan PUG bagi perangkat daerah			Kabupaten Bantaeng			Jumlah perangkat daerah kab/kota yang mendapatkan pendampingan/mentoring	6 Kab.Kota	Persentase komitmen pelaksanaan PUG di perangkat daerah Kab/Kota	75 %	120,000,000.0	120,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
								Kabupaten Bulukumba			Jumlah perangkat daerah provinsi yang mendapatkan pendampingan/mentoring	10 OPD Provinsi	Persentase komitmen pelaksanaan PUG di perangkat daerah Provinsi	90 %				
								Kabupaten Wajo										
								Kota Makassar										
								Kota Palopo										
								Kota Parepare										
								Provinsi Sulawesi Selatan										
1.02	02	01.00	02	015	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Indikator Pembangunan Ketahanan Keluarga			Kabupaten Bone			Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan dimonitoring pencapaian indikator pembangunan ketahanan keluarga	8 Kab/Kota	Persentase Kab/Kota yang mengembangkan percontohan desa berdasarkan indikator ketahanan keluarga	33 %	100,000,000.0	110,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
								Kabupaten Enrekang										
								Kabupaten Maros										
								Kabupaten Sinjai										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Wajo										
								Kota Makassar										
								Kota Parepare										
								Provinsi Sulawesi Selatan										
								1.02										02
Kabupaten Barru	# Makassar Makassar City South Sulawesi																	
Kota Makassar	#Panaikang Panakkukang Kota Makassar Sulawesi Selatan																	

1.02	0 2	01.00	0 2	0 1 8	Workshop Kader/Pengurus Organisasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosial			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta kader organisasi kemasyarakatan yang mengikuti workshop dan didampingi dalam pemberdayaan bidang politik, hukum, ekonomi dan Sosial	160 Orang	Persentase meningkatnya kualitas organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan bidang politik, hukum dan ekonomi	50 %	79,101,000.0	90,101,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	0 2	01.00	0 2	0 1 9	Penguatan dan Pengembangan Layanan PUSPAGA			Kabupaten Barru			Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga	2 Unit	Tersedianya layanan peningkatan kualitas keluarga	2 Unit	57,082,500.0	70,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	0 2	01.00	0 2	0 2 0	Operasionalisasi dan Penguatan focalpoint PUG			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah focal point PUG perangkat daerah yang ditingkatkan kapasitas dlm pelaksanaan fungsinya	30 Focal Point PUG	Persentase focal point perangkat daerah yang aktif menyusun laporan fungsi dan perannya sebagai focal point	80 %	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	0 2	01.00	0 2	0 2 1	TOT Pemberdayaan Perempuan di Bidang Polhukosek bagi lembaga organisasi /lembaga masyarakat			Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah fasilitator terlatih pada lembaga layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi	80 orang	% lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yg mempunyai kader /fasilitator terlatih	14 %	90,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	0 2	01.00	0 3		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>					% Kabupaten/Kota Layak Anak	54 %				847,184,580.0	839,184,580.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
										Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000)	2.94						
1.02	0 2	01.00	0 3	0 0 2	Workshop Konvensi Hak Anak			Kota Makassar			Jumlah peserta yang mengikuti workshop implementasi Konvensi Hak	40 Orang	Jumlah lembaga yang mengetahui strategi implementasi konvensi hak	40 Lembaga	20,000,000.0	30,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								Provinsi Sulawesi Selatan									
1.02	0 2	01.00	0 3	0 0 3	Penyediaan Layanan dan Materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk pencegahan Kekerasan terhadap Anak			Kota Makassar			Jumlah lembaga yang mengikuti pengembangan layanan informasi, komunikasi dan edukasi	30 Lembaga	Prosentase lembaga yang menyediakan layanan informasi, komunikasi dan edukasi (KIE)	50 %	71,150,000.0	71,150,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								Provinsi Sulawesi Selatan									

1.02	0 2	01.00	0 3	0 0 4	Pengembangan Model/ Percontohan Desa Bebas Pornografi dan Bebas Pekerja Anak			Kabupaten Sinjai	#Kec. Sinjai Utara Pasimarannu East Sinjai Sinjai Regency		Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan model desa/kelurahan Bebas Pornografi dan Bebas Pekerja Anak dan tematik	150 Orang	Tersedianya Model Desa/Kelurahan Bebas Pornografi dan Bebas Pekerja Anak dan tematik	2 Model	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								Kabupaten Tana Toraja	#Kecamatan Tempe Wajo Regency South Sulawesi ID								
								Kabupaten Wajo	#Makale Makale Tana Toraja Regency South Sulawesi								
1.02	0 2	01.00	0 3	0 0 5	Pengembangan dan Penyediaan Fasilitas Kegiatan Budaya, Kreatifitas, dan Rekreasi Ramah Anak			Kota Makassar			Jumlah peserta pelaksanaan pengembangan dan penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya	50 Orang	Prosentase Kabupaten/kota yg mengembangkan dan menyediakan fasilitas dan kegiatan budaya	25 %	40,000,000.0	43,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								Provinsi Sulawesi Selatan									
1.02	0 2	01.00	0 3	0 0 6	Pendampingan Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus			Kota Makassar			Jumlah peserta pengelola lembaga yang mengikuti pengembangan layanan	40 orang	Jumlah lembaga yang dikembangkan dan didampingi dalam pelaksanaan	4 Lembaga Layanan PKA	48,250,000.0	59,250,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								Provinsi Sulawesi Selatan									
1.02	0 2	01.00	0 3	0 0 7	Bimtek Pemenuhan Hak Anak Menuju Sekolah Ramah Anak			Kota Makassar			Jumlah Peserta Bimtek PHA menuju Sekolah Ramah Anak (SRA) dari	48 Orang	Prosentase Sekolah Binaan Provinsi yang menerapkan Sekolah Ramah Anak	12.5 %	40,000,000.0	40,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								Provinsi Sulawesi Selatan									
1.02	0 2	01.00	0 3	0 1 0	Penyelenggaraan Festival Forum Anak Tingkat Daerah dan Nasional			Kabupaten Bulukumba			Jumlah peserta Forum Anak SULSEL dan Forum Anak Nasional (FAN)	700 Orang	Jumlah Forum Anak Kab/kota se Indonesia mengikuti Forum Anak Nasional	700 Kab/Kota dan Orang	80,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
											Jumlah Provinsi yang mengikuti Forum Anak Nasional (FAN) dan Hari Anak Nasional (HAN) 2019	0 Provinsi	Jumlah Provinsi mengikuti Forum Anak Nasional (FAN) dan Hari Anak Nasional (HAN) 2019	0 Provinsi			
1.02	0 2	01.00	0 3	0 1 1	Workshop Gugus tugas Penyelenggara Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)			Kota Makassar			Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Gugus tugas Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan	50 Orang	Prosentase Kabupaten/Kota yang mencapai Nilai Minimal Indikator KLA	75 %	52,784,580.0	60,784,580.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								Provinsi Sulawesi Selatan									
1.02	0 2	01.00	0 3	0 1 5	Penyusunan MOU/Kerjasama pelaksanaan PHA antar Lembaga Pemerintah, Lembaga Masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota			Kota Makassar			Jumlah dokumen kerjasama sinergitas antar lembaga	2 Dokumen	Jumlah layanan PHA yang terpadu atau sinergi dalam pemenuhan	2 Layanan Terpadu	40,000,000.0	40,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



1.02	0 2	01.00	0 4	0 0 5	Supervisi pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan perlindungan perempuan di Kab/ Kota dalam mendorong Kab/ Kota Membantu UPT PPA			Kabupaten Jeneponto			Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan supervisi pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan	5 Kab/kota	Jumlah Kab/ Kota yang membentuk UPT PPA	5 Kab/Kota	90,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Takalar										
								Kabupaten Toraja Utara										
								Kota Parepare										
1.02	0 2	01.00	0 4	0 0 7	Lokakarya Tenaga Pendamping Korban Kekerasan Pada Lembaga Penyedia Layanan Termasuk TPPO			Kabupaten Luwu Utara			Jumlah Peserta lembaga layanan yang melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kondisi khusus termasuk TPPO yang mengikuti lokakarya	50 Orang	Persentase penguatan dan pengembangan SDM tenaga pendampingan pada lembaga layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kondisi khusus	80 %	40,000,000.0	40,000,000.0	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.02	0 2	01.00	0 4	0 1 0	Lokakarya Bagi Tenaga Penyedia Layanan Perempuan Korban Kekerasan (Layanan Pengaduan, Pencatatan Kasus, Manajemen Kasus, Teknik Pendampingan, Konseling, Mediator, Caring For Carigivers, Litigasi dan Non Litigasi)			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Petugas Layanan yang menjadi peserta lokakarya Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan (Layanan Pengaduan, Pencatatan Kasus, Manajemen Kasus, Teknik Pendampingan, Konseling, Mediator, Caring For Carigivers,	200 Orang	Persentase kab/kota yang memiliki petugas/tenaga mampu tata laksana layanan	25 %	90,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.02	0 2	01.00	0 4	0 1 5	Supervisi Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Bina Keluarga TKI (GT Bina Keluarga TKI) Perempuan Provinsi dan Kab/ Kota			Kabupaten Makassar			Jumlah Gugus Tugas Bina Keluarga TKI (GT Bina Keluarga TKI) Perempuan Provinsi dan Kab/ Kota	4 GT.BK.TKI	Persentase kab/kota yang membentuk Gugus Tugas Bina Keluarga TKI (GT Bina Keluarga TKI)	25 %	60,000,000.0	60,000,000.0	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Sinjai										
								Kabupaten Tana Toraja										

1.02	0 2	01.00	0 4	0 1 7	Workshop Penyusunan standar operasional pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta Workshop Penyusunan standar operasional pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi	50 Orang	Tersedianya SOP pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan pemulangan) bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang	6 SOP	40,000,000.0	40,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	0 2	01.00	0 4	0 1 8	Penyusunan kebijakan teknis Perlindungan Perempuan dari kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah dokumen kebijakan teknis perlindungan perempuan Tk.Provinsi yang terumuskan	2 Dokumen	Tersedianya dokumen kebijakan teknis perlindungan perempuan Tk.Provinsi (Ranperda Perlindungan Perempuan)	2 Dokumen	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	0 2	01.00	0 4	0 2 2	Workshop Penguatan Kapasitas Bagi Paralegal Perlindungan Perempuan tingkat Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota			Kabupaten Bantaeng			Jumlah Peserta Workshop Paralegal Perlindungan Perempuan Tingkat Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	50 Orang	Persentase penguatan kapasitas Paralegal Perlindungan Perempuan Tingkat Provinsi dan Kab/ Kota	50 %	35,950,000.0	40,048,826.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	0 2	01.00	0 4	0 2 3	Rapat Koordinasi Teknis Pencegahan Kekerasan Perempuan termasuk TPPO			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Teknis Pencegahan Kekerasan Perempuan termasuk TPPO	50 Orang	Tersedianya Rencana Aksi Daerah (RAD) GT.TPPO, Mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO, Rencana Tindak Lanjut (RTL)	3 Dokumen	32,415,000.0	39,815,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.02	0 2	01.00	0 4	0 3 5	Gerakan Bersama (Kampanye) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan termasuk TPPO			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah peserta lembaga layanan yang melaksanakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kondisi khusus termasuk TPPO yang mengikuti lokakarya	200 Orang	Persentase lembaga layanan yang melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kondisi khusus termasuk TPPO	75 %	104,995,659.0	104,995,659.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	0 2	01.00	0 5		PROGRAM PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK					% Korban KtP/A yang memperoleh layanan komprehensif pada UPT PPA	70 %					228,060,875.0	249,577,450.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	0 2	01.00	0 5	0 0 2	Penyediaan Perlindungan Rumah Aman			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilayani di rumah aman	24 Korban	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilayani di rumah aman	100 %	77,365,000.0	87,365,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	0 2	01.00	0 5	0 0 3	Pendampingan pemberdayaan korban KtP/KtA			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah korban KtP/KtA, TPPO yang mendapatkan pelayanan pendampingan pemberdayaan	60 Korban	Persentase korban KtP/KtA, TPPO yang mendapatkan pelayanan pendampingan pemberdayaan	100 %	16,295,875.0	26,295,875.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	0 2	01.00	0 5	0 0 4	Pelaporan data dan informasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Laporan data dan informasi pelayanan terhadap perempuan dan anak korban KtP/KtA	1 Laporan	Tersedianya data dan informasi KTP dan KtA	1 Laporan	46,800,000.0	47,316,575.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



1.02	0 2	01.00	0 5	0 0 5	Pengembangan Manajemen Mutu Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah dokumen evaluasi kepuasan pelanggan	1 Dokumen	Tersedianya dokumen mutu layanan yang menerapkan NSPK/Manajemen ISO/SPM terpadu Bidang perlindungan perempuan dan anak	1 Dokumen	7,600,000.0	8,600,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	0 2	01.00	0 5	0 0 6	Pelatihan Keterampilan Teknis Petugas Layanan & jejaring layanan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah tenaga layanan P2TP2A dan jejaring kerja yang dilatih keterampilan teknis pelayanan terpadu KtP/KtA	30 Orang	Persentase petugas P2TP2A dan jejaring layanan yang memahami teknis pelayanan terpadu KtP/KtA	100 %	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	0 2	01.00	0 6		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>					<b>% Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di daerah</b>	<b>82 %</b>					<b>859,238,528.0</b>	<b>606,594,926.0</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
1.02	0 2	01.00	0 6	0 0 2	Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan dan Anak			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Profil Perlindungan Perempuan dan Anak yang tersusun	2 Dokumen Profil	Persentase Kab/Kota dan OPD Provinsi terinformasi profil perlindungan perempuan dan anak	100 %	60,000,000.0	0.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	0 2	01.00	0 6	0 0 3	Diseminasi Data dan Informasi Gender dan Anak			Provinsi Sulawesi Selatan				Intensitas diseminasi gender dan anak melalui media	12 bulan	Persentase capaian diseminasi gender dan anak selama tahun berjalan	98 %	212,498,000.0	212,498,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	0 2	01.00	0 6	0 0 4	Penyusunan Profil Anak			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah dokumen profil Anak tematik tersusun	2 Dokumen Profil	Persentase Kab/Kota dan OPD Provinsi terinformasi profil Anak tematik	100 %	70,000,000.0	0.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	0 2	01.00	0 6	0 0 5	Penyusunan Profil Gender			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah dokumen Profil Gender Tematik tersusun	2 Dokumen Profil	Persentase kab/kota dan OPD Provinsi terinformasi profil Gender	100 %	75,000,000.0	0.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.02	0 2	01.00	0 6	0 0 6	Workshop Penyediaan Bahan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) Gender dan Anak			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah petugas pengelola data perangkat daerah yang terinformasi teknik media KIE gender dan anak	60 Orang	Persentase peserta workshop yang mampu membuat bahan KIE gender dan anak	90 %	65,000,000.0	0.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.02	0 2	01.00	0 6	0 0 7	Workshop Pengelolaan Data Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Aplikasi Simfoni PPA			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah petugas pencatatan pelaporan Simfoni PPA yang mengikuti workshop	60 Orang	Persentase petugas pencatatan pelaporan simfoni PPA yang mampu melakukan input data	98 %	45,826,028.0	49,950,280.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.02	0 2	01.00	0 6	0 1 1	Workshop Pengelolaan dan Analisis Data Gender dan Anak			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pengelola data perangkat daerah terlatih teknik penyajian dan analisis data gender dan anak yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya	80 Orang/OPD	Persentase pengelola data OPD yang mampu mengolah dan menganalisis data gender dan anak	90 %	65,000,000.0	65,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.02	0 2	01.00	0 6	0 1 6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Informasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Kabupaten Bantaeng			Jumlah Kab/kota lokasi monitoring dan evaluasi	24 Kab/kota	Laporan informasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tersusun	24 Dokumen	200,814,500.0	200,814,500.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
								Kabupaten Barru										
								Kabupaten Bone										
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Enrekang										
								Kabupaten Gowa										
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Kepulauan Selayar										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Maros										
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
								Kabupaten Pinrang										



1.02	02	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah ATK yang tersedia	35 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	357,975,623.99	359,745,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	13 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	8,205,642.0	8,675,642.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kabupaten Bantaeng			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	6 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	2,850,860,000.0	3,109,036,289.96	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Kabupaten Barru												
					Kabupaten Bone												
					Kabupaten Bulukumba												
					Kabupaten Enrekang												
					Kabupaten Gowa												
					Kabupaten Jeneponto												
					Kabupaten Kepulauan Selayar												
					Kabupaten Luwu												
					Kabupaten Luwu Timur												
					Kabupaten Luwu Utara												
					Kabupaten Maros												
					Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan												
					Kabupaten Pinrang												
					Kabupaten Sidenreng Rappang												
					Kabupaten Sinjai												
					Kabupaten Soppeng												
					Kabupaten Takalar												
					Kabupaten Tana Toraja												
					Kabupaten Toraja Utara												
					Kabupaten Wajo												
					Kota Makassar												
					Kota Palopo												
					Kota Parepare												



1.02	0 2	01.00	5 2		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %					114,801,069.0	117,226,495.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.02	0 2	01.00	5 2	0 0 1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	105 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	37,250,000.0	37,650,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.02	0 2	01.00	5 2	0 0 2	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	67,551,069.0	69,576,495.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
												Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				
												Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	1 Dokumen				
												Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	5 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	5 Dokumen				
1.02	0 2	01.00	5 2	0 0 4	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	20 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	100 %	5,000,000.0	5,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
												Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	20 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %				
1.02	0 2	01.00	5 2	0 0 6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	5,000,000.0	5,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
												Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %				

											Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %					
1.02	02	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					% ASN berkinerja sangat baik	100 %				197,842,116.0	200,171,821.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.02	02	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Aparat OPD yang mengelola administrasi kepegawaian nya	3 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	20,000,000.0	20,500,000.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
											Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	3 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %					
1.02	02	01.00	53	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	60 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	55,000,000.0	56,500,507.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.02	02	01.00	53	03	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	60 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	122,842,116.0	123,171,314.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.02	0				Pangan														
1.02	03	01.00			Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura										183,889,001,767.0	190,042,216,329.29			
1.02	03	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR					Skor Pola Pangan	93.05 %				3,395,000,000.0	3,590,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
										% Pengawasan keamanan pangan	100 %								
1.02	03	01.00	01	07	Pembinaan dan Pemantauan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kelompok yang dibina	50 kelompok	Meningkatnya pemahaman kelompok binaan tentang B2SA	100 %	350,000,000.0	345,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1.02	03	01.00	01	08	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			Kota Makassar Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah lomba yang diikuti	2 Jenis	Terpromosinya Pengolahan Pangan Lokal	2 Jenis	310,000,000.0	375,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		

1.02	03	01.00	01	010	Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT)			Kota Makassar				Frekuensi pengawasan terpadu ke produsen pangan segar	2 Kali	Berkurangnya Kasus Ketidakamanan Pangan Segar	100 %	350,000,000.0	385,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
1.02	03	01.00	01	0112	Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Sertifikat PSAT	10 Sertifikat	Meningkatnya Nilai Mutu PSAT	100 %	350,000,000.0	320,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
												Jumlah produk pangan segar yang terdaftar	10 Nomor Pendaftaran	Meningkatnya Jumlah produk pangan segar yang terdaftar	10 Nomor Pendaftaran				
1.02	03	01.00	01	0115	Penyusunan Dokumen Sistem Jaminan Mutu			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Dokumen Sistem Jaminan Mutu	1 Dokumen	Termanfaatkannya dokumen Sitem Jaminan Mutu dan Tinjauan Manajemen	100 %	450,000,000.0	345,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
1.02	03	01.00	01	0117	Penyebarluasan Informasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Dokumen ekspose PSAT	1 Dokumen	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PSAT	100 %	310,000,000.0	355,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
1.02	03	01.00	01	023	Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Penerima Manfaat Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)				#- setuju diakomodir apabila anggaran tersedia				Jumlah kelompok yang dibina	100 kelompok	Terbinanya KWT untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga	100 kelompok	850,000,000.0	750,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
								Kabupaten Bantaeng	# Bulutana Tinggimoncong Gowa Regency										
								Kabupaten Barru	#Bantaeng Bantaeng Regency South Sulawesi ID										
								Kabupaten Bone	#Berdasarkan KK miskin Kindang Bulukumba Regency South Sulawesi										
								Kabupaten Bulukumba	#Berdasarkan KK miskin Rilau Ale Bulukumba Regency South Sulawesi										
								Kabupaten Enrekang	#Desa Amessangeng Kec. Ajangale Amessangeng Ajangale Bone Regency										











1.02	03	01.00	03	002	Pengembangan dan Pemantauan Harga Pangan Strategis			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Dokumen Data harga pangan strategis secara real time	2 Dokumen	Termanfaatnya data harga pangan strategis	2 Dokumen	250,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02	03	01.00	03	004	Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan Strategis			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah dokumen Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan Strategis	2 dokumen	Termanfaatnya dokumen Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan Strategis	2 dokumen	325,000,000.0	350,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02	03	01.00	50		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>					<b>6,231,662,334.0</b>	<b>6,827,900,352.65</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>
1.02	03	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Gowa				Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	3 Jenis	1,230,000,000.0	1,290,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
								Kabupaten Maros										
								Kantor / UPT DKPTPH Sulsel Kota Makassar										
1.02	03	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kantor DKPTPH / UPT DKPTPH Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	84 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	3,550,000,000.0	3,829,900,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02	03	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Gowa				Jumlah ATK yang tersedia	12 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	485,962,334.0	501,000,352.65	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
								Kabupaten Maros										
								Kantor DKPTPH / UPT DKPTH Sulsel Kota Makassar										
1.02	03	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor DKPTPH / UPT DKPTPH Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	20 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	43,800,000.0	75,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02	03	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kantor DKPTPH / UPT DKPTPH Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	10 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	375,000,000.0	500,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02	03	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Makassar Kota Makassar				Jumlah Keikutsertaan dalam	7 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam	100 %	230,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan,

								Pulau Jawa, Kalimantan dan Sumatera Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Pameran		Pameran Pembangunan				Tanaman Pangan dan Hortikultura	
1.02	03	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			24 kab / kota se sulse 24 Kab/Kota				Jumlah perjalanan dinas	100 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	100 Orang	316,900,000.0	332,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
								Luar Provinsi Sulawesi Selatan Luar Provinsi Sulawesi Selatan											
<b>1.02</b>	<b>03</b>	<b>01.00</b>	<b>51</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>							<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>1,075,000,000.0</b>	<b>1,125,000,000.0</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	
1.02	03	01.00	51	012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas			Kota Makassar Kota Makassar				Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	4 Unit	Ketersediaan rumah jabatan/ rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
1.02	03	01.00	51	014	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kota Makassar Kota Makassar				Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	2 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	350,000,000.0	350,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
1.02	03	01.00	51	016	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Makassar, Maros, Gowa Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	50 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
1.02	03	01.00	51	017	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Kota Makassar Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	20 Unit	Ketersediaan Perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas sesuai kebutuhan	100 %	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
1.02	03	01.00	51	018	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Makassar Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	20 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
1.02	03	01.00	51	019	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Makassar, Gowa dan Maros Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	20 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	150,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	

1.02	03	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan dan Peralatan Kantor				Makassar, Gowa dan Maros Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02	03	01.00	51	0112	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website				Makassar, Gowa dan Maros Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	3 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
												Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	5 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	100 %			
1.02	03	01.00	52		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>							% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %		900,000,000.0	975,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
1.02	03	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah				Makassar Kota Makassar			Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	100 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	125,000,000.0	125,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02	03	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				Makassar, Gowa dan Maros Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	350,000,000.0	400,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
												Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen			
												Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	1 Dokumen			
												Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	1 Dokumen			

1.02	03	01.00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK			Makassar, Gowa dan Maros Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	10 Usulan Kegiatan	Ketersediaan Usulan Kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	10 Laporan	35,000,000.0	35,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02	03	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			24 kab / kota se Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	5 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
											Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	5 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %			
1.02	03	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	250,000,000.0	275,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02	03	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Makassar Kota Makassar			Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	Ketersediaan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02	03	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Makassar Kota Makassar			Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %	40,000,000.0	40,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02	03	01.00	53		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>										575,556,633.0	255,485,168.14	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02	03	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Makassar, Gowa dan Maros Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian nya	700 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	250,556,633.0	255,485,168.14	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
											Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	12 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %			
1.02	03	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Makassar, Gowa dan Maros Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	700 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	300,000,000.0	0.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



1.02	03	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Makassar Kota Makassar			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	100 Orang	25,000,000.0	0.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
1.02	0				<b>Pertanahan</b>													
1.02	04	01.00			Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan										101,764,607,787.19	103,536,440,319.97		
1.02	04	01.00	01		PROGRAM PENATAAN KEAGRARIAAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERBATASAN ANTAR DAERAH,PROVINSI					Penyelesaian Kasus tanah Provinsi	100 %				2,505,666,494.0	2,598,537,233.97	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan	
										Penyelesaian Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum	3 Lokasi							
1.02	04	01.00	01	001	Fasilitasi Pengadaan Tanah			Kabupaten Luwu Utara			Jumlah Pengadaan Tanah	1 Kawasan	Terwujudnya Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk kepentingan publik dan Instansi yang Membutuhkan	100 %	2,505,666,494.0	2,598,537,233.97	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan	
1.02	0				<b>Lingkungan Hidup</b>													
1.02	05	01.00			Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup										10,589,968,879.0	10,982,478,515.38		
1.02	05	01.00	01		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Prioritas)	Peningkatan Ketahanan Pangan, Sumber Daya Air, dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim			% Penurunan Jumlah Beban Pencemaran	41 %				913,628,103.79	936,750,015.95	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
										Cakupan lokasi kerusakan sumber daya alam yang dipulihkan	20 %							
										Indeks kualitas udara (Prioritas)	88.71							
										Indeks kualitas air (Prioritas)	77.67							
1.02	05	01.00	01	001	Pemantauan Kualitas Air			Danau Matano, Danau Tempe, Sungai Tallo,Sungai Maros,Sungai Jeneberang,Sungai Pangkajene,Sungai Sigeri,Sungai Kalibone,Sungai Taman Royo,Sungai Pappa,Sungai Karajae,Sungai Bila,Sungai Kelara,Sungai Kariango,Sungai Saddang,Sungai			Jumlah sungai dan danau yang diketahui status kualitas airnya	20 Sungai dan 2 Danau	Termanfaatkannya hasil pemantauan kualitas air untuk pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup	100 %	165,000,000.0	175,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	

1.02	05	01.00	01	002	Pemantauan Kualitas Udara			Makassar, Maros, Pangkajene, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Parepare, Pinrang, Palopo, Tana Toraja, Toraja Utara, Bulukumba, Luwu Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kab/kota yang dipantau status mutu udaranya	15 Kab/kota	Termanfaatnya hasil pemantauan kualitas udara untuk pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	01	003	Pemantauan kualitas tanah			Kabupaten Bantaeng Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur			Jumlah lokasi pemantauan kualitas tanah	3 Kab/kota	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	100 %	65,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	01	004	Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten	#Kec. Pattallassang Pattallassang Takalar Regency South Sulawesi  #Kec. wara, kec. wara timur dan kec. wara barat Wara Palopo City South Sulawesi  #Kompleks SKPD Kel. Batu Lappa Kec. Watang Pulu Batu Lappa Watang Pulu Sidenreng Rappang Regency  #Usaha dan/ atau Kegiatan di Desa Pakatto, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa Pakatto Bontomarannu Kabupaten Gowa		Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang diawasi tingkat ketaatannya terhadap izin lingkungan dan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi	60 Usaha dan/atau kegiatan	persentase tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH	45 %	233,308,877.79	236,750,015.95	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	

1.02	05	01.00	01	006	Inventarisasi kerusakan Sumber Daya Alam			24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kab/kota yang di inventarisasi kerusakan sumber daya alamnya	10 Lokasi	Cakupan kab/kota yang di inventarisasi kerusakan sumber daya alamnya	40 %	100,319,226.0	100,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	01	007	Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam			24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan	#Desa Lampoko Kec balusu Kab Barru Lampoko Balusu Barru Regency #Gusung Desa Bontolebang Kecamatan Bontoharu Selayar Island Selayar Regency South Sulawesi #Kec. Sanrobone, Kec. Galesong, Kec. Mangarabombang, Kec. Mappakasungu Sanrobone Takalar Regency South Sulawesi #Kec. Sinjai Timur Sinjai Regency South Sulawesi ID #Rano Rano Tana Toraja Regency South Sulawesi #Sangalla Utara North Sangalla Tana Toraja Regency South Sulawesi		Jumlah lokasi yang dipulihkan sumber daya alamnya	1 Lokasi	Cakupan lokasi yang dipulihkan dari total lokasi yang telah di inventarisasi kerusakan sumber daya alamnya	40 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	01	008	Pemantauan Kualitas Air Laut			Laut Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laut yang diketahui Kualitas Status Mutunya	4 Laut	Tercapainya Indeks Kualitas Air Laut	100	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	02		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3					% Penanganan Sampah Kabupaten/Kota	48 %			5,173,010,617.0	5,364,744,562.72	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
										Cakupan Limbah B3 yang Dikelola	80 %						

1.02	05	01.00	02	001	Pengembangan Fasilitas Tekhnis Pengelolaan Sampah dan Limbah B3			Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah lokasi pengembangan fasilitas Teknis pengelolaan sampah dan limbah B3	5 Lokasi	Cakupan Lokasi Pengembangan Fasilitas Teknis Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	50 %	723,010,617.0	770,944,108.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	02	002	Pembinaan Pemanfaatan B3 dan Pengelolaan Limbah B3			24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Perusahaan yang dibangun dalam pemanfaatan dan Pengelolaan LB3	120 Perusahaan	Jumlah Limbah B3 Yang dikelola oleh Pemrakarsa Usaha/Kegiatan di Sulawesi Selatan	6800000 Ton	900,000,000.0	947,933,491.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	02	003	Pembinaan Adipura dan Kalpataru			15 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kab/kota yang dibangun untuk penilaian Adipura dan Kalpataru	15 Kab/kota	Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan Adipura dan Kalpataru	100 %	350,000,000.0	397,933,491.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	02	004	Pengelolaan Persampahan			24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kab/kota yang dibangun dalam pengelolaan persampahan	24 Kab/kota	Presentase Jumlah sampah yang tangani Di Sulawesi Selatan	18 %	450,000,000.0	497,933,491.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	02	005	Pengelolaan Limbah B3			24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Limbah B3 yang dikelola	450 ton	Presentase Limbah B3 terhadap Total limbah B3 yang dikelola hingga akhir periode RENSTRA	36 %	2,040,000,000.0	1,989,999,981.72	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	02	006	Penyelenggaraan Ketatausahaan UPTD Pengelolaan Limbah B3			UPT LB3 Kota Makassar			Jumlah pelayanan ketatausahaan UPTD pengelolaan Limbah B3	7 Jenis	Cakupan Ketersediaan pelayanan ketatausahaan UPTD pengelolaan limbah B3	100 %	560,000,000.0	590,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	02	007	Penjaminan Pengelolaan Limbah B3			UPT LB3 Kota Makassar			Jumlah dokumen penjaminan pengelolaan limbah B3	3 Dokumen	Cakupan Ketersediaan dokumen penjaminan pengelolaan limbah B3	100 %	150,000,000.0	170,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	03		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP</b>										<b>459,454,944.0</b>	<b>476,484,313.87</b>	<b>Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>
1.02	05	01.00	03	001	Penatausahaan Administrasi Laboratorium Lingkungan Hidup			Laboratorium LH Sulsel Kota Makassar			Jumlah PAD yang dihasilkan dari jasa Laboratorium Lingkungan	625000000 Rupiah	Meningkatnya jumlah PAD	100 %	210,234,500.0	210,484,313.87	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.02	05	01.00	03	002	Pengembangan Mutu Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup			Laboratorium LH Sulsel Kota Makassar			Meningkatnya Parameter yang Ter Akreditasi	50 Parameter	Jumlah Parameter yang ter Akreditasi	100 %	120,000,000.0	136,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	03	003	Pelayanan dan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup			Laboratorium LH Sulsel Kota Makassar			Meningkatnya Jumlah Sampel yang diuji	1050 sampel	jumlah sampel yang diuji	100 %	129,220,444.0	130,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	04		<b>PROGRAM PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>% Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti</b>	<b>100 %</b>				<b>652,964,702.21</b>	<b>687,907,433.26</b>	<b>Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>
										<b>Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kelompok Masyarakat atau lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>24 kab/kota</b>						
1.02	05	01.00	04	001	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup			24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Rekomendasi tindak lanjut Kasus/Perkara LH yang ditangani	12 Rekomendasi	Presentase jumlah kasus/Perkara LH yang ditindak lanjuti	100 %	65,000,000.0	68,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	04	002	Identifikasi, Investigasi, Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup			24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Provinsi, Lokasi Usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	12 Rekomendasi	Presentase jumlah pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %	65,000,000.0	68,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02	05	01.00	04	004	Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan			24 Kab/kota dan sekolah Provinsi Sulawesi Selatan	#Kab. Sinjai Jl. Persatuan Raya Balangnipa Sinjai Utara		Jumlah Kab/kota dan sekolah yang dibina	100 Sekolah dan Kab/kota	Jumlah sekolah peduli lingkungan yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional	12 Sekolah	225,373,580.0	229,373,580.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.02	05	01.00	04	005	Pemberian Penghargaan dibidang Lingkungan Hidup			24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Penerima penghargaan lingkungan hidup	50 Sekolah	Presentase Peningkatan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	66 %	100,000,000.0	110,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	04	007	Penerapan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi Peduli Lingkungan			24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverifikasi	10 MHA dan Kearifan Lokal	Cakupan Jumlah MHA dan Kearifan Lokal yang Telah diverifikasi	27 %	129,900,000.0	131,592,747.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	04	009	Pembinaan dan Penerapan Ekolabel, Teknologi Ramah Lingkungan			24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kab/kota yang dibina dalam penerapan ekolabel dan teknologi ramah lingkungan	3 Produk	Meningkatnya kemampuan dalam penerapan ekolabel, teknologi ramah lingkungan	100 %	67,691,122.21	80,941,106.26	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	05		<b>PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN</b>					Cakupan penilaian dokumen lingkungan kabupaten/kota	100 %				765,471,091.0	793,842,730.75	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
										Cakupan pemantauan emisi Gas Rumah Kaca	10 Kab/Kota							
1.02	05	01.00	05	001	Koordinasi Pelaksanaan Adaptasi dan Mitigasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca)			24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Dokumen Pelaporan penurunan emisi gas Rumah kaca (GRK)	1 Dokumen	Presentase Perubahan Emisi CO2/Emisi GRK	3 %	295,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	05	004	Pembinaan dan Pengawasan dan pelaksanaan KLHS dan RPPLH di Kabupaten/Kota/Prov. Sulawesi selatan			24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kab/kota yang dibina dalam Pelaksanaan KLHS dan RPPLH	24 Kab/Kota	Cakupan laporan KLHS yang tervalidasi dan terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan	10 dokumen	220,000,000.0	230,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	05	005	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati			24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan	#Kecamatan Benteng, Bontomanai, Buki, Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu Selayar Island Selayar Regency South Sulawesi		Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	1 Dokumen	Cakupan ketersediaan dokumen Rencana Pemanfaatan Kehati	40 %	150,471,091.0	151,500,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	05	006	Penilaian Dokumen Lingkungan			24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang di Nilai	7 Dokumen	Cakupan dokumen LH yang dinilai layak dan dikeluarkan rekomendasinya	40 %	100,000,000.0	112,342,730.75	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	

1.02	05	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %				1,706,945,273.0	1,770,211,980.39	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup		
1.02	05	01.00	50	03	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kantor DPLH Sulsel Kota Makassar				Jumlah tenaga non PNS yang diadakan	21 orang	Cakupan ketersediaan jasa tenaga non PNS	100	718,200,000.0	718,200,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	50	05	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kantor DPLH Sulsel Kota Makassar				Jumlah ATK yang Tersedia	60 Jenis ATK	Cakupan Ketersediaan ATK	100	200,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	50	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor DPLH Sulsel Kota Makassar				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	60 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	20,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	50	08	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kantor DPLH Sulsel Kota Makassar				Jumlah kegiatan rapat atau pertemuan yang disediakan makanan dan minumannya.	250 Rapat	Cakupan ketersediaan makanan dan minuman rapat	100 %	350,000,000.0	350,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	50	09	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Lokasi Pameran Kota Makassar				Jumlah pameran yang dilaksanakan dan diikuti	1 Pameran	Cakupan ketersediaan pameran yang dilaksanakan dan diikuti	100	218,745,273.0	182,011,980.39	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Luar Provinsi Sulawesi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40 Kali	Jumlah laporan hasil perjalanan dinas	40 Laporan	200,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %				349,106,494.0	362,045,877.45	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup		
1.02	05	01.00	51	09	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor DPLH Sulsel Kota Makassar				Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas untuk kendaraan dinas dan operasional kantor	25000 Liter	Ketersediaan Bahan Bakar Minyak/Gas untuk kendaraan dinas dan operasional kantor	100 %	32,415,494.0	45,354,877.45	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
												Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan	62 jenis	Cakupan ketersediaan perlengkapan dan peralatan kantor	100 %				
1.02	05	01.00	51	00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor DPLH Sulsel Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100 unit	Cakupan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	100 %	316,691,000.0	316,691,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	

1.02	05	01.00	52		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %				444,104,329.0	460,564,739.30	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup		
1.02	05	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Peserta yang mengikuti Forum PD	100 orang	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan forum perangkat daerah LH	100 %	30,000,000.0	30,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kantor DPLH Sulsel Kota Makassar				Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	8 Dokumen	Cakupan Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	100 %	30,000,000.0	30,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK			Kantor DPLH Sulsel Kota Makassar				Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	1 Usulan Kegiatan	Ketersediaan Usulan Kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	1 Laporan	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	4 Jenis	Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %	149,104,329.0	157,064,739.30	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kantor DPLH Kota Makassar				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	91,500,000.0	91,500,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Kantor DPLH Kota Makassar				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3 Laporan	Cakupan ketersediaan laporan pengelolaan administrasi keuangan	100 %	91,500,000.0	100,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Kantor DPLH Kota Makassar				Jumlah Laporan Monitoring Program dan Kegiatan OPD	4 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Monitoring Program dan Kegiatan OPD	100 %	2,000,000.0	2,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	05	01.00	53		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					% ASN berkinerja sangat baik	100 %				125,283,325.0	129,926,861.69	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup		
1.02	05	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kantor DPLH Kota Makassar				Cakupan ASN yang mendapatkan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 Pasang	Cakupan ASN yang mendapatkan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 %	65,000,000.0	65,000,000.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	



1.02	05	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kantor DPLH Kota Makassar			Jumlah ASN yang diadakan pakaian dinas lapangan dan pakaian khusus hari-hari tertentu.	105 ASN	Cakupan ASN yang mendapatkan pakaian dinas lapangan dan pakaian khusus hari-hari tertentu.	100 %	60,283,325.0	64,926,861.69	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1.02	06				Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil													
1.02	06	01.00			Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana										6,868,503,878.82	6,586,015,785.27		
1.02	06	01.00	01		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					Cakupan penerbitan akta kelahiran	89 %				1,244,016,308.82	1,290,124,884.04	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
										Cakupan Perekaman KTP-el	97 %							
										Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	20 %							
										Cakupan Kepemilikan KTP-el	89 %							
1.02	06	01.00	01	002	Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el Kab/Kota			Kota Makassar			Jumlah Kabupaten/kota yang difasilitasi	24 Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kemampuan Aparat Pemerintah Kab/Kota dalam pelaksanaan penerbitan KTP El	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
1.02	06	01.00	01	003	Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun			Kota Makassar			Jumlah Peserta	50 Orang	Meningkatnya kemampuan Aparat Pemerintah Kab/Kota yang menangani penerbitan akta kelahiran	100 %	190,000,000.0	190,000,000.0	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
1.02	06	01.00	01	004	Pembinaan Penerbitan Akta Kematian			Kota Makassar			Jumlah Peserta	75 Orang	Meningkatnya kemampuan Aparat Pemerintah Kab/Kota yang menangani penerbitan akta kematian	100 %	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

1.02	06	01.00	01	007	Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan monitoring	24 Kab/Kota	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100 %	193,047,308.82	239,155,884.04	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	06	01.00	01	008	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Kab/Kota tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil			Kota Makassar			Jumlah Peserta	80 Orang	Meningkatnya kemampuan Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat	100 %	190,000,000.0	190,000,000.0	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
											Jumlah Laporan	2 Laporan	Meningkatnya kemampuan Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat	100 %			
1.02	06	01.00	01	010	Pembinaan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian			Kota Makassar			Jumlah Peserta Sosialisasi	75 Orang	Meningkatnya Kemampuan Aparat Pemerintah Kab/Kota mengenai akta perkawinan dan perceraian	100 %	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	06	01.00	01	013	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan			Kota Makassar			Jumlah koordinasi dan konsultasi pelayanan adminduk	24 Kali	Terpeliharanya database kependudukan skala provinsi	100 %	300,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	06	01.00	01	014	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kab/Kota			Kota Makassar			Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan monitoring	24 Kab/Kota	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administerasi Kependudukan	100 %	150,969,000.0	150,969,000.0	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	06	01.00	02		PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					Cakupan Ketersediaan dan pemanfaatan database kependudukan skala provinsi	100 %			1,800,668,690.0	1,130,344,902.98	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

1.02	06	01.00	02	003	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)			Kota Makassar			Jumlah Kegiatan Pengelolaan SIAK	4 Kegiatan	Tersedianya Data Base Kependudukan Skala Provinsi	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	06	01.00	02	004	Peningkatan Kapasitas Administrator Data Base Pengelola SIAK			Kota Makassar			Jumlah Peserta	80 Orang	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Administrator Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota	100 %	150,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	06	01.00	02	006	Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan			Kota Makassar			Jumlah Peserta Sosialisasi	82 Peserta	Meningkatnya Pemahaman Mengenai aturan Administrasi Kependudukan	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	06	01.00	02	008	Penyajian data dan Dokumen Kependudukan			Kota Makassar			Jumlah Dokumen Kependudukan yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah data dan informasi kependudukan yang tersaji	100 %	1,050,668,690.0	230,344,902.98	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	06	01.00	02	001	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Kab/Kota tentang PIAK, Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office)			Kota Makassar			Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	50 OPD	Persentase Lembaga yang melaksanakan Perjanjian Kerjasama	100 Persen	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
<b>1.02</b>	<b>06</b>	<b>01.00</b>	<b>50</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>				<b>100 %</b>	<b>2,008,810,622.0</b>	<b>2,080,304,289.71</b>	<b>Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>
1.02	06	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Dinas Dukapil Kota Makassar			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	9 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	9 Unit	30,977,072.80	46,275,806.35	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk

												Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	3 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	3 Unit			Dan Keluarga Berencana	
1.02	06	01.00	5003	0	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kantor Dinas Dukapil Kota Makassar				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	26 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	893,253,449.80	908,552,183.34	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
1.02	06	01.00	5005	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kantor Dinas Dukapil Kota Makassar				Jumlah ATK yang tersedia	30 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	155,628,199.80	170,926,933.34	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
1.02	06	01.00	5008	0	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kantor Dinas Dukapil Kota Makassar				Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	12 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	669,433,449.80	679,732,183.34	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
1.02	06	01.00	5009	0	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kantor Dinas Dukapil Kota Makassar				Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
1.02	06	01.00	5010	0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kantor Dinas Dukapil Kota Makassar				Jumlah perjalanan dinas	33 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	15 Orang	209,518,449.80	224,817,183.34	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
1.02	06	01.00	5011		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>						% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %			612,942,151.0	735,660,414.60	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		

1.02	06	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kantor Dinas Dukapil Kota Makassar			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	250,462,051.0	308,034,805.93	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	06	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kantor Dinas Dukapil Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	12 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	215,442,050.0	223,014,804.33	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	06	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor Dinas Dukapil Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	3 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	147,038,050.0	204,610,804.34	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	06	01.00	52		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %			302,190,395.0	413,390,866.29	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
1.02	06	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Kantor Dinas Dukapil Kota Makassar			Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	160 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	2 Laporan	81,900,798.34	105,634,288.95	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	06	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kantor Dinas Dukapil Kota Makassar			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	144,380,798.33	178,114,288.67	Dinas Kependudukan. Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen			
											Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	1 Dokumen			

												Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	4 Dokumen				
1.02	06	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kantor Dinas Dukapil Kota Makassar				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	15 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	75,908,798.33	129,642,288.67	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
1.02	06	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					% ASN berkinerja sangat baik	100 %					55,000,000.0	60,000,000.0	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
1.02	06	01.00	53	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kantor Dinas Dukapil Kota Makassar				Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	60 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	55,000,000.0	60,000,000.0	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
1.02	07				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
1.02	07	01.00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											15,418,115,964.86	17,104,329,567.42		
1.02	07	01.00	01		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN					Peningatan jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	5 %					962,730,369.0	1,000,111,095.63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
										Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya	60 RTM								
1.02	07	01.00	01	01	Identifikasi Pemanfaatan Produk TTG Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat			Lokasi Produk TTG	# Enrekang Enrekang Regency South Sulawesi #Kabupaten Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi ID #Lembang Nonongan Nonongan Utara Sopai North Toraja Regency			Jumlah Lokasi Identifikasi Pemanfaatan Produk TTG Masyarakat	6 Lokasi	Jumlah inovasi TTG yang dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa	6 Inovasi TTG	131,250,000.0	137,812,500.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

1.02	07	01.00	01	002	Pengembangan Inovasi TTTG Perdesaan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah Juara Lomba Inovasi TTTG Tingkat Provinsi	6 Juara	Tingkat Ketersediaan Produk Inovasi TTTG	80 %	436,690,369.0	452,099,595.63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	01	004	Bimtek Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan			Kota Makassar			Jumlah Peserta Bimtek Pemanfaatan TTTG	60 Orang	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Pemanfaatan Produk - Produk TTTG	80 %	244,790,000.0	260,199,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	01	000	Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sumberdaya Alam dan TTTG			kab/kota			Jumlah Lokasi Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan SDA dan TTTG	24 Lokasi	Tersedianya Laporan Pemanfaatan Produk - Produk TTTG dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat	24 Laporan	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	02		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN</b>					Jumlah BUMDES yang difasilitasi	180 BUMDES				1,175,875,209.0	1,219,458,183.67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	02	001	Workshop Pengembangan Kerjasama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah Peserta Workshop Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten	90 Orang	Peningkatan Pemahaman Aparat Teknis, Pemerintah Desa dan Stakeholder Dalam Melakukan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga	80 %	142,232,000.0	147,679,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	02	002	Bimtek Manajemen Pengelolaan Kerja Sama Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah Peserta Bimtek Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten	60 Orang	Peningkatan Pemahaman dan Keterampilan Aparat Teknis, Pengurus BKAD/Lemba ga Kerja Sama Desa, Pemerintah Desa dan Stakeholder Dalam Mengelola Kelembagaan Kerja Sama Desa	80 %	129,732,000.0	135,179,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	02	004	Identifikasi Kelembagaan Bumdes Berprestasi			Kota Makassar	# Tana Toraja Regency South Sulawesi ID		Jumlah Lokasi Identifikasi Kelembagaan	21 Lokasi	Jumlah Juara Lomba Bumdes	6 Juara	264,132,209.0	269,585,183.67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

									#Kabupaten Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi ID			BUMDES		Kategori Terbaik				dan Desa	
1.02	07	01.00	02	008	Bimtek Pengelolaan dan Pengembangan Unit Usaha Bumdes Tingkat Provinsi			Kota Makassar	# Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan ID # Makale Tana Toraja Regency South Sulawesi # Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan #kab upaten soppeng Soppeng Regency South Sulawesi ID #Kabupaten Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi ID #kabupaten wajo Wajo Regency South Sulawesi ID #Lembang Angin - Angin Kesu North Toraja Regency South Sulawesi #Makassar #peserta dari kabupaten Takalar dan Gowa Takalar Regency South Sulawesi ID #sekabupaten Bulukumba Bulukumba Regency South Sulawesi ID			Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Pengelolaan Unit Usaha Bumdes	60 Orang	Terpahaman Tata Cara Pengembangan Unit Usaha Bumdes	80 %	130,132,000.0	135,579,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	07	01.00	02	009	Bimtek Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat			Kota Makassar	#KABUPATEN BONE Bone Regency South Sulawesi ID #kelurahan bulete Pitumpanua Wajo Regency South Sulawesi			Jumlah Pengelola Usaha Ekonomi Masyarakat yang Mengikuti Bimbingan Teknis	120 Orang	Peningkatan Keterampilan Pengelola Usaha Ekonomi Masyarakat	80 %	220,332,000.0	225,779,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	



1.02	07	01.00	02	010	Identifikasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan			Kota Makassar	#se Kabupaten Bulukumba Bontotiro Bulukumba Regency South Sulawesi			Jumlah Peserta Identifikasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	60 Peserta	Jumlah Kawasan Perdesaan yang diidentifikasi oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP)	15 Kawasan	94,935,000.0	100,383,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	02	013	Bimtek Pembangunan Kawasan Perdesaan			Kota Makassar	# Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan ID #Desa Kanjilo, Desa Moncobalang, Desa Tamannyeleng, Desa Biringala Barombong Gowa Regency South Sulawesi #Lembang Baruppu Baruppu North Toraja Regency South Sulawesi #se Kabupaten Bulukumba Bonto Bahari Bulukumba Regency South Sulawesi			Jumlah Peserta Aparat Pelaku Pembangunan Kawasan Perdesaan	90 Orang	Meningkatnya Keterampilan Aparat Perdesaan dalam Merencanakan dan Melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan	80 %	147,848,000.0	153,295,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	02	015	Pengendalian dan Pembinaan Program Pendampingan Desa Tingkat Provinsi			Kota Makassar				Jumlah Aparat Teknis dan Pendamping Profesional yang dibina dan ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	Peningkatan Kapasitas Aparat Teknis dan Pendamping Profesional dalam mengawal Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Desa di Kabupaten	80 %	46,532,000.0	51,979,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	03		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA				% Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (% LSM yang aktif)	0.25 %						898,714,362.86	1,386,548,500.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

									% Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (% LPM Berprestasi)	6.25 %									
									% Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	1 %									
1.02	07	01.00	03	00	01	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat			Kota Makassar			Jumlah Lokasi Monev Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat	24 Lokasi	Meningkatnya Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat	80 %	250,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	07	01.00	03	00	02	Identifikasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat			Kota Makassar	#Kabupaten Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi ID #se Kabupaten Bulukumba Bulukumba Regency South Sulawesi ID #Seluruh Desa yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang		Jumlah Kabupaten Kota Lokasi Identifikasi Swadaya Masyarakat	24 Kab / Kota	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	67 %	162,750,000.0	170,887,500.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	07	01.00	03	00	04	Bimtek Peningkatan SDM Pengelola Kelembagaan Adat Desa			Kota Makassar	#Kabupaten Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi ID #Makassar #Seluruh Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang		Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Kelembagaan Adat Istiadat	30 Orang	Meningkatnya Pemahaman Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Nilai - Nilai Sosial Budaya Masyarakat	80 %	61,532,000.0	183,600,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	07	01.00	03	00	05	Sosialisasi Program dan Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat			Kota Makassar			Jumlah Peserta adat Istiadat dan Nilai-Nilai sosial Budaya Masyarakat	30 Orang	Meningkatnya Pemahaman Tentang Pelestarian dan Pengembangan adat Istiadat dan Nilai-Nilai sosial Budaya Masyarakat	80 %	46,532,000.0	51,987,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

1.02	07	01.00	03	006	Identifikasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar	#Kabupaten Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi ID #se Kabupaten bulukumba Bulukumba Regency South Sulawesi ID #Seluruh Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang			Jumlah Peserta dari Unsur LSM dan LPM yang mengikuti Identifikasi Kelembagaan	60 Orang	Tersedianya Data Persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (% LSM yang aktif, LPM Berprestasi dan Jumlah KLP Binaan LPM)	80 %	85,736,362.86	427,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	07	01.00	03	009	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Keluarga dan Pelayanan Dasar			Kota Makassar	#perwakilan beberapa BPD ditiap desa Takalar Regency South Sulawesi ID #perwakilan dari tiap kecamatan Takalar Regency South Sulawesi ID			Jumlah Aparatur dan Kader Yang Mengikuti Bimtek	120 Orang	Terpahaminya a Pengelolaan kelembagaan Pemberdayaan Keluarga dan Pelayanan Dasar	80 %	165,932,000.0	171,387,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	07	01.00	03	011	Lomba Kelembagaan Pokjnal Posyandu Berprestasi			Kota Makassar	#kecamatan burau, kecamatan wotu, kecamatan tomoni, kecamatan mangkutana, kecamatan tomoni timur, kecamatan kalaena, kecamatan angkona, kecamatan malili, kecamatan wasuponda, kecamatan towuti, kecamatan nuha #se Kabupaten Bulukumba Bulukumba Regency South Sulawesi ID #Seluruh Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang			Jumlah Juara Lomba	3 Juara	Terwujudnya Kelembagaan Pokjnal Posyandu Yang Berprestasi	80 %	126,232,000.0	131,687,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	07	01.00	04		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA					Jumlah aparat desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	350 Aparat Desa					2,774,601,106.0	3,474,954,357.90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

									Jumlah desa berstatus swasembada	2 Desa Swasembada								
1.02	0 7	01.00	0 4	0 0 1	Workshop Penataan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar	# #Makassar #se kabupaten bulukumba Bulukumba Regency South Sulawesi ID			Jumlah Aparat Teknis PMD yang Mengikuti Workshop	60 Orang	Meningkatnya Pemahaman Tentang Tata Kelola Pemerintahan di Desa	80 %	78,762,000.0	156,300,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	0 7	01.00	0 4	0 0 2	Identifikasi Status Perkembangan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar	#Lembang Awa Kawasik Balusu North Toraja Regency South Sulawesi #se kabupaten bulukumba Bulukumba Regency South Sulawesi ID			Jumlah Kabupaten Lokasi Identifikasi Status Perkembangan Desa	21 Kabupaten	Jumlah desa berstatus swasembada	3 Desa	131,250,000.0	137,812,500.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	0 7	01.00	0 4	0 0 3	Workshop Implementasi Kewenangan Bagi Perangkat Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar				Jumlah Perangkat Desa yang Mengikuti Workshop	30 Orang	Peningkatan Pengetahuan Aparat Desa Tentang Kewenangan Desa	80 %	39,187,000.0	154,300,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	0 7	01.00	0 4	0 0 4	Bimtek Pengelolaan Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar				Jumlah Pengelola ADD/PAD Tingkat Kabupaten dan Perangkat Desa yang Mengikuti Bimbingan Teknis	60 Orang	Peningkatan Keterampilan Aparat Desa dalam Pengembangan Ekonomi, Aset Desa dan PAD Desa	80 %	84,512,000.0	94,547,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	0 7	01.00	0 4	0 0 5	Identifikasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar	# Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan ID #se Kabupaten bulukumba Bulukumba Regency South Sulawesi ID			Jumlah Kabupaten Lokasi Identifikasi Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21 Kabupaten	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	100 %	131,250,000.0	137,812,500.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	0 7	01.00	0 4	0 0 6	Bimtek Sistem Informasi Pegelolaan Keuangan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar	#Kecamatan Burau, Kab. Luwu Timur East Luwu Regency South Sulawesi ID #pesertanya dari kabupaten takalar dan gowa Takalar Regency South Sulawesi ID			Jumlah Aparat Desa yang Mengikuti Bimbingan Teknis	30 Orang	Peningkatan Keterampilan Aparatur Desa dalam Mengelola Keuangan Desa Berbasis Database	80 %	57,562,000.0	67,597,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.02	07	01.00	04	007	Bimtek Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar	# Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan			Jumlah Perangkat Desa dan Pengurus BPD yang Mengikuti Bimbingan Teknis	30 Orang	Meningkatnya Pengetahuan Perangkat Desa dan BPD dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa	80 %	61,812,000.0	71,847,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	04	009	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Lokasi Monev dan Pembinaan Kerjasama Desa	15 Lokasi	Tersedianya Laporan Tingkat Perkembangan dan Kerjasama Desa	15 Laporan	157,500,000.0	157,500,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	04	010	Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi dan Nasional			24 Kab/Kota Jakarta	# Bulukumba Regency South Sulawesi ID			Jumlah Juara Perlombaan Desa / Kelurahan	12 Juara	Terwujudnya Desa dan Kelurahan Berprestasi	2 Desa	1,385,829,157.0	1,455,120,614.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	04	011	Pengembangan Potensi Desa Melalui Pekan Inovasi Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi dan Nasional			Kota Makassar				Jumlah Display, Layanan Informasi Kegiatan yang ditampilkan	12 Display	Meningkatnya Ketersediaan Informasi Inovasi Desa di Sulawesi Selatan	80 %	113,112,949.0	156,470,743.90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	04	012	Bimtek Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar	# Makale Tana Toraja Regency South Sulawesi			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek	80 Orang	Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan dalam Pengelolaan Profil Desa Berbasis IT	80 %	171,812,000.0	513,600,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
									#Desa Belapunranga Kec. Parangloe Belapunranga Parangloe Gowa Regency									
									#Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Manimbahoi Parigi Gowa Regency									
									#Desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu Mata Allo Bajeng Gowa Regency									
									#Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Rappolemba Tompobulu Gowa Regency									
									#Makassar									
									#se kabupaten Bulukumba Bulukumba Regency South Sulawesi ID									

1.02	07	01.00	04	020	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan Desa			Kab/Kota			Jumlah Lokasi Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan Desa	10 Lokasi	Capaian Data Hasil Monev Bidang pemerintahan Desa	80 %	105,000,000.0	105,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	07	01.00	04	021	Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina Perangkat Desa			Kota Makassar			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek PTPD	60 Orang	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pelaksanaan PKAD Terpadu	80 %	257,012,000.0	267,047,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	07	01.00	05		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN PERDESAAN (Prioritas)					Jumlah kelompok binaan PKK (Prioritas)	1 Kelompok Binaan PKK				2,179,378,603.0	2,260,155,715.14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
						% Posyandu aktif	99.93 %											
						% PKK aktif	100 %											
1.02	07	01.00	05	001	Sosialisasi Kebijakan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi			Kota Makassar			Jumlah Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang Terlibat	400 Orang	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	80 %	839,200,000.0	839,200,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	07	01.00	05	002	Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Jambore PKK			Kota Makassar			Jumlah Peserta yang Mengikuti	700 Orang	Terpahaman Program Kerja PKK	80 %	489,221,000.0	502,683,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
1.02	07	01.00	05	003	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Perencanaan dan Pembangunan Partisipasi Masyarakat			Kota Makassar			Jumlah Kader yang Mengikuti Workshop Perencanaan dan pembangunan partisipasi masyarakat	60 Orang	Meningkatnya partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan masyarakat	80 %	81,421,000.0	94,883,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	07	01.00	05	004	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan dalam Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup			Kota Makassar			Jumlah Kader yang Mengikuti Pelatihan budi daya cacing	90 Orang	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	80 %	195,921,000.0	209,383,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	07	01.00	05	005	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemenuhan Sandang Pangan			Kota Makassar			Jumlah Kader yang Mengikuti Pelatihan pengolahan sumber pangan alternatif	60 Orang	Meningkatnya Pengetahuan Pokja Dalam Pemenuhan Sandang Pangan	80 %	85,223,603.0	98,690,715.14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	07	01.00	05	006	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Peningkatan Derajat Pendidikan dan Keterampilan Perempuan / Keluarga			Kota Makassar			Jumlah lansia yang mengikuti pembinaan	90 Orang	Meningkatnya pengetahuan pokja dalam peningkatan derajat Pendidikan dan Keterampilan Perempuan / Keluarga	80 %	410,771,000.0	424,233,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

1.02	07	01.00	0507	Workshop Identifikasi Kelompok Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga			Kota Makassar				Jumlah Peserta dari unsur Posyandu dan PKK yang mengikuti Workshop Identifikasi Kelompok Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	50 Orang	- Tersedianya Data Posyandu Aktif, Data Kelompok Binaan PKK, Data PKK Aktif	80 %	77,621,000.0	91,083,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	50	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %					4,354,456,658.0	4,568,053,739.21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	5001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Makassar				Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	4 Jenis	384,111,000.0	401,848,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	5002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Makassar				Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	10 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	10 Unit	17,500,000.0	19,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
									Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	19 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	19 Unit					
1.02	07	01.00	5003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kota Makassar				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	29 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	1,031,442,288.0	1,083,014,402.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	5005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Makassar				Jumlah ATK yang tersedia	60 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	782,500,000.0	800,237,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	5006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Makassar				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	771 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	15,751,473.0	33,491,995.21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	5008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Makassar				Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	2 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	566,913,000.0	595,258,650.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	5009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kota Makassar				Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	2 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	331,683,000.0	349,420,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.02	07	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kota Makassar			Jumlah perjalanan dinas	185 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	75 Orang	1,224,555,897.0	1,285,783,692.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>1.02</b>	<b>07</b>	<b>01.00</b>	<b>51</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100 %</b>					<b>1,541,619,657.0</b>	<b>1,602,723,425.87</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
1.02	07	01.00	51	0104	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kota Makassar			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	4 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	710,652,000.0	721,343,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	51	0106	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	29 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	330,652,000.0	341,343,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	51	0109	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	32 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	366,760,000.0	385,098,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	51	0110	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	85 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	37,903,657.0	48,596,425.87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	01.00	51	0112	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Kota Makassar			Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	8 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	95,652,000.0	106,343,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
											Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	36 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	100 %			
<b>1.02</b>	<b>07</b>	<b>01.00</b>	<b>52</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>				<b>% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu</b>	<b>80 %</b>					<b>1,106,420,000.0</b>	<b>1,156,923,550.0</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
1.02	07	01.00	52	0101	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	90 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	3 Laporan	360,000,000.0	378,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



1.02	07	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar				Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	268,751,000.0	282,188,550.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
												Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				
												Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	1 Dokumen				
												Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	4 Dokumen				
1.02	07	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD		Kota Makassar					Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	24 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	100 %	387,023,000.0	393,378,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
												Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	10 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %				
1.02	07	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan		Kota Makassar					Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	70,323,000.0	76,678,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	07	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun		Kota Makassar					Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	5 Laporan	Ketersediaan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	15,323,000.0	21,679,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	07	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Makassar					Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %	5,000,000.0	5,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	07	01.00	53		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>	<b>100 %</b>					<b>424,320,000.0</b>	<b>435,401,000.0</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	

1.02	07	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Kota Makassar				Jumlah Aparat OPD yang mengelola administrasi kepegawaian nya	3 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
												Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	12 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %				
1.02	07	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kota Makassar				Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	240 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	112,000,000.0	117,600,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	07	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kota Makassar				Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	163 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	52,700,000.0	52,700,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	07	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Kota Makassar				Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	85 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	85 Orang	109,620,000.0	115,101,000.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1.02	08				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
1.02	08	01.00			Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana											6,868,503,878.82	6,586,015,785.27		
1.02	08	01.00	01		PROGRAM PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK					Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.08 % (BPS)					376,965,547.0	390,937,505.80	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
1.02	08	01.00	01	001	Sistem Pemetaan dan Proyeksi Pengendalian Kependudukan			Kota Makassar				Jumlah Pemetaan dan Aplikasi Penduduk	2 Pemetaan dan Aplikasi	Tersedianya hasil Pemetaan dan Proyeksi Pengendalian Penduduk Kab/Kota	100 %	164,034,165.66	168,691,485.80	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	

1.02	08	01.00	01	002	Rencana Induk Pengendalian Penduduk			Kota Makassar			Jumlah Kebijakan RIPDUK Prov. Sulsel	2 Kebijakan	Tersedianya Rumusan Rekomendasi Kebijakan RIPDUK	100 %	109,684,415.67	114,341,735.0	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	08	01.00	01	003	Penyusunan Analisis dan Model Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan			Kota Makassar			Jumlah dokumen Analisis dan model Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	Tersedianya Analisisa Dampak Kependudukan dan Pemanfaatan Jalur Formal, Non Formal serta Informal	100 %	103,246,965.67	107,904,285.0	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	08	01.00	02		PROGRAM PENINGKATAN KELUARGA BERENCANA					% Penggunaan kontrasepsi jangka panjang	24.31 %				214,350,748.0	222,295,505.61	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
										Angka pemakaian kontrasepsi/CP R bagi pasangan usia subur	66.74 %						
										% Peserta KB Aktif	72.26 %						
										Rasio Total Fertility Rate	2.3						
1.02	08	01.00	02	001	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan KB di Prov. Sulsel			Kota Makassar			Jumlah SKPD Kabupaten/Kota yang Mengikuti Rakor	55 Orang	Terkoordinasi nya Pengelolaan Pelayanan KB di Sulawesi Selatan	100 %	47,631,582.66	50,279,835.20	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	08	01.00	02	002	Pertemuan Stakeholder Dalam Upaya Peningkatan Program KB			Kota Makassar			Jumlah Pertemuan	1 Pertemuan	Meningkatnya Kapasitas KB MKJP di Kabupaten/Kota	100 %	88,137,582.67	90,785,835.20	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	08	01.00	02	004	Sosialisasi Model KIE KB Berbasis Kearifan Lokal			Kota Makassar			Jumlah Peserta	60 Orang	Petugas Dalduk KB Kab/ Kota Mengetahui Model KIE KB Berbasis Kearifan Lokal	35 %	78,581,582.67	81,229,835.21	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.02	08	01.00	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA					Jumlah Kelompok UPPKS yang dibina	1600 Klp				253,559,417.0	262,957,416.24	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil,

									Cakupan Kab/Kota yang menyelenggarakan Pembinaan Keluarga Sejahtera secara terpadu berkesinambungan dan terencana	100 %							Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
1.02	08	01.00	03	00	Pembinaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Kelpmpok UPPKS			Kabupaten Bulukumba	# Mengkendek Tana Toraja Regency South Sulawesi		Jumlah Kelompok UPPKS	80 Orang	Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Keluarga	100 %	71,216,139.0	74,348,805.40	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
							Kabupaten Kepulauan Selayar	# South Sangala Tana Toraja Regency South Sulawesi										
							Kabupaten Tana Toraja	#Kabupaten Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi ID										
								#Kec. Kajang Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan										
								#Kec. Kindang Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan										
1.02	08	01.00	03	00	Pembinaan Bina Ketahanan Keluarga BKB, BKR dan BKL Kabupaten/Kota		Kabupaten Sinjai	# South Sangala Tana Toraja Regency South Sulawesi		Jumlah Kelompok Bina Ketahanan Keluarga	24 Kelompok	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga	100 %	102,341,139.0	105,473,805.41	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
							Kabupaten Tana Toraja	#Desa Bontotannga Dusun balantieng Sinjai Borong Sinjai Regency South Sulawesi										
1.02	08	01.00	03	00	Pelatihan Advokasi Bagi Pengurus Kelompok Kerja Bina Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Kota Makassar			Jumlah Peserta	80 Orang	Meningkatnya Wawasan Pengurus Pokja Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	80,002,139.0	83,134,805.43	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
1.02	0				Perhubungan													
1.02	0	01.00			Dinas Perhubungan									28,547,269,564.09	22,889,546,752.55			

1.02	09	01.00	01		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN DAN ANGKUTAN PELAYARAN (Prioritas)					Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	1009 Orang				9,598,098,035.09	6,450,000,000.0	Dinas Perhubungan		
										Jumlah pelabuhan strategis provinsi	11 Lokasi								
										Jumlah pelabuhan yang beroperasi	38 Lokasi								
1.02	09	01.00	01	004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha			Kota Makassar				Jumlah Laporan	1 Laporan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Movev	1 laporan	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	01	005	Pengadaan Kapal			Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	#Dermaga Ulo - Ulo North Belopa Luwu Regency South Sulawesi			Jumlah Pengadaan Kapal	1 Unit	Tersedianya Kapal Untuk kelancaran Moda Transportasi di Bidang Pelayaran	1 Unit	2,823,098,035.09	0.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	01	023	Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Angkutan PELRA			Kota Makassar	#Bantaeng Bantaeng Regency South Sulawesi ID			Jumlah Perusahaan Angkutan Pelra	5 Badan Usaha	Terlaksananya a Movev Perusahaan Angkutan Pelra	100 %	75,000,000.0	0.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	01	026	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Angkutan Sungai dan Penyeberangan Bira			Bira Kabupaten Bulukumba				Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT	1 Laporan	Cakupan Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Teknis	1 Laporan	300,000,000.0	325,000,000.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	01	027	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Selayar			Kabupaten Kepulauan Selayar				Jumlah Laporan Pelayanan Teknis UPT	1 Laporan	Tersedianya Laporan	1 Laporan	300,000,000.0	325,000,000.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	01	028	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Takalar			Kabupaten Takalar				Jumlah Laporan Pelayanan Teknis UPT	1 Laporan	Tersedianya Laporan Pelayanan Teknis UPT	1 Laporan	300,000,000.0	325,000,000.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	01	029	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Bone			Kabupaten Bone				Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Teknis	1 Laporan	Tersedianya Laporan Pelayanan Teknis	1 Laporan	300,000,000.0	325,000,000.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	01	030	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Luwu Timur			Kabupaten Luwu Timur				Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT	1 Laporan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Teknis	1 Laporan	300,000,000.0	325,000,000.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	01	031	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan Bira			Kabupaten Bulukumba				Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT	1 Laporan	Tersedianya Laporan	1 Laporan	300,000,000.0	325,000,000.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	01	033	Penyusunan Perencanaan Teknis Pelabuhan dan Dermaga Wisata			Kota Makassar	#Bantaeng Bantaeng Regency South Sulawesi ID			Jumlah Dokumen FS, RIP, DED Pelabuhan	3 Lokasi	Tersedianya Dokumen FS, RIP, DED, UKL/UPL	3 Dokumen	1,750,000,000.0	1,750,000,000.0	Dinas Perhubungan	

									#Kec. Bontoharu, Kec. Takabonerate Selayar Islands Regency South Sulawesi ID											
									#Pulau larea rea Sembilan Island Sinjai Regency South Sulawesi											
1.02	09	01.00	01	035	Pembangunan Dermaga Wisata			Kayu Bangkoa, Panyua Kota Makassar					Jumlah Dermaga Wisata	1 Lokasi	Tersedianya Dermaga Wisata	1 Unit	1,000,000,000.0	1,100,000,000.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	01	037	Operasional Kapal Pelra			Kabupaten Pangkajene Kota Makassar	#Bantaeng Bantaeng Regency South Sulawesi ID				Jumlah Kapal	1 Kapal	Tersedianya Anggaran Operasional Pengelolaan	1 Tahun	400,000,000.0	400,000,000.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	01	038	Diklat Teknis Non Struktural Bidang Pelayaran			Kota Makassar					Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	10 Orang	Meningkatnya Kapasitas PNS di Bidang Pelayaran dan Pelabuhan Pengumpan Regional Sesuai Kewenangan	1 Laporan	500,000,000.0	500,000,000.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	01	039	Kampanye Keselamatan Pelayaran			Kota Makassar					Jumlah Peserta	700 Orang	Terlaksananya Kampanye Keselamatan Pelayaran	100 %	700,000,000.0	700,000,000.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	01	040	Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan			Kabupaten Bulukumba Kabupaten Kepulauan Selayar					Jumlah Pelabuhan Dalam Kondisi Baik	2 Pelabuhan	Jumlah Pelabuhan Dalam Kondisi Baik	2 Pelabuhan	500,000,000.0	0.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	02		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN (Prioritas)</b>	Penguatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur						Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik (Prioritas)	24 %				3,337,212,011.0	2,854,903,391.31	Dinas Perhubungan
													Cakupan penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	78 Ruas						
1.02	09	01.00	02	001	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan			Provinsi Sulawesi Selatan	# Detail lokasi = Poros Bantimurung Turikale Maros Regency South Sulawesi # Makassar Makassar City South Sulawesi				Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ yang Terpasang	9 Jenis	Cakupan Tersedianya Fasilitas Keselamatan LLAJ pada Jalan Provinsi	9 Jenis	1,181,547,011.0	1,305,238,391.31	Dinas Perhubungan	

								<p>#Benteng gajah-Carangke.(pindah lokasi) Tondongkura Tondong Tallasa Pangkajene Dan Kepulauan Regency</p>												
								<p>#Bosowa. Detail lokasi = Jalan poros benteng gajah Bantimurung Maros Regency South Sulawesi</p>												
								<p>#Daerah Rawan Lokasi Kecelakaan/Bencana Kecamatan Tombolo Tombolo Pao Gowa Regency South Sulawesi</p>												
								<p>#Desa Jonjo Kecamatan Parigi (Sungguminasa-Malino Km.60) Jonjo Parigi Gowa Regency</p>												
								<p>#Jalan Palopo (Latuppa) dengan Bastem Utara (Bonglo) .Detail lokasi : Latuppa-Bonglo Jl. Palopo-Bastem Bassesangtemp e Kabupaten Luwu</p>												
								<p>#Jalan palopo (Latuppa) dengan Bastem Utara (Bonglo). Detail lokasi : Latuppa-Bonglo Jl. Palopo-Bastem Bassesangtemp e Kabupaten Luwu</p>												

								<p>#Jalan Palopo (Latuppa) dengan Bastem Utara (Bonglo). Detail lokasi : Latuppa-Bonglo Jl. Palopo-Bastem Bassesangtemp e Kabupaten Luwu</p>											
								<p>#Jalan Poros Kapala Pitu. Lokasi diganti menjadi : Poros Rantepao-Pangalla. Kapala Pitu North Toraja Regency South Sulawesi</p>											
								<p>#Jalan Poros Buntao - Rantebua. Lokasi diganti menjadi : Batas Kab.Luwu - Tedong Bonga Buntao North Toraja Regency South Sulawesi</p>											
								<p>#Jalan poros Kesu" - Rantebua. Lokasi diganti menjadi : Batas Kab.Luwu - Tedong Bonga Rantebua North Toraja Regency South Sulawesi</p>											
								<p>#Jalan Poros Tikala - Kapala Pitu. Lokasi diganti menjadi : Poros Rantepao-Pangalla. Kapala Pitu North Toraja Regency South Sulawesi</p>											



								#Jalan Ussu- Nuha-Beteleme- Bts.Prov.Sultra g Malli East Luwu Regency South Sulawesi											
								#Jln. Provinsi poros Bone via Salonro Pompanua Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan ID											
								#Jln. Provinsi Via Bulu Dua/ Kel. Tettikenrarae Kec. Merioriwawo Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan ID											
								#Jln. Provinsi Poros Bone Via pompanua / Desa Parenring Kec. Lilirilau Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan ID											
								#Jln. Provinsi Poros Bone Via pompanua / Kel. Ujung dan Desa Parenring Kec. Lilirilau Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan ID											

								<p>#Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan ID (Kabupaten Sidenreng Rappang). Detail lokasi : Soppeng batas Sidrap, Batas soppeng - Pangkajene-Rappang, Sidrap, Sulawesi Selatan ID Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan ID</p> <p>#Kabupaten Sidenreng Rappang. Detail lokasi : Soppeng batas Sidrap, Batas soppeng - Pangkajene-Rappang, Sidrap, Sulawesi Selatan ID Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan ID</p> <p>#Kec. Bontoharu, Kec. Bontosikuyu Selayar Islands Regency South Sulawesi ID</p> <p>#Kotu-Masalle-Baroko-Batas Kab. Tana toraja Enrekang Regency South Sulawesi ID</p> <p>#Palangga-Sapaya (Desa Bontomanai, Desa Mangempang, Desa Bissalora dan Desa Buakkang) Bungaya Gowa Regency South Sulawesi</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									#Palangga-Sapaya (Kecamatan Biringbulu) Biringbulu Gowa Regency South Sulawesi										
									#Palangga-Sapaya Desa Bontomanai dan Desa Sapaya Bungaya Gowa Regency South Sulawesi										
									#Palleko-Towata Kec.Polut Takalar Regency South Sulawesi ID										
									#Panciro-Galesong-Pattallassang Barombong Gowa Regency South Sulawesi										
									#Perbatasan Walenrang Barat (Simbuang) dengan Toraja Utara. Detail lokasi : Batas Kab.Luwu-Tedongbonga West Walenrang Luwu Regency South Sulawesi										
									#Perbatasan Walenrang Barat (simbuang) dengan Toraja Utara. Detail Lokasi : Batas Kab.Luwu - Tedongbonga West Walenrang Luwu Regency South Sulawesi										

								<p>#Perbatasan Walenrang Barat (Simbuang) dengan Toraja Utara. Detail Lokasi : Batas Kab.Luwu - Tedongbonga West Walenrang Luwu Regency South Sulawesi</p>										
								<p>#Poros Jalan Malino (Km. 60) - Batas Sinjai (Takapala, Bonto Lapisi dan Bonto Lerung) Tinggimoncong Gowa Regency South Sulawesi</p>										
								<p>#Poros Jalan Malino (Km. 60) - Batas Sinjai Gowa Regency South Sulawesi ID</p>										
								<p>#Poros Jalan Propinsi Sungguminasa - Malino (Km. 60) (Km. 5 - 17) Gowa Regency South Sulawesi ID</p>										
								<p>#Poros Lajoa-Pacangkang-Citta-Tobenteng Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan ID</p>										
								<p>#Poros Malino KM 60- Bts Sinjai Parigi Gowa Regency South Sulawesi</p>										

								<p>#Poros Panciro-Galesong-Patalassang. SMUN 1 Sungguminasa, SDN Centre Mangalli, SDN. 6 Bontokamase dan SDI Tinggi Mae Somba Opu Gowa Regency South Sulawesi</p>											
								<p>#Poros Sinjai-Kajang, Poros Bts.Gowa-Tondong, Sinjai Regency South Sulawesi ID</p>											
								<p>#Poros Soppeng-Batas Sidrap (SDN 7, SDN 3 Lemba) Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan ID</p>											
								<p>#Poros Sungguminasa-Malino Km.60 Parangloe Gowa Regency South Sulawesi</p>											
								<p>#SDN. Center Malino dan SDI. 2 Malino (Malino Km 60 Btrs.Sinjai) Tinggimoncong Gowa Regency South Sulawesi</p>											
								<p>#Sungguminasa-Malino Km.60 (Pappartang Desa Belabori) Parangloe Gowa Regency South Sulawesi</p>											
								<p>#Sungguminasa-Malino Km.60 Pasar Lebong Kecamatan Parangloe Lonjoboko Parangloe Gowa Regency</p>											

								#Tana Bau- Ngapaloka- Pattumbukang Selayar Islands Regency South Sulawesi ID											
								#turikale. Detail lokasi = Poros Carangki - Bantimurung Turikale Maros Regency South Sulawesi											
1.02	0 9	01.00	0 2	0 0 4	Pengadaan dan Pemasangan ATCS Beserta Kelengkapannya			Kota Makassar			Jumlah ATCS yang Terpasang	1 Unit	Tersedianya Fasilitas ATCS dijalan Jalan Provinsi	1 Unit	200,000,000.0	0.0	Dinas Perhubungan		
1.02	0 9	01.00	0 2	0 0 5	Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan			Kota Makassar	#Boro- Bantaeng (Jl. T.A Gani Bantaeng - Boro Jeneponto) Bantaeng Regency South Sulawesi ID		Jumlah lokasi Penyusunan Andalalin	2 Lokasi	Tersedianya Dokumen Penyusunan Andalalin	1 Dokumen	306,000,000.0	306,000,000.0	Dinas Perhubungan		
									#rantepao dan tallunglipu Rantepao North Toraja Regency South Sulawesi		Jumlah Ruas Jalan	5 Jalan	Terlaksananya a Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	1 Laporan					
1.02	0 9	01.00	0 2	0 0 6	Rekayasa Lalu Lintas Ruas Jalan Provinsi			Kota Makassar			Jumlah Laporan	1 Laporan	Terpenuhinya Arus Lalu Lintas Lancar dan Tertib Yang terdampak rekayasa Lalu Lintas.	1 Laporan	100,000,000.0	0.0	Dinas Perhubungan		
1.02	0 9	01.00	0 2	0 0 9	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan			Kota Makassar	#rantepao Rantepao North Toraja Regency South Sulawesi		Jumlah Peserta	50 Orang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum	1 Laporan	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perhubungan		
1.02	0 9	01.00	0 2	0 1 4	Koordinasi Pelaksanaan RAD - GRK			Kota Makassar			Jumlah Laporan	1 Laporan	Tersedianya Laporan Koordinasi pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perhubungan		
1.02	0 9	01.00	0 2	0 1 5	Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing			Kota Makassar			Jumlah Pelican Crossing Yang Terpasang	2 Unit	Tersedianya Pelican Crossing	2 Unit	206,000,000.0	0.0	Dinas Perhubungan		
1.02	0 9	01.00	0 2	0 1 6	Pemeliharaan Halte dan Pemindahannya			Kabupaten Kabupaten Maros Kabupaten Takalar Kota Makassar			Jumlah Halte dalam Kondisi Baik dan Yang dipindahkan	30 unit	Cakupan Tersedianya Halte Dalam Kondisi Baik dan yang dipindahkan	30 Unit	43,665,000.0	43,665,000.0	Dinas Perhubungan		

1.02	09	01.00	02	022	Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)			Kabupaten Bantaeng	#Jalan Ussu-Nuha-Beteleme-Bts.Prov.Sulteng Malili East Luwu Regency South Sulawesi		Jumlah Titik Daerah Rawan Kecelakaan	5 Lokasi	Terlaksananya Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaann	1 Laporan	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Perhubungan
								Kabupaten Barru	#Kotu-Masalle-Baroko-Batas Kab. Tana toraja Enrekang Regency South Sulawesi ID								
								Kabupaten Bone	#Pada Poros Bua-Batas Kab.Tana Toraja. SD Neg. 80 Jalan Jendral Sudirman Kota Palopo, SD Neg. 5 Salamae Jalan Ratulangi Kota Palopo Palopo City South Sulawesi ID								
								Kabupaten Bulukumba	#Poros Panciro-Galesong-Patalassang Desa Bontosunggu dan Desa Limbung Jl. Poros Pallangga Panciro Bajeng								
								Kabupaten Enrekang	#Poros Sungguminasa-Malino Km.60 Jalan Poros Malino - Kecamatan Parangloe Jl. Malino Borisalo Parangloe								
								Kabupaten Gowa	#SMA Neg. 3 Persimpangan Jalan Jendral Sudirman dan Tociung dan Pertigaan Jalan Jendral Sudirman dan Ahmad Kasim Palopo City South Sulawesi ID								
								Kabupaten Jeneponto									
								Kabupaten Kepulauan Selayar									

							Kabupaten Luwu													
							Kabupaten Luwu Timur													
							Kabupaten Luwu Utara													
							Kabupaten Maros													
							Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan													
							Kabupaten Pinrang													
							Kabupaten Sidenreng Rappang													
							Kabupaten Sinjai													
							Kabupaten Soppeng													
							Kabupaten Takalar													
							Kabupaten Tana Toraja													
							Kabupaten Toraja Utara													
							Kabupaten Wajo													
							Kota Makassar													
							Kota Palopo													
							Kota Parepare													
1.02	09	01.00	02	023	Sosialisasi Keselamatan Berliku Lintas Kepada Pengusaha Angkutan		Kota Makassar	#Kecamatan Pattallassang Kab.Takalar Prov.Sulawesi Selatan Takalar Regency South Sulawesi ID		Jumlah Peserta Sosialisasi	25 Orang	Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan Berliku Lintas kepada Pengusaha Angkutan	25 Orang	100,000,000.0		0.0	Dinas Perhubungan			
1.02	09	01.00	02	025	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Transportasi Mamminasata		Kabupaten Gowa			Jumlah Laporan	1 Laporan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan UPT	1 Laporan	250,000,000.0		250,000,000.0	Dinas Perhubungan			
							Kabupaten Maros													
							Kabupaten Takalar													
							Kota Makassar													
1.02	09	01.00	02	029	Penanganan Kemacetan Lalu Lintas		Kota Makassar			Jumlah titik keramaian / Pusat Kegiatan	2 Lokasi	Terlaksananya pengawasan Manajemen Parkir di titik keramaian / pusat kegiatan	1 Laporan	625,000,000.0		625,000,000.0	Dinas Perhubungan			
										Jumlah Ruas Jalan	5 Jalan	Identifikasi dan analisa penanganan kemacetan lalu lintas	1 Laporan							



1.02	09	01.00	02	030	Kampanye Keselamatan Transportasi Darat			Kota Makassar	#SMA NEGERI I GALESONG UTARA Jl.Pendidikan tamasaju desa Tamasaju kec.Galesong Utara, SMAN I POLUT Jl.H.Manila Dg.Pati			Jumlah Peserta	50 Orang	Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor	1 Laporan	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Perhubungan	
												Jumlah Peserta	50 Orang	Terlaksananya Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	1 Laporan				
1.02	09	01.00	03		PROGRAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN					% Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	40 %					3,648,250,415.0	3,183,470,212.28	Dinas Perhubungan	
										% Layanan Angkutan Darat	52 %								
										Jumlah Terminal Bis Terkelola	7 Lokasi								
										Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	245000 Orang								
1.02	09	01.00	03	001	Pembangunan Terminal Type B Di Jeneponto (Tahap II)			Kabupaten Jeneponto				Jumlah Terminal yang dibangun	1 Lokasi	Terselesaikannya Pembangunan Terminal Type B Jeneponto (Tahap II)	1 Unit	1,258,250,415.0	1,393,470,212.28	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	03	003	Diklat Teknis Non Struktural Bidang Angkutan Jalan			Kota Makassar				Jumlah PNS	10 Orang	Meningkatnya Kapasitas PNS di Bidang Angkutan dan Pengelolaan Terminal Tipe b	1 Laporan	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	03	006	Pembangunan Terminal Multi Moda			Kabupaten Bantaeng				Jumlah Terminal Multi Moda	1 Paket	Tersedianya Fasilitas Terminal Multi Moda	1 Paket	600,000,000.0	0.0	Dinas Perhubungan	
								Kabupaten Barru											
								Kabupaten Jeneponto											
								Kabupaten Sinjai											
								Kota Makassar											
1.02	09	01.00	03	007	Pelayanan Perizinan Angkutan Orang Dalam Trayek			Kota Makassar				Jumlah Badan Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek	10 Badan Usaha	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SPM Angkutan Orang Dalam Trayek	1 Laporan	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Perhubungan	
												Jumlah Kartu Pengawasan yang di buat	500 Kartu Pengawasan	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Angkutan Orang Dalam Trayek	1 Laporan				

1.02	09	01.00	03	008	Pelayanan Perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek			Kota Makassar			Jumlah Badan Usaha Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	10 Badan Usaha	Terlaksananya a Evaluasi dan Monitoring SPM Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	1 Laporan	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Perhubungan	
											Jumlah Kartu Pengawasan yang di buat	500 Kartu Pengawasan	Terlaksananya a Pelayanan Perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	1 Laporan				
1.02	09	01.00	03	011	Pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru			Kabupaten Bantaeng			Jumlah Laporan	3 Laporan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Posko	3 Laporan	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Perhubungan	
								Kabupaten Bone										
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Kepulauan Selayar										
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Takalar										
								Kota Makassar										
								Kota Palopo										
								Kota Parepare										
1.02	09	01.00	03	014	Pemilihan Abdi Yasa Teladan			Kota Makassar			Jumlah Peserta	15 Orang	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	03	016	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalulintas dan Angkutan Jalan Wilayah I			Kabupaten Bantaeng			Jumlah Laporan	1 Laporan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan UPT	1 Laporan	250,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Perhubungan	
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Sinjai										
1.02	09	01.00	03	017	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalulintas dan Angkutan Jalan Wilayah II			Kabupaten Barru	#Pada poros tanete-tanaberu Barombang Gantarang Bulukumba Regency		Jumlah laporan	1 Laporan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan UPT	1 Laporan	250,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Perhubungan	
								Kabupaten Bone	#Pada poros tanete-tanaberu Bulukumba Bulukumba Regency South Sulawesi									
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	#Pada poros tanete-tanaberu Jl. Poros Bira Bulukumba Manyampa Ujung Loe									

								Kabupaten Pinrang	#Pada poros tanete-tanaberu Tanah Beru Bonto Bahari Bulukumba Regency								
								Kabupaten Sidenreng Rappang	#Pada poros tanete-tanaberu Tanah Jaya Kajang Bulukumba Regency								
								Kabupaten Soppeng									
								Kabupaten Wajo									
								Kota Parepare									
1.02	09	01.00	03	018	Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan Lalulintas dan Angkutan Jalan Wilayah III			Kabupaten Enrekang	#poros tanah baru, poros bira , kajang Tanah Beru Bonto Bahari Bulukumba Regency	Jumlah Laporan	1 Laporan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelayanan UPT	1 Laporan	250,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Perhubungan	
								Kabupaten Luwu	#tanah baru/ Bira Kec. Bonto bahari Tanah Beru Bonto Bahari Bulukumba Regency								
								Kabupaten Luwu Timur									
								Kabupaten Luwu Utara									
								Kabupaten Tana Toraja									
								Kabupaten Toraja Utara									
								Kota Palopo									
1.02	09	01.00	03	019	Peningkatan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B			Kabupaten Bantaeng		Jumlah Terminal Tipe B	3 Lokasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B	1 Laporan	610,000,000.0	610,000,000.0	Dinas Perhubungan	
								Kabupaten Barru									
								Kabupaten Jeneponto									
								Kabupaten Sinjai									
1.02	09	01.00	03	020	Pelaksanaan Pelayanan Terminal Tipe B			Kabupaten Bantaeng		Jumlah Terminal tipe B	3 Laporan	Terlaksananya pelayanan Terminal tipe B	1 Laporan	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Perhubungan	
								Kabupaten Barru									
								Kabupaten Jeneponto									
								Kabupaten Sinjai									

1.02	09	01.00	04		PROGRAM PERENCANAAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Transportasi	7 Dokumen				2,112,706,338.0	400,000,000.0	Dinas Perhubungan		
1.02	09	01.00	04	001	Studi Pengembangan Bandara			Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Tana Toraja			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Terlediannya Hasil Studi Kelayakan Bandara Udara	1 Dok	79,000,000.0	0.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	04	003	Pengembangan Pembangunan Bandara			Kabupaten Bone Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Tana Toraja	#Kec. Malili East Luwu Regency South Sulawesi		Jumlah Lahan yang dibebaskan	1000 M2	Ketersediaan Lahan bandara	1 lokasi	1,000,000,000.0	0.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	04	005	Kampanye Keselamatan Penerbangan dan perkeretaapian			Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Tana Toraja Kota Makassar			Jumlah Peserta	200 peserta	jumlah peserta	200 orang	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	04	008	Rencana Induk Transportasi Mamminasata			Kabupaten Gowa Kabupaten Maros Kabupaten Takalar Kota Makassar			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Tersediannya Rencana Induk Transportasi Mamminasata	1 dokumen	500,000,000.0	0.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	04	011	Pembebasan Lahan Bandara			Kabupaten Bulukumba Kabupaten Tana Toraja			Jumlah Area	1000 m2	Ketersediaan Lahan	1000 M2	100,000,000.0	0.0	Dinas Perhubungan	

1.02	09	01.00	04	024	Survey Penataan Jaringan Transportasi Barang kawasan Mamminasata			Kabupaten Gowa			Jumlah Laporan	1 laporan	Ketersediaan Laporan Hasil Survey	1 Laporan	33,706,338.0	0.0	Dinas Perhubungan
								Kabupaten Maros									
								Kabupaten Takalar									
								Kota Makassar									
1.02	09	01.00	04	025	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sektor Perhubungan			Kota Makassar			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Monev	1 Dokumen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	04	035	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Transportasi			Kota Makassar			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Termanfaatkannya Dokumen Perencanaan Pengembangan Transportasi	1 Dokumen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	50		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										7,637,171,247.0	7,920,237,546.86	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100 Jenis	564,000,000.0	624,450,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Dinas Perhubungan Prov. Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	38 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	38 Unit	65,450,000.0	105,000,000.0	Dinas Perhubungan
											Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	63 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	63 Unit			
1.02	09	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	120 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	4,176,000,000.0	4,176,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah ATK yang tersedia	36 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	761,450,000.0	811,450,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	65,271,247.0	98,337,546.86	Dinas Perhubungan

1.02	09	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	2 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	355,000,000.0	405,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	150,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perjalanan dinas	200 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	200 Orang	1,500,000,000.0	1,500,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	51		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			Kementerian / Lembaga Terkait; dll. Luar Provinsi Sulawesi Selatan			<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>				<b>874,978,740.0</b>	<b>827,409,202.01</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>
1.02	09	01.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas			Dinas Perhubungan Prov. Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan rumah jabatan/ rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Dinas Perhubungan Prov. Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	2 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Dinas Perhubungan Prov. Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	101 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	600,000,000.0	600,000,000.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	51	007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Dinas Perhubungan Prov. Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	5 Unit	Ketersediaan Perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas sesuai kebutuhan	100 %	50,000,000.0	0.0	Dinas Perhubungan
1.02	09	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Dinas Perhubungan Prov. Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	50 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	74,978,740.0	77,409,202.01	Dinas Perhubungan

1.02	09	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA				% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %				932,308,389.0	950,413,733.92	Dinas Perhubungan		
1.02	09	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	125 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	127,108,389.0	133,108,389.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Dinas Perhubungan Prov. Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	339,750,000.0	345,750,000.0	Dinas Perhubungan	
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	1 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	3 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	3 Dokumen				
1.02	09	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			Dinas Perhubungan Prov. Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	1 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	100 %	310,450,000.0	300,000,000.0	Dinas Perhubungan	
											Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	100 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %				
1.02	09	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Dinas Perhubungan Prov. Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	45,000,000.0	51,000,000.0	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Dinas Perhubungan Prov. Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	110,000,000.0	120,555,344.92	Dinas Perhubungan	

1.02	09	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				% ASN berkinerja sangat baik	100 %					406,544,389.0	303,112,666.17	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	53	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Dinas Perhubungan Prov. Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	235 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	295,625,000.0	303,112,666.17	Dinas Perhubungan	
1.02	09	01.00	53	03	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Dinas Perhubungan Prov. Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	61 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	110,919,389.0	0.0	Dinas Perhubungan	
1.02	1				Komunikasi dan Informatika													
1.02	10	01.00			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian										18,741,318,091.70	19,435,951,666.41		
1.02	10	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT (Prioritas)	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan, Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan		% Penerapan e-Government pada lingkup Perangkat Daerah (Prioritas)	70 %					9,623,858,367.70	9,932,559,414.41	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	10	01.00	01	001	Pembangunan dan Pemeliharaan Command Center			Kota Makassar			Jumlah Jenis Kelengkapan Command Centre	1 Paket	Termanfaatkannya Command Centre Room Sebagai Pusat TIK Provinsi Sulawesi Selatan	100 %	1,517,150,000.0	1,563,150,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	10	01.00	01	002	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optic (FO) Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah OPD/Unit Kerja yang terkoneksi Jaringan Fiber Optic (FO)	47 OPD	Tersedianya Infrastruktur Jaringan seluruh OPD/Unit Kerja	100 %	2,043,004,805.70	2,029,703,469.41	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	10	01.00	01	003	Peningkatan Akses Internet Bandwith			Kota Makassar			Jumlah Kapasitas Bandwith Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahap I	600 MBps	Tersedianya Layanan Akses Internet Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	100 %	2,262,150,000.0	2,308,150,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
											Jumlah Kapasitas Bandwith Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahap II	600 MBps	Tersedianya Layanan Akses Internet Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	100 %				



1.02	1 0	01.00	0 1	0 0 4	Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Keras			Kota Makassar			Jumlah Unit Videotron yang Tersedia	1 Jenis	Persentase ketersediaan Videotron sebagai Digital Billboard Provinsi Sulawesi Selatan	100 %	1,699,650,000.0	1,745,650,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
											Jumlah Jenis Perangkat Keras yang Tersedia	10 Jenis	Persentase ketersediaan perangkat keras	100 %			
1.02	1 0	01.00	0 1	0 0 5	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi			Kota Makassar			Jumlah Aplikasi yang dibangun	50 Aplikasi	Tersedianya Aplikasi yang Terintegrasi	100 %	1,767,150,000.0	1,813,150,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	1 0	01.00	0 1	0 0 6	Monitoring Layanan Infrastruktur Jaringan dan Bandwith Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah Access Point Jaringan dan Bandwith yang termonitor	50 Access Point	Tersedianya Infrastruktur Jaringan dan Bandwith Lingkup Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan	100 %	166,150,000.0	212,150,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	1 0	01.00	0 1	0 0 7	Pengembangan Sumber Daya e-Government			Kota Makassar / Luar Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah Sumber Daya Manusia yang meningkat kualitasnya dalam bidang E-Government	16 Orang	Tersedianya Tenaga SDM E-Government yang Berkualitas	100 %	104,150,000.0	150,150,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	1 0	01.00	0 1	0 0 9	Bimbingan Teknis Pengembangan Aplikasi			Kota Makassar			Jumlah peserta Bimtek Pengembangan Aplikasi	60 Orang	Tersedianya SDM Pengelola Aplikasi	100 %	64,453,562.0	110,455,945.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
<b>1.02</b>	<b>1 0</b>	<b>01.00</b>	<b>0 2</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BARUGA LAYANAN PUBLIK (Prioritas)</b>	<b>Penguatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah</b>	<b>Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>			<b>% Pemanfaatan Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik (Prioritas)</b>	<b>100 %</b>				<b>1,018,503,316.0</b>	<b>1,056,253,415.0</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian</b>
1.02	1 0	01.00	0 2	0 0 1	Pengembangan Baruga Layanan Aduan Masyarakat			Kota Makassar / Luar Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Aduan Masyarakat Yang Masuk dan DitindakLanjuti	2100 Aduan	Tersedianya Layanan Aduan Masyarakat Secara Elektronik	100 %	825,350,000.0	844,200,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	1 0	01.00	0 2	0 0 2	Pengelolaan Konten dan Berita Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah Konten dan Berita yang Tersedia	1800 Konten/Berita	Tersedianya Layanan Konten dan Berita melalui Website	100 %	193,153,316.0	212,053,415.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

1.02	10	01.00	03		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK					% Layanan Konten Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi berkualitas baik	80 %					1,586,574,921.0	1,643,526,973.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	10	01.00	03	001	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar / Luar Kota Makassar Kota Makassar		Jumlah sengketa Informasi yang diselesaikan	100 Sengketa	Terwujudnya Keterbukaan informasi di Provinsi Sulawesi Selatan	100 %	1,000,386,000.0	1,006,710,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian			
1.02	10	01.00	03	002	Sosialisasi Regulasi dan Kualitas Layanan Informasi Publik			Kota Makassar		Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	100 Peserta	Tersosialisasinya Regulasi terkait Layanan Informasi Publik	100 %	26,286,000.0	32,610,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian			
1.02	10	01.00	03	003	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas PPID			Kota Makassar		Jumlah Peserta Bimtek PPID	110 Orang	Peningkatan Pengelolaan PPID	3 %	36,186,000.0	42,510,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian			
1.02	10	01.00	03	004	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik			Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah Kab/Kota Yang Dinilai Berdasarkan Layanan Keterbukaan Informasi Publik	24 Kab/Kota	Penilaian Hasil Pemeringkatan Layanan Keterbukaan Informasi Publik	100 %	132,286,000.0	138,610,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian			
1.02	10	01.00	03	005	Pengelolaan Informasi Publik			Kota Makassar		Jumlah Data Informasi Publik dari OPD	500 Informasi Publik	Keterbukaan Informasi Publik	100 %	69,386,921.0	75,746,973.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian			
1.02	10	01.00	03	006	Rumusan Kebijakan Teknis Daerah Terkait Layanan Yang Dikecualikan			Kota Makassar / Luar Kota Makassar Kota Makassar		Jumlah Dokumen hasil Rumusan Kebijakan Teknis Daerah terkait Layanan Informasi yang dikecualikan	1 Dokumen	Tersusunnya Kebijakan Teknis Daerah terkait Layanan Informasi yang dikecualikan	100 %	43,886,000.0	50,210,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian			
1.02	10	01.00	03	007	Monitoring dan Evaluasi PPID			Kota Makassar		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	4 Laporan	Pemantauan Layanan Informasi Publik	100 %	58,386,000.0	64,710,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian			
1.02	10	01.00	03	008	Pengembangan Sarana dan Prasarana PPID			Kota Makassar / Luar Kota Makassar Kota Makassar		Jumlah Infrastruktur Sistem Portal PPID	1 Sistem	Tercapainya Layanan Informasi yang berkualitas di Provinsi Sulawesi Selatan	100 %	97,386,000.0	103,710,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian			

1.02	10	01.00	03	009	Pengembangan Sarana dan Prasarana Integrasi Sistem			Kota Makassar			Jumlah e-aplikasi yang terintegrasi	1 e-aplikasi	Terlaksananya Sistem Informasi yang terintegrasi	100 %	122,386,000.0	128,710,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	10	01.00	04		PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK				% Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	50 %					569,487,881.0	590,595,542.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
									% Desiminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilakukan sesuai dengan Strategi komunikasi (STRAKOM)	50 %							
1.02	10	01.00	04	001	Peningkatkan Sumber Daya Komunikasi			Kota Makassar / Luar Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Ditingkatkan	50 Orang	Tersedianya Peningkatan Sumber Daya Komunikasi Publik	100 %	37,160,000.0	39,799,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	10	01.00	04	002	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Komunikasi Publik			Provinsi Sulawesi Selatan			Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Komunikasi Publik	24 Laporan	Terwujudnya Laporan Monitoring & Evaluasi Penyelenggaraan Komunikasi Publik	100 %	42,160,000.0	44,799,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	10	01.00	04	003	Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Media			Kota Makassar			Jumlah Mitra Media Dalam Pelaksanaan Publikasi	3 Media	Terlaksananya Pelaksanaan Kemitraan Media	100 %	41,660,000.0	44,299,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	10	01.00	04	004	Literasi Media Sosial			Kota Makassar			Jumlah Peserta yang mengikuti Literasi Pengguna Media Sosial	77 Orang	Terwujudnya hasil pemahaman Netizen yang Santun dalam Penggunaan Media Sosial	100 %	10,977,881.0	13,602,542.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	10	01.00	04	006	Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik			Kota Makassar / Luar Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pemanfaatan Komunikasi Publik	2 Laporan	Tersebar nya Informasi dan Komunikasi Publik melalui Media Komunikasi	100 %	123,160,000.0	125,799,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

1.02	10	01.00	0407	Gelar Aksi Pertunjukan Rakyat			Kota Makassar / Luar Kota Makassar Kota Makassar				Jumlah Gelar Aksi Pertunjukan Rakyat Yang Dilaksanakan	1 Pertunjukan	Tersebar nya Informasi dan Komunikasi Publik melalui Pelaksanaan Aksi Pertunjukan Rakyat Kabupaten/Kota	100 %	156,350,000.0	158,999,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	10	01.00	0408	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Kab/Kota Prov Sulsel			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	24 Kab/Kota	Cakupan Pengembangan & Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	100 %	23,860,000.0	26,499,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	10	01.00	0409	Pengelolaan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat			Kota Makassar / Luar Kota Makassar Kota Makassar				Jumlah Layanan Pengelolaan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	2 Layanan	Terlaksananya Pengelolaan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	100 %	134,160,000.0	136,799,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
<b>1.02</b>	<b>10</b>	<b>01.00</b>	<b>50</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>						<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>75 %</b>				<b>3,502,376,215.0</b>	<b>3,631,901,663.0</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian</b>
1.02	10	01.00	5003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kota Makassar				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	43 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	1,485,390,000.0	1,511,290,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	10	01.00	5005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Makassar				Jumlah ATK yang tersedia	82 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	410,528,100.0	436,438,100.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	10	01.00	5008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Makassar				Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	80 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	990,570,000.0	1,016,470,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	10	01.00	5009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kota Makassar				Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	84,458,115.0	110,363,563.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	10	01.00	5010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kota Makassar / Luar Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah perjalanan dinas	65 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	100 Orang	531,430,000.0	557,340,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

1.02	10	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %				1,169,464,711.0	1,272,109,422.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian		
1.02	10	01.00	5104	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kota Makassar				Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	42,064,711.0	62,589,422.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	10	01.00	5106	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kota Makassar				Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	22 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	537,540,000.0	558,070,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	10	01.00	5109	0	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	25 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	477,020,000.0	497,550,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	10	01.00	5110	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	57,320,000.0	77,850,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	10	01.00	5112	0	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Kota Makassar				Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	45 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	55,520,000.0	76,050,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	10	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %				222,150,999.0	224,838,679.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian		
1.02	10	01.00	5201	0	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Kota Makassar				Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	155 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	11,139,099.0	12,026,779.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	10	01.00	5202	0	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar				Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	71,870,000.0	72,770,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
												Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				

											Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	1 Dokumen							
											Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	4 Dokumen							
1.02	10	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD						Kota Makassar			Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	1 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	100 %	42,821,900.0	42,821,900.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
														Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	6 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %				
1.02	10	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan						Kota Makassar			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	15 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	96,320,000.0	97,220,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
<b>1.02</b>	<b>10</b>	<b>01.00</b>	<b>53</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>													<b>193,086,660.0</b>	<b>200,243,279.0</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian</b>	
1.02	10	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu						Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	390 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	193,086,660.0	200,243,279.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
<b>1.02</b>	<b>11</b>				<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>																
<b>1.02</b>	<b>11</b>	<b>01.00</b>			<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>													<b>20,556,816,814.51</b>	<b>22,207,547,695.05</b>		
<b>1.02</b>	<b>11</b>	<b>01.00</b>	<b>01</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK UKM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Prioritas)</b>	Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru dan Pengembangan Destinasi Wisata	Menurunnya kesenjangan antar lapisan dan antar wilayah												<b>9,917,900,000.0</b>	<b>11,294,900,000.0</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
1.02	11	01.00	01	001	Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan petani						Provinsi Sulawesi Selatan	# Maros Regency South Sulawesi ID		Jumlah masyarakat petani miskin	50 Orang	meningkatnya pengetahuan	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil	

									#Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto Balang Baru Tarowang Jeneponto Regency			yang mengikuti diklat kewirausahaan		para peserta untuk berwirausaha				dan Menengah
									#Desa Kalatiri Kec.Burau Kab.Luwu Timur Burau East Luwu Regency South Sulawesi									
									#Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Pabiringa Binamu Jeneponto Regency									
1.02	11	01.00	01	002	Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi nelayan			Provinsi Sulawesi Selatan	# P. Kondingareng Ujung Tanah Kota Makassar			Jumlah masyarakat nelayan miskin yang mengikuti diklat wirausaha	50 Orang	Meningkatnya pengetahuan para peserta untuk berwirausaha	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
									#kelurahan benteng selatan, Kecamatan benteng selatan, Kabupaten selayar South Benteng Benteng Selayar Regency									
									#kepulauan sangkarrang Makassar Makassar City South Sulawesi									
1.02	11	01.00	01	003	Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan			Provinsi Sulawesi Selatan	# Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan			Jumlah peserta masyarakat miskin kaum perempuan yang mengikuti diklat wirausaha	50 Orang	Meningkatnya pengetahuan kaum perempuan dalam berwirausaha	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
									# Ujung Pare-Pare City South Sulawesi									
									#Kota Makassar Makassar Makassar City South Sulawesi									

									#Makassar Makassar Makassar City South Sulawesi										
									#panaikang Panakkukang Kota Makassar Sulawesi Selatan										
1.02	1 1	01.00	0 1	0 0 4	Pelatihan kewirausahaan bagi pelajar/siswa			Provinsi Sulawesi Selatan	# Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan #Kota Makassar Makassar Makassar City South Sulawesi			Jumlah pelajar/siswa yang mengikuti diklat wirausaha	150 Orang	Meningkatnya pengetahuan peserta dalam berwirausaha	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	0 1	0 0 5	Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi purnabakti			Provinsi Sulawesi Selatan	#kota makassar Makassar Makassar City South Sulawesi #sudiang Biring Kanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan			Jumlah purnabakti yang mengikuti diklat kewirausahaan	150 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan para peserta dalam mengelola usaha	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	0 1	0 0 7	Pendidikan dan pelatihan bagi pendamping KUMKM			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah pendamping yang mengikuti diklat	72 Orang	Meningkatnya pengetahuan pendamping dalam memberi solusi kepada masyarakat yang didampingi	100 %	1,232,900,000.0	1,232,900,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	0 1	0 0 8	Sout Sulawesi kreatif Hub			Kota Makassar				Jumlah sarana dan prasarana pendukung SSCH yang yang diadakan	6 Jenis	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kreativitas yang tersedia	100 %	3,500,000,000.0	4,000,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	0 1	0 0 9	Pengembangan sarana produksi KUMKM			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah dukungan sarana produksi yang diadakan	1 Unit	Meningkatnya peluang dan pangsa pasar hasil produk KUMKM	100 %	4,685,000,000.0	5,562,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
<b>1.02</b>	<b>1 1</b>	<b>01.00</b>	<b>0 2</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA DAN PROMOSI PRODUK UMKM (Prioritas)</b>					<b>Cakupan promosi produk UMKM pada Rest Area (Prioritas)</b>	<b>10 Produk</b>				<b>900,000,000.0</b>	<b>900,000,000.0</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>		
1.02	1 1	01.00	0 2	0 0 1	Bimbingan Tehnis peningkatan daya saing produk dan legalitas usaha			Provinsi Sulawesi Selatan	#Kota Makassar Makassar Makassar City South Sulawesi			Jumlah pengelola yang mengikuti bimtek	50 Orang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk yang diterima pasar	100 %	300,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	



1.02	1 1	01.00	0 2	0 0 2	Pameran Promosi produk unggulan UMKM dalam dan luar negeri			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah produk yang diikutkan dalam pameran/pra	50 Produk	Meningkatnya pemasaran hasil produk UMKM	100 %	300,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	1 1	01.00	0 2	0 0 3	Workshop Peningkatan kualitas desain kemasan produk UMKM			Provinsi Sulawesi Selatan	# Makassar Kota Makassar # Makassar Makassar City South Sulawesi		Jumlah peserta yang memiliki produk yang mengikuti workshop	50 Orang	Meningkatnya UMKM yang mempunyai desain kemasan	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	1 1	01.00	0 2	0 0 4	Bimbingan teknis pengembangan usaha melalui kemitraan, dan pemasaran produk orientasi ekspor			Provinsi Sulawesi Selatan	# Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan		Jumlah UMKM yang mengikuti bimtek	50 Orang	Meningkatnya produk UMKM yang telah bermitra dengan kualitas ekspor	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	1 1	01.00	0 2	0 0 5	Pelatihan vocational berbasis e-commerce			Provinsi Sulawesi Selatan	# Bulukumba Regency South Sulawesi ID		Jumlah pengelola UMKM yang mengikuti diklat e-commerce	50 Orang	Meningkatnya penggunaan e-commerce dikalangan UMKM	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	1 1	01.00	0 3		<b>PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF DAN PENGEMBANGAN PRODUK PEMASARAN BAGI KOPERASI DAN UMKM</b>					Jumlah KUMKM yang terfasilitasi sarana dan prasarana	10 Unit			300,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
										Jumlah produk baru yang terfasilitasi perizinan	5 Produk						
1.02	1 1	01.00	0 3	0 0 1	Pendampingan penilaian Koperasi berprestasi dan tokoh Koperasi penerima award Koperasi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah penerima penghargaan Koperasi berprestasi dan tokoh Koperasi penerima award	20 Orang/Koperasi	Meningkatnya jumlah penerima penghargaan dan tokoh Koperasi penerima award	100 %	175,000,000.0	175,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	1 1	01.00	0 3	0 0 2	Pengembangan dan penguatan kelembagaan Koperasi wanita			Provinsi Sulawesi Selatan	# Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan		Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan penguatan kelembagaan Koperasi wanita	100 Orang	Meningkatnya jumlah Koperasi wanita yang mengikuti pengembangan dan penguatan kelembagaan	100 %	125,000,000.0	125,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	1 1	01.00	0 4		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA PRODUKTIF BAGI KUMKM</b>					% Jumlah KUMKM yang terfasilitasi kelembaga Keuangan	20 %			775,000,000.0	775,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
										% Pengelola yang terfasilitasi diklat	20 %						

1.02	1 1	01.00	0 4	0 0 1	Bimbingan teknis pengembangan permodalan usaha Koperasi			Provinsi Sulawesi Selatan	# Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan			Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis pengembangan permodalan usaha Koperasi	50 Orang	Meningkatnya pengetahuan peserta bimtek	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	1 1	01.00	0 4	0 0 2	Pembinaan Koperasi jasa dan produksi dengan lembaga keuangan			Provinsi Sulawesi Selatan	# Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan #kota makassar Makassar Makassar City South Sulawesi			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Koperasi jasa dan produksi	50 Orang	Meningkatnya pengetahuan peserta pembinaan Koperasi jasa dan produksi	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	1 1	01.00	0 4	0 0 7	Pelatihan ekonomi produktif (UEP) bagi masyarakat pesisir/nelayan			Provinsi Sulawesi Selatan	# Barrang Caddi Ujung Tanah Kota Makassar #Kel Bontorannu Mariso Kota Makassar Sulawesi Selatan #kepulauan sangkarrang Makassar Makassar City South Sulawesi			Jumlah masyarakat pesisir/nelayan yang mengikuti pelatihan	50 Orang	Meningkatnya pengetahuan peserta dalam pengembangan usaha ekonomi produktif	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	1 1	01.00	0 4	0 0 9	Pemanfaatan produk unggulan dengan pendekatan OVOP melalui Koperasi			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah pengelola Koperasi yang mengikuti produk unggulan dengan pendekatan OVOP	50 Orang	Meningkatnya pengetahuan pengembangan produk unggulan dengan pendekatan OVOP melalui Koperasi	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	1 1	01.00	0 4	0 1 0	Pengembangan usaha kemitraan Koperasi dengan BUMN/BUMD/BUMS			Provinsi Sulawesi Selatan	# Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan #kota makassar Makassar Makassar City South Sulawesi			Jumlah pengelola Koperasi yang mengikuti pengembangan usaha kemitraan dengan BUMN/BUMD/BUMS	75 Orang	Meningkatnya pengetahuan peserta pengembangan usaha kemitraan Koperasi dengan BUMN/BUMD/BUMS	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	1 1	01.00	0 4	0 1 2	Temu kemitraan pemasaran produk Koperasi			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah pengelola Koperasi yang mengikuti temu kemitraan pemasaran produk Koperasi	50 Orang	Meningkatnya pengetahuan peserta temu kemitraan pemasaran produk Koperasi	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1.02	1 1	01.00	0 4	0 1 5	Temu konsultasi dan evaluasi kinerja dan koordinator PPKL			Kota Makassar				Jumlah peserta yang mengikuti temu konsultasi dan evaluasi kinerja PPKL dan koordinator PPKL se Sulawesi Selatan	53 Orang	Meningkatnya pengetahuan PPKL dan Koordinator PPKL dalam melaksanakan penyuluhan	100 %	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1.02	1 1	01.00	0 4	0 1 6	Bimbingan teknis standarisasi penyuluhan dan advokasi Koperasi			Provinsi Sulawesi Selatan	#kota makassar Makassar City South Sulawesi			Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis standarisasi penyuluhan dan advokasi Koperasi	50 Orang	Terciptanya standarisasi penyuluhan dan advokasi Koperasi di Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1.02	1 1	01.00	0 5		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI DAN UMKM					Jumlah Koperasi aktif	100 Unit					1,400,000,000.0	1,400,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
						Jumlah Usaha Kecil menjadi usaha Menengah	50 Unit													
						Jumlah Koperasi skala besar	2 Unit													
1.02	1 1	01.00	0 5	0 0 1	Temu konsultasi pembenahan Koperasi tidak aktif			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah peserta temu konsultasi pembenahan Koperasi tidak aktif	50 Orang	Meningkatnya jumlah Koperasi yang dibenahi	100 %	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1.02	1 1	01.00	0 5	0 0 3	Bimbingan teknis penyusunan laporan RAT			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah pengurus/pengelola yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan laporan RAT	100 orang	Meningkatnya jumlah pengurus yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan laporan RAT	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1.02	1 1	01.00	0 5	0 0 6	Pengembangan Koperasi Primer dan sekunder			Provinsi Sulawesi Selatan	#kota makassar Makassar City South Sulawesi			Jumlah pengelola koperasi primer dan sekunder provinsi yang mengikuti pengembangan	100 orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan koperasi primer dan sekunder	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1.02	1 1	01.00	0 5	0 1 0	Temu konsultasi pencapaian koperasi skala besar			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah peserta yang mengikuti temu konsultasi pencapaian koperasi skala besar	30 orang	Meningkatnya temu konsultasi pencapaian koperasi skala besar	100 %	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		

1.02	1 1	01.00	0 5	0 1 2	Bimbingan teknis peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan kepatuhan kelembagaan syariah			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan kepatuhan kelembagaan syariah	50 orang	Meningkatnya pengetahuan peserta bimbingan teknis peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan kepatuhan kelembagaan syariah	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	0 5	0 1 4	Pengawasan koperasi di bidang pelaksanaan kegiatan organisasi dan kelengkapan legalitas			Provinsi Sulawesi Selatan	#kota makassar Makassar City South Sulawesi #kota Makassar Makassar City South Sulawesi		Jumlah koperasi yang telah diawasi pelaksanaan kegiatan organisasi dan kelengkapan legalitas usaha	50 orang	Meningkatnya pengetahuan pengurus dan pengawasan koperasi tentang pengawasan dan kepatuhan	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	0 5	0 1 9	Bimbingan teknis penyusunan neraca pemisahan USP/KSP			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pengelola KPS/USP yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan dan pemisahan neraca	50 orang	Meningkatnya pengelolaan pemisahan neraca KSP/USP koerasi	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	0 5	0 2 0	Diklat SKKNI			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta yang mengikuti diklat SKKNI	25 orang	Pengelola koperasi	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	0 5	0 2 5	Bimbingan teknis rehabilitasi terhadap koperasi yang menerima sanksi			Provinsi Sulawesi Selatan	#kota makassar Makassar Makassar City South Sulawesi		Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti bimbingan teknis rehabilitasi terhadap koperasi yang menerima sanksi	50 orang	Meningkatnya jumlah pengurus dan pengawas dalam pemahaman rehabilitasi terhadap koperasi yang menerima sanksi	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	0 5	0 2 8	Bimbingan teknis penyelesaian kasus internal pra penyerahan penegakan hukum			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti bimbingan teknis penyelesaian kasus	50 orang	Meningkatnya jumlah pengelola koperasi yang mengikuti bimbingan teknis penyelesaian kasus koperasi	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

1.02	1 1	01.00	0 5	0 2 9	Workshop pengembangan kewirausahaan industri kreatif			Provinsi Sulawesi Selatan	#kota makassar Makassar City South Sulawesi			Jumlah peserta workshop pengembangan kewirausahaan industri kreatif	50 Orang	Meningkatnya keterampilan kewirausahaan industri kreatif	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
									#Kota Makassar Makassar City South Sulawesi									
									#makassar Makassar Makassar City South Sulawesi									
1.02	1 1	01.00	0 5	0 3 4	Diklat pembuatan akte dan badan hukum Koperasi			Provinsi Sulawesi Selatan	# Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan			Jumlah pengelola yang mengikuti diklat	100 Orang	Meningkatnya kompetensi pengelola Koperasi	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	1 1	01.00	0 5	0 3 8	Diklat penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi			Provinsi Sulawesi Selatan	# Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan			Jumlah peserta yang mengikuti diklat penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus	100 Orang	Meningkatnya kompetensi pengelola Koperasi	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
									#kota makassar Makassar Makassar City South Sulawesi									
1.02	1 1	01.00	0 5	0 4 2	Pelatihan penilai kesehatan Koperasi			Provinsi Sulawesi Selatan	# Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penilai kesehatan Koperasi	50 Orang	Meningkatnya kompetensi pengelola Koperasi	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	1 1	01.00	5 0		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>							<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>4,750,000,000.0</b>	<b>4,750,000,000.0</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
1.02	1 1	01.00	5 0	0 0 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar				Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100 Jenis	1,500,000,000.0	1,500,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02	1 1	01.00	5 0	0 0 2	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar				Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	12 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	12 Unit	25,000,000.0	25,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
												Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	35 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	35 Unit			

1.02	1 1	01.00	5 0	0 0 3	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	75 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	2,500,000,000.0	2,500,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	5 0	0 0 5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar			Jumlah ATK yang tersedia	25 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	175,000,000.0	175,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	5 0	0 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	16 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	5 0	0 0 8	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	12 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	5 0	0 1 0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Luar Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perjalanan dinas	150 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	50 Orang	350,000,000.0	350,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
<b>1.02</b>	<b>1 1</b>	<b>01.00</b>	<b>5 1</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>				<b>100 %</b>	<b>1,884,916,814.51</b>	<b>2,158,647,695.05</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	
1.02	1 1	01.00	5 1	0 0 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	4 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	900,000,000.0	1,100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	5 1	0 0 6	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	47 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	500,000,000.0	500,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	5 1	0 0 9	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	4 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	284,916,814.51	358,647,695.05	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

1.02	1 1	01.00	5 1	0 1 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	5 2		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %				100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	5 2	0 0 5	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kota Makassar			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	4 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	5 3		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					% ASN berkinerja sangat baik	100 %				529,000,000.0	529,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	5 3	0 0 1	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar			Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian nya	150 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
										Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	6 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %					
1.02	1 1	01.00	5 3	0 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapan nya yang tersedia	300 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapan nya sesuai kebutuhan	100 %	195,000,000.0	195,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	5 3	0 0 3	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari- hari tertentu yang tersedia	90 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari- hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	84,000,000.0	84,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1 1	01.00	5 3	0 0 8	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan			Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang- undangan	200 Orang	Peningkatan Jumlah aparatur yang memahami peraturan perundang- undangan	200 Orang	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.02	1				<b>Penanaman Modal</b>													
1.02	1 2	01.00			<b>Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>										9,247,960,000.0	7,580,515,000.0		

1.02	1 2	01.00	0 1		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>					Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	13.87 Triliun				762,429,656.0	783,991,544.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
1.02	1 2	01.00	0 1	0 0 1	Pemantauan perkembangan penanaman modal			Provinsi Sulawesi Selatan	# Bantaeng Bantaeng Regency South Sulawesi ID #11 kecamatan East Luwu Regency South Sulawesi ID #Kecamatan Makale Makale Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan			Jumlah Perusahaan yang terpantu di Kab/Kota	50 Perusaha an	Terlaksananya pemantauan terhadap aktifitas penanaman modal di Sulsel	100 %	529,697,656.0	542,009,544.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
1.02	1 2	01.00	0 1	0 0 2	Pembinaan perusahaan penanaman modal			Provinsi Sulawesi Selatan	# Sinjai Regency South Sulawesi ID #11 kecamatan East Luwu Regency South Sulawesi ID #Bantaeng Bantaeng Regency South Sulawesi ID #Kecamatan Makale Makale Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan			Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang terfasilitasi di Kab/Kota	10 Perusaha an	Terfasilitasiny a perusahaan PMDN/PMA yang memiliki hambatan/pe rmasalahan	100 %	141,083,200.0	150,333,200.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
1.02	1 2	01.00	0 1	0 0 3	Pengawasan ketentuan pelaksanaan penanaman modal			Provinsi Sulawesi Selatan	#Bantaeng Bantaeng Regency South Sulawesi ID #Kecamatan Cina Desa Arasoe, PGB Arasoe. Kecamatan Libureng, Pabrik Gula Camming Bone Regency South Sulawesi ID #Kecamatan Makale Makale Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan #Kecamatan Nuha, Wotu, Malili East Luwu Regency South Sulawesi ID			Jumlah Perusahaan PMA/PMDN di Kab/Kota yang di awasi	8 Perusaha an	Terlaksananya pengawasan terhadap perusahaan PMDN/PMA di Kab/Kota	100 %	91,648,800.0	91,648,800.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	



1.02	1 2	01.00	0 2		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL					Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	821 Proyek					1,222,152,945.0	1,269,285,992.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
1.02	1 2	01.00	0 2	0 0 7	Pembuatan Sarana Promosi Investasi			Toraja utara, Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah sarana dan prasarana promosi yang disiapkan	1 Paket	Tersedianya paket sarana dan prasarana promosi	100 %	58,005,000.0	65,382,682.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
												Jumlah media promosi elektronik	2 Unit	Tersedianya media promosi	100 10					
1.02	1 2	01.00	0 2	0 0 8	Pengembangan Kerjasama Investasi Dalam dan Luar Negeri			Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Kesepakatan Kerjasama	1 Kesepakat an	Meningkatny a realisasi PMDN/PMA	100 %	97,845,500.0	105,223,183.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
								Provinsi Sulawesi Selatan												
1.02	1 2	01.00	0 2	0 1 0	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal/Investasi Daerah			Dalam dan Luar Negeri	# Jakarta ID				Jumlah pameran	10 Pameran	Meningkatny a minat investasi di Sulawesi Selatan	100 %	1,066,302,445.0	1,098,680,127.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
									# Sinjai Regency South Sulawesi ID				Jumlah temu usaha	2 Temu usaha	Meningkatny a minat investasi di Sulawesi Selatan	100 %				
									#18 Kecamatan Gowa Regency South Sulawesi ID				Jumlah workshop promosi	1 Workshop	Meningkatny a pemahaman aparap tentang promosi PM	100 %				
									#Jakarta Bantaeng Regency South Sulawesi ID											
									#Kecamatan Makale Makale Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan											
									#makassar Makassar Makassar City South Sulawesi											
									#Mega mall Batam Batam City Riau Islands ID											
1.02	1 2	01.00	0 3		PROGRAM PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL					Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	13 Orang/proye k				692,270,915.0	724,397,299.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
1.02	1 2	01.00	0 3	0 0 2	Penyusunan Mitra Bisnis Potensial Sulsel			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah buku	100 Buku	Tersedianya Buku Mitra Bisnis Potensial Sulsel	100 %	50,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		

1.02	1 2	01.00	0 3 5	0 0	Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal			Kota Makassar				Jumlah kebijakan penanaman modal	2 Regulasi	Tersedianya regulasi penanaman modal dan CSR	100 %	138,783,100.0	166,783,000.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
1.02	1 2	01.00	0 3 7	0 0	Pengembangan Aparat DPMPPTSP Provinsi, Kab/Kota dan Dunia Usaha			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Peserta dari DPMPPTSP provinsi, kab/kota, dan dunia usaha	100 Orang	Terselenggaranya kegiatan pengembangan aparat DPMPPTSP provinsi, kab/kota, dan dunia usaha	100 %	154,651,815.0	182,217,000.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
1.02	1 2	01.00	0 3 8	0 0	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Potensi Penanaman Modal			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah website	1 Website	Meningkatnya pemanfaatan website DPMPPTSP Prov. Sulsel oleh masyarakat dan dunia usaha dalam mengakses informasi tentang Prov. Sulawesi Selatan	100 %	348,836,000.0	300,397,299.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
												Jumlah buku	200 Buku	Meningkatnya informasi profil investasi	100 %				
												Jumlah peta sektor potensi unggulan	8 Peta	Meningkatnya informasi peta sektor potensi unggulan	100 %				
1.02	1 2	01.00	0 4		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERIZINAN</b>					<b>Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN</b>	<b>15 %</b>				<b>1,081,788,499.0</b>	<b>1,236,720,879.0</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>		
1.02	1 2	01.00	0 4 1	0 0	Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	25000 Dokumen izin dan non izin	Tersusunnya administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan	100 %	664,008,599.0	790,220,979.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
1.02	1 2	01.00	0 4 3	0 0	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu			Kabupaten Sinjai				Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diproses	13000 Izin dan Non Izin	Meningkatnya realisasi PMDN/PMA	100 %	238,073,400.0	258,796,400.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
								Kabupaten Toraja Utara				Tersedianya Mall Pelayanan Publik	1 Unit	Tersedianya sarana dan prasarana	50 %				

												Pelayanan Perizinan Mobile di Rest Area	2 Unit	Tersedianya sarana prasarana perizinan mobile	100 %				
1.02	1 2	01.00	0 4	0 0 4	Pengaduan Perizinan Penanaman Modal			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah pengaduan penanaman modal	24 Pengaduan	Terselesaikannya pengaduan penanaman modal	100 %	179,706,500.0	187,703,500.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
<b>1.02</b>	<b>1 2</b>	<b>01.00</b>	<b>5 0</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>75 %</b>					<b>1,990,176,170.0</b>	<b>2,127,454,378.0</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>	
1.02	1 2	01.00	5 0	0 0 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Makassar				Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	3 Jenis	514,104,970.0	530,000,200.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
1.02	1 2	01.00	5 0	0 0 3	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kota Makassar				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	18 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	644,400,000.0	665,783,178.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
1.02	1 2	01.00	5 0	0 0 5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Makassar				Jumlah ATK yang tersedia	130 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	313,972,200.0	348,972,000.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
1.02	1 2	01.00	5 0	0 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Makassar				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	50 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	27,974,000.0	37,974,000.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
1.02	1 2	01.00	5 0	0 0 8	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Makassar				Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	3 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	205,725,000.0	205,725,000.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
1.02	1 2	01.00	5 0	0 1 0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kota Makassar				Jumlah perjalanan dinas	10 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	100 Orang	284,000,000.0	339,000,000.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
<b>1.02</b>	<b>1 2</b>	<b>01.00</b>	<b>5 1</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>75 %</b>					<b>2,791,376,212.0</b>	<b>745,229,801.0</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>	
1.02	1 2	01.00	5 1	0 0 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kota Makassar				Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	1,923,020,000.0	44,540,788.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
1.02	1 2	01.00	5 1	0 0 9	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	20 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	617,309,212.0	427,309,212.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

1.02	1 2	01.00	5 1	0 1 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	32 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	251,047,000.0	273,379,801.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
1.02	1 2	01.00	5 2		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	80 %				245,572,887.0	254,674,870.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
1.02	1 2	01.00	5 2	0 0 1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	50 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	19,202,500.0	19,202,500.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
1.02	1 2	01.00	5 2	0 0 2	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	142,328,500.0	142,328,500.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
										Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	1 Dokumen					
										Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	0 Dokumen					
										Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	4 Dokumen					
1.02	1 2	01.00	5 2	0 0 5	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kota Makassar			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	84,041,887.0	93,143,870.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
1.02	1 2	01.00	5 3		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					% ASN berkinerja sangat baik	85 %				462,192,716.0	438,760,237.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
1.02	1 2	01.00	5 3	0 0 1	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Kota Makassar			Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian nya	82 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparut OPD	100 %	284,792,716.0	206,360,237.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
										Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	9 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %					

1.02	1 2	01.00	5 3	0 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	82 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	177,400,000.0	232,400,000.0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
1.02	1				<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>													
1.02	1 3	01.00			Dinas Kepemudaan dan Olahraga										36,744,119,026.59	38,989,452,845.02		
1.02	1 3	01.00	0 1		PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN PRAMUKA					% Organisasi pemuda yang aktif	9.81 %				1,090,002,301.59	1,490,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
										Jumlah lembaga pramuka yang aktif	25 Kwarda/Kwarcab							
1.02	1 3	01.00	0 1	0 0 2	Temu Koordinasi Lembaga Kemahasiswaan, Kepemudaan dan Dewan Kerja Kepramukaan			Kota Makassar			Jumlah peserta unsur dewan kerja daerah kepramukaan	25 Kwarda/Kwarcab	Adanya kesefahaman dan rekomendasi dewan kerja daerah kepramukaan	1 Laporan	100,000,000.0	105,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
										Jumlah peserta unsur lembaga kepemudaan	11 Forum	Adanya rekomendasi lembaga kepemudaan	1 Laporan					
										Jumlah lembaga kemahasiswaan	10 BEM	Adanya rekomendasi lembaga kemahasiswaan	1 Laporan					
1.02	1 3	01.00	0 1	0 0 5	Pembinaan Lembaga Kepemudaan dengan Pola Kemitraan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah lembaga kepemudaan	49 OKP	Meningkatnya peran serta OKP dalam pembangunan	100 %	305,002,102.0	425,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
										Jumlah peserta dialog pemuda	200 orang	Adanya kesepakatan dan rekomendasi	1 laporan					
1.02	1 3	01.00	0 1	0 1 0	Pitaran Pelatih Kepramukaan dan Kemah Bakti Pramuka			Kota Makassar			Jumlah peserta pitaran pelatih kepramukaan	100 Orang	Meningkatnya kapasitas pelatih pramuka	100 %	100,000,100.0	320,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
										Jumlah peserta kemah bakti pramuka	200 Orang	Meningkatnya wawasan kepanduan pemuda	100 %					
1.02	1 3	01.00	0 1	0 1 1	Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda			Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pameran hasil karya pemuda	24 kab/kota	Terpublikasinya hasil karya pemuda	100 %	335,000,099.59	340,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
										Jumlah lomba pada pekan raya pemuda	7 event	Tersalurkannya kreativitas pemuda	100 %					

											Jumlah peserta pekan raya pemuda	1000 orang	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	100 %					
											Jumlah pemuda hasil seleksi Kapal Pemuda Nusantara	10 orang	Terseleksinya pemuda peserta kapal pemuda nusantara	100 %					
											Jumlah pemuda hasil seleksi pertukaran pemuda antar negara	5 Orang	Terseleksinya pemuda peserta pertukaran pemuda antar negara	100 %					
1.02	13	01.00	01	02	Peningkatan IPTEK dan Mental Spiritual Pemuda			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pengembangan moral etika	100 Orang	Peningkatan kapasitas peserta pengembangan moral etika	100	250,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
											Jumlah peserta pelatihan IT	300 Orang	Peningkatan kapasitas peserta pelatihan IT	100					
1.02	13	01.00	02		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (Prioritas)</b>				<b>% Wirausaha muda</b>	<b>18.31 %</b>					<b>2,159,000,301.0</b>	<b>2,435,000,000.0</b>	<b>Dinas Kepemudaan dan Olahraga</b>		
									<b>Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri dan berdaya saing (Prioritas)</b>	<b>950 Pemuda</b>									
1.02	13	01.00	02	01	Seleksi, Pemusatan Pelatihan Paskibraka dan Studi Wawasan			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Paskibraka Sulawesi Selatan	73 Orang	Terlaksananya upacara penaikan dan penurunan bendera pada HUT RI	100 %	1,500,000,000.0	1,505,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
								Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta seleksi Paskibraka	150 Orang	Terpilihnya calon Paskibraka Sulawesi Selatan	75 Orang					
											Jumlah peserta studi wawasan	110 Orang	Meningkatnya wawasan kebangsaan Tim Paskibraka	100 %					
1.02	13	01.00	02	05	Pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda			Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pengembangan kepemimpinan pemuda	70 orang	Tersedianya pemuda yang memiliki basic kepemimpinan	100 %	217,000,301.0	270,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
											Jumlah pemuda pelopor hasil seleksi	5 orang	Terpilihnya pemuda Sulawesi Selatan pada pemilihan pemuda pelopor Tk Nasional	100 %					

											Jumlah peserta kesukarelawan pemuda	200 orang	Adanya pemuda kader	100 %				
1.02	13	01.00	02	006	Pembinaan dan Pengelolaan Kewirausahaan Pemuda			Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan	# Jalan Stadion Kalegowa Tetebatu Pallangga		Jumlah kelompok wirausaha muda yang dibina	25 kelompok	Adanya kelompok wirausaha muda yang inovatif	100 %	442,000,000.0	660,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
									# Polewali Gantarang Bulukumba Regency		Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	200 orang	Bertambahnya jumlah wirausaha muda	100 %				
									#Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan		Jumlah peserta lomba wirausaha muda	120 orang	Terpilihnya peserta wirausaha muda ke Tk. Nasional	100 %				
									#Kec. Malili East Luwu Regency South Sulawesi ID									
									#Kelurahan Macanang Kec. Tanete Riattang Barat									
									#Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi ID									
									#Rantepao Toraja Utara									
1.02	13	01.00	03		<b>PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN</b>					<b>Cakupan atlet pelajar berprestasi</b>					<b>2,310,500,100.0</b>	<b>4,630,000,000.0</b>	<b>Dinas Kepemudaan dan Olahraga</b>	
										<b>Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan</b>								
1.02	13	01.00	03	011	Gebyar Olahraga Pendidikan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta gebyar	500 Orang	Meningkatnya budaya olahraga masyarakat	100 %	95,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
1.02	13	01.00	03	012	Peningkatan Pembinaan Olahraga Pendidikan			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah atlet POPNAS Sulawesi Selatan	0 atlet	Peringkat Nasional atlet pelajar Sulawesi Selatan	0 besar nasional	1,825,000,000.0	2,300,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
											Jumlah atlet POPWIL Sulawesi Selatan	95 atlet	Tersedianya atlet POPNAS Sulawesi Selatan	100 %				
											Jumlah peserta Liga Pendidikan usia pelajar	24 kab/kota	Meningkatnya bibit atlet pelajar	100 %				

											Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada POPDA	7 cabor	Tersedianya atlet persiapan seleksi POPWIL	100 %					
											Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada KEJURDA	0 cabor	Tersedianya atlet persiapan seleksi POPNAS	0 %					
1.02	1 3	01.00	0 3	0 1 3	Pemberian Penghargaan Atlet Prestasi Daerah				Kota Makassar		Jumlah atlet dan pelatih berprestasi penerima penghargaan Tk. Internasional	0 Atlet dan pelatih	Peningkatan kesejahteraan atlet dan pelatih berprestasi tingkat internasional	0 %	50,000,000.0	1,580,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
											Jumlah atlet dan pelatih berprestasi penerima penghargaan Tk. Nasional	30 Atlet dan pelatih	Peningkatan kesejahteraan atlet dan pelatih berprestasi tingkat nasional	100 %					
1.02	1 3	01.00	0 3	0 1 4	Pembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus				Luar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah atlet Sulawesi Selatan pada PEPARPENAS	70 atlet		0	340,500,100.0	650,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
											Jumlah atlet penyandang Tuna Grahita	50 atlet		0					
											Jumlah peserta Senam Kebugaran Jasmani	24 kab/kota	Terpilihnya peserta SKJ ke Tk. Nasional	15 orang					
											Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada PEPARPEDA	6 CABOR	Terpilihnya atlet persiapan seleksi PEPARPENAS	100 %					
											Jumlah event yang dilombakan pada festival olahraga tradisional	7 event	Terpilihnya peserta festival olahraga tradisional pada Tk. Nasional	1 kelompok					
											Jumlah peserta invitasi olahraga tradisional	0 orang	Terpilihnya peserta invitasi olahraga tradisional pada Tk. Nasional	0 %					
1.02	1 3	01.00	0 4		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA					Cakupan pembinaan olahraga	34 %				23,885,970,680.0	2,665,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
										Jumlah atlet berprestasi	359 Atlet								



										Jumlah prestasi olahraga	27 Cabor								
										Cakupan pelatih yang bersertifikasi	17.36 %								
1.02	1 3	01.00	0 4	0 1 1	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi			Papua				Jumlah cabang olahraga daerah yang dibina	47 Cabang olahraga	Meningkatnya kesiapan tanding atlet	100 %	20,780,000,000.0	1,175,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
												Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada PON	44 Cabang olahraga	Peringkat nasional Sulawesi Selatan	10 Besar nasional				
												Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada PRA PON	0 Cabang olahraga	Meningkatnya prestasi atlet Sulsel	0 %				
												Jumlah atlet PPOD yang diseleksi	1226 atlet	Jumlah atlet hasil seleksi	613				
												Jumlah pelatih PPOD yang diseleksi	216 pelatih	Jumlah pelatih PPOD hasil seleksi	108				
1.02	1 3	01.00	0 4	0 1 2	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Disabilitas		Indonesia					Jumlah cabang olahraga disabilitas yang dilombakan	0 Cabang olahraga	Meningkatnya prestasi atlet disabilitas	0 %	2,215,970,580.0	500,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
												Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada PEPARNAS/K EURNAS	10 Cabang olahraga	Peringkat Nasional Sulawesi Selatan	10 Besar nasional				
1.02	1 3	01.00	0 4	0 1 4	Peningkatan Kompetensi Tenaga Keolahragaan		Kota Makassar					Jumlah tenaga keolahragaan yang mengikuti uji kompetensi	30 orang	Tersedianya tenaga keolahragaan yang memenuhi standar	100 %	290,000,100.0	390,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
												Jumlah wasit yang mengikuti pelatihan berlisensi	90 wasit	Tersedianya wasit olahraga yang memenuhi standar	100 %				
												Jumlah pelatih yang mengikuti pelatihan berlisensi	90 pelatih	Tersedianya pelatih olahraga yang memenuhi standar	100 %				
												Jumlah peserta peningkatan kapasitas pelatih fisik	50 orang	Tersedianya pelatih olahraga yang memenuhi standar	100 %				

1.02	1 3	01.00	0 4	0 1 5	Pengembangan dan Event Olahraga Unggulan Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan	# Kec. Barru Kabupaten Barru Sulawesi Selatan		Jumlah event olahraga unggulan daerah	10 Event	Peningkatan prestasi atlet	100 %	600,000,000.0	600,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
									# Pangkajene Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi		Jumlah cabang olahraga unggulan daerah	24 Cabang	Peningkatan jumlah cabang olahraga unggulan daerah	100 %				
									#Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan									
									#Kelurahan Biringere North Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi									
									#Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi ID									
									#Mattiro Bulu Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan									
									#Rantepao Toraja Utara North Toraja Regency South Sulawesi ID									
1.02	1 3	01.00	0 5		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN					Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	85 %				2,255,500,200.0	21,792,188,308.02	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
										Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pemuda	85 %							
1.02	1 3	01.00	0 5	0 0 3	Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Kepemudaan			Kota Makassar	#Wisma Pemuda Sudiang, Makassar Sudiang Biring Kanaya Makassar City		Jumlah prasarana kepemudaan yang direhab	1 Unit	Adanya prasarana kepemudaan yang representatif	100 %	200,000,000.0	500,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
1.02	1 3	01.00	0 5	0 0 4	Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kepemudaan			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan sarana dan prasarana yang diadakan	10 Jenis	Tersedianya perlengkapan sarana dan prasarana kepemudaan yang layak	100 %	50,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

1.02	1 3	01.00	0 5 0 6	0	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga			Kota Makassar			Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	10 Unit	Tersedianya prasarana olahraga yang representatif	100 %	75,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	1 3	01.00	0 5 0 7	0	Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Olahraga			Kota Makassar	#GOR Sudiang Makassar Makassar City South Sulawesi		Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang direhab	0 Unit	Tersedianya prasarana olahraga yang representatif	0 %	125,000,000.0	155,188,308.02	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	1 3	01.00	0 5 0 8	0	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Asrama PPLP			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga Asrama PPLP yang diadakan	15 Unit	Terpenuhinya kebutuhan Asrama Atlet PPLP	100 %	75,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	1 3	01.00	0 5 0 9	0	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Asrama PPLP			Kota Makassar			Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga Asrama PPLP	10 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga atlet PPLP	100 %	50,000,000.0	0.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	1 3	01.00	0 5 1 1	0	Lanjutan Pembangunan Stadion Barombong			Kota Makassar			Jumlah gedung stadion yang dibangun	1 Unit	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	100 %	845,500,100.0	19,501,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	1 3	01.00	0 5 1 5	0	Pengelolaan dan Pengembangan UPT Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan			Kota Makassar			Jumlah layanan UPT Sarana Prasarana	4 Jenis	Persentase ketersediaan kebutuhan UPT Sarana Prasarana	100 %	100,000,000.0	110,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	1 3	01.00	0 5 1 8	0	Pemeliharaan Stadion dan Lapangan Olahraga			Kota Makassar			Jumlah stadion yang dipelihara	3 Unit	Tersedianya stadion yang representatif	100 %	255,000,000.0	276,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
									Jumlah lapangan bola yang dipelihara	3 unit	Tersedianya lapangan olahraga yang representatif	100 %					
									Jumlah lintasan atletik yang dipelihara	5 unit	Tersedianya lintasan atletik yang representatif	100 %					
1.02	1 3	01.00	0 5 2 1	0	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Wisma Pemuda			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga Wisma Pemuda yang diadakan	10 Jenis	Tersedianya Wisma Pemuda yang layak huni	100 %	50,000,100.0	395,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02	1 3	01.00	0 5 2 2	0	Pengelolaan dan Pengembangan Gedung/Wisma Pemuda, GOR dan Stadion Olahraga			Kota Makassar			Jumlah stadion olahraga yang dikelola dan dikembangkan	3 Unit	Persentase pencapaian target PAD	100 %	430,000,000.0	455,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

											Jumlah gedung olahraga yang dikelola dan dikembangkan	1 Unit	Persentase pencapaian target PAD	100 %					
											Jumlah gedung/wisma pemuda yang dikelola dan dikembangkan	17 Unit	Persentase pencapaian target PAD	100 %					
1.02	13	01.00	06	0		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET</b>				<b>Cakupan Pembinaan Atlet Muda</b>	8.9 %				666,000,000.0	835,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
1.02	13	01.00	06	001		Pengelolaan dan Pengembangan UPT Balai Pengembangan Atlet				Kota Makassar		Jumlah layanan UPT Balai Pengembangan Atlet	4 Jenis	Persentase ketersediaan kebutuhan UPT Balai Pengembangan Atlet	100 %	151,000,000.0	160,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
1.02	13	01.00	06	005		Tes Pengukuran dan Outboard Atlet PPLP dan SKO Sulawesi Selatan				Kota Makassar		Jumlah atlet PPLP dan SKO yang dimonitoring dan evaluasi	200 Atlet	Tersedianya Atlet PPLP dan SKO memenuhi standar	100 %	100,000,000.0	155,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
												Jumlah atlet PPLP dan SKO yang mengikuti outboard	200 atlet	Terjalannya kerjasama tim	100 %				
1.02	13	01.00	06	006		Seleksi dan Pembinaan Atlet Sentra Pengembangan Olahraga				Kota Makassar		Jumlah atlet SKO/PPLP yang mengikuti Kejurjas	131 atlet	Perolehan medali atlet	100 %	415,000,000.0	520,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
												Jumlah peserta uji coba atlet SKO/PPLP	125 atlet	Adanya uji coba kemampuan tanding atlet	100 %				
												Jumlah atlet SKO hasil seleksi	100 atlet	Tersedianya atlet yang memenuhi standar	100 %				
												Jumlah cabang olahraga SKO	13 cabor	Tersedianya cabang olahraga SKO	100 %				
1.02	13	01.00	50	0		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	100 %				2,971,945,444.0	3,698,545,637.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
1.02	13	01.00	50	001		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar		Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	3 Jenis	33,200,000.0	34,600,193.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
1.02	13	01.00	50	002		Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar		Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	7 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	7 Unit	19,200,000.0	19,400,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	



1.02	1 3	01.00	5 1	0 0 7	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	10 Unit	Ketersediaan Perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas sesuai kebutuhan	100 %	5,000,000.0	0.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
1.02	1 3	01.00	5 1	0 0 9	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	10 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	55,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
1.02	1 3	01.00	5 1	0 1 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	24,800,000.0	25,718,900.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
1.02	1 3	01.00	5 1	0 1 2	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar			Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	2 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	40,000,000.0	41,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
											Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	150 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	100 %				
<b>1.02</b>	<b>1 3</b>	<b>01.00</b>	<b>5 2</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					<b>% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu</b>					<b>810,200,000.0</b>	<b>841,000,000.0</b>	<b>Dinas Kepemudaan dan Olahraga</b>	
1.02	1 3	01.00	5 2	0 0 1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	100 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	225,000,000.0	230,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
1.02	1 3	01.00	5 2	0 0 2	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	304,200,000.0	310,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				



1.02	1 3	01.00	5 3	0 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	130 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	135,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
1.02	1 3	01.00	5 3	0 0 3	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	130 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	100,000,000.0	0.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
1.02	1 3	01.00	5 3	0 0 8	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Kota Makassar			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	100 Orang	50,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
1.02	1				<b>Statistik</b>													
1.02	1 4	01.00			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian										18,741,318,091.70	19,435,951,666.41		
1.02	1 4	01.00	0 1		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL					Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	53 %				553,296,601.0	570,449,827.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
										% Sistem data dan statistik yang terintegrasi	50 %							
1.02	1 4	01.00	0 1	0 0 1	Penyusunan Validasi Data Output dan Interpretasi Output Data Statistik			Kota Makassar			Jumlah Laporan Validasi Data Output dan Interpretasi Output Data Statistik	4 Laporan	Tersedianya Hasil Validasi Data	100 %	9,990,000.0	11,540,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	1 4	01.00	0 1	0 0 2	Pembangunan Sistem Satu Data Statistik			Kota Makassar			Jumlah Sistem Aplikasi Satu Data	1 Aplikasi	Terlaksananya Sistem Satu Data di Provinsi Sulawesi Selatan	100 %	195,090,000.0	196,640,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	1 4	01.00	0 1	0 0 3	Pengembangan Infarstruktur Statistik			Kota Makassar / Luar Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	1 Aplikasi	Pemanfaatan Aplikasi yang dikembangkan	100 %	58,290,000.0	59,840,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	1 4	01.00	0 1	0 0 4	Pendidikan dan Pelatihan Teknis			Kota Makassar			Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Teknis	6 Orang	Tersedianya Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	100 %	60,090,000.0	61,640,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	1 4	01.00	0 1	0 0 5	Bimbingan Teknis			Kota Makassar			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	2 Kali	Tersedianya Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis	100 %	9,746,601.0	11,399,827.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	



1.02	1 4	01.00	0 1	0 0 6	Penguatan Kapasitas Kelembagaan			Kota Makassar			Jumlah laporan hasil Penguatan Kelembagaan	1 Laporan	Tersedianya Hasil Pelaksanaan kapasitas Kelembagaan	100 %	10,290,000.0	11,840,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	1 4	01.00	0 1	0 0 7	Manajemen Produk Diseminasi			Kota Makassar			Jumlah Publikasi Data	24 Data	Tersedianya Pelayanan Publikasi Data	100 %	48,000,000.0	48,000,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	1 4	01.00	0 1	0 0 8	Sinkronisasi Antara Data Dengan Metadata			Kota Makassar / Luar Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah Penyediaan Data Informasi yang terstruktur	2 Laporan	Tersedianya Sinkronisasi antara Data dengan Metadata	100 %	22,590,000.0	24,140,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	1 4	01.00	0 1	0 0 9	Pengelolaan Hasil Analisis Data			Kota Makassar			Jumlah Laporan Hasil Analisis Data	4 Laporan	Tersedianya Hasil Analisis Data	100 %	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	1 4	01.00	0 1	0 1 0	Identifikasi Kebutuhan Data Melalui Forum Satu Data			Kota Makassar			Jumlah Data OPD Statistik Sektoral yang teridentifikasi melalui Forum Satu Data	45 Data OPD	Tersedianya Identifikasi Forum Satu Data	100 %	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	1 4	01.00	0 1	0 1 1	Membangun Implementasi Rancangan Pengumpulan Data			Kota Makassar			Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan Implementasi Rancangan Data Informasi Statistik Sektoral	45 OPD	Tersedianya hasil Pelaksanaan Pengumpulan Implementasi Rancangan Data Informasi Statistik Sektoral	100 %	20,090,000.0	21,640,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	1 4	01.00	0 1	0 1 2	Pelaksanaan Pengumpulan Data OPD			Kota Makassar			Jumlah Laporan Data dan Informasi Statistik Sektoral yang dikumpulkan	1 Laporan	Tersedianya hasil Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	100 %	24,090,000.0	25,640,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	1 4	01.00	0 1	0 1 3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengumpulan Data Statistik Sektoral			Kota Makassar			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Data Statistik Sektoral	4 Laporan	Tersedianya Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi	100 %	44,940,000.0	46,490,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1.02	1 4	01.00	0 1	0 1 4	Integrasi Data, Klasifikasi Data, Penginputan Data dan Agregat Data Statistik Sektoral			Kota Makassar			Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral yang teridentifikasi melalui Forum Satu Data	1 Laporan	Tersedianya hasil Identifikasi melalui Forum Satu Data	100 %	7,590,000.0	9,140,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

1.02	1 4	01.00	0 1	0 1 5	Pengelolaan Hasil Pengolahan Data			Kota Makassar			Jumlah Laporan Pengelolaan Hasil Pengolahan Data	2 Laporan	Tersedianya Laporan Pengelolaan Hasil Pengolahan Data	100 %	22,500,000.0	22,500,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	1				Persandian													
1.02	1 5	01.00			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian										18,741,318,091.70	19,435,951,666.41		
1.02	1 5	01.00	0 1		PROGRAM PEMANFAATAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI				% Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian	50 %					302,518,420.0	313,473,452.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	1 5	01.00	0 1	0 0 1	Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Aset Informasi atau Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi			Kota Makassar / Luar Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah Data Celah Kerawanan dan Nilai Resiko Keamanan Sistem Elektronik Hasil Kegiatan Security Assesment Sistem Elektronik	47 Data OPD	Tersedianya Data Celah Kerawanan hasil Security Assesment Elektronik	100 %	20,128,420.0	21,663,452.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	1 5	01.00	0 1	0 0 2	Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi			Kota Makassar / Luar Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah Pelaksanaan Penanggulang an dan Pemulihan atas terjadinya Insiden Keamanan Informasi	47 OPD	Terlaksananya a Penanggulang an dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi	100 %	40,090,000.0	41,660,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	1 5	01.00	0 1	0 0 3	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keamanan Informasi di Bidang Penanggulangan dan Pemulihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi			Kota Makassar			Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Keamanan Informasi di Bidang Penanggulang an dan Pemulihan	100 Orang	Terlaksananya Bimtek Sumber Daya Manusia Keamanan Informasi di Bidang Penanggulang an dan Pemulihan	100 %	40,090,000.0	41,660,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	1 5	01.00	0 1	0 0 4	Pembentukan Computer Security Incident Respons Team (CSIRT) di Lingkungan Pemerintah Daerah			Kota Makassar			Jumlah Peserta Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi	165 Orang	Terbentuknya Tim CSIRT Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan	100 %	6,950,000.0	6,950,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	1 5	01.00	0 1	0 0 5	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Intra Pemerintah Daerah			Kota Makassar / Luar Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah Layanan Jaringan Komunikasi Sandi	24 Kab/Kota	Terlaksananya a Layanan Jaringan Komunikasi Sandi	100 %	30,090,000.0	31,660,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	1 5	01.00	0 1	0 0 6	Implementasi dan Pengelolaan Sertifikat Elektronik Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi			Kota Makassar / Luar Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah Peserta Sosialisasi Tanda Tangan Elektronik	110 Orang	Tersosialisasi nya Tata Cara Pengelolaan Tanda Tangan Elektronik	100 %	20,090,000.0	21,660,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	

1.02	1 5	01.00	0 1	0 0 7	Penyusunan Peraturan Tentang Tata Kelola/Manajemen dan Prosedur Teknis Operasional Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi			Kota Makassar / Luar Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah Peraturan Kepala Daerah dan Pedoman tentang SOP Penetapan Keamanan Informasi	5 SOP	Adanya Regulasi Tata Kelola dan SOP Keamanan Informasi	100 %	50,090,000.0	51,660,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
1.02	1 5	01.00	0 1	0 0 8	Pengelolaan Alat Pendukung Utama Persandian Yang Digunakan Pemerintah Daerah			Kota Makassar			Jumlah Alat Pendukung Utama Persandian yang digunakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	15 APU	Terlaksananya Kegiatan Maintenance Alat Pendukung Utama	100 %	94,990,000.0	96,560,000.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	
<b>1.02</b>	<b>1</b>				<b>Kebudayaan</b>													
<b>1.02</b>	<b>1 6</b>	<b>01.00</b>			<b>Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa</b>										<b>23,812,025,073.04</b>	<b>24,612,412,876.06</b>		
1.02	1 6	01.00	0 1		PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA					Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	8 Event				2,752,543,896.04	2,673,231,793.65	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa	
										Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	2 Jenis							
										% Kegiatan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan norma agama	100 %							
1.02	1 6	01.00	0 1	0 0 1	Pekan Budaya Daerah Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah pelaksanaan Pekan budaya Daerah	1 Kali	Kelestarian nilai-nilai budaya tradisi sulawesi selatan melalui Pekan Budaya Daerah Sulawesi Selatan	100 %	321,225,000.04	341,225,001.65	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa	
1.02	1 6	01.00	0 1	0 0 3	Peningkatan Kualitas Pengelola Museum dan Cagar Budaya			Kota Makassar			Jumlah Peserta Peningkatan Kualitas Pengelola Museum dan Cagar Budaya	50 Orang	Meningkatnya kualitas pengelola museum dan cagar budaya daerah	100 Persen	56,465,000.0	56,465,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa	
1.02	1 6	01.00	0 1	0 0 4	Festival Keraton Nusantara			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Partisipasi Festival Keraton Nusantara	1 Kali	Terpeliharanya silaturahmi pemangku adat kerajaan se-Nusantara	100 %	190,114,000.0	190,114,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa	

1.02	1 6	01.00	0 1	0 0 6	Inventarisasi Organisasi Kesenian Tradisional dan Kontemporer			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kab./kota yang terinventarisir	24 Kab/Kota	Tersedianya data organisasi kesenian tradisional dan kesenian kontemporer	1 Dokumen	250,000,000.0	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
1.02	1 6	01.00	0 1	0 0 7	Pertunjukan Seni Dalam Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pementasan pada event seni dalam daerah	24 Kali	Terlaksananya Pementasan pada event seni dalam daerah	24 kali	180,000,000.0	437,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
1.02	1 6	01.00	0 1	0 0 8	Pertunjukan Seni Luar Daerah			Jakarta Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pementasan pada event seni luar daerah	3 kali	Semakin dikenalnya tarian khas sulawesi selatan	100 %	265,140,000.0	395,590,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
1.02	1 6	01.00	0 1	0 1 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Manajemen Pengelolaan Sarana Pertunjukan			Kota Makassar			Jumlah Petunjuk Teknis Terkait Manajemen Pengelolaan sarana dan pertunjukan.	1 Dokumen	Meningkatnya manajemen pengelolaan sarana dan pertunjukan	100 %	65,000,000.0	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
1.02	1 6	01.00	0 1	0 1 1	Pembinaan Lembaga Kesenian di Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah lembaga kesenian yang mendapatkan pembinaan	5 Lembaga Kesenian	Meningkatnya pemahaman para pelaku seni tentang pengelolaan lembaga kesenian	100 %	125,000,000.0	125,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
1.02	1 6	01.00	0 1	0 1 2	Pengadaan Sarana Pertunjukan Kesenian			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pengadaan sarana pertunjukan kesenian	3 Paket	Tersedianya sarana pertunjukan kesenian	3 Paket	300,000,000.0	102,738,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
1.02	1 6	01.00	0 1	0 1 3	Pengenalan dan Edukasi Museum			Kota Makassar			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengenalan dan Edukasi Museum	1 Kali	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap benda-benda peninggalan bersejarah	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
1.02	1 6	01.00	0 1	0 1 6	Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Nasional			Kota Makassar			Jumlah Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara	120 orang	Terseleksinya peserta audisi Gita Bahana Nusantara yang akan tampil pada acara	4 Orang	60,863,896.0	65,863,792.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
1.02	1 6	01.00	0 1	0 2 3	Kemah Seni Se Sulse			Kota Makassar			Jumlah Pelaksanaan Kemah Seni	1 Kali	Semakin dilestarikannya seni budaya sulawesi selatan	100 %	125,200,000.0	130,200,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan

1.02	1 6	01.00	0 1	0 2 8	Pameran Temporer Museum Luar Daerah			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Partisipasi Pameran Temporer Museum Luar Daerah	3 Kali	Semakin dikenalnya koleksi museum pada Temporer Museum Luar Daerah	20 %	254,168,000.0	254,168,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n			
1.02	1 6	01.00	0 1	0 2 9	Temu Taman Budaya se Indonesia			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pelaksanaan Temu Taman Budaya	1 Kali	Dipentaskannya karya tari sulawesi selatan pada tingkat nasional	1 Karya Tari	293,368,000.0	293,868,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n			
1.02	1 6	01.00	0 1	0 3 1	Konservasi, Preparasi dan Labeling Koleksi Museum			Kota Makassar			Terpeliharanya koleksi museum lagaligo	250 Buah Koleksi	Semakin terpeliharanya koleksi museum lagaligo	20 %	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n			
1.02	1 6	01.00	0 1	0 3 5	Pameran Temporer Museum Dalam Daerah			Kota Makassar			Jumlah Pelaksanaan Pameran Temporer Museum Dalam Daerah	1 Kali	Meningkatnya minat masyarakat berkunjung ke Museum	20 %	91,000,000.0	106,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n			
1.02	1 6	01.00	0 2		PROGRAM PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN NILAI NILAI BUDAYA						Cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	6 %			1,555,462,196.0	1,394,461,053.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n			
																			Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	250 Benda Budaya
																			Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	12 Karya Budaya
1.02	1 6	01.00	0 2	0 0 3	Internalisasi Pemahaman Sejarah Bagi Generasi Muda			Kota Makassar			Jumlah peserta Internalisasi Pemahaman Sejarah Bagi Generasi Muda	50 orang	Meningkatnya pemahaman para generasi muda akan pentingnya sejarah di sulsel	100 %	29,650,000.0	59,300,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n			
1.02	1 6	01.00	0 2	0 0 4	Pemeliharaan Koleksi Museum di Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah Pemeliharaan Koleksi Museum di Sulawesi Selatan	100 koleksi	Ketersediaan koleksi Museum Daerah dalam kondisi baik	100 %	60,713,127.0	60,713,127.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n			
1.02	1 6	01.00	0 2	0 0 5	Pemeliharaan Museum di Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Museum yang dipelihara	1 Museum	Terpeliharanya Museum di Sulawesi Selatan	100 %	152,800,000.0	152,800,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n			

1.02	16	01.00	02	006	FGD Penguatan Lembaga Adat dan Komunitas Budaya			Kota Makassar			Jumlah peserta FGD Penguatan Lembaga Adat dan Komunitas Budaya	90 Orang	Meningkatnya pemahaman tugas dan fungsi lembaga adat dan Komunitas Budaya	100 Orang	120,000,000.0	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n
1.02	16	01.00	02	008	Seminar Penguatan Ketahanan Budaya Daerah			Kota Makassar			Jumlah peserta Seminar Penguatan Ketahanan Budaya Daerah	100 Orang	Meningkatnya pemahaman akan pentingnya budaya daerah	100 %	24,475,000.0	39,475,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n
1.02	16	01.00	02	009	Pengusulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)			Kota Makassar			Jumlah Pengusulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	20 Karya Budaya	Jumlah karya budaya sulsel yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda	12 Karya Budaya	155,825,800.0	165,825,800.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n
1.02	16	01.00	02	011	Pemeliharaan Rumah Adat			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Rumah Adat yang dipelihara	3 Unit	Terpeliharanya Rumah Adat di Sulawesi Selatan	100 %	797,934,519.0	385,842,864.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n
1.02	16	01.00	02	015	Penetapan Cagar Budaya dan Situs Tingkat Provinsi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	4 Cagar Budaya	Peningkatan jumlah cagar budaya di sulsel	3 Cagar Budaya	64,063,750.0	64,063,750.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n
1.02	16	01.00	02	018	Pemeliharaan Cagar Budaya dan Situs			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Cagar Budaya dan Situs	1 Cagar Budaya dan Situs	Terpeliharanya Cagar Budaya dan Situs di Sulawesi Selatan	100 %	150,000,000.0	466,440,512.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n
1.02	16	01.00	50		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>				<b>5,698,772,116.0</b>	<b>6,013,923,865.06</b>	<b>Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa an</b>
1.02	16	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Makassar			Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	0 Jenis	900,980,000.0	950,980,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n
1.02	16	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Makassar			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	7 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	7 Unit	20,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n
									Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	15 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	15 Unit					
1.02	16	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	80 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	2,109,748,251.0	2,167,400,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n

1.02	1 6	01.00	5 0	0 0 5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Makassar			Jumlah ATK yang tersedia	40 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 %	278,468,860.0	283,468,860.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n	
1.02	1 6	01.00	5 0	0 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Makassar			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	23 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 %	26,400,000.0	28,900,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n	
1.02	1 6	01.00	5 0	0 0 8	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Makassar			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	0 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	0 %	1,697,495,000.0	1,797,495,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n	
1.02	1 6	01.00	5 0	0 0 9	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kota Makassar			Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	0 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	0 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n	
1.02	1 6	01.00	5 0	0 1 0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kota Makassar			Jumlah perjalanan dinas	48 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	0 Orang	565,680,005.0	665,680,005.06	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n	
<b>1.02</b>	<b>1 6</b>	<b>01.00</b>	<b>5 1</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>					<b>1,899,061,816.0</b>	<b>2,204,061,816.0</b>	<b>Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n</b>	
1.02	1 6	01.00	5 1	0 0 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kota Makassar			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	4 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	1,193,281,816.0	1,393,281,816.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n	
1.02	1 6	01.00	5 1	0 0 6	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	24 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	274,480,000.0	324,480,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n	
1.02	1 6	01.00	5 1	0 0 9	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	0 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	0 %	276,300,000.0	316,300,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n	
1.02	1 6	01.00	5 1	0 1 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	100 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	105,000,000.0	120,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n	
1.02	1 6	01.00	5 1	0 1 2	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Kota Makassar			Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	0 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	0 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n	

											Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	0 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	0 %					
1.02	16	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %				358,866,000.0	388,866,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan		
1.02	16	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	125 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	93,816,000.0	108,816,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan		
1.02	16	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	56,570,000.0	56,570,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan		
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen					
											Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	0 Dokumen					
											Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	1 Dokumen					
1.02	16	01.00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	2 Usulan Kegiatan	Ketersediaan Usulan Kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	2 Laporan	180,400,000.0	190,400,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan		
1.02	16	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kota Makassar			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	4 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	21,080,000.0	26,080,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan		
1.02	16	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Kota Makassar			Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %	7,000,000.0	7,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan		



1.02	1 6	01.00	5 3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					% ASN berkinerja sangat baik	100 %				649,418,642.0	673,488,880.23	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan			
1.02	1 6	01.00	5 3	0 0 1	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Kota Makassar				Jumlah Aparat OPD yang dikelola administrasi kepegawaian nya	0 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	0 %	42,188,880.23	42,188,880.23	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan		
												Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	0 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	0 %					
1.02	1 6	01.00	5 3	0 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kota Makassar				Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	215 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	279,964,880.77	322,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan		
1.02	1 6	01.00	5 3	0 0 3	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kota Makassar				Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	0 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	0 %	267,264,881.0	309,300,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan		
1.02	1 6	01.00	5 3	0 0 8	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Kota Makassar				Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	100 Orang	60,000,000.0	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan		
1.02	1 7	01.00			Perpustakaan															
1.02	1 7	01.00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan											8,867,874,465.72	9,196,555,901.56			
1.02	1 7	01.00	0 1		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik	110000 Orang				1,100,000,000.0	1,100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
												Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat yang dibina	75 Unit							
1.02	1 7	01.00	0 1	0 0 4	Pembinaan Perpustakaan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Perpustakaan yang dibina	100 Perpustakaan	Meningkatnya Pengetahuan pengelola perpustakaan dan pola pengembangan pembinaannya	100 %	125,000,000.0	125,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		

1.02	17	01.00	01	009	Bimtek Perpustakaan			Kota Makassar			Jumlah peserta bimtek	200 Orang	Peningkatan jumlah peserta mampu melestarikan bahan perpustakaan sesuai tugas pustakawan	200 Orang	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	01	020	Road Show Pengembangan Kegemaran Membaca			Kota Makassar			Jumlah peserta	1000 Orang	Meningkatnya minat baca masyarakat	1000 Orang	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	01	027	Bedah Buku Terbitan Daerah Sulse			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Jumlah Judul Buku	120 Orang Judul	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap karya intelektual dan karya budaya di sulse	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	01	035	Pengembangan Otomasi Perpustakaan			Kota Makassar			Jumlah data otomasi yang diinput kepangkalan data	3500 Lembar	Tersedianya data informasi	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	01	036	Pekan Perpustakaan dan Wisata Baca			Kota Makassar			Jumlah peserta pekan perpustakaan dan budaya baca	1500 Orang	Peningkatan minat baca peserta	1500 Orang	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	01	037	Pengembangan, pemberdayaan bahan Pustaka dan Kearipan Lokal			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah naskah	10 Exp	Peningkatan jumlah naskah	10 Exp	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	01	038	Road show Story Telling			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta road show	100 Orang	Peningkatan pemahaman peserta	100 Orang	125,000,000.0	125,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	01	039	Up Grading Berkala Pustakawan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta upgrading berkala	200 Orang	Jumlah pustakawan	200 Orang	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	17	01.00	02		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN</b>					<b>Rasio perpustakaan per satuan penduduk</b>	<b>0.03</b>				<b>325,000,000.0</b>	<b>325,000,000.0</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>
										<b>Jumlah pustakawan dan tenaga teknis yang memiliki sertifikat</b>	<b>1100 Orang</b>						
1.02	17	01.00	02	005	Sinkronisasi Peningkatan Digitalisasi Alih Media Informasi Perpustakaan			Provinsi Sulawesi Selatan	#DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Jl. Landorundun Penanian Rantepao		Jumlah koleksi naskah kuno sulse yang dialih media	42 Judul	Pengetahuan tentang pemanahaman digitalisasi alih meadi	42 Judul	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



											Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	12 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	12 Unit				
1.02	17	01.00	5003	0	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	91 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	2,826,874,465.72	3,155,555,901.56	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1.02	17	01.00	5005	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar			Jumlah ATK yang tersedia	20 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1.02	17	01.00	5006	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	20 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1.02	17	01.00	5008	0	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	40 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1.02	17	01.00	5009	0	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar			Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1.02	17	01.00	5010	0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perjalanan dinas	71 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	150 Orang	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
<b>1.02</b>	<b>17</b>	<b>01.00</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>						<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>				<b>1,050,000,000.0</b>	<b>1,050,000,000.0</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	
1.02	17	01.00	5104	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	4 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	300,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1.02	17	01.00	5106	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	17 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	125,000,000.0	125,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1.02	17	01.00	5109	0	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	6 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	500,000,000.0	500,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

1.02	17	01.00	510	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1.02	17	01.00	511	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar				Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	4 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
												Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	50 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	100 %				
<b>1.02</b>	<b>17</b>	<b>01.00</b>	<b>52</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					<b>% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu</b>	<b>100 %</b>					<b>500,000,000.0</b>	<b>500,000,000.0</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	
1.02	17	01.00	520	011	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar				Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	48 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1.02	17	01.00	520	012	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar				Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	125,000,000.0	125,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
												Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	1 Dokumen				
												Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	1 Dokumen				
												Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	4 Dokumen				
1.02	17	01.00	520	014	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	1 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

										Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	3 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %							
1.02	17	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	5 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
1.02	17	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar		Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	3 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
1.02	17	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar		Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
<b>1.02</b>	<b>17</b>	<b>01.00</b>	<b>53</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>	<b>100 %</b>			<b>141,000,000.0</b>	<b>141,000,000.0</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>				
1.02	17	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar		Jumlah Aparat OPD yang mengelola administrasi kepegawaian nya	5 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
										Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	4 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %							
1.02	17	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar		Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	150 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	40,000,000.0	40,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
1.02	17	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar		Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	150 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	51,000,000.0	51,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
<b>1.02</b>	<b>1</b>				<b>Kearsipan</b>															
<b>1.02</b>	<b>18</b>	<b>01.00</b>			<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>									<b>8,867,874,465.72</b>	<b>9,196,555,901.56</b>					
1.02	18	01.00	01		PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN					<b>% Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku</b>	<b>40 %</b>			<b>600,000,000.0</b>	<b>600,000,000.0</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>				

1.02	18	01.00	01	008	Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Terbaik Kab/Kota Prov. Sulsel			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pemilik LKD terbaik	24 Unit kerja	Terpilihnya LKD terbaik Kab/Kota Prov. Sulsel	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1.02	18	01.00	01	011	Sosialisasi Kearsipan			Kota Makassar			Jumlah peserta	150 Orang	Meningkatnya pemahaman tentang kearsipan	150 Orang	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1.02	18	01.00	01	015	Bimtek Kearsipan			Kota Makassar			Jumlah peserta	150 Orang	meningkatnya pemahaman tentang kearsipan	150 Orang	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1.02	18	01.00	01	017	Penyusunan Pedoman Kearsipan			Kota Makassar			Jumlah pedoman yang disusun	2 Exp	Ketersediaan pedoman pengarsipan	2 Exp	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1.02	18	01.00	01	018	Penilaian Kinerja dan Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Prov. Sulsel			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pemilihan arsiparis teladan	80 Orang	Jumlah arsiparis teladan yang terpilih	80 Orang	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1.02	18	01.00	01	019	Pengawasan Kearsipan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah unit kerja yang diawasi pengarsipannya	20 Unit kerja	Peningkatan kualitas pengarsipan unit kerja	100 unit kerja	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
<b>1.02</b>	<b>18</b>	<b>01.00</b>	<b>02</b>		<b>PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH</b>					<b>Jumlah dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan</b>	<b>40 %</b>				<b>300,000,000.0</b>	<b>300,000,000.0</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	
1.02	18	01.00	02	004	Peningkatan Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Statis			Kota Makassar			Jumlah arsip statis yang akan dibersihkan	350000 Lembar	Arsip bersih dari debu dan kotoran	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1.02	18	01.00	02	014	Akuisisi dan Pengolahan Arsip Statis			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah khasanah	2 Khasanah	Peningkatan jumlah khasanah	2 Khasanah	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1.02	18	01.00	02	015	Penelusuran Arsip			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah penelusuran	4 Kab/Kota/Prov	Peningkatan penelusuran kearsipan	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
<b>1.02</b>	<b>18</b>	<b>01.00</b>	<b>03</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN</b>					<b>Jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar</b>	<b>5 Unit</b>				<b>250,000,000.0</b>	<b>250,000,000.0</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	
1.02	18	01.00	03	001	Penyimpanan dan Penataan Arsip Statis			Kota Makassar			Jumlah Arsip Statis yang Sudah Tertata	28932 Box	Memudahkan dalam mencari arsip statis	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1.02	18	01.00	03	003	Peningkatan, Pemeliharaan dan perawatan Arsip Statis			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah arsip statis yang dipelihara dan dibersihkan, jumlah arsip statis yang dirawat/dilestarikan	4500 Lembar	Peningkatan pemeliharaan arsip statis	4500 Lembar	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

1.02	18	01.00	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ARSIP					Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat	20 Lembaga/Instansi					450,000,000.0	450,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	04	001	Pengembangan Layanan Kearsipan			Kota Makassar				Jumlah pengunjung yang menggunakan layanan arsip	1500 Orang	Terpenuhinya naskah arsip bagi pengunjung	1500 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	04	009	Penelusuran dan Penggandaan Karya Ilmiah Khasanah Sulsel			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Penggandaan karya ilmiah	500 Exp	bertambahnya naskah sumber arsip	100 %	125,000,000.0	125,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	04	011	Layanan Tertib Arsip Dinamis			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah yang terlayani	5 OPD/SMA	Peningkatan pelayanan tertib arsip	5 OPD/SMA	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	04	012	Workshop Pengelolaan Arsip Dinamis			Kota Makassar				Jumlah peserta workshop	50 Orang	Peningkatan pemahaman peserta tentang pengelolaan arsip dinamis	50 Orang	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.02	18	01.00	04	013	Publikasi dan Promosi Kearsipan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah publikasi dan promosi kearsipan	3 OPD/PT	Peningkatan publikasi dan promosi kearsipan	3 %	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.00					Urusan Pilihan													
2.00	0				Pariwisata													
2.00	01	01.00			Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata											23,812,025,073.04	24,612,412,876.06	
2.00	01	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA (Prioritas)							Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	300000 WNA			4,368,526,750.0	4,710,858,750.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
												Jumlah kunjungan wisatawan lokal	7500000 WNI					
												Peningkatan jumlah produk usaha ekonomi kreatif (Prioritas)	2 Jenis					
												Lama Kunjungan Wisata	5 Hari					
												Jumlah pengguna rest area sebagai spot wisata alternatif (Prioritas)	1000 Orang					
2.00	01	01.00	01	001	Pekan Raya Sulsel			Kota Makassar				Jumlah Pelaksanaan Pekan Raya Sulsel	1 Event	Peningkatan promosi destinasi wisata daerah	100 %	66,250,000.0	66,250,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata



2.00	01	01.00	01	002	Direct Promotion Dalam Negeri			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah promosi pariwisata sulsel di dalam negeri	3 event	Terjadinya peningkatan jumlah pergerakan wisatawan nusantara ke sulsel melalui Promosi langsung / Direct Promotion	20 %	409,349,250.0	409,349,250.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
2.00	01	01.00	01	004	Pengadaan Bahan Promosi			Kota Makassar			Jumlah Bahan Promosi	5500 Exemplar	Tersedianya Bahan Promosi Pariwisata Sulsel	1 Tahun	410,785,000.0	415,785,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
2.00	01	01.00	01	005	Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik			Kota Makassar			Jumlah Media Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik	6 Media	Terpublikasikannya event - event Pariwisata Sulsel Melalui Media Cetak dan Elektronik	12 Bulan	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
2.00	01	01.00	01	006	Celebes Travel Mart (CTM)			Kota Makassar			Jumlah Pelaksanaan Celebes Travel Mart (CTM)	1 Kali	Terlaksananya Kontak Bisnis antara Buyers dan Sellers	150 Buyers & Sellers	155,700,000.0	165,700,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
2.00	01	01.00	01	007	Familiarization Trip ( Fam Trip )			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pelaksanaan Fam Trip (Familiarization Trip)	1 Kali	Peningkatan promisi Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Sulawesi Selatan	100 %	89,400,000.0	89,400,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
2.00	01	01.00	01	009	Analisa Data Kunjungan Wisatawan Nusantara/Mancanegara			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah informasi data Kunjungan Wisatawan	1 informasi	Tersedianya Informasi Data kunjungan wisatawan	20 %	102,147,200.0	112,147,200.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
2.00	01	01.00	01	011	Pembuatan Buku Profil Pariwisata Sulsel			Kota Makassar			Jumlah Pembuatan Buku Profil Pariwisata Sulsel	200 EXP	Tersedianya data/informasi pariwisata Sulawesi Selatan	1 Informasi	92,274,800.0	92,274,800.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
2.00	01	01.00	01	014	Launching Calender of Event (CoE) Sulawesi selatan			Jakarta Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pelaksanaan Launching Calender of Event (CoE) Sulawesi Selatan	1 event	Peningkatan event-event pariwisata di sulawesi selatan	100 %	65,468,000.0	100,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan
2.00	01	01.00	01	015	Wonderfull Event Sulawesi Selatan			Kabupaten Bulukumba Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Toraja Utara Kota Makassar			Jumlah event Wonderfull Event Sulawesi Selatan	4 event	Peningkatan Event Pariwisata Sulawesi Selatan	20 %	630,000,000.0	730,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataaan

2.00	0	01.00	0	0	Pembinaan Event Budaya dan Pariwisata di Kab/Kota			Kabupaten Gowa	# Malino Tinggimoncong Gowa Regency		Jumlah event Pembinaan Event Budaya dan Pariwisata di Kab/Kota	5 Event	Meningkatnya kualitas Event Pariwisata di kab./kota	20 %	559,089,000.0	809,089,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
	1		1	6			Kabupaten Luwu Timur	# Pangkajene Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi									
							Kabupaten Maros	# Salo Karajae Jl. Bau Massepe Lumpue West Bacukiki Pare-Pare City									
							Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	#Desa Tompobulu Bulupoddo Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan									
							Kabupaten Sinjai	#Jl. Bau Massepe, Monumen Cinta Habibie Ainun Mallusetasi Ujung Pare-Pare City									
							Kabupaten Wajo	#Kabupaten Bantaeng Bantaeng Regency South Sulawesi ID									
								#Kabupaten Enrekang Enrekang Regency South Sulawesi ID									
								#Kawasan Wisata Bira Bira Bira Bonto Bahari									
								#Kecamatan Benteng Selayar Islands Regency South Sulawesi ID									
								#Kecamatan Maros Baru Maros Baru Maros Regency South Sulawesi									
								#Kecamatan Nuha East Luwu Regency South Sulawesi ID									
								#Kecamatan Rantepao Rantepao North Toraja Regency South Sulawesi									

2.00	01	01.00	01	017	Pasar Ramadhan Wisata			Kota Makassar			Jumlah event Pasar Ramadhan Wisata	1 Kali	Terlaksananya Pasar Ramadhan Wisata	1 Kali	72,200,000.0	100,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	01	018	Misi Promosi Pariwisata Luar Negeri			ASEAN, Eropa dan Australia Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Misi Promosi Pariwisata Luar Negeri	3 Kali	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke sulawesi selatan	20 %	388,111,000.0	388,111,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	01	019	Misi Promosi Pariwisata Dalam Negeri			Bali, Bandung, Jakarta Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Misi Promosi Pariwisata Dalam Negeri	1 Kali	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke sulawesi selatan	20 %	171,000,000.0	171,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	01	020	Sales Mission			Luar Negeri Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Misi Penjualan di Luar Negeri	1 Event	Terjadinya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke sulsel	20 %	296,590,500.0	296,590,500.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	01	023	Pendataan Ekonomi Kreatif di Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan	1 Dokumen	Tersedianya data pelaku dan jenis ekonomi kreatif bidang seni di sulawesi selatan	1 Dokumen	145,000,000.0	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	01	025	Pekan Produk Kreatif			Kota Makassar			Jumlah Pelaksanaan	1 Kali	Semakin dikenalnya produk-produk kreatif sulawesi selatan pada pekan produk kreatif	100 %	246,900,000.0	296,900,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
								Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Partisipasi Pekan Produk Kreatif	1 Kali	Semakin dikenalnya produk-produk kreatif sulawesi selatan pada pekan produk kreatif luar daerah	100 %			
2.00	01	01.00	01	027	Kumpul ASIK (Asosiasi Industri Kreatif)			Kota Makassar			Jumlah Pelaksanaan Kumpul ASIK (Asosiasi Industri Kreatif)	1 Kali	Peningkatan Industri kreatif di sulawesi selatan	100 %	139,050,000.0	139,050,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan

2.00	01	01.00	01	028	Gelar Pesona Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah Kegiatan Gelar Pesona Sulawesi Selatan	3 Kali	Ketersediaan ajang pemilihan Putri Pariwisata, Duta Wisata dan Duta Maritim	100 %	142,912,000.0	142,912,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	01	032	Fashion Show Sutra			Kota Makassar			Jumlah Peserta Fashion Show Sutra	40 Orang	Peningkatan promosi Potensi daerah sulsel	100 %	86,300,000.0	86,300,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
2.00	01	01.00	02		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL (Prioritas)</b>	<b>Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru dan Pengembangan Destinasi Wisata</b>	<b>Menurunnya kesenjangan antar lapisan dan antar wilayah</b>			<b>Jumlah Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal (Prioritas)</b>	<b>2 Kab/Kota</b>				<b>260,916,000.0</b>	<b>316,014,072.12</b>	<b>Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan</b>
2.00	01	01.00	02	001	Sosialisasi Wisata Halal			Kabupaten Tana Toraja	# Kota Palopo Sulawesi Selatan ID		Jumlah Peserta Sosialisasi Wisata Halal	200 Orang	Meningkatnya pemahaman para stakeholder pariwisata mengenai wisata halal	200 Orang	70,916,000.0	78,514,072.12	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
								Kabupaten Toraja Utara	# Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi								
									#Dinas Pariwisata Kec. Barru Barru Sub District Barru Regency South Sulawesi								
									#Kabupaten Enrekang Enrekang Regency South Sulawesi ID								
									#Pangkajene Sidenreng Rappang Pangkajene Maritenggae Sidenreng Rappang Regency								
2.00	01	01.00	02	002	Sertifikasi Usaha Pariwisata Halal			Provinsi Sulawesi Selatan	#Kabupaten Bantaeng Bantaeng Regency South Sulawesi ID		Jumlah Usaha Pariwisata yang Bersertifikat Halal	4 Usaha Pariwisata	Tersedianya Usaha Pariwisata yang Bersertifikat Halal	4 Usaha Pariwisata	190,000,000.0	237,500,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan
									#Kabupaten Enrekang Enrekang Regency South Sulawesi ID								

								#Kawasan Wisata Bira Bira Bonto Bahari Bulukumba Regency												
								#Kecamatan Benteng Selayar Islands Regency South Sulawesi ID												
2.00	01	01.00	04		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA				Jumlah destinasi yang didukung/difasilitasi menjadi destinasi wisata unggulan	2 Destinasi Wisata					4,357,556,446.0	4,657,556,446.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa			
2.00	01	01.00	04	001	Workshop Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Destinasi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Workshop Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Destinasi	100 Orang	Peningkatan kualitas dan pemahaman peserta mengenai tata kelola destinasi wisata	100 %	104,385,000.0	104,385,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa			
2.00	01	01.00	04	002	Penataan Destinasi Wisata Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Destinasi Wisata yang meningkat	2 Destinasi	Ketersediaan amenitas pada destinasi pariwisata daerah (DPD)	20 %	3,735,057,446.0	4,035,057,446.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa			
2.00	01	01.00	04	003	Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Daya Tarik Wisata Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kab./Kota yang ter-Inventarisasi dan Identifikasi potensi daya tarik wisatanya	6 Kab./Kota	Ketersediaan data potensi wisata sulawesi selatan	1 Dokumen	150,100,000.0	150,100,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa			
2.00	01	01.00	04	008	Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) Sulsel			Kota Makassar			jumlah peserta forum	100 Orang	Peningkatan pemahaman peserta mengenai penataan dan Pengelolaan pariwisata	100 %	61,294,000.0	61,294,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa			
2.00	01	01.00	04	010	Inventarisasi Usaha Jasa Industri Pariwisata Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Industri Pariwisata yang terinventarisasi di Kab./Kota	24 Kab./Kota	Ketersediaan dokumen hasil inventarisasi Industri pariwisata di sulsel	1 Dokumen	140,100,000.0	140,100,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa			
2.00	01	01.00	04	011	Penyusunan Travel Pattern			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pola Perjalanan yang dihasilkan	2 Pola	Ketersediaan jumlah paket wisata antar provinsi (bali-selayar; bali-bua; bali-toraja; toraja-makassar)	2 Provinsi	166,620,000.0	166,620,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa			

2.00	01	01.00	05		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA					Cakupan penyelenggaraan event pariwisata bekerjasama dengan lembaga kemitraan	12 Event					1,910,901,211.0	1,579,950,200.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	
2.00	01	01.00	05	001	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kepariwisataan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Masyarakat Desa Wisata yang diberdayakan	2 Desa	Meningkatnya kualitas pengelolaan desa wisata	100 %	131,800,000.0	151,800,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	
											Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang diberdayakan	10 Kelompok	Meningkatnya kualitas kelompok sadar wisata	100 %					
2.00	01	01.00	05	002	Pelatihan SDM Bidang Pariwisata			Provinsi Sulawesi Selatan	# Palopo Wara Kota Palopo # Pangkajene Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi # Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi ID #Kabupaten Enrekang Regency South Sulawesi ID #Kabupaten Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi ID #Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang No.171 Jl. Jend. Sukawati Macorawalie			Jumlah Peserta	260 Orang	Meningkatnya Pemahaman dan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata	20 %	393,566,000.0	393,566,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	
2.00	01	01.00	05	003	Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona			Provinsi Sulawesi Selatan	#Kabupaten Enrekang Enrekang Regency South Sulawesi #Kawasan Wisata dan Kecamatan Ujung Bulu Bulukumba Regency South Sulawesi ID #Kecamatan Malili East Luwu Regency South Sulawesi ID			Jumlah peserta	200 Orang	Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap sapta pesona	20 %	164,300,000.0	164,300,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan	

									#kelurahan kambo Palopo Wara Kota Palopo											
									#Pantai Harapan Ammani, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang Desa Mattiro Tasi Mattirosompe											
2.00	0 1	01.00	0 5	0 0 4	Pelaksanaan forum Komunikasi Antar Kelompok Sadar Wisata			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Peserta Forum	100 Orang	Meningkatny a pemahaman peserta Forum akan pentingnya Sadar Wsata	100 Persen	100,000,000.0	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n		
2.00	0 1	01.00	0 5	0 0 6	Inventarisasi Kelompok Sadar Wisata Kab/Kota			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Dokumen hasil inventarisasi	1 Dokumen	Tersedianya dokumen inventarisasi kelompok sadar wisata kab/kota	1 Dokumen	110,822,911.0	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n		
2.00	0 1	01.00	0 5	0 0 8	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pariwisata			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Laporan Monev hasil tindak lanjut Kerjasama	2 Laporan	Tersedianya laporan Monev tindak lanjut Kerjasama	2 Laporan	106,700,000.0	116,700,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n		
2.00	0 1	01.00	0 5	0 1 0	Kerjasama Masyarakat Bidang Kepariwisataan			Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Stakeholder yang bekerjasama	3 Kerjasama	Jumlah dokumen kerjasama	3 Dokumen	324,584,200.0	324,584,200.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n		
2.00	0 1	01.00	0 5	0 1 2	Pendataan SDM Usaha Pariwisata			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Kab/Kota yang didata	12 Kab/Kota	Tersedianya dokumen/dat a SDM Usaha Pariwisata	1 Dokumen	240,000,000.0	240,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n		
2.00	0 1	01.00	0 5	0 1 3	Pembuatan Pergub tentang Pramuwisata			Kota Makassar				Jumlah Pergub Pramuwisata yang dihasilkan	1 Dokumen	Tersedia peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang pramuwisata	100 %	75,128,100.0	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n		
2.00	0 1	01.00	0 5	0 1 4	Saka Pariwisata			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Peserta Pembinaan/P elatihan Saka Pramuka Pariwisata	100 Orang	meningkatny a pemahaman dan pembinaan kepariwisataa n pada Saka Pramuka Pariwisata	100 Persen	85,000,000.0	0.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n		
2.00	0 1	01.00	0 5	0 1 5	Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah SDM yang tersertifikasi	200 Orang	Tersedianya tenaga kerja Pariwisata yang bersertifikasi dan kompeten	100 %	179,000,000.0	189,000,000.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataa n		
<b>2.00</b>	<b>0</b>				<b>Pertanian</b>															
<b>2.00</b>	<b>0 2</b>	<b>01.00</b>			<b>Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>											<b>183,889,001,767.0</b>	<b>190,042,216,329.29</b>			

2.00	0 2	01.00	0 1		PROGRAM HILIRISASI PERTANIAN (Prioritas)				Nilai Hilirisasi Produksi Pertanian (Prioritas)	45423790969 3 Rp				92,950,000,000.0	94,300,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2.00	0 2	01.00	0 1 0 1		Penyediaan Benih/Bibit untuk Mendukung Peningkatan Produksi						Jumlah Benih/Bibit Padi, Jagung dan Talas Satoimo yang disalurkan	6500000 Kg	Meningkatny a produksi padi, Jagung, dan Talas Satoimo	8125000 Kg	16,000,000,000.0	17,000,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura



							Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	# desa ulugalung kec eremerasa kab bantaeng Ulugalung Eremerasa Bantaeng Regency													
							Kabupaten Pinrang	# Gowa Regency South Sulawesi ID													
							Kabupaten Sidenreng Rappang	# Gunturu Hero Lange-Lange Bulukumba Regency													
							Kabupaten Sinjai	# Jenetallasa Pallangga Gowa Regency													
							Kabupaten Soppeng	# Jojolo Bulukumpa Bulukumba Regency													
							Kabupaten Takalar	# Kampala Arungkeke Jeneponto Regency													
							Kabupaten Tana Toraja	# Karassing Hero Lange-Lange Bulukumba Regency													
							Kabupaten Toraja Utara	# Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan													
							Kabupaten Wajo	# Lambarese Burau East Luwu Regency													
							Kota Palopo	# Luwu Regency South Sulawesi ID													
							Kota Parepare	# Majauleng Wajo Regency South Sulawesi													
								# Mandiri Tomoni East Luwu Regency													
								# Mattirotasi Watang Pulu Sidenreng Rappang Regency													
								# Minasupa Bontoa Maros Regency													
								# Moncongloe Maros Regency South Sulawesi													
								# Palopo Wara Palopo City													

																		# Pangkajene Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi																									
																		# Pantilang Bassesangtemp e Luwu Regency																									
																		# Pataro Hero Lange-Lange Bulukumba Regency																									
																		# Pattalassang Takalar Regency South Sulawesi																									
																		# Salo Karaja Lalabata Soppeng Regency																									
																		# Singa Hero Lange-Lange Bulukumba Regency																									
																		# Tana Toraja Regency South Sulawesi ID																									
																		# Tanuntung Hero Lange- Lange Bulukumba Regency																									
																		# Tibona Bulukumpa Bulukumba Regency																									
																		# Tondong Tallasa Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi																									
																		# Tugondeng Hero Lange- Lange Bulukumba Regency																									
																		# Wajo Regency South Sulawesi ID																									
																		#11 Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan ID																									
																		#8 Kecamatan Soppeng Regency South Sulawesi ID																									



								#DESA BALANG TAROWANG Tarowang Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#DESA BANRIMANUR UNG West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#Desa Barambang Sinjai Borong Sinjai Regency South Sulawesi												
								#DESA BARANA West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#DESA BARAYA Bontoramba Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#Desa Barembeng Bontonompo Gowa Regency South Sulawesi												
								#desa baringeng kec lilirilau kab soppeng Baringeng Lili Rilau Soppeng Regency												
								#Desa Batu Malonro Biringbulu Gowa Regency South Sulawesi												
								#Desa Batumalonro Biringbulu Gowa Regency South Sulawesi												
								#DESA BEROANGING West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#Desa Bilalang Manuju Gowa Regency South Sulawesi												

								#Desa Bili-bili Bontomarannu Gowa Regency South Sulawesi											
								#DESA BONGO LEBANG Kelara Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#DESA BONGO MATENE Turatea Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#DESA BONGO RAPPO Tarawang Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#DESA BONTOMANAI Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#Desa Bontomanai Bontomarannu Gowa Regency South Sulawesi											
								#DESA BONTONOMPO Kelara Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#Desa Bontoramba South Bontonompo Gowa Regency South Sulawesi											
								#DESA BONTOTANGN GA Tamalatea Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#Desa Borong Hero Lange- Lange Bulukumba Regency South Sulawesi											
								#Desa Boto Lempangan West Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi											

									#Desa BulolondongKe c.Lamasi Timur Kab.Luwu Bulolondong East Lamasi Luwu Regency									
									#DESA BULU LOE Turatea Jeneponto Regency South Sulawesi									
									#DESA BULUJAYA West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi									
									#Desa Bulutana Tinggimoncong Gowa Regency South Sulawesi									
									#desa bungung loe kec turatea kab jeneponto Bungung Loe Turatea Jeneponto Regency									
									#DESA BUNGUNG LOE Turatea Jeneponto Regency South Sulawesi									
									#DESA DATARA Bontoramba Jeneponto Regency South Sulawesi									
									#DESA GANTARANG Kelara Jeneponto Regency South Sulawesi									
									#DESA GARASSIKANG West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi									
									#Desa Garing Tompobulu Gowa Regency South Sulawesi									

								#Desa Jipang South Bontonompo Gowa Regency South Sulawesi											
								#DESA JOMBE Turatea Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#Desa Kalaserena Bontonompo Gowa Regency South Sulawesi											
								#Desa Kalobba Tellu Limpoe Sinjai Regency South Sulawesi											
								#desa kanite dusun kanite Popo South Galesong Takalar Regency											
								#Desa Kanjilo Barombong Gowa Regency South Sulawesi											
								#desa kapita kec bangkala kab jeneponto Kapita Bangkala Jeneponto Regency											
								#DESA KARELAYU Tamalatea Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#Desa Katangka Bontonompo Gowa Regency South Sulawesi											
								#DESA KAYU LOE BARAT Turatea Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#desa lakatong Lakatong Mangara Bombang Takalar Regency											

								#Desa Lalong Kec. Walenrang Kab. Luwu Lalong Walenrang Luwu Regency												
								#DESA LANGKURA Turatea Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#Desa Lassa- lassa Bontolempanga n Gowa Regency South Sulawesi												
								#DEsa Lassa- lassa Bontolempanga n Gowa Regency South Sulawesi												
								#DESA LENTU Bontoramba Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#DESA MANGEPONG Turatea Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#desa mangindara Mangindara South Galesong Takalar Regency												
								#DESA MANJANGLOE Tamalatea Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#Desa Manjapai Bontonompo Gowa Regency South Sulawesi												
								#Desa Moncobalang Barombong Gowa Regency South Sulawesi												
								#Desa Moncongloe Manuju Gowa Regency South Sulawesi												



									#Desa Paccellekang Pattalassang Gowa Regency South Sulawesi													
									#desa paitana kec turatea kab jeneponto Paitana Turatea Jeneponto Regency													
									#DESA PAITANA Turatea Jeneponto Regency South Sulawesi													
									#Desa Pakatto Bontomarannu Gowa Regency South Sulawesi													
									#Desa Panaikang Pattalassang Gowa Regency South Sulawesi													
									#desa panyangkalang kec marbo kab takalar Panyangkalang Mangara Bombang Takalar Regency													
									#Desa Pao Barombang Gowa Regency South Sulawesi													
									#DESA PAPALUANG West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi													
									#Desa Parangbanoa Pallangga Gowa Regency South Sulawesi													
									#DESA PARASANGENG BERU Turatea Jeneponto Regency South Sulawesi													



								#desa timusu kec liriaja kab soppeng Timusu Lili Riaja Soppeng Regency										
								#Desa Tindang South Bontonompo Gowa Regency South Sulawesi										
								#desa tolo kec kelare kab jeneponto Tolo Tolo Kelara										
								#DESA TOMBOLO Kelara Jeneponto Regency South Sulawesi										
								#DESA TONROKASSI BARAT Tamalatea Jeneponto Regency South Sulawesi										
								#DESA TONROKASSI Tamalatea Jeneponto Regency South Sulawesi										
								#DESA TONROKASSI TIMUR Tamalatea Jeneponto Regency South Sulawesi										
								#DESA TUJU West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi										
								#DESA TURATEA Tamalatea Jeneponto Regency South Sulawesi										
								#DESA TURATEA TIMUR Tamalatea Jeneponto Regency South Sulawesi										
								#Dusun I Ciro- Ciroe Watang Pulu Sidenreng Rappang Regency										

									#Dusun I dan II Duapitue Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi										
									#Dusun I dan II Talawe Watang Sidenreng Sidenreng Rappang Regency										
									#Dusun I dan II Watang Sidenreng Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi										
									#Dusun I, II dan III Sereang Maritengngae Sidenreng Rappang Regency										
									#Dusun II Mattiro Ciro- Ciroe Watang Pulu Sidenreng Rappang Regency										
									#Jl. Lamaloang Lapadde Ujung Pare-Pare City										
									#Jl. M. Yusuf Galung Maloang Bacukiki Pare- Pare City										
									#Kab. Barru Barru Regency South Sulawesi ID										
									#Kab. maros Maros Regency South Sulawesi ID										
									#Kabupaten Enrekang Enrekang Enrekang Regency South Sulawesi										
									#Kabupaten Luwu Timur East Luwu Regency South Sulawesi ID										
									#Kabupaten Pinrang Pinrang Regency South Sulawesi ID										

								#Kec. Bontomatene, Kec. Pasimasunggu Timur, Kec. Pasimarannu Selayar Islands Regency South Sulawesi ID													
								#Kec. Pasimasunggu Timur, Kec. Pasimasunggu Selayar Islands Regency South Sulawesi ID													
								#Kec. Sabbang, Sabbang Selatan, Baebunta, Baebunta Selatan, Masamba, Malangke, Malbar, Mappideceng, Sukamaju, Sukamaju Selatan, Bone- Bone dan Tana Lili North Luwu Regency South Sulawesi ID													
								#Kec.Baebunta Kab.Luwu Utara Baebunta North Luwu Regency South Sulawesi													
								#kecamatan bajeng kabupaten gowa Bajeng Pattallassang Takalar Regency													

								#Kecamatan Baruppu, Awan Rante Karua, Dende Piongan napo, Sesean Suloara, Kapala Pitu, Sopai, Sesean, Kesu, Sanggalani, Rantebua, Buntao, Rantepao, Tondon, Tallunglipu, Tikala, Nanggala,sa€™ dan, Bangkelikila, balusu, Rindingallo, Buntu Pepasan. North Toraja												
								#Kecamatan Donri-Donri, Marioriwawa dan Lalabata Soppeng Regency South Sulawesi ID												
								#kecamatan galesong kabupaten takalar Galesong Takalar Regency South Sulawesi												
								#kecamatan galesong selatan kabupaten takalar South Galesong Takalar Regency South Sulawesi												
								#Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Marioriwawa Soppeng Regency South Sulawesi ID												
								#Kecamatan Marioriwawo, Marioriwawa Soppeng Regency South Sulawesi ID												
								#kecamatan pallangga kabupaten gowa Pallangga Gowa Regency South Sulawesi												

								#kecamatan polongbangken g selatan kabupaten takalar South Polombangken g Takalar Regency South Sulawesi												
								#kecamatan polongbangken g utara North Polombangken g Takalar Regency South Sulawesi												
								#kecamatan sanrobone, kabupaten Takalar Sanrobone Takalar Regency South Sulawesi												
								#Kecamatan Turikale, Maros baru, Moncongloe, Tompobulu, Simbang, Cenrana, Caba, Mallawa Maros Regency South Sulawesi ID												
								#kel baji minasa kec gantarang keke kab bantaeng Bajiminasa Gantarangkeke Bantaeng Regency												
								#kel banyorang kec tompobulu ksb bsntseng Banyorang Tompobulu Bantaeng Regency												
								#kel biring kassi kec binamu kab jeneponto Biringkassi Binamu Jeneponto Regency												

							#Kel. Palleko Kec. Polongbangken g Utara dan Desa Sawakung Kec. Galesong Selatan Takalar Regency South Sulawesi ID												
							#KELOMPOK TANI A.PANGERANG DESA LAMAkkARASE NG KECAMATAN ULAWENG KABUPATEN BONE Lamakkaraseng Ulaweng Bone Regency												
							#Kelompok Tani Bontomanai (lalo) Jeneponto Regency South Sulawesi ID												
							#Kelompok Tani Harapan Jaya Paccerakkang South Ponrang Luwu Regency												
							#Kelompok Tani Jaya Mandiri dan Kelompok Tani Balutan Jaya desa Balutan Kec. Bupon Kab. Luwu Lawewe Baebunta North Luwu Regency												
							#Kelompok Tani Kalibirang 1 (Mantan) Jeneponto Regency South Sulawesi ID												
							#Kelompok Tani Kalibirang 2 (M. Darwis) Jeneponto Regency South Sulawesi ID												



								#kelompok tani semangat baru Turu Cinnae Lamuru Bone Regency											
								#KELOMPOK TANI SIPATUO DESA TEAMALALA KECAMATAN ULAWENG KABUPATEN BONE Tea Malala Ulaweng Bone Regency											
								#kelurahan bonto bulaeng kecamatan sinoa kabupaten bantaeng Bonto Bulaeng Sinoa Kabupaten Bantaeng											
								#KELURAHAN BONTO RAYA Batang Sub-District Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#KELURAHAN BULUJAYA West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#kelurahan karatuang kecamatan bantaeng kabupaten bantaeng Karatuang Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng											
								#kelurahan lanna kec parangloe kab gowa Lanna Parangloe Gowa Regency											
								#kelurahan manjang loe kec turatea kab jeneponto Manjangloe Tamalatea Jeneponto Regency											

								#Kelurahan Mannanti Tellu Limpoe Sinjai Regency South Sulawesi														
								#KELURAHAN TOGO-TOGO Batang Sub- District Jeneponto Regency South Sulawesi														
								#KELURAHAN TOLO BARAT Kelara Jeneponto Regency South Sulawesi														
								#KELURAHAN TOLO KOTA Kelara Jeneponto Regency South Sulawesi														
								#KELURAHAN TOLO SELATAN Kelara Jeneponto Regency South Sulawesi														
								#KELURAHAN TOLO UTARA Kelara Jeneponto Regency South Sulawesi														
								#Kota Palopo														
								#Lingkungan I dan II Tanru Tedong Duapitue Sidenreng Rappang Regency Regency														
								#Madallo Watang Sawitto Pinrang Regency South Sulawesi														
								#Parasangan Beru Jeneponto Regency South Sulawesi ID														
								#Sarempo Watang Sawitto Pinrang Regency South Sulawesi														
								#Terminal Induk Lumpue Lumpue West Bacukiki Pare- Pare City														

									#tersebar di 14 Kecamatan Kabupaten Wajo										
2.00	0 2	01.00	0 1	0 0 2	Pengembangan Jaringan Irigasi				# Ajuraja Takkalalla Wajo Regency	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpipaan, Irigasi Perpompaan, Sumur Bor dan Embung	20000 Ha	Meningkatnya luas lahan yang di Aliri	20000 Ha	60,000,000,000.0	65,000,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura			
							Kabupaten Bantaeng	# Allaere Tanralili Maros Regency											
							Kabupaten Barru	# Bajiminasa Rilau Ale Bulukumba Regency											
							Kabupaten Bone	# Balocci Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi											
							Kabupaten Bulukumba	# Bocco Takkalalla Wajo Regency											
							Kabupaten Enrekang	# Bola Bulu Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang											
							Kabupaten Gowa	# Bone Regency South Sulawesi ID											
							Kabupaten Jeneponto	# Bonto Marannu Lau Maros Regency											
							Kabupaten Kepulauan Selayar	# Bonto Matene Rilau Ale Bulukumba Regency											
							Kabupaten Luwu	# Bonto Rannu Kajang Kabupaten Bulukumba											
							Kabupaten Luwu Timur	# Bontoa Mandai Maros Regency											
							Kabupaten Luwu Utara	# Ceppaga Takkalalla Wajo Regency											
							Kabupaten Maros	# Dannuang Ujung Loe Bulukumba Regency											
							Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	# Garanta Ujung Loe Bulukumba Regency											
							Kabupaten Pinrang	# Inrello Keera Wajo Regency											
							Kabupaten Sidenreng Rappang	# Jangan-Jangan Pujananting Kabupaten Barru											
							Kabupaten Sinjai	# Kalosi Kalosi Alla											

							Kabupaten Soppeng	# Lagoari Takkalalla Wajo Regency										
							Kabupaten Takalar	# Ledan Buntu Batu Enrekang Regency										
							Kabupaten Tana Toraja	# Leweng Takkalalla Wajo Regency										
							Kabupaten Toraja Utara	# Lonrong Ujung Loe Bulukumba Regency										
							Kabupaten Wajo	# Manjalling Ujung Loe Bulukumba Regency										
							Kota Palopo	# Mattampae Ponre Bone Regency										
							Kota Parepare	# Mekkelak Curio Enrekang Regency										
								# Pabaloran Curio Enrekang Regency										
								# Paccerakkang South Ponrang Luwu Regency										
								# Palang Barae Gantarang Bulukumba Regency										
								# Pangalli East Walenrang Luwu Regency										
								# Paojepe Keera Wajo Regency										
								# Pattiro Deceng Camba Maros Regency										
								# Salobulo Sajoanging Wajo Regency										
								# Sawaru Camba Maros Regency										
								# Segeri Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi										
								# Sengeng Palie Lappariaja Bone Regency										
								# Sokkolia Bontomarannu Gowa Regency										

							# Sumbang Curio Enrekang Regency													
							# Tampunia Radda Belopa Luwu Regency													
							# Tanete Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang													
							# Terasa West Sinjai Sinjai Regency													
							# Timpuseng Camba Maros Regency													
							# Tua Majauleng Wajo Regency													
							# Wajo Regency South Sulawesi ID													
							# West Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi													
							#. Rantebua, Lembang Buangin, Kelompok Tani Siama" Buangin Rantebua North Toraja Regency													
							#BARAKA KECAMATAN BARAKA. KEB ENREKANG Baraka Baraka Enrekang Regency													
							#BAROKO KEC BAROKO. KAB ENREKANG Baroko Baroko Enrekang Regency													
							#Desa Alausalo, mamminasae Gilireng Wajo Regency South Sulawesi													
							#Desa Arajang, Desa lamata, polewalie, kelurahan gilireng, desa alausalo Gilireng Wajo Regency South Sulawesi													

								#DESA BARANA West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi													
								#Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Biru Kahu Bone Regency													
								#Desa Bola Bola Wajo Regency South Sulawesi													
								#Desa Bonto Padang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Bonto Padang Kahu Bone Regency													
								#Desa Bonto Salama Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai Bonto Salama West Sinjai Sinjai Regency													
								#Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba													
								#desa botto Botto Takkalalla Wajo Regency													
								#desa bungung loe kec turatea kab jeneponto Bungung Loe Turatea Jeneponto Regency													
								#desa empoang kec binamu kab jeneponto Empoang Binamu Jeneponto Regency													
								#Desa Inrello, awo, awota, pattirolokka, lalliseng, paojepe, labawang Keera Wajo Regency South Sulawesi													

								#Desa Jaling Jaling Awangpone Bone Regency											
								#Desa Jampu Kec. Liliraja Kab. Soppeng Jampu Lili Riaja Soppeng Regency											
								#Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Labuaja Kahu Bone Regency											
								#Desa Lampoko Lampoko Lampoko Barebbo											
								#desa langkura kec turatea kab jeneponto Langkura Turatea Jeneponto Regency											
								#Desa Lattimu, sanreseng ade, ujung tanah, rajamawellang, bola, lempong, manurung, balielo Bola Wajo Regency South Sulawesi											
								#Desa Lemoape Lemoape Palakka Bone Regency											
								#desa lempong Lemping Bola Wajo Regency											
								#desa manjang loe lec turatea kab jeneponto Manjangloe Tamalatea Jeneponto Regency											
								#desa manyili Manyilli Takkalalla Wajo Regency											
								#Desa Mario Mario Libureng Bone Regency											

								#Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone Melle Palakka Bone Regency										
								#Desa Otting - Dongi Dongi Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang										
								#Desa Padang Kecamatan Gantarang Kab.Bulukumba										
								#Desa Palambarae Kecamatan Gantarang KabupatenBulu kumba										
								#Desa Patila Tanalili Tana Lili North Luwu Regency South Sulawesi										
								#Desa Penrang, Tadangpalie, lawesso, benteng, doping, temmanbarang , walanga Penrang Wajo Regency South Sulawesi										
								#Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba										
								#DESA RUMBIA Rumbia Jeneponto Regency South Sulawesi										
								#Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kab.Bulukumba										
								#desa sapanang kec binamu kab jeneponto Sapanang Binamu Jeneponto Regency										



							#Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe KabupatenBulu kumba												
							#Desa Simpellu Kec. Pitumpanua, Kab Wajo Kelompok Tani Mattirovalie Simpellu Pitumpanua Wajo Regency												
							#desa timusu kec liliraja kab soppeng Timusu Lili Riaja Soppeng Regency												
							#DESA TIMUSU KEC LILIRAJA KAB SOPPENG Timusu Lili Riaja Soppeng Regency												
							#Desa Tompobulu Kec. Bulupoddo, Kab. Sinjai Tompobulu Bulupoddo Sinjai Regency												
							#Desa Tua, Benteng, Kelurahan Paria, Kelurahan Limpomajang, Desa Tajo,Desa Watang Rumpia, Rumpia, Majauleng Wajo Regency South Sulawesi												
							#Desa Tua, Macanang, laerung, paria, uraiyang, watang rumpia Majauleng Wajo Regency South Sulawesi												
							#Desa Ulo Ulo Tellu Siattinge Bone Regency												

								#Desa Waetuo, Desa Wewangrewu, Desa Ujunge, pajalele, Nepo, Desa Assorajang Tana Sitolo Wajo Regency South Sulawesi											
								#DI Mattirodeceng (P3A) Arinhua Kindang Kabupaten Bulukumba											
								#dusun alau salo Awota Keera Wajo Regency											
								#dusun bentenge Turu Adae Ponre Bone Regency											
								#dusun bonto langga desa tino kec tarowang kab jeneponto Tino Tarowang Jeneponto Regency											
								#Dusun Dedekan Sumillan Alla Enrekang Regency											
								#Dusun II Mattiro Ciro- Ciroe Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang											
								#dusun kacumpureng Waji Tellu Siattinge Bone Regency											
								#Dusun Kandeapi Utara Kelurahan Buntu Barana Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara Buntu Barana Tikala North Toraja Regency											

								#dusun lacakkeng Tanrongi Pitumpanua Wajo Regency											
								#dusun mauleng Watu Barebbo Bone Regency											
								#dusun pampupuran Masalle Enrekang Regency South Sulawesi											
								#dusun pasaran, kelurahan tanete Anggeraja Enrekang Regency South Sulawesi											
								#dusun saluwala Buntu Barana Curio Enrekang Regency											
								#dusun tanrongi Tanrongi Pitumpanua Wajo Regency											
								#Dusun Toroliya Bialo Gantarang Bulukumba Regency											
								#Dusun watang Bola Rajamawellang Bola Wajo Regency											
								#Kabupaten Enrekang Enrekang Enrekang Regency South Sulawesi											
								#Kec. Soppeng Riaja Barru Regency South Sulawesi ID											
								#kel biring kassi kec binamu kab jeneponto Biringkassi Binamu Jeneponto Regency											
								#kel. mattapa walie											

							#Kelompok Tani Bangsalayya I Borong Rappoa Kindang Kabupaten Bulukumba												
							#kelompok tani bantileng desa bengo kecamatan bengo kabupaten bone Bengo Bone Regency South Sulawesi												
							#kelompok tani Bina Karya Malela Suli Luwu Regency												
							#Kelompok Tani Bungayya Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan												
							#kelompok tani cappa ujung desa bulu allaporeng kecamatan bengo kab.bone Bulu Allaporeng Bengo Bone Regency												
							#KELOMPOK TANI CEMPALAGIE DESA WALIMPONG KECAMATAN BENGU KABUPATEN BONE Walimpong Bengo Bone Regency												
							#KELOMPOK TANI ELLUE DESA WALIMPONG KECAMATAN BENGU KABUPATEN BONE Walimpong Bengo Bone Regency												

								#kelompok tani harapan baru Kaladi Darussalam West Suli Luwu Regency												
								#Kelompok Tani Karawa Saronda West Bajo Luwu Regency												
								#kelompok tani lempung seratu desa bulu aallapporenge kecamatan bengo kabupaten bone Bulu Allaporenge Bengo Bone Regency												
								#KELOMPOK TANI MAMMINASAE DESA TUNGKE KECAMATAN BENGO KABUPATEN BONE Tungke Bengo Bone Regency												
								#KELOMPOK TANI PANGEMPANG KECAMATAN BENGO KABUPATEN BONE Bulu Allaporenge Bengo Bone Regency												
								#kelompok tani pasir putih Babang South Larompong Luwu Regency												
								#Kelompok Tani Pembaharuan Padang Tuju Bupon Luwu Regency												
								#Kelompok Tani Sikamali Saluinduk Bupon Luwu Regency												
								#Kelompok Tani Suso Batu Sampeang West Bajo Luwu Regency												

								#Kelompok Tani Tamarunang II Arinhua Kindang Kabupaten Bulukumba											
								#KELOMPOK TANI TENGGAE DESA WALIMPONG KECAMATAN BENGGO KABUPATEN BONE Walimpong Bengo Bone Regency											
								#Kelompok Tani Wiring Tappareng Lempong Bola Wajo Regency											
								#kelurahan bajiminasa kec gantarang keke kab bantaeng Bajiminasa Gantarangkeke Bantaeng Regency											
								#Kelurahan Balakia, Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai Balakia West Sinjai Sinjai Regency											
								#kelurahan bonto bulaeng kecamatan sinoa kabupaten bantaeng Bonto Bulaeng Sinoa Kabupaten Bantaeng											
								#kelurahan borongloe kecamatan pajukukang kabupaten bantaeng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan ID											

								#Kelurahan Bulete, Benteng, Tobarakka, Kalulu, alesilurung, Lauwa, lompoloang, simpellu, tanrongi, lacinde Pitumpanua Wajo Regency South Sulawesi												
								#kelurahan Cina, Desa Tadangpalie, lagosi, pammana, kampiri, simpurusia, pallawarukka Pammana Wajo Regency South Sulawesi												
								#kelurahan karatuang kecamatan bantaeng kabupaten bantaeng Karatuang Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng												
								#kelurahan lembang gantarangkeke kecamatan tompobulu kabupaten bantaeng Lembang Gantarangkeke Tompobulu Kabupaten Bantaeng												
								#Kelurahan Salubattang Telluwanua Palopo City South Sulawesi												
								#Lahan Kelompok Tani "Batubassi" Desa Jenetaesa, Kecamatan Bantimurung, Kab. Maros Jenetaesa Simbang Maros Regency												

								#Lahan Kelompok Tani "Binamandiri" Dusun Bonto Cinde, Desa Allaere, Kec. Tanralili, Kab Maros Allaere Tanralili Maros Regency													
								#Lahan Kelompok Tani Malaka II, Desa Cenrana Baru, Dusun Malaka, Kab. Maros Cenrana Baru Cenrana Maros Regency													
								#Iamarua Lamarua Takkalala Wajo Regency													
								#Iimpomajang, batu-batu, kaca Mario Riwawo Soppeng Regency South Sulawesi													
								#lingkungan topitu Bulete Pitumpanua Wajo Regency													
								#Makkaninong Bonto Macinna Gantarang Bulukumba Regency													
								#Peneki, Leweng, Botto,, Ajuraja. Iagoari, Iamarua, soro, Bocco, ceppaga, manyili, pantai timur													
								#tadangpalie Tadangpalie Pammana Wajo Regency													
								#ujung tanah bola wajo Ujungtanah Bola Wajo Regency													



2.00	0 2	01.00	0 1	0 0 3	Pengadaan Alsintan Pasca Panen				Kabupaten Bulukumba				Pembangunan Pabrik Gabah dan Tersedianya Mesin Pengolahan Jagung	1 Paket	Terbangunnya pabrik gabah dan pengolahan jagung	30 Ton	16,000,000,000.0	11,000,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
									Kabupaten Gowa				Operasional Pengembangan Pabrik gabah dan Pengolahan Jagung	0 Paket	Terlaksananya Operasional Pengembangan Pabrik Gabah dan Pengolahan Jagung	0 Paket			
									Kabupaten Luwu										
									Kabupaten Wajo										
2.00	0 2	01.00	0 1	0 0 4	Pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai Sentra Informasi Pertanian			10 kab lokasi BPP Percontohan Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Aparat yang dilatih SMIPP	50 orang	Meningkatnya kapasitas Penyuluh yang dilatih	50 orang	950,000,000.0	1,300,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2.00	0 2	01.00	0 4	0 0 4	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN					Jumlah produksi kedelai dan palawija	16751 Ton						7,275,000,000.0	7,600,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
										Jumlah produksi padi	6329309 Ton								
										Produktivitas padi	51 Kw/Ha								
										Produktivitas jagung	57 Kw/Ha								
										Produktivitas kedelai dan palawija	13 Kw/Ha								
										Jumlah produksi jagung	2560267 Ton								
2.00	0 2	01.00	0 4	0 0 4	Peningkatan Produksi dan Pengembangan Talas Satoimo			Kabupaten Bone	Cakupan pengembangan talas satoimo	11 lokasi	Berkembangnya talas satoimo	11 lokasi	250,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				
Kabupaten Gowa																			
Kabupaten Jeneponto																			
Kabupaten Luwu																			
Kabupaten Luwu Timur																			
Kabupaten Luwu Utara																			
Kabupaten Maros																			
Kabupaten Soppeng																			
Kabupaten Takalar																			
Kabupaten Tana Toraja																			
Kabupaten Toraja Utara																			
Kabupaten Wajo																			

2.00	0 2	01.00	0 4	0 0 5	Peningkatan Produksi dan Pengembangan Kacang-Kacangan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kelompok binaan dalam rangka pengembangan produksi kacang-kacangan	14 Kelompok	Meningkatnya hasil produksi	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	0 2	01.00	0 4	0 0 6	Peningkatan Produksi dan Pengembangan Umbi-Umbian			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kelompok binaan pengembangan umbi-umbian	14 kelompok	Meningkatnya hasil produksi	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	0 2	01.00	0 4	0 1 6	Pertemuan Koordinasi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			Kota Makassar			Pertemuan Koordinasi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2 kali	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2 kali	300,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	0 2	01.00	0 4	0 1 7	Bimbingan Teknis Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			Kota Makassar			Bimbingan Teknis Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	40 orang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	40 orang	225,000,000.0	225,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	0 2	01.00	0 4	0 1 9	Perbanyak Benih Jagung			Kabupaten Maros			Luas Perbanyak Benih Jagung Komposit	15 Ha	Meningkatnya ketersediaan benih sumber jagung komposit	10 Ton	400,000,000.0	450,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
										Luas Perbanyak Benih Jagung Hibrida	10 Ha	Meningkatnya ketersediaan benih sumber jagung hibrida	5 Ton				
2.00	0 2	01.00	0 4	0 2 0	Perbanyak Benih Kedelai			Kabupaten Maros			Jumlah benih sumber yang dikembangkan	550 Kg	Meningkatnya jumlah benih yang dihasilkan	550 Ton	150,000,000.0	175,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	0 2	01.00	0 4	0 2 1	Perbanyak Benih Kacang Tanah			Kabupaten Maros			Jumlah benih sumber yang dikembangkan	520 Kg	Meningkatnya jumlah benih yang dihasilkan	520 Ton	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	0 2	01.00	0 4	0 2 2	Perbanyak Benih Kacang Hijau			Kabupaten Maros			Luas perbanyak Benih Kacang Hijau	3 Ha	Meningkatnya produksi benih sumber kacang hijau	1 Ton	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	0 2	01.00	0 4	0 2 5	Pengembangan SDM Kelembagaan Perbenihan Tanaman Pangan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Benih yang di Uji	350000 Kg	Meningkatnya Kualitas Benih	100 %	450,000,000.0	450,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.00	0 2	01.00	0 4	0 2 6	Peningkatan Produksi dan Pengembangan Padi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kelompok binaan	60 kelompok	Meningkatnya produksi padi	60 kelompok	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
2.00	0 2	01.00	0 4	0 2 7	Peningkatan Produksi dan Pengembangan Jagung dan Serealia			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kelompok binaan jagung	60 kelompok	Meningkatnya produksi jagung	100 %	250,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
2.00	0 2	01.00	0 4	0 2 8	Perbanyak Benih Padi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah benih sumber yang dikembangkan	2800 kg	Meningkatnya jumlah benih yang dihasilkan	2800 Ton	1,800,000,000.0	2,000,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
2.00	0 2	01.00	0 4	0 2 9	Penguatan dan Pengembangan Kelembangan Perbenihan Tanaman Pangan			Kabupaten Maros			Jumlah IKB yang dibina	27 Unit	Terbinanya IKB untuk pengembangan perbenihan tanaman pangan	27 Unit	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
2.00	0 2	01.00	0 4	0 3 0	Perbanyak Benih Tanaman Pangan			Kabupaten Maros			Jumlah Benih Tanaman Pangan yang dikembangkan	5 Ton	Meningkatnya jumlah Benih yang dihasilkan	10 Ton	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
<b>2.00</b>	<b>0 2</b>	<b>01.00</b>	<b>0 5</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU PRODUK HORTIKULTURA</b>					<b>Jumlah produksi tanaman hortikultura</b>	<b>22806 Ton</b>				<b>5,400,000,000.0</b>	<b>5,800,000,000.0</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>		
										<b>Produktivitas tanaman hortikultura</b>	<b>57 Kw/Ha</b>								
										<b>Jumlah bibit Hortikultura bersertifikat yang siap diperbanyak pada IKB</b>	<b>10000 Pohon</b>								
2.00	0 2	01.00	0 5	0 0 1	Peningkatan Produksi dan Mutu serta Pengembangan Tanaman Hias			Kabupaten Gowa			Jumlah/jenis tanaman hias yang dikembangkan	6 Paket	Berkembangnya tanaman hias	6 Jenis	300,000,000.0	350,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman		
								Kota Makassar											
2.00	0 2	01.00	0 5	0 0 2	Peningkatan Produksi dan Mutu serta Pengembangan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah benih yang dikembangkan	3 Paket	Meningkatnya produksi sayuran	100 %	300,000,000.0	350,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
2.00	0 2	01.00	0 5	0 0 3	Peningkatan Produksi dan Mutu serta Pengembangan Buah-Buahan			Provinsi Sulawesi Selatan			Cakupan lokasi/kelompok pembinaan	27 Kelompok	Meningkatnya produksi buah-buahan	27 Kelompok	1,250,000,000.0	1,500,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
2.00	0 2	01.00	0 5	0 0 7	Pengembangan dan Pemeliharaan Kebun Hortikultura			Kabupaten Bantaeng			Cakupan monev hortikultura	16 IKB	Meningkatnya kualitas bibit yang dikembangkan	16 IKB	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
								Kabupaten Bulukumba											
								Kabupaten Gowa											

								Kabupaten Jenepero														
								Kabupaten Maros														
								Kabupaten Sidenreng Rappang														
								Kabupaten Sinjai														
								Kabupaten Tana Toraja														
								Kabupaten Wajo														
								Kota Makassar														
								Kota Palopo														
2.00	02	01.00	05	08	0	Perbanyak Benih dan Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura		Kabupaten Gowa			Jenis Benih yang dikembangkan	12 Jenis	Meningkatnya jumlah bibit yang dihasilkan	3500 Pohon	750,000,000.0	800,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					
2.00	02	01.00	05	09	0	Pertemuan Koordinasi Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura		Kota Makassar			Jumlah Peserta Pertemuan	120 Orang	Meningkatnya kapasitas SDM perbenihan	120 Orang	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					
2.00	02	01.00	05	10	0	Perbanyak Benih Hortikultura		Kabupaten Gowa			Jenis Benih/Bibit Hortikultura yang dikembangkan	10 Jenis	Meningkatnya jenis Benih/Bibit yang dihasilkan	10 Jenis	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					
2.00	02	01.00	05	11	1	Penyediaan Benih/Bibit Tanaman Hortikultura		Kabupaten Gowa			Jenis Benih Hortikultura yang disediakan	8 Jenis	Termanfaatnya Benih Hortikultura	100 %	500,000,000.0	500,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					
2.00	02	01.00	05	12	0	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura		Kabupaten Gowa			Jumlah IKB yang dibina	17 Unit	Terbinanya IKB untuk pengembangan perbenihan hortikultura	17 Unit	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					
<b>2.00</b>	<b>02</b>	<b>01.00</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PENGOLAHAN HASIL, PASCA PANEN, PENGEMBANGAN AGRIBISNIS, DAN PENYEBARAN INFORMASI</b>				<b>Tingkat kehilangan hasil panen</b>	<b>8 %</b>				<b>1,600,000,000.0</b>	<b>1,665,000,000.0</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>					
										<b>Jumlah Kelompok Tani yang menjalankan usaha agribisnis</b>	<b>25 Poktan</b>											
2.00	02	01.00	06	03	0	Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil		Provinsi Sulawesi Selatan			Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pengolahan Hasil dan Pasca Panen	20 Kelompok	Termanfaatnya Pembanguna n Pabrik Gabah dan pengolahan hasil TPH	1 Dokumen	650,000,000.0	665,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					

2.00	0 2	01.00	0 6 4	0 0	Penyebaran Informasi Agribisnis, Pengolahan Hasil dan Pasca Panen			Provinsi Sulawesi Selatan				Frekuensi Promosi Agribisnis	10 Kali	Terpromosinya Produk Agribisnis Asal Sulawesi Selatan	10 kali	550,000,000.0	600,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura			
2.00	0 2	01.00	0 6 5	0 0	Fasilitasi Sertifikasi Jaminan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura			Provinsi Sulawesi Selatan				Tersusunnya Dokumen Jaminan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	8 Dokumen	Termanfaatkannya Dokumen Jaminan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	8 Dokumen	400,000,000.0	400,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura			
2.00	0 2	01.00	0 7	0 0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN					Cakupan ketersediaan jaringan irigasi	20000 Ha					46,987,000,000.0	51,737,985,999.50	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura			
										Cakupan ketersediaan alat dan mesin pertanian	400 Unit										
2.00	0 2	01.00	0 7 2	0 0 2	Penyediaan Bantuan dan Pengembangan Jalan Tani								Jumlah jalan tani yang dibangun	100 Paket	Termanfaatkannya Jalan Tani yang telah dibangun	100 %	15,900,000,000.0	17,832,985,999.50	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
																				Kabupaten Bantaeng	# Arajang Gilireng Wajo Regency
																				Kabupaten Barru	# Aska Sinjai Sel. Kabupaten Sinjai
																				Kabupaten Bone	# Bajiminasa Rilau Ale Bulukumba Regency
																				Kabupaten Bulukumba	# Batang Tongka Bone-Bone North Luwu Regency
																				Kabupaten Enrekang	# Belawae Pitu Riase Sidenreng Rappang Regency
																				Kabupaten Gowa	# Biring Ere Bungoro Pangkajene Dan Kepulauan Regency
																				Kabupaten Jeneponto	# Bola Bulu Pitu Riase Sidenreng Rappang Regency
																				Kabupaten Kepulauan Selayar	# Bonto Baji Kajang Bulukumba Regency
																				Kabupaten Luwu	# Bonto Matene Rilau Ale Bulukumba Regency
																				Kabupaten Luwu Timur	# Bonto Perak Pangkajene Pangkajene Dan Kepulauan Regency

							Kabupaten Luwu Utara	# Bontomasila Gantarang Bulukumba Regency											
							Kabupaten Maros	# Bontonlempang Bontoa Maros Regency											
							Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	# Bukit Tinggi Gantarang Bulukumba Regency											
							Kabupaten Pinrang	# Buntu Barana Curio Enrekang Regency											
							Kabupaten Sidenreng Rappang	# Cempa Enrekang Enrekang Regency											
							Kabupaten Sinjai	# Cinnong Sibulue Bone Regency											
							Kabupaten Soppeng	# Corawalie Barebbo Bone Regency											
							Kabupaten Takalar	# Damai Watang Sidenreng Sidenreng Rappang Regency											
							Kabupaten Tana Toraja	# Duampanuae Bulupoddo Sinjai Regency											
							Kabupaten Toraja Utara	# East Bonea Bontomanai Selayar Regency											
							Kabupaten Wajo	# Jojolo Bulukumpa Bulukumba Regency											
							Kota Palopo	# Kalabbirang Minasatene Pangkajene Dan Kepulauan Regency											
							Kota Parepare	# Kassi Balocci Pangkajene Dan Kepulauan Regency											
								# Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan											

								# Labakkang Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi											
								# Lalong Walenrang Luwu Regency											
								# Lamanda Bontotiro Kabupaten Bulukumba											
								# Lamasi Pantai East Walenrang Luwu Regency											
								# Lappacinrana Bulupoddo Sinjai Regency											
								# Luwu Regency South Sulawesi ID											
								# Mangilu Bungoro Pangkajene Dan Kepulauan Regency											
								# Mannanti Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai											
								# Manuju Gowa Regency South Sulawesi											
								# Mattiro Tasi Maros Baru Maros Regency											
								# Minasatene Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi											
								# Pacing Awangpone Bone Regency											
								# Parak Bontomanai Selayar Regency											
								# Parenreng Segeri Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan											
								# Purangi Sendana Palopo City											
								# Salenrang Bontoa Maros Regency											

							# Salusana South Larompong Luwu Regency											
							# Samalewa Bungoro Pangkajene Dan Kepulauan Regency											
							# Sengeng Palie Lappariaja Bone Regency											
							# Sipatokkong Watang Sawitto Pinrang Regency											
							# Soppeng Regency South Sulawesi ID											
							# Sukamukti Sukamaju North Luwu Regency											
							# Sumillan Alla Enrekang Regency											
							# Tabo-Tabo Bungoro Pangkajene Dan Kepulauan Regency											
							# Tana Toraja Regency South Sulawesi ID											
							# Taraweang Labakkang Pangkajene Dan Kepulauan Regency											
							# Tirong Palakka Bone Regency											
							# Tompobulu Bulupoddo Sinjai Regency											
							#. Rantebua, Lembang Buangin, Kelompok Tani Siama" Buangin Rantebua North Toraja Regency											



								#ANGGERAJA. KEC ANGGERAJA. KAB ENREKANG Anggeraja Enrekang Regency South Sulawesi											
								#BARAKA. KEC BARAKA. KAB ENREKANG Baraka Enrekang Regency South Sulawesi											
								#berdikari 2 desa mata allo kec bontomarannu kab gowa Mata Allo Bajeng Gowa Regency											
								#Buloe Lingk. Boli-Bolie Kec. Sajoanging											
								#CURIO. KEC CURO. KAB ENREKANG Curio Enrekang Regency South Sulawesi											
								#Desa Batang Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba Batang Bontotiro Bulukumba Regency											
								#Desa Batu Malonro, Kecamatan Biring bulu, Kabupaten Gowa Batumalonro Biringbulu Gowa Regency											
								#DESA BATU NONI. KECAMATAN ANGGERAJA Batu Noni Anggeraja Enrekang Regency											

								#Desa BatuRappe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa Baturappe Biringbulu Gowa Regency											
								#Desa Belabori Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa											
								#Desa Binturu Larompong Larompong Larompong											
								#Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Biru Kahu Bone Regency											
								#desa bolaramang kec tumbolopao kab gowa Bolaramang Tombolo Pao Gowa Regency											
								#Desa Bonelemo Utara, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu Bone Lemo West Bajo Luwu Regency											
								#Desa Bonto Baji Kec. Kajang Kab. Bulukumba Bonto Baji Kajang Bulukumba Regency											
								#DESA BONTO RAPPO, DUSUN BORONG LOE Tarowang Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#Desa Bontomanai Bontomanai Selayar Regency South Sulawesi											

								#Desa Bontomangir g Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba												
								#desa bontomarannu Bontomarannu South Galesong Takalar Regency												
								#desa bontoparang kec marbo kab takalar Bontoparang Mangara Bombang Takalar Regency												
								#Desa Bontosalama Kecamatan Sinjai Barat												
								#Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa Buakkang Bungaya Gowa Regency												
								#Desa Bungapati Kec.Tanalili Kab.Luwu Utara Bungapati Bone Bone North Luwu Regency												
								#DESA BUNTU BATU. KEC. ENREKANG Buntu Batu Enrekang Regency South Sulawesi												
								#DESA BUNTU MONDONG. KECAMATAN BUNTU BATU Buntu Mondong Buntu Batu Enrekang Regency												
								#Desa Cakke Bone Cakke Bone Awangpone Bone Regency												

								#Desa Cerowali, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Barebbo Bone Regency South Sulawesi														
								#Desa Duampanuae Kecamatan Bulu Poddo Kabupaten Sinjai														
								#Desa Garuntungan Kec. Kindang Kab. Bulukumba Garuntungan Kindang Bulukumba Regency														
								#Desa Gattareng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Gattareng Gantarang Bulukumba Regency														
								#Desa Jaipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa South Bontonompo Gowa Regency South Sulawesi														
								#Desa Kampale Desa Kalosi Kampale Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang														
								#DESA KARELOE Bontoramba Jeneponto Regency South Sulawesi														
								#DESA KASSI Rumbia Jeneponto Regency South Sulawesi														

								#DESA KOLAI. KECAMATAN MALUA Kolai Malua Enrekang Regency											
								#desa langkura kec turatea kab jeneponto Langkura Turatea Jeneponto Regency											
								#DESA LATIMOJONG. KECAMATAN BUNTU BATU Latimojong Buntu Batu Enrekang Regency											
								#Desa Lauwo Kec.Burau Kab.Luwu Timur Lauwo Burau East Luwu Regency											
								#Desa Leang- Leang Bantimurung Maros Regency South Sulawesi											
								#DESA LEBANG MANAI UTARA Rumbia Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#Desa Ledan Kec.Bassesangt empe Kab.Luwu Ledan Bassesangtemp e Luwu Regency											
								#Desa Lembanna Kec. Kajang Kab. Sinjai Lembanna Kajang Bulukumba Regency											
								#DESA LUNJEN. KECAMATAN BUNTU BATU Lunjen Buntu Batu Enrekang Regency											

								#desa mamampang kec tombolopao kab gowa Mamampang Tombolo Pao Gowa Regency											
								#Desa Mangempang, Kecamatan Bugaya, Kabupaten Gowa Mangempang Bugaya Gowa Regency											
								#Desa Marinding West Bajo Luwu Regency South Sulawesi											
								#desa nirannuang kec bontomarannu kab gowa Nirannuang Bontomarannu Gowa Regency											
								#desa Pabundukang, Kecamatan Bontonompo Selatan Pabundukang South Bontonompo Gowa Regency											
								#Desa Paccerakang Kec.Ponrang Selatan South Ponrang Luwu Regency South Sulawesi											
								#DEsa Paconne North Belopa Luwu Regency South Sulawesi											
								#Desa Pada Cengnga Pada Cengnga Dua Boccoe Bone Regency											

								#Desa Padakalawa, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang Padakkalawa Mattiro Bulu Pinrang Regency												
								#desa paitana kec turatea kab jeneponto Paitana Turatea Jeneponto Regency												
								#desa pakatto kec bontomsranu kab gowa Pakatto Bontomarannu Gowa Regency												
								#Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan												
								#DESA PALANGI KEC. BALUSU KAB TORUT Palangi Balusu North Toraja Regency												
								#DESA PANDUNG BATU. KECAMATAN BARAKA Desa Pandung Batu Baraka												
								#Desa Pangapparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang Lembang Pinrang Regency South Sulawesi												
								#desa panyangkalang kec mabo kab takalar Panyangkalang Mangara Bombang Takalar Regency												
								#Desa Paroto Lili Rilau Soppeng Regency South Sulawesi												

								#desa popo Popo South Galesong Takalar Regency														
								#DESA PUNAGAYYA Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi														
								#Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang Lembang Pinrang Regency South Sulawesi														
								#desa romangloe kec bontomarannu kab gowa Romangloe Bontomarannu Gowa Regency														
								#DESA SIAMBO. KECAMATAN ANGGERAJA Siambo Anggeraja Enrekang Regency														
								#Desa Sidobinangun Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara Sidobinangun Bone-Bone North Luwu Regency														
								#Desa Siloro Bontoa Minasatene Pangkajene Dan Kepulauan Regency														
								#DESA SINGKI. KECAMATAN ANGGERAJA Singki Anggeraja Enrekang Regency														



								#Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang Mattirosompe Pinrang Regency South Sulawesi										
								#desa sorkolia kec bontomarannu kab gowa Sokkolia Bontomarannu Gowa Regency										
								#desa tabinjai kec tombolopao kab gowa Tabbinjai Tombolo Pao Gowa Regency										
								#Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai										
								#DESA TALLUNG TONDOK. KECAMATAN MALUA Tallung Tondok Malua Enrekang Regency										
								#DESA TAMPO. KECAMATAN ANGGERAJA Tampo Anggeraja Enrekang Regency										
								#Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba										
								#desa tanete kec tompobulu kab gowa Tanete Tompobulu Gowa Regency										

																					#DESA TANGRU. KECAMATAN MALUA Tangru Malua Enrekang Regency
																					#Desa Tanrara South Bontonompo Gowa Regency South Sulawesi
																					#DESA TAROWANG , DUSUN TANGGAKAN Tarowang Jeneponto Regency South Sulawesi
																					#DESA TAULAN. KEC CENDANA. KAB ENREKANG Cendana Enrekang Regency South Sulawesi
																					#desa tellulimpoe kec marioriawa kab soppeng Tellulimpoe Mario Riawa Soppeng Regency
																					#DESA TINDALUN. KECAMATAN ANGGERAJA Tindallun Anggeraja Enrekang Regency
																					#desa toddotoa kec pallangga kab gowa Toddotoa Pallangga Gowa Regency
																					#Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai
																					#Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

								#desa towata Towata North Polombangkeng Takalar Regency											
								#Desa Tulung Indah, Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara Tulung Indah Sukamaju North Luwu Regency											
								#desa ulu galung kec eremerasa kab bantaeng Ulugalung Eremerasa Bantaeng Regency											
								#dusun boddia desa bontoparang kec marbo kab takalar Bontoparang Mangara Bombang Takalar Regency											
								#Dusun Bonne Sipatuo Patamanua Pinrang Regency											
								#dusun bontobiraeng desa bontoramba kec pallangga kab gowa Bontoramba Pallangga Gowa Regency											
								#dusun bontobiraeng desa kampili kec pallangga kab gowa Kampili Pallangga Gowa Regency											
								#dusun borongrappo desa sorkolia kec bontomarannu kab gowa Sorkolia Bontomarannu Gowa Regency											
								#dusun bottoulu Liu Sabbang Paru Wajo Regency											

							#dusun cennoe Belo Ganra Soppeng Regency											
							#Dusun Cenrana dan Carawali Carawali Watang Pulu Sidenreng Rappang Regency											
							#Dusun Kaluku, Desa Mangeloreng, Kec. Bantimurung, Kab. Maros Mangeloreng Bantimurung Maros Regency											
							#Dusun Kandeapi Utara Kelurahan Buntu Barana Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara Buntu Barana Tikala North Toraja Regency											
							#dusun lure desa panyangkalang kec marbo kab takalar Panyangkalang Mangara Bombang Takalar Regency											
							#Dusun Makowong Desa Patila Kec.Tanalili Kab.Luwu Utara Patila Bone- Bone North Luwu Regency											
							#dusun Mattirowalie Batu Pitumpanua Kabupaten Wajo											
							#dusun ongkoe Awota Keera Wajo Regency											

								#dusun pajalau desa panakkukang kec pallangga kab gowa Panakkukang Pallangga Gowa Regency												
								#dusun raja raja desa bunga ejaya kec pallangga kab gowa Bungaejaya Pallangga Gowa Regency												
								#dusun rante limbong Buntu Barana Curio Enrekang Regency												
								#dusun rumbia, desa lunjeng Buntu Batu Enrekang Regency South Sulawesi												
								#Dusun Saile, Desa Panaikang, Kec. Pattalassang Kab. Gowa Pattalassang Gowa Regency South Sulawesi												
								#dusun tadanpalie Basseang Lembang Pinrang Regency												
								#dusun tibuseng desa sokkolia kec bontomarannu kab gowa Mata Allo Bajeng Gowa Regency												
								#dusunbontom ani desa lengkese kec marbo kab gowa Lengkese Mangara Bombang Takalar Regency												

								#dusun borong kaluku desa sokkolia kec bontomarannu kab gowa Sokkolia Bontomarannu Gowa Regency											
								#dusun bororngbulo desa sokkolia kec bontomarannu kab gowa Sokkolia Bontomarannu Gowa Regency											
								#ENREKANG. KEC ENREKANG. KAB ENREKANG Enrekang Enrekang Regency South Sulawesi											
								#ENREKANG. KEC ENRKANG. KAB ENREKANG Enrekang Enrekang Regency South Sulawesi											
								#Kabupaten Enrekang Enrekang Enrekang Regency South Sulawesi											
								#Kabupaten Luwu Timur East Luwu Regency South Sulawesi ID											
								#KEC ALLA. KAB ENREKANG Alla Enrekang Regency South Sulawesi											
								#Kec. Bontomatene, Kec. Pasitasunggu, Kec. Pasitasunggu Timur Selayar Islands Regency South Sulawesi ID											

								#KEC. KELARA, DUSUN BUNGUNG BANGKALA. DESA BONTO LEBANG Jeneponto Regency South Sulawesi ID												
								#Kec. Mallusettasi Desa Nepo Barru Regency South Sulawesi ID												
								#Kec. Sopai, Lembang Salu Sopai, Kelompok Tani Siangkaran Salu Sopai Sopai North Toraja Regency												
								#KEC. TAROWANG, DESA ALLU TAROWANG Jeneponto Regency South Sulawesi ID												
								#KEC. TAROWANG, DESA BALANG BARU Jeneponto Regency South Sulawesi ID												
								#Kecamatan Baruppu, Awan Rante Karua, Dende Piongan napo, Sesean Suloara, Kapala Pitu, Sopai, Sesean, Kesu, Sanggalani, Rantebua, Buntao, Rantepao, Tondon, Tikala, Nanggala,saã€ ™ dan, Bangkelikila, balusu, Rindingallo, Buntu Pepasan. North Toraja Regency South Sulawesi ID												
								#Kecamatan Bastem Utara Luwu Regency South Sulawesi ID												

							#Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa Bungaya Gowa Regency South Sulawesi											
							#kecamatan galesong kabupaten takalar Galesong Takalar Regency South Sulawesi											
							#kecamatan galesong selatan kabupaten takalar South Galesong Takalar Regency South Sulawesi											
							#kecamatan galesong utara kabupaten takalar North Galesong Takalar Regency South Sulawesi											
							#kecamatan kurra, kabupaten tana toraja Kurra Tana Toraja Regency South Sulawesi											
							#Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja Lembang Randan Batu South Makale Tana Toraja Regency											
							#kecamatan mangarabombong kabupaten takalar Mangara Bombang Takalar Regency South Sulawesi											
							#kecamatan mappakasungu, kabupaten takalar Mappakasungu Takalar Regency South Sulawesi											



								#Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja Belau Utara Masanda Tana Toraja Regency											
								#kecamatan pattalassang kabupaten takalar Pattalassang Takalar Regency South Sulawesi											
								#kecamatan polongbangken g selatan kabupaten takalar South Polombangken g Takalar Regency South Sulawesi											
								#kecamatan polongbangken g utara kabupaten takalar North Polombangken g Takalar Regency South Sulawesi											
								#kecamatan sanrobone, kabupaten Takalar Sanrobone Takalar Regency South Sulawesi											
								#Kecamatan Tikala, kabupaten Toraja Utara Tikala North Toraja Regency South Sulawesi											
								#KecamatanSimbuang Lekke, Kabupaten Tana Toraja Simbuang Tana Toraja Regency South Sulawesi											
								#Kel. Bontoramba South Bontonompo Gowa Regency South Sulawesi											



								#Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone West Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi															
								#Kelurahan Padang Lambe West Wara Palopo City South Sulawesi															
								#Kelurahan Padangsappa Kab.Luwu Padang Sappa Ponrang Luwu Regency															
								#Kelurahan Pento Jangan Telluwanua Palopo City South Sulawesi															
								#Kelurahan Sapaya, Kecamatan Sapaya, Kabupaten Gowa Sapaya Bungaya Gowa Regency															
								#Kelurahan Tassililu, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai Tassililu West Sinjai Sinjai Regency															
								#Kota Palopo															
								#KT. Baji Minasa Kel. Pettuadae Kec. Turikale Maros Regency South Sulawesi ID															
								#KT. Jaya Desa Aletenggae Kec. Bantimurung Pettuadae Turikale Maros Regency															
								#Labessi Mario Riwawo Soppeng Regency South Sulawesi															

									#Labokong Donri Donri Soppeng Regency South Sulawesi											
									#Laha Kelompok Tani "Mabbulo Sibatang" Desa Wanua Waru, Kec. Mallawa, Kab. Maros Mallawa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan											
									#Lahan Kelompok "Cinta Damai" Dusun Bonto Panno, Desa Laiya, kecamatan Cenrana Cenrana Kabupaten Maros Sulawesi Selatan											
									#Lahan Kelompok Tani "Tupabbiring" Dusun Marimisi Lompo, Desa Mattiro, Tasi Kematan Maros Baru, Kab. Maros Mattiro Tasi Maros Baru Kabupaten Maros											
									#Lahan Kelompok Tani "Abadi" Dusun Carangki, Desa Lekopancingh, Kec. Tanralili, Kab. Maros Lekopancing Tanralili Kabupaten Maros											

								#Lahan Kelompok Tani "Abbulo Sibatang" Desa Abbulosibatang , Kec. Marusu, Kab. Maros Marusu Kabupaten Maros Sulawesi Selatan												
								#Lahan Kelompok Tani "Amanah" Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung - Kab. Maros Kalabbirang Bantimurung Maros Regency												
								#Lahan Kelompok Tani "Barugaiya" Desa Tanete, Kecamatan Simbang, Kab. Maros Tanete Simbang Kabupaten Maros												
								#Lahan Kelompok Tani "Bonto Ramba" Dusun Bonto Ramba, Dusun Abulosibatang, Kec. Marusu, Kab. Maros Abulo Sibatang Marusu Kabupaten Maros												
								#Lahan Kelompok Tani "Borong 1" Desa Abbulosibatang , Kecamatan Marusu, Kab Maros Marusu Kabupaten Maros Sulawesi Selatan												

								#Lahan Kelompok Tani "Bungung Kokoa" Dusun Tala-tala, Desa Nisombalia ecamayan Marusu Nisombalia Marusu Kabupaten Maros												
								#Lahan Kelompok Tani "Cisadane" Lingkungan Talamangape, Kelurahan Raya, Kec. Turikale, Kab. Maros Raya Turikale Maros Regency												
								#Lahan Kelompok Tani "Jaya Bersama" Desa Lekopancingh, Kec. Tanralili, Kab. Maros Lekopancing Tanralili Kabupaten Maros												
								#Lahan Kelompok Tani "Lappa Talle" Desa Benteng, Kecamatan Camba - Kab. Maros Benteng Camba Maros Regency												
								#Lahan Kelompok Tani "Lompo Katareng" Kelurahan Leang-leang, Kecamatan Bantimurung - Kab. Maros Leang-Leang Bantimurung Maros Regency												

								#Lahan Kelompok Tani "Masumange" Desa Parenreng Kecamatan Segeri, Kab. Pangkep Parenreng Segeri Pangkajene Dan Kepulauan Regency											
								#Lahan Kelompok Tani "Padanglohe" Dusun Padanglihe, Desa Sawaru, Kecamatan Camba, Kab. Maros Sawaru Camba Maros Regency											
								#Lahan Kelompok Tani "Panen Jaya" Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kab. Maros Tompobulu Tompu Bulu Maros Regency											
								#Lahan Kelompok Tani "Paraikatte" Lingkungan Satangi, Kelurahan Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kab. Maros Baji Pamai Maros Baru Maros Regency											
								#Lahan Kelompok Tani "Sipatuo" Desa Mattoangin Kecamatan Bantimurung Kab. Maros Mattoangin Bantimurung Maros Regency											

								#Lahan Kelompok Tani "Sipatuo" Desa Pettanyameng, Kec Camba kab. Maros Camba Kabupaten Maros Sulawesi Selatan												
								#Lahan Kelompok Tani "Sipurennu" Dusun Cendana, Desa Lekopancing, Kec. Tanralili, Kab. Maros Lekopancing Tanralili Maros Regency												
								#Lahan Kelompok Tani "Sugi Manai" Kelurahan Learosng-leang Kab. Ma Leang- Leang Bantimurung Kabupaten Maros												
								#Lahan Kelompok Tani "Tunas harapan" Desa Tanete, Kec. Simbang, Kab. Maros Tanete Simbang Kabupaten Maros												
								#Lahan Kelompok Tani Celebes, Desa Lebbotengngae , Kecamatan Cenrana, Kab. Maros Lebbotengngae Cenrana Maros Regency												
								#Lahan Kelompok Tani Marana Lebbotenggae, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kab. Maros Cenrana Maros Regency South Sulawesi												





								#Lembang Embatau, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara Embatau Tikala North Toraja Regency											
								#lembang Gasing, mengkendek, tana toraja Gasing Mengkendek Tana Toraja Regency											
								#lembang Marinding, Mengkendek Tana Toraja Marinding Mengkendek Tana Toraja Regency											
								#Lembang Nanggala, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara Nanggala North Toraja Regency South Sulawesi											
								#Lembang Pali, Kec. Bittuang, Kab. Bittuang Pali Bittuang Tana Toraja Regency											
								#lembang patengko, kecamatan mengkendek, kabupaten tana toraja Patengko Mengkendek Tana Toraja Regency											
								#lembang patongloan, bittuang, tana toraja Patongloan Bittuang Tana Toraja Regency											



								#Lembang Tantanan Kelurahan Tantanan Kecamatan Tallunglipu Tantanan Tallunglipu Tallunglipu North Toraja Regency												
								#Lingk. Marannue Macorawalie Watang Sawitto Pinrang Regency												
								#lingkungan mappala kel pangkabinanga kec pallangga kab gowa Pangkabinanga Pallangga Gowa Regency												
								#MAIWA. KEC MAIWA. KAB ENRKANG Maiwa Enrekang Regency South Sulawesi												
								#MALUA. KEC MALUA. KAB ENRKANG Malua Enrekang Regency South Sulawesi												
								#Nanggala Nanna, Toraja Utara Nanggala North Toraja Regency South Sulawesi												
								#pembukaan jalan tani kecamatan nanggala kab. toraja utara kt. salimbongan Nanggala Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan												

								#pembukaan jalan tani lembang buntu labo kec. sangallangi kab. toraja utara kt. kua Butu Lobo Sesean Kabupaten Toraja Utara											
								#pembukaan jalan tani lembang loko uru kec. rindingallo kab. toraja utara kt. batulea Rindingallo Rindingalo Kabupaten Toraja Utara											
								#pembukaan jalan tani lembang rinding allo kec. rinding allo kab. toraja utara kt. dumbia Rindingallo Rindingalo Kabupaten Toraja Utara											
								#pembukaan jalan tani lembang suloara kec. sesean suloara kab. toraja utara kt. padang sati Suloara Sesean Suloara Kabupaten Toraja Utara											
								#pembukaan jalan tani lembanga kecamatan nanggala kab. toraja utara kt. woirede Nanggala Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan											
								#saloka raja kab soppeng Salo Karaja Lalabata Soppeng Regency											

								#Srempo Macorawalie Watang Sawitto Pinrang Regency									
								#tana toraja Tana Toraja Regency South Sulawesi ID									
								#tersebar 9 Kecamatan Takalar Regency South Sulawesi ID									
								#Tersebar di 8 Kecamatan Sinjai Regency South Sulawesi ID									
								#Toraja Utara North Toraja Regency South Sulawesi ID									
2.00	0 2	01.00	0 7	0 0 3	Penyediaan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian			# 1 Dusun Tonasa Tonasa		Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang disalurkan	230 Unit	Termanfaatkannya Alat dan Mesin Pertanian	100 %	12,337,000,000.0	13,080,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
						Kabupaten Bantaeng		# Abulo Sibatang Marusu Kabupaten Maros									
						Kabupaten Barru		# Adatongeng Turikale Maros Regency									
						Kabupaten Bone		# Alatengae Bantimurung Kabupaten Maros									
						Kabupaten Bulukumba		# Allaere Tanrillili Maros Regency									
						Kabupaten Enrekang		# Apala Barebbo Bone Regency									
						Kabupaten Gowa		# Baebunta North Luwu Regency South Sulawesi									
						Kabupaten Jeneponto		# Baju Bodoa Maros Baru Maros Regency									
						Kabupaten Kepulauan Selayar		# Banyuanyara Sanrobone Takalar Regency									
						Kabupaten Luwu		# Baranti Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi									
						Kabupaten Luwu Timur		# Barombong Tamalate Makassar City									







									# Kassi Balocci Pangkajene Dan Kepulauan Regency										
									# Kulo Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang										
									# Kulo Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi										
									# Laba Masamba North Luwu Regency										
									# Laiya Cenrana Kabupaten Maros										
									# Lakkang Tallo Makassar City										
									# Lallatang Dua Boccoe Bone Regency										
									# Laponrong Amali Bone Regency										
									# Lau Kabupaten Maros Sulawesi Selatan										
									# Lempopacci Suli Luwu Regency										
									# Luwu Regency South Sulawesi ID										
									# Mallawa Maros Regency South Sulawesi										
									# Mandalle Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi										
									# Mandalle West Bajeng Gowa Regency										
									# Mangilu Bungoro Pangkajene Dan Kepulauan Regency										
									# Maritengngae Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi										

								# Mattampae Ponre Bone Regency												
								# Mattirotasi Watang Pulu Sidenreng Rappang Regency												
								# Melle Dua Bocoe Bone Regency												
								# Minasa Baji Bantimurung Maros Regency												
								# Minasatene Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi												
								# Mojong Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang												
								# Mojong Watang Sidenreng Sidenreng Rappang Regency												
								# Mula Menree Ulaweng Bone Regency												
								# Nisombalia Marusu Maros Regency												
								# Palakka Kahu Bone Regency												
								# Panca Lautang Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi												
								# Panca Rijang Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi												
								# Pandak Masamba North Luwu Regency												
								# Pangkajene Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi												

						# Panrannuangku North Polombangken g Takalar Regency																
						# Panreng Baranti Sidenreng Rappang Regency																
						# Panyangkalang Mangara Bombang Takalar Regency																
						# Parenreng Segeri Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan																
						# Pencilong Biringbulu Gowa Regency																
						# Pettuadae Turikale Maros Regency																
						# Pitu Riase Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi																
						# Pitu Riawa Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi																
						# Pombakka Masamba North Luwu Regency																
						# Pombakka West Malangke North Luwu Regency																
						# Rompu Masamba North Luwu Regency																
						# Salenrang Bontoa Maros Regency																
						# Samalewa Bungoro Pangkajene Dan Kepulauan Regency																
						# Saotengah Tellu Limpoe Sinjai Regency																

								# Sapo Bonto Bulukumpa Bulukumpa Regency										
								# Sepakat Masamba North Luwu Regency										
								# Soppeng Regency South Sulawesi ID										
								# Tabo-Tabo Bungoro Pangkajene Dan Kepulauan Regency										
								# Taccimpo Duapitue Sidenreng Rappang Regency										
								# Tacipong Amali Bone Regency										
								# Taeng Pallangga Gowa Regency										
								# Tamalanrea Bontotiro Bulukumba Regency										
								# Tamaona Kindang Bulukumba Regency										
								# Tapong Maiwa Enrekang Regency										
								# Taraweang Labakkang Pangkajene Dan Kepulauan Regency										
								# Taring Biringbulu Gowa Regency										
								# Tassipi Amali Bone Regency										
								# Tekkalasi Maritenggae Sidenreng Rappang Regency										
								# Tellulimpo E Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi										
								# Tibona Bulukumpa Bulukumba Regency										

								# Timbuseng North Polombangkeng Takalar Regency										
								# Timoreng Panua Panca Rijang Sidenreng Rappang Regency										
								# Towata North Polombangkeng Takalar Regency										
								# Tuncung Maiwa Enrekang Regency										
								# Uluale Watang Pulu Sidenreng Rappang Regency										
								# Wajo Regency South Sulawesi ID										
								# Watang Pulu Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi										
								# Watang Sidenreng Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi										
								# West Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi										
								#ANGGERAJA. KEC ANGGERAJA. KAB ENREKANG Anggeraja Enrekang Regency South Sulawesi										
								#Bua - Bua I Watang Sawitto Pinrang Regency South Sulawesi										
								#CENDANA. KEC CENDANA. AB ENREKANG Cendana Cendana Enrekang Regency										

								#DESA ALLU TAROWANG Tarowang Jeneponto Regency South Sulawesi													
								#DESA BALANG BARU Tarowang Jeneponto Regency South Sulawesi													
								#DESA BALUMBUNGA NG Bontoramba Jeneponto Regency South Sulawesi													
								#Desa Balutan Bupon Luwu Regency South Sulawesi													
								#DESA BANGKALA LOE Bontoramba Jeneponto Regency South Sulawesi													
								#DESA BANRIMANUR UNG West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi													
								#desa banua Bungin Enrekang Regency South Sulawesi													
								#DESA BARANA West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi													
								#Desa Barangmamase Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Kelompok Tani Abbangeng 2 Barangmamase Sajoanging Wajo Regency													
								#DESA BENTENG ALLA KECAMATAN BAROKO Benteng Alla Baroko Enrekang Regency													

							#DESA BENTENG ALLA UTARA. KEC BAROKO. KAB ENREKANG Baroko Enrekang Regency South Sulawesi															
							#DESA BEROANGING West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi															
							#Desa Beru Tallasa Biringbulu Gowa Regency South Sulawesi															
							#Desa Berutallasa, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa Berutallasa Biringbulu Gowa Regency															
							#Desa Bola Kecamatan Bola Kab. Wajo, Kelompok Tani Mattiro Deceng Bola Wajo Regency South Sulawesi															
							#Desa Bone Bajeng Gowa Regency South Sulawesi															
							#DESA BONTO CINI Rumbia Jeneponto Regency South Sulawesi															
							#desa bonto tangga Baturappe Biringbulu Kabupaten Gowa															
							#DESA BONTO TIRO Rumbia Jeneponto Regency South Sulawesi															

								#Desa Borong Palala Kec. Pattalassang, Kab. Gowa Pattalassang Gowa Regency South Sulawesi												
								#DESA BULUSUKA Bontoramba Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#DESA BUNGUNG LOE Turatea Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#Desa Buntu Barana Buntu Barana West Suli Luwu Regency												
								#Desa Buntu Kunyi Suli Luwu Regency South Sulawesi												
								#Desa Cakkeawo Suli Luwu Regency South Sulawesi												
								#DESA CAMBA- CAMBA Batang Sub-District Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#DESA GARASSIKANG West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#DESA JENE TALLASA Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#DESA JENETALLASA Rumbia Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#Desa Jonjo Parigi Gowa Regency South Sulawesi												



							#Desa Kaladi Darussalam West Suli Luwu Regency South Sulawesi												
							#Desa Kalaserena Bontonompo Gowa Regency South Sulawesi												
							#Desa Katangka Bontonompo Gowa Regency South Sulawesi												
							#DESA KAYU LOE BARAT Turatea Jeneponto Regency South Sulawesi												
							#Desa Lacinde Kecamatan Pitumpnaua Kabupaten Wajo												
							#Desa Lagoari Kec. Takkalalla, Kab. Wajo, Kelompok Tani Maccolliloloe Lagoari Takkalalla Wajo Regency												
							#Desa Lalong Kec. Walenrang Kab. Luwu Lalong Walenrang Luwu Regency												
							#DESA LANGKURA Turatea Jeneponto Regency South Sulawesi												
							#desa lompu dusun cippo kecamatan cina Bone Regency South Sulawesi ID												
							#DESA MAERO Bontoramba Jeneponto Regency South Sulawesi												
							#DESA MANGEPONG Turatea Jeneponto Regency South Sulawesi												

								#Desa Manuju Manuju Gowa Regency South Sulawesi											
								#desa maradekaya Maradekaya Bajeng Gowa Regency											
								#Desa Muhajirin West Suli Luwu Regency South Sulawesi											
								#Desa Murante Suli Luwu Regency South Sulawesi											
								#Desa Palambarae Kecamatan Gantarang KabupatenBulu kumba											
								#desa pallantikang kecamatan pattallassang kabupaten gowa Pallantikang Pattallassang Gowa Regency											
								#Desa Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa Pattallassang Gowa Regency South Sulawesi											
								#DESA PANA KEC ALLA Pana Alla Enrekang Regency											
								#Desa Panaikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa Pattallassang Gowa Regency South Sulawesi											
								#DESA PAPALUANG West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi											

									#Desa Parangloe Parangloe Gowa Regency South Sulawesi										
									#Desa Parangloe, Kabupaten Gowa Parangloe Gowa Regency South Sulawesi										
									#Desa Parangloe, kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa Biringbulu Gowa Regency South Sulawesi										
									#Desa Paranglompoa, Kecamatan Bonto lempangan, Kabupaten Gowa Paranglompoa Bontolempanga n Gowa Regency										
									#DESA PARASANGENG BERU Turatea Jeneponto Regency South Sulawesi										
									#Desa Pasamai Belopa Luwu Regency South Sulawesi										
									#DESA PASUI KEC BUNTU BATU Pasui Buntu Batu Enrekang Regency										
									#Desa Pattengko Kec.Tomoni Timur Kab.Luwu Timur East Tomoni East Luwu Regency South Sulawesi										

							#DESA PATTIRO West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi												
							#DESA PERANGIAN. KECAMATAN BARAKA Parangian Baraka Enrekang Regency												
							#DESA RANTE MARIO. KEC MALUA. KAB ENREKANG Rante Mario Malua Enrekang Regency												
							#Desa Saga Bajo Luwu Regency South Sulawesi												
							#Desa salajangki, Kabupaten Gowa Salajangki South Bontonompo Gowa Regency												
							#Desa Sanreseng Ade, Kec. Bola, Kab. Wajo Kelompok Tani Mattunru- Tunrue Sanreseng Ade Bola Wajo Regency												
							#Desa Sanreseng Ade, Kec. Bola, kab. Wajo, Kelompok Tani Mappalaka Sanreseng Ade Bola Wajo Regency												
							#Desa Sicini Parigi Gowa Regency South Sulawesi												
							#Desa Siloro Bontoa Minasatene Pangkajene Dan Kepulauan Regency												

									#desa sugiale kecamatan barebbo Bone Regency South Sulawesi ID										
									#DESA SUMBANG. KEC CURIO. KAB ENRKANG Sumbang Curio Enrekang Regency										
									#Desa Sumberdadi Kec.Patila Kab.Luwu Utara Sumberdadi Bone-Bone North Luwu Regency										
									#DESA SUMILLAN. KECAMATAN ALLA. KAB ENREKANG Alla Enrekang Regency South Sulawesi										
									#Desa Tallang Bulawang Bajo Luwu Regency South Sulawesi										
									#Desa Tallang Tallang West Suli Luwu Regency										
									#DESA TAMPO. KEC ANGGERJA Tampo Anggeraja Enrekang Regency										
									#Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba										
									#desa Taring Taring Biringbulu Gowa Regency										
									#Desa Tellumpanua Kec. Taneterilau Barru Regency South Sulawesi ID										

								#desa timbuseng kecamatan pattallassang kabupaten gowa Timbuseng Pattallassang Gowa Regency													
								#DESA TOMPO BULU Rumbia Jeneponto Regency South Sulawesi													
								#Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba													
								#DESA TUJU West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi													
								#DESA UJUNG BULU Rumbia Jeneponto Regency South Sulawesi													
								#dusun bottoulu Liu Sabbang Paru Wajo Regency													
								#Dusun Bungung- bungung, Desa Tpddopulia, Kecamatan Tanralili, Kab. Maros Toddo Pulia Tanralili Maros Regency													
								#Dusun Garunggang Desa Barangmamase , Kec. Sajoanging, Kab. Wajo Kelompok Tani Maccolliloloe Barangmamase Sajoanging Wajo Regency													
								#Dusun I dan II Cipotakari Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang													



							#dusun topitu Bulete Pitumpanua Wajo Regency												
							#ENREKANG. KEC ENRKANG. KAB ENREKANG Enrekang Enrekang Regency South Sulawesi												
							#ersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Wajo												
							#Kab. Luwu Utara North Luwu Regency South Sulawesi ID												
							#Kab. maros Kec. Maros Baru Maros Regency South Sulawesi ID												
							#Kab. Takalar (tersebar) Takalar Regency South Sulawesi ID												
							#Kabupaten Bulukumba												
							#Kabupaten Enrekang Enrekang Enrekang Regency South Sulawesi												
							#kabupaten Gowa Gowa Regency South Sulawesi ID												
							#Kabupaten Gowa Gowa Regency South Sulawesi ID												
							#Kabupaten Pinrang Pinrang Regency South Sulawesi ID												
							#Kabupaten Sidenreng Rappang Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi ID												
							#Kabupaten Sinjai												
							#Kabupaten Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi ID												



								#kabupaten sinjai West Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi												
								#KEC CURIO. KAB ENREKANG Curio Enrekang Regency South Sulawesi												
								#Kec. Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kec. Bontomanai, Kec. Pasimasunggu Timur, Kec. Pasimasunggu Selayar Islands Regency South Sulawesi ID												
								#Kec. Bontomanai, Kec. Bontoharu, Kec. Bontosikuyu, Kec. Pasimasunggu Timur Selayar Islands Regency South Sulawesi ID												
								#Kec. Bontomanai, Kec. Bontosikuyu, Kec. Pasimasunggu Timur Selayar Islands Regency South Sulawesi ID												
								#Kec. Sopai, Lembang Nonongan, Kelompok Tani Ria Nonongan Selatan Sopai North Toraja Regency												
								#Kec. Sopai, Lembang Salu Sopai, Kelompok Tani Siangkaran Salu Sopai Sopai North Toraja Regency												

								<p>#Kecamatan Baruppu, Awan Rante Karua, Dende Piongan napo, Sesean Suloara, Kapala Pitu, Sopai, Sesean, Kesu, Sanggalani, Rantebua, Buntao, Rantepao, Tondon, Tallunglipu, Tikala, Nanggala,sa€™™dan, Bangkelikila, balusu, Rindingallo, Buntu Pepasan. North Toraja</p>										
								<p>#kecamatan bontonompo Bontonompo Gowa Regency South Sulawesi</p>										
								<p>#Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa Bungaya Gowa Regency South Sulawesi</p>										
								<p>#kecamatan galesong kabupaten takalar Galesong Takalar Regency South Sulawesi</p>										
								<p>#kecamatan galesong selatan kabupaten takalar Galesong Takalar Regency South Sulawesi</p>										
								<p>#kecamatan galesong selatan kabupaten takalar South Galesong Takalar Regency South Sulawesi</p>										

							#kecamatan galesong utara kabupaten takalar North Galesong Takalar Regency South Sulawesi													
							#Kecamatan Lalabata, Marioriwawo dan Ganra Soppeng Regency South Sulawesi ID													
							#Kecamatan Lilirilau, Citta dan Lalabata Soppeng Regency South Sulawesi ID													
							#kecamatan mangarabomba ng kabupaten takalar Mangara Bombang Takalar Regency South Sulawesi													
							#kecamatan mappakasung u, kabupaten takalar Mappakasung u Takalar Regency South Sulawesi													
							#Kecamatan Marioriawa, Ganra, Donri- Donri Soppeng Regency South Sulawesi ID													
							#Kecamatan Marioriwawo, Liliriaja dan Marioriawa Soppeng Regency South Sulawesi ID													
							#kecamatan pattalassang kabupaten takalar Pattalassang Takalar Regency South Sulawesi													

								#kecamatan polongbangken g selatan kabupaten takalar South Polombangken g Takalar Regency South Sulawesi												
								#kecamatan polongbangken g utara North Polombangken g Takalar Regency South Sulawesi												
								#kecamatan sanrobone, kabupaten Takalar Sanrobone Takalar Regency South Sulawesi												
								#KELOMPOK TANI AWANG PANUA 1 DESA LILIRIawang KECAMATAN BENGO KABUPATEN BONE Liliriawang Bengo Bone Regency												
								#KELOMPOK TANI AWANG PANUA 2 DESA LILIRIawang KECAMATAN BENGO KABUPATEN BONE Liliriawang Bengo Bone Regency												
								#KELOMPOK TANI BULU RAYA DESA BULU ALLAPPORENGE KECAMATAN BENGO KABUPATEN BONE Bulu Allaporenge Bengo Bone Regency												

								#KELOMPOK TANI DATTANG PANUA DESA KAJUARA KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE Kajuara Bone Regency South Sulawesi												
								#Kelompok tani Desa Karambua Karambua Wotu East Luwu Regency												
								#Kelompok Tani Harapan Baru Padang Tuju Bupon Luwu Regency												
								#Kelompok Tani Kabloang Bonto Padang Kahu Bone Regency												
								#Kelompok Tani Kalukue Langi Bontocani Bone Regency												
								#kelompok tani Kanan Bersatu Marinding West Bajo Luwu Regency												
								#Kelompok Tani Lapinceng Labuaja Kahu Bone Regency												
								#kelompok tani mabulo sipappa desa pammusureng kecamatan bontocani kabupaten bone Pammusureng Bontocani Bone Regency												
								#kelompok tani mabulo sipappa desa selli kecamatan bengo kabupaten bone Selli Bengo Bone Regency												

							#Kelompok Tani Mali Siparappe Erecinnong Bontocani Bone Regency											
							#kelompok tani mamminasae kel.sudiang raya kec.biringkanay a Jl. Laikang Sudiang Raya Biring Kanaya											
							#kelompok tani manyikkoaya kel.sudiang kec.biringkanay a Jl. Arung Teko Sudiang Biring Kanaya											
							#KELOMPOK TANI MAPPESONA DESA CAKKEWARE KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE Cekreware Cenrana Bone Regency											
							#KELOMPOK TANI MAPPESONA DESA LILIRIAWANG KECAMATAN BENGO KABUPATEN BONE Liliriawang Bengo Bone Regency											
							#KELOMPOK TANI MATTAROAD E DESA MATTAROPULI KECAMATAN BENGO KABUPATEN BONE Mattaro Puli Bengo Bone Regency											
							#Kelompok Tani Mattirovalie Batulappa Patimpeng Bone Regency											

								#KELOMPOK TANI MULAMOMPO E DESA PASAKA KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE Pasaka Kahu Bone Regency												
								#Kelompok Tani Pabbineang 2 Bontoraja Gantarang Kabupaten Bulukumba												
								#KELOMPOK TANI PADAIDI DESA PAMMUSUREN G KECAMATAN BONTO CANI KABUPATEN BONE Pammusureng Bontocani Bone Regency												
								#KELOMPOK TANI PAKKITA DESA BULU ALLAPPORENGE KECAMATAN BENGGO KABUPATEN BONE Bulu Allaporenge Bengo Bone Regency												
								#Kelompok Tani Pammesarang Balo-Balo Belopa Luwu Regency												
								#Kelompok Tani Papoleonro Bonto Padang Kahu Bone Regency												
								#KELOMPOK TANI REBBA SIPATOKKONG DESA AJALASSE KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE Ajalasse Cenrana Bone Regency												

								#KELOMPOK TANI SAMATURU DESA BATULAPPA KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE Batulappa Patimpeng Bone Regency												
								#Kelompok Tani Sappewali Kadai Mare Bone Regency												
								#KELOMPOK TANI SEMANGAT BARU DESA MATTOANGING KECAMTAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE Mattoanging Tellu Siattinge Bone Regency												
								#kelompok tani siamasei desa pammusureng kecamatan bontocani kabupaten bone Pammusureng Bontocani Bone Regency												
								#Kelompok Tani Sinar Baru Tanjong Bupon Luwu Regency												
								#KELOMPOK TANI SIPAKATAU DESA PASAKA KECAMATAN SIBULUE KABUPATEN BONE Pasaka Kahu Bone Regency												





								#kelurahan macannang kecamatan tanete riattang Bone Regency South Sulawesi ID											
								#Kelurahan Padangsubur Kab.Luwu Padang Subur Ponrang Luwu Regency											
								#Kelurahan Paria, Kecamatan. Majauleng Kab. Wajo, Kelompok Tani Padaidi Paria Majauleng Wajo Regency											
								#Kelurahan Siparappe Watang Sawitto Pinrang Regency South Sulawesi											
								#Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba											
								#KELURAHAN TOGO-TOGO Batang Sub- District Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#KELURAHAN TOLO BARAT Kelara Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#KELURAHAN TOLO SELATAN Kelara Jeneponto Regency South Sulawesi											
								#KELURAHAN TOLO TIMUR Kelara Jeneponto Regency South Sulawesi											







									#Toraja Utara North Toraja Regency South Sulawesi ID									
2.00	0 2	01.00	0 7	0 0 4	Penyediaan Bantuan Pupuk dan Pestisida				# Abulo Sibatang Marusu Kabupaten Maros		Jumlah Pupuk yang disalurkan	90 Paket	Termanfaatka nnya Pupuk yang telah disalurkan	100 %	18,000,000,000.0	20,000,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
								Kabupaten Bantaeng	# Adatongeng Turikale Maros Regency									
								Kabupaten Barru	# Arawa Watang Pulu Sidenreng Rappang Regency									
								Kabupaten Bone	# Baju Bodoa Maros Baru Maros Regency									
								Kabupaten Bulukumba	# Baranti Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi									
								Kabupaten Enrekang	# Baring Segeri Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan									
								Kabupaten Gowa	# Belawae Pitu Riase Sidenreng Rappang Regency									
								Kabupaten Jeneponto	# Biring Ere Bungoro Pangkajene Dan Kepulauan Regency									
								Kabupaten Kepulauan Selayar	# Biru Tanete Riattang Bone Regency									
								Kabupaten Luwu	# Bongki Lengkese East Sinjai Sinjai Regency									
								Kabupaten Luwu Timur	# Bonto Manai Labakkang Pangkajene Dan Kepulauan Regency									
								Kabupaten Luwu Utara	# Bonto Perak Pangkajene Pangkajene Dan Kepulauan Regency									
								Kabupaten Maros	# Bulolondong East Lamasi Luwu Regency									







							# Pangkajene Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi																						
							# Pantilang Bassesangtemp e Luwu Regency																						
							# Panyili Palakka Bone Regency																						
							# Pararra Sabbang North Luwu Regency																						
							# Parenreng Segeri Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan																						
							# Pasempe Palakka Bone Regency																						
							# Passippo Palakka Bone Regency																						
							# Patila Bone- Bone North Luwu Regency																						
							# Pettuadde Turikale Maros Regency																						
							# Pombakka Masamba North Luwu Regency																						
							# Pongko North Walenrang Luwu Regency																						
							# Puncak Sinjai Sel. Kabupaten Sinjai																						
							# Rante Alang Larompong Luwu Regency																						
							# Salenrang Bontoa Maros Regency																						
							# Salo Mallori Duapitue Sidenreng Rappang Regency																						
							# Samalewa Bungoro Pangkajene Dan Kepulauan Regency																						
							# Saotengah Tellu Limpoe Sinjai Regency																						

							# Sapo Bonto Bulukumpa Bulukumpa Regency											
							# Sengeng Palie Lappariaja Bone Regency											
							# Siame Palakka Bone Regency											
							# Soppeng Regency South Sulawesi ID											
							# Sukadamai Sukamaju North Luwu Regency											
							# Sumilin Masamba North Luwu Regency											
							# Tabo-Tabo Bungoro Pangkajene Dan Kepulauan Regency											
							# Taccimpo Duapitue Sidenreng Rappang Regency											
							# Tamboke Sukamaju North Luwu Regency											
							# Tanah Tengga Palakka Bone Regency											
							# Tandung Sabbang North Luwu Regency											
							# Tanru Tedong Duapitue Sidenreng Rappang Regency											
							# Taraweang Labakkang Pangkajene Dan Kepulauan Regency											
							# Teteaji Tellulimpo E Sidenreng Rappang Regency											
							# Tipojong East Tanete Riattang Bone Regency											

								# Tompobulu Bulupoddo Sinjai Regency																		
								# Toro East Tanete Riattang Bone Regency																		
								# Tullak Tallu Sabbang North Luwu Regency																		
								# Ujung Mattajang Mappedeceeng North Luwu Regency																		
								# Ureng Palakka Bone Regency																		
								# Usa Palakka Bone Regency																		
								# Wajo Regency South Sulawesi ID																		
								# Watang Palakka West Tanete Riattang Bone Regency																		
								# Watang Sidenreng Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi																		
								# West Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi																		
								#barombong																		
								#bontolebang Bontolebang North Galesong Takalar Regency																		
								#Desa Bajoe Bajoe East Tanete Riattang Bone Regency																		
								#Desa Beroppa Kec.Seko Kab.Luwu Utara Seko North Luwu Regency South Sulawesi																		
								#Desa Bonto Manai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba																		

								#Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba											
								#Desa Cellu Cellu East Tanete Riattang Bone Regency											
								#Desa Jojolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba											
								#Desa Maleku Kec.Mangkutana Kab.Luwu Maleku Mangkutana East Luwu Regency											
								#Desa Paenre Lompoe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba											
								#Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba											
								#Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba											
								#Desa Siloro Bontoa Minasatene Pangkajene Dan Kepulauan Regency											
								#Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba											
								#Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba											
								#Desa Tompobulu Kec. Maros											



								#Kec. Maringi Soppeng Regency South Sulawesi ID												
								#Kec. Maringi Kab. Soppeng Mario Riwawo Soppeng Regency South Sulawesi												
								#Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo Pitumpanua Wajo Regency South Sulawesi												
								#Kec. Tanete riaja Barru Regency South Sulawesi ID												
								#kecamatan bajeng barat kabupaten gowa West Bajeng Gowa Regency South Sulawesi												
								#kecamatan bontonompo selatan kabupaten gowa South Bontonompo Gowa Regency South Sulawesi												
								#Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang Cempa Pinrang Regency South Sulawesi												
								#Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Duampanua Pinrang Regency South Sulawesi												
								#kecamatan galesong kabupaten takalar Galesong Takalar Regency South Sulawesi												

								#kecamatan galesong selatan kabupaten takalar South Galesong Takalar Regency South Sulawesi											
								#kecamatan galesong utara kabupaten takalar North Galesong Takalar Regency South Sulawesi											
								#Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang Lanrisang Pinrang Regency South Sulawesi											
								#kecamatan mangarabombang kabupaten takalar Mangara Bombang Takalar Regency South Sulawesi											
								#kecamatan mappakasungu, kabupaten takalar Mappakasungu Takalar Regency South Sulawesi											
								#Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang Mattirosompe Pinrang Regency South Sulawesi											
								#Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang Mattiro Bulu Pinrang Regency South Sulawesi											
								#kecamatan pallangga kabupaten gowa Pallangga Gowa Regency South Sulawesi											

								#kecamatan pattalassang kabupaten takalar Pattalassang Takalar Regency South Sulawesi											
								#kecamatan polongbangken g selatan kabupaten takalar South Polombangken g Takalar Regency South Sulawesi											
								#kecamatan polongbangken g utara North Polombangken g Takalar Regency South Sulawesi											
								#kecamatan sanrobone, kabupaten Takalar Sanrobone Takalar Regency South Sulawesi											
								#Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang Tiroang Pinrang Regency South Sulawesi											
								#Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba											
								#Kelurahan Ta TA Tanete Riattang Bone Regency											
								#Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba											
								#KT. Bantimurung Desa Bantimurung Kec. Maros Maros Regency South Sulawesi ID											



								#KT. Lampasaile Desa Tompobulu Kec. Maros Barru Regency South Sulawesi ID											
								#Tabaringan keluarahan bontolebang kecamatan galesong utara Bontolebang North Galesong Takalar Regency											
								#tersebar 9 Kecamatan Takalar Regency South Sulawesi ID											
2.00	0 2	01.00	0 7	0 0 5	Pengelolaan Kebutuhan Lahan dan Air			Provinsi Sulawesi Selatan				Cakupan Pembinaan/ monev Pengelolaan Lahan dan Air	15 Kelompok	Meningkatkan kapasitas penyebaran lahan dan air	100 %	250,000,000.0	275,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2.00	0 2	01.00	0 7	0 0 6	Pengelolaan Kebutuhan Alat dan Mesin Pertanian			Provinsi Sulawesi Selatan				Cakupan Pembinaan Monev Alsin	100 kelompok	Meningkatnya kapasitas kelompok penerima manfaat	100 %	250,000,000.0	275,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2.00	0 2	01.00	0 7	0 0 7	Pengelolaan Kebutuhan Pupuk dan Pestisida			Kabupaten Bantaeng				Cakupan Monev Penyaluran Pupuk dan Pestisida	55 kelompok	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Pupuk dan Pestisida	100 %	250,000,000.0	275,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
						Kabupaten Barru													
						Kabupaten Bone													
						Kabupaten Bulukumba													
						Kabupaten Enrekang													
						Kabupaten Gowa													
						Kabupaten Jeneponto													
						Kabupaten Kepulauan Selayar													
						Kabupaten Luwu													
						Kabupaten Luwu Timur													
						Kabupaten Luwu Utara													
						Kabupaten Maros													
						Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan													
						Kabupaten Pinrang													

							Kabupaten Sidenreng Rappang														
							Kabupaten Sinjai														
							Kabupaten Soppeng														
							Kabupaten Takalar														
							Kabupaten Tana Toraja														
							Kabupaten Toraja Utara														
							Kabupaten Wajo														
							Kota Palopo														
							Kota Parepare														
2.00	0 2	01.00	0 8		PROGRAM PENYEDIAAN BENIH BERMUTU PENGENDALIAN OPT DAN STATISTIK PERTANIAN						% Penurunan serangan OPT	4.8 %				3,695,000,000.0		3,750,000,000.0		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
											% Penggunaan benih padi bersertifikat	63 %									
											Cakupan ketersediaan data statistik pertanian	100 %									
2.00	0 2	01.00	0 8 0 2	0	Sertifikasi dan Pelabelan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura		Kabupaten Bantaeng				Cakupan Supervisi Sertifikasi Benih	20 Penangkar	Meningkatnya Kualitas Benih Penangkar	100 %		245,000,000.0		300,000,000.0		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
							Kabupaten Barru														
							Kabupaten Bone														
							Kabupaten Bulukumba														
							Kabupaten Gowa														
							Kabupaten Luwu														
							Kabupaten Luwu Timur														
							Kabupaten Luwu Utara														
							Kabupaten Maros														
							Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan														
							Kabupaten Pinrang														
							Kabupaten Sidenreng Rappang														
							Kabupaten Sinjai														
							Kabupaten Soppeng														
							Kabupaten Wajo														
2.00	0 2	01.00	0 8 0 3	0	Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura		Kabupaten Maros				Cakupan Penilaian Uji Varietas Benih	15 Penangkar	Meningkatnya Kualitas Varietas Benih	100 %		400,000,000.0		400,000,000.0		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	

2.00	0 2	01.00	0 8	0 0 4	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura						Cakupan Pengawasan Peredaran Benih	15 Lokasi	Meningkatnya Pengawasan Peredaran Benih	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
																			Kabupaten Bantaeng
																			Kabupaten Barru
																			Kabupaten Bone
																			Kabupaten Bulukumba
																			Kabupaten Gowa
																			Kabupaten Luwu
																			Kabupaten Luwu Timur
																			Kabupaten Luwu Utara
																			Kabupaten Maros
																			Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
																			Kabupaten Pinrang
																			Kabupaten Sidenreng Rappang
																			Kabupaten Sinjai
Kabupaten Soppeng																			
Kabupaten Wajo																			
2.00	0 2	01.00	0 8	0 0 7	Peramalan dan Pengamatan Serangan OPT dan DPI						Cakupan Peramalan dan Pengamatan Serangan OPT	15 Lokasi	Berkurangnya Kasus Serangan OPT	100 %	750,000,000.0	750,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
																			Kabupaten Bantaeng
																			Kabupaten Barru
																			Kabupaten Bone
																			Kabupaten Bulukumba
																			Kabupaten Gowa
																			Kabupaten Kepulauan Selayar
																			Kabupaten Luwu
																			Kabupaten Luwu Utara
																			Kabupaten Maros
																			Kabupaten Pinrang
																			Kabupaten Sidenreng Rappang
																			Kabupaten Sinjai
																			Kabupaten Soppeng
Kabupaten Tana Toraja																			
Kabupaten Wajo																			

2.00	0 2	01.00	0 8	0 1 0	Gerakan Pengendalian OPT			Kabupaten Maros				Cakupan Pengendalian OPT	5 Unit	Berkurangnya Kasus Serangan OPT	100 %	550,000,000.0	550,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	0 2	01.00	0 8	0 1 3	Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura			Kabupaten Bantaeng				Jumlah Dokumen Ketersediaan Data Statistik	3 Dokumen	Tersedianya Data Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
								Kabupaten Barru										
								Kabupaten Bone										
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Enrekang										
								Kabupaten Gowa										
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Kepulauan Selayar										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Maros										
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Sinjai										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Takalar										
								Kabupaten Tana Toraja										
								Kabupaten Toraja Utara										
								Kabupaten Wajo										
								Kota Makassar										
								Kota Palopo										
								Kota Parepare										
2.00	0 2	01.00	0 8	0 1 4	Peramalan dan Pengamatan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)			Provinsi Sulawesi Selatan				Peramalan OPT Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura setiap Musim Tanam	1 Dokumen Peramalan	Termanfaatnya Dokumen Peramalan	1 Dokumen	750,000,000.0	750,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.00	02	01.00	08	015	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)			Provinsi Sulawesi Selatan				Pengamatan serangan OPT dan DPI	24 Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengamatan serangan OPT dan DPI	24 Kabupaten/Kota	700,000,000.0	700,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	02	01.00	09		<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PELATIHAN SDM PERTANIAN</b>					<b>Rasio ketersediaan penyuluh pertanian dan pelaku utama pertanian</b>	<b>0.5 %</b>					<b>4,200,000,000.0</b>	<b>2,450,000,000.0</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>
2.00	02	01.00	09	01	Peningkatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Penyuluhan			Kabupaten Bone				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Program Penyuluhan	3 Dokumen	Termanfaatkannya Dokumen Perencanaan dan Monev Program Penyuluhan	100 %	150,000,000.0	175,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
								Kabupaten Luwu				Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan sinergitas program penyuluhan pertanian	50 orang	Meningkatnya pengetahuan peserta yang mengikuti pertemuan sinergitas program penyuluhan pertanian	50 orang			
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Sinjai										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Wajo										
								Kota Makassar										
2.00	02	01.00	09	03	Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian			Kota Makassar				Jumlah Dokumen Program Penyuluhan Pertanian	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Program Penyuluhan Pertanian	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	02	01.00	09	05	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama			Kabupaten Bone				Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani	5 Unit	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani	100 %	125,000,000.0	125,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Soppeng										

								Kabupaten Wajo											
2.00	0 2	01.00	0 9	0 1 3	Peningkatan Kompetensi SDM Pertanian			Kabupaten Bone Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	100 Orang	Meningkatnya Pengetahuan dan Kompetensi SDM Pertanian	100 %		350,000,000.0		375,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	0 2	01.00	0 9	0 1 4	Penyusunan Data Base Ketenagaan Penyuluh			Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah dokumen data base ketenagaan penyuluh	1 dokumen	Tersedianya dokumen data base ketenagaan penyuluh	1 dokumen		100,000,000.0		0.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	0 2	01.00	0 9	0 1 5	Pemberdayaan BPP melalui Adopsi Teknologi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah BPP lokasi diseminasi paket teknologi	10 BPP	Berkembangnya BPP untuk diseminasi paket teknologi	10 BPP		150,000,000.0		150,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	0 2	01.00	0 9	0 1 6	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Pertanian			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Penyuluh yang memperoleh pembinaan karier Dokumen Data base ketenagaan SDM Pertanian Jumlah kategori yang diikuti pada Penerima Penghargaan Penyuluhan Pertanian Jumlah Penyuluh yang terlatih dalam pengembangan TPH	50 orang 1 dokumen 3 kategori 40 orang	Meningkatnya jumlah Penyuluh yang memperoleh pembinaan karier Tersedianya Dokumen Data base ketenagaan SDM Pertanian Meningkatnya Penyuluh Pertanian yang menerima penghargaan Meningkatnya pengetahuan Penyuluh yang telah dilatih	50 orang 1 dokumen 3 kategori 40 orang		850,000,000.0		775,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.00	0 2	01.00	0 9	0 1 7	Pembinaan, Pengembangan Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah materi penyuluhan pertanian yang disusun pada cyber extension	10 Materi	Tersebar nya materi penyuluhan di cyber extension	10 Materi		2,425,000,000.0		800,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

							Sumatera Barat Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Kelembagaan Petani yang dibina	5 Unit	Terbinanya Kelembagaan Petani	5 Unit					
											Jumlah peserta sarasehan KTNA, Tudang Sipulung, PEDANA dan PENAS	250 Orang	Terlaksananya Sarasehan KTNA, Tudang Sipulung, PEDANA dan PENAS	250 Orang					
											Jumlah Pelaku Utama, Gap /KEP yang berprestasi	5 Orang	Meningkatnya jumlah Pelaku Utama, Gap /KEP yang berprestasi	5 Orang					
											Jumlah BPP yang diadvokasi dan diseminasi paket teknologi	10 Unit	Berkembangnya BPP yang diadvokasi & diseminasi paket teknologi	10 Unit					
2.00	02	01.00	10		PROGRAM FASILITASI PRASARANA DAN SARANA BERBANTUAN					Jumlah proyek bantuan WISMP dan LOAN untuk sektor pertanian	2 Proyek				6,946,538,000.0	7,187,588,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura		
2.00	02	01.00	10	01	Pembangunan, Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)		Kabupaten Maros					Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian	5 Unit	Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Pertanian	100 %	3,071,538,000.0	3,170,574,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2.00	02	01.00	10	02	Peningkatan Produktivitas Pertanian Beririgasi Melalui Program IPDMIP		Kabupaten Bone					Peralatan Sertifikasi Benih Padi	1 Paket	Tersedianya Peralatan Sertifikasi Benih Padi	100 %	1,200,000,000.0	1,200,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
							Kabupaten Pinrang					Fasilitasi Proses Sertifikasi Benih Padi	1 Paket	Terlaksananya Sertifikasi Benih Padi	100 %				
							Kabupaten Sidenreng Rappang					Kontrak dengan Petani Penangkar Benih	23 Penangkar	Terlaksananya Kontrak dengan Petani Penangkar Benih	100 %				
							Kabupaten Soppeng					Dukungan Balai Benih Tanaman Pangan tentang Perbenihan	1 Proposal	Tersusunnya Proposal Dukungan tentang Perbenihan	100 %				
							Kabupaten Wajo					Pengadaan Benih Padi Pokok/Label Ungu F-3	107982 Kg	Terlaksananya Pengadaan Benih Padi Pokok/Label Ungu F-3	100 %				

												Pelatihan Dasar Fasilitasi Rantai Nilai	50 Orang	Terlaksananya a Pelatihan Dasar Fasilitasi Rantai Nilai	100 %				
2.00	0 2	01.00	1 0 0 3	0	Perluasan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pertanian Melalui Proyek READ-SI (PHLN)			Kabupaten Luwu				Jumlah Peserta penyegaran penyuluh pertanian	180 Orang	Terlaksananya a pelatihan penyegaran penyuluh pertanian	180 Orang	1,250,000,000.0	1,392,014,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
								Kabupaten Luwu Timur				Jumlah Dukungan operasional manajemen pengelolaan READSI	1 Paket	Terlaksananya a operasional manajemen pengelolaan READSI	1 Paket				
								Kabupaten Luwu Utara											
2.00	0 2	01.00	1 0 0 4	0	Modernisasi dan Rehabilitasi Sistem Irigasi Strategis dan Mendesak (SIMURP)			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Peserta penyegaran penyuluh pertanian	120 Orang	Terlaksananya a pelatihan penyegaran penyuluh pertanian	120 Orang	750,000,000.0	750,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
												Jumlah Dukungan operasional manajemen pengelolaan SIMURP	1 Paket	Terlaksananya a operasional manajemen pengelolaan SIMURP	1 Paket				
2.00	0 2	01.00	1 0 0 5	0	Pelayanan Kewirausahaan dan Dukungan Ketenagakerjaan Muda (YESS Programme)			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Peserta penyegaran penyuluh pertanian	60 orang	Terlaksananya a pelatihan penyegaran penyuluh pertanian	60 orang	675,000,000.0	675,000,000.0	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
												Jumlah Dukungan operasional manajemen pengelolaan YESS Programme	1 Paket	Terlaksananya operasional manajemen pengelolaan YESS Programme	1 Paket				
<b>2.00</b>	<b>0 2</b>	<b>02.00</b>			<b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>											<b>65,690,486,164.74</b>	<b>35,584,028,553.21</b>		
<b>2.00</b>	<b>0 2</b>	<b>02.00</b>	<b>0 3</b>		<b>PROGRAM HILIRISASI PETERNAKAN (Prioritas)</b>					<b>Nilai Hilirisasi Produksi Peternakan (Prioritas)</b>	<b>21964750000 Rp</b>					<b>35,405,887,584.0</b>	<b>5,697,903,750.0</b>	<b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>	
2.00	0 2	02.00	0 3 0 1	0	Pembinaan, Revitalisasi RPH-R/RPU dan Sertifikasi Kelayakan Dasar			Kabupaten Bulukumba	#			Jumlah RPH-R/RPU yang direvitalisasi	1 Unit RPHRPH-R/RPU	Laporan Revitalisasi RPH-R/RPU	1 Laporan	283,000,000.0	283,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
								Kota Parepare				Jumlah RPH-R/RPU dan Unit Usaha yang memiliki NKV	1 Unit RPH-R/RPU	Jumlah RPH-R/RPU dan Unit Usahayang memiliki NKV	1 Unit RPH-R/RPU				
								kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai				Jumlah RPH-R/RPU yang mendapatkan Pembinaan Fasilitasi dan Strukturisasi Manajemen	2 Unit RPH-R/RPU	Jumlah RPH-R/RPU Yang Memenuhi Persyaratan Higiene Sanitasi	2 Unit RPH-R/RPU				



											Jumlah Unit Pengolahan Daging Umum Bersertifikat Halal dan NKV	1 Unit	Jumlah laporan Unit Pengolahan Daging Umum Bersertifikat Halal dan NKV	1 Laporan					
2.00	0 2	02.00	0 3	0 0 8	Penumbuhan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan						Jumlah Pelaku Usaha mendapatkan Pembinaan Kelompok Pasca panen di kab/kota	100 Pelaku Usaha	Jumlah peserta yang meningkat pengetahuannya dan keterampilannya	100 Orang	405,000,000.0	415,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
											Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pengolahan Limbah	2 Dokumen	Jumlah Sarana Pengolahan Limbah	1 Unit					
											Jumlah buku inventaris usaha pengolahan hasil peternakan	75 Buku	Persentase tingkat pengetahuan peternak terhadap buku inventaris usaha pengolahan hasil ternak	80 %					

						Kabupaten Jeneponto	#KWT Ilalang, Paenre Lompoe, Gantarang, Bulukumba Paenre Lampoe Gantarang Bulukumba Regency												
						Kabupaten Kepulauan Selayar	#KWT Mitra Jaya, Dampang, Gantarang, Bulukumba Dampang Gantarang Bulukumba Regency												
						Kabupaten Luwu	#KWT Sipatokkong Sejahtera, Jalanjang, Gantarang, Bulukumba Jalanjang Gantarang Bulukumba Regency												
						Kabupaten Luwu Timur	#RW 4 ( RT. 1,2,3) Labukkang Ujung Pare-Pare City												
						Kabupaten Luwu Utara	#Sapaya Bungaya Gowa Regency South Sulawesi												
						Kabupaten Maros													
						Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan													
						Kabupaten Pinrang													
						Kabupaten Sidenreng Rappang													
						Kabupaten Sinjai													
						Kabupaten Soppeng													
						Kabupaten Takalar													
						Kabupaten Tana Toraja													
						Kabupaten Toraja Utara													
						Kabupaten Wajo													
						Kota Makassar													
						Kota Palopo													
						Kota Parepare													

2.00	0 2	02.00	0 3	0 0 9	Penyusunan Data Base Pelaku Usaha dan Harga Komoditi Peternakan			Kabupaten Bantaeng				Jumlah Buku Kebutuhan dan Harga Komoditi Ternak dan Produk Peternakan	20 Buku	Jumlah Buku Analisa Harga Komoditi Peternakan	20 Buku	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
								Kabupaten Barru				Jumlah Buku database Pelaku Usaha	35 Buku	Jumlah Data Pelaku Usaha Bidang Peternakan	35 Buku				
								Kabupaten Bone											
								Kabupaten Bulukumba											
								Kabupaten Enrekang											
								Kabupaten Gowa											
								Kabupaten Jeneponto											
								Kabupaten Kepulauan Selayar											
								Kabupaten Luwu											
								Kabupaten Luwu Timur											
								Kabupaten Luwu Utara											
								Kabupaten Maros											
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan											
								Kabupaten Pinrang											
								Kabupaten Sidenreng Rappang											
								Kabupaten Sinjai											
								Kabupaten Soppeng											
								Kabupaten Takalar											
								Kabupaten Tana Toraja											
								Kabupaten Toraja Utara											
								Kabupaten Wajo											
Kota Makassar																			
Kota Palopo																			
Kota Parepare																			
2.00	0 2	02.00	0 3	0 1 1	Pengawasan Tim Jejaring Keamanan Pangan			10 Kab/Kota				Jumlah Unit Usaha/Pasar yang mendapatkan Pengawasan Tim jejaring Keamanan Pangan	12 Unit Usaha/Pasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tim Jejaring Keamanan Pangan	12 Laporan	55,000,000.0	65,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

2.00	0 2	02.00	0 3	0 1 2	Pengambilan dan Pengujian sampel produk pangan Hewani UPT PMPP			Kabupaten Bantaeng					Jumlah Pengambilan dan Pengujian sampel Produk Hewani UPT PMPP	150 sampel	Jumlah laporan hasil pengujian sampel pangan hewani	1 Laporan	150,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
								Kabupaten Barru											
								Kabupaten Bone											
								Kabupaten Bulukumba											
								Kabupaten Enrekang											
								Kabupaten Gowa											
								Kabupaten Jeneponto											
								Kabupaten Kepulauan Selayar											
								Kabupaten Luwu											
								Kabupaten Luwu Timur											
								Kabupaten Luwu Utara											
								Kabupaten Maros											
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan											
								Kabupaten Pinrang											
								Kabupaten Sidenreng Rappang											
								Kabupaten Sinjai											
								Kabupaten Soppeng											
								Kabupaten Takalar											
								Kabupaten Tana Toraja											
								Kabupaten Toraja Utara											
Kabupaten Wajo																			
Kota Makassar																			
Kota Palopo																			
Kota Parepare																			
2.00	0 2	02.00	0 3	0 1 3	Pelayanan Rekomendasi Usaha Peternakan			Provinsi Sulawesi Selatan					Jumlah surat Persetujuan Teknis	750 surat Persetujuan Teknis	Jumlah Laporan Rekapitulasi surat Persetujuan Teknis Ternak/ PAH dan HPAH	36 Laporan	90,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	0 2	02.00	0 3	0 1 5	Pengawasan dan Peningkatan Mutu Kualitas Pakan Berbasis pengujian			Kabupaten Bantaeng					Jumlah Pengambilan dan Pengujian sampel pakan, pengujian sampel dan	160 sampel	Jumlah Laporan Mutu dan Kualitas Pakan dan Bahan Pakan yang beredar dan diantar	1 Laporan	204,000,000.0	216,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Barru																			
Kabupaten Bone																			
Kabupaten Bulukumba																			



							Kabupaten Enrekang											
							Kabupaten Gowa											
							Kabupaten Jeneponto											
							Kabupaten Kepulauan Selayar											
							Kabupaten Luwu											
							Kabupaten Luwu Timur											
							Kabupaten Luwu Utara											
							Kabupaten Maros											
							Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan											
							Kabupaten Pinrang											
							Kabupaten Sidenreng Rappang											
							Kabupaten Sinjai											
							Kabupaten Soppeng											
							Kabupaten Takalar											
							Kabupaten Tana Toraja											
							Kabupaten Toraja Utara											
							Kabupaten Wajo											
							Kota Makassar											
							Kota Palopo											
							Kota Parepare											
2.00	02	02.00	03	018	Pengembangan Kelembagaan Kelompok Ternak Unggulan		Kabupaten Barru	#Bilalang Lemoie Bacukiki Pare-Pare City		Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Pembinaan bagi kelompok ternak	30 Kelompok	Jumlah kelompok yang dibina	30 Kelompok	90,000,000.0	95,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
							Kabupaten Bone	#Kabupaten Luwu Timur East Luwu Regency South Sulawesi ID		Jumlah Dokumen DataBase Penyuluh dan Kelompok Tani	50 Dokumen	Jumlah Dokumen Database yang dihasilkan	50 Dokumen					
							Kabupaten Bulukumba	#Rantepao,Tall unglipu, Tikala, Kesu, Soppai, Rantebua, Sesean North Toraja Regency South Sulawesi ID		Jumlah Dokumen Road Map Penguatan Kelembagaan Agribisnis Mandiri Petani/Peternak	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Road Map Penguatan Kelembagaan Agribisnis Mandiri Petani/Peternak	0 Dokumen					

								Kabupaten Enrekang	#tersebar 9 kecamatan Takalar Regency South Sulawesi ID									
								Kabupaten Gowa										
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Kepulauan Selayar										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Maros										
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Sinjai										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Takalar										
								Kabupaten Tana Toraja										
								Kabupaten Toraja Utara										
								Kabupaten Wajo										
								Kota Palopo										
								Kota Parepare										
								Provinsi Kota Makassar										
2.00	02	02.00	03	020	Pengembangan, Pemanfaatan Biogas dan Adaptasi dan Mitigasi RAD-GRK					Jumlah Dokumen Adaptasi dan Mitigasi RAD-GRK nan Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Adaptasi dan Mitigasi RAD-GRK nan Dokumen	1 Dokumen	223,000,000.0	225,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
								Kabupaten Bantaeng		Jumlah Peserta Pertemuan pengembangan dan pemanfaatan Biogas	50 Orang	Jumlah Laporan Pertemuan Pengembangan dan Pemanfaatan Biogas	1 Laporan					
								Kabupaten Barru		Jumlah kelompok penerima pengadaaan Biogas	2 Kelompok	Jumlah laporan pengembangan dan pemanfaatan biogas	2 Laporan					
								Kabupaten Bone										

							Kabupaten Bulukumba																
							Kabupaten Enrekang																
							Kabupaten Gowa																
							Kabupaten Jeneponto																
							Kabupaten Kepulauan Selayar																
							Kabupaten Luwu																
							Kabupaten Luwu Timur																
							Kabupaten Luwu Utara																
							Kabupaten Maros																
							Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan																
							Kabupaten Pinrang																
							Kabupaten Sidenreng Rappang																
							Kabupaten Sinjai																
							Kabupaten Soppeng																
							Kabupaten Takalar																
							Kabupaten Tana Toraja																
							Kabupaten Toraja Utara																
							Kabupaten Wajo																
							Kota Makassar																
							Kota Palopo																
							Kota Parepare																
2.00	0	02.00	0	0	Promosi Hasil Produksi Peternakan		Luar Provinsi				Jumlah promosi/pameran usaha	2 Pameran	Jumlah Laporan hasil promosi	1 Laporan	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan						
2.00	0	02.00	0	0	Penyusunan Media Informasi dan Komunikasi Penyuluhan Peternakan		Provinsi Kota Makassar				Jumlah edisi buletin informasi dan komunikasi yang diterbitkan	4 Edisi	Jumlah exp buletin informasi peternakan dan kesehatan hewan yang Terpublikasi	200 Buletin	60,000,000.0	60,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan						
	2		3	2			Kabupaten Bantaeng																
				4			Kabupaten Barru																
							Kabupaten Bone																
							Kabupaten Bulukumba																
							Kabupaten Enrekang																
							Kabupaten Gowa																
							Kabupaten Jeneponto																
							Kabupaten Kepulauan Selayar																
							Kabupaten Luwu																



								Kabupaten Luwu Timur																																
								Kabupaten Luwu Utara																																
								Kabupaten Maros																																
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan																																
								Kabupaten Pinrang																																
								Kabupaten Sidenreng Rappang																																
								Kabupaten Sinjai																																
								Kabupaten Soppeng																																
								Kabupaten Takalar																																
								Kabupaten Tana Toraja																																
								Kabupaten Toraja Utara																																
								Kabupaten Wajo																																
								Kota Makassar																																
								Kota Palopo																																
								Kota Parepare																																
2.00	0	02.00	0	0	0	Survey Identifikasi Desain wilayah pengembalaan								Jumlah dokumen profil wilayah pengembalaan	1 Dokumen	Persentase pemanfaatan data profil wilayah pengembalaan	100 %								300,000,000.0			300,000,000.0									Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
	2		3	2	7				24 kab./kota					Jumlah Penyusunan Dokumen Pedum Kriteria dan Persyaratan Teknis Pembangunan Prasarana Usaha Peternakan	1 Dokumen	Persentase Pedum Kriteria dan Persyaratan Teknis Pembangunan Prasarana Usaha Peternakan	95 %																							
									Kabupaten Luwu Utara					Jumlah Dokumen Analisis kemampuan daya tampung lahan	1 Dokumen	Persentase pemanfaatan data daya tampung lahan pada setiap satuan ternak	95 %																							

2.00	0 2	02.00	0 3	0 2 8	Peningkatan Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan UPT PMPP			Provinsi Sulawesi Selatan				Persentase Kepuasan Pelanggan UPT PMPP	85 %	Persentase Peningkatan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, dan persentase tingkat kepuasan pelanggan dan Penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017	85 %	55,000,000.0	60,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
2.00	0 2	02.00	0 3	0 2 9	Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah, Kelayakan Usaha			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah dan Kelayakan Usaha (Kewirausahaan)	60 Orang	Jumlah kelompok binaan pengemuka n sapi dan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dan aparat peternakan	24 Kelompok	60,000,000.0	60,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
												Jumlah peserta pertemuan pelaku usaha Peternak	30 Orang	Jumlah Laporan Pertemuan Pelaku Usaha Peternak	1 Laporan					
2.00	0 2	02.00	0 3	0 3 0	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Antara Kelompok Tani Dengan Pihak Perbankan dan Asuransi			Kabupaten Bantaeng					Jumlah peserta pertemuan permodalan asuransi usaha ternak	50 Orang	Jumlah kelompok usaha UMKM yang mengakses perbankan dan asuransi	10 Kelompok	150,000,000.0	155,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
								Kabupaten Barru					Jumlah Kelompok Tani/UMKM yang terfasilitasi dalam Membentuk Lembaga Keuangan Mikro	3 Kelompok	Jumlah Kelompok Usaha UMKM	3 Kelompok				
								Kabupaten Bone												
								Kabupaten Bulukumba												
								Kabupaten Enrekang												
								Kabupaten Gowa												
								Kabupaten Jeneponto												
								Kabupaten Kepulauan Selayar												
								Kabupaten Luwu												
								Kabupaten Luwu Timur												

							Kabupaten Luwu Utara											
							Kabupaten Maros											
							Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan											
							Kabupaten Pinrang											
							Kabupaten Sidenreng Rappang											
							Kabupaten Sinjai											
							Kabupaten Soppeng											
							Kabupaten Takalar											
							Kabupaten Tana Toraja											
							Kabupaten Toraja Utara											
							Kabupaten Wajo											
							Kota Makassar											
							Kota Palopo											
							Kota Parepare											
2.00	0 2	02.00	0 3	0 3 2	Pembinaan Asuransi Usaha Ternak		22 Kab/Kota			Jumlah Peserta Pembinaan Asuransi Ternak	50 Orang	Jumlah Binaan Kelompok Asuransi Ternak	10 Kelompok	70,000,000.0	72,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
2.00	0 2	02.00	0 3	0 3 3	Bimbingan Teknis Pengolahan Limbah Ternak Unggas dan Limbah Pasar Menjadi Pupuk Organik		Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Bimtek Pengolahan Limbah Menjadi Pupuk Organik	60 Orang	Jumlah Laporan Peningkatan SDM Pengolahan Limbah Menjadi Pupuk Organik	75 Laporan	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
2.00	0 2	02.00	0 3	0 3 4	Pembinaan Teknis Bidang Pembiayaan dan Investasi		24 kab/Kota		Jumlah Kelompok Tani Peternak	0 Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Peternak	0 Kelompok	220,000,000.0	320,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
									Jumlah Laporan Pembinaan Teknis Pembiayaan dan Investasi	2 Laporan	Jumlah laporan Peningkatan kualitas industri kecil dan menengah	2 Laporan						
									Jumlah laporan Monev Perkembangan kredit, Investasi dan Kemitraan	3 Laporan	Jumlah laporan monev, perkembangan kredit, investasi dan kemitraan	3 Laporan						
									Jumlah SDM pelaku usaha UMKM yang mendapatkan pelatihan	50 Orang	Jumlah Laporan SDM pelaku usaha yang terampil	1 Laporan						

2.00	0 2	02.00	0 3	0 3 5	Pendampingan untuk pengembangan kapasitas dan Produktivitas			24 Kab/Kota	#Borimatangka sa, dan Manjalling, Kab. Gowa West Bajeng Gowa Regency South Sulawesi			Jumlah Kelompok Tani Model Agribisnis	20 Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Model Agribisnis yang di dampingi	20 Kelompok	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
									#tersebar 9 kecamatan Takalar Regency South Sulawesi ID										
2.00	0 2	02.00	0 3	0 3 6	Pengawasan Kesmavet dan Pengawasan Mutu Pangan Asal Hewan			24 Kab/Kota	#Kelurahan Somba Somba Opu Gowa Regency South Sulawesi			Jumlah Pengambilan Sampel Mutu Pangan Asal Hewan	200 Sampel	Jumlah Sampel Mutu Pangan Asal hewan untuk Pemeriksaan Laboratorium	200 Sampel	100,000,000.0	111,903,750.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
									#Menyebar di 8 Kecamatan se Kabupaten Bantaeng Bantaeng Regency South Sulawesi ID										
									#Pasar Tradisional dan Modern di Kota Makassar serta kantin sekolahan Makassar Makassar City South Sulawesi										
									#Rantepao, Tallunglipu, Tikala, Sopai, Kesu, Sesean, Tondon North Toraja Regency South Sulawesi ID										
									#Sungguminasa Somba Opu Gowa Regency South Sulawesi										
2.00	0 2	02.00	0 3	0 3 7	Pembuatan Blue Print Hillirisasi Produk Peternakan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Penyusunan Dokumen Blue Print	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Blue Print	1 Dokumen	150,000,000.0	0.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0 2	02.00	0 3	0 3 8	Sosialisasi Pengujian Mutu Pakan/Bahan Pakan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah peserta pertemuan sosialisasi	20 orang	Jumlah Laporan Hasil Pertemuan	1 Laporan	30,000,000.0	30,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0 2	02.00	0 3	0 4 1	Komunikasi Informasi dan Edukasi Penyakit Zoonosis dan, Pengawasan Kesrawan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Peserta KIE Penyakit Zoonosis dan Pengawasan Kesrawan	25 Orang	Jumlah laporan KIE Penyakit Zoonosis dan Pengawasan Kesrawan	1 laporan	73,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

2.00	0 2	02.00	0 3	0 4 3	Pembangunan dan Pengembangan RPH-R Modern			Prov. Sul-Sel			Jumlah RPH-R Modern yang di bangun dan dikembangkann	1 Unit	Jumlah RPH-R Modern	1 Unit	31,702,887,584.0	1,900,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0 2	02.00	1 1		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK					5497 Kasus					3,446,000,000.0	3,403,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0 2	02.00	1 1	0 0 1	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyakit Hewan			24 Kab./Kota			Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan pembinaan dan monitoring	15 Unit Usaha	Jumlah buku database perusahaan yangmendapatkan pembinaan	1 Buku	77,000,000.0	77,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0 2	02.00	1 1	0 0 3	Peningkatan Kapasitas Petugas Medik dan Paramedik			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Medik dan Paramedik	30 Orang	Jumlah laporan hasil pertemuan peningkatan kapasitas petugas medik/paramedik	1 Laporan	180,000,000.0	180,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
											Jumlah peserta Pertemuan analisa Ekonomi Bidang Kesehatan Hewan	30 Orang	Jumlah laporan hasil pertemuan analisa ekonomi	1 Laporan				
2.00	0 2	02.00	1 1	0 0 4	Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Penyakit Reproduksi			24 Kab./Kota			Jumlah Pengadaan vaksin dan obat-obatan	640860 Dosis	Laporan pengendalian penyakit hewan menular strategis prioritas	1 Laporan	2,000,000,000.0	2,000,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0 2	02.00	1 1	0 0 7	Pembinaan dan Monitoring Peredaran Obat Hewan			24 Kabupaten/Kota			Jumlah Unit Usaha yang Mendapatkan Pembinaan dan Monitoring dan Tersusunnya Buku Data Base Perusahaan/Depo Obat Hewan	30 Unit	Laporan Pembinaan dan Monitoring Peredaran Obat Hewan dan Buku Data Base Perusahaan/Depo Obat Hewan	1 Laporan dan Buku	187,000,000.0	88,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

											Jumlah Peternak yang mendapatkan Sosialisasi Penggunaan Antibiotik dan Jumlah Peternak yang mendapatkan Pembinaan Penggunaan Antibiotik	70 Orang	Jumlah Laporan Sosialisasi penggunaan antibiotik dan Laporan Pembinaan penggunaan antibiotik	2 Laporan				
2.00	0 2	02.00	1 1	0 1 0	Peningkatan Kapasitas Pengawasan Obat Hewan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Obat Hewan	50 Orang	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Obat Hewan	1 Laporan	235,000,000.0	240,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0 2	02.00	1 1	0 1 1	Pengawasan Mutu Obat Hewan			Bogor BBPM SOH			Jumlah sampel obat hewan yang di uji	75 Sampel	Jumlah Laporan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran vaksin dan	1 Laporan	154,000,000.0	160,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
								provinsi Kota Makassar										
2.00	0 2	02.00	1 1	0 1 2	Pelayanan Kesehatan Hewan dan Klinik hewan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah hewan yang diobati/ditan gani	325 Ekor	Jumlah laporan penanganan hewan yang diobati	12 Laporan	170,000,000.0	180,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0 2	02.00	1 1	0 1 3	Peningkatan KIE Kepada Tenaga Medis dan Masyarakat			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Pertemuan Tenaga Medis dan Masyarakat yang mendapatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	27 Orang	Laporan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kepada Tenaga Medis dan Masyarakat	1 Laporan	40,000,000.0	60,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0 2	02.00	1 1	0 1 4	Peningkatan Pelayanan Pengujian Penyakit Hewan			24 Kabupaten/Kota			Jumlah Pengujian Penyakit hewan	3550 sampel	Jumlah laporan pengujian penyakit hewan	1 laporan	295,000,000.0	310,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0 2	02.00	1 1	0 1 5	Penguatan Kelembagaan UPT BK3			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah petugas yang mengikuti peningkatan SDM	2 Orang	Persentase SDM yang mengikuti pelatihan dan keterampilan aparaturnya UPT BK3 dalam pelaksanaan pelayanan	100 %	108,000,000.0	108,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
<b>2.00</b>	<b>0 2</b>	<b>02.00</b>	<b>1 3</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TERNAK (Prioritas)</b>					<b>Jumlah Populasi ternak kecil</b>	<b>1740324 Ekor</b>			<b>19,478,200,000.0</b>	<b>18,838,720,000.0</b>	<b>Dinas Peternakan dan</b>		

										Jumlah Populasi ternak sapi perah (Prioritas)	1416 Ekor									Kesehatan Hewan	
										Jumlah Populasi ternak unggas	129027702 Ekor										
										Jumlah Populasi ternak kuda (Prioritas)	185948 Ekor										
										Jumlah Populasi ternak kerbau (Prioritas)	115598 Ekor										
										Jumlah produksi telur (Prioritas)	170724195 Kg										
										Jumlah Populasi sapi potong (Prioritas)	1329788 Ekor										
										Jumlah produksi daging (Prioritas)	139478730 Kg										
										Jumlah produksi susu (Prioritas)	3370049 Kg										
2.00	0 2	02.00	1 3	0 0 1	Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Potong di Luwu Utara (Seko dan Rampi)			Kabupaten Luwu Utara		Jumlah Dokumen Penyusunan Amdal, Survey Identifikasi dan Desain (SID)	0 Dokumen	Jumlah Kawasan Peternakan Sapi potong	0 Kawasan	2,100,000,000.0	600,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					
										Jumlah Kawasan Pengembangan breeding center kawasan seko dan rampi	2 Kawasan	Jumlah pengadaan ternak kawasan seko dan rampi	1000 Ekor								
2.00	0 2	02.00	1 3	0 0 3	Pengembangan pusat perbibitan unggas berbasis teknologi			Kabupaten Sinjai		Jumlah Perbibitan (Hatchery) Berbasis Teknologi	0 Kelompok	Jumlah Kelompok Pusat Perbibitan (Hatchery) Berbasis Teknologi	0 Kelompok	800,000,000.0	0.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					
										Jumlah Kelompok pembibitan unggulan	1 Kelompok	Jumlah laporan pengembangan desa pembibitan unggulan	1 Laporan								
2.00	0 2	02.00	1 3	0 0 4	Peningkatan Kapasitas Tampung Ternak Potong			24 kab/kota		Jumlah Luas Lahan Pengadaan HPT	15 Ha	Persentase Kapasitas Tampung Ternak Sapi	100 %	500,000,000.0	0.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					

2.00	0	02.00	1	0	Revitalisasi Pus Keswan					Jumlah Revitalisasi Puskesmas	24 Unit/kab.kota	Jumlah Revitalisasi Puskesmas	24 Unit	500,000,000.0	500,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	2		3	1													
				4													
							Kota Parepare	#Jl. Ahmad Yani Km. 6 Bukit Harapan Soreang Pare-Pare City									
							Kab. Benteng Kepulauan Selayar	#Masamba, Mappedeceng, Tanalili									
							Kac. Bara Batu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	#Tallunglipu North Toraja Regency South Sulawesi ID									
							Kec. Taneterilau Kabupaten Barru	#UPTD Puskesmas Ujung Bulu, Bulukumba Caile Bulukumba Kabupaten Bulukumba									
							Kec. Bantimurung Kabupaten Maros										
							Kec. Belopa Kabupaten Luwu										
							Kec. Biringkanaya Kota Makassar										
							Kec. Bolu Kabupaten Toraja Utara										
							Kec. Liliriaja Kabupaten Soppeng										
							Kec. Maiwa Kabupaten Enrekang										
							Kec. Majauleng Kabupaten Wajo										
							Kec. Makale Kabupaten Tana Toraja										
							Kec. Mancani Kota Palopo										
							Kec. Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang										
							Kec. Pajukukang Kabupaten Bantaeng										
							Kec. Polongbangkeng Kabupaten Takalar										



								Kec. Sabbang Kabupaten Luwu Utara											
								Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai											
								Kec. Tamarunang Kabupaten Gowa											
								Kec. Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone											
								Kec. Tomoni Kabupaten Luwu Timur											
								Kec. Turatea Kabupaten Jeneponto											
								Kec. Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang											
								Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba											
2.00	0 2	02.00	1 3	0 2 2	Pengembangan Inseminasi Buatan			24 Kab/Kota	# Tana Toraja Regency South Sulawesi ID			Jumlah pengadaan Straw Semen Beku	9000 Straw	Persentase kelahiran ternak hasil IB	75 %	215,000,000.0	240,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
									#Dinas Pertanian Tallunglipu Matalo Tallunglipu North Toraja Regency			Jumlah Peserta Pertemuan Penetapan Wilayah dan Target Akseptor	50 orang	Laporan Penetapan Wilayah dan Target Akseptor	1 Laporan				
									#Dinas Peternakan dan Keswan Bulukumba Caile Bulukumba Kabupaten Bulukumba										
									#Jl. Ahmad Yani Km. 6 Bukit Harapan Soreang Pare- Pare City										
									#kabupaten enrekang										
									#Kabupaten Luwu Timur East Luwu Regency South Sulawesi ID										

								#Kec. Bontomatene, Kec. Bontomanai, Kec. Buki, Kec. Benteng, Kec. Bontoharu, Kec. Bontosikuyu, Kec. Pasimasunggu, Kec. Pasimasunggu Timur, Kec. Pasimarannu, Kec. Pasilambena, Kec. Taka Bonerate Selayar Islands Regency South Sulawesi ID									
								#Kec. Sinjai Utara, Sinjai Timur, Sinjai Selatan, Sinjai Borong, Sinjai Tengah, Sinjai Barat, Tellulimpoe dan Bulupoddo Sinjai Regency South Sulawesi ID									
								#sungguminasa Somba Opu Gowa Regency South Sulawesi									
								#tersebar 9 kecamatan Takalar Regency South Sulawesi ID									
2.00	0 2	02.00	1 3	0 2 3	Pengembangan Populasi Ternak Unggas dan Aneka Ternak		10 kab./kota	# Mario Kulo Sidenreng Rappang Regency		Jumlah Pengadaan Ternak Ayam Buras, Ayam Petelur dan Itik	50950 Ekor	jumlah laporan kegiatan pengadaan ternak ayam buras, ayam petelur dan itik	1 laporan	4,540,000,000.0	4,445,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
							24 kab./kota	# Lokasi pada desa tadongkon kec. Kesu North Toraja Regency South Sulawesi ID		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak	120 Orang	Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kelompok Peternak Unggas dan Aneka Ternak	120 Orang				



							Kabupaten Luwu	#Kec. Moncongloe Moncongloe Lappara Moncongloe Maros Regency										
							Kabupaten Luwu Timur	#Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur Wasuponda East Luwu Regency South Sulawesi										
							Kabupaten Luwu Utara	#Kecamatan Balocci (Balleanging, Balocci Baru, Kassi, Tonasa) Balocci Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi										
							Kabupaten Maros	#kecamatan galesong selatan kabupaten takalar South Galesong Takalar Regency South Sulawesi										
							Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	#kecamatan polongbangkeng selatan kabupaten takalar South Polombangkeng Takalar Regency South Sulawesi										
							Kabupaten Pinrang	#kecamatan polut kabupaten takalar North Polombangkeng Takalar Regency South Sulawesi										
							Kabupaten Sidenreng Rappang	#Kelompok Ternak Tanete, Kelurahan Bone Tua, Kec. Masamba										
							Kabupaten Sinjai	#Kelompok Samaturu, Desa Pammanu Kec. Belopa Utara Luwu Regency South Sulawesi ID										



								#lingkungan pangkabinanga kel pangkabinanga kec pallangga kab gowa Pangkabinanga Pallangga Gowa Regency									
								#nama kelompok Resotemanging i, Desa Libureng Kec. Tonra Tonra Bone Regency South Sulawesi									
								#Sarempo Siparappe Watang Sawitto Kabupaten Pinrang									
2.00	02	02.00	13	024	Peningkatan Produksi Ternak Bibit Unggas dan Aneka Ternak		Kabupaten Maros	# Tana Toraja Regency South Sulawesi ID	Jumlah Pengadaan ayam ketawa	50 ekor	Persentase Peningkatan produksi ternak bibit ayam ketawa	80 %	200,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
								#Gapoktan Cahaya Tani Desa Kayu Bauk Kec. Bontomatene Selayar Islands Regency South Sulawesi ID	Jumlah Pengadaan kelinci	50 ekor	Persentase Peningkatan produksi ternak bibit kelinci	80 %					
								#Kelompok Wanita Tani Ternak Jeneberang Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan	Jumlah Pengadaan Ayam Kampung	300 ekor	Persentase Peningkatan produksi ternak bibit ayam kampung	80 %					
2.00	02	02.00	13	026	Pengembangan Populasi Ternak Besar		Kabupaten Bantaeng	# Kecamatan Segeri Kab.Pangkep	Jumlah Pengadaan Ternak Sapi Bali Betina, dan Kerbau Betina	400 Ekor	Jumlah Kelompok Binaan Budidaya Ternak Besar	40 Kelompok	4,340,000,000.0	4,440,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
							Kabupaten Barru	# Amparita Tellulimpo E Sidenreng Rappang Regency	Jumlah Peserta Bimtek Pengembang an Ternak Besar	120 Orang	Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kelompok Ternak Besar	95 %					

					Kabupaten Bone	# Arawa Watang Pulu Sidenreng Rappang Regency			Jumlah Penyusunan Dokumen Model Peternakan Kuda	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Model Peternakan Kuda	1 Dokumen								
					Kabupaten Bulukumba	# Passeno Baranti Sidenreng Rappang Regency			Jumlah bantuan bibit kuda ke kelompok ternak	20 ekor	laporan kegiatan pengembangan kelompok model peternakan kuda	1 laporan								
					Kabupaten Enrekang	# Sinjai Regency South Sulawesi ID														
					Kabupaten Gowa	# Tana Toraja Regency South Sulawesi ID														
					Kabupaten Jeneponto	#biii-bili, Kelompok ternak sari tene, desa bili-bili kec. bontomarannu Bontomarannu Gowa Regency South Sulawesi														
					Kabupaten Kepulauan Selayar	#Desa Baruppu Parodo, Kec. Baruppu North Toraja Regency South Sulawesi ID														
					Kabupaten Luwu	#Desa Batulappa Batulappa Patimpeng Bone Regency														
					Kabupaten Luwu Timur	#DESA BUNTU PEMA. KEC CURIO. AB ENREKANG Buntu Pema Curio Enrekang Regency														
					Kabupaten Luwu Utara	#Desa Gona 3 Kelompok Tani Gona Kajuara Bone Regency														
					Kabupaten Maros	#desa inrello, kec. kera kab wajo Inrello Keera Wajo Regency														





							Kota Palopo	#Kecamatan Lau Maros Regency South Sulawesi ID												
							Kota Parepare	#Kelompok Annisia, Desa Garuntungan, Kindang, Bulukumba Garuntungan Kindang Bulukumba Regency												
								#Kelompok aswaja, desa waqsuponda, kec. wasuponda Kabupaten Luwu Timur East Luwu Regency South Sulawesi ID												
								#Kelompok Balangpaliasa, Desa Moncongkomb a Kec. Polongbangken g Selatan Takalar Regency South Sulawesi ID												
								#Kelompok sipatuo desa tombang kec. walenrang Luwu Regency South Sulawesi ID												
								#Kelompok Tani Desa Binturu Kec. Larompong Kab. Luwu Binturu Larompong Luwu Regency												
								#Kelompok Tani Sipulung, Desa Maccile Kec. Lalabata Maccile Lalabata Soppeng Regency												
								#Kelompok Tassisso Desa Puncak Kec. Sinjai Selatan Sinjai Regency South Sulawesi ID												

								#KELOMPOK TERNAK PUTRA PAO KELURAHAN BAJOE KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE Bajoe East Tanete Riattang Bone Regency										
								#Kelompok Wanita Tani Lestari, Desa Gunung Perak Kec. Sinjai Barat Gn. Perak Sinjai Bar. Kabupaten Sinjai										
								#KELOMPOK TERNAK MACCARINNAE DESA BALLE KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE, DESA BONTOPADANG KEC. KAHU Balle Kahu Bone Regency										
								#Kelurahan Apala, nama kelompok : mulamompoe, kelurahan apala, Kec. Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan										
								#Kelurahan Purangi, Kec. Sendana Palopo City South Sulawesi ID										
								#Toraja Utara North Toraja Regency South Sulawesi ID										
2.00	02	02.00	13	027	Pengembangan Populasi Ternak Kecil		Kabupaten Bantaeng	# Abbokongeng Kulo Sidenreng Rappang Regency		Jumlah Pengadaan Ternak Kambing dan Babi	260 Ekor	Jumlah Kelompok Binaan Ternak Kecil	13 Kelompok	930,000,000.0	990,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		

							Kabupaten Barru	# Amparita Tellulimpo E Sidenreng Rappang Regency		Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Ternak Kecil	100 orang	Jumlah SDM yang dapat Pengetahuan dan Keterampilan Kelompok Ternak Kecil	100 Orang					
							Kabupaten Bone	# Arawa Watang Pulu Sidenreng Rappang Regency										
							Kabupaten Bulukumba	# Sinjai Regency South Sulawesi ID										
							Kabupaten Enrekang	# Tana Toraja Regency South Sulawesi ID										
							Kabupaten Gowa	#Desa Balang Baru, Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto Balang Baru Tarowang Jeneponto Regency										
							Kabupaten Jeneponto	#desa barugae Lamuru Bone Regency South Sulawesi										
							Kabupaten Kepulauan Selayar	#Desa Pandak Kec. Masamba, Kabupaten Luwu Utara Komba Larompong Luwu Regency										
							Kabupaten Luwu	#Desa Salubua Kec.Basse Sangtempe Utara Kab.Luwu Basesangtempe Luwu Regency South Sulawesi										
							Kabupaten Luwu Timur	#Desa Tondon Kec. Tondon North Toraja Regency South Sulawesi ID										
							Kabupaten Luwu Utara	#Desa Uraso Kec.Basse Sangtempe Utara Kab.Luwu Uraso Basesangtempe Luwu Regency										

						Kabupaten Maros	#Desa Watu Toa, Kec. marioriwawo Watu Toa Mario Riwawo Soppeng Regency														
						Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	#DSA MASALLE. KEC MASALLE. KAB ENREKANG Masalle Masalle Enrekang Regency														
						Kabupaten Pinrang	#Gapoktan Karamaiya Desa Bungaiya Kec. Bontomatene Selayar Islands Regency South Sulawesi ID														
						Kabupaten Sidenreng Rappang	#Gentung Labakkang Pangkajene Dan Kepulauan Regency Gentung Labakkang Pangkajene Dan Kepulauan Regency														
						Kabupaten Sinjai	#kabupaten Gowa Gowa Regency South Sulawesi ID														
						Kabupaten Soppeng	#Kabupaten Pinrang Pinrang Regency South Sulawesi ID														
						Kabupaten Takalar	#kabupaten takalar Takalar Regency South Sulawesi ID														
						Kabupaten Tana Toraja	#Kec. Alla, Kec. Baraka, Kec. Masalle, Kec. Malua, Kec. Bungin														
						Kabupaten Toraja Utara	#Kelompok Dulunna Awangtangka, Kelurahan AwangTangka Kec. Kajuara Kalero Kajuara Bone Regency														



									#RT. 2 RW. IV Kelurahan Bukit Harapan Kec. Soreang Bukit Harapan Soreang Pare-Pare City									
									#tana toraja Tana Toraja Regency South Sulawesi ID									
									#Toraja Utara North Toraja Regency South Sulawesi ID									
2.00	0 2	02.00	1 3	0 2 8	Peningkatan Produksi Ternak Bibit Ruminansia			Kabupaten Maros				Jumlah Pakan Konsentrat dan Pakan Hasil Samping Pertanian	123370 Kg	Jumlah Kelahiran Ternak Bibit Sapi Bali, Ternak Bibit Kambing, dan Ternak Bibit Kerbau	90 Ekor	743,000,000.0	795,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
												jumlah ternak sapi yang dipelihara	169 ekor	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 laporan			
2.00	0 2	02.00	1 3	0 3 0	Peningkatan Prasarana dan Sarana Peralatan dan Mesin Peternakan			24 kab./kota				Jumlah Pengadaan Prasarana dan Sarana Peralatan dan Mesin Peternakan	5 Jenis	Jumlah Alat Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Teknologi Peternakan	5 Jenis	200,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	0 2	02.00	1 3	0 3 1	Analisis Supplay Demand Ternak Unggas dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak Unggas dan Aneka Ternak			24 Kab/Kota				Jumlah Laporan Analisis Supplay Demand Bibit Ternak Unggas dan Aneka Ternak serta Jumlah Laporan Pengawasan Lalu Lintas Ternak Unggas dan Aneka Ternak	6 Laporan	Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Bibit Ternak Unggas dan Aneka Ternak serta Terawasinya Lalu Lintas Ternak dan Aneka Ternak	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	0 2	02.00	1 3	0 3 3	Penguatan Kelembagaan UPT Pelayanan IB & Produksi Semen			24 Kab/Kota				Jumlah SDM yang mengikuti Kursus-kursus pelatihan	9 Orang	Persentase peningkatan wawasan dan keterampilan bagi peserta kursus singkat/maga ng	100 %	170,000,000.0	190,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

							Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Peserta Bimtek Petugas Handling Semen dan ISIKHNAS IB	50 Orang	Persentase Wawasan dan keterampilan Petugas Handling Semen, Peserta Bimtek Isikhnas IB	100 %			
2.00	0 2	02.00	1 3 4	0 3 4	Pengolahan Lahan Kebun Rumput UPTD IB		24 Kab/Kota			Jumlah Luas Pengolahan Lahan Kebun Rumput UPTPIB-PS	20 Ha	Jumlah Lahan rumput untuk HPT UPTPIB-PS	20 Ha	230,000,000.0	230,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0 2	02.00	1 3 4 0	0 4 0	Peningkatan Penerapan Teknologi Embrio Transfer		Kabupaten Bantaeng			Jumlah Embrio Transfer Sapi Bali	10 Embrio	Jumlah Kelahiran Ternak Teknologi Embrio Transfer	3 Ekor	30,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
							Kabupaten Barru										
							Kabupaten Bone										
							Kabupaten Bulukumba										
							Kabupaten Enrekang										
							Kabupaten Gowa										
							Kabupaten Jeneponto										
							Kabupaten Kepulauan Selayar										
							Kabupaten Luwu										
							Kabupaten Luwu Timur										
							Kabupaten Luwu Utara										
							Kabupaten Maros										
							Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
							Kabupaten Pinrang										
							Kabupaten Sidenreng Rappang										
							Kabupaten Sinjai										
							Kabupaten Soppeng										
							Kabupaten Takalar										
							Kabupaten Tana Toraja										
							Kabupaten Toraja Utara										
							Kabupaten Wajo										
							Kota Makassar										
							Kota Palopo										
							Kota Parepare										

2.00	0 2	02.00	1 3	0 4 2	Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Ternak Besar					Jumlah Wilayah Pengembangan Sumber Bibit Ternak Besar	13 Wilayah	Jumlah Laporan Pengembangan Kawasan Perbibitan Ternak Besar	1 Laporan	250,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
						Kabupaten Barru	#Batumalonro, dan Baturappe. Kelompok tani mallapisi, desa batumalonro, kec. biringbulu Biringbulu Gowa Regency South Sulawesi												
						Kabupaten Bone	#Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan ID Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan ID												
						Kabupaten Bulukumba	#Kabupaten Toraja Utara/ Dinas Pertanian North Toraja Regency South Sulawesi ID												
						Kabupaten Enrekang	#Kec. Maiwa, Kec. Curio												
						Kabupaten Gowa	#Kec. Polut, Kec. Polsel dan Kec. Pattalassang Takalar Regency South Sulawesi ID												
						Kabupaten Jeneponto	#Kelompok Mabbulo Sibatang, Desa Tibona, Kec. Bulukumpa, Bulukumba Tibona Bulukumpa Bulukumba Regency												
						Kabupaten Luwu Utara	#Kelompok Multi Agro, Desa Bulu-Bulo, Kec. Bulukumpa, Bulukumba Bulu-Bulo Bulukumpa Bulukumba Regency												
						Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	#Kelompok Pada Idi, Desa Ballasaraja, Kec. Bulukumpa, Bulukumba Ballasaraja Bulukumpa Bulukumba Regency												



								Kabupaten Sidenreng Rappang	#Kelompok Sapanatole, Desa Jojjolo, Kec. Bulukumpa, Bulukumba Jojjolo Bulukumpa Bulukumba Regency											
								Kabupaten Sinjai	#Kelompok Sijareki, Desa Tombolo Kec. Gantarang Keke Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan											
								Kabupaten Takalar												
								Kabupaten Toraja Utara												
								Kabupaten Wajo												
2.00	0 2	02.00	1 3	0 4 3	Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Ternak Unggas dan Aneka Ternak			Kab. Sinjai dan Kota Palopo	#UPTD Perbibitan Mancani, Kelurahan Mancani Kec. Telluwanua Mancani Telluwanua Palopo City			Jumlah Wilayah Pengembangan Sumber Bibit Ternak Unggas dan Aneka Ternak	5 Wilayah	Jumlah laporan Pengembangan kawasan perbibitan unggas dan Aneka Ternak	1 Laporan	250,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
								Kabupaten Bantaeng				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Amdal Penetapan Kawasan Sumber Bibit Ayam Buras Unggulan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penetapan (SK)	2 Dokumen					
								Kabupaten Maros												
								Kabupaten Pinrang												
								Kabupaten Sinjai												
								Kota Palopo												
2.00	0 2	02.00	1 3	0 4 5	Inventarisasi Bahan Pakan dan Hijauan Pakan Ternak			Kabupaten Barru				Jumlah Dokumen Data Base Bahan Pakan dan Hijauan Pakan Ternak	1 Dokumen	Jumlah Laporan Inventarisasi bahan pakan dan hijauan pakan ternak	6 Laporan	145,200,000.0	159,720,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
								Kabupaten Bone												
								Kabupaten Bulukumba												
								Kabupaten Gowa												
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan												
								Kabupaten Pinrang												

2.00	0 2	02.00	1 3	0 4 7	Pengembangan Mutu Pakan dan Hijauan Makanan Ternak			24 Kab./Kota					Jumlah Produsen Pakan dan Kelompok Ternak yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Mutu Pakan	4 Produsen / Kelompok Ternak	Persentase Peningkatan wawasan produsen pakan/kelompok ternak dalam membuat pakan ternak	90 %	210,000,000.0	321,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
													jumlah Sampel Pengawasan kualitas dan keamanan pakan	150 sampel	Jumlah Laporan Pengawasan Kualitas dan Keamanan Pakan	1 Laporan					
2.00	0 2	02.00	1 3	0 4 9	Pengembangan dan Penguatan UPT Pembibitan Ternak dan HPT			Kabupaten Maros					Jumlah sarana dan prasarana pada UPT-PT HPT	14 Unit	Cakupan Pemeliharaan sarana dan prasarana	80 %	140,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
2.00	0 2	02.00	1 3	0 5 0	Pemeliharaan Ternak dan Produksi Semen Beku			Provinsi Sulawesi					Jumlah Bahan Pakan Ternak	124850 Kg	Persentase Peningkatan Produksi dan Kualitas Semen	75 %	515,000,000.0	516,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
2.00	0 2	02.00	1 3	0 5 2	Peningkatan Produksi Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)			Pucak Kabupaten Maros					Jumlah Produksi Bibit Rumput dan Bibit Legum	2200 Stek	Persentase Produksi Hijauan Pakan Ternak yang Berkualitas	80 %	100,000,000.0	180,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
2.00	0 2	02.00	1 3	0 5 3	Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan									Jumlah Pengadaan Prasarana dan Sarana Peternakan	200 Paket/Unit	Jumlah Laporan Pengadaan Prasarana dan Sarana Peternakan	1 Laporan	620,000,000.0	1,682,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
								24 kab./kota	Jumlah Dokumen Data Base PLA dan UPJA Peternakan	2 Dokumen	Persentase pemanfaatan data base PLA dan UPJA peternaka	95 %									
								24 Kab./Kota	Luas Penanaman Hijauan Pakan Ternak	15 Hektar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan									
								Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Lokasi Tata Kelola Air	5 Lokasi	Jumlah Lokasi Tata Kelola Air	5 Lokasi									
									Jumlah kawasan pengembalaa n	0 kab	Jumlah Bibit Sapi dan Kerbau Ke Kelompok Tani ternak	0 ekor									
2.00	0 2	02.00	1 3	0 5 5	Pembinaan Pengelolaan Pakan dan Formulasi Ransum			Provinsi Sulawesi Selatan					Jumlah Peserta yang Mendapatkan Pembinaan, Pengelolaan Pakan dan Formulasi Ransum	60 Orang	Persentase Pengetahuan dan Keterampilan Peserta Bimtek Pengelolaan Pakan dan Formulasi Ransum	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		

2.00	0 2	02.00	1 3	0 6 1	Pengendalian dan Penjarangan Betina Produktif						Jumlah Ternak Betina Produktif di RPH-R/RPU	0 Kelompok	Jumlah Pemotongan Ternak Betina Produktif	0 Kelompok	500,000,000.0	1,000,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
											Jumlah Penyelamatan Pemotongan Betina Produktif di RPH-R/RPU	260 Ekor	Persentase Terselamatkannya Ternak Betina Produktif di Rumah Potong Hewan	60 %				
						Kabupaten Bantaeng												
						Kabupaten Barru												
						Kabupaten Bone												
						Kabupaten Bulukumba												
						Kabupaten Enrekang												
						Kabupaten Gowa												
						Kabupaten Jeneponto												
						Kabupaten Kepulauan Selayar												
						Kabupaten Luwu												
						Kabupaten Luwu Timur												
						Kabupaten Luwu Utara												
						Kabupaten Maros												
						Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan												
						Kabupaten Pinrang												
						Kabupaten Sidenreng Rappang												
						Kabupaten Sinjai												
						Kabupaten Soppeng												
						Kabupaten Takalar												
						Kabupaten Tana Toraja												
						Kabupaten Toraja Utara												
						Kabupaten Wajo												
						Kota Makassar												
						Kota Palopo												
						Kota Parepare												
2.00	0 2	02.00	1 3	0 6 2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung UPT Peternakan (DAK)						Jumlah Sarana dan Prasarana	4 Paket	Jumlah Laporan DAK	1 Dokumen	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	Dinas Peternakan dan	

								Pucak Kabupaten Maros						UPT Peternakan					Kesehatan Hewan			
2.00	02	02.00	50														5,402,468,580.0	5,416,468,580.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>																						
2.00	02	02.00	50	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									Jumlah Bandwith	5 Mbps	Persentase jasa komunikasi	100 %	985,000,000.0	987,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
								Provinsi Sulawesi Selatan						Jumlah Kubik Air	10124 Kubik	Persentase jasa air	100 %					
								Pucak Kabupaten Maros						Jumlah Kwh Listrik	749830 Kwh	Persentase jasa Listrik	100 %					
2.00	02	02.00	50	02	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Provinsi Sulawesi Selatan						Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	31 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	31 Unit	125,000,000.0	130,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
														Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	49 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	49 Unit					
2.00	02	02.00	50	03	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Provinsi Sulawesi Selatan						Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	110 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	2,414,468,580.0	2,414,468,580.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
								Kecamatan Pucak Kabupaten Maros														
2.00	02	02.00	50	05	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Provinsi Sulawesi Selatan						Jumlah ATK yang tersedia	15 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	313,000,000.0	320,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
														Jumlah Jasa surat masuk dan surat keluar	14200 Surat	Jumlah Jasa surat masuk dan surat keluar	14200 surat					
														Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10000 lembar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10000 lembar					
2.00	02	02.00	50	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Provinsi Sulawesi Selatan						Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	15,000,000.0	15,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
2.00	02	02.00	50	08	Penyediaan Makanan dan Minuman			Provinsi Sulawesi Selatan						Jumlah makan minum tamu	315 OH	Cakupan makan minum tamu	100 %	1,250,000,000.0	1,230,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
														Jumlah makan minum rapat (kegiatan Pertemuan Sekretariat, Bidang dan UPT)	3720 OH	Cakupan makan minum rapat	100 %					

2.00	02	02.00	5009	0	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	60 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	5010	0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perjalanan dinas	37 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	37 Orang	200,000,000.0	220,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
<b>2.00</b>	<b>02</b>	<b>02.00</b>	<b>5011</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>					<b>729,880,000.74</b>	<b>928,150,000.0</b>	<b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>
2.00	02	02.00	5012	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan rumah jabatan/ rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	5014	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	6 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	200,000,000.0	308,150,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	5016	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	90 %	200,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
											Jumlah service/perbaikan kendaraan dinas roda 4	31 unit	tersedianya jasa pemeliharaan /perizinan kendaraan operasional	90 %			
											jumlah service/perbaikan kendaraan dinas roda 2	49 unit	tersedianya jasa pemeliharaan /perizinan kendaraan operasional	90 %			
											Bahan bakar kendaraan dinas	80 Unit	Tersedianya bahan bakar dinas	90 Unit			
2.00	02	02.00	5017	0	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	1 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas sesuai kebutuhan	35 %	99,880,000.0	100,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.00	02	02.00	5018	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik	30 %	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

2.00	0 2	02.00	5 1	0 0 9	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	6 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	100,000,000.74	100,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0 2	02.00	5 1	0 1 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	75 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	50,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0 2	02.00	5 1	0 1 2	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	1 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	70 %	20,000,000.0	30,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
									Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	12 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	70 %						
2.00	0 2	02.00	5 2		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %			990,500,000.0	1,077,236,223.21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
2.00	0 2	02.00	5 2	0 0 1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	72 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	100,000,000.0	129,736,223.21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0 2	02.00	5 2	0 2	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun dan Perubahannya	4 Dokumen	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun dan Perubahan	4 Dokumen	492,500,000.0	542,500,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
									jumlah dokumen Renja dan Perubahan yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan yang disusun	2 Dokumen						
									Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun yaitu LKPJ, LPPD dan Renstra OPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun yaitu LKPJ, LPPD dan Renstra OPD	2 Dokumen						

										Jumlah Pejabat Struktural yang ditetapkan kinerjanya	37 orang	Tersedianya perjanjian kinerja pejabat struktural	37 Orang				
										Penyusunan dokumen lakip	1 Dokumen	Jumlah dokumen lakip	1 Dokumen				
										Jumlah usulan kegiatan pada kementerian dan kelembagaan	1 Laporan	Jumlah Laporan usulan kegiatan	1 Laporan				
										Jumlah data program prioritas nasional yang dilaporkan	1 Laporan	Jumlah Laporan program prioritas nasional yang dilaporkan	1 laporan				
										Jumlah peserta Sosialisasi PUG Tingkat Kab/kota	24 Orang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan				
										Jumlah Peserta pemantapan PUG OPD Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan	0 Orang	Jumlah Laporan pertemuan pemantapan PUG	0 Laporan				
2.00	0 2	02.00	5 2	0 3	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK			Kec. Tamalate Kota Makassar Kec. Tompobulu Kabupaten Maros		Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	2 Usulan Kegiatan	Ketersediaan Usulan Kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan	1 Laporan	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0 2	02.00	5 2	0 4	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	2 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	90 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0 2	02.00	5 2	0 5	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	12 %	110,000,000.0	110,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
										laporan realisasi fisik dan keuangan tiap triwulan	3 Laporan	Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan	3 Laporan				
2.00	0 2	02.00	5 2	0 6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	90 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

												jumlah laporan monitoring program dan kegiatan OPD	4 Laporan	Ketersediaan laporan monitoring program dan kegiatan OPD	90 %				
2.00	0 2	02.00	5 2	0 7	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah laporan prognosi realisasi anggaran yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan prognosi realisasi keuangan	100 %	38,000,000.0	45,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
												Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan dan Pengawasan	2 Laporan	Ketersediaan laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengawasan	100 %				
2.00	0 2	02.00	5 3		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					% ASN berkinerja sangat baik	100 %					237,550,000.0	222,550,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0 2	02.00	5 3	0 1	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian nya	133 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	55,000,000.0	65,000,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
												Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %				
												jumlah Pendidikan dan Pelatihan aparat	30 Orang	Peningkatan kompetensi aparat	100 %				
2.00	0 2	02.00	5 3	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	131 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	157,550,000.0	157,550,000.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0 2	02.00	5 3	0 8	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	133 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	55 Orang	25,000,000.0	0.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
2.00	0	03.00			Dinas Perkebunan											22,083,074,676.30	22,747,309,358.65		
2.00	0 2	03.00	0 2		<b>PROGRAM HILIRISASI PERKEBUNAN (Prioritas)</b>					Nilai Hilirisasi Produksi Perkebunan (Prioritas)	5000000000 Rp					910,000,000.30	780,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	0 2	0 1	Pengadaan Alat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Kakao			Kabupaten Bantaeng	# Bontotiro Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan			Jumlah alat Pengolahan Pasca Panen yang diadakan	50 Unit	Ketersediaan alat pengolahan pasca panen	50 Unit	200,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perkebunan	





2.00	0 2	03.00	0 2	0 0 2	Pengadaan Alat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Kopi			Kabupaten Enrekang	# Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa Sulawesi Selatan		Jumlah alat Pengolahan Pasca Panen yang diadakan	50 Unit	Ketersediaan alat Pengolahan Pasca Panen	50 Unit	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan		
							Kabupaten Tana Toraja	# Buntu Sarong Masalle Kabupaten Enrekang											
								# Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan ID											
								# Kindang Kabupaten Bulukumpa Sulawesi Selatan											
								# Ledan Buntu Batu Enrekang Regency											
								# Lembang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan											
								# Luwu Regency South Sulawesi ID											
								# Tana Toraja Regency South Sulawesi ID											
								#baruppu, rindingallo, awan rantekarua, buntu pepasan, sesesan suloara, kapala pitu, denpina dan bangkelekila North Toraja Regency South Sulawesi ID											
								#Batulappa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan Batulappa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan											
								#Desa manimbahoi Parigi Gowa Regency South Sulawesi											
								#Desa Manimbahoi Parigi Gowa Regency South Sulawesi											

								#DESA MASALLE KEC MASALLE KAB ENREKANG Masalle Masalle Enrekang Regency												
								#Desa Rappolemba Rappolemba Tompobulu Gowa Regency												
								#Desa Rappolemba Tompobulu Gowa Regency South Sulawesi												
								#Desa Tanete Tompobulu Gowa Regency South Sulawesi												
								#Kec. Rongkong dan Kec. seko North Luwu Regency South Sulawesi ID												
								#Kelurahan Bontolerung Tinggimoncong Gowa Regency South Sulawesi												
								#Kelurahan Cikoro Tompobulu Gowa Regency South Sulawesi												
								#Kelurahan Malino Tinggimoncong Gowa Regency South Sulawesi												
								#Tapporang Batulappa Kabupaten Pinrang Tapporang Batulappa Kabupaten Pinrang												
								#Tersebar di Desa-desa yang Terletak di Kecamatan Sinjai Barat West Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi												

2.00	0 2	03.00	0 2	0 0 5	Pengadaan Alat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Cengkeh			Kabupaten Bulukumba	# Belawae Pitu Riase Sidenreng Rappang Regency			Jumlah alat Pengolahan Pasca Panen yang diadakan	5 Unit	Ketersediaan alat pengolahan	5 Unit	100,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Perkebunan	
								Kabupaten Kepulauan Selayar	# Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan										
								Kabupaten Luwu	# Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan										
								Kabupaten Luwu Utara	# Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan										
								Kota Palopo	# Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan										
									# Ledan Buntu Batu Enrekang Regency										
									# Luwu Regency South Sulawesi ID										
									# Palopo Wara Palopo City										
									# Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan										
									#Dusun I, II dan III Buntu Buanging Pitu Riase Sidenreng Rappang Regency										
									#Kec. Buki, Kec. Bontomanai Selayar Islands Regency South Sulawesi ID										
									#Kelurahan Battang										
2.00	0 2	03.00	0 2	0 0 6	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Pasca Panen Pengolahan Hasil Perkebunan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Peserta peningkatan kapasitas SDM bidang pasca panen pengolahan hasil perkebunan	160 Orang	Peserta peningkatan kapasitas SDM	160 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	

2.00	0 2	03.00	0 2	0 0 7	Penyebarluasan Informasi Pasar dan Produk Unggulan Perkebunan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kabupaten yang mendapatkan informasi produk unggulan Perkebunan	14 Kabupaten	Terselurnya informasi ke kabupaten	14 Kabupaten	50,000,000.0	60,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	0 2	0 0 8	Pameran/Expo Produk Olahan Hasil Perkebunan			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pameran yang diikuti	2 Expo	Terpromosikannya produk perkebunan	2 Expo	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	0 2	0 0 9	Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditi Perkebunan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kabupaten yang dipantau dan dievaluasi harga komoditi perkebunan	24 Kabupaten	Tersedianya laporan harga pasar	24 Kabupaten	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	0 2	0 1 0	Bimtek Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditi Perkebunan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi perkebunan	70 Orang	Peserta bimbingan teknis	70 Orang	20,000,000.30	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	0 2	0 1 1	Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	110 Orang	Peningkatan pemahaman peserta bimtek	100 %	20,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	0 2	0 1 2	Fasilitas Pelabelan dan Kemasan Produk Olahan Perkebunan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah UKM yang difasilitasi pebelan dan kemasan produk olahan perkebunan	6 UKM	Cakupan UKM yang difasilitasi	6 UKM	60,000,000.0	70,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	0 2	0 1 3	Pengembangan Agrowisata			Kabupaten Luwu			Jumlah peserta pengembangan agrowisata	10 Orang	Terwujudnya pengetahuan, wawasan, sikap dan keterampilan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan	2 Laporan	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	0 2	0 1 4	Pembangunan Unit Layanan Pengembangan Kawasan Perkebunan			Kabupaten Luwu Timur			Jumlah Bangunan ULPKP	2 Unit	Berdirinya bangunan ULPKP untuk pengembangan	2 Unit	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	0 2	0 1 5	Pengadaan Sarana Pendukung ULPKP			Kabupaten Luwu			Jumlah Sarana Pendukung ULPKP	2 Paket	Sarana yang tersedia	2 Paket	20,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Perkebunan	
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										

2.00	0 2	03.00	0 2	0 2 0	Pengembangan Usaha Produk Perkebunan Unggulan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pengembangan usaha produk perkebunan unggulan	100 Orang	Peningkatan pemahaman peserta pengembangan usaha produk perkebunan unggulan	100 Orang	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	0 2	0 2 1	Kemitraan Usaha Pengembangan Agrowisata Perkebunan			Kabupaten Bantaeng			Jumlah peserta kemitraan usaha dan agrowisata perkebunan	100 Orang	Cakupan kemitraan usaha dan agrowisata perkebunan	100 Orang	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	0 2	0 2 2	Pembinaan Inovasi Usaha Perkebunan			Kabupaten Enrekang			Jumlah peserta pembinaan usaha	80 Orang	Peningkatan pemahaman peserta pembinaan usaha	80 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	0 2	0 2 3	Pengawasan dan Pendampingan Teknologi Pengembangan Tanaman Kakao			Kabupaten Bantaeng			Jumlah laporan pengawasan dan pendampingan teknologi kakao	5 Laporan	Cakupan pengawasan dan pendampingan teknologi kakao	5 Laporan	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	0 2	0 2 4	Pengawasan dan Pendampingan Teknologi Pengembangan Tanaman Kopi			Kabupaten Enrekang			Jumlah laporan pengawasan dan pendampingan teknologi	2 Laporan	Cakupan pengawasan dan pendampingan teknologi	2 Laporan	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	0 2	0 2 5	Pengawasan dan Pendampingan Teknologi Pengembangan Tanaman Rempah			Kabupaten Bone			Jumlah laporan pengawasan dan pendampingan teknologi pengembangan tanaman rempah	2 Laporan	Cakupan pengawasan dan pendampingan teknologi tanaman rempah	2 Laporan	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	1 6		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN</b>						Produktivitas Komoditi Kelapa Sawit	4356 Kg/Ha			3,575,707,673.0	3,302,898,513.75	Dinas Perkebunan	
											Produktivitas Komoditi Tembakau (Nikotin rendah)	1030 Kg/Ha						
											Produktivitas Komoditi Tebu (Gula)	1169 Kg/Ha						
											Produktivitas Komoditi Kelapa (Kopra)	681 Kg/Ha						
											Produktivitas Komoditi Cengkeh (Biji Kering)	534 Kg/Ha						
											Produktivitas Komoditi Kopi	589 Kg/Ha						
											Produktivitas Komoditi Kakao	704 Kg/Ha						
											Nilai Produksi Komoditi Kelapa Sawit	1361430 Triliun						

Nilai Produksi Komoditi Kopi	1962360000 Triliun
Nilai Produksi Komoditi Tebu (Gula)	64580000 Triliun
Nilai Produksi Komoditi Kelapa (Kopra)	513670000 Triliun
Nilai Produksi Komoditi Cengkeh (Biji Kering)	2724405000 Triliun
Nilai Produksi Komoditi Jambu Mete	337500000 Triliun
Nilai Produksi Komoditi Pala	17670000 Triliun
Nilai Produksi Komoditi Lada	1258510000 Triliun
Nilai Produksi Komoditi Kakao	6030760000 Triliun
Volume Produksi Komoditi Kelapa Sawit	90762 Ton
Volume Produksi Komoditi Kopi	32706 Ton
Volume Produksi Komoditi Tebu (Gula)	3229 Ton
Produktivitas Komoditi Pala	127 Kg/Ha
Produktivitas Komoditi Lada	748 Kg/Ha
Volume Produksi Komoditi Kelapa (Kopra)	51367 Ton
Volume Produksi Komoditi Lada	6730 Ton
Volume Produksi Komoditi Kakao	150769 Ton
Volume Produksi Komoditi Pala	186 Ton
Volume Produksi Komoditi Jambu Mete	13500 Ton
Volume Produksi Komoditi Cengkeh (Biji Kering)	18789 Ton
Produktivitas Komoditi Jambu Mete	411 Kg/Ha

2.00	0 2	03.00	1 6	0 0 1	Intensifikasi Tanaman Kakao				Kabupaten Luwu	# Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan			Luas areal tanaman kakao yang diintensifikasi	500 Ha	Produksi dan produktivitas tanaman kakao	500 Ha	500,000,000.0	1,000,000,000.0	Dinas Perkebunan	
									Kabupaten Luwu Utara	# Hero Lange-Lange Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan										
										# Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan ID										
										# Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan										
										# Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan										
										# Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan										
										# Masamba Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan										
										# Palopo Wara Palopo City										
										# Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan										
										# Tana Toraja Regency South Sulawesi ID										
										# Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan										
										# Watang Kassa Batulappa Kabupaten Pinrang										
										#Desa Bontolempangan Bontolempangan Gowa Regency South Sulawesi										



								#Desa Buangin Kec.Sabbang Kab.Luwu Utara Buangin Sabbang North Luwu Regency									
								#Desa kamanre Kec.Kamanre Kab.Luwu Kamanre Luwu Regency South Sulawesi									
								#Desa Karama Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan									
								#Desa Mangempang Bungaya Gowa Regency South Sulawesi									
								#Kab. Luwu Utara North Luwu Regency South Sulawesi ID									
								#Kabupaten Luwu Timur East Luwu Regency South Sulawesi ID									
								#Kec. Bulukumpa Bulukumpa Bulukumba Regency South Sulawesi									
								#Kecamatan Rantebua North Toraja Regency South Sulawesi ID									
2.00	0 2	03.00	1 6	0 0 2	Intensifikasi Tanaman Kopi		Kabupaten Enrekang	# Bantaeng Regency South Sulawesi ID			Luas areal tanaman kopi yang diintensifikasi	500 Ha	Produksi dan produktivitas tanaman kopi	500 Ha	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perkebunan
							Kabupaten Toraja Utara	# Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan									
								# Pitu Riase Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi									
								# Tana Toraja Regency South Sulawesi ID									

								#baruppu, rindingallo, awan rantekarua, buntu pepasan, sesesan suloara, kapala pitu, denpina dan bangkelekila North Toraja Regency South Sulawesi ID											
								#Desa Bonto Tengah Sinjai Borong Sinjai Regency South Sulawesi											
								#Desa Rappolemba Tompobulu Gowa Regency South Sulawesi											
								#Kelurahan Cikoro Tompobulu Gowa Regency South Sulawesi											
								#Lembang Balla, Kecamatan Bittuang Balla Bittuang Tana Toraja Regency											
								#Lembang Tiroan Kecamatan Bittuang Tiroan Bittuang Tana Toraja Regency											
2.00	0 2	03.00	1 6	0 0 3	Intensifikasi Tanaman Kelapa			# Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan # Bontotiro Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan # Hero Lange- Lange Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan # Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan ID			Luas areal tanaman kelapa yang diintensifikasi	380 Ha	Produksi dan Produktivitas tanaman kelapa	380 Ha	20,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Perkebunan		

								# Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan									
								# Selayar Regency South Sulawesi ID									
								# Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan									
								#Kec. Bontomanai, Kec. Bontosikuyu, Kec. Pasimasunggu, Kec. Pasimasunggu Timur Selayar Islands Regency South Sulawesi ID									
								#tersebar 9 kecamatan Takalar Regency South Sulawesi ID									
2.00	0 2	03.00	1 6	0 0 4	Intensifikasi Tanaman Kelapa Sawit		Kabupaten Luwu	# Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan ID		Luas areal tanaman kelapa sawit yang di intensifikasi	100 Ha	Produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit	100 Ha	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Perkebunan	
							Kabupaten Luwu Utara	# Kulo Kulo Sidenreng Rappang Regency									
								#Desa Bungapati Kec.Tanalili Kab.Luwu Utara Bungapati Bone- Bone North Luwu Regency									
								#Desa Lumbewe Kec.Burau Kab.Luwu Utara Lumbewe Burau East Luwu Regency									
								#Desa Patila Kec.Tanalili Kab.Luwu Utara Patila Bone- Bone North Luwu Regency									
2.00	0 2	03.00	1 6	0 0 5	Intensifikasi Tanaman Cengkeh		Kabupaten Luwu Utara	# Betao Riase Pitu Riawa Sidenreng Rappang Regency		Luas areal tanaman cengkeh yang di intensifikasi	100 Ha	Produksi dan produktivitas tanaman cengkeh	100 Ha	30,000,000.0	35,000,000.0	Dinas Perkebunan	



									#Kec. Sabbang, Baebunta, Masamba, Sukamaju, dan Bone-Bone North Luwu Regency South Sulawesi ID									
									#Kecamatan Bulukumpa Bulukumba Regency South Sulawesi ID									
									#Kecamatan Buntao North Toraja Regency South Sulawesi ID									
2.00	02	03.00	16	006	Intensifikasi Tanaman Pala			Kabupaten Soppeng	# Betao Riase Pitu Riawa Sidenreng Rappang Regency			Luas areal tanaman pala yang di intensifikasi	200 Ha	Produksi dan produktivitas tanaman pala	200 Ha	44,000,000.0	48,400,000.0	Dinas Perkebunan
								Kabupaten Wajo	# Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan									
									# Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan ID									
									# Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan									
									# Luwu Regency South Sulawesi ID									
									# Palopo Wara Palopo City									
									# Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan									
									#Desa Bacu-Bacu Pujananting Barru Regency South Sulawesi									
									#Desa Mario Kec.Ponrang Kab.Luwu Mario Ponrang Luwu Regency									
									#Kec. Bontomanai Selayar Islands Regency South Sulawesi ID									

								#Kec.Sabbang Kab.Luwu Utara Sabbang North Luwu Regency South Sulawesi													
2.00	0 2	03.00	1 6	0 0 7	Intensifikasi Tanaman Lada			Kabupaten Bone	# Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan			Luas areal tanaman lada yang di intensifikasi	200 Ha	Produksi dan produktivitas tanaman lada	200 Ha	51,700,000.0	56,870,000.0	Dinas Perkebunan			
								Kabupaten Enrekang	# Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan												
								Kabupaten Luwu	# Hero Lange- Lange Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan												
								Kabupaten Sinjai	# Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan ID												
									# Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan												
									# Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan												
									# Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan												
									# Palopo Wara Palopo City												
									# Pitu Riase Sidenreng Rappang Regency South Sulawesi												
									# Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan												
									# Tana Toraja Regency South Sulawesi ID												
									#Desa Bantimurung Kecamatan Tondong Tallasa												
									#desa coppo tompong kec. Mandalle												

									#Desa Lakawali Kec.Malili Kab.Luwu Timur Lakawali Malili East Luwu Regency										
									#Desa Mangilu Kecamatan Bungoro										
									#Desa Tompo Bulu Bulupoddo Sinjai Regency South Sulawesi										
									#Desa tompo bulu kecamatan balocci										
									#desa tondongkura kec. tondong tallasa										
									#Desa Tondongkura Kecamatan Tondong Tallasa										
									#Dusun II Pallae Bila Duapitue Sidenreng Rappang Regency										
									#Kec. Mappideceng, Masamba dan Sabbang Mappedeceang North Luwu Regency South Sulawesi										
									#Kec. Towuti East Luwu Regency South Sulawesi ID										
									#kecamatan Mandalle										
									#kel. balleangin kec. balocci										
									#Kelurahan Balleangin Kecamatan Balocci										
2.00	0 2	03.00	1 6	0 0 8	Intensifikasi Tanaman Jambu Mete			Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	# Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan ID		Luas areal tanaman jambu mete yang di intensifikasi	100 Ha	Produksi dan produktivitas tanaman jambu mete	100 Ha	15,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Perkebunan		
									#Kec. Bontomatene Selayar Islands Regency South Sulawesi ID										

2.00	0 2	03.00	1 6	0 0 9	Rehabilitasi Tanaman Cengkeh			Kabupaten Bulukumba	# Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan ID			Luas lahan rehabilitasi tanaman cengkeh	100 Ha	Produksi dan produktivitas tanaman cengkeh	100 Ha	20,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Perkebunan	
									# Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan										
									# Palopo Wara Palopo City										
									#Desa Balassuka Tombolo Pao Gowa Regency South Sulawesi										
									#Desa Mammayang Tombolo Pao Gowa Regency South Sulawesi										
									#Kecamatan Rantebua, Nanggala North Toraja Regency South Sulawesi ID										
2.00	0 2	03.00	1 6	0 1 0	Rehabilitasi Tanaman Lada			Kabupaten Luwu				Luas lahan rehabilitasi tanaman lada	35 Ha	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman lada	35 Ha	20,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Perkebunan	
								Kabupaten Luwu Timur											
2.00	0 2	03.00	1 6	0 1 1	Peremajaan Tanaman Pala			Kabupaten Kepulauan Selayar	# Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan ID			Luas lahan peremajaan tanaman pala	50 Ha	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pala	50 Ha	20,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Perkebunan	
								Kabupaten Sinjai	# Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan										
2.00	0 2	03.00	1 6	0 1 2	Peremajaan Tanaman Cengkeh			Kabupaten Bone	# Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan ID			Luas lahan peremajaan tanaman cengkeh	100 Ha	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman cengkeh	100 Ha	44,000,000.0	48,400,000.0	Dinas Perkebunan	
								Kabupaten Luwu	# Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan										
									# Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan										
									# Palopo Wara Palopo City										



									# Tana Toraja Regency South Sulawesi ID										
									#Kecamatan Buntao dan Kecamatan Nanggala North Toraja Regency South Sulawesi ID										
2.00	0 2	03.00	1 6	0 1 3	Identifikasi dan Inventarisasi OPT			Kabupaten Tana Toraja			Jumlah Organisme Penggangu Tanaman (OPT) yang di identifikasi dan di inventarisasi	12 OPT	Jenis organisme pengganggu tanaman (OPT) yang teridentifikasi dan terinventarisasi	12 OPT	15,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Perkebunan		
								Kabupaten Toraja Utara											
2.00	0 2	03.00	1 6	0 1 4	Pengendalian OPT Tanaman Lada			Kabupaten Bantaeng	# Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan ID		Luas lahan yang terkendali	5 Ha	Jumlah produksi tanaman lada	5 Ha	15,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Perkebunan		
								Kabupaten Bone	# Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan										
								Kabupaten Bulukumba	# Palopo Wara Palopo City										
									#Desa Era Baru Tellu Limpoe Sinjai Regency South Sulawesi										
									#Kec. Towuti East Luwu Regency South Sulawesi ID										
2.00	0 2	03.00	1 6	0 1 5	Pengendalian OPT Tanaman Kopi			Kabupaten Tana Toraja	# Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan		Luas lahan yang terkendali OPT tanaman kopi	6 Ha	Jumlah produksi tanaman kopi	6 Ha	34,650,000.0	38,115,000.0	Dinas Perkebunan		
								Kabupaten Toraja Utara	#Buntu pepasan North Toraja Regency South Sulawesi ID										
									#Desa Batu Belering Sinjai Borong Sinjai Regency South Sulawesi										
									#Desa Rappolemba Tompobulu Gowa Regency South Sulawesi										

2.00	0 2	03.00	1 6	0 1 6	Pengendalian OPT Tanaman Kakao			Kabupaten Bantaeng	# Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan ID			Luas lahan tanaman kakao yang terkendali OPT	6 Ha	Jumlah produksi tanaman kakao	6 Ha	38,500,000.0	142,350,000.0	Dinas Perkebunan	
									# Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan ID										
									# Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan										
									# Palopo Wara Palopo City										
									#Desa Batumalonro Biringbulu Gowa Regency South Sulawesi										
									#Kab. Luwu Utara North Luwu Regency South Sulawesi ID										
									#Kabupaten Luwu TimurKec. Burau, Kec. Wotu, Kec. Malili East Luwu Regency South Sulawesi ID										
									#Kec. Pasimasunggu, Kec. Pasimasunggu Timur Selayar Islands Regency South Sulawesi ID										
									#Kecamatan Rantebua North Toraja Regency South Sulawesi ID										
2.00	0 2	03.00	1 6	0 1 7	Pengendalian OPT Tanaman Cengkeh							Luas lahan yang terkendali OPT tanaman cengkeh	6 Ha	Jumlah produksi tanaman cengkeh	6 Ha	35,637,998.0	39,204,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	1 6	0 2 0	Sertifikasi Benih Perkebunan							Jumlah sertifikat benih perkebunan	500 Sertifikat	Jumlah benih yang di sertifikasi	500 Sertifikat	15,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Perkebunan	
								Kabupaten Bantaeng											
								Kabupaten Barru											
								Kabupaten Bone											

								Kabupaten Bulukumba									
								Kabupaten Enrekang									
								Kabupaten Gowa									
								Kabupaten Jeneponto									
								Kabupaten Kepulauan Selayar									
								Kabupaten Luwu									
								Kabupaten Luwu Utara									
								Kabupaten Maros									
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan									
2.00	02	03.00	16	021	Demplot Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim			Kabupaten Wajo			Jumlah demplot konservasi air dan antisipasi anomali iklim	4 Unit	Tersedianya air pengairan untuk mendukung tanaman perkebunan	4 Unit	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Perkebunan
2.00	02	03.00	16	022	Demfarm Integrasi Ternak Sapi dengan Tanaman Jambu Mete			Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan			Jumlah kabupaten yang mendapatkan demplot	2 Kabupaten	Cakupan kabupaten yang mendapat demplot	2 Kabupaten	15,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Perkebunan
2.00	02	03.00	16	023	Pengendalian Hama Terpadu PBK pada Tanaman Kakao			Kabupaten Luwu			Jumlah luas lahan terkendali OPT tanaman kakao	6 Ha	Lahan yang terkendali OPT tanaman kakao	6 Ha	385,000,000.0	123,500,000.0	Dinas Perkebunan
								Kabupaten Luwu Timur									
								Kabupaten Luwu Utara									
2.00	02	03.00	16	024	Pengadaan Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan			Kabupaten Enrekang	# Bantaeng Regency South Sulawesi ID		Jumlah bibit yang disalurkan	16667 Pohon	Jumlah produksi komoditi unggulan	16667 Pohon	500,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Perkebunan
								Kabupaten Luwu Timur	# Belawa Pitu Riase Sidenreng Rappang Regency								
								Kabupaten Luwu Utara	# Compong Compong Pitu Riase								
								Kabupaten Sinjai	# Jeneponto Regency South Sulawesi ID								
								Kabupaten Wajo	# Keera Wajo Regency South Sulawesi								
									# Pitumpanua Wajo Regency South Sulawesi								
									# Selayar Regency South Sulawesi ID								

									# Terasa West Sinjai Sinjai Regency								
									#desa botta, kecamatan sulii, kab luwu Botta Sulii Luwu Regency								
									#kelurahan bonto bulaeng kecamatan sinoa kabupaten bantaeng Bonto Bulaeng Sinoa Kabupaten Bantaeng								
									#kelurahan lembang gantarangkeke kecamatan tompobulu kabupaten bantaeng Lembang Gantarangkeke Tompobulu Kabupaten Bantaeng								
									#Kelurahan Tassililu, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai Tassililu West Sinjai Sinjai Regency								
2.00	0 2	03.00	1 6	0 2 5	Pengadaan Pupuk NPK			Kabupaten Sinjai	# Wajo Regency South Sulawesi ID		Jumlah pupuk NPK yang disalurkan	60000 Kg	Jumlah produksi komoditi unggulan perkebunan	60000 Kg	587,291,676.0	250,000,000.0	Dinas Perkebunan
									#Desa Bungadidi Kec.Tanalili Kab.Luwu Utara Bungadidi Bone- Bone North Luwu Regency								
									#desa parak Selayar Regency South Sulawesi ID								
									#Dusun Patiai Desa Sumberdadi Kec.Tanalili Kab.Luwu Utara Sumberdadi Bone-Bone North Luwu Regency								

								#eremerasa Bantaeng Regency South Sulawesi ID										
								#Kec. Awan Rante Karua, Lembang Batu Lotong, Kelompok Tani Bina Usaha Tani Batu Lotong Awan Rante Karua North Toraja Regency										
								#Kec. Angkona Kab. Luwu Timur Angkona East Luwu Regency South Sulawesi										
								#Ioka Bantaeng Regency South Sulawesi ID										
2.00	0 2	03.00	1 6	0 2 6	Pengadaan Pupuk Organik		Kabupaten Bone	# Maddukelleng Tempe Wajo Regency	Jumlah pupuk organik yang disalurkan	10000 Kg	Jumlah produksi komoditi unggulan perkebunan	10000 Kg	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Perkebunan			
							Kabupaten Bulukumba	# Salo Karaja Lalabata Soppeng Regency	Jumlah pupuk organik cair yang disalurkan	0 Ltr	Jumlah produksi komoditi unggulan perkebunan	0 Ltr						
							Kabupaten Luwu	#Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba										
							Kabupaten Luwu Utara	#Desa Borong Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba										
							Kabupaten Sinjai	#Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba										
							Kabupaten Soppeng	#Desa Kahayyung Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba										
							Kabupaten Tana Toraja	#Desa Karassing Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba										

							Kabupaten Toraja Utara	#desa mangindara Mangindara South Galesong Takalar Regency													
								#Desa Oro Gading Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba													
								#Desa Pangalli Kec.Walenrang Timur Kab.Luwu Pangalli East Walenrang Luwu Regency													
								#DESA TABBINGJAI KEC TOMBOLOPAO KAB GOWA Tabbinjai Tombolo Pao Gowa Regency													
								#Desa Tamaona Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba													
								#dusun balangbukit desa tonasa kec tombolopao kab gowa Tonasa Tombolo Pao Gowa Regency													
								#Kec. Awan Rante Karua, Lembang Batu lotong, Kelompok Tani Cempaka jaya Batu Lotong Awan Rante Karua North Toraja Regency													
								#kelurahan bonto bulaeng kecamatan sinoa kabupaten bantaeng Bonto Bulaeng Sinoa Kabupaten Bantaeng													

									#Kelurahan Jawi Jawi Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba										
									#Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba										
2.00	0 2	03.00	1 6	0 2 7	Pengadaan Pupuk dan Pesticida (UPT- PSBP2)			Kabupaten Barru			Jumlah hektar kebun dinas yang mendapatkan pupuk dan pestisida	361 Ha	Jumlah produ ksi komoditi perkebunan	361 Ha	300,000,000.0	291,059,513.75	Dinas Perkebunan		
								Kabupaten Bone											
								Kabupaten Bulukumba											
								Kabupaten Luwu											
								Kabupaten Luwu Utara											
								Kabupaten Maros											
								Kabupaten Soppeng											
2.00	0 2	03.00	1 6	0 2 8	Pemeliharaan Tanaman Sumber Benih dan Produksi			Kabupaten Enrekang			Jumlah hektar tanaman sumber benih dan produksi yang terpelihara	361 Ha	Jumlah produksi tanaman perkebunan	361 Ha	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan		
								Kabupaten Luwu											
								Kabupaten Luwu Utara											
								Kabupaten Toraja Utara											
2.00	0 2	03.00	1 6	0 2 9	Pembangunan Kebun Produksi Tanaman Perkebunan			Kabupaten Luwu			Luas areal pembangu n kebun tanaman perkebunan	20 Ha	Jumlah produksi komoditi perkebunan	20 Ha	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perkebunan		
								Kabupaten Maros											
								Kabupaten Soppeng											
2.00	0 2	03.00	1 6	0 3	Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau						Jumlah Luas Lahan	40 Ha	Luas lahan tembakau	40 Ha	399,927,999.0	100,000,000.0	Dinas Perkebunan		
								Kabupaten Bantaeng			Jumlah Peserta Pelatihan	0 Org	Meningkatny a Pengetahuan Petani	0 Org					
								Kabupaten Barru											
								Kabupaten Bone											
								Kabupaten Bulukumba											
								Kabupaten Enrekang											

								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Maros										
								Kabupaten Sinjai										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Wajo										
2.00	02	03.00	18		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PERKEBUNAN					% Peningkatan jumlah hasil panen tanaman perkebunan	100 %					11,922,352,003.0	12,366,455,358.0	Dinas Perkebunan
										Cakupan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam produksi tanaman perkebunan	5 Jenis							
2.00	02	03.00	18	001	Pengembangan Kemitraan Managemen Petani dengan Lembaga Ekonomi Masyarakat			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah peserta pengembang an kemitraan managemen petani dengan Lembaga Ekonomi Masyarakat	110 Orang	Peningkatan pemahaman peserta pengembang an kemitraan managemen petani dengan Lembaga Ekonomi Masyarakat	110 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan
2.00	02	03.00	18	002	Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan			Kabupaten Bantaeng				Jumlah kabupaten yang diawasi peredaraan benih perkebunann ya	22 Kab/Kota	Jumlah laporan benih perkebunan	22 Kab/Kota	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Perkebunan
								Kabupaten Barru										
								Kabupaten Bone										
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Enrekang										
								Kabupaten Gowa										
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Kepulauan Selayar										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Maros										



							Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
							Kabupaten Pinrang										
							Kabupaten Sidenreng Rappang										
							Kabupaten Sinjai										
							Kabupaten Soppeng										
							Kabupaten Takalar										
							Kabupaten Wajo										
2.00	02	03.00	18	003	Demfarm Penggunaan Kapur dan Pupuk Tanaman Kakao						Kabupaten yang di Demfarm penggunaan kapur dan pupuk tanaman kakao	2 Kab	Jumlah kabupaten yang menerapkan penggunaan kapur dan pupuk pada tanaman kakao	2 Kab	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Perkebunan
2.00	02	03.00	18	004	Peningkatan SDM Petugas dan Petani Perkebunan dalam Mengelola Bibit dan Pemeliharaan Tanaman		Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah peserta Peningkatan SDM Petugas dan Petani Perkebunan dalam Mengelola Bibit dan Pemeliharaan Tanaman	30 Orang	Peningkatan kualitas SDM Petugas dan Petani	30 Orang	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Perkebunan
2.00	02	03.00	18	005	Sosialisasi Gangguan Usaha Perkebunan dan Kebakaran Lahan		Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah peserta Sosialisasi Gangguan Usaha Perkebunan dan Kebakaran Lahan	250 Orang	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan petugas & Kelompok Tani	250 Laporan	10,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perkebunan
2.00	02	03.00	18	006	Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan dan Kebakaran Lahan		Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah peserta penanganan gangguan usaha perkebunan dan kebakaran lahan	100 Orang/Kab	Meningkatnya pengetahuan peserta penanganan gangguan usaha	100 Orang/Kab	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Perkebunan
2.00	02	03.00	18	007	Sosialisasi Kebijakan Teknis Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (GUKP)		Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah peserta gangguan usaha dan konflik perkebunan	50 Orang	Peserta gangguan usaha dan konflik perkebunan	50 Orang	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Perkebunan

2.00	0 2	03.00	1 8	0 0 8	Analisis Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta analisis penerapan model perkebunan rendah emisi karbon	3 Kelompok	Peningkatan pemahaman peserta analisis penerapan model perkebunan rendah emisi karbon	3 Kelompok	60,000,000.0	70,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	1 8	0 0 9	Pengadaan Mesin Pompa Air (Bidang Penyuluhan, Kelembagaan dan Sarana Prasarana			Kabupaten Jeneponto	# Biring Ere Bungoro Pangkajene Dan Kepulauan Regency		Jumlah pompa air yang tersedia	28 Unit	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	28 Unit	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
									# Bonto Manai Labakkang Pangkajene Dan Kepulauan Regency									
									# Gowa Regency South Sulawesi ID									
									# Kalabirang Minasatene Pangkajene Dan Kepulauan Regency									
									# Kalupang Maiwa Enrekang Regency									
									# Kassi Balocci Pangkajene Dan Kepulauan Regency									
									# Mangilu Bungoro Pangkajene Dan Kepulauan Regency									
									# Samalewa Bungoro Pangkajene Dan Kepulauan Regency									
									# Tabo-Tabo Bungoro Pangkajene Dan Kepulauan Regency									
									# Tapong Maiwa Enrekang Regency									
									# Taraweang Labakkang Pangkajene Dan Kepulauan Regency									

									# Tuncung Maiwa Enrekang Regency													
									#Camba daerah Tompo bulu, Maros Bontoa Mandai Maros Regency													
									#Daerah Cenrana 228 Jl. DR. Ratulangi Parang													
									#Daerah Mallawa, Maros Moncongloe Maros Regency South Sulawesi													
									#Desa Bonto Bunga, Maros Maros Regency South Sulawesi ID													
									#Desa Burung Loe kelompok tani paklingan Bantaeng Regency South Sulawesi ID													
									#desa empoang kec binamu kab jeneponto Empoang Binamu Jeneponto Regency													
									#Desa Moncongloe Bulu Moncongloe Bulu Moncongloe Maros Regency													
									#Desa Moncongloe Lappara, Maros Moncongloe Lappara Moncongloe Maros Regency													
									#DESA PALLANTIKANG Rumbia Jeneponto Regency South Sulawesi													

									#Desa Pattalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai										
									#Desa Siloro Bontoa Minasatene Pangkajene Dan Kepulauan Regency										
									#Kelompok Tani Bontomanai (lalo) Balumbungang Bontoramba Kabupaten Jeneponto										
									#Kelompok Tani Kalabirang 1 (Mantan) Balumbungang Bontoramba Kabupaten Jeneponto										
									#Kelompok Tani Kalabirang 2 (M. Darwis) Balumbungang Bontoramba Kabupaten Jeneponto										
2.00	02	03.00	18	010	Pengadaan Mesin Traktor			Kabupaten Bantaeng	#desa bontoparang kec marbo kab takalar Bontoparang Mangara Bombang Takalar Regency		Jumlah traktor	2 Unit	Jumlah produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	2 Unit	280,000,000.0	286,607,857.0	Dinas Perkebunan		
								Kabupaten Jeneponto	#desa bungung loe kec turatea kan jeepony/to Bungung Loe Turatea Jeneponto Regency										
									#desa empoang utara kec binamu kab jenekpnto North Empoang Binamu Jeneponto Regency										

								#desa leworenag kec dOnri donri kab soppeng Leworeng Donri Donri Soppeng Regency												
								#desa p[akkana kec tana sitolo kab wajo Pakkana Tana Sitolo Wajo Regency												
								#desa pakkatto lombo kecamatan bontomarannu kabupaten gowa Jl. Malino Pakatto Bontomarannu												
								#desa panyangkalang kec marbo kab takalar Panyangkalang Mangara Bombang Takalar Regency												
								#desa salo karaja kec lalabata kab soppeng Salo Karaja Lalabata Soppeng Regency												
								#Dusun Baeka Desa Belapunranga Kec Parangloe Kab Gowa Belapunranga Parangloe Gowa Regency												
								#dusun mattirobulu desa pattopakang kec marbo kab takalar Pattopakang Mangara Bombang Takalar Regency												

								#dusun pangkajene desa panyangkalang kec marbo kab takalar Panyangkalang Mangara Bombang Takalar Regency												
								#Kabupaten Sinjai												
								#kelurahan bocco kab wajo Bocco Takkalalla Wajo Regency												
								#kelurahan karatuang kecamatan bantaeng kabupaten bantaeng Karatuang Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng												
2.00	0 2	03.00	1 8	0 1 1	Monitoring dan evaluasi gangguan usaha dan kebakaran lahan			Kabupaten Bantaeng				Jumlah kabupaten yang dimonitoring dan evaluasi	10 kabupaten	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	10 kabupaten	50,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perkebunan		
								Kabupaten Barru												
								Kabupaten Bone												
								Kabupaten Bulukumba												
								Kabupaten Enrekang												
								Kabupaten Gowa												
								Kabupaten Jeneponto												
								Kabupaten Kepulauan Selayar												
								Kabupaten Luwu												
								Kabupaten Luwu Timur												
								Kabupaten Luwu Utara												
								Kabupaten Maros												
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan												
								Kabupaten Pinrang												
								Kabupaten Sidenreng Rappang												
								Kabupaten Sinjai												

								Kabupaten Soppeng											
								Kabupaten Takalar											
								Kabupaten Tana Toraja											
								Kota Palopo											
2.00	0 2	03.00	1 8	0 1 2	Monitoring dan Evaluasi Agrowisata			Kabupaten Bantaeng			Jumlah kabupaten yang di Monitoring dan Evaluasi	20 Laporan	Laporan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	20 Laporan	55,000,000.0	60,000,000.0	Dinas Perkebunan		
								Kabupaten Barru											
								Kabupaten Bulukumba											
								Kabupaten Enrekang											
								Kabupaten Gowa											
								Kabupaten Jeneponto											
								Kabupaten Kepulauan Selayar											
								Kabupaten Luwu											
								Kabupaten Luwu Timur											
								Kabupaten Luwu Utara											
								Kabupaten Maros											
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan											
								Kabupaten Pinrang											
								Kabupaten Sidenreng Rappang											
								Kabupaten Sinjai											
								Kabupaten Takalar											
								Kabupaten Tana Toraja											
								Kota Palopo											
2.00	0 2	03.00	1 8	0 1 4	Orientasi Agronomis Lada			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta orientasi agronomis lada	50 Orang	Jumlah laporan hasil orientasi agronomis lada	50 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan		
2.00	0 2	03.00	1 8	0 1 5	Pengadaan Pompa Air (UPT-PSBP2)						Jumlah Pompa Air yang diadakan (Alsintan)	24 Unit	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	24 Unit	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan		
2.00	0 2	03.00	1 8	0 1 6	Pengadaan Jembatan Jalan Produksi Kebun Sumber Benih & Produksi						Jumlah jembatan jalan produksi yang tersedia	1 Unit	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	1 Unit	126,500,000.0	139,150,000.0	Dinas Perkebunan		





2.00	02	03.00	18	021	Peningkatan SDM Petugas Brigade Proteksi			Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah petugas brigade proteksi	20 orang	Peningkatan pengetahuan petugas brigade proteksi	20 orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	022	Sosialisasi Pemasaran Benih			Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah peserta sosialisasi pemasaran benih	50 orang	Meningkatkan pengetahuan peserta sosialisasi	50 orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	023	Penguatan Data Base Kelembagaan Petani Perkebunan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pengawasan data base kelembagaan petani perkebunan	50 Orang	Jumlah data base yang tersedia	50 Orang	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	024	Bimtek Agroteknologi Tanaman Jambu Mete Yang Berkelanjutan			Kabupaten Kepulauan Selayar			Jumlah peserta bimtek agroteknologi budidaya tanaman jambu mete	75 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta agroteknologi budidaya tanaman jambu mete	75 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	025	Bimtek Intensifikasi Tanaman jambu mete			Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan			Jumlah peserta bimbingan teknis intensifikasi tanaman jambu mete	75 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas / Kelompok Tani	75 Laporan	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	027	Bimtek Intensifikasi Tanaman tebu			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta bimbingan teknis intensifikasi tanaman tebu	200 Orang	Meningkatnya pengetahuan peserta bimbingan teknis intensifikasi tanaman tebu	200 Orang	50,000,000.0	60,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	028	Bimtek Intensifikasi Tanaman Kakao			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta bimbingan teknis tanaman kakao	220 Orang	Meningkatnya pengetahuan peserta bimbingan teknis tanaman kakao	220 Orang	230,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	030	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah (UPT- PSBP2)			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah perjalanan dinas	15 kali/orang	Jumlah laporan hasil perjalanan dinas	15 kali/orang	60,000,000.0	70,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	031	Penguatan Data Base Kelembagaan Petani Perkebunan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah data base kelembagaan petani perkebunan	10 Data	Ketersediaan data base kelembagaan petani perkebunan	10 Data	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	032	Pelatihan Manajemen Kemitraan Usaha			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pelatihan manajemen kemitraan usaha	100 Orang	Jumlah peserta pelatihan manajemen kemitraan usaha	100 Orang	35,000,000.0	35,000,000.0	Dinas Perkebunan	

2.00	02	03.00	18	033	Orientasi Agronomis Cengkeh				Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta orientasi cengkeh	50 Orang	Jumlah peserta orientasi cengkeh	50 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	034	Rapat Koordinasi Tim/Kelompok Peduli Api				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta rapat koordinasi tim/kelompok peduli api	50 Orang	Meningkatnya pengetahuan peserta rapat koordinasi tim/kelompok api	50 Orang	25,000,000.0	30,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	035	Bimtek Intensifikasi Tanaman Kopi				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta bimbingan teknis intensifikasi tanaman kopi	220 Orang	Meningkatnya pengetahuan peserta bimbingan teknis intensifikasi tanaman kopi	220 Orang	30,000,000.0	64,500,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	036	Bimtek Budidaya Tanaman Kemiri Yang Berkelanjutan				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta bimbingan teknis budidaya tanaman kemiri yang berkelanjutan	100 Orang	Meningkatnya pengetahuan peserta bimbingan teknis budidaya tanaman kemiri	100 Orang	60,000,000.0	70,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	037	Peningkatan Kapasitas SDM Kebun Sumber Benih				Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah peserta SDM kebun sumber benih	30 orang	Peningkatan pengetahuan peserta SDM kebun sumber benih	30 orang	50,000,000.0	60,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	038	Pengadaan Pompa Air dan Instalasinya				Kabupaten Bantaeng			Jumlah pompa air dan instalasinya pada kebun dinas	5 Unit	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	5 Unit	57,500,000.0	66,125,000.0	Dinas Perkebunan	
									Kabupaten Jeneponto										
									Kabupaten Takalar										
2.00	02	03.00	18	039	Bimtek Budidaya Tanaman Kelapa Yang Berkelanjutan				Kabupaten Bantaeng			Jumlah peserta budidaya tanaman aren yang berkelanjutan	45 Orang	Peserta budidaya tanaman aren yang berkelanjutan	45 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
									Kabupaten Jeneponto										
									Kabupaten Kepulauan Selayar										
2.00	02	03.00	18	040	Bimtek Intensifikasi Tanaman kelapa sawit				Kabupaten Luwu			Jumlah peserta bimbingan teknis intensifikasi tanaman kelapa sawit	200 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta bimbingan teknis intensifikasi tanaman kelapa sawit	200 Orang	30,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
									Kabupaten Luwu Utara										

2.00	02	03.00	18	041	Bimtek Intensifikasi Tanaman Lada			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta bimbingan teknis tanaman lada	200 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta bimbingan teknis tanaman lada	200 Orang	50,000,000.0	60,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	043	Bimtek Budidaya Tembakau			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta bimbingan teknis budidaya tembakau	400 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta teknis budidaya tembakau	400 Orang	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	044	Pertemuan Petugas Pengelola Kebun			Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah peserta pertemuan petugas pengelola kebun	25 orang	jumlah peserta pertemuan petugas pengelola kebun	25 orang	54,999,999.0	60,500,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	047	Peningkatan Kapasitas Petugas UPPT Tanaman Perkebunan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta peningkatan kapasitas petugas UPPT tanaman perkebunan	50 Orang	Jumlah peserta peningkatan kapasitas petugas UPPT tanaman perkebunan	50 Orang	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	048	Bimtek Intensifikasi Tanaman Pala			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta bimbingan teknis tanaman pala	200 Orang	Meningkatkan pengetahuan peserta bimbingan teknis tanaman pala	200 Orang	250,000,000.0	1,100,500,001.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	049	Bimtek Agronomis Cengkeh Bagi Petani			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta bimbingan teknis agronomis cengkeh bagi petani	400 Orang	Jumlah peserta bimbingan teknis agronomis cengkeh bagi petani	400 Orang	330,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	050	Pembinaan dan Monev Pengembangan Sumber Benih dan Produksi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kabupaten yang dimonitoring dan evaluasi	20 laporan	jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	20 laporan	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	051	Bimtek Agronomis Lada Bagi Petani			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta bimbingan teknis agronomis lada bagi petani	400 orang	Meningkatnya pengetahuan petani tentang agronomis lada	400 Orang	330,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	052	Pembinaan Pencegahan Kebakaran Lahan			Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah kabupaten yang mendapat pembinaan	2 kabupaten	Jumlah laporan kabupaten kabupaten yang dibina	2 kabupaten	115,000,000.0	132,250,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	053	Pengadaan Alat dan Mesin Tebu			Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah alat dan mesin tebu (pompa air)	10 unit	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tebu	10 unit	150,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	

2.00	0 2	03.00	1 8	0 5 4	Pengadaan Pupuk dan Pestisida (UPT-PSBP2)			Kabupaten Bone			Jumlah hektar kebun dinas yang mendapatkan pupuk dan pestisida	361 Ha	Kebun dinas yang mendapatkan pupuk dan pestisida	361 Ha	575,000,000.0	661,250,000.0	Dinas Perkebunan	
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Wajo										
2.00	0 2	03.00	1 8	0 5 5	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tanaman PenyeGAR			Kabupaten Bantaeng			Jumlah kabupaten yang dimonitoring dan evaluasi	1 laporan	Jumlah laporan perjalanan monitoring dan evaluasi	1 laporan	57,500,000.0	66,125,000.0	Dinas Perkebunan	
								Kabupaten Bone										
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Gowa										
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Kepulauan Selayar										
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Takalar										
								Kabupaten Wajo										
2.00	0 2	03.00	1 8	0 5 6	Bimtek Agronomis Pala			Kabupaten Bone			Jumlah peserta bimbingan teknis agronomis pala	400 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta bimbingan teknis agronomis pala	400 Orang	330,000,000.0	363,000,000.0	Dinas Perkebunan	
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Wajo										
2.00	0 2	03.00	1 8	0 5 7	Bimtek Konservasi Lahan			Kabupaten Bone			Jumlah peserta bimbingan teknis konservasi lahan	600 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta bimbingan teknis konservasi lahan	600 Orang	600,000,000.0	700,000,000.0	Dinas Perkebunan	



2.00	02	03.00	18	063	Pengadaan Kontruksi Pagar Kebun Sumber Benih dan Produksi			Kabupaten Luwu			Panjang kontruksi pagar	1000 meter	Pembatas kebun dinas dengan lahan petani	1000 Meter	500,000,000.0	500,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	064	Sosialisasi Perbenihan Tanaman Perkebunan			Kabupaten Bantaeng			Jumlah kabupaten sosialisasi perbenihan tanaman perkebunan	13 Kabupaten	Peningkatan pengetahuan SDM tentang perbenihan tanaman perkebunan	13 Kabupaten	220,000,000.0	240,000,000.0	Dinas Perkebunan	
								Kabupaten Barru										
								Kabupaten Bone										
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Gowa										
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Maros										
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Sinjai										
								Kabupaten Takalar										
2.00	02	03.00	18	065	Bimtek Integrasi Tanaman Rempah dengan Ternak			Kabupaten Bantaeng			Jumlah peserta bimbingan teknis integrasi tanaman rempah dengan ternak	200 Orang	Jumlah peserta bimbingan teknis integrasi tanaman rempah dengan ternak	200 Orang	172,500,000.0	198,375,000.0	Dinas Perkebunan	
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Sinjai										
2.00	02	03.00	18	066	Sosialisasi Penataan dan Pelestarian Lahan			Kabupaten Bone			Jumlah peserta sosialisasi penataan dan pelestarian lahan	300 Orang	Peningkatan pengetahuan SDM penataan dan pelestarian lahan	300 Orang	150,000,000.0	175,000,000.0	Dinas Perkebunan	
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Wajo										
2.00	02	03.00	18	067	Pembinaan Pencegahan Kebakaran Lahan			Kabupaten Bulukumba			Jumlah peserta pembinaan pencegahan kebakaran lahan	200 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta pembinaan pencegahan kebakaran lahan	200 Orang	200,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Perkebunan	

									Provinsi Sulawesi Selatan										
2.00	0 2	03.00	1 8	0 7 0	Pelatihan Manajemen Kemitraan Usaha				Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah peserta pelatihan manajemen kemitraan usaha	100 orang	Peningkatan pengetahuan SDM pelatihan manajemen kemitraan usaha	100 orang	20,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Perkebunan		
2.00	0 2	03.00	1 8	0 7 1	Adopsi Agroteknologi Budidaya Tanaman Sagu yang Berkelanjutan				Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah peserta adopsi agroteknologi budidaya tanaman sagu yang berkelanjutan	30 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta adopsi agroteknologi budidaya tanaman sagu yang berkelanjutan	30 Orang	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Perkebunan		
2.00	0 2	03.00	1 8	0 7 2	Orientasi Pencegahan Kebakaran Lahan Luar Provinsi				Luar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah peserta pembinaan kebakaran lahan	30 Orang	pembinaan kebakaran lahan	30 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan		
2.00	0 2	03.00	1 8	0 7 3	Bimtek Intensifikasi Tanaman Cengkeh				Kabupaten Bone		Jumlah peserta intensifikasi tanaman cengkeh	200 Orang	Peningkatan pengetahuan SDM intensifikasi tanaman cengkeh	200 Orang	25,000,000.0	26,000,000.0	Dinas Perkebunan		
									Kabupaten Luwu										
2.00	0 2	03.00	1 8	0 7 4	Bimtek Peningkatan Produksi Tanaman Kakao Berbasis Bioteknologi				Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah peserta bimtek peningkatan produksi tanaman kakao berbasis bioteknologi	220 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta bimtek peningkatan produksi tanaman kakao berbasis bioteknologi	220 Orang	23,000,000.0	26,450,000.0	Dinas Perkebunan		
2.00	0 2	03.00	1 8	0 7 5	Workshop Pengembangan Usaha Agrowisata Perkebunan				Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah peserta workshop pengembangan usaha agrowisata perkebunan	50 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta workshop pengembangan usaha agrowisata perkebunan	50 Orang	25,500,000.0	26,000,000.0	Dinas Perkebunan		
2.00	0 2	03.00	1 8	0 7 6	Bimtek Intensifikasi Tanaman kelapa				Kabupaten Bone		Jumlah peserta bimbingan teknis intensifikasi tanaman kelapa	200 Orang	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas / kelompok tani	1 Laporan	25,000,000.0	26,000,000.0	Dinas Perkebunan		
									Kabupaten Kepulauan Selayar										
									Kabupaten Luwu										

2.00	02	03.00	18	077	Pelatihan SDM di Bidang Agrowisata Bagi Aparat Kab/Kota			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pelatihan SDM di bidang agrowisata	100 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta pelatihan SDM di bidang agrowisata	100 Orang	23,500,000.0	24,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	078	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan petani	200 Orang	Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan petani	200 Orang	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	079	Orientasi Peningkatan Kapasitas Penangkar			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta peningkatan kapasitas penangkar	50 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta peningkatan kapasitas penangkar	50 Orang	38,500,000.0	42,350,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	080	Orientasi Petugas dan Petani Ke Sumber Bahan Tanaman Perkebunan			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta orientasi petugas dan petani ke sumber bahan tanaman perkebunan	20 Orang	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan petugas dan petani tentang budidaya tanaman perkebunan	20 Laporan	22,000,000.0	25,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	081	Sosialisasi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim			Kabupaten Luwu			Jumlah peserta sosialisasi adaptasi dampak perubahan iklim	250 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta sosialisasi adaptasi dampak perubahan iklim	250 Orang	12,500,000.0	15,000,000.0	Dinas Perkebunan	
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
2.00	02	03.00	18	082	Orientasi Konservasi pada Lahan Kering			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta orientasi konservasi pada lahan kering	40 orang	Tersedianya laporan orientasi konservasi pada lahan kering	40 Orang	25,000,000.0	25,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	083	Orientasi Konservasi di Kawasan Lahan Miring			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta orientasi konservasi di kawasan lahan miring	40 Orang	Tersedianya laporan orientasi konservasi di kawasan lahan miring	40 Orang	25,000,000.0	25,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	084	Orientasi Pengembangan Agrowisata Bagi Aparat Kab/Kota			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta orientasi pengembangan agrowisata	50 Orang	Peningkatan pemahaman peserta tentang pengembangan agrowisata	50 Orang	10,000,000.0	15,000,000.0	Dinas Perkebunan	



2.00	02	03.00	18	085	Peningkatan Kapasitas Petugas UPPT Tanaman Perkebunan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah petugas UPPT tanaman perkebunan yang dilatih	50 Orang	Peningkatan pengetahuan petugas UPPT tanaman perkebunan yang dilatih	50 Orang	25,000,000.0	27,500,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	086	Pembinaan Kelembagaan Penangkar Benih Perkebunan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pembinaan kelembagaan penangkar benih perkebunan	100 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta pembinaan kelembagaan penangkar benih perkebunan	100 Orang	28,750,000.0	33,062,500.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	087	Pembinaan Pencegahan Kebakaran Lahan						Jumlah peserta pembinaan pencegahan kebakaran lahan	250 Orang	Peningkatan pemahaman peserta terhadap pencegahan kebakaran lahan	250 Orang	20,004,008.0	25,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	088	Pembinaan Penangkar/Produsen Benih			Kabupaten Bantaeng			Jumlah Kabupaten yang dibina	22 Kab/Kota	Laporan penangkar benih/produsen benih	22 Kab/Kota	220,000,000.0	242,000,000.0	Dinas Perkebunan	
								Kabupaten Barru										
								Kabupaten Bone										
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Enrekang										
								Kabupaten Gowa										
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Kepulauan Selayar										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Maros										
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Sinjai										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Takalar										
								Kabupaten Tana Toraja										



								Kabupaten Sinjai										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Takalar										
								Kabupaten Tana Toraja										
								Kabupaten Toraja Utara										
								Kabupaten Wajo										
								Kota Palopo										
2.00	02	03.00	18	091	Pembinaan, Pemantapan dan Monev Bantuan Hibah Mesin Pompa Air			Kabupaten Bantaeng			Jumlah kabupaten yang dimonev	12 Kabupaten	Jumlah kabupaten yang dimonev	12 Kabupaten	90,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Perkebunan	
								Kabupaten Bone										
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Enrekang										
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Sinjai										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Takalar										
								Kabupaten Wajo										
2.00	02	03.00	18	092	Pembinaan, Pemantapan dan Monev Bantuan Hibah Pupuk			Kabupaten Bantaeng			Jumlah kabupaten yang dimonev	12 Kabupaten	Jumlah kabupaten yang dimonev	12 Kabupaten	150,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Perkebunan	
								Kabupaten Bone										
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Enrekang										
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Sinjai										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Wajo										

2.00	02	03.00	18	093	Koordinasi Ke Sumber Pengendalian OPT			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta koordinasi ke sumber pengendalian OPT	10 Orang	Jumlah peserta koordinasi ke sumber pengendalian OPT	10 orang	61,600,000.0	67,760,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	094	Penguatan Kelembagaan UPT BSMBP			Provinsi Sulawesi Selatan			Penataan Usaha UPT BSMBP	1 Kegiatan	Penataan Usaha UPT BSMBP	1 Kegiatan	165,000,000.0	181,500,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	095	Inventarisasi Data Bantuan Hibah Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan			Kabupaten Bantaeng			Jumlah kabupaten yang diinventarisasi bantuan hibah bibit komoditi unggulan perkebunan	13 Kabupaten	Terinventarisasinya bantuan hibah bibit komoditi unggulan perkebunan	13 Laporan	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perkebunan	
								Kabupaten Barru										
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Enrekang										
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Sinjai										
								Kabupaten Wajo										
								Kota Palopo										
2.00	02	03.00	18	096	Koordinasi ke Sumber Bahan Tanaman Pembangunan Kebun Induk			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah petugas ke sumber bahan tanaman pembangunan kebun induk	20 Orang	Peningkatan pengetahuan petugas ke sumber bahan tanaman pembangunan kebun induk	20 Orang	80,000,000.0	85,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	097	Inventarisasi Data Bantuan Hibah Pupuk			Kabupaten Bantaeng			Jumlah kabupaten yang diinventarisasi data bantuan hibah pupuk	10 Kabupaten	Ketersediaan data bantuan hibah pupuk	10 Kabupaten	99,997,996.0	120,000,000.0	Dinas Perkebunan	
								Kabupaten Bone										
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Enrekang										



2.00	02	03.00	18	103	Pertemuan Teknis Pupuk dan Pesticida				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pertemuan teknis pupuk dan pestisida	50 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta pertemuan teknis pupuk dan pestisida	50 Orang	90,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	104	Pertemuan Teknis Alat dan Mesin Perkebunan				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pertemuan teknis alat dan mesin perkebunan	50 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta pertemuan teknis alat dan mesin perkebunan	50 Orang	90,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	105	Pertemuan Petugas Pengamat OPT Perlindungan Tanaman Perkebunan Awal Tahun				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pertemuan petugas pengamat OPT perlindungan tanaman perkebunan awal tahun	79 Orang	Bertambahnya pengetahuan petugas OPT perlindungan tanaman	79 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	107	Pertemuan Teknis Petugas Konservasi Lahan dan Air				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pertemuan teknis petugas konservasi lahan dan air	50 orang	Peningkatan pengetahuan peserta pertemuan teknis petugas konservasi lahan dan air	50 orang	57,500,000.0	66,125,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	108	Pertemuan Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pertemuan pengembangan kawasan tanaman rempah	50 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta pertemuan pengembangan kawasan tanaman rempah	50 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	109	Pertemuan Petugas Pendamping				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pertemuan petugas pendamping	50 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta pertemuan petugas pendamping	50 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	110	Pertemuan Koordinasi Tebu				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pertemuan koordinasi tebu, tembakau, kapas	50 orang	Peningkatan pengetahuan peserta pertemuan koordinasi tebu, tembakau, kapas	50 orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	111	Pertemuan Petugas Pengelola Kebun				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta petugas pengelola kebun	20 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta petugas pengelola kebun	20 Orang	57,500,000.0	66,125,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	02	03.00	18	112	Pertemuan Teknis Pengendalian OPT Yang Efektif				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pertemuan teknis pengendalian OPT yang efektif	50 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta pertemuan teknis pengendalian OPT yang efektif	50 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	

2.00	0 2	03.00	1 8	1 1 3	Pertemuan Penetapan Harga Satuan Benih/Bibit			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pertemuan penetapan harga satuan benih/bibit	50 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta pertemuan penetapan harga satuan benih/bibit	50 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	1 8	1 1 4	Pertemuan Penangkar Bibit/Benih Perkebunan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pertemuan penangkar bibit/benih perkebunan	50 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta pertemuan penangkar bibit/benih perkebunan	50 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	1 8	1 1 5	Pertemuan Koordinasi Petugas dengan Penyalur Bantuan Hibah Pupuk			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pertemuan koordinasi dengan penyalur bantuan hibah pupuk	50 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta pertemuan koordinasi dengan penyalur bantuan hibah pupuk	50 Orang	70,000,000.0	85,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	1 8	1 1 6	Pertemuan Koordinasi Tebu, Kapas dan Tembakau (3 kali)			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pertemuan koordinasi tebu, kapas dan tembakau	50 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta pertemuan koordinasi tebu, kapas dan tembakau	50 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	1 8	1 1 7	Pertemuan Petugas Pengamat OPT Perlindungan Tanaman Perkebunan Akhir Tahun			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta pertemuan petugas pengamat OPT perlindungan tanaman perkebunan akhir tahun	79 Orang	Peningkatan pengetahuan peserta pertemuan petugas pengamat OPT perlindungan tanaman perkebunan akhir tahun	79 Orang	120,000,000.0	130,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	1 8	1 1 8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah (UPT-BSMBP)			Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah perjalanan dinas	10 OT	Ketersediaan laporan perjalanan dinas	10 OT	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	1 8	1 1 9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah (UPT-Proteksi)			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah perjalanan dinas	10 kali/orang	Ketersediaan laporan perjalanan dinas	10 kali/orang	80,500,000.0	92,575,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	1 8	1 2 0	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah (Bidang Tanaman Tahunan dan Penyegar)			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah perjalanan dinas	10 kali/orang	Ketersediaan laporan perjalanan dinas	10 kali/orang	20,000,000.0	20,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	1 8	1 2 1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah (Seksi Tanaman Semusim)			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah perjalanan dinas	10 kali/orang	Ketersediaan laporan perjalanan dinas	10 kali/orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	1 8	1 2 2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Seksi Konservasi			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah laporan hasil rapat-rapat dan konsultasi	10 kali/orang	Ketersediaan laporan perjalanan dinas	10 kali/orang	70,000,000.0	70,000,000.0	Dinas Perkebunan	

2.00	0 2	03.00	1 8	1 2 3	Monitoring dan Evaluasi UPT BSMBP			Kabupaten Bantaeng			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi UPT BSMBP	22 Laporan	Ketersediaan laporan hasil monitoring dan evaluasi UPT BSMBP	22 Laporan	57,500,000.0	66,125,000.0	Dinas Perkebunan		
								Kabupaten Bone											
								Kabupaten Bulukumba											
								Kabupaten Jeneponto											
								Kabupaten Kepulauan Selayar											
								Kabupaten Luwu											
								Kabupaten Luwu Utara											
2.00	0 2	03.00	1 8	1 2 4	Monitoring dan Evaluasi UPT Proteksi			Kabupaten Bone			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi UPT Proteksi	22 Laporan	Ketersediaan laporan hasil monitoring dan evaluasi UPT Proteksi	22 Laporan	57,500,000.0	66,125,000.0	Dinas Perkebunan		
								Kabupaten Luwu											
								Kabupaten Luwu Timur											
								Kabupaten Luwu Utara											
								Kabupaten Soppeng											
								Kabupaten Wajo											
2.00	0 2	03.00	1 8	1 2 5	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tanaman Semusim			Kabupaten Bantaeng			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	11 Laporan	Ketersediaan laporan hasil monitoring dan evaluasi	11 Laporan	57,500,000.0	66,125,000.0	Dinas Perkebunan		
								Kabupaten Bulukumba											
								Kabupaten Jeneponto											
								Kabupaten Takalar											
2.00	0 2	03.00	1 8	1 2 6	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tanaman Rempah			Kabupaten Bone			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	16 Laporan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	16 Laporan	57,500,000.0	66,125,000.0	Dinas Perkebunan		
								Kabupaten Bulukumba											
								Kabupaten Luwu											
								Kota Palopo											
2.00	0 2	03.00	1 8	1 2 7	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Konservasi Lahan dan Air			Kabupaten Bone			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	13 laporan	Ketersediaan laporan hasil monitoring dan evaluasi	13 Laporan	57,500,000.0	66,125,000.0	Dinas Perkebunan		
								Kabupaten Soppeng											
								Kabupaten Wajo											



2.00	02	03.00	18	128	Money Pengembangan Sumber Benih dan Produksi			Kabupaten Bone			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumber benih dan produksi	21 Laporan	Kabupaten yang di monitoring dan evaluasi pengembangan sumber benih dan produksi	21 Laporan	57,500,000.0	66,125,000.0	Dinas Perkebunan		
								Kabupaten Bulukumba											
								Kabupaten Luwu											
								Kabupaten Luwu Utara											
								Kabupaten Pinrang											
<b>2.00</b>	<b>02</b>	<b>03.00</b>	<b>50</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>				<b>4,200,000,000.0</b>	<b>4,812,940,486.90</b>	<b>Dinas Perkebunan</b>		
2.00	02	03.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	3 Jenis	50,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Perkebunan		
												0		0					
												0		0					
												0		0					
												0		0					
												0		0					
												0		0					
												0		0					
												0		0					
2.00	02	03.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	15 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	15 Unit	50,000,000.0	62,940,486.90	Dinas Perkebunan		
												35 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	35 Unit					
2.00	02	03.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	131 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	3,800,000,000.0	4,100,000,000.0	Dinas Perkebunan		
2.00	02	03.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	100 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	200,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Perkebunan		
2.00	02	03.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	10 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	10 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perkebunan		
<b>2.00</b>	<b>02</b>	<b>03.00</b>	<b>51</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100 %</b>				<b>392,215,000.0</b>	<b>402,215,000.0</b>	<b>Dinas Perkebunan</b>		

2.00	0 2	03.00	5 1	0 0 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	100 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	5 1	0 0 6	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	100 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	5 1	0 0 9	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	100 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	170,000,000.0	180,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	5 1	0 1 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	100 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	72,215,000.0	72,215,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	5 2		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %			600,000,000.0	600,000,000.0	Dinas Perkebunan		
2.00	0 2	03.00	5 2	0 0 1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	60 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	5 2	0 0 2	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perkebunan	
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	3 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	3 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	6 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	6 Dokumen				

2.00	0 2	03.00	5 2	0 0 4	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	100 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Perkebunan	
											Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	100 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %				
2.00	0 2	03.00	5 2	0 0 5	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	100 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	5 2	0 0 6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	100 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	5 2	0 0 7	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	100 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perkebunan	
<b>2.00</b>	<b>0 2</b>	<b>03.00</b>	<b>5 3</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>	<b>100 %</b>			<b>482,800,000.0</b>	<b>482,800,000.0</b>	<b>Dinas Perkebunan</b>		
2.00	0 2	03.00	5 3	0 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	100 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	282,800,000.0	282,800,000.0	Dinas Perkebunan	
2.00	0 2	03.00	5 3	0 0 3	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	100 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Perkebunan	
<b>2.00</b>	<b>0</b>				<b>Kehutanan</b>													
<b>2.00</b>	<b>0</b>	<b>01.00</b>			<b>Dinas Kehutanan</b>										<b>45,732,314,517.03</b>	<b>44,934,350,104.01</b>		
<b>2.00</b>	<b>0 3</b>	<b>01.00</b>	<b>2 0</b>		<b>PROGRAM PENATAAN HUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN (Prioritas)</b>					<b>% Luas kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya (Prioritas)</b>	<b>64.67 %</b>			<b>4,205,000,000.0</b>	<b>3,405,000,000.0</b>	<b>Dinas Kehutanan</b>		
										<b>Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu</b>	<b>339.6 Ton</b>							

									Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan	76947.18 M3								
2.00	0 3	01.00	2 0	0 0 1	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Jeneberang I			Kabupaten Gowa			Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 Lokasi	Cakupan pengembangan jasa lingkungan	30 persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 0	0 0 2	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Jeneberang II			Kabupaten Sinjai	#Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai Gantarang Central Sinjai Sinjai Regency		Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 Lokasi	Cakupan pengembangan jasa lingkungan	10 Persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 0	0 0 3	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Selayar			Kabupaten Kepulauan Selayar			Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 Lokasi	Cakupan pengembangan jasa lingkungan	10 Persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 0	0 0 4	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Cenrana			Kabupaten Bone			Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 Lokasi	Cakupan pengembangan jasa lingkungan	10 Persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 0	0 0 5	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Walanae			Kabupaten Soppeng			Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 Lokasi	Cakupan pengembangan jasa lingkungan	30 Persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Wajo										
2.00	0 3	01.00	2 0	0 0 6	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Bulusaraung			Kabupaten Maros			Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 Lokasi	Cakupan pengembangan jasa lingkungan	30 Persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 0	0 0 7	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Ajatappareng			Kabupaten Barru			Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 Lokasi	Cakupan pengembangan jasa lingkungan	10 Persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 0	0 0 8	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Bila			Kabupaten Sidenreng Rappang			Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 Lokasi	Cakupan pengembangan jasa lingkungan	10 Persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 0	0 0 9	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Sawitto			Kabupaten Pinrang			Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 Lokasi	Cakupan pengembangan jasa lingkungan	10 Persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 0	0 1 0	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Saddang I			Kabupaten Tana Toraja			Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 Lokasi	Cakupan pengembangan jasa lingkungan	10 Persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 0	0 1 1	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Saddang II			Kabupaten Toraja Utara			Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 Lokasi	Cakupan pengembangan jasa lingkungan	10 persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 0	0 1 2	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Latimojong			Kota Palopo			Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 Lokasi	Cakupan pengembangan jasa lingkungan	10 persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 0	0 1 3	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Rongkong			Kabupaten Luwu Utara			Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 Lokasi	Cakupan pengembangan jasa lingkungan	10 persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 0	0 1 4	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Kalaena			Kabupaten Luwu Utara			Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 Lokasi	Cakupan pengembangan jasa lingkungan	10 persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	

2.00	03	01.00	20	015	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Larona Malili			Kabupaten Luwu Timur			Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 Lokasi	Cakupan pengembangan jasa lingkungan	10 persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	20	016	Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Mata Allo			Kabupaten Enrekang			Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 Lokasi	Cakupan pengembangan jasa lingkungan	10 persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	20	017	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Jeneberang I			Kabupaten Gowa			Jumlah patok batas blok dan petak	250 buah	Panjang batas blok dan petak yang ditata	50 km	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Takalar										
2.00	03	01.00	20	018	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Jeneberang II			Kabupaten Bantaeng			Jumlah patok batas blok dan petak	250 buah	Panjang batas blok dan petak yang ditata	50 km	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Bulukumba										
								Kabupaten Sinjai										
2.00	03	01.00	20	019	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Selayar			Kabupaten Kepulauan Selayar			Jumlah patok batas blok dan petak	250 buah	Panjang batas blok dan petak yang ditata	50 km	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	20	020	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Cenrana			Kabupaten Bone			Jumlah patok batas blok dan petak	187 buah	Panjang batas blok dan petak yang ditata	37 km	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	20	021	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Walanae			Kabupaten Soppeng			Jumlah patok batas blok dan petak	187 buah	Panjang batas blok dan petak yang ditata	37 km	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Wajo										
2.00	03	01.00	20	022	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Bulusaraung			Kabupaten Maros			Jumlah patok batas blok dan petak	187 buah	Panjang batas blok dan petak yang ditata	37 km	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
2.00	03	01.00	20	023	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Ajatappareng			Kabupaten Barru			Jumlah patok batas blok dan petak	125 buah	Panjang batas blok dan petak yang ditata	25 km	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	20	024	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Bila			Kabupaten Sidenreng Rappang			Jumlah patok batas blok dan petak	187 buah	Panjang batas blok dan petak yang ditata	37 km	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	20	025	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Sawitto			Kabupaten Pinrang			Jumlah patok batas blok dan petak	125 buah	Panjang batas blok dan petak yang ditata	25 km	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	20	026	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Saddang I			Kabupaten Tana Toraja			Jumlah patok batas blok dan petak	187 buah	Panjang batas blok dan petak yang ditata	37 km	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	20	027	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Saddang II			Kabupaten Toraja Utara			Jumlah patok batas blok dan petak	187 buah	Panjang batas blok dan petak yang ditata	37 km	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Kehutanan	

2.00	03	01.00	20	028	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Latimojong			Kabupaten Luwu			Jumlah patok batas blok dan petak	187 buah	Panjang batas blok dan petak yang ditata	37 km	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kota Palopo										
2.00	03	01.00	20	029	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Rongkong			Kabupaten Luwu Utara			Jumlah patok batas blok dan petak	250 buah	Panjang batas blok dan petak yang ditata	50 km	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	20	030	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Kalaena			Kabupaten Luwu Utara			Jumlah patok batas blok dan petak	250 buah	Panjang batas blok dan petak yang ditata	50 km	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	20	031	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Larona Malili			Kabupaten Luwu Timur			Jumlah patok batas blok dan petak	187 buah	Panjang batas blok dan petak yang ditata	37 km	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	20	032	Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Mata Allo			Kabupaten Enrekang			Jumlah patok batas blok dan petak	187 buah	Panjang batas blok dan petak yang ditata	37 km	75,000,000.0	75,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	20	049	Review perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kabupaten/kota pengusul	1 Kab/Kota	Cakupan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	5 Persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Provinsi Sulawesi Selatan										
2.00	03	01.00	20	050	Pembinaan dan pengawasan GANIS dan WASGANIS			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah GANIS dan WASGANIS yang dibina	40 orang	Persentase GANIS dan WASGANIS yang berkinerja baik	90 Persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	20	051	Pembinaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, IUPHHK, IPHHK, IPK	30 izin	Jumlah pemegang izin yang tertib	30 izin	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	20	052	Penyusunan bisnis plan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah buku bisnis plan	16 dokumen	Jumlah dokumen yang disusun	16 dokumen	800,000,000.0	0.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	20	053	Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil hutan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah industri yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi	60 Industri	Persentase industri yang aktif dan tertib aturan	0.32 persen	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	20	054	Monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan PSDH/DR						Jumlah data perhitungan iuran kehutanan	2 Laporan	Jumlah data bahan rekonsiliasi iuran kehutanan	2 Laporan	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pemegang izin yang wajib bayar PSDH/DR	60 izin	Jumlah pemegang izin yang membayar PSD/DR tepat waktu	60 pemegang izin				

							Provinsi Sulawesi Selatan													
2.00	03	01.00	21		PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (Prioritas)	Peningkatan Ketahanan Pangan, Sumber Daya Air, dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Terpeliharaan ya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim			Cakupan Ketersediaan Jumlah Bibit Tanaman Hutan	1000000 Bibit					14,967,300,000.0	14,148,550,000.0	Dinas Kehutanan		
										Cakupan Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Prioritas)	1000 Ha									
										Indeks kualitas tutupan lahan (Prioritas)	58.62									
2.00	03	01.00	21	0	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Jeneberang I			Kabupaten Gowa				Jumlah unit persemaian	1 unit	Jumlah ketersediaan bibit	25000 batang	100,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan		
2.00	03	01.00	21	0	Pembuatan persemaian di wilayah KPH jeneberang II			Kabupaten Sinjai	#Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai Pattongko Central Sinjai Sinjai Regency			Jumlah unit persemaian	1 unit	Jumlah ketersediaan bibit	25000 batang	100,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan		
2.00	03	01.00	21	0	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Selayar			Kabupaten Kepulauan Selayar				Jumlah unit persemaian	1 unit	Jumlah ketersediaan bibit	25000 batang	100,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan		
2.00	03	01.00	21	0	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Cenrana			Kabupaten Bone				Jumlah unit persemaian	1 unit	Jumlah ketersediaan bibit	25000 batang	100,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan		
2.00	03	01.00	21	0	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Walanae			Kabupaten Soppeng				Jumlah unit persemaian	1 unit	Jumlah ketersediaan bibit	25000 batang	100,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan		
2.00	03	01.00	21	0	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Bulusaraung			Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	#di Wilayah Kerja KPH Bulu Saraung Bulu Saraung Tompo Bulu Balocci			Jumlah unit persemaian	1 unit	Jumlah ketersediaan bibit	25000 batang	100,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan		
2.00	03	01.00	21	0	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Ajatappareng			Kabupaten Barru				Jumlah unit persemaian	1 unit	Jumlah ketersediaan bibit	25000 batang	100,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan		
2.00	03	01.00	21	0	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Bila			Kabupaten Sidenreng Rappang				Jumlah unit persemaian	1 unit	Jumlah ketersediaan bibit	25000 batang	100,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan		
2.00	03	01.00	21	0	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Sawitto			Kabupaten Pinrang				Jumlah unit persemaian	1 unit	Jumlah ketersediaan bibit	25000 batang	100,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan		
2.00	03	01.00	21	0	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Saddang I			Kabupaten Tana Toraja				Jumlah unit persemaian	1 unit	Jumlah ketersediaan bibit	25000 batang	100,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan		
2.00	03	01.00	21	0	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Saddang II			Kabupaten Toraja Utara				Jumlah unit persemaian	1 unit	Jumlah ketersediaan bibit	25000 batang	100,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan		
2.00	03	01.00	21	0	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Latimojong			Kabupaten Luwu				Jumlah unit persemaian	1 unit	Jumlah ketersediaan bibit	25000 batang	100,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan		

2.00	03	01.00	21	013	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Rongkong			Kabupaten Luwu Utara			Jumlah unit persemaian	1 unit	Jumlah ketersediaan bibit	25000 batang	100,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	21	014	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Kalaena			Kabupaten Luwu Utara			Jumlah unit persemaian	1 unit	Jumlah ketersediaan bibit	25000 batang	100,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	21	015	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Larona Malili			Kabupaten Luwu Timur			Jumlah unit persemaian	1 unit	Jumlah ketersediaan bibit	25000 batang	100,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	21	016	Pembuatan persemaian di wilayah KPH Mata Allo			Kabupaten Enrekang			Jumlah unit persemaian	1 unit	Jumlah ketersediaan bibit	25000 batang	100,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	21	017	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK VI dan VII / KPH Jeneberang I			Kabupaten Gowa			Jumlah unit dam penahan	7 Unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali erosi dan sedimentasi	7 Unit	505,500,000.0	521,500,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Jeneponto			Jumlah unit gully plug	6 Unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali jurang	6 Unit				
								Kabupaten Takalar			Jumlah unit sumur resapan	6 Unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali penyerapan air ke dalam tanah	6 Unit				
2.00	03	01.00	21	018	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK VII dan VIII / KPH Jeneberang II						Jumlah unit dam penahan	6 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali erosi dan sedimentasi	6 unit	454,500,000.0	469,500,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Bantaeng			Jumlah unit gully plug	6 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali jurang	6 unit				
								Kabupaten Bulukumba			Jumlah unit sumur resapan	6 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi penyerapan air ke dalam tanah	6 unit				
								Kabupaten Sinjai										
2.00	03	01.00	21	019	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK VIII / KPH Selayar			Kabupaten Kepulauan Selayar			Jumlah unit dam penahan	2 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali erosi dan sedimentasi	2 unit	151,500,000.0	156,500,000.0	Dinas Kehutanan	



											Jumlah unit gully plug	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali jurang	3 unit				
											Jumlah unit sumur resapam	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi penyerapan air ke dalam tanah	3 Unit				
2.00	03	01.00	21	020	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK V / KPH Cenrana			Kabupaten Bone			Jumlah unit dam penahan	2 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali erosi dan sedimentasi	2 unit	151,500,000.0	156,500,000.0	Dinas Kehutanan	
											Jumlah unit gully plug	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali jurang	3 unit				
											Jumlah unit sumur resapan	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi penyerapan air ke dalam tanah	3 unit				
2.00	03	01.00	21	021	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK V / KPH Walanae						Jumlah unit dam penahan	4 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali erosi dan sedimentasi	4 unit	303,000,000.0	313,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Soppeng			Jumlah unit gully plug	6 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali jurang	6 unit				
								Kabupaten Wajo			Jumlah unit sumur resapan	6 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali penyerapan air ke dalam tanah	6 Unit				
2.00	03	01.00	21	022	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK I / KPH Bulusaraung			Kabupaten Maros			Jumlah unit dam penahan	4 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali erosi dan sedimentasi	4 Unit	303,000,000.0	313,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan			Jumlah unit gully plug	6 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali jurang	6 Unit				

											Jumlah unit sumur resapan	6 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi penyerapan air ke dalam tanah	6 Unit				
2.00	03	01.00	21	023	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK II / KPH Ajatappareng			Kabupaten Barru			Jumlah unit dam penahan	2 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali erosi dan sedimentasi	2 Unit	151,500,000.0	156,500,000.0	Dinas Kehutanan	
											Jumlah unit gully plug	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali erosi dan sedimentasi	3 Unit				
											Jumlah unit sumur resapan	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali erosi dan sedimentasi	3 Unit				
2.00	03	01.00	21	024	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK II / KPH Bila			Kabupaten Sidenreng Rappang			Jumlah unit dam penahan	4 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali erosi dan sedimentasi	4 unit	303,000,000.0	313,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kota Parepare			Jumlah unit gully plug	6 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali jurang	6 unit				
											Jumlah unit sumur resapan	6 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi penyerapan air ke dalam tanah	6 Unit				
2.00	03	01.00	21	025	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK II / KPH Sawitto			Kabupaten Pinrang			Jumlah unit dam penahan	2 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali erosi dan sedimentasi	2 unit	151,500,000.0	156,500,000.0	Dinas Kehutanan	
											Jumlah unit gully plug	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali jurang	3 unit				

											Jumlah unit sumur resapan	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi penyerapan air ke dalam tanah	3 Unit				
2.00	03	01.00	21	026	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK III / KPH Saddang I			Kabupaten Tana Toraja			Jumlah unit dam penahan	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali erosi dan sedimentasi	3 unit	202,500,000.0	208,500,000.0	Dinas Kehutanan	
											Jumlah unit gully plug	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali jurang	3 unit				
											Jumlah unit sumur resapan	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi penyerapan air ke dalam tanah	3 unit				
2.00	03	01.00	21	027	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK III / KPH Saddang II			Kabupaten Toraja Utara			Jumlah unit dam penahan	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali erosi dan sedimentasi	3 unit	202,500,000.0	208,500,000.0	Dinas Kehutanan	
											Jumlah unit gully plug	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali jurang	3 unit				
											Jumlah unit sumur resapan	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi penyerapan air ke dalam tanah	3 unit				
2.00	03	01.00	21	028	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK IV / KPH Latimojong			Kabupaten Luwu			Jumlah unit dam penahan	4 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali erosi dan sedimentasi	4 unit	303,000,000.0	313,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kota Palopo			Jumlah unit gully plug	6 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali jurang	6 unit				
											Jumlah unit sumur resapan	6 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi penyerapan air ke dalam tanah	6 unit				

2.00	03	01.00	21	029	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK IV / KPH Rongkong			Kabupaten Luwu Utara				Jumlah unit dam penahan	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali erosi dan sedimentasi	3 unit	202,500,000.0	208,500,000.0	Dinas Kehutanan	
												Jumlah unit gully plug	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali jurang	3 unit				
												Jumlah unit sumur resapan	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi penyerapan air ke dalam tanah	3 Unit				
2.00	03	01.00	21	030	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK IV / KPH Kalaena			Kabupaten Luwu Timur				Jumlah unit dam penahan	2 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali erosi dan sedimentasi	2 unit	151,500,000.0	156,500,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Luwu Utara				Jumlah unit gully plug	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali jurang	3 unit				
												Jumlah unit sumur resapan	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali penyerapan air ke dalam tanah	3 unit				
2.00	03	01.00	21	031	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK IV / KPH Larona Malili			Kabupaten Luwu Timur				Jumlah unit dam penahan	2 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali erosi dan sedimentasi	2 unit	151,500,000.0	156,500,000.0	Dinas Kehutanan	
												Jumlah unit gully plug	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali jurang	3 unit				
												Jumlah unit sumur resapan	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi penyerapan air ke dalam tanah	3 unit				

2.00	03	01.00	21	032	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air/ sipil teknis di wilayah CDK III / KPH Mata Allo			Kabupaten Enrekang			Jumlah unit dam penahan	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali erosi dan sedimentasi	3 unit	202,500,000.0	208,500,000.0	Dinas Kehutanan	
											Jumlah unit gully plug	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi pengendali jurang	3 unit				
											Jumlah unit sumur resapan	3 unit	Jumlah bangunan KTA berfungsi penyerapan air ke dalam tanah	3 unit				
2.00	03	01.00	21	033	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada Wilayah CDK VI dan CDK VII / Wilayah KPH Jeneberang I			Kabupaten Gowa			Luas pemeliharaan tanaman mangrove	50 hektar	Luas lahan berfungsi mencegah abrasi lahan	50 ha	891,000,000.0	775,500,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Jeneponto			Luas pemeliharaan tanaman bambu	40 hektar	Luas lahan bambu yang dipelihara	40 ha				
								Kabupaten Takalar			Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	150 hektar	Luas lahan hutan rakyat yang dipelihara	150 ha				
											Luas pembuatan tanaman mangrove	3 hektar	Luas lahan yang ditanami mangrove	3 ha				
											Luas pembuatan tanaman bambu	5 hektar	Luas lahan yang ditanami bambu	5 ha				
											Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	20 hektar	Luas lahan yang ditanami melalui hutan rakyat	20 ha				
2.00	03	01.00	21	034	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK VII dan VIII / KPH Jeneberang II			Kabupaten Bantaeng			Luas pemeliharaan mangrove	10 hektar	Luas lahan berfungsi mencegah abrasi lahan	10 ha	739,000,000.0	548,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Bulukumba			Luas pemeliharaan tanaman bambu	40 hektar	Luas lahan bambu yang dipelihara	40 ha				
								Kabupaten Sinjai			Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	160 hektar	Luas lahan hutan rakyat yang dipelihara	160 ha				
											Luas pembuatan tanaman mangrove	4 hektar	Luas lahan yang ditanami mangrove	4 ha				
											Luas pembuatan tanaman bambu	3 hektar	Luas lahan yang ditanami bambu	3 ha				



												Luas pembuatan tanaman mangrove	3 hektar	Luas lahan mangrove yang ditanami	3 ha					
												Luas pembuatan tanaman bambu	3 hektar	Luas lahan yang ditanami bambu	3 ha					
												Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	20 hektar	Luas lahan yang dipelihara melalui hutan rakyat	20 ha					
2.00	03	01.00	21	038	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK I / KPH Bulusaraung					Kabupaten Maros		Luas pemeliharaan tanaman mangrove	53 hektar	Luas lahan berfungsi mencegah abrasi lahan	53 ha	570,500,000.0	511,000,000.0	Dinas Kehutanan		
										Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		Luas pemeliharaan tanaman bambu	70 hektar	Luas lahan bambu yang dipelihara	7 ha					
												Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	0 hektar	Luas lahan hutan rakyat yang dipelihara	0 ha					
												Luas pembuatan tanaman mangrove	3 hektar	Luas lahan yang ditanami mangrove	3 ha					
												Luas pembuatan tanaman bambu	3 hektar	Luas lahan yang ditanami bambu	3 ha					
												Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	20 hektar	Luas lahan yang ditanami melalui hutan rakyat	20 ha					
2.00	03	01.00	21	039	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK II / KPH Ajatappareng					Kabupaten Barru		Luas pemeliharaan tanaman mangrove	3 hektar	Luas lahan berfungsi mencegah abrasi lahan	3 ha	316,500,000.0	434,250,000.0	Dinas Kehutanan		
												Luas pemeliharaan tanaman bambu	0 hektar	Luas lahan bambu yang dipelihara	0 ha					
												Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	25 hektar	Luas lahan hutan rakyat yang dipelihara	25 ha					
												Luas pembuatan tanaman mangrove	3 hektar	Luas lahan yang ditanami mangrove	3 ha					
												Luas pembuatan tanaman bambu	0 hektar	Luas lahan yang ditanami bambu	0 ha					
												Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	28 hektar	Luas lahan yang ditanami melalui hutan rakyat	28 ha					
2.00	03	01.00	21	040	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK II / KPH Bila					Kabupaten Sidenreng Rappang		Luas pemeliharaan tanaman mangrove	0 hektar	Luas lahan berfungsi mencegah abrasi lahan	0 ha	210,000,000.0	276,500,000.0	Dinas Kehutanan		

								Kota Parepare				Luas pemeliharaan tanaman bambu	10 hektar	Luas lahan hutan bambu yang dipelihara	10 ha					
												Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	0 hektar	Luas lahan hutan rakyat yang dipelihara	0 ha					
												Luas pembuatan tanaman mangrove	3 hektar	Luas lahan yang ditanami mangrove	3 ha					
												Luas pembuatan tanaman bambu	0 hektar	Luas lahan yang ditanami bambu	0 ha					
												Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	20 hektar	Luas lahan yang ditanami melalui hutan rakyat	20 ha					
2.00	03	01.00	21	041	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK II / KPH Sawitto			Kabupaten Pinrang				Luas pemeliharaan mangrove	0 hektar	Luas lahan berfungsi mencegah abrasi lahan	0 ha	221,500,000.0	276,500,000.0	Dinas Kehutanan		
												Luas pemeliharaan tanaman bambu	15 hektar	Luas lahan bambu yang dipelihara	15 ha					
												Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	0 hektar	Luas lahan hutan rakyat yang dipelihara	0 ha					
												Luas pembuatan tanaman mangrove	3 hektar	Luas lahan yang ditanami mangrove	3 ha					
												Luas pembuatan tanaman bambu	0 hektar	Luas lahan yang ditanami bambu	0 ha					
												Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	20 hektar	Luas lahan yang ditanami melalui hutan rakyat	20 ha					
2.00	03	01.00	21	042	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK III / KPH Saddang I			Kabupaten Tana Toraja				Luas pemeliharaan tanaman bambu	20 hektar	Luas lahan bambu yang dipelihara	20 ha	470,100,000.0	461,000,000.0	Dinas Kehutanan		
												Luas pemeliharaan tanaman hutan rakyat	100 hektar	Luas lahan hutan rakyat yang dipelihara	100 ha					
												Luas pembuatan tanaman bambu	3 hektar	Luas lahan yang ditanami bambu	3 ha					
												Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	20 hektar	Luas lahan yang ditanami melalui hutan rakyat	20 ha					
2.00	03	01.00	21	043	Pembuatan dan pemeliharaan tanaman pada wilayah CDK III / KPH Saddang II			Kabupaten Toraja Utara				Luas pemeliharaan tanaman bambu	0 hektar	Luas lahan bambu yang dipelihara	0 ha	154,100,000.0	220,800,000.0	Dinas Kehutanan		











2.00	03	01.00	21	068	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK III/ KPH Saddang II)			Kabupaten Toraja Utara			Jumlah batang rehabilitasi lahan	3445 Batang	Luas rehabilitasi lahan	5 Ha	112,000,000.0	112,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	21	069	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK IV/ KPH Latimojong)			Kabupaten Luwu			Jumlah batang rehabilitasi lahan	3445 Batang	Luas rehabilitasi lahan	5 Ha	112,000,000.0	112,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kota Palopo										
2.00	03	01.00	21	070	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK IV/ KPH Rongkong)			Kabupaten Luwu Utara			Jumlah batang rehabilitasi lahan	3445 Batang	Luas rehabilitasi lahan	5 Ha	112,000,000.0	112,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	21	071	Rehabilitasi lahan (wilayah CDK IV/ KPH Kalaena)			Kabupaten Luwu Timur			Jumlah batang rehabilitasi lahan	3445 Batang	Luas rehabilitasi lahan	5 Ha	112,000,000.0	112,000,000.0	Dinas Kehutanan	
<b>2.00</b>	<b>03</b>	<b>01.00</b>	<b>22</b>		<b>PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL</b>					<b>Luas areal wilayah kelola masyarakat dengan skema perhutanan sosial</b>	<b>45953 Ha</b>				<b>2,860,000,000.0</b>	<b>2,895,000,000.0</b>	<b>Dinas Kehutanan</b>	
										<b>Jumlah kelompok yang dibentuk dan dibina</b>	<b>32 Kelompok</b>							
2.00	03	01.00	22	001	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK VI dan CDK VII / KPH Jeneberang I			Kabupaten Gowa			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	2 kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	2 kelompok tani	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	22	002	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK VII dan CDK VIII / KPH Jeneberang II			Kabupaten Bantaeng			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	2 kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	2 kelompok tani	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	22	003	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK VIII / KPH Selayar			Kabupaten Kepulauan Selayar			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	2 kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	2 kelompok tani	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	22	004	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK V / KPH Cenrana			Kabupaten Bone			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	2 kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	2 kelompok tani	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	22	005	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK V / KPH Walanae			Kabupaten Soppeng			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	2 kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	2 kelompok tani	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	

2.00	03	01.00	22	006	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK I / KPH Bulusaraung			Kabupaten Maros			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	2 kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	2 kelompok tani	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	22	007	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK II / KPH Ajatappareng			Kabupaten Barru			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	2 kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	2 kelompok tani	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	22	008	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK II / KPH Bila			Kabupaten Sidenreng Rappang			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	2 kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	2 kelompok tani	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	22	009	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK II / KPH Sawitto			Kabupaten Pinrang			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	2 kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	2 kelompok tani	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	22	010	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK III / KPH Saddang I			Kabupaten Tana Toraja			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	2 kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	2 kelompok tani	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	22	011	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK III / KPH Saddang II			Kabupaten Toraja Utara			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	2 kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	2 kelompok tani	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	22	012	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK IV / KPH Latimojong			Kabupaten Luwu			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	2 kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	2 kelompok tani	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kota Palopo										
2.00	03	01.00	22	013	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK IV / KPH Rongkong			Kabupaten Luwu Utara			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	2 kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	2 kelompok tani	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	22	014	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK IV / KPH Kalaena			Kabupaten Luwu Utara			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	2 kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	2 kelompok tani	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	

2.00	03	01.00	22	015	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK IV / KPH Larona Malili			Kabupaten Luwu Timur			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	2 kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	2 kelompok tani	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	22	016	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif di wilayah CDK III / KPH Mata Allo			Kabupaten Enrekang			Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktif	2 kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	2 kelompok tani	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	22	033	Pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan kehutanan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	100 orang	Jumlah penyuluh kehutanan yang meningkat kapasitasnya	100 Orang	100,000,000.0	110,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	22	034	Pembinaan, monitoring dan evaluasi perhutanan sosial			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kelompok perhutanan sosial yang dibina, dimonitoring dievaluasi	20 kelompok tani	Jumlah kelompok yang mengelola usaha perhutanan sosial	20 kelompok	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	22	035	Pertemuan koordinasi dan peningkatan kapasitas pendamping dan kelompok usaha perhutanan sosial			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pelaksanaan pertemuan perhutanan sosial	1 kali	Jumlah orang yang mengikuti pertemuan	50 orang	100,000,000.0	110,000,000.0	Dinas Kehutanan	
											Jumlah pendamping dan kelompok usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan kapasitasnya	16 orang	Jumlah pendamping dan kelompok usaha perhutanan sosial yang meningkat kapasitasnya	16 orang				
2.00	03	01.00	22	036	Pembentukan koperasi tani hutan dan peningkatan kelas KTH			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah koperasi tani hutan yang dibentuk	1 Kelompok	Jumlah KTH kelas madya yang telah membentuk dan mengembangkan koperasi	1 Kelompok	80,000,000.0	85,000,000.0	Dinas Kehutanan	
											Jumlah KTH kelas kemampuan madya dan utama	2 kelompok	Jumlah KTH yang meningkat kelas kemampuannya	2 Kelompok				
2.00	03	01.00	22	037	Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah unit penyelenggara penyuluhan	16 unit penyelenggara	Jumlah penyuluh yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya	75 orang	80,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	23		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM</b>						<b>% Tindak pidana khusus kehutanan yang ditangani</b>	<b>100 %</b>			<b>4,065,000,000.0</b>	<b>4,230,000,000.0</b>	<b>Dinas Kehutanan</b>	

2.00	0 3	01.00	2 3	0 1 7	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Jeneberang I			Kabupaten Gowa				Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	18 kali	Persentase penurunan kerusakan hutan	5 Persen	80,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Jeneponto											
								Kabupaten Takalar											
2.00	0 3	01.00	2 3	0 1 8	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Jeneberang II			Kabupaten Bantaeng				Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	18 kali	Persentase penurunan kerusakan hutan	5 persen	80,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Bulukumba											
								Kabupaten Sinjai											
2.00	0 3	01.00	2 3	0 1 9	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Selayar			Kabupaten Kepulauan Selayar				Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	18 kali	Persentase penurunan kerusakan hutan	5 persen	80,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 3	0 2 0	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Cenrana			Kabupaten Bone				Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	18 kali	Persentase penurunan kerusakan hutan	5 persen	80,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 3	0 2 1	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Walanae			Kabupaten Soppeng				Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	18 kali	Persentase penurunan kerusakan hutan	5 persen	80,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Wajo											
2.00	0 3	01.00	2 3	0 2 2	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Bulusaraung			Kabupaten Maros				Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	18 kali	Persentase penurunan kerusakan hutan	5 persen	80,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan											
2.00	0 3	01.00	2 3	0 2 3	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Ajatappareng			Kabupaten Barru				Jumlah kali patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan	18 kali	Persentase penurunan kebakaran hutan	5 persen	80,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 3	0 2 4	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Bila			Kabupaten Sidenreng Rappang				Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	18 kali	Persentase penurunan kerusakan hutan	5 persen	80,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kota Parepare											



2.00	03	01.00	23	025	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Sawitto			Kabupaten Pinrang			Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	18 kali	Persentase penurunan kerusakan hutan	5 Persen	80,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	23	026	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Saddang I			Kabupaten Tana Toraja			Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	18 kali	Persentase penurunan kerusakan hutan	5 persen	80,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	23	027	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Saddang II			Kabupaten Toraja Utara			Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	18 kali	Persentase penurunan kerusakan hutan	5 Persen	80,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	23	028	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Latimojong			Kabupaten Luwu			Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	18 kali	Persentase penurunan kerusakan hutan	5 Persen	80,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kota Palopo										
2.00	03	01.00	23	029	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Rongkong			Kabupaten Luwu Utara			Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	18 kali	Persentase penurunan kerusakan hutan	5 Persen	80,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	23	030	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Kalaena			Kabupaten Luwu Timur			Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	18 kali	Persentase penurunan kerusakan hutan	5 Persen	80,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Luwu Utara										
2.00	03	01.00	23	031	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Larona Malili			Kabupaten Luwu Timur			Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	18 kali	Persentase penurunan kerusakan hutan	5 Persen	80,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	23	032	Patroli perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah KPH Mata Allo			Kabupaten Enrekang			Jumlah kali patroli perlindungan dan pengamanan hutan	18 kali	Persentase penurunan kerusakan hutan	5 Persen	80,000,000.0	90,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	23	033	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan wilayah KPH. Jeneberang I			Kabupaten Gowa			Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	1 jenis	cakupan ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan	5 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	23	034	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Jeneberang II			Kabupaten Bantaeng			Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	1 jenis	cakupan ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan	5 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	

2.00	0 3	01.00	2 3	0 3 5	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Selayar			Kabupaten Kepulauan Selayar			Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	1 jenis	cakupan ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan	5 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 3	0 3 6	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Cenrana			Kabupaten Bone			Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	1 jenis	cakupan ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan	5 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 3	0 3 7	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Walanae			Kabupaten Soppeng			Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	1 jenis	cakupan ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan	5 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 3	0 3 8	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Bulusaraung			Kabupaten Maros			Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	1 jenis	cakupan ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan	5 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 3	0 3 9	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Ajatappareng			Kabupaten Barru			Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	1 jenis	cakupan ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan	5 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 3	0 4 0	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Bila			Kabupaten Sidenreng Rappang			Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	1 jenis	cakupan ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan	5 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 3	0 4 1	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Sawitto			Kabupaten Pinrang			Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	1 jenis	cakupan ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan	5 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 3	0 4 2	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Saddang I			Kabupaten Tana Toraja			Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	1 jenis	cakupan ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan	5 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 3	0 4 3	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Saddang II			Kabupaten Toraja Utara			Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	1 jenis	cakupan ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan	5 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 3	0 4 4	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Latimojong			Kota Palopo			Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	1 jenis	cakupan ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan	5 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	0 3	01.00	2 3	0 4 5	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Kalaena			Kabupaten Luwu Utara			Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	1 jenis	cakupan ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan	5 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan	

2.00	03	01.00	23	046	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Larona Malili			Kabupaten Luwu Timur			Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	1 jenis	cakupan ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan	5 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan		
2.00	03	01.00	23	047	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Rongkong			Kabupaten Luwu Utara			Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	1 jenis	cakupan ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan	5 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan		
2.00	03	01.00	23	048	Penyediaan sarana prasarana pengamanan hutan di wilayah KPH. Mata Allo			Kabupaten Enrekang			Jumlah jenis sarana prasarana pengamanan hutan	1 jenis	cakupan ketersediaan sarana prasarana pengamanan hutan	5 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan		
2.00	03	01.00	23	050	Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga perlindungan dan pengamanan hutan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah tenaga perlindungan dan pengamanan hutan yang ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	Jumlah tenaga perlindungan dan pengamanan hutan yang berkompeten	50 orang	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan		
2.00	03	01.00	23	051	Monitoring dan koordinasi perlindungan dan pengamanan hutan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pelaksanaan monitoring dan koordinasi perlindungan dan pengamanan hutan	20 kali	persentase penurunan kerusakan hutan	3 persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan		
2.00	03	01.00	23	052	Operasi gabungan dan penanganan tindak pidana khusus kehutanan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pelaksanaan operasi gabungan	1 kali	persentase penurunan kerusakan hutan	3 persen	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Kehutanan		
											Jumlah kasus tindak pidana kehutanan	1 kasus	persentase kasus tindak pidana kehutanan yang ditangani	100 persen					
2.00	03	01.00	23	054	Pembinaan dan monitoring tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi	5 kali	Cakupan pembinaan dan monitoring tumbuhan satwa liar yang tidak dilindungi	20 %	35,000,000.0	40,000,000.0	Dinas Kehutanan		
<b>2.00</b>	<b>03</b>	<b>01.00</b>	<b>24</b>		<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN</b>					<b>Cakupan luas kebakaran hutan yang dikendalikan</b>					<b>3,220,000,000.0</b>	<b>3,230,000,000.0</b>	<b>Dinas Kehutanan</b>		
2.00	03	01.00	24	001	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Jeneberang I			Kabupaten Gowa			Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	80 orang	Jumlah orang kader peduli api	80 orang	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Kehutanan		
								Kabupaten Takalar											

2.00	03	01.00	24	002	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Jeneberang II			Kabupaten Bantaeng			Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	80 orang	Jumlah orang kader peduli api	80 orang	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Sinjai										
2.00	03	01.00	24	003	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Selayar			Kabupaten Kepulauan Selayar			Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	80 orang	Jumlah orang kader peduli api	80 orang	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	24	004	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Cenrana			Kabupaten Bone			Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	80 Orang	Jumlah orang kader peduli api	80 orang	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	24	005	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Walanae			Kabupaten Soppeng			Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	80 orang	Jumlah orang kader peduli api	80 orang	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Wajo										
2.00	03	01.00	24	006	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Bulusaraung			Kabupaten Maros			Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	80 orang	Jumlah orang kader peduli api	80 orang	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
2.00	03	01.00	24	007	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Ajatappareng			Kabupaten Barru			Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	80 orang	Jumlah orang kader peduli api	80 orang	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	24	008	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Bila			Kabupaten Sidenreng Rappang			Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	80 orang	Jumlah orang kader peduli api	80 orang	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kota Parepare										
2.00	03	01.00	24	009	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Sawitto			Kabupaten Pinrang			Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	80 orang	Jumlah orang kader peduli api	80 orang	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	24	010	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Saddang I			Kabupaten Tana Toraja			Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	80 orang	Jumlah orang kader peduli api	80 orang	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Kehutanan	

2.00	03	01.00	24	011	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Saddang II			Kabupaten Toraja Utara			Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	80 orang	Jumlah orang kader peduli api	80 orang	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	24	012	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Latimojong			Kabupaten Luwu			Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	80 orang	Jumlah orang kader peduli api	80 orang	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kota Palopo										
2.00	03	01.00	24	013	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Rongkong			Kabupaten Luwu Utara			Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	80 orang	Jumlah orang kader peduli api	80 orang	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	24	014	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Kalaena			Kabupaten Luwu Timur			Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	80 orang	Jumlah orang kader peduli api	80 orang	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Luwu Utara										
2.00	03	01.00	24	015	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Larona Malili			Kabupaten Luwu Timur			Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	80 orang	Jumlah orang kader peduli api	80 orang	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	24	016	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Mata Allo			Kabupaten Enrekang			Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	80 orang	Jumlah orang kader peduli api	80 orang	80,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	24	017	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK I/ wilayah KPH Bulusaraung)						Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	12 Kali	Persen penurunan kebakaran hutan	5 Persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Maros			Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	100 Orang	Persentase pemadaman kebakaran hutan	100 Persen				
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
2.00	03	01.00	24	018	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK II/ wilayah KPH Ajatappareng)			Kabupaten Barru			Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	12 Kali	Persen penurunan kebakaran hutan	5 Persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	





								Kabupaten Wajo				Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	100 Orang	Persentase pemadaman kebakaran hutan	100 Persen				
2.00	03	01.00	24	029	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK V/ wilayah KPH Cenrana)			Kabupaten Bone				Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	12 Kali	Persen penurunan kebakaran hutan	5 Persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
												Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	100 Orang	Persentase pemadaman kebakaran hutan	100 Persen				
2.00	03	01.00	24	030	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK VI dan CDK VII/ wilayah KPH Jeneberang I)			Kabupaten Gowa				Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	12 Kali	Persen penurunan kebakaran hutan	5 Persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Jeneponto				Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	100 Orang	Persentase pemadaman kebakaran hutan	100 Persen				
								Kabupaten Takalar											
2.00	03	01.00	24	031	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK VII dan CDK VIII/ wilayah KPH Jeneberang II)			Kabupaten Bantaeng				Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	12 Kali	Persen penurunan kebakaran hutan	5 Persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Kabupaten Bulukumba				Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	100 Orang	Persentase pemadaman kebakaran hutan	100 Persen				
								Kabupaten Sinjai											
2.00	03	01.00	24	032	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wilayah CDK VIII/ wilayah KPH Selayar)			Kabupaten Kepulauan Selayar				Jumlah kali patroli pencegahan dan pengendalian kebaaran hutan dan lahan	12 Kali	Persen penurunan kebakaran hutan	5 Persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
												Jumlah orang yang terlibat pemadaman kebakaran hutan	100 Orang	Persentase pemadaman kebakaran hutan	100 Persen				



2.00	03	01.00	24	049	Pengembangan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan			Kota Makassar			Jumlah jenis sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	2 jenis	Cakupan ketersediaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan	5 %	240,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	24	053	Monitoring dan pembinaan, pencegahan, pengendalian dan pasca kebakaran hutan dan lahan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pelaksanaan monitoring dan pembinaan, pengendalian dan pasca kebakaran hutan dan lahan	10 kali	persentase penurunan kebakaran hutan	5 persen	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
<b>2.00</b>	<b>03</b>	<b>01.00</b>	<b>50</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>11,820,314,517.03</b>	<b>11,937,350,104.01</b>	<b>Dinas Kehutanan</b>		
2.00	03	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	4 Jenis	1,413,114,517.03	1,450,150,104.01	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Makassar			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	30 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	30 Unit	175,000,000.0	185,000,000.0	Dinas Kehutanan	
											Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	35 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	35 Unit				
2.00	03	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	393 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	10 %	6,307,200,000.0	6,307,200,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Makassar			Jumlah ATK yang tersedia	75 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	850,000,000.0	900,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	30 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	235,000,000.0	240,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	2 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	480,000,000.0	485,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kota Makassar			Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	4 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	360,000,000.0	360,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah						Jumlah perjalanan dinas	176 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	60 Orang	2,000,000,000.0	2,010,000,000.0	Dinas Kehutanan	



2.00	03	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	2 Dokumen	200,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				
												Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	0 Dokumen				
												Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	2 Dokumen				
2.00	03	01.00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK			Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi , tugas pembantuan dan DAK	1 Usulan Kegiatan	Ketersediaan Usulan Kegiatan dana dekonsentrasi , tugas pembantuan dan DAK	1 Laporan	275,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Kehutanan	
								Provinsi Sulawesi Selatan											
2.00	03	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	1 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	70 %	500,000,000.0	500,000,000.0	Dinas Kehutanan	
												Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	100 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	70 %				
2.00	03	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Kota Makassar				Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	18,000,000.0	18,000,000.0	Dinas Kehutanan	
2.00	03	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR							% ASN berkinerja sangat baik	80 %			350,000,000.0	480,000,000.0	Dinas Kehutanan	

2.00	03	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Kota Makassar			Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian nya	968 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	90 %	300,000,000.0	430,000,000.0	Dinas Kehutanan
											Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	90 %			
2.00	03	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	75 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	75 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Kehutanan
2.00	04				Energi dan Sumber Daya Mineral												
2.00	04	01.00			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral										22,617,808,261.95	23,308,809,033.22	
2.00	04	01.00	01		PROGRAM PENYEDIAAN LISTRIK DAN KETAHANAN ENERGI (Prioritas)	Peningkatan Ketahanan Pangan, Sumber Daya Air, dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur			% Desa Berlistrik (Prioritas)	98.5 %				7,965,551,012.0	8,138,476,329.17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
										% Rumah Tangga Pengguna Listrik	97.5 %						
										Jumlah Kapasitas Bio Energi yang terbangun	1244 M3						
2.00	04	01.00	01	000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengusahaan Energi Baru Terbarukan, Konservasi Energi Serta Ketenagalistrikan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pengelola energi baru dan terbarukan yang dibina (40 % Pengelola Laki Laki, 60 % Pengelola Perempuan)	15 Pengelola	Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan administrasi perizinan pada usaha di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan aturan	100 %	120,000,000.0	120,000,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

											Jumlah Perusahaan ketenagalistrikan/dan perusahaan yang memiliki genset terlayani aspek perizinannya	20 Perusahaan	Meningkatnya pemahaman tentang usaha ketenagalistrikan bagi perusahaan yang belum memenuhi administrasi perizinan perusahaan ketenagalistrikan dalam rangka kedaultan energi	100 %					
											Jumlah perusahaan pengguna energi yang dibina	20 Perusahaan/Lembaga	Meningkatnya pemahaman tentang konservasi dan lingkungan ketenagalistrikan bagi perusahaan sektor ketenagalistrikan dalam rangka ketahanan energi	100 %					
2.00	04	01.00	01	011	Inventarisasi, Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Bioenergi			Kec. Tanete Rilau Kabupaten Barru	#21 Kecamatan North Toraja Regency South Sulawesi ID		Jumlah Instalasi Bioenergi yang dibangun	311 Unit	Termanfaatnya pembangunan instalasi bioenergi bagi rumah tangga /masyarakat desa dalam rangka ketahanan energi	100 %	7,845,551,012.0	8,018,476,329.17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
									#Desa Siteba North Walenrang Luwu Regency South Sulawesi		Jumlah pembangkit listrik energi baru terbarukan yang terbangun	2 Unit	Termanfaatnya pembangkit listrik energi baru terbarukan di wilayah terpencil	100 %					
									#Sinjai Timur, Sinjai Tengah, Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Tellulimpoe Sinjai Regency South Sulawesi ID		Jumlah Dokumen FS	3 Dokumen	Terlaksananya Data Potensi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	100 %					

2.00	04	01.00	02		PROGRAM HILIRISASI PERTAMBANGAN (Prioritas)	Peningkatan Ketahanan Pangan, Sumber Daya Air, dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam			Nilai Hilirisasi Produksi Pertambangan (Prioritas)	15203925000 Rp					1,227,776,582.0	1,273,283,244.52	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
2.00	04	01.00	02	005	Pembinaan Peningkatan Nilai Tambah dan Produksi Pertambangan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah pemegang IUPK sektor hilir	10 Izin/Rekomendasi	Meningkatnya usaha pertambangan sektor hilir	100 %	171,388,290.0	194,141,622.26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
												Jumlah Produksi Logam	92400 Ton	Meningkatnya produksi usaha pertambangan dan terjaminnya pasokan mineral dan batubara bagi masyarakat.	100 %				
												Jumlah Produksi Non Logam	16500000 Ton	Meningkatnya produksi usaha pertambangan dan terjaminnya pasokan mineral dan batubara bagi masyarakat.	100 %				
												Jumlah Produksi Batuan	770000 m3	Meningkatnya produksi usaha pertambangan dan terjaminnya pasokan mineral dan batubara bagi masyarakat.	100 %				
												Jumlah Produksi Batubara	38500 Ton	Meningkatnya produksi usaha pertambangan dan terjaminnya pasokan mineral dan batubara bagi masyarakat.	100 %				
2.00	04	01.00	02	006	Peningkatan Pelayanan Pengusahaan Pertambangan dan penataan wilayah IUP Di Atas 10 Ha			Provinsi Sulawesi Selatan				Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan	2000 Ha	Meningkatnya Penataan Wilayah Izin Usaha Pertambangan minerba	100 %	1,056,388,292.0	1,079,141,622.26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

											Jumlah Izin/Rekomendasi Usaha Pertambangan	110 Izin/Rekomendasi	Meningkatnya kegiatan usaha di sektor pertumbuhan mineral dan batubara.	100 %				
2.00	04	01.00	03		PROGRAM EKSPLORASI SUMBER DAYA GEOLOGI, KONSERVASI DAN PEMANFAATAN AIR TANAH (Prioritas)	Peningkatan Ketahanan Pangan, Sumber Daya Air, dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam			Luas Wilayah Pemetaan (Prioritas)	8500 Ha				4,880,036,064.0	5,060,911,116.37	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
									Jumlah Cadangan Sumber Daya (Prioritas)	4000000 Ton								
									Jumlah Pembangunan Sumur Bor	15 Unit								
2.00	04	01.00	03	008	Pembinaan, Pelayanan Pengusahaan, dan Pengembangan Air Tanah				# Ledan Buntu Batu Enrekang Regency		Jumlah Peta Zonasi Konservasi Air Tanah	2 Peta	Termanfaatnya Peta Zonasi Air Tanah bagi Masyarakat, Pengusaha dan Pemerintah	100 %	4,787,357,376.0	4,907,940,744.24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
									#4 kecamatan North Toraja Regency South Sulawesi ID		Jumlah Sumur Bor	15 Unit	Tersedianya Air Bersih untuk masyarakat	100 %				
									#70 desa kelurahan kab. soppeng Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan ID		Jumlah Pengguna Air Tanah	30 Pengguna Air Tanah	Terbinanya para pengguna air tanah yang taat terhadap aturan air tanah	100 %				
									#DESA BONTO MATENE Turatea Jeneponto Regency South Sulawesi		Jumlah Lokasi Titik Duga	17 Titik	Tersedianya data potensi air tanah	100 %				
									#DESA BULUSIBATANG West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi									
									#DESA KALUKU Batang Sub-District Jeneponto Regency South Sulawesi									

									#DESA LEBANG MANAI Rumbia Jeneponto Regency South Sulawesi												
									#DESA PALLANTIKANG Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi												
									#DESA PALLENGU Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi												
									#DESA SAMATARING Kelara Jeneponto Regency South Sulawesi												
									#DESA TANAMMAWA NG West Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi												
									#DESA TANJONGA Turatea Jeneponto Regency South Sulawesi												
									#DESA TOMBO- TOMBOLO Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi												
									#desa uru Buntu Batu Enrekang Regency South Sulawesi												
									#kabupaten sinjai Tellu Limpoe Sinjai Regency South Sulawesi												



2.00	04	01.00	03	009	Eksplorasi dan Dokumentary Mineral Logam, Bukan Logam, Batuan, dan Batubara			Kabupaten Bantaeng				Jumlah Cadangan	4000000 Ton	Meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya disektor usaha pertambangan mineral bukan logam, batuan dan batubara	100 %	92,678,688.0	152,970,372.13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan				Luas Wilayah Pemetaan	8500 Ha	Meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya disektor usaha pertambangan mineral bukan logam, batuan dan batubara	100 %			
												Jumlah Dokumentary dan Informasi geologi yang dihasilkan	1 Laporan	Termanfaatnya Informasi geologi Sulawesi Selatan	100 %			
2.00	04	01.00	04		<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN AIR TANAH</b>					% Pertambangan Tanpa Izin	31.49 %					460,391,162.0	477,455,231.32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	04	01.00	04	006	Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan, Geologi, Air Tanah, Energi Baru Terbarukan Dan Ketenagalistrikan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Pengguna Air Tanah yang Terawasi	50 Pengguna Air Tanah	Termanfaatnya Hasil Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Geologi Air Tanah Bagi Pengguna Air Tanah	100 %	354,624,697.20	364,863,138.78	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
												Jumlah Penyedia Tenaga Listrik	65 Penyedia Tenaga Listrik	Termanfaatnya Hasil Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bagi Perusahaan EBTKE dan Ketenagalistrikan	100 %			



2.00	04	01.00	05	06	Penatausahaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi Mineral, Batubara Dan Air Tanah			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah laporan yang di susun	1 Laporan	Termanfaatnya laporan hasil jasa pelayanan ketatausahaan laboratorium dalam rangka peningkatan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Eksplorasi	100 %	363,624,629.50	373,181,799.22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
												Jumlah peminjaman alat eksplorasi mineral dan air tanah	9 Unit	Meningkatnya fungsi peralatan survey dan eksplorasi bagi pengusaha dan Masyarakat dalam rangka peningkatan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Eksplorasi	100 %				
2.00	04	01.00	20		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERIZINAN						Jumlah Izin/Rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah yang diterbitkan	52 Izin/Rekomtek				1,520,237,975.0	1,576,584,510.44	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
											Jumlah izin Rekomendasi teknis pemanfaatan minerba yang diterbitkan	289 Izin/Rekomtek							
											Jumlah Izin/Rekomendasi teknik pemanfaatan EBT dan ketenagalistrikan yang diterbitkan	121 Izin/Rekomtek							
2.00	04	01.00	20	01	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor Mineral Batuan, Batubara di bawah 10 Ha dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah I			Kabupaten Barru				Jumlah izin/rekomtek yang diterbitkan	55 Izin/Rekomtek	Terlaksananya Pengelolaan pertambangan minerba dan air tanah yang aman dan benar	100 %	91,286,497.88	95,982,042.50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
								Kabupaten Maros											
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan											

2.00	04	01.00	20	002	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor Mineral Batuan, Batubara di bawah 10 Ha dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah II			Kabupaten Gowa			Jumlah izin/rekomtek yang diterbitkan	55 Izin/Rekomtek	Terlaksananya Pengelolaan pertambangan mineral dan air tanah yang aman dan benar	100 %	91,286,497.92	95,982,042.54	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
								Kabupaten Jeneponto									
								Kabupaten Takalar									
2.00	04	01.00	20	003	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor Mineral Batuan, Batubara di bawah 10 Ha dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah III			Kabupaten Luwu			Jumlah izin/rekomtek yang diterbitkan	66 Izin/Rekomtek	Terlaksananya Pengelolaan pertambangan mineral dan air tanah yang aman dan benar	100 %	91,286,497.92	95,982,042.54	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
								Kabupaten Luwu Timur									
								Kabupaten Luwu Utara									
								Kabupaten Toraja Utara									
								Kota Palopo									
2.00	04	01.00	20	004	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor Mineral Batuan, Batubara di bawah 10 Ha dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah IV			Kabupaten Bantaeng			Jumlah izin/rekomtek yang diterbitkan	55 Izin/Rekomtek	Terlaksananya Pengelolaan pertambangan mineral dan air tanah yang aman dan benar	100 %	91,286,497.92	95,982,042.54	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
								Kabupaten Bulukumba									
								Kabupaten Kepulauan Selayar									
								Kabupaten Sinjai									
2.00	04	01.00	20	005	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor Mineral Batuan, Batubara di bawah 10 Ha dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah V			Kabupaten Bone			Jumlah izin/rekomtek yang diterbitkan	55 Izin/Rekomtek	Terlaksananya Pengelolaan pertambangan mineral dan air tanah yang aman dan benar	100 %	91,286,497.92	95,982,042.54	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
								Kabupaten Soppeng									
								Kabupaten Wajo									
2.00	04	01.00	20	006	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor Mineral Batuan, Batubara di bawah 10 Ha dan Air Tanah Cabang Dinas Wilayah VI			Kabupaten Enrekang			Jumlah Izin/Rekomtek yang diterbitkan	55 Izin/Rekomtek	Terlaksananya Pengelolaan pertambangan mineral dan air tanah yang aman dan benar	100 %	91,286,497.92	95,982,042.54	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
								Kabupaten Pinrang									
								Kabupaten Sidenreng Rappang									



2.00	04	01.00	20	011	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan dibawah 500 kVa Cabang Dinas Wilayah V			Kabupaten Sinjai				Jumlah izin/rekomtek yang diterbitkan	16 Izin/Rekomtek	Terlaksananya Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan yang aman dan benar	100 %	55,286,497.92	59,982,042.54	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
								Kabupaten Soppeng												
								Kabupaten Wajo												
2.00	04	01.00	20	012	Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Sektor Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan dibawah 500 kVa Cabang Dinas Wilayah VI			Kabupaten Enrekang				Jumlah izin/rekomtek yang diterbitkan	16 Izin/Rekomtek	Terlaksananya Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan yang aman dan benar	100 %	55,286,497.92	59,982,042.54	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
								Kabupaten Pinrang												
								Kabupaten Sidenreng Rappang												
								Kabupaten Tana Toraja												
								Kota Parepare												
2.00	04	01.00	20	013	Penatausahaan Administrasi Perkantoran Cabang Dinas Wilayah I			Kabupaten Maros				Jumlah dokumen administrasi perkantoran	1 Dokumen	Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik dan benar	100 %	106,800,000.0	106,800,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.00	04	01.00	20	014	Penatausahaan Administrasi Perkantoran Cabang Dinas Wilayah II			Kabupaten Gowa				Jumlah dokumen administrasi perkantoran	1 Dokumen	Terlaksananya dokumen administrasi perkantoran	100 %	106,800,000.0	106,800,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.00	04	01.00	20	015	Penatausahaan Administrasi Perkantoran Cabang Dinas Wilayah III			Kota Palopo				Jumlah dokumen administrasi perkantoran	1 Dokumen	Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik dan benar	100 %	106,800,000.0	106,800,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.00	04	01.00	20	016	Penatausahaan Administrasi Perkantoran Cabang Dinas Wilayah IV			Kabupaten Bulukumba				Jumlah dokumen administrasi perkantoran	1 Dokumen	Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik dan benar	100 %	106,800,000.0	106,800,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.00	04	01.00	20	017	Penatausahaan Administrasi Perkantoran Cabang Dinas Wilayah V			Kabupaten Bone				Jumlah Dokumen administrasi perkantoran	1 Dokumen	Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik dan benar	100 %	106,800,000.0	106,800,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		

2.00	04	01.00	20	018	Penatausahaan Administrasi Perkantoran Cabang Dinas Wilayah VI			Kota Parepare			Jumlah dokumen administrasi perkantoran	1 Dokumen	Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik dan benar	100 %	106,800,000.0	106,800,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
2.00	04	01.00	50		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %				2,878,161,980.95	2,984,839,001.04	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
2.00	04	01.00	50	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor Dinas ESDM Kota Makassar			Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	6 Jenis	350,340,000.0	350,340,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
2.00	04	01.00	50	02	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Dinas ESDM Kota Makassar			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	8 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	8 Unit	18,450,000.0	18,450,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
											Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	7 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	7 Unit				
2.00	04	01.00	50	03	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kantor Dinas ESDM Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	38 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	912,600,000.0	1,019,277,019.06	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
2.00	04	01.00	50	05	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kantor Dinas ESDM Kota Makassar			Jumlah ATK yang tersedia	32 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	471,175,600.0	471,175,600.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
2.00	04	01.00	50	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor Dinas ESDM Kota Makassar			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	225 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	8,212,500.0	8,212,500.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
2.00	04	01.00	50	08	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kantor Dinas ESDM Kota Makassar			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	2 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	237,383,880.95	237,383,881.98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
2.00	04	01.00	50	09	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kantor Dinas ESDM Kota Makassar			Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	180,000,000.0	180,000,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
2.00	04	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perjalanan dinas	150 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	120 Orang	700,000,000.0	700,000,000.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
								Provinsi Sulawesi Selatan										
2.00	04	01.00	51		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %				1,421,023,404.0	1,448,692,622.25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

2.00	04	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kantor Dinas ESDM Kota Makassar			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	10 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	490,713,401.0	497,630,704.25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
2.00	04	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kantor Dinas ESDM Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	14 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	411,703,201.0	418,620,506.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
2.00	04	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor Dinas ESDM Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	44 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	463,803,401.0	470,720,706.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
2.00	04	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor Dinas ESDM Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	28 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	54,803,401.0	61,720,706.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
2.00	04	01.00	52		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %			1,099,283,182.0	1,140,027,328.18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.00	04	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	50 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	31,397,200.0	39,546,028.18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
											Jumlah Laporan hasil forum perangkat daerah	1 Laporan	Tersedianya laporan hasil forum perangkat daerah	100 %				
2.00	04	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kantor Dinas ESDM Kota Makassar			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	426,394,282.0	434,543,113.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	0 Dokumen				





2.00	04	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Sulawesi Selatan			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	350 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	350 Orang	372,837,285.0	378,856,888.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
2.00	0				Perdagangan													
2.00	0	01.00			Dinas Perdagangan										14,398,050,628.56	14,839,043,380.49		
2.00	05	01.00	01		PRGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL (Prioritas)	Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru dan Pengembangan Destinasi Wisata	Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru			Jumlah penyelenggaraan pameran dalam dan luar negeri	4 Pameran				2,608,637,889.0	2,668,260,904.0	Dinas Perdagangan	
										Jumlah kerjasama antara Pemerintah dan lembaga dunia usaha (Prioritas)	2 MoU							
2.00	05	01.00	01	001	Promosi Produk Ekspor dan Unggulan Daerah			24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Lokasi Pameran Promosi Dalam dan Luar Daerah	4 Lokasi	Terlaksananya Pameran Promosi Dalam dan Luar Negeri	100 %	1,677,300,000.0	1,736,923,015.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	01	002	Misi Dagang Dalam dan Luar Negeri			Kota Makassar			Jumlah MOU Produk Perdagangan yang Dikerjasamakan	2 MOU	Terciptanya MOU Produk Perdagangan Antara Buyer dan Penjual	100 %	931,337,889.0	931,337,889.0	Dinas Perdagangan	
								Surabaya Luar Provinsi Sulawesi Selatan										
2.00	05	01.00	02		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR (Prioritas)	Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru dan Pengembangan Destinasi Wisata	Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru			Nilai Total Ekspor	1358097840 Rp (Milyar)				6,158,248,497.0	6,330,903,152.0	Dinas Perdagangan	
										Nilai ekspor bersih perdagangan (Prioritas)	135809784 Juta \$ US							
2.00	05	01.00	02	001	Pemantauan dan Pengendalian Impor			Kota Makassar			Persentase Nilai Impor Sebesar 10 % di Bawah Nilai Ekspor	10 %	Terpantaunya Produk-Produk Impor dibawah 10 % Dari Nilai Ekspor Pertahun	100 %	605,000,000.0	655,000,000.0	Dinas Perdagangan	

2.00	05	01.00	02	002	Pembinaan Gerakan Peningkatan Ekspor			Kota Makassar			Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	8 %	Tercapainya Peningkatan Nilai Ekspor Sebesar 8 % Tahunan	100 %	605,000,000.0	725,000,000.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	02	003	Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Internasional			Kota Makassar			Jumlah Desiminasi Hasil-Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	4 Hasil Perundingan	Termanfaatnya Hasil-Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	100 %	400,534,497.0	403,189,152.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	02	004	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kalibrasi			Kota Makassar			Jumlah Sertifikat Kalibrasi	3000 Sertifikat	Tersedianya Informasi Kepastian Kesuaian Mutu Suatu Alat dan Bahan Ukur Terhadap Spesifikasi Tertentu	100 %	251,000,000.0	251,000,000.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	02	005	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji			Kota Makassar			Jumlah Sertifikat Penguji	2000 Sertifikat	Tersedianya Informasi Kepastian Kesesuaian Mutu Terhadap Standart yang Digunakan Baik Nasional Maupun Internasional	100 %	251,000,000.0	251,000,000.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	02	006	Pengembangan dan Penerapan Penilaian Kesesuaian SNI			Kota Makassar			Jumlah Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia	24 Sertifikat	Tersertifikasinya Produk Berdasarkan Standar Nasional Indonesia	100 %	3,595,714,000.0	3,595,714,000.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	02	007	Penatausahaan UPT BSPM			Kota Makassar			Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Mendukung Pelayanan Pengujian, Kalibrasi dan Produk	4 Unit	Terpenuhinya Permintaan Pelayanan Pengujian, Kalibrasi dan Produk	100 %	450,000,000.0	450,000,000.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	03		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN</b>					<b>Cakupan kelompok pedagang/usaha informal yang dibina</b>	<b>0.98 %</b>				<b>472,318,134.0</b>	<b>489,824,268.0</b>	<b>Dinas Perdagangan</b>	
2.00	05	01.00	03	001	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa			24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Barang Beredar Yang Diawasi	85000 Unit	Berkurangnya Barang Beredar yang tidak sesuai dengan Aturan dan Standar	100 %	99,000,000.0	116,506,134.0	Dinas Perdagangan	

2.00	05	01.00	03	002	Penyelenggaraan dan Pembinaan BPSK dan LPKSM			Kota Pare-Pare dan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah BPSK yang di Fasilitas	2 BPSK	Terfasilitasinya BPSK di Sulawesi Selatan	100 %	188,068,134.0	188,068,134.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	03	003	Peningkatan Pengawasan Tertib Niaga			24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Gudang yang Diawasi	15 Gudang	Terciptanya Ketertiban dalam Kegiatan Perdagangan	100 %	97,750,000.0	97,750,000.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	03	004	Penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen			Kota Makassar			Jumlah Peserta Hari Konsumen Nasional 2019	55 Peserta	Terpahaminya a Peraturan Perlindungan Konsumen di Sulawesi Selatan	100 %	87,500,000.0	87,500,000.0	Dinas Perdagangan	
<b>2.00</b>	<b>05</b>	<b>01.00</b>	<b>04</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>						<b>Jumlah izin usaha perdagangan</b>	<b>5 Izin</b>			<b>1,102,493,257.0</b>	<b>1,143,356,382.0</b>	<b>Dinas Perdagangan</b>	
											<b>Nilai perdagangan dalam negeri</b>	<b>30000000 Rp</b>						
2.00	05	01.00	04	001	Pelaksanaan Sistem Resi Gudang			Dua Boccoe Bone Regency Kabupaten Bone	#dua boccoe Bone Regency South Sulawesi		Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem Resi Gudang	60 Peserta	Terciptanya Optimalisasi Resi Gudang di Sulawesi Selatan	100 %	85,293,257.0	85,293,257.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	04	002	Database Perkembangan Harga dan Stok Bapokting			Kabupaten Toraja Utara	#Dinas Perdagangan Kota Palopo Palopo City South Sulawesi ID		Jumlah Database Komoditi yang terpantau	15 Database Komoditi	Terjaganya Stabilitas Harga dan Terkendalinya Inflasi	100 %	60,300,000.0	80,300,000.0	Dinas Perdagangan	
								Dinas Perdagangan Kota Palopo	#Hotel Kenari 65 Jalan Jend. Sudirman Cappa Galung									
								Hotel Kenari 65 Jl. Jend. Sudirman Cappa Galung	#Kabupaten Toraja Utara North Toraja Regency South Sulawesi ID									
									#Kecamatan Tondon Tondon North Toraja Regency South Sulawesi									
									#Kelurahan Tallunglipu Matallo Tallunglipu North Toraja Regency South Sulawesi									
2.00	05	01.00	04	003	Pelaksanaan Pasar Murah			Kabupaten Bone	# Bulukumba Regency South Sulawesi ID		Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah	6 Lokasi	Terkendalinya Harga Bahan Pokok Menjelang HBKN	100 %	104,470,000.0	104,470,000.0	Dinas Perdagangan	
								Kabupaten Bulukumba	# Tanete Riattang Bone Regency South Sulawesi									

							Kabupaten Jeneponto	# Wara Palopo City South Sulawesi											
							Kabupaten Kepulauan Selayar	#Kabupaten Luwu Timur East Luwu Regency South Sulawesi ID											
							Kabupaten Luwu	#Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan											
							Kota Makassar	#Kel. Empoang Jeneponto Regency South Sulawesi ID											
2.00	05	01.00	04	006	Pengembangan Usaha Perdagangan		Kota Makassar			Jumlah Data Perizinan Minuman Beralkohol dan Bahan Berbahaya	5 Data	Tesedianya Data Pelaku Usaha Bahan Berbahaya dan Minuman Beralkohol	100 %	80,630,000.0	90,630,000.0	Dinas Perdagangan			
2.00	05	01.00	04	008	Pengelolaan Gedung Ballroom CCC		Kota Makassar			Jumlah Penyewaan Gedung Ballroom CCC	25 Penyewaan	Termanfaatnya Fasilitas Gedung Ballroom CCC	100 %	521,000,000.0	521,863,125.0	Dinas Perdagangan			
2.00	05	01.00	04	009	Pengelolaan Pusat Distribusi Regional (PDR) Makassar		Kota Makassar			Jumlah Pelaku Usaha Yang Berpartisipasi	10 Pelaku Usaha	Termanfaatnya Sarana dan Prasarana di PDR Makassar	100 %	35,300,000.0	45,300,000.0	Dinas Perdagangan			
2.00	05	01.00	04	012	Pengembangan Pasar Tradisional Modern Pare-Pare Jompie		Kota Pare-Pare Kota Parepare			Jumlah Pelaku Usaha yang Berpartisipasi	6 Pelaku Usaha	Terciptanya Kelancaran Arus Barang Pokok dan Strategi	100 %	43,700,000.0	43,700,000.0	Dinas Perdagangan			
2.00	05	01.00	04	013	Penyusunan Data Base Sarana Perdagangan		24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Database Perdagangan	5 Database	Termanfaatnya Database Perdagangan	100 %	82,300,000.0	82,300,000.0	Dinas Perdagangan			
2.00	05	01.00	04	016	Rapat Koordinasi dan Identifikasi Bapak Menjelang HBKN		Kota Makassar			Jumlah Peserta Rakor dan Identifikasi Bapak	55 Peserta	Terjaminnya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bapak di Sulawesi Selatan	100 %	89,500,000.0	89,500,000.0	Dinas Perdagangan			

2.00	05	01.00	08		PROGRAM PENGEMBANGAN CITRA PRODUK					Peningkatan jumlah pemasaran komoditi ekspor	15 Jenis				200,453,320.0	207,882,978.0	Dinas Perdagangan		
										Peningkatan jumlah informasi pemasaran komoditi ekspor	15 Informasi								
										Peningkatan jumlah lembaga kerjasama promosi produk perdagangan	10 Lembaga								
2.00	05	01.00	08	001	Peningkatan Pemasaran Komoditi Ekspor			24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Jenis Komoditi yang di Identifikasi	15 Jenis	Terciptanya Komoditi yang Berkualitas	100 %	200,453,320.0	207,882,978.0	Dinas Perdagangan		
2.00	05	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %				2,289,419,457.0	2,374,275,159.93	Dinas Perdagangan		
2.00	05	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Tamalate, Kalurahan Maccini Sombala Kota Makassar		Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	5 Jenis	266,692,000.0	266,692,000.0	Dinas Perdagangan			
2.00	05	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. tamalate kel maccini sombala. Kota Makassar		Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	5 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	5 Unit	20,000,000.0	30,000,000.0	Dinas Perdagangan			
										Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	11 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	11 Unit						
2.00	05	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			kec tamalate kel maccini sumbala		Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	36 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	1,228,800,000.0	1,228,800,000.0	Dinas Perdagangan			
								Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar											
2.00	05	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar		Jumlah ATK yang tersedia	60 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	433,500,000.0	433,500,000.0	Dinas Perdagangan			

2.00	05	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	20,177,457.0	50,177,461.93	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar				Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	10 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	45,250,000.0	45,250,000.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kota Makassar dan Luar Prov.Sulawesi Selatan Kota Makassar				Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	95,000,000.0	95,000,000.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kota Makassar dan Luar Prov.Sulawesi Selatan Kota Makassar				Jumlah perjalanan dinas	25 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	25 Orang	180,000,000.0	224,855,698.0	Dinas Perdagangan	
<b>2.00</b>	<b>05</b>	<b>01.00</b>	<b>51</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>							<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>				<b>802,615,092.56</b>	<b>832,363,445.56</b>	<b>Dinas Perdagangan</b>	
2.00	05	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar				Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	90,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar				Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	15 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	90,000,000.0	109,748,353.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	16 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	610,800,000.0	610,800,000.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	16 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	11,815,092.56	11,815,092.56	Dinas Perdagangan	

2.00	05	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %				467,995,882.0	485,341,815.0	Dinas Perdagangan		
2.00	05	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Kota Makassar Kota Makassar				Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	120 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	82,058,359.0	82,058,359.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar				Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	305,200,000.0	322,545,933.0	Dinas Perdagangan	
												Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				
												Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	2 Dokumen				
												Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	7 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	7 Dokumen				
2.00	05	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	70,737,523.0	70,737,523.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar				Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	5,000,000.0	5,000,000.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar				Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %	5,000,000.0	5,000,000.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					% ASN berkinerja sangat baik	100 %				295,869,100.0	306,835,276.0	Dinas Perdagangan		



2.00	05	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar			Jumlah Aparat OPD yang mengelola administrasi kepegawaian nya	5 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	1,000,000.0	1,000,000.0	Dinas Perdagangan	
											Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %				
2.00	05	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	250 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	146,800,000.0	157,766,176.0	Dinas Perdagangan	
2.00	05	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	260 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	148,069,100.0	148,069,100.0	Dinas Perdagangan	
2.00	0				Perindustrian													
2.00	0	01.00			Dinas Perindustrian										22,925,714,982.84	24,295,946,418.91		
2.00	06	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI (Prioritas)	Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru dan Pengembangan Destinasi Wisata	Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru			Jumlah sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukannya	2 Sentra				7,350,000,000.0	7,600,000,000.0	Dinas Perindustrian	
										Jumlah kawasan pergudangan yang tertata	2 Kawasan							
										% Peningkatan produksi industri potensial (Prioritas)	10 %							
2.00	06	01.00	01	005	Pengembangan dan pembinaan sentra industri hasil hutan			Kabupaten Luwu	#Jl. Lasangnga Lompoe Bacukiki Kota Pare-Pare		jumlah sentra industri hasil hutan yang dibentuk dan dibina	2 sentra	meningkatnya jumlah dan kualitas sentra industri hasil hutan	2 sentra	250,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Perindustrian	
								Kabupaten Takalar	#kelurahan pappa Pattalassang Takalar Regency South Sulawesi									
								Kota Parepare										



2.00	06	01.00	01	008	Pengembangan dan pembinaan sentra industri kapal rakyat			Kabupaten Bulukumba	#Desa bontoloe North Galesong Takalar Regency South Sulawesi			jumlah sentra industri kapal rakyat yang dibentuk dan dibina	3 sentra	meningkatnya jumlah dan kualitas sentra industri kapal rakyat	3 sentra	250,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Perindustrian		
								Kabupaten Kepulauan Selayar	#Kabupaten Kepulauan Selayar Islands Regency South Sulawesi ID											
								Kabupaten Takalar												
								Provinsi Sulawesi Selatan												
2.00	06	01.00	01	009	Pengembangan dan Pembinaan Sentra Industri Agro			Provinsi Sulawesi Selatan				jumlah sentra industri agro yang dibina dan dikembangkan	5 sentra	meningkatnya jumlah dan kualitas sentra industri agro	5 sentra	900,000,000.0	1,000,000,000.0	Dinas Perindustrian		
2.00	06	01.00	01	010	Pengembangan dan Pembinaan Sentra Industri Kerajinan dan Aneka			Kabupaten Sidenreng Rappang				jumlah sentra industri kerajinan dan aneka yang dibina dan dikembangkan	3 sentra	meningkatnya jumlah dan kualitas sentra industri kerajinan dan aneka	3 sentra	500,000,000.0	600,000,000.0	Dinas Perindustrian		
								Kabupaten Tana Toraja												
								Kabupaten Toraja Utara												
								Kota Makassar												
2.00	06	01.00	01	015	Penataan dan Pengembangan Kawasan Industri			Kabupaten Bantaeng	#Kecamatan Awangpone dan Kecamatan Tanete Riattang Timur Bone Regency South Sulawesi ID			jumlah kawasan industri yang dibentuk dan dikembangkan	1 kawasan	meningkatnya pemanfaatan kawasan industri sebagai kawasan baru pertumbuhan ekonomi daerah	1 kawasan	5,000,000,000.0	5,000,000,000.0	Dinas Perindustrian		
								Kabupaten Barru	#Kel. Lappa Lappa Sinjai Utara Kabupaten Sinjai			Jumlah perizinan kawasan industri yang dilaksanakan	1 perizinan	Meningkatnya perizinan kawasan industri	1 kawasan					
								Kabupaten Bone	#kelurahan denuang Ujung Loe Bulukumba Regency South Sulawesi											
								Kabupaten Bulukumba												
								Kabupaten Maros												





2.00	06	01.00	03	007	Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir			Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	#Kec. Bangkala dan Kec. Arungkeke			jumlah IKM kimia hilir yang dibangun dan dikembangkan	10 IKM	meningkatnya kualitas IKM kimia hilir	10 IKM	350,000,000.0	350,000,000.0	Dinas Perindustrian	
								Provinsi Sulawesi Selatan											
2.00	06	01.00	03	012	Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional, nasional dan internasional industri ITEA			Kota Makassar				jumlah IKM ITEA yang mengikuti gelar dan akses produk	5 IKM	meningkatnya akses produk IKM ITEA melalui pameran	1 pameran	350,000,000.0	375,000,000.0	Dinas Perindustrian	
								Luar Provinsi Sulawesi Selatan											
								Provinsi Sulawesi Selatan											
2.00	06	01.00	03	014	Pameran produk ikm pada event daerah, Nasional dan Internasional			Luar Provinsi Sulawesi Selatan				jumlah Ikm yang produknya terpromosikan	5 IKM	Terlaksananya pameran produk IKM pada event daerah dan nasional	1 pameran	350,000,000.0	350,000,000.0	Dinas Perindustrian	
								Provinsi Sulawesi Selatan											
2.00	06	01.00	03	015	Pembinaan dan Pengembangan industri kecil dan menengah			Provinsi Sulawesi Selatan	# Berada di pinggir jalan poros Belopa-Makassar dekat dengan Kantor Palang Merah Kecamatan Suli desa Buntu Kunyi Suli			jumlah IKM yang dibangun dan dikembangkan	10 IKM	Meningkatnya kualitas dan mutu produk IKM	10 produk	150,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Perindustrian	
									#11 Kecamatan										
									#12 Kecamatan Enrekang Regency South Sulawesi ID										
									#Desa Timusu, Kec. Liliraja Soppeng Regency South Sulawesi ID										
									#Hotel Kenari 65 Jalan Jend. Sudirman Cappa Galung										
									#kecamatan lamuru Bone Regency South Sulawesi ID										
2.00	06	01.00	03	016	pembinaan dan pembimbingan kelompok pengrajin industri			Kota Makassar	#11 Kecamatan			jumlah kelompok pengrajin industri yang dibangun dan dibimbing	5 kelompok pengrajin	meningkatnya kualitas kelompok pengrajin industri melalui pelatihan	1 pelatihan	300,000,000.0	325,000,000.0	Dinas Perindustrian	



									#Desa Kahayya Kindang Kindang Bulukumba Regency													
									#Kabupaten Bantaeng Bantaeng Sub-District Bantaeng Regency South Sulawesi													
									#Kec. Sajoangin g Sajoangin Wajo Regency South Sulawesi													
									#Kecamatan Baraka, Enrekang, Cendana & Maiwa Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan													
									#Kecamatan Baroko & Kecamatan Masalle Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan													
									#Kecamatan Bontosikuyu Selayar Islands Regency South Sulawesi ID													
									#Kecamatan Cendana Kec. Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan													
									#Kelompok KSM Kec. Kalaena Kalaena East Luwu Regency South Sulawesi													
									#Kelompok Solata Kec. Angkona Angkona East Luwu Regency South Sulawesi													
									#UPTD Sentra IKM													



									#UPTD Sentra IKM Pangan Kota Palopo											
2.00	06	01.00	03	035	Pembinaan dan pengembangan industri hilirisasi hasil kehutanan			Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah IKM hilirisasi hasil kehutanan yang dibina	3 IKM	meningkatnya kualitas produk industri hilirisasi hasil kehutanan	3 produk	300,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Perindustrian			
2.00	06	01.00	04		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI					Jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan	1 Industri			2,600,000,000.0	2,800,000,000.0	Dinas Perindustrian				
										Jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar	1 Unit									
2.00	06	01.00	04	002	Pembinaan kemampuan teknologi industri alat angkut			Kota Makassar			jumlah IKM alat angkut yang dibina	50 IKM	Meningkatnya kualitas IKM alat angkut melalui pelatihan	2 Pelatihan	200,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Perindustrian			
								Provinsi Sulawesi Selatan												
2.00	06	01.00	04	003	Klinik Teknologi			Kota Makassar			Jumlah IKM yang mengakses klinik teknologi	25 IKM	meningkatnya kemampuan teknologi industri IKM setelah berkonsultasi di klinik teknologi	25 IKM	150,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Perindustrian			
								Provinsi Sulawesi Selatan												
2.00	06	01.00	04	004	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Elektronika dan Informatika			Kota Makassar	#Kecamatan Benteng Benteng Selayar Regency South Sulawesi		jumlah IKM elektronika dan informatika yang dibina	20 IKM	Meningkatnya kualitas IKM elektronika dan informatika yang dibina	20 IKM	150,000,000.0	150,000,000.0	Dinas Perindustrian			
								Provinsi Sulawesi Selatan	#Kota Makassar Makassar City South Sulawesi											
									#Semua Kecamatan Sinjai Regency South Sulawesi ID											

2.00	06	01.00	04	007	Pelayanan administrasi perkantoran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) logam, alsintan dan tekstil			Kabupaten Enrekang				jumlah UPTD Logam, tekstil dan alsintan yang dilayani administrasi perkantorannya	3 UPTD	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran UPTD logam, tekstil dan alsintan	12 pelayanan	300,000,000.0	300,000,000.0	Dinas Perindustrian
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Wajo										
								Kota Makassar										
								Kota Parepare										
2.00	06	01.00	04	008	Pelayanan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) logam dan alsintan			Kabupaten Sidenreng Rappang				Jumlah IKM yang dilayani di UPTD Logam	20 IKM	Meningkatnya akses pelayanan UPTD Logam	20 Akses pelayanan	750,000,000.0	775,000,000.0	Dinas Perindustrian
								Kota Makassar										
								Kota Parepare										
2.00	06	01.00	04	009	Pelayanan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tekstil			Kabupaten Enrekang				jumlah IKM yang dilayani di UPTD Tekstil	25 IKM	meningkatnya akses pelayanan UPTD tekstil ke IKM	25 Akses pelayanan	900,000,000.0	925,000,000.0	Dinas Perindustrian
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Wajo										
2.00	06	01.00	04	011	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Tekstil dan Produk Tekstil			Kota Makassar				jumlah IKM tekstil dan sutera yang dibina	25 IKM	meningkatnya kemampuan teknologi IKM tekstil dan produk tekstil melalui pelatihan	2 pelatihan	150,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Perindustrian
								Provinsi Sulawesi Selatan										
<b>2.00</b>	<b>06</b>	<b>01.00</b>	<b>50</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>							<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>4,533,714,982.84</b>	<b>4,952,946,418.91</b>	<b>Dinas Perindustrian</b>
2.00	06	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			kantor dinas perindustrian prov sulsel kel. maccini sombala Kota Makassar				Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	3 Jenis	508,714,982.84	537,946,418.91	Dinas Perindustrian
2.00	06	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			kantor dinas perindustrian prov sulsel kel. maccini sombala Kota Makassar				Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	4 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	4 Unit	100,000,000.0	110,000,000.0	Dinas Perindustrian



2.00	06	01.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas			kota makassar Kota Makassar			Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan rumah jabatan/ rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	150,000,000.0	160,000,000.0	Dinas Perindustrian	
2.00	06	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kabupaten Enrekang			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	13 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	200,000,000.0	210,000,000.0	Dinas Perindustrian	
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Wajo										
								Kota Makassar										
								Kota Parepare										
2.00	06	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			kota makassar Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	10 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	70,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Perindustrian	
2.00	06	01.00	51	007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			kota makassar Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	10 Unit	Ketersediaan Perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas sesuai kebutuhan	100 %	52,000,000.0	52,000,000.0	Dinas Perindustrian	
2.00	06	01.00	51	008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			kota makassar Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	9 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	50,000,000.0	55,000,000.0	Dinas Perindustrian	
2.00	06	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			kec. tamalate kel. maccini Sombala Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	3 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	75,000,000.0	80,000,000.0	Dinas Perindustrian	
2.00	06	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			kec. tamalate kel. maccini Sombala Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	6 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100,000,000.0	110,000,000.0	Dinas Perindustrian	
2.00	06	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			kec. tamalate kel. maccini Sombala Kota Makassar			Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	3 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	24,000,000.0	30,000,000.0	Dinas Perindustrian	

												Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	12 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	100 %				
2.00	06	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA				% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %						585,000,000.0	730,000,000.0	Dinas Perindustrian	
2.00	06	01.00	52	01	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			kota makassar Kota Makassar			Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	100 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan		60,000,000.0	70,000,000.0	Dinas Perindustrian	
2.00	06	01.00	52	02	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen		150,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Perindustrian	
								Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	1 Dokumen					
								Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	0 Dokumen					
											Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	4 Dokumen					
2.00	06	01.00	52	03	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK			Kota Makassar			Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	24 Usulan Kegiatan	Ketersediaan Usulan Kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK	5 Laporan		75,000,000.0	100,000,000.0	Dinas Perindustrian	
								Luar Provinsi Sulawesi Selatan											
								Provinsi Sulawesi Selatan											
2.00	06	01.00	52	04	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			Kota Makassar			Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	12 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	100 %		150,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Perindustrian	

							Provinsi Sulawesi Selatan					Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	3 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %				
2.00	06	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan		Kota Makassar					Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	80,000,000.0	85,000,000.0	Dinas Perindustrian	
2.00	06	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun		Kota Makassar					Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	60,000,000.0	65,000,000.0	Dinas Perindustrian	
2.00	06	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Makassar					Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	12 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %	10,000,000.0	10,000,000.0	Dinas Perindustrian	
<b>2.00</b>	<b>06</b>	<b>01.00</b>	<b>53</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>						<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>	<b>100 %</b>			<b>136,000,000.0</b>	<b>136,000,000.0</b>	<b>Dinas Perindustrian</b>		
2.00	06	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		kec. tamalate kel. maccini sombala Kota Makassar					Jumlah Aparat OPD yang mengelola administrasi kepegawaian nya	72 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	15,000,000.0	15,000,000.0	Dinas Perindustrian	
												Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	72 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %				
2.00	06	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya		kec. tamalate kel. maccini sombala Kota Makassar					Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	72 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Perindustrian	
2.00	06	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu		Kota Makassar					Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	72 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	46,000,000.0	46,000,000.0	Dinas Perindustrian	
							Provinsi Sulawesi Selatan												
2.00	06	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		kec. tamalate kel. maccini sombala Kota Makassar					Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	72 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	72 Orang	25,000,000.0	25,000,000.0	Dinas Perindustrian	
<b>2.00</b>	<b>0</b>				<b>Transmigrasi</b>														

2.00	07	01.00			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi										16,632,013,024.26	16,876,080,996.28		
2.00	07	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI				% Penempatan Transmigrasi	100 %					796,200,000.0	796,200,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.00	07	01.00	01	001	Penyusunan Data Base Ketransmigrasian			Kabupaten Luwu			Peta dan Data Base Ketransmigrasian	2 Dokumen	Sebagai dasar penyusunan program kegiatan ketransmigrasian	100 %	153,200,000.0	153,200,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Soppeng										
								Kabupaten Tana Toraja										
								Kabupaten Toraja Utara										
								Kabupaten Wajo										
2.00	07	01.00	01	002	Bimbingan Teknis Ketransmigrasian				#Lokasi SUPI Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan ID		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	80 Orang	Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan ketrampilan aparatur transmigran dibidang perencanaan kawasan, bidang penataan persebaran penduduk dan bidang pengembangan sapsras kawasan transmigrasi	100 %	84,000,000.0	84,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
								Kabupaten Luwu	#Rantepao Toraja Utara Rantepao North Toraja Regency South Sulawesi									
								Kabupaten Luwu Timur										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Soppeng										

							Kabupaten Tana Toraja											
							Kabupaten Toraja Utara											
							Kabupaten Wajo											
2.00	07	01.00	01	003	Penyusunan Peta Awal Pembangunan Ketransmigrasian		Kabupaten Luwu Timur				Data peta awal tata ruang pembangunan pemukiman transmigrasi	1 Dokumen	Dasar pembangunan permukiman transmigrasi	100 %	65,000,000.0	65,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Kabupaten Luwu Utara											
							Kabupaten Pinrang											
							Kabupaten Sidenreng Rappang											
							Kabupaten Soppeng											
							Kabupaten Tana Toraja											
							Kabupaten Toraja Utara											
							Kabupaten Wajo											
2.00	07	01.00	01	005	Inventarisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Lokasi Transmigrasi		Kabupaten Luwu				Data dan informasi kebutuhan sarana prasarana lokasi transmigrasi	1 Dokumen	Sebagai dasar penyusunan kebutuhan sarana prasarana lokasi transmigrasi	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Kabupaten Luwu Timur											
							Kabupaten Luwu Utara											
							Kabupaten Pinrang											
							Kabupaten Sidenreng Rappang											
							Kabupaten Soppeng											
							Kabupaten Tana Toraja											
							Kabupaten Wajo											
2.00	07	01.00	01	006	Pembinaan Usaha Ekonomi Lokasi Transmigrasi						Pembinaan pengembangan potensi usaha ekonomi warga transmigrasi	3 Lokasi	Meningkatnya pengetahuan aparaturnya ketransmigrasian kabupaten dalam pengembangan potensi usaha ekonomi di lokasi transmigrasi	100 %	70,000,000.0	70,000,000.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							Kabupaten Luwu											





							Kabupaten Sidenreng Rappang															
							Kabupaten Soppeng															
							Kabupaten Tana Toraja															
							Kabupaten Toraja Utara															
							Kabupaten Wajo															
2.00	07	01.00	01	010	Perwujudan Ruang Lokasi Transmigrasi							Data dan informasi perwujudan ruang lokasi transmigrasi	1 Dokumen	Sebagai dasar pembangunan permukiman transmigrasi	100 %	65,000,000.0	65,000,000.0		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
							Kabupaten Luwu Timur															
							Kabupaten Luwu Utara															
							Kabupaten Sidenreng Rappang															
							Kabupaten Soppeng															
							Kabupaten Tana Toraja															
							Kabupaten Wajo															
2.00	07	01.00	01	013	Klarifikasi Lokasi Transmigrasi		Kabupaten Luwu					Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	6 Lokasi	Sebagai dasar penerbitan sertifikasi lahan transmigrasi	100 %	123,000,000.0	123,000,000.0		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
							Kabupaten Luwu Timur															
							Kabupaten Luwu Utara															
							Kabupaten Pinrang															
							Kabupaten Sidenreng Rappang															
							Kabupaten Soppeng															
							Kabupaten Tana Toraja															
							Kabupaten Wajo															
2.00	07	01.00	01	014	Sosialisasi Sistem Penilaian Transmigran dan Pembina UPT Teladan		Kabupaten Luwu					Jumlah aparatur ketransmigrasian yang mengikuti sosialisasi	60 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur ketransmigrasian tentang tatacara penilaian transmigran dan pembina upt teladan	100 %	42,000,000.0	42,000,000.0		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			



								Kabupaten Jeneponto	# East Bassiang South Ponrang Luwu Regency										
								Kabupaten Kepulauan Selayar	# Lampuara South Ponrang Luwu Regency										
								Kabupaten Luwu	# Mario Ponrang Luwu Regency										
								Kabupaten Luwu Timur	# Paconne North Belopa Luwu Regency										
								Kabupaten Luwu Utara	# South Ponrang Luwu Regency South Sulawesi										
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	# South Salupare Mang Kamanre Luwu Regency										
								Kabupaten Pinrang	# South Senga Belopa Luwu Regency										
								Kabupaten Sinjai	# Tamuku Bone-Bone North Luwu Regency										
								Kabupaten Takalar	# Tirowali Ponrang Luwu Regency										
								Kabupaten Wajo	#(Cahaya Labuleng, Kelurahan Akkajeng kecamatan Sajjoanging) (kelompok Aliansi Buriko Raya, Buriko kecamatan Pitumpanua) Wajo Regency South Sulawesi ID										
									#Arungkeke Pallantikang Arungkeke Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan										
									#Bungeng Kec. Batang Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan										
									#DESA BALANG TAROWANG, DUSUN KASSI-KASSI Tarowang Jeneponto Regency South Sulawesi										

									#Desa Baruga Kecamatan Pajukukang Bantaeng Regency South Sulawesi ID									
									#Desa Benteng Kec. Malangke Benteng Malangke North Luwu Regency									
									#Desa Benteng, Kec. Malangke Benteng Malangke North Luwu Regency									
									#DESA BONTOJAI Tamalatea Jeneponto Regency South Sulawesi									
									#DESA BONTOSUNGG U Tamalatea Jeneponto Regency South Sulawesi									
									#Desa Bontosunggu, Desa Borongtala Tamalatea Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan									
									#Desa Borong Loe Kecamatan Pajukukang Bantaeng Regency South Sulawesi ID									
									#DESA BORONGTALA Tamalatea Jeneponto Regency South Sulawesi									
									#Desa Bungaiya Bontomatene Selayar Regency South Sulawesi									
									#desa carigading Cari Gading Awangpone Bone Regency									

									#Desa Garassikang Bangkala Bar. Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan										
									#Desa Jenne Maeja South Ponrang Luwu Regency South Sulawesi										
									#desa laikang Mangara Bombang Takalar Regency South Sulawesi										
									#Desa laikang Mangara Bombang Takalar Regency South Sulawesi										
									#desa lamurukung Tellu Siattinge Bone Regency South Sulawesi										
									#Desa Lumpangan Kec. Pajukukang Bantaeng Regency South Sulawesi ID										
									#Desa Mario Ponrang Luwu Regency South Sulawesi										
									#Desa Munte Kecamatan Tanahlili Munte Bone-Bone North Luwu Regency										
									#Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Bantaeng Regency South Sulawesi ID										
									#desa pancana kec tanete rilau Barru Regency South Sulawesi ID										
									#DESA PAO Tarowang Jeneponto Regency South Sulawesi										



								#Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Duampanua Pinrang Regency South Sulawesi											
								#Kecamatan Lasinrang, Kabupaten Pinrang Pinrang Regency South Sulawesi ID											
								#kecamatan mappakasunggu, kabupaten takalar Mappakasunggu Takalar Regency South Sulawesi											
								#Kecamatan Pulau Sembilan Sinjai Regency South Sulawesi ID											
								#Kecamatan wotu dan kecamatan burau East Luwu Regency South Sulawesi ID											
								#Kel. Songka Kec. Wara Selatan, Kel. Benteng Kec. Wara Timur, Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur, Kel. Pontap Kec. Wara Timur, Kel. Temmalebba Kec. Bara											
								#Kelompok Harapan Baru, Kelompok Mamminasae, Kelompok Fajar Utama,Desa Pattiolokka Kecamatan Keera Wajo Regency South Sulawesi ID											
								#KELURAHAN BONTORANNU Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi											



									#Kelurahan Bontosunggu Bissappu Bantaeng Regency South Sulawesi											
									#Kelurahan pallantikang Pallantikang Bantaeng Sub-District Bantaeng Regency											
									#KELURAHAN PANTAI BAHARI Bangkala Jeneponto Regency South Sulawesi											
									#mandalle (klp bahari sejahtera)											
									#Pantai Bahari Bangkala Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan											
									#Pao Tarawang Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan											
									#Pulau Barang Caddi Kota makassar Makassar Makassar City South Sulawesi											
									#Pulau Dewakang, Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi ID											
									#pundata baji Labakkang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Sulawesi Selatan											
									#segeri (klp cinta laut, putra gusung 02, sipadecengngi, segar jaya)											
									#Tasiwalie Suppa Pinrang Regency South Sulawesi											

2.00	08	01.00	01	009	Inovasi Teknologi pengembangan usaha Garam			Kabupaten Kepulauan Selayar			Jumlah Inovasi Teknologi pengembangan usaha garam	35 unit	Meningkatnya Nilai hilirisasi produk garam	10 %	1,934,000,000.0	2,508,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
								Kabupaten Takalar										
								Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kabupaten Jeneponto										
2.00	08	01.00	01	013	Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional Pelabuhan Perikanan (UPT Provinsi) (DAK)			Kabupaten Bone	#Pajukukang Bontoa Mandai Maros Regency		Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan yang terbangun	5 unit	Meningkatnya nilai hilirisasi produk hasil tangkapan yang telah dibongkar di Pelabuhan Perikanan	3 %	9,000,000,000.0	9,000,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
								Kabupaten Bulukumba	#TPI Maccini Baji									
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										
								Kabupaten Takalar										
2.00	08	01.00	01	016	Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut (DAK)			Kabupaten Barru			Jumlah sarana dan prasarana pokok unit budidaya yang terbangun	0 unit	Meningkatnya kinerja pelayanan teknis budidaya payau dan laut	0 %	2,000,000,000.0	2,000,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
								Kabupaten Bulukumba			Jumlah percontohan budidaya laut	40 unit	Cakupan ketersediaan bibit rumput laut	25 %				
								Desa Pantai Burau Kec. Burau Kabupaten Luwu Timur										
								Kec. Malangke Kabupaten Luwu Utara										
								Kec. Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan										



								#Desa bontomanai,desa Lengese,desa Cikoang,Desa Pattopakkang,Desa Panyangkalang Mangara Bombang Takalar Regency South Sulawesi													
								#labakkang (klpk cambayya 01)													
								#labakkang,bungoro (klp resky, klpk karama 01, klpk mandiri, klpk biringkassi)													
								#Pallengu Bangkala Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan													
								#Pallengu, Bontorannu Bangkala Manggala Kota Makassar													
2.00	08	01.00	01	019	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Peningkatan Kapasitas Nelayan		Kabupaten Barru	# Batangmata Bontomatene Selayar Regency			Jumlah kapal yang dibangun	15 unit	Meningkatnya Nilai hilirisasi produk perikanan tangkap	3 %	9,450,000,000.0	11,000,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan				
							Kabupaten Bone	# Bone Pute South Larompong Luwu Regency			Jumlah sarana dan prasarana alat tangkap	150 unit	Meningkatnya Nilai hilirisasi produk perikanan tangkap	1 %							
							Kabupaten Bulukumba	# Bonto Kamase Hero Lange-Lange Bulukumba Regency			Jumlah alat bantu tangkap	100 piece	Meningkatnya Nilai hilirisasi produk perikanan tangkap	3 %							
							Kabupaten Jeneponto	# Bontoa Mandai Maros Regency													
							Kabupaten Kepulauan Selayar	# Desa Mekar Indah Bontolempangan Buki													
							Kabupaten Luwu	# Doping Doping Penrang													
							Kabupaten Luwu Utara	# Ekatiro Bontotiro Bulukumba Regency													

							Kabupaten Maros	# Gilireng Wajo Regency South Sulawesi										
							Kabupaten Pinrang	# Lamasi Pantai East Walenrang Luwu Regency										
							Kabupaten Sinjai	# Larea-Rea Kec. Pulau IX, Desa Sanjai Kec. Sinjai Timur										
							Kabupaten Takalar	# Lauwa North Belopa Luwu Regency										
							Kabupaten Wajo	# Mangempang Barru Sub-District Barru Regency										
							Kota Makassar	# Marusu Maros Regency South Sulawesi										
								# Mattiro Ujung Liukang Tupabbiring Pangkajene Dan Kepulauan Regency										
								# P. Kondingareng kec.kepulauan sangkarrang Makassar City										
								# Pulau Langkai ID										
								# Pulau Lumulumu ID										
								# Pulau Pajene kang Mattiro Deceng Liukang Tupabbiring										
								# Tarupa Takabonerate Selayar Regency										
								# Tokke Malangke North Luwu Regency										
								#Bulukumba Bulukumba Regency South Sulawesi ID										
								#Desa Baruga Kecamatan Pajukukang Bantaeng Regency South Sulawesi ID										

								#Desa Belopa Kec. Belopa Kelurahan Paku- Paku Belopa Luwu Regency South Sulawesi												
								#Desa Boddia Kec Galesong Kabupaten Takalar Takalar Regency South Sulawesi ID												
								#DESA BONTO UJUNG Tarowang Jeneponto Regency South Sulawesi												
								#Desa Burau Pantai Kecamatan Burau East Luwu Regency South Sulawesi ID												
								#Desa Lampoko Kecamatan Balusu, Desa Lasitae, Pancana, Kel. Tanete Kec. Tanete Rilau Barru Regency South Sulawesi ID												
								#DESA LAMURUKUNG KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE Bone Regency South Sulawesi ID												
								#Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Bantaeng Regency South Sulawesi ID												
								#Desa PAO-Pao, Desa Pancana Tanete Rilau Barru Regency South Sulawesi												

									#Desa Salanjangki Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Gowa Regency South Sulawesi ID												
									#DESA TAROWANG Tarowang Jeneponto Regency South Sulawesi												
									#Desa Tinu, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto Tarowang Jeneponto Regency South Sulawesi												
									#Desa Topejawa, Desa punaga, Desa Laikang, Desa bontoparang Mangara Bombang Takalar Regency South Sulawesi												
									#Desa Wewangriu Kecamatan Malili East Luwu Regency South Sulawesi ID												
									#Dusun Babana Kawali Desa Malangke Kec. Malangke Malangke Malangke North Luwu Regency												
									#Dusun Tapping Desa Tokke Kec. Malangke Tokke Malangke North Luwu Regency												
									#Kabupaten Pinrang Pinrang Regency South Sulawesi ID												
									#Kabupaten Sinjai												

									#Kec. Bonto Tiro Bulukumba Regency South Sulawesi ID														
									#Kec. Herlang Bulukumba Regency South Sulawesi ID														
									#Kec. Mangarabomba ng Desa Cikoang, Kec. Galesong Utara Desa Tamasaju Kec. Galesong Desa Paklakkang, Desa Bontosunggu Takalar Regency South Sulawesi ID														
									#kecamatan bontonopo selatan kabupaten gowa South Bontonopo Gowa Regency South Sulawesi														
									#kecamatan galesong kabupaten takalar Galesong Takalar Regency South Sulawesi														
									#kecamatan galesong selatan kabupaten takalar South Galesong Takalar Regency South Sulawesi														
									#kecamatan galesong utara kabupaten takalar North Galesong Takalar Regency South Sulawesi														
									#Kecamatan Malili dan Kecamatan Wotu East Luwu Regency South Sulawesi ID														





							#Kel. Sumpang Binangae Barru Sub-District Barru Regency South Sulawesi												
							#Kelompok Baji Minasa pulau Lumu Kecamatan Barrang Caddi Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan												
							#Kelompok Cakalang, Pulau Lumu Lumu Kec. Barrang Caddi Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan												
							#kelompok Cimpu Indah Cimpu Suli Luwu Regency												
							#Kelompok Mata tuna Cimpu Suli Luwu Regency												
							#Kelompok Matahari Pagi Bone Pute South Larompong Luwu Regency												
							#Kelompok Minasa Baji, Pulau Lumu Lumu Kecamatan Barrang Caddi Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan												
							#kelompok puncak ombak North Cimpu Suli Luwu Regency												
							#Kelompok samaturu 1, Pulau Barrang Lompo Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan												





								#Luwu Utara North Luwu Regency South Sulawesi ID													
								#mandalle, mattiro bombang,pang kajene,labakka ng (kub masengereng, cahaya balang lompo 01, padang lamun,sahabat sejati, hidup bersama)													
								#Pabiringa Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan													
								#Pabiringa Tanrusampe Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan													
								#Pajukukang Bontoa Mandai Maros Regency													
								#Pallameang (kelompok Ikan layur) Mattiro Sompe Liukang Tupabbiring Pangkajene Dan Kepulauan Regency													
								#Pao Tarowang Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan													
								#Pao, Balangloe Tarowang, Bontoujung, Tino Tarowang Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan													
								#RT 01/ RW 05 Lumpue West Bacukiki Pare- Pare City													
								#Sinjai Utara, Pulau IX													
								#Sinjai Utara, Sinjai Timur, Tellulimpoe													

2.00	08	01.00	01	023	Penguatan pola kemitraan dan promosi produk			Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kota Makassar			Jumlah promosi yang diikuti	2 kegiatan promosi	Meningkatnya hasil produk olahan yang terpasarkan	40 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
											Jumlah kerjasama pada Mitra Usaha Perikanan dalam memasarkan dan menggunakan produk perikanan	1 Mou	Meningkatnya penguatan pola kemitraan pada produk perikanan	40 %				
2.00	08	01.00	01	026	Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan konsumsi dan non konsumsi			Kabupaten Bone	# Bontosunggu Bontoharu Selayar Regency		Jumlah inovasi teknologi produk olahan hasil KP konsumsi dan non konsumsi	50 unit	Meningkatnya Nilai hilirisasi produk olahan	10 %	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
								Kabupaten Bulukumba	# Bukit Harapan Soreang Pare-Pare City									
								Kabupaten Gowa	# Cappa Galung West Bacukiki Pare-Pare City									
								Kabupaten Jeneponto	# Kampung Baru West Bacukiki Pare-Pare City									
								Kabupaten Kepulauan Selayar	# Lakessi Soreang Pare-Pare City									
								Kabupaten Luwu	# Lumpue West Bacukiki Pare-Pare City									
								Kabupaten Luwu Utara	# Mukti Jaya Baebunta North Luwu Regency									
								Kabupaten Maros	# Parak Bontomanai Selayar Regency									
								Kabupaten Sidenreng Rappang	# Tiro Sompe West Bacukiki Pare-Pare City									
								Kabupaten Sinjai	#Biringkassi Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan									
								Kabupaten Soppeng	#Bulukumba Bulukumba Regency South Sulawesi ID									



									#Kel. Rampoang Kec. Bara Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur dan Kel. Battang Kec. Wara Barat										
									#Kel. Tambunan, Kec. Makale Utara										
									#Kelompok Sipakalebbi, Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Wajo Regency South Sulawesi ID										
									#Kelurahan Bojo Baru Mallusetasi Barru Regency South Sulawesi										
									#Kelurahan Bontoa Bontoa Mandai Maros Regency										
									#Kelurahan Buntu Barana Kecamatan Tikala Jl. Buntu Barana Butu Lobo Sesean										
									#Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kappuna Masamba North Luwu Regency										
									#Kelurahan Pantanakan lolo kecamatan kesu Pantanakan Lolo Kesu North Toraja Regency										
									#Kota Makassar Makassar Makassar City South Sulawesi										
									#labakkang (klp bete-bete)										



								#Labakkang, (klp. , An nisa, Balocci Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Sulawesi Selatan												
								#Lembaga Pemasyarakata n Wanita kelas IIA Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Timbuseng Pattallassang Gowa Regency												
								#Lembang Buntu Tangti, Kec. Mengkendek												
								#Pallantikang, Garassikang Bangkala Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan												
								#Pallengu, Bontorannu Bangkala Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan												
								#Pao Tarowang Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan												
								#Pokhlahsar Ukhuwah Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Bontoala Pallangga Gowa Regency												
								#Poklahsar Barokah Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Bontobuddung Tompobulu Gowa Regency												



								Kabupaten Luwu Utara											
								Kabupaten Maros											
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan											
								Kabupaten Pinrang											
								Kabupaten Sidenreng Rappang											
								Kabupaten Sinjai											
								Kabupaten Soppeng											
								Kabupaten Takalar											
								Kabupaten Tana Toraja											
								Kabupaten Toraja Utara											
								Kabupaten Wajo											
								Kota Makassar											
								Kota Palopo											
								Kota Parepare											
								Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, CDK Kabupaten Bantaeng											
2.00	08	01.00	01	033	Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan Hasil Perikanan (DAK)			Kota Parepare			Jumlah bantuan peralatan pengolahan	10 Unit	Peningkatan produksi olahan dari tahun lalu	10 %	3,960,000,000.0	3,960,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan		
								Desa Kanjilo Kec. Barombong Kabupaten Gowa			Jumlah perbaikan bangunan pengolahan unit pengolahan ikan skala mikro dan skala kecil	10 Unit	Peningkatan produksi olahan dari tahun lalu	10 %					
								Desa Tana Jaya Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba			Jumlah pabrik es yang direhabilitasi	5 unit	Peningkatan mutu produk	20 %					
								Kel Lappa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai											
								Kel. Bila Kec. Lalabata Kabupaten Soppeng											
								Kel. Bojo Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru											

								Kel. Panyula Kec. Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone											
								Kel. Patobo Kec. Mattirosomp e Kabupaten Pinrang											
2.00	0 8	01.00	0 1	0 3 4	Pengelolaan unit perbenihan yang sesuai standar mutu			UPTD PBAPL Kabupaten Barru				Jumlah pengendalian kualitas lingkungan perikanan budidaya perbenihan	8 Unit	Jumlah Produksi benih yang menjadi sumber PAD	25 %	474,000,000.0	474,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
												Jumlah sarana dan prasarana perbenihan yang dioperasional kan	8 Unit	Jumlah produksi benih yang diserahkan kemasyarak at	50 %				
												Jumlah induk unggul yang untuk menghasilkan benih	750 Ekor	Jumlah produksi benih untuk diseminasi teknologi budidaya	25 %				
2.00	0 8	01.00	0 2		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							Jumlah produksi perikanan tangkap	374981 Ton			2,398,000,000.0	2,598,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
												Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	5088024 Ton						
												Jumlah produksi garam rakyat	95735.52 Ton						
2.00	0 8	01.00	0 2	0 2 4	Pengelolaan pelabuhan perikanan dalam rangka optimalisasi produksi			UPT Pelabuhan 1 Kabupaten Bone				Jumlah Layanan Operasional di pelabuhan perikanan wilayah 2	5 Unit	Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	10 %	1,000,000,000.0	1,200,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
								UPT Pelabuhan 2 Kabupaten Bulukumba				Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah 1	5 Unit	Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	10 %				
2.00	0 8	01.00	0 2	0 2 5	Koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi Kelautan dan Perikanan			Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kota Makassar				Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi Garam	720 Orang	Peningkatan keterampilan masyarakat pesisir dalam meningkatka n produksi garam	10 %	1,398,000,000.0	1,398,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan	

											Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi olahan	1260 Orang	Peningkatan keterampilan pengolah dalam meningkatkan produksi olahan	10 %					
											Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan budidaya	1260 Orang	Peningkatan keterampilan pembudidaya dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya	25 %					
											Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap	1260 Orang	Peningkatan keterampilan nelayan dalam meningkatkan produksi perikanan tangkap	25 %					
2.00	08	01.00	03	0	PROGRAM PENERAPAN MUTU, PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING					Volume ekspor produk KP	158053.95 Ton				3,270,000,000.0	3,370,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan		
										Nilai ekspor produk KP	411872.38 US\$ Juta								
										Jumlah Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi	28277.77 Ton								
2.00	08	01.00	03	00	Layanan pengujian Laboratorium dalam rangka pemenuhan standar mutu produk dan pemasaran				UPT BPMHPP Kota Makassar		Jumlah sampel Produk Yang dilakukan pengujian mutu	100 Hasil uji mutu	Peningkatan volume dan nilai ekspor	10 %	2,000,000,000.0	2,100,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan		
											Jumlah layanan pemenuhan standar mutu	100 UPI	Peningkatan volume dan nilai ekspor	10 %					
2.00	08	01.00	03	00	Pembinaan Daya Saing Hasil Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Produktif dan Kompetitif serta Sertifikasi Kelayakan Pengolah				Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kota Makassar		Jumlah unit usaha pengolah yang mendapatkan pembinaan daya saing	70 Unit Usaha	Meningkatnya kelayakan unit usaha pengolah dalam mendukung daya saing hasil kelautan	10 %	70,000,000.0	70,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan		
2.00	08	01.00	03	00	Penetapan standar produk perikanan untuk memenuhi persyaratan ekspor				UPT BPMHPP Kota Makassar		Dukungan Fasilitas Persyaratan sertifikasi produk hasil perikanan	70 Unit Usaha	Cakupan produk hasil perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor	25 %	1,200,000,000.0	1,200,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan		

											Dukungan Fasilitas Persyaratan sertifikasi perikanan tangkap	25 Unit Usaha	Cakupan produksi perikanan tangkap yang memenuhi persyaratan ekspor	25 %				
											Dukungan Fasilitas Persyaratan sertifikasi perikanan budidaya	25 Unit Usaha	Cakupan produksi perikanan budidaya yang memenuhi persyaratan ekspor	25 %				
2.00	08	01.00	04	0	PROGRAM PENGAWASAN, KONSERVASI, PENATAAN DAN REHABILITASI PESISIR DAN LAUT				Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	1008321.53 Ha					11,560,000,000.0	11,787,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
									% Penurunan tindakan IUU Fishing	8.03 %								
									Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	40 %								
2.00	08	01.00	04	001	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (DAK)			Kabupaten Bantaeng	# Pao West Malangke North Luwu Regency		Jumlah sarana dan prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	5 unit	Meningkatnya sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya Kelautan dan perikanan	40 %	3,600,000,000.0	3,827,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
								Kabupaten Bone	# Takkalala Malangke North Luwu Regency									
								Kabupaten Jeneponto	#Arungkeke Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan									
								Kabupaten Kepulauan Selayar	#Bontosunggu, Borongtala Tamalatea Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan									
								Kabupaten Luwu Timur	#Desa Batang Tongka Kec Bone Bone Batang Tongka Bone-Bone North Luwu Regency									



									#Kec. Wotu, Kec. Burau, Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan ID										
									#Kecamatan bungin, Kec. Curio, Kec. Buntu Batu, Kec. Malua										
									#Kelompok Maruddanie, desa Keera, Kecamatan Keera, Kelompok Wahana Bahari kelurahan doping, Kecamatan Penrang Wajo Regency South Sulawesi ID										
									#kepulauan sangkarrang Makassar Makassar City South Sulawesi										
									#Pantai Bahari Bangkala Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan										
									#POKMASWAS SALOMATE Kel. Limpomajang Kec. Marioriawa, POKMASWAS LASIMPO, Kel. Kaca, Kec. Marioriawa, POKMASWAS BINTANG 27 Kel. Attang Salo, Kec. Marioriawa Soppeng Regency South Sulawesi ID										
2.00	08	01.00	04	00	02	Pembangunan/Rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil (DAK)		Kabupaten Barru	# Buntu Matabing Larompong Luwu Regency		Jumlah sarana dan prasarana Kawasan Konservasi Perairan daerah	5 unit	Cakupan Luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	10 %	1,700,000,000.0	1,700,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan		



								Kabupaten Jeneponto	# Cimpu Suli Luwu Regency			Jumlah prasarana pulau-pulau kecil	6 unit	Cakupan pulau-pulau kecil yang dikelola	10 %				
								Kabupaten Luwu	# Gusung Kodingarengke ke P. Kodingareng Ujung Tanah										
								Kabupaten Luwu Timur	# North Cimpu Suli Luwu Regency										
								Kabupaten Luwu Utara	# Pulau Langkai ID										
								Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	# Pulau Lumulumu ID										
								Kota Makassar	#Bontorannu Bangkala Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan										
									#Desa Bawalipu Bawalipu Wotu Kabupaten Luwu Timur										
									#desa Pattirolokka kecamatan keera Wajo Regency South Sulawesi ID										
									#kelurahan bira Kota Makassar Sulawesi Selatan ID										
									#Kelurahan Buloa Kota Makassar Sulawesi Selatan ID										
									#Kelurahan Parangloe Kota Makassar Sulawesi Selatan ID										
									#Kelurahan Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan ID										
									#KELURAHAN UNTIA Kota Makassar Sulawesi Selatan ID										
									#Pabiringa Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan										

								#Pao, Balangloe Tarawang Tarawang Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan											
2.00	0 8	01.00	0 4	0 3 1	Pengawasan Terpadu SDKP			Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kota Makassar			Jumlah Peserta Koordinasi teknis Pengawasan dan pengendalian SDKP	120 Orang		10 %	360,000,000.0	360,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan		
											Jumlah Pokmasas yang diberdayakan	30 Kelompok		10 %					
											Jumlah Pengawasan Biota Laut yang dilindungi	3 Jenis	Cakupan luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	10 %					
											Jumlah Lokasi Pengawasan Terpadu	0 Kali Pengawas an	Persentase penurunan tindakan IUU Fishing	0 %					
2.00	0 8	01.00	0 4	0 3 8	Pengelolaan kawasan konservasi, perairan P3K dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan			CDK AJATAPPARE NG Kota Parepare			Jumlah rehabilitasi ekosistem sumberdaya KP	42 Ha	Cakupan luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	10 %	2,100,000,000.0	2,100,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan		
								CDK BOSOWASI Kabupaten Bone			Jumlah pengelolaan dan pembinaan pantai berseri	7 Wilayah	Cakupan luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	10 %					
								CDK Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar			Jumlah Tambatan Perahu didaerah pesisir yang dibangun	5 Unit	Cakupan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	10 %					
								CDK Luwu Raya Kota Palopo											
								CDK MAMMINASA TA Kabupaten Gowa											







							UPT Pelabuhan 2, CDK Wilayah Selatan Kabupaten Bulukumba													
2.00	08	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan		CDK Ajatappareng Kota Parepare				Jumlah ATK yang tersedia	30 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	20 %	1,290,260,218.0	1,300,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan			
							CDK Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar													
							CDK Luwu Raya Kota Palopo													
							CDK Mamminasata Kabupaten Gowa													
							CDK Pangkep Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan													
							Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, UPT BPMPPH Kota Makassar													
							UPT Pelabuhan 1, CDK Bosowasi Kabupaten Bone													
							UPT Pelabuhan 2, CDK Wilayah Selatan Kabupaten Bulukumba													
2.00	08	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman		CDK Ajatappareng Kota Parepare				Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	2 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	20 %	2,068,000,000.0	2,070,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan			
							CDK Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar													
							CDK Luwu Raya Kota Palopo													
							CDK MAMMINASATA Kabupaten Gowa													

								CDK Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan											
								Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, UPT BPMHPP Kota Makassar											
								UPT PBAPL Kabupaten Barru											
								UPT Pelabuhan 1, CDK BOSOWASI Kabupaten Bone											
								UPT Pelabuhan 2, CDK Wilayah Selatan Kabupaten Bulukumba											
2.00	08	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kota Makassar			Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	4 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	20 %	240,000,000.0	260,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan		
2.00	08	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			CDK AJATAPPARENG Kota Parepare			Jumlah perjalanan dinas	133 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	69 Orang	1,201,000,000.0	1,201,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan		
								CDK Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar											
								CDK Luwu Raya Kota Palopo											
								CDK MAMMINASATA Kabupaten Gowa											
								CDK Pangkajene Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan											

							Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, UPT BPMHPP Kota Makassar												
							UPT PBAPL Kabupaten Barru												
							UPT Pelabuhan 1, CDK BOSOWASI Kabupaten Bone												
							UPT Pelabuhan 2, CDK Wilayah Selatan Kabupaten Bulukumba												
2.00	08	01.00	51		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %				3,576,757,000.0	3,674,881,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan		
2.00	08	01.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas		Kota Makassar			Jumlah Unit rumah/jabatan/ rumah dinas yang dipelihara	2 Unit	Ketersediaan rumah jabatan/ rumah dinas dalam kondisi baik	20 %	125,000,000.0	125,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan			
2.00	08	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama		CDK AJATAPPARENG Kota Parepare			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	7 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	20 %	1,507,954,000.0	1,507,954,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan			
							CDK Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar												
							CDK Luwu Raya Kota Palopo												
							CDK MAMMINASATA Kabupaten Gowa												
							CDK Pangkajene Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan												
							Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, UPT BPMHPP Kota Makassar												





2.00	08	01.00	52		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %				1,590,000,000.0	1,600,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan		
2.00	08	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar				Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	0 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	0 Dokumen	850,000,000.0	850,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
												Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	0 Dokumen				
												Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	0 Dokumen				
												Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	0 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	0 Dokumen				
												Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	25 %				
2.00	08	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			Kota Makassar				Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	2 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	20 %	500,000,000.0	500,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
												Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	6 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	20 %				
2.00	08	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kota Makassar				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	6 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	20 %	240,000,000.0	250,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
<b>2.00</b>	<b>08</b>	<b>01.00</b>	<b>53</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>	<b>100 %</b>				<b>303,000,000.0</b>	<b>313,000,000.0</b>	<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>		
2.00	08	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Kota Makassar				Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasinya	210 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	20 %	30,000,000.0	40,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan	

											Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	8 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	20 %					
2.00	08	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	210 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	20 %	273,000,000.0	273,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan		
3.00					<b>Fungsi Penunjang Pemerintahan</b>														
3.00	0				<b>Perencanaan Pembangunan</b>														
3.00	01	01.00			<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>										28,327,537,926.0	29,033,078,272.67			
3.00	01	01.00	01		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Prioritas)	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan, Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan			%Ketersediaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan (Prioritas)	100 %				12,098,959,455.0	12,202,999,126.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
										% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD (Prioritas)	100 %								
										% Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD (Prioritas)	97.5 %								
3.00	01	01.00	01	003	Penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah Dokumen RKPD yang tersusun dan ditetapkan menjadi Perkada	2 Dokumen	Tersusunnya Dokumen RKPD Pokok dan Perubahan RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA PPAS	100 %	344,000,000.0	356,728,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
3.00	01	01.00	01	004	Penyelenggaraan Musrenbang dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah			Kota Makassar			Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	350 Orang	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagai Proses Bottom Up	100 %	344,906,000.0	357,667,522.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		



3.00	01	01.00	01	008	Forum Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi			Kota Makassar			Jumlah dokumen hasil Forum Regional Sulawesi	1 Dok Usulan	Jumlah dokumen hasil forum regional Sulawesi	100 %	353,252,397.0	106,811,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	01.00	01	009	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Kota Makassar			Jumlah dokumen evaluasi RPJPD dengan RPJMN/RPJPD dan RTRWN/RTRWP	0 Dok	Tersedianya dokumen hasil evaluasi dokumen RPJPD (Provinsi dan 24 Kab/Kota)	0 %	391,800,000.0	406,296,600.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
											Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen RPJMD (Provinsi dan 24 Kab/Kota)	0 Dok	Tersedianya dokumen hasil evaluasi RPJMD Provinsi dan Kab/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan	0 %			
											Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen RKPD (Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kab/Kota)	25 Dok	Tersedianya dokumen hasil evaluasi RKPD Provinsi dan Kab/Kota Se- Provinsi Sulawesi Selatan	100 %			
3.00	01	01.00	01	000	Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran	2 Laporan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran sebagai pedoman perencanaan tahun berikutnya	2 Laporan	515,825,000.0	534,910,525.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	01.00	01	001	Penyusunan Usulan Pendanaan dan Konsultasi Program Kegiatan Dekonsentrasi, TP dan DAK			Kota Makassar			Jumlah Laporan Usulan Pendanaan Dana Dekonsentrasi, TP dan DAK	2 Laporan	Tersusunnya Laporan sebagai bahan usulan pendanaan APBNn	2 Laporan	195,000,000.0	202,215,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	01.00	01	002	Asistensi Usulan Penganggaran Pembangunan			Kota Makassar			Jumlah OPD yang diasistinsi Rencana Kebutuhan Anggarannya	52 OPD	Terselenggaranya Asistinsi untuk mewujudkan penganggaran yang berkualitas	100 %	5,000,000.0	5,185,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	01.00	01	003	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV)			Kota Makassar			Jumlah sistem aplikasi yang dikelola dan dikembangkan	1 Aplikasi	Terpeliharanya sistem e-Monev	100 %	144,200,000.0	149,535,400.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3.00	01	01.00	01	015	Penyusunan KUA dan PPAS APBD Prov. Sulsel			Kota Makassar			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun dan disepakati	2 Dokumen	Tersusunnya KUA PPAS sebagai pedoman penyusunan APBD tahun berjalan dan perubahan	2 Dokumen	400,000,000.0	485,004,900.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	01.00	01	016	Pengumpulan updating dan Analisis Informasi Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan			Kota Makassar			Jumlah Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah	5000 informasi	Terwujudnya Integrasi, Komunikasi, Sinkronisasi Data dan Informasi untuk mendukung Perencanaan & Pengendalian Pembangunan	100 %	108,000,000.0	111,996,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	01.00	01	017	Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan APBD, Dekon, TP, dan DAK			Kota Makassar			Jumlah Dokumen Hasil evaluasi Dokumen APBD Provinsi	4 Dok	Konsistensi antara KUA PPAS dengan APBD, serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan	100 %	193,500,000.0	200,659,500.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
											Jumlah laporan triwulan hasil evaluasi penyelenggaraan Dekosentrasi	4 Laporan	Pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan jenis belanja serta perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi	100 %			

											Jumlah laporan triwulanan hasil evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan (24 Kab/Kota)	4 Laporan	Pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan jenis belanja serta perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi	100 %				
											Jumlah laporan triwulanan hasil evaluasi penyelenggaraan DAK (24 Kab/Kota)	4 Laporan	Pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan jenis belanja serta perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi	100 %				
3.00	01	01.00	01	019	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah dokumen renstra opd yg di evaluasi (56 Perangkat Daerah)	0 OPD	Konsistensi antara Renstra PD dengan RPJMD, serta kesesuaian antara target dengan capaian pembangunan daerah dan indikator kinerja yang telah ditetapkan	0 %	87,000,000.0	90,219,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
											Jumlah dokumen Renja opd yg di evaluasi (56 Perangkat Daerah)	56 OPD	Konsistensi antara RENJA PD dengan RKPD, serta kesesuaian antara target dengan capaian pembangunan daerah dan indikator kinerja yang telah ditetapkan	100 %				

3.00	01	01.00	01	020	Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama Antar Daerah dan Badan/Lembaga Luar Negeri			Kota Makassar			Jumlah dokumen evaluasi kerjasama antar daerah dan Badan/Lembaga Luar Negeri	1 Laporan	Terlaksananya benchmarking ke dalam atau keluar negeri	100 %	258,000,000.0	267,546,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
											Jumlah dokumen hasil evaluasi dalam negeri /badan/lembaga luar negeri	0 Dok	Tersedianya data hasil evaluasi kerjasama daerah dengan pemerintah dalam negeri/badan /lembaga luar negeri	0 %				
3.00	01	01.00	01	021	Penyusunan Grand Desain Kerjasama Daerah			Kota Makassar			Jumlah dokumen grand desain kerjasama daerah	1 Dok	Tersusunnya dokumen grand desain kerjasama daerah	100 %	148,809,058.0	0.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	01	022	Fasilitasi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan			Kota Makassar			Rekomendasi dan pertimbangan kepada Gubernur Sulawesi	12 dokumen	Terwujudnya percepatan pembangunan di Sulawesi Selatan	100 %	8,279,817,000.0	8,586,170,229.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	02		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU (Prioritas)</b>	<b>Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru dan Pengembangan Destinasi Wisata</b>	<b>Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru</b>			<b>Jumlah Kawasan yang difasilitasi perencanaan dan pengembangannya (Prioritas)</b>	<b>3 Kawasan</b>				<b>690,872,388.0</b>	<b>716,479,080.23</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
3.00	01	01.00	02	001	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			Kota Makassar				0	% kesesuaian antar RTR	100 %	164,459,237.0	170,588,642.64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
											Jumlah rekomendasi pengembangan pusat pertumbuhan baru	4 rekomendasi	% capaian pengembangan pusat pertumbuhan baru	100 %				
											Jumlah rekomendasi penyelenggaraan penataan ruang	4 rekomendasi	% kesesuaian rencana pembangunan daerah Prov dan Kab/ Kota dengan RTR	100 %				



3.00	01	01.00	02	002	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Baru dan Kawasan Khusus			Kota Makassar			Jumlah Laporan rencana pengembangan kawasan ekonomi baru dan kawasan ekonomi khusus	1 laporan	Termanfaatnya laporan perencanaan pengembangan kawasan ekonomi baru dan kawasan ekonomi khusus	100 %	179,015,144.0	185,638,704.33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	02	003	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri			Kota Makassar			Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan Industri	1 laporan	Termanfaatnya laporan Perencanaan Pengembangan Industri	100 %	113,237,300.0	117,427,080.10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	02	004	Perencanaan Pengembangan Perdagangan			Kota Makassar			Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan Perdagangan	1 laporan	Termanfaatnya laporan Perencanaan Pengembangan Perdagangan	100 %	120,923,407.0	125,397,573.06	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	02	005	Perencanaan Pengembangan Sektor pariwisata			Kota Makassar			Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan Sektor Pariwisata	1 laporan	Termanfaatnya laporan Perencanaan Pengembangan Sektor Pariwisata	100 %	113,237,300.0	117,427,080.10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	03		<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>					<b>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>10 Rekomendasi</b>				<b>1,317,980,576.0</b>	<b>1,366,830,584.93</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
3.00	01	01.00	03	001	Koordinasi Pencapaian Gerakan Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000HPK)			Kota Makassar			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Pencapaian Gerakan Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000HPK)	1 dokumen	Terumuskannya Upaya-Upaya koordinasi pencapaian gerakan perbaikan gizi pada 1000 hari Pertama Kehidupan (1000HPK)	100 %	122,678,947.60	127,226,541.45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	03	002	Penyusunan Rencana Aksi Daerah / Sustainable Development Goals (SDGs)			Kota Makassar			Jumlah rencana aksi daerah Sustainable development Goals (SDGs) yang disusun	24 Rencana Aksi	Terumuskannya Upaya-Upaya Penyusunan Rencana Aksi Daerah / Sustainable Development Goals(SDGs)	100 %	353,763,207.60	366,860,919.04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

3.00	01	01.00	03	03	Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial			Kota Makassar			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyusunan kebijakan program prioritas pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial	2 dokumen	Kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan target, tujuan dan sasaran pembangunan tahun berjalan	100 %	68,765,967.60	71,318,781.16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	01.00	03	04	Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan			Kota Makassar			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	2 dokumen	Termanfaatnya bahan informasi dalam peningkatan pelaksanaan kebijakan/program prioritas pembangunan kelembagaan pemerintah dan masyarakat	100 %	125,284,407.60	129,928,403.44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	01.00	03	05	Pengembangan Kerjasama Lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya			Kota Makassar			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kerjasama Lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	3 dokumen	Terumuskannya Upaya-Upaya Pengembangan Kerjasama Lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	100 %	67,763,867.60	70,279,603.46	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	01.00	03	06	Penyusunan Kebijakan / Program Prioritas Pembangunan pendidikan dan Olahraga			Kota Makassar			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan program strategis pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga	2 dokumen	Termanfaatnya Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan dan Olahraga	100 %	136,507,927.60	141,567,193.68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	01.00	03	07	Updating Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Prov Sulsel			Kota Makassar			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Updating Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Prov. Sulsel	2 dokumen	Terumuskannya Upaya-Upaya Updating Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Prov.Sulsel	100 %	95,221,407.60	98,753,072.44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3.00	01	01.00	03	008	Pengembangan dan Pembinaan Kab/Kota Layak anak			Kota Makassar			Jumlah kabupaten/kota layak anak yang dibina	2 Kab/Kota	Terumuskannya Upaya-Upaya pengembangan dan pembinaan kabupaten/kota layak anak	100 %	108,649,547.60	112,678,053.62	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	01.00	03	009	Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah terkait Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Kota Makassar			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah terkait Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 dokumen	Termanfaatkannya dokumen hasil Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah terkait Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	129,693,647.60	134,500,785.32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	01.00	03	010	Penyusunan Kebijakan / Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan			Kota Makassar			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan/Program Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	2 dokumen	Termanfaatkannya Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	100 %	109,651,647.60	113,717,231.32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>3.00</b>	<b>01</b>	<b>01.00</b>	<b>04</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN</b>					<b>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Perekonomian</b>	<b>8 Rekomendasi</b>				<b>946,931,459.0</b>	<b>982,028,797.21</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
3.00	01	01.00	04	001	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan			Kota Makassar			Jumlah Dokumen Penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	Termanfaatkannya laporan penanggulangan kemiskinan	100 %	323,437,429.0	335,412,223.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	01.00	04	002	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Investasi, Penanaman Modal dan PTSP			Kota Makassar			Jumlah Laporan perencanaan pengembangan investasi, penanaman modal dan PTSP	1 laporan	Termanfaatkannya laporan pengembangan investasi, penanaman modal dan PTSP	100 %	74,676,125.0	77,446,750.90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	01	01.00	04	003	Koordinasi Pencapaian Indikator Makro			Kota Makassar			Jumlah Laporan capaian indikator makro	1 laporan	Termanfaatkannya laporan pencapaian indikator makro	100 %	12,345,505.0	12,809,897.96	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3.00	01	01.00	04	005	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Bidang Koperasi dan UKM			Kota Makassar			Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan Bidang Koperasi dan UKM	1 laporan	Termanfaatnya laporan Perencanaan Pengembangan Bidang Koperasi dan UKM	100 %	95,219,175.0	98,749,893.75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	04	009	Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Kelautan dan Perikanan			Kota Makassar			Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Kelautan dan Perikanan	1 laporan	Termanfaatnya laporan Perencanaan dan Pengendalian Sektor Kelautan dan Perikanan	100 %	120,772,725.0	125,248,925.10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	04	010	Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Tanaman Pangan dan Hortikultura			Kota Makassar			Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	1 laporan	Termanfaatnya laporan Perencanaan dan Pengendalian Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	100 %	111,002,250.0	115,116,942.53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	04	011	Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Perkebunan			Kota Makassar			Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Perkebunan	1 laporan	Termanfaatnya laporan Perencanaan dan Pengendalian Sektor Perkebunan	100 %	106,743,325.0	110,700,437.30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	04	012	Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Peternakan			Kota Makassar			Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Peternakan	1 laporan	Termanfaatnya laporan Perencanaan dan Pengendalian Sektor Peternakan	100 %	102,734,925.0	106,543,726.50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	05		<b>PROGRAM PERENCANAAN SUMBERDAYA ALAM</b>						Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan SDA ke dalam Dokumen Perencanaan	4 Rekomendasi			283,601,958.0	294,113,461.91	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
											Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis perencanaan pembangunan sumber daya alam	4 Rekomendasi						

3.00	01	01.00	05	003	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup			Kota Makassar			Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan SDA dan LH	2 laporan	Termanfaatkannya koordinasi perencanaan pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	100 %	210,723,376.20	218,529,256.85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	05	004	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon			Kota Makassar			Jumlah rekomendasi integrasi PPRK dalam dokumen perencanaan daerah	4 rekomendasi	% capaian penurunan emisi GRK	100 %	72,878,581.80	75,584,205.06	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
											Jumlah rekomendasi penyelenggaraan PPRK	4 rekomendasi	% Kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan dokumen PPRK	100 %				
3.00	01	01.00	06		<b>PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>					Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah ke dalam dokumen Perencanaan	4 Rekomendasi			4,739,959,284.0	4,915,642,490.86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
										Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah	4 Rekomendasi							
3.00	01	01.00	06	001	Koordinasi Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi			Kota Makassar			Jumlah laporan rekomendasi pelaksanaan dan keterpaduan pembangunan PPA	2 dokumen	Keterpaduan rencana untuk pencapaian universal akses dan smart living perkotaan	100 %	172,867,050.0	302,517,337.50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	06	004	Koordinasi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			Kota Makassar				0	% kesesuaian rencana penyelenggaraan jalan dan jembatan Kab/Kota dengan RKP	100 %	166,457,444.0	291,300,527.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	



3.00	01	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %				3,551,801,799.0	3,683,446,797.37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
3.00	01	01.00	5001	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Kota Makassar			Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	2 Jenis	21,988,800.0	22,802,385.60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	5002	0	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				Kota Makassar			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	13 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	13 Unit	15,270,000.0	15,834,990.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
												Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	20 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	20 Unit				
3.00	01	01.00	5003	0	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS				Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	30 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	594,176,368.0	616,160,893.62	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	5005	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan				Kota Makassar			Jumlah ATK yang tersedia	25 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	252,466,036.0	261,807,279.33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	5006	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Kota Makassar			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	35,630,000.0	36,948,310.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	5008	0	Penyediaan Makanan dan Minuman				Kota Makassar			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	2 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	1,548,101,613.0	1,605,381,372.68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	5009	0	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran				Kota Makassar			Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	170,310,382.0	176,611,866.13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	5010	0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah				Kota Makassar			Jumlah perjalanan dinas	3250 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	145 Orang	913,858,600.0	947,899,700.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %					3,231,774,968.0	3,351,558,399.70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	5104	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama				Kota Makassar			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	902,850,000.0	936,255,450.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	5106	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas				Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	13 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	415,616,400.0	430,994,206.80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

3.00	01	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	12 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	1,348,500,000.0	1,398,394,500.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	8 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	440,000,000.0	456,280,000.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Kota Makassar			Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	3 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	124,808,568.0	129,634,242.90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
											Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	150 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	100 %				
3.00	01	01.00	52		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					<b>% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu</b>	<b>100 %</b>			<b>1,087,801,532.0</b>	<b>1,128,120,119.62</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		
3.00	01	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	60 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	41,132,000.0	42,653,884.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	451,611,892.0	468,391,462.94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	0 Dokumen				





3.00	01	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	170 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	94,200,000.0	97,685,400.0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.00	01	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Kota Makassar			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	100 Orang	23,854,507.0	30,674,014.84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
<b>3.00</b>	<b>0</b>				<b>Keuangan</b>													
<b>3.00</b>	<b>0</b>	<b>01.00</b>			<b>Badan Pendapatan Daerah</b>										<b>55,232,298,750.49</b>	<b>56,908,801,610.07</b>		
<b>3.00</b>	<b>02</b>	<b>01.00</b>	<b>05</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PAJAK DAERAH</b>					<b>Cakupan ketersediaan pelayanan drivethru, gerai samsat, e-samsat, samsat keliling</b>	<b>100 %</b>				<b>269,800,000.0</b>	<b>327,760,000.0</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	
3.00	02	01.00	05	001	Jasa SMS Broadcast kepada Wajib Pajak			Kota Makassar			Jumlah terkirimnya sms pemberitahuan jatuh tempo pajak kendaraan bermotor	220000 Wajib Pajak	Terciptanya kualitas Pelayanan yang Baik dan Lancar	100 %	64,800,000.0	77,760,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	02	01.00	05	002	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Layanan Unggulan Samsat			Kota Makassar			Jumlah lokasi layanan unggulan samsat yang dimonitoring	25 Lokasi	Jumlah laporan hasil evaluasi Layanan unggulan samsat	25 Laporan	110,000,000.0	130,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	02	01.00	05	003	Peningkatan dan Pengembangan layanan Unggulan Samsat Prov.SulSel			Kota Makassar			Jumlah ketersediaan inovasi layanan unggulan samsat bagi masyarakat	1 Inovasi	Cakupan ketersediaan inovasi layanan unggulan samsat bagi masyarakat	100 %	95,000,000.0	120,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
<b>3.00</b>	<b>02</b>	<b>01.00</b>	<b>06</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>					<b>% Pertumbuhan kenaikan pendapatan daerah yang dikelola bapenda</b>	<b>5 %</b>				<b>17,416,084,915.0</b>	<b>19,652,698,277.0</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	
3.00	02	01.00	06	001	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar I Selatan			Kota Makassar			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	12679 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	950906250 Rp	62,884,800.0	75,461,760.0	Badan Pendapatan Daerah	

3.00	0 2	01.00	0 6 0 2	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar II Utara			Kota Makassar			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	9536 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	715168545 Rp	93,024,000.0	111,628,800.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6 0 3	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pare-Pare			Kota Parepare			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	8087 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	606493545 Rp	79,320,000.0	95,184,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6 0 4	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Palopo			Kota Palopo			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	7881 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	598893750 Rp	55,344,000.0	66,412,800.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6 0 5	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bone			Kabupaten Bone			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10314 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	773561250 Rp	93,744,000.0	112,492,800.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6 0 6	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Wajo			Kabupaten Wajo			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	7469 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	586822500 Rp	70,944,000.0	85,132,800.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6 0 7	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bantaeng			Kabupaten Bantaeng			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	8114 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	608541045 Rp	76,464,000.0	91,756,800.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6 0 8	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Gowa			Kabupaten Gowa			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	11907 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	893025000 Rp	89,544,000.0	107,452,800.0	Badan Pendapatan Daerah	

3.00	0 2	01.00	0 6	0 0 9	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pinrang			Kabupaten Pinrang			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	8368 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	627637500 Rp	75,960,000.0	91,152,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 1 0	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Maros			Kabupaten Maros			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	8918 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	668823750 Rp	77,484,000.0	92,980,800.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 1 1	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pangkep			Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	9087 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	681463545 Rp	32,760,000.0	39,312,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 1 2	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sidrap			Kabupaten Sidenreng Rappang			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	8106 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	607950000 Rp	42,144,000.0	50,572,800.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 1 3	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Tana Toraja			Kabupaten Tana Toraja			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	8247 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	618463545 Rp	48,504,000.0	58,204,800.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 1 4	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu Timur			Kabupaten Luwu Timur			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	8968 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	627637500 Rp	60,480,000.0	72,576,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 1 5	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Soppeng			Kabupaten Soppeng			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	7468 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	560148750 Rp	49,800,000.0	59,760,000.0	Badan Pendapatan Daerah	

3.00	0 2	01.00	0 6	0 1 6	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bulukumba			Kabupaten Bulukumba			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	5407 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	405562500 Rp	48,744,000.0	58,492,800.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 1 7	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Barru			Kabupaten Barru			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	8531 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	639843750 Rp	62,400,000.0	74,880,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 1 8	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu			Kabupaten Luwu			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	7581 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	568575000 Rp	66,144,000.0	79,372,800.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 1 9	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sinjai			Kabupaten Sinjai			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	7868 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	590034795 Rp	72,000,000.0	86,400,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 2 0	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Takalar			Kabupaten Takalar			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	9120 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	683983545 Rp	73,800,000.0	88,560,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 2 1	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Selayar			Kabupaten Kepulauan Selayar			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	5830 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	437181045 Rp	31,260,000.0	37,512,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 2 2	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Toraja Utara			Kabupaten Toraja Utara			Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	7080 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	503763750 Rp	66,144,000.0	79,372,800.0	Badan Pendapatan Daerah	

3.00	0 2	01.00	0 6	0 2 3	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu Utara			Kabupaten Luwu Utara				Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	6717 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	503763750 Rp	76,939,200.0	92,327,040.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 2 4	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Jeneponto			Kabupaten Jeneponto				Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	7519 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	563928750 Rp	77,583,600.0	93,100,320.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 2 5	Pendataan, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Enrekang			Kabupaten Enrekang				Jumlah SP3D yang Disampaikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	7632 SP3D	Jumlah Nilai Pendapatan dari Hasil Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	572394795 Rp	75,744,000.0	90,892,800.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 2 6	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar I Selatan			Kota Makassar				Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Makassar I Selatan yang ditertibkan	1000 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	1020 Unit	73,740,000.0	88,488,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 2 7	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Makassar II Utara			Kota Makassar				Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Makassar II Utara yang ditertibkan	1000 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	1020 Unit	71,400,000.0	85,680,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 2 8	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pare-Pare			Kota Parepare				Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Pare-Pare yang ditertibkan	800 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	820 Unit	53,400,000.0	64,080,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 2 9	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Palopo			Kota Palopo				Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Palopo yang ditertibkan	800 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	820 Unit	53,400,000.0	64,080,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 3 0	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bone			Kabupaten Bone				Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Bone yang ditertibkan	1000 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	1020 Unit	64,147,200.0	76,976,640.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 3 1	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Wajo			Kabupaten Wajo				Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Wajo yang ditertibkan	900 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	920 Unit	60,000,000.0	72,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	

3.00	0 2	01.00	0 6	0 3 2	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bantaeng			Kabupaten Bantaeng			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Bantaeng yang ditertibkan	500 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	520 Unit	34,320,000.0	41,184,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 3 3	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Gowa			Kabupaten Gowa			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Gowa yang ditertibkan	1000 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	1020 Unit	66,282,000.0	79,538,400.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 3 4	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pinrang			Kabupaten Pinrang			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Pinrang yang ditertibkan	800 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	820 Unit	53,760,000.0	64,512,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 3 5	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Maros			Kabupaten Maros			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Maros yang ditertibkan	900 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	920 Unit	65,400,000.0	78,480,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 3 6	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Pangkep			Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Pangkep yang ditertibkan	800 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	820 Unit	49,800,000.0	59,760,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 3 7	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sidrap			Kabupaten Sidenreng Rappang			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah sidrap yang ditertibkan	900 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	920 Unit	67,200,000.0	80,640,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 3 8	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Tana Toraja			Kabupaten Tana Toraja			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah tana toraja yang ditertibkan	500 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	520 Unit	35,400,000.0	42,480,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 3 9	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu Timur			Kabupaten Luwu Timur			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Luwu Timur yang ditertibkan	800 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	820 Unit	49,512,000.0	59,414,400.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 4 0	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Soppeng			Kabupaten Soppeng			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Soppeng yang ditertibkan	600 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	620 Unit	37,800,000.0	45,360,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 4 1	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Bulukumba			Kabupaten Bulukumba			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Bulukumba yang ditertibkan	800 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	820 Unit	49,029,600.0	58,825,520.0	Badan Pendapatan Daerah	

3.00	0 2	01.00	0 6	0 4 2	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Barru			Kabupaten Barru			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Barru yang ditertibkan	600 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	620 Unit	39,600,000.0	47,520,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 4 3	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu			Kabupaten Luwu			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Luwu yang ditertibkan	600 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	620 Unit	41,400,000.0	49,680,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 4 4	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Sinjai			Kabupaten Sinjai			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Sinjai yang ditertibkan	600 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	620 Unit	42,840,000.0	51,408,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 4 5	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Takalar			Kabupaten Takalar			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Takalar yang ditertibkan	600 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	620 Unit	50,400,000.0	60,480,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 4 6	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Selayar			Kabupaten Kepulauan Selayar			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Selayar yang ditertibkan	500 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	520 Unit	32,340,000.0	38,808,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 4 7	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Toraja Utara			Kabupaten Toraja Utara			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Toraja Utara yang ditertibkan	500 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	520 Unit	32,340,000.0	38,808,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 4 8	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Luwu Utara			Kabupaten Luwu Utara			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Luwu Utara yang ditertibkan	600 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	620 Unit	45,961,200.0	55,153,440.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 4 9	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Jeneponto			Kabupaten Jeneponto			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Jeneponto yang ditertibkan	600 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	620 Unit	42,624,000.0	51,148,800.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 5 0	Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pendapatan WIL Enrekang			Kabupaten Enrekang			Jumlah unit kendaraan bermotor wilayah Enrekang yang ditertibkan	500 Unit	Nilai jumlah Unit Kendaraan yang ditertibkan	520 Unit	35,400,000.0	42,480,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 5 1	Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan			Kota Makassar			Jumlah laporan administrasi pengelolaan pendapatan yang diperiksa	30 Laporan	Rekomendasi hasil pemeriksaan administrasi pengelolaan pendapatan	30 Laporan	241,692,000.0	290,030,400.0	Badan Pendapatan Daerah	



3.00	0 2	01.00	0 6	0 5 2	Monitoring Pelaksanaan Penertiban dan Pendataan Subjek/Objek Pajak			Kota Makassar			Jumlah laporan hasil monitoring pelaksanaan penertiban dan pendataan subjek/objek pajak	8 Laporan	Jumlah subjek/objek pajak yang terdata	8 laporan	75,300,000.0	90,360,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 5 3	Penyusunan LKPJ, Nota Perhitungan APBD dan Rekonsiliasi Pelaporan Pendapatan Daerah			Kota Makassar			Jumlah Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang disusun	12 Laporan	Jumlah Laporan Data yang Akurat Tentang Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	12 Laporan Rekonsiliasi	206,467,200.0	247,760,640.0	Badan Pendapatan Daerah	
											Jumlah Laporan LKPJ yang disusun	1 Laporan	Cakupan Laporan LKPJ yang tersedia	1 Laporan LKPJ				
											Jumlah Laporan Nota Perhitungan yang disusun	1 Laporan	Cakupan Laporan Nota Perhitungan yang tersedia	1 Laporan Nota Perhitungan				
3.00	0 2	01.00	0 6	0 5 4	Verifikasi dan Analisa Kendaraan Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang			Kota Makassar			Laporan hasil verifikasi dan analisa kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran ulang	4 Laporan	Laporan Kendaraan Tidak Melakukan Pendaftaran Ulang	4 Laporan	61,440,000.0	73,728,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 5 5	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan			Kota Makassar			Jumlah Laporan potensi pajak yang belum dikelola	2 Laporan	Peningkatan jumlah potensi pajak	2 Laporan	63,600,000.0	76,320,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 5 6	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah			Kota Makassar			Jumlah peraturan pelaksanaan teknis bidang pendapatan yang disusun	10 Produk Hukum	Peningkatan jumlah regulasi bidang pendapatan	10 Jenis	97,080,000.0	116,496,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 5 7	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok			Kota Makassar			Laporan hasil Rapat Kerja asistensi, monitoring dan evaluasi Pemanfaatan dana pajak rokok	4 Laporan	Tertibnya Pemanfaatan dana Pajak rokok	25 Pemda	91,560,000.0	109,872,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 5 8	Pemutakhiran Data Base Objek dan Subjek Pajak Daerah			Kota Makassar			Jumlah laporan hasil pemutakhiran	4 laporan	cakupan hasil pemutakhiran	4 laporan	62,520,000.0	75,024,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 5 9	Penyusunan dan Sosialisasi NJKB			Kota Makassar			Pergub Tentang NJKB	75 set	Tersedianya NJKB untuk Perhitungan PKB dan BBNKB	100 %	200,100,000.0	240,120,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 6 0	Pembinaan SDM Aparatur Sipil Pendapatan Daerah			Kota Makassar			Jumlah laporan hasil pembinaan	18 Laporan	Laporan hasil Pembinaan	18 Laporan	333,626,400.0	400,351,680.0	Badan Pendapatan Daerah	

3.00	0 2	01.00	0 6	0 6 1	Peningkatan Pengelolaan Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan dan PBBKB			Kota Makassar			Jumlah monev dan koordinasi	6 Laporan	cakupan Hasil Laporan monev dan koordinasi	6 Laporan	84,000,000.0	100,800,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 6 2	Peningkatan Pengelolaan PKB dan BBNKB			Kota Makassar			Jumlah monev, konsultasi dan koordinasi	10 laporan	cakupan Laporan Hasil monev, konsultasi dan koordinasi	10 Laporan	91,680,000.0	110,016,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 6 3	Evaluasi dan Monitoring Retribusi Daerah dan PADL			Kota Makassar			Jumlah laporan dan berita acara monitoring	4 laporan	cakupan laporan dan berita acara	4 Laporan	90,600,000.0	108,720,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
											Jumlah Buku Pendapatan daerah Kab/Kota	50 exp	Cakupan Ketersediaan Buku Pendapatan Daerah Kabupaten Kota	50 exp				
3.00	0 2	01.00	0 6	0 6 4	Evaluasi Penerimaan PAD pada UPT Bapenda			Kota Makassar			Jumlah laporan hasil Evaluasi Penerimaan PAD	4 laporan	cakupan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penerimaan PAD	4 Laporan	48,000,000.0	57,600,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 6 5	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Palopo			Kota Palopo			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Palopo	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	125,760,000.0	150,912,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 6 6	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil.Pare-pare			Kota Parepare			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Pare-pare	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 6 7	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan			Kota Makassar			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Makassar I Selatan	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 6 8	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bone			Kabupaten Bone			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Bone	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 6 9	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Wajo			Kabupaten Wajo			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Wajo	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 7 0	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Maros			Kabupaten Maros			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Maros	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	

3.00	0 2	01.00	0 6	0 7 1	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bantaeng			Kabupaten Bantaeng			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Bantaeng	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	65,280,000.0	78,336,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 7 2	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Pangkep			Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Pangkep	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 7 3	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Gowa			Kabupaten Gowa			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Gowa	1 laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 7 4	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Sidrap			Kabupaten Sidenreng Rappang			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Sidrap	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,400,000.0	74,880,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 7 5	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Pinrang			Kabupaten Pinrang			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Pinrang	1 laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 7 6	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja			Kabupaten Tana Toraja			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Tana Toraja	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 7 7	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur			Kabupaten Luwu Timur			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Luwu Timur	1 laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	125,760,000.0	150,912,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 7 8	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Soppeng			Kabupaten Soppeng			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Soppeng	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 7 9	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Bulukumba			Kabupaten Bulukumba			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Bulukumba	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 8 0	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Jeneponto			jenepono			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Jeneponto	1 laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 8 1	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Enrekang			Kabupaten Enrekang			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Enrekang	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	

3.00	0 2	01.00	0 6	0 8 2	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu			Kabupaten Luwu			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Luwu	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	125,760,000.0	150,912,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 8 3	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. makassar II Utara			Kota Makassar			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Makassar II Utara	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 8 4	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Selayar			Kabupaten Kepulauan Selayar			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Selayar	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 8 5	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara			Kabupaten Toraja Utara			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Toraja Utara	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 8 6	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara			Kabupaten Luwu Utara			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Luwu Utara	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	125,760,000.0	150,912,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 8 7	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Barru			Kabupaten Barru			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Barru	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 8 8	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Sinjai			Kabupaten Sinjai			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Sinjai	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 8 9	Sosialisasi Pajak Daerah UPT Pendapatan Wil. Takalar			Kabupaten Takalar			Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah UPT. Wil Takalar	1 Laporan	Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	100 %	62,880,000.0	75,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 9 0	Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan			Kota Makassar			Jumlah laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengawasan	14 Laporan	Rekomendasi hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengawasan	14 Laporan	141,000,000.0	169,200,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	0 9 1	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan Aparat Fungsional			Kota Makassar			Jumlah laporan hasil pemutakhiran data tindak lanjut	8 laporan	Cakupan hasil pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional	8 Laporan	49,800,000.0	59,760,000.0	Badan Pendapatan Daerah	

3.00	0 2	01.00	0 6	0 9 2	Asistensi dan Penyusunan Target Pokok dan Target Perubahan Bidang Pendapatan Daerah			Kota Makassar			Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan target APBD pokok dan perubahan	2 laporan	cakupan ketersediaan laporan hasil asistensi penyusunan target APBD pokok dan perubahan	2 laporan	122,880,000.0	147,456,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	0 2	01.00	0 6	0 9 3	Peningkatan Kapasitas SDM operator Sistem dan Operator Data			Kota Makassar			Jumlah peserta pelatihan operator sistem dan operator data	75 orang	Peningkatan keahlian aparat dalam mengelola sistem	100 %	1,800,000.0	2,160,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	0 2	01.00	0 6	0 9 6	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan			Kota Makassar			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Makassar I Selatan	12 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 Laporan	924,048,240.0	1,108,867,888.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	0 2	01.00	0 6	0 9 7	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Makassar II Utara			Kota Makassar			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Makassar II Utara	12 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 Laporan	472,584,600.0	567,101,520.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	0 2	01.00	0 6	0 9 8	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Pare-pare			Kota Parepare			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Pare-pare	12 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 Laporan	565,222,800.0	678,267,360.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	0 2	01.00	0 6	0 9 9	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Palopo			Kota Palopo			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Palopo	12 laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 laporan	391,894,200.0	470,273,040.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	0 2	01.00	0 6	1 0 0	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Bone			Kabupaten Bone			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Bone	12 laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 laporan	382,306,800.0	458,768,160.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	0 2	01.00	0 6	1 0 1	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Wajo			Kabupaten Wajo			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Wajo	12 laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 laporan	366,640,800.0	439,968,960.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	0 2	01.00	0 6	1 0 2	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Bantaeng			Kabupaten Bantaeng			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Bantaeng	12 laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 laporan	309,414,000.0	371,296,800.0	Badan Pendapatan Daerah

3.00	0 2	01.00	0 6	1 0 3	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Gowa			Kabupaten Gowa			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Gowa	12 laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 laporan	610,000,000.0	550,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	1 0 4	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Pinrang			Kabupaten Pinrang			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Pinrang	12 laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 laporan	652,000,000.0	510,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	1 0 5	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Maros			Kabupaten Maros			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Maros	12 laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 laporan	356,200,000.0	310,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	1 0 6	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Pangkep			Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Pangkep	12 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 Laporan	353,000,000.0	310,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	1 0 7	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Sidrap			Kabupaten Sidenreng Rappang			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Sidrap	12 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 Laporan	496,000,000.0	470,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	1 0 8	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja			Kabupaten Tana Toraja			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja	12 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 Laporan	290,000,000.0	280,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	1 0 9	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur			Kabupaten Luwu Timur			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Luwu Timur	12 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 laporan	455,000,000.0	420,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	1 1 0	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Soppeng			Kabupaten Soppeng			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Soppeng	12 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 Laporan	390,000,000.0	350,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	1 1 1	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Bulukumba			Kabupaten Bulukumba			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Bulukumba	12 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 Laporan	398,503,680.0	300,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	1 1 2	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Barru			Kabupaten Barru			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Barru	12 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 Laporan	393,394,000.0	492,072,800.0	Badan Pendapatan Daerah	

3.00	0 2	01.00	0 6	1 1 3	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu			Kabupaten Luwu			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Luwu	12 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 Laporan	390,000,000.0	680,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	1 1 4	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Sinjai			Kabupaten Sinjai			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Sinjai	12 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 Laporan	304,333,459.0	320,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	1 1 5	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Takalar			Kabupaten Takalar			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Takalar	12 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 Laporan	300,000,000.0	350,197,691.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	1 1 6	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Selayar			Kabupaten Kepulauan Selayar			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Selayar	12 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 Laporan	300,000,000.0	380,395,382.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	1 1 7	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara			Kabupaten Toraja Utara			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Toraja Utara	12 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 Laporan	300,000,000.0	320,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	1 1 8	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara			Kabupaten Luwu Utara			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Luwu Utara	12 laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 Laporan	360,000,000.0	360,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	1 1 9	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Jeneponto			Kabupaten Jeneponto			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Jeneponto	12 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 Laporan	550,001,136.0	629,209,236.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	1 2 0	Penatausahaan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT Pendapatan Wil. Enrekang			Kabupaten Enrekang			Jumlah Laporan Penatausahaan UPT Pendapatan Wil. Enrekang	12 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan	12 Laporan	250,300,000.0	300,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	0 6	1 2 1	Penerapan Elektronik Tilang (e-Tilang)			Kota Makassar			Jumlah terkirimnya surat pemberitahuan E-Tilang	6000 Surat	Peningkatan manajemen pelayanan yang baik dan lancar	100 %	60,000,000.0	72,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
<b>3.00</b>	<b>0 2</b>	<b>01.00</b>	<b>5 0</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>21,145,902,475.49</b>	<b>22,371,489,701.07</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>		
3.00	0 2	01.00	5 0	0 0 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Makassar			Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	4 Jenis	8,303,379,487.49	8,938,053,907.07	Badan Pendapatan Daerah	

3.00	02	01.00	5002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Makassar			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	68 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	68 Unit	114,000,000.0	136,800,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
										Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	107 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	107 Unit				
3.00	02	01.00	5003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	193 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	8,060,000,000.0	8,155,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	02	01.00	5005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Makassar			Jumlah ATK yang tersedia	60 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	2,306,951,160.0	2,300,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
										Jumlah Cetak yang tersedia	4 Jenis	Cakupan ketersediaan barang cetakan	100 %				
										Jumlah Penggandaan yang tersedia	100000 Lembar	Cakupan Ketersediaan Penggandaan	100 %				
3.00	02	01.00	5006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Makassar			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	454 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	60,042,000.0	79,800,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	02	01.00	5008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Makassar			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	4 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	1,144,440,000.0	1,373,328,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	02	01.00	5009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kota Makassar			Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	2 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	450,000,000.0	540,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	02	01.00	5010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kota Makassar			Jumlah perjalanan dinas	571 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	465 Orang	707,089,828.0	848,507,794.0	Badan Pendapatan Daerah	
										Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah	556 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan dalam daerah	438 Orang				
										Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	15 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan Luar daerah	27 orang				
3.00	02	01.00	5011	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %				13,805,155,600.0	11,644,186,720.0	Badan Pendapatan Daerah	



3.00	0 2	01.00	5 1	0 0 3	Pembangunan Gedung Kantor / Asrama						Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dibangun	1 Unit	Ketersediaan gedung kantor/Asrama sesuai kebutuhan	100 %	3,500,000,000.0	0.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	5 1	0 0 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kota Makassar			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	26 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	1,365,328,400.0	1,638,394,080.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	5 1	0 0 6	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	173 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	1,979,827,200.0	2,375,792,640.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	5 1	0 0 9	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	468 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	5,860,000,000.0	6,200,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	5 1	0 1 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	1146 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	850,000,000.0	980,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	5 1	0 1 2	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Kota Makassar			Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	4 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	250,000,000.0	450,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah	
											Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	120 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	100 %				
3.00	0 2	01.00	5 2		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>						% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %			810,055,760.0	972,666,912.0	Badan Pendapatan Daerah	
3.00	0 2	01.00	5 2	0 0 2	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	2 Dokumen	540,995,760.0	649,194,912.0	Badan Pendapatan Daerah	
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				



3.00	0 2	01.00	5 3	0 0 3	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	1046 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	840,000,000.0	951,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	0 2	01.00	5 3	0 0 8	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Kota Makassar			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	150 Orang	65,000,000.0	78,000,000.0	Badan Pendapatan Daerah
3.00	0 2	02.00			Badan Pengelolaan Keuangan Daerah										25,030,818,292.26	26,333,684,114.45	
3.00	0 2	02.00	0 1		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH					Rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah	1				3,667,260,000.0	3,797,932,600.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
										Perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung	0.43						
										% Belanja Modal terhadap total APBD	12 %						
										% Belanja Pendidikan terhadap total APBD	20 %						
										% Belanja Kesehatan terhadap total APBD	10 %						
										% Belanja Tidak Langsung terhadap Total APBD	70 %						
										% Belanja bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa terhadap Total APBD	16 %						
										% Belanja Langsung terhadap Total APBD	30 %						
										% Program/Kegiatan yang tidak terlaksana	0 %						
										% SILPA	2 %						
										Capaian Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA tepat waktu	100 %						

3.00	0 2	02.00	0 1	0 0 1	Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah Buku APBD Provinsi Sulawesi Selatan Pokok, Perubahan dan Parsial Yang Disusun	9 Buku	Cakupan Ketersediaan Buku APBD Provinsi Sulawesi Selatan	9 Buku	1,496,250,000.0	1,548,812,500.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	0 2	02.00	0 1	0 0 2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah			Kota Makassar			Jumlah ASN Laki-Laki Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	210 Orang	Peningkatan Pengetahuan ASN Laki-Laki Terhadap Adanya Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	210 Orang	207,785,000.0	219,362,850.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
											Jumlah ASN Perempuan Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	140 Orang	Peningkatan Pengetahuan ASN Perempuan Terhadap Adanya Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	140 Orang				
3.00	0 2	02.00	0 1	0 0 3	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah			Kota Makassar			Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dikembangkan dan Dipelihara	1 Sistem Informasi	Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Mendukung Proses Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	1 Sistem Informasi	552,500,000.0	577,525,000.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	0 2	02.00	0 1	0 0 4	Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah			Kota Makassar			Jumlah Regulasi Keuangan Daerah Yang Disusun	5 Perda/Per gub	Cakupan Ketersediaan Regulasi Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	5 Perda/Pergub	687,625,000.0	692,901,250.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

3.00	0 2	02.00	0 1	0 0 5	Perencanaan dan Penganggaran Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah			Kota Makassar				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Dibuat	4 Dokumen	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pada BPKD Prov. Sulsel Selaku SKPKD	4 Dokumen	160,625,000.0	171,881,250.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	0 2	02.00	0 1	0 0 6	Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial			Kota Makassar				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibuat	4 Laporan	Perencanaan, Penatausahaan dan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Yang Telah Sesuai Dengan Aturan	4 Laporan	241,025,000.0	253,085,250.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	0 2	02.00	0 1	0 0 7	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah			Kota Makassar				Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan Yang Dibuat	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Berisi Hasil Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	65,200,000.0	75,602,000.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	0 2	02.00	0 1	0 0 8	Penyusunan Profil APBD Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar				Jumlah Buku Profil APBD Provinsi Sulawesi Selatan Yang Dibuat	1 Buku	Ketersediaan Profil APBD Provinsi Sulawesi Selatan	1 Buku	256,250,000.0	258,762,500.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
<b>3.00</b>	<b>0 2</b>	<b>02.00</b>	<b>0 2</b>		<b>PROGRAM PENATAUSAHAAN DAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH</b>					<b>% Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah</b>	<b>98 %</b>					<b>2,794,417,500.0</b>	<b>2,916,361,675.0</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	
										<b>Rata-Rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas Daerah</b>	<b>2 Hari</b>								
3.00	0 2	02.00	0 2	0 0 1	Pengelolaan Surat Penyediaan Dana			Kota Makassar				Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) Yang Diterbitkan	721 SPD	Cakupan OPD/UPTD/S KPKD Yang Dilayani Terkait Penerbitan SPD	65 OPD/UPTD/S KPKD	185,550,000.0	211,655,500.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	0 2	02.00	0 2	0 0 2	Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana			Kota Makassar				Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Yang Diterbitkan	15560 SP2D	Cakupan OPD/UPTD/S KPKD Yang Dilayani Terkait Penerbitan SP2D	65 OPD/UPTD/S KPKD	557,400,000.0	567,224,000.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

3.00	0 2	02.00	0 2	0 0 3	Koordinasi dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah Bendahara Yang Dibina Terkait Aturan Penatausahaan SP2D (Pajak, Taspen, BPJS Kesehatan)	62 Orang	Peningkatan Pemahaman OPD Terkait Penatausahaan SP2D Yang Sesuai Aturan	58 OPD	545,720,000.0	554,177,200.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	0 2	02.00	0 2	0 0 4	Pengelolaan Administrasi Penggajian ASN Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah ASN Yang Dilayani Dalam Rangka Penerbitan SKPP dan Laporan Rekap Gaji/Susulan/ Terusan/, Rekap JKK/JKM/ASKES	1114 Orang	Cakupan Ketersediaan SKPP dan Laporan Rekap Gaji/Susulan/ Terusan/, Rekap JKK/JKM dan ASKES	1150 Laporan	306,100,000.0	328,311,000.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	0 2	02.00	0 2	0 0 5	Pelaksanaan Administrasi Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)			Kota Makassar			Jumlah Laporan Kuasa BUD Yang Dibuat	48 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	48 Laporan	631,167,500.0	656,529,175.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	0 2	02.00	0 2	0 0 6	Koordinasi dan Penatausahaan Pinjaman dan Dana Transfer			Kota Makassar			Jumlah Laporan Penatausahaan Pinjaman dan Dana Transfer Yang Dibuat	8 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan Pinjaman dan Dana Transfer Yang Dibuat	8 Laporan	386,750,000.0	395,267,500.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	0 2	02.00	0 2	0 0 7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah			Kota Makassar			Jumlah ASN Laki-Laki Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah	232 Orang	Peningkatan Pengetahuan ASN Laki-Laki Terhadap Adanya Peraturan Perundang-undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah	232 Orang	181,730,000.0	203,197,300.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

												Jumlah ASN Perempuan Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah	232 Orang	Peningkatan Pengetahuan ASN Perempuan Terhadap Adanya Peraturan Perundang-undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah	232 Orang					
3.00	02	02.00	03		PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH					% Tindak lanjut temuan kerugian daerah yang diselesaikan	100 %					3,167,081,835.42	3,292,752,653.77	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
										% Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	100 %									
3.00	02	02.00	03	001	Pengelolaan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Yang Disusun	9 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Yang Disusun	9 Laporan		1,850,067,400.0	1,865,318,074.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			
										Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Disusun	75 Laporan	Cakupan Ketersediaan Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Disusun	75 Laporan							
3.00	02	02.00	03	002	Pengelolaan Verifikasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah			Kota Makassar		Jumlah Laporan Hasil Verifikasi SPJ OPD Yang Dikelola	1560 Laporan	Cakupan SPJ OPD Yang Telah Diverifikasi Setiap Bulan	1560 SPJ. OPD		698,773,080.0	778,510,810.80	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			

3.00	0 2	02.00	0 3	0 0 3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			Kota Makassar				Jumlah ASN Laki-Laki Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	390 Orang	Peningkatan Pengetahuan ASN Laki-Laki Terhadap Adanya Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	390 Orang	150,625,000.0	176,881,250.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
												Jumlah ASN Perempuan Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	260 Orang	Peningkatan Pengetahuan ASN Perempuan Terhadap Adanya Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	260 Orang				
3.00	0 2	02.00	0 3	0 0 4	Pengelolaan Tindak Lanjut Dan Penyelesaian Kerugian Daerah			Kota Makassar				Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan	192 Rekomendasi	Penyelesaian Rekomendasi Temuan Pemeriksaan	24 Laporan	467,616,355.42	472,042,518.97	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
												Jumlah Kasus TGR Yang Diproses	15 Kasus	Penyelesaian Kasus TGR	15 Laporan				
<b>3.00</b>	<b>0 2</b>	<b>02.00</b>	<b>0 4</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>% Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Tepat Waktu</b>	<b>100 %</b>					<b>2,357,242,500.0</b>	<b>2,474,814,925.0</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	
3.00	0 2	02.00	0 4	0 0 1	Evaluasi APBD dan Pemantauan Pelaksanaan Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota			Kota Makassar				Jumlah SK Gubernur Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan	24 SK Gubernur	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi APBD Pokok	24 Kabupaten/Kota	996,664,500.0	1,024,231,145.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
												Jumlah SK Gubernur Terkait Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan	24 SK Gubernur	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Perubahan APBD	24 Kabupaten/Kota				





3.00	0 2	02.00	0 4	0 0 4	Rekonsiliasi dan Monitoring Data Realisasi/Laporan Pertanggungjawaban Bagi Hasil, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Desa			Kota Makassar				Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Realisasi Bagi Hasil, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Lainnya dan Bantuan Desa	24 Kabupaten/Kota	Cakupan Kabupaten/Kota Penerima Bagi Hasil, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Lainnya dan Bantuan Desa	24 Kabupaten/Kota	311,352,500.0	333,066,025.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
												Jumlah Pelaksanaan Monitoring Data Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Desa	24 Kabupaten/Kota	Cakupan Kabupaten/Kota Penerima Bagi Hasil, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Lainnya dan Bantuan Desa Yang Dimonitoring	24 Kabupaten/Kota				
3.00	0 2	02.00	0 4	0 0 5	Penyusunan Profil Keuangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan			Kota Makassar				Jumlah Buku Profil Keuangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Yang Disusun	1 Buku	Ketersediaan Profil Keuangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan	24 Kabupaten/Kota	166,530,000.0	177,595,300.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	0 2	02.00	0 4	0 0 6	Pengembangan Aplikasi dan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Data Keuangan Kabupaten/Kota			Kota Makassar				Jumlah Aplikasi Sistem Pengolahan Data Keuangan Kabupaten/Kota Yang Dikembangkan dan Dipelihara	1 Aplikasi	Ketersediaan Aplikasi Pengolahan Data Keuangan Kabupaten/Kota	1 Aplikasi	60,250,000.0	60,752,500.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	0 2	02.00	0 4	0 0 7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota			Kota Makassar				Jumlah ASN Laki-Laki Kabupaten/Kota Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	128 Orang	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman ASN Laki-Laki Pengelola Keuangan di 24 Kabupaten/Kota	128 Orang	224,920,500.0	246,569,705.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

												Jumlah ASN Perempuan Kabupaten/Kota Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	72 Orang	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman ASN Perempuan Pengelola Keuangan di 24 Kabupaten/Kota	72 Orang				
3.00	02	02.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %					8,215,253,104.92	8,430,779,600.97	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	02	02.00	5001		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Makassar				Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	2 Jenis	82,400,000.0	85,204,000.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	02	02.00	5002		Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Makassar				Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	11 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	11 Unit	25,617,500.0	27,853,675.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
												Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	34 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	34 Unit				
3.00	02	02.00	5003		Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kota Makassar				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	69 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	2,525,400,000.0	2,730,000,000.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	02	02.00	5005		Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Makassar				Jumlah ATK yang tersedia	63 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	1,571,415,679.74	1,574,629,836.54	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	02	02.00	5006		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Makassar				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	40 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	40,853,500.0	55,000,000.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	02	02.00	5008		Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Makassar				Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	4 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	2,515,331,837.82	2,515,485,156.20	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	02	02.00	5009		Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kota Makassar				Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	150,000,000.0	161,500,000.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	02	02.00	5010		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kota Makassar				Jumlah perjalanan dinas	24 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	100 Orang	1,304,234,587.36	1,281,106,933.23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

3.00	02	02.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %				2,281,733,550.0	2,464,906,888.24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
3.00	02	02.00	5102	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas			Kota Makassar				Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan rumah jabatan/ rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	02	02.00	5104	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kota Makassar				Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	400,000,000.0	450,000,000.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	02	02.00	5106	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kota Makassar				Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	45 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	884,150,000.0	942,491,500.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	02	02.00	5107	0	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	7 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas sesuai kebutuhan	100 %	80,000,000.0	0.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	02	02.00	5108	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	5 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	20,000,000.0	30,000,000.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	02	02.00	5109	0	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	50 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	452,156,130.0	513,427,691.30	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	02	02.00	5110	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	70 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	265,427,420.0	328,987,696.94	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	02	02.00	5112	0	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Kota Makassar				Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	2 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	80,000,000.0	100,000,000.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
												Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	48 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	100 %				

3.00	0 2	02.00	5 2		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %				1,663,667,889.82	1,830,034,256.22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
3.00	0 2	02.00	5 2	0 0 1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Kota Makassar				Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	100 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	51,692,175.0	57,209,096.75	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	0 2	02.00	5 2	0 0 2	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar				Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	793,000,000.0	859,030,000.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
												Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	6 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	6 Dokumen				
												Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	1 Dokumen				
												Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	39 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	39 Dokumen				
3.00	0 2	02.00	5 2	0 0 4	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			Kota Makassar				Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	13 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	100 %	36,406,250.0	50,000,000.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
												Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	5 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %				
3.00	0 2	02.00	5 2	0 0 5	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kota Makassar				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3000 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	628,662,514.82	698,849,139.97	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	0 2	02.00	5 2	0 0 6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Kota Makassar				Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	77 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	153,906,950.0	164,946,019.50	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

3.00	02	02.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					% ASN berkinerja sangat baik	100 %				884,161,912.10	1,126,101,515.25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
3.00	02	02.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				Kota Makassar			Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian nya	115 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	317,714,412.10	328,301,040.25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
												Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	90 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %				
3.00	02	02.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya				Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	258 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	221,500,000.0	312,500,000.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	02	02.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu				Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	183 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	124,650,000.0	253,400,000.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	02	02.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				Kota Makassar			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	115 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	115 Orang	220,297,500.0	231,900,475.0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.00	03				Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan														
3.00	01	01.00			Badan Kepegawaian Daerah											13,231,869,802.96	13,497,299,610.31		
3.00	03	01.00	02		PROGRAM PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI APARATUR (Prioritas)					Cakupan SDM yang ditempatkan sesuai kompetensinya (Prioritas)	75 %					2,655,000,000.0	2,205,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	02	001	Pelaksanaan pemetaan dan evaluasi kompetensi bagi pegawai ASN				Kota Makassar			Jumlah pelaksanaan pemetaan dan evaluasi kompetensi	2 Kali	Peningkatan jumlah aparat yang ditempatkan sesuai kompetensinya	80 %	750,000,000.0	800,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
												Jumlah penerapan talent management	1 laporan	Pengembangan manajemen talenta	40 %				
												Jumlah alat ukur / bank data soal uji kompetensi	2 paket	Ketersediaan alat ukur uji kompetensi	80 %				

3.00	03	01.00	02	002	Penyusunan metoda / alat ukur penilaian kompetensi				Kota Makassar			Jumlah alat ukur / bank data soal uji kompetensi	1 Paket	Ketersediaan alat ukur penilaian kompetensi	80 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	02	003	Pengolahan hasil penilaian kompetensi				Kota Makassar			Jumlah rekomendasi hasil penilaian kompetensi	1 Dokumen	Ketersediaan hasil penilaian kompetensi	80 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	02	004	Digitalisasi arsip hasil assessment				Kota Makassar			Jumlah dokumen hasil assessment yang terdigitalisasi	100 Dokumen	Ketersediaan data digital hasil assessment	80 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	02	005	Pengembangan sistem talent management di lingkup Pemprov.Sulsel				Kota Makassar			Jumlah sistem yang dibangun dan diterapkan	1 Sistem	Keterediaan sistem talent management	80 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	02	006	Peningkatan kompetensi assessor				Kota Makassar			Jumlah pelatihan/workshop/bimtek	10 Laporan	Peningkatan kompetensi assessor	85 %	80,000,000.0	80,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	02	007	Konseling kerja peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai				Kota Makassar			Jumlah peserta yang mengikuti konseling kerja	100 Orang	Peningkatan jumlah aparat yang mengikuti konseling kerja	100 %	75,000,000.0	75,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	02	008	Penyusunan pedoman konseling kerja peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai				Kota Makassar			Jumlah pedoman konseling kerja	1 Buku Pedoman	Ketersediaan pedoman konseling kerja	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	02	009	Pedoman konseling dan coaching pegawai di lingkup Pemprov Sulsel				Kota Makassar			Jumlah dokumen pedoman konseling dan coaching pegawai yang disusun/dievaluasi	1 Dokumen	Ketersediaan pedoman konsling dan coaching pegawai	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	02	010	Pembangunan ruang assessment center				Kota Makassar			Jumlah ruangan assessment yang dibangun/dipelihara	10 Ruangan	Ketersediaan bangunan gedung assessment center	75 %	500,000,000.0	0.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	02	011	Sosialisasi peran assessment center dalam pengelolaan sumber daya manusia				Kota Makassar			Jumlah peserta sosialisasi peran assessment center	100 Orang	Peningkatan jumlah aparat yang memahami peran assessment center	100 Orang	25,000,000.0	25,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	02	012	Penataan manajemen dan infrastruktur penilaian kompetensi				Kota Makassar			Jumlah infrastruktur dan instrumen penilaian kompetensi	1 Instrumen	Ketersediaan instrumen penilaian kompetensi	80 %	400,000,000.0	500,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	

3.00	03	01.00	02	013	Workshop peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai			Kota Makassar			Jumlah peserta peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai	120 Orang	Peningkatan jumlah aparatur yang meningkat kompetensi dan kinerjanya	100 %	25,000,000.0	25,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	02	014	Penyusunan Regulasi Pedoman Model Kerja ASN Pemprov.Sulsel berbasis teamwork			Kota Makassar			Jumlah dokumen pedoman model kerja	1 Dokumen	Ketersediaan pedoman model kerja	1 Dokumen	100,000,000.0	0.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	02	015	Penerapan Model Kerja ASN Pemprov.Sulsel berbasis teamwork			Kota Makassar			Jumlah OPD yang menerapkan model kerja berbasis teamwork	1 OPD	Peningkatan jumlah OPD yang menerapkan model kerja berbasis teamwork	1 OPD	200,000,000.0	200,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	02	016	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Model Kerja ASN			Kota Makassar			Jumlah laporan monev penerapan model kerja	1 Laporan	Peningkatan model kerja ASN mengikuti pola membership type	80 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
<b>3.00</b>	<b>03</b>	<b>01.00</b>	<b>03</b>		<b>PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN</b>					<b>% Terisinya formasi</b>	<b>100 %</b>				<b>150,000,000.0</b>	<b>150,000,000.0</b>	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>	
3.00	03	01.00	03	001	Seleksi calon peserta pendidikan kedinasan			Kota Makassar			Jumlah pelamar calon peserta pendidikan kedinasan	1000 Orang	Ketersediaan jumlah calon peserta pendidikan kedinasan	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	03	002	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan			Kota Makassar			Jumlah laporan hasil pemantauan penyelenggaraan pendidikan	1 Laporan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan bagi PNS	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
<b>3.00</b>	<b>03</b>	<b>01.00</b>	<b>04</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KINERJA APARATUR</b>					<b>% Pegawai yang menerima penghargaan</b>	<b>100 %</b>				<b>1,446,000,000.0</b>	<b>1,027,000,000.0</b>	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>	
										<b>Jumlah pegawai yang menerima tunjangan tambahan penghasilan</b>	<b>26000 Orang</b>							
3.00	03	01.00	04	002	Pelayanan administrasi pensiun, cuti, dan KGB PNS			Kota Makassar			Jumlah usulan yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut	1200 Usulan	Ketersediaan layanan SK pensiun, cuti dan KGB pegawai	100 %	250,000,000.0	260,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	04	003	Pengelolaan tunjangan penghasilan PNS berbasis kinerja			Kota Makassar			Jumlah laporan pengelolaan tunjangan berbasis kinerja	12 Laporan	Ketersediaan laporan pengelolaan tunjangan berbasis kinerja	90 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	



3.00	03	01.00	04	005	Penganugerahan lancana karya satya bagi PNS Pemprov.Sulsel			Kota Makassar			Jumlah PNS Pemprov.Sulsel penerima lancana karya satya 10, 20, dan 30 tahun	380 Orang	Peningkatan kinerja dan prestasi pegawai	380 Orang	75,000,000.0	80,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	04	006	Penyelenggaraan persemayaman bagi pegawai ASN dan keluarga lingkup Pemprov Sulsel			Kota Makassar			Jumlah pelayanan persemayaman bagi PNS yang meninggal	15 Orang	Ketersediaan layanan persemayaman bagi PNS yang meninggal	15 Orang	371,000,000.0	327,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	04	007	Pembangunan / Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Berbasis IT			Kota Makassar			Jumlah sistem yang terbangun	1 Sistem	Ketersediaan sistem manajemen kinerja berbasis web	80 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	04	008	Penyusunan pedoman manajemen kinerja dan pemberian tunjangan kinerja			Kota Makassar			Jumlah pedoman penilaian kinerja dan pemberian tunjangan kinerja	2 Dokumen	Ketersediaan pedoman pemberian tunjangan kinerja	2 Dokumen	400,000,000.0	0.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	04	009	Bimtek penerapan sistem penilaian kinerja berbasis IT			Kota Makassar			Jumlah peserta bimtek	100 Orang	Peningkatan jumlah aparatur yang memahami penerapan sistem penilaian kinerja berbasis web	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	04	011	Sosialisasi pedoman manajemen kinerja dan pemberian tunjangan kinerja			Kota Makassar			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan manajemen kinerja pegawai	10000 Orang	Peningkatan jumlah aparatur yang memahami kebijakan manajemen kinerja pegawai	250 Orang	50,000,000.0	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	04	013	Bimtek layanan administrasi pensiun dan cuti PNS			Kota Makassar			Jumlah peserta bimtek	100 Orang	Peningkatan jumlah aparat yang memahami layanan administrasi pensiun pegawai	90 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	04	016	Pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi			Kota Makassar			Jumlah PNS yang menerima penghargaan	25 orang	Peningkatan prestasi kerja aparat	85 %	50,000,000.0	60,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
<b>3.00</b>	<b>03</b>	<b>01.00</b>	<b>05</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN APARATUR</b>					<b>% Pegawai yang menerima sanksi disiplin</b>	<b>100 %</b>			<b>590,000,000.0</b>	<b>635,000,000.0</b>	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>		
3.00	03	01.00	05	001	Penanganan kasus-kasus kepegawaian			Kota Makassar			Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	10 Kasus	Ketersediaan rekomendasi penanganan kasus kepegawaian	100 %	60,000,000.0	70,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	

3.00	03	01.00	05	002	Pelaksanaan sumpah / janji PNS			Kota Makassar			Jumlah pelaksanaan sumpah / janji PNS	2 Kali	Ketersediaan aparat yang mengikuti pengambilan sumpah/janji PNS	200 Orang	30,000,000.0	35,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	05	003	Pengelolaan administrasi izin perkawinan dan izin perceraian PNS			Kota Makassar			Jumlah permohonan izin yang ditangani	10 Permohonan	Ketersediaan pemberian rekomendasi izin kawin dan izin cerai PNS	100 %	25,000,000.0	30,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	05	005	Pelayanan administrasi kenaikan pangkat			Kota Makassar			Jumlah usulan yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut	6000 Dokumen	Ketersediaan layanan kenaikan pangkat PNS	100 %	350,000,000.0	365,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	05	006	Pelayanan administrasi perpindahan PNS			Kota Makassar			Jumlah penyelesaian usulan pindah pegawai yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut	3857 Dokumen	Ketersediaan layanan SK mutasi pindah pegawai	100 %	100,000,000.0	110,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	05	007	Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat Lingkup Pemprov.Sulsel dan Kab/Kota			Kota Makassar			Jumlah peserta rakernis pengelolaan administrasi kenaikan pangkat lingkup pemprov.sulsel	100 Orang	Peningkatan jumlah aparat yang memahami pengelolaan administrasi kenaikan pangkat	90 %	25,000,000.0	25,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
<b>3.00</b>	<b>03</b>	<b>01.00</b>	<b>06</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KARIER APARATUR</b>					<b>% Kebutuhan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai standar yang telah ditentukan</b>	<b>100 %</b>				<b>1,025,000,000.0</b>	<b>1,300,000,000.0</b>	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>	
3.00	03	01.00	06	001	Penataan dan pengelolaan kebijakan manajemen kepegawaian penempatan pegawai dalam JPT dan Jabatan Administrasi sesuai sistem meritokrasi SDM aparatur			Kota Makassar			Jumlah dokumen dan regulasi pembinaan karier ASN	1 Dokumen	Ketersediaan regulasi pembinaan karier ASN	85 %	100,000,000.0	130,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
											Jumlah instrumen (sistem) pola karier	1 Sistem	Ketersediaan sistem pola karier	85 %				
3.00	03	01.00	06	002	Sosialisasi kebijakan manajemen kepegawaian yang berbasis sistem meritokrasi SDM aparatur			Kota Makassar			Jumlah peserta	150 Orang	Peningkatan jumlah aparat yang memahami kebijakan manajemen pegawai berbasis meritokrasi	150 Orang	25,000,000.0	25,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	

3.00	03	01.00	06	003	Penataan dalam JPT secara terbuka di lingkungan Pemprov.Sulsel			Kota Makassar			Jumlah pelaksanaan pengisian jabatan secara terbuka	8 Kali	Ketersediaan pengisian dalam jabatan secara terbuka	100 %	400,000,000.0	500,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	06	004	Penataan dalam Jabatan Administrasi sesuai merit sistem di lingkungan Pemprov.Sulsel			Kota Makassar			Jumlah pelaksanaan pengisian jabatan secara merit sistem	8 Kali	Ketersediaan pengisian dalam jabatan administrasi berbasis merit sistem	100 %	80,000,000.0	100,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	06	005	Penyelenggaraan pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan pejabat JPT dan JA serta kepala instansi vertikal di lingkungan dan di wilayah kerja Pemprov.Sulsel			Kota Makassar			Jumlah pelaksanaan pengambilan sumpah	8 Kali	Ketersediaan pelaksanaan pengambilan sumpah dalam JPT dan JA	100 %	125,000,000.0	150,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	06	006	Pengelolaan administrasi JPTP dan JA di lingkungan pemerintah kab/kota se Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah dokumen	10 Dokumen	Ketersediaan dokumen pengelolaan dalam jabatan	100 %	50,000,000.0	75,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	06	007	Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah			Kota Makassar			Jumlah pelaksanaan ujian	2 Kali	Peningkatan jumlah aparat yang mengikuti pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	90 %	20,000,000.0	30,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	06	008	Pengelolaan izin belajar dan tugas belajar bagi PNS Pemprov Sulsel			Kota Makassar			Jumlah usulan yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut	300 Usulan	Ketersediaan layanan pengelolaan izin belajar dan tugas belajar bagi PNS	100 %	25,000,000.0	35,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	06	009	Penataan PNS dalam jabatan fungsional			Kota Makassar			Jumlah penatausahaan dalam jabatan fungsional	1000 SK	Ketersediaan SK dalam jabatan fungsional	100 %	100,000,000.0	130,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	06	010	Rapat koordinasi jabatan fungsional			Kota Makassar			Jumlah peserta rakor jabatan fungsional	100 Orang	Peningkatan jumlah aparat yang memahami pengelolaan dalam jabatan fungsional	90 %	25,000,000.0	25,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	06	011	Penyusunan rencana kebutuhan diklat ASN			Kota Makassar			Jumlah dokumen rencana kebutuhan diklat	2 Dokumen	Ketersediaan dokumen rencana kebutuhan diklat	100 %	75,000,000.0	100,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
<b>3.00</b>	<b>03</b>	<b>01.00</b>	<b>07</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN INFORMASI ASN</b>					<b>Cakupan pegawai yg direkrut sesuai dengan usulan formasi CPNS</b>	<b>100 %</b>			<b>580,000,000.0</b>	<b>630,000,000.0</b>	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>		



3.00	03	01.00	5003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kantor BKD Prov Sulse Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	32 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	1,115,000,000.0	1,115,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	5005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kantor BKD Prov Sulse Kota Makassar			Jumlah ATK yang tersedia	60 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	1,200,000,000.0	1,300,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	5006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Gedung kantor BKD Prov Sulse Kota Makassar			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	100 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	20,000,000.0	20,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	5008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Makassar			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	4 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	1,275,000,000.0	1,350,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	5009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kota Makassar			Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	2 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	50,000,000.0	70,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	5010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kota Makassar			Jumlah perjalanan dinas	180 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	100 Orang	1,100,869,802.96	1,150,299,610.31	Badan Kepegawaian Daerah	
<b>3.00</b>	<b>03</b>	<b>01.00</b>	<b>51</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100 %</b>				<b>1,270,000,000.0</b>	<b>1,760,000,000.0</b>	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>	
3.00	03	01.00	5104	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Gedung kantor BKD Prov Sulse Kota Makassar			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	80 %	200,000,000.0	300,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	5106	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	25 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	80 %	500,000,000.0	550,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	5109	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor BKD Prov Sulse Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	60 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	80 %	220,000,000.0	500,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	5110	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor BKD Prov Sulse Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	85 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	80 %	100,000,000.0	110,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	

3.00	03	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Kantor BKD Prov Sulsel Kota Makassar			Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	3 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	250,000,000.0	300,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
											Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	48 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	100 %				
3.00	03	01.00	52		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %				310,000,000.0	330,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	52	01	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	100 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	10,000,000.0	10,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	52	02	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	120,000,000.0	130,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	0 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	4 Dokumen				
3.00	03	01.00	52	04	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			Kota Makassar			Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	1 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
											Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	2 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %				

3.00	03	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan				Kota Makassar			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	50,000,000.0	60,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun				Kota Makassar			Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	3 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	20,000,000.0	20,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran				Kota Makassar			Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	2 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %	10,000,000.0	10,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
<b>3.00</b>	<b>03</b>	<b>01.00</b>	<b>53</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>							<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>				<b>360,000,000.0</b>	<b>370,000,000.0</b>	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>	
3.00	03	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				Kantor BKD Prov Sulsel Kota Makassar			Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian nya	2 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	30,000,000.0	0.0	Badan Kepegawaian Daerah	
												Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	12 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %				
3.00	03	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya				Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	110 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	100,000,000.0	120,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu				Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	221 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	130,000,000.0	150,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
3.00	03	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				Kota Makassar			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	300 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	300 Orang	100,000,000.0	100,000,000.0	Badan Kepegawaian Daerah	
<b>3.00</b>	<b>03</b>	<b>02.00</b>			<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>											<b>16,901,186,023.99</b>	<b>17,527,616,417.36</b>		

3.00	03	02.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR (Prioritas)					Cakupan SDM Aparatur yang lulus Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Diklat Manajerial (Prioritas)	100 %					3,001,304,370.99	3,112,493,647.42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3.00	03	02.00	01	001	Pelaksanaan Rumpun Pelatihan Kepemimpinan			Kota Makassar				Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	120 Orang	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	120 Orang	1,094,998,000.0	1,095,913,000.42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3.00	03	02.00	01	002	Pelaksanaan Rumpun Pelatihan Latsar			Kota Makassar				Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan Latsar	120 Orang	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan Latsar	120 Orang	633,550,000.0	723,538,147.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3.00	03	02.00	01	003	Pendampingan dan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Latsar dan Pelatihan Revolusi Mental			Kota Makassar				Jumlah pembinaan penyelenggaraan diklat kepemimpinan Tk. III dan Tk. IV, diklat Latsar dan diklat peningkatan Revolusi mental kab/kota se sulse	24 Kab/kota/instansi Pembina	Jumlah pembinaan penyelenggaraan diklat kepemimpinan Tk. III dan Tk. IV, diklat Latsar dan diklat peningkatan Revolusi mental kab/kota se sulse	24 Kab/kota/instansi pembina	157,398,870.99	161,133,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
												Jumlah Rapat koordinasi pengembangan kompetensi manajerial prov. dan kab./kota	30 Orang	Jumlah Pembinaan pengembangan kompetensi manajerial prov. dan kab./kota	30 Orang				
3.00	03	02.00	01	004	Pelaksanaan Rumpun Pelatihan Revolusi Mental			Kota Makassar				Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan Revolusi Mental	60 Orang	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan Revolusi Mental	60 Orang	208,000,000.0	209,300,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3.00	03	02.00	01	006	Pelaksanaan Rumpun Pelatihan Fungsional			Kota Makassar				Jumlah aparat yang mengikuti diklat fungsional	85 Orang	Jumlah aparat yang mengikuti diklat fungsional	85 Orang	325,000,000.0	335,000,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3.00	03	02.00	01	007	Pelaksanaan Rumpun Pelatihan Teknis			Kota Makassar				Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan teknis	125 Orang	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan teknis	125 Orang	318,000,000.0	320,000,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	



3.00	03	02.00	01	008	Pendampingan Penyelenggaraan Rumpun Diklat Teknis dan Fungsional dan Pemerintahan Provinsi dan Kab/Kota se Sulsel			Kota Makassar				Jumlah pelatihan teknis , fungsional dan pemerintahan yang diselenggarakan	24 Kab/kota se Sulsel/Instansi Pembina	Jumlah pelatihan teknis , fungsional dan pemerintahan yang diselenggarakan	24 Kab/kota se Sulsel/instansi pembina	173,948,000.0	176,200,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
												Jumlah peserta rapat koordinasi pengembangan kompetensi teknis/fungsional dan pemerintahan	24 Kab/kota se Sulsel/Instansi Pembina	Jumlah peserta rapat koordinasi pengembangan kompetensi teknis/fungsional dan pemerintahan	24 Kab/kota se Sulsel/Instansi Pembina			
3.00	03	02.00	01	009	Pelaksanaan Rumpun Pelatihan Pemerintahan			Kota Makassar				Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan pemerintahan	25 Orang	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan pemerintahan	25 Orang	90,409,500.0	91,409,500.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>3.00</b>	<b>03</b>	<b>02.00</b>	<b>11</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN KEDIKLATAN</b>					<b>Cakupan ketersediaan pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan</b>	<b>100 %</b>					<b>663,227,370.0</b>	<b>687,809,418.93</b>	<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>
3.00	03	02.00	11	001	Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Kediklatan			Kota Makassar				Jumlah sertifikat ISO 9001 2015	3 Dokumen	Tercapainya kualitas penyelenggaraan diklat sesuai standar SMM ISO 9001 2015	3 Dokumen	108,095,000.0	109,095,000.93	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	11	002	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan			Kota Makassar				Jumlah aparatur satuan pamong praja lingkup pemerintah prov. Sulsel dan Kab/Kota Se Sulsel meningkat kompetensinya	40 Orang	Terjaminnya kompetensi aparatur satuan pamong praja lingkup pemerintah prov. Sulsel dan Kab/Kota Se Sulsel	40 Orang	124,605,000.0	126,905,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	11	003	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi			Kota Makassar				Jumlah peningkatan kompetensi penyusunan pengembangan kompetensi bagi ASN pemerintah Prov. Sulsel	30 Orang	Jumlah Workshop penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi	30 Orang	168,527,370.0	189,809,418.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



3.00	03	02.00	50		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %				7,080,958,414.0	7,343,409,081.67	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia	
3.00	03	02.00	5001	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Makassar				Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	1 Jenis	1,169,000,000.0	1,430,388,081.67	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	5002	0	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Makassar				Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	13 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	13 Unit	21,500,000.0	21,800,000.0	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
												Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	13 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	13 Unit			
3.00	03	02.00	5003	0	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kota Makassar				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	68 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	1,548,740,000.0	1,549,740,000.0	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	5005	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggunaan			Kota Makassar				Jumlah ATK yang tersedia	30 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	592,651,000.0	592,651,000.0	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	5006	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Makassar				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	80,000,000.0	80,000,000.0	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	5008	0	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Makassar				Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	40 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	3,219,067,414.0	3,218,830,000.0	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	5010	0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kota Makassar				Jumlah perjalanan dinas	50 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	50 Orang	450,000,000.0	450,000,000.0	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
<b>3.00</b>	<b>03</b>	<b>02.00</b>	<b>51</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100 %</b>					<b>3,248,587,376.0</b>	<b>3,368,993,947.37</b>	<b>Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia</b>
3.00	03	02.00	5104	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kota Makassar				Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	41 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	1,861,932,376.0	1,960,338,947.37	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
3.00	03	02.00	5106	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kota Makassar				Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	13 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	568,280,000.0	570,280,000.0	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia

3.00	03	02.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	76 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	818,375,000.0	838,375,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3.00	03	02.00	52		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %				1,537,713,144.0	1,594,705,312.13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3.00	03	02.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	50 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	158,475,000.0	160,075,000.13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3.00	03	02.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	588,425,127.0	637,819,293.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	2 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	4 Dokumen				
3.00	03	02.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			Kota Makassar			Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	10 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	100 %	225,145,000.0	225,145,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
											Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	12 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %				
3.00	03	02.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kota Makassar			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	454,350,019.0	460,350,019.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

3.00	03	02.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Kota Makassar			Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	98,500,000.0	98,500,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3.00	03	02.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Kota Makassar			Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	4 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %	12,817,998.0	12,816,000.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
<b>3.00</b>	<b>03</b>	<b>02.00</b>	<b>53</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>	<b>100 %</b>				<b>735,575,984.0</b>	<b>762,893,583.01</b>	<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	
3.00	03	02.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Kota Makassar			Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian nya	120 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	735,575,984.0	762,893,583.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
											Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	4 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %				
<b>3.00</b>	<b>03</b>				<b>Penelitian dan Pengembangan</b>													
<b>3.00</b>	<b>04</b>	<b>01.00</b>			<b>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>										<b>11,612,991,976.46</b>	<b>11,443,419,232.97</b>		
<b>3.00</b>	<b>04</b>	<b>01.00</b>	<b>01</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI PEMERINTAHAN (Prioritas)</b>					<b>% Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah (Prioritas)</b>	<b>20 %</b>				<b>4,941,641,751.46</b>	<b>5,222,916,752.81</b>	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	
3.00	04	01.00	01	001	Science Techno Park (STP) Berbasis Pertanian			Kabupaten Maros			Jumlah STP Berbasis Pertanian	1 STP	Jumlah STP Berbasis Pertanian dalam Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Menjamin Keberlanjutan Pembangunan	1 STP	402,000,000.0	445,200,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.00	04	01.00	01	002	Science Techno Park (STP) Berbasis Kehutanan			Kabupaten Maros			Jumlah STP Berbasis Kehutanan	1 STP	Jumlah STP Berbasis Kehutanan dalam Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Menjamin Keberlanjutan Pembangunan	1 STP	804,000,000.0	875,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	

3.00	04	01.00	01	003	Penguatan Kluster Inovasi			Sulawesi Selatan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kluster Inovasi	1 Rekomendasi	Jumlah Kebijakan Penguatan Kluster Inovasi yang Ditindaklanjuti	1 Kebijakan	230,000,000.0	230,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
											Jumlah Produk Komoditas Unggulan Daerah	5 Produk	Jumlah Hillirisasi Produk Komoditas Unggulan Daerah	5 Produk				
3.00	04	01.00	01	006	Pekan Inovasi Sulawesi Selatan			Sulawesi Selatan			Jumlah Booth Pameran Hasil Riset dan Inovasi Daerah	30 booth	Jumlah Pengunjung Pameran Hasil Riset dan Inovasi Daerah	300 orang	470,000,000.0	470,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
											Jumlah Artikel Seminar Kelitbangan	10 artikel	Jumlah Artikel Seminar Kelitbangan yang Dipublikasikan	10 artikel				
											Jumlah Inkubator Bisnis Teknologi	5 inkubator	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Inovasi Daerah dan Inkubator Bisnis Teknologi untuk Menumbuhkembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing	1 rekomendasi				
3.00	04	01.00	01	008	Pengembangan Riset pada Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan Balitbangda Prov. Sulsel			Kabupaten Barru			Jumlah Data dan Informasi Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1 rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Perikanan dan Kelautan	1 rekomendasi	256,941,555.46	256,267,297.83	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.00	04	01.00	01	009	Laboratorium Inovasi			Sulawesi Selatan			Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	20 %	Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah	20 %	300,000,000.0	300,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
											Persentase Kebijakan Inovasi di Daerah	60 %	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	60 %				

3.00	04	01.00	01	011	Governors Award			Sulawesi Selatan			Jumlah OPD Provinsi/Lembaga Vertikal Berprestasi	3 OPD/lembaga	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di OPD Provinsi	1 Rekomendasi	250,000,000.0	250,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
											Jumlah Kab./kota Berprestasi	3 Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten/kota	1 rekomendasi				
											Jumlah Lembaga Non Pemerintah Berprestasi	3 lembaga	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lembaga Non Pemerintah	1 rekomendasi				
											Jumlah Peserta Launching Buku Inovasi	100 orang	Jumlah Peserta Launching yang Mengetahui Inovasi Sulsel	100 orang				
3.00	04	01.00	01	013	Pengembangan Inkubator Inovasi			Sulawesi Selatan			Jumlah Produk Inkubator Inovasi	2 produk	Jumlah Produk Implementasi Inkubator Inovasi	2 produk	350,000,000.0	350,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.00	04	01.00	01	014	Revitalisasi Kebun Raya Pucak			Kabupaten Maros			Jumlah Kebun Raya	1 Kebun Raya	Jumlah Kebun Raya dalam Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Menjamin Keberlanjutan Pembangunan	1 Kebun Raya	1,878,700,196.0	2,046,449,454.98	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.00	04	01.00	02		PROGRAM KELITBANGAN DAN PEMANFAATAN IPTEK DAERAH					Jumlah rekomendasi kebijakan hasil Kelitbangan dan pemanfaatan iptek daerah	9 Rekomendasi				2,647,200,000.0	2,047,200,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	

3.00	04	01.00	02	002	Pemeliharaan Benih Eksplorasi dan Tanaman Koleksi			Kabupaten Maros			Jumlah Pemeliharaan Tanaman Koleksi	200 pohon	Jumlah Tanaman Koleksi yang terpelihara	200 pohon	150,000,000.0	150,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
											Jumlah Spesies Benih Hasil Eksplorasi	50 Spesies	Jumlah Spesies Benih Koleksi	50 Spesies			
3.00	04	01.00	02	003	Eksplorasi Tumbuhan Sulawesi			Kabupaten Maros			Jumlah Tumbuhan Sulawesi	60 Spesies	Jumlah Tumbuhan Sulawesi yang Didokumentasikan dengan Baik	60 Spesies	100,000,000.0	100,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	01.00	02	004	Penelitian Peningkatan Produktivitas Ikan Nila Air Asin di Sulawesi Selatan			Sulawesi Selatan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Produktivitas Ikan Nila Air Asin di Sulawesi Selatan	1 rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti untuk Produktivitas Ikan Nila Air Asin di Sulawesi Selatan dalam Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Perikanan dan Kelautan	1 rekomendasi	150,000,000.0	0.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	01.00	02	007	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan			Sulawesi Selatan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik	1 rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 rekomendasi	150,000,000.0	150,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	01.00	02	008	Pengembangan Kebijakan dan Isu-isu Strategis Sektor Pemerintahan			Sulawesi Selatan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Quick Research Isu-isu Strategis	1 rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti Hasil Quick Research Isu-isu Strategis	1 rekomendasi	100,000,000.0	100,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah





3.00	04	01.00	02	011	Penelitian Kebijakan Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Kepemudaan			Sulawesi Selatan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Kepemudaan	1 rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti untuk Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Kepemudaan	1 rekomendasi	200,000,000.0	200,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.00	04	01.00	02	012	Penelitian Kebijakan Sosial dan Pengembangan Karakter			Sulawesi Selatan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kesehatan Preventif	0 rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti Pengembangan Kesehatan Preventif	0 rekomendasi	200,000,000.0	200,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
											Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata	0 rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti Pengembangan Destinasi Pariwisata	0 rekomendasi				
											Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Strategi Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial	1 rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti Pengembangan Strategi Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial	1 rekomendasi				
											Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan Vokasional	0 rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti Pengembangan Pendidikan Vokasional	0 rekomendasi				
3.00	04	01.00	02	013	Peningkatan Kualitas Kelitbang Utama			Sulawesi Selatan			Jumlah Persidangan Tim Pengendali Mutu (TPM)	4 sidang	Jumlah Laporan Hasil Persidangan Tim Pengendali Mutu (TPM)	1 laporan	347,200,000.0	347,200,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
											Jumlah Rancangan Rekomendasi Majelis Pertimbangan (MP)	2 rancangan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Majelis Pertimbangan (MP)	1 rekomendasi				



3.00	04	01.00	02	021	Kajian Penggunaan Teknologi Alat Tangkap di Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah rekomendasi kebijakan Pengembangan Teknologi Alat Tangkap di Sulawesi Selatan	1 rekomendasi	Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam Pengembangan Teknologi Alat Tangkap di Sulawesi Selatan	1 rekomendasi	150,000,000.0	0.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.00	04	01.00	50		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %					1,840,993,077.0	1,909,228,170.88	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.00	04	01.00	50	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Sulawesi Selatan				Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	4 Jenis	18,200,000.0	18,200,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.00	04	01.00	50	02	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Sulawesi Selatan				Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	7 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	7 Unit	20,000,000.0	20,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
												Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	8 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	8 Unit				
3.00	04	01.00	50	03	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Sulawesi Selatan				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	21 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	655,200,000.0	655,200,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.00	04	01.00	50	05	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Sulawesi Selatan				Jumlah ATK yang tersedia	55 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	328,368,077.0	364,728,170.88	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.00	04	01.00	50	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Sulawesi Selatan				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	18,100,000.0	18,100,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.00	04	01.00	50	08	Penyediaan Makanan dan Minuman			Sulawesi Selatan				Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	3 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	452,125,000.0	484,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.00	04	01.00	50	09	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Sulawesi Selatan				Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	99,000,000.0	99,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.00	04	01.00	50	00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Sulawesi Selatan				Jumlah perjalanan dinas	29 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	29 Orang	250,000,000.0	250,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	

3.00	04	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %				908,083,605.0	941,741,075.94	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.00	04	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Sulawesi Selatan				Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	9 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	142,250,000.0	142,250,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Sulawesi Selatan				Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	15 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	262,780,000.0	262,780,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Sulawesi Selatan				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	41 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	448,500,000.0	448,500,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Sulawesi Selatan				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	54,553,605.0	88,211,075.94	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %				930,474,241.0	964,961,604.66	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.00	04	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Sulawesi Selatan				Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	100 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	200,000,000.0	200,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	04	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Sulawesi Selatan				Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	202,104,241.0	236,591,604.66	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
												Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen			
												Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	0 Dokumen			



3.00	04	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Sulawesi Selatan			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	320 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	128,000,000.0	128,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3.00	04	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Sulawesi Selatan			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	50 Orang	25,000,000.0	25,000,000.0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
<b>3.00</b>	<b>0</b>				<b>Sekretariat Dewan</b>													
<b>3.00</b>	<b>0</b>	<b>01.00</b>			<b>Sekretariat DPRD</b>										<b>235,133,938,249.0</b>	<b>240,514,695,499.36</b>		
<b>3.00</b>	<b>05</b>	<b>01.00</b>	<b>01</b>		<b>PROGRAM PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT</b>					<b>% Usulan rees yang diakomodir</b>	<b>100 %</b>				<b>35,233,914,760.0</b>	<b>35,702,068,373.19</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	
3.00	05	01.00	01	001	Reses DPRD			Kab/Kota			Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.	3 Kegiatan	Terlaksananya Reses DPRD dan Terakomodirnya Aspirasi Masyarakat.	100 %	31,715,200,000.0	31,931,482,137.19	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	01	002	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama			Kab/Kota			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	7 Kegiatan	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	100 %	3,518,714,760.0	3,770,586,236.0	Sekretariat DPRD	
<b>3.00</b>	<b>05</b>	<b>01.00</b>	<b>02</b>		<b>PROGRAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>					<b>% Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RPKD</b>	<b>100 %</b>			<b>26,953,768,636.0</b>	<b>27,856,831,390.61</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>		
3.00	05	01.00	02	001	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan DPRD			Kota Makassar			Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan DPRD	18 Kegiatan	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Pimpinan DPRD	100 %	6,410,011,600.0	6,551,012,760.0	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	02	002	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Musyawarah			Kota Makassar			Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Musyawarah	4 Kegiatan	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Badan Musyawarah	100 %	1,862,274,240.0	1,915,087,555.01	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	02	003	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi			Kota Makassar			Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi	11 Kegiatan	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Komisi	100 %	14,305,243,000.0	14,676,867,300.0	Sekretariat DPRD	

3.00	05	01.00	02	004	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah			Kota Makassar				Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah	6 Kegiatan	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah	100 %	1,659,913,600.0	1,825,904,960.0	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	02	005	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Anggaran			Kota Makassar				Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Anggaran	4 Kegiatan	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Badan Anggaran	100 %	2,360,454,520.0	2,496,499,972.0	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	02	006	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kehormatan			Kota Makassar				Jumlah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kehormatan	4 Kegiatan	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Badan Kehormatan	100 %	355,871,676.0	391,458,843.60	Sekretariat DPRD	
<b>3.00</b>	<b>05</b>	<b>01.00</b>	<b>03</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>					<b>Cakupan anggota DPRD yang kompeten dibidangnya</b>	<b>100 %</b>					<b>18,355,683,917.0</b>	<b>18,961,895,664.63</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	
3.00	05	01.00	03	001	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Bidang Legislasi			Kota Makassar				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Bidang Legislasi	4 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Pimpinan dan Anggota DPRD Bidang Legislasi	100 %	13,954,450,400.0	14,149,895,440.0	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	03	002	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Bidang Anggaran			Kota Makassar				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Bidang Anggaran	4 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Pimpinan dan Anggota DPRD Bidang Anggaran	100 %	2,719,651,017.0	2,991,616,118.70	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	03	003	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Bidang Pengawasan			Kota Makassar				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Bidang Pengawasan	2 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Pimpinan dan Anggota DPRD Bidang Pengawasan	100 %	767,682,500.0	815,094,105.93	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	03	004	Penyediaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD			Kota Makassar				Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Diketahui Status kesehatannya	85 Orang	Meningkatnya kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	913,900,000.0	1,005,290,000.0	Sekretariat DPRD	
<b>3.00</b>	<b>05</b>	<b>01.00</b>	<b>04</b>		<b>PROGRAM PRODUK HUKUM DAERAH</b>					<b>Jumlah Ranperda yang difasilitasi pembahasannya</b>	<b>16 Ranperda</b>					<b>116,636,715,929.0</b>	<b>119,151,844,668.69</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	



3.00	05	01.00	04	001	Pembentukan Rancangan Perda/Perda APBD			Kota Makassar				Jumlah Rancangan Perda Menjadi Perda APBD	3 Rancangan Perda	Terwujudnya Peraturan Daerah APBD	3 Peraturan Daerah	11,882,006,340.0	11,960,206,974.0	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	04	002	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur			Kota Makassar				Jumlah Keputusan DPRD terkait LKPJ Gubernur	1 Keputusan	Terwujudnya Keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas LKPJ Gubernur	100 %	1,473,004,180.0	1,481,761,744.79	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	04	003	Pembentukan Rancangan Perda/Perda Non APBD			Kota Makassar				Jumlah Rancangan Perda Non APBD yang dibahas	13 Rancangan Perda	Terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Non APBD	13 Perda Non APBD	18,824,655,409.0	20,307,120,949.90	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	04	004	Penyebarluasan Peraturan Daerah			Kab/Kota				Jumlah Peraturan Daerah yang disosialisasikan	20 Kegiatan	Terwujudnya Sosialisasi Peraturan Daerah	100 %	84,457,050,000.0	85,402,755,000.0	Sekretariat DPRD	
<b>3.00</b>	<b>05</b>	<b>01.00</b>	<b>50</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>					<b>20,458,117,125.0</b>	<b>21,216,382,630.43</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	
3.00	05	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Makassar				Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	4 Jenis	1,894,832,967.38	1,996,770,057.04	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Makassar				Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	34 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	34 Unit	112,200,000.0	123,420,000.0	Sekretariat DPRD	
												Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	35 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	35 Unit				
3.00	05	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kota Makassar				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	204 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	7,604,089,174.98	7,964,498,092.48	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Makassar				Jumlah ATK yang tersedia	180 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	3,580,472,967.38	3,638,520,264.12	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Makassar				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	13 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	312,359,800.50	343,595,780.55	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Makassar				Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	3 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	4,568,120,067.38	4,724,932,074.12	Sekretariat DPRD	

3.00	05	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran				Kota Makassar				Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	253,550,000.0	278,905,000.0	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah				Kota Makassar				Jumlah perjalanan dinas	296 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	121 Orang	2,132,492,147.38	2,145,741,362.12	Sekretariat DPRD	
<b>3.00</b>	<b>05</b>	<b>01.00</b>	<b>51</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>							<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100 %</b>				<b>11,139,260,387.0</b>	<b>11,033,596,977.31</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	
3.00	05	01.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas				Kota Makassar				Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	6 Unit	Ketersediaan rumah jabatan/ rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	960,774,264.50	987,262,242.56	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama				Kota Makassar				Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	5 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	2,719,174,264.50	2,241,091,690.95	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas				Kota Makassar				Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	69 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	1,597,639,064.50	1,607,402,970.95	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	51	007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas				Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	260 Unit	Ketersediaan Perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas sesuai kebutuhan	100 %	2,663,024,264.50	2,729,326,690.95	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	51	008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas				Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	5 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	726,000,000.0	798,600,000.0	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor				Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	141 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	1,100,474,264.50	1,160,521,690.95	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor				Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	915,674,264.50	1,007,241,690.95	Sekretariat DPRD	

3.00	05	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Kota Makassar			Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	1 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	456,500,000.0	502,150,000.0	Sekretariat DPRD	
											Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	80 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	100 %				
<b>3.00</b>	<b>05</b>	<b>01.00</b>	<b>52</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					<b>% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu</b>	<b>100 %</b>			<b>1,635,598,861.0</b>	<b>1,696,221,164.68</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>		
3.00	05	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	2 Dokumen	199,650,000.0	219,615,000.0	Sekretariat DPRD	
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan					
											Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	1 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	1 Dokumen				
3.00	05	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD			Kota Makassar			Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	16 Laporan	Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan	100 %	1,240,808,861.0	1,261,952,164.68	Sekretariat DPRD	
											Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi	2 Jenis	Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan	100 %				
3.00	05	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kota Makassar			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	99,000,000.0	108,900,000.0	Sekretariat DPRD	

3.00	05	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Kota Makassar			Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	38,940,000.0	42,834,000.0	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Kota Makassar			Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	13 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %	57,200,000.0	62,920,000.0	Sekretariat DPRD	
<b>3.00</b>	<b>05</b>	<b>01.00</b>	<b>53</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>	<b>100 %</b>			<b>4,720,878,634.0</b>	<b>4,895,854,629.82</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>		
3.00	05	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Kota Makassar			Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian nya	120 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	105,490,000.0	108,927,132.42	Sekretariat DPRD	
											Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	11 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %				
3.00	05	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	916 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	2,810,822,134.0	2,921,904,347.40	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	345 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	1,414,066,500.0	1,435,473,150.0	Sekretariat DPRD	
3.00	05	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Kota Makassar			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	124 Orang	Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan	124 Orang	390,500,000.0	429,550,000.0	Sekretariat DPRD	
<b>3.00</b>	<b>0</b>				<b>Sekretariat Daerah</b>													
<b>3.00</b>	<b>0</b>	<b>01.01</b>			<b>Biro Hukum dan HAM</b>										<b>3,560,926,086.92</b>	<b>4,174,377,126.98</b>		
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.01</b>	<b>07</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM DAERAH</b>					Jumlah produk hukum daerah yang dievaluasi	12 Perda			<b>435,335,736.92</b>	<b>618,394,074.43</b>	<b>Biro Hukum dan HAM</b>		
										Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi	50 Perda							

3.00	06	01.01	07	005	Pemantauan Hasil Klarifikasi dan Evaluasi Perda Kab/Kota Wilayah I			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap produk hukum daerah	12 Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota	30,000,000.0	50,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	07	006	Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah I			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pelaksanaan Pengkajian Produk Hukum Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota	Tercapainya Harmonisasi / Sinkronisasi produk hukum daerah kab/kota	12 Kabupaten/Kota	40,000,000.0	60,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	07	007	Evaluasi/Asistensi Ranperda Kab/Kota Wilayah I			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah dokumen Sinkronisasi Antara Kebijakan Nasional dan Daerah	120 Dokumen	Terlaksananya Harmonisasi produk hukum daerah kab/kota	120 Dokumen	31,000,000.0	61,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	07	008	Evaluasi/Asistensi Ranperda Kab/Kota Wilayah II			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah dokumen Sinkronisasi Antara Kebijakan Nasional dan Daerah	120 Dokumen	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	120 Dokumen	35,000,000.0	65,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	07	009	Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah II			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah dokumen Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Pengkajian	12 Kabupaten / Kota	25,000,000.0	25,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	07	010	Rakontek Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah I Dan Wilayah II Kabupaten / Kota			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta Rakontek Binwas Produk Hukum Kabupaten / Kota	24 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Asistensi / Koordinasi Yang Efektif	24 Kabupaten/Kota	43,700,000.0	43,700,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	07	011	Pemantauan Hasil Fasilitasi Dan Evaluasi Perda Kab/Kota Untuk Wilayah II			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pembinaan Terhadap Produk Hukum Daerah	12 Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan Produk Hukum Daerah	12 Kabupaten/Kota	23,000,000.0	23,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	07	013	Pembinaan Dokumentasi Melalui JDIH			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Jaringan Informasi Hukum	1 Program	Tersedianya Dokumentasi Hukum	1 Program	41,450,000.0	42,450,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	07	015	Pengkajian Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD Kab/Kota Wilayah I			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah dokumen Sinkronisasi Antara Kebijakan Nasional dan Daerah	10 Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD Kab/Kota	10 Dokumen	25,000,000.0	45,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	

3.00	06	01.01	07	016	Pengkajian Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD Kab/Kota Wilayah II				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah dokumen sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah	10 Dokumen	Terlaksananya Fasilitas Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD Kab/Kota	10 Dokumen	25,000,000.0	45,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	07	017	Rapat Koordinasi isu- Isu Aktual Tentang Hukum				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta rapat koordinasi Isu- Isu Aktual Tentang Hukum	24 Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pemahaman Aparatur Hukum Tentang permasalahan Hukum	24 Kabupaten/Kota	73,935,736.92	95,994,074.43	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	07	018	Sistem Informasi Pengendalian Evaluasi dan Konsultasi Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota Wil I dan II				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kab/kota fasilitasi dan evaluasi secara online	24 Kabupaten/Kota	Terwujudnya fasilitasi dan evaluasi ranperda pajak dan retribusi daerah kab/kota wilayah I dan II	24 Kabupaten/Kota	20,000,000.0	20,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	07	019	FGD Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pelaksanaan FGD Penyusunan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	24 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Asistensi/Koordinasi Yang Efektif	24 Kabupaten/Kota	22,250,000.0	42,250,000.0	Biro Hukum dan HAM	
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.01</b>	<b>08</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DALAM RANGKA PEMANTAPAN ADVOKASI DAN PENGAMANAN YURIDIS KEROV BIJAKAN PEMERINTAHAN</b>						<b>% LHP aparat fungsional prov dan kab/kota yang ditindaklanjuti</b>	<b>100 %</b>				<b>560,015,926.0</b>	<b>677,342,553.13</b>	<b>Biro Hukum dan HAM</b>	
3.00	06	01.01	08	02	Advokasi hukum dengan Konsultan Hukum dan Pakar Hukum				Kota Makassar			Jumlah Advokasi Hukum dengan Konsultan Hukum dan Pakar Hukum yang dilaksanakan	22 Kasus/Perkara	Tersedianya Bahan Advokasi Hukum yang Sesuai dengan Perundang-undangan	22 Kasus/Perkara	66,000,000.0	76,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	08	03	Pemantapan Tugas Yudisial Pemda				Kota Makassar			Jumlah advokasi hukum dengan konsultan hukum dan pakar hukum yang terlaksana	22 Kasus /Perkara	Tersedianya Bahan Advokasi Hukum yang Sesuai Dengan Perkara	22 Kasus /Perkara	425,997,303.0	477,342,553.13	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	08	04	Tindak Lanjut Hasil Temuan Aparat Pengawasan Fungsional				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan	22 Kasus /Perkara	Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut	22 Kasus /Perkara	41,018,623.0	52,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	08	06	Pengelolaan Pengaduan				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	15 Dokumen	Laporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut	15 Dokumen	22,000,000.0	42,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	

3.00	06	01.01	08	009	Forum Komunikasi Bagian Hukum Pemerintah Daerah Prov. Sulsel			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Peserta Forum Komunikasi Bantuan Hukum	24 Kabupaten/Kota	Terciptanya Forum Komunikasi Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM	24 Kabupaten/Kota	5,000,000.0	30,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	09		<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN PRODUK HUKUM MELALUI SOSIALISASI DAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN</b>					Jumlah produk hukum yang disosialisasikan	2 Jenis					220,299,439.0	374,387,609.03	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	09	007	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Di Bidang Hukum			Provinsi Sulawesi Selatan				Peserta bintek kapasitas aparatur pemda dibidang hukum	24 Kabupaten/Kota	Meningkatnya Motivasi dan Kompetensi Aparatur Pemda Dibidang Hukum	24 Kabupaten/Kota	49,950,000.0	79,950,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	09	009	Monitoring pelaksanaan RANHAM Provinsi Sulsel			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah kab/kota yang dimonitoring dalam rangka pelaksanaan RAN HAM	24 Kab/Kota	Terwujudnya Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM	24 Kab/Kota	55,000,000.0	75,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	09	010	Penyuluhan hukum tentang produk hukum daerah			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah peserta penyuluhan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	24 Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Hukum dan Masyarakat Tentang Produk Hukum Daerah	24 Kabupaten/Kota	33,450,000.0	43,450,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	09	011	Bimtek Legal Drafting Tentang Peraturan Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah peserta Bimtek Legal Drafting Tentang Peraturan Daerah	24 Kabupaten/kota	Meningkatnya Pemahaman Teknis Penyusunan Perda	24 Kabupaten/Kota	38,600,000.0	68,600,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	09	015	Bimtek Penyusunan/perancangan Rancangan Peraturan Gubernur			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah peserta bintek perancangan/ penyusunan peraturan gubernur	24 Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kemampuan Aparatur dalam Pembuatan Peraturan Gubernur	24 kabupaten/Kota	35,600,000.0	65,600,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	09	016	Workshop Tentang Hukum Tata Pemerintahan Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Peserta Workshop Tata Pemerintahan Daerah	24 Kabupaten/ Kota	Di Perolehnya Informasi dan Pemahaman Teknis Tentang Hukum Tata Pemerintahan Daerah	24 Kabupaten/Kota	7,699,439.0	41,787,609.03	Biro Hukum dan HAM	

3.00	06	01.01	10		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM LEGISLASI DAERAH					Cakupan rancangan produk hukum/produk hukum (Perda,Pergub, Keppub, dan PKS) yang dikaji dan finalisasi	100 %				588,714,644.0	674,534,931.49	Biro Hukum dan HAM		
3.00	06	01.01	1003	0	Pemantapan/Harmonisasi,Pembahasan dan Penetapan Ranperda			Kota Makassar				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Yang Diharmonisasi Dari Pembahasan Hingga Penetapan Ranperda	15 Dokumen	Terkoordinasinya Penyusunan Ranperda Sesuai Agenda	15 Dokumen	186,374,949.0	250,374,949.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	1004	0	Pengkajian Rancangan Peraturan Gubernur			Kota Makassar				Jumlah rancangan Peraturan Gubernur yang dikaji	50 Dokumen	Terkoordinasinya Penyusunan Pergub dan Naskah Kerjasama Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	50 Dokumen	106,333,334.0	106,333,334.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	1005	0	Pengkajian Naskah Keputusan Gubernur			Kota Makassar				Jumlah rancangan Keputusan Gubernur yang dikaji	1000 Naskah	Terprosesnya Pengkajian Naskah Keputusan Gubernur Sesuai Mekanisme	1000 Naskah	53,214,695.0	75,034,982.49	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	1006	0	Pengkajian Rancangan MOU/Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama			Kota Makassar				Jumlah rancangan Mou/Nota kesepahaman /Nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang dikaji	6 Dokumen	Terkoordinasinya Penyusunan MOU/Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	6 Dokumen	30,000,000.0	30,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	1008	0	Pra Ranperda Propemperda dan Evaluasinya			Kota Makassar				Jumlah rancangan peraturan daerah yang diharmonisasi dari pembahasan hingga penetapan ranperda	10 Dokumen	Terkoordinasinya Penyusunan Ranperda Sesuai Agenda	10 Dokumen	167,791,666.0	167,791,666.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	1020	0	Otentifikasi Produk Hukum Daerah			Kota Makassar				Jumlah dokumen Otentifikasi Produk Hukum Daerah	1000 Dokumen	Terprosesnya Pengkajian Produk Hukum Daerah Sesuai Mekanisme	1000 Dokumen	45,000,000.0	45,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	



3.00	06	01.01	50		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %				1,422,018,624.0	1,466,297,799.36	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	502	00	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Makassar				Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	4 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	4 Unit	28,000,000.0	39,000,000.0	Biro Hukum dan HAM
												Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	4 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	4 Unit			
3.00	06	01.01	503	00	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kota Makassar				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	22 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	800,000,000.0	800,000,000.0	Biro Hukum dan HAM
3.00	06	01.01	505	00	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Makassar				Jumlah ATK yang tersedia	20 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	230,000,000.0	248,648,899.68	Biro Hukum dan HAM
3.00	06	01.01	508	00	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Makassar				Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	2 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	194,018,624.0	208,648,899.68	Biro Hukum dan HAM
3.00	06	01.01	510	00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kota Makassar				Jumlah perjalanan dinas	35 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	35 Orang	170,000,000.0	170,000,000.0	Biro Hukum dan HAM
3.00	06	01.01	511		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %				259,541,717.0	268,420,159.54	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	516	00	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kota Makassar				Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	4 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	183,541,717.0	192,420,159.54	Biro Hukum dan HAM
3.00	06	01.01	519	00	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	7 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	51,000,000.0	51,000,000.0	Biro Hukum dan HAM
3.00	06	01.01	510	00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	34 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	25,000,000.0	25,000,000.0	Biro Hukum dan HAM
3.00	06	01.01	52		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %				30,000,000.0	30,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	

3.00	06	01.01	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar				Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	1 Dokumen	10,000,000.0	10,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	
												Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	1 Dokumen				
												Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	1 Dokumen				
												Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	1 Dokumen				
3.00	06	01.01	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Kota Makassar				Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %	20,000,000.0	20,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	53		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>						% ASN berkinerja sangat baik	100 %				45,000,000.0	65,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kota Makassar				Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	41 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	25,000,000.0	35,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.01	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kota Makassar				Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	4 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	20,000,000.0	30,000,000.0	Biro Hukum dan HAM	
3.00	06	01.02			Biro Pemerintahan											2,686,974,833.0	2,786,565,636.54		
3.00	06	01.02	11		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENATAAN PEMERINTAHAN</b>							Cakupan ketersediaan dokumen LKPJ dan LPPD tepat waktu	100 %			578,678,415.0	600,126,717.20	Biro Pemerintahan	
												Rata-Rata Capaian SPM Perangkat Daerah	100 %						



3.00	06	01.02	11	008	Koordinasi dan Fasilitasi Kunjungan Kerja			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kunjungan kerja anggota MPR, DPR/DPD RI, Watimpres dan DPRD Provinsi lain yang difasilitasi	140 Kunjungan kerja	Fasilitasi kunjungan kerja DPR/DPD RI, Watimpres, Pejabat Negara, Pejabat Pemda Provinsi lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan	100 %	4,303,297.0	6,686,440.08	Biro Pemerintahan
3.00	06	01.02	11	009	Pembinaan dan Pengendalian Urusan Pemerintahan			24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dalam rangka HUT kab/kota	24 Kab/kota di Sulsel	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel	100 %	60,584,296.0	62,967,440.0	Biro Pemerintahan
3.00	06	01.02	11	010	Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring, Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan			24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kab/kota yang dimonitoring dan dievaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) nya	24 Kab/kota	Terwujudnya pembinaan dan fasilitasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi urusan wajib pemerintah Prov. Sulsel dan pemerintah kab/kota se Sulawesi Selatan	100 %	27,784,295.0	30,167,440.0	Biro Pemerintahan
											Jumlah SKPD Provinsi yang dimonitoring dan dievaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) nya	6 SKPD Provinsi	Terwujudnya pembinaan dan fasilitasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi urusan wajib pemerintah Prov. Sulsel dan pemerintah kab/kota se Sulawesi Selatan	100 %			
3.00	06	01.02	11	011	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			24 Kab/kota Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kab/Kota Yang dimonitoring dan dievaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	24 Kab/Kota	Tersedianya Laporan hasil Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	43,018,646.0	45,401,790.0	Biro Pemerintahan

3.00	06	01.02	11	014	Penyusunan Administrasi Pejabat Negara dan Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan				Fasilitasi SK usulan pengangkatan Bupati dan Wakil, Wakilkota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi	30 SK	Jumlah SK usulan pengangkatan pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi	100 %	125,904,396.0	128,287,541.0	Biro Pemerintahan
												Penerbitan SK pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota	30 SK	Terlaksananya penerbitan keputusan serta informasi Pimpinan/ Anggota DPRD Provinsi dan Pimpinan/ Anggota DPRD Kabupaten/Kota	100 %			
												Fasilitasi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan KDH/WKDH	30 PAW	Terlaksananya pengambilan sumpah dan pelantikan KDH/WKDH	100 %			
3.00	06	01.02	13		PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah					Cakupan Koordinasi Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah	100 %				138,823,946.0	143,969,356.90	Biro Pemerintahan	
3.00	06	01.02	13	001	Penataan Penyelenggaraan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat			24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah peserta rapat koordinasi peran Gubernur di tingkat Prov. Sulsel	72 orang	Tercapainya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	100 %	138,823,946.0	143,969,356.90	Biro Pemerintahan
3.00	06	01.02	14		PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH					Peningkatan jumlah kerjasama daerah	20 MoU				38,937,371.0	40,380,556.61	Biro Pemerintahan	
3.00	06	01.02	14	001	Pelayanan Administrasi Kerjasama Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah MoU/Pks yang difasilitasi	40 MoU/Pks	Meningkatnya kerjasama pembangunan kawasan antar wilayah	100 %	38,937,371.0	40,380,556.61	Biro Pemerintahan
3.00	06	01.02	22		PROGRAM PENETAPAN BATAS WILAYAH KAB/KOTA					% Segement Batas Wilayah yang terfasilitasi	100 %				73,165,562.0	75,877,391.17	Biro Pemerintahan	
3.00	06	01.02	22	001	Penegasan Batas Antara Kabupaten/ Kota dan Provinsi			24 kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan				Tertib Administrasi Penegasan Batas Daerah Kab/Kota	24 Kab/Kota	Tersedianya data dokumen Penegasan Batas Daerah	100 %	73,165,562.0	75,877,391.17	Biro Pemerintahan

3.00	06	01.02	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %					1,589,656,213.0	1,648,575,685.23	Biro Pemerintahan		
3.00	06	01.02	503	0	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kota Makassar				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	24 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	720,000,000.0	734,729,000.0	Biro Pemerintahan		
3.00	06	01.02	505	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggunaan			Kota Makassar				Jumlah ATK yang tersedia	60 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	100,796,650.0	115,527,341.23	Biro Pemerintahan		
3.00	06	01.02	508	0	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Makassar				Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	7 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	412,818,481.0	427,548,372.0	Biro Pemerintahan		
3.00	06	01.02	510	0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah perjalanan dinas	135 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	100 Orang	356,041,082.0	370,770,972.0	Biro Pemerintahan		
								Provinsi Sulawesi Selatan												
3.00	06	01.02	511		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %					254,147,748.0	263,567,552.79	Biro Pemerintahan		
3.00	06	01.02	516	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kota Makassar				Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	9 Unit	Ketersediaan kendaraan/jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	171,500,000.0	174,639,932.0	Biro Pemerintahan		
3.00	06	01.02	519	0	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	10 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	30,574,748.0	33,714,686.79	Biro Pemerintahan		
3.00	06	01.02	510	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	9 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	52,073,000.0	55,212,934.0	Biro Pemerintahan		
3.00	06	01.02	522		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %					13,565,578.0	14,068,376.64	Biro Pemerintahan		
3.00	06	01.02	522	0	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar				Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	13,565,578.0	14,068,376.64	Biro Pemerintahan		



3.00	06	01.03	21	001	Pengelolaan dan Penyaringan Informasi			Kota Makassar			jumlah media sosial dan website	5 berita	terlaksananya publikasi melalui website, media sosial, dan majalah	100 %	300,000,000.0	316,285,664.84	Biro Humas dan Protokol	
3.00	06	01.03	21	002	Pelayanan Informasi Publik			Kota Makassar			Jumlah peserta koordinasi kehumasan	100 orang	terlaksananya kordinasi kehumasan	100 %	101,407,772.0	100,000,000.0	Biro Humas dan Protokol	
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.03</b>	<b>50</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>3,037,676,538.0</b>	<b>3,150,265,849.84</b>	<b>Biro Humas dan Protokol</b>		
3.00	06	01.03	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Makassar			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	11 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	11 Unit	27,676,538.0	27,000,000.0	Biro Humas dan Protokol	
											Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	11 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	11 Unit				
3.00	06	01.03	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	42 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	1,500,000,000.0	1,550,000,000.0	Biro Humas dan Protokol	
3.00	06	01.03	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Makassar			Jumlah ATK yang tersedia	26 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	380,000,000.0	385,000,000.0	Biro Humas dan Protokol	
3.00	06	01.03	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Makassar			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	20 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	30,000,000.0	30,265,849.84	Biro Humas dan Protokol	
3.00	06	01.03	50	007	Penyediaan Bahan Bacaan			Kota Makassar			Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	34 Jenis	Ketersediaan Bahan Bacaan	100 %	250,000,000.0	250,000,000.0	Biro Humas dan Protokol	
3.00	06	01.03	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Makassar			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	2 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Biro Humas dan Protokol	
3.00	06	01.03	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kota Makassar			Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	300,000,000.0	338,000,000.0	Biro Humas dan Protokol	
3.00	06	01.03	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kota Makassar			Jumlah perjalanan dinas	650 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	6 Orang	350,000,000.0	370,000,000.0	Biro Humas dan Protokol	
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.03</b>	<b>51</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>251,317,446.65</b>	<b>260,632,349.07</b>	<b>Biro Humas dan Protokol</b>		



3.00	06	01.03	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kota Makassar			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	2 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Biro Humas dan Protokol	
3.00	06	01.03	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	11 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	150,000,000.0	160,632,349.07	Biro Humas dan Protokol	
											Jumlah Kendaraan Roda 2 yang dipelihara	11 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %				
3.00	06	01.03	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	5 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	30,000,000.0	30,000,000.0	Biro Humas dan Protokol	
3.00	06	01.03	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	21,317,446.65	20,000,000.0	Biro Humas dan Protokol	
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.03</b>	<b>53</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>	<b>100 %</b>			<b>54,122,396.94</b>	<b>56,128,404.25</b>	<b>Biro Humas dan Protokol</b>		
3.00	06	01.03	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	210 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	54,122,396.94	56,128,404.25	Biro Humas dan Protokol	
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.04</b>			<b>Biro Perekonomian</b>									<b>4,265,787,959.02</b>	<b>4,423,896,344.17</b>			
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.04</b>	<b>16</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN EKONOMI</b>					<b>Peningkatan Jumlah Lembaga Ekonomi Kab/Kota yang berdaya saing</b>	<b>7 Lembaga</b>			<b>3,146,311,132.0</b>	<b>3,277,752,622.75</b>	<b>Biro Perekonomian</b>		
3.00	06	01.04	16	001	Pembentukan dan Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)			Kabupaten Barru			Jumlah TPAKD yang dibentuk dan dikukuhkan	7 kab/kota	Persentase TPAKD Kab/Kota yang sudah dikukuhkan	7 Tim TPAKD	266,400,250.0	266,400,250.75	Biro Perekonomian	
								Kabupaten Luwu										
								Kabupaten Luwu Utara										
								Kabupaten Maros										
								Kabupaten Pinrang										
								Kabupaten Sidenreng Rappang										
								Kabupaten Wajo										

3.00	06	01.04	16	002	Koordinasi Kelembagaan Keuangan dalam mendukung Ekonomi Inklusif			Kota Makassar			Jumlah Rapat Koordinasi	4 Kali	Laporan dan Rekomendasi Kegiatan	4 Dokumen	93,769,882.0	115,211,372.0	Biro Perekonomian
3.00	06	01.04	16	003	Literasi dan Inklusi Produk Jasa Keuangan			Kota Makassar			Jumlah Peserta yang di Edukasi	250 Org	Jumlah Pemangku Kepentingan yang memahami manfaat produk jasa keuangan bagi pengembangan usaha	250 Org	245,200,000.0	245,200,000.0	Biro Perekonomian
3.00	06	01.04	16	004	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi/UKM dalam mendukung Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan			Kota Makassar			Jumlah Koperasi/UKM yang difasilitasi	24 Kab/Kota	Jumlah Palaku Usaha yang telah difasilitasi dan dibina	150 Org	406,700,000.0	456,700,000.0	Biro Perekonomian
3.00	06	01.04	16	006	Koordinasi dan Fasilitasi Sarana BUMN dan BUMD			Kota Makassar			Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pengembangan BUMD, Data Sarana BUMN dan BUMD	24 - Kab/Kota	Peningkatan Pemahaman Peserta Rapat Koordinasi Pengembangan BUMD, Penyusunan data sarana BUMN dan BUMD	70 Org	300,000,000.0	300,000,000.0	Biro Perekonomian
3.00	06	01.04	16	007	Fasilitasi Pengembangan Industri kecil dan menengah di Sulsel untuk mendorong Ekonomi Inklusif			Kota Makassar			Jumlah Peserta Sosialisasi Industri Kecil dan Menengah, Data Informasi Industri Kecil dan Menengah	24 Kab/Kota	Peningkatan Pemahaman Peserta Sosialisasi Industri Kecil dan Menengah, Penyusunan data dan Informasi Industri Kecil dan Menengah	150 Org	317,700,000.0	317,700,000.0	Biro Perekonomian
3.00	06	01.04	16	008	Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Sarana Infrastruktur dan Kewilayahan			Kota Makassar			Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan, Data dan Informasi Sarana Infrastruktur dan Kewilayahan	24 Kab/Kota	Peningkatan Pemahaman Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan, Penyusunan Data dan Informasi Sarana Infrastruktur dan Kewilayahan	70 Org	304,400,000.0	304,400,000.0	Biro Perekonomian
3.00	06	01.04	16	009	Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Sektor Peternakan dan Perikanan			Kota Makassar			Terusnya Rekomendasi Kebijakan Sektor Peternakan dan Perikanan	100 %	Rekomendasi Kebijakan Sektor Pertanian dan Perikanan	24 Kab/Kota	130,000,000.0	150,000,000.0	Biro Perekonomian

3.00	06	01.04	16	010	Fasilitasi Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Daerah			Kota Makassar				Tersedianya Data dan Informasi Produk Unggulan Daerah	100 %	Data dan Informasi Produk Unggulan	24 Kab/Kota	150,000,000.0	160,000,000.0	Biro Perekonomian		
3.00	06	01.04	16	0111	Koordinasi Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah			Kabupaten Bone				Tersedianya Informasi dan Rekomendasi Pengendalian Inflasi Daerah	1 Laporan	Terkendalnya Inflasi Sulsel	24 Kab/Kota	276,000,000.0	276,000,000.0	Biro Perekonomian		
								Kabupaten Bulukumba												
								Kota Makassar												
								Kota Palopo												
								Kota Parepare												
3.00	06	01.04	16	0112	Fasilitasi dan Pembinaan Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan			Kota Makassar				Terumusnya Kebijakan Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan	1 Dokumen	Rumusan Kebijakan Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan	24 Kab/Kota	100,000,000.0	130,000,000.0	Biro Perekonomian		
3.00	06	01.04	16	0113	Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau			Kota Makassar				Tersedianya Rumusan Kebijakan Penggunaan DBH-CHT	1 Laporan	Rumusan Kebijakan Penggunaan DBH-CHT	24 Kab/Kota	472,418,100.0	472,418,100.0	Biro Perekonomian		
3.00	06	01.04	16	0114	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai			Kota Makassar				Meningkatkan Pemahaman Peserta Tentang Ketentuan di Bidang Cukai	250 Org	Terfasilitasinya OPD Tentang Ketentuan di Bidang Cukai	24 Kab/Kota	83,722,900.0	83,722,900.0	Biro Perekonomian		
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.04</b>	<b>50</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>						<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>				<b>571,128,268.02</b>	<b>590,443,514.0</b>	<b>Biro Perekonomian</b>		
3.00	06	01.04	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kota Makassar				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	5 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	120,000,000.0	120,000,000.0	Biro Perekonomian		
3.00	06	01.04	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Makassar				Jumlah ATK yang tersedia	30 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	121,128,268.02	140,443,514.0	Biro Perekonomian		
3.00	06	01.04	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Makassar				Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	2 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	50,000,000.0	50,000,000.0	Biro Perekonomian		
3.00	06	01.04	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kota Makassar				Jumlah perjalanan dinas	23 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	5 Orang	280,000,000.0	280,000,000.0	Biro Perekonomian		
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.04</b>	<b>51</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>						<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100 %</b>				<b>414,872,855.0</b>	<b>420,983,749.98</b>	<b>Biro Perekonomian</b>		

3.00	06	01.04	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kota Makassar			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Biro Perekonomian	
3.00	06	01.04	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	8 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	134,500,000.0	134,500,000.0	Biro Perekonomian	
3.00	06	01.04	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	10 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	150,000,000.0	150,000,000.0	Biro Perekonomian	
3.00	06	01.04	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	30,372,855.0	36,483,749.98	Biro Perekonomian	
3.00	06	01.04	52		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %			100,000,000.0	100,000,000.0	Biro Perekonomian		
3.00	06	01.04	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	100,000,000.0	100,000,000.0	Biro Perekonomian	
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	0 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	0 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	0 Dokumen				
3.00	06	01.04	53		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					% ASN berkinerja sangat baik	100 %			33,475,704.0	34,716,457.44	Biro Perekonomian		

3.00	06	01.04	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	85 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	33,475,704.0	34,716,457.44	Biro Perekonomian
3.00	06	01.05			Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa										6,407,758,505.94	6,645,257,500.14	
3.00	06	01.05	03		PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN					% Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan rencana pembangunan sumber dana APBD	100 %				788,719,667.0	817,952,998.62	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
										% Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan rencana pembangunan sumber dana APBN	100 %						
3.00	06	01.05	03	001	Penyusunan Informasi Belanja Daerah Prov. SULSEL			Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah Laporan penyusunan Informasi Belanja Daerah Prov. Sulsel	12 laporan	cakupan penyusunan informasi belanja daerah	100 %	121,500,000.0	133,152,998.62	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	01.05	03	002	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Prov. SULSEL			Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Prov. Sulsel	12 laporan	Cakupan Evaluasi dan pengawasan Realisasi Anggaran Prov. Sulsel	100 %	110,000,000.0	115,000,000.0	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	01.05	03	003	Pengukuran Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Prov. SULSEL			Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBD Prov. Sulsel	4 laporan	Cakupan hasil pengukuran evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Prov. Sulsel	100 %	162,500,000.0	164,500,000.0	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	01.05	03	004	Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Prov. SULSEL			Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan DAK Prov. Sulsel	4 Laporan	Cakupan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Prov. Sulsel	100 %	78,500,000.0	79,500,000.0	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa

3.00	06	01.05	03	005	Pengendalian dan Pemantauan Program Prioritas Daerah Prov. SULSEL			Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Pemantauan Program-Program Prioritas Daerah Prov. Sulsel	4 laporan	Cakupan pengendalian dan Pemantauan program prioritas Daerah Prov. Sulsel	100 %	121,500,000.0	125,000,000.0	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	
3.00	06	01.05	03	006	Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah Prov. SULSEL			Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah Laporan Terkait Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	4 Dokumen	Cakupan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	100 %	172,919,667.0	175,300,000.0	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	
3.00	06	01.05	03	007	Sosialisasi Pergub Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Prov. SULSEL			Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah ASN Lingkup Prov. Sulsel yang memahami Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD baik perempuan dan laki-laki	150 Peserta Perempuan dan Laki-Laki	Cakupan ASN yang mengikuti sosialisasi Penyusunan Pergub tentang Pedoman APBD	100 %	21,800,000.0	25,500,000.0	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	
3.00	06	01.05	04		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>					% Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana	100 %				1,349,251,293.0	1,399,260,329.61	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	
										% Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	100 %							
3.00	06	01.05	04	001	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan UKPBJ Kab/Kota			24 Kantor UKPBJ/UPLP Kab/Kota Prov. Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan UKPBJ Kab/Kota	24 Kab/Kota	Cakupan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Kab/Kota	100 %	140,000,000.0	150,100,000.0	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	
3.00	06	01.05	04	002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UKPBJ						jumlah laporan pengembangan kapasitas kelembagaan UKPBJ	4 laporan	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas kelembagaan UKPBJ	100 OPD, Kab/Kota	78,500,000.0	82,560,329.61	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	
3.00	06	01.05	04	003	Pemantauan Pelaksanaan LPSE			24 Kab/Kota Prov. Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan LPSE OPD dan Kab/Kota	4 laporan	cakupan Pemantauan pelaksanaan LPSE OPD dan Kab/Kota Prov. Sulsel	100 %	175,800,000.0	178,200,000.0	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	

3.00	06	01.05	04	004	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa			Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah Laporan Pengelolaan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	4 laporan	Cakupan OPD Pemprov. Sulsel dan Instansi lainnya yang melaksanakan pengadaan Barang/Jasa	100 %	209,000,000.0	215,000,000.0	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	01.05	04	005	Penyusunan Informasi Pengadaan Barang/Jasa			Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4 laporan	cakupan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan BArang/Jasa Pemerintah Prov. Sulsel	100 %	153,151,293.0	155,800,000.0	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	01.05	04	006	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa			Kantor ULP pada 24 Kabupaten/Kota Lingkup Prov. Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	4 Laporan	Cakupan Monitoring dan Evaluasi OPD lingkup Pemprov Sulsel dan Kabupaten/Kota	24 OPD, Kab/Kota	92,500,000.0	94,000,000.0	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	01.05	04	008	Rapat Koordinasi UKPBJ Provinsi Sulawesi Selatan			Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah Peserta Rapat koordinasi pelaksanaan rapat koordinasi UKPBJ Provinsi Sulawesi Selatan baik Perempuan dan Laki-Laki	80 Peserta Perempuan dan Laki-Laki	Cakupan OPD lingkup Pemprov. Sulsel dan Kab/Kota yang mengikuti rapat koordinasi UKPBJ	24 OPD, Kab/Kota	48,600,000.0	55,200,000.0	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
3.00	06	01.05	04	009	Bintek/Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah Peserta Bintek/Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik Perempuan dan Laki-Laki	80 peserta Perempuan dan Laki-Laki	Terciptanya ASN Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terampil dalam menyusun spesifikasi teknis, HPS, Kontrak, Dokumen Pemilihan, Evaluasi Penawaran, Pemanfaatan aplikasi SIRUP dan pemanfaatan aplikasi SPSE	100 %	147,100,000.0	150,200,000.0	Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa

3.00	06	01.05	04	010	Peningkatan Kapabilitas SDM Aparatur Sipil Negara Tentang Pengadaan Barang/Jasa			Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik perempuan dan laki-laki	15 orang Baik Perempuan dan Laki-Laki	Meningkatny a Kapabilitas ASN pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100 %	220,100,000.0	230,400,000.0	Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa		
3.00	06	01.05	04	011	Layanan Pendampingan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa			Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Laporan Layanan Pendampingan Hukum	4 Paket	Meningkatny a Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	100 %	84,500,000.0	87,800,000.0	Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa		
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.05</b>	<b>28</b>		<b>PROGRAM ADMINISTRASI USAHA JASA PEMBANGUNAN</b>					<b>% Capaian Kinerja Pembinaan Usaha Jasa Pembangunan</b>	<b>100 %</b>				<b>401,402,762.94</b>	<b>416,280,467.76</b>	<b>Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa</b>		
3.00	06	01.05	28	001	Pembinaan Usaha Jasa Pembangunan			Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah Kordinator Usaha Jasa Pembangunan Lingkup Prov. Sulsel yang dibina	24 Kab/Kota	cakupan pembinaan Usaha Jasa Pembangunan Prov. Sulsel	100 %	108,952,762.94	116,749,999.76	Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa		
3.00	06	01.05	28	002	Rapat Koordinasi Daerah Usaha Jasa Pembangunan			Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota	25 peserta	Cakupan pelaksanaan Rapat koordinasi Daerah	100 %	17,500,000.0	21,000,000.0	Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa		
3.00	06	01.05	28	003	Fasilitasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi			Kantor Pemerintah Kab/Kota seProvinsi Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan	200 peserta	cakupan pelaksanaan fasilitasi pelatihan tenaga kerja konstruksi	100 %	274,950,000.0	278,530,468.0	Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa		
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.05</b>	<b>50</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>				<b>2,362,910,196.0</b>	<b>2,450,489,775.09</b>	<b>Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa</b>		
3.00	06	01.05	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	4 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	4 Unit	35,100,000.0	35,100,000.0	Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa		
											Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	9 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	9 Unit					



3.00	06	01.05	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Biro Pembanguan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	24 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	337,200,000.0	337,200,000.0	Biro Pembanguan dan Pengadaan Barang/Jasa	
3.00	06	01.05	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Biro Pembanguan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah ATK yang tersedia	100 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	341,610,196.0	375,189,775.09	Biro Pembanguan dan Pengadaan Barang/Jasa	
3.00	06	01.05	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Biro Pembanguan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	50 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	1,112,000,000.0	1,158,000,000.0	Biro Pembanguan dan Pengadaan Barang/Jasa	
3.00	06	01.05	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah						Jumlah perjalanan dinas	100 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	45 Orang	537,000,000.0	545,000,000.0	Biro Pembanguan dan Pengadaan Barang/Jasa	
								24 Kab/Kota Prov. Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan										
								34 Provinsi di Indonesia Luar Provinsi Sulawesi Selatan										
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.05</b>	<b>51</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100 %</b>				<b>1,186,553,357.0</b>	<b>1,230,532,109.95</b>	<b>Biro Pembanguan dan Pengadaan Barang/Jasa</b>	
3.00	06	01.05	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Biro Pembanguan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	6 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	465,953,357.0	476,140,000.0	Biro Pembanguan dan Pengadaan Barang/Jasa	
3.00	06	01.05	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Biro Pembanguan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda. Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	6 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	504,000,000.0	520,100,000.0	Biro Pembanguan dan Pengadaan Barang/Jasa	

3.00	06	01.05	510	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan dan Peralatan Kantor			Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	100 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	90,700,000.0	97,992,109.95	Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa	
3.00	06	01.05	5112	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah Sistem Informasi/Apl ikasi yang dipelihara dan dikembangka n	8 Sistem Informasi/ Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Apl ikasi yang terupdate	100 %	125,900,000.0	136,300,000.0	Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa	
											Jumlah Berita/Inform asi yang diposting di Website	40 Berita/Inf ormasi	Ketersediaan Berita/Inform asi yang dibutuhkan	100 %				
3.00	06	01.05	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %				318,921,230.0	330,741,819.11	Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa	
3.00	06	01.05	5202	022	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	2 Dokumen	318,921,230.0	330,741,819.11	Biro Pembanguna n dan Pengadaan Barang/Jasa	
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	1 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	1 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	1 Dokumen				
3.00	06	01.06			Biro Kesejahteraan										5,208,617,670.03	6,287,107,079.23		
3.00	06	01.06	02		PROGRAM PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL (Prioritas)	Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan	Berkembang nya inovasi dalam penyelenggara an pemerintaha n dan pelayanan publik			% Penurunan Penyalahgunaa n Narkoba (Prioritas)	1.55 %				1,000,078,478.03	1,642,184,053.79	Biro Kesejahteraa n	

										% Penurunan Penduduk Buta Aksara AlQuran (Prioritas)	10 %									
										% Penurunan Kejahatan terhadap Kesulitan (Prioritas)	10 %									
3.00	06	01.06	02	001	Pengembangan Tahfidz di Sulsel			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Tahfidz di Sulsel	100 orang	Meningkatnya Rumah Tahfidz yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi	100 %	324,296,703.03	480,000,000.0	Biro Kesejahteraan		
3.00	06	01.06	02	002	Peningkatan Kualitas Guru Mengajar di Sulsel			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah orang yang mengikuti kegiatan peningkatan Kualitas Guru Mengajar di Sulsel	300 orang	Meningkatnya kualitas guru mengajar di Sulsel	40 %	211,000,000.0	253,200,000.0	Biro Kesejahteraan		
3.00	06	01.06	02	003	Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Sulsel			Kota Makassar				Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Sulsel	80 orang	jumlah rumusan yang dihasilkan pada Kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Sulsel	2 rumusan	17,600,000.0	17,600,000.0	Biro Kesejahteraan		
3.00	06	01.06	02	004	Rapat Koordinasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Sulawesi Selatan			Kota Makassar				Jumlah orang yang mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Sulawesi Selatan	80 orang	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan pada Kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Sulawesi Selatan	1 Rek	12,000,000.0	20,000,000.0	Biro Kesejahteraan		
3.00	06	01.06	02	005	Pembentukan Warga Peduli HIV dan AIDS di Sulsel			Kota Makassar				Jumlah Warga Peduli HIV dan AIDS di Sulsel	400 orang	meningkatnya peran warga terhadap penanggulangan HIV dan AIDS di Sulsel	100 %	47,850,000.0	120,000,000.0	Biro Kesejahteraan		

3.00	06	01.06	02	007	Penyusunan dan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Sulawesi Selatan			Kota Makassar				Jumlah orang yang mengikuti Keg. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Sulawesi Selatan	50 orang	jumlah rumusan yang dihasilkan pada Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Sulawesi Selatan	1 rumusan	27,200,000.0	27,200,000.0	Biro Kesejahteraan	
3.00	06	01.06	02	008	Rapat Koordinasi Penanggulangan Pergaulan Bebas di Sulawesi Selatan			Kota Makassar				Jumlah orang yang mengikuti Keg. Rapat Koordinasi Penanggulangan Pergaulan Bebas di Sulawesi Selatan	50 orang	Terbentuknya Tim Terpadu Penanggulangan Pergaulan Bebas di Sulawesi Selatan	24 Kab/Kota	12,500,000.0	12,500,000.0	Biro Kesejahteraan	
3.00	06	01.06	02	009	Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Pergaulan Bebas di Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah jenis media informasi penanggulangan pergaulan bebas yang dihasilkan	4 jenis	tersebarannya media informasi penanggulangan pergaulan bebas di kab/kota di Sulsel	24 Kab/Kota	75,000,000.0	106,684,053.79	Biro Kesejahteraan	
3.00	06	01.06	02	010	Bimbingan Belajar Baca Alquran Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar				Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Belajar Baca Alquran Bagi ASN Lingkup Pemerintah Prov. Sulsel	150 orang	& peserta yang bisa baca Alquran	100 orang	50,000,000.0	75,000,000.0	Biro Kesejahteraan	
3.00	06	01.06	02	011	Penyusunan Produk Hukum terkait Pergaulan Bebas/Penanggulangan Narkoba di Sulsel			Luar Provinsi Sulawesi Selatan				terbentuknya produk hukum pergaulanbebas/penanggulangan narkoba di Sulsel	1 buah	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	1 buah	91,200,000.0	200,000,000.0	Biro Kesejahteraan	
								Provinsi Sulawesi Selatan											

3.00	06	01.06	02	012	Inovasi Keaksaraan Fungsional Bisa Baca Tulis Alquran			Provinsi Sulawesi Selatan			Terlaksananya Kegiatan Inovasi Keaksaraan Fungsional Bisa Baca Tulis Alquran	1 Keg	Jumlah Klp. yang mengikuti kegiatan Inovasi Keaksaraan Fungsional Bisa Baca Tulis Alquran	10 Klp	131,431,775.0	330,000,000.0	Biro Kesejahteraan
3.00	06	01.06	05		PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG KEAGAMAAN					% Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	20 %				1,766,096,324.0	1,890,816,005.10	Biro Kesejahteraan
3.00	06	01.06	05	001	Monitoring & Evaluasi Bantuan Sarana Rumah Ibadah, Lembaga Keagamaan & Kegiatan Keagamaan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah ASN yang melakukan Monitoring dan evaluasi Bantuan Sarana Rumah Ibadah, Lembaga Keagamaan dan Kegiatan Keagamaan	25 orang/kali	berjalannya pelaksanaan verifikasi pemberian hibah rumah ibadah, lembaga keagamaan dan kegiatan keagamaan	100 %	15,000,000.0	15,000,000.0	Biro Kesejahteraan
3.00	06	01.06	05	002	Pelaksanaan MTQ / STQ Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Terselenggaranya MTQ/STQ Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	1 keg	Jumlah Kategori yang diperlombakan	20 cabang	547,000,000.0	559,000,000.0	Biro Kesejahteraan
3.00	06	01.06	05	003	Pengiriman Kafilah Pada MTQ / STQ Tingkat Nasional			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Qari-Qariah dan Pendamping Utusan Sulsel yang difasilitasi pada Event MTQ / STQ Nasional	75 orang	Keikutsertaan Sulawesi Selatan pada Event MTQ / STQ Tingkat Nasional	1 Keg	585,500,000.0	605,000,000.0	Biro Kesejahteraan
3.00	06	01.06	05	006	Rekrutmen dan Pembekalan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) Prov. Sulsel			Kota Makassar			Jumlah Calon Anggota Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)	150 orang	Terbentuknya Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) yang direkrut	2 tim	340,000,000.0	430,000,000.0	Biro Kesejahteraan
								Luar Provinsi Sulawesi Selatan									

3.00	06	01.06	05	009	Temu Koordinasi Dai dan Pemuka Agama				Kota Makassar				jumlah orang yang mengikuti Kegiatan temu Koordinasi Dai dan Pemuka Agama	50 orang	jumlah rumusan yang dihasilkan pada Keg. Temu Koordinasi Dai dan Pemuka Agama	1 rumusan	10,800,000.0	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan	
3.00	06	01.06	05	012	Pembinaan dan Peningkatan Kegiatan Keagamaan				Kota Makassar				Jumlah bulan kegiatan keagamaan yang difasilitasi	12 bulan	terlaksananya pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kegiatan keagamaan	100 %	129,600,000.0	129,600,000.0	Biro Kesejahteraan	
3.00	06	01.06	05	013	Optimalisasi Peran dan Fungsi Sarana Peribadatan				Kota Makassar				Jumlah orang yang mengikuti Keg. Optimalisasi Peran dan Fungsi Sarana Peribadatan	50 orang	Jumlah Laporan yang dihasilkan pada Keg Optimalisasi Peran dan Fungsi Sarana Peribadatan	1 Laporan	10,800,000.0	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan	
3.00	06	01.06	05	014	Temu Koordinasi Peningkatan Manajemen Masjid				Kota Makassar				Jumlah Orang Yang Mengikuti Keg. Temu Koordinasi Peningkatan Manajemen Masjid	50 orang	Jumlah rumusan yang dihasilkan pada Keg Temu Koordinasi Peningkatan Manajemen Masjid	1 Rumusan	10,800,000.0	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan	
3.00	06	01.06	05	015	Pengembangan Kapasitas Muallaf di Sulsel				Kota Makassar				Jumlah orang yang mengikuti Keg Pengembangan Kapasitas Muallaf di Sulsel	50 orang	meningkatkan kapasitas muallaf di Sulsel	100 %	13,200,000.0	13,200,000.0	Biro Kesejahteraan	
3.00	06	01.06	05	019	Pembinaan dan Peningkatan paduan suara Gerejaawi				Kota Makassar				Jumlah orang yang mengikuti Keg Pembinaan dan Peningkatan Paduan Suara Gerejaawi	50 orang	Jumlah Laporan yang dihasilkan pada Keg Pembinaan dan Peningkatan Paduan Suara Gerejaawi	1 Laporan	11,200,000.0	11,200,000.0	Biro Kesejahteraan	
3.00	06	01.06	05	020	Pengelolaan Gedung LPTQ Provinsi Sulawesi Selatan				Kota Makassar				Jumlah bulan pemeliharaan Gedung LPTQ Prov. Sulsel	12 bulan	Terpeliharanya Gedung LPTQ Prov. Sulsel	12 bulan	59,796,324.0	63,016,005.10	Biro Kesejahteraan	

3.00	06	01.06	05	022	Rapat Koordinasi Kerukunan Beragama di SulSel			Kota Makassar			Jumlah orang yang mengikuti Keg Rapat Koordinasi Kerukunan Beragama di Sulsel	50 orang	Jumlah rumusan yang dihasilkan pada Keg. Rapat Koordinasi Kerukunan Beragama di Sulsel	1 rumusan	10,800,000.0	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan	
3.00	06	01.06	05	023	Pembinaan dan Penataan Lembaga Penyelenggara Ibadah Umroh			Kota Makassar			Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan dan Penataan Lembaga Penyelenggara Ibadah Umroh	50 orang	Jumlah laporan yang dihasilkan pada kegiatan pembinaan dan penataan Lembaga Penyelenggara Ibadah Umroh	1 Laporan	10,800,000.0	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan	
3.00	06	01.06	05	024	Pembinaan Mental dan Spritual ASN			Kota Makassar			Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Mental dan Spritual ASN	50 orang	meningkatnya pemahaman mental dan Sritual ASN Peserta	100 %	10,800,000.0	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan	
3.00	06	01.06	06		PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN					% Pelaksanaan Koordinasi dibidang kepemudaan, keolahragaan, pendidikan dan seni budaya	20 %				513,368,744.0	697,368,744.0	Biro Kesejahteraan	
										% Pelaksaaan koordinasi dibidang perlindungan dan kerawanan sosial	20 %							
										% Pelaksanaan koordinasi dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	20 %							

3.00	06	01.06	06	001	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah orang yang mengikuti Keg. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Sulawesi Selatan	60 orang	jumlah rumusan yang dihasilkan pada Keg Rapat Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Sulawesi Selatan	1 rumusan	10,400,000.0	10,400,000.0	Biro Kesejahteraan
3.00	06	01.06	06	002	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan GERMAS di Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah orang yang mengikuti Keg. Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan GERMAS di Sulawesi Selatan	50 orang	Jumlah laporan yang dihasilkan pada Keg Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan GERMAS di Sulawesi Selatan	1 Laporan	10,400,000.0	10,400,000.0	Biro Kesejahteraan
3.00	06	01.06	06	003	Forum Dialog Pemerintah dengan Organisasi Pemuda			Kota Makassar			Jumlah orang yang mengikuti Keg. Forum Dialog Pemerintah dengan Organisasi Pemuda	60 orang	Jumlah laporan yang dihasilkan Keg. Forum Dialog Pemerintah dengan Organisasi Pemuda	1 Laporan	13,800,000.0	13,800,000.0	Biro Kesejahteraan
3.00	06	01.06	06	004	Pengadaan ATM Beras Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah ATM yang diperadakan	7 Unit	Jumlah masyarakat yang menikmati ATM beras	700 orang	305,000,000.0	455,000,000.0	Biro Kesejahteraan
3.00	06	01.06	06	005	Temu Koordinasi Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Sulsel			Kota Makassar			Jumlah orang yang mengikuti Temu Koordinasi Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Sulsel	50 orang	Jumlah rumusan yang dihasilkan pada Temu Koordinasi Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Sulsel	1 rumusan	10,800,000.0	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan
3.00	06	01.06	06	006	Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan			Kota Makassar			Jumlah orang yang mengikuti Keg. Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan	50 orang	Jumlah rumusan yang dihasilkan pada Keg. Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan	1 rumusan	10,800,000.0	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan



3.00	06	01.06	06	007	Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Anak			Kota Makassar			Jumlah orang yang mengikuti Keg. Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Anak	50 orang	Jumlah rumusan yang dihasilkan pada Keg. Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Anak	1 rumusan	10,800,000.0	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan
3.00	06	01.06	06	008	Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Keluarga Berencana			Kota Makassar			Jumlah orang yang mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Keluarga Berencana	50 orang	Jumlah rumusan yang dihasilkan pada Keg. Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Keluarga Berencana	1 rumusan	10,400,000.0	10,400,000.0	Biro Kesejahteraan
3.00	06	01.06	06	013	Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani Bagi PNS Lingkup Kantor Gubernur			Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Instruktur Pemandu SKJ	1 orang	Peningkatan Pelaksanaan SKJ	100 %	20,168,744.0	20,168,744.0	Biro Kesejahteraan
3.00	06	01.06	06	014	Temu Koordinasi Kebijakan Keolahragaan di Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kegiatan Temu Koordinasi Kebijakan Keolahragaan di Sulawesi Selatan	50 orang	Jumlah rumusan yang dihasilkan pada Temu Koordinasi Kebijakan Keolahragaan di Sulawesi Selatan	1 rumusan	10,800,000.0	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan
3.00	06	01.06	06	015	Temu Koordinasi Kebijakan Kepemudaan di Sulawesi Selatan			Kota Makassar			Jumlah orang yang mengikuti Temu Koordinasi Kebijakan Kepemudaan di Sulawesi Selatan	50 orang	rumusan yang dihasilkan pada Temu Koordinasi Kebijakan Kepemudaan di Sulawesi Selatan	1 rumusan	10,800,000.0	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan
3.00	06	01.06	06	017	Penguatan Manajemen Kesekretariatan Tim Pembina UKS/M Kab/Kota se Sulsel			Kota Makassar			Jumlah orang yang mengikuti Penguatan Manajemen Kesekretariatan Tim Pembina UKS/M Kab/Kota se Sulsel	50 orang	Meningkatkan Pemahaman peserta keg Penguatan Manajemen Kesekretariatan Tim Pembina UKS/M Kab/Kota se Sulsel	100 %	10,800,000.0	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan

3.00	06	01.06	06	018	Rapat Koordinasi Tim Pembina UKS/M Kab/Kota Se Sulsel			Kota Makassar			Jumlah orang yang mengikuti keg Rapat Koordinasi Tim Pembina UKS/M Kab/Kota se Sulsel	100 orang	jumlah rumusan yang dihasilkan pada keg Rapat Koordinasi Tim Pembina UKS/M Kab/Kota se Sulsel	1 rumusan	12,400,000.0	12,400,000.0	Biro Kesejahteraan
3.00	06	01.06	06	019	Pembinaan dan Penilaian UKS/M Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Penilaian UKS/M Tingkat Prov. Sulsel	24 Kab/Kota	Jumlah Kategori yang diperlombakan	4 kategori	66,000,000.0	100,000,000.0	Biro Kesejahteraan
								Provinsi Sulawesi Selatan									
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.06</b>	<b>50</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>						<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>1,867,140,848.0</b>	<b>1,992,620,680.61</b>	<b>Biro Kesejahteraan</b>
3.00	06	01.06	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Makassar			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	5 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	5 Unit	15,000,000.0	15,000,000.0	Biro Kesejahteraan
											Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	10 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	10 Unit			
3.00	06	01.06	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	22 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	755,140,848.0	800,000,000.0	Biro Kesejahteraan
											Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan	2 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kebersihan Non PNS	100 %			
											Jumlah Jasa Tenaga Sopir	1 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Sopir Non PNS	100 %			
3.00	06	01.06	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Makassar			Jumlah ATK yang tersedia	25 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	175,000,000.0	200,000,000.0	Biro Kesejahteraan
3.00	06	01.06	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Makassar			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	100 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	10,000,000.0	10,000,000.0	Biro Kesejahteraan
3.00	06	01.06	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	2 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	600,000,000.0	650,000,000.0	Biro Kesejahteraan

3.00	06	01.06	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perjalanan dinas	120 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	60 Orang	312,000,000.0	317,620,680.61	Biro Kesejahteraan	
								Provinsi Sulawesi Selatan										
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.06</b>	<b>51</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>30,067,998.0</b>	<b>31,182,446.80</b>	<b>Biro Kesejahteraan</b>		
3.00	06	01.06	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	16 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	20,067,998.0	20,182,446.80	Biro Kesejahteraan	
3.00	06	01.06	51	000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	5,000,000.0	6,000,000.0	Biro Kesejahteraan	
3.00	06	01.06	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Kota Makassar			Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	1 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	5,000,000.0	5,000,000.0	Biro Kesejahteraan	
											Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	60 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	100 %				
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.06</b>	<b>52</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					<b>% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu</b>	<b>100 %</b>			<b>28,865,278.0</b>	<b>29,935,148.93</b>	<b>Biro Kesejahteraan</b>		
3.00	06	01.06	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	80 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	10,800,000.0	10,800,000.0	Biro Kesejahteraan	
3.00	06	01.06	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	5,065,278.0	6,135,148.93	Biro Kesejahteraan	
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				



3.00	06	01.07	01	001	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi						Jumlah Dokumen penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	Cakupan penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	100 %	550,000,000.0	590,000,000.0	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
											Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sulsel Nomor 10 Tahun 2016	1 Dokumen	Cakupan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sulsel Nomor 10 Tahun 2016	100 %				
											Jumlah dokumen keterangan/p enjelasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sulsel Nomor 10 Tahun 2016	1 Dokumen	Cakupan dokumen keterangan/p enjelasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sulsel Nomor 10 Tahun 2016	100 %				
											Jumlah dokumen layanan administrasi penataan kelembagaan Provinsi dan Pemerintah Pusat	15 Dokumen	Cakupan dokumen layanan administrasi penataan kelembagaan Provinsi dan Pemerintah Pusat	100 %				
3.00	06	01.07	01	002	Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Sulsel						Jumlah Kabupaten/K ota yang dibina dalam penataan kelembagaan	1 Dokumen	Cakupan penataan pembinaan Kabupaten/K ota se Sulsel dalam penataan kelembagaan	1 Dokumen	400,000,000.0	408,000,000.0	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
											24 Kabupaten/K ota se Sulsel							
											Luar Provinsi Sulawesi Selatan							
											Provinsi Sulawesi Selatan							

3.00	06	01.07	01	003	Pembinaan dan Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	Cakupan pembinaan dan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Provinsi	100 %	166,317,668.0	160,000,000.0	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
								Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Sulsel	1 Dokumen	Cakupan pembinaan dan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota se Sulsel	100 %				
3.00	06	01.07	01	004	Pembinaan dan Penataan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kab/Kota se Sulsel yang dibina penyusunan tugas dan fungsi	24 Kab/Kota	Cakupan pembinaan dan penyusunan tugas dan fungsi Kab/Kota se Sulsel	100 %	120,000,000.0	125,902,906.91	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
								Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah dokumen tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sulsel	53 Dokumen	Cakupan pembinaan dan penyusunan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sulsel	100 %				
3.00	06	01.07	01	005	Pembinaan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pembinaan dan penyusunan standar kompetensi jabatan Kab/Kota se Sulsel	24 Kab/Kota	Cakupan pembinaan dan penyusunan standar kompetensi jabatan Kab/Kota se Sulsel	100 Kab/Kota	225,997,830.0	230,000,000.0	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
								Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah standar kompetensi jabatan Perangkat Daerah Provinsi Sulsel yang disusun	53 PD	Cakupan pembinaan dan penyusunan standar kompetensi jabatan Perangkat Daerah Provinsi Sulsel	100 %				

3.00	06	01.07	01	006	Pembinaan dan Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pembinaan dan penyusunan Evaluasi Jabatan Kab/Kota se Sulsel	24 Kab/Kota	Cakupan pembinaan dan penyusunan Evaluasi Jabatan Kab/Kota se Sulsel	100 %	201,942,575.0	212,039,703.0	Biro Organisasi dan Tata Laksana
								Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pembinaan dan penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Sulsel	53 PD	Cakupan pembinaan dan penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Sulsel	100 100			
3.00	06	01.07	17		PROGRAM PENGUATAN KETATALAKSANAAN DAN REFORMASI BIROKRASI					Cakupan Fasilitas Penataan Tatalaksana Lingkup Prov. Sulsel	53 OPD Prov			1,495,485,999.0	1,550,915,120.23	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
										Cakupan Fasilitas Pembinaan Pelayanan Publik Lingkup Prov. Sulsel	53 OPD Prov						
										Cakupan Fasilitas Penataan Tatalaksana Umum Lingkup Prov. Sulsel	53 OPD Prov						
										Cakupan Fasilitas Penataan Tatalaksana Umum Lingkup Prov.Sulsel	24 Kab/Kota						
										Cakupan Fasilitas Penataan Standarisasi Tatalaksana Lingkup Prov.Sulsel	24 Kab/Kota						
										Cakupan Fasilitas Penataan Standarisasi Tatalaksana Lingkup Prov.Sulsel	142 UPT						
										Cakupan Fasilitas Penataan Standarisasi Tatalaksana Lingkup Prov.Sulsel	34 Cabang Dinas						

										Cakupan Fasilitas Pembinaan Pelayanan Publik Lingkup Prov. Sulsel	24 Kab/Kota								
3.00	06	01.07	17	007	Penyelenggaraan Tatalaksana Umum				Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pembinaan penyelenggaraan Tatalaksana Umum Kab/Kota se Sulsel	24 Kab/Kota	Cakupan pembinaan penyelenggaraan Tatalaksana Umum Kab/Kota se Sulsel	100 %	146,466,574.0	149,395,905.0	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
									Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kelompok Budaya Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	53 PD	Cakupan pembinaan penyelenggaraan Tatalaksana Umum Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	100 %				
3.00	06	01.07	17	008	Pengumpulan Data, Penyusunan Profil Pejabat dan Pengadaan Buku Kerja Pemerintah Prov. Sulsel				Kota Makassar			Jumlah Buku Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1000 Buku	1000 Buku Kerja	Jumlah Buku Kerja yang tersedia sebagai data dan informasi bagi pejabat Pemerintah Provinsi, Kab/Kota serta Instansi vertikal se Sulsel	1000 Buku Kerja	60,000,000.0	61,200,000.0	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
3.00	06	01.07	17	009	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (ID Card)				Kota Makassar			Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai (ID Card) PNS Lingkup Pemerintah Prov. Sulsel yang tersedia	2200 ID Card	Cakupan ketersediaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (ID Card) PNS dalam meningkatkan kedisiplinan dan wibawa pegawai	100 %	80,019,425.0	90,000,000.0	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
3.00	06	01.07	17	010	Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Penerapan Tata Naskah Dinas lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sulsel				Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pembinaan, fasilitasi dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan terlaksananya fasilitasi penerapan Tata Naskah Dinas lingkup pemerintah Kab/Kota se Sulsel	24 Kab/Kota	Cakupan Kab/Kota yang dibina dalam penyusunan SOP dan penerapan Tata Naskah Dinas	100 %	150,000,000.0	153,000,000.0	Biro Organisasi dan Tata Laksana	



							Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah pembinaan, fasilitas dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan terlaksananya fasilitas penerapan Tata Naskah Dinas lingkup Perangkat Daerah Pemprov Sulsel	53 PD	Cakupan Perangkat Daerah Provinsi Sulsel dibina dalam penyusunan SOP dan penerapan Tata Naskah Dinas	100 %				
3.00	06	01.07	17	011	Penilaian Abdibaktitani bagi UKPP berprestasi Bidang Pertanian Provinsi dan Kab/Kota se Sulsel		Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) bidang pertanian Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sulsel yang dilakukan Penilaian Abdibaktitani nasional lingkup perangkat daerah pemprov Sulsel	3 PD	Cakupan Penilaian Abdibaktitani untuk peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Pertanian dalam rangka Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Nasional lingkup perangkat daerah pemprov Sulsel	100 %	126,000,000.0	128,520,000.0	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
							Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) bidang pertanian Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sulsel yang dilakukan Penilaian Abdibaktitani nasional lingkup pemerintah kab/kota	24 Kab/Kota	Cakupan Penilaian Abdibaktitani untuk peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Pertanian dalam rangka Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Nasional lingkup pemerintah kab/kota	100 %				
3.00	06	01.07	17	012	Pembinaan dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulsel		Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Kab/Kota se Sulsel yang dibina dalam penyusunan peta proses bisnis	24 Kab/Kota	Cakupan Kab/Kota se Sulsel yang dibina dalam penyusunan peta proses bisnis	100 %	386,000,000.0	393,720,000.0	Biro Organisasi dan Tata Laksana	

							Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dibina dalam penyusunan peta proses bisnis	53 PD	Cakupan Perangkat Daerah Provinsi Sulsel yang dibina dalam penyusunan peta proses bisnis	100 %				
3.00	06	01.07	17	013	Penilaian Unit Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota se Sulsel dalam rangka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional		Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Inovasi yang diikutsertakan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	80 Inovasi	Persentase jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang masuk Top 40 Tingkat Provinsi	100 %	210,000,000.0	214,200,000.0	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
							Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Inovasi yang diikutsertakan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	30 Inovasi	Persentase jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang masuk Top 40 Tingkat Provinsi dan Top 99 Tingkat Nasional serta finalis tingkat Internasional (UNPSA)	100 %				
											Jumlah Unit Pelayanan yang difasilitasi dalam penyusunan proposal Inovasi Pelayanan Publik lingkup pemerintah provinsi	53 PD	Persentase proposal Inovasi Pelayanan Publik telah disusun perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi	100 %				
											Jumlah Unit Pelayanan yang difasilitasi dalam penyusunan proposal Inovasi Pelayanan Publik lingkup kabupaten/kota	24 Kab/Kota	Persentase proposal Inovasi Pelayanan Publik telah disusun kabupaten/kota	100 %				



								Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	24 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Reformasi Birokrasi	100 %						
											Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2024	1 Dokumen	Penerapan Rencana Aksi berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2024	1 Laporan						
											Laporan penyelenggaraan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2019	1 Laporan	Laporan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2019 yang diatur berdasarkan Permenpan Nomor 30 Tahun 2018	1 Laporan						
											Jumlah peserta Bimbingan Penyelenggaraan Pelaksanaan reformasi Birokrasi Kab/Kota	48 Orang	Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	1 Laporan						
3.00	06	01.07	17	015	Pembinaan dan Evaluasi Unit Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan dan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Unit Pelayanan dan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang telah dibina dan difasilitasi dalam penyusunan SPP, Maklumat Pelayanan dan SKM se Sulsel	1 Laporan	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Unit Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota se Sulsel	1 Laporan	180,000,000.0	200,099,215.23	Biro Organisasi dan Tata Laksana			





3.00	06	01.07	5006	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Makassar			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	50 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	20,000,000.0	14,025,000.0	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
3.00	06	01.07	5008	08	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Makassar			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	20 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	667,968,000.0	720,345,605.40	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
3.00	06	01.07	5010	00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perjalanan dinas	40 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	10 Orang	605,520,000.0	666,072,000.0	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
								Provinsi Sulawesi Selatan										
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.07</b>	<b>51</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100 %</b>				<b>576,887,799.0</b>	<b>424,035,887.64</b>	<b>Biro Organisasi dan Tata Laksana</b>	
3.00	06	01.07	5104	04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kota Makassar			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	195,000,000.0	87,711,199.64	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
3.00	06	01.07	5109	09	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	12 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	350,000,000.0	299,092,500.0	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
3.00	06	01.07	5110	00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	80 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	31,887,799.0	37,232,188.0	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.07</b>	<b>52</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					<b>% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu</b>	<b>100 %</b>				<b>22,500,000.0</b>	<b>56,160,000.0</b>	<b>Biro Organisasi dan Tata Laksana</b>	
3.00	06	01.07	5202	02	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kota Makassar			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	4 Dokumen	13,500,000.0	21,600,000.0	Biro Organisasi dan Tata Laksana	
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	1 Dokumen				





3.00	06	01.08	23	003	Pengendalian dan pendistribusian naskah			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah naskah / undangan pemerintah provinsi sulawesi selatan yang terkendali dan terdistribusi	12785 naskah	Terkendalikannya dan terdistribusikannya naskah kedinasan (undangan/surat/naskah) dengan cepat, tepat dan aman.	100 %	30,000,000.0	35,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan
3.00	06	01.08	23	004	Penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan aparat fungsional			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah laporan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	3 laporan	Terselesaikannya laporan hasil pemeriksaan, dalam bentuk tindak lanjut yang akuntabel	100 %	20,000,000.0	25,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan
3.00	06	01.08	23	005	Pelayanan Administrasi Ketatausahaan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah aparatur yang melakukan pelayanan administrasi ketatausahaan	172 Aparatur	Tersedianya informasi dan data (catatan, keterangan) yang dibutuhkan setiap organisasi dalam bentuk dokumen administrasi.	100 %	2,040,794,265.0	2,140,794,265.0	Biro Umum dan Perlengkapan
3.00	06	01.08	23	006	Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Administrasi Kedinasan			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah jenis pembinaan pengembangan pelayanan administrasi aparatur yang dilaksanakan	4 jenis	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kedinasan	100 %	150,000,000.0	155,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan
								Provinsi Sulawesi Selatan									
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.08</b>	<b>24</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH</b>					<b>Cakupan jumlah pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan</b>	<b>2150 Pelayanan</b>				<b>21,172,294,000.0</b>	<b>23,044,294,000.0</b>	<b>Biro Umum dan Perlengkapan</b>
3.00	06	01.08	24	001	Sosialisasi / bimbingan teknis pelayanan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengadaan barang jasa SETDA			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta sosialisasi / bimbingan teknis pelayanan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengadaan barang jasa SETDA	510 Orang	Terselenggarakannya sosialisasi / bimbingan teknis kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengadaan barang jasa, yang sesuai dengan kebutuhan	100 %	620,000,000.0	622,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan
								Provinsi Sulawesi Selatan									

3.00	06	01.08	24	002	Penyediaan kebersihan dan keindahan kantor / rumah jabatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah gedung perkantoran, rumah jabatan dan halaman yang terlayani kebersihan keindahannya	14 bangunan	Terjaganya kebersihan dan keindahan gedung perkantoran dan gedung tempat tinggal rumah jabatan dinas, setiap saatnya	100 %	2,500,290,000.0	2,700,290,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.08	24	003	Pembuatan / pemeliharaan taman kantor / rumah jabatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pertamanan yang dibuat / dipelihara	2 pertamanan	Terpeliharanya pertamanan perkantoran dan pertamanan tempat tinggal rumah jabatan dinas, dengan baik dan benar	100 %	800,000,000.0	810,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.08	24	004	Penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan kantor			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah jenis jasa perlengkapan dan jenis jasa peralatan kantor yang tersedia	14 jenis	Tersedianya jasa perlengkapan dan jasa peralatan kantor yang tepat guna dan hasil guna, dalam mendukung acara kegiatan perkantoran	100 %	2,300,000,000.0	2,500,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.08	24	005	Penyediaan spanduk / umbul - umbul peringatan hari tertentu			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah spanduk / umbul - umbul yang tersedia	1500 buah	Tersedianya spanduk dan umbul-umbul pemerintah provinsi sulawesi selatan yang mendukung keindahan dan kebersihan gedung perkantoran dan rumah jabatan dinas	100 %	100,000,000.0	120,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.08	24	006	Pembuatan / pemeliharaan area parkir dan sarana olahraga kantor gubernur			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah area parkir dan area sarana olahraga yang tersedia dan terjamin keamanannya	1 area	Terkelolanya area parkir dan sarana olahraga kantor dengan baik dan benar	100 %	450,000,000.0	470,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	

3.00	06	01.08	24	007	Rehabilitasi sedang / berat gedung persewaan				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah gedung persewaan yang direhabilitasi	1 gedung	Tersedianya gedung persewaan yang indah dan aman serta mampu bersaing dengan gedung persewaan lainnya	100 %	400,000,000.0	400,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.08	24	008	Peningkatan kualitas pelayanan gedung / tempat persewaan				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah gedung / tempat persewaan yang terjamin pelayanannya	5 gedung / tempat	Tersedianya gedung tempat persewaan yang mampu menopang sumber pendapatan pemerintah provinsi sulawesi selatan	100 %	450,000,000.0	450,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.08	24	009	Rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan / rumah dinas				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah rumah jabatan/dinas yang di rehabilitasi	3 unit	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan pada rumah jabatan/dinas	100 %	2,000,000,000.0	2,000,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.08	24	010	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah gedung perkantoran yang direncanakan direhabilitasi	10 gedung	Meningkatnya kualitas kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat kerja	100 %	2,500,000,000.0	3,000,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.08	24	011	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah jenis barang milik daerah yang bertanggung asuransinya	2 jenis	Meningkatnya kualitas jaminan keamanan bangunan dan kendaraan pemerintah provinsi sulawesi selatan	100 %	662,004,000.0	762,004,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.08	24	012	Penyediaan makanan dan minuman				Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah acara kegiatan perjamuan makanan dan minuman yang di rencanakan	870 acara kegiatan	Terjalinya hubungan yang erat antar pemerintah, antar lembaga lainnya dan masyarakat	100 %	8,080,000,000.0	8,800,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	

3.00	06	01.08	24	013	Koordinasi dan Konsultasi antar Lembaga Pelayanan Kerumahtangaan dan Perlengkapan			Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah pegawai yang melakukan koordinasi dan konsultasi antar lembaga pelayanan kerumahtangaan dan perlengkapan	137 pegawai	Meningkatnya knowledge sharing antar pelayan kerumahtangaan dan perlengkapan	100 %	310,000,000.0	410,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
								Provinsi Sulawesi Selatan											
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.08</b>	<b>25</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KETATAUSAHAAN DAN INVENTARISASI ASET SEKRETARIAT DAERAH</b>					<b>Cakupan jumlah barang dan jasa yang terkelola</b>	<b>1058 Unit</b>					<b>202,000,000.0</b>	<b>202,000,000.0</b>	<b>Biro Umum dan Perlengkapan</b>	
3.00	06	01.08	25	001	Perencanaan kebutuhan barang dan jasa			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang dan jasa yang tersedia	2 dokumen	Tersedianya barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan aturan yang berlaku	100 %	25,000,000.0	25,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.08	25	002	Pengendalian rencana tahunan pemeliharaan barang			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah dokumen perencanaan pemeliharaan barang yang tersedia	2 dokumen	Terkendalikannya pekerjaan pemeliharaan barang, sehingga terciptanya pekerjaan yang tepat sasaran	100 %	15,000,000.0	15,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.08	25	003	Pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah dokumen pemeriksaan dan penerimaan barang/pekerjaan yang tersedia	1024 dokumen	Terlaksanakannya pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan perjanjian dan perintah pekerjaan	100 %	20,000,000.0	20,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.08	25	004	Pengendalian dan pendistribusian barang SETDA Provinsi Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah dokumen administrasi pengendalian dan pendistribusian barang yang tersedia	10 dokumen	Terkendalikannya dan terdistribusikannya hasil pengadaan barang pemerintah provinsi sulawesi selatan, dengan baik dan benar	100 %	17,000,000.0	17,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	

3.00	06	01.08	25	05	Inventarisasi barang lingkup sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah dokumen penginventarian barang yang tersedia	9 dokumen	Terdokumentasinya seluruh hasil pengadaan barang pemerintah provinsi sulawesi selatan dengan baik dan benar	100 %	25,000,000.0	25,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan
3.00	06	01.08	25	06	Penyediaan data informasi pengelolaan barang daerah			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah laporan pengelolaan barang yang tersedia	9 laporan	Terkelolahnya data dan informasi tentang pekerjaan pengadaan barang, jasa lainnya, konstruksi, konsultansi, swakelola dengan baik dan akuntabel	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan
3.00	06	01.08	26		<b>PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH</b>					<b>Cakupan jumlah dokumen administrasi penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah</b>	<b>15205 Dokumen</b>				<b>1,960,000,000.0</b>	<b>1,960,000,000.0</b>	<b>Biro Umum dan Perlengkapan</b>
3.00	06	01.08	26	01	Sosialisasi / bimbingan teknis pelayanan ketatausahaan keuangan SETDA			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta sosialisasi / bimbingan teknis pelayanan ketatausahaan keuangan SETDA	75 Orang	Terciptanya kesepahaman dalam pelaksanaan ketatausahaan keuangan di lingkup SETDA Provinsi Sulawesi Selatan.	100 %	500,000,000.0	500,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan
								Provinsi Sulawesi Selatan									
3.00	06	01.08	26	02	Fasilitasi dan verifikasi, penyusunan APBD SETDA Provinsi Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah dokumen RKA, DPA yang tersusun pada kegiatan fasilitasi dan verifikasi penyusunan APBD SETDA	36 dokumen	Terlaksananya penyusunan RKA-DPA yang sesuai dengan kaidah/pedoman penyusunan RKA-DPA	100 %	235,000,000.0	235,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan

3.00	0 6	01.08	2 6	0 0 3	Pengelolaan data progres RAPBD - APBD SETDA Provinsi Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah laporan progres RAPBD-APBD SETDA Provinsi Sulawesi Selatan yang tersedia	9 laporan	Terdokumentasi dan terkendalinya data nama program dan anggaran program SETDA , mulai penyusunan hingga penetapan APBD.	100 %	99,000,000.0	99,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	0 6	01.08	2 6	0 0 4	Pengelolaan administrasi perbendaharaan SETDA Provinsi Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah dokumen administrasi perbendaharaan keuangan yang dikelola	13994 dokumen	Terkelolahnya dokumen administrasi perbendaharaan keuangan secara baik dan benar	100 %	350,000,000.0	350,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	0 6	01.08	2 6	0 0 5	Pengelolaan data administrasi daftar gaji SETDA Provinsi Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah unit kerja yang terkoordinasi dalam pembuatan daftar gaji setiap bulannya	9 unit kerja	Terlaksananya ketepatan waktu dalam penerimaan gaji tunjangan, tambahan penghasilan beban kerja, dan tunjangan operasional KDH/WKDH	100 %	75,000,000.0	75,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	0 6	01.08	2 6	0 0 6	Pengelolaan data dan pengujian penagihan surat perintah membayar SETDA Provinsi Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah dokumen SPM penagihan pembayaran yang dikelola dan teruji	939 dokumen	Tertindak lanjutnya secara baik, benar dokumen SPM, menjadi SP2D	100 %	115,000,000.0	115,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	0 6	01.08	2 6	0 0 7	Pengendalian dan verifikasi surat pertanggungjawaban SETDA Provinsi Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah unit kerja yang terlayani akan pengendalian dan verifikasi SPJnya	9 unit kerja	Terlaksananya verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan secara baik dan benar di lingkup SETDA Provinsi Sulawesi Selatan	100 %	30,000,000.0	30,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	

3.00	06	01.08	26	008	Penyusunan pelaporan dan analisa APBD SETDA Provinsi Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah laporan yang tersedia pada bagian keuangan SETDA Provinsi Sulawesi Selatan	27 laporan	Tersedianya laporan Realisasi Keuangan, Neraca saldo, Operasional, perubahan ekuitas, realisasi keuangan fisik, triwulan, semesteran, akhir tahun, LKPJ, LPPD dengan baik dan benar	100 %	256,000,000.0	256,000,000.0	Biro Umum dan Perengkapan
3.00	06	01.08	26	009	Koordinasi dan Konsultasi antar Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah			Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah pegawai yang melakukan koordinasi dan konsultasi pada lembaga pengelolaan keuangan daerah	39 Pegawai	Meningkatnya a knowledge sharing antar pengelola keuangan daerah	100 %	300,000,000.0	300,000,000.0	Biro Umum dan Perengkapan
								Provinsi Sulawesi Selatan										
3.00	06	01.08	27		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH</b>							<b>Cakupan jumlah pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>11534 Pelayanan</b>			<b>9,515,000,000.0</b>	<b>9,595,687,069.0</b>	<b>Biro Umum dan Perengkapan</b>
3.00	06	01.08	27	001	Pengadaan pakaian kedinasan dan pakaian khusus hari-hari tertentu KDH-WKDH			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah pakaian KDH-WKDH yang tersedia dalam penyelenggaraan tugas kedinasan	20 Pasang	Meningkatnya a pandangan positif masyarakat kepada KDH / WKDH (memiliki identitas sebagai pemerintah yang disiplin dan berkarakter).	100 %	110,000,000.0	110,000,000.0	Biro Umum dan Perengkapan
3.00	06	01.08	27	002	Koordinasi konsultasi KDH-WKDH dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya			Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah perjalanan dinas KDH-WKDH	177 kali	Meningkatnya a sinergitas kedinasan antara KDH-WKDH dengan pemerintah lainnya	100 %	2,900,000,000.0	2,900,000,000.0	Biro Umum dan Perengkapan
								Provinsi Sulawesi Selatan										

3.00	06	01.08	27	003	Penyelenggaraan kerumahtanggaan rumah jabatan KDH-WKDH			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah perjamuan kerumahtanggaan KDH-WKDH	2880 perjamuan	Terjalinnnya hubungan yang membangun antar individu pengendali/pengelola rumah jabatan	100 %	3,605,000,000.0	3,605,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan		
3.00	06	01.08	27	004	Pelayanan penerimaan tamu pemerintah provinsi sulawesi selatan dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah penyelenggaraan acara kegiatan KDH-WKDH dalam penerimaan tamu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	1510 Acara kegiatan	Meningkatnya kualitas hubungan antar pemerintah pusat / provinsi / kabupaten / kota, dalam kedinasan yang berorientasi pada pelayanan	100 %	2,900,000,000.0	2,980,687,069.0	Biro Umum dan Perlengkapan		
3.00	06	01.08	50		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>						<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>				<b>18,364,267,632.0</b>	<b>18,464,267,632.0</b>	<b>Biro Umum dan Perlengkapan</b>		
3.00	06	01.08	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100 Jenis	7,100,000,000.0	7,200,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan		
3.00	06	01.08	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	335 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	7,564,267,632.0	7,564,267,632.0	Biro Umum dan Perlengkapan		
3.00	06	01.08	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah ATK yang tersedia	5 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	400,000,000.0	400,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan		
3.00	06	01.08	50	000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah perjalanan dinas	1990 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	181 Orang	3,300,000,000.0	3,300,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan		
								Provinsi Sulawesi Selatan												
3.00	06	01.08	51		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>						<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100 %</b>				<b>14,275,564,069.93</b>	<b>14,596,564,071.94</b>	<b>Biro Umum dan Perlengkapan</b>		
3.00	06	01.08	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	3 Unit	Ketersediaan rumah jabatan/ rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	700,000,000.0	500,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan		
3.00	06	01.08	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	10 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	1,200,000,000.0	1,100,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan		



3.00	06	01.08	51	005	Pengadaan Kendaraan Jabatan/Dinas			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah mobil jabatan/dinas yang tersedia	2 Unit	Ketersediaan mobil jabatan/dinas sesuai kebutuhan	100 %	1,989,000,000.0	2,500,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.08	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	292 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	4,546,564,069.93	4,546,564,071.94	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.08	51	007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	300 Unit	Ketersediaan Perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas sesuai kebutuhan	100 %	2,200,000,000.0	2,300,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.08	51	008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	4 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	300,000,000.0	310,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.08	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	170 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	2,300,000,000.0	2,300,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.08	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	490,000,000.0	490,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.08	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	3 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	550,000,000.0	550,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.08</b>	<b>53</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>	<b>100 %</b>			<b>1,020,000,000.0</b>	<b>1,070,000,000.0</b>	<b>Biro Umum dan Perlengkapan</b>		
3.00	06	01.08	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	700 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	450,000,000.0	490,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	

3.00	06	01.08	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	427 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	570,000,000.0	580,000,000.0	Biro Umum dan Perlengkapan	
3.00	06	01.09			Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah										6,013,599,585.0	6,236,489,360.90		
3.00	06	01.09	20		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					Cakupan ketersediaan data aset yang akurat	6 Jenis				1,931,500,000.0	2,032,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
										Cakupan Aset (tanah) milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki sertifikat	52 %							
										Cakupan aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan	24 %							
3.00	06	01.09	20	001	Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah sertifikat aset tetap tanah	30 Sertifikat	Meningkatnya pengamanan administrasi aset tetap tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	100 %	500,000,000.0	500,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
3.00	06	01.09	20	002	Pengelolaan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			Aset Tanah dan Bangunan yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Hasil Kajian Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan	3 Kajian	Meningkatnya pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan	100 %	297,000,000.0	396,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
								Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Kota Makassar										
3.00	06	01.09	20	003	Inventarisasi Barang Milik Daerah			Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah	58 Laporan	Meningkatnya cakupan inventarisasi barang milik daerah	100 %	78,000,000.0	93,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	

3.00	06	01.09	20	004	Pengembangan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah			Bengkel Aset Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dipelihara dan dikembangkan	1 Sistem Informasi/Aplikasi	Meningkatnya layanan pengelolaan sistem informasi/aplikasi barang milik daerah	100 %	175,000,000.0	175,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
3.00	06	01.09	20	005	Penertiban Aset Bermasalah						Jumlah Aset Bermasalah yang Teridentifikasi	10 Aset	Berkurangnya aset bermasalah yang difasilitasi	100 %	274,000,000.0	280,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
								Kantor BPKP, Kejaksaan Tinggi, BPN, Kepolisian Daerah, Pemda Setempat, KPKNL & Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Kota Makassar										
								Seluruh Aset Bermasalah yang tersebar di Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan										
3.00	06	01.09	20	006	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	7 Dokumen	Meningkatnya kualitas perencanaan RKBMD	100 %	18,000,000.0	20,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
3.00	06	01.09	20	008	Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa			Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah standar harga barang dan jasa yang disusun	2 Standar	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan yang disusun	100 %	6,000,000.0	6,500,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
3.00	06	01.09	20	009	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah			Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah OPD yang ditetapkan Status Penggunaannya	58 OPD	Meningkatnya jumlah penggunaan barang milik daerah	100 %	6,000,000.0	12,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
3.00	06	01.09	20	013	Penghapusan Barang Milik Daerah			Kantor Gubernur Sulawesi Selatan & KPKNL Kota Makassar			Jumlah dokumen penghapusan barang milik daerah	1 Dokumen	Tertibnya pelaksanaan penghapusan barang milik daerah	100 %	67,000,000.0	73,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	

3.00	06	01.09	20	014	Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah			Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah OPD yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan BMD	58 OPD	Meningkatnya kualitas pemeliharaan BMD	100 %	5,500,000.0	6,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
3.00	06	01.09	20	015	Pengamanan Fisik Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan			Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah Jenis Pengamanan Fisik Aset Tanah dan Bangunan	2 Jenis	Meningkatnya jenis pengamanan fisik aset tanah dan bangunan	100 %	335,000,000.0	250,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
								Seluruh Aset Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan										
3.00	06	01.09	20	016	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah kebijakan pengelolaan BMD yang disusun	1 Jenis	Meningkatnya jumlah kebijakan pengelolaan BMD	100 %	45,000,000.0	64,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
3.00	06	01.09	20	018	Revaluasi/Appraisal Barang Milik Daerah			Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan KPKNL Kota Makassar			Jumlah BMD yang direvaluasi/di nilai	1 Dokumen	Updatenya nilai BMD	100 %	120,000,000.0	150,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
3.00	06	01.09	20	019	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Persediaan Barang Milik Daerah			Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah Laporan Penatausahaan Persediaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Meningkatnya pengelolaan persediaan barang milik daerah	100 %	5,000,000.0	6,500,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.09</b>	<b>50</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>						<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>2,763,080,000.0</b>	<b>2,980,090,000.0</b>	<b>Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah</b>	
3.00	06	01.09	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Kota Makassar			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	4 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	4 Unit	17,000,000.0	16,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
											Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	19 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	19 Unit				
3.00	06	01.09	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kantor Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	25 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	900,000,000.0	1,061,760,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	

3.00	06	01.09	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kantor Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Kota Makassar			Jumlah ATK yang tersedia	3 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	396,000,000.0	418,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
3.00	06	01.09	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Makassar			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	15 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	19,580,000.0	19,830,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
3.00	06	01.09	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	2 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	430,500,000.0	439,500,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
3.00	06	01.09	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perjalanan dinas	225 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	40 Orang	1,000,000,000.0	1,025,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
								Luar Provinsi Sulawesi Selatan Luar Provinsi Sulawesi Selatan										
<b>3.00</b>	<b>06</b>	<b>01.09</b>	<b>51</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>1,212,769,585.0</b>	<b>1,106,949,360.90</b>	<b>Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah</b>		
3.00	06	01.09	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kantor Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Kota Makassar			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	418,000,000.0	250,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
3.00	06	01.09	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kantor Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Kota Makassar			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	4 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	175,000,000.0	192,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
3.00	06	01.09	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	10 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	307,369,585.0	375,999,360.90	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
3.00	06	01.09	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Kota Makassar			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	242,000,000.0	217,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	

3.00	06	01.09	51	02	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Kantor Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Kota Makassar			Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	3 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	70,400,000.0	71,950,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
											Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	20 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	100 %				
3.00	06	01.09	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA					% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %				5,250,000.0	5,450,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
3.00	06	01.09	52	05	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kantor Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Kota Makassar			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	5,250,000.0	5,450,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
3.00	06	01.09	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					% ASN berkinerja sangat baik	100 %				101,000,000.0	112,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
3.00	06	01.09	53	01	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian nya	52 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	101,000,000.0	112,000,000.0	Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah	
											Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %				
3.00	0				Pengawasan													
3.00	0	01.00			Inspektorat Daerah										13,630,898,331.0	14,068,205,038.35		
3.00	07	01.00	01		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN DAERAH (Prioritas)	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan, Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan			Opini LKPD dari BPK RI (Proritas)	100 % (Opini WTP)				4,305,376,487.0	4,464,952,193.04	Inspektorat Daerah	
3.00	07	01.00	01	09	Pemeriksaan Dana BOS			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Kab/Kota yang diperiksa	24 Kab/Kota	termanfaatkannya rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan dana bos	100 %	600,000,000.0	600,000,000.0	Inspektorat Daerah	
3.00	07	01.00	01	00	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi dan Keuangan OPD Provinsi dan Kab/ Kota/ Pamjab Irbanwil I			Kabupaten Bantaeng			Jumlah OPD/ Unit Kerja yang di opname kas/ Pengecekan	14 OPD/ Unit Kerja	termanfaatkannya rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan administrasi dan keuangan	100 %	854,000,000.0	949,952,193.04	Inspektorat Daerah	



3.00	07	01.00	01	012	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi dan Keuangan OPD Provinsi dan Kab/ Kota/ Pamjab Irbawil III			Kabupaten Barru			Jumlah OPD/Unit Kerja yang diperiksa	14 OPD/ Unit Kerja	termanfaatkannya rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan administrasi dan keuangan	100 %	922,000,000.0	965,000,000.0	Inspektorat Daerah	
								Kabupaten Bulukumba			Jumlah OPD/Unit Kerja yang diopnamekas/pengecekan	14 OPD/ Unit Kerja	termanfaatkannya rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan administrasi dan keuangan	100 %				
								Kabupaten Enrekang			Jumlah kab/kota yang diperiksa	6 Kab/ Kota	termanfaatkannya rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan administrasi dan keuangan	100 %				
								Kabupaten Jeneponto										
								Kabupaten Kepulauan Selayar										
								Kabupaten Takalar										
								Provinsi Sulawesi Selatan										
3.00	07	01.00	01	013	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi dan Keuangan OPD Provinsi dan Kab/ Kota/ Pamjab Irbawil II			Kabupaten Gowa			Jumlah OPD/Unit Kerja yang diperiksa	14 OPD/ Unit Kerja	termanfaatkannya rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan administrasi dan keuangan	100 %	1,007,376,487.0	985,000,000.0	Inspektorat Daerah	
								Kabupaten Luwu			Jumlah OPD/Unit Kerja yang diopnamekas/pengecekan	14 OPD/ Unit Kerja	termanfaatkannya rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan administrasi dan keuangan	100 %				
								Kabupaten Pinrang			Jumlah kab/kota yang diperiksa	6 Kab/ Kota	termanfaatkannya rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan administrasi dan keuangan	100 %				
								Kabupaten Sinjai										





											Jumlah Dokumen LK OPD yang di Reviu	30 Dokumen	Tersusunnya dokumen yang telah memenuhi standar penyusunan Laporan keuangan	100 %						
											Jumlah Dokumen LKPD yang di Reviu	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen yang telah memenuhi standar penyusunan Laporan keuangan	100 %						
3.00	07	01.00	02	003	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender			Kota Makassar			Jumlah SKPD yang di evaluasi	40 OPD/ Unit Kerja	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran OPD yang responsif gender	100 %	52,000,000.0	52,000,000.0	Inspektorat Daerah			
3.00	07	01.00	02	004	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			Kota Makassar			Jumlah OPD yang di evaluasi	40 OPD/ Unit Kerja	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern OPD yang baik	100 %	17,000,000.0	17,000,000.0	Inspektorat Daerah			
3.00	07	01.00	02	005	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP			Kota Makassar			Jumlah Peserta Rapat Pemutakhiran Tingkat Nasional	0 Orang	Meningkatnya OPD yang menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil temuan	100 %	430,000,000.0	435,000,000.0	Inspektorat Daerah			
											Jumlah Peserta Rapat Pemutakhiran TLHP BPK/APIP OPD Prov. Sulsel	240 Orang	Meningkatnya OPD yang menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil temuan	100 %						
											Jumlah Peserta Rapat Pemutakhiran TLHP APIP Kab/Kota	150 Orang	Meningkatnya OPD yang menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil temuan	100 %						
											Jumlah OPD yang dimonev TLHP BKP-RI	56 OPD	Meningkatnya OPD yang menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil temuan	100 %						
											Jumlah Kab/kota yang dimonev TLHP APIP	24 Kab/Kota	Meningkatnya OPD yang menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil temuan	100 %						

											Jumlah OPD yang dimonev TLHP APIP	56 OPD	Meningkatnya OPD yang menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil temuan	100 %				
3.00	07	01.00	02	006	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa				Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah Kabupaten yang dimonev	21 Kabupaten	Terwujudnya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Juknis	100 %	245,000,000.0	250,000,000.0	Inspektorat Daerah	
3.00	07	01.00	02	007	Evaluasi SAKIP				Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi Sakip	6 Kab/Kota	Meningkatnya jumlah Pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi kelengkapan dokumen sakip	100 %	270,000,000.0	280,000,000.0	Inspektorat Daerah	
											Jumlah OPD yang dievaluasi Sakip	30 OPD	Meningkatnya jumlah OPD Provinsi yang memenuhi kelengkapan dokumen sakip	100 %				
3.00	07	01.00	02	008	Pengawasan Tujuan Tertentu				Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah LHP pengawasan tujuan tertentu	24 LHP	meningkatnya pengawasan tujuan tertentu pada OPD yang ditindaklanjuti	100 %	270,000,000.0	280,000,000.0	Inspektorat Daerah	
3.00	07	01.00	02	009	Peningkatan dan Pengendalian Pengawasan				Luar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah Kabupaten/Kota	18 Kab/Kota	terlaksananya pengendalian pengawasan di Kab/kota	100 %	120,000,000.0	125,000,000.0	Inspektorat Daerah	
									Provinsi Sulawesi Selatan									
3.00	07	01.00	02	010	Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah				Luar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah OPD yang di asistensi dan Pendampingan	56 OPD/Unit Kerja	Terlaksananya pendampingan dan Asistensi yang intensif	100 %	94,500,000.0	94,500,000.0	Inspektorat Daerah	
									Provinsi Sulawesi Selatan									
3.00	07	01.00	02	013	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif				Luar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah Koordinasi pengawasan yang dilaksanakan	10 Kegiatan	Terwujudnya koordinasi pengawasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Yang lebih komprehensif	100 %	250,209,182.0	259,515,864.01	Inspektorat Daerah	



											Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pemantapan jabatan fungsional pengawasan	4 Kegiatan	meningkatkan kapasitas aparat pengawasan	100 %					
3.00	07	01.00	03		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI				Jumlah OPD/Unit Kerja yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas	7 OPD/Unit Kerja					2,230,000,000.0	2,245,000,000.0	Inspektorat Daerah		
3.00	07	01.00	03	001	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi			Kota Makassar			Jumlah peserta rapat	150 Orang	termanfaatkannya hasil penilaian mandiri birokrasi reformasi birokrasi	100 %	90,000,000.0	90,000,000.0	Inspektorat Daerah		
											Jumlah kab/kota yang difasilitasi	8 Kab/Kota	termanfaatkannya hasil penilaian mandiri birokrasi reformasi birokrasi	100 %					
											Jumlah OPD yang dinilai	20 OPD/Unit Kerja	termanfaatkannya hasil penilaian mandiri birokrasi reformasi birokrasi	100 %					
3.00	07	01.00	03	002	Evaluasi Pelayanan Publik			Kota Makassar			Jumlah kab/kota yang dievaluasi	8 Kab/Kota	termanfaatkannya hasil evaluasi ntuk peningkatan kulaitas pelayanan publik	100 %	100,000,000.0	100,000,000.0	Inspektorat Daerah		
											Jumlah OPD pelayanan publik yang dievaluasi	20 OPD/Unit Kerja	termanfaatkannya hasil evaluasi ntuk peningkatan kulaitas pelayanan publik	100 %					
3.00	07	01.00	03	003	Penanganan Laporan Gratifikasi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta sosialisasi	300 Orang	Terselenggara nya sosialisasi Pelaporan Gratifikasi	100 %	200,000,000.0	200,000,000.0	Inspektorat Daerah		
											Jumlah tim penanganan	2 tim	Tertindaklanjutnya penanganan laporan gratifikasi	100 %					

3.00	07	01.00	03	004	Penanganan Benturan Kepentingan dan Penanganan Whistle Blower System			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta sosialisasi	300 Orang	Terselenggaranya Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan dan Penanganan WBS	100 %	90,000,000.0	90,000,000.0	Inspektorat Daerah
											Jumlah tim penanganan	6 tim	Tertindaklanjutnya penanganan benturan kepentingan dan WBS	100 %			
3.00	07	01.00	03	006	Penilaian internal Zona Integritas			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah OPD yang dinilai	20 OPD/ Unit Kerja	Terpenuhi OPD yang memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi wilayah integritas	100 %	175,000,000.0	175,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	03	007	Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah rencana aksi yang diverifikasi	9 Sektor	Terselenggaranya rencana aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi	100 %	80,000,000.0	80,000,000.0	Inspektorat Daerah
3.00	07	01.00	03	008	Verifikasi LHKPN/LHKASN			Kota Makassar			Jumlah ASN yang melaporkan LHKASN	5000 ASN	Tersedianya LHKASN yang sesuai dengan pedoman	100 %	70,000,000.0	75,000,000.0	Inspektorat Daerah
											Jumlah ASN yang diverifikasi LHKPN	66 ASN	Tersedianya LHKPN yang sesuai dengan pedoman	100 %			
3.00	07	01.00	03	009	Peningkatan Kapabilitas APIP			Kota Makassar			Jumlah dokumen kapabilitas APIP	20 Dokumen	Terwujudnya sinergitas peningkatan kapabilitas APIP antara Pemerintah prov sulsel dengan pemprov lainnya	100 %	50,000,000.0	60,000,000.0	Inspektorat Daerah
											Jumlah tim telaah sejawat antar Provinsi	1 Tim	Terwujudnya sinergitas peningkatan kapabilitas APIP antara Pemerintah prov sulsel dengan pemprov lainnya	100 %			

												Jumlah tim telaah sejawat antar Irbawil	4 Tim	Terwujudnya sinergitas peningkatan kapabilitas APIP antara Pemerintah prov sulsel dengan pemprov lainnya	100 %				
3.00	0 7	01.00	0 3	0 1 0	Gelar Pengawasan Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah peserta gelar pengawasan	150 Orang	Terseleenggara nya Gelar Pengawasan Daerah	100 %	25,000,000.0	25,000,000.0	Inspektorat Daerah	
3.00	0 7	01.00	0 3	0 1 2	Sapu Bersih Pungutan Liar			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah kegiatan FGD pembanguna n pelayanan publik anti pungutan liar	1 kegiatan	Terwujudnya penyelenggara an pemerintaha n daerah yang bebas dari pungli	100 %	1,350,000,000.0	1,350,000,000.0	Inspektorat Daerah	
												Jumlah kegiatan supervisi/pe mantauan pelayanan publik	4 Kegiatan	Terseleenggara nya Kegiatan Sosialisasi Saber pungli	100 %				
3.00	0 7	01.00	0 5		<b>PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT</b>						% Pengaduan Masyarakat terhadap OPD yang ditindaklanjuti	100 %				436,204,464.0	452,372,071.11	Inspektorat Daerah	
											% Pengaduan Masyarakat terhadap Bupati/Walikota yang ditindaklanjuti	100 %							
3.00	0 7	01.00	0 5	0 0 3	Penanganan Pengaduan masyarakat Terhadap Perangkat Daerah dan Bupati/ Walikota			Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah LHP Pengaduan Masyarakat terhadap OPD	30 LHP	Terlaksananya a Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap OPD	100 %	436,204,464.0	452,372,071.11	Inspektorat Daerah	
												Jumlah LHP Pengaduan Masyarakat terhadap Bupati/Waliko ta	10 LHP	Terlaksananya a Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Bupati/waliko ta	100 %				
3.00	0 7	01.00	5 0		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>						% Pemenuhan administrasi perkantoran	100 %				2,955,019,044.0	3,064,544,715.27	Inspektorat Daerah	
3.00	0 7	01.00	5 0	0 0 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	3 Jenis	620,000,000.0	635,000,000.0	Inspektorat Daerah	

3.00	07	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	8 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	8 Unit	26,000,000.0	26,000,000.0	Inspektorat Daerah	
											Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	11 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	11 Unit				
3.00	07	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	112 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	970,000,000.0	993,832,715.27	Inspektorat Daerah	
3.00	07	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah ATK yang tersedia	54 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	375,000,000.0	390,000,000.0	Inspektorat Daerah	
3.00	07	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	7,212,000.0	7,212,000.0	Inspektorat Daerah	
3.00	07	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	6 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	700,000,000.0	730,000,000.0	Inspektorat Daerah	
3.00	07	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	2 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	52,500,000.0	52,500,000.0	Inspektorat Daerah	
3.00	07	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perjalanan dinas	30 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	10 Orang	204,307,044.0	230,000,000.0	Inspektorat Daerah	
								Provinsi Sulawesi Selatan										
<b>3.00</b>	<b>07</b>	<b>01.00</b>	<b>51</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>					<b>693,822,059.0</b>	<b>719,538,078.26</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>	
3.00	07	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	2 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	242,000,000.0	250,000,000.0	Inspektorat Daerah	
3.00	07	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	10 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	250,000,000.0	250,000,000.0	Inspektorat Daerah	



3.00	07	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	40 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	141,822,059.0	154,538,078.26	Inspektorat Daerah	
3.00	07	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	40 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	50,000,000.0	55,000,000.0	Inspektorat Daerah	
3.00	07	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website			Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	2 Sistem Informasi/Aplikasi	Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate	100 %	10,000,000.0	10,000,000.0	Inspektorat Daerah	
											Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	10 Berita/Informasi	Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan	100 %				
3.00	07	01.00	52		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>						% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100 %			168,661,423.0	174,912,738.28	Inspektorat Daerah	
3.00	07	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	2 Dokumen	102,250,000.0	105,000,000.0	Inspektorat Daerah	
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	2 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan	1 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	4 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	4 Dokumen				

3.00	07	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	4 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	66,411,423.0	69,912,738.28	Inspektorat Daerah	
3.00	07	01.00	53		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					% ASN berkinerja sangat baik	93 %				155,505,672.0	161,269,378.38	Inspektorat Daerah	
3.00	07	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaian nya	10 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	48,000,000.0	51,269,378.38	Inspektorat Daerah	
											Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	2 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %				
3.00	07	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	194 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	107,505,672.0	110,000,000.0	Inspektorat Daerah	
3.00	08				<b>Pemerintahan Umum</b>													
3.00	08	01.00			<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>										8,453,641,963.73	8,748,438,024.61		
3.00	08	01.00	01		<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK</b>					Cakupan wilayah konflik yang terpetakan	20 %				3,039,170,704.0	3,144,402,539.52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	01	001	Pemetaan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Wilayah Sulsel			Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Dokumen Pemetaan Konflik Wilayah	2 Dokumen	Tersedianya data dan Informasi peta rawan konflik di Sulsel	1 Dokumen	173,000,000.0	173,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	01	002	Koordinasi Satgas Kontra Terorisme, Radikalisme dan Narkoba			Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Satgas Kontra terorisme, radikalisme dan narkoba	4 Laporan	Tersedianya data, informasi dan sinergitas satgas	1 Dokumen	95,000,000.0	95,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	01	003	Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah Laporan Pengawasan dan pemantauan Orang Asing NGO dan lembaga asing	4 Laporan	Tersedianya data informasi pengawasan orang asing, NGO dan lembaga asing	1 Dokumen	93,420,704.0	93,652,539.52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

3.00	08	01.00	01	004	Pembinaan dan Koordinasi Tiga Pilar Bangdes Mantra			Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Laporan Koordinasi Tiga Pilar Bangdes Mantra	4 Laporan	Ketersediaan Informasi Sinergitas Lurah, Babinsa, Babinkantibmas dalam deteksi dan cegah dini ATHG	1 Dokumen	97,500,000.0	97,500,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	01	005	Pembinaan dan Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Daerah Prov. Sulsel			Kota Makassar Kota Makassar				Jumlah Laporan Forum Kewaspadaan Dini Daerah Prov. Sulsel	4 Laporan	Ketersediaan Dokumen informasi/rujukan /bahan masukan terhadap pemerintah prov tentang kewaspadaan dini	1 Dokumen	50,250,000.0	60,250,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
												Jumlah peserta rapat koordinasi kewaspadaan dini daerah	100 Orang	Terwujudnya kesamaan persepsi dan tindak dalam pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah	100 %				
3.00	08	01.00	01	006	Sinkronisasi Bidang Ipoleksosbudhukam Pimpinan Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Laporan Sinkronisasi bidang ipoleksosbudhukam pimpinan daerah	12 Laporan	Ketersediaan bahan rumusan sinkronisasi pengambilan kebijakan dalam rangka stabilitas multi sektor di wilayah Sulsel	1 Dokumen	1,780,000,000.0	1,800,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	01	007	Antisipasi Potensi Ancaman Bangsa			Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Laporan Antisipasi Potensi Ancaman Bangsa	12 Laporan	Tersedianya data/informasi situasi kondisi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dan konflik di lingkungan masyarakat	1 Dokumen	750,000,000.0	825,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	02		<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>					% Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat	10 %					73,165,462.0	75,877,287.22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	02	001	Pemantauan dan pengendalian Trantibmas			Kota Makassar Kota Makassar				Jumlah Laporan Pemantauan dan pengendalian Trantibmas	4 Laporan	Terwujudnya kerjasama pemantauan dan pengendalian trantibmas di Sulsel	100 %	3,165,462.0	5,877,287.22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

3.00	08	01.00	02	002	Pemantauan dan Pengendalian Unjuk Rasa			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah Laporan Pemantauan dan pengendalian unjuk rasa	12 Laporan	Tersedianya data/informasi pengendalian unjuk rasa	1 Dokumen	30,000,000.0	30,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	02	003	Pengamanan dan Penegakan Hukum dan HAM			Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Objek yang membutuhkan pengamanan	4 Objek	Tersedianya data/informasi pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum dan HAM	1 Dokumen	40,000,000.0	40,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	03		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>					<b>Cakupan Jumlah konflik antar umat beragama dan etnis</b>	5 Kasus				66,400,162.0	68,861,236.69	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>
3.00	08	01.00	03	001	Pembinaan dan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)			Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Forum Pembauran kebangsaan (FPK)	4 Laporan	Tersedianya rumusan/bahasan masukan tentang pembauran bangsa kepada pemprov.sulsel	1 Dokumen	8,750,000.0	11,211,074.69	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	03	002	Pembinaan dan Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)			Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Forum kerukunan umat beragama (FKUB)	4 Laporan	Terciptanya kehidupan umat beragama yang berlandaskan toleransi saling mengormati dan menghargai kesetaraan dalam penagamalan ajaran agama	1 Dokumen	18,750,000.0	18,750,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	03	004	Pemetaan dan monev Potensi Kerawanan terhadap Kerukunan Umat beragama dan Multi Etnis			Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Pemetaan potensi kerawanan terhadap kerukunan umat bergama dan multi etnis	4 Laporan	Tersedianya data dan informasi potensi kerawanan terhadap kerukunan umat beragama dan kepercayaan	1 Dokumen	13,900,162.0	13,900,162.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.00	08	01.00	03	005	Pemantapan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan pemantapan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah	4 Laporan	Tersedianya informasi/data pelaksanaan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di Sulsel	1 Dokumen	15,000,000.0	15,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.00	08	01.00	03	007	Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan			Kantor Bakesbangpol Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah laporan pembinaan ideologi, karakter dan wasbang	4 Laporan	Tersedianya data dan informasi pembinaan ideologi, karakter dan wasbang	1 Dokumen	10,000,000.0	10,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	04		PROGRAM KETAHANAN EKONOMI DAERAH					Cakupan Rumusan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi	20 %				140,454,560.0	143,807,194.14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	04	001	Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Daerah			Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi daerah	4 Laporan	Tersedianya Laporan Monev ketahanan ekonomi daerah	4 Laporan	130,204,560.0	133,557,194.14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	04	002	Dialog Publik Peningkatan Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi Kab/Kota			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah Peserta Dialog publik peningkatan ketahanan lembaga usaha ekonomi kab/kota	100 Peserta	Meningkatnya pemahaman lembaga usaha ekonomi dalam memelihara stabilitas ketahanan ekonomi	100 %	10,250,000.0	10,250,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	05		PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN PEMILU					% Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	78 %				79,429,628.0	82,373,630.31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
										Cakupan Partai Politik peserta Pemilu	16 Parpol							
3.00	08	01.00	05	001	Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik di Sulsel			Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah dokumen pemetaan dan evaluasi kondisi politik di Sulsel	2 Dokumen	Tersedianya data dan informasi kondisi politik di Sulsel	2 Dokumen	43,500,000.0	43,500,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	05	002	Pelaporan Bantuan Keuangan Parpol			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah Laporan Bantuan Keuangan Parpol	1 Laporan	Terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol yang baik	100 %	10,250,000.0	10,250,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	05	003	Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)			Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			jumlah pertemuan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia	4 Pertemuan	Meningkatnya angka indeks demokrasi Indonesia	71.29	5,179,628.0	8,123,630.31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

3.00	08	01.00	05	004	Pendidikan Politik Masyarakat			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah Peserta Pendidikan Politik Masyarakat	100 Peserta	Meningkatnya pemahaman politik masyarakat	100 %	10,250,000.0	10,250,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	05	005	Pemberdayaan Ormas			Kota Makassar Kota Makassar			Jumlah usulan Surat Keterangan Terdaftar yang dikelola	4 Dokumen	Tersedianya data dan informasi Ormas yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar	45 SKT	10,250,000.0	10,250,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
<b>3.00</b>	<b>08</b>	<b>01.00</b>	<b>06</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA</b>					<b>% Tingkat keikutsertaan aparat dan masyarakat bela negara</b>	<b>20 %</b>			<b>221,023,692.0</b>	<b>225,509,348.39</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>		
3.00	08	01.00	06	001	Gerakan Bela Negara			Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Peserta Gerakan Bela Negara	500 Peserta	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran bela negara	100 %	221,023,692.0	225,509,348.39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
<b>3.00</b>	<b>08</b>	<b>01.00</b>	<b>50</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>3,359,211,789.73</b>	<b>3,483,718,576.29</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>		
3.00	08	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	1 Jenis	18,708,581.73	19,878,576.29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	7 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	7 Unit	13,000,000.0	13,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
											Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	19 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	19 Unit				
3.00	08	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	14 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	486,745,208.0	520,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah ATK yang tersedia	150 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	855,000,000.0	903,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	50 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	24,918,000.0	27,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

3.00	08	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar				Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	5 Jenis	Ketersediaan Makanan dan Minuman	100 %	1,330,840,000.0	1,330,840,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran			Kota Makassar Kota Makassar				Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	1 Pameran	Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan	100 %	80,000,000.0	90,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Provinsi, Kab/Kota diluar Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah perjalanan dinas	145 Kali	Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan	100 Orang	550,000,000.0	580,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
<b>3.00</b>	<b>08</b>	<b>01.00</b>	<b>51</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>							<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>1,052,193,818.0</b>	<b>1,088,968,773.80</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	
3.00	08	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama			Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar				Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	100,000,000.0	120,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas			Kota Makassar Kota Makassar				Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	24 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	676,443,818.0	686,218,773.80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kota Makassar Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	10 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	106,750,000.0	106,750,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor			Kantor Bakesbangpol Prov. Sulsel Kota Makassar				Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	82 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	169,000,000.0	176,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
<b>3.00</b>	<b>08</b>	<b>01.00</b>	<b>52</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>							<b>% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu</b>	<b>100 %</b>			<b>153,666,595.0</b>	<b>156,396,994.67</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	
3.00	08	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah			Kota Makassar Kota Makassar				Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	75 Orang	Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Laporan	11,500,000.0	11,500,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kantor Bakesbangpol Prov. Sulsel Kota Makassar				Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	35 Dokumen	Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	35 Dokumen	100,166,595.0	101,396,994.67	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

3.00	08	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kantor Bakesbangpol Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	16,000,000.0	16,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Kantor Bakesbangpol Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	13,000,000.0	14,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Kantor Bakesbangpol Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %	13,000,000.0	13,500,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	53		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					% ASN berkinerja sangat baik	100 %			268,925,553.0	278,522,443.58	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
3.00	08	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Kantor Bakesbangpol Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah Aparat OPD yang dikelola administrasi kepegawaian nya	52 Orang	Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD	100 %	10,895,553.0	10,492,443.58	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
											Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	15 Laporan	Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	100 %				
3.00	08	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kantor Bakesbangpol Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	185 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	140,030,000.0	140,030,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kantor Bakesbangpol Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	104 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	88,000,000.0	88,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Kantor Bakesbangpol Prov. Sulsel Kota Makassar			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	Meningkatnya pemahaman aparat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 Persen	30,000,000.0	40,000,000.0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3.00	08	03.00			<b>Badan Penghubung Daerah</b>										21,113,936,641.97	22,687,710,290.54		
3.00	08	03.00	07		<b>PROGRAM FASILITAS PELAYANAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>					% Pelayanan tamu daerah	100 %				1,707,771,172.0	1,791,586,377.53	Badan Penghubung Daerah	



3.00	08	03.00	07	001	Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah			Mess Penghubung (DKI Jakarta) Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah tamu yang terlayani pada Badan Penghubung Daerah	5000 Orang	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan tamu dalam rangka tugas kedinasan	1 Laporan	1,224,771,172.0	1,155,586,377.53	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	07	002	Penguatan Koordinasi Urusan Daerah pada Pemerintah Pusat			Kantor Badan Penghubung Daerah (DKI Jakarta) Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah laporan hasil koordinasi urusan daerah pada pemerintah pusat	1 Laporan	Peningkatan koordinasi urusan daerah yang baik pada pemerintah pusat	1 Lapran	70,000,000.0	223,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	07	004	Pertemuan dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Sosial dan Masyarakat asal Sulawesi Selatan se Jabodetabek			Kantor Badan Penghubung Daerah (DKI Jakarta) Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah sarana dan prasarana pertemuan yang tersedia	1 Laporan	Terjalannya hubungan antar masyarakat sulawesi selatan yang ada di Jabodetabek	100 Orang	299,500,000.0	299,500,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	07	005	Workshop Peningkatan Kapasitas dan Kecakapan Hidup bagi Staf, Karyawan Mess Pemda, serta Tenaga Guide Anjungan TMII			Kantor Badan Penghubung Daerah Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah peserta workshop	100 Orang	Peningkatan kapasitas dan kecakapan hidup bagi pegawai badan penghubung daerah prov. sulsel	100 Orang	113,500,000.0	113,500,000.0	Badan Penghubung Daerah
<b>3.00</b>	<b>08</b>	<b>03.00</b>	<b>08</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA DAERAH</b>					<b>% Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah</b>	<b>100 %</b>				<b>1,022,002,000.0</b>	<b>921,500,000.0</b>	<b>Badan Penghubung Daerah</b>
3.00	08	03.00	08	002	Penyelenggaraan Pameran Promosi Daerah			Jakarta, Surabaya, Bali Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pameran promosi daerah pada badan penghubung daerah prov sulsel	1 Pameran	Terlaksananya pameran promosi seni dan budaya daerah provinsi sulawesi selatan	100 %	334,502,000.0	134,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	08	003	Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya di Anjungan Sulawesi Selatan TMII Jakarta			Taman Mini Indonesia Indah Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah pagelaran seni dan budaya di anjungan daerah provinsi sulawesi selatan TMII	1 Kegiatan	Jumlah laporan pagelaran seni dan budaya dan promosi tari daerah provinsi sulawesi selatan	1 Laporan	300,000,000.0	400,000,000.0	Badan Penghubung Daerah

3.00	08	03.00	08	04	Penyelenggaraan Paket Promosi Budaya dan Pariwisata di Jakarta, Surabaya dan Bali			Bali Bali				Jumlah promosi budaya dan pariwisata provinsi sulawesi selatan	1 Pameran	Terlaksananya kegiatan promosi budaya dan pariwisata daerah dalam rangka mendukung dan promosi daerah	100 %	300,000,000.0	300,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	08	05	Pelestarian dan Pembinaan Tarian Bugis Makassar dan Toraja secara Berkala.			DKI Jakarta Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah kegiatan pembinaan tarian bugis makassar dan toraja secara berkala pada anjungan sulawesi selatan TMII	1 Laporan	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pembinaan tari daerah bugis makassar dan toraja pada anjungan sulawesi selatan TMII	100 %	87,500,000.0	87,500,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	50		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>							<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>			<b>9,208,118,825.97</b>	<b>10,079,159,052.01</b>	<b>Badan Penghubung Daerah</b>
3.00	08	03.00	50	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor Badan Penghubung Daerah Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	3 Jenis	956,248,412.97	956,248,412.01	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	50	02	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Badan Penghubung (DKI Jakarta) Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	26 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	26 Unit	345,000,000.0	345,000,000.0	Badan Penghubung Daerah
												Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	6 Unit	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	6 Unit			
3.00	08	03.00	50	03	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS			Kantor Badan Penghubung (DKI Jakarta) Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	92 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Non PNS	100 %	4,552,532,240.0	4,552,532,240.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	50	05	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan			DKI Jakarta Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah ATK yang tersedia	26 Jenis ATK	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100 %	267,500,000.0	337,500,000.0	Badan Penghubung Daerah
3.00	08	03.00	50	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor Badan Penghubung (DKI Jakarta) Luar Provinsi Sulawesi Selatan				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 Unit	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	35,650,000.0	35,650,000.0	Badan Penghubung Daerah



3.00	08	03.00	51	016	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Seksi Penghubung Surabaya			Surabaya Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	5 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	45,000,000.0	45,000,000.0	Badan Penghubung Daerah	
3.00	08	03.00	51	017	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Seksi Penghubung Surabaya			Surabaya Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	16,000,000.0	16,000,000.0	Badan Penghubung Daerah	
3.00	08	03.00	51	018	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Asrama Seksi Penghubung Bali			Provinsi Bali Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	1 Unit	Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik	100 %	16,500,000.0	16,500,000.0	Badan Penghubung Daerah	
3.00	08	03.00	51	020	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas Seksi Penghubung Bali			Provinsi Bali Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	16 Unit	Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	93,000,000.0	93,000,000.0	Badan Penghubung Daerah	
3.00	08	03.00	51	021	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Seksi Penghubung Bali			Provinsi Bali Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	6 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	100 %	40,000,000.0	40,000,000.0	Badan Penghubung Daerah	
3.00	08	03.00	51	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Seksi Penghubung Bali			Provinsi Bali Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	6 Unit	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	20,000,000.0	10,000,000.0	Badan Penghubung Daerah	
<b>3.00</b>	<b>08</b>	<b>03.00</b>	<b>52</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA</b>					<b>% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu</b>	<b>100 %</b>				<b>130,022,700.0</b>	<b>130,000,000.0</b>	<b>Badan Penghubung Daerah</b>	
3.00	08	03.00	52	02	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			Kantor Badan Penghubung (DKI Jakarta) Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	2 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan	2 Dokumen	75,000,000.0	75,000,000.0	Badan Penghubung Daerah	
											Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan	1 Dokumen				
											Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	3 Dokumen	Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan	3 Dokumen				

3.00	08	03.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan			Kantor Badan Penghubung (DKI Jakarta) Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	2 Laporan	Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD	100 %	45,000,000.0	45,000,000.0	Badan Penghubung Daerah	
3.00	08	03.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Kantor Badan Penghubung (DKI Jakarta) Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100 %	7,000,000.0	7,000,000.0	Badan Penghubung Daerah	
3.00	08	03.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Kantor Badan Penghubung (DKI Jakarta) Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Laporan	Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan	100 %	3,022,700.0	3,000,000.0	Badan Penghubung Daerah	
3.00	08	03.00	53		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					<b>% ASN berkinerja sangat baik</b>	<b>100 %</b>				<b>67,000,000.0</b>	<b>65,800,000.0</b>	<b>Badan Penghubung Daerah</b>	
3.00	08	03.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya			Kantor Badan Penghubung (DKI Jakarta) Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	54 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan	100 %	35,000,000.0	35,000,000.0	Badan Penghubung Daerah	
3.00	08	03.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			Kantor Badan Penghubung (DKI Jakarta) Luar Provinsi Sulawesi Selatan			Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	35 Pasang	Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan	100 %	32,000,000.0	30,800,000.0	Badan Penghubung Daerah	
<b>JUMLAH</b>															<b>3,287,441,659,134.0</b>	<b>3,333,910,532,233.71</b>		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

#### 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

##### 7.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada table berikut ini:

**Tabel 7.1.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023**

No.	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2017)	Target 2019	Target 2020
1	2	3	4	5
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	B
2	Nilai SAKIP	B	B	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	IKM = D	D	C
4	Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Pengadaan Air (%)	Tahun 2016: 6,99 dan Tahun 2017:8,56	7.6	7.8
5	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	51	56	64
6	PDRB Perkapita (Juta Rp)	47,93	57,64	62,97
7	Angka Kemiskinan (%)	9,48	8.78	8.46
8	PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan Bone) (Milyar RP)	29,202,608.04	33,110,348.45	35,124,356.44
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,61	5.17	4.97
10	Indeks Gini	0,429	0.385	0.376
11	Indeks Williamson	0,610	0,580	0,570
12	IPM	70,34	71,58	72,18
13	Indeks Pendidikan	63,39	65,19	66,10
14	IPG	92,84	93,18	93,40

No.	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2017)	Target 2019	Target 2020
1	2	3	4	5
15	IDG	72,48	74,01	75,54
16	Indeks Kesehatan	76,68	77,03	77,17
17	Pertumbuhan PDRB (%)	7,23	7,2-7,6	7,4-7,8
18	Produktifitas Total Daerah(Rp/Angkatan Kerja)	75.782.133	78.777.309	81.942.489
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,24	73,33	73,36
20	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO <sub>2</sub> Eq)	0,79 Juta ton CO <sub>2</sub> eq (2017)	1,1	1,4

### 7.2.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2.  
Target Indikator Kinerja Tahun 2020

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				
	<b>FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI</b>				
1	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian</b>				
1	1	Pertumbuhan PDRB	%	7,23	7,4-7,8
1	2	Laju Inflasi	%	4,44	3,0-1,0
1	3	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	%	6,01	8,00
1	4	PDRB Perkapita	Juta Rp	47,93	62,97
1	5	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,89	23,77
1	6	Indeks Gini		0,429	0,376
1	7	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	%	50,93	51,49
1	8	Indeks Ketimpangan Williamson		0,610	0,570
1	9	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	90,62	91,00
1	10	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	%	22,89	23,77



No.		ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	11	Kontribusi Sektor Pertanian (Tabama/Tanaman Bahan Makanan) Terhadap PDRB	%	7,52		7,75
1	12	PDRB Pertanian	Trilyun Rp	95,50		135,36
1	13	Kontribusi Sektor Perkebunan (TanamanKeras) Terhadap PDRB	%	4,26		4,42
1	14	PDRB Perkebunan	Trilyun Rp	17,84		23,40
1	15	PDRB Peternakan	Trilyun Rupiah	4,6		6,0
1	16	Kontribusi sub sektor Peternkan terhadap PDRB	%	1,09		1,21
1	17	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	%	0,07		0,08
1	18	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	5,36		6,26
1	19	Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	8,33		9,48
1	20	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	13,94		14,50
1	21	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	13,71		13,89

No.		ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	22	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industry	%	14,51		15,0
1	23	Pertumbuhan PDRB Industri	%	5,03		7,65
1	24	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	40,62		40,72
1	25	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	92,6		94,4
1	26	Penguatan Cadangan Pangan	%	72,5		80
1	27	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	39,4		62,99
2		<b>FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>				
2	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70,34		72,18
2	2	Angka Melek Huruf (AMH)		90,44		91,26
2	3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah		7,95		8,29
2	4	Angka Harapan lama Sekolah		13,28		13,86
2	5	Angka Usia Harapan Hidup		69,84		70,16
2	6	Angka Partisipasi Angkatan Kerja		60,98		62,42
2	7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	60,98		62,42
2	8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,61		5,05
2	9	Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	%	94,39		94,62

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
2	10		Persentase Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk yang Bekerja	%	37,26		38,63
2	11		Prevalensi Balita Gizi Buruk (Balita Kurus/Wasting)	%	4,90		8,00
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
<b>URUSAN WAJIB</b>							
<b>TERKAIT PELAYANAN DASAR</b>							
<b>PENDIDIKAN</b>							
1	1	1	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	%	81,39		91,42
1	1	2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	%	70,54		84,5
1	1	3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	71,8		85,98
1	1	4	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	1,18		1,07
1	1	5	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99,95		100
1	1	6	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	94,65		97,55
1	1	7	Rasio Guru/Murid per Kelas Pendidikan Menengah		1:12		1:17

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020	
1	1	8	Kondisi Bangunan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi baik	%	47,32		56,08	
1	1	9	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah		0.170833		0.1888889	
1	1	10	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	97,97		98,29	
1	1	11	Penduduk yang Berusia>15 Tahun Melek Huruf (TidakButaAksara)	%	94,06		94.3	
1	1	12	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	91,8		97,96	
1	2		<b>KESEHATAN</b>					
1	2	1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Kasus	1.059		1.055	
1	2	2	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	Kasus	1.151		1.147	
1	2	3	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	Kasus	818		814	
1	2	4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Kasus	115		113	
1	2	5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Per 1000 Balita	11,30		13,95	

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	2	6	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	Per 100.000 Balita	20,37		
1	2	7	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	1,03		1,23
1	2	8	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	14,08		19
1	2	9	Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk	Per 100.000 Penduduk	37,70		37,72
1	2	10	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	79,95		83
1	2	11	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	95,31		96,5
1	2	12	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	%	96,45		96,5
1	2	13	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100		100

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	2	14	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	102		95
1	2	15	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk	Per 100.000 penduduk	1,96		2
1	2	16	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	19,04		30
1	2	17	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	46		100
1	2	18	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	Per 100.000 penduduk	197		207
1	2	19	Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis	Per 100.000 penduduk	3		3
1	2	20	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkolosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	%	46		75

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	2	2 1	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS	%	89		90
1	2	2 2	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100		100
1	2	2 3	Penderita Diare yang ditangani	Orang	169.972		206.55
1	2	2 4	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 penduduk	0,15		< 1
1	2	2 5	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi	%	0,33		< 0,5
1	2	2 6	Proporsi Jumlah Penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan Komprehensif	%	83,4		0
1	2	2 7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100		100
1	2	2 8	Cakupan Kunjungan Bayi	%	98,54		98
1	2	2 9	Cakupan Puskesmas	%	147		
1	2	3 0	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	89.5		92,5

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020	
1	2	3 1	Cakupan Pelayanan Nifas	%	92,63		93,5	
1	2	3 2	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	%	60,28		62	
1	2	3 3	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	71,74		72,5	
1	2	3 4	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Keluarga Miskin	%	100		100	
1	2	3 5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100		100	
1	2	3 6	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100		100	
1	2	3 7	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100		100	
1	3		<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					
1	3	1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	34,41		56,84	
1	3	2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Km/Km	0,00017		0,00022	



No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	3	3	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 Meter)	%	77,00		93,50
1	3	4	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	43,40		45,36
1	3	5	Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar	%	9,85		9,21
1	3	6	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	86.9		88.65
1	3	7	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	35		37
1	3	8	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	32,55		45
1	3	9	Rasio Jaringan Irigasi	M/Ha	9,184		14
1	3	10	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	87,38		
1	3	11	Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum	%	87,45		87,95
1	3	12	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	%	83.34		85.02

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	3	1 3	Proporsi Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	74,76		75,65
1	3	1 4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	87,45		87,80
1	3	1 5	Persentase Luas Areal Kawasan Kumuh	%	0,067		0,055
1	3	1 6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	%	84,41		84,95
1	3	1 7	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	%	75.41		76.93
1	3	1 8	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Unit/ Jiwa	2,09		2,11
1	3	1 9	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	8,52		11,20
1	3	2 0	Ketaatan terhadap RTRW	%	65		67
1	3	2 1	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	%	25		30

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	3	2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	48		50
1	3	2	Rasio luas Kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	%	46		47
1	4		<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
1	4	1	Rasio Rumah Layak Huni		0,194		0,197
1	4	2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0.048		<b>0.039</b>
1	4	3	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	%	0.048		<b>0.039</b>
1	4	4	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani	%	35,49		47,20
1	5		<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				
1	5	1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	<b>34.54</b>		<b>27.977</b>
1	5	2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	<b>20</b>		<b>20</b>
1	5	3	Persentase Penegakan PERDA	%	<b>20</b>		<b>20</b>
1	6		<b>SOSIAL</b>				

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	6	1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	31,75		35
1	6	2	Persentase PMKS yang tertangani	%	35		35
1	6	3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100		100
1	6	4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100		100
1	6	5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100		100
1	6	6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	45.27		<b>49.91</b>
1	6	7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	82,15		75
1	6	8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	Lanjut Usia : 5,58%		10

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	6	9			Disabilitas : 7,43%		
1	6	10	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Sosial)	%	82,32		75
1	6	11	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (BPBD)	%	61,9		70
<b>TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR</b>							
1	7	<b>TENAGA KERJA</b>					
1	7	1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	22,30		20,98
1	7	2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100		98,0
1	7	3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	51,20		3,70
1	7	4	Keselamatan dan perlindungan	%	100		70,0
1	7	5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100		100
1	7	6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	25,48		39,0

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020	
1	7	7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	5,0		9,0	
1	7	8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	-		70	
1	7	9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	66,67		71,0	
1	8	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
1	8	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49,66		51,85	
1	8	2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	21		22	
1	8	3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	71,6		74	
1	8	4	Rasio KDRT	%	0,04		0,06	
1	8	5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0,04		0,06	
1	8	6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	43,76		45,96	

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	8	7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100		100
1	8	8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100		100
1	8	9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	49		52
1	8	10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100		100

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020	
1	8	11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	54		100	
1	8	12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	36		50	
1	8	13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	29		35	
1	8	14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	100,1		102	
1	8	15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	104,1		105,86	
1	8	16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA					
1	8	17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	103,1		106,3	
1	8	18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		100,4		100,7	
1	9		<b>PANGAN</b>					
1	9	1	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	384		411,41	



No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	9	2	Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	%	38,89		57,62
1	9	3	Ketersediaan Pangan Utama (Kedelai)	%	20,88		35,24
1	9	4	Ketersediaan Energi Perkapita	%	5.769		5.944
1	9	5	Ketersediaan Protein Perkapita	%	164,38		169,36
1	9	6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100		100
1	10		<b>PERTANAHAN</b>				
1	10	1	Persentase luas lahan bersertifikat	%			
1	10	2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100		100
1	10	3	Penyelesaian izin lokasi	%	100		100
1	11		<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>				
1	11	1	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada		Ada
1	11	2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada		Ada
1	11	3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada		Ada

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	11	4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada		Ada
1	11	5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada		Ada
1	11	6	Peningkatan Indeks Kualitas Air		55,94		56,3
1	11	7	Peningkatan Indeks Kualitas Udara		88,66		86,3
1	11	8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan		55,1		56,7
1	11	9	Laporan Inventarisasi GRK	Ada / Tidak Ada	Ada		Ada
1	11	10	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada		Ada
1	11	11	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Ton	667.9		2.000.000
1	11	12	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	34-35		77

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020	
1	11	13	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak Ada	Ada		8	
1	11	14	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Kasus	9		14	
1	11	15	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada		Ada	
1	11	16	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	%	73%		74%	
1	11	17	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					
1	11	18	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		0,82		0,97	
1	11	19	Rasio bayi berakte kelahiran		0,86		0,89	
1	11	20	Rasio pasangan berakte menikah		0,11		0,20	

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020	
1	11	2 1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada		Ada	
1	11	2 2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah		Sudah	
1	11	2 3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	79,92		97	
1	11	2 4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	85,03		89,0	
1	12		<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					
1	12	1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	%	31,47		38,08	
1	12	2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	20		22	
1	12	3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	39		41	
1	12	4	Persentase LPM Berprestasi	%	24,33		25,31	
1	12	5	Persentase PKK aktif	%	97,71		98,20	
1	12	6	Persentase Posyandu aktif	%	99,53		99,75	

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	12	7	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	0		60
1	12	8	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%	0		60
1	13		<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
1	13	1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		1,36		1,14
1	13	2	Total Fertility Rate (TFR)		2,4		2,30
1	13	3	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2,4		2,30
1	13	4	Rasio Akseptor KB		66,3		66,74
1	13	5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49		66,3		66,74
1	13	6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		26		20
1	13	7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	50.7		<b>45.76</b>
1	13	8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,14		13,80

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	13	9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22,05		25,35
1	13	10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	10,99		14,31
1	13	11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	60,0		63,6
1	13	12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	52,0		54,4
1	13	13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	44,0		49,0
1	13	14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	55		57
1	13	15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	15		19
1	13	16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100,26		100

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	13	17	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	65,71		67,21
1	13	18	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0,02		0,01
1	13	19	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100		100
1	13	20	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	71		75,32
1	13	21	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,03		2,00
<b>PERHUBUNGAN</b>							
1	14		Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jiwa	13.322.856		16.782.962
1	14	1	Rasio ijin trayek		0,20		0,50
1	14	2	Persentase layanan angkutan darat	%	97		97,5

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	14	3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal BIS	Unit	281		325
1	14	4	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	135.665		909.039
1	14	5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		108		108
1	14	6	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum		14.239.542		17.229.846
1	15	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					
1	15	1	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	42.04		42.461451
1	15	2	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	26.89		27.159572
1	16	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>					
1	16	1	Persentase koperasi aktif	%	59,08		75,00
1	16	2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	94,29		97,00
1	17	<b>PENANAMAN MODAL</b>					
1	17	1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek	689		821
1	17	2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun (Rp)	11,47		13,87
1	17	3	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/ Proyek	16		13



No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	17	4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	-41		15
1	18		<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				
1	18	1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	8,31		9,81
1	18	2	Persentase wirausaha muda	%	10,89		18,31
1	18	3	Cakupan pembinaan olahraga	%	32		34
1	18	4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	12,13		17,36
1	18	5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	7,54		8,90
1	18	6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	81		105
1	18	7	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	16		17
1	19		<b>STATISTIK</b>				
1	19	1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak Ada	Ada		Ada
1	19	2	Buku "Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka"	Ada/ Tidak Ada	Ada		Ada
1	19	3	Buku PDRB	Ada/ Tidak Ada	Ada		Ada
1	20		<b>PERSANDIAN</b>				

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	20	1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100		100
1	21		<b>KEBUDAYAAN</b>				
1	21	1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	22		85
1	21	2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	3		5
1	21	3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	6		23
1	21	4	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Buah	1		3
1	22		<b>PERPUSTAKAAN</b>				
1	22	1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	621,306		110,000
1	22	2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp.	571002		310,000
1	22	3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Unit/Jiwa	0.0043		0.00000034
1	22	4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	111,097		56,000
1	22	5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	380,579		251,000

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
1	22	6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	2,300		1,100
1	23		<b>KEARSIPAN</b>				
1	23	1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	62		40
1	23	2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	3,700		200
2			<b>PELAYANAN URUSAN PILIHAN</b>				
2	1		<b>PARIWISATA</b>				
2	1	1	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	Wisnu	8.367.748		7.750.000
2	1	2	Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	Wisman	255.747		151.763
2	1	3	Lama kunjungan Wisata	Hari	5		5
2	1	4	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	451.750.000		650.000.000
2	2		<b>PERTANIAN</b>				
2	2	1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	22.89		24.76
2	2	2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	6.01		6.75
2	2	3	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	4,26		4,69

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
2	2	4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (Perkebunan)	%	87,71		91,17
2	2	5	Cakupan bina kelompok tani (Perkebunan)	%	83,77		87,09
2	2	6	Produksi sub sektor Peternakan (Daging)	Kg	125,673,776		139,478,730
2	2	7	Produksi sub sektor Peternakan (Telur)	Kg	140.439.879		141,855,523
2	2	8	Produksi sub sektor Peternakan (Susu)	Kg	3.052.800		3.370.049
2	2	9	Konsumsi Hasil Peternakan (Daging)	Kg/ Kapita/ Tahun	4,86		5,36
2	2	10	Konsumsi Hasil Peternakan (Telur)	Kg/ Kapita/ Tahun	5,65		6,23
2	2	11	Konsumsi Hasil Peternakan (Susu)	Kg/ Kapita/ Tahun	2,56		2,66
2	2	12	Nilai PDRB Sub Sektor Peternakan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Juta Rupiah	4.198.428		5.224.541
2	2	13	Pertumbuhan PDRB	(%)	6,09		6,97

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
2	2	1 4	Sumbangan PDRB Sektor Peternakan	(%)	1,09		1,21
2	2	1 5	Cakupan Bina Kelompok Peternak	Kelompok	1.159		1.238
2	2	1 6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Asal Hewan	Sampel	450		200
2	2	1 7	Nilai Tukar Peternak (NTP.Pt)		108,46		110,11
2	3		<b>KEHUTANAN</b>				
2	3	1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	48,48		49,19
2	3	2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,00092		0,01851
2	3	3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Luas Kawasan Lindung/Total Kawasan Hutan	76,45		76,45
2	4		<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				
2	4	1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	95,54		99
2	4	2	Rasio ketersediaan daya listrik		87,55		89,21

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
2	4	3	Persentase pertambangan tanpa ijin	%	14,22		25
2	4	4	Cadangan Sumber Daya	Ton	357.500.000		4.000.000
2	4	5	Luas Wilayah Pemetaan	Ha	6		8,5
2	5		<b>PERDAGANGAN</b>				
2	5	1	Ekspor Bersih Perdagangan	Juta US\$	57.950.717		70.120.367
2	5	2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	0,74		0,98
2	6		<b>PERINDUSTRIAN</b>				
2	6	1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	2,38		2,8
2	7		<b>TRANSMIGRASI</b>				
2	7	1	Persentase transmigran swakarsa	%	75,86		100
2	8		<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
2	8	1	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	20,02		21,82
2	8	2	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	48,37		50,60
2	8	3	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0,22		0,28

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
2	8	4	Kontribusi PDRB Sektor Perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan	%	8,3		8,8
2	8	5	Nilai PDRB Perikanan	Trilyun Rp	34,90		37,04
2	8	6	Produksi Kelautan dan Perikanan	%	4.261.427		5.614.824,50
2	8	7	Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan	Trilyun Rp	15,59		20,75
2	8	8	Nilai hasil pengolahan produksi perikanan	Trilyun Rp	6,24		8,30
2	8	9	Jumlah Produksi PerikananTangkap	Ton	357.77		370.649
2	8	10	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Trilyun Rp	6,4		8,52
2	8	11	Cakupan bina kelompok nelayan	%	24,94		33,2
2	8	12	Nilai Tukar Nelayan	%	107,57		107,89
2	8	13	Jumlah Produksi PerikananBudidaya	Ton	3.901.657		5.301.486,20
2	8	14	Nilai Produksi Perikanan Budidaya	Trilyun Rp	9,19		12,23
2	8	15	Nilai Tukar Pembudidaya	%	97,96		104,93

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
2	8	16	Cakupan bina UPR dan Panti Benih	%	-		18,84
2	8	17	Cakupan Pelabuhan perikanan yang beroperasi	%	-		65,22
2	8	18	Jumlah produksi hasil tangkapan yang dibongkardi Pelabuhan Perikanan	Ton	-		18.076
2	8	19	Nilai produksi hasil tangkapan yang dibongkardi Pelabuhan Perikanan	Milyar Rupiah	-		243,8
2	8	20	Jumlah kapal yang didaratkan dan bongkar muat di Pelabuhan Perikanan	Unit	-		16.029
2	8	21	Jumlah Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi	Ton	242,150.00		322.301,7
2	8	22	Konsumsi Ikan	Kg/Kap	52,5		54,1
2	8	23	Volume Ekspor produk Kelompok Perikanan	Ton	123.435,9		199.583,45
2	8	24	Nilai Ekspor Produk Kelompok Perikanan	US\$	210.317,60		427.646,67
2	8	2		Juta			



No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
		5					
2	8	2 6	Nilai Tukar Pengolah	%	102		105,09
2	8	2 7	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan tutorial	%	0		20
2	8	2 8	Cakupan Luas Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Ha	101.427		114.06
2	8	2 9	Cakupan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali	%	0		20
2	8	3 0	Jumlah produksi garam rakyat	Ton	39.259,90		52.254,9
2	8	3 1	Cakupan Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	%	27		60
2	8	3 2	Berkurangnya tindakan IUU fishing	%	13,33		8,03
2	8	3 3	Cakupan kasus illegal fishing yang dapat diproses melalui jalur hukum	%	16,67		17,69

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
2	8	3 4	Cakupan bina kelompok masyarakat terhadap pengawasan	%	62,65		75
2	8	3 5	Cakupan pengawasan dan pengendalian usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan	%	20		20
3			<b>PENUNJANG URUSAN</b>				
3	1		<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>				
3	1	1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada		Ada
3	1	2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada		Ada
3	1	3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada		Ada
3	1	4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada		Ada
3	1	5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100		100

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020	
3	1	6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100		100	
3	1	7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100		100	
3	2	<b>KEUANGAN</b>						
3	2	1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini	WTP		WTP	
3	2	2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,78		2,0	
3	2	3	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	42,48		20	
3	2	4	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10,84		10	
3	2	5	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	Belanja langsung : 34,24 Belanja Tidak Langsung : 65,64		Belanja langsung : 30,0 Belanja Tidak Langsung : 70,0	
3	2	6	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	16,86		16,0	

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
3	2	7	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu (Perda No. 11 Tahun 2016, 30 Desember 2016)		Tepat Waktu
3	3		<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				
3	3	1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP/	15		20
3	3	2		Tahun			
3	3	3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,1		2,0
3	3	4	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	2,9		5,8
3	3	5	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	60		60
3	3	6	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	8.877		8.795
3	3	7	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	17.485		15.893
3	4		<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020	
3	4	1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100		100	
3	4	2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	24		100	
3	4	3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	49		20	
3	4	4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	22		60	
3	5	<b>PENGAWASAN</b>						
3	5	1	Persentase tindak lanjut temuan	%	67,91		75	
3	5	2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,08		0,10	
3	5	3	Jumlah temuan BPK	Kasus	16		15	
3	6	<b>SEKRETARIAT DEWAN</b>						
3	6	1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/ Tidak Ada	Ada		Ada	

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
3	6	2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak Ada	Ada		Ada
3	6	3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada		Ada
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>							
<b>FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI</b>							
4	1		Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Juta Rp	25,94		32,15
4	2		Pengeluaran Perkapita	Ribu Rp	10.498		11,159
4	3		Nilai Tukar Petani	Poin	101,71		104,70
4	4		Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	14,35		17,73
4	5		Persentase Desa Berstatus Swasembada	%	266,62		277,39

No.			ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Kondisi Kinerja pada Tahun 2018	Target 2020
4	6		Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)		33,08		51,32

## 7.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 7.3.**  
**Penetapan Target Indikator SPM**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023**

No.	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	Capaian Tahun 2018	Target tahun 2020
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>		
<b>1.1</b>	<b>Pendidikan Menengah</b>		
	Persentase jumlah warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah		100
<b>1.2</b>	<b>Pendidikan Khusus</b>		
	Persentase jumlah warga negara usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus		100
<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>		
<b>2.1</b>	<b>Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi</b>		
	Persentase penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan		100



No.	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	Capaian Tahun 2018	Target tahun 2020
	kesehatan		
2.2	<b>Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi</b>		
	Persentase penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100
3	<b>PEKERJAAN UMUM</b>		
3.1	<b>Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota</b>		
	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota		100
3.2	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota</b>		
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota		100
4	<b>PERUMAHAN RAKYAT</b>		
4.1	<b>Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi</b>		
	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		100
4.2	<b>Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi</b>		
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		100
5	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>		
5.1	<b>Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi</b>		
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan		100

No.	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	Capaian Tahun 2018	Target tahun 2020
	perkada di Provinsi		
<b>6</b>	<b>SOSIAL</b>		
<b>6.1</b>	<b>Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti</b>		
	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti		100
<b>6.2</b>	<b>Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti</b>		
	Persentase Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti		100
<b>6.3</b>	<b>Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti</b>		
	Persentase Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti		100
<b>6.4</b>	<b>Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti</b>		
	Persentase Jumlah Warga Negara/gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti		100
<b>6.5</b>	<b>Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana provinsi</b>		
	Persentase Warga Negara Korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi		100

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk Tahun 2020 yang merupakan penjabaran teknis dari pelaksanaan Tahun Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan serta kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat tahunan maka RKPD disusun berisi Program Pembangunan Daerah beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program prioritas dan kegiatan prioritas Tahun 2020 merupakan hasil dari pengejawantahan dari sasaran Misi RPJMD Tahun 2020 yang dipengaruhi oleh Isu Strategis Tahun 2020.

Disamping itu, penyusunan Program dan Kegiatan dalam Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, oleh karena itu pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 ini berorientasi pada proses dengan pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, Partisipatif, Politis dan Atas bawah dan bawah atas. Serta memperhatikan substansi pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan yaitu :

1. Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antar perangkat daerah/biro dan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor.
2. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai kebermanfaatan tinggi bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

3. Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat.

Pada akhirnya, komitmen seluruh stakeholder dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Provinsi mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama mewujudkan kemantapan pembangunan Sulawesi Selatan secara menyeluruh.

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr**

## **Informasi Lebih Lanjut**

---

### **PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Jl. Jend. Uripsumoharjo 269 Makassar Telp (0411) 4453070 - 445305 - 320754**

**Fax (0411) 4453965 - 445445**

**Website : <http://sulsel.go.id/>**

---

### **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Jl. Jend. Uripsumoharjo 269 Makassar Telp (0411) 453486**

**Fax (0411) 453869**

**Email : [Bappedass.makro@yahoo.co.id](mailto:Bappedass.makro@yahoo.co.id)**

---

---